



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, telah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun yang dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Semarang untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Semarang untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup.

- (2) Penjabaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

PENJABARAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

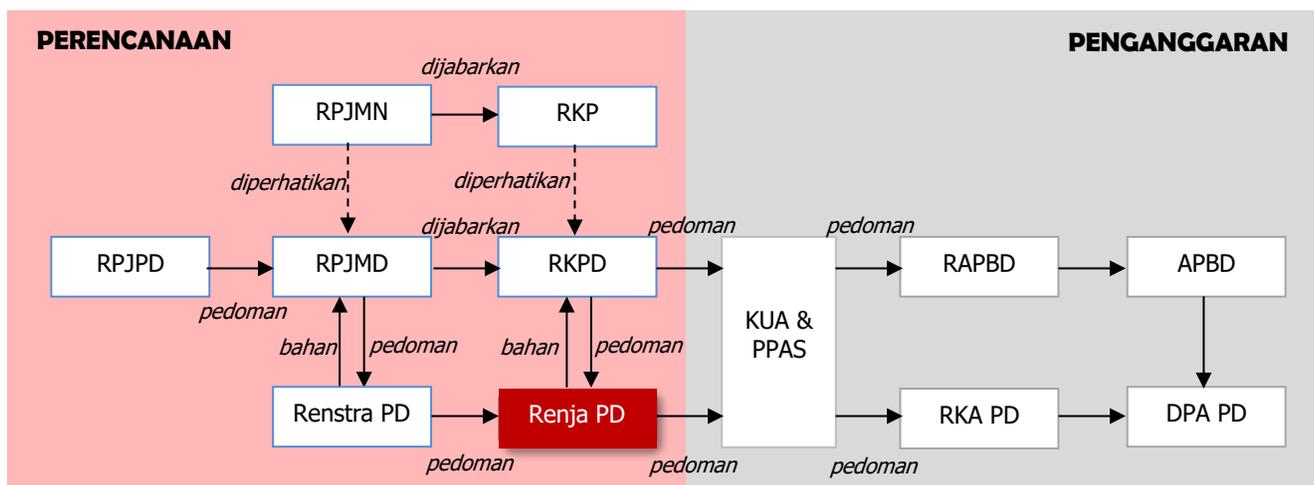
1. DINAS PENDIDIKAN

**BAB I
 PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023** dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
 - p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

- Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang;
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan tahun 2022 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN WAJIB PENDIDIKAN										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50.0%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50.0%	100%	50%	50.0%	50.0%
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50.0%	100%	50%	50.0%	50.0%
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD 100 %	100%	100%	100%	50%	50.0%	100%	50%	50.0%	50.0%
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	102 dok	20 Dokumen	20 Dokumen	6 Dokumen	30%	17 Dokumen	8 Dokumen	47.06%	7.84%
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA-SKPD	6 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0	0
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD	6 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0	0
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	6 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0	0
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	6 dok	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan Capaian	72 dok	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	12 Dokumen	6 Dokumen	50.00%	8.33%
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	18 dok	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	16.67%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100 %	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	50%	100%	43%	43%	43%
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	16.67%
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semester	12 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	6 dokumen	42.86%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	8.33%
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0	0
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	12 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	16.67%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100%	100%	100%	50%	50%	100%	30%	30%	30%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	50%	50%	100%	40%	40%	40%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	30%	30%	30%
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.300 Orang	100%	100%	50%	50%	12.500 Orang	4.750 Orang	38.00%	7.16%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	2.600 Orang	100%	100%	50%	50%	400 Orang	124 Orang	31.00%	4.77%
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	0	0	100%	0	0	0
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terbangun	1 unit	0	0	0	0	1 Unit	0	0	0
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	25%	25%	100%	0	0	0
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	0	0	0	0	100%	0	0	0
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100 %	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Urusan Pemerintahan Daerah										
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	100%	100%	50%	50%	1 Unit	0	0	0
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	124 unit	100%	100%	50%	50%	124 Unit	61 Unit	49.19%	49.19%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	15 Unit	100%	100%	50%	50%	3 Unit	0	0	0
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	30%	30%	30%
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMP/MTs	115.65%	113.67%	100%	0.00%	0.00%	115.61%	113.67%	98.32%	98.29%
		APK PAUD 5-6 tahun	86.39%	83.01%	82%	0.00%	0.00%	85.81%	85.51%	99.65%	98.98%
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	14 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	0	0	6 Lembaga	5 Lembaga	83.33%	35.71%
		APK SD/MI	111.75%	109.88%	100%	0.00%	0.00%	111.69%	109.88%	98.38%	98.33%
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	5 Unit	1 Paket	2 Paket	0	0	2 Unit	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	128 ruang	4 Paket	20 Paket	0	0	30 Ruang	4 Ruang	13.33%	3.13%
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	10 Ruang	-	-	-	-	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	17 Unit	2 Paket	3 Paket	0	0	3 Unit	1 Unit	33.33%	5.88%
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	14 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	2 Unit	0	0	0
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	24 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	4 Unit	3 Unit	75.00%	12.50%
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	253 Ruang	54 Paket	86 Paket	0	0	35 Ruang	20 Ruang	57.14%	7.91%
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	24 Ruang	4 Paket	4 Paket	0	0	4 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	29 Ruang	6 Paket	6 Paket	0	0	4 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	13 Ruang	2 Paket	2 Paket	0	0	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43 Unit	31 Paket	31 Paket	0	0	8 Unit	0	0	0
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	6 paket	6 paket	6 paket	0	0	-	-	-	-
			69 Unit	-	-	-	-	14 Unit	14 Unit	100%	20.29%
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	326 Paket	76 paket	326 paket	0	0				
			186 Unit	-	-	-	-	42 Unit	0	0	0
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	27.376 Siswa	-	-	-	-	4.831 Set	0	0	0
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya operasional biaya personil peserta didik sekolah dasar	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	50.518 siswa	-	-	-	-	4.800 Siswa	4.538 Siswa	94.54%	8.98%
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	28.310 siswa	-	-	-	-	6.700 Siswa	6.534 Siswa	97.52%	23.08%
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	326 paket	-	326 paket	-	-	-	-	-	-
			1.636 set	-	-	-	-	326 Set	0	0	0
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	143.325 siswa	-	-	-	-	49.714 Siswa	30.052 Siswa	60.45%	20.97%
		Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	248.570 siswa	-	-	-	-	28.665 Siswa	0	0	0
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Dokumen Evaluasi dan Kajian	108 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen	16 Dokumen	160%	14.81%
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	42 lomba	42 lomba	42 lomba	7 lomba	16.67%	42 Lomba	33 Lomba	78.57%	78.57%
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3.144 Orang	2.806 Orang	3.144 Orang	-	0	-	-	-	-
			3 kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66.67%	66.67%
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Monitoring dan Akreditasi sekolah	155 Satpen	-	-	-	-	-	-	-	-
			100%	-	-	-	-	-	-	-	-
			2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
			88.951 Siswa	-	-	-	-	88951 Siswa	31.650 Siswa	35.58%	35.58%
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
			3 kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33.33%	33.33%
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3 Unit	-	-	-	-	1 Unit	0	0	0
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	93 Ruang	4 Paket	20 Paket	0	0	12 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8 Ruang	-	-	-	-	1 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	8 Ruang	-	-	-	-	1 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6 Ruang	0	4 Paket	0	0	1 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	8 Ruang	0	3 Paket	0	0	1 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3 Ruang	-	-	-	-	1 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7 Ruang	0	5 Paket	0	0	3 Ruang	0	0	0
		Jumlah pengadaan sarpras	25 Unit	-	-	-	-	5 Unit	0	0	0
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Sekolah	30 Ruang	-	-	-	-	6 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	329 Ruang	9 Paket	12 Paket	3 Paket	25%	55 Ruang	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah	60 Ruang	-	-	-	-	12 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	15 Ruang	-	-	-	-	3 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	11 Ruang	1 Paket	1 Paket	0	0	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium	13 Ruang	3 Paket	3 Paket	0	0	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Serba Guna/Aula	10 Ruang	-	-	-	-	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Kantin Sekolah	10 Ruang	-	-	-	-	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Ruang	15 Paket	15 Paket	7 Paket	46.67%	2 Ruang	0	0	0
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	6 Unit	-	-	-	-	1 Sekolah	0	0	0
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	6 Sekolah	18 Paket	53 Paket	8 Paket	15.09%	1 Sekolah	0	0	0
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	5.724 Siswa	-	-	-	-	1109 Set	0	0	0
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya operasional biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	26.530 Siswa	-	-	-	-	800 Siswa	792 Siswa	99.00%	2.99%
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	5.830 Siswa	-	-	-	-	3.250 Siswa	3.191 Siswa	98.18%	54.73%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	5 Sekolah	-	-	-	-	1 Sekolah	0	0	0
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
			12 Kegiatan	-	-	-	-	12 Kegiatan	4 Kegiatan	33.33%	33.33%
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
			50 Dokumen	-	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	100%
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	14 Lomba	25 Lomba	35 Lomba	0	0	14 Lomba	12 Lomba	85.71%	85.71%
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah guru sekolah menengah pertama yang mendapatkan sertifikasi	3.108 Orang	2.012 Orang	3.108 Orang	0	0	-	-	-	-
			3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33.33%	33.33%
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang termonitoring	75 Satpen	30 Satpen	75 Satpen	10 Satpen	13.33%	-	-	-	-
			2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	0	0	0
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya BOS sekolah menengah pertama	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
			33615 Siswa	-	-	-	-	33615 Siswa	16.806 Siswa	50.00%	50.00%
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya operasional pengelolaan BOS sekolah menengah pertama	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
			3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	24 Unit	6 Paket	4 Paket	0	0	5 Unit	0	0	0
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	22 Unit	4 Paket	6 Paket	2 Paket	33.33%	4 Unit	2 Unit	50%	9.09%
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	12 Unit	4 Paket	1 Paket	0	0	2 Unit	2 Unit	100%	16.67%
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	14 Unit	5 Paket	2 Paket	0	0	2 Unit	1 Unit	50%	7.14%
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	13 Unit	4 Paket	4 Paket	0	0	3 Unit	0	0	0
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	88 Sekolah	11 Paket	15 Paket	0	0	11 Sekolah	11 Sekolah	100%	12.50%
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pemenuhan SPM PAUD	4.620 Siswa	-	-	-	-	740 Siswa	740 Siswa	100%	16.02%
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	12.749 Siswa	-	-	-	-	1750 Siswa	1.672 Siswa	95.54%	13.11%
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	88 Sekolah	4 Paket	4 Paket	0	0	11 Sekolah	5 Sekolah	45.45%	5.68%
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	3 Kegiatan	60.00%	60.00%
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase tersusunnya Dokumen Evaluasi Satuan PAUD	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Dokumen Evaluasi dan Kajian	59 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	3 Dokumen	25.00%	5.08%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah guru TK/PAUD yang mendapatkan sertifikasi	1.000 Orang	985 Orang	1.000 Orang	0	0	-	-	-	-
		Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang termonitoring dan terakreditasi	130 Lembaga	130 Lembaga	130 Lembaga	50 Lembaga	38.46%	-	-	-	-
		Kegiatan monitoring, Pendampingan akreditasi dan lomba	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	295.230 Siswa	41.230 Siswa	49.205 Siswa	0	0	49205 Siswa	36.955 Siswa	75.10%	12.52%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	2 Unit	0	0	0
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Unit	1 Paket	1 Paket	0	0	1 Unit	1 Unit	100%	16.67%
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Unit	1 Paket	3 Paket	0	0	1 Unit	1 Unit	100%	16.67%
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Satpen	1 Satpen	100%	100%
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan yang terlaksana	2 Paket	4 Paket	2 Paket	1 Paket	50%	-	-	-	-
		Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	1.685 Siswa	-	-	-	-	328 Siswa	328 Siswa	100%	19.47%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Persentase terlaksananya operasional pengelolaan BOP/Pendampingan BOP	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	3 kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33.33%	33.33%
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	1 Satpen	2 Paket	1 Paket	0	0	1 Satpen	0	0	0
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Persentase penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan yang terlaksana	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	100%
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dokumen Evaluasi dan Kajian	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	33.33%
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah tutor/pamong belajar yang mendapatkan sertifikasi	10 Orang	-	10 Orang	-	-	-	-	-	-
		Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	-	-	-	-	3 Dokumen	2 Dokumen	66.67%	66.67%
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	100%
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	21.090 siswa	2.429 siswa	3.515 siswa	0	0	3515 Siswa	2.767 Siswa	78.72%	13.12%
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50.0%
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50.0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6 Kegiatan	-	100%	-	-	1 Kegiatan	0	0	0
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 Kegiatan	-	100%	-	-	5 Kegiatan	0	0	0
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	6 Kegiatan	-	100%	-	-	1 Kegiatan	0	0	0
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	30 Kegiatan	-	100%	-	-	5 Kegiatan	0	0	0
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase tersusunnya kompetensi dasar muatan lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	0	0	0
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase tersusunnya silabus muatan lokal PAUD dan PNF	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	5 Kegiatan	-	-	-	-	5 Kegiatan	1 Kegiatan	20.00%	20.00%
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	-	100%	-	-	0 Kegiatan	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru berkualitas S1/D-IV	90.70%	80.51%	100%	0	0	89.01%	0	0	0
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase terlaksananya perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan PNF/Kesetaraan	100%	100%	100%	25%	25%	-	-	-	-
		Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5.627 Orang	-	-	-	-	5334 Orang	0	0	0
		Jumlah non ASN	3.392 Orang	-	-	-	-	1737 Orang	3.410 Orang	196.32%	100.53%
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	0	0	0
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50.0%
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50.0%
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	24 Sekolah	-	-	-	-	4 Sekolah	0	0	0
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	-	-	-	-
		Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	6 Sekolah	-	-	-	-	1 Sekolah	0	0	0
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin PAUD dan PNF yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat	100%	100%	100%	25%	25%	-	-	-	-
		PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	1.740 Lembaga	-	-	-	-	290 Lembaga	28 Lembaga	9.66%	1.61%
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan PNF yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	25%	25%	-	-	-	-
		PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	1.200 Lembaga	-	-	-	-	200 Lembaga	41 Lembaga	20.50%	3.42%
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase terlaksananya Pembinaan PAUD dan PNF yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	25%	25%	-	-	-	-
		Workshop yang terlaksana	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	1 Kegiatan	25.00%	25.00%

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 Dinas Pendidikan Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan Wajib, 5 Program dan 12 Indikator Kinerja Program serta 16 Kegiatan dengan 18 Indikator Kinerja Kegiatan.
 - b) Dari 12 Indikator Kinerja Program, terdapat 2 indikator yang melampaui target, 7 indikator sesuai target, serta 3 indikator tidak memenuhi target.
- 2) Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 urusan, 5 program dengan 12 indikator program dan 16 kegiatan dengan 16 indikator kegiatan.
 - b) Dari 12 indikator kinerja program, terdapat 3 indikator yang dapat melampaui target, dan 52 indikator dapat memenuhi target akhir periode Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	1,215,003,023,000	377,342,409,830	31.06
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	311,911,093,805	30,596,512,289	9.81
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	172,404,100,300	16,362,171,564	9.49
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	6,000,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	5,255,371,600	600,000,000	11.42
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	331,927,000	0	0.00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	160,737,000	0	0.00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	614,841,782	0	0.00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	7,653,874,800	1,015,923,000	13.27
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	150,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	150,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,500,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	300,000,000	291,797,000	97.27
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7,056,895,218	132,150,000	1.87
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	594,000,000	0	0.00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	13,250,000,000	12,643,190,000	95.42
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	221,249,900	0	0.00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	750,000,000	86,891,850	11.59
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	700,000,000	178,727,000	25.53
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	686,503,000	454,475,650	66.20
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	325,000,000	158,666,464	48.82
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1,000,000,000	752,830,100	75.28
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124,853,700,000	24,062,494,602	19.27%
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	250,000,000	47,520,500	19.01
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	97,827,768,000	11,020,660,940	11.27
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	0	0.00
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	7,350,000,000	350,349,500	4.77
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0.00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	130,000,000	130,000,000	100.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	250,000,000	250,000,000	100.00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,972,468,000	146,000,000	4.91
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4,150,000,000	351,253,500	8.46
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	0	0.00
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	0	0	0.00
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	0	0	0.00
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	738,500,000	240,795,300	32.61
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	300,000,000	0	0.00
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	542,500,000	242,500,000	44.70
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	144,500,000	0	0.00
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8,799,100,000	8,202,262,500	93.22
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	420,000,000	20,000,000	4.76
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	750,000,000	55,575,000	7.41
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	750,000,000	747,647,140	99.69
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	600,000,000	54,169,000	9.03
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	200,000,000	117,434,000	58.72
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150,000,000	0	0.00
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	69,340,700,000	10,245,877,016	14.78%
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	240,000,000	112,675,000	46.95
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	34,794,025,505	2,953,921,075	8.49
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1,516,000,000	153,704,500	10.14
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,000,383,000	945,000	0.09
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200,000,000	0	0.00
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	305,442,505	0	0.00
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	300,000,000	60,700,000	20.23
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	250,000,000	95,883,600	38.35
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	81,400,000	43,237,000	53.12
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2,515,000,000	2,117,495,000	84.19
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	230,000,000	168,493,500	73.26
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	325,000,000	83,630,075	25.73
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	315,000,000	18,055,400	5.73
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	175,000,000	149,790,000	85.59
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	300,000,000	61,987,000	20.66
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	27,280,800,000	0	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6,885,200,000	259,758,710	3.77
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	700,000,000	0	0.00
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	225,000,000	39,805,710	17.69
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	225,000,000	0	0.00
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,000,000	0	0.00
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43,200,000	23,208,000	53.72
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	150,000,000	11,977,000	7.98
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	80,000,000	2,755,000	3.44
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	200,000,000	182,013,000	91.01
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	0	0.00
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,000,000	0	0.00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	250,000,000	0	0.00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4,812,000,000	0	0.00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1,225,000,000	74,474,400	6.08
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	600,000,000	0	0.00
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	300,000,000	0	0.00
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50,000,000	0	0.00
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100,000,000	0	0.00
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	150,000,000	0	0.00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	625,000,000	74,474,400	11.92
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	400,000,000	74,474,400	18.62
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100,000,000	0	0.00
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	125,000,000	0	0.00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	98,483,933,195	51,728,133,845	52.52
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	98,483,933,195	51,728,133,845	52.52
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	93,968,933,195	51,728,133,845	55.05
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,515,000,000	0	0.00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	875,000,000	151,961,350	17.37

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	375,000,000	3,762,350	1.00
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	175,000,000	3,262,350	1.86
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200,000,000	500,000	0.25
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	500,000,000	148,199,000	29.64
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200,000,000	109,472,900	54.74
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	125,000,000	38,726,100	30.98
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	175,000,000	0	0.00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	802,507,996,000	294,791,327,946	36.73
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346,400,000	20,526,100	5.93
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	255,000,000	10,662,000	4.18
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16,000,000	0	0.00
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16,000,000	0	0.00
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12,000,000	0	0.00
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12,000,000	0	0.00
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,400,000	4,758,100	23.32
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000	5,106,000	34.04
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	775,945,796,000	287,505,682,610	37.05
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	770,635,572,000	285,434,580,050	37.04
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5,256,424,000	2,064,727,560	39.28
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,400,000	4,655,500	22.82
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20,400,000	1,719,500	8.43
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13,000,000	0	0.00
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32,000,000	16,505,000	51.58
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	32,000,000	16,505,000	51.58
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,141,398,039	333,651,063	10.62
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	190,000,000	32,711,950	17.22
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	325,000,000	42,679,050	13.13
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	326,398,039	40,024,700	12.26
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	400,000,000	12,313,200	3.08
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	500,000,000	39,692,047	7.94
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800,000,000	166,230,116	20.78
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600,000,000	0	0.00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	525,000,000	0	0.00
1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	525,000,000	0	0.00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,442,001,961	6,461,682,109	31.61
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,487,001,961	6,461,682,109	33.16
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0.00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	955,000,000	0	0.00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,075,400,000	453,281,064	21.84
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	214,400,000	40,605,740	18.94
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	896,000,000	175,032,774	19.53
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400,000,000	88,274,100	22.07
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	475,000,000	139,366,450	29.34
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90,000,000	10,002,000	11.11
JUMLAH		1,215,003,023,000	377,342,409,830	31.06

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 16 kegiatan dan 122 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebesar Rp 1.157.975.409.083,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 377.342.409.830,- Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 780.632.999.253,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai OPD Teknis yang menangani urusan wajib Pendidikan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 TW 2	2024	2025	2026	2023
Tujuan : Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)	103,42	103,44	103,46	103,47	103,48	103,49	103,42	103,42	103,42				103,44
Sasaran :														
1. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	72,37	76,15	77,15	78,25	80,00	80,35	72,37	77,21	77,21				76,15
2. Meningkatkan layanan Pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	78,64	79,22	80,15	81,78	83,92	85,03	78,64	78,64	78,64				79,22
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	86,55	86,61	86,73	87,20	87,60	88,20	86,55	86,55	86,55				86,61

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Angka Partisipasi Kasar (APK)”, target sebesar 103,44% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 103,42 % (capaian 99,98 %);
- b. Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”, target sebesar 76,15 sudah tercapai melampaui target dengan realisasi sebesar 77,21 (capaian 101,39%); Sasaran 2 “Meningkatnya layanan Pendidikan berkualitas” memiliki 2 indikator, sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Angka Partisipasi Murni (APM)” belum dapat mencapai target sebesar 79,22 %, dengan realisasi sebesar 78,64% (capaian sebesar 99,27%);
 - 2) Indikator “Angka Partisipasi Sekolah (APS)” belum dapat mencapai target sebesar 86,61 %, dengan realisasi sebesar 86,55% (capaian sebesar 99,93%);

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang pendidikan

juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw 2	2024	2025	2026	2023
1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	21	21	21	21	21	21	21	21	5				21
2	Dokumen Pelaporan	15	15	15	15	15	15	15	15	5				15

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2023

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang di bidang pendidikan, ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang di bidang pendidikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara Renstra dengan Renja
dan antara Renja dengan APBD Kota Semarang
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw 2	2024	2025	2026	2023
1	Kesesuaian Program Renstra dengan Program Renja	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %				100,00 %
2	Kesesuaian Program Renja dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %				100,00 %

Sumber : OPD Kota Semarang, 2023

Pada triwulan II tahun 2023, kesesuaian program Renstra dengan Renja sebesar 100 %. Adapun untuk kesesuaian program Renja dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana seluruh program pada Renja Tahun 2023 dapat terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Pendidikan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw 2	2024	2025	2026		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																
Fokus Kesejahteraan Sosial																
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	82,80	83,20	83,60	84,00	84,40	84,80	83,55	83,56	83,56				83,20	
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,55	10,57	10,59	10,61	10,63	10,65	10,55	10,56	10,56				10,57	
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,54	15,56	15,58	15,60	15,62	15,64	15,54	15,55	15,55				15,56	
ASPEK PELAYANAN UMUM																
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	107,97	107,97	107,97				100	
2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	%														
	a. Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100	95,59	95,81	95,81				100	
	b. Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang erpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	100	95,51	95,51	95,51				100	
3	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7 -18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	26,22	26,22	26,22				100	
4	Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	37,34	47,24	57,14	65,50	70,60	86,50	1,915	1,915	1,99				2,015	
5	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	NA	25,56	51,43	65,70	70,50	88,50	1,78	1,78	1,82				1,88	
6	Angka Partisipasi Kasar															
	a. PAUD (3 -6 tahun)	%	81,5	81,6	81,7	81,75	81,85	82,10	71,33	83,01	83,01				84,6	
	b. SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	109,88	109,88	109,88				100	
	c. SLTP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	113,67	113,67	113,67				100	
7	Angka Partisipasi Murni :															
	a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	90	90	90	90	90	95,50	95,50	95,50				90	
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	80	80	80	80	80	80	84,51	84,51	84,51				80	
8	Angka Putus Sekolah:															
	a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01				0,01	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw 2	2024	2025	2026		
	b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,06	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02				0,04	
9	Angka Kelulusan:															
	a. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	98,73	98,73	98,73				100	
	b. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,9	99,9	99,9	100	100	100	99,94	99,94	99,94				99,9	
10	Angka Melanjutkan (AM):															
	a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	103,14	103,14	103,14				100	
11	Fasilitas Pendidikan:															
	a. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95	95,5	96	96,5	97	97,5	84,80	84,80	84,80				95,5	
	b. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	91,62	91,62	91,62				99,1	
12	Rasio Guru/Murid perkelas Rata -rata															
	a. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18	1:18				1:18	
	b. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32	1:20:32				1:20:32	
	c. Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	%	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17	1:17				1:17	
	d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	%	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30	1:17:30				1:17:30	
13	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV															
	a. Jenjang PAUD	%	98	98,2	98,4	98,8	99	98,2	61,88	88,76	88,76				98,2	
	b. Jenjang SD/MI	%	100	98	99	100	100	100	90,24	96,50	96,50				98	
	c. Jenjang SMP/MTs	%	100	99	100	100	100	100	86,37	96,95	96,95				99	

Sumber : OPD Kota Semarang, 2023

* Data Sementara

** Data Sangat Sementara

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Masih perlu dioptimalkannya lagi peningkatan kualitas pendidikan, antara lain melalui perbaikan rapor pendidikan;
- Perlu ditingkatkan angka partisipasi sekolah untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya :

- a. Terjadinya mutasi dan promosi yang menyebabkan jumlah SDM di Dinas berkurang dengan beban kerja yang semakin bertambah dan kompleks.
- b. Masih belum meratanya jumlah sekolah dalam kondisi baik terutama di SD;
- c. Perlunya peningkatan kemampuan guru terutama dengan adanya program sekolah penggerak untuk mewujudkan pendidikan yang semakin berkualitas.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan
 - 1) jumlah SDM yang semakin berkurang.
 - 2) pemerataan sarana dan prasarana dalam kondisi baik, terutama untuk di jenjang SD.
 - 3) Masih adanya anak tidak sekolah dengan berbagai alasan pemicu.
- b. Peluang
 - 1) pemanfaatan anggaran BOS yang lebih fleksibel.
 - 2) implementasi Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.
 - 3) pemahaman dan penguasaan teknologi informasi terutama yang mendukung pembelajaran.
 - 4) meningkatnya peran NGO dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- b. Perbaikan sarana dan prasarana
- c. Peningkatan dukungan penerapan teknologi informasi
- d. Perwujudan data pendidikan yang lebih akurat
- e. Penguatan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
DINAS PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	DINAS PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		APK SMP/MTs	115.61 %	313.576.213.958	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		APK SMP/MTs	115.61 %	313.576.213.958	
		APK PAUD 5-6 tahun	85.87 %				APK PAUD 5-6 tahun	85.87 %		
		Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	6.00 lembaga				Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan	6.00 lembaga		
		APK SD/MI	111.69 %				APK SD/MI	111.69 %		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	176.454.493.965	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	176.454.493.965	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2 Unit	6.000.000.000	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2 Unit	6.000.000.000	
Penambahan Ruang Kelas Baru	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	30 Ruang	5.255.371.600	Penambahan Ruang Kelas Baru	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	30 Ruang	5.255.371.600	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	331.927.000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	331.927.000	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Pembangunan Ruang UKS	3 Unit	160.737.000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Pembangunan Ruang UKS	3 Unit	160.737.000	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Unit	614.841.782	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Unit	614.841.782	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	35 Ruang	7.653.874.800	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	35 Ruang	7.653.874.800	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	200.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	200.000.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4 Ruang	150.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4 Ruang	150.000.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	2 Ruang	150.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	2 Ruang	150.000.000	
Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	14 Unit	703.409.001	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	14 Unit	703.409.001	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	42 Unit	11.621.266.076	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	42 Unit	11.621.266.076	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	4831 Set	594.000.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	4831 Set	594.000.000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	6700 Siswa	13.250.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	6700 Siswa	13.250.000.000	
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	4800 Siswa				Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	4800 Siswa		
Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	326 set	2.102.400	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktikum dan	326 set	2.102.400	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
							Peraga Siswa			
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	28665 Siswa	750.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	28665 Siswa	750.000.000	
		Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	49714 Siswa				Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	49714 Siswa		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Dokumen Evaluasi dan Kajian	10 Dokumen	700.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Dokumen Evaluasi dan Kajian	10 Dokumen	700.000.000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Lomba	42 Lomba	686.503.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Lomba	42 Lomba	686.503.000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	206.238.200	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	206.238.200	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Monitoring dan Akreditasi sekolah	2 Kegiatan	755.000.000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Semarang	Monitoring dan Akreditasi sekolah	2 Kegiatan	755.000.000	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	88951 Siswa	123.713.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	88951 Siswa	123.713.700.000	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3 Kegiatan	279.982.825	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Semarang	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3 Kegiatan	279.982.825	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.00 %	99.289.714.118	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.00 %	99.289.714.118	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	12 Ruang	8.257.483.751	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kota Semarang	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	12 Ruang	8.257.483.751	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pembangunan Laboratorium	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	1 Ruang	130.000.000	Pembangunan Laboratorium	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	1 Ruang	130.000.000	
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 Ruang	250.000.000	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 Ruang	250.000.000	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah pengadaan sarpras	5 Unit	2.972.468.000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah pengadaan sarpras	5 Unit	2.972.468.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	55 Ruang	4.150.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	55 Ruang	4.150.000.000	
Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Sekolah	300.000.000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Sekolah	300.000.000	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Sekolah	542.500.000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Sekolah	542.500.000	
Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	1109 set	144.500.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	1109 set	144.500.000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	3250 Siswa	8.699.100.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	3250 Siswa	8.699.100.000	
	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	800 Siswa			Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	800 Siswa		
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Sekolah	280.984.167	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Sekolah	280.984.167	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 Kegiatan	526.500.000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 Kegiatan	526.500.000	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	10 Dokumen	950.000.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	10 Dokumen	950.000.000	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Lomba	14 Lomba	500.000.000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Semarang	Jumlah Lomba	14 Lomba	500.000.000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	151.978.200	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	151.978.200	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33615 Siswa	70.480.700.000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33615 Siswa	70.480.700.000	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	215.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Semarang	Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 Kegiatan	215.000.000	
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100.00 %	31.810.413.101	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100.00 %	31.810.413.101	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5 Unit	1.516.000.000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5 Unit	1.516.000.000	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	200.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	200.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	3 Unit	380.000.000	Pengadaan Mebel PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	3 Unit	380.000.000	
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	11 Sekolah	288.000.000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	11 Sekolah	288.000.000	
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Semarang	Pemenuhan SPM PAUD	740 Siswa	81.400.000	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kota Semarang	Pemenuhan SPM PAUD	740 Siswa	81.400.000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	1750 Siswa	2.515.000.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Semarang	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	1750 Siswa	2.515.000.000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	11 Sekolah	230.000.000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	11 Sekolah	230.000.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	325.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Semarang	Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	325.000.000	
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Semarang	Dokumen Evaluasi dan Kajian	12 Dokumen	367.258.000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kota Semarang	Dokumen Evaluasi dan Kajian	12 Dokumen	367.258.000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	175.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	175.000.000	
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	49205 Siswa	24.247.200.000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Semarang	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	49205 Siswa	24.247.200.000	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100.00 %	6.021.592.774	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100.00 %	6.021.592.774	
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat	1 Unit	225.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	225.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	225.000.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Unit	225.000.000	
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	100.000.000	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan Mebeluer Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	100.000.000	
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	328 Siswa	43.200.000	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	328 Siswa	43.200.000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	3 Kegiatan	88.193.550	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	3 Kegiatan	88.193.550	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	4.399.350	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1 Satpen	4.399.350	
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3 Kegiatan	200.000.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3 Kegiatan	200.000.000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	100.000.000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 Kegiatan	100.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	223.799.874	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	223.799.874	
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	3515 Siswa	4.812.000.000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Semarang	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	3515 Siswa	4.812.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100.00 %	631.760.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF	100.00 %	631.760.000	
		Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.00 %				Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.00 %		
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100.00 %	231.360.000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100.00 %	231.360.000	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	231.360.000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	231.360.000	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100.00 %	400.400.000	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100.00 %	400.400.000	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	300.400.000	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1 Kegiatan	300.400.000	
Penyusunan Silabus Muatan Lokal	Kota Semarang	Silabus Muatan Lokal Pendidikan	5 Kegiatan	100.000.000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal	Kota Semarang	Silabus Muatan Lokal Pendidikan	5 Kegiatan	100.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.01 %	97.188.473.195	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV	89.01 %	97.188.473.195	
<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>		<i>Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	<i>100.00 %</i>	<i>97.188.473.195</i>	<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>		<i>Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	<i>100.00 %</i>	<i>97.188.473.195</i>	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah non ASN	1737 Orang	93.929.183.195	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah non ASN	1737 Orang	93.929.183.195	
		Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5334 Orang				Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5334 Orang		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100.00 %	435.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang berijin	100.00 %	435.000.000	
		Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100.00 %				Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin	100.00 %		
<i>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>		<i>Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>100.00 %</i>	<i>110.000.000</i>	<i>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>		<i>Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>	<i>100.00 %</i>	<i>110.000.000</i>	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	4 Sekolah	10.000.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	4 Sekolah	10.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	1 Sekolah	100.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	1 Sekolah	100.000.000	
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00 %	325.000.000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100.00 %	325.000.000	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	290 Lembaga	200.000.000	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	290 Lembaga	200.000.000	
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	200 Lembaga	125.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Kota Semarang	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	200 Lembaga	125.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.115.969.019.888	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	704.137.572.735	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	704.137.572.735	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %		

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100.00 %		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan	100.00 %	298.518.171	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Pelaporan	100.00 %	298.518.171	
		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	17 Dokumen	224.125.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	17 Dokumen	224.125.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	RKA SKPD	1 Dokumen	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	RKA SKPD	1 Dokumen	16.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	16.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	16.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	DPA SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	DPA SKPD	1 Dokumen	12.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Pelaporan Capaian	12 Dokumen	10.027.443	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Kota Semarang</i>	Pelaporan Capaian	12 Dokumen	10.027.443	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Dokumen Laporan	3 Dokumen	8.365.728	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Dokumen Laporan	3 Dokumen	8.365.728	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	679.140.380.018	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Pelaporan Keuangan SKPD	100.00 %	679.140.380.018	
		Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %				Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 %	673.843.156.018	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 %	673.843.156.018	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100.00 %	5.256.424.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100.00 %	5.256.424.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	20.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	20.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Semester	2 Dokumen	20.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Laporan Keuangan Semester	2 Dokumen	20.400.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pelaporan Barang Milik Daerah	100.00 %	32.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Pelaporan Barang Milik Daerah	100.00 %	32.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	32.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	32.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100.00 %	2.203.926.982	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100.00 %	2.203.926.982	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100.00 %	190.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	100.00 %	190.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Peralatan Rumah Tangga	100.00 %	212.423.564	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Peralatan Rumah Tangga	100.00 %	212.423.564	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Logistik Kantor	100.00 %	226.398.039	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Logistik Kantor	100.00 %	226.398.039	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Barang Cetak dan Penggandaan	100.00 %	249.510.903	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Barang Cetak dan Penggandaan	100.00 %	249.510.903	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12500 Orang	263.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12500 Orang	263.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Rapat koordinasi dan konsultasi	400 Orang	529.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Rapat koordinasi dan konsultasi	400 Orang	529.300.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.00 %	533.294.476	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.00 %	533.294.476	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %	350.021.010	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %	350.021.010	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Peralatan Gedung Kantor	100.00 %	350.021.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Peralatan Gedung Kantor	100.00 %	350.021.010	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	20.020.946.336	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	20.020.946.336	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00 %	770.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00 %	770.300.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	2.091.780.218	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	2.091.780.218	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Rehabilitasi Gedung	3 Unit	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Rehabilitasi Gedung	3 Unit	400.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100.00 %	486.380.218	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100.00 %	486.380.218	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Semarang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	100.00 %	95.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Kota Semarang	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	100.00 %	95.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pendukung Gedung Kantor			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Prasarana Pendukung Gedung Kantor			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana

tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2023 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif, dengan fokus:
 1. Peningkatan Kualitas Dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi, melalui upaya-upaya antara lain:
 - a) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - b) Peningkatan SDM pendidikan yang berbasis pada dukungan pengembangan teknologi dan informasi
 - c) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - d) Penguatan pendidikan agama dan akhlak mulia berwawasan daerah dan kebangsaan
 - e) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - f) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - g) Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan
 - h) Pengembangan literasi dan arsip digital
 2. Peningkatan Partisipasi, Kesempatan Belajar, dan Keberlanjutan Pendidikan Untuk Semua, melalui upaya-upaya:
 - a) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - b) Peningkatan pemberian beasiswa bagi warga miskin dan siswa berprestasi
 - c) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - d) Fasilitasi penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;

- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kedua, yaitu “**Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif**”.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul”,

dengan indikator tujuan **“Angka Partisipasi Kasar (APK)”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** dengan indikator sasaran Nilai AKIP dan **“Meningkatnya layanan Pendidikan berkualitas”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Angka Partisipasi Murni (APM)
- b. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Mewujudkan kualitas pelayanan Pendidikan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	103,44
Sasaran :			
1. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Poin	76,15
2. Meningkatkan layanan Pendidikan berkualitas	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	79,22
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	86,61

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pendidikan bertugas sebagai OPD teknis di urusan pendidikan. Namun secara khusus, Dinas Pendidikan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Angka Partisipasi Kasar (APK)”** dan indikator sasaran **“Nilai AKIP”, “Angka Partisipasi Murni (APM) dan “Angka Partisipasi Sekolah (APS)”**;
3. Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Ketersediaan data dan informasi pendidikan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pendidikan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kota Semarang

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PENDIDIKAN					1.165.494.284.906	1.165.494.284.906	1.157.975.409.083		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					765.622.929.719	765.622.929.719	755.425.239.733		
I	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100%	100%	100%	346,400,000	346,400,000	298,518,171		
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	100%	100%	78.000.000	78.000.000	74.000.000		
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Dokumen Pendukung Perencanaan	17 dok	17 dok	17 dok	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	
		Dokumen Pelaporan	100%	100%	100%	18.000.000	18.000.000	14.000.000		
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan Capaian	12 dok	12 dok	12 dok	8.000.000	8.000.000	8.000.000	APBD	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan	3 dok	3 dok	3 dok	10.000.000	10,000,000	6,000,000	APBD	
II	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		100%	100%	100%	743.743.007.805	743.743.007.805	729.390.034.687		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	743.743.007.805	743.743.007.805	729.390.034.687		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	738.475.727.405	738.475.727.405	724.223.602.447	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	5.239.880.400	5.239.880.400	5.139.032.240	APBD	
		Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	40.400.000	40.400.000	27.400.000		
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dok	1 dok	1 dok	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD	
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semester	2 dok	2 dok	2 dok	17.400.000	17.400.000	17.400.000	APBD	
1.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	13,000,000	13,000,000	-	APBD	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaporan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	44.000.000	44.000.000	505.520.000		
1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	44.000.000	44.000.000	505.520.000	APBD	
III	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100%	100%	100%	21.757.921.914	21.757.921.914	25.455.685.046		
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	2.529.133.812	2.529.133.812	4.355.164.221		
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	100%	100%	100%	200.000.000	200.000.000	160.000.000	APBD	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100%	285.891.628	285.891.628	249.201.628	APBD	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	100%	100%	100%	250.000.000	250.000.000	2.151.763.000	APBD	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	300.000.000	300.000.000	300.000.000	APBD	
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	12.500 Orang	12.500 Orang	12.500 Orang	125.568.000	125.568.000	100.568.000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	400 Orang	400 Orang	400 Orang	1.014.320.000	1.014.320.000	1.089.989.715	APBD	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	353.354.184	353.354.184	303.641.878	APBD	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	353.622.191	353.622.191	441.243.622		
1.01.01.2.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Gedung kantor yang terbangun	1 unit	1 unit	1 unit	-	-	-	APBD	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	100%	353.622.191	353.622.191	441.243.622	APBD	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	16.957.115.427	16.957.115.427	18.155.530.326		
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	16.099.825.427	16.099.825.427	17.418.912.336	APBD	
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	-	-	-	APBD	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	857.290.000	857.290.000	736.617.990	APBD	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	1.918.050.484	1.918.050.484	2.503.746.877		
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	194.863.630	194.863.630	194.863.630	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	124 unit	124 unit	124 unit	903.982.857	903.982.857	896.089.341	APBD	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	3 Unit	3 Unit	3 Unit	401.356.077	401.356.077	831.356.077	APBD	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100%	337.847.920	337.847.920	461.437.829	APBD	
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor	100%	100%	100%	80.000.000	80.000.000	120.000.000	APBD	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					320.773.080.220	320.773.080.220	338.964.456.876		
I	APK SD/MI		111.69%	111.69%	111.69%	152.701.427.000	152.701.427.000	171.562.726.840		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	100%	152.701.427.000	152.701.427.000	171.562.726.840		
1.01.02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2 unit	2 unit	2 unit	7,633,276,740	6,000,000,000	6,000,000,000	APBD	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	30 Ruang	30 Ruang	30 Ruang	2.184.417.000	2.184.417.000	2.373.917.000	APBD	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	580,893,600	331,927,000	331,927,000	APBD	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Unit	3 Unit	3 Unit	420,940,800	160,737,000	160,737,000	APBD	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Unit	2 Unit	2 Unit	692,666,510	614,841,782	614,841,782	APBD	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1,309,829,400	1.259.377.000	1.559.377.000	APBD	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	35 Ruang	35 Ruang	35 Ruang	7.552.144.000	7.552.144.000	6.127.364.000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	562,464,000	200,000,000	200,000,000	APBD	
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4 Ruang	4 Ruang	4 Ruang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	400.439.000	400.439.000	485.749.000	APBD	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8 Unit	8 Unit	8 Unit	3.150.000.000	3.150.000.000	2.836.900.000	APBD	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	-				APBD	
			14 Unit	14 Unit	14 Unit	920.000.000	920.000.000	20.112.000.000	APBD	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	-	-	-				APBD	
			42 Unit	42 Unit	42 Unit	2.880.250.000	2.880.250.000	3.009.839.840	APBD	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Dasar	4831 Siswa	4831 Siswa	4831 Siswa				APBD	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	6.700 siswa	6.700 siswa	6.700 siswa	627,825,200	594,000,000	594,000,000	APBD	
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	4.800 siswa	4.800 siswa	4.800 siswa	14.006.300.000	14.006.300.000	13.996.300.000	APBD	
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	-	-				APBD	
			326 set	326 set	326 set	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa peserta AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)	-	-	-				APBD	
		Jumlah Peserta Didik yang terlayani dalam PPDB	28.665 siswa	28.665 siswa	28.665 siswa	768.400.000	768.400.000	768.400.000	APBD	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Evaluasi dan Kajian	-	-	-				APBD	
			10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	430.000.000	430.000.000	613.500.000	APBD	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba	42 Lomba	42 Lomba	42 Lomba	696.800.000	696.800.000	826.800.000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	319.000.000	319.000.000	293.080.000	APBD	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase satuan pendidikan yang termonitoring dan terakreditasi	-	-	-				APBD	
		Monitoring dan Akreditasi sekolah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	941.500.000	941.500.000	750.000.000	APBD	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya BOS Sekolah Dasar	-	-	-					
		Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Dasar	88.951 siswa	88.951 siswa	88.951 siswa	116.638.200.000	116.638.200.000	117.234.900.000	APBN	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase terlaksananya operasional pengelolaan BOS Sekolah Dasar	-	-	-	254.600.000	254.600.000	274.600.000	APBD	
		Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan				APBD	
II	APK SMP/MTs		115.61%	115.61%	115.61%	122.808.161.000	122.808.161.000	121.779.777.506		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	100%	122.808.161.000	122.808.161.000	121.779.777.506		
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10.601.862.137	10.601.862.137	10.601.862.137	APBD	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Baru	12 Ruang	12 Ruang	12 Ruang	17.673.137.863	17.673.137.863	15.605.823.748	APBD	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	-	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	217.881.000	217.881.000	217.881.000	APBD	
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	-	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pembangunan Laboratorium Sekolah	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	480,925,000	130,000,000	130,000,000	APBD	
1.01.02.2.02.07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	1 Ruang	1 Ruang	1 Ruang	1,134,920,000	250,000,000	250,000,000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	1.655.240.000	1.655.240.000	1.655.240.000	APBD	
		Jumlah pengadaan sarpras	5 Unit	5 Unit	5 Unit				APBD	
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	6 Ruang	6 Ruang	6 Ruang	-	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	55 Ruang	55 Ruang	55 Ruang	240.000.000	240.000.000	240.000.000	APBD	
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	12 Ruang	12 Ruang	12 Ruang	-	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	-	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	-	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	-	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	-	-	-	APBD	
1.01.02.2.02.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2 Ruang	2 Ruang	2 Ruang	1.448.000.000	1.448.000.000	1.831.669.829	APBD	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	338.064.000	338.064.000	338.064.000	APBD	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	4.036.576.000	4.036.576.000	4.285.079.000	APBD	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Pemenuhan SPM Sekolah Menengah Pertama	1.109 Siswa	1.109 Siswa	1.109 Siswa	144,458,380	144,500,000	144,500,000	APBD	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah siswa yang mendapatkan hibah	3.250 Siswa	3.250 Siswa	3.250 Siswa	13.334.300.000	13.334.300.000	13.327.384.756	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sekolah Menengah Pertama	pendampingan sekolah swasta gratis								
		Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa miskin dan miskin berprestasi	800 Siswa	800 Siswa	800 Siswa				APBD	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	523,379,096	420,000,000	280,984,167	APBD	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.217.200.000	1.217.200.000	1.158.678.630	APBD	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Kajian	-	-	-				APBD	
			10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	600.000.000	600.000.000	990.000.000	APBD	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Terlaksananya lomba-lomba di tingkat SMP dan PPDB	-	-	-				APBD	
		Jumlah Lomba	14 Lomba	14 Lomba	14 Lomba	646.000.000	646.000.000	825.569.278	APBD	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	197.600.000	197.600.000	169.727.720	APBD	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase satuan pendidikan yang termonitoring dan terakreditasi	-	-	-				APBD	
		Monitoring dan Akreditasi Sekolah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	148.200.000	148.200.000	86.042.560	APBD	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase terlaksananya BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-					
		Jumlah siswa penerima BOS Sekolah Menengah Pertama	33.615 Siswa	33.615 Siswa	33.615 Siswa	70.124.500.000	70.124.500.000	70.124.500.000	APBN	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS	Persentase terlaksananya operasional pengelolaan	-	-	-	179.600.000	179.600.000	172.254.848	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sekolah Menengah Pertama	BOS Sekolah Menengah Pertama								
		Kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	179.600.000	179.600.000	172.254.848	APBD	
III	APK PAUD 5-6 tahun		85.81%	85.81%	85.81%	38.529.414.333	38.529.414.333	39.587.874.643		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	100%	38.529.414.333	38.529.414.333	39.587.874.643		
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5 Unit	5 Unit	5 Unit	6.150.000.000	6.150.000.000	5.659.012.500	APBD	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	4 Unit	4 Unit	4 Unit	717.441.000	717.441.000	717.441.000	APBD	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Unit	2 Unit	2 Unit	295.000.000	295.000.000	295.000.000	APBD	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Pemb. Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Unit	2 Unit	2 Unit	280.000.000	280.000.000	280.000.000	APBD	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Pengadaan Mebel PAUD	3 Unit	3 Unit	3 Unit	205.000.000	205.000.000	1.013.000.000	APBD	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Pengadaan Perlengkapan PAUD	11 Sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah	245.000.000	245.000.000	444.975.840	APBD	
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pemenuhan SPM PAUD	740 Siswa	740 Siswa	740 Siswa	81,400,000	81,400,000	81,400,000	APBD	
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Persentase tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD	-	-	-					
		Jumlah siswa yang mendapatkan hibah pendampingan sekolah swasta gratis	1.750 Siswa	1.750 Siswa	1.750 Siswa	2.548.040.000	2.548.040.000	2.639.765.000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	11 Sekolah	11 Sekolah	11 Sekolah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	-	-	-					
		Jumlah kegiatan Proses Belajar PAUD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	597.133.333	597.133.333	697.133.333	APBD	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen Evaluasi dan Kajian	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	150.000.000	417.546.970	APBD	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kegiatan monitoring, Pendampingan akreditasi dan lomba	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	194.000.000	194.000.000	194.000.000	APBD	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP PAUD	49.205 Siswa	49.205 Siswa	49.205 Siswa	26.797.800.000	26.797.800.000	26.880.000.000	APBN	
IV	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan		6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	6.734.077.887	6.734.077.887	6.034.077.887		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal	100%	100%	100%	6.734.077.887	6.734.077.887	6.034.077.887		
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	700,000,000	700,000,000	-	APBD	
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	264,764,300	225,000,000	225,000,000	APBD	
1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	147,060,300	225,000,000	225,000,000	APBD	
1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1 Satpen	1 Satpen	1 Satpen	75,198,893	100,000,000	100,000,000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	328 Siswa	328 Siswa	328 Siswa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan Pengelolaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	61.400.000	61.400.000	61.400.000	APBD	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	1 Satpen	1 Satpen	1 Satpen	91.877.887	91.877.887	91.877.887	APBD	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	-	-	-				APBD	
		Jumlah Kegiatan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	186.000.000	186.000.000	186.000.000	APBD	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dokumen Evaluasi dan Kajian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	APBD	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah workshop guru peningkatan kompetensi guru	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	APBD	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Monitoring dan Pendampingan Akreditasi Lembaga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	166.000.000	166.000.000	166.000.000	APBD	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang menerima Dana BOP Kesetaraan	3.515 siswa	3.515 siswa	3.515 siswa	5.403.800.000	5.403.800.000	5.403.800.000	APBN	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.007.340.000	1.007.340.000	1.536.945.000		
I	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		100%	100%	100%	603.670.000	603.670.000	361.945.000		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	100%	100%	100%	200.000.000	200.000.000	50.000.000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-	APBD	
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-	APBD	
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-	APBD	
II	Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF		100%	100%	100%	403.670.000	403.670.000	311.945.000		
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		100%	100%	100%	403.670.000	403.670.000	311.945.000		
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-					
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	183.200.000	183.200.000	183.200.000	APBD	
1.01.03.2.02.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-					
			5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	70.470.000	70.470.000	70.470.000	APBD	
1.01.03.2.02.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-	-	-					
			1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000	150.000.000	58.275.000	APBD	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					70.334.129.144	70.334.129.144	70.334.129.144		
I	Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV		89.01%	89.01%	89.01%	70.334.129.144	70.334.129.144	70.350.343.297		

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	100%	100%	70.334.129.144	70.334.129.144	70.350.343.297	APBD	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi	5.334 Orang	5.334 Orang	5.334 Orang	66.629.129.144	66.629.129.144	66.645.343.297	APBD	
		Jumlah non ASN	1.737 Orang	1.737 Orang	1.737 Orang					
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	-	-	-					
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.705.000.000	3.705.000.000	3.705.000.000	APBD	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					641.600.000	641.600.000	641.600.000		
I	Persentase Satuan Pendidikan Dasar swasta yang berijin		100%	100%	100%	278.600.000	278.600.000	101.700.000		
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	100%	100%	278.600.000	278.600.000	101.700.000	APBD	
1.01.05.2.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang	Sekolah yang mendapatkan Ijin Pendirian	4 Sekolah	4 Sekolah	4 Sekolah	133.200.000	133.200.000	101.700.000	APBD	

KODE REKENING	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			Pagu Anggaran			SUMBER DANA	KET
			Renja 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023	RENJA 2023	APBD TA. 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Diselenggarakan oleh Masyarakat									
1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Sekolah yang mendapatkan Ijin Operasional	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	145.400.000	145.400.000	-	APBD	
II	Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin		100%	100%	100%	363.000.000	363.000.000	290.600.000		
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100%	100%	100%	363.000.000	363.000.000	290.600.000		
1.01.05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Izin Pendirian	290 Lembaga	290 Lembaga	290 Lembaga	142.000.000	142.000.000	197.000.000	APBD	
1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD yang mendapatkan Ijin Operasional	200 Lembaga	200 Lembaga	200 Lembaga	93.600.000	93.600.000	93.600.000	APBD	
1.01.05.2.02.03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Workshop yang terlaksana	4 keg	4 keg	4 keg	127.400.000	127.400.000	-	APBD	
TOTAL ANGGARAN						1.157.975.409.083	1.165.494.284.906	1.157.975.409.083		

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2022, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan ini berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pendidikan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pendidikan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

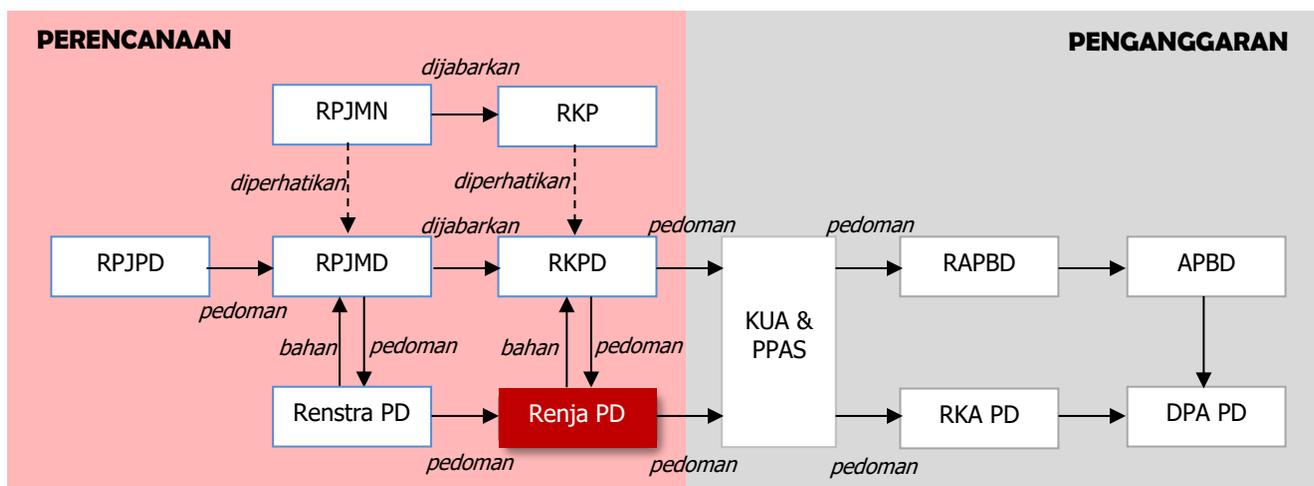
2. DINAS KESEHATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Penganggaran kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) BLUD Puskesmas; (2) Penambahan anggaran untuk perbaikan gizi stunting, Daycare; (3) Adanya penyesuaian belanja Gaji, TPP.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kesehatan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DINAS KESEHATAN Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang;
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BABII
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Ambil di Renstra	Ambil Monev 2022	Ambil Monev 2022	Ambil Monev 2022 Triwulan II		Ambil Monev	Ambil Monev 2023 s.d Triwulan II		
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredainya sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	75 %	75%	75%
X.XX.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	11 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	20%	10 Dokumen	5 Dokumen	50%	47%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja rensta, masterplan kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 kokumen	25%	4 dokumen	2 dokumen	50%	50%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100%	15 dokumen	4 dokumen	26%	400%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	12 dokumen	3 dokumen	25%	1200%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub KegiatanRenja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			TingkatCapaian Realisasi TargetRenstra (%)
					Target RenjaTahun 2022	Realisasi RenjaTriwulan II Tahun2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4 dokumen	2 dokumen	50%	200%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	3 dokumen	1 dokumen	33%	100%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021)	jumlah dokumen LKPJ, LKJiP, SPM	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	100%	33 Laporan	8 Laporan	24%	260%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 dokumen	25%	4 dokumen	2 dokumen	50%	50%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	50%	50%	50%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase terpenuhinya honor pengelolaan keuangan OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	50%	50%	50%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 dokumen	0 dokumen	0%	0%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	0 dokumen	0%	0%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase tersedianya komponen instalasi listrik	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	persentase ketersediaan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	50%	50%	50%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase ketersediaan makmin rapat koordinasi dan rapat konsultasi luar/dalam daerah	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sarana pendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	50%	50%	50%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100 %	50%	50%	50%
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana prasarana gedung kantor	10 paket	7 paket	7 paket	2 paket	28%	9 paket	2 paket	22%	28%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase keterpenuhinya jasa surat menyurat	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub KegiatanRenja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			TingkatCapaian Realisasi TargetRenstra (%)
					Target RenjaTahun 2022	Realisasi RenjaTriwulan II Tahun2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	25%	25%	25%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan dan service kendaraan dinas jabatan	6 unit	6 unit	6 unit	3 unit	50%	6 unit	2 unit	33%	33%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 unit	150 unit	134 unit	131 unit	97%	135 unit	68 unit	50%	68%
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase perbaikan peralatan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya rehabilitasi gedung kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase terpenuhinya pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana gedung kantor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100%	86%	86%	50%	58%	86%	42%	42%	42%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Poncol	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub KegiatanRenja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			TingkatCapaian Realisasi TargetRenstra (%)
					Target RenjaTahun 2022	Realisasi RenjaTriwulan II Tahun2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Miroto	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bandarharjo	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas bandarharjo	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bulu Lor	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bululor	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Halmahera	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bugangan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangdoro	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karngdoro	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pandanaran	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lamper Tengah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangayu	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Lebdosari	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub KegiatanRenja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			TingkatCapaian Realisasi TargetRenstra (%)
					Target RenjaTahun 2022	Realisasi RenjaTriwulan II Tahun2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Manyaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Manyaran	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Krobokan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngeplak Simongan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Simongan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gayamsari	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Candilama	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kagok	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pegandan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Genuk	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bangetayu	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Wetan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub KegiatanRenja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			TingkatCapaian Realisasi TargetRenstra (%)
					Target RenjaTahun 2022	Realisasi RenjaTriwulan II Tahun2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tlogosari Kulon	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kedungmundu	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Rowosari	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngesrep	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padangsari	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Srandol	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Srandol	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Puduk Payung	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudukpayung	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunungpati	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mijen	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangmalang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Tambakaji	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Purwoyoso	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngaliyan	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mangkang	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karanganyar	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sekaran	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	58%	58%	100%	55%	55%	55%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standa	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukung	Jumlah pembangunan rumahsakit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0%				
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	jumlah pembangunan rumah sakit	1 unit	4 unit	4 unit	1 unit	25%				

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah pembangunan puskesmas pembantu	1 Unit	1 Unit	1 Unit	0 unit	0%				
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pustu menjadi Puskesmas Induk	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0%	2 unit	1 unit	50%	100%
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	jumlah pustu menjadi puskesmas induk	2 Unit	1 Unit	1 Unit	0 unit	0%	8 unit	4 unit	50%	200%
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah puskesmas yang direhabilitasi	1 Unit	16 Paket	16 Paket	3 paket	18%	15 unit	2 unit	14%	200%
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah sarana prasarana puskesmas	4 Unit	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%				
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	16 Paket	1 Paket	1 Paket	0 paket	0%	20 paket	5 paket	25%	31%
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	jumlah ketersediaan alkes dan alat penunjang medis di fasyankes	1 Paket	100%	100%	18%	18%				
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	alat kesehatan yang terkalibrasi	100%	100%	100%	91%	91%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	jumlah item bahan habis pakai dan BMHP	80 unit	70 unit	70 unit	102 unit	145%				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	25%	25%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	25%	25%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	25%	25%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	36%	36%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	0%	0%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	26%	26%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	90%	90%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	27%	27%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	41%	41%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	100%	23%	23%	100%	50%	50%	50%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub KegiatanRenja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			TingkatCapaian Realisasi TargetRenstra (%)
					Target RenjaTahun 2022	Realisasi RenjaTriwulan II Tahun2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		kesehatan jiwa sesuai standar									
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	25%	25%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	23%	23%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk kondisi KLB	100%	100%	100%	0%	0%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	cakupan pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan akibat	100%	100%	100%	47%	47%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prosentase penanganan stunting	50%	48%	48%	0%	0%	50%	25%	50%	50%
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100%	85%	85%	0%	0%	85%	50%	58%	50%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar	83 fasyankes	63 fasyankes	63 fasyankes	0 fasyankes	0%	63 fasyankes	0 fasyankes	0%	0%
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah kelurahan yang telah	95%	87%	87%	0%	0%	87%	0%	0%	0%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub KegiatanRenja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			TingkatCapaian Realisasi TargetRenstra (%)
					Target RenjaTahun 2022	Realisasi RenjaTriwulan II Tahun2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		mengimplemantasikan kebijakan PHBS									
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang membina penyehatan tradisional	37 Puskesmas	37 Puskesmas	37 Puskesmas	0 puskesmas	0%	37 Puskesmas	37 Puskesmas	100%	100%
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	persentase kelengkapan laporan W1, W2 dan C1	100%	50%	50%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	cakupan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	100%	100%	100%	0%	0%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88%	80%	80%	52%	65%	80%	52%	65%	59%
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan	100%	100%	100%	0%	0%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	cakupan rating kelurahan sehat	100%	29%	29%	15%	52%	43%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	100%	100%	100%	30%	30%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	100%	100%	30%	30%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	jumlah puskesmas yang terakreditasi utama	37 Puskesmas	37 Puskesmas	37 Puskesmas	0 Puskesmas	0%	37 Puskesmas	0 Puskesmas	0%	0%
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	jumlah kejadian KIPI	100%					100%	50%	50%	50%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	persentase kegiatan kewaspadaan dini dan respon wabah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	cakupan pelayanan PSC	100%	100%	100%	0%	0%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	76%	76%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas	100%	100%	100%	80%	80%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	persentase pembangunan dan pengembangan aplikasi kesehatan	100%	100%	100%	36%	36%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	rasio ketersediaan perangkat pendukung SIK dan jaringan	100%	100%	100%	18%	18%	100%	50%	50%	50%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100%	100%	100%	24%	24%	100%	40%	40%	40%
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	rasio sarana kesehatan yang mengajukan ijin operasional	100%	100%	100%	20%	20%	100%	50%	50%	50%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan	70%	50%	50%	0%	0%	50%	50%	100%	71%
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	prosentase respon time ambulan hebat kota semarang	100%	80%	80%	0%	0%	80%	80%	100%	80%
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	75%
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM Kesehatan	100%	100%	100%	81%	81%	100%	50%	50%	50%
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	rasio dokter umum	2.11 per 1000 penduduk	1.83 per 1000 penduduk	1.83 per 1000 penduduk	2.35 per 1000 penduduk	2.35 per 1000 penduduk	1 dokumen	1 dokumen	100%	100%
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	97%	97%	100%	50%	50%	50%
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan untuk puskesmas dan RS	100%	80%	80%	0%	0%	100%	50%	50%	50%
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDM Kesehatan yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100%	100%	100%	96%	96%	100%	50%	50%	50%
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	jumlah uji kompetensi tenaga kesehatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	0 kegiatan	0%	2 kegiatan	1 kegiatan	50%	50%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	98%	90%	90%	59%	59%	96%	70%	72%	71%
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100%	100%	100%	40%	40%	100%	50%	50%	50%
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase produk alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat	100%	100%	100%	40%	40%	100%	50%	50%	50%
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase terbitnya ijin apotik, toko alkes dan optik, UMOT	100%	100%	100%	40%	40%	100%	50%	50%	50%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase industri rumah tangga pangan yang menerapkan CPP PIRT	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	persentase pemeriksaan produk makanan dan minuman rumah tangga	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	100%	100%	47%	47%	100%	75%	75%	75%
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,	Persentase mitra yang aktif dalam kegiatan jejaring	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat										
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	50%	50%
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	proporsi strata posyandu	100%	88%	88%	0%	0%	100%	50%	50%	50%

Sumber : DINAS KESEHATAN Kota Semarang, 2023

Berdasarkan table 2.1 dapat dilihat pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di tahun 2022 TW II mendapatkan nilai 50% dari target 100% sedangkan di tahun 2023 TW II adanya peningkatan menjadi 75%.

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di tahun 2022 TW II mendapatkan nilai 58% dari target 100% sedangkan di tahun 2023 TW II adanya penurunan menjadi 55%.

Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan di tahun 2022 TW II mendapatkan nilai 100% dari target 100% sedangkan di tahun 2023 TW II ada penurunan menjadi 75%. Hal ini belum tercapai dikarenakan belum terpenuhinya Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman di tahun 2022 TW II mendapatkan nilai 59% dari target 90% sama halnya tahun 2022 TWII di tahun 2023 TW II mendapatkan nilai 70% dari target 96%.

Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di tahun 2022 TW II mendapatkan nilai 47% dari target 100% sedangkan di tahun 2023 TW II yaitu 75%.

Hasil dari tabel diatas terjadinya peningkatan dan penurunan pada hasil kinerja Dinas Kesehatan Kota Semarang di tahun 2023 TW II dibandingkan tahun 2022 TW II.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	442.170.313.293	189.073.923.074	42,76
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	274.336.815.265	141.528.487.871	51,59
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.396.080	5.242.250	13,31
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.108.800	1.229.000	20,12
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.188.500	0	0
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.734.400	1.642.500	18,80
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.940.820	903.000	30,71
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.486.720	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021)	9.936.840	1.467.750	14,77
1.02.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	204.715.879.769	109.014.594.175	53,25
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	203.948.903.769	108.762.440.175	53,33
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	756.860.000	247.611.000	32,72
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.372.000	880.640	26,12
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.372.000	1.791.360	53,12
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.372.000	1.871.000	55,49
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.779.648.725	210.396.593	7,57
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.091.000	14.589.000	63,18
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	67.954.800	6.071.000	8,93
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250.000.000	13.408.300	5,36
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.630.000	1.616.830	44,54
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.196.000.000	174.711.463	14,61
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.238.972.925	0	0
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	989.443.028	-	-
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	989.443.028	-	-
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.868.971.484	1.264.695.086	32,69
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.100.000	-	-
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.066.674.384	298.110.041	27,95
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.790.197.100	966.585.045	34,64
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	989.443.028	-	-
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.874.411.300	1.565.391.006	40,40
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.572.720	93.053.817	41,07
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.038.703.580	917.967.169	45,03
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000	110.109.854	11,01
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	434.661.866	86,93
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.135.000	9.598.300	8,79
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	73.003.963.945	30.079.585.734	41,20
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PONCOL	1.754.500.000	640.791.130	36,52
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS MIROTO	1.295.426.000	493.386.311	38,09
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS BANDARHARJO	2.659.698.459	1.058.238.227	39,79
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS BULU LOR	1.736.710.580	699.495.448	40,28
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS HALMAHERA	2.239.105.000	939.246.315	41,95
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS BUGANGAN	1.158.304.485	528.198.858	45,60
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KARANGDORO	2.057.000.000	988.670.866	48,06
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PANDANARAN	2.105.400.000	876.416.642	41,63
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS LAMPER TENGAH	1.343.684.430	537.998.415	40,04
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KARANGAYU	1.448.994.360	543.759.320	37,53

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS LEBDOSARI	1.555.328.603	627.820.054	40,37
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS MANYARAN	1.279.916.488	528.803.742	41,32
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KROBOKAN	1.329.363.596	575.921.454	43,32
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN	1.200.804.000	544.191.900	45,32
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS GAYAMSARI	3.143.045.233	1.115.651.564	35,50
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS CANDILAMA	2.089.651.955	747.661.911	35,78
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KAGOK	1.454.420.000	606.057.179	41,67
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PEGANDAN	1.735.061.350	708.011.968	40,81
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS GENUK	1.939.459.995	910.458.192	46,94
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS BANGETAYU	3.430.859.410	1.205.399.456	35,13
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN	2.983.267.403	1.125.584.910	37,73
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TLOGOSARI KULON	3.114.540.000	1.466.007.389	47,07
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KEDUNG MUNDU	4.134.592.082	1.712.254.151	41,41
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS ROWOSARI	2.866.705.012	1.113.379.407	38,84
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS NGESREP	2.028.657.428	844.232.759	41,62
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PADANGSARI	1.611.059.340	791.162.004	49,11
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS SRONDOL	1.676.781.057	774.215.145	46,17
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PUDAK PAYUNG	1.374.560.000	632.094.790	45,99
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS GUNUNG PATI	3.144.776.206	1.202.388.336	38,23
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS MIJEN	2.279.640.000	792.041.118	34,74
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KARANGMALANG	1.530.686.845	604.102.020	39,47
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TAMBAKAJI	1.280.180.000	639.419.819	49,95
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PURWOYOSO	1.132.620.500	492.328.852	43,47
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS NGALIYAN	2.616.090.906	976.808.236	37,34
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS MANGKANG	1.391.869.322	586.769.931	42,16
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KARANGANYAR	1.092.187.440	548.010.018	50,18
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS SEKARAN	1.789.016.460	902.607.897	50,45
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	130.202.322.762	40.385.870.645	31,02
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.409.001.410	3.556.643.770	9,02
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	2.314.612.226	-	-
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	12.300.000.000	244.930.350	1,99
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1.400.000.000	31.986.000	2,28
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.239.849.020	2.500.000	0,08
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	830.135.430	-	-
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.653.427.734	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	7.711.885.000	385.503.220	5,00
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.959.092.000	2.891.724.200	58,31
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	79.055.216.512	32.474.082.488	41,08
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.530.000	8.600.000	22,32
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	96.790.000	10.771.525	11,13
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	96.945.000	10.025.000	10,34
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	47.850.000	-	-
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	40.000.000	11.008.000	27,52
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	65.000.000	16.800.000	25,85
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35.000.000	-	-
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	65.000.000	23.550.000	36,23
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.908.213.000	1.278.516.000	67,00
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	65.000.000	900.000	1,38
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.767.817.609	82.306.798	2,97
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	783.817.850	546.802.488	69,76
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	15.000.000	1.350.000	9,00
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.400.000.000	30.505.500	2,18
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16.837.817.100	698.125.700	4,15
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	68.614.100	12.589.050	18,35
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	150.500.000	39.308.425	26,12
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	140.348.480	15.876.300	11,31
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	24.750.000	13.500.000	54,55
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	210.425.000	84.580.500	40,20
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	107.747.120	-	-
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	45.000.000	15.900.000	35,33
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.679.087.688	1.053.123.140	62,72
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	48.187.458.828	27.838.506.946	57,77
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.420.136.021	300.309.466	21,15
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	857.059.375	161.589.600	18,85
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.227.771.000	52.800.000	4,30
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10.000.000	2.819.900	28,20
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	248.060.000	88.123.900	35,53
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	289.865.400	32.390.000	11,17
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	47.182.941	6.100.000	12,93
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	44.100.000	8.385.000	19,01
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	34.330.000	28.919.250	84,24
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.074.369.600	891.763.658	42,99
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya UPTD Instalasi Farmasi	1.324.369.600	505.209.184	38,15
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya UPTD Laboratorium Kesehatan	750.000.000	386.554.474	51,54
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.671.263.230	443.669.449	26,55
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	238.554.420	66.442.000	27,85
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	906.513.380	361.369.729	39,86

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	526.195.430	15.857.720	3,01
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.992.472.010	3.019.711.280	37,78
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	9.900.000	4.825.000	48,74
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	5.044.962.610	1.438.884.498	28,52
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2.937.609.400	1.576.001.782	53,65
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.372.241.200	245.693.665	17,90
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	410.296.100	79.619.711	19,41
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	21.300.000	5.308.700	24,92
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	59.671.200	27.239.411	45,65
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	329.324.900	47.071.600	14,29
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	961.945.100	166.073.954	17,26
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	961.945.100	166.073.954	17,26
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	653.064.820	234.047.720	35,84
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	230.070.600	119.681.900	52,02
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	230.070.600	119.681.900	52,02
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	261.531.410	39.206.300	14,99
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	261.531.410	39.206.300	14,99
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	161.462.810	75.159.520	46,55
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	161.462.810	75.159.520	46,55
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	901.499.180	137.564.900	15,26
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	134.987.180	21.194.900	15,70
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	134.987.180	21.194.900	15,70
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	766.512.000	116.370.000	15,18
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	766.512.000	116.370.000	15,18
BOK PUSKESMAS		19.769.471.000	5.930.841.300	50,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan

pemerintahan bidang kesehatan, yang terdiri dari 1) program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. 3) program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. 4) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. 5) program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. pada Dinas Kesehatan kota Semarang adalah sebesar Rp. 442.170.313.293 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 189.073.923.074 (42,76%) Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 253.096.390.219 (57,23%)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah. Ini berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta System Kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada **Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026**. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYE KSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup [tahun]		77,38	77,40	77,42	77,44	77,46		77,69	77,69				
Sasaran : Meningkatkan upaya kesehatan yang tercapai (<i>accessible</i>), terjangkau (<i>affordable</i>), dan bermutu	Angka Kematian Bayi [per 1.000 KH]		6,08	6,07	6,06	6,05	6,04		5,60	6,97				
	Angka Kematian Ibu [per 100.000 KH]		71,34	71,33	71,32	71,31	71,30		67,25	87,16				
	Angka Morbiditas [per 1000 penduduk]		11,71	11,21	10,71	10,21	9,71		11,01	12,51				
Sasaran : Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk [per 1000 penduduk]		1,31	1,34	1,37	1,40	1,43		2,60	1,72				

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYE KSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2022
	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar [persentase]		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		100%	45%				
Sasaran : Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Persentase proporsi kelurahan siaga aktifmandiri		22,00 %	22,60 %	23,16 %	23,73 %	24,30 %		22,00 %	47,46 %				
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		72,40	72,45	72,50	72,55	72,60		74,01	74,01				

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan memiliki 1 indikator kinerja yaitu Angka Harapan Hidup[tahun], target 2023 sebesar 77,40 sudah dapat tercapai, dengan realisasi 2023 TW II sebesar 77,69
- b. Sasaran Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Angka Kematian Bayi[per 1.000 KH] target di tahun 2023 adalah 6,07 sedangkan realisasi di TW II sebesar 6,97.
 - 2) Indikator Angka Kematian Ibu [per 100.000 penduduk] target di tahun 2023 adalah 71,33 sedangkan realisasi di TW II sebesar 87,16.
 - 3) Indikator Angka Morbiditas [per 1000 penduduk] target di tahun 2023 adalah 11,21 sedangkan realisasi di TW II sebesar 12,51.
- c. Sasaran Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Indikator Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk[per 1000 penduduk] belum dapat mencapai target 2023 sebesar 1,34, sedangkan realisasi di TW II sebesar 1,72.
 - b. Indikator Persentase proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar belum dapat mencapai target 2023 sebesar 100%, sedangkan realisasi di TW II sebesar 45,00%.
- d. Sasaran Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Indikator Persentase proporsi kelurahan siaga aktif mandiri target di tahun 2023 sebesar 22,60%, sedangkan realisasi di TW II sebesar 47,46%
- e. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Indikator nilai AKIP target di tahun 2023 sebesar 72,45%, sedangkan realisasi di TW II sebesar 74,01%.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kesehatan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)				PROYEKSI		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2022
1	Tersedianya Dokumen Renja	1	1	1	1	1	1	1	1	0				
2	Tersedianya Dokumen RKA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
3	Tersedianya Dokumen RDPPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
4	Tersedianya Dokumen DPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5	Tersedianya Dokumen DPPA Dinas Kesehatan	1	1	1	1	1	1	1	1	0				
6	Tersedianya Dokumen evaluasi seperti : LKJIP, SAKIP, LPPD, SPM, PUG, LKPJ	3	3	3	3	3	3	3	3	0				

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang di bidang kesehatan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan

yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50 %				
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50 %				

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023

Pada tahun 2023 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 50 %; dimana 50 % program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2023 dapat terakomodir. Sehingga di akhir tahun bisa mencapai 100%.

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Kesehatan di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG /TAHUN RKPD)				PREDIKSI			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023 TWII	2024	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usulan	Usulan		38	34			38	34					
2	Usulan yang Terakomodir	Usulan		4	4			4	9					
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	%		10	10			10	25					

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2023 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022) sebesar 10 %.

Disamping itu Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan produktifitas dan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai program baik yang bersifat promotif, preventif maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan.

Pemerintah memprioritaskan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat umum, dengan perhatian khusus kepada warga miskin. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk kurun waktu 2022, yaitu sebagai berikut;

1. Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - a. Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan
 - b. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas & RS
 - c. Pengadaan Alat Kesehatan
2. Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
 - b. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Laboratorium Kesehatan
 - c. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Instalasi Farmasi
 - d. Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas
 - e. Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan
 - f. Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan
 - g. Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - h. Pendistribusian Obat Dan Logistik
 - i. Pengembangan Kemitraan
3. Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat
 - b. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan dan Kemitraan
4. Perbaikan Gizi Masyarakat
 - a. Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin
 - b. Penanggulangan Kurang Energi Protein, Anemi, Gangguan Akibat Kurangyodium
 - c. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

5. Pengembangan Lingkungan Sehat
 - a. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
 - b. Penyehatan Lingkungan
6. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 - a. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
 - b. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
7. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - a. Integrasi JamkesmasKot ke JKN, KIS
 - b. Pendampingan JamkesmasKot
8. Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
 - a. Pembangunan puskesmas pembantu
 - b. Pengadaan sarana prasarana puskesmas
 - c. Rehab Sedang/Berat Puskesmas pembantu
 - d. Rehab Sedang/berat Puskesmas
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - a. Pelatihan Pendidikan Perawatan Anak Balita
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
 - a. Pendidikan Pelatihan Perawatan Kesehatan
11. Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
12. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
 - b. Pembinaan Program Kesehatan Ibu dan KB
13. Informasi Kesehatan
 - a. Manajemen informasi kesehatan.
14. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular
 - a. Pelayanan Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
 - b. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/epidemic
 - c. Peningkatan Imunisasi
 - d. P2 PTM
 - e. Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang
 - f. Pelayanan Pengendalian Penyakit HIV AIDS dan IMS
15. Peningkatan Pelayanan BLUD 37 Puskesmas

Disamping dirumuskan berbagai program utama seperti diatas, terdapat pula program penunjang yang membantu pencapaian berbagai sasaran pembangunan. Program penunjang ini sebelum diberlakukannya Permendagri

59/2007 banyak dikenal sebagai kegiatan rutin bagi operasionalisasi sehari-hari organisasi. Adapun program penunjang adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik
 - c. Penyediaan jasa peralatan perlengkapan
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen listrik
 - i. Penyediaan bhn bacaan & peraturan
 - j. Penyediaan makanan minuman
 - k. Rakor & konsultasi luar daerah
 - l. Rakor & konsultasi dalam daerah
 - m. Penyelesaian pengelolaan administrasi
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung
 - d. Pengadaan peralatan gedung
 - e. Pengadaan mebelair
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
 - j. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan pelatihan formal
 - b. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Penyusunan LKPJ SKPD
 - b. Penyusunan LAKIP
 - c. Penyusunan laporan capaian realisasi kinerja SKPD
 - d. Penyusunan laporan keuangan semester
 - e. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
 - f. Penyusunan Renja SKPD
 - g. Penyusunan RENSTRA SKPD
 - h. Penyusunan RKA dan DPA Perubahan
 - i. Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Kesehatan yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang kesehatan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Kesehatan sebagai penyelenggaran urusan pemerintah di bidang kesehatanyaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2023	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026		
ASPEK KESEHATAN MASYARAKAT																
Fokus Kesehatan																
1	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	0,32%	0,36%	0,37%	0,38%	0,39%	0,40%	0,22	0,32%	0,32%				0,37%	
2	Persentase rumah sakit rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	%		89,65 %	84,38 %	90,60 %	93,70 %	96,80 %		65,63 %	65,63 %				84,38%	
3	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%				100%	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%				100%	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%				100%	
6	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%				100%	
7	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%				100%	
8	Persentase penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	50%				100%	
9	Persentase usia lansia yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%				100%	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	50%				100%	
11	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%				100%	

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2023	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026		
12	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%	50%				100%	
13	Persentase orang terduga tuberculosis mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	100%	50%				100%	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi <i>human immunodeficiency virus (HIV)</i> mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,72%	100%	50%				100%	
15	Angka kematian ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	23 kasus	71,33	71,32	71,31	71,30	71,34	21 kasus	67,25	37,50				74,89	
16	Angka kematian bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	181 kasus	6,08	6,07	6,06	6,05	6,04	133 kasus	5,60	3,50				6,93	
17	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup (AKABA)	Angka kematian balita (AKABA) per 1000 kelahiran hidup	7,56	6,90	6,88	6,86	6,84	7,00	6,95	6,00	4,03				8,06	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023

*Data Sementara

** Data Sangat Sementara

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan Program KIA

- a. Pelaksana sistem rujukan kurang optimal;
- b. Kebutuhan sarpras Puskesmas terkait kegawatan maternal neonatal

belum maksimal;

- c. Komunikasi dan koordinasi antar Jejaring fasyankes kurang optimal;
- d. Screening faktor risiko atau komplikasi bumil, bumil, bufas dan bayi baru lahir kurang optimal dikarenakan adanya pandemi covid;
- e. Analisa hasil pemeriksaan ibu hamil belum optimal sehingga berdampak pada kelangsungan hidup bayi;
- f. Penanganan kegawatandaruratan maternal dan neonatal belum sesuai standar;
- g. Pelayanan kesehatan bayi dan balita kurang optimal pada masa pandemi dikarenakan pelayanan Posyandu tidak aktif dan kunjungan ke Puskesmas menurun.

2. Permasalahan terkait pencapaian standar pelayanan minimal bidang Kesehatan

- a. Permasalahan pelayanan kesehatan lansia dikarenakan Jumlah posyandu lansia yang terbatas;
- b. FKTP puskesmas belum maksimal sebagai fungsi UKM (upaya Kesehatan masyarakat).

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Pola asuh orang tua terhadap asupan anak yang belum baik.
- 2) Adanya informasi yang kontradiktif dengan kesehatan terutama tentang kesehatan Ibu dan Anak.
- 3) Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang cepat dan lingkungan yang nyaman di Puskesmas

b. Peluang

- 1) Adanya program pemerintah pusat dalam pemenuhan upaya kesehatan masyarakat yang mencakup pendampingan dan pelayanan terhadap Ibu hamil dan pasca melahirkan
- 2) 37 Puskesmas Kota Semarang semuanya berstatus BLUD yang artinya puskesmas bisa meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
- 3) Terdapat program DAYCARE RUMAH PELANGI Rumah Penanganan Stunting Lintas Sektoral Bagi Baduta

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam

meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Semarang sebagai berikut :

- 1) Angka prevalensi stunting
- 2) Angka Kematian Bayi
- 3) Angka Kematian Balita
- 4) Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Kesehatan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 8
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				465.949.963.557	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				465.949.963.557	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredainya sarana prasarana perkantoran OPD	100 %	291.166.249.644	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, teredainya sarana prasarana perkantoran OPD	100 %	291.166.249.644	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100 %	39.396.080	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	100 %	39.396.080	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	420 Dokumen	6.108.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	420 Dokumen	6.108.800	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	15 Dokumen	8.188.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	15 Dokumen	8.188.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	8.734.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	8.734.400	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	4 Dokumen	2.940.820	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	4 Dokumen	2.940.820	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.486.720	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3.486.720	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 Laporan	9.936.840	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 Laporan	9.936.840	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	100 %	198.669.728.850	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	jumlah dokumen laporan keuangan	100 %	198.669.728.850	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.614 Orang/bulan	198.120.852.850	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.614 Orang/bulan	198.120.852.850	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	538.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	538.760.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.372.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.372.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	2 Laporan	3.372.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	2 Laporan	3.372.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.372.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.372.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	3.948.579.183	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	3.948.579.183	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.091.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	23.091.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	93.456.770	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	93.456.770	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	196.736.940	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	196.736.940	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.630.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.630.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	1.128.720.363	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan	1.128.720.363	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan	5 Dokumen	2.502.944.110	Dukungan Pelaksanaan Sistem	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan	5 Dokumen	2.502.944.110	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	2.610.405.156	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	2.610.405.156	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	2.610.405.156	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	2.610.405.156	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	3.134.564.194	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	3.134.564.194	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	795.574.384	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	795.574.384	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.338.989.810	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	2.338.989.810	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	4.108.133.624	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	4.108.133.624	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 unit	226.572.720	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 unit	226.572.720	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			dibayarkan Pajaknya			Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 unit	2.038.703.580	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	150 unit	2.038.703.580	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	740.912.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	740.912.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	1.018.730.124	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	1.018.730.124	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	83.215.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	umlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	83.215.000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100 %	78.655.442.557	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Semarang	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100 %	78.655.442.557	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	169.792.543.323	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kota Semarang	Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	169.792.543.323	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai stand	100 %	45.580.931.033	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai stand	100 %	45.580.931.033	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Semarang	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	2.314.612.226	Pengembangan Rumah Sakit	Kota Semarang	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	2.314.612.226	
	Pengembangan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	12.310.081.194	Pengembangan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	12.310.081.194	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	8 Unit	2.729.350.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	8 Unit	2.729.350.000	
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	4.900.024.490	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	4.900.024.490	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	1.467.966.690	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	1.467.966.690	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	20 Unit	9.947.345.321	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	20 Unit	9.947.345.321	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kesehatan yang Disediakan					Kesehatan yang Disediakan			
	Pengadaan Obat, Vaksin	Kota Semarang	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	32 Paket	6.952.459.112	Pengadaan Obat, Vaksin	Kota Semarang	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	32 Paket	6.952.459.112	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 %	114.508.813.930	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 %	114.508.813.930	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.388 Orang	3.136.914.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kota Semarang	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24.388 Orang	3.136.914.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.023 Orang	93.951.520	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kota Semarang	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.023 Orang	93.951.520	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.453 Orang	93.212.750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kota Semarang	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22.453 Orang	93.212.750	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100.828 Orang	763.702.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kota Semarang	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100.828 Orang	763.702.500	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227.547 Orang	1.084.941.885	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227.547 Orang	1.084.941.885	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	1.125.431 Orang	568.301.892	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	1.125.431 Orang	568.301.892	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kesehatan Sesuai Standar					Kesehatan Sesuai Standar			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	606.388.177	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kota Semarang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	152 Orang	606.388.177	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290.912 Orang	58.925.918	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kota Semarang	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290.912 Orang	58.925.918	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40.623 Orang	1.887.629.333	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kota Semarang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40.623 Orang	1.887.629.333	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4.203 Orang	195.946.863	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4.203 Orang	195.946.863	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29.003 Orang	3.033.689.644	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	29.003 Orang	3.033.689.644	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35.699 Orang	899.826.212	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kota Semarang	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	35.699 Orang	899.826.212	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	12.330.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	12.330.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	150 Dokumen	36.820.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	150 Dokumen	36.820.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	148 Dokumen	21.638.471.203	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	148 Dokumen	21.638.471.203	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37 Dokumen	923.402.820	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37 Dokumen	923.402.820	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	743.259.190	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	743.259.190	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37 Dokumen	859.739.897	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37 Dokumen	859.739.897	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	3 Dokumen	22.275.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	3 Dokumen	22.275.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	591.002.746	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	591.002.746	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Semarang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	107.747.120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kota Semarang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	107.747.120	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	235 Orang	111.140.745	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	235 Orang	111.140.745	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	4.187.481.368	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	4.187.481.368	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	64.178.066.703	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	64.178.066.703	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Semarang	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	36 Paket	12.025.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kota Semarang	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	36 Paket	12.025.000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil	10 Dokumen	955.847.446	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil	10 Dokumen	955.847.446	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	3.771.393.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	3.771.393.000	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.478.189.583	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	2.478.189.583	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	123 Unit	704.762.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	123 Unit	704.762.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	27.937.500	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	27.937.500	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dokumen	192.024.664	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dokumen	192.024.664	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Semarang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	256.210.310	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Semarang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	256.210.310	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	27.520 Orang	173.185.941	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Kota Semarang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	27.520 Orang	173.185.941	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			kesehatan sesuai standar					kesehatan sesuai standar			
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35.699 Orang	39.487.500	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Kota Semarang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35.699 Orang	39.487.500	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	58 Orang	62.583.500	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Kota Semarang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	58 Orang	62.583.500	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 %	2.246.979.986	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Kota Semarang	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 %	2.246.979.986	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10 Dokumen	550.271.176	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10 Dokumen	550.271.176	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	900.513.380	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	900.513.380	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kota Semarang	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	21 Unit	796.195.430	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kota Semarang	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	21 Unit	796.195.430	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	7.455.818.374	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	7.455.818.374	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	rasio sarana kesehatan yang mengajukan ijin operasional	32%	9.900.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kota Semarang	rasio sarana kesehatan yang mengajukan ijin operasional	32%	9.900.000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan	55%	4.650.918.374	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kota Semarang	persentase tingkat kemandirian III keluarga binaan	55%	4.650.918.374	
	prosentase respon time ambulan hebat kota semarang	Kota Semarang	umlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	2.795.000.000	prosentase respon time ambulan hebat kota semarang	Kota Semarang	umlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	2.795.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	1.485.198.133	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kota Semarang	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	1.485.198.133	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	100 %	455.983.803	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	100 %	455.983.803	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	17.925.000	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	17.925.000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	333 Orang	59.671.200	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	333 Orang	59.671.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kesehatan (Fasyankes)					Kesehatan (Fasyankes)			
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	378.387.603	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	378.387.603	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	1.029.214.330	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	1.029.214.330	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	1.029.214.330	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	1.029.214.330	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	100 %	580.319.892	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kota Semarang	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	100 %	580.319.892	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100 %	219.373.405	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100 %	219.373.405	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	118 Dokumen	219.373.405	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha	118 Dokumen	219.373.405	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	231.207.824	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	231.207.824	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	360 Dokumen	231.207.824	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	360 Dokumen	231.207.824	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	129.738.663	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Semarang	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	129.738.663	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	100 Unit	129.738.663	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka	100 Unit	129.738.663	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Tindak Lanjut Pengawasan					Tindak Lanjut Pengawasan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	2.925.652.565	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kota Semarang	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	2.925.652.565	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100 %	125.679.680	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100 %	125.679.680	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	125.679.680	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	125.679.680	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100 %	2.799.972.885	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100 %	2.799.972.885	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	148 Dokumen	2.799.972.885	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	148 Dokumen	2.799.972.885	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Kesehatan Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Kesehatan Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi dan Pembinaan PMT bagi Posyandu	Pedurungan			Dapat diakomodir

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kota Semarang, antara lain:

- a. **Melakukan koordinasi dengan semua lintas sector berkaitan dengan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Semarang untuk melakukan pemantauan dan juga pemberantasan jentik nyamuk (PJN) secara serentak di seluruh Kota Semarang. Selain pengasapan atau fogging.**

Tanggapan :

Dinas kesehatan telah melakukan koordinasi dengan lintas sektor melalui POKJANAL DBD Kota Semarang. Selain itu juga telah dilakukan pembuatan Surat Edaran Walikota No. B/6228/443.42/XII/2021 mengenai Kewaspadaan peningkatan kasus Dengue. Dinas Kesehatan juga telah membuat Surat Edaran Sekda No. 443.42/338 mengenai kewaspadaan infeksi dengue melalui pelaksanaan pemantauan jentik nyamuk (PJN) di seluruh OPD yang ada di Kota Semarang. Seluruh kegiatan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya.

- b. Program vaksinasi untuk masyarakat juga minta lebih diintensifkan dengan kewajiban vaksin diberikan pada usia diatas 50 tahun dan anak-anak usia sekolah, karena sekarang ini kewajiban pada masyarakat berusia lansia banyak yang tidak berjalan optimal karena seperti kita ketahui bahwa masyarakat lansia banyak yang takut vaksin dan banyak faktor kesehatannya sudah menurun dsb. Oleh karena itu, pemerintah kota semarang untuk bisa menurunkan batasan usia vaksin pada masyarakat, minimal bisa diusulkan kepada gugus depan penanganan covid-19 ini agar program vaksin covid 19 lebih berjalan efektif.**

Tanggapan :

Pelaksanaan Vaksin Covid-19 sampai saat ini dr Dinas Kesehatan Kota Semarang tetap dilakukan setiap harinya baik oleh Puskesmas dan RS layanan vaksinasi Covid-19.

Untuk sentra vaksin saat ini masih ada di tentrem mall, Poltekkes Semarang dan Rumah Dinas Walikota yg melayani 24 jam selama 7 hari.

Selain itu untuk menggerakkan masyarakat untuk booster dilakukan koordinasi lintas sektor beserta pemangku wilayah untuk layanan door to door dan juga layanan vaksinasi di tingkat RW serta kelurahan.

Korrdinasi linsek juga kita lakukan dalam kolaborasi event dimasyarakat, baik yg berhubungan dengan hiburan ataupun dengan kegiatan sosial

Untuk capaian layanan vaksinasi kota Semarang per 14 September 2022 sebanyak 3.918.487 dengan rincian

Dosis 1 : 1.655.527

Dosis 2 : 1.514.220

Dosis 3 : 735.324

Dosis 4 : 13.416

- c. Perlu terus mengedukasi masyarakat perihal pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kesehatan dan keluarga.**

Tanggapan :

Mengadakan kegiatan Edukasi kepada Masyarakat melalui kegiatan “Lawangsewu” Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu yang di lakukan pada :

- 37 Puskesmas Se Kota Semarang dgn dukungan 42 Orang

- Di TTU yang ada di Kota Semarang setiap 2 Minggu Sekali Edukasi melalui Media Elektronik dan Media KIE

- d. Peningkatan kualitas kesehatan bagi warga tidak mampu dan pada program kematian ibu hamil yang akan melahirkan di wilayah Tanggungrejo, Tambakrejo, dan Gayamsari.**

Tanggapan :

Dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), upaya yang telah dilakukan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Edukasi kepada ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan deteksi dini tanda bahaya kehamilan
 2. Pendampingan ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan
 3. Pemeriksaan ANC sesuai standart
 4. Penunjukan Puskesmas PONEC (Obstetri Neonatal Emergency Dasar) dan RS PONEK (Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif). Di wilayah Kecamatan Gayamsari terdapat RS PW Citarum, RSWN, RS PW Dr. Cipto
 5. Pengajuan UHC bagi ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan
 6. RAISA (Rawat ibu bersalin secara GRATIS)
- e. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya gerakan masyarakat hidup sehat (Germas), dengan demikian diharapkan bisa menekan keberadaan penyakit non infeksius atau penyakit tidak menular yang memang harus diwaspadai.**

Tanggapan :

Mengadakan kegiatan Edukasi Germas Masyarakat melalui kegiatan

1. “Lawangsewu” Layanan Warga Semarang Sehat Setiap Waktu
2. Melakukan Kegiatan Kesorga (Kesehatan Olah Raga) di 37 Puskesmas dengan meliputi kelompok kelompok Kebugaran olah raga yang ada di wilayah 37 Puskesmas

Gemar Makan Buah dan sayur Mengadakan kegiatan Edukasi kepada Masyarakat melalui kegiatan “Lawangsewu”

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah pada Pemkot Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.

- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
- 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.

- 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.

- 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan”,

dengan indikator tujuan **“persentase capaian indikator tujuan bidang kesehatan pada RPJMD Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kesehatan Kota Semarang yaitu **“Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu;
2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya Kesehatan;
3. Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,40
SASARAN : Meningkatkan upaya Kesehatan yang tercapai (<i>accessible</i>), terjangkau (<i>affordable</i>), dan bermutu	Angka Kematian Ibu	Per 1.000 KH	6,07
	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	71,33
	Angka Morbiditas	Per 1.000 pddk	11,21
SASARAN : Meningkatkan kapasitas sumber daya Kesehatan	Rasio tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk	Per 1.000 pddk	1,34
	Proporsi pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	Persentase	100
Sasaran : Meningkatkan keberdayaan (mampu) dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan	Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri	Persentase	22,60
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Kesehatan bertugas “Aspek Kesehatan Masyarakat” dengan 17 indikator. Namun secara khusus, Dinas Kesehatan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Angka Harapan Hidup”** dan indikator sasaran “Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 4 program penunjang, dan 1 program pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 18 kegiatan, yang terdiri dari 17 kegiatan penunjang, dan 1 kegiatan pembangunan. Kegiatan tersebut meliputi 1 unit Pembangunan Puskesmas, 2 unit Rehabilitas Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Induk dan 1 unit Puskesmas yang direhabilitasi.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 378.496.560.319, yang bersumber dari dana APBD Kota dan pendapatan BLUD, dengan perincian:

- a. Rp. 369.556.711.299 untuk program dan kegiatan penunjang.
- b. Rp. 8.939.849.020 untuk program dan kegiatan pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Semarang

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja2023	APBDDTA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					378,496,560,319	442.170.313.293	465.949.963.557		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					289,271,714,331	289.271.714.331	291.166.249.644		
		persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD, Pelaporan Keuangan OPD, terdianya sarana prasarana perkantoran OPD	100 %	100 %	100 %				APBD Kota Semarang	
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	39,396,080	39.396.080	39.396.080	APBD Kota Semarang	-
1.02.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	204,715,879,769	204,715,879,769	198.669.728.850	APBD Kota Semarang	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	2,779,648,725	2,779,648,725	3.948.579.183	APBD Kota Semarang	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	989,443,028	989,443,028	2.610.405.156	APBD Kota Semarang	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	100 %	3,868,971,484	3,868,971,484	3.134.564.194	APBD Kota Semarang	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD	100 %	100 %	100 %	3,874,411,300	3,874,411,300	4.108.133.624	APBD Kota Semarang	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas	100 %	100 %	100 %	73,003,963,945	73,003,963,945	78.655.442.557	APBD Kota Semarang	
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Layanan Standar Pelayanan	100 %	100 %	100 %	88,575,474,788	130.202.322.762	169.792.543.323	APBD Kota Semarang	

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja2023	APBDDA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar								
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standa	100 %	100 %	100 %	20,678,594,236	39.409.001.410	45.580.931.033	APBD Kota Semarang	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	100 %	100 %	100 %	58,233,145,312	98.861.817.112	114.508.813.930	APBD Kota Semarang	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase faskes (Puskesmas, RS) yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	1,671,263,230	1.671.263.230	2.246.979.986	APBD Kota Semarang	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	7,992,472,010	7.992.472.010	7.455.818.374	APBD Kota Semarang	
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	2,937,609,400	1.372.241.200	1.485.198.133	APBD Kota Semarang	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persentase keterpenuhinya kebutuhan SDM	100 %	100 %	100 %	167,698,100	410.296.100	455.983.803	APBD Kota Semarang	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDM yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan	100 %	100 %	100 %	126,223,100	961.945.100	1.029.214.330	APBD Kota Semarang	

KodeRekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator KinerjaProgram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja2023	APBDA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar	98 %	98 %	98 %	250,000,000	653.064.820	580.319.892	APBD Kota Semarang	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	cakupan pemberian izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional	100 %	100 %	100 %	74,141,530	230.070.600	219.373.405	APBD Kota Semarang	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	100 %	100 %	100 %	109,139,230	261.531.410	231.207.824	APBD Kota Semarang	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga	100 %	100 %	100 %	66,719,240	161.462.810	129.738.663	APBD Kota Semarang	
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100 %	100 %	100 %	105,450,000	901.499.180	2.925.652.565	APBD Kota Semarang	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral	100 %	100 %	100 %	70,450,000	134.987.180	125.679.680	APBD Kota Semarang	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina	100 %	100 %	100 %	35,000,000	2.803.752.000	2.799.972.885	APBD Kota Semarang	

BABV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Kesehatan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Kesehatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

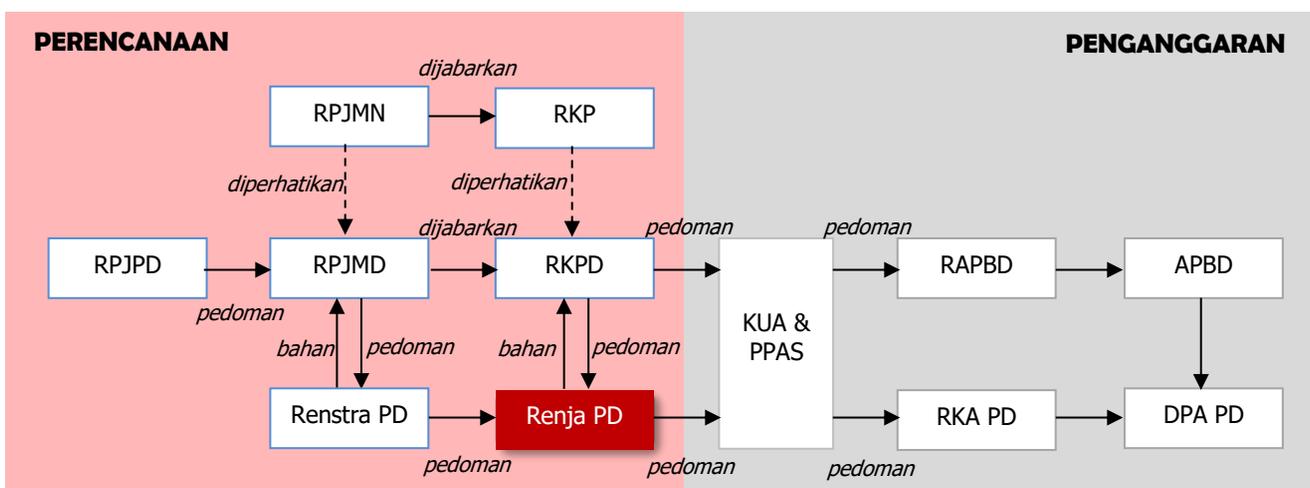
3. RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
 - q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - r. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, isu - isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Pengembangan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
	Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:100							
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (9/4)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Sumber : RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang, 2023

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Triwulan II Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Presentase (%)
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	430.185.342.483	161.841.726.247	37,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	372.026.217.101	159.098.813.035	42,77
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.986.675.631	34.322.734.756	59,19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.938.675.631	34.295.084.756	41,97
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.400.00	27.650.000	44,69
Peningkatan Pelayanan BLUD	314.040.141.470	129.180.063.108	41,13
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	314.040.141.470	129.180.063.108	41,13
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	58.159.125.382	2.742.913.212	4,7
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	58.159.125.382	2.742.913.212	4,7
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	50.000.000.000	2.235.813.212	4,47
Pengembangan Rumah Sakit	1.634.444.460	0	0
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang	6.524.649.644	507.100.000	7,77

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro kota Semarang adalah sebesar Rp 430.185.342.483,- . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 161.841.726.247,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 268.343.616.236,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Penyelenggaraan rencana dan program kerja dibidang pelayanan kesehatan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota

Semarang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI					PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2022 Tw II	2023	2024	2025	2026	2022
Tujuan												
Meningkatkan Kualitas Kinerja Layanan RS	Terwujudnya pelayanan prima di RSD											
Sasaran												
Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	91,34	97,00				
Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM	Nilai Kinerja BLUD Baik	AA (83,50)	AA (84,00)	AA (84,50)	AA (85,00)	AA (85,50)	AA (83,00)	AA (87,5)				
Meningkatkan sarana dan prasarana	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	50,00	50,00				

Sumber : Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro tahun 2022 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan Kualitas Kinerja Layanan RS” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Terwujudnya pelayanan prima di RSD”.
- b. Sasaran “Meningkatkan Nilai Kepuasan Pelanggan” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS” target sebesar 97,00 %, dengan realisasi sebesar 97,00 % (capaian Triwulan II);
 - 2) Indikator “Nilai Kinerja BLUD Baik” target sebesar 84,00 %, dengan realisasi sebesar 87,5 % (capaian Triwulan II);
 - 3) Indikator “Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran” target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 50 % (capaian triwulan II).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penambahan alat medis, bahan habis pakai, dan perbekalan farmasi.
- b. Penambahan SDM dengan merekrut tenaga keperawatan baru dan tenaga sukarela.
- c. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengadakan pelatihan.
- d. Pengembangan / pembangunan gedung pelayanan kesehatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi bidang kesehatan diantaranya :

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Keterbatasan Dana

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan :
 - Sistem rujukan berjenjang yang berakibat kunjungan pasien menurun Rumah sakit kelas B sebaiknya memang menjadi tempat rujukan dari sistem pelayanan rujukan rumah sakit tipe C. Adanya kebijakan rujukan berjenjang membuat pasien tidak bisa langsung datang ke Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang karena harus melalui rujukan dari Rumah Sakit tipe C.
 - Adanya Rumah Sakit baru disekitar Rumah Sakit K.R.M.T Wongsonegoro Beroperasinya RS. Primaya dan RS Gigi dan Mulut Unimus yang memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu

layanan menyebabkan tantangan tersendiri untuk Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro.

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang belum memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan

Dengan adanya standar baru sarana dan prasarana yang tercantum pada Peraturan menteri Kesehatan No. 8 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Penataan kondisi rawat inap di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro belum sesuai dengan standard yang baru.

- Ditetapkannya RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai rumah sakit strata madya untuk pelayanan prioritas

Pada tahun 2023, RSD K.R.M.T. Wongsonegoro ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit untuk pelayanan pritoritas, yaitu: Kanker, Kardiovaskular, Stroke, Uronefrologi, Kesehatan Ibu dan Anak, Respirasi dan Tuberkulosis, serta Diabetes Melitus.

- Teknologi yang terus berkembang semakin cepat
Teknologi alat kesehatan semakin berkembang dan canggih membuat Rumah Sakit Daerah harus megikuti perkembangan tersebut.
- Teknologi informasi yang mengutamakan percepatan dalam pelayanan.
Adanya era digitalisasi menuntut Rumah Sakit Daerah untuk meningkatkan keterampilan SDM serta meningkatkan sarana prasarana teknologi informasi.

b. Peluang

- Adanya dukungan (anggaran) Pemerintah Kota Semarang untuk BLUD.
Komitmen dari Pemerintah Kota Semarang untuk mendukung subsidi anggaran kepada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro yang menerapkan BLUD tetap ada dan kontinyu setiap tahun.
- Lingkungan geografi dan demografi yang strategis
- Letak Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro terletak pada posisi yang strategis dan mudah dijangkau dari arah manapun.

Aksesibilitas:

- Mudah dicapai dari berbagai arah;
 - Kondisi jalan baik;
 - Dilewati jalur angkutan umum.
- Ditetapkannya Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama Universitas Wahid Hasyim.
 - Lokasi RS berada di wilayah Pengembangan Pemukiman baru yang berkembang
 - Peningkatan jumlah pasien stroke memungkinkan dibangunnya Unit Stroke Center dengan alasan penyakit stroke karena hipertensi termasuk dalam 10 besar penyakit di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro.

- Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas.
- Adanya permendagri 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis PPK-BLUD.
- Jumlah dan jenis tenaga medis dan paramedis yang cukup dan lengkap.
- Tersedianya alat-alat kesehatan yang canggih.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis :

a. Menurunkan angka kematian

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB) masih menjadi masalah yang aktual di Jawa Tengah (AKI 2017:88,58/100.000 KH; AKB 2017: 8,93/1.000 KH) meskipun angka ini sudah lebih baik dibanding target nasional (AKI:226/100.000 KH; AKB:24/1.000 KH).

Rumah Sakit PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal secara komprehensif dan terintegrasi 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu dan sangat berperan dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pelaksanaan RS PONEK memerlukan prasarana dan sarana yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan sumber daya manusia juga harus diperhatikan dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan sehingga Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro menjadi tempat rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawat daruratan ibu dan bayi.

Pada tahun 2022, ISPA / Acute Upper Respiratory Infection, Bronchopneumonia, dan Stroke termasuk dalam daftar 10 Penyakit Besar berdasarkan diagnosa di Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Pelayanan Cancer (Kanker) di tahun 2022 mengalami kenaikan pasien yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 2.259 pasien di rawat jalan dan 466 di rawat inap. Dengan data tersebut dan telah ditunjuknya RSD K.R.M.T. Wongsonegoro sebagai Rumah Sakit dengan pelayanan unggulan, maka RSD K.R.M.T. Wongsonegoro berfokus untuk meningkatkan pelayanan dengan cara memenuhi sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Meningkatkan kinerja layanan kesehatan rumah sakit.

Nilai kinerja rumah sakit BLU pada 2022 masih bernilai skor 87,5 yang artinya bahwa Rumah Sakit dikategorikan Baik dengan Nilai AA.

Salah satu unsur penilaian kinerja BLU rumah sakit adalah nilai kinerja pelayanan. Beberapa variabel indikator dalam mutu pelayanan masih mempunyai nilai yang belum maksimal. Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi baik melalui jalur akademik maupun non akademik sangat diperlukan. Disamping itu kemajuan teknologi kesehatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan teknologi kesehatan juga harus dipersiapkan.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pelayanan public maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Permenpan No. 14 Tahun 2017 menyebutkan bahwa SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang merupakan penyelenggara pelayanan publik, sehingga wajib melakukan SKM.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat. Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang biasanya melakukan SKM setiap 6 bulan sekali.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				518.847.830.493	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				518.847.830.493	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tembalang, Mangunharjo, Kota Semarang.	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	390.068.561.234	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tembalang, Mangunharjo, Kota Semarang.	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	390.068.561.234	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%		
1.02.0..2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	57.564.735.646	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	57.564.735.646	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	551 Orang / Bulan	57.517.335.646	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	551 Orang / Bulan	57.517.335.646	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	47.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	47.400.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	332.503.825.588	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD	100%	332.503.825.588	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	332.503.825.588	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	332.503.825.588	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	100%	128.779.269.259	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit	100%	128.779.269.259	
			Penembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%				Penembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	128.779.269.259	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	128.779.269.259	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100%				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100%		
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah	1 Unit	50.000.000.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	50.000.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penduduk Minimal 1:1000								
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1.634.449.220	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1.634.449.220	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	29 Unit	77.144.820.039	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	29 Unit	77.144.820.039	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

- 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.

- 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.

- 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

- 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima”,

dengan indikator tujuan “Meningkatkan Nilai Kinerja BLUD Rumah Sakit”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang yaitu **“Terwujudnya pelayanan Kesehatan Prima”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Type B Pendidikan
- b. Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS;
- c. Nilai Kinerja BLUD Baik.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Rumah Sakit Daerah

K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima	Pemenuhan Saranan dan Prasaranan RS Type B Pendidikan	100%
	Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	97,00
	Nilai Kinerja BLUD Baik	84,00

Sumber : RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro bertugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu, upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan (preventif) serta melaksanakan upaya rujukan. Namun secara khusus, Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima”** dan indikator sasaran **“Meningkatkan Kinerja RS BLUD”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					425.167.163.028	425.167.163.028	518.847.830.493		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD	100%	100%	100%	372.026.217.101	372.026.217.101	390.068.561.234	APBD, DBH CHT, DAK, dan BLUD	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%					
1.02.0..2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Rumah Sakit	100%	100%	100%	57.986.075.631	57.986.075.631	57.564.735.646		
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	500 Orang / Bulan	500 Orang / Bulan	551 Orang / Bulan	57.938.675.631	57.517.335.646	57.517.335.646	APBD	
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	47.400.000	47.400.000	47.400.000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100%	100%	100%	314.040.141.470	314.040.141.470	332.503.825.588		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	314.040.141.470	314.040.141.470	332.503.825.588	BLUD	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100%	53.140.945.927	53.140.945.927	128.779.269.259	APBD, DBH HCT, DAK	
		Penembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	100%					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit	100%	100%	100%	53.140.945.927	53.140.945.927	128.919.269.259		
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rumah Sakit	100%	100%	100%					
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi RasioTempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	APBD	Pembangunan Gedung Rawat Inap 12 Lantai Tahap 1
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.634.449.220	50.000.000.000	1.634.449.220		Pembangunan Gedung IGD Terpadu Tahap 2
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	29 Unit	1.506.496.707	1.506.496.707	77.144.820.039	APBD,DBHC HT,DAK	Pengadaan Alat Kesehatan
JUMLAH						425.167.163.028	425.167.163.028	518.847.830.493		

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro;
3. Penyusunan Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dalam hal ini Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah dan merupakan dokumen secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara arti strategis dokumen Perubahan Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja PD mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD. Sehingga penyusunan Perubahan Renja PD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan perubahan RKPD, dengan melihat kondisi terkini

dari PD, evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang

- Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 32);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPU KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPU KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Perubahan Renja DPU Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPU KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan DPU Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kualitas penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Perubahan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra OPD sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp 407.789.139.075. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 375.321.769.229 atau sebesar 92,04%.

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang**

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM								
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob		97,57%	97,57%	97,57%	97,86%	97,57	
<i>1.03.02.2.01</i>	<i>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir</i>		<i>95,61%</i>	<i>95,61%</i>	<i>95,61%</i>	<i>96,17</i>	<i>95</i>	
		Review DED Pembangkit Listrik Tenaga Air (Gondoriyo dan Kedung Gandul)		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen			
<i>1.03.02.2.01.01</i>	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun					1.00 dokumen	1.00 dokumen	
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	10 Unit	10 Unit	
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi					1 unit	1 unit	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang					1 km	1 km	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Dinormalisasi/Direstorasi							
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	2 unit	2 unit	
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah barat		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1 unit	1 unit	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah I		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1 unit	1 unit	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah II		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1 unit	1 unit	
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah timur		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1 unit	1 unit	
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1 unit	1 unit	
1.03.02.2.02	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.</i>		81,80%	81,80%	81,80%	83	83	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan	Dokumen Database Irigasi		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Rawa								
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.		79.00 persen	79 persen	79.00 persen	2.3km	2.3km	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		64,00%	64,00%	64,00%	65	64	
1.03.06.2.01	<i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai</i>		98,64%	98,64%	98,64%	99,17	98	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan		2.00 Kegiatan	2 Kegiatan	2.00 Kegiatan	5 dokumen	5 dokumen	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Peningkatan saluran drainase perkotaan		5.00 lokasi	5 lokasi	5.00 lokasi	3829km	3829km	
		Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan Talud Kali Semarang)		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan			
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	2727 m	2727 m	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan		74,13%	74,13%	74,13%	74,5	74,15	
1.03.10.2.01	<i>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</i>		86,98%	86,98%	86,98%	87,48	92,52	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
		Pembangunan Akses		1.00	1	1.00			

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Penyusunan AMDAL/UKL-UPL)		dokumen	dokumen	dokumen			
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan					3000m2	3000m2	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan		2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	jumlah data survey dan kondisi jalan		2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli UNDIP (Pekerjaan Konstruksi)		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	7 km	7 km	
		Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan			
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan					0.5 km		
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi					1.4km		
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala(UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum)					5.3 km		
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Operasi Pemeliharaan jalan		167.00 km	167 km	167.00 km	4 km		
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Revitalisasi Semarang Lama Kampung Melayu (Pembangunan jembatan Kampung Melayu)		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan			
1.03.10.2.01.12	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian					15m		
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Operasi Pemeliharaan Jembatan		1.00 unit	1 unit	1.00 unit	50m		

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan		1.00 Jenis	1 Jenis	1.00 Jenis	1 dokumen	1 dokumen	
		Jumlah Alat Pengujian yang terawat		1.00 Jenis	1 Jenis	1.00 Jenis			
		Jumlah Alat Pengujian yang terkalibrasi		14.00 Jenis	14 Jenis	14.00 Jenis			
		Jumlah dokumen sertifikasi dan akreditasi serta dokumen pendukungnya		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen			
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Diklat Pegawai Teknis Pendukung Kinerja		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan			
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU		100,00%	100,00%	100,00%	100	100	
		Persentase kinerja adminstrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU		100,00%	100,00%	100,00%	100	100	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU		100,00%	100,00%	100,00%	100	100	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU		100,00%	100,00%	100,00%	100	100	
<i>X.XX.01.2.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD		2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen		1.00	1	1.00	1 dokumen	1 dokumen	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD		dokumen	dokumen	dokumen			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 laporan	1 laporan	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 laporan	1 laporan	
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</i>		100,00%	100,00%	100,00%	100	100	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan		100.00 persen	100 persen	100.00 persen	113 orang/bulan	113 orang/bulan	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas		100.00 persen	100 persen	100.00 persen	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 laporan	1 laporan	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran		2.00 dokumen	2 dokumen	2.00 dokumen	2 laporan	2 laporan	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		100,00%	100,00%	100,00%	100	100	
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.00 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Dokumen		1.00	1	1.00	1 laporan	1 laporan	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		dokumen	dokumen	dokumen			
X.XX.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		100,00%	100,00%	100,00%	100	100	
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai		5.00 Kegiatan	5 Kegiatan	5.00 Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		100.00 skor 1-100	100 skor 1-100	100.00 skor 1-100	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD</i>		100,00%	100,00%	100,00%	100	100	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	umlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		50.00 Jenis	50 Jenis	50.00 Jenis	50 paket	50 paket	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan		25.00 Jenis	25 Jenis	25.00 Jenis	30 paket	30 paket	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan		100.00 Jenis	100 Jenis	100.00 Jenis	100.00 Jenis	100 Jenis	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.00 Jenis	5 Jenis	5.00 Jenis	5 Dokumen	5 Dokumen	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu		125.00 Orang	125 Orang	125.00 Orang	1 laporan	1 laporan	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		40.00 Kegiatan	40 Kegiatan	40.00 Kegiatan	40 laporan	40 laporan	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Akselerasi pelaksanaan SPBE		1.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1.00 Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	
X.XX.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>		100,00%	100,00%	100,00%	100	100	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel perkantoran yang disediakan		10.00 Jenis	10 Jenis	10.00 Jenis	20 unit	20 unit	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
				Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia		100.00 persen	100 persen	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor		100.00 persen	100 persen	100.00 persen	1 laporan	1 laporan	
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Aset SKPD</i>		100,00%	100,00%	100,00%	100	100	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan yang disediakan		4.00 Jenis	4 Jenis	4.00 Jenis	100 Unit	100 Unit	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara		5.00 Jenis	5 Jenis	5.00 Jenis	300 Unit	300 Unit	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		10.00 Jenis	10 Jenis	10.00 Jenis	200 Unit	200 Unit	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi		1.00 Jenis	1 Jenis	1.00 Jenis	10 Unit	10 Unit	
JUMLAH									

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, dengan 4 Program dan 6 Indikator Kinerja Program dan 12 Kegiatan dengan 12 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 7 Indikator kinerja program, sejumlah 7 indikator berhasil memenuhi target
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, dengan 4 Program dan 7 Indikator Kinerja Program dan 12 Kegiatan dengan 12 Indikator kinerja kegiatan
 - b) Dari 7 Indikator kinerja program, sejumlah 7 indikator masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Rp		
		Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
DINAS PEKERJAAN UMUM				

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Rp		
		Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.740.116.478	30.585.407.930	96,36
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.000.000	41.722.250	99,34
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.952.000	99,68
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	1.962.000	98,10
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.488.000	99,52
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	2.975.750	99,19
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.500.000	4.425.500	98,34
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.954.000	98,08
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.965.000	99,65
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.742.491.534	16.095.178.955	96,13
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.545.889.374	15980.811.155	96,58
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	190.230.000	108.000.000	56,77
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.633.600	1.629.800	99,77
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.369.280	2.369.000	99,99
02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.369.280	2.369.000	99,99
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.959.900	7.340.250	81,92
03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.479.950	4.430.250	98,89
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.479.950	2.910.000	64,96
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.806.080	-	0,00
05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.867.980	-	0,00
05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.938.100	-	0,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.887.520.444	1.717.999.680	91,02

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Rp		
		Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	228.761.706	222.498.693	97,26
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	520.772.011	456.900.950	87,74
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	48.796.635	81,33
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	163.937.810	140.783.310	85,88
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	4.995.000	99,90
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	92.352.000	81.369.500	88,11
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.375.395	271.294.632	88,15
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	494.321.522	491.360.960	99,40
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.557.410	150.583.100	66,47
07.05	Pengadaan Mebel	226.557.410	150.583.100	66,47
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.088.933.271	9.875.398.604	97,88
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.996.000	36.711.000	91,79
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.100.782.672	4.092.579.464	99,80
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.948.154.599	5.746.108.140	96,60
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.734.847.839	2.697.185.091	98,62
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.800.000.000	1.799.069.532	99,95
09.05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	49.148.025	98,30
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.594.159	172.523.330	84,32
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	680.253.680	676.444.204	99,44
02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	25.834.082.945	23.895.488.277	92,50
2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.121.624.810	21.227.716.708	91,81

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Rp		
		Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kostruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	988.356.650	926.067.675	93,70
01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	2.000.000.000	1.864.355.470	93,22
01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.735.554.294	2.590.083.694	94,68
01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	16.397.713.866	14.884.477.949	90,77
01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1.000.000.000	962.731.920	96,27
2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.712.458.135	2.667.771.569	98,35
02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	214.490.055	208.842.140	97,37
02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.497.968.080	2.458.929.429	98,44
06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	86.837.138.645	77.710.215.107	89,49
2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	86.837.138.645	77.710.215.107	89,49
01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1.124.468.987	1.107.115.591	98,46
01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	22.321.148.000	16.747.703.569	75,03
01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	42.437.025.658	41.253.553.928	97,21
01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	20.954.496.000	18.601.842.019	88,77
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	263.377.801.007	243.130.657.915	92,31
2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	263.377.801.007	243.130.657.915	92,31
01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.124.468.987	1.107.115.591	98,46
01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	60.400.000.000	57.047.657.509	94,45
01.03	Pengelolaan Leger Jalan	330.816.577	320.839.250	96,98
01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	664.970.049	656.805.323	98,77

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Jumlah Rp		
		Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
01.05	Pembangunan Jalan	31.469.563.523	26.059.770.007	82,81
01.09	Rehabilitasi Jalan	47.665.549.432	41.215.287.405	86,47
01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	47.391.733.104	44.966.070.490	94,88
01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	54.278.963.614	53.507.906.460	98,58
01.12	Pembangunan Jembatan	15.400.000.000	13.949.382.720	90,58
01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.000.000.000	706.689.180	70,67
01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.983.360.932	1.931.219.874	97,37

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 12 kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebesar Rp 407.789.139.075,-. Dari jumlah anggaran tersebut, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 375.321.769.229,- atau 92,04%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja		Target Capaian pada akhir tahun	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian dan Rasio	
				2022	2023	2024	2025	2026	Capaian 2022	Capaian 2023
TUJUAN RENSTRA										
Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob	97.30 persen	98.75 persen	97.57 persen	97.86 persen	98.15 persen	98.44 persen	98.75 persen	97.57	96.00
Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap	Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik.	73.95 persen	75.75 persen	74.13 persen	74.50 persen	74.90 persen	75.30 persen	75.75 persen	97.98	73.00
SASARAN RENSTRA										
Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir	3.40 persen	1.50 persen	3.02 persen	2.64 persen	2.26 persen	1.88 persen	1.50 persen	3.40	2.37
Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan rob	2.00 persen	1.00 persen	1.85 persen	1.65 persen	1.45 persen	1.25 persen	1.00 persen	3.00	1.12
Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	92.38 persen	94.50 persen	92.50 persen	93.00 persen	93.50 persen	94.00 persen	94.50 persen	92.40	92.52
Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	55.51 persen	57.00 persen	55.75 persen	56.00 persen	56.30 persen	56.60 persen	57.00 persen	55.90	96.45
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	74.27	75.70	74.50	74.80	75.10	75.40	75.70	74.50	74.80

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob”, belum dapat memenuhi target, dimana data capaian sebesar 97,57% dari target sebesar 97,57%. Sedangkan “Tujuan Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik”, dapat memenuhi target, dengan data capaian sebesar 97,98% dari target sebesar 74,13%.
- b. Sasaran “Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Kawasan Banjir” dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 3,40% dari target sebesar 3,40%;
 - 2) Indikator “Persentase kawasan rob” belum dapat mencapai target sebesar 1,85%, dengan realisasi sebesar 3,00%;
- c. Sasaran “Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase jalan dalam kondisi mantap” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 92,40% dari target sebesar 92,50%;
 - 2) Indikator “Persentase jembatan dalam kondisi baik” dapat mencapai target sebesar 55,90%, dengan realisasi sebesar 55,75%;
- d. Sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)” belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 74,50% dari target sebesar 74,50%;

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Kota Semarang, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional, yang mendukung penguatan posisi Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan rob
- b. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, sungai, rawa, bendungan dan jaringan lainnya.
- c. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat secara keberlanjutan.
- d. Belum optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
- e. Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor.
- f. Pembangunan bidang infrastruktur jalan jembatan dan sumber daya air yang berkualitas dan kinerjanya yang semakin dapat diandalkan agar daya Tarik dan daya saing Kota Semarang dalam konsteks global, regional dan nasional dapat membaik.
- g. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif, berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan.
- h. Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan dokumen perencanaan serta belum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan.
- i. Masih perlunya pembangunan street furniture untuk memperindah wajah kota dan penyediaan kantung-kantung lahan untuk penunjang pejalan kaki.
- j. Optimalisasi jalan bebas hambatan sebagai pendukung konektivitas daerah.
- k. Pembangunan infrastruktur kota dan utilitas yang bertahap dan berkelanjutan untuk menjadikan Kota Semarang lebih tangguh dan produktif.

1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kota Semarang yang fokus terhadap isu gender diantaranya akses pedestrian yang ramah difabel, lansia dan anak-anak, kekerasan pada perempuan dan anak, serta kurangnya akses infrastruktur kawasan daerah miskin yang mendukung terhadap pendidikan dan perekonomian yang baik.

2.4 Review Terhadap RKPD

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:

- 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
- 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja

- 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan

lembaga swadaya masyarakat

- 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air

- 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00

- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;”. Namun sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum di Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maupun dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target-target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Dari hasil Musrenbang tersebut telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirian Pemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, merupakan tugas Pemerintah untuk menyusun lebih lanjut peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK. Dengan melaksanakan Renstra secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang kebinamargaan dan sumber daya air akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan strategis serta secara fungsional bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi

masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Keterkaitan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dengan Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dengan sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air dan sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan meningkatkan kinerja jalan dan jembatan serta kinerja sumber daya air dengan dukungan teknis agar terwujud Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima, menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 berpedoman Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari bidang infrastruktur berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat tahun 2015-2019 dalam rangka pencapaian kehandalan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; serta keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan adalah arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar

dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

Tujuan 1: **“Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob

Tujuan 2 **“Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik”

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai berikut:

- a) Sasaran **“Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Kawasan Banjir”
 - 2) Indikator “Persentase kawasan rob”
- b) Sasaran **“Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase jalan dalam kondisi mantap”
 - 2) Indikator “Persentase jembatan dalam kondisi baik”
- c) Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD”** memiliki 1 indikator yaitu Indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.	Jumlah rata-rata persentase kawasan wilayah kota yang bebas dari banjir dan rob	%	97,68
SASARAN: Meningkatnya kinerja sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan Rob	Persentase kawasan banjir	%	2,64
	Persentase kawasan rob	%	1,65
TUJUAN: Meningkatkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap	Jumlah rata-rata persentase panjang jalan dalam kondisi mantap dan jembatan dalam kondisi baik.	%	74,50
SASARAN: Meningkatnya fungsi dan manfaat infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	93,00
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	56,00
SASARAN: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	%	74,80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- a. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang bertugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan indikator sasaran “**Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**”;
- c. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
- d. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
- f. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 3 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 8

kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 kegiatan pelaksanaan/pembangunan.

3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 258.839.007.046,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 34.046.468.726,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 224.792.538.320,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU		
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
						2023	2023		2023	2023
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM							345.163.444.958	369.563.444.958	441.546.609.993
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							311.072.282.708	334.222.282.708	403.403.735.127
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,86%	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob	97,86%	97,86%	97,86%	28.471.938.141	30.921.938.141	32.158.595.524
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96,17%	Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	96,17%	96,17%	96,17%	26.071.938.141	28.521.938.141	27.968.964.630
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen Database Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1 dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	545.000.000	545.000.000	614.900.000
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	10 lokasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
		Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang terpelihara	1 Kegiatan							
1.03.02.2.01.28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Stasiun Pompa Banjir yang terpelihara	1 lokasi	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU		
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
						2023	2023		2023	2023
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM	1 KM	1 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.03.02.2.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 kegiatan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	1.084.766.388	1.084.766.388	1.084.766.388
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Wilayah I	1 kegiatan	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	17.000.000.000	18.450.000.000	17.627.126.489
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Wilayah II	1 kegiatan							
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1 kegiatan							
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1 kegiatan							
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah barat	1 Kegiatan							
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah tengah II	1 Kegiatan							
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah timur	1 Kegiatan							
		Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir wilayah	1 Kegiatan							

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
						2023	2023		2023	2023	
		tengah I									
1.03.02.2.01.56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	1 kegiatan	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	942.171.753	1.942.171.753	2.142.171.753	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	83,00%	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	83,00%	83,00%	83,00%	2.400.000.000	2.400.000.000	4.189.630.894	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Database Irigasi	1 dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	75.500.000	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi kewenangan kota dalam kondisi baik.	80,00 persen	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM	2 KM	2 KM	2.300.000.000	2.300.000.000	4.114.130.894	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65,00%	Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	65,00%	65,00%	65,00%	68.545.911.137	74.145.911.137	95.507.131.101	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan rawas abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai	99,17%	Rasio luas kawasan rawas abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai	99,17%	99,17%	99,17%	68.545.911.137	74.145.911.137	95.507.131.101	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 dokumen	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.405.000.000	1.405.000.000	2.335.400.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
						2023	2023		2023	2023	
		Penyusunan DED (Rechannelling the city)	1 dokumen								
		Dokumen Database dan Rencana Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Kegiatan								
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Peningkatan saluran drainase perkotaan	5 lokasi	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	3.829 M	3.829 M	3.829 M	20.500.000.000	22.800.000.000	22.800.000.000	
		Penghijauan Sempadan Sungai Semarang (Pelaksanaan Fisik)	1 kegiatan								
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kinerja (mesin dan alat berat) dalam kondisi baik	15 jenis	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	21 Unit	26.328.252.045	26.328.252.045	51.403.148.909	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan sistem drainase	1 kegiatan	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.727 M	2.727 M	2.727 M	20.312.659.092	23.612.659.092	18.968.582.192	
		Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	15 jenis	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.727 M	2.727 M	2.727 M				
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74,50%	Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	74,50%	74,50%	74,50%	214.054.433.430	229.154.433.430	275.738.008.502	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	87,48%	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	87,48%	87,48%	87,48%	214.054.433.430	229.154.433.430	275.738.008.502	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Database dan Rencana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.550.000.000	2.650.000.000	3.035.897.533	
		Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Jangli Mrican (Penyusunan AMDAL/UKL-UPL dan LARAP)	1 dokumen								

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU		
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
						2023	2023		2023	2023
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Rintisan Semarang Outer Ring Road (Mangkang Mijen)	1 kegiatan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	3.000 M ²	3.000 M ²	3.000 M ²	2.000.000.000	2.000.000.000	29.800.000.000
		Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pengadaan Lahan)	1 kegiatan							
		Pembangunan Akses Perguruan Tinggi Sronдол Sekaran (Pengadaan Lahan)	1 kegiatan							
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen leger jalan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000	450.000.000	468.200.000
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	jumlah data survey dan kondisi jalan	2 dokumen	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	575.000.000	575.000.000	911.400.000
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 1)	1 kegiatan	Panjang Jalan yang Dibangun	7 KM	7 KM	7 KM	20.000.000.000	20.000.000.000	23.300.000.000
		Semarang Middle Ring Road Jalan Gajah (Pekerjaan Konstruksi)	1 kegiatan							
		Rintisan Semarang Outer Ring Road Mangkang Mijen (Pekerjaan Konstruksi 2)	1 kegiatan							
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan		-	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1 KM	1 KM	1 KM	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan jalan wilayah kota dan pedestrian	10 ruas jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM	1 KM	49.386.000.000	49.386.000.000	59.678.003.015
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Bahan dan Material pendukung kinerja yang disediakan	100 jenis	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	5 KM	5 KM	5 KM	50.948.978.468	54.948.978.468	31.824.146.368
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Operasi Pemeliharaan jalan	167 kilometer	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara	4 KM	4 KM	4 KM	71.250.000.000	82.250.000.000	110.613.520.653

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
						2023	2023		2023	2023	
				Rutin							
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah I	250 ruas jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4 KM	4 KM	4 KM				
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah IV	250 ruas jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4 KM	4 KM	4 KM				
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah II	250 ruas jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4 KM	4 KM	4 KM				
		Operasi Pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase Wilayah III	250 ruas jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	4 KM	4 KM	4 KM				
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan		-	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	15 M	15 M	15 M	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Operasi Pemeliharaan Jembatan	1 unit	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5.000 M	5.000 M	5.000 M	1.000.000.000	1.000.000.000	429.706.861	
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Alat Pengujian Baru yang disediakan	1 jenis	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.894.454.962	1.894.454.962	1.677.134.072	
		Jumlah Alat Pengujian yang terawat	1 jenis								
		Jumlah Alat Pengujian yang terkalibrasi	14 jenis								
		Jumlah dokumen sertifikasi dan akreditasi serta dokumen pendukungnya	1 dokumen								

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
						2023	2023		2023	2023	
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Diklat Pegawai Teknis Pendukung Kinerja	1 kegiatan								
X.XX	NON URUSAN							34.091.162.250	35.341.162.250	38.142.874.866	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU	100,00%	Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU	100,00%	100,00%	100,00%	34.091.162.250	35.341.162.250	38.142.874.866	
		Persentase kinerja adminstrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	100,00%	Persentase kinerja adminstrasi dan pelaporan keuangan Dinas PU	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas PU	100,00%	100,00%	100,00%				
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	100,00%	Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas PU	100,00%	100,00%	100,00%				
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	42.000.000	42.000.000	42.000.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan OPD	2 dokumen								
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU		
					RKP2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKP2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
						2023	2023		2023	2023
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000	4.500.000	4.500.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	18.287.313.298	18.287.313.298	17.109.575.957
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113 Orang/bulan	113 Orang/bulan	113 Orang/bulan	18.055.553.298	18.055.553.298	16.868.715.957
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	218.760.000	218.760.000	227.860.000

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU		
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
						2023	2023		2023	2023
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	10.000.000	10.000.000	10.000.000
X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	10.000.000	10.000.000	10.000.000
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Kegiatan							

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	
						2023	2023		2023	2023	
		Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Kegiatan								
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100 Skor 1-100	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	2.374.892.492	2.374.892.492	4.121.846.704	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	150.000.000	150.000.000	165.000.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	995.461.545	995.461.545	2.588.070.907	
		Jumlah Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis								
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan pembersih, peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga lainnya yang disediakan	25 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket	28 Paket	28 Paket	75.000.000	75.000.000	121.272.600	
		Jumlah bahan dan cairan pembersih virus dan kuman	3 jenis								
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan	10 jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	150.000.000	150.000.000	210.000.000	
		Jumlah bahan cetak dan penggandaan	10 Jenis								
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	125 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	127.000.000	127.000.000	90.646.425	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU		
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
						2023	2023		2023	2023
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	372.430.947	372.430.947	267.254.305
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem penunjang kinerja SKPD berbasis elektronik baru yang tersedia	1 aplikasi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	674.602.467
		Jumlah sistem penunjang kinerja SKPD berbasis elektronik yang diupgrade dan terpelihara	5 aplikasi							
		Akselerasi pelaksanaan SPBE	1 kegiatan							
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100.000.000	100.000.000	205.465.279
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel perkantoran yang disediakan	10 jenis	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100.000.000	100.000.000	205.465.279
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	9.941.956.460	11.191.956.460	13.399.289.665
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jasa surat menyurat yang tersedia	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.431.956.460	4.431.956.460	7.002.063.665
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5.500.000.000	6.750.000.000	6.387.226.000

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU		
					RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
						2023	2023		2023	2023
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	3.325.000.000	3.325.000.000	3.244.697.261
X.XX.01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan yang disediakan	4 jenis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	100 Unit	100 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
X.XX.01.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel perkantoran yang dipelihara	5 jenis	Jumlah Mebel yang Dipelihara	300 Unit	300 Unit	300 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000
X.XX.01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	200 Unit	150.000.000	150.000.000	269.697.261
X.XX.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 jenis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1.125.000.000	1.125.000.000	925.000.000
JUMLAH								345.163.444.958	369.563.444.958	441.546.609.993

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Pekerjaan Umum pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum ini berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu- isu strategis;
3. Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Perubahan Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh

Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

3. Perubahan – perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

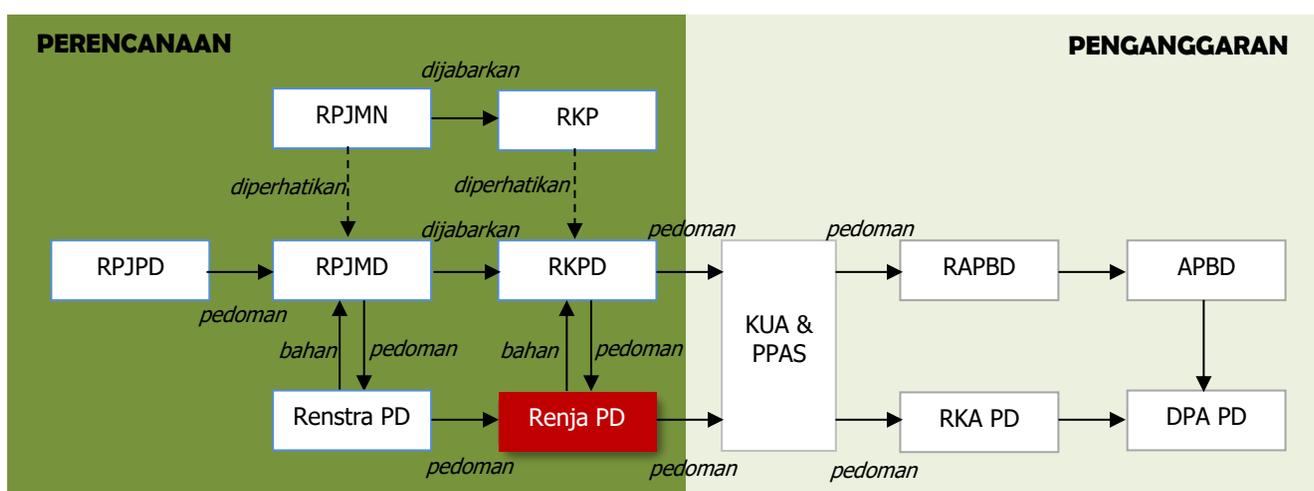
5. DINAS PENATAAN RUANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh dari dinamika perekonomian dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian baik dalam pendapatan maupun belanja daerah pada tahun berjalan. Selain itu, perubahan RKPD juga perlu dilakukan untuk menyikapi perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2023. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian hasil sampai dengan triwulan II tahun 2023 juga menjadi dasar untuk penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- h. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang

- Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023; dan
 - w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENATAAN RUANG
KOTA SEMARANG**

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	20%	100%	25%	25%	45%	45%
		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	20%	100%	25%	25%	45%	45%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	20%	100%	25%	25%	45%	45%
		Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	100%	20%	100%	25%	25%	45%	45%
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5 Dokumen	3	5 Dokumen	1	20%	4	80%
		Meningkatnya jumlah peserta Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	580 orang	200	125 orang	0	0%	200	34%
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TABG	64 Dokumen	0	10 Dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Meningkatnya pemahaman stakeholder terkait SIMBG	590 orang	200	100 orang	0	0%	200	34%
		Rasio SK IMB/Rekomendasi Teknis IMB	88%	0	86,36%	0	0%	0	0%
		Rasio SK IMB Pertandaan/Rektek Pertandaan	52,63%	0	41,18%	0	0%	0	0%
		Tersedianya Sistem Implementasi SIMBG	3 aplikasi	1	1 aplikasi	0	0%	1	33%
		Jumlah Labelisasi SLF	35 bangunan	0	20 bangunan	0	0%	0	0%
		Rasio SK Reklame/Rektek Reklame	61,36%	0	58,54%	0	0%	0	0%
		Jumlah rekomendasi teknis IMB/PBG yang diberikan oleh Pemkot dalam tahun eksisting	2500 dokumen	1900	2.200 dokumen	0	0%	1900	76%
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TACB	39 dokumen	4	5 dokumen	0	0%	4	10%
		Jumlah bangunan yang mendapatkan SLF	125 dokumen	13	23 dokumen	0	0%	13	10%
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	118 Dokumen	78	78 Dokumen	17	22%	95	81%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	145 Dokumen	28	28 Dokumen	0	0%	28	19%
		Terbangunnya Gedung Pemerintah di tahun berjalan	50 Gedung	10	20 Gedung	0	0%	10	20%
		Terbangunnya Fasilitas Publik ditahun berjalan	75 bangunan	9	15 bangunan	0	0%	9	12%
		Terbangunnya Sport Center di tahun berjalan	55 Lokasi	8	10 Lokasi	0	0%	8	15%
		Jumlah dokumen supervisi pengawasan pembangunan	127 Dokumen	23	45 Dokumen	0	0%	23	18%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Persentase bangunan gedung yang terbangun Distaru terhadap seluruh aset bangunan gedung milik Pemkot	6,00%	3%	3,00%	0	0%	0,03	50%
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	5 Dokumen	1	5 Dokumen	0	0%	1	20%
		Penetapan Perda Retribusi Perijinan tertentu	1 Dokumen	1	1 Dokumen	0	0%	1	100%
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Kota Semarang	5 Dokumen	1	1 Dokumen	0	0%	1	20%
		Penetapan Perwal tentang Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	1 Dokumen	1	1 Dokumen	0	0%	1	100%
		Penetapan regulasi terkait Tim Ahli bangunan gedung	1 Dokumen	1	1 Dokumen	0	0%	1	100%
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1 Dokumen	1	1 Dokumen	0	0%	1	100%
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	135 Unit		8 Unit	0	0%	0	0%
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	150 Dokumen	0	135 Dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Kawasan yang diteapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	12 Kegiatan	0	1 Dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah Label yang terpasang pada bangunan cagar budaya	1 Dokumen	0	14 buah	0	0%	0	0%
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	10 Pengelola		10 Pengelola	4	40%	4	40%
		Tersedianya dokumen pendukung Bantuan Teknis masyarakat pemilik bangunan Gedung Cagar Budaya	25 Dokumen	0	10 Dokumen	0	0%	0	0%
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10 Pengelola		10 Pengelola	4	40%	4	40%
		Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang mendapatkan kompensasi, Insentif dan Disinsentif	25 Dokumen	0	10 Dokumen	0	0%	0	0%
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2.310 Unit		2.310 Unit	107	5%	107	5%
		Jumlah Penerbitan Peringatan Pelanggaran Bangunan	592 Dokumen	0	482 Dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah pelanggaran yang telah terselesaikan	503 Dokumen	0	409 Dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah bangunan gedung yang dilakukan penilikan BG oleh Penilik Bangunan	2674 bangunan	0	2.310 bangunan	0	0%	0	0%
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	53 Unit		53 Unit	25	47%	25	47%
		Jumlah Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	70 bangunan	0	53 bangunan	25	47%	25	36%
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	36 Unit	34	34 Unit	0	0%	34	94%
		Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung	64 Dokumen	13	11 Dokumen	0	0%	13	20%
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah	47 bangunan	20	20 bangunan	0	0%	20	43%
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Fasilitas Publik	14 bangunan	1	2 bangunan	0	0%	1	7%
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Sport Center	13 Lokasi	0	3 Lokasi	0	0%	0	0%
		Jumlah dokumen supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	41 dokumen	34	25 dokumen	0	0%	34	83%
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	80 Unit	53	80 Unit	5	6%	58	73%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung Pemerintah	99 bangunan	7	25 bangunan	0	0%	7	7%
		Terpelihara dan terawatnya Sport Center	61 lokasi	15	20 lokasi	0	0%	15	25%
		terpelihara dan terawatnya bangunan gedung dan fasilitas Kelurahan dan kecamatan	149 bangunan	16	20 bangunan	0	0%	16	11%
		Terpelihara dan terawatnya Fasilitas Publik	74 bangunan	15	15 bangunan	0	0%	15	20%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100%		100%	25%	25%	25%	25%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100%		100%	25%	25%	25%	25%
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	3	25%	3	25%
		Tersedianya regulasi terkait Titik Reklame yang ditetapkan	25 Dokumen	0%	6 Dokumen	0	17%	0	0%
		Tersedianya regulasi terkait penilikan gedung yang ditetapkan	25 dokumen	0%	6 dokumen	0	17%	0	0%
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan		1 Kawasan	1	100%	1	100%
		Jumlah Videotron terbangun	7 buah	0%	1 buah	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Titik Reklame di Tanah Pemkot Semarang	1086 buah	0%	810 buah	0	0%	0	0%
		Jumlah reklame non permanen yang berizin	2508 buah	0%	3.087 buah	0	0%	0	0%
		Jumlah reklame permanen yang berizin	996 buah	0%	688 buah	0	0%	0	0%
		Jumlah Titik Reklame Non Komersial	8 buah	0%	5 buah	0	0%	0	0%
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan		1 Kawasan	1	100%	1	100%
		Jumlah pembongkaran reklame non permanen tidak berizin	2071 buah	0%	2.655 buah	0	0%	0	0%
		Persentase pembongkaran reklame tidak berizin	100%	0%	100,00%	0	0%	0	0%
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen		2 Dokumen	1	50%	1	50%
		Jumlah Penerbitan SP1 Pengawasan Reklame	129 Dokumen	0%	176 Dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah Penerbitan SP2 Pengawasan Reklame	106 Dokumen	0%	144 Dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah penerbitan SP pembongkaran	592 Dokumen	0%	482 Dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah Permasalahan Reklame	827 Dokumen	0%	802 Dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Menurunnya Persentase permasalahan reklame yang terselesaikan	28,40%	0%	39,90%	0	0%	0	0%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100%		100%	15%	15%	15%	15%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	2 kegiatan		2 kegiatan	1	50%	100%	50%
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang		150 Orang	140	93%	140	93%
		Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Kota Semarang	2 pelatihan	0%	2 pelatihan	1	50%	1	50%
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	440 Orang		440 Orang	0	0%	0	0%
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat ahli di wilayah Kota Semarang	740 orang	0%	440 orang	0	0%	0	0%
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	370 Orang		370 Orang	0	0%	0	0%
		Jumlah penerbitan sertifikat IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan gedung) di Kota Semarang	520 dokumen	0%	370 dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memahami tata cara memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan Konstruksi	250 orang	0%	100 orang	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang memahami Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	250 orang	0%	100 orang	0	0%	0	0%
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 Dokumen		8 Dokumen	0	0%	0	0%
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Semarang untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	2 dokumen	0%	2 dokumen	0	0%	0	0%
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	2 dokumen	0%	2 dokumen	0	0%	0	0%
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan	2 dokumen	0%	2 dokumen	0	0%	0	0%
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Semarang	2 dokumen	0%	2 dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah pelaku jasa konstruksi	1820 orang	0%	1.700 orang	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100%		100%	15%	15%	15%	15%
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100%		100%	5%	5%	5%	5%
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	0	0%	0	0%
		Tersedianya dokumen Regulasi (Perda/Perwal) Tata Ruang	5 Dokumen	0%	4 Dokumen	0	0%	0	0%
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	0	0%	0	0%
		Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Semarang	5 Dokumen	0%	1 Dokumen	0	0%	0	0%
		Dokumen Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	0	0%	0	0%
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0%	0	0%
		% Luas RTH Perkotaan	11,64%	0%	10,56%	0	0%	0	0%
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0%	0	0%
		Meningkatnya Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	200 orang	0%	400 orang	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100%		100%	15%	15%	15%	15%
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0%	0	0%
		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	45,84	0%	152 Ha	0	0%	0	0%
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0%	0	0%
		Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	15,32%	0%	6,56%	0	0%	0	0%
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100%		100%	5%	5%	5%	5%
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Forum Penataan Ruang	10 dokumen	0%	2 dokumen	0	0%	0	0%
		Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	15,60%	0%	9,19%	0	0%	0	0%
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Dokumen		5 Dokumen	1	20%	1	20%
		Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Aplikasi	0%	5 Aplikasi	0	0%	0	0%
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil	77,51%	0%	64,81%	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan							
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100%		100%	5%	5%	5%	5%
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	125 dokumen	0%	1 dokumen	0	0%	0	0%
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	3	300%	3	300%
		Jumlah rekomendasi penertiban dan penegakan hukum bidang Penataan Ruang	3 dokumen	0%	1 dokumen	0	0%	0	0%
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen		2 Dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah rekomendasi tata ruang OUV (Outstanding Universal Value)	3 dokumen	0%	1 dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah rekomendasi Badan Pengelola Kawasan	3 dokumen	0%	1 dokumen	0	0%	0	0%
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%		100%	51,13%	51%	51%	51%
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100%		100%	51,13%	51%	51%	51%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 Dokumen		55 Dokumen	24	44%	24	44%
		Data Sengketa konflik dan perkara pertanahan yang terinventarisasi	43 dokumen aduan	0%	55 dokumen aduan	0	0%	0	0%
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Berita Acara		35 Berita Acara	20	57%	20	57%
		Jumlah aduan sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti melalui mediasi	39 dokumen aduan	0%	35 dokumen aduan	0	0%	0	0%
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%		100%	5%	5%	5%	5%
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%		100%	5%	5%	5%	5%
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	1	50%	1	50%
		Jumlah lokasi bidang yang terdampak berdasarkan usulan OPD terkait	9 lokasi	0%	2 kegiatan	0	0%	0	0%
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti	Terbitnya Surat Walikota penetapan lokasi penerima ganti	5 kegiatan		100%	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan							
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%		100%	15%	15%	15%	15%
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%		100%	30%	30%	30%	30%
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen	0	0%	0	0%
		jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang terinventarisasi	6 lokasi	0%	3 lokasi	0	0%	0	0%
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen		3 Dokumen	2	67%	2	67%
		Jumlah Surat Walikota objek redistribusi tanah yang terinventarisir	6 dokumen	0%	3 dokumen	0	0%	0	0%
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-		3 dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah redistribusi tanah objek Reforma Agraria yang terkoordinir	6 lokasi	0%	3 lokasi	0	0%	0	0%
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		2 laporan	2	100%	2	100%
		Jumlah penataan akses yang terkoordinasi	6 kegiatan	0%	3 kegiatan	0%	0%	0	0%
2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota	100%		100%	5%	5%	5%	5%
2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang terinventarisasi	1 dokumen		100%	0%	0%	0	0%
2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat rekomendasi penetapan ganti kerugian objek tanah kelebihan yang dikeluarkan	1 dokumen	0%	0%	0%	-	0	0%
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100%		100%	5%	5%	5%	5%
2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota	100%		100%	5%	0%	5%	0%
2.10.07.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data hasil koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas ulayat	1 dokumen	0%	0%	0%	-	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.10.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Penguakuan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data hasil koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan penguakuan masyarakat hukum adat	1 dokumen	0%	0%	0%	-	0	0%
2.10.07.2.01.03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah penetapan tanah ulayat dalam satu daerah Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	1 dokumen	0%	0%	0%	-	0	0%
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100%		100%	73,82%	74%	74%	74%
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100%		100%	49,73%	50%	50%	50%
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2 Laporan		2 Laporan	2	100%	2	100%
		Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah	5 kasus	0%	5 kasus	0	0%	0	0%
		Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah yang terkoordinir	4 lokasi	0%	2 lokasi	0	0%	0	0%
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	100%		100%	74,18%	74%	74%	74%
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang terinventarisasi	35.000 bidang		1 laporan	1	100%	1	100%
		Jumlah tanah kosong yang terinventarisasi	12 bidang	0%	0%	0	0%	0	0%
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	jumlah data tanah kosong yang dapat dimanfaatkan	0		2 dok	0	0%	0	0%
		jumlah data tanah kosong yang dapat dimanfaatkan	7000 bidang	0%	0%	0	-	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100%		100%	25%	25%	25%	25%
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	tertibnya izin membuka tanah	100%		100%	15%	15%	15%	15%
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5 Dokumen		2 Dokumen	0	0%	0	0%
		Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah	5 dokumen	0%	5 dokumen	0	0%	0	0%
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2 Dokumen		2 Dokumen	1	50%	1	50%
		Jumlah pemanfaatan tanah negara yang terkendali	2 dokumen	0%	2 dokumen	0	0%	0	0%
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100%		100%	15%	15%	15%	15%
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100%		100%	15%	15%	15%	15%
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	0	0%	0	0%
		Data perencanaan penggunaan tanah yang terkoordinasi	1 dokumen	0%	1 dokumen	0	0%	0	0%
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	-		1 dokumen	0	0%	0	0%
		Data zona nilai tanah yang terpetakan	1 dokumen	0%	1 dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-		2 dokumen	0	0%	0	0%
		Jumlah tanah Kota Semarang yang terkonsolidasi untuk rencana pembangunan	2 wilayah	0%	2 wilayah	0	0%	0	0%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kualitas SDM	100%		100%	25%	25%	25%	25%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100%		100%	25%	25%	25%	25%
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100%		100%	25%	25%	25%	25%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%		100%	25%	25%	25%	25%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	0	0%	0	0%
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)	2 Dokumen	0%	3 Dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0%	0	0%
		Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
		Tersusnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0%	0	0%
		Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0%	0	0%
		Tersusunnya Dokumen DPA perubahan	1 Dokumen	0%	1 Dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0	0%	0	0%
		Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0%	2 Dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	2	50%	2	50%
		Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	2 Dokumen	0%	4 Dokumen	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		100%	25%	25%	25%	25%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan		88 Orang/bulan	0	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	0%	100%	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen		80 Dokumen	20	25%	20	25%
		Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Optimal	100%	0%	100%	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan	1	20%	1	20%
		Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	0%	100%	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan		10 Laporan	2	20%	2	20%
		Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	0%	100%	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen		10 Dokumen	5	50%	5	50%
		Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	0%	100%	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%		100%	25%	25%	25%	25%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen		24 Dokumen	5	21%	5	21%
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		200 Orang	80	40%	80	40%
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	0%	100%	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		100%	25%	25%	25%	25%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	5	25%	5	25%
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis	0%	20 jenis	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	7	35%	7	35%
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Jenis	0%	100 Jenis	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	20	25%	20	25%
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	80 Jenis	0%	80 Jenis	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	40	40%	40	40%
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 Jenis	0%	100 Jenis	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	40	40%	40	40%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 Jenis	0%	100 Jenis	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen		30 Dokumen	0	0%	0	0%
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30 Buah	0%	30 Buah	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan		500 Laporan	15	3%	15	3%
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	0%	500 kegiatan	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen		50 Dokumen	5	10%	5	10%
		Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Penataan Ruang	4,00 indeks SPBE	0%	50 indeks SPBE	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	25%	25%	25%	25%
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200 Laporan		1.200 Laporan	300	25%	300	25%
		Terlaksananya surat menyurat kantor	100%	0%	100%	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75 Laporan		75 Laporan	25	33%	25	33%
		Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	0%	100%	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	25	25%	25	25%

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Terpenuhinya pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	0%	100%	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%	25%	25%	25%	25%
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1	100%	1	100%
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan Dinas dan kendaraan dinas pejabat	1 unit	0%	1 unit	1	100%	1	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit		54 Unit	0	0%	0	0%
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53 Unit	0%	54 Unit	0	0%	0	0%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	2	50%	2	50%
		Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	1 kegiatan	0%	2 kegiatan	0	0%	0	0%

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 belum banyak sub kegiatan yang telah selesai terlaksana, akibat dari efisiensi Belanja Barang dan Jasa pada bulan Maret 2023, yang meliputi: ATK, Mamin dan SPPD.

Selain itu untuk pekerjaan fisik juga belum dapat dieksekusi lebih awal terutama pekerjaan yang melalui mekanisme Lelang, akibat adanya refocusing pagu anggaran, sehingga perlu penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis yang berimplikasi pada lamanya proses di Pokja BPBJ.

Untuk pekerjaan Penunjukan Langsung juga mengalami penundaan akibat adanya pergantian pejabat yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), sehingga penyusunan kontrak juga tertunda.

Ada beberapa Program dan sub kegiatan yang tidak tercapai 100% karena tidak relevan dengan kewenangan Pemerintah Kota Semarang, dan Realisasinya hanya mencapai 5% yang meliputi kajian yang menjadi dasar penghapusan Program dan Sub Kegiatan, antara lain :

1. Sub Keg. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Sub Keg. Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Sub Keg. Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
5. Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6. Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7. Sub Keg. Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.867.232.694	10.369.535.352	43,45
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.178.660	24.797.301	13,76
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.458.360	2.867.000	2,94
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.492.700	3.193.900	25,57
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.167.300	-	0,00
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.608.000	-	0,00
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.167.300	-	0,00
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.704.000	3.597.600	21,54
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.581.000	15.138.801	64,20
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.274.195.503	7.884.111.490	51,62
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.647.539.103	7.040.828.764	51,59
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.596.266.400	833.454.976	52,21
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.230.000	-	0,00
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.080.000	9.827.750	97,50
1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.080.000	-	0,00
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	680.711.950	8.710.000	1,28
1.03.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	125.045.050	-	0,00
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	555.666.900	8.710.000	1,57
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.653.502.661	2.002.294.258	35,42
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	180.267.581	5.077.000	2,82
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	480.205.078	277.231.000	57,73
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	161.162.700	66.360.500	41,18
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	229.899.624	85.661.700	37,26
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	507.900.535	54.865.250	10,80
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.839.338	-	0,00
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	930.429.620	139.356.308	14,98
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.139.798.185	1.373.742.500	43,75
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	952.307.940	163.683.523	17,19
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000	2.650.000	27,89
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315.000.000	86.661.523	27,51
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	627.807.940	74.372.000	11,85
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.126.335.980	285.938.780	25,39
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	19.372.000	53,34
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	666.559.250	266.566.780	39,99

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	423.458.550	-	0,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	159.104.870.889	4.608.231.644	2,90
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	159.104.870.889	4.608.231.644	2,90
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	4.144.647.366	1.016.477.236	24,53
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	105.561.058.979	644.111.790	0,61
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	596.128.209	30.147.000	5,06
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	796.000.000	22.556.060	2,83
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	325.000.000	17.221.500	5,30
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	118.611.650	39,54
1.03.08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	546.955.000	27.575.500	5,04
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	449.814.000	21.012.500	4,67
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	32.892.431.972	1.934.995.900	5,88
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	13.492.835.363	775.522.508	5,75
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.900.000.000	1.099.489.400	22,44
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.900.000.000	1.099.489.400	22,44
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	600.000.000	6.764.300	1,13
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	3.300.000.000	795.921.000	24,12
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	850.000.000	291.544.500	34,30
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	150.000.000	5.259.600	3,51
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.357.746.036	122.423.500	9,02
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.357.746.036	122.423.500	9,02
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	376.049.765	94.694.000	25,18
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	208.675.981	4.311.000	2,07
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	547.007.198	15.387.500	2,81
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	226.013.092	8.031.000	3,55
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	11.120.109.419	1.559.040.097	14,02
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	5.581.964.450	340.480.033	6,10

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1.235.792.837	14.391.400	1,16
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	770.914.595	20.114.900	2,61
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	3.234.833.174	285.102.633	8,81
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	340.423.844	20.871.100	6,13
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	386.053.986	22.560.550	5,84
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	209.236.884	10.509.250	5,02
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	176.817.102	12.051.300	6,82
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.781.921.143	829.271.564	29,81
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	921.243.044	13.933.800	1,51
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	1.860.678.099	815.337.764	43,82
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.370.169.840	366.727.950	15,47
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	297.382.873	9.002.500	3,03
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	310.605.592	277.182.150	89,24
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.762.181.375	80.543.300	4,57
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	804.751.409	629.885.550	78,27
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	804.751.409	629.885.550	78,27
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	322.802.107	311.688.400	96,56
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	481.949.302	318.197.150	66,02
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	6.486.473.136	270.142.806	4,16
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	819.831.424	518.292.925	63,22
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	819.831.424	518.292.925	63,22
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	587.935.298	308.536.775	52,48
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	190.682.268	181.839.100	95,36
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20.606.929	14.836.100	72,00
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20.606.929	13.080.950	63,48
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	15.650.947.322	15.497.176.863	99,02
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	230.479.035	179.562.700	77,91
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.479.035	179.562.700	77,91
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	15.420.468.287	15.317.614.163	99,33

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	15.420.468.287	15.317.614.163	99,33
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	313.621.984	303.038.000	96,63
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	313.621.984	303.038.000	96,63
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	198.575.714	193.397.350	97,39
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	115.046.270	109.640.650	95,30
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	240.175.735	42.132.050	17,54
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	240.175.735	42.132.050	17,54
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	198.961.877	22.409.750	11,26
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.606.929	10.696.250	51,91
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	20.606.929	9.026.050	43,80
JUMLAH		224.665.760.048	35.019.388.187	15,59

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 11 program, dan 19 kegiatan dan 70 sub kegiatan pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah sebesar Rp 224.665.760.048. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 35.019.388.187 atau 15,59% dari pagu Murni. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 189.646.371.861.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 95 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2023
Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	59.47	60.49	62.76	64.77	67.68	70.55	59.47	60.49	64.30	62.76
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	97.70	97.00	97.50	97.60	97.70	97.80	97.00	97.50	98.90	97.50
Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin	Persentase bangunan berijin	26.32	27.20	28.50	29.40	33.00	36.50	27.20	28.50	36.40	28.50
Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	54.40	57.30	62.30	67.30	72.30	77.30	57.30	62.30	57.40	62.30

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Capaian atas Tujuan Renstra Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan sampai dengan TW II adalah 64,30% dari target tahunan 62,76%. Capaian tujuan ini merupakan hasil dari pembobotan sasaran;
- b. Capaian atas Sasaran Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW sampai dengan TW II adalah 98,90% dari target tahunan 97,50%. Walaupun capaiannya sudah melebihi dari target (101,44%) namun komponen indikator berdasarkan pada jumlah permohonan KRK yang masuk sampai dengan TW II, sehingga permohonan di TW III dan IV belum terhitung;
- c. Capaian atas Sasaran Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin sampai dengan TW II adalah 36,40% dari target tahunan 28,50%. Walaupun capaiannya sudah melebihi dari target (127,72%) namun komponen indikator berdasarkan pada jumlah permohonan PBG yang masuk sampai dengan TW II, sehingga permohonan di TW III dan IV belum terhitung;
- d. Capaian atas Sasaran Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan sampai dengan TW II adalah 57,40% dari target tahunan 62,30%. Walaupun capaiannya di bawah (92,13%) dari target namun komponen indikator berdasarkan pada jumlah sertifikat tanah yang teridentifikasi berdasarkan permohonan KRK yang masuk sampai dengan TW II, sehingga permohonan di TW III dan IV belum terhitung;

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penataan Ruang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Dinas Penataan Ruang berkontribusi pada Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota. Selain itu Dinas Penataan Ruang juga berkontribusi pada prioritas Pembangunan daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan focus:

Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:

1. Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur,
2. Peningkatan sarana prasarana olahraga,
3. Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata,
4. Pengembangan kawasan strategis cagar budaya,
5. Dukungan kemudahan berinvestasi dan perijinan, serta
6. Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Pengadaan lahan sebagaimana PP No 19 Tahun 2021 harus didahului dengan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang didalamnya meliputi DED, AMDAL, dan dokumen lainnya. Seringkali proses ini terlewati dan tidak teranggarkan, sehingga menyulitkan pelaksanaan;
2. Usulan Sport Center seringkali tidak disertai dengan kesiapan asset, penerima manfaat belum menganggarkan pemeliharaan, dan proses serah terima asset yang belum efisien;
3. Belum fokusnya pengembangan kawasan strategis, menyebabkan belum konsistennya penetapan proyek yang mendukung daya saing pariwisata yang akan diintervensi oleh Dinas Penetapan Ruang, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata;
4. Bangunan cagar budaya lebih banyak dimiliki oleh privat, sehingga intervensi penetapan BCB dan konservasi BCB masih tergantung pada permohonan pemilik;

5. Dinas Penataan Ruang berperan dalam penerbitan KRK, penetapan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung dan rekomendasi teknis reklame yang berkaitan erat dengan pendapatan retribusi. Kemudahan proses perijinan mempengaruhi kemudahan berinvestasi. Dalam pelaksanaannya waktu proses perijinan mendapat banyak keluhan dari pemohon, yang sebetulnya berkaitan dengan kevalidan data yang diajukan oleh pemohon dan kinerja system yang mana system yang digunakan adalah milik Pemerintah Pusat;
6. Kewenangan Dinas Penataan Ruang sebagai OPD teknis yang melakukan Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Kantor dan Balai Kecamatan dan Kelurahan belum mendapat dukungan dari Aset dan Tata Pemerintahan sebagai pengelola dan koordinator data-data BGN Aset Pemerintah Kota;
7. Belum optimalnya penyediaan sarpras ramah gender pada bangunan public.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- Jumlah BGN yang perlu di intervensi Dinas Penataan Ruang tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia;
- Belum tersedianya Perkada RDTR;
- Penerapan aplikasi pusat yaitu OSS KKPR dan SIMBG masih menemui kendala;
- Belum optimalnya database administrasi pertanahan di Kota Semarang.

b. Peluang

- Adanya sinkronisasi Renstra Kementrian PU dan Renstra Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan RTRW Kota Semarang;
- Adanya dokumen RPJP, RPJMD, Renstra dan RKPD yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
- Adanya bidang Pertanahan diharapkan akan tercapai peningkatan tertib administrasi pertanahan di Kota Semarang
- Adanya koordinasi dan sinkronisasi Lintas OPD dalam pelaksanaan program/kegiatan terutama Urusan Penataan Ruang;
- Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang;
- Dukungan stakeholder dan kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan IMB/PBG & KRK pada saat akan mendirikan bangunan semakin meningkat;

- Adanya pengembangan aplikasi secara online guna meningkatkan pelayanan pada bidang Tata Bangunan dan Bidang Tata Ruang.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sebagai berikut:

1. Dukungan daya saing pariwisata;
2. Kemudahan perijinan dan berinvestasi;
3. Optimalisasi dukungan pelayanan public melalui Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung milik pemerintah yang menjadi Kantor dan balai Kecamatan/Kelurahan;
4. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian tata ruang;
5. Urgensi Perkada RDTR Kota Semarang
6. Optimalisasi penertiban pelanggaran tata guna lahan dan bangunan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG				139.991.982.089	DINAS PENATAAN RUANG				139.991.982.089
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				90.675.524.497	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				90.675.524.497
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00%	75.639.063.117	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00%	75.639.063.117
			Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00 persen				Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00 persen	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Semarang	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100,00%	75.639.063.117	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Semarang	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100,00%	75.639.063.117
		Semarang	Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan,pem bangunan,	100,00 persen			Semarang	Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan,pem bangunan,	100,00 persen	

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
			pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung					pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung		
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5 Dokumen	4.429.447.718	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5 Dokumen	4.429.447.718
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	78 Dokumen	19.547.365.132	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	78 Dokumen	19.547.365.132
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	5 Dokumen	469.328.209	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	5 Dokumen	469.328.209
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya	Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan	8 Unit	716.000.000	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya	Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan	8 Unit	716.000.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota		Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan			yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota		Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan		
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	10 Pengelola	172.336.882	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	10 Pengelola	172.336.882
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10 Pengelola	136.520.438	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10 Pengelola	136.520.438
1.03.08.2.01.09	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Semarang	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2.310 Unit	446.330.425	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Semarang	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2.310 Unit	446.330.425
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan	Semarang	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah	53 Unit	374.914.000	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan	Semarang	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah	53 Unit	374.914.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi		Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi			Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi		Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi		
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	34 Unit	31.398.684.950	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	34 Unit	31.398.684.950
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	80 Unit	17.948.135.363	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	80 Unit	17.948.135.363
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Semarang	Persentase reklame yang berizin	100,00%	3.357.808.798	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Semarang	Persentase reklame yang berizin	100,00%	3.357.808.798
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	terselenggarakan penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100,00%	3.357.808.798	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	terselenggarakan penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100,00%	3.357.808.798
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Semarang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	12 Dokumen	553.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Semarang	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	12 Dokumen	553.000.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		
		Semarang					Semarang			
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Semarang	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1.951.608.798	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Semarang	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1.951.608.798
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Semarang	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	770.000.000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Semarang	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	770.000.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	83.200.000	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	83.200.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Semarang	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100,00%	2.110.015.912	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Semarang	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100,00%	2.110.015.912
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Semarang	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	2 kegiatan	2.110.015.912	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Semarang	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	2 kegiatan	2.110.015.912
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	675.843.056	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	675.843.056
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	440 Orang	208.675.981	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	440 Orang	208.675.981
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Semarang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	370 Orang	505.337.265	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Semarang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	370 Orang	505.337.265

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	8 Dokumen	720.159.610	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	8 Dokumen	720.159.610
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Semarang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100,00%	9.568.636.670	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Semarang	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100,00%	9.568.636.670
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100,00%	5.365.014.938	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Semarang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100,00%	5.365.014.938
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.235.792.837	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.235.792.837
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	770.914.595	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	770.914.595
		Semarang					Semarang			

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.100.383.662	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.100.383.662
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	257.923.844	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	257.923.844
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	319.453.986	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	319.453.986
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlag Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	209.236.884	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlag Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	209.236.884
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	110.217.102	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	110.217.102
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	1.771.947.906	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	1.771.947.906

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	211.145.904	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	211.145.904
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Dokumen	1.560.802.002	Sistem Informasi Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Dokumen	1.560.802.002
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100,00%	2.112.219.840	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100,00%	2.112.219.840
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	297.382.873	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	297.382.873
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	285.605.592	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	285.605.592

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	1.529.231.375	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	1.529.231.375
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Semarang			24.453.615.101	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Semarang			24.453.615.101
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Semarang	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00%	1.005.043.509	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Semarang	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00%	1.005.043.509
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00%	1.005.043.509	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00%	1.005.043.509
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 Dokumen	422.948.157	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 Dokumen	422.948.157
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Berita Acara	582.095.352	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Berita Acara	582.095.352
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN	Semarang	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan	100,00%	6.558.241.476	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN	Semarang	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan	100,00%	6.558.241.476

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RPKD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		tanah untuk pembangunan			TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		tanah untuk pembangunan		
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	6.558.241.476	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	6.558.241.476
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.558.241.476	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.558.241.476
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Semarang	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	779.477.394	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Semarang	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	779.477.394
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti	Semarang	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti	100,00%	779.477.394	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti	Semarang	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti	100,00%	779.477.394

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee			Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee		
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Semarang	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	547.581.268	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Semarang	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	547.581.268
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Semarang	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	190.682.268	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Semarang	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	190.682.268
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Sidang Panitia PertimbanganLan dreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	3 Dokumen	20.606.929	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Sidang Panitia PertimbanganLan dreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	3 Dokumen	20.606.929
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi	3 Dokumen	20.606.929	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi	3 Dokumen	20.606.929

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	(satu) Kabupaten/Kota		Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			(satu) Kabupaten/Kota		Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota	100,00%	0	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota	100,00%	0
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Semarang	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100,00%	0	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Semarang	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100,00%	0
2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota	100,00%	0	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota	100,00%	0
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Semarang	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100,00%	15.654.997.322	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Semarang	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100,00%	15.654.997.322
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Semarang	terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100,00%	234.529.035	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Semarang	terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100,00%	234.529.035
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2 Laporan	234.529.035	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2 Laporan	234.529.035

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Semarang					Semarang			
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Semarang	terinventarisasinya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	100,00%	15.420.468.287	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Semarang	terinventarisasinya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	100,00%	15.420.468.287
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Semarang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	15.420.468.287	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Semarang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	15.420.468.287
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Semarang	terkelolanya izin membuka tanah	100,00%	313.621.984	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Semarang	terkelolanya izin membuka tanah	100,00%	313.621.984
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Semarang	tertibnya izin membuka tanah	100,00%	313.621.984	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Semarang	tertibnya izin membuka tanah	100,00%	313.621.984
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Semarang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	2 Dokumen	198.575.714	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Semarang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	2 Dokumen	198.575.714
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Semarang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2 Dokumen	115.046.270	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Semarang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2 Dokumen	115.046.270
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Semarang	terselesaikannya penatagunaan tanah	100,00%	142.233.416	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Semarang	terselesaikannya penatagunaan tanah	100,00%	142.233.416

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100,00%	142.233.416	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Semarang	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100,00%	142.233.416
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu)Kabupaten/ Kota	1 Laporan	101.019.558	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu)Kabupaten/ Kota	1 Laporan	101.019.558
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	20.606.929	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	20.606.929
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.606.929	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	20.606.929
X.XX	NON URUSAN	Semarang			24.862.842.491	NON URUSAN	Semarang			24.862.842.491

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semarang	Peningkatan kualitas SDM	100,00%	24.862.842.491	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semarang	Peningkatan kualitas SDM	100,00%	24.862.842.491
		Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100,00%			Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	
		Semarang	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100,00%			Semarang	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100,00%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	106.850.100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	106.850.100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.929.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	11.929.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.492.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.492.700
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	1 Dokumen	11.167.300	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan	1 Dokumen	11.167.300

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Perubahan RKA-SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Perubahan RKA-SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	10.144.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	10.144.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.167.300	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.167.300
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	24.108.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	24.108.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25.841.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	25.841.800
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	15.281.263.687	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semarang	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	15.281.263.687
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	13.654.607.287	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	13.654.607.287
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen	1.596.266.400	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen	1.596.266.400
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	10.230.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	10.230.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	10 Laporan	10.080.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	10 Laporan	10.080.000

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
			an/Semesteran SKPD					an/Semesteran SKPD		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	10.080.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	10.080.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100,00%	791.029.485	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100,00%	791.029.485
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	125.045.050	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	125.045.050
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	665.984.435	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	665.984.435
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	6.605.055.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semarang	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	6.605.055.300
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	180.267.581	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	180.267.581

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	700.372.830	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	700.372.830
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	169.147.330	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	169.147.330
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	232.232.622	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	232.232.622
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	521.281.863	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	521.281.863
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	23.839.338	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	30 Dokumen	23.839.338
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	1.678.373.893	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	1.678.373.893
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	3.099.539.843	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	3.099.539.843

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	952.307.940	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	952.307.940
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200 Laporan	9.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200 Laporan	9.500.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75 Laporan	315.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75 Laporan	315.000.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	627.807.940	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	627.807.940
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	1.126.335.979	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	1.126.335.979
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	54 Unit	666.559.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	54 Unit	666.559.250

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	423.458.549	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	423.458.549	
JUMLAH					139.991.982.089	JUMLAH					139.991.982.089

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.

- 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%

- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan”

dengan indikator tujuan **“Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yaitu:

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW;
2. Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin;
3. Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
2. Persentase bangunan berijin
3. Persentase tertib administrasi pertanahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2021-2026

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	%	85

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kesesuaian tata ruang	Persentase kawasan strategis yang tertata	%	81.82
	Persentase kesesuaian tata ruang	%	100.00
Meningkatnya bangunan dan reklame yang sesuai dengan peraturan perijinan	Persentase kepatuhan bangunan ber-IMB	%	62.18
	Persentase reklame berizin	%	80.00
Meningkatnya kualitas kinerja pelayan perangkat daerah	Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	poin	78.00
Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan	Persentase meningkatnya ketertiban administrasi pertanahan	%	84.21

TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA 2021-2026 HASIL REVIU

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	%	62.76
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	%	97.50
Meningkatnya kepatuhan bangunan berijin	Persentase bangunan berijin	%	28.50
Meningkatnya tertib Administrasi Pertanahan	Persentase tertib administrasi pertanahan	%	62.30
Terwujudnya tata ruang yang berdayaguna dan berkelanjutan	Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan	%	62.76

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Penataan Ruang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan” dan indikator sasaran “Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW, Persentase bangunan berijin, Persentase tertib administrasi pertanahan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
1.03.2.10.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG							209.865.76 0.048	224.665.76 0.048	139.991.98 2.089
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							161.877.19 7.330	176.482.72 6.344	90.675.524 .497
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00%	100,00%	100,00%	144.774.09 5.314	159.104.87 0.889	75.639.063. 117
		Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100%	Persentase Tertatanya Bangunan Gedung	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen			
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100,00%	100,00%	100,00%	144.774.09 5.314	159.104.87 0.889	75.639.063. 117
		Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	100%	Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, pengawasan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen			
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik	Meningkatnya jumlah peserta Workshop Penerapan SLF di Kota Semarang	125 orang	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4.100.000.000	4.144.647.366	4.429.447.718

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARG ET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBA HAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHA N 2023
	Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG						
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TABG	10 Doku men							
		Meningkatnya pemahaman stakeholder terkait SIMBG	100 orang							
		Rasio SK IMB/Rekomendasi Teknis IMB	86,36 %							
		Rasio SK IMB Pertandaan/Rektek Pertandaan	41,18 %							
		Tersedianya Sistem Implementasi SIMBG	1 aplika si							
		Jumlah Labelisasi SLF	20 bangu nan							
		Rasio SK Reklame/Rektek Reklame	58,54 %							
		Jumlah rekomendasi teknis IMB/PBG yang diberikan oleh Pemkot dalam tahun eksisting	2.200 doku men							

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		Jumlah bangunan yang mendapatkan Rekomendasi Teknis TACB	5 dokumen							
		Jumlah bangunan yang mendapatkan SLF	23 dokumen							
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	28 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	118 Dokumen	118 Dokumen	78 Dokumen	99.561.058.979	105.561.058.979	19.547.365.132
		Terbangunnya Gedung Pemerintah di tahun berjalan	20 Gedung							
		Terbangunnya Fasilitas Publik ditahun berjalan	15 bangunan							
		Terbangunnya Sport Center di tahun berjalan	10 Lokasi							
		Jumlah dokumen supervisi pengawasan pembangunan	45 Dokumen							
		Persentase bangunan gedung yang terbangun Distaru terhadap seluruh aset bangunan gedung milik Pemkot	3,00%							

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Penetapan Perda Retribusi Perijinan tertentu	1 Dokumen	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	550.000.000	596.128.209	469.328.209
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Kota Semarang	1 Dokumen							
		Penetapan Perwal tentang Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Ijin mendirikan Bangunan	1 Dokumen							
		Penetapan regulasi terkait Tim Ahli bangunan gedung	1 Dokumen							
		Penetapan regulasi terkait Bangunan Gedung Hijau di Kota Semarang	1 Dokumen							
1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Penetapan regulasi terkait Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	135 Unit	135 Unit	8 Unit	746.000.000	796.000.000	716.000.000
		Jumlah Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk	135 Dokumen							

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		dilindungi/dilestarikan								
		Jumlah Kawasan yang diteapkan oleh Walikota untuk dilindungi/dilestarikan	1 Dokumen							
		Jumlah Label yang terpasang pada bangunan cagar budaya	14 buah							
1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen pendukung Bantuan Teknis masyarakat pemilik bangunan Gedung Cagar Budaya	10 Dokumen	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	10 Pengelola	10 Pengelola	10 Pengelola	325.000.000	325.000.000	172.336.882
1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) yang mendapatkan kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10 Dokumen	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	10 Pengelola	10 Pengelola	10 Pengelola	300.000.000	300.000.000	136.520.438
1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Penerbitan Peringatan Pelanggaran Bangunan	482 Dokumen	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	2.310 Unit	2.310 Unit	2.310 Unit	496.955.000	546.955.000	446.330.425
		Jumlah pelanggaran yang telah terselesaikan	409 Dokumen							

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		Jumlah bangunan gedung yang dilakukan penilikan BG oleh Penilik Bangunan	2.310 bangunan							
1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Pemeriksaan Kelaikan fungsi Rumah Tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka Penerbitan sertifikat laik fungsi	53 bangunan	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	53 Unit	53 Unit	53 Unit	399.814.000	449.814.000	374.914.000
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung	11 Dokumen	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	36 Unit	36 Unit	34 Unit	24.802.431.972	32.892.431.972	31.398.684.950
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah	20 bangunan							
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Fasilitas Publik	2 bangunan							
		Jumlah rehab, renovasi dan ubahsuai Sport Center	3 Lokasi							
		Jumlah dokumen supervisi Rehab, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung	25 dokumen							

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terpelihara dan terawatnya bangunan gedung Pemerintah	25 bangunan	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	80 Unit	80 Unit	80 Unit	13.492.835.363	13.492.835.363	17.948.135.363
		Terpelihara dan terawatnya Sport Center	20 lokasi							
		terpelihara dan terawatnya bangunan gedung dan fasilitas Kelurahan dan kecamatan	20 bangunan							
		Terpelihara dan terawatnya Fasilitas Publik	15 bangunan							
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase reklame yang berizin	100%	Persentase reklame yang berizin	100,00%	100,00%	100,00%	4.900.000.000	4.900.000.000	3.357.808.798
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100%	terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota	100,00%	100,00%	100,00%	4.900.000.000	4.900.000.000	3.357.808.798
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi terkait Titik Reklame yang ditetapkan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000	600.000.000	553.000.000

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARG ET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBA HAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHA N 2023
		Tersedianya regulasi terkait penilikan gedung yang ditetapkan	6 dokumen							
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Videotron terbangun	1 buah	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	3.300.000.000	3.300.000.000	1.951.608.798
		Jumlah Titik Reklame di Tanah Pemkot Semarang	810 buah							
		Jumlah reklame non permanen yang berizin	3.087 buah							
		Jumlah reklame permanen yang berizin	688 buah							
		Jumlah Titik Reklame Non Komersial	5 buah							
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah pembongkaran reklame non permanen tidak berizin	2.655 buah	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	850.000.000	850.000.000	770.000.000

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBA HAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHA N 2023
		Persentase pembongkaran reklame tidak berizin	100%							
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penerbitan SP1 Pengawasan Reklame	176 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000	83.200.000
		Jumlah Penerbitan SP2 Pengawasan Reklame	144 Dokumen							
		Jumlah penerbitan SP pembongkaran	482 Dokumen							
		Jumlah Permasalahan Reklame	802 Dokumen							
		Menurunnya Persentase permasalahan reklame yang terselesaikan	39,90 %							
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100,00%	izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan	100,00%	100,00%	100,00%	1.257.746.036	1.357.746.036	2.110.015.912
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	2 kegiatan	terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1.257.746.036	1.357.746.036	2.110.015.912
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah Kota Semarang	2 pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	150 Orang	150 Orang	150 Orang	276.049.765	376.049.765	675.843.056

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan bersertifikat ahli di wilayah Kota Semarang	440 orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	440 Orang	440 Orang	440 Orang	208.675.981	208.675.981	208.675.981
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah penerbitan sertifikat IPTB (Izin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan gedung) di Kota Semarang	370 dokumen	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	370 Orang	370 Orang	370 Orang	547.007.198	547.007.198	505.337.265
		Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memahami tata cara memeriksa dan menerima hasil Pekerjaan Konstruksi	100 orang							
		Jumlah Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang memahami Peraturan Perundangan Jasa Konstruksi	100 orang							
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kota Semarang untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	2 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen	226.013.092	226.013.092	720.159.610
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangan yang	2 dokumen							

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARG ET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala								
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan	2 dokumen							
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah Kota Semarang	2 dokumen							
		Jumlah pelaku jasa konstruksi	1.700 orang							
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100,00%	Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun	100,00%	100,00%	100,00%	10.945.355.980	11.120.109.419	9.568.636.670
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100,00%	Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang	100,00%	100,00%	100,00%	5.532.211.011	5.581.964.450	5.365.014.938

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
	(RRTR) Kabupaten/Kota									
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Regulasi (Perda/Perwal) Tata Ruang	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.235.792.837	1.235.792.837	1.235.792.837
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kota Semarang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	770.914.595	770.914.595	770.914.595
		Dokumen Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ)	1 Dokumen							
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	% Luas RTH Perkotaan	10,56 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.234.833.174	3.234.833.174	3.100.383.662
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Meningkatnya Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	400 orang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	290.670.405	340.423.844	257.923.844
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	386.053.986	386.053.986	319.453.986

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	152 Ha	Jumlag Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	209.236.884	209.236.884	209.236.884
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW	6,56%	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	176.817.102	176.817.102	110.217.102
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	2.681.921.143	2.781.921.143	1.771.947.906
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Forum Penataan Ruang	2 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	821.243.044	921.243.044	211.145.904
		Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	9,19%							
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Aplikasi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.860.678.099	1.860.678.099	1.560.802.002
		Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto	64,81%							

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		udara terhadap luas daratan								
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100,00%	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	2.345.169.840	2.370.169.840	2.112.219.840
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif bidang Penataan Ruang	1 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	297.382.873	297.382.873	297.382.873
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi penertiban dan penegakan hukum bidang Penataan Ruang	1 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	285.605.592	310.605.592	285.605.592
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi tata ruang OUV (Outstanding Universal Value)	1 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.762.181.375	1.762.181.375	1.529.231.375
		Jumlah rekomendasi Badan Pengelola Kawasan	1 dokumen							
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							24.190.801.010	24.315.801.010	24.453.615.101
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN	terselesaikannya sengketa tanah	100,00%	terselesaikannya sengketa tanah	100,00%	100,00%	100,00%	781.158.501	804.751.409	1.005.043.509

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
	SENGKETA TANAH GARAPAN	garapan di kota semarang		garapan di kota semarang						
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00%	terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang	100,00%	100,00%	100,00%	781.158.501	804.751.409	1.005.043.509
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa konflik dan perkara pertanahan yang terinventarisasi	55 dokumen aduan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	322.802.107	322.802.107	422.948.157
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aduan sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti melalui mediasi	35 dokumen aduan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35 Berita Acara	35 Berita Acara	35 Berita Acara	458.356.394	481.949.302	582.095.352
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%	6.637.818.927	6.486.473.136	6.558.241.476
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	terselesaikannya penggantian kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%	6.637.818.927	6.486.473.136	6.558.241.476
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan	Terbitnya Surat Walikota penetapan lokasi penerima ganti kerugian dan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	6.637.818.927	6.486.473.136	6.558.241.476

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
	Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	santunan tanah untuk pembangunan		Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	100,00%	100,00%	778.617.566	819.831.424	779.477.394
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100,00%	100,00%	100,00%	778.617.566	819.831.424	779.477.394
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	jumlah subjek dan objek redistribusi tanah yang terinventarisasi	3 lokasi	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	587.935.298	587.935.298	547.581.268
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Surat Walikota objek redistribusi tanah yang terinventarisir	3 dokumen	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	190.682.268	190.682.268	190.682.268
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah	Jumlah redistribusi tanah objek Reforma	3 lokasi	Jumlah Dokumen Sidang Panitia PertimbanganLandrefo	-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	20.606.929	20.606.929

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
	Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Agraria yang terkoordinir		rm dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah						
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah penataan akses yang terkoordinasi	3 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-	3 Dokumen	3 Dokumen	-	20.606.929	20.606.929
2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota	100,00%	ditetapkannya ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100,00%	terselesaikannya penetapan tanah ulayat	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0
2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota	100,00%	terselenggarakannya penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota	100,00%	100,00%	100,00%	0	0	0
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100,00%	terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong	100,00%	100,00%	100,00%	15.497.917.035	15.650.947.322	15.654.997.322
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100,00%	terselesaikannya permasalahan tanah kosong	100,00%	100,00%	100,00%	205.479.035	230.479.035	234.529.035

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah	5 kasus	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	205.479.035	230.479.035	234.529.035
		Jumlah lokasi pengelolaan tanah kosong bermasalah yang terkoordinir	2 lokasi							
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	100,00%	terinventarisasikannya tanah kosong serta penyelesaian pemanfaatan tanah kosong	100,00%	100,00%	100,00%	15.292.438.000	15.420.468.287	15.420.468.287
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang terinventarisasi	35.000 bidang	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.292.438.000	15.420.468.287	15.420.468.287
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	terkelolanya izin membuka tanah	100,00%	terkelolanya izin membuka tanah	100,00%	100,00%	100,00%	313.621.984	313.621.984	313.621.984
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	tertibnya izin membuka tanah	100,00%	tertibnya izin membuka tanah	100,00%	100,00%	100,00%	313.621.984	313.621.984	313.621.984
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terbitnya Surat Rekomendasi Izin Membuka Tanah	5 dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	5 Dokumen	-	2 Dokumen	198.575.714	198.575.714	198.575.714
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah pemanfaatan tanah negara yang terkendali	2 dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	115.046.270	115.046.270	115.046.270

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARG ET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBA HAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHA N 2023
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	terselesaikannya penatagunaan tanah	100,0 0%	terselesaikannya penatagunaan tanah	100,00%	100,00%	100,00%	181.666.99 7	240.175.73 5	142.233.41 6
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100,0 0%	tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota	100,00%	100,00%	100,00%	181.666.99 7	240.175.73 5	142.233.41 6
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Data perencanaan penggunaan tanah yang terkoordinasi	1 doku men	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	181.666.99 7	198.961.87 7	101.019.55 8
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Data zona nilai tanah yang terpetakan	1 doku men	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	-	1 Dokume n	1 Dokume n	-	20.606.929	20.606.929
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah Kota Semarang yang terkonsolidasi untuk rencana pembangunan	2 wilaya h	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokume n	2 Dokume n	-	20.606.929	20.606.929
X.XX	NON URUSAN							23.797.761 .708	23.867.232 .694	24.862.842 .491
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Peningkatan kualitas SDM	100,0 0%	Peningkatan kualitas SDM	100,00%	100,00%	100,00%	23.797.761. 708	23.867.232. 694	24.862.842. 491

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
	DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%			
		Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100,00%	Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang	100,00%	100,00%	100,00%			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	180.178.660	180.178.660	106.850.100
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Renja dan Dokumen Renstra)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	97.458.360	97.458.360	11.929.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.492.700	12.492.700	12.492.700
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.167.300	11.167.300	11.167.300
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.608.000	7.608.000	10.144.000

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
				Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD						
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA perubahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.167.300	11.167.300	11.167.300
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	16.704.000	16.704.000	24.108.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui dokumen LAKIP dan LKPJ SKPD	4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	23.581.000	23.581.000	25.841.800
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	15.274.195.503	15.274.195.503	15.281.263.687
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	13.647.539.103	13.647.539.103	13.654.607.287
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Optimal	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	80 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	1.596.266.400	1.596.266.400	1.596.266.400

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
				Pelaksanaan Tugas ASN						
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	10.230.000	10.230.000	10.230.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10.080.000	10.080.000	10.080.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10.080.000	10.080.000	10.080.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100,00%	Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	620.711.950	680.711.950	791.029.485
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	125.045.050	125.045.050	125.045.050
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	495.666.900	555.666.900	665.984.435

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00%	100,00%	100,00%	5.644.031.675	5.653.502.661	6.605.055.300
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	20 Paket	180.267.581	180.267.581	180.267.581
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Jenis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	474.605.883	480.205.078	700.372.830
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	80 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 Paket	80 Paket	80 Paket	161.162.700	161.162.700	169.147.330
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	229.899.624	229.899.624	232.232.622
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	100 Paket	507.900.535	507.900.535	521.281.863
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30 Buah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	23.839.338	23.839.338	23.839.338
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	930.429.620	930.429.620	1.678.373.893

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGE T	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dinas Penataan Ruang	50 indeks SPBE	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	3.135.926.394	3.139.798.185	3.099.539.843
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	952.307.940	952.307.940	952.307.940
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat kantor	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200 Laporan	1.200 Laporan	1.200 Laporan	9.500.000	9.500.000	9.500.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	315.000.000	315.000.000	315.000.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi pemeliharaan aset tetap lainnya, Pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	627.807.940	627.807.940	627.807.940
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	1.126.335.980	1.126.335.980	1.126.335.979
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan perorangan	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU ANGGARAN		
					RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas dan kendaraan dinas pejabat		Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54 buah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	54 Unit	54 Unit	666.559.250	666.559.250	666.559.250
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	2 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	4 Unit	423.458.550	423.458.550	423.458.549
JUMLAH								209.865.760.048	224.665.760.048	139.991.982.089

Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

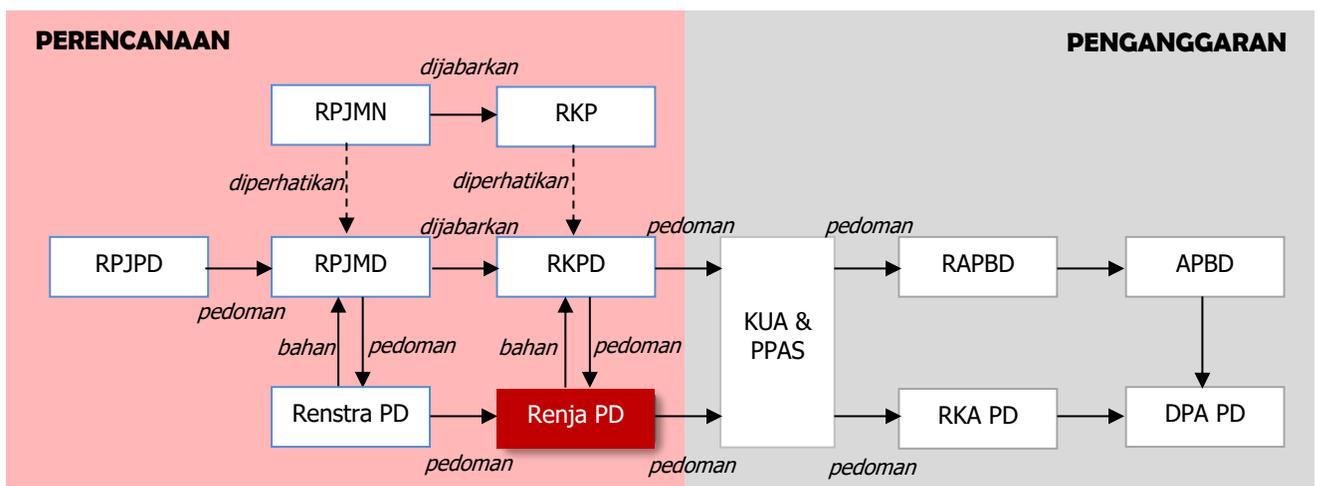
6. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (2) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun

- Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang; dan
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43); dan
 - t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024			
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	76,96%	97,49%	66,64%	98,94%	148,47%	69,69%	266,12%	345,79%	345,79%
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	100%	100%	30%	100	100%	100	100	100
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	-	Pembangunan & Perawatan Sumur	20 unit	10 unit	20 unit	6 unit	100	20 unit	100%	100	100
		-	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun						4 titik			
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	0	100%	1982,00%	1982,00%	100%	2082,00%	2082,00%	2082,00%
1.03.02.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	100%	100%	991 SR	97,14	50 SR	20%	20	20

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.03.02.2.01.07	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	- SPAM Jaringan Perpipaan Terbangun	50 SR	100%	-	991 SR	-	50 SR	20%	20	20
		- Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat						1000 SR			
01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	- Persentase rumah tangga bersanitasi	92,75%	98,93%	88,51%	98,94%	111,78%	90,86%	288,73%	311,30%	311,30%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Terkelolanya sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/ kota	100%	-	100%	10%	100	100%	40%	40	40
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	- Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	11 unit	100%	100%	1 unit	100	11 unit	40%	40	40
		- Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota						100 Rumah Tangga			
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	- Terlaksananya Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1 unit	100%	100%	500 unit	100		40%	40	40
		- Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik						500 unit			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	- Pengoperasian dan Pemeliharaan SPAL	2 unit	-	100%	0 unit	100	0	40%	40	40
		- Pengoperasian dan Pemeliharaan IPLT	100%	-	-	100%	-	0	20%	20	20
		- Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara									
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	- Tersedianya sarana dan prasarana IPLT	100%								
		- Kapasitas IPLT Terbangun						75 M ³ /Hari			
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	- Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	100%	99,86%	26%	23,38%	89,92%	48%	171,24%	171,24%	171,24%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur di lingkungan permukiman	100%	-	100%	99,86%	99,86	100%	39,97%	39,97	39,97
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Perbaiki jalan paving, jalan aspal, dan saluran di lingkungan permukiman	16 kecamatan	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan	16 kecamatan (20%)	100		16 kecamatan (60%)	60	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		- Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			0			177 Sistem Jaringan			
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan sarpras lingkungan permukiman	12 bulan	12 bulan (20%)	12 bulan (20%)	12 bulan (20%)	100		12 bulan (60%)	60	60
		- Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			0			177 Sistem Jaringan			
01.03.02	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	- Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	0	100%	100,00%	100%	100%	200%	200%	200%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	- Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	-	100%	100%	100	100%	40%	40	40
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarpras Rusun Kota Semarang	8 Rusunawa	-	-	-	-	8 Rusunawa			
		- Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah,	-	-	-	-	-	1 Kawasan			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	- Terpeliharanya bangunan dan sarpras rusun	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		- Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						8 Kawasan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		- Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		- Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024			
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)	
		-	Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
			Nilai AKIP	74	-	72	72,91	101,26	72,5			
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen Renstra & Renja	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	50%	50	50
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 dokumen			
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60	60
		-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD						1 dokumen			
1.04.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60	60
		-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 dokumen			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60	60
		-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD						1 dokumen			
1.04.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60	60
		-	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						1 dokumen			
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Terlaksananya koordinasi & sinkronisasi capaian kinerja	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60	60
		-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 laporan			
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen LAKIP	2 dokumen (100%)	2 dokumen (20%)	2 dokumen (100%)	2 dokumen (20%)	100	2 dokumen (20%)	60%	60	60
		-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2 laporan			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						164 orang/bulan			
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Tertib pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1 dokumen			
1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan penatausahaan & verifikasi keuangan	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60	60
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						2 dokumen			
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir tahun		1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60	60
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2 laporan			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Jumlah Dokumen Laporan semesteran realisasi anggaran	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60	60
		-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						18 laporan			
1.04.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Jumlah Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen (100%)	1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen (20%)	100	1 dokumen (20%)	60%	60	60
		-	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						2 dokumen			
1.04.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Jumlah pakaian pelindung diri tersedia	2000 set (100%)	100%	100%	100%	100	400 set	40%	40	40
		-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1 paket			
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	5 kegiatan (100%)	100%	100%	100%	100	1 kegiatan (20%)	40%	40	40
		-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1 dokumen			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.04.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Kegiatan sosialisasi	5 kegiatan	0%	100%	0%	0	1 kegiatan	40%	40	40
		-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100 orang			
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Terlaksananya bimbingan teknis	20 kegiatan (100%)	100%	100%	100%	100	4 kegiatan (20%)	40%	40	40
		-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						120 orang			
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	50 jenis	100%	100%	100%	100	10 jenis	60%	60	60
		-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 paket			
1.04.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 jenis	100%	100%	100%	100	25 jenis	60%	60	60
		-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						4 paket			
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Jenis Peralatan dan Rumah Tangga	100 jenis	100%	100%	100%	100	25 jenis	60%	60	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		- Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						4 paket			
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor	100 jenis	100%	100%	100%	100	25 jenis	60%	60	60
		- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						4 paket			
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	50 jenis	100%	100%	100%	100	10 jenis	60%	60	60
		- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						4 paket			
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Tersedianya Makanan dan Minuman	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12 laporan			
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 laporan			
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Penataan dan penertiban arsip dinas	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		- Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						164 dokumen			
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	- Terpenuhinya dukungan pelaksanaan SPBE	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024			
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)	
		-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 dokumen				
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	3 unit	3 unit	3 unit	100	100%	40%	40	40
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan									
		-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 unit				
1.04.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	-	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	6 unit	3 unit	2 unit	0 unit	100	2 unit	40%	40	40
		-	Jumlah unit alat besar yang disediakan					1 unit				
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	Jumlah Mebel									
		-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					20 unit				
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 laporan				
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 laporan			
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Terwujudnya Peningkatan Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12 laporan			
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	60%	60	60
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 laporan			
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	100%	100	100%	40%	40	40
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
		- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						270 unit			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
						Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	-	Jumlah Belanja Perawatan dan Bahan Bakar Kendaraan Operasional	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
		-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						110 unit			
1.04.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perijinan Alat Besar	-	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
		-	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya						20 unit			
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	-	Mebeleur terpelihara rutin/berkala	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
		-	Jumlah Mebel yang Dipelihara						300 unit			
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
		-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						5 unit			
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Peralatan Gedung Kantor Terpelihara Rutin/Berkala	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						200 unit			
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	- Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	300%
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	- Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	16 kecamatan	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40	40
		- Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi						15 Unit Rumah			
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	- Rumah susun Umum dan/atau Rumah Khusus terbina dan terkelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	- Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan penghuni Rusun	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
		- Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun						4 laporan			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
1.04.02.2.06.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	- Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia	1 kegiatan	1 kegiatan (20%)	1 kegiatan (20%)	1 kegiatan (20%)	100	1 kegiatan (20%)	40%	40	40
		- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	-					1 laporan			
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	- Persentase rumah layak huni	100,00%	98,63%	98,87%	98,34%	99,46%	99,15%	296%	296,12%	296,12%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	100%	0	100%	0	0	100%	20%	20	20
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	- Database survey	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen (100%)	0 dokumen	0	1 dokumen (20%)	20%	20	20
		- Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh						-			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	50%	100%	50%	50	100%	50%	50	50
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	- Tersusunnya DED sarana prasarana jalan dan saluran kawasan permukiman kumuh	5 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	20%	20	20
		- Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh						10 dokumen			
1.04.03.2.03.02	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	- Rehabilitasi RTLH	16 kec.	16 kec.	16 kec.	16 kec.	100	16 kec.	60%	60	60
		- Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki						730 Unit Rumah			
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	- Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100,00%	96,96%	100,00%	250,00%	250,00%	100,00%	446,96%	446,96%	446,96%
		- Persentase Ruang Terbuka Hijau	44,46%	44,23%	44,26%	44,36%	100,23%	44,31%	132,90%	298,92%	298,92%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	- Terwujudnya urusan penyelenggaraan PSU yang menunjang fungsi hunian	100%	96,96%	100%	96,96%	96,96	100%	39,99%	39,96	39,96
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	- Persentase Lampu PJU Terpasang	99%	85%	95,87%	85%	85	97%	37%	37	37

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	untuk Menunjang Fungsi Hunian										
		- Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 1	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40	40
		- Terpeliharanya Lampu PJU Wilayah 2	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40	40
		- Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian						16 lokasi			
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	- Cakupan perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
		- Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk	20,84%	-	-	-	-	17,70%	20%	20	20
		- Terkelolanya ruang terbuka hijau	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100	16 kecamatan	40%	40	40
		- Terkelolanya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau	16 kecamatan (100%)	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40	40
		- Terpenuhinya sarana prasarana kebun bibit	16 kecamatan (100%)	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	16 kecamatan (20%)	100	16 kecamatan (20%)	40%	40	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024		
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10)	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		- Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						16 laporan			
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian										
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan										
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	- Terlaksananya kegiatan serah terima PSU	100%	100%	100%	100%	100	100%	40%	40	40
		- Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang						10 laporan			
		- Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan									

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2023

Dalam mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yang dicapai melalui beberapa program urusan wajib pelayanan dasar meliputi:

- Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada penyediaan sumber daya air dalam bentuk pembangunan sumur air tanah untuk air baku.
 - 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada penyediaan dan pengelolaan air minum dalam bentuk pemabangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan.
 - 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dalam bentuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota, sub sistem pengelolaan setempat serta operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik.
 - 4) Program Pengembangan Permukiman
Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman serta pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/kota.
 - 5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
Program ini diarahkan untuk pemeliharaan bangunan dan lingkungan.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Program ini diarahkan pada perencanaan, penganggaran, evaluasi, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah dan pemeliharaan barang milik daerah.
 - 2) Program Pengembangan Perumahan
Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi, pembinaan pengelolaan rumah susun umum, dan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
 - 3) Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan.

Pada tahun 2023, muncul Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terdapat pemutakhiran nama kegiatan dan sub kegiatan sehingga ada beberapa target dan realisasi indikator yang belum selaras dengan indikator yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026.

Dari data sebagaimana Tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 3 Urusan, 10 Program dan 10 Indikator Kinerja Program dan 17 Kegiatan dengan 55 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 10 Indikator kinerja program, terdapat 9 Indikator yang melampaui target, serta 1 Indikator belum memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 2 Urusan 10 Program dengan 10 indikator program dan 17 kegiatan dengan 55 indikator
 - b) Dari 10 indikator kinerja program, terdapat 9 indikator yang diperkirakan dapat melampaui target, serta 1 indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 10 indikator kinerja kegiatan, terdapat 9 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, serta 1 Indikator masih dalam proses memenuhi Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Triwulan II Tahun 2023

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di kawasan perdesaan			
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan			
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun			
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum			
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 Ha			
	Penyusunan rencana tapak (site plan) dan DED peremajaan/pemugaran permukiman kumuh			
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			
3	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pengadaan Alat Besar			
	Pengadaan Mebel			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan Mebel			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	JUMLAH			

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 10 program, dan 11 kegiatan dan 56 sub kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah sebesar Rp 296.224.030.773. Dari anggaran tersebut, terdapat perubahan menjadi Rp 373.138.797.406.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sub urusan permukiman yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN	Indikator Kinerja	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
Tujuan: Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat		97,00	97,50	98,00	99,00			96,34	98,78	98,00	99,00		
Sasaran: Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	84	76	60	40	20		0,14	76,62	76,62	40	20		52
	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan		76,53	77,53	78,53	79,53			80,25	80,25	78,53	79,53		
	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	46,26	44,26	44,31	44,36	44,41		44,23	44,36	44,36	44,36	44,41		44,31
Sasaran: Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		72	72,5	73	73,5			72,91	72,91	73	73,5		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lingkungan Permukiman Sehat”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 96,34% dari target sebesar 97% (capaian sebesar 99,32%);
- b. Sasaran “Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Luasan Kawasan Kumuh” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 76,62% dari target sebesar 76% (capaian sebesar 100,81%);
 - 2) Indikator “Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan” telah mencapai target sebesar 76,53%, dengan realisasi sebesar 80,25% (capaian sebesar 104,87%);
 - 3) Indikator “Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 44,36% dari target sebesar 44,26% (capaian sebesar 100,23%).
- a. Sasaran “Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja Nilai berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 72,91% dari target sebesar 72% (capaian sebesar 101,26%).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;

3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
6. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
7. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, Bidang Pendayagunaan Infrastruktur dan UPTD;
8. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
9. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
10. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota diantaranya:

1. Perubahan lokasi pekerjaan karena sudah dikerjakan Perangkat Daerah lain, kecamatan dan kelurahan, sehingga mengakibatkan pengunduran waktu pelaksanaan kegiatan, dan perubahan desain.
2. Batas waktu antara masuknya usulan pokok pikiran DPRD dan penginputan SIPD terlalu singkat, sehingga keterbatasan waktu dalam survey perencanaan.
3. Dengan adanya ketentuan Permendagri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dimana pada akun belanja modal tidak dapat dilakukan perubahan rincian obyek belanja, sehingga banyak pekerjaan baru dapat dilaksanakan pada Anggaran Perubahan.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dapat mengakomodir usulan pembangunan sumur air tanah di beberapa wilayah di Kota Semarang karena masuk dalam zona merah.
5. Timbulnya persepsi kurang tepat sasaran oleh penerima bantuan karena adanya perbedaan kriteria dan persyaratan mekanisme bantuan dari masing-masing sumber dana.

6. Inventarisasi data Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang bukan milik Pemerintah Kota Semarang, baik milik pribadi maupun swasta belum terpenuhi.
7. Belum terselesaikannya pengadaan lahan akibat penolakan oleh warga masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- 1) Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
- 2) Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan perangkat daerah;
- 3) Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
- 4) Tuntutan dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Kerjasama antar perangkat daerah serta kemitraan dengan swasta.

b. Peluang:

- 1) Adanya data yang akurat memberikan kelancaran penyampaian informasi yang cepat dan tepat.
- 2) Berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang dan potensi di segala bidang yang ada serta pelayanan apa saja yang disediakan untuk melayani masyarakat.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang sebagai berikut:

1. Kurang maksimalnya lahan hijau pemanfaatan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman;

2. Belum optimalnya pemanfaatan bangunan vertikal sebagai hunian untuk mengentaskan kawasan kumuh;
3. Belum meratanya pengentasan kawasan kumuh untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas;
4. Kurang memadainya jumlah ketersediaan lubang pemakaman umum dalam memenuhi layanan kebutuhan Masyarakat;
5. Kurangnya jangkauan akses layanan rumah tangga bersanitasi untuk menunjang kualitas hidup sehat di lingkungan Masyarakat;
6. Kurangnya pemenuhan rumah layak huni untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di kawasan perkotaan;
7. Kurangnya ketersediaan lahan yang diperuntukkan untuk penyediaan sarana prasarana utilitas dasar di kawasan perkotaan;
8. Kurang optimalnya peningkatan pelayanan dan pengelolaan akses air minum dan air limbah;
9. Kurang optimalnya pemeliharaan dan pengawasan fasilitas keberadaan taman dalam memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau yang berkualitas.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	55.75%	1.375.000.000						
1.03.02.201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%	1.375.000.000						
1.03.02.201.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Kota Semarang	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	3 unit	1.375.000.000	Pembangunan Unit Air Baku	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	3 unit	1.325.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%	0						
1.03.03.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR	0						

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.03.03 .2.01.0 028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Semarang	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	50 Liter/Detik	0	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	50 Liter/Detik	50.000.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Semarang	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,69%	3.999.197.688						
1.03.05 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	null	null	3.999.197.688						
1.03.05 .2.01.0 007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 lokasi	147.380.000.000						
1.03.05 .2.01.0 008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177 lokasi	53.449.002.800						
1.03.05 .2.01.0 025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Semarang	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 M ³ /Hari	3.482.672.688	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 M ³ /Hari	3.432.672.688	
1.03.05 .2.01.0 036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 M ³ /Hari	516.525.000	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 M ³ /Hari	516.525.000	
1.03.05 .2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan	100%	200.829.002.800						

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Infrastruktur di Lingkungan Permukiman								
		Kota Semarang	Terwujudnya Urusan Penyelenggaraan PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100 %							
1.03.05 .2.01.0 007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 lokasi	147.380.000.000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 lokasi	147.380.000.000	
1.03.05 .2.01.0 008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177 lokasi	53.449.002.800	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177 lokasi	53.449.002.800	
1.03.05 .2.01.0 025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Semarang	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 M ³ /Hari	3.482.672.688	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 M ³ /Hari	3.482.672.688	
1.03.05 .2.01.0 036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 M ³ /Hari	516.525.000	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 M ³ /Hari	516.525.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kota Semarang	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	64%	0						
1.03.07 .2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	Kota Semarang	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	0	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	Kota Semarang, Semua Kecamatan,	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	0	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
	Daerah Kabupaten/Kota					Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa				
1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	250 Rumah Tangga	0						
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Semarang	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%	2.367.962.198						
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%	2.367.962.198						
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 dokumen	2.367.962.198	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 dokumen	2.367.962.198	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kota Semarang	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%	5.262.830.450						
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	100%	0						
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dokumen	0						
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan	3 dokumen	0						

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Bencana Kabupaten/Kota								
1.04.02 .2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	400.000.000						
1.04.02 .2.03.0 001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	400.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	400.000.000	
1.04.02 .2.03.0 004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Kota Semarang	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	0						
1.04.02 .2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Semarang	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%	4.045.000.000						
1.04.02 .2.05.0 001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	4.045.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	4.045.000.000	
1.04.02 .2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Semarang	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	817.830.450						
1.04.02 .2.06.0 004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan	1 Laporan	817.830.450	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan	1 Laporan	817.830.450	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Umum/Rumah Susun Umum			Umum/Rumah Susun Umum		Umum/Rumah Susun Umum			
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Semarang	Persentase Rumah Layak Huni	99,42%	13.663.207.352						
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Semarang	null	null	310.000.000						
1.04.03.2.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	310.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan	310.000.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	100%	0						
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 dokumen	0						
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Semarang	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%	13.353.207.352						
1.04.03.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 unit	13.353.207.352	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 unit	13.353.207.352	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kota Semarang	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani	64%	48.555.550.492						
		Kota Semarang	Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%							

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.04.05 .2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Semarang	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	100%	48.555.550.49 2						
1.04.05 .2.01.0 002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi	21.070.036.43 1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi	21.070.036.43 1	
1.04.05 .2.01.0 003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Lokasi	25.673.000.00 0	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	16 Lokasi	25.673.000.00 0	
1.04.05 .2.01.0 010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	1.812.514.061	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan	1.812.514.061	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%	47.857.737.47 0						
		Kota Semarang	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%							
		Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100%							

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100%							
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.660.900						
1.04.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.660.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	7.660.900	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	21.514.624.000						
1.04.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	21.091.564.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan	21.091.564.000	
1.04.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	415.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	415.560.000	
1.04.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	7.500.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	7.500.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	287.581.600						

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.04.01 .2.05.0 005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	8.100.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	8.100.000	
1.04.01 .2.05.0 010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	217.154.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	217.154.400	
1.04.01 .2.05.0 011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	62.327.200	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	62.327.200	
1.04.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%	2.862.952.887						
1.04.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	42.928.000	
1.04.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	1.966.698.270	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	1.973.770.270	
1.04.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	207.249.698	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	207.249.698	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.04.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	70.942.276	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	70.942.276	
1.04.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	87.576.602	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	87.576.602	
1.04.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	59.130.600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	59.130.600	
1.04.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.334.041	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.334.041	
1.04.01 .2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160 Dokumen	22.021.400	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160 Dokumen	22.021.400	
1.04.01 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	275.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	275.000.000	
1.04.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	5.712.436.639						

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.04.01 .2.07.0 001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0						
1.04.01 .2.07.0 002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	815.360.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	852.540.000	
1.04.01 .2.07.0 003	Pengadaan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 unit	4.660.664.510	Pengadaan Alat Besar	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 unit	5.173.337.606	
1.04.01 .2.07.0 005	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	236.412.129	Pengadaan Mebel	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	236.412.129	
1.04.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.976.294.340						
1.04.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.000.000	
1.04.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	772.056.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	772.056.000	
1.04.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	2.191.238.340	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	2.491.238.340	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Kantor yang Disediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kantor yang Disediakan			
1.04.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	14.050.461.935						
1.04.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 unit	1.828.348.355	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 unit	1.828.348.355	
1.04.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 unit	8.169.873.861	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 unit	7.620.020.765	
1.04.01 .2.09.0 005	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614 unit	121.078.800	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614 unit	121.078.800	
1.04.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	3.300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	3.300.000.000	
1.04.01 .2.09.0 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	300 unit	631.160.919	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	300 unit	631.160.919	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.04.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	103.855.900						
1.04.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.837.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.837.600	
1.04.01 .2.01.0 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.535.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.535.900	
1.04.01 .2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	19.185.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	19.185.900	
1.04.01 .2.01.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.660.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.660.900	
1.04.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	2 Laporan	7.317.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2 Laporan	7.317.800	

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
			Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
1.04.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	32.317.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	32.317.800	
1.04.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	15.231.400						
1.04.01 .2.02.0 005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.139.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	5.139.400	
1.04.01 .2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	6.051.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	6.051.600	
1.04.01 .2.02.0 008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Laporan	4.040.400	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Laporan	4.040.400	
1.04.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%	326.637.869						

No	Rancangan Perubahan RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1.04.01 .2.05.0 002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	326.637.869	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	326.637.869	
1.04.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0						
1.04.01 .2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0						
1.04.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0						
1.04.01 .2.09.0 003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	20 unit	0						

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107

8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;

- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

- 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran**, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif**, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.

- 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.

- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.

- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Terwujudnya Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas Umum Permukiman Perkotaan yang Tertata dan Berkualitas”,

dengan indikator tujuan “Persentase Lingkungan Permukiman Sehat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang yaitu:

1. “Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Persentase Luasan Kawasan Kumuh,

- b. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan, dan
 - c. Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau.
2. “Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah”, dengan indikator sasaran berupa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Tahun 2024

TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum permukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas	Persentase Lingkungan Permukiman Sehat	%	98,00
SASARAN : Meningkatnya kualitas sarana, prasarana & utilitas umum permukiman perkotaan	- Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	40,00
	- Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Perkotaan	%	78,53
	- Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	44,36
SASARAN: Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		73

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas menkoordinasikan pencapaian Persentase Lingkungan Permukiman Sehat dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak	55.75%				1.375.000.000			
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan	100%				1.375.000.000			
1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	3 unit				1.375.000.000			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM	100%				0			
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	50 SR				0			
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	50 Liter/Detik				0			
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	92,69%				3.999.197.688			
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	null	null				3.999.197.688			
1.03.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 lokasi				147.380.000.000			
1.03.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177 lokasi				53.449.002.800			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 M ³ /Hari				3.482.672.688			
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 M ³ /Hari				516.525.000			
1.03.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	100%				200.829.002.800			
		Terwujudnya Urusan Penyelenggaraan PSU yang Menunjang Fungsi Hunian	100 %							
1.03.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	16 lokasi				147.380.000.000			
1.03.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	177 lokasi				53.449.002.800			
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	2 M ³ /Hari				3.482.672.688			
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	75 M ³ /Hari				516.525.000			
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten. / kota yang ditangani	64%				0			
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%				0			
1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	250 Rumah Tangga				0			
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pemanfaatan Hunian yang Tertata	100%				2.367.962.198			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Rumah Susun yang Tertata	100%				2.367.962.198			
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 dokumen				2.367.962.198			
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan	100%				5.262.830.450			
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	100%				0			
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 dokumen				0			
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3 dokumen				0			
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%				400.000.000			
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah				400.000.000			
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah				0			
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik	100%				4.045.000.000			
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan				4.045.000.000			
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%				817.830.450			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan				817.830.450			
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	99,42%				13.663.207.352			
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	null	null				310.000.000			
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	3 Laporan				310.000.000			
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata	100%				0			
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 dokumen				0			
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	100%				13.353.207.352			
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	730 unit				13.353.207.352			
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani	64%				48.555.550.492			
		Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU	100%							
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Pembangunan dan Penyelenggaraan Infrastruktur di Lingkungan Permukiman	100%				48.555.550.492			
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	16 Lokasi				21.070.036.431			
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan	16 Lokasi				25.673.000.000			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan								
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	10 Laporan				1.812.514.061			
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Disperkim	100%				47.857.737.470			
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim	100%							
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Disperkim	100%							
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Disperkim	100%							
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%				7.660.900			
1.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen				7.660.900			
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%				21.514.624.000			
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/bulan				21.091.564.000			
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen				415.560.000			
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen				7.500.000			
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%				287.581.600			
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen				8.100.000			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.04.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang				217.154.400			
1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang				62.327.200			
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	100%				2.862.952.887			
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket				50.000.000			
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket				1.966.698.270			
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket				207.249.698			
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket				70.942.276			
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket				87.576.602			
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				59.130.600			
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				124.334.041			
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	160 Dokumen				22.021.400			
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen				275.000.000			
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%				5.712.436.639			
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0				0			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0				815.360.000			
1.04.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 unit				4.660.664.510			
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0				236.412.129			
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				2.976.294.340			
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan				13.000.000			
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				772.056.000			
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				2.191.238.340			
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				14.050.461.935			
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	270 unit				1.828.348.355			
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 unit				8.169.873.861			
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	614 unit				121.078.800			
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit				3.300.000.000			
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	300 unit				631.160.919			
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%				103.855.900			
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen				30.837.600			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				6.535.900			
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen				19.185.900			
1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen				7.660.900			
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan				7.317.800			
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan				32.317.800			
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%				15.231.400			
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan				5.139.400			
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan				6.051.600			
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Laporan				4.040.400			
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur	100%				326.637.869			
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket				326.637.869			
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				0			

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan				0			
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				0			
1.04.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	20 unit				0			

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan

- menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

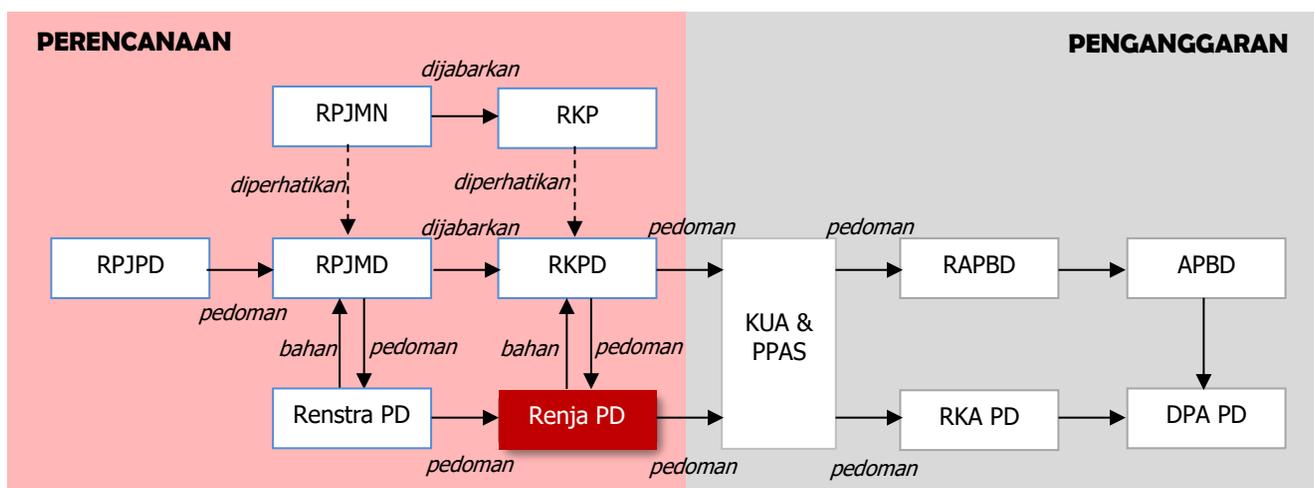
7. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Satuan Polisi Pamong Praja **Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Adanya penyesuaian belanja yang dilakukan mengingat adanya efisiensi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang; (2) Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang di tahun 2023 yang menurun akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada alokasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- i. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang

- Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - y. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - z. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan /

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, review terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan Rencana Kerja (Renja) serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10	12 = (10/4)
	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Ambil di Renstra	Ambil Monev 2023 (kalau ada)	Ambil Monev 2022 Kolom 6	Ambil Monev 2022 Triwulan II		Ambil Monev 2023 s.d Triwulan II	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SATpol pp							
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD							
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	3 Dokumen	60
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	0	0 Dokumen	60
1.05.01.2.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	3 Dokumen	100 %
1.05.01.2.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	3 Dokumen	60 %
1.05.01.2.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100	0 Dokumen	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10	12 = (10/4)
1.05.01.2.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	0	60 %
1.05.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja adminitrasi dan pelaporan keuangan SKPD							
1.05.02.2.020.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	130 Orang/bulan	100 %	100	80%	60 %
1.05.02.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	9 Dokumen	80 %	75 %	100 %
1.05.02.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	0	1 Dokumen (100%)	0	0	0 Dokumen	40 %
1.05.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	5 Dokumen	12 Dokumen (100 %)	12 Dokumen (100%)	9 Dokumen	80 %	3 Dokumen	60 %
1.05.02.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah aporan prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen (100 %)	1 Dokumen (100%)	0 Dokumen	0	3 Dokumen	60 %
1.05.02.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD							
1.05.02.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan (Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan)	43 kegiatan	330 orang	330 orang	220 orang	80%	220 orang	60 %
1.05.02.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peserta Yang Lulus Pendidikan / Pelatihan / Bintek (Jumlah Orang yang jadi Narasumber Bimbingan Teknis / Sosialisasi)	100 %	7 Orang	7 Orang	0	0	75 %	75%
1.05.02.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10	12 = (10/4)
1.05.02.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 jenis	16 Paket	16 Paket	12 Paket	75%	45 Paket	60 %
1.05.02.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia (Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan)	140 jenis	24 Paket	24 Paket	12 Paket	50%	76 Paket	55 %
1.05.02.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ahan logistik kantor yang tersedia	300 jenis	60 jenis	60 jenis	30 jenis	50%	180 jenis	60 %
1.05.02.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan)	529.405 lembar	105.881 lembar (12 Paket)	13 Paket	12 Paket	92%	26.470 lembar +12 Paket	75 %
1.05.02.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung (Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu)	3200 orang (12 Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	9 Laporan	75%	400 orang + 9 Laporan	60%
1.05.02.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi SKPD yang terlaksana (Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)	420 kegiatan (12 Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	45 kegiatan + 6 Bulan	60%
1.05.02.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang mendukung sistem pemerintahan yang Berbasis Elektronik yang tersedia	45 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100	3 jenis	100 %
1.05.02.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
1.05.02.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan (kipas,jenset,pompa air) (Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan)	40 unit	6 unit (10 Jenis)	10 Jenis	10 Jenis	100%	60%	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10	12 = (10/4)
1.05.02.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor							
1.05.02.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan (Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan)	100 %	100 % (12 Laporan)	12 Laporan	6 Laporan	50%	60 %	60 %
1.05.02.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase honorarium TPHL dan Tenaga Kebersihan yang di bayarkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	75 %	100 %
1.05.02.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan mobil jabatan	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	100 %	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpenuhinya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas operasional	220 unit	50 Unit	50 Unit	45 unit	90%	140 Unit	63%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi kebutuhan pemeliharannya (Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara)	500 unit	13 Jenis	13 Jenis	10 Jenis	100	76 %	60 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	2 gedung	2 gedung	1 gedung	1 gedung	100	60 %	60 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarpras Gedung Kantor	60 unit	60 unit	180 unit	90 unit	50%	60 %	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10	12 = (10/4)
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda							
		Persentase pemberdayaan Linmas							
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan (Permendagri 18 tahun 2020)							
		Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum							
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	persentase kasus pelanggaran perda yang terdeteksi dan ditindaklanjuti (Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan)	100 %	100 % (120 Kasus)	120 Kasus	60 Kasus	50 %	60%	60 %
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (Permendagri 86/2017) (Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan)	100 %	100 % (96 Kasus)	96 Kasus	44 Kasus	50%	60%	60%
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pengerahan linmas dan monitoring poskamling yang dilaksanakan (Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota)	100 %	100 % (12 Dokumen)	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	60%	60 %
1.05.02.2.01.04	pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan (Permendagri 18 tahun 2020)	177 orang	177 orang (12 Dokumen)	12 Doukumen	8 Dokumen	66%	60%	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10	12 = (10/4)
	umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	(Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum)							
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah peningkatan kapasitas yang dilaksanakan (Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya)	3 kali	310 Orang	310 Orang	100 Orang	32%	60%	60%
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi antar lembaga yang dilaksanakan (Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Trantibum)	2 kali	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	60%	60 %
1.05.02.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	tersedianya dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	75 %	75%
1.05.02.2.01.10	Penyedia Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (SPM) (Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani)	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	60%	60%
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan (Permendagri 18 tahun 2020)							
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha)	12 kali	3 Laporan	3 Laporan	0 Laporan	0	60%	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	10	12 = (10/4)
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	persentase pengamanan ovit dan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan (umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota)	100 %	120 Laporan	120 Laporan	40 Laporan	33%	60%	60%
1.05.02.2.02.03	penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase penerapan sanksi terhadap pelanggaran perda (Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP)	100 %	28 Laporan	28 Laporan	16 Laporan	80%	60%	60%
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS							
1.05.02.2.03	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah pembinaan ppns yang dilaksanakan (Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada)	2 kali	5 Laporan	5 Laporan	0	0	60%	60 %

Sumber : OPD Kota Semarang, 2021

Adapun hasil analisis rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun 2023 dan capaian renstra sampai dengan triwulan II tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- Pada sub kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan anggaran SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD belum terrealisasi, karena pelaksanaan kegiatan tersebut pada triwulan III, sehingga target pada triwulan II belum terpenuhi.
- Pada sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia, belum terrealisasi penuh dikarenakan menyesuaikan kebutuhan selama satu tahun .
- Pada beberapa sub kegiatan berbeda jumlah capaiannya karena indikatornya juga berubah/berbeda yang membuat capaian renstra tidak bisa dihitung.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PERENCANAAN			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.919.201.217	10.837.610.049	51.81
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.897.340	58.215.900	58,27
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.662.600	7.425.000	96,90
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.224.510	7.500.000	73,35

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.620.420	3.967.000	46,02
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.424.510	2.415.150	44,52
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.120.420	1.500.000	21,07
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.844.880	35.408.750	58,20
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.653.277.949	12.070.754.802	68,37
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.406.051.789	11.926.997.802	68,52
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.330.000	138.760.000	59,22
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.198.720	1.148.500	52,23
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	9.548.720	2.700.000	28,28
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.148.720	1.148.500	99,98
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	206.533.755	140.401.093	67,97
1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	138.601.093	69,30
2.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.533.755	1.800.000	27,55
2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.841.615	639.017.350	81,31
2.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.428.480	17.638.950	90,79
2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.557.540	29.424.650	85,15
2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.894.640	16.821.150	76,83
2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.682.820	26.034.000	82,17
2.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.025.000	46.250.000	74,57
2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	334.218.440	229.198.600	68,58
2.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	282.034.695	273.650.000	97,03
2.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	338.821.556	326.770.000	96,44
2.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	338.821.556	326.770.000	96,44
2.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.941.080	454.846.302	73,60
2.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.141.080	167.746.302	71,34
2.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	382.800.000	287.100.000	75,00
2.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.272.266.320	555.388.072	43,6
2.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (SATPOL PP)	36.318.180	32.375.000	89,14
2.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	981.045.210	679.496.150	69,26
2.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.909.108	73.370.875	76,50
2.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.251.131	150.860.550	99,74
2.9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.089.600	10.787.000	82,41
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.014.651.252	6.475.922.648	43,13
2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.270.589.833	10.502.965.136	
2.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	80.274.100	28.489.000	35,49

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	365.825.166	246.990.700	67.52
2.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.687.002.968	5.566.385.000	97.88
2.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.471.503.640	5.468.083.852	73.19
2.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDMSatuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	271.651.170	187.723.800	69.10
2.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	308.934.930	213.183.660	69.01
2.2.01.09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (SATPOL PP)	77.264.032	70.830.500	91.67
2.2.01.10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	8.133.827	0	0,00
2.2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	441.942.260	150.783.310	34.1
2.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	47.854.755	15.615.000	32.63
2.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	241.368.190	170.308.550	70.56
2.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	271.237.237	228.217.500	84.14
2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	122.875.930	88.277.900	71.84
2.2.03.01	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	122.875.930	88.277.900	71.84

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2023 "Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat"

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai urusan Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 2 program, dan 10 kegiatan dan 41 sub kegiatan pada Satpol PP kota Semarang adalah sebesar **Rp 35.933.852.469** Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar **Rp 17.313.532.697** Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar **Rp 18.620.319.772** atau Sebesar 48.18%.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Satpol PP adalah melaksanakan fungsi mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 98 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Satpol PP Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada renstra Satpol PP Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Satpol PP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Satpol PP Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
Tujuan : Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat Kota Semarang	persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	0	-	-	-	5 %
Sasaran : meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	25%	-	-	-	100,00 %
	Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	NA	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	25%	-	-	-	100,00 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		70	71	72	73	74		70.61	74.3	-	-	-	70

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Satpol PP tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat Kota Semarang memiliki satu indikator kinerja yaitu persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban, target sebesar 5% per tahun belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 2% sampai dengan triwulan 2 dan masih ada dua triwulan lagi untuk mencapai target yang ditetapkan.
- b. Sasaran pertama meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat memiliki dua indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 25% (capaian sebesar 25 %);
 - 2) Indikator Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 25% (capaian sebesar 25 %);

c. Sasaran kedua Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan nilai sebesar 74,3.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Satpol PP dalam pelaksanaan fungsinya di bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Satpol PP Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Dokumen)						REALISASI KINERJA (Dokumen)						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 tw II	2024	2025	2026	
1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	-	-	-	100 %

Sumber : OPD Kota Semarang, 2022

Dalam pelaksanaan fungsi Satpol PP Kota Semarang di bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan teknis menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana sejak tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada pelaksanaan perencanaan tahun 2019 dan 2020 serta 2021, Pemerintah Kota Semarang menjadi pemenang terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah Pangripta Abipraya yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Satpol PP di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
Dan antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI KINERJA						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-	-	100,00 %

Sumber : Satpol PP Kota Semarang, 2023

Pada tahun 2023 triwulan II, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD sebesar 100 %. Adapun untuk kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100 %, dimana 2 program pada RKPD Tahun 2023 dapat terakomodir pada APBD Tahun 2023.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Satpol PP, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Satpol PP Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanisme;
- b. Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender). Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Adanya efisiensi anggaran yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi di Kota Semarang.
- b. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh petugas Linmas belum didukung oleh pemenuhan sarana kelengkapan bertugas yang memadai.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

- a. Tantangan
 - 1) Menurunkan angka gangguan trantibum
 - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memahami, taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku agar bisa menjadi satu kekuatan sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pemerintah daerah
- b. Peluang
 - 1) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi terkait penegakan hukum untuk menjamin kapstian hukum dan iklim yang kondusif di Kota Semarang
 - 2) Sumber daya yang memadai termasuk dukungan SDM dari petugas Linmas

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satpol PP Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Angka gangguan trantibum di Kota Semarang walaupun mengalami penurunan akan tetapi angkanya relatif tinggi. Sehingga membutuhkan adanya upaya-upaya dalam pencegahan secara preventif persuasive dan juga penanganan dengan penerapan sanksi tegas namun tetap mengedepankan humanism.
- b. Berdasarkan asas keadilan maka hasil-hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Ada satu sistem yang menjamin hal itu, yaitu PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender).

Melalui PPRG, diharapkan semua golongan masyarakat (perempuan, anak, difabel, dan lansia) dapat mendapatkan akses yang sama terhadap hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, ke depannya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang diharapkan mampu menjangkau semua golongan masyarakat, tanpa terkecuali.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Satpol PP Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Satpol PP Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

No	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100%	20.919.201.217,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100%		-
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SATpol pp	100%				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SATpol pp	100%		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100%				Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100%		
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100%				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	88.347.340,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	88.347.340,-	-
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.662.600,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.662.600,-	-
b	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	8.424.510,-	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	8.424.510,-	-
c	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	4.120.420,-	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	4.120.420,-	-
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.174.510,-	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.174.510,-	-
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.120.420,-	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.120.420,-	-

No	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	60.844.880,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	90.000.000,-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	15.618.570.192,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	15.618.570.192,-	-
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 orang/ 12 Bulan	15.377.194.032,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 orang/ 12 Bulan	15.377.194.032,-	-
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	233.880.00,-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	233.880.00,-	-
c	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	2.198.720,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	2.198.720,-	-
d	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.148.720,-	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.148.720,-	-
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	4.148.720,-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	4.148.720,-	-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	292.399.201,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	292.399.201,-	-
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	330 Orang	285.865.446,-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	330 Orang	285.865.446,-	-
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang jadi Narasumber Bimbingan Teknis / Sosialisasi	7 Orang	6.533.755,-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang jadi Narasumber Bimbingan Teknis / Sosialisasi	7 Orang	6.533.755,-	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	714.877.527,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	714.877.527,-	-

No	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	19.428.480,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	19.428.480,-	
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	34.557.540,-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	34.557.540,-	-
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	17.363.552,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	17.363.552,-	-
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	31.682.820,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	31.682.820,-	
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	46.425.000,-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	46.425.000,-	-
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	283.385.440,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	283.385.440,-	-
g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	282.034.695,-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	282.034.695,-	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.487.794.617,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.487.794.617,-	-
a	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang			338.821.556,-	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang			338.821.556,-	-
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit		-
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			1.148.973.061,-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			1.148.973.061,-	-
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit		-

No	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	634.224.907,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	634.224.907,-	-
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	251.424.907,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	251.424.907,-	-
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	382.800.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	382.800.000,-	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.278.405.435,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.278.405.435,-	-
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180,-	-
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	906.854.330,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	906.854.330,-	-
c	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Jenis	115.596.324,-	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Jenis	115.596.324,-	-
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	206.547.001,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	206.547.001,-	-
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180 Unit	13.089.600,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180 Unit	13.089.600,-	-
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	18.135.148.901,-	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	18.135.148.901,-	-
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga	10%	17.372.407.589,-	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga	10%	17.372.407.589,-	-

No	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		ketenteraman dan ketertiban umum			Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		ketenteraman dan ketertiban umum			
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120 Kasus	60.600.657,-	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120 Kasus	60.600.657,-	-
b	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	96 Kasus	275.421.744,-	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	96 Kasus	275.421.744,-	-
c	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	5.616.943.906,-	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	5.616.943.906,-	-
d	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	10.828.129.048,-	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	10.828.129.048,-	-
e	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310 Orang	257.746.320,-	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310 Orang	257.746.320,-	-
f	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama	2 Dokumen	260.925.330,-	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama	2 Dokumen	260.925.330,-	-

No	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
g	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	72.640.584,-	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	72.640.584,-	-
h	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8.133.827,-	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8.133.827,-	-
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	64 Persen	639.865.382,-	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	64 Persen	639.865.382,-	-
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha /	3 Laporan	40.486.005,-	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha /	3 Laporan	40.486.005,-	
b	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120 Laporan	181.453.633,-	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120 Laporan	181.453.633,-	-
c	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	28 Laporan	417.925.744,-	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	28 Laporan	417.925.744,-	-

No	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan		
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	8 Kasus	122.875.930,-	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	8 Kasus	122.875.930,-	-
a	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	5 Laporan	122.875.930,-	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	5 Laporan	122.875.930,-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

- 1) pendekatan perencanaan teknokratik
- 2) pendekatan perencanaan politik
- 3) pendekatan perencanaan partisipatif
- 4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
- 5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun

2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.

- 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Program dan kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan prioritas tersebut dengan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
dengan Prioritas Pembangunan Nasional maupun Daerah

Program Prioritas 4: Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika serta Peningkatan Kamtibmas	
	
Prioritas 4 Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021: Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah	Fokus 6. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.
	
Prioritas 3 Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, Prioritas 5 Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	Fokus 50. Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan social Fokus 87. Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat”

dengan indikator tujuan **“Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang yaitu:

“Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat”

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman;
2. Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban	%	5
Sasaran : meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	1. Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman	%	100
	2. Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat	%	100

Sumber : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang, 2023

3.3. Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2023 yaitu :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Peningkatan Perlindungan Masyarakat.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 40

(empat puluh) sub kegiatan yang terdiri dari terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kegiatan rutin dan 12 (dua belas) kegiatan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Kinerja SKPD
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
9	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
11	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
26	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
VIII	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

29	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawalan
30	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa
31	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
32	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
33	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
34	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
35	Penyusunan SOP Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
36	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada
IX	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota
37	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota
38	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota
39	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota
X	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
40	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS

Rencana program dan kegiatan tersebut di atas melibatkan segenap unsur masyarakat di Kota Semarang yang terdiri dari pemangku kebijakan di Kota Semarang yang tergabung dalam Tim Yustisi Kota Semarang, jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang, dan masyarakat (Linmas/Kader Siaga Trantib/Forum Komunitas) dan para aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kota Semarang.

Biaya guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang tahun 2023 mencapai **Rp. 38,245,268,120,- (Tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah)**. Tabel rencana program dan kegiatan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagaimana lampiran berikut ini.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp	100%	,-	APBD Kota Semarang
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SATpol pp	100%		APBD Kota Semarang
			Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP	100%		APBD Kota Semarang
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol pp	100%		APBD Kota Semarang
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100%	88.347.340,-	APBD Kota Semarang
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.662.600,-	APBD Kota Semarang
b	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	8.424.510,-	APBD Kota Semarang
c	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 Dokumen	4.120.420,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.174.510,-	APBD Kota Semarang
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.120.420,-	APBD Kota Semarang
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	60.844.880,-	APBD Kota Semarang
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	15.618.570.192,-	APBD Kota Semarang
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 orang/ 12 Bulan	15.377.194.032,-	APBD Kota Semarang
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	233.880.00,-	APBD Kota Semarang
c	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Laporan	2.198.720,-	APBD Kota Semarang
d	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	4.148.720,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	4.148.720,-	APBD Kota Semarang
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100%	292.399.201,-	APBD Kota Semarang
a	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	330 Orang	285.865.446,-	APBD Kota Semarang
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang jadi Narasumber Bimbingan Teknis / Sosialisasi	7 Orang	6.533.755,-	APBD Kota Semarang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	714.877.527,-	APBD Kota Semarang
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	19.428.480,-	APBD Kota Semarang
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	34.557.540,-	APBD Kota Semarang
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	17.363.552,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	31.682.820,-	APBD Kota Semarang
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	46.425.000,-	APBD Kota Semarang
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	283.385.440,-	APBD Kota Semarang
g	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	282.034.695,-	APBD Kota Semarang
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	1.487.794.617,-	APBD Kota Semarang
a	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang			338.821.556,-	APBD Kota Semarang
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit		APBD Kota Semarang
b	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang			1.148.973.061,-	APBD Kota Semarang
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit		

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	634.224.907,-	APBD Kota Semarang
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	251.424.907,-	APBD Kota Semarang
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	382.800.000,-	APBD Kota Semarang
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100%	1.278.405.435,-	APBD Kota Semarang
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180,-	APBD Kota Semarang
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	906.854.330,-	APBD Kota Semarang
c	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Jenis	115.596.324,-	APBD Kota Semarang
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	206.547.001,-	APBD Kota Semarang
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180 Unit	13.089.600,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	18.135.148.901,-	APBD Kota Semarang
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum	10%	17.372.407.589,-	APBD Kota Semarang
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan Dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan Dan Pengawasan	Kota Semarang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120 Kasus	60.600.657,-	APBD Kota Semarang
b	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Kota Semarang	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	96 Kasus	275.421.744,-	APBD Kota Semarang
c	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	5.616.943.906,-	APBD Kota Semarang
d	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	10.828.129.048,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
e	Peningkatan Kapasitas Sdm Satuan Polisi Pamong Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kota Semarang	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310 Orang	257.746.320,-	APBD Kota Semarang
f	Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	260.925.330,-	APBD Kota Semarang
g	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum danKetenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	72.640.584,-	APBD Kota Semarang
h	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah Dan Perkada	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	8.133.827,-	APBD Kota Semarang
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupate/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	64 Persen	639.865.382,-	APBD Kota Semarang
a	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/PelakuUsaha/	3 Laporan	40.486.005,-	APBD Kota Semarang
b	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120 Laporan	181.453.633,-	APBD Kota Semarang
c	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati/Walikota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	28 Laporan	417.925.744,-	APBD Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
			Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	10 Laporan		
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	8 Kasus	122.875.930,-	APBD Kota Semarang
a	Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	5 Laporan	122.875.930,-	APBD Kota Semarang

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban” dan indikator sasaran 1. “Persentase penurunan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman”, 2. “Persentase penyelenggaraan perlindungan masyarakat”;
3. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan kenyamanan lingkungan serta suasana perlindungan masyarakat dan tegaknya hukum perlu adanya partisipasi dari seluruh unsur masyarakat dan instansi terkait
4. Koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait perlu ditingkatkan dan terjalin sinergi yang berkelanjutan
5. Peningkatan sistem kerja berbasis teknologi dan komunikasi secara cepat melalui media sosial baik antar pegawai maupun dengan masyarakat.
6. Peningkatan upaya persuasif preventif untuk menekan angka pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
8. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Target	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Perda	10%	10%	10%	11.127.225.000	14.953.925.945	18.135.148.901		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum	12.00 %	12.00 %	12.00 %	11.127.225.000	14.270.589.833	17.372.407.589		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120 Kasus	120 Kasus	120 Kasus	120.000.000	80.274.100	60.600.657		
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	96 Kasus	96 Kasus	96 Kasus	820.000.000	365.825.166	275.421.744		
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	260.000.000	5.687.002.968	5.616.943.906		
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	7.964.100.000	7.471.503.640	10.828.129.048		
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	310 Orang	310 Orang	310 Orang	500.000.000	271.651.170	257.746.320		
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Trantibum	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	308.934.930	260.925.330		
1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	77.264.032	72.640.584		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Target	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.125.000	8.133.827	8.133.827		
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	66.00 %	66.00 %	66.00 %	760.000.000	560.460.182	639.865.382		
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	120.000.000	47.854.755	40.486.005		
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	390.000.000	241.368.190	181.453.633		
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	250.000.000	271.237.237	417.925.744		
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS	10.00 Kasus	10.00 Kasus	10.00 Kasus	190.000.000	122.875.930	122.875.930		
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	190.000.000	122.875.930	122.875.930		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SATpol pp	100%	100%	100%	28.960.916.000	20.879.926.524			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	190.000.000	99.897.340	88.347.340		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	7.662.600	7.662.600		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	10.224.510	8.424.510		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	8.620.420	4.120.420		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	5.424.510	3.174.510		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	7.120.420	4.120.420		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Target	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	90.000.000	60.844.880	90.000.000		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	20.342.409.090	17.653.277.949	15.618.570.192		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	22.658.062.996	17.406.051.789	15.377.194.032		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	323.560.000	234.330.000	233.880.000		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	2.198.720	2.198.720		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	9.548.720	4.148.720		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1.148.720	4.148.720		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tersedianya Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	324.400.000	106.533.755	292.399.201		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	330 Orang	330 Orang	330 Orang	300.000.000	100.000.000	285.865.446		
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang jadi Narasumber Bimbingan Teknis / Sosialisasi	7 Orang	7 Orang	7 Orang	24.400.000	6.533.755	6.533.755		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.393.098.824	785.841.615	714.877.527		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	16 Paket	36.931.931	19.428.480	19.428.480		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	33.995.812	34.557.540	34.557.540		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	60 Paket	55.700.689	21.894.640	17.363.552		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13 Paket	36.470.392	31.682.820	31.682.820		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	140.000.000	62.025.000	46.425.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			PAGU ANGGARAN			Sumber Dana	Keterangan
			Target	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	690.000.000	334.218.440	283.385.440		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	433.995.812	282.034.695	282.034.695		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.600.000.000	338.821.556	1.487.794.617		
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	400.000.000	338.821.556	338.821.556		
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1.200.000.000	-	1.148.973.061		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	643.000.554	617.941.080	634.224.907		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	289.000.554	235.141.080	251.424.907		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	354.000.000	382.800.000	382.800.000		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.702.333.417	1.277.613.229	1.278.405.435		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000	36.318.180	36.318.180		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	50 Unit	1.222.333.417	981.045.210	906.854.330		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	80.000.000	95.909.108	115.596.324		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	300.000.000	151.251.131	206.547.001		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	180 Unit	180 Unit	180 Unit	50.000.000	13.089.600	13.089.600		

Sumber : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

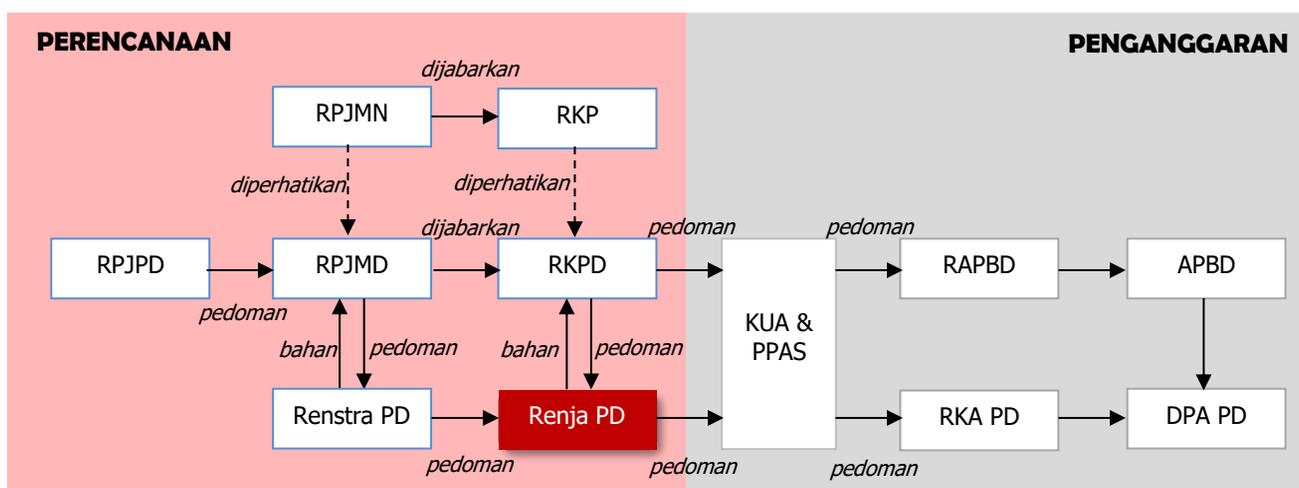
8. DINAS PEMADAM KEBAKARAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa diperkirakan tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun 2022 yang disebabkan oleh El Nino dan faktor Indian Ocean Dipole (IOD) yang terdeteksi semakin menguat ke arah positif sehingga akan menimbulkan potensi peningkatan ancaman kebakaran yang lebih tinggi pada tahun 2023; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5 No Reg Peraturan Daerah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (5-157/2021);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, No Reg Peraturan Daerah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah: (6-179/2021);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2022 tanggal 16 November 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang tahun 2022 Nomor 73);
- s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemadam

Kebakaran Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Pemadam Kebakaran**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	19,44%	20%	8,84%	44,2%	28,28%	28,28%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100% (20%)	100%	53,84%	53,84% (10,77%)	30,77%	30,77%
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pemadam Kebakaran	10 dokumen	2 dokumen (20%)	3 dokumen	1	33.33%	3 dokumen	30%
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 Dokumen (20%)	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	20%
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA Dinas Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 Dokumen (20%)	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	20%
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 Dokumen (20%)	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	20%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan DPA perubahan Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 Dokumen (20%)	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	20%
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	10 dokumen	2 Dokumen (20%)	1 Laporan	1	100%	3 dokumen	33.33%
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	10 dokumen	2 Dokumen (20%)	5 Laporan	5 laporan	100%	7 dokumen	70%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100% (20%)	100%	36,36%	36,36% (7,27%)	27,27%	27,27%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100% (20%)	150 orang	64	100% (20%)	40%	40%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Penunjang Kinerja pengelola keuangan dan barang milik daerah	100%	100% (20%)	12 dokumen	6 dokumen	50% (10%)	18 dokumen	30%
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	12 Dokumen (20%)	12 dokumen	6 dokumen	50% (10%)	18 dokumen	30%
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	12 Dokumen (20%)	12 dokumen	6 dokumen	50% (10%)	18 laporan	30%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 Dokumen (20%)	1 Dokumen	1 Dokumen	100% (20%)	2 Dokumen	40%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah/ persentase Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	100% (20%)	12 dokumen	6 dokumen	50% (10%)	18 dokumen	30%
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	12 dokumen (20%)	12 dokumen	6 dokumen	50% (10%)	24 dokumen	40%
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 dokumen (20%)	1 dokumen	0	0%	1 dokumen	20%
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100% (20%)	100	50%	50% (10%)	30%	30%
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan barang milik daerah Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 dokumen (20%)	1 dokumen	1 dokumen	100% (20%)	2 dokumen	40%
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	12 dokumen (20%)	12 dokumen	6 dokumen	50% (10%)	18 dokumen	30%
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	12 dokumen (20%)	12 dokumen	6 dokumen	50% (10%)	18 dokumen	30%
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100% (20%)	100%	48%	48% (9,6%)	29,6%	29,6%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	5 dokumen	1 dokumen (20%)	1 dokumen	0	0	1 dokumen	20%
1.05.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan wajib retribusi daerah Dinas Pemadam Kebakaran	1750 dokumen (60 bulan)	318 dokumen (12 bulan)	350 Dokumen (12 bulan)	137 dokumen (6 bulan)	39,14% (7,83)	455 dokumen	26% dokumen
1.05.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah Dinas Pemadam Kebakaran	60 dokumen	21 Dokumen (35%)	12 dokumen	6	50% (10%)	18 dokumen	30%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100%	75% (15%)	100%	0,6%	0,6% (0,12%)	15,12%	15,12%
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	50% (10%)	3 paket	2 paket	66,67% (13,33%)	23,33%	23,33%
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran	5 dokumen	1 dokumen (20%)	1 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	20%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib administrasi umum Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100% (20%)	100%	30%	30% (6%)	26%	26%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100% (20%)	1 paket	0	0%	1 paket	20%
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100% (20%)	2 paket	2 paket	100% (20%)	40%	40%
1.05.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Ketersediaan peralatan rumah tangga	100%	0	0	0	0%	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 bulan	12 bulan (20%)	2 paket	0	0%	20%	20%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan paket Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100% (20%)	1 paket	1 paket	100% (20%)	40%	40%
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100% (20%)	14 laporan	7 laporan	50% (10%)	30%	30%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100% (20%)	12 laporan	8 laporan	66,67% (13,33%)	33,33%	33,33%
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Ketersediaan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100% (20%)	0	0	0%	20%	20%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100% (20%)	100%	91,49%	91,49% (18,298)	38,298%	38,298%
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis/unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 jenis	1 jenis (33,33%)	0	0	0%	1 jenis/unit	33,33%
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 unit	1 unit (20%)	0	0	0%	0	20%
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jenis/unit Mebel	30 jenis	0	7 unit	7	100%	17 jenis/unit	56,66%
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis/unit Peralatan dan Mesin Lainnya	25 jenis	5 jenis (20%)	14 unit	13 unit	92,86% (18,57%)	18 jenis/unit	38,57%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 jenis	0	5 Unit	3 Unit	3 Unit	0	0
1.05.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	5	1	1	0	0	0	0
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis/unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 jenis	2 jenis (13,33%)	23 unit	23 unit	100% (153,33%)	25 jenis/unit	166,67%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi jasa penunjang urusan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100% (20%)	100%	50%	50% (10%)	30%	30%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100% (20%)	12 laporan	6 laporan	50% (10%)	30%	30%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100% (20%)	12 laporan	6 laporan	50% (10%)	30%	30%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100% (20%)	100%	37,5%	37,515% (7,5%)	27,5%	27,5%
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100% (20%)	1 unit	1 unit	100% (20%)	40%	40%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	100%	100% (20%)	41 unit	40 unit	97,56% (19,51%)	39,51%	39,51%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya							
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel	100%	0	100%	0	0%	0	0
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100% (20%)	3 unit	3 unit	100% (20%)	40%	40%
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100% (20%)	7 unit	0	0	20%	20%
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	100% (20%)	96 unit	15 unit	15,625 % (3,125%)	23,125%	23,125%
1.5.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran	100%	23,35%	100%	21,73%	21,73%	48,64%	48,64%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah, Kabupaten/Kota	100%	122,17% (24,43)	100%	8,93%	8,93%	131,1%	131,1%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pencegahan kebakaran melalui rekomendasi teknis gambar dan sosialisasi	60 bulan	200 dokumen (20%)					
		Jumlah orang yang bertambah kesadaran terhadap kewajiban pemasangan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung/tempat usaha di Kota Semarang			200 orang	50 orang	25% (5%)	25%	25%
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan pemadaman kebakaran secara cepat, tepat dan efisien	2000 kejadian/laporan	200 kejadian (10%)	300 laporan	85 laporan	28.33% (4,25%)	285 laporan	14.25%
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Terlaksananya kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	2150 kejadian/dokumen	200 kejadian (9,30%)	20 dokumen	3 dokumen	15% (0,14%)	203 dokumen/k kejadian	9.44% dokumen
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kota Semarang	12 kejadian/dokumen	3 kejadian (25%)	20 dokumen	0	0%	3 dokumen/k kejadian	25%
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	25 dokumen	3 Dokumen (12%)	3 Dokumen	0	0%	3 dokumen	12%
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan,	200 jenis/buah	40 jenis (20%)	138 buah	98	71.01% (49%)	138 buah	69%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran	60 orang	87 orang (145%)	0 orang	0	0	87 orang	145%
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya dokumen pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan	60 Kegiatan/dokumen	0	2 dokumen	0	0	0	0
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terselenggaranya dokumen hasil Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	25 kegiatan	5 kegiatan (20%)	5 dokumen	0	0	5 dokumen	20%
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	20%	100%	30%	30% (6%)	26%	26%
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Didapatkannya jumlah dokumen data proteksi	60 bulan	250 gedung (20%)				30%	30%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		kebakaran gedung di Kota Semarang							
		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			12 dokumen	6 dokumen	50% (10%)		
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	60 bulan	297 gedung (12 bulan /dokumen)	12 dokumen	6 dokumen	50%	18 dokumen	30%
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	100% (20%)	300 dokumen	10 dokumen	3.33% (0,5%)	20.5%	20.5%
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran/ Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	2000 kejadian	400 kejadian (20%)	300 dokumen	10 dokumen	3.33% (0,5%)	410 dokumen	20.5%
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran (jumlah pemadaman yang dilakukan relawan dibagi jumlah kebakaran di Kota Semarang)	100%	27,97%	100%	8,87%	8,87% (1,77%)	29,74%	29,74%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	5310 orang	0	1125 Orang	705 orang	62.66% (13,28%)	705 orang	13.28%
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Satuan Relawan Kebakaran	100%	360 orang (20%)					
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			36 kelurahan (360 orang)	12 kelurahan (120 orang)	33.33% (6,67%)	20,67%	20,67%
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana prasarana dukungan pemberdayaan Masyarakat/relawan pemadam kebakaran/ Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	100%	6 jenis (20%)	6 dokumen	2 Dokumen	33.33% (6,67%)	20,67%	20,67%
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi	Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	121,75% (24,35%)	100%	57,53%	57,53% (11,5%)	35,85%	35,85%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Membahayakan Manusia								
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terselenggaranya laporan /Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	70 kejadian	450 kejadian (642,60%)	500 laporan	463 laporan	92,6%	913 laporan	1304,29%
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya dokumen standar sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	25 dokumen	3 dokumen (12%)	3 dokumen	0 unit	0%	3 dokumen	12%
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya sejumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	24 jenis	0%	146 Unit (15 jenis)	48 unit (12 jenis)	80%	12 jenis	80%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami refocusing yaitu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pengadaan Aset Tak Berwujud. Kedua sub kegiatan ini didukung dari indikator sasaran RPJMD Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang berupa Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran. Dengan terefocusingnya 2 sub kegiatan tersebut maka kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran berkurang.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN SEMARANG	36.233.346.681	15.210.873.222	41,9%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.608.959.900	6.917.414.002	32%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.685.540	3.957.500	17.4%
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.446.040	1.588.500	46,1%
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.568.720	0	0%
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.232.630	0	0%
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.513.680	0	0%
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.995.590	0	0%
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	896.480	812.000	90%
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.032.400	1.557.000	30%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.224.372.021	5.364.003.450	29.4%
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.940.212.871	5.220.749.450	29.1%
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	277.979.000	139.760.000	50.2%
1.2.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	746.540	731.00	99%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	632.550	475.000	75%
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.319.790	1.002.000	76%
1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.393.830	695.000	49,87%
1.2.7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	1.234.560	591.000	47.88%
1.2.8	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	852.880	0	0%
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.375.660	834.000	60.6%
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	402.880	102.000	25%
1.3.2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	402.880	252.000	62.5%
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	569.900	480.000	84.2%
1.4	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.400.850	719.000	51.32%
1.4.1	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	442.890	75.000	16.93%
1.4.2	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	555.080	542.000	97.6%
1.4.3	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	402.880	102.000	25.3%
1.5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	519.460.171	239.360.000	46%
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	518.056.126	239.360.000	46.2%
1.5.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.404.045	0	0%
1.6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.946.547	124.061.023	39.26%
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.692.777	0	0%
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.783.824	33.420.100	93.39%
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.349.739	32.205.447	39.58%
1.6.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.718.527	9.725.000	33.86%
1.6.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.450.000	4.998.000	10.96%
1.6.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.951.680	43.712.476	46.52%
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	549.613.273	363.013.000	66.04%
1.7.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.285.820	0	0%
1.7.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	5.103.700	5.050.000	98.9%
1.7.3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.581.017	213.242.500	98%
1.7.4	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3.230.200	0	0%
1.7.5	Pengadaan Aset Tak Berwujud	119.637.820	0	0%
1.7.6	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.774.716	144.720.500	81.86%
1.8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.447.398	169.342.575	34.45%
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.426.099	117.794.175	35.22%
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.021.299	51.548.400	32.82%
1.9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.482.658.440	652.123.454	43.98%
1.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	18.367.000	45.56%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.042.419.273	591.417.304	56.73%
1.9.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel			
1.9.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.802.211	16.856.150	56.56%
1.9.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.662.188	11.250.000	4.315%
1.9.6	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.461.588	14.233.000	13%
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.624.386.781	8.293.459.220	56.7%
2.1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.683.206.998	7.019.394.979	60%
2.1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.784.000	47.648.320	99.7%
2.1.2	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.284.659.616	4.928.591.659	53%
2.1.3	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	8.284.403	0	0%
2.1.4	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.383.416	775.000	17.68%
2.1.5	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.038.938	0	0%
2.1.6	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.917.843.742	1.712.710.000	89.3%
2.1.7	Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0	0	0%
2.1.8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	412.412.883	329.670.000	79.93%
2.1.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.800.000	0	0%
2.2	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	710.216.000	398.739.463	56.14%
2.2.1	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	9.679.302	9.554.654	98.7%
2.2.2	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	700.536.698	389.184.809	55.55%
2.3	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	23.884.403	1.350.000	5.65%
2.3.1	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	23.884.403	1.350.000	5.65%
2.4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	964.763.917	615.101.900	63.75%
2.4.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	539.443.950	318.473.200	59.03%
2.4.2	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	194.673.775	78.372.700	40.25%
2.4.3	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	230.646.192	218.256.000	94.62%
2.5	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.242.315.463	258.872.878	20.83%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.5.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	58.184.403	31.225.000	53.66%
2.5.2	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	15.245.060	14.120.000	92.62%
2.5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1.168.886.000	213.527.878	18.26%
JUMLAH		36.233.346.681	15.210.873.222	41,9%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 14 kegiatan dan 61 sub kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah sebesar Rp 36.233.346.681,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 15.210.873.222,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 21.022.473.459,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteramaan dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
Tujuan: Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	Jumlah warganegara yang memperoleh layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%
Sasaran 1 : Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan / atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	77,04 %	98,02 %	100%				99,94%
Sasaran 2: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		100%	100%	100%	100%	100%	73,63 %	74,05 %	78,5%	-	-	-	78,5%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran”** memiliki indikator kinerja yaitu “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran”, dengan realisasi sebesar 100% (capaian 100%);
- b. Sasaran **“Meningkatnya tingkat waktu tanggap *response time rate*/jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran”** memiliki indikator kinerja yaitu “Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran”, dari kejadian kebakaran dalam triwulan II tahun 2023 sebanyak 85 kejadian, yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap *response time rate* oleh Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 74 kejadian (capaian sebesar 87,06%), dengan realisasi kebakaran yang tertangani oleh relawan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu tanggap sebanyak 11 kejadian kebakaran (capaian sebesar 12,94%). Jadi jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 100%;
- c. Sasaran **“Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran”** memiliki indikator kinerja yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dengan realisasi penilaian tahun 2023 sebesar 78,5 (BB), nilai dapat dicek di <https://penilaian.e-sakip.semarangkota.go.id/score>.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran dengan terealisasi sebesar 100% (capaian 100%);
2. Sasaran 1 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran terealisasi sebesar 100% dengan rincian yang layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak sebesar 87,06% dan realisasi kebakaran yang tertangani oleh relawan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu tanggap sebesar 12,94%.
3. Sasaran 2 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” terealisasi 78,5 (BB).

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan sub urusan kebakaran, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Sarana dan prasarana pendukung pemadaman kebakaran dan penyelamatan perkotaan belum terpenuhi:
 - a. Pos sektor pemadam kebakaran dibutuhkan di tiap kecamatan (berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2018) di Kota Semarang, namun hanya terdapat 7 pos di 7 kecamatan di Kota Semarang, kurang 9 pos.
 - b. Mobil tangga tidak dimiliki sementara jumlah bangunan tinggi selalu bertambah.
 - c. Standar harga pemeliharaan mobil pemadam kebakaran sama dengan kendaraan roda 6 umum, sedangkan pada mobil pemadam kebakaran terdapat pompa pemadam yang juga membutuhkan biaya pemeliharaan.
 - d. Sumber air seperti hidran, sumur pemadam, bak tandon kurang dan belum menyebar di tiap kelurahan.

- e. Alat pelindung diri untuk pemadaman kebakaran dan penyelamatan belum memenuhi untuk 1 orang 1 peralatan.
2. Personil yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran belum semua bersertifikasi, petugas investigasi dan inspeksi tidak bersertifikasi;
3. Dibutuhkan personil di pos sektor pemadam kebakaran sebanyak 48 orang dengan 2 unit armada untuk *stand by* 24 jam di pos, saat ini terdapat 24 orang dengan 1 unit armada di tiap pos sektor;
4. Belum ada NSPK seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau manajemen pemadaman kebakaran tingkat kota, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP), Peraturan Daerah tentang penanggulangan kebakaran sejak tahun 1994 belum disesuaikan dengan peraturan terbaru.
5. Rendahnya partisipasi relawan pemadam kebakaran yang telah dibentuk.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Mendukung visi dan misi kepala daerah dengan keterbatasan sumber daya sarana prasarana, personil, NSPK dan anggaran;
- 2) Layanan penunjang yaitu penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia menunjukkan grafik kenaikan setiap tahun, tahun 2021 sebanyak 679 kejadian, tahun 2022 sebanyak 810 kejadian, sampai dengan September 2023 sebanyak 797 kejadian.
- 3) Pemberian layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada bangunan tinggi tanpa memiliki mobil tangga.

b. Peluang

- 1) Bantuan dari perangkat daerah/instansi, pelaku usaha, dan kabupaten sekitar dalam membantu suplai air, konsumsi, pemadaman kebakaran, dan peningkatan kapasitas sangat membantu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
- 2) Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang sedang dilaksanakan oleh Bappeda sangat membantu dalam pencapaian visi misi walikota khususnya pelayanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi di masa yang akan datang;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dapat

diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang sebagai berikut:

1. Indeks kemiskinan dan kekumuhan kota tinggi karena sarana prasarana pemadaman kebakaran kurang.
2. Risiko bencana dan perubahan iklim yang berdampak kekeringan, banjir, dan tanah longsor meningkatkan jumlah kebakaran dan warga yang membutuhkan penyelamatan dan evakuasi.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibutuhkan guna peningkatan pelayanan pemadaman kebakaran secara terpadu termasuk area yang membutuhkan perhatian khusus seperti tempat pengolahan akhir sampah.
4. Good Governance diperlukan untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN SEMARANG				35.778.351.681	DINAS PEMADAM KEBAKARAN SEMARANG				29.226.443.691	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	a. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100%	14.361.702.443	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	a. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran	100%	14.311.702.443	
b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran			100%	b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran				100%			
c. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran			100%	c. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran				100%			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	22.910.540	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	22.910.540	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.446.040	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.446.040	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.568.720	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.568.720	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.232.630	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.232.630	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.663.680	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.663.680	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.070.590	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.070.590	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	896.480	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	896.480	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.032.400	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5.032.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	11.177.087.805	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	11.127.087.805	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	10.886.583.205	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan	10.836.583.205	
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	284.279.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	284.279.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	746.540	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	746.540	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	632.550	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	632.550	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.319.790	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.319.790	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.439.280	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	1.439.280	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	1.234.560	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	1.234.560	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD			
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	852.880	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	852.880	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	1.375.660	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	1.375.660	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	402.880	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	402.880	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	402.880	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	402.880	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	569.900	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	569.900	
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	1.400.850	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	1.400.850	
	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	442.890	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	442.890	
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	555.080	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	555.080	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	402.880	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	402.880	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	491.993.431	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	491.993.431	
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	490.589.386	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	490.589.386	
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.404.045	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.404.045	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	297.705.446	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	297.705.446	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.692.777	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.692.777	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	58.491.094	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	58.491.094	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.357.959	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	75.357.959	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.718.527	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.718.527	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	16.200.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	16.200.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.245.089	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	88.245.089	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	a. Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran b. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	407.681.836	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	a. Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran b. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	407.681.836	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	5.103.700	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	5.103.700	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	222.573.220	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	222.573.220	
	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.230.200	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.230.200	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Semarang	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Semarang	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	23 Unit	176.774.716	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	23 Unit	176.774.716	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Disediakan			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	491.447.398	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	491.447.398	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	334.426.099	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	334.426.099	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.021.299	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.021.299	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	a. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran b. Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	1.470.099.477	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	a. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran b. Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100%	1.470.099.477	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.313.180	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.313.180	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	1.046.741.092	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	1.046.741.092	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	20.286.525	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	20.286.525	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	277.640.391	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	277.640.391	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lai	96 Unit	85.118.289	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lai	96 Unit	85.118.289	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Semarang	a. Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan /atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100% 100% 100%	14.834.741.248	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Kota Semarang	a. Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan /atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran c. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan	100% 100% 100%	14.914.741.248	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			<p>c. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran</p> <p>d. Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>e. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>				<p>peralatan proteksi kebakaran</p> <p>d. Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>e. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>		
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	<p>a. Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</p> <p>b. Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar</p>	100,00%	11.920.679.444	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	<p>a. Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</p> <p>b. Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam</p>	100,00%	12.007.500.905	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran c. Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran c. Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	200 orang	47.784.000	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	200 orang	87.784.000	FGD
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	9.324.334.382	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	300 Laporan	9.364.334.382	FGD
	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	20 Dokumen	8.284.403	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	20 Dokumen	8.284.403	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kebakaran dan Non Kebakaran		Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			Kebakaran dan Non Kebakaran		Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			
	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	4.383.416	Sub Kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	4.383.416	
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	3 Dokumen	586.618	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	3 Dokumen	586.618	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	138 buah	2.117.843.742	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	138 buah	2.117.843.742	
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan	Kota Semarang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki	2 Desa/Kelurahan	412.412.883	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan	Kota Semarang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki	2 Desa/Kelurahan	412.412.883	Pengadaan HT

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelamatan (SKIK)		Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya			Penyelamatan (SKIK)		Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	5.050.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	5.050.000	
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	739.637.200	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	739.637.200	
	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	9.679.302	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	9.679.302	
	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana	13 Dokumen	729.957.898	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana	13 Dokumen	729.957.898	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Prasarana Proteksi Kebakaran					Prasarana Proteksi Kebakaran			
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	23.884.403	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	17.062.942	
	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	300 Dokumen	23.884.403	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	300 Dokumen	17.062.942	Digesor untuk pengadaan HT
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Semarang	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100,00%	964.763.917	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Semarang	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100,00%	964.763.917	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1.125 Orang	539.443.950	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1.125 Orang	539.443.950	
	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	36 Desa/Kelurahan	194.673.775	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	36 Desa/Kelurahan	194.673.775	
	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia	6 Dokumen	230.646.192	Sub Kegiatan Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia	6 Dokumen	230.646.192	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Dukungan Saprass Damkar			melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Dukungan Saprass Damkar			
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Semarang	a. Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi b. Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100% 100%	1.185.776.284	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kota Semarang	a. Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi b. Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100% 100%	1.185.776.284	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	58.184.403	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	58.184.403	
	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	3 Dokumen	15.245.060	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	3 Dokumen	15.245.060	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang	146 Unit	1.112.346.821	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang	146 Unit	1.112.346.821	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan Standar Teknis			Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Semarang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Kota Semarang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran” dengan indikator tujuan “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran;
 2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran;
- dengan indikator sasaran sebagai berikut:
1. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran;
 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatkan rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran	%	100,00
SASARAN 1 : Meningkatnya tingkat waktu tanggap response time rate/ jumlah ketepatan waktu tindakan pemadaman kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	%	100,00
SASARAN 2 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	%	73.28

Sumber Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pemadam Kebakaran memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran” dan indikator sasaran “Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Semarang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	<p>a. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran</p> <p>b. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemadam Kebakaran</p> <p>c. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran</p>	100%	100%	100%	21.553.426. 484	21.608.959. 900	14.311.702. 443	PAD	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%	22.685.540	22.685.540	22.910.540	PAD	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.446.040	3.446.040	3.446.040	PAD	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.568.720	3.568.720	3.568.720	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.232.630	4.232.630	4.232.630	PAD	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.513.680	2.513.680	2.663.680	PAD	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.995.590	2.995.590	3.070.590	PAD	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	896.480	896.480	896.480	PAD	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5.032.400	5.032.400	5.032.400	PAD	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	18.224.372.021	18.224.372.021	11.177.087.805	PAD dan DAU	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	202 Orang/bulan	202 Orang/bulan	150 Orang/bulan	17.940.212.871	17.940.212.871	10.886.583.205	DAU	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	277.979.000	277.979.000	284.279.000	PAD	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	746.540	746.540	746.540	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	632.550	632.550	632.550	PAD	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.319.790	1.319.790	1.319.790	PAD	
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.393.830	1.393.830	1.439.280	PAD	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.234.560	1.234.560	1.234.560	PAD	
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	852.880	852.880	852.880	PAD	
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	1.375.660	1.375.660	1.375.660	PAD	
1.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	402.880	402.880	402.880	PAD	
1.05.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	402.880	402.880	402.880	PAD	
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	569.900	569.900	569.900	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.05.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	1.400.850	1.400.850	1.400.850	PAD	
1.05.01.2.04.01	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan dan Target Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	442.890	442.890	442.890	PAD	
1.05.01.2.04.06	Jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	555.080	555.080	555.080	PAD	
1.05.01.2.04.07	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Retribusi Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	402.880	402.880	402.880	PAD	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	519.460.171	519.460.171	491.993.431	PAD	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	2 Paket	3 Paket	518.056.126	518.056.126	490.589.386	PAD	
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.404.045	1.404.045	1.404.045	PAD	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persentase	100 Persentase	100 Persentase	334.762.050	315.946.547	297.705.446	PAD	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.692.777	30.692.777	30.692.777	PAD	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	35.783.824	35.783.824	58.491.094	PAD	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	81.349.739	81.349.739	81.349.739	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	47.534.030	28.718.527	28.718.527	PAD	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	42 Laporan	42 Laporan	42 Laporan	45.450.000	45.450.000	16.200.000	PAD	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	93.951.680	93.951.680	88.245.089	PAD	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	483.352.506	549.613.273	407.681.836	PAD	
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%					
1.05.01.2.070.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1 Unit	0	27.285.820	27.285.820	0	PAD	
1.05.01.2.070.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	5.103.700	5.103.700	5.103.700	PAD	
1.05.01.2.070.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	13 Unit	14 Unit	363.550.902	217.581.017	222.573.220	PAD	
1.05.01.2.070.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	3 Unit	3.230.200	3.230.200	3.230.200	PAD	
1.05.01.2.070.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	844.260	119.637.820	0	PAD	
1.05.01.2.070.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	23 Unit	23 Unit	83.337.624	176.774.716	176.774.716	PAD	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran	100 Persenta se	100 Persenta se	100 Persentase	491.269.099	491.447.398	491.447.398	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	334.426.099	334.426.099	334.426.099	PAD	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	156.843.000	157.021.299	157.021.299	PAD	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	1.474.748. 587	1.482.658. 440	1.470.099. 477	PAD	
		Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%					
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	252.722.130	40.313.180	40.313.180	PAD	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	43 Unit	41 Unit	921.449.388	1.042.419.273	1.046.741.092	PAD	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69 Unit	25 Unit	3 Unit	29.802.211	29.802.211	20.286.525	PAD	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	7 Unit	160.617.000	260.662.188	277.640.391	PAD	
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	115 Unit	114 Unit	96 Unit	110.157.858	109.461.588	85.118.289	PAD	

1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	a. Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia	100%	100%	100%	14.224.925.197	14.624.386.781	14.834.741.248	PAD	
		b. Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	100%	100%	100%					
		c. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran	100%	100%	100%					
		d. Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%					
		e. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	100%	100%					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<p>a. Ketersediaan dan standar Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</p> <p>b. Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>c. Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	100%	100%	100%	12.046.176.414	11.683.206.998	11.920.679.444	PAD	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota Setiap Tahunnya	50 Dokumen	50 orang	200 orang	50.000.000	47.784.000	47.784.000	PAD	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	300 Laporan	300 Laporan	300 Laporan	9.284.659.616	9.284.659.616	9.324.334.382	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	8.284.403	8.284.403	8.284.403	PAD	
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	4.383.416	4.383.416	4.383.416	PAD	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.038.938	2.038.938	2.038.938	PAD	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	15 Unit	138 buah	138 buah	2.689.766.397	1.917.843.742	2.117.843.742	PAD	
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun),	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	1.243.644	412.412.883	412.412.883	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya								
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5.800.000	5.800.000	5.050.000	PAD	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung	100%	100%	100%	718.000.000	710.216.000	739.637.200	PAD	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	14.464.800	9.679.302	9.679.302	PAD	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3 Dokumen	12 Dokumen	13 Dokumen	703.535.200	700.536.698	729.957.898	PAD	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat	100%	100%	100%	23.884.403	23.884.403	23.884.403	PAD	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	23.884.403	23.884.403	23.884.403	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100%	100%	100%	489.868.917	964.763.917	964.763.917	PAD	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	40 Orang	1.125 Orang	1.125 Orang	64.548.950	539.443.950	539.443.950	PAD	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	36 Desa/Kelurahan	36 Desa/Kelurahan	36 Desa/Kelurahan	194.673.775	194.673.775	194.673.775	PAD	
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Supras Damkar	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	230.646.192	230.646.192	230.646.192	PAD	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	100%	946.995.463	1.242.315.463	1.185.776.284	PAD	
		Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100%	100%	100%					
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	500 Laporan	500 Laporan	500 Laporan	58.184.403	58.184.403	58.184.403	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	15.245.060	15.245.060	15.245.060	PAD	
1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	146 Unit	146 Unit	146 Unit	833.666.000	1.168.886.000	1.112.346.821	PAD	
1.05.04.2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	2 Laporan	0	0	39.900.000	0	0	PAD	
JUMLAH						35.778.351.681	36.233.346.681	29.196.443.691		

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

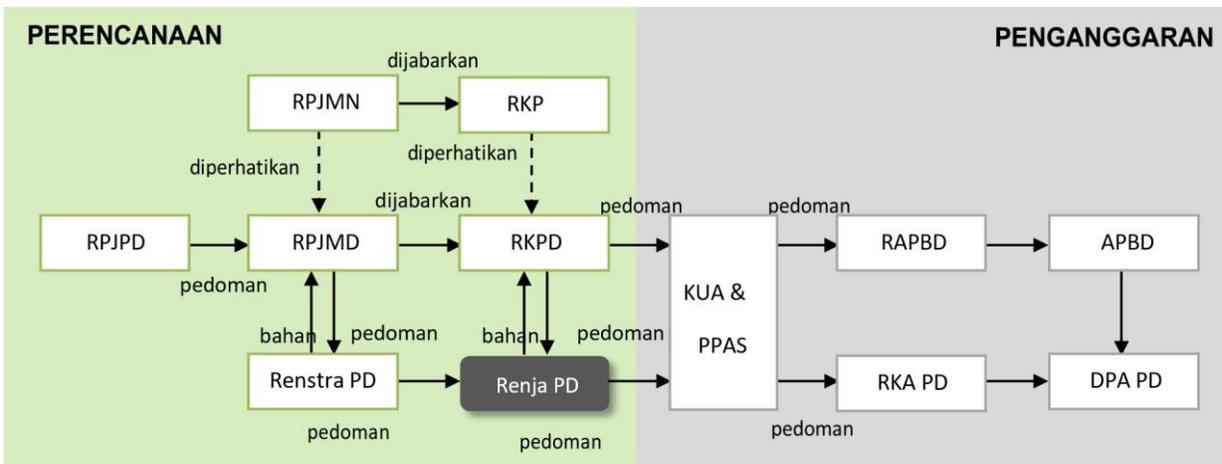
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 20212026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunanann dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya. Selanjutnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah

- Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
 - s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 tahun 2010 penjabaran tugas dan fungsi Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang padatahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang melaksanakan sebanyak 2 (dua) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 24.275.681.669 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 23.006.530.038 atau sebesar 94,77%.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016 - 2021 dengan Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100,00 %		100,00 %			100,00 %	50%	50%	50%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	25 %	16,00	100,00 %	50%	50%	50%
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100,00 %		100,00 %			100,00 %	50%	50%	50%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100,00 %		100,00 %			100,00 %	50%	50%	50%
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%	50%
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra	2 Dokumen	100%	100%	50%	50%	1 dokumen (100%)	1 Dokumen (100%)	100%	100%
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	2 Dokumen	100%	100%	50%	50%	2 dokumen (100%)	1Dokumen (50%)	50%	50%
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Dokumen DPA	2 Dokumen	100%	100%	50%	100%	2 dokumen	1 dokumen	50,00%	50,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
								(100%)	(50%)		
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	1 Dokumen	100%	100%	%	100%	1 dokumen (100%)	0 dokumen	0	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	50%	100%	100%	60.50%	60.50%	60.50%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	50%	100%	100%	44.64%	44.64%	44.64%
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	50%	100%	1 dokumen (100%)	0%	0%	0%
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen (100%)	100%	50%	100%	1 dokumen (100%)	0%	0%	0%
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan lapangan beserta atribut dan kelengkapannya	100%	-	-	-	-	50 orang (100%)	50 orang (100%)	100%	100%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan	10 jenis	100%	100%	50%	100%	10 jenis	6 jenis	60%	60%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang tersedia						(100%)	(60%)		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 jenis	100%	100%	50%	100%	3 jenis (100%)	2 jenis (66.67%)	66.67%	66.67%
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 jenis	100%	100%	50%	100%	5 jenis (100%)	3 jenis (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	100%	100%	50%	100%	10 jenis (100%)	5 jenis (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	1000 lembar	100%	100%	50%	100%	1000 lembar (100%)	500 lembar (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	1000 orang	100%	100%	50%	100%	1000 orang (100%)	400 orang (40%)	40%	40%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	100 kegiatan	100%	100%	50%	100%	100 kegiatan (100%)	50 kegiatan (50%)	50%	50%
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	100%	100%	50%	100%	5 jenis (100%)	3 jenis (60%)	60%	60%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstras/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	100%	100%	50%	100%	10 unit (100%)	4 unit 40%	40%	40%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 unit	100%	100%	50%	100%	10 unit (100%)	4 unit 40%	40%	40%
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 unit	100%	100%	50%	100%	1 unit (100%)	1 unit (100%)	100%	100%
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	10 unit	100%	100%	50%	100%	10 unit (100%)	4 unit 40%	40%	40%
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	1 gedung	100%	100%	50%	100%	1 gedung (100%)	0	0	0
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	27 (100%)	-	-	-	-	100 %	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi	500 orang	-	-	-	-				
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KRB	5 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen (100%)	-	-	-
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pusat Data Informasi Kebencanaan (PUSDATIN)	60 dokumen	100%	100%	50%	100%	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	6 dokumen	0	0	0	0	4 dokumen	0	0	0
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Semarang	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen (100%)	-	-	-
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi lapang kebencanaan	1500 orang	-	-	-	-	100 orang	-	-	-
		pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	1500 orang	-	-	-	-	200 orang	-	-	-
		Pengurangan Resiko bencana inklucif disabilitas	500 orang	-	-	-	-	100 orang	-	-	-
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	5 jenis	5 jenis	100%	0	0	5 jenis (100%)	2 jenis (40%)	40%	40%
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap	Early Warning Sistem	15 titik	7 titik	1 titik	-	-	3 titik (100%)	0	0	0

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
	Bencana										
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	32 kelurahan	26 kelurahan	100%	25%	25%	8 kelurahan (100%)	4 kelurahan (50%)	50%	50%
		Pembentukan Sekolah Maderasah Aman Bencana (SMAB)	45 sekolah	16 sekolah				10 sekolah	-	-	-
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	100%		100%	50%	100%	100%	25%	25%	25%
		Pendampingan Bantuan Sosial	60 dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	1500 orang	-	-	-	-	200 orang (100%)	48 orang (24%)	24%	24%
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	60 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	60 dokumen	100%	100%	50%	100%	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	100%	100%	100%	50%	100%	100%	50%	50%	50%
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	1500 orang	-	-	-	-	300 orang (100%)	245 orang (81.67%)	81.67%	81.67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2021			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2022			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2022	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Capaian Tahun 2022	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan Kebencanaan	1500 orang	100%	100%	50%	100%	300 orang (100%)	245 orang (81.67%)	81.67%	81.67%
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	60 dokumen	-	-	-	-	12 dokumen (100%)	6 dokumen (50%)	50%	50%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanaka 1 Urusan, 2 Program dan 4 Indikator Kinerja Program dan 10 Kegiatan dengan 10 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 4 Indikator kinerja program, terdapat, 4 Indikator memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 2 Program dengan 5 indikator program dan 10 kegiatan dengan 10 indikator
 - b) Dari 5 indikator kinerja program, terdapat 5 indikator yang dipekrirakan dapat melampaui target, 5 Indikator diperkirakan dapat memenuhi target serta 5 Indikator yang masih dalam proses pencapaian target akhir periode Renstra.
 - c) Dari 10 indikator kinerja akegiatan, terdapat 1 indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, 9 Indikator masih dalam proses serta 1 Indikator tidak dapat memenuhi Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	24.275.681.669	23.006.530.038	94,77
	OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.820.384.228	8.312.419.209	94,24
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.264.010	18.264.010	100,00
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.724.218	10.724.218	100,00
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.632.733	1.632.733	100,00
	c. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1.614.600	1.614.600	100,00
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.588.050	1.588.050	100,00
	e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.704.409	2.704.409	100,00

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.919.591.919	6.569.133.328	94,94
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.687.682.669	6.391.803.328	95,58
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.931.000	176.730.000	77,88
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.557.300	300.000	19,26
	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.556.350	300.000	19,28
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.336.330	438.766.050	88,76
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12.095.998	10.869.000	89,86
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.801.560	10.675.000	90,45
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.533.974	56.295.100	96,18
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.343.617	9.543.000	92,26
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.945.981	41.299.000	91,89
	f. Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.750.000	14.375.000	91,27
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.838.000	119.638.450	95,83
	h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	216.027.200	176.071.500	81,50
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.978.005	594.778.061	97,67
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.996.000	2.970.000	99,13
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.105.296	190.040.893	93,57
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	402.876.709	401.767.168	99,72
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	779.213.964	691.477.760	88,74
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.410.000	274.772.900	90,56
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	284.170.000	235.322.200	82,81
	c. Pemeliharaan Mebel	4.400.000	4.345.000	98,75
	d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.944.264	88.276.700	92,01
	e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.289.700	88.760.960	97,23
B	Program Penanggulangan Bencana	15.455.297.441	14.694.110.829	95,07
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	384.939.000	362.046.500	94,05
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	87.839.000	87.100.000	99,16

NO	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	297.100.000	274.946.500	92,54
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12.419.864.024	11.887.279.850	95,71
	a. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	107.083.489	101.985.540	95,24
	b. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	375.789.740	359.480.000	95,66
	c. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	391.537.094	343.256.400	87,67
	d. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	11.545.453.701	11.082.557.910	95,99
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.449.443.512	2.280.349.546	93,10
	a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.411.960.972	1.263.432.536	89,48
	b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	1.037.482.540	1.016.917.010	98,02
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	201.050.905	164.434.933	81,79
	a. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	201.050.905	164.434.933	81,79

Sumber : BPBD Kota Semarang, 2021

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program dan 10 kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Kota Semarang adalah sebesar Rp (24.275.681.669). Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp (23.006.530.038) dengan sisa sebesar Rp 1.269.151.631 (5,23%) dengan urain berikut:

- a. **Belanja Tidak Langsung**, anggaran sebesar Rp. 6.687.682.669, realisasi Rp. 6.391.803.328 dan sisa anggaran sebesar Rp. 295.879.341
- b. **Belanja langsung**: anggaran sebesar Rp. 17.587.999.000 Dengan realisasi sebesar Rp. 16.614.726.710 (94,47%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 973.272.290 (5,53%).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI	PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tujuan : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang	115%	113%	111%	108.63%	113%	111%
Sasaran : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	-	100%	100%	-	100%	100%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	100%	100%	100%	75,60%	100%	100%

Sumber : BPBD Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana” memiliki indikator kinerja yaitu “Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 108.63 % dari target sebesar 115% (capaian sebesar 105,86%);

- b. Sasaran “Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana” dengan indikator “Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
- c. Sasaran “Meningkatnya upaya penanganan saat bencana” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut dengan indicator “Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana” telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100% dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
- d. Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 3 indikator kinerja sebagai berikut dengan indicator “Nilai SAKIP” tidak dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 75,60% dari target sebesar 100%.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang merupakan usaha berbagai pihak dalam rangka mengurangi resiko bencana diharapkan agar menjadi kesadaran untuk setiap pihak tentang pentingnya pengurangan resiko bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan walaupun capaiannya sudah mencapai 100% karena pada kenyataan dilapangan banyak masyarakat yang belum peduli terhadap bencana.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Belum optimalnya ketangguhan bencana
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:

- Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming).
- Belum terpadunya program penanggulangan bencana secara lintas sektor.
- Belum seragamnya persepsi lintas sektor untuk penanggulangan bencana terpadu.
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulangan bencana seperti kendaraan taktis, rescue, gudang logistik dan alat serta penunjang lainnya.
- Memasukkan isu kebencanaan pada dokumen RPJMD.

b. Peluang:

- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan
- Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana
- Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif
- Kepedulian lintas sektor dan SKPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang sebagai berikut: Isu – isu strategis

- a) Meningkatnya ancaman bencana yang dipengaruhi letak topografi wilayah Kota Semarang;
- b) Ancaman bencana non alam (pandemi);
- c) Belum adanya persamaan persepsi pengertian dan tindak lanjut yang terencana dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana;
- d) Perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;

- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
- 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan

- 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “**Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**”.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

NO	Urusan / Program / Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Urusan / Program / Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				14.919.845.058	URUSAN TRANTIBUMLINMAS				14.919.845.058	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100 %	8,932,447,919	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD	100 %	8,932,447,919	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %		
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100 %				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD	100 %		
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %				Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	3,520,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	3,520,000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	880,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	880,000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 dokumen	880,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 dokumen	880,000	

NO	Urusan / Program / Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Urusan / Program / Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	880,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	1 dokumen	880,000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 laporan	880,000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 laporan	880,000	
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	880,000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD	100 %	6,901,312,658	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %	6.855.717.735	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6,677,792,658	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	6.655.837.735	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	207,240,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	183.600.000	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	880,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	880,000	
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	15,400,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	15,400,000	

NO	Urusan / Program / Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Urusan / Program / Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %	36.588.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD	100 %	22.391.000	
1.3.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen (100%)	27,588,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen (100%)	19.391.000	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang (100%)	9,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang (100%)	3,000,000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 %	334,322,917	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100 %	363.590.366	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19,927,150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	19,927,150	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	17.190.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	61.189.639	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	38.141.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	38.141.000	
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	26.637.767	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	20.465.146	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1000 paket	24.000.000	
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	15.000.000	

NO	Urusan / Program / Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Urusan / Program / Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	157.637.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	157.637.000	
1.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	20.080.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	27.230.431	
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	713.402.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	713.402.000	
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 laporan	3.927.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 laporan	3.927.000	
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	237.575.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	237.575.000	
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	471.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	471.900.000	
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	943.302.344	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100 %	1.653.699.291	
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	312.420.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	312.420.000	

NO	Urusan / Program / Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Urusan / Program / Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	316.920.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	346.861.170	
1.6.3	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	2.908.800	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	2.908.800	
1.6.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	46.705.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	51.331.238	
1.6.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	264.348.544	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	940.178.083	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	5,987,397,139	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	5,987,397,139	
2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	703.948.400	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	13%	607.115.632	
2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	418.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	403.000.000	
2.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada	500 Orang	205.306.040	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	500 Orang	204.115.632	

NO	Urusan / Program / Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Urusan / Program / Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen	2.866.892.656	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang, dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan	3 dokumen	3.105.267.236	
2.2.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	900 orang	1.073.694.556	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	900 orang	1.241.344.556	
2.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 dokumen	75.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5 dokumen	75.000.000	
2.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 unit	993.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Semarang	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 unit	784.082.380	
2.2.4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Bencana)	4 kawasan	228.447.560	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Semarang	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Bencana)	4 kawasan	343.132.961	

NO	Urusan / Program / Kegiatan	Rancangan Perubahan RKPD				Urusan / Program / Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.2.5	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen	421.750.540	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pendampingan Bantuan Sosial	12 dokumen	496.741.890	
2.2.6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 orang	75.000.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 orang	164.965.449	
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	1.875.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Semarang	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana	12 dokumen	1.875.000.000	
2.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1255 Orang	1.575.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1255 Orang	1.778.333.948	
2.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1255 Orang	300.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1255 Orang	598.014.099	
2.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	100 orang	541,556,083	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan	100 orang	584.295.883	
2.4.1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	5 dokumen	376.233.242	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	5 dokumen	509.573.042	
2.4.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 laporan	165.322.841	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 laporan	74.722.841	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 TELAAHAN RENSTRA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis.

Menjabarkan sasaran yang telah digariskan BNPB, maka Renstra ini akan berusaha menterjemahkannya sasaran di atas sesuai ruang lingkup dan konteks di Kota Semarang yang dirinci dalam rencana program dan indikator yang relevan.

3.2 TELAAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan Rencana strategis Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Badan penanggulangan Bencana adalah **“Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam Penanggulangan Bencana dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah”**.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah, Sasaran Badan penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan Masyarakat terdampak bencana
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistikbencana
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKILKOTA TERPILIH

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode.

Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Penanggulangan Bencana, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana
2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai target meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2022 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;

- b. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
- h. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 adalah **“Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaiki kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;

- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upacaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut

:

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2022 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;

- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian prioritas keempat, yaitu “Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana”,

dengan indikator tujuan **“Penurunan nilai Indeks Resiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana
2. Meningkatnya upaya penanganan saat bencana
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah , dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - 1.1. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal;
 - 1.2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

3. Nilai SAKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menuju Semarang Tangguh Bencana	Penurunan nilai Indeks Risiko Bencana Kota Semarang pada RPJMD Kota Semarang	%	111,00
Sasaran : Meningkatnya kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ legal	%	100,00
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00
Sasaran : Meningkatnya upaya penanganan saat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	%	75,60 (100)

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Resiko Bencana” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah/ eks rutin), dan 1 program pelaksanaan/ pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 10 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 4 kegiatan pelaksanaan/pembangunan;

3. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 16.285.347.190 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp. 9.612.320.392 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp. 6.673.026.798 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan
Maju Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Semarang

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				16.285.347.190				15.718.437.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana		13%	6.673.026.798			20%	5.489.696.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi		500 orang	607.115.632			500 orang	589.696.000
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KRB	Kota Semarang	1 dokumen	403.000.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	204.696.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pusat Data Informasi Kebencanaan (PUSDATIN)	Kota Semarang	12 dokumen	204.115.632	APBD Kota Semarang		12 dokumen	385.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kota Semarang , dokumen Rencana Kontijensi dan dokumen kegiatan		3 dokumen	3.105.267.236			4 dokumen	2.175.000.000
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Gladi lapang kebencanaan	Kota Semarang	300 orang	1.241.344.556	APBD Kota Semarang		300 orang	675.000.000
		pengembangan dan pelatihan kebencanaan berbasis komunitas	Kota Semarang	400 orang		APBD Kota Semarang		300 orang	
		Pengurangan Resiko bencana inklucif disabilitas	Kota Semarang	200 orang		APBD Kota Semarang		100 orang	

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan	Kota Semarang	5 jenis	75.000.000	APBD Kota Semarang		5 jenis	100.000.000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Early Warning Sistem	Kota Semarang	2 titik	784.082.380	APBD Kota Semarang		3 titik	350.000.000
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)	Kota Semarang	2 kelurahan	343.132.961	APBD Kota Semarang		3 kelurahan	375.000.000
		Pembentukan Sekolah Maderasah Aman Bencana (SMAB)	Kota Semarang	2 sekolah		APBD Kota Semarang		5 sekolah	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pendampingan Bantuan Sosial	Kota Semarang	12 dokumen	496.741.890	APBD Kota Semarang		12 dokumen	550.000.000
		Penanganan Rehab/Rekon Pasca Bencana	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan dan Pengembangan TRC Kota Semarang	Kota Semarang	100 orang	164.965.449	APBD Kota Semarang		200 orang	125.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana		12 dokumen	2.376.348.047			12 dokumen	2.350.000.000
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	Kota Semarang	12 dokumen	1.778.333.948	APBD Kota Semarang		12 dokumen	1.850.000.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya evakuasi dan Bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Kota Semarang	100%	598.014.099	APBD Kota Semarang		100%	500.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Money kebencanaan		100 orang	584.295.883			200 orang	375.000.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan kebencanaan	Kota Semarang	100 orang	509.573.042	APBD Kota Semarang		200 orang	125.000.000
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Monitoring dan Evaluasi kegiatan kebencanaan	Kota Semarang	12 dokumen	74.722.841	APBD Kota Semarang		12 dokumen	250.000.000
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD		100%	8.932.447.919			100%	10.228.741.000
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD		100%				100%	
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD		100%				100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD		100%				100%	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD		100%	3.520.000			100%	6.000.000
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Renstra	Kota Semarang	1 dokumen	880.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.500.000
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA	Kota Semarang	2 dokumen	880.000	APBD Kota Semarang		2 dokumen	1.500.000
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA	Kota Semarang	2 dokumen	880.000	APBD Kota Semarang		2 dokumen	1.500.000
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi OPD	Kota Semarang	1 dokumen	880.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.500.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD		100%	6.855.717.735			100%	8.077.431.625
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kota Semarang	100%	6.655.837.735	APBD Kota Semarang		100%	7.824.431.625
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100%	183.600.000	APBD Kota Semarang		100%	250.000.000
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Semarang	1 dokumen	880.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.500.000
1.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dokumen	15.400.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	1.500.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sumber Daya Manusia		100.00	22.391.000			100.00	10.000.000
1.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Kota Semarang	1 kegiatan	19.391.000	APBD Kota Semarang		1 kegiatan	5.000.000
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya pelatihan dan pendidikan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Kota Semarang	1 kegiatan	3.000.000	APBD Kota Semarang		1 kegiatan	5.000.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD		100.00	363.590.366			100.00	589.825.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Kota Semarang	5 jenis	19.927.150	APBD Kota Semarang		5 jenis	5.325.000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	3 jenis	61.189.639	APBD Kota Semarang		3 jenis	30.000.000
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	5 jenis	38.141.000	APBD Kota Semarang		5 jenis	55.000.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Semarang	10 jenis	20.465.146	APBD Kota Semarang		10 jenis	27.000.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Kota Semarang	1000 lembar	24.000.000	APBD Kota Semarang		1000 lembar	37.500.000
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung	Kota Semarang	1000 orang	15.000.000	APBD Kota Semarang		1000 orang	65.000.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	Kota Semarang	100 kegiatan	157.637.000	APBD Kota Semarang		100 kegiatan	195.000.000
1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5 jenis	27.230.431	APBD Kota Semarang		5 jenis	175.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor		100%	713.402.000			100%	730.484.375
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat OPD yang telah terkirim	Kota Semarang	100%	3.927.000	APBD Kota Semarang		100%	3.484.375
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Semarang	100%	237.575.000	APBD Kota Semarang		100%	282.000.000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keamanan dan kebersihan kantor terpenuhi	Kota Semarang	100%	471.900.000	APBD Kota Semarang		100%	445.000.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD		100%	1.653.699.291			100%	815.000.000
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Kota Semarang	10 unit	312.420.000	APBD Kota Semarang		10 unit	330.000.000

Kode	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Peroraangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	10 unit	346.861.170	APBD Kota Semarang		10 unit	325.000.000
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	1 unit	2.908.800	APBD Kota Semarang		1 unit	4.000.000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kota Semarang	10 unit	51.331.238	APBD Kota Semarang		10 unit	78.000.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor	Kota Semarang	1 gedung	940.178.083	APBD Kota Semarang		1 gedung	78.000.000
	JUMLAH			16.285.347.190				15.718.437.000	

BAB V PENUTUP

Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

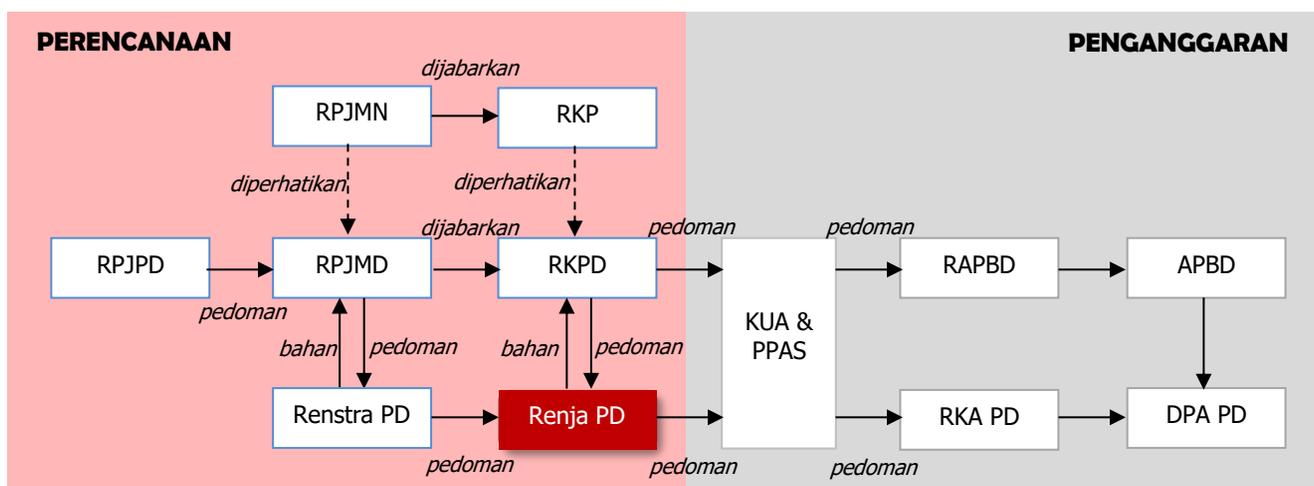
10. DINAS SOSIAL

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang;

- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Sosial Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Sosial Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan Tahun 2023 Triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Sosial Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	65,3%	65,3%	65,3%	65,3%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	100%	100%	35,7%	35,7%	35,7%	35,7%
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	150%
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.01.02 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	-
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.01.03 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	-
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.01.04 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	-
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1.06.01.2.01.05 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	-
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-
1.06.01.2.01.06 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	-
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	-
1.06.01.2.01.07 (Pemustakhiran)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2 laporan	2 laporan	100%-	2 laporan	-
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	49 oang/bulan	49 oang/bulan	100%	49 oang/bulan	100%
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	12 dokumen	6 dokumen	50%	6 dokumen	-
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1.06.01.2.02.05 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	1 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	-
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 dokumen	12 dokumen	-	-	-	-	-
1.06.01.2.02.07 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	50%
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	100%	100%	73%	73%	73%	73%
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	-
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 jenis	17 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	0 paket	0%	0 paket	-
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Persediaan Peralatan Rumah Tangga	12 jenis	12 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	50 jenis	35 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.04 (Pemustakhiran)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	-
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15 jenis	10 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.05 (Pemustakhiran)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	-
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 exemplar	36 exemplar	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.06 (Pemustakhiran)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	50 dokumen	28 dokumen	56%	28 dokumen	-
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat	1.500 dos	1.500 dos	-	-	-	-	-
		Jumlah penyediaan minuman dan dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat	2.000 dos	2.000 dos	-	-	-	-	-
		Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat	500 pack	500 pack	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.08 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	11 laporan	7 laporan	64%	7 laporan	-
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 orang	80 orang	-	-	-	-	-
1.06.01.2.06.09 (Pemustakhiran)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	6 laporan	4 laporan	67%	4 laporan	-
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	2 jenis	2 jenis	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1.06.01.2.06.11 (Pemustakhiran)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	3 dokumen	2 dokumen	67%	2 dokumen	-
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	70%	70%	70%	70%
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	5 jenis	4 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.07.05 (Pemustakhiran)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	4 unit	4 unit	100%	4 unit	-
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Autis	0 jenis	30 jenis	-	-	-	-	-
1.06.01.2.07.10 (Pemustakhiran)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	5 unit	2 unit	40%	2 unit	-
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
1 06 01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, telepon, air	3 rekening	3 rekening	-	-	-	-	-
1 06 01 2.08.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	-
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	78,2%	78,2%	78,2%	78,2%
1 06 01 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
1 06 01 2.09.01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	100%
1 06 01 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	49 unit	45 unit	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 unit	45 unit	46 unit	45 unit	98%	45 unit	92%
1 06 01 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 buah	10 buah	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.05 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	10 unit	10 unit	100%	10 unit	-
1 06 01 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 bangunan	7 jenis	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.09 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	7 unit	5 unit	71%	5 unit	-
1 06 01 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	1 jenis	1 jenis	-	-	-	-	-
1 06 01 2.09.10 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	5 unit	0 unit	0%	0 unit	-
1 06 01 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	7 jenis	7 jenis	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 01 2.09.11 (Pemustakhiran)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	5 unit	5 unit	100%	5 unit	-
1 06 01 2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1 06 01 2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Draf SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	100%
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	100%	100%	100%	30%	30%	30%	30%
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan Sosialisasi Izin pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
		Fasilitasi dan pengelolaan CSR	4 kegiatan	0 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 02 2.02 01 (Pemustakhiran)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	3 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	-
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	100%	100%	100%	60%	60%	60%	60%
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan berdayanya PSM	1 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-	-
		Terfasilitasinya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	100%	18 kelurahan	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
		Terpenuhinya pemberian tali asih Pekerja Sosial Masyarakat	177 orang	260 orang	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 01 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	260 orang	260 orang	100%	260 orang	-
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
		Terpenuhinya pemberian tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	16 orang	15 orang	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 02 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	16 orang	16 orang	100%	16 orang	-
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH))	1 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 03 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	4 keluarga	0 keluarga	0%	0 keluarga	-
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ko	Terfasilitasi dan meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan kabupaten/kota	8 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 02 2.03 04 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 lembaga	5 lembaga	100%	5 lembaga	-
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
		Terlaksananya kegiatan Kepahlawanan	6 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-	-
		Terlaksananya kegiatan Ziarah Wongsonegoro	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 02 2.03 05 (Pemustakhiran)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan	-	-	9 sertifikat	0 sertifikat	0%	0 sertifikat	-
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	100%	100%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	100%	100%	38,4%	38,4%	38,4%	38,4%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Titik Debarkasi untuk dipulangkan ke daerah asal	20 orang	4 orang	-	-	-	-	-
1 06 03 2.01 01 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	13 orang	5 orang	38,4%	5 orang	-
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,99%	100%	100%	90,6%	90,6%	90,6%	90,6%
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	81,4%	81,4%	81,4%	81,4%
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	85 orang	98 orang/hari	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	85 orang	96 orang	113%	96 orang	-
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	150 orang	75 orang	-	-	-	--	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 04 2.01 02 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	150 orang	96 orang	64%	96 orang	-
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/shelter	0 buah	10 buah	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20 orang	2 orang	10%	2 orang	-
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	100 orang	32 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 04 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	30 orang	1 orang	3,33%	1 orang	-
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial	265 orang	271 orang	-	-	-	-	-
		Operasional Rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	100%	75%	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 05 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	250 orang	183 orang	73,2%	183 orang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	8 kegiatan	14 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 06 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	7 orang	75 orang	1.71,4%	75 orang	-
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	50 orang	74 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 07 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	8 orang	80%	8 orang	-
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	130 orang	75 orang	-	-	-	-	-
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di shelter	1 orang	1 orang	-	-	-	-	-
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 04 2.01 08 (Pemustakhiran)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	130 orang	96 orang	73,8%	96 orang	-
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terpenuhinya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	100 orang	100 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 09 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 orang	135 orang	135%	135 orang	
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dimakamkan	100 orang	21 orang	-	-	-	-	-
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	200 orang	13 orang	-	-	-	-	-
		Terpenuhinya Pemberian Layanan Kedaruratan	100%	45%	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 10 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 orang	51 orang	51%	51 orang	
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	75 orang	88 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 11 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50 orang	71 orang	142%	71 orang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	100 orang	70 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.01 12 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20 orang	12 orang	60%	12 orang	-
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	100%	100%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Layanan data dan pengaduan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100%	100%	-	-	-	-	-
		Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-
		Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	1 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 01 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 orang	75 orang	75%	75 orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang dijangkau	100 orang	26 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 02 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50 orang	58 orang	116%	58 orang	-
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang mendapat bantuan permakanan	5.000 orang	5.304 orang	-	-	-	-	-
		Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan permakanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	17 kegiatan	-	-	-	-	-
		Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Permakanan Panti Sosial	2 kegiatan	0 panti	-	-	-	-	-
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Permakanan	265 orang	-	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5.000 orang	4.604 orang	92%	4.604 orang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial yang menerima paket sandang	48 orang	153 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 04 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	40 orang	78 orang	195%	78 orang	-
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar panti bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 06 (Pemustakhiran)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	-	-	10 orang	10 orang	100%	10 orang	-
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 07 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	135 orang	178 orang	131,8%	178 orang	-
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	1 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 04 2.02 08 (Pemustakhiran)	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	60 orang	100 orang	166,6%	100%	-
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 09 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	30 orang	7 orang	23,2%	7 orang	-
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Autis	2 orang	0 orang	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 10 (Pemustakhiran)	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 orang	28 orang	28%	28 orang	-
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya	12 kegiatan	7 kegiatan	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
		bukan korban HIV AIDS dan NAPZA							
1 06 04 2.02 11 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	40 orang	27 orang	67,5%	27 orang	
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	7 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 12 (Pemustakhiran)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	40 orang	33 orang	82,5%	33 orang	
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	12 kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 13 (Pemustakhiran)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 orang	14 orang	14%	14 orang	
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan pemberdayaan Komda Lansia	4 kegiatan	5 kegiatan	-	-	-	-	-
		Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan antar lembaga (UPKSAI, RBM, HIMIKS, TPA)	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
		Pelatihan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	30 orang	0 orang					
		Layanan penitipan anak balita warga Fakir Miskin	100%	0%	-	-	-	-	-
1 06 04 2.02 14 (Pemustakhiran)	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	-	4 dokumen	7 dokumen	175%	7 dokumen	-
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	71,96%	100%	107,5%	60,52%	118,55%	60,52	84,1%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
		yang memperoleh bantuan Sosial							
1 06 05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	100%	100%	110%	110%	110%	110%
1 06 05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau	20 orang	7 orang	-	-	-	-	-
1 06 05.2.01.01 (Pemustakhiran)	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	7 orang	70%	7 orang	
1 06 05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dirujuk	20 orang	9 orang	-	-	-	-	-
1 06 05.2.01.02 (Pemustakhiran)	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	15 orang	150%	15 orang	
1 06 05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	4 kegiatan	10 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 05.2.01.03 (Pemustakhiran)	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	11 orang	110%	11 orang	
1 06 05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya angka DTKS	14,90%	11.06	15,15%	11,05	127,1%	11,05	125,8%
1 06 05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin Kota Semarang	2 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-
		Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	2 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-
		Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 05.2.02.01 (Pemustakhiran)	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	-	-	180.000 orang	135.286 orang	75%	135.286 orang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	2 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-
		Monev Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota	1 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-
		Bintek Verifikasi dan Validasi pengelolaan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
		Verifikasi dan Validasi pengelolaan data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti cakupan daerah kabupaten/kota	2 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 05.2.02.02 (Pemustakhiran)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	-	-	1.500 keluarga	3.150 keluarga	210%	3.150 keluarga	-
1 06 05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan fasilitas dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (BSP)	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah kegiatan Fasilitasi penerima PBI APBN	12 kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah Bantuan Santunan Kematian	1.413 orang	1.505 orang	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 05.2.02.03 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 keluarga	-	50.000 keluarga	70.439 keluarga	140,8%	70.439 keluarga	-
1 06 05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan pendampingan e-warong Kube	12 kegiatan	13 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 05.2.02.04 (Pemustakhiran)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50 orang	20 orang	40%	20 orang	-
1 06 06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	100%	100%	132,5%	132,5%	132,5%	132,5%
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	65%	65%	65%	65%
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan permakanan/makanan siap saji	373 orang	15.226 orang	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 01 (Pemustakhiran)	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	373 orang	24 orang	6,4%	24 orang	-
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids	373 orang	1.056 orang	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 06 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	373 orang	157 orang	42,09%	157 orang	-
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana	5 unit	1 unit	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 03 (Pemustakhiran)	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 unit	3 unit	60%	3 unit	-
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak)	75 orang	342 orang	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 04 (Pemustakhiran)	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	75 orang	135 orang	180%	135 orang	-
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	18 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 06 2.01 05 (Pemustakhiran)	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	11 orang	4 orang	36,3%	4 orang	-
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	2 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(9/4)
1 06 06 2.02 01 (Pemustakhiran)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2 kampung	0 kampung	0%	0 kampung	-
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	3 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-
1 06 06 2.02 02 (Pemustakhiran)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	51 orang	102 orang	200%	102 orang	-

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah”, “Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN”, “Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor”, “Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor”, “Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan”, “Pengadaan Mebel”, “Pemeliharaan Mebel”, “Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan”, “Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (terlantar)”, “Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (terlantar)”, “Pemberian Layanan Kedaruratan (PMKS)”, “Penyediaan Sandang (PMKS)”, “Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti (PMKS)”, “Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (PMKS)”, “Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (PMKS)”, “Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (PMKS)”, “Rujukan Anak-Anak Terlantar”, “Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar”, “Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota”, “Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga”, “Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan”, dan “Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana”,

Hampir semua sub kegiatan di Triwulan II Tahun 2023 mengalami efisiensi anggaran terutama yang terdapat item belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Perjalanan Dinas dan Makan minum.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Sosial Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Sosial Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.796.621.178	5.757.528.753	53,33
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.257.260	3.031.000	71,20
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	487.800	482.000	98,81
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP	253.600	0	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	355.890	0	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	253.600	0	0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	355.890	0	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.933.200	1,932.000	99,94
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	617.280	617.000	99,95
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.154.298.576	4.597.940.932	56,39

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.825.768.436	4.440.194.782	56,74
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324.643.200	155.588.550	47,93
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	253.600	102.800	40,54
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	263.980	253.300	100,00
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.167.760	1.600.000	50,51
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	201.500	99,95
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.046.114	301.730.136	42,49
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.724.370	86,22
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.200.000	0	0,00
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.000.000	10.131.040	77,93
17	Penyediaan Bahan Logistik Kanto	19.727.000	4.997.300	25,33
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.369.712	10.647.250	69,27
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	2.520.000	43,72
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.000.000	20.125.000	20,33
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.948.592	137.619.676	41,21
22	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	215.040.810	113.965.500	53,00
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.286.513	149.489.250	66,06
23	Pengadaan Mebel	197.073.443	139.610.250	70,84
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.213.070	9.879.000	33,82
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.782.784	55.622.748	42,86
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.782.784	55.622.748	42,86
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.421.131.531	505.139.663	35,54
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	12.547.000	31,12
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	610.978.814	247.986.450	40,59
28	Pemeliharaan Mebel	3.636.000	3.635.250	99,98
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	491.336.000	185.770.213	37,81
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	173.450.000	0	0,00
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.417.537	55.200.750	54,43
G	Penataan Organisasi	150.818.400	144.575.024	95,86
32	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.818.400	144.575.024	95,86
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.335.838.813	2.956.796.720	40,31
H	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	136.000.033	38.585.600	28,37
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	136.000.033	38.585.600	28,37
I	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	7.199.838.780	2.918.211.120	40,53
34	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.121.772.620	2.429.178.400	47,43
35	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	381.997.728	160.469.820	42,01
36	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	262.726.410	37.095.600	14,12
37	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	573.120.680	170.925.100	29,82
38	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	860.221.342	120.542.200	14,01

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	54.023.060	10.318.850	19,10
J	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	54.023.060	10.318.850	19,10
39	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	54.023.060	10.318.850	19,10
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.706.511.596	2.327.491.119	34,70
K	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.546.166.460	1.081.550.828	42,48
40	Penyediaan Permakanan	960.700.000	477.840.000	49,74
41	Penyediaan Sandang	10.705.000	10.678.250	99,75
42	Penyediaan Alat Bantu	804.100	0	0,00
43	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	77.540.000	2.856.000	3,68
44	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	752.408.140	379.161.999	50,39
45	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	140.547.500	21.300.000	15,16
46	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	13.295.000	0	0,00
47	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.702.720	1.694.820	99,54
48	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	391.424.000	154.600.759	39,50
49	Pemberian Layanan Kedaruratan	44.000.000	17.675.000	40,17
50	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	76.040.000	1.480.000	1,95
51	Pemberian Layanan Rujukan	77.000.000	14.264.000	18,52
L	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4.160.345.136	1.245.940.291	29,95
52	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	494.340.800	246.248.907	49,81
53	Pemberian Layanan Kedaruratan	50.850.000	19.185.000	33,80
54	Penyediaan Permakanan	2.552.309.450	473.333.574	18,55
55	Penyediaan Sandang	20.315.000	19.500.000	95,99
56	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	133.284.400	6.264.760	4,70
57	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	155.220.100	146.612.250	94,45
58	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	129.851.000	14.475.000	11,15
59	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	52.899.920	375.000	0,71
60	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	55.517.000	48.472.000	87,31
61	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	16.500.000	2.700.000	16,36
62	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	16.500.000	2.325.000	14,09
63	Pemberian Layanan Rujukan	31.900.000	9.123.500	28,60
64	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	450.857.466	259.325.300	57,52
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.573.580.046	1.905.597.390	28,99
M	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	240.809.710	91.244.520	37,89
65	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	151.912.400	62.151.800	40,91
66	Rujukan Anak-Anak Terlantar	55.209.210	24.727.720	44,79
67	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	33.688.100	4.365.000	12,96
N	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.332.770.336	1.814.352.870	28,65
68	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	499.115.790	241.908.300	48,47
69	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	559.131.980	228.468.525	40,86
70	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.962.495.900	1.194.565.300	24,07

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
71	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	312.026.666	149.410.745	47,88
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.108.789.176	453.296.204	40,88
O	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	624.326.176	288.725.405	46,25
72	Penyediaan Makanan	214.159.660	63.533.150	29,67
73	Penyediaan Sandang	70.860.000	68.503.280	96,67
74	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	41.970.000	40.705.375	96,99
75	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	61.114.450	7.800.000	12,76
76	Pelayanan Dukungan Psikososial	236.222.066	108.182.600	45,80
P	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	484.463.000	164.570.799	33,97
77	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	247.965.000	96.756.050	39,02
78	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	236.498.000	67.814.749	28,67
	JUMLAH	32.575.363.869	13.411.029.036	41,17

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, dan 16 kegiatan dan 78 sub kegiatan pada Dinas Sosial Kota Semarang adalah sebesar Rp 32.575.363.869,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 13.411.029.036,00. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 19.164.334.833,00.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Nomor 460/2190/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Sosial Kota Semarang maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
Tujuan :														
1. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	16,45%	16,10%	15,80%	15,50%	15,20%	14,90%	24,23%	11,06%	11,05%	-	-	-	11,05%
Sasaran :														
1. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	-	0,05%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	-	-	0,01%	-	-	-	0,01%
2. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	-	-	100%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	-	-	100%
	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	98%	99,75%	99,81%	99,87%	99,93%	99,99%	100%	100%	100%	-	-	-	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Penduduk Miskin”, telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 11,05% dari target sebesar 15,80%, di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih kecil dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin ;
- b. Sasaran **“Menurunnya Angka Kemiskinan”** memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu “Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 0,01% dari target sebesar

0,3% (capaian sebesar 133,3%), di indikator kinerja ini dengan realisasi lebih kecil dari target justru menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang telah berhasil menurunkan Persentase Penduduk Miskin ;

- c. Sasaran **“Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :
1. “Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%) ;
 2. “Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 100% (capaian sebesar 100%) ;
 3. “Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 100%, dari target sebesar 99,81% (capaian sebesar 100,19%) ;

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Lingkungan Internal :
- a. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial
 - b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada
 - c. Tersedianya anggaran dan regulasi yang mendukung layanan pada urusan sosial
 - d. Tersedianya jaringan system informasi yang ada
 - e. SDM Relawan Sosial yang ada sampai pada di tingkat kelurahan
- B. Lingkungan Eksternal :
- a. Letak Kota Semarang yang strategis.
 - b. Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - c. Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);

- d. Adanya partisipasi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat;
- e. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/CSR.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Belum adanya konsep perencanaan penganggaran yang tepat terutama yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota dan belum mengacu pada jenis pelayanan;
2. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial;
3. Masih ada beberapa SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan masalah sosial, serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional;
4. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Adanya konsep penganggaran yang tepat dan sesuai sasaran;
- 2) Memberikan sarana prasarana yang lebih memadai untuk rumah singgah/shelter yang dimiliki supaya dapat mencakup jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial;
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada;
- 4) Identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;

b. Peluang

- 1) Meningkatkan penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti dengan memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Meningkatkan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana;
- 3) Memfasilitasi dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada sehingga peran dan keterlibatannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa lebih optimal;
- 4) Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai berikut:

1. Upaya pengentasan Kemiskinan Ekstrim;
2. Upaya penanganan Stunting;
3. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Sosial Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				34.912.253.286	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				34.912.253.286	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	10.730.976.564	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	10.730.976.564	
1.06.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100 %	4.257.260	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100 %	4.257.260	
1.06.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	487.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	487.800	-
1.06.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	253.600	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	253.600	-
1.06.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	355.890	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	355.890	-
1.06.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	253.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	253.600	-
1.06.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	355.890	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	355.890	-
1.06.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	1.933.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	1.933.200	-

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	617.280	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	617.280	
1.06.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100 %	8.230.346.015	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100 %	8.230.346.015	
1.06.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	7.901.815.875	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	7.901.815.875	
1.06.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	324.643.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	324.643.200	
1.06.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	253.600	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	253.600	
1.06.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	263.980	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	263.980	
1.06.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	3.167.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	3.167.760	
1.06.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	201.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	201.600	
1.06.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100 %	558.664.061	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100 %	558.664.061	
1.06.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.000.000	
1.06.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0	
1.06.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	13.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13.339.950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13.339.950	
1.06.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.369.712	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.369.712	
1.06.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	5.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	5.040.000	
1.06.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 laporan	70.275.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 laporan	70.275.000	
1.06.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	224.598.589	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	224.598.589	
1.06.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	215.040.810	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	215.040.810	
1.06.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial	100 %	226.286.513	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial	100 %	226.286.513	
1.06.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	197.073.443	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	197.073.443	
1.06.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unt	29.213.070	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unt	29.213.070	
1.06.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial	100 %	126.292.784	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial	100 %	126.292.784	
1.06.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	126.292.784	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	126.292.784	
1.06.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100 %	1.434.311.531	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100 %	1.434.311.531	
1.06.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	40.313.180	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
1.06.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	579.269.724	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	579.269.724	
1.06.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	3.636.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	3.636.000	
1.06.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	491.336.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	491.336.000	
1.06.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	212.658.822	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	212.658.822	
1.06.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	107.097.805	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	107.097.805	
1.06.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100 %	150.818.400	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100 %	150.818.400	
1.06.01.2.1 3.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	150.818.400	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	150.818.400	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78 %	7.358.499.936	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	89 %	7.358.499.936	
1.06.02.2.0 2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100 %	109.637.283	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100 %	109.637.283	
1.06.02.2.0 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 dokumen	109.637.283	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 dokumen	109.637.283	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	78 %	7.248.862.653	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	78 %	7.248.862.653	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	5.373.737.338	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	5.373.737.338	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	363.577.840	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	363.577.840	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 keluarga	210.296.720	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 keluarga	210.296.720	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	380.744.095	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	380.744.095	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	9 sertifikat	920.506.660	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Semarang	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	9 sertifikat	920.506.660	
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100 %	45.413.532	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100 %	45.413.532	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kota Semarang	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	45.413.532	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kota Semarang	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100 %	45.413.532	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.03.2.0 1.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	45.413.532	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Kota Semarang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	45.413.532	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81 %	9.434.013.628	Program Rehabilitasi Sosial	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81 %	9.434.013.628	
1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	2.276.761.460	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	2.276.761.460	
1.06.04.2.0 1.01	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 orang	960.700.000	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 orang	960.700.000	
1.06.04.2.0 1.02	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	10.705.000	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	10.705.000	
1.06.04.2.0 1.03	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 orang	804.100	Penyediaan Alat Bantu	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 orang	804.100	
1.06.04.2.0 1.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	33.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	33.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.04.2.0 1.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	752.408.140	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	752.408.140	
1.06.04.2.0 1.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	94.422.500	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	94.422.500	
1.06.04.2.0 1.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	8.045.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	8.045.000	
1.06.04.2.0 1.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	1.702.720	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	1.702.720	
1.06.04.2.0 1.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	297.974.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	297.974.000	
1.06.04.2.0 1.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	44.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	44.000.000	
1.06.04.2.0 1.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	25.250.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	25.250.000	
1.06.04.2.0 1.12	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	47.750.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	47.750.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100 %	7.157.252.168	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Semarang	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial	100 %	7.157.252.168	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	478.890.800	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	478.890.800	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	78.100.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	78.100.000	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	5.535.024.450	Penyediaan Permakanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	5.535.024.450	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	20.315.000	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	20.315.000	
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 orang	69.816.400	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 orang	69.816.400	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 orang	147.720.100	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 orang	147.720.100	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	129.851.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Semarang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	129.851.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.04.2.0 2.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	48.764.452	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	48.764.452	
1.06.04.2.0 2.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	55.517.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	55.517.000	
1.06.04.2.0 2.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	5.250.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	5.250.000	
1.06.04.2.0 2.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	5.250.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	5.250.000	
1.06.04.2.0 2.13	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	15.900.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	15.900.000	
1.06.04.2.0 2.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 dokumen	566.852.966	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 dokumen	566.852.966	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	69,85 %	6.337.803.540	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kota Semarang	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	69,85 %	6.337.803.540	
1.06.05.2.0 1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100 %	222.292.360	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100 %	222.292.360	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.05.2.0 1.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	146.682.730	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	146.682.730	
1.06.05.2.0 1.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	52.763.770	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	52.763.770	
1.06.05.2.0 1.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	22.845.860	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kota Semarang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	22.845.860	
1.06.05.2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Menurunnya angka DTKS	15,15 %	6.115.511.180	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Menurunnya angka DTKS	15,15 %	6.115.511.180	
1.06.05.2.0 2.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	180.000 orang	449.985.170	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	180.000 orang	449.985.170	
1.06.05.2.0 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.500 keluarga	478.173.336	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.500 keluarga	478.173.336	
1.06.05.2.0 2.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 keluarga	4.808.996.430	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 keluarga	4.808.996.430	
1.06.05.2.0 2.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	378.356.244	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	378.356.244	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Penyanggah Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100 %	1.005.546.086	Program Penanganan Bencana	Kota Semarang	Persentase Pemerlu Penyanggah Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100 %	1.005.546.086	
1.06.06.2.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100 %	591.516.036	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100 %	591.516.036	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1.06.06.2.0 1.01	Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	210.709.660	Penyediaan Makanan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	210.709.660	
1.06.06.2.0 1.02	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	70.860.000	Penyediaan Sandang	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	70.860.000	
1.06.06.2.0 1.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit	41.970.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Semarang	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit	41.970.000	
1.06.06.2.0 1.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	64.414.450	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	64.414.450	
1.06.06.2.0 1.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	203.561.926	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Semarang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	203.561.926	
1.06.06.2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100 %	414.030.050	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100 %	414.030.050	
1.06.06.2.0 2.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	225.565.636	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	225.565.636	
1.06.06.2.0 2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51 orang	188.464.414	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51 orang	188.464.414	

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.

- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.

- 2) Peningkatan prestasi olahraga.
- 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
- 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Nomor 460/2190/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Dinas Sosial Kota Semarang maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat”

dengan indikator tujuan **“Persentase Penduduk Miskin”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Sosial Kota Semarang yaitu:

1. Menurunnya Angka Kemiskinan;
2. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS);

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan;
2. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti;
3. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota;
4. Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan :			
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	%	15,80
Sasaran :			
Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin yang dientaskan	%	0,3
Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100
	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	99,81

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Sosial memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Persentase Penduduk Miskin” dan indikator sasaran “Persentase penduduk Miskin yang dientaskan, Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota, dan Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Sosial Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					48.040.553.000	30.801.314.76	35.272.253.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100 %	12.751.665.000	10.796.621.178	10.737.798.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dinas Sosial	100%	100%	100 %	9.001.000	4.257.260	4.257.260	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2.001.000	487.800	487.800	PendapatanAsli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	253.600	253.600	PendapatanAsli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.500.000	355.890	355.890	PendapatanAsli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	253.600	253.600	PendapatanAsli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	355.890	355.890	PendapatanAsli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.000.000	1.933.200	1.933.200	PendapatanAsli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1.000.000	617.280	617.280	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Dinas Sosial	100%	100 %	100 %	9.671.712.000	8.154.298.576	8.230.346.015	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	49 orang/bulan	49 orang/bulan	8.807.957.000	7.825.768.436	7.901.815.875	PendapatanAsli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	859.755.000	324.643.200	324.643.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	253.600	253.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.000.000	263.980	263.980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.000.000	3.167.760	3.167.760	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	201.600	201.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial	100%	100%	100 %	1.217.140.000	710.046.114	558.664.061	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	5.700.000	2.000.000	2.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	500.000.000	6.200.000	0	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	30.000.000	13.000.000	13.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	25.000.000	19.727.000	13.339.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	15.000.000	15.369.712	15.369.712	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	5.940.000	5.760.000	5.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 laporan	11 laporan	11 laporan	137.500.000	99.000.000	70.275.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	6 laporan	6 laporan	6 laporan	250.000.000	333.948.592	224.598.589	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
1.06.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	248.000.000	215.040.810	215.040.810	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial	100%	100%	100 %	458.212.000	226.286.513	226.286.513	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	4 unit	4 unit	100.000.000	197.073.443	197.073.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unt	5 unt	5 unt	358.212.000	29.213.070	29.213.070	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial	100%	100%	100 %	200.000.000	129.782.784	126.292.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	200.000.000	129.782.784	126.292.784	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dinas Sosial	100 %	100 %	100 %	1.166.600.000	1.421.131.531	1.434.311.531	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	39.950.000	40.313.180	40.313.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	46 unit	46 unit	769.370.000	610.978.814	579.269.724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	10 unit	10 unit	5.280.000	3.636.000	3.636.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	7 unit	7 unit	300.000.000	491.336.000	491.336.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	30.000.000	173.450.000	212.658.822	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	22.000.000	101.417.537	107.097.805	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi	Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial	100 %	100 %	100 %	29.000.000	150.818.400	150.818.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	29.000.000	150.818.400	150.818.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	78%	78%	78 %	9.725.000.000	7.335.838.813	7,358,499,936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial	100%	100%	100 %	305.000.000	136.000.033	109.637.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	305.000.000	136.000.033	109.637.283	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	78%	78%	78 %	9.240.000.000	7.199.838.780	7,248,862,653	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 orang	260 orang	260 orang	6.650.000.000	5.121.772.620	5.373.737.338	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	16 orang	16 orang	60.000.000	381.997.728	363,577,840	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 keluarga	4 keluarga	4 keluarga	360.000.000	262.726.410	210.296.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	1.050.000.000	573.120.680	380,744,095	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	9 sertifikat	9 sertifikat	9 sertifikat	1.300.000.000	860.221.342	920.506.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani	100%	100%	100 %	40.000.000	54,023,060	45.413.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	100%	100%	100 %	40.000.000	54,023,060	45.413.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa / Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 orang	13 orang	13 orang	40.000.000	54,023,060	45.413.532	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	99,81%	99,81 %	99,81 %	18.528.888.000	6,706,511,596	9,434,013,628	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100 %	100 %	4.316.193.000	2,546,166,460	2,276,761,460	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	85 orang	85 orang	85 orang	1.396.127.000	960.700.000	960.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	150 orang	150 orang	75.000.000	10.705.000	10.705.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	2 orang	2 orang	71.897.000	804.100	804.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	30 orang	85.500.000	77.540.000	33.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	250 orang	250 orang	450.350.000	752.408.140	752.408.140	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	7 orang	7 orang	334.000.000	140.547.500	94.422.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	10 orang	15.884.000	13.295.000	8.045.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	130 orang	50 orang	50 orang	98.300.000	1.702.720	1.702.720	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100 orang	50.000.000	391.424.000	297.974.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100 orang	1.555.535.000	44.000.000	44.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	50 orang	92.400.000	76.040.000	25.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	20 orang	91.200.000	77.000.000	47.750.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	100%	100 %	100 %	14.212.695.000	4.160.345.136	7.157.252.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial								
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100 orang	205.500.000	494.340.800	478.890.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	50 orang	54.000.000	50.850.000	78.100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000 orang	5.000 orang	5.000 orang	10.605.875.000	2,552,309,450	5.535.024.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	40 orang	40 orang	23.548.000	20.315.000	20.315.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 orang	10 orang	10 orang	12.420.000	133.284.400	69.816.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 orang	135 orang	135 orang	90.000.000	155.220.100	147.720.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	0 orang	100 orang	55.000.000	129.851.000	129.851.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	30 orang	30 orang	30 orang	55.000.000	52.899.920	48.764.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100 orang	72.604.000	55.517.000	55.517.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	40 orang	40 orang	12.000.000	16.500.000	5.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	40 orang	40 orang	12.000.000	16.500.000	5.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100 orang	27.500.000	31.900.000	15.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2.987.248.000	450.857.466	566.852.966	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	69,85%	69,85%	69,85 %	6.115.000.000	4,799,530,946	6,337,803,540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar	100%	100%	100 %	80.000.000	240,809,710	222,292,360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	10 orang	25.000.000	151.912.400	146.682.730	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	10 orang	25.000.000	55.209.210	52.763.770	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.05.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	10 orang	30.000.000	33.688.100	22.845.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Menurunnya angka DTKS	15,15%	15,15%	15,15 %	6.035.000.000	4,558,721,236	6,115,511,180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	180.000 orang	180.000 orang	180.000 orang	1.055.000.000	499.115.790	499.985.170	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1.500 keluarga	1.500 keluarga	1.500 keluarga	1.503.000.000	559.131.980	478.173.336	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000 orang	50.000 orang	50.000 keluarga	3.427.000.000	3.188.446.800	4.808.996.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	50 orang	50.000.000	312.026.666	378.356.244	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani	100%	100%	100 %	880.000.000	1,108,789,176	1,005,546,086	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100 %	630.000.000	624,326,176	591,516,036	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	373 orang	373 orang	315.000.000	214.159.660	210.709.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	373 orang	373 orang	375 orang	150.000.000	70.860.000	70.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit	5 unit	5 unit	25.000.000	41.970.000	41.970.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	75 orang	75 orang	30.000.000	61.114.450	64.414.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	11 orang	11 orang	110.000.000	236.222.066	203.561.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	100%	100%	100 %	250.000.000	484,463,000	414.030.050	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kampung	2 kampung	2 kampung	50.000.000	247,965,000	225.565.636	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51 orang	51 orang	51 orang	200.000.000	236,498,000	188.464.414	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
JUMLAH						48.040.553.000	30.801.314.769	34.912.253.286		

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Sosial Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Sosial ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 pada Triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

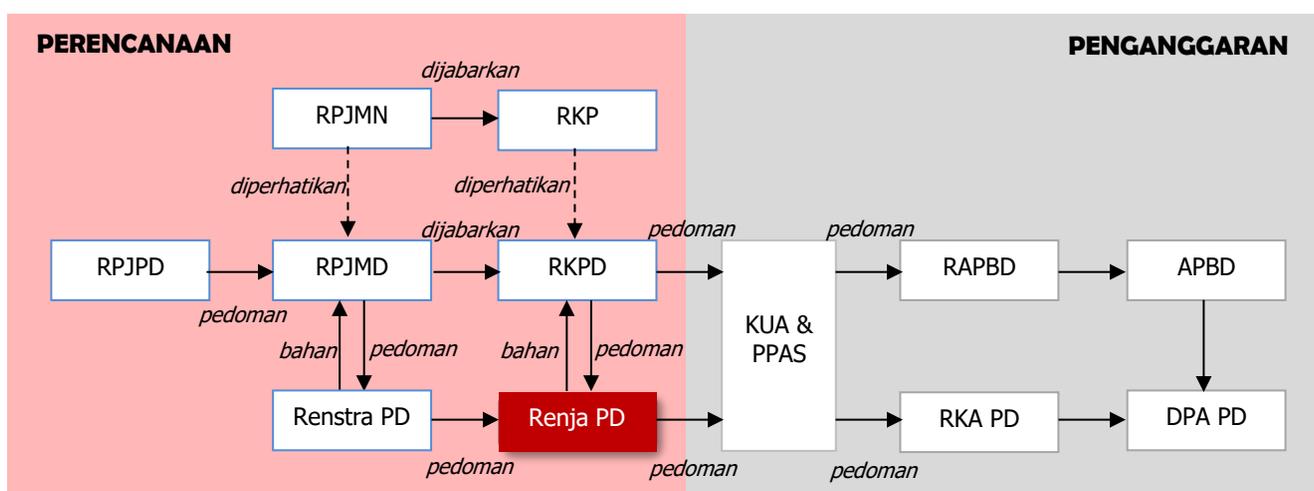
11. DINAS TENAGA KERJA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	48,46 %	19,70 %	40,65%	19,70%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41,65 %	13,57 %	32,58%	13,57%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja OPD	5 doc	1 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	0 doc	0,00 %	0,00 %
		Jumlah dokumen Renstra OPD	1 doc	1 doc	0 doc	0 doc	100 %	0 doc	0 doc	0,00 %	0,00 %
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD	5 doc	1 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	0 doc	0,00 %	0,00 %
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA OPD	5 doc	1 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	0 doc	0,00 %	0,00 %
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA OPD	5 doc	1 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	1 doc	95,00 %	20,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA OPD	5 doc	1 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	0 doc	0,00 %	0,00 %
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD	10 doc	2 doc	2 doc	2 doc	100 %	2 doc	0 doc	0,00 %	0,00 %
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja OPD	5 doc	1 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	0 doc	0,00 %	0,00 %
	PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perserntase kinerja adminnstrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	23,33 %	23,33 %	23,33 %
X.XX.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41,65 %	23,33 %	56,01 %	23,33 %
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41,65 %	35,00 %	84,03 %	35,00 %
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya honoraium pengelola keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41,65 %	35,00 %	84,03 %	35,00 %
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan keuangan OPD	20 doc	4 doc	4 doc	4 doc	100 %	4 doc	0 doc	0,00 %	0,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terjadinya sarana praarana perkantoran dinas tenaga kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	20,33%	20,33%	20,33%
X.XX.01.2.06	Admininstrasi umum perangkat daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	44,99%	21,30%	47,34%	21,30%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan	20 jenis	10 jenis	10 jenis	12 jenis	120 %	12 jenis	4 jenis	35,00 %	20,00 %
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	2 jenis	2 jenis	3 jenis	150 %	3 jenis	0 jenis	0,00 %	0,00 %
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	35 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100 %	30 jenis	11 jenis	35,00 %	31,43 %
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	40 jenis	59 jenis	59 jenis	40 jenis	67,79 %	40 jenis	16 jenis	34,00 %	40,00 %
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100 %	10 jenis	4 jenis	36,00 %	26,66 %
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya bahan bacaan	730 eksem	730 eksem	730 eksem	730 eksem	100 %	730 eksem	183 eksem	25,00 %	25,06 %
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu	500 org	350 org	350 org	300 org	85,71 %	300 org	36 org	12,00 %	7,20 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tersedianya biaya perjalanan dinas	200 keg.	182 keg.	182 keg.	100 keg.	54,94 %	100 keg.	28 keg.	28,00 %	14,00 %
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan tata kelola arsip OPD	5 keg.	0 keg.	1 keg.	1 keg.	100 %	1 keg.	0 keg.	0,00 %	0,00 %
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah tersedianya sarpras TIK	5 jenis	12 jenis	12 jenis	5 jenis	41,66 %	5 jenis	1 jenis	08,00 %	20,00 %
X.XX.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah tersedianya meubeler	20 jenis	5 jenis	4 jenis	1 jenis	25 %	1 jenis	0 jenis	0,00 %	0,00 %
X.XX.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase tersedianya jasa urusan kedinasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41,65	43,50 %	104%	104%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41,65	45,00	108%	108%
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tersedianya honorarium non ASN	24 orang	24 orang	23 orang	23 orang	100 %	23 orang	10 orang	42,00 %	41,66 %
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	40,83 %	16,50 %	40,41%	16,50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	33,00 %	100 %
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas operasional	24 unit	24 unit	28 unit	24 unit	85,71 %	24 unit	8 unit	33,00 %	33,33 %
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	18 jenis	11 jenis	11 jenis	15 jenis	136,6 %	15 jenis	0 jenis	0,00 %	0,00 %
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	2 gedung	2 gedung	3 gedung	150 %	3 gedung	0 gedung	0,00 %	0,00 %
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80 %	0 %	60 %	80,95 %	134,91 %	60.00 %	6,75 %	11,25%	8,44%
2.07.02.2.01	Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan ternaga kerja kabupaten/ kota	1 doc	1 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	1 doc	6,75 %	100 %
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 doc	0 doc	1 doc	1 doc	100 %	1 doc	1 doc	13,50 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyusunan rencana tenaga kerja mikro pada perusahaan	150 org	0 org	30 org	30 org	100 %	30 org	0 org	0,00 %	0,00 %
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	80 %	76 %	76 %	72,74 %	95,71 %	49.40	33.30	67,41%	41,63%
2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	57 %	45 %	47 %	37,6 %	80 %	34,00 %	52,50 %	154 %	92,11 %
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	460 org	160 org	100 org	100 org	100 %	100 org	10 org	10,00 %	2,17 %
		Jumlah peserta uji kompetensi	400 org	60 org	120 org	60 org	50 %	60 org	6 org	10,00 %	1,50 %
		Jumlah peserta pelatihan (buruh rokok)	880 org	400	350	140	40 %	140 org	14 org	10,00 %	1,59 %
		Jumlah terlaksananya pendataan tenaga kerja kompetensi	5 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	100 %	1 keg.	1 keg.	10,00 %	20,00 %
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan peralatan pelatihan	5 jenis	3 jenis	3 jenis	5 jenis	166,6 %	5 jenis	5 jenis	95,00 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah pengadaan peralatan pelatihan	3 paket	0 paket	0 paket	0 paket	100 %	0 paket	0 paket	95,00 %	00,00 %
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	26 %	16 %	18 %	18 %	100 %	60,00 %	15,00 %	25,00%	57,69%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK swasta yang dibina	40 LPK	20 LPK	8 LPK	8 LPK	100 %	8 LPK	1 LPK	15,00 %	2,50 %
		Jumlah peserta pelatihan pemagangan	100 org	20 org	10 org	20 org	200 %	20 org	3 org	15,00 %	3,00 %
		Jumlah instruktur LPK swasta yang memperoleh peningkatan kapasitas	100 org	20 org	0 org	25 org	100 %	25 org	4 org	15,00 %	4,00 %
		Jumlah modul pelatihan yang disusun	3 jenis	1 jenis	0 jenis	1 jenis	100 %	1 jenis	1 jenis	15,00 %	33,33 %
		Jumlah forum komunikasi jejaring pemagangan yang memperoleh peningkatan kapasitas	60 perush	20 perush	0 perush	20 perush	100 %	20 perush	3 perush	15,00 %	5,00 %
2.07.03.2.03	Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja	Presentase LPK swasta yang memiliki izin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30,00 %	25,00 %	83,33%	25,00%
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah LPK swasta yang memperoleh rekomendasi, pendaftaran, monitoring	50 LPK	50 LPK	10 LPK	10 LPK	100 %	10 LPK	3 LPK	25,00 %	6,00 %
2.07.03.2.04	Konsultasi produktifitas pada Perusahaan kecil	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	50 perus	0 perus	10 perus	10 perus	100 %	10 perus	4 perus	42,00 %	8,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang memperoleh sosialisasi dan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas kerja pada perusahaan	50 perush	10 perush	10 perush	10 perush	100 %	10 perush	4 perush	42,00 %	8,00%
2.07.03.2.05	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	155.809.000 rupiah	149726000 rupiah	150.474.000 rupiah	150474000 rupiah	100 %	151.227.000 rupiah	48.392.640 rupiah	32,00 %	31,06 %
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang memperoleh sosialisasi pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	15 perush	5 perush	3 perush	3 perush	100 %	3 perush	1 perush	32,00 %	6,66 %
		Jumlah pekerja yang memperoleh pengukuran produktivitas tenaga kerja	25000 org	5000 org	5000 org	5000 org	100 %	5000 org	1600 org	32,00 %	6,40 %
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	72 %	64 %	64 %	66 %	103,12 %	59,15 %	35,05 %	59,26%	48,68%
2.07.04.2.01	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	10.000 org	2690 org	2.000 org	2000 org	100 %	2000 org	240 org	11,75 %	2,40 %
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah KK yang ditempatkan melalui transmigrasi	12 KK	1 KK	3 KK	3 KK	100 %	3 KK	1 KK	11,75 %	8,33 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi identifikasi peminat transmigrasi	10 kali	1 kali	2 kali	2 kali	100 %	2 kali	1 kali	11,75 %	10,00 %
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	0 orang	2500 orang	2000 orang	2000 orang	100 %	2000 orang	240 orang	11,75 %	00,00 %
		Jumlah lowongan yang disediakan	12.500 org	1000 org	2500 org	2500 org	100 %	2500 orang	300 orang	11,75 %	2,40 %
		Jumlah pelayanan antar kerja yang dilaksanakan	60 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	100 %	12 keg.	2 keg.	11,75 %	3,33 %
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	12 kali	0 kali	2 kali	1 kali	50 %	1 kali	1 kali	1,00 %	8,33 %
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelayanan disabilitas	155 org	0 org	35 org	30 org	85,71 %	30 org	0 org	0,00 %	0,00 %
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah orang yang memperoleh pelatihan wirausaha baru	190 org	30 org	40 org	30 org	75 %	30 org	8 org	26,00 %	4,21 %
2.07.04.2.02	Penerbitan izin Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu daerah kabupaten/kota	Persentase izin LPTKS yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	40,00 %	31,00 %	77,50%	31,00 %
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah pelaksanaan monitoring LPTKS, LPPRT, P3MI, Perusahaan	565 kali	0 kali	165 kali	100 kali	60,6 %	100 kali	31 kali	31,00 %	5,48 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.07.04.2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dan bursa kerja	5.000 org	2690 org	1.000 org	1000 org	100 %	1000 org	615 org	61,50 %	12,30 %
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah waktu pelayanan IPK online	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	3 bulan	23,00 %	5,00 %
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK	1200 orang	200 orang	200 orang	220 orang	110 %	220 orang	51 orang	23,00 %	4,25 %
		Jumlah lowongan pekerjaan melalui IPK	2250 lowongan	400 lowongan	400 lowongan	425 lowongan	106,25 %	425 lowongan	98 lowongan	23,00 %	4,35 %
		Jumlah forum komunikasi pengguna kerja	400 org	100 org	100 org	0 org	0 %	0 org	0 org	23,00 %	0,00 %
		Jumlah pencari kerja terdaftar (AK1)	12000 org	2400 org	2400 org	2400 org	100 %	2400 org	552 org	23,00 %	4,60 %
		Jumlah forum bursa kerja khusus (BKK)	3 kali	1 kali	1 kali	0 kali	0 %	0 kali	0 kali	23,00 %	0,00 %
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	3750 org	750 org	750 org	750 org	100 %	750 org	750 org	100 %	20,00 %
		Jumlah pelaksanaan bursa kerja	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	100 %	20,00 %
		Jumlah lowongan melalui bursa kerja	12000 lowongan	1500 lowongan	3000 lowongan	3000 lowongan	100 %	3000 lowongan	3000 lowongan	100 %	25,00 %
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna	Jumlah PMI yang dilindungi	240 org	0 org	30 org	30 org	100 %	40 org	27 org	66,00 %	11,25 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	penempatan) di daerah kabupaten/kota	(Pra dan Purna Penempatan)									
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang memperoleh pelatihan	130 org	0 org	20 org	20 org	100 %	20 org	8 org	39,00 %	6,15 %
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI yang memperoleh pelatihan wirausaha	82 org	30 org	12 org	10 org	83 %	10 org	10 org	93,00%	12,19 %
2.07.04.2.05	Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten/kota	Penerbitan perpanjangan IMTA	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	79,00 %	05,00 %	6,33%	05,00 %
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang memperoleh fasilitas perpanjangan IMTA	1000 TKA	200 TKA	200 TKA	200 TKA	100 %	200 TKA	10 TKA	5,00 %	1,00 %
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5.70 %	5 %	5.10 %	5.30 %	103.92 %	48,21 %	33,88 %	70,28%	594%
2.07.05.2.01	Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian	Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) dan	848 perus	698 perus	728 perus	758 perus	104,12 %	758 perus	311 perus	41,00 %	36,67 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	Perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)									
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melakukan penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)	300 perus	50 perus	50 perus	50 perus	100 %	50 perus	42 perus	83,00 %	14,00 %
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	240 perush	50 perush	50 perush	50 perush	100 %	50 perush	0 perush	0,00 %	0,00 %
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah kegiatan koordinasi dewan pengupahan	60 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	100 %	12 keg.	5 keg.	40,00 %	8,33 %
		Jumlah bimtek peraturan perundang-undangan dan jamsos	240 org/perush	50 perush	0 perush	20 perush	100 %	20 perush	8 perush	40,00 %	3,33 %
		Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jamsos	50 perush	50 perush	50 perush	50 perush	100 %	50 perush	20 perush	40,00 %	40,00 %
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan	Persentase perselisihan hubungan industrial yang	62 %	32 %	54 %	54 %	100 %	41,75 %	26,75 %	64,07%	43,15%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	industrial, mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota	diselesaikan melalui perjanjian bersama									
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek pencegahan perselisihan hubungan industrial	230 org/perush	40 perush	50 perush	30 perush	60 %	50 perush	9 perush	18,00 %	3,91 %
		Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas konsolidasi hubungan industrial	225 perush	50 perush	75 perush	0 perush	0 %	0 perush	0 perush	18,00 %	0,00 %
		Jumlah Perusahaan yang memperoleh deteksi kerawanan ketenagakerjaan	40 perush	8 perush	20 perush	0 perush	0 %	0 perush	0 perush	18,00 %	0,00 %
		Jumlah Perusahaan yang dilakukan pencegahan perselisihan hubungan industrial	20 perush	10 perush	0 perush	0 perush	100 %	0 perush	0 perush	18,00 %	0,00 %
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Jumlah kasus mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	800 kasus	150 kasus	160 kasus	160 kasus	100 %	160 kasus	40 kasus	25,00 %	5,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	40 PUK	50 PUK	40 PUK	12 PUK	30 %	12 PUK	4 PUK	31,00 %	10,00 %
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	60 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	100 %	12 keg.	4 keg.	33,00 %	6,66 %

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik” dan “Job Fair/Bursa Kerja”,

Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami refocusing yaitu “Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro”, “Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro”, “Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi”, “Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja”, “Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan”, “Pengawasan dan Pengendalian LPTKS”, dan “Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.906.866.543	6.507.403.531	50,42
2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.035.000	1.539.000	15,34
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	542.000	0	0,00
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.954.000	0	0,00
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.488.000	0	0,00
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.633.000	1.539.000	94,24
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.244.000	0	0,00
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	443.000	0	0,00
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	731.000	0	0,00
2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	10.575.834.543	5.405.992.081	51,12
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.350.167.543	5.326.772.081	51,47
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	225.000.000	79.220.000	35,21
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	667.000	0	0,00
2.06	Admininstrasi umum perangkat daerah	373.115.415	110.533.074	29,62
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	9.280.000	46,40
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.687.355	0	0,00
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	13.342.500	44,48
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	15.928.900	45,51
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000	13.526.750	50,10

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	1.500.000	30,00
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	2.349.200	15,66
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.323.000	42.105.724	28,39
06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	0	0,00
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.105.060	12.500.000	23,99
2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	43.459.998	0	0,00
07.05	Pengadaan Mebel	43.459.998	0	0,00
2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.119.158.000	560.079.252	50,04
08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	350.000.000	119.382.252	34,11
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	769.158.000	440.697.000	57,30
2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	785.263.587	429.260.124	54,66
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.350.000	15.246.500	37,79
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.150.000	100.254.624	31,51
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.699.600	32.772.000	25,87
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.063.987	280.987.000	93,64
02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	162.400.000	13.225.100	8,14
2.01	Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)	162.400.000	13.225.100	8,14
01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	125.000.000	10.943.000	8,75
01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	37.400.000	2.282.100	6,10
03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.688.760.000	1.092.146.112	40,62
2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	2.171.400.000	853.430.593	39,30
01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.141.400.000	828.491.093	38,69
01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	30.000.000	24.939.500	83,13
2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	285.600.000	152.698.181	53,47
02.01	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	285.600.000	152.698.181	53,47
2.03	Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja	15.800.000	3.421.350	21,65
03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	15.800.000	3.421.350	21,65
2.04	Konsultasi produktifitas pada Perusahaan kecil	48.960.000	27.298.386	55,76
04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	48.960.000	27.298.386	55,76
2.05	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	167.000.000	55.297.602	33,11
05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	167.000.000	55.297.602	33,11
04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.091.979.996	590.754.295	54,10
2.01	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	530.399.996	215.487.244	40,63
01.02	Pelayanan antar Kerja	181.020.000	38.575.400	21,31
01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	35.680.000	2.909.549	8,15

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	15.300.000	0	0,00
01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	298.399.996	174.002.295	58,31
2.02	Penerbitan izin Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu daerah kabupaten/kota	6.220.000	3.466.252	55,73
02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	6.220.000	3.466.252	55,73
2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja	380.860.000	296.774.633	77,92
03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	253.960.000	171.087.656	67,37
03.03	Job Fair/Bursa Kerja	126.900.000	125.686.977	99,04
2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah kabupaten/kota	143.900.000	67.883.125	47,17
04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	111.000.000	40.452.727	36,44
04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	32.900.000	27.430.398	83,38
2.05	Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten/kota	30.600.000	7.143.041	23,34
05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.600.000	7.143.041	23,34
05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	744.300.000	333.698.612	44,83
2.01	Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	392.500.000	173.509.800	44,21
01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	48.000.000	35.182.800	73,30
01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	48.000.000	0	0,00
01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	296.500.000	138.327.000	46,65
2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota	351.800.000	160.188.812	45,53
02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.676.000	59.469.481	60,27
02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.324.000	5.692.000	21,62
02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	43.200.000	19.589.231	45,35
02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	183.600.000	75.438.100	41,09
JUMLAH		17.594.306.539	8.537.227.650	48,52

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 19 kegiatan dan 52 sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah sebesar Rp 17.594.306.539. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp

8.537.227.650. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 9.057.078.889.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dinas tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	
Tujuan: Menurunkan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,30 %	9,00 %	8,60 %	8,00 %	7,10 %	6,20 %	9,54 %	7,6 %	7,6 %	6,8 %	6,5 %	6,2 %	7,0 %
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,95 %	70,04 %	70,10 %	70,15 %	70,20 %	70,25 %	69,41 %	70,9 %	70,9 %	71,15% %	71,25 %	71,50 %	71,00 %
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	0,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	0,00	71,91	76,65	76,70	76,78	76,79	76,65
Sasaran 2: Meningkatkan keterampilan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	75,00 %	76,00 %	77,00 %	78,00 %	79,00 %	80,00 %	68,14 %	72,74 %	74,94 %	78,00 %	79,00 %	80,00 %	77,00 %
Sasaran 3: Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	62,00 %	64,00 %	66,00 %	68,00 %	70,00 %	72,00 %	91,60 %	97,33 %	50,05 %	97,75 %	98,00 %	98,25 %	97,5 %
Sasaran 4: Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	52,00 %	54,00 %	56,00 %	58,00 %	60,00 %	62,00 %	53,71 %	61,11 %	56,00 %	58,00 %	60,00 %	62,00 %	56,00 %

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Menurunkan pengangguran” memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”, target sebesar 8,6 % belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 7,6 % (capaian 105 %); “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”, target 70.10 %, dengan realisasi sebesar 70,9 % (Capaian 101%).
- b. Sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
Indikator “Nilai AKIP” dapat mencapai target 71, dengan realisasi sebesar 76,65 (capaian sebesar 108 %).
- c. Sasaran “Meningkatnya keterampilan tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
Indikator “Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi” belum dapat mencapai target sebesar 77 %, dengan realisasi sebesar 74,94 % (capaian sebesar 97,3 %).
- d. Sasaran “Meningkatnya penempatan tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
Indikator “Persentase pencari kerja yang ditempatkan” belum dapat mencapai target sebesar 66%, dengan realisasi sebesar 50,05 % (capaian sebesar 76 %).
- e. Sasaran “Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut :
Indikator “Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)” dapat mencapai target sebesar 56%, dengan realisasi sebesar 56% (capaian sebesar 100 %).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi;
2. Masih terbatasnya pelaksanaan uji kompetensi
3. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja
4. Masih tingginya perselisihan hubungan industrial

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Sarana hubungan industrial masih belum optimal
2. Keterbatasan sumberdaya untuk implementasi teknologi digital pada proses pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja di UPTD BLK Kota Semarang

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan
 - 1) Perselisihan hubungan industrial masih cukup tinggi
 - 2) Ketersediaan Informasi Pasar Kerja belum optimal
- b. Peluang
 - 1) Adanya inovasi yang dikembangkan untuk memudahkan akses terhadap Informasi Pasar Kerja
 - 2) Deteksi dini yang dilakukan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesempatan kerja
2. Belum optimalnya hubungan industrial

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Kota Semarang			5.585.583.421
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Semarang	persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65,00%	51.531.000
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Semarang	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 Dokumen	51.531.000
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	17.025.000
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	5 Perusahaan	34.506.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	77,00%	3.950.677.750
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50,00%	3.532.596.232
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	897 Orang	3.502.596.232
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	4 Paket	30.000.000
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	20,00%	235.686.598
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	65 Lembaga	235.686.598
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Semarang	Persentase LPK swasta yang memiliki izin	100,00%	8.777.500
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 Perizinan	8.777.500
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	10 Perusahaan	33.300.802
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	33.300.802
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tingkat produktivitas tenaga kerja	151.227.000	140.316.618

NO	Rancangan Perubahan RKPD				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	10 Dokumen	140.316.618
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Semarang	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	66,00%	919.074.671
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2.000 Orang	393.328.846
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2.000 Orang	115.278.060
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	11.542.790
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	-	-
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	266.507.996
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Izin LPTKS yang diterbitkan	100,00%	3.478.252
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Semarang	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	5 Lembaga	3.478.252
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Semarang	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dan bursa kerja	1.000 Orang	347.767.573
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kota Semarang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	2.500 Orang	220.867.573
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Kota Semarang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	750 Orang	126.900.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perlindungan PMI (pra dan purna penempatan)	40 Orang	143.900.000
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kota Semarang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang	111.000.000
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kota Semarang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	15 Orang	32.900.000
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penerbitan perpanjangan IMTA	100,00%	30.600.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah perpanjangan IMTA	200 Orang	30.600.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Semarang	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,30%	664.300.000
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	758 Perusahaan	312.500.000
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	45 Perusahaan	48.000.000
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kota Semarang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-	-
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	264.500.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	56,00%	351.800.000
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	160 Perkara	98.676.000
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Perkara	26.324.000
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Semarang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	43.200.000
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	183.600.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX	NON URUSAN	Kota Semarang			12.482.942.275
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00%	12.482.942.275
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100,00%	
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Dinas Tenaga Kerja	100,00%	
			Cakupan Pelayanan Perangkat Daerah	100,00%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00%	10.035.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	542.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	2.954.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.488.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.633.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.244.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	443.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	731.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00%	9.938.510.058
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	9.726.883.058
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	210.960.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	667.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	419.562.052
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	69.566.824
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	30.000.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	30.364.147
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	27.019.857
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 Laporan	11.250.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	111.262.000
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	110.099.224
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	42.759.998
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	48 Unit	42.759.998
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya jasa urusan penunjang kedinassan	100,00%	1.296.811.580
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD				
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	946.811.580
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase terpeliharanya barang milik daerah	100,00%	775.263.587
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.350.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	318.150.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	103 Unit	116.699.600
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.063.987

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Menurunkan pengangguran”

dengan indikator tujuan **“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”** dan **“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yaitu “Menurunkan pengangguran” dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
2. Meningkatnya keterampilan tenaga kerja
3. Meningkatnya penempatan tenaga kerja
4. Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan: Menurunkan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	8,60
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	70,10
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	persen	71,00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Sasaran 2: Meningkatnya keterampilan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	persen	77,00
Sasaran 3: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	persen	66,00
Sasaran 4: Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial dan perlindungan terhadap	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	persen	56,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS TENAGA KERJA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Tenaga Kerja memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan perangkat daerah	100 %	19,70 %	19,70 %	12.906.866.543	12.906.866.543	12.482.942.275	APBD	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	13,57 %	13,57 %	10.035.000	10.035.000	10.035.000	APBD	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja OPD	1 doc	0 doc	0 doc	542.000	542.000	542.000	APBD	
		Jumlah dokumen Renstra OPD	0 doc	0 doc	0 doc				APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA OPD	1 doc	0 doc	0 doc	2.954.000	2.954.000	2.954.000	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA OPD	1 doc	0 doc	0 doc	2.488.000	2.488.000	2.488.000	APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA OPD	1 doc	1 doc	1 doc	1.633.000	1.633.000	1.633.000	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA OPD	1 doc	0 doc	0 doc	1.244.000	1.244.000	1.244.000	APBD	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja OPD	2 doc	0 doc	0 doc	443.000	443.000	443.000	APBD/DAU	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja OPD	1 doc	0 doc	0 doc	731.000	731.000	731.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perserntase kinerja adminnstrasi dan pelaporan keuangan	100 %	23,33 %	23,33 %	10.575.834.543	10.575.834.543	9.938.510.058	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Presentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %	23,33 %	23,33 %	10.575.834.543	10.575.834.543	9.938.510.058	APBD	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	35,00 %	35,00 %	10.350.167.543	10.350.167.543	9.726.883.058	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya honoraium pengelola keuangan	100 %	35,00 %	35,00 %	225.000.000	225.000.000	210.960.000	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen laporan keuangan OPD	4 doc	0 doc	0 doc	667.000	667.000	667.000	APBD	
	PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terjadinya sarana praarana perkantoran dinas tenaga kerja	100 %	20,33%	20,33%	2.320.997.000	2.320.997.000	419.562.052	APBD	
X.XX.01.2.06	Admininstrasi umum perangkat daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	21,30%	21,30%	373.115.415	373.115.415	419.562.052	APBD	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan	12 jenis	4 jenis	4 jenis	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	0 jenis	0 jenis	35.687.355	35.687.355	69.566.824	APBD	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	30 jenis	11 jenis	11 jenis	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	40 jenis	16 jenis	16 jenis	35.000.000	35.000.000	30.364.147	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah tersedianya barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	4 jenis	4 jenis	27.000.000	27.000.000	27.019.857	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tersedianya bahan bacaan	730 eksem	183 eksem	183 eksem	5.000.000	5.000.000	5,000,000	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu	300 org	36 org	36 org	15.000.000	15.000.000	11,250,000	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah tersedianya biaya perjalanan dinas	100 keg.	28 keg.	28 keg.	148.323.000	148.323.000	111,262,000	APBD	
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan tata kelola arsip OPD	1 keg.	0 keg.	0 keg.	5.000.000	5.000.000	5,000,000	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah tersedianya sarpras TIK	5 jenis	1 jenis	1 jenis	52.105.060	52.105.060	110,099,224	APBD	
X.XX.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	0.00 %	0.00 %	43.459.998	43.459.998	42,759,998	APBD	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah tersedianya meubeler	1 jenis	0 jenis	0 jenis	43.459.998	43.459.998	42,759,998	APBD	
X.XX.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase tersedianya jasa urusan kedinasan daerah	100 %	43,50 %	43,50 %	1.119.158.000	1.119.158.000	1,296,811,580	APBD	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	Jumlah tersedianya pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	100 %	45.00	45.00	350.000.000	350.000.000	350,000,000	APBD	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tersedianya honorarium non ASN	23 orang	10 orang	10 orang	769.158.000	769.158.000	946,811,580	APBD	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase terpeliharanya barang milik daerah	100 %	16,50 %	16,50 %	785.263.587	785.263.587	775,263,587	APBD	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	40.350.000	40.350.000	40,350,000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas operasional	24 unit	8 unit	8 unit	318.150.000	318.150.000	318,150,000	APBD	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	15 jenis	0 jenis	0 jenis	126.699.600	126.699.600	116,699,600	APBD	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	0 gedung	0 gedung	300.063.987	300.063.987	300,063,987	APBD	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	65 %	6,75 %	6,75 %	162.400.000	162.400.000	51,531,000	APBD	
2.07.02.2.01	Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan ternaga kerja kabupaten/ kota	1 doc	1 doc	1 doc	162.400.000	162.400.000	51,531,000	APBD	
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 doc	1 doc	1 doc	125.000.000	125.000.000	17,025,000	APBD	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyusun rencana tenaga kerja mikro pada perusahaan	30 org	0 org	0 org	37.400.000	37.400.000	34,506,000	APBD	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	77 %	33.30	33.30	2.688.760.000	2.688.760.000	3,950,677,750	APBD, DBHCHT	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	50 %	52,50 %	52,50 %	2.171.400.000	2.171.400.000	3,532,596,232	APBD, DBHCHT	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	100 org	10 org	10 org	2.141.400.000	2.141.400.000	3,502,596,232	APBD, DBHCHT	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									
		Jumlah peserta uji kompetensi	60 org	6 org	6 org					
		Jumlah peserta pelatihan (buruh rokok)	140 org	14 org	14 org					
		Jumlah terlaksananya pendataan tenaga kerja kompetensi	1 keg.	1 keg.	1 keg.					
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan peralatan pelatihan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	30.000.000	30.000.000	30,000,000	APBD	
		Jumlah pengadaan peralatan pelatihan	0 paket	0 paket	0 paket					
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	Persentase LPK swasta yang terakreditasi	20 %	15,00 %	15,00 %	285.600.000	285.600.000	235,686,598	APBD	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPK swasta yang dibina	8 LPK	1 LPK	1 LPK	285.600.000	285.600.000	235,686,598	APBD	
		Jumlah peserta pelatihan pemagangan	20 org	3 org	3 org					
		Jumlah instruktur LPK swasta yang memperoleh peningkatan kapasitas	25 org	4 org	4 org					
		Jumlah modul pelatihan yang disusun	1 jenis	1 jenis	1 jenis					
		Jumlah forum komunikasi jejaring pemagangan yang memperoleh peningkatan kapasitas	20 perush	3 perush	3 perush					
2.07.03.2.03	Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja	Presentase LPK swasta yang memiliki izin	100 %	25,00 %	25,00 %	15.800.000	15.800.000	8,777,500	APBD	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah LPK swasta yang memperoleh rekomendasi, pendaftaran, monitoring	10 LPK	3 LPK	3 LPK	15.800.000	15.800.000	8,777,500	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.07.03.2.04	Konsultasi produktifitas pada Perusahaan kecil	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	10 perus	4 perus	4 perus	48.960.000	48.960.000	33,300,802	APBD	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan yang memperoleh sosialisasi dan bimbingan konsultansi peningkatan produktivitas kerja pada perusahaan	10 perush	4 perus	4 perus	48.960.000	48.960.000	33,300,802	APBD	
2.07.03.2.05	Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	Tingkat produktivitas tenaga kerja	151.227.000 rupiah	48.392.640 rupiah	48.392.640 rupiah	167.000.000	167.000.000	140,316,618	APBD	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah perusahaan yang memperoleh sosialisasi pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	3 perush	1 perush	1 perush	167.000.000	167.000.000	140,316,618	APBD	
		Jumlah pekerja yang memperoleh pengukuran produktivitas tenaga kerja	5000 org	1600 org	1600 org					
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	66 %	35,05 %	35,05 %	1.091.979.996	1.091.979.996	919,074,671	APBD	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja	2000 org	240 org	240 org	530.399.996	530.399.996	393,328,846	APBD	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah KK yang ditempatkan melalui transmigrasi	3 KK	1 KK	1 KK	181.020.000	181.020.000	115,278,060	APBD	
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi identifikasi peminat transmigrasi	2 kali	1 kali	1 kali					
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	2000 orang	240 orang	240 orang					
		Jumlah lowongan yang disediakan	2500 orang	300 orang	300 orang					
		Jumlah pelayanan antar kerja yang dilaksanakan	12 keg.	2 keg.	2 keg.					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	1 kali	1 kali	1 kali	35.680.000	35.680.000	11,542,790	APBD	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelayanan disabilitas	30 org	0 org	0 org	15.300.000	15.300.000	0	APBD	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah orang yang memperoleh pelatihan wirausaha baru	30 org	8 org	8 org	298.399.996	298.399.996	266,507,996	APBD	
2.07.04.2.02	Penerbitan izin Lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam satu daerah kabupaten/kota	Persentase izin LPTKS yang diterbitkan	100 %	31,00 %	31,00 %	6.220.000	6.220.000	3,478,252	APBD	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah pelaksanaan monitoring LPTKS, LPPRT, P3MI, Perusahaan	100 kali	31 kali	31 kali	6.220.000	6.220.000	3,478,252	APBD	
2.07.04.2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK dan bursa kerja	1000 org	615 org	615 org	380.860.000	380.860.000	347,767,573	APBD	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah waktu pelayanan IPK online	12 bulan	3 bulan	3 bulan	253.960.000	253.960.000	220,867,573	APBD	
		Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui IPK	220 orang	51 orang	51 orang					
		Jumlah lowongan pekerjaan melalui IPK	425 lowongan	98 lowongan	98 lowongan					
		Jumlah forum komunikasi pengguna kerja	0 org	0 org	0 org					
		Jumlah pencari kerja terdaftar (AK1)	2400 org	552 org	552 org					
		Jumlah forum bursa kerja khusus (BKK)	0 kali	0 kali	0 kali					
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui bursa kerja	750 org	750 org	750 org	126.900.000	126.900.000	126,900,000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah pelaksanaan bursa kerja	1 kali	1 kali	1 kali					
		Jumlah lowongan melalui bursa kerja	3000 lowongan	3000 lowongan	3000 lowongan					
2.07.04.2.04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di daerah kabupaten/kota	Jumlah PMI yang dilindungi (Pra dan Purna Penempatan)	40 org	27 org	27 org	143.900.000	143.900.000	143,900,000	APBD	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang memperoleh pelatihan	20 org	8 org	8 org	111.000.000	111.000.000	111,000,000	APBD	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI yang memperoleh pelatihan wirausaha	10 org	10 org	10 org	32.900.000	32.900.000	32,900,000	APBD	
2.07.04.2.05	Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam satu daerah kabupaten/kota	Penerbitan perpanjangan IMTA	100 %	05,00 %	05,00 %	30.600.000	30.600.000	30,600,000	APBD	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TKA yang memperoleh fasilitas perpanjangan IMTA	200 TKA	10 TKA	10 TKA	30.600.000	30.600.000	30,600,000	APBD	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	5,30 %	33,88 %	33,88 %	744.300.000	744.300.000	664,300,000	APBD	
2.07.05.2.01	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) dan Perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	758 perush	311 perus	311 perus	392.500.000	392.500.000	312,500,000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melakukan penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)	50 perush	42 perus	42 perus	48.000.000	48.000.000	48,000,000	APBD	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	50 perush	0 perush	0 perush	48.000.000	48.000.000	0	APBD	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah kegiatan koordinasi dewan pengupahan	12 keg.	5 keg.	5 keg.					
		Jumlah bimtek peraturan perundang-undangan dan jamsos	20 perush	8 perush	8 perush	296.500.000	296.500.000	264,500,000	APBD	
		Jumlah Perusahaan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dan jamsos	50 perush	20 perush	20 perush					
2.07.05.2.02	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan Perusahaan di daerah kabupaten/kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	56 %	26,75 %	26,75 %	351.800.000	351.800.000	351,800,000	APBD	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek pencegahan perselisihan hubungan industrial	50 perush	9 perush	9 perush	98.676.000	98.676.000	98,676,000	APBD	
		Jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitas	0 perush	0 perush	0 perush					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		konsolidasi hubungan industrial								
		Jumlah Perusahaan yang memperoleh deteksi kerawanan ketenagakerjaan	0 perush	0 perush	0 perush					
		Jumlah Perusahaan yang dilakukan pencegahan perselisihan hubungan industrial	0 perush	0 perush	0 perush					
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	160 kasus	40 kasus	40 kasus	26.324.000	26.324.000	26,324,000	APBD	
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	12 PUK	4 PUK	4 PUK	43.200.000	43.200.000	43,200,000	APBD	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	12 keg.	4 keg.	4 keg.	183.600.000	183.600.000	183,600,000	APBD	
JUMLAH						17.594.306.539	17.594.306.539	18.068.525.696		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

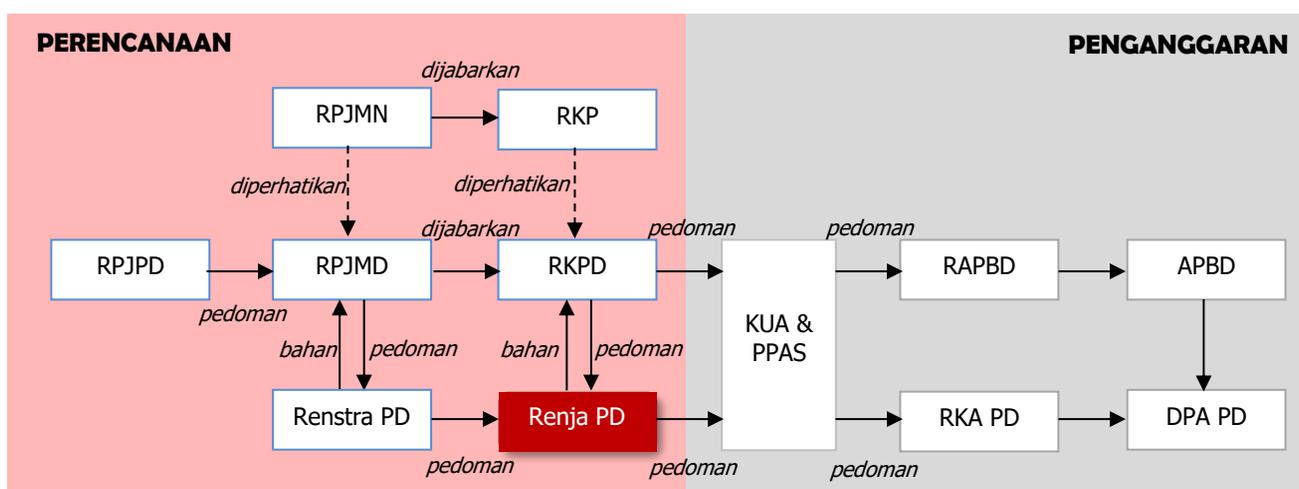
12. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan RKPD Tahun 2023 melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pada tahun 2023 perlu disusun perubahan terhadap RKPD tahun 2023 sebagai akibat dari dinamika perekonomian dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian baik dalam pendapatan maupun belanja daerah pada tahun Perubahan RKPD Tahun 2023 I.2 berjalan. Selain itu, perubahan RKPD juga perlu dilakukan untuk menyikapi perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2023. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian hasil sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 juga menjadi dasar untuk penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023. Implikasi yang ditimbulkan dari perubahan tersebut adalah diperlukannya penyesuaian terhadap target pendapatan serta pagu indikatif. Di samping itu, penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2023 juga perlu dilakukan. Perubahan dokumen RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam

penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

- o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%	51,16%	51,16	151,16%	151,16
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%	52,17%	52,17	152,17%	152,17
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	15 Dokumen	55,55	42 Dokumen	155,55
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50	6 Dokumen	150
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	4 Dokumen	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Laporan	5 Laporan	83,33	11 Laporan	183,33
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	6 Laporan	50	18 Laporan	150
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	41 Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	107,3	N/A	N/A
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	N/A	N/A
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	1 Laporan	50	2 Laporan	200
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	100
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Laporan	7 Laporan	50	21 Laporan	150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		<i>Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>							
2.08.01.2.02.08	<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100</i>
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.05.05	<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
2.08.01.2.05.10	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>16 Kegiatan</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>400 Orang</i>	<i>119 Orang</i>	<i>29,75</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.06.01	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>6 Jenis</i>	<i>6 Jenis</i>	<i>1 Paket</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
2.08.01.2.06.02	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>7 Jenis</i>	<i>3 Jenis</i>	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>100</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
2.08.01.2.06.03	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>13 Jenis</i>	<i>26 Jenis</i>	<i>3 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>33,33</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
2.08.01.2.06.04	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>60 Jenis</i>	<i>64 Jenis</i>	<i>4 Paket</i>	<i>2 Paket</i>	<i>50</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
2.08.01.2.06.05	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>8 Jenis</i>	<i>8 Jenis</i>	<i>3 Paket</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
2.08.01.2.06.08	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>800 Orang</i>	<i>646 Orang</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>100</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Kegiatan	27 Kegiatan	20 Laporan	0	0	N/A	N/A
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Jenis	12 Jenis	5 Dokumen	6 Dokumen	120	N/A	N/A
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Unit	5 Unit	250	N/A	N/A
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	3 Jenis	1 Unit	4 Unit	400	N/A	N/A
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Jenis	4 Jenis	5 Unit	3 Unit	60	N/A	N/A
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	36 Laporan	18 Laporan	50	N/A	N/A
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	12 Laporan	6 Laporan	50	N/A	N/A
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit	20 Unit	1 Unit	1 Unit	100	21 Unit	110,53

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	6 Unit	27 Unit	15 Unit	55,55	21 Unit	262,5
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	10 Unit	4 Unit	40	8 Unit	200
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	200
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10 Unit	3 Unit	30	4 Unit	400
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	58,11%	58,11	158,11%	158,11
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	102 Program	93 Program	93 Program	93 Program	100	186 Program	182,35
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Kegiatan	6 Kegiatan	2 Dokumen	1 Dokumen	50	N/A	N/A
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Dokumen	0	0	N/A	N/A
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	8,10%	59,37%	30 Perangkat Daerah	0	0	N/A	N/A

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		<i>Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	16 Kegiatan	1 Kegiatan	30 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	106,66	N/A	N/A
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	100%	100%	2 Dokumen	0	0	N/A	N/A
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	100%	100%	25 Organisasi	27 Organisasi	108	N/A	N/A
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	32 Lembaga	32 Lembaga	30 Lembaga	15 Lembaga	50	47 Lembaga	146,87
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>	100%	100%	25 Lembaga	20 Lembaga	80	N/A	N/A

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100%	100%	50 Orang	100 Orang	200	N/A	N/A
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	N/A	N/A
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10,04%	25,46 point	14,00 Poin	12,42 Poin	88,71	37,88	377,29
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	6 Dokumen	9 Dokumen	6 Dokumen	9 Dokumen	150	18 Dokumen	300
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	3 Kegiatan	2 Dokumen	4 Dokumen	200	N/A	N/A
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	9 Kegiatan	30 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	110	N/A	N/A
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100	200%	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100%	100%	100 Orang	94 Orang	94	N/A	N/A
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang terstandardisasi	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50	N/A	N/A
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1030 Orang	758 Orang	1630 Orang	800 Orang	49,08	1558 Orang	151,26
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100%	100%	3 Orang	3 Orang	100	N/A	N/A
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50	N/A	N/A
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	50%	50	150%	150

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	100%	40%	40	140%	140
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	100	N/A	N/A
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Dokumen	0	0	N/A	N/A
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	N/A	N/A
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	100%	50%	50	150%	150
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	100%	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100	N/A	N/A
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan	3 Lomba	2 Lomba	150 Orang	354 Orang	236	N/A	N/A

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	<i>Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>							
2.08.04.2.02.03	<i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	2 Dokumen	0	0	N/A	N/A
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kegiatan pemberdayaan berbasis kesetaraan gender	100%	100%	100%	60%	60	160%	160
2.08.04.2.03.01	<i>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Layanan	1 Layanan	50	N/A	N/A
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%	68,75%	68,75	168,75%	168,75
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	4 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50	3 Kegiatan	75
2.08.05.2.01.01	<i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50	3 Dokumen	150
2.08.05.2.01.02	<i>Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	20 Media Massa	19 Media Massa	2 Dokumen	2 Dokumen	100	N/A	N/A
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100%	41,02%	41,02	141,02%	141,02

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	10 Jejaring	8 Jejaring	8 Jejaring	8 Jejaring	100	16 Jejaring	160
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	100%	100%	7 Organisasi	0	0	N/A	N/A
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	300	N/A	N/A
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	8 Lembaga	7 Lembaga	6 Lembaga	85,71	14 Lembaga	155,55
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	400 Orang	150 Orang	37,5	N/A	N/A
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Kegiatan	8 Kegiatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100	N/A	N/A

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.06.2.02.03	<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	12 Kegiatan	9 Kegiatan	4 Dokumen	2 Dokumen	50	N/A	N/A
2.08.06.2.02.04	<i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	9 Lembaga	9 Lembaga	6 Dokumen	2 Dokumen	33,33	N/A	N/A
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,010%	0,028%	0,012%	0,010%	100	0,038%	380
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
2.08.07.2.01.01	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	11 Kegiatan	2 Kegiatan	30 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	53,33	N/A	N/A
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
2.08.07.2.02.01	<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	100%	100%	60 Orang	0	0	N/A	N/A

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	100%	100%	2 Dokumen	0	0	N/A	N/A
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100	N/A	N/A
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100%	35%	35	135%	135
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	6 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Dokumen	1 Dokumen	50	N/A	N/A
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Dokumen	1 Dokumen	50	N/A	N/A
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100	200%	200
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100 Kelurahan	177 Kelurahan	177	354 Kelurahan	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100	N/A	N/A
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50	N/A	N/A
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	51,51%	51,51	151,51%	151,51
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100	354 Kelurahan	200
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50	N/A	N/A
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	100%	4 Lembaga	1 Lembaga	25	N/A	N/A

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	100	N/A	N/A
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Laporan	1 Laporan	50	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 beberapa sub kegiatan sudah mencapai tingkat realisasi 100% tetapi juga ada beberapa sub kegiatan yang belum tercapai karena sedang proses pelaksanaan di triwulan III dan triwulan IV.

Selain itu juga ada beberapa sub kegiatan yang mengalami *hold* belanja (efisiensi) dari kebijakan TAPD Kota Semarang.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Realisasi	
					Rp.	%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG			19,040,274,859	22,583,537,779	8,476,014,674	37.53%
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,695,075,129	10,770,075,129	5,383,997,110	49.99%
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,391,260	6,391,260	1,790,200	28.01%
1	2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,058,400	1,058,400	511,200	48.30%
2	2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,157,920	1,157,920	0	0.00%
3	2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,431,830	1,431,830	0	0.00%
4	2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	705,760	705,760	602,800	85.41%
5	2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	548,230	548,230	0	0.00%
6	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	793,920	793,920	495,000	62.35%
7	2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	695,200	695,200	181,200	26.06%
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,888,268,419	7,888,268,419	4,443,005,364	56.32%
8	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,642,078,859	7,642,078,859	4,325,934,764	56.61%
9	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243,149,080	243,149,080	116,133,700	47.76%
10	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596,480	596,480	254,000	42.58%
11	2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	560,000	560,000	0	0.00%
12	2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,484,960	1,484,960	682,900	45.99%
13	2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	399,040	399,040	0	0.00%
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	321,738,598	396,738,598	78,946,400	19.90%
14	2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	146,738,598	146,738,598	20,424,900	13.92%
15	2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175,000,000	250,000,000	58,521,500	23.41%

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Realisasi	
					Rp.	%
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,187,360,264	1,187,360,264	325,541,538	27.42%
16	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,996,050	4,996,050	1,020,600	20.43%
17	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,781,300	14,781,300	3,663,000	24.78%
18	2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,000,000	30,000,000	6,280,998	20.94%
19	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62,867,328	62,867,328	19,785,700	31.47%
20	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,691,466	21,691,466	7,204,190	33.21%
21	2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39,500,000	39,500,000	12,758,200	32.30%
22	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678,606,540	678,606,540	46,818,850	6.90%
23	2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	334,917,580	334,917,580	228,010,000	68.08%
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	410,713,510	410,713,510	195,877,000	47.69%
24	2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	180,989,490	180,989,490	98,140,000	54.22%
25	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113,330,260	113,330,260	45,842,000	40.45%
26	2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116,393,760	116,393,760	51,895,000	44.59%
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314,478,000	314,478,000	147,086,268	46.77%
27	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109,272,000	109,272,000	46,890,110	42.91%
28	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205,206,000	205,206,000	100,196,158	48.83%
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	566,125,078	566,125,078	191,750,340	33.87%
29	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,313,180	40,313,180	22,074,248	54.76%
30	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361,294,699	361,294,699	108,726,622	30.09%
31	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43,059,666	43,059,666	4,163,000	9.67%
32	2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94,252,665	94,252,665	54,381,470	57.70%
33	2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,204,868	27,204,868	2,405,000	8.84%
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,255,239,817	1,255,239,817	513,271,824	40.89%
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	201,000,000	201,000,000	55,907,731	27.81%
34	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	98,700,000	98,700,000	21,870,500	22.16%
35	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	17,500,000	17,500,000	1,863,000	10.65%
36	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	68,400,000	68,400,000	21,839,231	31.93%
37	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	16,400,000	16,400,000	10,335,000	63.02%
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	94,200,000	94,200,000	40,913,231	43.43%

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Realisasi	
					Rp.	%
38	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9,200,000	9,200,000	0	0.00%
39	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	85,000,000	85,000,000	40,913,231	48.13%
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	960,039,817	960,039,817	416,450,862	43.38%
40	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	460,140,638	460,140,638	200,826,150	43.64%
41	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	376,828,979	376,828,979	156,422,481	41.51%
42	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	123,070,200	123,070,200	59,202,231	48.10%
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2,392,849,258	2,392,849,258	762,529,443	31.87%
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	474,712,049	474,712,049	107,967,500	22.74%
43	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	269,307,539	269,307,539	92,517,500	34.35%
44	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	205,404,510	205,404,510	15,450,000	7.52%
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1,340,945,370	1,340,945,370	477,288,913	35.59%
45	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1,340,945,370	1,340,945,370	477,288,913	35.59%
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	577,191,839	577,191,839	177,273,030	30.71%
47	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	101,493,199	101,493,199	46,176,530	45.50%
48	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	167,922,310	167,922,310	63,792,500	37.99%
49	2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25,199,500	25,199,500	0	0.00%
50	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	282,576,830	282,576,830	67,304,000	23.82%
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2,046,855,000	2,046,855,000	912,128,222	44.56%
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123,995,000	123,995,000	12,843,250	10.36%
51	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	103,995,000	103,995,000	6,418,250	6.17%

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Realisasi	
					Rp.	%
52	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	0	0.00%
53	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	6,425,000	64.25%
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,827,060,000	1,827,060,000	875,294,972	47.91%
54	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,102,060,000	1,102,060,000	618,761,741	56.15%
55	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525,000,000	525,000,000	255,668,231	48.70%
56	2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	200,000,000	865,000	0.43%
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	95,800,000	95,800,000	23,990,000	25.04%
57	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	95,800,000	95,800,000	23,990,000	25.04%
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	303,613,140	303,613,140	162,160,000	53.41%
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303,613,140	303,613,140	162,160,000	53.41%
58	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	90,868,300	90,868,300	35,240,000	38.78%
59	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	212,744,840	212,744,840	126,920,000	59.66%
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	639,054,060	3,424,316,980	61,326,850	9.60%
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	384,034,240	210,254,950	34,638,850	9.02%
60	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	196,779,290	23,000,000	0	0.00%
61	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	187,254,950	187,254,950	34,638,850	18.50%
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	255,019,820	3,214,062,030	26,688,000	10.47%
62	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	87,779,740	1,499,575,020	9,506,000	0.63%
63	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89,725,230	89,725,230	3,055,000	3.40%
64	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34,936,970	1,582,183,900	0	0.00%

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Realisasi	
					Rp.	%
65	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42,577,880	42,577,880	14,127,000	33.18%
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	520,740,280	520,740,280	127,797,612	24.54%
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51,868,280	51,868,280	36,850,000	71.05%
66	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51,868,280	51,868,280	36,850,000	71.05%
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	202,816,330	202,816,330	53,121,500	26.19%
68	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113,462,330	113,462,330	33,954,000	29.93%
70	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	66,927,480	66,927,480	0	0.00%
71	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	22,426,520	22,426,520	19,167,500	85.47%
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	266,055,670	266,055,670	37,826,112	14.22%
72	2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	133,473,030	133,473,030	28,059,612	21.02%
74	2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132,582,640	132,582,640	9,766,500	7.37%
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	252,226,040	252,226,040	59,845,000	23.73%
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	252,226,040	252,226,040	59,845,000	23.73%
75	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	46,935,990	46,935,990	22,858,500	48.70%
76	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	205,290,050	205,290,050	36,986,500	18.02%
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	934,622,135	1,617,622,135	492,958,613	30.47%
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	934,622,135	1,617,622,135	492,958,613	30.47%
77	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	205,284,110	205,284,110	165,640,300	80.69%

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Realisasi	
					Rp.	%
78	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	96,895,300	96,895,300	25,580,231	26.40%
79	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	72,720,620	72,720,620	15,851,500	21.80%
80	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	559,722,105	1,242,722,105	285,886,582	23.00%
T o t a l			19,040,274,859	22,583,537,779	8,476,014,674	37.53%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 9 program, dan 24 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebesar Rp 19.040.274.859,- dan kemudian mendapatkan tambahan anggaran di Anggaran Pergeseran sehingga anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp 22.583.537.779,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 8.476.014.674,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 14.107.523.105,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah untuk membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI			PROYEKSI		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026
TUJUAN RENSTRA													
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase implemementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87	N/A	70,59	70,59	66,34	68,10	69,87
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	N/A	90	91	92	93	94	N/A	92,46	100	92	93	94
SASARAN RENSTRA													
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	100	100	100	100	100	100	100	100	58,11	100	100	100
	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,24	51,24	51,27	51,29	51,32	51,34	51,15	51,30	49,78	51,29	51,32	51,34
	Jumlah Kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	4	50	75	100	155	177	4	60	65	100	155	177
	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	N/A	100	100	100	100	100	N/A	100	100	100	100	100
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	743	701	801	801	801	901	738,3	744,4	744,4	801	801	901
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	69,74	70,10	70,40	70,70	71,00	71,30	74,56	76,71	76,71	70,70	71,00	71,30

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak” dan “Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan” memiliki 3 indikator kinerja yaitu “Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan”, “Indeks Perlindungan Anak (IPA)” dan “Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” telah dapat memenuhi target, dimana realisasinya sesuai dengan target.
- b. Adapun Sasaran Renstra Sebagai Berikut :
 - 1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga, dengan indikator kinerja :

- a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan sudah mencapai 58,11% dari target 100% yang ditetapkan;
 - b. Presentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang dirilis oleh BPS mendapat nilai 49,78 dan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 51,27;
 - c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan ketahanan keluarga sudah mencapai 65 kelurahan dari target 75 kelurahan;
 - d. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.
- 2) Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang dengan indikator kinerja Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT,RW, Posyandu) sudah mencapai target 100%.
 - 3) Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator kinerja Peringkat Kota Layak Anak di triwulan II masih belum ada penilaian tersebut. Penilaian dilakukan di triwulan III dan diharapkan mencapai target yang telah ditentukan yaitu dengan nilai minimal 801;
 - 4) Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator nilai SAKIP di triwulan II masih belum ada penilaian tersebut. Penilaian dilakukan di triwulan III dan diharapkan mencapai target yang telah ditentukan yaitu dengan nilai minimal 70,40.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya:

1. Belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan dalam Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
2. Semakin kompleksnya kekerasan yang dihadapi oleh perempuan maupun anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga;
4. Belum optimalnya peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang sudah dibentuk;
5. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan TTG;
6. Lembaga kemasyarakatan yang ada belum berperan serta secara optimal.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Meningkatkan peran serta perempuan dalam kesetaraan gender pada bidang politik dan ekonomi;
- 2) Melaksanakan penanganan kasus secara terpadu dan terintegrasi dengan berbagai pihak terkait, dan melakukan upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan kepada perempuan dan anak melalui sosialisasi TPPO dan pembentukan JPPA di setiap kelurahan;
- 3) Melaksanakan program kegiatan untuk percepatan penurunan stunting melalui KIE /promosi kesehatan reproduksi pada Calon pengantin (Catin);
- 4) Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem yang ada pada masyarakat, DP3A mempunyai tantangan untuk tetap berkomitmen meningkatkan pembinaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui workshop dan pelatihan terhadap kelompok perempuan.
- 5) Mengoptimalkan peran serta lembaga kemasyarakatan yang ada di Kota Semarang.

c. Peluang

- 1) DP3A mempunyai mitra kerja yang aktif dan cukup berpengaruh dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan;
- 2) Mempunyai relawan-relawan tangguh yang tergabung dalam PPT pada setiap kecamatan di Kota Semarang dalam melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Komitmen dan integritas dari lembaga kemasyarakatan yang ada dalam mendukung program kerja DP3A.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
2. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;

3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
4. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
5. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalian Potensi SDA dan Penerapan TTG;
7. Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
8. Masih Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
9. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 Kota Semarang
 Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	08							17,959,747,594	17,853,426,684	20,235,224,677				17,321,015,000				
2	08	01												100 %	10,876,601,000			
2	08	01	2.01											27 Dokumen	7,800,000			
2	08	01	2.01	01										4 Dokumen	1,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	2.01	02										1 Dokumen	1,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	2.01	03										1 Dokumen	1,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	2.01	04										2 Dokumen	1,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	2.01	05										1 Dokumen	1,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	700,080	793,920	1,382,080	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	6 Laporan	1,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	674,098	695,200	592,320	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	12 Laporan	1,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	%	%	100 %	100 %	7,887,297,459	7,888,268,419	8,237,908,757					100 %	8,986,895,588		
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	7,642,078,859	7,642,078,859	7,992,027,837	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	41 Orang/bulan	8,738,945,588	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	242,189,080	243,149,080	243,149,080	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	246,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	793,920	596,480	493,600	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	2 Laporan	500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	560,000	560,000	560,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	1,177,840	1,484,960	1,382,080	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	14 Laporan	700,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	497,760	399,040	296,160	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	250,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	%	%	%	100 %	100 %	326,691,640	321,738,598	400,096,800						100 %	60,000,000	
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	151,691,640	146,738,598	150,096,800	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang dan Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				400 Orang	400 Orang	175,000,000	175,000,000	250,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang dan Masyarakat	400 Orang	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	%	%	%	100 %	100 %	1,183,812,686	1,187,360,264	859,024,472						100 %	718,105,412	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,996,050	4,996,050	4,996,050	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Paket	3,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,781,300	14,781,300	16,634,060	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Paket	8,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	3 Paket	12,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJ/MD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	61,767,328	62,867,328	62,867,328	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	4 Paket	70,105,412	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30,327,458	21,691,466	20,515,430	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	3 Paket	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	39,500,000	39,500,000	40,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	12 Laporan	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	661,065,540	678,606,540	349,094,024	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	20 Laporan	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	341,375,010	334,917,580	334,917,580	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	5 Dokumen	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	%		%	100 %	100 %	721,895,510	410,713,510	457,631,650						100 %	300,000,000	
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	180,989,490	180,989,490	180,989,490	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	2 Unit	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	424,512,260	113,330,260	113,330,260	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Unit	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	116,393,760	116,393,760	163,311,900	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	5 Unit	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	%	%		100 %	100 %	314,478,000	314,478,000	311,425,200						100 %	365,000,000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	109,272,000	109,272,000	106,219,200	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	36 Laporan	125,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	205,206,000	205,206,000	205,206,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	12 Laporan	240,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	%	%		100 %	100 %	566,125,078	566,125,078	533,114,764						100 %	438,800,000	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40,313,180	40,313,180	40,313,180	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Unit	238,800,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	361,294,699	361,294,699	361,294,699	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	27 Unit	90,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	43,059,666	43,059,666	32,817,900	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5, Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	10 Unit	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	94,252,665	94,252,665	94,252,665	Kota Semarang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	1 Unit	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	27,204,868	27,204,868	4,436,320	Kota Semarang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif	DP3A Kota Semarang	10 Unit	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persen		Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1,195,240,137	1,255,239,817	1,188,188,288						100.00 Persen	1,392,000,000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	Program/Kegiatan		Program/Kegiatan	1 Program	1 Program	201,000,000	201,000,000	156,706,250						93 Program/Kegiatan	260,000,000	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	98,700,000	98,700,000	70,031,250	Kota Semarang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	60,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	17,500,000	17,500,000	17,500,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	68,400,000	68,400,000	56,900,000	Kota Semarang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	30 Perangkat Daerah	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	16,400,000	16,400,000	12,275,000	Kota Semarang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	30 Perangkat Daerah	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	%	%		100 %	100 %	94,200,000	94,200,000	99,961,720						100 %	160,000,000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	9,200,000	9,200,000	5,473,950	Kota Semarang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Organisasi	25 Organisasi	85,000,000	85,000,000	94,487,770	Kota Semarang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	25 Organisasi	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	900,040,137	960,039,817	931,520,318			30 Lembaga	972,000,000					
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			25 Lembaga	25 Lembaga	460,140,838	460,140,638	450,335,139	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	25 Lembaga	500,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			50 Orang	50 Orang	376,829,099	376,828,979	376,828,979	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	50 Orang	340,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumen	1 Dokumen	63,070,200	123,070,200	104,356,200	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	1 Dokumen	132,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	point	point	14,24 point	14,24 point	2,372,584,298	2,392,849,258	2,130,227,624						14,24 point	1,572,414,000		
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	412,997,229	474,712,049	346,373,175						6 Dokumen	20,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	208,292,719	269,307,539	219,601,429	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	204,704,510	205,404,510	126,771,746	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	30 Perangkat Daerah	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	%	100 %	100 %	1,382,384,190	1,340,945,370	1,284,602,330						100 %	1,512,414,000		
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				100 Orang	100 Orang	1,382,384,190	1,340,945,370	1,284,602,330	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	100 Orang	1,502,414,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang terstandardisasi	%	%	100 %	100 %	577,202,879	577,191,839	499,252,119						100 %	40,000,000		
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	101,493,199	101,493,199	101,493,199	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	12 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				1630 Orang	1630 Orang	170,183,350	167,922,310	156,060,590	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	1630 Orang	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				3 Orang	3 Orang	25,199,500	25,199,500	25,199,500	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	3 Orang	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	280,326,830	282,576,830	216,498,830	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	DP3A Kota Semarang	4 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	Persen		Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	1,952,860,000	2,046,855,000	1,885,339,165						100.00 Persen	2,180,000,000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	%		%	100 %	100 %	30,000,000	123,995,000	123,995,000						100 %	30,000,000	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	10,000,000	103,995,000	103,995,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	16 Perangkat Daerah	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	1 Dokumen	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	%	%		100 %	100 %	1,827,060,000	1,827,060,000	1,688,594,165					100 %	2,000,000,000		
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	1,102,060,000	1,102,060,000	1,067,928,350	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	1 Lembaga	1,050,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	525,000,000	525,000,000	525,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	150 Orang	700,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	95,665,815	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	2 Dokumen	250,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	%	%		100 %	100 %	95,800,000	95,800,000	72,750,000			100 %	150,000,000				
2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Layanan	2 Layanan	95,800,000	95,800,000	72,750,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Layanan	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	Persen	Persen		100.00 Persen	100.00 Persen	303,613,140	303,613,140	318,495,190				100.00 Persen	270,000,000			
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	Kegiatan	Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	303,613,140	303,613,140	318,495,190				2 Kegiatan	270,000,000			
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	90,868,300	90,868,300	82,683,220	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	212,744,840	212,744,840	235,811,970	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	120,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	Persen	Persen		100.00 Persen	100.00 Persen	575,654,060	639,054,060	3,473,094,597				100.00 Persen	550,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	Jejaring		Jejaring	8 Jejaring	8 Jejaring	343,134,240	384,034,240	173,040,950			8 Jejaring	250,000,000				
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				7 Organisasi	7 Organisasi	196,779,290	196,779,290	23,000,000	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	7 Organisasi	150,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	146,354,950	187,254,950	150,040,950	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Lembaga		Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	232,519,820	255,019,820	3,300,053,647					7 Lembaga	300,000,000		
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				400 Orang	400 Orang	87,779,740	87,779,740	1,585,152,637	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	400 Orang	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	67,225,230	89,725,230	89,725,230	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	4 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	34,936,970	34,936,970	1,582,597,900	Kota Semarang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	4 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	42,577,880	42,577,880	42,577,880	Kota Semarang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	6 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen		Persen	0.01 Persen	0.01 Persen	553,346,208	520,740,280	432,208,570						0.01 Persen	480,000,000	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	%		%	100 %	100 %	55,254,760	51,868,280	47,308,430						100 %	50,000,000	
2 08 07 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	55,254,760	51,868,280	47,308,430	Kota Semarang Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	30 Perangkat Daerah	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	%		%	100 %	100 %	208,635,778	202,816,330	123,417,010						100 %	200,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				72 Orang	60 Orang	117,608,210	113,462,330	40,417,740	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	60 Orang	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	68,600,938	66,927,480	60,572,750	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	22,426,630	22,426,520	22,426,520	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	%		100 %	100 %	289,455,670	266,055,670	261,483,130						100 %	230,000,000	
2 08 07 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	156,873,030	133,473,030	124,873,030	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	50,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	132,582,640	132,582,640	136,610,100	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	2 Dokumen	80,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							1,171,709,265	1,186,848,175	1,781,406,145						1,281,000,000		
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	Persen		Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	252,226,040	252,226,040	78,056,220						100.00 Persen	330,000,000	
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	252,226,040	252,226,040	78,056,220						100 %	330,000,000	
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	46,935,990	46,935,990	40,245,700	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif	Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen	205,290,050	205,290,050	37,810,520	Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;	Masyarakat	2 Dokumen	230,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen		Persen	100.00 Persen	100.00 Persen	919,483,225	934,622,135	1,703,349,925						100.00 Persen	951,000,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak”,

Dan

“Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”

dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Persentase implemmentasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
3. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
2. Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
3. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga;
4. Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan;
5. Peringkat Kota Layak Anak (KLA);
6. Nilai SAKIP;
7. Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu).

Demikian pula dalam penetapan target dari 729able729tor tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN			
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase implemetasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	64,58
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	90
SASARAN			
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100
	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,24
	Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	Kelurahan	75
	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100
Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota LayakAnak (KLA)	Point	801
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Point	70,40
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEEMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” dan indikator sasaran “Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					17,959,747,594	17,853,426,684	20,713,689,604	20,295,224,677		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%	11,006,449,751	10,695,075,129	10,770,075,129	10,807,671,248		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%						
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%						
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	25 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	6,149,378	6,391,260	6,391,260	8,469,600	PAD	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1,007,200	1,058,400	1,058,400	1,911,040	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Murni	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,090,080	1,157,920	1,157,920	1,507,200	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,287,520	1,431,830	1,431,830	1,590,480	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni dan Pergeseran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	695,200	705,760	705,760	602,880	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	695,200	548,230	548,230	883,600	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Realisasi Kinerja	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	700,080	793,920	793,920	1,382,080	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	674,098	695,200	695,200	592,320	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	7,887,297,459	7,888,268,419	7,888,268,419	8,237,908,757	PAD & DAU	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	7,642,078,859	7,642,078,859	7,642,078,859	7,992,027,837	PAD & DAU	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	242,189,080	243,149,080	243,149,080	243,149,080	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	793,920	596,480	596,480	493,600	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	560,000	560,000	560,000	560,000	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	1,177,840	1,484,960	1,484,960	1,382,080	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	497,760	399,040	399,040	296,160	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100%	326,691,640	321,738,598	396,738,598	407,978,598	PAD	
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	151,691,640	146,738,598	146,738,598	157,978,598	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	400 Orang	400 Orang	175,000,000	175,000,000	250,000,000	250,000,000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	1,183,812,686	1,187,360,264	1,187,360,264	850,805,009	PAD	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4,996,050	4,996,050	4,996,050	4,996,050	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14,781,300	14,781,300	14,781,300	16,634,060	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	61,767,328	62,867,328	62,867,328	62,867,328	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	30,327,458	21,691,466	21,691,466	20,515,430	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39,500,000	39,500,000	39,500,000	40,000,000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	661,065,540	678,606,540	678,606,540	332,704,731	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	341,375,010	334,917,580	334,917,580	343,087,410	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	721,895,510	410,713,510	410,713,510	453,938,000	PAD	
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	180,989,490	180,989,490	180,989,490	177,295,840	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	424,512,260	113,330,260	113,330,260	113,330,260	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	116,393,760	116,393,760	116,393,760	163,311,900	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	314,478,000	314,478,000	314,478,000	311,425,200	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	109,272,000	109,272,000	109,272,000	106,219,200	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	205,206,000	205,206,000	205,206,000	205,206,000	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100%	566,125,078	566,125,078	566,125,078	537,146,084	PAD	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40,313,180	40,313,180	40,313,180	44,344,500	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	27 Unit	361,294,699	361,294,699	361,294,699	361,294,699	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	43,059,666	43,059,666	43,059,666	32,817,900	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	94,252,665	94,252,665	94,252,665	94,252,665	PAD	DP3A Kota Semarang
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	27,204,868	27,204,868	27,204,868	4,436,320	PAD	DP3A Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	1,195,240,137	1,255,239,817	1,255,239,817	1,188,188,288	PAD	
2.08.02.2.01	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender</i>	93 Program/Kegiatan	93 Program/Kegiatan	93 Program/Kegiatan	201,000,000	201,000,000	201,000,000	156,706,250	PAD	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	98,700,000	98,700,000	98,700,000	70,031,250	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	17,500,000	17,500,000	17,500,000	17,500,000	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	68,400,000	68,400,000	68,400,000	56,900,000	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten / Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	16,400,000	16,400,000	16,400,000	12,275,000	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	100%	3 Organisasi	3 Organisasi	94,200,000	94,200,000	94,200,000	99,961,720	PAD	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9,200,000	9,200,000	9,200,000	5,473,950	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	85,000,000	85,000,000	85,000,000	94,487,770	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	900,040,137	960,039,817	960,039,817	931,520,318	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	460,140,838	460,140,638	460,140,638	450,335,139	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50 Orang	50 Orang	376,829,099	376,828,979	376,828,979	376,828,979	PAD	Kota Semarang
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	63,070,200	123,070,200	123,070,200	104,356,200	PAD	Kota Semarang
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14,00 Point	14,24 Point	14,24 Point	2,372,584,298	2,392,849,258	2,392,849,258	2,190,227,619	PAD	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	6 Dokumen	4 Kegiatan	4 Kegiatan	412,997,229	474,712,049	474,712,049	406,373,170	PAD	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	208,292,719	269,307,539	269,307,539	279,601,424	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	204,704,510	205,404,510	205,404,510	126,771,746	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	100%	5 Lembaga	5 Lembaga	1,382,384,190	1,340,945,370	1,340,945,370	1,284,602,330	PAD	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	1,382,384,190	1,340,945,370	1,340,945,370	1,284,602,330	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan	100%	26 Lembaga	26 Lembaga	577,202,879	577,191,839	577,191,839	499,252,119	PAD	
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	101,493,199	101,493,199	101,493,199	101,493,199	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1630 Orang	1630 Orang	1630 Orang	170,183,350	167,922,310	167,922,310	156,060,590	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3 Orang	3 Orang	3 Orang	25,199,500	25,199,500	25,199,500	25,199,500	PAD	Kota Semarang
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	280,326,830	282,576,830	282,576,830	216,498,830	PAD	Kota Semarang
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	1,952,860,000	2,046,855,000	2,046,855,000	1,885,339,165	PAD	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	30,000,000	123,995,000	123,995,000	123,995,000	PAD	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	10,000,000	103,995,000	103,995,000	103,995,000	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100%	16 Kegiatan	16 Kegiatan	1,827,060,000	1,827,060,000	1,827,060,000	1,688,594,165	PAD	
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasidan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1,102,060,000	1,102,060,000	1,102,060,000	1,067,928,350	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	525,000,000	525,000,000	525,000,000	525,000,000	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	95,665,815	PAD	Kota Semarang
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	100%	100%	95,800,000	95,800,000	95,800,000	72,750,000	PAD	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	95,800,000	95,800,000	95,800,000	72,750,000	PAD	Kota Semarang
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak		100%	100%	303,613,140	303,613,140	303,613,140	318,495,190	PAD	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak		2 Kegiatan	2 Kegiatan	303,613,140	303,613,140	303,613,140	318,495,190	PAD	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia		2 Dokumen	2 Dokumen	90,868,300	90,868,300	90,868,300	82,683,220	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	2 Dokumen	212,744,840	212,744,840	212,744,840	235,811,970	PAD	Kota Semarang
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100%	575,654,060	639,054,060	3,424,316,980	3,473,094,597	PAD	
<i>2.08.06.2.01</i>	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA</i>	<i>8 Jejaring</i>	<i>8 Jejaring</i>	<i>8 Jejaring</i>	<i>343,134,240</i>	<i>384,034,240</i>	<i>210,254,950</i>	<i>173,040,950</i>	<i>PAD</i>	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	7 Organisasi	7 Organisasi	196,779,290	196,779,290	23,000,000	23,000,000	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	146,354,950	187,254,950	187,254,950	150,040,950	PAD	Kota Semarang
<i>2.08.06.2.02</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</i>	<i>7 Lembaga</i>	<i>7 Lembaga</i>	<i>7 Lembaga</i>	<i>232,519,820</i>	<i>255,019,820</i>	<i>3,214,062,030</i>	<i>3,300,053,647</i>	<i>PAD</i>	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	400 Orang	400 Orang	87,779,740	87,779,740	1,499,575,020	1,585,152,637	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	67,225,230	89,725,230	89,725,230	89,725,230	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	34,936,970	34,936,970	1,582,183,900	1,582,597,900	PAD	Kota Semarang
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	42,577,880	42,577,880	42,577,880	42,577,880	PAD	Kota Semarang
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,01%	0,012%	0,012%	553,346,208	520,740,280	520,740,280	432,208,570	PAD	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	100%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	55,254,760	51,868,280	51,868,280	47,308,430	PAD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	55,254,760	51,868,280	51,868,280	47,308,430	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	7%	7%	208,635,778	202,816,330	202,816,330	123,417,010	PAD	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	72 Orang	60 Orang	117,608,210	113,462,330	113,462,330	40,417,740	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	68,600,938	66,927,480	66,927,480	60,572,750	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	22,426,630	22,426,520	22,426,520	22,426,520	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100%	289,455,670	266,055,670	266,055,670	261,483,130	PAD	
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	156,873,030	133,473,030	133,473,030	124,873,030	PAD	Kota Semarang
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	132,582,640	132,582,640	132,582,640	136,610,100	PAD	Kota Semarang
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1,171,709,265	1,186,848,175	1,869,848,175	1,781,406,145	PAD & BANKEU	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	252,226,040	252,226,040	252,226,040	78,056,220	PAD	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	100 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	252,226,040	252,226,040	252,226,040	78,056,220	PAD	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46,935,990	46,935,990	46,935,990	40,245,700	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	205,290,050	205,290,050	205,290,050	37,810,520	PAD	Kota Semarang
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	919,483,225	934,622,135	1,617,622,135	1,703,349,925	PAD & BANKEU	
2.13.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan</i>	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	919,483,225	934,622,135	1,617,622,135	1,703,349,925	PAD	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	160,145,200	205,284,110	205,284,110	402,671,740	PAD	Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran				Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Perkada (Pergeseran)	Perubahan Renja 2023 Baru		
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	4 Lembaga	1 Lembaga	96,895,300	96,895,300	96,895,300	96,895,300	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	102,720,620	72,720,620	72,720,620	69,244,010	PAD	Kota Semarang
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	559,722,105	559,722,105	1,242,722,105	1,134,538,875	PAD & BANKEU	Kota Semarang
JUMLAH						19,131,456,859	19,040,274,859	22,583,537,779	22,076,630,822		

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

13. DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

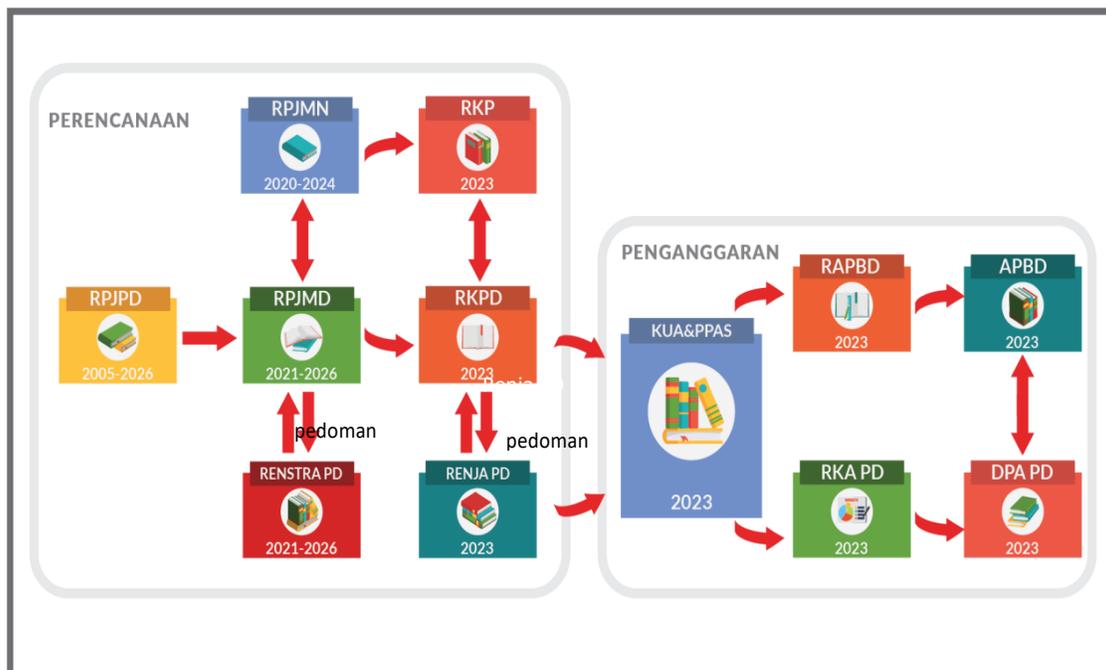
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu

terhadap kondisi eksisting Dinas Ketahanan Pangan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1.1 diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

- dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan OPD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTASEMARANG
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG
Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2023
- BAB V PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja OPD Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2021 dan juga capaian target pada tahun 2022. Pada tahun 2022 OPD melaksanakan sebanyak 5 (Lima) Program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar 14.695.584.812 (Empat belas milyar Enam ratus Sembilan puluh Lima Juta Lima ratus Delapan puluh Empat ribu Delapan ratus Dua belas rupiah) dengan realisasi anggaran 13.711.397.518 atau sebesar 93,30 %

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2022

Dinas Ketahanan Pangan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
URUSAN PANGAN										
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
		- Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
		- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Renja dan P-Renja	10 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	30 %
		- Renstra SKPD	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	NA	2 dokumen	100 %
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- R-DPPA dan DPPA	10 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100 %	NA	2 dokumen	20 %
		- RKA dan DPA	10 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	30 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										11
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dokumen perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	80 %
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Dokumen DPA	5 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	40 %
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- DPA Perubahan	5 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	40 %
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- LKJIP	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	60 %
		- LKPJ	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	60 %
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- jumlah ATK yang disediakan	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	89,21 % (17,8 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	57,8 %	57,8 %
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Perundang	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Makanan Dan Minuman	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	12 60 %
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	100 %	NA	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	40 %	40 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 %	NA	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	40 %	40 %
		- Terbayarnya TPP ASN	100 %	NA	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	40 %	40 %
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kelancaran administrasi keuangan	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	40 %
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Jumlah laporan keuangan semesteran	10 dokumen	NA	2 dokumen	2 dokumen	100 %	NA	2 dokumen	13 20 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Laporan prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	40 %
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	86,82 % (17,36 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	57,36 %	57,36 %
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Presenrase penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	81,46 % (16,29 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	56,29 %	56,29 %
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Petugas caraka	5 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100 %	1 orang	60 %	60 %
		- Pramubakti	10 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100 %	2 orang	60 %	60 %
		- Tenaga Keamanan Kantor	5 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100 %	1 orang	60 %	60 %
		- Tenaga Kebersihan Kantor	5 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100 %	1 orang	60 %	60 %
		- Tenaga Pengemudi	5 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100 %	1 orang	60 %	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah penyediaan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan SKPD	100 %	92,31 % (18,46 5)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	58,46 %	58,46 %
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah penyediaan pemeliharaan dan pajak dan perijinan kendaraan dinas/operasional lapangan SKPD	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin SKPD	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Presentase pemeliharaan/rehab Gedung kantor	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- Cakupan distribusi pangan	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Skor Pola Pangan Harapan	88,10	88,70 (17,74 %)	88,10	89,10 (17,82%)	101,13 %	NA	89,10 %	89,10 %
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	- Cakupan distribusi pangan	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	60 %	60 %
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	- Data Ketersediaan Pangan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	60 %
		- Neraca Bahan Pangan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	60 %
		- Prognosa Kebutuhan Pangan	5 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	2 dokumen	40 %
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Data Base Pangan Terpadu	5 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100 %	NA	1 dokumen	20 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Obor Pangan Lestari	5 kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	NA	1 kegiatan	20 %
		- Pelatihan Pengembangan Ketersediaan Pangan	13 kegiatan	NA	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	3 kegiatan	6 kegiatan	46,15 %
		- Pelatihan pengembangan sumber daya pangan	10 kegiatan	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	NA	2 pelatihan	20 %
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	- Jumlah Koordinasi dengan instansi terkait / stakeholder pangan	20 kegiatan	2 kegiatan	NA	NA	NA	NA	6 kegiatan	30 %
		-Petugas IT dan Aplikasi Ketahanan Pangan	2 orang	NA	2 orang	2 orang	100 %	NA	2 orang	100 %
		- Profil dan Selayang Pandang Dinas Ketahanan Pangan	2 dokumen	NA	2dokumen	2 dokumen	100 %	NA	2 dokumen	16 100 %
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	- Data Base Distribusi Pangan	5 dokumen	1 dokumer	1 dokumen	1 dokumen	100 %	2 dokumen	4 dokumen	80 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Informasi Harga Pangan	1 laporan	NA	1 laporan	1 laporan	100 %	NA	1 dokumen	100 %
		- Koordinator Petugas Pemantau Harga Pangan	2 orang	NA	1 orang	1 orang	100 %	1 orang	2 orang	100 %
		- Pasar Murah	4 lokasi	NA	1 lokasi	1 lokasi	100 %	3 lokasi	4 lokasi	100 %
		- Petugas Enumerator Distribusi	16 orang	1 orang	16 orang	16 orang	100 %	16 orang	8 orang	50 %
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	- Fasilitasi pemasaran produk pangan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	3 kegiatan	5 kegiatan	100 %
		- Pemberdayaan KDPM	10 pelatihan	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	3 kegiatan	5 kegiatan	50 %
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	- Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan Toko Tani Indonesia	20 lokasi	NA	NA	NA	NA	10 lokasi	10 lokasi	50 %
		- Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi Toko Tani Indonesia	20 lokasi	NA	NA	NA	NA	10 lokasi	10 lokasi	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
										17
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Cakupan pangan distribus	100 %	NA	100 %	100 % (20 %)	100 %	100 % (20 %)	40 %	40 %
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Pemanfaatan Pangan	Sosialisas 6 kegiatan	NA	6 kegiatan	3 kegiatan	50 %	2 kegiatan	5 kegiatan	83,33%
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Beras ATM	81 ton	NA	81 ton	81 ton	100 %	7.750 kg	95,68 %	95,68 %
		- Beras Cadangan Pangan	7 ton	NA	7 ton	7 ton	100 %	7.000 kg	100 %	100 %
		- Presentasi Penyalur Terhadap Lokasi Bencana	100 %	NA	100 %	100 % (20 %)	100 %	NA	NA	20 %
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Petugas monev	6 orang	NA	6 orang	6 orang	100 %	NA	6 orang	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	- Petugas Pengelola ATM Beras - Skor Pola Pangan Harapan	20 orang	NA	20 orang	20 orang	100 %	NA	20 orang	100 %
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	- Diseminasi Pola Pangan Harapan (PPH)	4 kegiatan	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	2 kegiatan	100 %	100 %
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Intervensi Pangan Harapan (IPAH) - Apresiasi B2SA Anak Usia Dini - Event promosi pangan local - Forum Olahan Pangan - Pelatihan Pangan	Analisa 100 % 15 kegiatan 10 event 15 kegiatan 2 pelatihan	NA	100 % 10 kegiatan 4 event 5 kegiatan 2 pelatihan	100 % 5 kegiatan 1 event 5 kegiatan 2 pelatihan	100 % 100 % 25 % 100 % 100 %	NA NA NA NA	100 % 15 kegiatan 4 event 15 kegiatan 2 kegiatan	100 % 18 40 % 100 % 100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Pelatihan pengembang pangan local	7 pelatihan	NA	6 pelatihan	3 pelatihan	50 %	NA	3 pelatihan	50 %
		- Pelatihan RPL (Rumah Pangan Lestari)	38 kegiatan	10 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100 %	23 kegiatan	5 kegiatan	52,62 %
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	- Jumlah Anak Stunting yang Diintervensi	1263 Anak	NA	NA	NA	NA	1263 Anak	600 anak	47,5 %
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	- Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	7 %	NA	NA	NA	NA	5 %	4,50 %	64,3 %
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	- Tersedianya Katahanan Kerentanan Pangan	Peta 2 buku dar	NA	NA	NA	NA	2 buku	NA	NA
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	- Jumlah Dokumen Kerawanan Pangan	Data 2 kelurahan	NA	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	NA	19 NA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Jumlah Dokumen Petugas Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	NA	NA
		- Jumlah Dokumen Petugas Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	NA	NA
		- Jumlah Pemantauan Petugas Kerawanan Pangan	2 orang	NA	2 orang	2 orang	100 %	2 orang	2 orang	100 %
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 kelurahan	NA	NA	NA	NA	2 kelurahan	1 kelurahan	50 %
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	- Jumlah Instansi Terkait Koordinasi / Stakeholder	2 kegiatan	NA	NA	NA	NA	2 kegiatan	1 kegiatan	50 %
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	- Presentase Pangan Segala Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanaran Pangan	80 %	NA	NA	NA	NA	81 %	80 %	96,38 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Pengawasan Keamanaran Pangan di Kota Semarang	100 %	NA	100 %	73,29 %	73,29 %	73,29 %	50 %	50 %
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	- Monitoring dan Evaluasi Kader Keamanan Pangan	55 orang	NA	55 orang	45 orang	81,81 %	NA	NA	20
		- Jumlah Pembinaan Kader Keamanan Pangan	55 kegiatan	NA	NA	NA	NA	11 kegiatan	2 kegiatan	18,18 %
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Pembentukan dan BIMTEK Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah	1 kegiatan	NA	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	NA	1 kegiatan	100 %
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Pendataan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan	40 pelaku usaha	NA	40 pelaku usaha	NA	NA	1 kegiatan	NA	NA
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	2 kegiatan	NA	2 kegiatan	2 kegiatan	100 %	NA	2 kegiatan	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Sosialisasi Keamanan Pangan	1 kegiatan	NA	NA	NA	NA	24 lokasi	NA	NA
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium	1 paket	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	100 %
		- Jumlah Pengadaan Reagen Uji Laboratorium	1 paket	NA	NA	NA	NA	1 paket	1 paket	100 %
		- Jumlah Petugas Pengawas Keamanan Pangan	2 orang	NA	2 orang	2 orang	100 %	2 orang	2 orang	21 100 %
		- Jumlah Petugas Survei Keamanan Pangan	2 orang	NA	1 orang	1 orang	100 %	2 orang	2 orang	100 %
		- Jumlah survey keamanan pangan	72 survey	NA	77 survey	44 survey	57,14 %	72 survey	29 survey	40,27 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Jumlah sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan	7 kegiatan	NA	NA	NA	NA	7 kegiatan	5 kegiatan	71,43 %

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

- a) Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 4 Program 10 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan.
- b) Dari ke empat Program tersebut diatas ada satu program yang realisasinya melebihi dari yang ditargetkan yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan masyarakat dengan Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan realisasi sebesar 89,10 % melebihi dari yang di targetkan sebesar 88,10 % atau dengan prosentase sebesar 101,13 %. Tercapaiannya Target PPH lebih pada Kesadaran Masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang Beragam Bergizi Sehat dan Aman (B2SA).Namun demikian ada Indikator yang tidak memenuhi target yaitu pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan Indikator Event promosi pangan lokal dari 4 event yang ditargetkan hanya tercapai 1 event atau hanya tercapai 25 % dari 100 %, ketidak tercapaiannya Indikator tersebut karena dampak dari pandemi Covid-19 dan adanya Penyesuaian Anggaran di Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.
- c) Dari keseluruhan Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan maka Dinas Ketahanan Pangan dapat dikatakan Berhasil dalam pelaksanaannya. Hal ini tertuang dalam tabel diatas rata – rata capaian indikator kinerjanya 100 %.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2022

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase	Selisih
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.305.109.508	7.796.599.574	93,88	508.509.934
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.603.640	6.480.000	85,22	1.123.640

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase	Selisih
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	656.920	590.000	89,81	66.920
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.214.950	1.100.000	90,54	114.950
2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.429.450	1.250.000	87,45	179.450
2 09 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.214.950	975.000	80,25	239.950
2 09 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.429.450	1.190.000	83,25	239.450
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.657.920	1.375.000	82,94	282.920
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.900.745.308	6.602.411.638	95,68	298.333.670
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.728.592.548	6.452.747.638	95,90	275.844.910
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	168.895.000	147.609.000	87,40	21.286.000
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	651.552	510.000	78,27	141.552
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.954.656	1.275.000	65,23	679.656
2 09 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	651.552	270.000	41,44	381.552
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.804.482	463.318.883	78,96	123.485.599
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.249.408	5.856.000	93,70	393.408
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.802.329	49.950.000	91,15	4.852.329
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.527.234	65.817.000	77,86	18.710.234
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.148.207	36.155.000	90,05	3.993.207
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.475.266	18.882.215	66,31	9.593.051
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.700.000	4.070.000	71,40	1.630.000
2 09 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.023.000	18.456.100	70,92	7.566.900
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.174.000	71.544.448	54,13	60.629.552
2 09 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	208.705.038	192.588.120	92,28	16.116.918
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.029.108	262.992.903	92,59	21.036.205
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.166.908	107.970.133	89,85	12.196.775

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase	Selisih
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.862.200	155.022.770	94,61	8.839.430
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.926.970	461.396.150	87,73	64.530.820
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	35.514.350	97,79	803.830
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.645.330	214.702.100	79,92	53.943.230
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.963.460	13.092.700	62,45	7.870.760
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	198.087.000	99,04	1.913.000
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	51.762.491	51.714.900	99,91	47.591
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.762.491	51.714.900	99,91	47.591
2 09 02 2.01 05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	51.762.491	51.714.900	99,91	47.591
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.665.792.397	5.217.725.491	92,09	448.066.906
2 09 02 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	300.421.587	281.518.256	93,71	18.903.331
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	16.679.420	15.558.750	93,28	1.120.670
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	71.280.730	65.699.000	92,17	5.581.730
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan	195.797.941	193.330.435	98,74	2.467.506
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	3.563.174	3.559.624	99,90	3.550
2 09 03 2.01 06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	13.100.322	3.370.447	25,73	9.729.875
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1.205.633.000	1.168.092.250	96,89	1.168.092.250
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.102.418.000	1.064.877.250	96,59	1.064.877.250
2 09 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	103.215.000	103.215.000	100,00	103.215.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase	Selisih
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	4.159.737.810	3.768.114.985	90,59	391.622.825
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	75.000.000	60.344.460	80,46	14.655.540
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	277.723.800	269.833.800	97,16	7.890.000
2 09 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	3.807.014.010	3.437.936.725	90,31	369.077.285
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	123.212.864	117.733.520	95,55	5.479.344
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	85.712.864	82.233.520	95,94	3.479.344
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	85.712.864	82.233.520	95,94	3.479.344
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.500.000	35.500.000	95	2.000.000
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	37.500.000	35.500.000	94,67	2.000.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	549.707.552	527.624.033	95,98	22.083.519
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	549.707.552	527.624.033	95,98	22.083.519
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.876.348	24.319.463	93,98	1.556.885
2 09 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8.710.757	7.800.490	89,55	910.267
2 09 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	85.283.620	78.509.040	92,06	6.774.580
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	429.836.827	416.995.040	97,01	12.841.787
Total		14.695.584.812	13.711.397.518	93,30	984.187.294

Sumber data Anggaran Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 12 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang adalah sebesar Rp **14.695.584.812** Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp **13.711.397.518** dengan sisa anggaran sebesar Rp **984.187.294**

(6,7%).Silpa anggaran terjadi karena adanya efisiensi ATK dan SPPD yang menyesuaikan kebutuhan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Tabel 2. 3

Capaian Indikator Dinas Ketahanan Pangan Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun 2023

TUJUAN SASARAN	INDIKATOR	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI	
			2020 (bila ada data)	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Tujuan : Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Pola Pangan Harapan	87,9	88,1	88,9	89	88,7	89,1	89,10	89,20	
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	Presentase Ketersediaan Pangan	NA	252,81 %	253,56 %	254,32 %	NA	365,54 %	367,13 %	368 %	
Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	Tingkat Keamanan Pangan	80	80	80,5	81	91,26	91,27	84,60	84,60	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2022

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Tujuan **“Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Pola Pangan Harapan”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 89,1 % dari target sebesar 88,9% .Skor Pola Pangan Harapan dapat dihitung berdasarkan (%Angka Kecukupan Gizi (AKG) dikali Bobot Masing-masing Kelompok Pangan)
- Sasaran **“Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **”Persentase Ketersediaan Pangan”** telah melebihi dari yang ditargetkan sebesar **253,56 %** terealisasi sebesar **367,13 %**. Presentase Ketersediaan Pangan dapat di hitung berdasarkan **”Jumlah Cadangan Pangan Kota (Ketersediaan Pangan Utama) dibanding Jumlah Kebutuhan Pangan Kota dikali 100%”**
- Sasaran yang kedua yaitu **”Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman”** dengan Indikatornya **“Tingkat**

Keamanan Pangan“ Indikator inipun juga melebihi dari yang ditargetkan sebesar **81,50 %** dengan tingkat realisasi sebesar **84,60 %**.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Isu-isu yang masuk kriteria strategis bidang Ketahanan Pangan :

- a. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) menurun
- b. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan menurun
- c. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- d. Semarang bukan daerah produksi pertanian sehingga pasokan pangan masih bergantung wilayah lain
- e. Belum adanya jejaring distribusi pangan
- f. Belum optimalnya penyaluran cadangan pangan
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang keragaman pangan
- h. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut :

Permasalahan	Akar masalah
Masih Belum Optimalnya Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Penanganan Rawan Pangan	Terbatasnya Lahan Pertanian sehingga Pasokan Pangan Masih Bergantung Dari Wilayah Lain (Daerah Sekitar) Serta Belum Optimalnya Peran Lumbung Pangan
	Belum Adanya Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan yang Dapat Meningkatkan Keterjangkauan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat
	Belum Optimalnya Penyaluran Cadangan Pangan ke Daerah Rawan Pangan
Masih rendahnya kesadaran masyarakat	Adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat terutama generasi milenial yang lebih mengutamakan kemudahan dalam

dalam pemanfaatan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	konsumsi pangan kurang mempertimbangkan keberagaman dan kualitas pangan
	Masih Banyak Makanan yang Beredar di Masyarakat yang Belum Memenuhi Standart Keamanan Pangan dikarenakan Kurangnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Tentang Keamanan Pangan yang Dikonsumsi Maupun yang Diproduksi
	Adanya pemahaman dari sebagaiamn masyarakat bahwa pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) adalah pangan yang mahal

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Peningkatan Jumlah penduduk membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan pangan, sehingga bidang ketersediaan dan kewaspadan pangan serta bidang distribusi dan cadangan pangan dituntut untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan melalui penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan seimbang
- Kota Semarang bukan daerah produksi pangan, namun mempunyai potensi pengembangan beberapa komoditas pangan, oleh sebab itu perlu diupayakan dapat mengoptimalkan produktivitas beberapa komoditas pangan yang ada serta melakukan inovasi produk pangan
- Diversifikasi konsumsi belum optimal, menyebabkan kebutuhan bahan pangan pokok menjadi makin tinggi. Hal ini dapat menjadi ancaman karena harus selalu mendapat supply produksi bahan pangan. Ancaman ini perlu dirubah menjadi peluang agar dapat tercipta pangan alternatif yang berkualitas. Masih tingginya konsumsi beras dan terigu, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memperkenalkan dan menggali potensi pangan lokal non beras non terigu
- Masih banyak beredar bahan / produk pangan yang kurang memenuhi standar mutu pangan, terutama dalam penggunaan bahan tambahan non pangan. Pemakaian bahan tambahan pangan yang berlebihan (natrium benzoate), penambahan zat pemutih pada beras, bahan pengawet non pangan (formalin, boraks, rhodamine methanil yellow, dll) dan lain-lain memerlukan pengawasan dibidang kewananan makanan segar agar dapat menjaga kualitas dan keamanan pangan segar

b. Peluang :

- Kota Semarang masih memiliki lahan pertanian di beberapa kecamatan yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan pangan;
- Pengembangan sentra-sentra olahan pangan berbasis sumber daya lokal;
- Dinas Ketahanan Pangan sudah mempunyai Kader Keamanan Pangan disetiap pasar tradisional di Kota Semarang yang menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menjaga keamanan pangan di Kota Semarang khususnya di Pasar Tradisional.
- Kelurahan diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan dari Dinas Ketahanan Pangan dalam menyebarluaskan informasi tentang penganekaragaman konsumsi, pengenalan prinsip konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) maupun keamanan pangan;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

1. Ketersediaan pangan yang tergantung pada daerah produksi, kadang tidak merata sepanjang tahun karena pola tanam padi. Untuk pemenuhan kebutuhan agar tercukupi sepanjang tahun perlu adanya pengelolaan stok. Disisi lain, lahan pertanian memiliki kondisi yang luasnya makin terbatas akibat adanya alih fungsi lahan pertanian yang tidak diimbangi dengan upaya terpadu untuk pengembangan budidaya dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terkini untuk meningkatkan produksi.
2. Belum Optimalnya Peran Lumbung Pangan. Adanya tantangan iklim dan pandemi covid 19 sangat memerlukan peran lumbung pangan baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat dalam penyediaan cadangan makanan.
3. Belum Adanya Jejaring Distribusi Pangan. Belum adanya jejaring distribusi pangan membuat perumusan kebijakan terkait distribusi pangan menjadi sulit. Data mengenai informasi harga, rantai pasok, jaringan distribusi dan sistem logistik daerah yang komprehensif diperlukan untuk merumuskan intervensi yang perlu dilakukan Ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.
4. Belum Optimalnya Penyaluran Cadangan Pangan ke Daerah Rawan Pangan
5. Perkembangan Teknologi yang Menyebabkan Perubahan Perilaku Konsumsi Masyarakat Terutama Generasi Milenial yang Lebih Mengutamakan Kemudahan dalam Konsumsi Pangan Kurang Mempertimbangkan

Keberagaman dan Kualitas Pangan

6. Masih Banyak Makanan yang Beredar di Masyarakat yang Belum Memenuhi Standart Keamanan Pangan dikarenakan Kurangnya Kesadaran Masyarakat / Pelaku Usaha Tentang Keamanan Pangan yang Dikonsumsi Maupun yang Diproduksi
7. Pandemi Covid yang masih berlangsung mengakibatkan turunnya ketersediaan, dan keterjangkauannya dan perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian di semua lini usaha, termasuk sektor pertanian. Salah satu dampak yang harus diantisipasi terkait dampak Covid-19 adalah ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke pertama dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.

- 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif

- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
- 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan,

melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang

Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan mendukung pencapaian prioritas kesatu, yaitu **“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan”**.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				22.853.861.745	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				13.119.150.139	
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Cakupan wilayah layanan kemandirian Pangan	100 %	275.000.000	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		Cakupan wilayah layanan kemandirian Pangan	100 %	286.932.432	
2.09.02.2.01	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	275.000.000	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit	286.932.432	-
2.09.02.2.01.03	Penyediaan infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	50.000.000	Penyediaan infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	214.591.908	-
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka	6 laporan	75.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka	6 laporan	17.244.164	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Penyediaan Infrastruktur Logistik			Infrastruktur Logistik		Penyediaan Infrastruktur Logistik			
2.09.02.2.01.05	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan nfrastruktur Pendukung emandirian Pangan	Kota Semarang	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	2 dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Kota Semarang	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	2 dokumen	55.096.360	-
2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kota Semarang	Ketersediaan energi / Kapita	3057 kkal/kapita/tahun	8.812.000.000	Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kota Semarang	Ketersediaan energi / Kapita	3057 kkal/kapita/tahun	2.704.743.880	-
			Presentase Cakupan Distribusi	100 %				Presentase Cakupan Distribusi	100 %		
			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100 %				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	100 %		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan penyaluran pangan atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga	Kota Semarang	Presentase tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100 %	1.248.000.000	Penyediaan dan penyaluran pangan atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	Kota Semarang	Presentase tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100 %	679.041.520	-

No	Rancangan Awal RKPd 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	pangan					kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan					
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Semarang	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	24 laporan	80.000.000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Semarang	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	24 laporan	57.888.255	-
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	15 laporan	300.000.000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	15 laporan	94.462.968	
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	13 laporan	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	13 laporan	9.591.808	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	72 laporan	320.000.000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	72 laporan	218.062.995	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	21 unit	358.000.000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	21 unit	255.889.372	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	25 unit	90.000.000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	25 unit	43.146.122	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penguatan Cadangan Pangan	100 %	1.114.000.000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Penguatan Cadangan Pangan	100 %	1.063.602.360	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4 kegiatan	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	4 laporan	11.584.180	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 ton	975.000.000	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 ton	929.500.000	
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	15 ton	114.000.000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	15 ton	122.518.180	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Semarang	Angka Kecukupan Energi	88 %	6.450.000.000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Semarang	Angka Kecukupan Energi	88 %	962.100.000	
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Tahun	33 Per dokumen	150.000.000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Tahun	33 Per dokumen	146.400.000	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	53 laporan	1.300.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	53 laporan	543.100.000	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 laporan	5.000.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 laporan	272.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	4 %	450.000.000	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	4 %	109.195.275	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan Ketahanan Kecamatan	Kota Semarang	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	200.000.000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Semarang	Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	2 buku	90.490.866	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	4 dokumen	200.000.000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan)	2 dokumen	90.490.866	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 Kelurahan	250.000.000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tertanganinya Kerawanan Pangan	2 Kelurahan	18.704.409	
2.09.04.2.02.01	Koordinasi Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 laporan	250.000.000	Koordinasi Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 laporan	18.704.409	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu	81.50 %	902.150.000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Kota Semarang	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu	81.50 %	675.248.970	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Keamanan Pangan					Keamanan Pangan			
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 %	902.150.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100 %	675.248.970	
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	4 dokumen	150.000.000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	4 dokumen	101.950.000	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100 sertifikat	85.000.000	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100 sertifikat	63.300.000	
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	30.000.000	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	85.250.000	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	5 dokumen	30.000.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	12 dokumen	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota			a		Daerah Kabupaten/Kota			
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	607.150.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	401.038.970	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	12.414.711.745	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	9.343.029.582	
			Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %				Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %		
			Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %				Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 %		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	8 dokumen	10.710.815	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	8 dokumen	12.042.170	

No	Rancangan Awal RKPd 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			dan Rencana Anggaran SKPD					dan Rencana Anggaran SKPD			
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.234.770	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.516.536	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.470.410	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.785.849	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.470.410	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1.549.899	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.470.410	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Dokumen DPA SKPD								
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.785.849	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.470.410	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2.572.682	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.925.760	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	9.087.704.548	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	6.997.096.569	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang	8.796.931.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 orang/bulan	6.768.820.139	
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	284.790.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dokumen	223.500.000	

No	Rancangan Awal RKPd 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.196.710	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	924.510	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 laporan	3.590.128	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 laporan	2.773.530	
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	1.196.710	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	1.078.390	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	871.964.456	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100 %	1.127.511.699	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 paket	6.874.349	Penyediaan Komponer Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 paket	6.868.565	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	60.282.562	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	238.331.655	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	92.979.957	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	57.338.240	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	44.163.028	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	45.227.891	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	26.819.018	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	44.764.981	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 dokumen	6.270.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 dokumen	5.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Undangan yang Disediakan					Undangan yang Disediakan			
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	55.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	95.422.370	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	303.814.000	
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	229.575.542	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	330.043.997	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100 %	350.563.789	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	100 %	708.677.154	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132.188.269	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	120.171.154	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	218.375.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	588.506.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	673.768.137	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	497.701.990	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.949.998	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36.318.180	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	367.363.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	303.945.320	

No	Rancangan Awal RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Operasional atau Lapangan					
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	46.454.639	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	59.558.690	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	220.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	97.879.800	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 5 Program 12 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp13.119.150.139

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Ketahanan Pangan, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 yang ada di Dinas Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Patemon RT 02 RW 01	Pelatihan pengembang produk	1 kegiatan	di akomodir pada Kegiatan 2 09 03 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Balai Kelurahan Bendungan RT 0 / RW 0	Pelatihan membuat aneka kue Lebaran	1 kegiatan	di akomodir pada Kegiatan 2 09 03 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	Balai Kelurahan Bendungan RT 1 RW 5	Bazar Ramadhan	1 kegiatan	di akomodir pada kegiatan 2.09.03.2.01.05 Pemantauan stok pasokan dan harga pangan
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jl.Sendangguwo Raya No.56 RT 13 rw 02	Sosialisasi budidaya pangan	40 orang	di akomodir pada Kegiatan 2 09 03 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

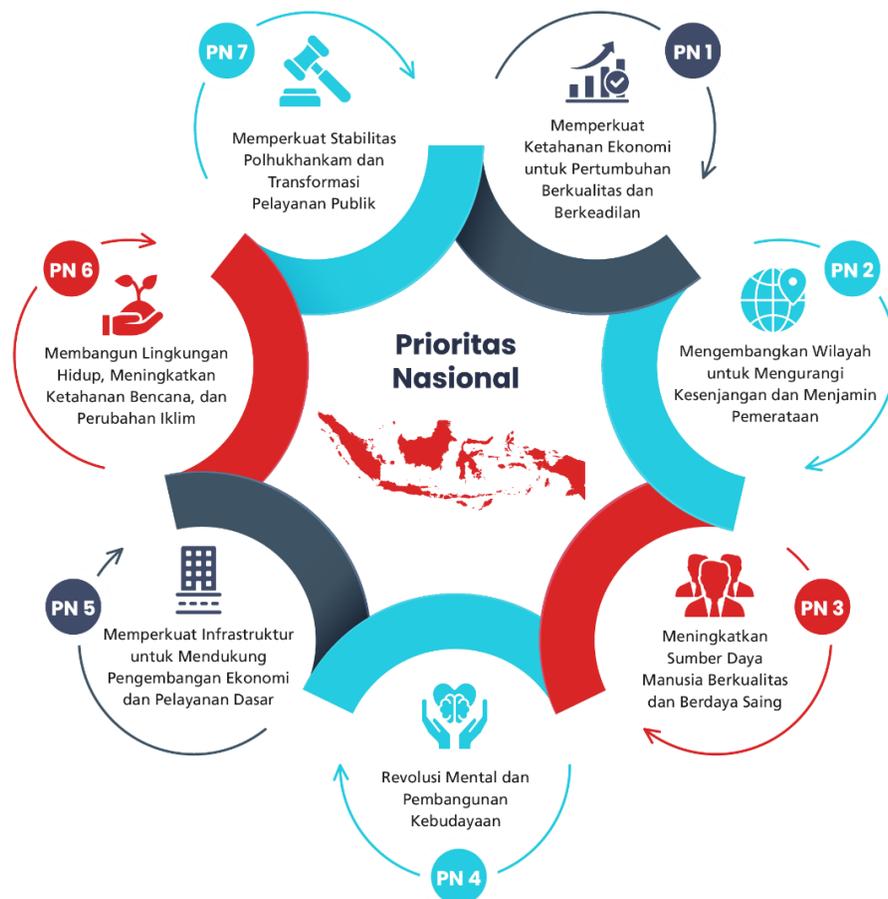
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2022

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung

- PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial

- PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pangan.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKPD Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;** dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satga Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;** dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk

- mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjaminkeselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu “Meningkatkan ketahan pangan daerah”, dengan indikator tujuan “Skor Pola Pangan Harapan”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang yaitu

- “Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan”, dengan indikator sasaran “Presentase cadangan pangan masyarakat”
- “Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman” dengan indicator sasaran “Tingkat Keamanan Pangan”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89
SASARAN : 1. Meningkatnya Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Presentase cadangan pangan	%	253,56
2. Meningkatnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman	Tingkat keamanan pangan	%	81,5

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA
SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Ketahanan Pangan bertugas menkoordinasikan pencapaian indikator tujuan (1 indikator) dan indikator sasaran (2 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Dinas Ketahanan Pangan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Meningkatkan ketahanan pangan daerah”** dan indikator sasaran **“Presentase cadangan pangan masyarakat”**serta **“Tingkat Keamanan Pangan”**
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2023 Perubahan adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada tahun 2023 Perubahan adalah sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 5 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 7 kegiatan pelaksanaan/pembangunan
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan

kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 Perubahan adalah sebesar Rp16.857.035.325 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:

- a. Rp 9.751.527.422 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
- b. Rp 7.105.507.903 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 Perubahan disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Perubahan dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				16.128.345.325				16.633.805.374
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan		100 %	67.405.877		-	100 %	144.204.400
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Kota Semarang	1 unit	67.405.877	APBD Kota Semarang	-	1 unit	144.204.400
2 09 02 2.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kota Semarang	1 unit	17.269.460	APBD Kota Semarang	-	1 unit	25.000.000
2 09 02 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kota Semarang	1 laporan	12.909.147	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	119.204.400

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2 09 02 2.005	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Kota Semarang	1 dokumen	37.227.270	-	-	-	-
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase Cakupan Distribusi	Kota Semarang	100 %	5.150.248.627	APBD Kota Semarang	-	100 %	4.216.557.190
		Ketersediaan Energi / Kapita	Kota Semarang	3057 Kkal / Kapita / Tahun				3058 Kkal / Kapita / Tahun	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Kota Semarang	100 %				100 %	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Presentase Tersedianya Pangan Sesuai Kebutuhan di Kota Semarang	Kota Semarang	100 %	1.656.450.316	APBD Kota Semarang	-	100 %	1.624.498.023
		Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	100 %				100 %	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kota Semarang	15 laporan	62.091.510	APBD Kota Semarang	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kota Semarang	25 laporan	194.544.625	APBD Kota Semarang	-	10 laporan	180.120.000
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kota Semarang	13 laporan	8.501.408	APBD Kota Semarang	-	4 laporan	518.403.827
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kota Semarang	44 dokumen	213.700.604	APBD Kota Semarang	-	72 dokumen	165.400.000
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Kota Semarang	21 unit	1.146.055.399	APBD Kota Semarang	-	21 unit	95.000.000
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kota Semarang	15 unit	31.556.770	APBD Kota Semarang	-	1 unit	50.028.119
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan di Kota Semarang	Kota Semarang	100 %	1.710.334.681	APBD Kota Semarang	-	100 %	1.070.749.000
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 laporan	77.484.681	APBD Kota Semarang	-	4 laporan	20.000.000
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	19.637 ton	1.509.400.000	APBD Kota Semarang	-	11 ton	862.349.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kota Semarang	20 ton	123.450.000	APBD Kota Semarang	-	15 ton	188.400.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi	Kota Semarang	88 %	1.783.463.630	APBD Kota Semarang	-	88 %	712.500.000
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	1 dokumen	1.086.556.480	APBD Kota Semarang	-	33 dokumen	75.000.000
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Semarang	10 laporan	378.829.900	APBD Kota Semarang	-	53 laporan	525.000.000
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kota Semarang	2 laporan	318.077.250	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	112.500.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Kota Semarang	4 %	207.894.580	APBD Kota Semarang	-	4 %	293.750.000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kota Semarang	2 buku	91.870.230	APBD Kota Semarang	-	2 buku	266.500.000
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang	Kota Semarang	2 dokumen	91.870.230	APBD Kota Semarang	-	2 dokumen	266.500.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Dimutahirkan							
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Kota Semarang	2 kelurahan	116.024.350	APBD Kota Semarang		2 kelurahan	27.250.000
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 laporan	116.024.350	APBD Kota Semarang		12 laporan	27.250.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Kota Semarang	81.50 %	1.679.958.819	APBD Kota Semarang		81.50 %	935.806.000
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Kota Semarang	100 %	1.679.958.819	APBD Kota Semarang		100 %	935.806.000
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	Kota Semarang	4 dokumen	254.000.000	APBD Kota Semarang		4 dokumen	150.000.000
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	100 sertifikat	38.050.000	APBD Kota Semarang		100 sertifikat	85.000.000
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	1 dokumen	19.800.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	30.000.000
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Kota Semarang	12 dokumen	73.855.300	APBD Kota Semarang		12 dokumen	30.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kabupaten/Kota							
2.09.05.2.01.05	Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	4 dokumen	1.294.253.519	APBD Kota Semarang		4 dokumen	640.806.000
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100 %	9.751.527.422	APBD Kota Semarang		100 %	10.832.174.000
		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Semarang	100 %				100 %	
		Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100 %				100 %	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	Kota Semarang	8 dokumen	14.181.890	APBD Kota Semarang		8 dokumen	17.943.000
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 dokumen	1.650.400	APBD Kota Semarang		3 dokumen	7.500.000
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporanhasil Koordinasi	Kota Semarang	1 dokumen	2.773.530	APBD Kota Semarang		1 dokumen	2.015.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Penyusunan Dokumen RKA SKPD							
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	2.773.530	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	2.015.000
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	1.637.700	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.936.000
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dokumen	2.773.530	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	1.815.000
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	3 laporan	2.573.200	APBD Kota Semarang	-	3 laporan	2.662.000
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	4 dokumen	7.202.993.337	APBD Kota Semarang	-	4 dokumen	9.511.531.000
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	44 orang/bulan	6.961.246.907	APBD Kota Semarang	-	44 orang/bulan	9.236.778.000
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	6 dokumen	236.970.000	APBD Kota Semarang	-	6 dokumen	267.856.000
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Kota Semarang	1 laporan	924.510	APBD Kota Semarang	-	1 laporan	2.299.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	7 laporan	2.773.530	APBD Kota Semarang		7 laporan	2.299.000
2.09.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	2 dokumen	1.078.390	APBD Kota Semarang		2 dokumen	2.299.000
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	Kota Semarang	100 %	1.114.211.864	APBD Kota Semarang		100 %	398.900.000
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	30 paket	6.868.565	APBD Kota Semarang		30 paket	3.500.000
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	5 paket	238.449.232	APBD Kota Semarang		5 paket	8.500.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	4 paket	57.338.240	APBD Kota Semarang	-	4 paket	30.000.000
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 paket	34.745.180	APBD Kota Semarang	-	1 paket	30.000.000
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	4 paket	44.799.773	APBD Kota Semarang	-	4 paket	8.000.000
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Semarang	1 dokumen	5.700.000	APBD Kota Semarang	-	1 dokumen	5.700.000
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	12 laporan	71.731.400	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	33.200.000
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	12 laporan	287.021.360	APBD Kota Semarang	-	12 laporan	80.000.000
2.09.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	5 dokumen	367.558.116	APBD Kota Semarang	-	5 dokumen	200.000.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD	Kota Semarang	100 %	722.597.549	APBD Kota Semarang		100 %	384.000.000
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	141.211.949	APBD Kota Semarang		12 laporan	148.000.000
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	12 laporan	581.385.600	APBD Kota Semarang		12 laporan	236.000.000
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	100 %	697.542.780	APBD Kota Semarang		100 %	519.800.000
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 unit	36.318.180	APBD Kota Semarang		1 unit	40.000.000
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	24 unit	335.654.410	APBD Kota Semarang		24 unit	427.800.000

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Perubahan				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	5 unit	59.558.690	APBD Kota Semarang	-	5 unit	25.000.000
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Semarang	1 unit	266.011.500	APBD Kota Semarang	-	1 unit	27.000.000

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Ketahanan Pangan padaprinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Ketahanan Pangan;
3. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

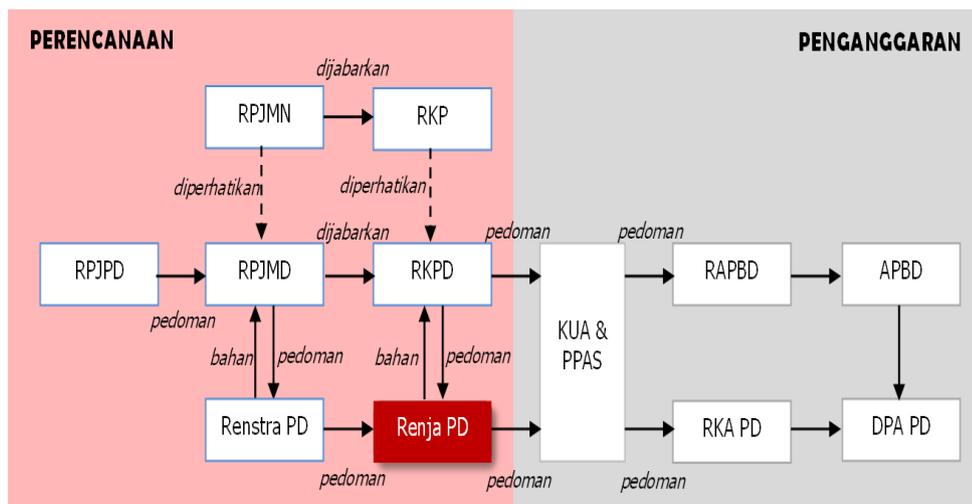
14. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan umum adanya perubahan RKPD Tahun 2023 antara lain :

- (1) Penyesuaian pagu belanja daerah pada perubahan tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi belanja pada triwulan I tahun 2023 serta kegiatan yang tidak dapat terlaksana di tahun 2023
- (2) Penyesuaian pagu belanja daerah pada perubahan tahun 2023 dilakukan terhadap belanja operasional seperti efisiensi terhadap belanja alat tulis kantor (ATK), belanja konsumsi rapat, dan belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung secara langsung pencapaian target indikator pembangunan
- (3) Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran
- (4) Belanja di perubahan tahun 2023 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:
 - a. Pencapaian target RPJMD dan RKPD tahun 2023
 - b. Prioritas Kota, yang terdiri dari penanganan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, penanganan inflasi serta pengendalian banjir dan rob
 - c. Program-program dedicated yang telah ditetapkan
 - d. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 - i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang (FP-PUG) Kota Semarang;
 - s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 103);
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - y. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang secara berkesinambungan. Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Lingkungan Hidup Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;

- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana

pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Kualitas penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 dengan Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran SKPD	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	30 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	1 dokumen	11,00	10 dokumen	33,33

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33,33	4 dokumen	26,66
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100,00	9 dokumen	36,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan SKPD	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 orang/bulan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	115 orang/bulan	100,00	115 orang/bulan	100,00
2.11.01.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60,00 dokumen	12,00 dokumen	12,00 dokumen	6,00 dokumen	50,00	18,00 dokumen	30,00
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60,00 dokumen	12,00 dokumen	12,00 dokumen	6,00 dokumen	50,00	18,00 dokumen	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	2,00 laporan	40,00
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	2,00 laporan	40,00
2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1,00 dokumen	20,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	0 paket	0,00	1 paket	20,00
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket	6 paket	6 paket	4 paket	66,67	10 paket	33,33
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 paket	9 paket	4 paket	1 paket	25,00	10 jenis	22,22
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	2 paket	2 paket	0 paket	0,00	2 paket	20,00
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0,00	2 dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60,00 dokumen	12,00 dokumen	12,00 dokumen	6,00 dokumen	50,00	18,00 dokumen	30,00
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60,00 dokumen	12,00 dokumen	12,00 dokumen	6,00 dokumen	50,00	18,00 dokumen	30,00
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	15 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33,33	5 dokumen	33,33
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60,00 dokumen	12,00 dokumen	12,00 dokumen	6,00 dokumen	50,00	18,00 dokumen	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60,00 dokumen	12,00 dokumen	12,00 dokumen	6,00 dokumen	50,00	18,00 dokumen	30,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan asset SKPD	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3,00 unit	3,00 unit	3,00 unit	1,00 unit	33,33	1 unit	33,33
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	200,00 unit	200,00 unit	200,00 unit	120,00 unit	60,00	120,00 unit	60,00
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80,00 unit	15,00 unit	16,00 unit	16,00 unit	100,00	31,00 unit	38,75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1070 unit	200,00 unit	214,00 unit	80,00 unit	37,38	280,00 unit	26,17
2.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	15,00 unit	2,00 unit	3,00 unit	3,00 unit	100,00	5,00 unit	33,33
2.11.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan (RPPLH)	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen DIKPLHD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	20,00	1 dokumen	20,00
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	66 %	77,57 %	59,00 %	78,37 %	132,83	78,37 %	118,74

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	93,00 %	73,59 %	87,00 %	74,09 %	85,16	74,09 %	79,67
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	25 Ha	10,00 Ha	20,00 Ha	15,63 Ha	78,15	15,63 Ha	62,52
		Persentase perubahan emisi CO2 / Emisi Gas Rumah Kaca	2,00 %	5,9 %	2,00 %	5,9 %	295	5,9 %	295
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	75,00 dokumen	15,00 dokumen	15,00 dokumen	6,00 dokumen	40,00	21,00 dokumen	28,00
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	75,00 dokumen	15,00 dokumen	15,00 dokumen	6,00 dokumen	40,00	21,00 dokumen	28,00
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	60,00 dokumen	12,00 dokumen	12,00 dokumen	6,00 dokumen	50,00	18,00 dokumen	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
1.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2,00 jenis	2,00 jenis	2,00 jenis	1,00 jenis	50,00	2,00 jenis	100,00
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20,00 laporan	4,00 laporan	4,00 laporan	2,00 laporan	50,00	6,00 laporan	30,00
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luasan Lahan yang terkonservasi	90 Ha	50 Ha	60 Ha	59,05 Ha	98,42	59,05 Ha	65,61
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50,00	6 dokumen	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	15 jenis	3 jenis	3 jenis	2 jenis	66,67	5 jenis	33,33
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	15 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0,00	2 dokumen	13,33
2.11.04.2.01.02	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	10,00 Ha	6,00 Ha	7,90 Ha	4,00 Ha	50,63	4,00 Ha	40,00
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	12,00 unit	2,00 unit	4,00 unit	2,00 unit	50,00	6 dokumen	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Brbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	60,00 %	54,50 %	56,00%	54,70%	97,68	54,70%	91,17
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50,00 perusahaan	27,00 perusahaan	50,00 perusahaan	12,00 perusahaan	24,00	12,00 perusahaan	24,00
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	66,67	5 dokumen	33,33
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan	150 laporan	30 laporan	50 laporan	0 laporan	0,00	30 laporan	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	86,00 %	86,08 %	85,40 %	86,28 %	101,03	86,28 %	100,32
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	120,00 dokumen	60,00 dokumen	60,00 dokumen	36,00 dokumen	60,00	96,00 dokumen	80,00
		Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	10,00 kegiatan	2,00 kegiatan	2,00 kegiatan	2,00 kegiatan	100,00	4,00 Kegiatan	40,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	10,00 laporan	2,00 laporan	2,00 laporan	0,00 laporan	0,00	2,00 laporan	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	58,00 %	48,00 %	50,00 %	48,00 %	96,00	48,00 %	82,76
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	10,00 kegiatan	2,00 kegiatan	2,00 kegiatan	1,00 kegiatan	50,00	3,00 kegiatan	30,00
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kempetensinya terkait PPLH	300,00 lembaga	100,00 lembaga	160,00 lembaga	40,00 lembaga	25,00	140,00 lembaga	46,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	15,00 dokumen	3,00 dokumen	3,00 dokumen	2,00 dokumen	66,67	5,00 dokumen	33,33
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	13,00 %	16,91 %	11,50 %	16,91 %	147,04	16,91 %	130,08
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2,00 jenis	2,00 jenis	2,00 jenis	2,00 jenis	100,00	2,00 jenis	100,00
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga ,asyarakat/dunia usaha/dunia Pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	150,00 entitas	30,00 entitas	60,00 entitas	15,00 entitas	25,00	45,00 entitas	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani/ditindaklanjuti per-tahun/ditindaklanjuti per-tahun	60,00 kasus	38,00 kasus	60,00 kasus	49,00 kasus	81,67	49,00 kasus	81,67
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5,00 dokumen	1,00 dokumen	1,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00	1,00 dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	5,00 dokumen	1,00 dokumen	1,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00	1,00 dokumen	20,00
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA	92,00 %	90,50 %	91,00 %	90,90 %	99,89	90,90 %	98,80
		Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	32,00 %	26,04 %	27,00 %	26,18 %	103,00	26,18 %	81,81

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
		Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	69,00 %	73,31 %	72,00 %	72,88 %	98,77	72,88 %	98,78
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 %	(100,00 %) 40,00 %	(100,00 %) 60,00 %	50,00 % (25,00%)	41,67 %	50,00 % (25,00%)	50,00 %
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan Jakstrada yang disusun	10,00 dokumen	2,00 dokumen	2,00 dokumen	0,00 dokumen	0,00	2,00 dokumen	20,00
2.11.11.2.01.02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali	20,00 laporan	4,00 laporan	4,00 laporan	2,00 laporan	50,00	6,00 laporan	30,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	450,00 ton	250,00 ton	363,00 ton	121,00 ton	88,97	121,00 ton	26,88
2.11.11.2.01.04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	50,00 kelompok	20,00 kelompok	27,00 kelompok	9,00 kelompok	33,33	29,00 kelompok	58,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9 (5+7)	10 (9/4)
2.11.11.2.01.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan penyediaan prasarana dan sarana Bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jakstrada	50,00 dokumen	15,00 dokumen	20,00 dokumen	7,00 dokumen	35,00	22,00 dokumen	44,00

2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen Kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota yang ditetapkan	80,00 dokumen	20,00 dokumen	50,00 dokumen	15,00 dokumen	30,00	35,00 dokumen	43,75
2.11.11.2.01.07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	60,00 unit	28,00 unit	40,00 unit	10,00 unit	25,00	53,00 unit	88,33

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 triwulan II Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 sampai dengan triwulan II Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang telah dilaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang terdiri dari 10 (sepuluh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan
 - b) Dari 18 (delapan belas) indikator program terdapat 4 (empat) program yang telah memenuhi target dan 14 (empat belas) masih dalam proses pencapaian target
 - c) Dari 17 (tujuh belas) indikator kegiatan terdapat 3 (tiga) indikator yang memenuhi target dan 14 (empat belas) indikator masih dalam proses pencapaian target
 - d) Dari 54 (lima puluh empat) indikator sub kegiatan terdapat 7 (tujuh) indikator yang memenuhi target, 32 (tiga puluh dua) indikator masih dalam proses pencapaian target dan 15 (lima belas) indikator yang belum berjalan
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 triwulan II diperoleh data sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target yang telah dilaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang terdiri dari 10 (sepuluh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan
 - b) Dari 18 (delapan belas) indikator program terdapat 4 (empat) program yang telah memenuhi target dan 14 (empat belas) masih dalam proses pencapaian target
 - c) Dari 17 (tujuh belas) indikator kegiatan terdapat 2 (dua) indikator yang memenuhi target dan 14 (empat belas) indikator masih dalam proses pencapaian target
 - d) Dari 54 (lima puluh empat) indikator sub kegiatan terdapat 1 (satu) indikator yang memenuhi target dan 53 (lima puluh tiga) indikator masih dalam proses pencapaian target

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021

Kode Rek.	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup		134.459.623.358	57.410.714.860	42,70	77.048.908.498
5.1 Belanja Operasi		117.715.068.370	55.006.901.410	46,13	62.708.166.960
5.1.02	Belanja Barang dan jasa	102.076.927.876	47.086.552.342	50,65	54.990.375.534
5.1.01	Belanja Pegawai	15.638.140.494	7.920.349.068	14,36	7.717.791.426
5.2 Belanja Modal		16.744.554.988	2.403.803.450	17,80	14.340.741.538
5.2.02	Belanja modal peralatan dan mesin	11.778.764.670	2.096.413.650	0	9.682.351.020
5.2.05	Belanja modal asset tetap lainnya	2.284.000	0	0	2.284.000
5.2.03	Belanja modal gedung dan bangunan	4.468.359.398	307.399.800	6,88	4.160.959.598
5.2.04	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	495.146.920	0	0	495.146.920
Dinas Lingkungan Hidup					
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.797.579.422	20.462.131.528	51,42	19.335.447.894
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.321.694	2.455.500	14,18	14.866.194
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.754.178	0	0	2.754.178
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.376.206	0	0	2.376.206
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.593.666	0	0	2.593.666
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.376.206	0	0	2.376.206
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.593.666	0	0	2.593.666
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.627.772	2.455.500	53,06	2.172.272
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.900.643.251	8.537.842.318	50,52	8.362.800.933
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.122.896.494	7.756.639.068	51,29	7.366.257.426
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	429.963.455	162.510.000	37,80	267.453.455
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1.341.390.301	616.097.750	45,93	725.292.551
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.727.514	2.595.500	95,16	132.014
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	1.982.132	0	0	1.982.132
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.683.355	0	0	1.683.355
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.667.763.616	1.039.580.671	62,33	628.182.945
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.650.000	21.864.400	47,90	23.785.600
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.144.000	45.234.000	39,63	68.910.000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.471.000	42.627.100	47,12	47.843.900

Kode Rek.	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.457.000	13.429.450	31,63	29.027.550
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.284.000	0	0	2.284.000
08	Fasilitas Kunjungan Tamu	134.865.000	15.660.000	11,61	119.205.000
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	834.856.736	775.245.850	92,86	59.610.886
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	916.240.265	308.019.233	33,62	608.221.032
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	713.200.000	210.073.078	29,46	503.126.922
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.040.265	97.946.155	48,24	105.094.110
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.295.610.596	10.574.233.806	52,10	9.721.376.790
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.471.000	35.324.650	22,10	125.146.350
02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.577.046.596	10.160.178.100	51,90	9.416.868.496
05	Pemeliharaan Mebel	1.293.000	1.290.000	99,77	3.000
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	93.341.056	37,34	156.658.944
11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	306.800.000	284.100.000	92,60	22.700.000
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	647.559.024	60.837.681	9,39	586.721.343
2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	366.159.024	55.843.581	15,25	310.315.443
01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	155.282.024	25.414.300	16,37	129.867.724
02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	210.877.000	30.429.281	14,43	180.447.719
2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	281.400.000	4.994.100	1,77	276.405.900
02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	281.400.000	4.994.100	1,77	276.405.900
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.503.020.395	1.248.819.187	16,64	6.254.201.208
2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6.756.708.047	1.141.536.887	16,89	5.615.171.160
01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	2.802.172.920	164.345.837	5,86	2.637.827.083
02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.900.483.441	553.385.343	19,08	2.347.098.098

Kode Rek.	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.054.051.686	423.805.707	40,21	630.245.979
2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/Kota	278.092.497	29.977.200	10,78	248.115.297
01	Pemberian Informasi Peringatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	278.092.497	29.977.200	10,78	248.115.297
2.03	Pemulihan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	468.219.851	77.305.100	16,51	390.914.751
04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	468.219.851	77.305.100	16,51	390.914.751
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	866.083.646	172.820.198	19,95	693.263.448
2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	866.083.646	172.820.198	19,95	693.263.448
01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	390.880.077	79.735.993	20,40	311.144.084
02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	287476843	87.666.205	30,50	199.810.638
07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	187.726.726	5.418.000	2,89	182.308.726
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	399.971.800	66.202.731	16,55	333.769.069
2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	310.750.784	46.254.881	14,88	264.495.903
01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	225.726.384	36.547.031	16,19	189.179.353
02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	85.024.400	9.707.850	11,42	75.316.550
2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam I (satu) Daerah Kabupaten/Kota	89.221.016	19.947.850	22,36	69.273.166
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	89.221.016	19.947.850	22,36	69.273.166
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	723.917.837	219.261.474	30,29	504.656.363
2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	723.917.837	219.261.474	30,29	504.656.363

Kode Rek.	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	430.060.000	97.342.812	22,63	332.717.188
03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	293.857.837	121.918.662	41,49	17.939.175
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	3.524.807.924	752.105.090	21,34	2.772.702.834
2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.524.807.924	752.105.090	21,34	2.772.702.834
01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	3.080.744.924	739.636.125	24,01	2.341.108.799
02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	444.063.000	12.468.965	2,81	431.594.035
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	291.129.200	59.010.362	20,27	232.118.838
2.01	Pemberiaan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	291.129.200	59.010.362	20,27	232.118.838
01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	291.129.200	59.010.362	20,27	232.118.838
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	128.807.617	55.333.477	42,96	73.474.140
2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	128.807.617	55.333.477	42,96	73.474.140
01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	102.407.787	40.913.031	39,95	61.494.756
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	26.399.830	14.420.446	54,62	11.979.384
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	80.576.746.493	34.314.193.132	42,59	46.262.553.361
2.01	Pengelolaan Sampah	80.576.746.493	34.314.193.132	42,59	46.262.553.361
01	Penyusunan Kebijakan dan Stategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	98.800.000	14.631.862	14,81	84.168.138
02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	762.360.546	361.826.175	47,46	400.534.371

Kode Rek.	PROGRAM/KEGATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	55.825.178.642	29.425.748.256	52,71	26.399.430.386
04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.103.498.400	543.116.406	49,22	560.381.994
05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	16.854.869.403	2.509.458.140	14,89	14.345.411.263
06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	1.537.350.000	438.217.240	28,50	1.099.132.760
07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.394.689.502	1.021.195.053	23,24	3.373.494.449

Sumber : DLH Kota Semarang, 2023

Dari data Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam pembiayaan 10 (sepuluh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah sebesar Rp. 134.459.623.358,- (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan rupiah), dengan sisa pagu anggaran yang belum dipergunakan sebesar Rp. 77.048.908.498,- (tujuh puluh tujuh milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah melaksanakan pelayanan di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Semarang
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi			Proyeksi		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 TW II	2024	2025	2026
Tujuan : Meningkatnya	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,23	52,33 poin	52,43 poin	52,53 poin	52,63 poin	33,76 poin	52,33 poin	52,43 poin	33,76 poin	52,53 poin	52,63 poin	52,53 poin
Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	95,20	95,40 poin	95,60 poin	96,80 poin	96,00 poin	77,38 poin	95,40 poin	95,60 poin	77,38 poin	96,80 poin	96,00 poin	96,80 poin
	Penurunan Emisi CO ₂	0 ton CO ₂ e	132.262,29 ton CO ₂ e	143.447,76 Ton CO ₂ e	155.619,35 ton CO ₂ e	183.278,54 ton CO ₂ e	247.855,14 ton CO ₂ e	132.262,29 ton CO ₂ e	143.447,76 ton CO ₂ e	247.855,14 ton CO ₂ e	155.619,35 ton CO ₂ e	183.278,54 ton CO ₂ e	155.619,35 ton CO ₂ e
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	74 persen	73,00 persen	72,00 persen	71,00 persen	70,00 Persen	73,31 persen	73,00 persen	72,00 persen	72,88 persen	71,00 persen	70,00 Persen	71,00 persen
Meningkatnya Kualitas Air	Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu	0 persen	50,00 persen	50,20 persen	50,40 persen	50,60 Persen	44,55 persen	50,00 persen	50,20 persen	72,88 persen	50,40 persen	50,60 Persen	50,40 persen
Meningkatnya Kualitas Udara	Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu	0 persen	50,00 persen	50,20 persen	50,40 persen	50,60 Persen	87,50 persen	50,00 persen	50,20 persen	87,50 persen	50,40 persen	50,60 Persen	50,40 persen
Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	85,20 persen	85,40 persen	85,60 persen	85,80 persen	86,00 Persen	86,08 persen	85,40 persen	85,60 persen	86,08 persen	85,80 persen	86,00 Persen	85,80 persen

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi			Proyeksi		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2024	2023 TW II	2024	2025	2026
Menurunnya Emisi CO ₂	Persentase penurunan emisi GRK	0 persen	2,00 persen	2,00 persen	2,00 persen	2,00 persen	5,9 persen	2,00 persen	2,00 persen	5,90 persen	2,00 persen	2,00 persen	2,00 persen
Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	74 persen	73,00 persen	72,00 persen	71,00 persen	70,00 persen	73,31 persen	73,00 persen	72,00 persen	72,88 persen	71,00 persen	70,00 persen	71,00 persen

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 sampai dengan triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” memiliki 4 (empat) indikator kinerja diantaranya :
 - a. Indeks Kualitas Air (IKA)
Capaian realisasi sebesar 33,76 poin dari yang ditargetkan sebesar 52,43 poin, dengan persentase capaian 64,39 %
 - b. Indeks Kualitas Udara (IKU)
Capaian realisasi sebesar 77,38 poin dari yang ditargetkan sebesar 95,60 poin, dengan persentase capaian 80,94 %
 - c. Penurunan Emisi CO₂
Capaian realisasi sebesar 247.855,14 ton CO₂e dari yang ditargetkan sebesar 143.447,76 ton CO₂e, dengan persentase capaian 172,78 %
 - d. Persentase sampah perkotaan yang tertangani
Capaian realisasi sebesar 72,88 persen dari yang ditargetkan sebesar 72,00 persen, dengan persentase capaian 98,77 %
- b) **Sasaran 1** “Meningkatnya kualitas Air ” dengan indikator kinerja “ Persentase kualitas air yang memenuhi baku mutu” berhasil mencapai realisasi sebesar 72,88 persen dari yang ditargetkan sebesar 50,20 persen, dengan persentase capaian 145,18 %.
- c) **Sasaran 2** “Meningkatnya kualitas udara” dengan indikator kinerja “ Persentase kualitas udara yang memenuhi baku mutu” berhasil mencapai realisasi sebesar 87,50 persen dari yang ditargetkan sebesar 50,20 persen, dengan persentase capaian 170,72 %.
- d) **Sasaran 3** “Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota” dengan indikator kinerja “Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota” berhasil mencapai realisasi sebesar 86,08 persen dari yang ditargetkan sebesar 85,60 persen, dengan persentase capaian 100,56 %.
- e) **Sasaran 4** “Menurunnya Emisi CO₂” dengan indikator kinerja “Persentase penurunan emisi GRK” berhasil mencapai realisasi sebesar 5,90 persen dari yang ditargetkan sebesar 2,00 persen, dengan persentase capaian 295 %
- f) **Sasaran 5** “Meningkatnya cakupan pengelolaan sampah kota” dengan indikator kinerja “Persentase sampah perkotaan yang tertangani” berhasil mencapai realisasi sebesar 72,88 persen dari yang ditargetkan sebesar 72,00 persen, dengan persentase capaian 98,78 %.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang

kehutanan juga dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP) Tahun 2023
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat**

BARIS 1	NAMA OPD	Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN YANG DIAMPU	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	KEGIATAN	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	TUJUAN SUB KEGIATAN	Meningkatkan pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah bank sampah di Kota Semarang sebanyak 250 bank sampah ➤ Pengelola Bank sampah <ul style="list-style-type: none"> L = 600 orang (48%) P = 650 orang (52%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendampingan TPST <ul style="list-style-type: none"> L = 150 orang (70%) P = 250 orang (30%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah <ul style="list-style-type: none"> Sasaran : bank sampah L = 400 orang (66.67%) P = 200 orang (33.33%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembinaan bank sampah <ul style="list-style-type: none"> Sasaran : 16 kecamatan L = 120 orang (40%) P = 180 orang (60%) ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pilah sampah <ul style="list-style-type: none"> L = 200 orang (40%) P = 300 orang (60%) ➤ Jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 1.387.959 ton/tahun (99.54%) pada tahun 2021 ➤ Pelaksanaan Hari Peduli Sampah Nasional <ul style="list-style-type: none"> L = 250 orang (50%) P = 250 orang (50%)

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Studi Orentasi Bank Sampah : 1 lokasi
BARIS 3	ISU GENDER	FAKTOR KESENJANGAN/ PERMASALAHAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Akses</u> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan bank sampah dari segi manajemen yang kurang terkelola dengan baik termasuk masalah administrasi dan pembukuan yang belum tertata dengan baik • Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan penanganan dan pemilahan sampah • Sampah selama ini hanya dipandang barang tidak berguna, sebenarnya dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai tambah
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partisipasi <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi laki-laki dalam pengelolaan bank sampah masih rendah jika dibandingkan jumlah perempuannya • Proporsi perempuan yang mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah, pilah sampah, pendampingan TPST lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki • Proporsi perempuan yang mengikuti pelatihan bank sampah lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrol <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi pengelola bank sampah didominasi oleh perempuan • Perempuan lebih banyak mengambil keputusan dibandingkan laki-laki
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manfaat <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan tambahan pendapatan bagi perempuan dengan jiwa kewirausahaan yang dimilikinya

			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sampah • Membantu melakukan pendekatan secara aktif kepada masyarakat yang belum berpartisipasi dalam pengelolaan bank sampah khususnya kepada laki-laki
BARIS 4	FAKTOR	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tidak semua pengambil keputusan pada OPD memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender ➢ Ketersediaan SDM Aparatur belum memadai untuk mendampingi seluruh kelompok bank sampah yang ada ➢ Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan bank sampah
		SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masih ada anggapan kuat dimasyarakat bahwa pengembangan karir laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan karena laki-laki pencari nafkah utama sedangkan perempuan hanya mengurus rumah tangga ➢ Kurangnya ketersediaan armada untuk mengantar jemput sampah
BARIS 5	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup, baik perempuan maupun laki-laki
BARIS 6	RENCANA AKSI		<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan sosialisasi pelatihan bank sampah, pilah sampah, pendampingan TPST ➢ Menentukan peserta pelatihan pembinaan bank sampah ➢ Menentukan petugas diseminasi pendampingan dan narasumber ➢ Pendampingan melalui kegiatan PKK, bank sampah, RT/RW dan kelompok – kelompok masyarakat ➢ Melakukan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Hari peduli Sampah Nasional
BARIS 7	BASELINE		Pemberdayaan bank sampah wilayah

BARIS 8	PENGUKURAN HASIL	OUTPUT/SUB KEGIATAN	<p>Indikator Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah bangunan pilah sampah yang terbangun 2) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pendampingan TPST 3) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pilah sampah 4) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah 5) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembinaan bank sampah 6) Jumlah peserta mengikuti Hari Peduli Sampah Nasional 7) Jumlah kendaraan roda 3 yang terbeli 8) Jumlah kantong pilah sampah yang terbeli 9) Jumlah timbangan duduk yang terbeli 10) Jumlah timbangan gantung yang terbeli 11) Pemberdayaan Bank Sampah <p>Target Kinerja :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) 5 lokasi</td> <td style="width: 50%;">8) 1600 buah</td> </tr> <tr> <td>2) 400 orang</td> <td>9) 30 buah</td> </tr> <tr> <td>3) 500 orang</td> <td>10) 64 buah</td> </tr> <tr> <td>4) 600 orang</td> <td>11) 250 unit</td> </tr> <tr> <td>5) 300 orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6) 500 orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7) 5 unit</td> <td></td> </tr> </table>	1) 5 lokasi	8) 1600 buah	2) 400 orang	9) 30 buah	3) 500 orang	10) 64 buah	4) 600 orang	11) 250 unit	5) 300 orang		6) 500 orang		7) 5 unit	
1) 5 lokasi	8) 1600 buah																
2) 400 orang	9) 30 buah																
3) 500 orang	10) 64 buah																
4) 600 orang	11) 250 unit																
5) 300 orang																	
6) 500 orang																	
7) 5 unit																	
		OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN	<p>➤ Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</p> <p>➤ Target Kinerja : 2 kegiatan</p>														
		OUTCOME (INTERMEDIATE)/PROGRAM	<p>➤ Indikator Kinerja : Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>➤ Target Kinerja : 50 %</p>														
		OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	<p>➤ Indikator Kinerja : Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan</p> <p>➤ Target Kinerja : 72 %</p>														
		DAMPAK/TUJUAN	<p>➤ Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</p> <p>➤ Target Kinerja : 67,01</p>														

Sumber : DLH Kota Semarang, 2023

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN 2023**

NAMA OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 URUSAN YANG DIAMPU : Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 KABUPATEN/KOTA : Kota Semarang
 PROVINSI : Jawa Tengah
 TAHUN ANGGARAN : 2023

PROGRAM	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
KEGIATAN	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
ANALISI SITUASI	<p>Salah satu permasalahan yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia adalah persampahan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya pengembangan bank sampah yang bersifat <i>social engineering</i> yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA, menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi dan bersih.</p> <p>Pembangunan bank sampah merupakan langkah awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah. Pendekatan pengelolaan sampah 3R membuka pandangan dan wawasan baru bagi masyarakat dalam mengelola sampah yang dipandang tidak berguna, akan tetapi melalui pendekatan 3R sampah dapat dijadikan sesuatu yang bernilai tambah. Sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat, karena saat menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki dimana mereka akan menjadi nasabah dan mendapatkan buku tabungan layaknya seperti aktivitas perbankan. Sampah-sampah yang disetorkan nantinya akan dilakukan pemilahan berdasarkan komposisinya, dimana untuk senyawa organik akan diolah menjadi kompos dan biogas sementara anorganik akan diolah menjadi tas, sandal, dan <i>homemade</i> lainnya.</p>
	<p>Pengelolaan bank sampah sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang mampu dan ingin mengelola lingkungan. Sampai dengan tahun 2023 sudah ada 250 bank sampah yang tersebar di Kota Semarang. Dalam mendukung peningkatan kompetensi SDM yang ada, salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terkait dengan pengurangan sampah yakni melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup untuk Lembaga</p>

	<p>kemasyarakatan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi pelatihan bank sampah, sosialisasi pilah sampah, sosialisasi pendampingan TPST dan melakukan pelatihan pembinaan bank sampah dengan sasaran 16 kecamatan dengan melibatkan RT/RW, PKK, kelompok masyarakat, maupun bank sampah. Sosialisasi dan pendampingan/pelatihan dilakukan secara terus menerus agar dapat berkelanjutan terhadap bank sampah yang ada di Kota Semarang sebagai upaya awal untuk memberikan pengetahuan dasar tentang urgensi pendirian bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan keberadaan bank sampah secara mandiri khususnya untuk sampah anorganik. Dalam menunjang bank sampah yang ada di Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup ikut mendukung fasilitasi sarana prasarana bank sampah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pilah sampah yang rencananya akan dilaksanakan pembangunan di 5 lokasi 2. Kendaraan Roda Tiga sebanyak 5 unit 3. Pemberian kantong pilah sampah yang diserahkan kepada bank sampah sebanyak 1600 buah 4. Pengadaan timbangan duduk sebanyak 30 buah 5. Pengadaan timbangan sebanyak 64 buah 6. Melaksanakan studi orientasi bank sampah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud pengembangan kompetensi sebagai bahan masukan dan evaluasi pengembangan bank sampah <p>Setiap tahunnya juga diselenggarakan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 21 Februari yang bertujuan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran serta keterlibatannya dalam pengelolaan sampah</p>	
RENCANA TINDAK	SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	Meningkatkan pengetahuan/keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup, baik perempuan maupun laki-laki
	RENCANA TINDAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi, sosialisasi pelatihan bank sampah, sosialisasi pilah sampah, sosialisasi pendampingan TPST 2. Menentukan peserta pelatihan pembinaan bank sampah 3. Menentukan petugas diseminasi pendampingan dan narasumber 4. Pendampingan melalui kegiatan PKK, bank sampah, RT/RW dan kelompok – kelompok masyarakat 5. Melakukan Monitoring Evaluasi 6. Pelaksanaan Hari peduli Sampah Nasional
ALOKASI SUMBER DAYA	ANGGARAN	Rp. 2.830.752.000
	SDM	Panitia : 50 orang

		Peserta pelaksana L = 350 orang P = 250 orang Narasumber : 20 orang
	PERALATAN DAN MESIN	Spanduk, Materi Kit, Kamera, Sewa Gedung, Tenda, Sound System dan Genset
OUTPUT/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja : 1) Jumlah bangunan pilah sampah yang terbangun 2) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pendampingan TPST 3) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pilah sampah 4) Jumlah peserta mengikuti sosialisasi pelatihan bank sampah 5) Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembinaan bank sampah 6) Jumlah peserta mengikuti Hari Peduli Sampah Nasional 7) Jumlah kendaraan roda 3 yang terbeli 8) Jumlah kantong pilah sampah yang terbeli 9) Jumlah timbangan duduk yang terbeli 10) Jumlah timbangan gantung yang terbeli 11) Pemberdayaan Bank Sampah	
	Target Kinerja : 1) 5 lokasi 2) 400 orang 3) 500 orang 4) 600 orang 5) 300 orang 6) 500 orang 7) 5 unit 8) 1600 buah 9) 30 buah 10) 64 buah 11) 250 unit	
OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN	➤ Indikator Kinerja : Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup ➤ Target Kinerja : 2 kegiatan	
OUTCOME (INTERMEDIATE)/PROGRAM	➤ Indikator Kinerja : Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup ➤ Target Kinerja : 50 %	
OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	➤ Indikator Kinerja : Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah perkotaan ➤ Target Kinerja : 72 %	
DAMPAK/TUJUAN	➤ Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ➤ Target Kinerja : 67,01	

Sumber : DLH Kota Semarang, 2023

**Matriks Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (GAP) Tahun 2023
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

BARIS 1	NAMA OPD		Dinas Lingkungan Hidup
	URUSAN YANG DIAMPU		Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup
	PROGRAM		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	KEGIATAN		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	SUB KEGIATAN		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	TUJUAN SUB KEGIATAN		Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah kelurahan di Kota Semarang = 177 kelurahan ➤ Jumlah peserta lomba Program Kampung Iklim (Proklim) Sasaran : 32 kelurahan dari 16 kecamatan L = 100 orang (33.33%) P = 200 orang (66.67%) ➤ Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) = 5 kelurahan ➤ Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) Sasaran : 32 kelurahan yang lolos verifikasi L = 40 orang (47.06%) P = 45 orang (52.94%) <p>Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan Proklim 2.825 batang</p>
BARIS 3	ISU GENDER	FAKTOR KESENJANGAN/ PERMASALAHAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Akses</u> • Belum optimalnya sistem kaderisasi dalam pelaksanaan kegiatan program kampung iklim • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup dan pemahaman masyarakat akan dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim

			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Partisipasi <ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi keterlibatan laki-laki dalam lomba kampung iklim masih rendah jika dibandingkan jumlah perempuannya • Proporsi keterlibatan perempuan dalam mengikuti sosialisasi program kampung iklim lebih besar dibandingkan dengan jumlah laki-laki
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrol <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi dalam upaya penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim lebih di dominasi oleh perempuan • Perempuan lebih banyak mengambil keputusan dibandingkan laki-laki
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Manfaat <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk persepsi masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan motivasi masyarakat untuk melaksanakan aksi nyata dalam memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim • Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK • Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
BARIS 4	FAKTOR PENYEBAB	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak semua pengambil keputusan pada OPD memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender ➤ Ketersediaan SDM Aparatur belum memadai untuk melakukan pendampingan di semua kelurahan ➤ Kurangnya ketersediaan sarana prasarana ➤ Belum optimalnya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal serta kegiatan ekonomi masyarakat
		SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih ada anggapan kuat di masyarakat bahwa pengembangan

		<p>karir laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan karena laki-laki pencari nafkah utama sedangkan perempuan hanya mengurus rumah tangga</p> <p>➤ Kurangnya pembinaan dan sosialisasi serta inovasi yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat tentang cara memanfaatkan kegiatan pengendalian emisi GRK, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim</p>
BARIS 5	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik perempuan maupun laki-laki
BARIS 6	RENCANA AKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan kelurahan peserta Lomba Kampung Iklim (Proklam) 2. Melakukan penjangkauan peserta lomba Program Kampung Iklim 3. Melakukan wawancara, mengupload video, dan melakukan entry Sistem Registri Nasional (SRN) 4. Melakukan Verifikasi 5. Penetapan petugas penilai lomba Program Kampung Iklim (Proklam) 6. Pelaksanaan sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklam)
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Fasilitasi lomba Program Kampung Iklim (Proklam) dengan melibatkan PKK, LSM, dan Dinas terkait 8. Pembinaan dan pendampingan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
BARIS 7	BASELINE	Jumlah Program Kampung Iklim (Proklam) yang terbangun

BARIS 8	PENGUKURAN HASIL	OUTPUT/SUB KEGIATAN	<p>Indikator Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dokumen laporan pendampingan peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim 2) Jumlah alat bor biopori yang terbeli 3) Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan Proklam 4) Jumlah dokumen DED Rain Water Harvesting 5) Jumlah dokumen DED sumur resapan 6) Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK 7) Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) 8) Jumlah dokumen rencana aksi daerah mitigasi perubahan iklim 9) Jumlah dokumen kajian sponge city 10) Jumlah kampung iklim yang terbangun 11) Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir 12) Pelubangan biopori dan pengadaan penutupan biopori 13) Pembangunan sumur resapan 14) Pengadaan Rain Water Harvesting 15) Pengadaan motor listrik roda 3 16) Pengadaan permanenan air hujan 17) Pembuatan aplikasi pemberdayaan proklam tingkat tapak
	PENGUKURAN HASIL	<p>OUTPUT/SUB KEGIATAN</p> <hr/> <p>OUTCOME (IMMEDIATE)/KEGIATAN</p> <hr/> <p>OUTCOME (INTERMEDIATE)/PROGRAM</p>	<p>Target Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 dokumen 2) 100 unit 3) 2.825 batang 4) 1 dokumen 5) 1 dokumen 6) 1 dokumen 7) 1 dokumen 8) 1 dokumen 9) 1 dokumen 10) 5 lokasi 11) 1500 buah 12) 100 unit 13) 12 unit 14) 12 unit 15) 4 unit 16) 10 unit 17) 1 aplikasi <hr/> <p>➤ Indikator Kinerja : Emisi CO₂</p> <p>➤ Target Kinerja : 155.619,35</p> <hr/> <p>➤ Indikator Kinerja : Persentase perubahan emisi CO₂ atau Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</p> <p>➤ Target Kinerja : 2 %</p>

		OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Emisi CO₂ ➤ Target Kinerja : 155.619,35
		DAMPAK/TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ➤ Target Kinerja : 67,01

Sumber : DLH Kota Semarang, 2023

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN 2023**

NAMA OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 URUSAN YANG DIAMPU : Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 KABUPATEN/KOTA : Kota Semarang
 PROVINSI : Jawa Tengah
 TAHUN ANGGARAN : 2023

PROGRAM	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
KEGIATAN	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
ANALISI SITUASI	<p>Persoalan lingkungan yang terjadi akibat dari adanya aktivitas manusia, turut mendorong percepatan fenomena perubahan iklim di bumi. Isu perubahan iklim menjadi perhatian banyak pihak baik di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal. Kondisi tersebut perlu di sikapi dengan memperkuat aksi nyata mulai dari tingkat lokal sampai dengan global yang dapat berkontribusi terhadap upaya mitigasi untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca serta sebagai upaya adaptasi untuk meningkatkan kapasitas seluruh pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang terjadi. Aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan strategis pembangunan berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim yang terus dikembangkan dan di perkuat pelaksanaannya. Lingkungan hidup untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak melaksanakan aksi lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan upaya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) salah satunya melalui Program Kampung Iklim (Proklim) yaitu program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi.</p>
	<p>Program Kampung Iklim (Proklim) dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya sehingga seluruh pihak terdorong untuk untuk melaksanakan aksi nyata yang dapat memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi perubahan iklim serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Hal laon</p>

	<p>yang diharapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan Proklamasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan adaptasi perubahan iklim, termasuk menjaga nilai-nilai kearifan local yang dapat mendukung upaya penanganan perubahan iklim dan pengendalian kerusakan lingkungan secara umum 2) Menjabatani kebutuhan masyarakat dan pihak yang dapat memberikan dukungan untuk pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 3) Meningkatkan Kerjasama seluruh pihak di tingkat nasional dan daerah dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 4) Menumbuhkan Gerakan nasional adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat yang bersifat aplikatif, adaptif dan berkelanjutan 5) Mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi dan pengurangan bencana iklim 6) Mendukung program nasional yang dapat memperkuat upaya penanganan perubahan iklim secara global. <p>Pelaksanaan Proklamasi tidak terlepas dari sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan yang secara rutin dan berkala dilakukan oleh pihak pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat. Penilaian Proklamasi mengedepankan penilaian upaya bukan hasil, artinya metode penilaian proklamasi mengoptimalkan upaya penyelesaian masalah (problem solving) dampak perubahan iklim di tingkat local dan potensi perbaikan ke depan.</p>
--	--

RENCANA TINDAK	<p>Dalam mendukung Program Kampung Iklim (Proklam) Dinas Lingkungan Hidup melalui kegiatan pencegahan atau pemanfaatan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melakukan beberapa kegiatan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan dokumen laporan pendampingan peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim 2) Pengadaan alat bor biopori 3) Pengadaan bibit tanaman untuk kegiatan Proklam 4) Penyusunan dokumen DED Rain Water Harvesting 5) Penyusunan dokumen DED sumur resapan 6) Penyusunan dokumen laporan inventarisasi GRK 7) Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) 8) Jumlah dokumen rencana aksi daerah mitigasi perubahan iklim 9) Jumlah dokumen kajian sponge city 10) Jumlah kampung iklim yang terbangun 11) Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir 12) Pelubangan biopori dan pengadaan penutupan biopori 13) Pembangunan sumur resapan 14) Pengadaan Rain Water Harvesting 15) Pengadaan motor listrik roda 3 16) Pengadaan permanenan air hujan 17) Pembuatan aplikasi pemberdayaan proklam tingkat tapak 	
	SUB KEGIATAN	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER	Menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim baik perempuan maupun laki-laki
	RENCANA TINDAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan kelurahan peserta Lomba Kampung Iklim (Proklam) 2. Melakukan penjaringan peserta lomba Program Kampung Iklim 3. Melakukan wawancara, mengupload video, dan melakukan entry Sistem Registri Nasional (SRN) 4. Melakukan Verifikasi 5. Penetapan petugas penilai lomba Program Kampung Iklim (Proklam) 6. Pelaksanaan sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklam)
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Fasilitasi lomba Program Kampung Iklim (Proklam) dengan melibatkan PKK, LSM, dan Dinas terkait 8. Pembinaan dan pendampingan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
ALOKASI SUMBER DAYA	ANGGARAN	Rp. 2.700.483.441
	SDM	<p>Panitia : 7 orang</p> <p>Peserta pelaksana</p>

		Sasaran : 32 Kelurahan dari 16 Kecamatan L = 30 orang P = 45 orang Narasumber : 3 orang																				
	PERALATAN DAN MESIN	Spanduk, Materi Kit, Kamera, Sewa Gedung, Tenda, Sound System dan Genset																				
OUTPUT/SUB KEGIATAN	<p>Indikator Kinerja :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dokumen laporan pendampingan peningkatan kapasitas Program Kampung Iklim 2) Jumlah alat bor biopori yang terbeli 3) Jumlah bibit tanaman yang terbeli untuk kegiatan Proklim 4) Jumlah dokumen DED Rain Water Harvesting 5) Jumlah dokumen DED sumur resapan 6) Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK 7) Jumlah dokumen pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca (GRK) 8) Jumlah dokumen rencana aksi daerah mitigasi perubahan iklim 9) Jumlah dokumen kajian sponge city 10) Jumlah kampung iklim yang terbangun 11) Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir 12) Pelubangan biopori dan pengadaan penutupan biopori 13) Pembangunan sumur resapan 14) Pengadaan Rain Water Harvesting 15) Pengadaan motor listrik roda 3 16) Pengadaan permanenan air hujan 17) Pembuatan aplikasi pemberdayaan proklim tingkat tapak 																					
	<p>Target Kinerja :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1) 1 dokumen</td> <td style="width: 50%;">11) 1500 buah</td> </tr> <tr> <td>2) 100 unit</td> <td>12) 100 unit</td> </tr> <tr> <td>3) 2.825 batang</td> <td>13) 12 unit</td> </tr> <tr> <td>4) 1 dokumen</td> <td>14) 12 unit</td> </tr> <tr> <td>5) 1 dokumen</td> <td>15) 4 unit</td> </tr> <tr> <td>6) 1 dokumen</td> <td>16) 10 unit</td> </tr> <tr> <td>7) 1 dokumen</td> <td>17) 1 aplikasi</td> </tr> <tr> <td>8) 1 dokumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9) 1 dokumen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10) 5 lokasi</td> <td></td> </tr> </table>		1) 1 dokumen	11) 1500 buah	2) 100 unit	12) 100 unit	3) 2.825 batang	13) 12 unit	4) 1 dokumen	14) 12 unit	5) 1 dokumen	15) 4 unit	6) 1 dokumen	16) 10 unit	7) 1 dokumen	17) 1 aplikasi	8) 1 dokumen		9) 1 dokumen		10) 5 lokasi	
1) 1 dokumen	11) 1500 buah																					
2) 100 unit	12) 100 unit																					
3) 2.825 batang	13) 12 unit																					
4) 1 dokumen	14) 12 unit																					
5) 1 dokumen	15) 4 unit																					
6) 1 dokumen	16) 10 unit																					
7) 1 dokumen	17) 1 aplikasi																					
8) 1 dokumen																						
9) 1 dokumen																						
10) 5 lokasi																						
OUTCOME (IMMEDIATE)/ KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Emisi CO₂ ➤ Target Kinerja : 155.619,35 																					
OUTCOME (INTERMEDIATE)/ PROGRAM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Persentase perubahan emisi CO₂ atau Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ➤ Target Kinerja : 2 % 																					
OUTCOME (ULTIMATE)/SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Emisi CO₂ ➤ Target Kinerja : 155.619,35 																					
DAMPAK/TUJUAN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Indikator Kinerja : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ➤ Target Kinerja : 67,01 																					

Sumber : DLH Kota Semarang, 2022

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagaimana diuraikan diatas, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan diantaranya :

1. Pengelolaan persampahan
2. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
3. Rendahnya nilai indeks kualitas air dan kualitas udara yang masih dalam kategori sedang
4. Kualitas tutupan lahan yang semakin rendah

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu untuk kedepannya perlu diupayakan pemecahan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis, menuntut sumber daya agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi yang ada
- 2) Masih adanya regulasi yang tumpang tindih terkait peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor
- 3) Masih rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat maupun dunia usaha terhadap lingkungan serta pola pikir lama yang susah untuk diubah khususnya dalam upaya pengelolaan, penanganan dan pengurangan sampah.
- 4) Limbah cair rumah tangga yang perlu di olah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan namun banyak masyarakat yang masih awam dan belum mengetahui cara pengolahan limbah rumah tangga
- 5) Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota.
- 6) Meningkatnya pertambahan penduduk dan pembangunan infrastruktur yang semakin padat menyebabkan semakin berkurangnya tutupan lahan yang akan berdampak apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang seimbang.

b. Peluang

- 1) Ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah dimana disamping menjadi tantangan ternyata sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- 2) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi dan stakeholder harus dimanfaatkan secara tepat guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Adanya peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan baik pada tingkat pusat, provinsi dan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai berikut:

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Visi dan misi Walikota Semarang yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Visi dan Misi juga dilengkapi dengan serangkaian program dan kegiatan prioritas.

b. Implementasi regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota Semarang terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi Jawa Tengah diantaranya kebijakan terkait :

- a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- b) Kebijakan dan Strategis Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- c) Penilaian Program Kampung Iklim

Selain regulasi/kebijakan tersebut diatas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan diantaranya :

- 1) Penyusunan dokumen pendampingan Raperda
- 2) Analisis kualitas air permukaan
- 3) Penyusunan DIKPLHD
- 4) Perwal tentang penataan lingkungan
- 5) DED pembangunan Onlimo
- 6) Review DED pembangunan pusat studi lingkungan DLH
- 7) Pembangunan Biogas IPAL tahu dan IPAL domestic
- 8) Pembangunan pusat studi lingkungan DLH
- 9) Pengadaan penunjang penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim
- 10) Pedampingan peningkatan kapasitas proklam
- 11) Penyusunan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca
- 12) Penyusunan laporan pemantauan evaluasi dan pelaporan Gas Rumah Kaca

- 13) Penyusunan laporan Rencana Aksi Daerah Mitigasi Perubahan Iklim
 - 14) Pemutakhiran aplikasi E- Monev DLH
 - 15) Pengembangan aplikasi data spasial
 - 16) Penyediaan satu data DLH
 - 17) Penyusunan kajian pengelolaan limbah B3 skala kota
 - 18) Penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran B3 dan limbah B3
 - 19) Penyusunan FS
 - 20) Penyusunan DED sarpras kehati
 - 21) Penyusunan kajian dampak lingkungan
 - 22) Pengadaan timbangan untuk penunjang bank sampah
 - 23) Pembangunan gedung bank sampah di 5 lokasi
 - 24) Penyusunan dokumen Jasktrada
 - 25) Pembangunan site development BSI DLH
 - 26) Penyusunan kajian potensi retribusi
 - 27) DED jalan akses operasional TPA
 - 28) DED Pembangunan TPST 2 lokasi
 - 29) DED peningkatan rumah kompos menjadi TPST di UPT Wilayah II
 - 30) Penyusunan kajian pemilahan sampah skala kawasan
 - 31) Penyusunan kajian penambangan sampah lama (landfill mining) di TPA PSEL Jatibarang
 - 32) Penyusunan dokumen perjanjian kerjasama pembangunan dan pengoperasian PSE
- c. Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar tercapainya peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan maka perlu dilakukan upaya-upaya yang dilakukan antara lain :
- a) Keberlanjutan Pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam, diprioritaskan pada upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi energi maupun barang yang bernilai ekonomi lebih, memanfaatkannya menjadi peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan guna mencapai kesejahteraan dalam jangka panjang sekaligus melestarikan lingkungan
 - b) Optimalisasi peraturan perundangan daerah terkait dengan lingkungan hidup yang berlaku dan pengawasan terhadap penerapannya secara langsung di lapangan. Kegiatan dilakukan dengan bekerjasama antar lintas sektor dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan maupun dalam upaya mengatasi sampah di perkotaan
 - c) Perhitungan daya tampung beban pencemaran sungai
 - d) Pengelolaan sampah pada permukiman yang padat penduduk maupun yang sulit dijangkau oleh kendaraan sampah, diperlukan koordinasi dengan pihak terkait serta pembentukan kelembagaan seperti KSM maupun bank sampah

- e) Mendorong masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraan untuk mengatasi penurunan kualitas udara perkotaan
- f) Meningkatkan luasan tutupan lahan melalui penghijauan, pembangunan taman kota, hutan kota dan mengendalikan alih fungsi tata guna lahan
- g) Penerapan gerakan ekonomi sirkular dalam upaya menghadapi tantangan perubahan iklim serta memanfaatkan menjadi peluang ekonomi guna mencapai kesejahteraan dalam jangka panjang sekaligus melestarikan lingkungan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integrative dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, perkiraan capaian di tahun 2022 serta isu-isu strategis di tahun 2023. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah “Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif

Dari prioritas Daerah diatas, secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup yaitu terdapat pada Prioritas Daerah 4 yaitu “Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar”. Prioritas Pembangunan Daerah tersebut, secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya- upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

- a. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - (1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - (2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang public
 - (4) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
- Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana

b. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:

- (1) Konservasi sumber daya air
- (2) Pendayagunaan sumber daya air
- (3) Pengendalian daya rusak air

c. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:

- (1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
- (2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana

Dalam mendukung Prioritas Daerah tersebut, diperlukan koordinasi terhadap stakeolder terkait dalam pencapaian target indikator kinerja utama maupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023. Untuk selanjutnya, dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.15
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
XXX.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	48.841.775.943	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	47.341.775.943	
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %				Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %		
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	17.321.694	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 dokumen	17.321.694	
01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2.754.178	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2.754.178	
02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2.376.306	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	2.376.206	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.593.666	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.593.666	
04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.376.206	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.376.206	
05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.593.666	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.593.666	
07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	4.627.772	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Semarang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	4.627.772	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100 %	17.738.280.036	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100 %	16.238.280.036	
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen		
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 Orang/bulan	16.048.253.279	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 Orang/bulan	14.548.253.279	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	422.163.455	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	422.163.455	
03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	1.261.470.301	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	1.261.470.301	
05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	2.727.514	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	2.727.514	
07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	1.982.132	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	1.982.132	
08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1.683.355	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1.683.355	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	1.809.906.468	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	1.809.906.468	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Semarang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	45.650.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Semarang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	45.650.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	190.928.605	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	190.928.605	
04	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	83.000.234	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	83.000.234	
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	42.457.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	42.457.000	
06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2.284.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2.284.000	
08	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	93.271.635	Fasilitasi kunjungan tamu	Kota Semarang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	93.271.635	
09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	374.463.600	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	374.463.600	
11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3 dokumen	977.851.394	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3 dokumen	977.851.394	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	777.411.265	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	777.411.850	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	574.371.850	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	574.371.585	
04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	203.040.265	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Semarang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	203.040.265	
2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	28.498.855.895	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	28.498.855.895	
01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	158.820.018	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	158.820.018	
02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	200 unit	27.616.858.063	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	200 unit	27.616.858.063	
05	Pemeliharaan mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	1.293.000	Pemeliharaan mebel	Kota Semarang	Jumlah mebel yang dipelihara	16 unit	1.293.000	
06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	214 unit	314.424.814	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Semarang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	214 unit	314.424.814	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	407.460.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	407.460.000	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	621.333.732	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	621.333.732	
2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 %	352.645.122	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 %	352.645.122	
01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	149.542.383	Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	149.542.383	
02	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1 dokumen	203.102.739	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1 dokumen	203.102.739	
2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis	100 %	268.688.610	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis	100 %	268.688.610	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Semarang	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	2 dokumen	268.688.610	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Semarang	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	2 dokumen	268.688.610	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	7.822.918.808	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	7.962.918.808	
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59 %				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59 %		
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87 %				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87 %		
			Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20 Ha				Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20 Ha		
			Persentase perubahan emisi CO2/ emisi gas rumah kaca	2 %				Persentase perubahan emisi CO2/ emisi gas rumah kaca	2 %		

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	7.057.807.606	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	7.197.807.606	
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan				Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan		
			Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	65 %				Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	65 %		
			Emisi CO2	7.625.348 Kt CO2e				Emisi CO2	7.625.348 Kt CO2e		
01	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Kota Semarang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	16 dokumen	3.262.017.865	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Kota Semarang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	16 dokumen	3.262.017.865	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	15 dokumen	2.765.241.084	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	15 dokumen	2.905.241.084	
03	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	12 Dokumen	1.030.548.657	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	12 Dokumen	1.030.548.657	
2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	300.292.497	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	300.292.497	
01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Kota Semarang	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	5 laporan	300.292.497	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Kota Semarang	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	5 laporan	300.292.497	
2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Luasan lahan yang terkonservasi	60 Ha	464.818.705	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Semarang	Luasan lahan yang terkonservasi	60 Ha	464.818.705	
04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	4 dokumen	464.818.705	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	4 dokumen	464.818.705	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	100 %	854.294.162	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	100 %	854.294.162	
2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	854.294.162	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	854.294.162	
01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	3 dokumen	379.090.593	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	3 dokumen	379.090.593	
02	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Kota Semarang	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	8 Ha	287.476.843	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Kota Semarang	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	8 Ha	287.476.843	
07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	4 unit	187.726.726	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	4 unit	187.726.726	
2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Kota Semarang	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56 %	380.196.509	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Kota Semarang	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56 %	380.196.509	
2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Kota Semarang	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	297.038.076	Penyimpanan sementara limbah B3	Kota Semarang	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	297.038.076	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kota Semarang	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3 dokumen	220.128.789	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kota Semarang	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3 dokumen	220.128.789	
02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kota Semarang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	50 laporan	76.909.287	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kota Semarang	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	50 laporan	76.909.287	
2.02	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 jenis	83.158.433	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 jenis	83.158.433	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah b3 yang sesuai dengan kewenangnya	1 dokumen	83.158.433	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah b3 yang sesuai dengan kewenangnya	1 dokumen	83.158.433	
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Semarang	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	85.40 %	706.029.187	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Semarang	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	85.40 %	706.029.187	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %				Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %		
2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	706.029.187	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	706.029.187	
			Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 %				Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 %		
01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	60 dokumen	412.171.350	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Kota Semarang	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	60 dokumen	412.171.350	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	2 laporan	293.857.837	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	2 laporan	293.857.837	
2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50 %	3.468.481.920	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50 %	3.468.481.920	
2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	3.468.481.920	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	3.468.481.920	
01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	160 lembaga	3.024.418.920	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	160 lembaga	3.024.418.920	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Kota Semarang	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	444.063.000	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Kota Semarang	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	444.063.000	
2.11.09	Program penghargaan lingkungan Hidup untuk masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11,50 %	581.176.175	Program penghargaan lingkungan Hidup untuk masyarakat	Kota Semarang	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11,50 %	581.176.175	
2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	581.176.175	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	581.176.175	
01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Semarang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	60 entitas	581.176.175	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Semarang	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	60 entitas	581.176.175	
2.11.10	Program Penanganan Pengasuan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	128.807.617	Program Penanganan Pengasuan Lingkungan Hidup	Kota Semarang	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	128.807.617	
2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	128.807.617	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	128.807.617	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pph kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 dokumen	102.407.787	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 dokumen	102.407.787	
02	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 dokumen	26.399.830	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 dokumen	26.399.830	
2.11.11	Pengelolaan Sampah	Kota Semarang	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91 %	89.530.125.080	Pengelolaan Sampah	Kota Semarang	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91 %	93.430.125.080	
			Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	27 %				Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	27 %		
			Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 %				Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 %		
2.01	Pengelolaan sampah	Kota Semarang	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 %	89.530.125.080	Pengelolaan sampah	Kota Semarang	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 %	93.430.125.080	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	97.482.203	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	97.482.203	
02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Kota Semarang	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	4 laporan	736.189.237	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Kota Semarang	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	4 laporan	736.189.237	
03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	363 ton	63.933.034.209	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	363 ton	67.833.034.209	
04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Semarang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	27 kelompok	1.039.917.933	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Semarang	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	27 kelompok	1.039.917.933	

Kode Rek	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	20 dokumen	16.914.878.028	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	22 dokumen	16.914.878.028	
06	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di tpa/tpst kabupaten/kota yang ditetapkan	50 dokumen	1.486.020.446	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Kota Semarang	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di tpa/tpst kabupaten/kota yang ditetapkan	50 dokumen	1.486.020.446	
07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	40 unit	5.322.603.024	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Kota Semarang	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	40 unit	5.322.603.024	

Berdasarkan data di atas, terdapat penyesuaian anggaran dari Rancangan Perubahan RKPD terhadap kebutuhan perubahan rencana kegiatan anggaran tahun 2023. Hasil penyesuaian Renja SKPD tersebut terdapat beberapa masukan atau penyesuaian anggaran kebutuhan antara lain adalah :

- a. Adanya perubahan kebutuhan anggaran pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang semula Rp. 16.048.253.279,- menjadi Rp. 14.548.253.279,- dimana anggaran yang awalnya dipergunakan untuk insentif retribusi di drop digeserkan untuk keperluan lainnya pada sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota dan Sub Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota
- b. Adanya perubahan kebutuhan anggaran pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang semula Rp. 2.765.241.084,- menjadi 2.905.241.084,- dimana terdapat penambahan anggaran yang dipergunakan untuk honorarium moderator dan pembawa acara sosialisasi kelola sampah lingkungan kita
- c. Adanya perubahan kebutuhan anggaran pada sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota yang semula Rp. 63.933.034.209,- menjadi 67.833.034.209,- dimana terdapat penambahan anggaran yang dipergunakan untuk menambah paket penyapuan selama 3 bulan dan honor tenaga swakelola

2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulankegiatan yang ditujukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Keentingan Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Becak gerobak sampah	Kelurahan Bandarharjo	15 buah	Akan diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan anggaran
2.	Perbaiki TPS menjadi TPS 3R	Jl. Lingkar Tanjung, Panggung Lor	400 m ²	Tidak diakomodir dikarenakan keterbatasan lahan di lokasi tersebut
3.	Tempat Sampah	Kelurahan Bangunharjo RT 01/RW 02 Bangunharjo	100 unit	Akan diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan
4.	Penyediaan tong sampah untuk tiap unit	Karanganyar	1 kegiatan	Tidak diakomodir, tidak sesuai prioritas OPD
5.	Pembuatan tempat pilah sampah (bank sampah)	Perum Wijaya Kusuma RT 04 RW 03 Karanganyar	18 m ²	Tidak diakomodir karena belum memenuhi persyaratan pengembangan bank sampah, harus ada embrio/KSM
6.	Penyediaan kontainer sampah untuk TPS	Di belakang makam RT 08 RW 02 Karanganyar	100 unit	Dilaksanakan di Tahun 2022
7.	Pekerjaan pembuatan lapangan hijau	Jl/ Oerip Soemohardjo No. 77 Semarang RT 05 RW 04 Mangkang Kulon	1 paket	Bukan Kewenangan DLH
8.	Pekerjaan pembuatan limbah peternakan	Jl. Duduhan -Tlogo RT 03 RW 03 Jatibarang	72 m ²	Tidak diakomodir, tidak sesuai prioritas OPD
9.	Permintaan bantuan tong sampah, gerobak sampah, becak sampah untuk 5 RW dan pohon turus jalan (pohon pule)	RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 12,3,4,5 Bendan Ngisor	5 paket	Diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan anggaran untuk bantuan prasarana pengelolaan sampah, pohon turus jalan kewenangan DPU
10.	Pengadaan gerobak dan tong sampah	Candi Losmen RT 04 RW 08 Candi	40 unit	Diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan anggaran
11.	Bangunan bank sampah RW 03	Jl. Keruing Raya RT 0 RW 03 Srandol Wetan	1 buah	Diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan anggaran dahulu dan tanah milik Pemkot
12.	Penambahan biopori di lingkungan RW	Jl. Bina Remaja No. 39 Srandol Wetan	600 buah	Diakomodir Tahun 2023 sesuai kemampuan anggaran

Sumber : DLH Kota Semarang, 2023

Selain itu juga terdapat pertanyaan maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, antara lain:

1. Perlu edukasi terus menerus tentang pembuangan sampah dan limbah cair rumah tangga

Tanggapan :

Edukasi tentang pembuangan sampah ke masyarakat selalu dilaksanakan DLH melalui kegiatan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, pemasangan banner dan dimedia social.

- Terkait limbah cair rumah tangga bukan kewenangan Tupoksi DLH Kota Semarang

2. Perlu menambah unit pengolahan sampah di tiap RW

Tanggapan :

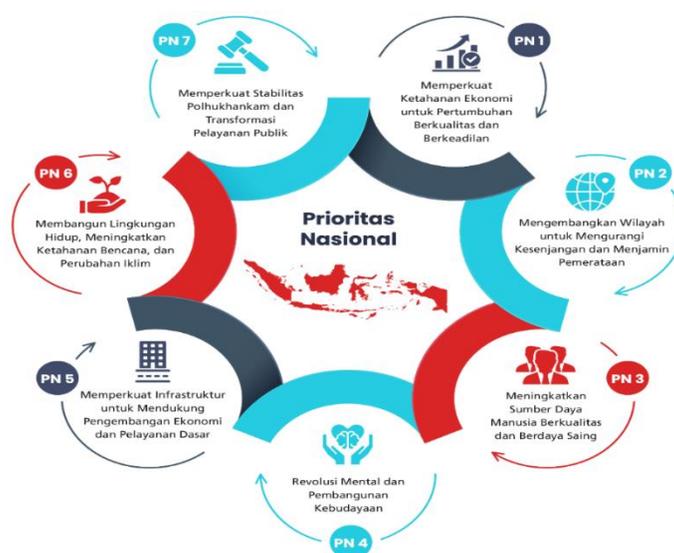
- Pembangunan unit pengolahan sampah disuatu wilayah perlu memperhatikan ketersediaan asset lahan/lokasi dan SDM pengelolanya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

3.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

Program Nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah PN 6, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan bidang kehutanan memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah penurunan emisi CO₂ atau sasaran pembangunan rendah karbon dengan target pada tahun 2023 sebesar 27 persen. Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah dan kesejahteraan Masyarakat di Dukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM” dengan prioritas sebagai berikut:

- P1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
- P2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
- P3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing
- P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas. Berdasarkan Prioritas diatas, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada Prioritas ke 1 (satu) yaitu “Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana”. Adapun target pembangunan yang menjadi Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 yaitu : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,87.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023, yaitu “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator yang hendak dicapai antara lain:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Emisi CO₂
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Meningkatnya Kualitas Air
3. Meningkatnya Kualitas Udara
4. Menurunnya Emisi CO₂

5. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota
6. Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota

Dengan indikator sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu
3. Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu
4. Persentase Penurunan Emisi GRK
5. Persentase Ketaatan Penanggungjawan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota
6. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA)	poin	52,43
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	poin	95,60
	- Emisi CO2	kt CO2	7625348,23
	- Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	64,58
SASARAN :			
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	78,57
- Meningkatnya Kualitas Air	- Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	Persen	50,20
- Meningkatnya Kualitas Udara	- Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	Persen	50,20
- Menurunnya Emisi CO2	- Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	2,00
- Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	- Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kota	Persen	85,80
- Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sampah Kota	- Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan	Persen	72,00

Sumber : DLH Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2021-2026
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Lingkungan Hidup bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (4 indikator) dan indikator sasaran (6 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 10 (sepuluh) program, yang terdiri 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 9 (sembilan) program pelaksanaan / pembangunan
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan, yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 12 (dua belas) kegiatan pelaksanaan/pembangunan
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 152.935.139.133,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Anggaran sebesar Rp. 48.841.775.943,- untuk program dan kegiatan

- penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin)
- b. Anggaran sebesar Rp.104.093.363.190,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun
2024 Dinas Lingkungan Hidup
Kota Semarang

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
XXX.01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	39.441.858.878	39.797.579.422	48.841.775.943	APBD	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %					
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen	12 dokumen	9 dokumen	17.321.694	17.321.694	17.321.694	APBD	
01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.754.178	2.754.178	2.754.178	APBD	
02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.376.206	2.376.206	2.376.206	APBD	
03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.593.666	2.593.666	2.593.666	APBD	
04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.376.206	2.376.206	2.376.206	APBD	
05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.593.666	2.593.666	2.593.666	APBD	
07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	5 laporan	5 laporan	4.627.772	4.627.772	4.627.772	APBD	

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	16.912.180.020	16.900.643.251	17.738.280.036	APBD	
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen					
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	15.122.896.494	15.122.896.494	16.048.253.279	APBD	
02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	441.500.224	429.963.455	422.163.455	APBD	
03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.341.390.301	1.341.390.301	1.261.470.301	APBD	
05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2.727.514	2.727.514	2.727.514	APBD	
07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.982.132	1.982.132	1.982.132	APBD	
08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.683.355	1.683.355	1.683.355	APBD	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	100 %	1.300.506.303	1.667.763.616	1.809.906.469	APBD	
01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	45.650.000	45.650.000	45.650.000	APBD	

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 paket	6 paket	6 paket	109.526.000	114.144.000	190.928.605	APBD	
04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	4 paket	90.471.000	90.471.000	83.000.234	APBD	
05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	42.457.000	42.457.000	42.457.000	APBD	
06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.284.000	2.284.000	2.284.000	APBD	
08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	134.865.000	134.865.000	93.271.635	APBD	
09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	403.035.880	403.035.880	374.463.600	APBD	
11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	472.217.423	834.856.736	977.851.394	APBD	
2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	100 %	916.240.265	916.240.265	777.411.850	APBD	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	713.200.000	713.200.000	574.371.585	APBD	
04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	203.040.265	203.040.265	203.040.265	APBD	
2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	100 %	100 %	20.295.610.596	20.295.610.596	28.498.855.895	APBD	
01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit	3 unit	3 unit	160.471.000	160.471.000	158.471.000	APBD	

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	200 unit	200 unit	200 unit	19.577.046.596	19.577.046.596	27.616.858.063	APBD	
05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	19 unit	16 unit	16 unit	1.293.000	1.293.000	1.293.000	APBD	
06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	214 unit	214 unit	214 unit	250.000.000	250.000.000	314.424.814	APBD	
11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	306.800.000	306.800.000	407.460.000	APBD	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Penguatan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	100 %	615.559.024	647.559.024	621.333.732	APBD	
2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penguatan, perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	100 %	100 %	100 %	366.159.024	366.159.024	352.645.122	APBD	
01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	155.282.024	155.282.024	149.542.383	APBD	
02	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	210.877.000	210.877.000	203.102.739	APBD	
2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis	100 %	100 %	100 %	249.400.000	281.400.000	268.688.610	APBD	
02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	249.400.000	281.400.000	268.688.610	APBD	

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan peningkatan penataan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	6.224.340.968	6.065.101.395	7.822.918.808	APBD	
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	59 %	59 %	59 %					
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	87 %	87 %	87 %					
		Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	20 Ha	20 Ha	20 Ha					
		Persentase perubahan emisi CO2/ emisi gas rumah kaca	2 %	2 %	2 %					
2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	5.478.028.620	5.318.789.047	7.057.807.606	APBD	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	150 perusahaan	150 perusahaan	150 perusahaan					
		Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai	65 %	65 %	65 %					
		Emisi CO2	7.625.348 Kt CO2e	7.625.348 Kt CO2e	7.625.348 Kt CO2e					

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
01	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	15 dokumen	15 dokumen	16 dokumen	1.723.493.493	1.364.253.920	3.262.017.865	APBD	
02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	2.700.483.441	2.900.483.441	2.765.241.084	APBD	
03	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.054.051.686	1.054.051.686	1.030.548.657	APBD	
2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Ketersediaan informasi publik bidang LH	2 jenis	2 jenis	2 jenis	278.092.497	278.092.497	300.292.497	APBD	
01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 laporan	4 laporan	5 laporan	278.092.497	278.092.497	300.292.497	APBD	
2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Luasan lahan yang terkonservasi	60 Ha	60 Ha	60 Ha	468.219.851	468.219.851	464.818.705	APBD	
04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	468.219.851	468.219.851	464.818.705	APBD	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan pengelolaan taman keanekaragaman hayati (kehati) di Kota Semarang	100 %	100 %	100 %	866.083.646	866.083.646	854.294.162	APBD	

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Jumlah pengelolaan dan sarana prasarana keanekaragaman hayati yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	866.083.464	866.083.646	854.294.162	APBD	
01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	390.880.077	390.880.077	379.090.593	APBD	
02	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	8 Ha	8 Ha	8 Ha	287.476.843	287.476.843	287.476.843	APBD	
07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	4 unit	4 unit	4 unit	187.726.726	187.726.726	187.726.726	APBD	
2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3	56 %	56 %	56 %	363.971.800	399.971.800	380.196.509	APBD	
2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	50 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	274.750.784	310.750.784	297.038.076	APBD	
01	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	225.726.384	225.726.384	220.128.789	APBD	
02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	50 laporan	50 laporan	50 laporan	49.024.400	85.024.400	76.909.287	APBD	
2.02	Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 yang tersedia	1 jenis	1 jenis	1 jenis	89.221.016	89.221.016	83.158.433	APBD	

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
02	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah b3 yang sesuai dengan kewenangannya	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	89.221.016	89.221.016	83.158.433	APBD	
2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	85.40 %	85.40 %	85.40 %	691.927.835	723.917.837	706.029.187	APBD	
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %					
2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	691.927.835	723.917.837	706.029.187	APBD	
		Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %					
01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	60 dokumen	60 dokumen	60 dokumen	396.060.000	430.060.000	412.171.350	APBD	

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
03	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	2 laporan	2 laporan	2 laporan	293.867.835	293.857.837	293.857.837	APBD	
2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	50 %	50 %	50 %	3.274.815.000	3.524.807.924	3.468.481.920	APBD	
2.01	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	3.274.815.000	3.524.807.924	3.468.481.920	APBD	
01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga/kelempok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	160 lembaga	160 lembaga	160 lembaga	2.830.752.000	3.080.744.924	3.024.418.920	APBD	
02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	444.063.000	444.063.000	444.063.000	APBD	
2.11.09	Program penghargaan lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan	11,50 %	11,50 %	11,50 %	291.129.200	291.129.200	581.176.175	APBD	
2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	291.129.200	291.129.200	581.176.175	APBD	

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	60 entitas	60 entitas	60 entitas	291.129.200	291.129.200	581.176.175	APBD	
2.11.10	Program Penanganan Pengasuan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	125.108.000	128.807.617	128.807.617	APBD	
2.01	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kabupaten/kota	Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun	60 kasus	60 kasus	60 kasus	125.108.000	128.807.617	128.807.617	APBD	
01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pplh kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	95.908.000	102.407.787	102.407.787	APBD	
02	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	29.200.000	26.399.830	26.399.830	APBD	

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
2.11.11	Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA	91 %	91 %	91 %	79.836.910.007	80.086.746.493	89.530.125.080	APBD	
		Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	27 %	27 %	27 %					
		Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 %	72 %	72 %					
2.01	Pengelolaan sampah	Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan	100 %	100 %	100 %	79.836.910.007	80.086.746.493	89.530.125.080	APBD	
01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	98.800.000	98.800.000	97.482.203	APBD	
02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	4 laporan	4 laporan	4 laporan	762.360.546	762.360.546	736.189.237	APBD	
03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	363 ton	363 ton	363 ton	55.088.356.212	55.825.178.642	63.933.034.209	APBD	
04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	27 kelompok	27 kelompok	27 kelompok	202.466.400	1.103.498.400	1.039.917.933	APBD	

Kode Rek	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA.2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023 (Rp.)	APBD TA.2023 (Rp.)	Perubahan Renja 2023 (Rp.)		
05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	20 dokumen	20 dokumen	22 dokumen	8.985.248.874	16.364.869.403	16.914.878.028	APBD	
06	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerja sama penanganan sampah di tpa/tpst kabupaten/kota yang ditetapkan	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	1.537.350.000	1.537.350.000	1.486.020.446	APBD	
07	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	40 unit	40 unit	40 unit	13.162.327.975	4.394.689.502	5.322.603.034	APBD	

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. CATATAN PENTING

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja dimana telah dilakukan penyesuaian sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu terdapat penambahan output/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup
3. Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang SERTA hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023. Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

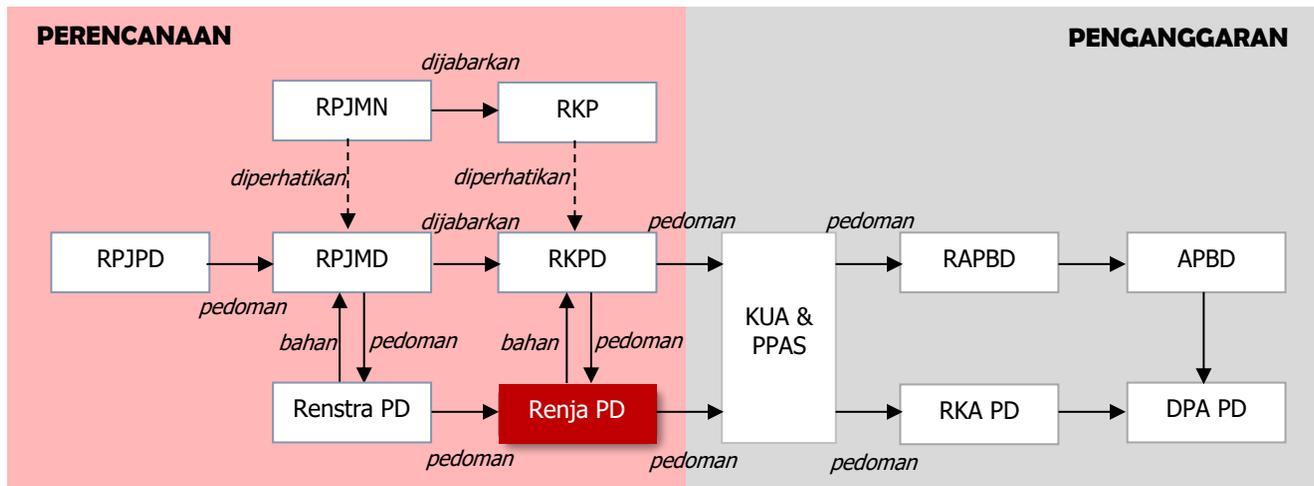
BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hubungan antar dokumen Renstra OPD terhadap dokumen RPJMD dan terhadap RPJMN serta dokumen Renja OPD terhadap RKPD dan terhadap RKP yang kesemua dokumen tersebut digambarkan dari sisi Perencanaan dan Penganggaran, dapat dilihat seperti gambar bagan di bawah ini:



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- (1) Terjadinya dinamika perkembangan kebutuhan operasional ex rutin dari program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten / kota;
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan dari pusat yaitu program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yaitu program kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (3) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang telah direncanakan dan dialokasikan pada awal tahun 2023;
- (4) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II

- Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran

- Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 88);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;

- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022;
- w. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 470/2623/IX/2022 tentang Tim Penyusunan Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- x. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor 470/2643/IX/2022 tentang Penetapan Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SEMARANG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II. Juga disajikan Capaian Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan Tahun 2023 Triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	WAJIB														
2	Kependudukan dan Catatan Sipil														
2	12														
2	12	01													
2	12	01	2.01												
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	60%	100%	100%	60%	60%	65%				
2	Perencanaan, Pengaangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	60%	100%	100%	60%	60%	65%				
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	50%	3 dokumen	1 dokumen	50%	65%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	65%
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%	65%
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	65%
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	65%
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	65%
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	65%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	60% 60%	60% 60%	65%	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	50%	100%	864 OB	504 OB	60%	65%
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	50%	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%	65%
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	100%	100%	100%	50%	100%	1 laporan	1 laporan	50%	65%
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan / Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100%	100%	100%	50%	100%	12 laporan	9 laporan	75%	65%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%	100%	50%	50%	1 dokumen	1 dokumen	100%	65%
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	65%	65%	65%
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	50%	50%	100 orang	50 orang	50%	65%
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	100%	60%	60%	65%
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100%	50%	50%	1 paket	1 paket	100%	65%
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	50%	50%	3 paket	2 paket	70%	65%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	3 paket	2 paket	70%	65%
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	5 paket	5 paket	100%	65%
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	5 paket	5 paket	100%	65%
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	75%	65%
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	75%	65%
2	12	01	2.06	10	Penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	65%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	12 dokumen	9 dokumen	75%	65%
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	70%	65%
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100 unit	75 unit	75%	65%
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	36 unit	28 unit	75%	65%
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%	65%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	75%	65%
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	12 laporan	9 laporan	75%	65%
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55%	55%	65%
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	100%	100%	100%	100%	35 unit	25 unit	72%	65%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	125 unit	80 unit	65%	65%
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	450 unit	400 unit	80%	68%
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	18 unit	10 unit	56%	65%
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	2 unit	1 unit	50%	65%
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase perekaman KTP-el Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	99,40% 71%	98% 60,57%	99,30% 68%	95,07% 61,79%	95,07% 82,38%	99,40% 71%	98,16% 64,72%	98,75% 91,15%	65% 65%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	428.000 dokumen	471.031 dokumen	405.825 dokumen	471.031 dokumen	116,06%	428.000 dokumen	266.087 dokumen	63%	65%
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	6 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	68%
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	100%	-	-	-	-	107.500 dokumen	84.745 dokumen	78,83%	65%
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	50%	50%	12 laporan	9 laporan	75%	65%
2	12	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	320.500 dokumen	100%	50%	50%	100%	107.500 dokumen	85.345 dokumen	79%	65%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kependudukan										
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	88%	65%
2	12	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	65%
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100%	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	100%	65%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	65%
2	12	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	12 dokumen	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	65%
2	12	02	2.03	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	2 laporan	-	-	-	-	4 laporan	3 laporan	75%	65%
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan sosialisasi pendaftaran penduduk	4 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	100%	65%
2	12	02	2.03	06	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	200 dokumen	-	-	-	-	200 dokumen	150 dokumen	75%	65%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	02	2.04												
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	65%	
2	12	02	2.04	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	12 laporan	100%	100%	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	65%
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	98%	97,85%	97,85%	97,00%	99,13%	97,20%	98,08%	100%	80%
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	46.000 dokumen	100%	100%	100%	100%	45.425 dokumen	38.302 dokumen	84,31%	75%
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	46.000 dokumen	100%	100%	50%	50%	45.425 dokumen	38.302 dokumen	92,48%	75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	3 layanan	100%	100%	50%	50%	100%	65%	65%	65%
2	12	03	2.01	04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	65%
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	2 paket	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%	65%
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 laporan	16 kecamatan	16 kecamatan	10 kecamatan	62,5%	12 laporan	9 laporan	75%	65%
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	4 laporan	-	-	-	-	100%	50%	50%	65%
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	65%
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	40%
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian	100%	230 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	100%	81%	81%	100%	65%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		kerjasama													
2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	60%	60%	65%		
					Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	65%		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	100%	100%	100%	100%	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	65%
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan haril inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	100%	100%	100%	50%	50%	81%	81%	100%	65%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	65%	
2	12	04	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%	65%
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	65%
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	65%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2	12	04	2.03	03	dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kerjasama									
2	12	04	2.03	04	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4 laporan	100%	100%	100%	100%	4 laporan	3 laporan	75%	65%
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	81%	230 lembaha pengguna	250 lembaga pengguna	250 lembaga pengguna	100%	81%	81%	100%	65%
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	65%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	04	2.03	06	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	10 dokumen	-	-	-	-	10 dokumen	7 dokumen	70%	65%
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	65%
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%	65%
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Akhir Priode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									Target Renja 2022	Realisasi Renja 2022 sampai Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan Triwulan II 2023	Tingkat Capaian Realisasi Tahun 2023	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	65%
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	1 jenis buku	100%	2 jenis buku	2 jenis buku	100%	65%

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan sebelum penyusunan anggaran perubahan yaitu pada Bulan Juni 2023 - Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Triwulan III Bulan Juni Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	ANGGARAN APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2023	
			KEUANGAN	%
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23.443.105.241	12.520.940.327	53.41
	2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23.443.105.241	12,520,940,327	53.41
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.723.063.237	1.617.891.065	59.41
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	9.707.280	1.434.000	14.77
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	11.074.560	900.000	8.13
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	866.122.560	430.963.065	49.76
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	1.675.617.737	1.156.133.000	69.00
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	11.839.160	9.600.000	81.09
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	91.268.640	0	0.00
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	17.846.520	11.821.000	66.24
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	11.001.520	5.400.000	49.08
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	12.957.220	290.000	2.24
2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	8.376.520	0	0.00
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	7.251.520	1.350.000	18.62
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	506.296.429	246.023.691	48.59
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	46.176.620	0	0.00
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	277.405.680	137.731.146	49.65

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	ANGGARAN APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2023	
			KEUANGAN	%
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	6.261.984	2.119.000	33.84
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	37.311.520	0	0.00
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	9.746.520	4.500.000	46.17
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	103.664.545	98.755.125	95.26
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	10.851.520	0	0.00
2.12.03.2.02.09	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	8.376.520	0	0.00
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	6.501.520	2.918.420	44.89
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	346.827.620	30.779.360	8.87
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	6.876.520	6.876.520	100.00
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	44.423.790	2.331.520	5.25
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.971.520	5.096.520	73.10
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8.017.280	2.264.880	28.25
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98.140.150	0	0.00
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	11.376.520	4.206.880	36.98
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	131.251.520	0	0.00
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	6.971.520	0	0.00
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.707.280	9.797.280	77.10
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	20.091.520	205.760	1.02
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	121.157.880	6.036.520	4.98
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	121.157.880	6.036.520	4.98
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.745.760.075	10.620.209.691	53.78

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	ANGGARAN APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2023	
			KEUANGAN	%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	819.520	0	0.00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.308.640	0	0.00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.608.550	0	0.00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.720.160	0	0.00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.315.430	0	0.00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.287.520	1.254.560	97.44
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.911.520	997.920	52.21
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.038.492.241	6.517.076.896	54.14
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.202.840	74.800.000	33.07
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	695.200	0	0.00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.879.840	336.000	17.87
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.287.520	0	0.00
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.418.640	1.798.000	7.36
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.046.350	2.247.400	3.25
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.558.307	106.719.840	66.88
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	121.234.420	30.315.800	25.01
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	473.262.145	228.078.750	48.19
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	181.008.407	160.781.798	88.83
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.850.000	5.199.900	35.02
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.826.880	196.139.706	48.81
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.960.000	0	0.00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.131.399.787	915.385.000	80.91
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	102.789.500	99.000.000	96.31

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	ANGGARAN APBD	CAPAIAN KINERJA S.D JUNI 2023	
			KEUANGAN	%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	561.121.449	358.701.000	63.93
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	983.898.800	424.009.027	43.09
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.965.388.059	942.900.000	47.98
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	389.990.660	108.691.444	27.87
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	18.907.200	1.609.000	8.51
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	370.065.650	100.228.650	27.08
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	352.566.000	297.082.000	84.26
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.938.840	46.857.000	57.89
JUMLAH		23,443,105,241	12,520,940,327	53.41

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari 5 (lima) Program, dan 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 61 (enam puluh satu) Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebesar Rp 23.443.105.241,- . Dari anggaran tersebut, sampai dengan sebelum penyusunan anggaran perubahan pada Bulan Juni 2023 - Triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 12.520.940.327,- atau sebesar 53,41% untuk capaian realisasinya. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 10.922.164.914,-.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah melaksanakan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra 2021-2026 Pelayanan Administrasi Kependudukan

NO	TUJUAN	INDIKATOR	Target Kinerja					Realisasi Kinerja			Proyeksi Realisasi				
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 TRW II	2022	2023	2024	2025	2026
	TUJUAN:														
1	Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,00 %	91,50 %	92,00 %	92,50 %	93,00 %	85,62%	86,00 %	92,18 %	91,00%	91,50%	92,00 %	92,50%	93,00%
	SASARAN:														
1	Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan	Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudukan	88,86 %	93,52 %	94,20 %	94,88 %	95,54 %	79,42%	87,00 %	92,18 %	87,00%	93,52%	94,20 %	94,88%	95,54%
2	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	83,5	84	84,5	85	82,8	85,28	85,90	85,28	85,50	85,60	85,70	85,80
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai Sakip	75,7	75,8	75,9	76	76,1	75,32	77,21	79,3	77,21	77,30	77,35	77,40	77,50

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang”, memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu ”Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, target pada tahun 2023 sebesar 91,50% dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 92,18% (capaian 100,74%).
- b. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ada 3 Sasaran, yaitu:
 - 1) Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Cakupan pelayanan dan penerbitan administrasi kependudukan dengan target pada tahun 2023 sebesar 93,52% dan telah tercapai sebesar 92,18% (capaian 94,15%);
 - 2) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target tahun 2023 sebesar 83,50 dan telah tercapai sebesar 85,90 (capaian 102,87%);
 - 3) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Sakip dengan target sebesar 75,8 dan telah tercapai sebesar 77,21.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dijabarkan dalam Indikator Kinerja , yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Uraian	Uraian Indikator	Target Indikator Kinerja						Realisasi Indikator Kinerja						Proyek-si Capaian 2023
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 TRW I	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya perekaman KTP Elektronik	Perekaman KTP Elektronik	99,20 %	99,30%	99,40 %	99,50%	99,60%	99,70%	95,07%	96,93 %	98,13 %	99,50 %	99,60 %	99,70 %	99,40%
2	Meningkatnya kepemilikan KIA pada anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	64,00%	68,00%	71,00%	74,00%	77,00%	80,00%	61,79%	64,31 %	64,72 %	74,00%	77,00%	80,00%	68,00%
3	Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran	Kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun	95,00 %	97,00%	97,20 %	97,50%	97,80%	98,00%	98,81%	97,85 %	98,08 %	97,50 %	97,80 %	98,00 %	98,50%
4	Meningkatnya kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	50%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen RKPD, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir
dalam RKPD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA (TAHUN PELAKSANAAN MUSRENBANG / TAHUN RKPD)		PROYEKSI	
			2020	2021	2022	2023	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023	2023 / 2024
	<u>NIHIL</u>									

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2023

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. **Administrasi Kependudukan**

Dengan jumlah penduduk yang besar, Kota Semarang tentunya membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir. Administrasi kependudukan dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data informasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan, diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, perbankan, imigrasi, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka

kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Seiring dengan perkembangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menghadapi permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai berikut :

- 1) Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) di setiap Kelurahan yang terintegrasi dengan sistem pelaporan akta kematian Disdukcapil. Sehingga setiap ada warga yang meninggal di Kelurahan, maka akan tercatat di sistem yang ada di Kelurahan dan sekaligus dilaporkan dan diterbitkan Akta Kematian oleh Disdukcapil dan diserahkan oleh petugas Kelurahan kepada keluarga almarhum yang meninggal;
- 2) Belum optimalnya pelayanan adminduk bagi penduduk inklusi dan penduduk rentan adminduk.
- 3) Belum optimalnya pengembangan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang berkelanjutan.
- 4) Perlunya peningkatan budaya kerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang berintegrasi dan berorientasi pelayanan prima.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Ketersediaan blangko KTP-el, bergantung pada ketersediaan blangko KTP-el yang ada di pusat (Dirjen Dukcapil) dikarenakan pemerintah daerah tidak dapat melakukan pengadaan blangko KTP-el sendiri;
- b. Belum optimalnya perekaman KTP-el meskipun saat ini telah menerapkan inovasi agar Wajib KTP-el Pemula dapat melakukan perekaman KTP-el sejak usia 16 tahun. Perekaman KTP-el juga telah dilakukan pada waktu

tambahan yaitu pada akhir pekan dan malam hari 3 (tiga) pelayanan akhir pekan per bulannya.

- c. Belum optimalnya penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga kepemilikan KIA di Kota Semarang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini perlu berbagai inovasi yang dilakukan untuk dapat mencapai target capaiannya.
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pemanfaatan aplikasi adminduk online SiD'nOK oleh masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kota Semarang merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk terus meningkatkan kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan kepada masyarakat.
- 2) Masih perlunya sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat secara luas. Pelayanan IKD yang dimulai sejak tahun 2022, dan pada tahun 2023 ini masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara terus menerus, agar capaian IKD di Kota Semarang dapat mencapai target untuk seluruh Wajib KTP-el.
- 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tengah mencanakan program Perekaman KTP-el di Sekolah-Sekolah bagi Pemula yang usianya belum menginjak 17 (tujuh belas) tahun. Perekaman KTP-el bagi Pemula ini bekerjasama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Semarang. Dengan melakukan perekaman KTP-el lebih awal, maka pada saat usia peserta perekaman KTP-el menginjak 17 tahun, mereka dapat langsung mencetak KTP-el di Dinas atau di 16 TPKD Kecamatan. Hal ini merupakan suatu terobosan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan capaian kinerja perekaman KTP-el di Kota Semarang.
- 4) Perlunya penambahan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan dengan OPD-OPD di Kota Semarang atau dengan instansi swasta terkait

pemanfaatan data kependudukan maupun dalam peningkatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.

- 5) Perlunya penambahan jumlah mitra KIA dari yang semula berjumlah 10 (sepuluh) Mitra KIA diharapkan dapat bertambah pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat meningkatkan capaian kepemilikan KIA serta menambah nilai manfaat dari KIA itu sendiri bagi masyarakat di Kota Semarang.

b. Peluang

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
- 2) Tersedianya gedung Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di 16 Kecamatan menjadi peluang dan kekuatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Penggunaan aplikasi pelayanan online SiDenok merupakan peluang bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bagi warga masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke tempat pelayanan dapat menggunakan aplikasi SiDenok untuk pendaftaran dokumen administrasi kependudukan.
- 4) Adanya berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan melalui ekstensifikasi waktu dan jam pelayanan. Diwujudkan melalui pelayanan akhir pekan dan malam hari, pelayanan keliling, perekaman KTP_el ke sekolah SMA dan SMK, penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi warga miskin ekstrem dan lain sebagainya.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dapat diformulasikan tindak lanjut dari isu-isu strategis dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Penerapan Buku Pokok Pemakaman (BPP) yang telah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Kecamatan dan seluruh Kelurahan di Kota Semarang untuk membuat pelaporan BPP setiap ada warga yang meninggal dan selanjutnya Kelurahan dapat membantu untuk penerbitan Akta Kematian bekerjasama dengan Disdukcapil. Penyerahan Akta Kematian disampaikan oleh petugas Kelurahan kepada warga. Disdukcapil melakukan

monitoring dan evaluasi BPP ke Kelurahan dan Kelurahan melaporkan Laporan BPP kepada petugas monev dari Dukcapil atau dapat juga mengirimkan laporan BPP ke Disdukcapil.

- b. Melaksanakan pelayanan keliling perekaman KTP-el dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, difabel, lansia. Pelayanan keliling jemput bola perekaman KTP-el dilakukan ke rumah warga difabel dan lansia yang membutuhkan perekaman serta di Yayasan Sosial, Panti Wredha, Panti Asuhan dan lain-lain.
- c. Mengalihkan pelayanan adminduk dari yang semula pelayanan manual ke pelayanan online yang dilakukan secara bertahap per TPDK Kecamatan. Beberapa TPDK yang sudah dilakukan peralihan pelayanan dari pelayanan manual menjadi full online antara lain TPDK Kecamatan Pedurungan, Tembalang, Banyumanik dan Semarang Barat, menyusul TPDK Kecamatan lainnya yang akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, dalam Pelaksanaan Program Prioritas dalam Visi dan Misi Walikota dan Walikota Semarang periode 2021-2026 di bidang pelayanan publik yaitu pelaksanaan Pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari terus senantiasa dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Pelaksanaan pelayanan Akhir Pekan dan Malam Hari dilaksanakan setiap Hari Sabtu minggu pertama setiap bulan. Jadwal ini dilaksanakan oleh seluruh OPD yang menangani pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menambahkan jadwal khusus tersendiri yaitu setiap Hari Sabtu, minggu ke-3, sehingga pelaksanaan Pelayanan akhir Pekan dan Malam Hari pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan 2 (dua) kali setiap bulan yaitu setiap Hari Sabtu minggu pertama dan minggu ke-3 setiap bulan.
- d. Peningkatan capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil dengan kerjasama penerbitan akta kelahiran dan akta kematian dengan Rumah Sakit baik negeri maupun swasta di Kota Semarang, kerjasama dengan Yayasan Layanan Kematian, kerjasama dengan bidan, pelayanan terintegrasi (Paket 3 in 1).
- e. Implementasi dan internalisasi budaya kerja yang terus menerus ditingkatkan melalui berbagai hal misalnya dengan memulai apel pagi dengan menyanyikan yel-yel, budaya pelayanan 5 S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun. Selain itu juga dengan menetapkan Role Model dan Agen Perubahan, juga dilaksanakan pula pemilihan Pegawai Teladan setiap 3 bulan sekali, yang mekanismenya melalui usulan dari bidang kemudian dari kandidat pegawai teladan yang diusulkan masing-masing bidang dipilih berdasarkan beberapa kriteria yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas tentang Pemilihan Pegawai Teladan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25.475.777.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25.196.059.463	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25.475.777.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				25.196.059.463	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.40%	1.708.980.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas	Persentase Perekaman KTP-el	99.40%	2.398.197.397	
			Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71.00%				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	71.00%		
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	428.000 dokumen	1.371.980.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	428000 dokumen	2.265.591.297	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	6 penduduk	26.300.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6 dokumen	5.207.280	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	107.500 dokumen	26.300.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	107.500 dokumen	2.974.560	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12%	1.036.755.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	870.618.720	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	320.500 dokumen	221.625.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	320.500 dokumen	1.3386.790.737	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	212.000.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	71.947.800	
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 dokumen	11.839.160	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	10 jenis dokumen	197.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 dokumen	60.108.640	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	99.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	51.456.780	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pendaftaran penduduk	12 pelayanan	24.000.000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 dokumen	22.121.520	
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	4 fasilitasi pelayanan	26.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	4 laporan	11.001.520	
2.12.02.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	1 dokumen	0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk				0	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan sosialisasi pendaftaran penduduk	4%	28.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4 laporan	12.957.220	
2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Persentase Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	200%	21.000.000	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	200 dokumen	5.376.520	
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	26.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	9.201.520	
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas	Cakupan pembinaan dan Pengawasan pendaftaran penduduk	12%	26.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	12 laporan	9.201.520	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.20%	679.300.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.20%	482.224.949	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 dokumen	497.500.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 dokumen	367.562.364	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	45.425 dokumen	54.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan	45.425 dokumen	46.176.620	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Cakupan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	3%	311.500.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas	Peristiwa Penting Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan	277.405.680	
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	1 dokumen	22.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	1 dokumen	6.261.984	
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	2 jenis dokumen / formulir / buku	110.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dinas	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 paket	37.311.520	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	118.500.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	108.161.065	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait	Dinas	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 pelayanan	24.000.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan	12 laporan	5.471.520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.02.06	Pencatatan Sipil					Penting terkait Pencatatan Sipil		Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Cakupan fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	4%	21.000.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 laporan	102.689.545	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Cakupan sosialisasi terkait pencatatan sipil	4%	21.000.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4 laporan	0	
2.12.03.2.02.08											
2.12.03.2.02.09	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	100%	21.000.000	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	100%	0	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	63.300.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	6.501.520	
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12%	26.300.000	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	12 laporan	6.501.520	
2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan	Dinas	Jumlah Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai		21.000.000	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota	Dinas			0	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil		Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Sipil yang Dilaksanakan			a dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil					
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2 laporan	16.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Dinas			0	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	804.700.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%	297.352.620	
			Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%				Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%		

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	477.500.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	51.300.310	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	12%	26.500.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 dokumen	6.876.520	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Persentase Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2%	26.000.000	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 laporan	44.423.790	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	21.000.000	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	100%	6.971.520	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 dokumen	21.000.000	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	2 dokumen	6.971.520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kependudukan yang Disusun			
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	186.200.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	194.281.990	
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12%	29.500.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	11.917.280	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah fasilitasi / inovasi pelayanan administrasi kependudukan	4 fasilitasi pelayanan	49.500.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	98.140.150	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Persentase OPD dan lembaga pengguna yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	10%	52.600.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dokumen	9.501.520	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Dinas	Cakupan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi	6%	33.600.000	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi	6 laporan	67.751.520	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.04.2.03.06	Kependudukan		kependudukan			Administrasi Kependudukan		Administrasi Kependudukan			
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas	Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10%	21.000.000	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dinas	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 dokumen	6.971.520	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	120.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	45.298.800	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	22.832.280	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	23.707.280	
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas	Cakupan SDM yang mendapatkan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	4%	51.000.000	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dinas	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 laporan	21.591.520	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	96.400.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	118.907.880	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	96.400.000	Penyusunan Profil Kependudukan	Dinas	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	118.907.880	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 jenis buku	37.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dinas	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2.00	118.907.880	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	22.186.397.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	21.899.376.617	
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%		
			Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	13.650.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	12.971.340	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 dokumen	1.950.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00	819.520	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00	1.308.640	
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	1.608.550	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00	3.720.160	
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	2.315.430	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	2 dokumen	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	1.287.520	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2 dokumen	1.950.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.00	1.911.520	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Administrasi Keuangan SKPD	100%	17.727.692.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100.00	11.182.089.013	
			Pelaporan Keuangan SKPD	100%							
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	17.459.092.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260.00	10.952.023.613	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD	1%	260.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.00	226.202.840	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Laporan keuangan akhir tahun	1%	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1.00	695.200	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Laporan Keuangan Semesteran	12%	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas	Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.00	1.879.840	
2.12.01.2.02.08		Dinas	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1%	2.200.000		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	166.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	24.418.640	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Cakupan sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	166.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.00	24.418.640	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	1.229.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100%	5.960.956.963	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Komponen instalasi listrik yang tersedia	100%	189.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00	33.869.320	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	48.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00	147.675.140	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Peralatan rumah tangga perkantoran	100%	206.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.00	113.539.920	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Logistik kantor	100%	210.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.00	2.233.246.595	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas	Barang cetakan dan penggandaan	100%	210.400.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.00	252.675.081	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Fasilitasi kunjungan tamu	100%	27.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	16.350.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Rapat koordinasi, konsultasi dan koordinasi	100%	127.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00	562.387.880	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Pengelolaan arsip dinamis	100%	52.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.00	61.960.000	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	160.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.00	2.539.253.027	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	402.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	712.016.284	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas	Mebel perkantoran	100%	122.000.000	Pengadaan Mebel	Dinas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50.00	102.439.500	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Peralatan dan mesin	100%	280.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36.00	609.576.784	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	1.725.855.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	2.841.324.637	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	716.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	876.286.578	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jasa pelayanan umum kantor	100%	1.009.855.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	1.965.038.059	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	921.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	Pemeliharaan aset SKPD	100%	1.165.599.740	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	526.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35.00	309.617.980	
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Pemeliharaan mebel	100%	16.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinas	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125.00	18.907.200	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Pemeliharaan peralatan dan mesin	100%	114.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	515.00	404.569.720	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	147.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18.00	352.566.000	

No Rekening	Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan Anggaran 2023					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	118.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2.00	80.938.840	
JUMLAH					25.475.777.000						25.196.059.463

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir melalui proses Musrenbang kabupaten/kota. Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan Renja OPD hasil forum OPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah memperhatikan hasil pembahasan forum OPD atau forum gabungan OPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja OPD, yang meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/OPD.

Untuk Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang tingkat kota disajikan dalam tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<u>NIHIL</u>				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan jangka Panjang yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan jangka menengah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2024. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2020-2024 dengan mengangkat Visi “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, serta pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan arah Kebijakan dan Strategis khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:

- a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pemanfaatan NIK, *database* kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
- d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Prioritas program dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program Prioritas Pembangunan Nasional
Di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tema	Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan
1	Revolusi Mental	Daya rekat sosial dalam rangka kemajemukan	Pemenuhan akta kelahiran untuk anak
2	Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Akses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau sebagai dasar penerbitan dokumen serta penyediaan informasi untuk pelayanan publik

Operasionalisasi Arah Kebijakan dan Strategi Kemendagri pada tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran yang memuat di dalamnya dukungan Kemendagri atas pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), Program Quick Wins, dan Prioritas K/L. Adapun program yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung prioritas tersebut dilaksanakan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pokok-pokok kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

- a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal
- b. Meningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota
- d. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak
- e. Jumlah Kab/Kota dalam pengelolaan KTP-el berbasis NIK dengan perekaman sidik jari
- f. Jumlah Kab/Kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan Provinsi dan Nasional
- g. Terpenuhinya Sarpras SIAK di daerah dan data center kependudukan
- h. Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online

- i. Jumlah daerah yang terfasilitasi bimbingan teknis pendampingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan Sistem informasi Administrasi kependudukan
- j. Jumlah Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun
- k. Terpenuhinya Blangko KTP-el untuk daerah
- l. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- m. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik
- n. Pengendalian dan Pengamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pembangunan ke depan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu, masalah yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan, sampai saat ini data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik, belum seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Semarang memahami untuk kemudian membutuhkan data kependudukan agar dapat mendukung program kerja pada perangkat daerah, sehingga belum banyak perangkat daerah yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam penerapan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, tujuan pembangunan administrasi kependudukan jangka menengah dalam RPJMD 2021-2026 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang. Sedangkan Sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas; dan
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2023, maka disusun strategi pembangunan administrasi kependudukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perluasan Cakupan dan Akses Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Penguatan Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kependudukan;
3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2023, maka arah kebijakan pembangunan bidang administrasi kependudukan adalah :

1. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang cepat, tepat dan akurat;
2. Meningkatkan pembangunan pelayanan publik yang berkualitas di bidang Administrasi Kependudukan;

3. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel;
5. Pengembangan kualitas SDM;
6. Peningkatan dukungan sarana prasarana aparatur.

Beberapa hal pokok yang perlu ditindaklanjuti di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan kebijakan strategis nasional adalah :

1. Dalam rangka pengembangan SAK terpadu adalah penerapan KTP elektronik dengan indikator kabupaten/kota melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk.
2. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan indikator Kementerian/Lembaga dan kabupaten/kota yang koneksitas Kementerian/Lembaga telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan data *warehouse* NIK Nasional.
3. Tersusunnya dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang”

Sedangkan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2023 sebagai berikut :

1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan;
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET 2023
TUJUAN: Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang		
SASARAN: 1. Terpenuhinya hak pelayanan masyarakat Kota Semarang di bidang administrasi kependudukan 2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas 3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	71,00%
	Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	97,20%
	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian, akta perceraian, dan akta perkawinan dari peristiwa kematian, perceraian dan perkawinan yang dilaporkan	100%
	Pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100%
	Perekaman KTP-elektronik	99,40%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH KOTA SEMARANG

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2016, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai Tujuan RPJMD yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Semarang, dengan Indikator: Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP OPD.
3. Meningkatkan program dan kegiatan yang langsung turun ke masyarakat, melalui kegiatan Jemput Bola dan Pelayanan Keliling;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan harus mengikuti aturan yang berlaku, dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal ini besumber dari APBD Kota Semarang dan Silpa Dana Alokasi Khusus (DAK);
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.12.0.0 0.0.00.0 1.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG					23.443.105.241	23.443.105.241	25.196.059.463		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					23.443.105.241	23.443.105.241	25.196.059.463		
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Perekaman KTP-el	99.40 %	99.40 %	99.40 %	2.723.063.237	2.723.063.237	2.398.197.397	APBD	-
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	68.00 %	68.00 %	68.00 %					
2.12.02.2 .01	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk</i>	428.000 Dokumen	428.000 Dokumen	428.000 Dokumen	2.723.063.237	2.723.063.237	2.265.591.297		
2.12.02.2 .01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	9.707.280	9.707.280	5.207.280		
2.12.02.2 .01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	107.500 dokumen	107.500 dokumen	107.500 dokumen	11.074.560	11.074.560	2.974.560		
2.12.02.2 .01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	866.122.560	866.122.560	870.618.720		
2.12.02.2 .01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	319.000 dokumen	319.000 dokumen	319.000 dokumen	1.675.617.737	1.675.617.737	1.386.790.737		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	103.107.800	103.107.800	71.947.800		
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pendaftaran penduduk	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	1 jenis dokumen	11.839.160	11.839.160	11.839.160		
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduksesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	10 jenis dokumen	91.268.640	91.268.640	60.108.640		
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	28.848.040	28.848.040	33.123.040		
2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pendaftaran penduduk	96 pelayanan	96 pelayanan	96 pelayanan	17.846.520	17.846.520	22.121.520		
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	2 Fasilitasi Pelayanan	2 Fasilitasi Pelayanan	2 Fasilitasi Pelayanan	11.001.520	11.001.520	11.001.520		
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	7.251.520	7.251.520	9.201.520		
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan pembinaan dan Pengawasan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	7.251.520	7.251.520	9.201.520		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase kepemilikan akta kelahiran	97.20 %	97.20 %	97.20 %	506.296.429	506.296.429	482.224.949	APBD	-

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	45.425 dokumen	45.425 dokumen	45.425 dokumen	367.155.804	367.155.804	367.562.364		
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	45.425 dokumen	45.425 dokumen	45.425 dokumen	46.176.620	46.176.620	46.176.620		
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	100%	100%	100%	277.405.680	277.405.680	277.812.240		
2.12.03.2.01.02	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.261.984	6.261.984	6.261.984		
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah jenis pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	37.311.520	37.311.520	37.311.520		
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	113.411.065	113.411.065	108.161.065		
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipi	Jumlah pelayanan secara aktif, layanan publik akhir pekan dan layanan terpadu malam hari terkait pencatatan sipil	12 laporan	12 laporan	12 laporan	9.746.520	9.746.520	5.471.520		
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Cakupan fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	103.664.545	103.664.545	102.689.545		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	6.501.520	6.501.520	6.501.520		
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	6.501.520	6.501.520	6.501.520		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	81.00 %	81.00 %	81.00 %	346.827.620	346.827.620	297.852.620	APBD	-
		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%					
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	100%	51.300.310	51.300.310	51.300.310		
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase pengolahan dan penyajian data kependudukan	100%	100%	100%	6.876.520	6.876.520	6.876.520		
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	100%	100%	100%	44.423.790	44.423.790	44.423.790		
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	100%	100%	100%	6.971.520	6.971.520	6.971.520		
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.971.520	6.971.520	6.971.520		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan								
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	255.576.990	255.576.990	194.281.990		
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Adminduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	8.017.280	8.017.280	11.917.280		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan fasilitasi / inovasi pelayanan administrasi kependudukan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	98.140.150	98.140.150	98.140.150		
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	11.376.520	11.376.520	9.501.520		
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi adminduk	100%	100%	100%	131.251.520	131.251.520	67.751.520		
2.12.04.2.03.05	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	6.791.520	6.791.520	6.971.520		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	32.798.800	32.798.800	45.298.800		
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi adminduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12.707.280	12.707.280	23.707.280		
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	20.091.520	20.091.520	21.591.520		
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah	100%	100%	100%	121.157.880	121.157.880	118.907.880	APBD	-
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	121.157.880	121.157.880	118.907.880		
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	2 Jenis buku	2 Jenis buku	2 Jenis buku	121.157.880	121.157.880	118.907.880		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan laporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	19.745.760.075	19.745.760.075	21.899.376.617	APBD	-
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%					
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%					

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Pelaporan SKPD	100%	100%	100%	7.380.871	7.380.871	12.971.340		
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	819.520	819.520	819.520		
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.308.640	1.308.640	1.308.640		
2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.608.550	1.608.550	1.608.550		
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.160	3.720.160	3.720.160		
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.315.430	2.315.430	2.315.430		
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.287.520	1.287.520	1.287.520		
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.911.520	1.911.520	1.911.520		
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD	864 orang/bulan 864 orang/bulan	864 orang/bulan 864 orang/bulan	864 orang/bulan 864 orang/bulan	12.268.325.745 12.268.325.745	12.268.325.745 12.268.325.745	11.182.089.013 11.182.089.013		
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	864 orang/bulan	864 orang/bulan	864 orang/bulan	12.038.492.241	12.038.492.241	10.952.023.613		
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	226.202.840	226.202.840	226.202.840		
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	695.200	695.200	695.200		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan / semesteran	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.879.840	1.879.840	1.879.840		
2.12.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.055.624	1.055.624	1.287.520		
2.12.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD</i>	100%	100%	100%	24.418.640	24.418.640	24.418.640		
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	100 orang	100 orang	24.418.640	24.418.640	24.418.640		
2.12.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD</i>	100%	100%	100%	2.614.146.296	2.614.146.296	5.960.956.963		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	69.046.350	69.046.350	33.869.320		
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	159.558.307	159.558.307	147.675.140		
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	121.234.420	121.234.420	113.539.920		
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	473.262.145	473.262.145	2.233.246.595		
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	181.008.407	181.008.407	252.675.081		
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	14.850.000	14.850.000	16.350.000		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	401.826.880	401.826.880	562.387.880		
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	61.960.000	61.960.000	61.960.000		
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.131.399.787	1.131.399.787	2.539.253.027		
2.12.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>663.910.949</i>	<i>663.910.949</i>	<i>712.016.284</i>		
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100 unit	100 unit	100 unit	102.789.500	102.789.500	102.439.500		
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	36 unit	36 unit	36 unit	561.121.449	561.121.449	609.576.784		
2.12.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>2.949.286.859</i>	<i>2.949.286.859</i>	<i>2.841.324.637</i>		
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	983.898.800	983.898.800	876.286.578		
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.965.388.059	1.965.388.059	1.965.038.059		
2.12.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemeliharaan aset SKPD</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>1.348.085.566</i>	<i>1.348.085.566</i>	<i>1.165.599.740</i>		

KODE REKENING	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	35 unit	35 unit	35 unit	389.990.660	389.990.660	308.617.980		
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	125 unit	125 unit	125 unit	18.907.200	18.907.200	18.907.200		
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	450 unit	450 unit	450 unit	370.065.650	370.065.650	404.569.720		
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	18 unit	18 unit	18 unit	352.566.000	352.566.000	352.566.000		
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	80.938.840	80.938.840	80.938.840		
JUMLAH						23.443.105.241	23.443.105.241	25.196.059.463		

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

5.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 ini, pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 ini berpedoman pada program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra periode 2021-2026; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 pada Triwulan Ke-4 (empat) Tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja Tahun 2023 ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

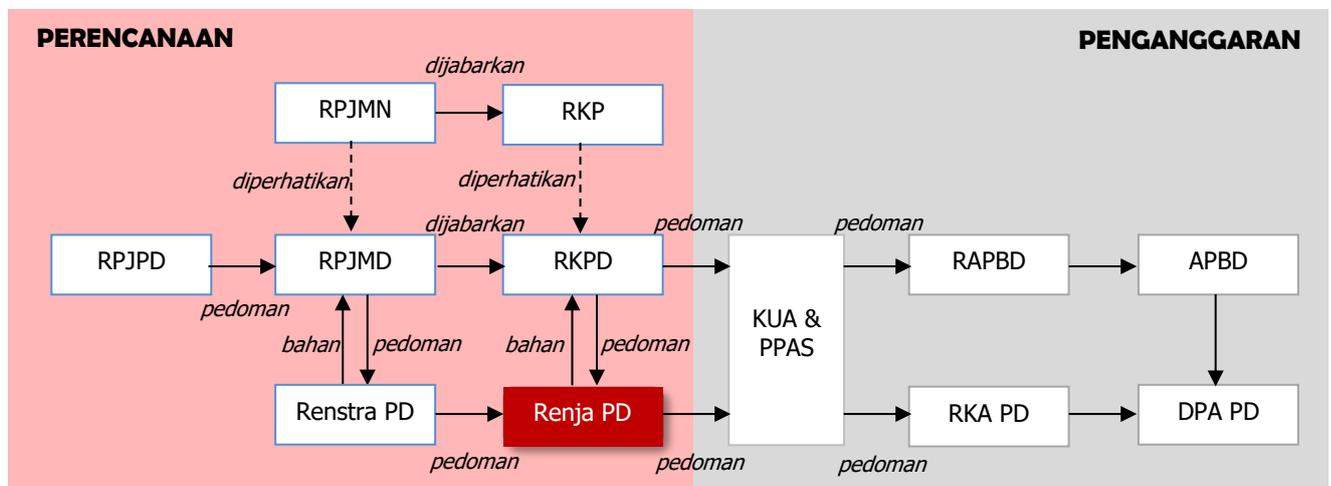
16. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (2) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
 - q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pealporan kinerja SKPD	100,00 %	100,00%	100,00%	69,47%	69,47 %	100,00 %	69,47 %	69,47 %	69,47 %
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 %	100,00%	100,00%	80,03%	80,03 %	100,00 %	73,31 %	73,31 %	73,31 %
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00 %	100,00 %	87,50 %	87,50 %	100,00 %	87,50 %	87,50 %	87,50 %
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	20,00%
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	20,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	20,00%
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	20,00%
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5 Dok	2 Dok	1 Dok	0 Dok	0,00 %	1 Dok	0 Dok	0,00 %	0,00%
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15 Dok	6 Dok	3 Dok	3 Dok	100,00 %	3 Dok	3 Dok	100,00 %	20,00%
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00 %	100,00%	100,00 %	51,43 %	51,43 %	100,00 %	51,43 %	51,43 %	51,43 %
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bln	14 Bln	14 Bln	8 Bln	57,14 %	14 Bln	8 Bln	57,14 %	57,14 %
5.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00%	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Dok	2 Dok	1 Dok	0 Dok	0,00 %	1 Dok	0 Dok	0,00 %	0,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00%	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
5.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %	20,00%
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 %	100,00 %	100,00 %	70,13 %	70,13 %	100,00 %	72,94 %	72,94 %	72,94%
5.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	17 jenis	17 jenis	17 jenis	10 jenis	58,82 %	17 jenis	10 jenis	58,82 %	58,82%
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	11 Jenis	73,33 %	15 Jenis	11 Jenis	73,33 %	73,33%
5.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	20 jenis	20 jenis	13 jenis	65,00 %	20 jenis	13 jenis	65,00 %	65,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	10 jenis	83,33 %	12 jenis	10 jenis	83,33 %	83,33 %
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	9 jenis	75,00 %	12 jenis	9 jenis	75,00 %	75,00 %
5.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	500 Orang	500 Orang	500 Orang	278 Orang	55,60 %	500 Orang	255 Orang	51,00 %	51,00 %
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50,00 %	12 bulan	6 bulan	50,00 %	50,00 %
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100,00 %	10 Unit	10 Unit	100,00 %	100,00 %
5.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00%	75,00%	75,00%
5.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00 %	8 Unit	6 Unit	75,00 %	75,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Internet, Air, Listrik dan Media Massa	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	12 bulan	6 bulan	50,00%	50,00%
5.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Admistrasi, Kebersihan, Keamanan, Caraka, Supir dan IT Perkantoran	96 Orang	96 Orang	96 Orang	48 Orang	50,00%	96 Orang	48 Orang	50,00%	50,00%
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,30%	95,30%	95,30%
5.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas atau Operasional	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%	100,00%
5.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan SKPD	85 Unit	85 Unit	85 Unit	85 Unit	100,00%	85 Unit	69 Unit	81,18 %	81,18%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
5.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komponen Peralatan Gedung Kantor yang Diperbaiki dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Diperbaiki	82 Unit	82 Unit	82 Unit	82 Unit	100,00%	82 Unit	82 Unit	100,00%	100,00%
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1822 m2	1822 m2	1822 m2	1822 m2	100,00%	1822 m2	1822 m2	100,00%	100,00%
5.01.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.39 %	0.50 %	0.51 %	98,00%	0.50 %	0.39%	122.00%	122.00%
5.01.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.39 %	0.50 %	0.51 %	98,00%	0.50 %	0.39%	122.00%	122.00%
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	30 Keg	12 Keg	6 Keg	6 Keg	100,00%	6 Keg	3 Keg	50,00%	10,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Memfasilitasi dalam peningkatan pengelolaan program Keluarga Berencana bersama mitra terkait	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	20,00%
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Ketersediaan Materi Pendidikan Kependudukan	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	20,00%
5.01.02.2.01.09	Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan di sektor formal (dasar dan menengah) & informal	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	20,00%
5.01.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Memfasilitasi pembinaan Pendidikan Kependudukan di Jalur Formal dan Informal	15 Keg	6 Keg	3 Keg	2 Keg	66,67%	3 Keg	2 Keg	66,67%	13,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.02.2.01.13	Sub Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Honor Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	50,00%
		Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis	10 Keg	4 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	1 Keg	50,00%	10,00%
5.01.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Rapat Evaluasi Bulanan Program Bangga Kencana Rapat persiapan kegiatan pada sistem informasi data pengendalian penduduk	20 Keg	8 Keg	4 Keg	4 Keg	100,00%	4 Keg	2 Keg	50,00%	10,00%
5.01.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.39 %	0.50 %	0.51 %	98,00%	0.50 %	0.39%	122.00%	122.00%
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	Workshop penetapan parameter kependudukan	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	20,00%
5.01.02.2.02.05	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen dampak kependudukan	5 Dok	3 Dok	2 Dok	2 Dok	100,00%	1 Dok	1 Dok	100,00%	20,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terimplementasikannya Sistim Informasi data Pengendalian Penduduk	10 Keg	4 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	2 Keg	100,00%	20,00%
5.01.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Cetak blangko R/1/PUS, R/1/KB, R/2/KB	15 Cetak	6 Cetak	3 Cetak	2 Cetak	66,67%	3 Cetak	2 Cetak	66,67%	13,33%
		Transport Kegiatan dalam kota	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%
5.01.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pelatihan Updating Pelaporan Dallap dan Pelkon	5 Keg	2 Keg	1 Keg	1 Keg	100,00%	1 Keg	1 Keg	100,00%	20,00%
		Pelatihan Updating data PK 2021, Sarasehan Tingkat Kota dan Kecamatan, Desiminasi PK 2021	20 keg	8 Keg	4 Keg	2 Keg	50,00%	4 Keg	2 Keg	50,00%	10,00%
5.01.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Dallap dan Pelkon	2100 Buku	840 Buku	420 Buku	300 Buku	71,43%	420 Buku	300 Buku	71,43%	14,28%
		Honor Non ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	50,00%
5.01.02.2.02.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	10 Keg	4 Keg	2 Keg	2 Keg	100,00%	2 Keg	2 Keg	100,00%	20,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
5.01.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2.00	1.75	2.00	1.75	112.50%	2.00	1.75	112.50%	112.50%
5.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77.44 %	76.08 %	77.04 %	73.69 %	100 %	77.14%	77.20%	100.07%	99.69%
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Laporan dan Dokumentasi	45 Keg	18 Keg	9 Keg	5 Keg	55,56%	9 Keg	5 Keg	55,56%	11,11%
5.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan dan Dokumentasi	40 Keg	16 Keg	8 Keg	4 Keg	50,00%	8 Keg	4 Keg	50,00%	10,00%
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Laporan dan dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%
5.01.03.2.01.04	Sub Kegiatan	Laporan dan Dikumentasi	40 Keg	16 Keg	8 Keg	4 Keg	50,00%	8 Keg	4 Keg	50,00%	10,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										
5.01.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%
5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	terwujudnya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%
5.01.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPk	Tercapainya Kegiatan Pendayagunaan Penyuluh KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%
5.01.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77.44%	76.08 %	77.04 %	73.69 %	100 %	77.14%	77.20%	100.07%	99.69%
5.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan	Laporan dan Dokumentasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB										
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%
5.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%
5.01.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need	7.00 %	9.13 %	9.08 %	11.26 %	75,99 %	8.56%	8.49%	100,82%	78,71%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	10.80 %	7.91 %	11.20 %	4.49 %	159.91 %	11.10%	4.44 %	160.00%	158.89%
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tersedianya Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
5.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Meningkatnya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%
5.01.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya dukungan ayoman kompikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%
5.01.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%
5.01.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Meningkatnya pembinaan pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
5.01.03.2.03.09	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promkes dan Konseling Kespro, serta hak-hak reproduksi di Faskes kelompok Kegiatan	240 Keg	96 Keg	48 Keg	40 Keg	83,33%	48 Keg	40 Keg	83,33%	16,67%
5.01.03.2.03.10	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pelayanan KB, Kespro dan kualitas pelayanan KB	240 Keg	96 Keg	48 Keg	40 Keg	83,33%	48 Keg	40 Keg	83,33%	16,67%
5.01.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terpenuhinya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak di Kota Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	80,00%	80,00%	80,00%
5.01.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	Meningkatnya Kesertaan KB Pria di Kota Semarang	30 Keg	12 Keg	6 Keg	4 Keg	66,67%	6 Keg	4 Keg	66,67%	13,33%
5.01.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat	Cakupan Peserta KB Aktif	77.44%	76.08 %	77.04 %	73.69 %	100 %	77.14%	77.20%	100.07%	99.69%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
5.01.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Laporan dan Dokumentasi	16 Kec	16 Kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%
5.01.03.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB	<i>Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>	16 kec	16 kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%
5.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	72.90 %	60.02 %	39.16 %	65.24 %	60.12%	69.87%	116.22%	115.64%
5.01.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	72.90 %	60.02 %	39.16 %	65.24 %	60.12%	69.87%	116.22%	115.64%
5.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
5.01.04.2.01.03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	100,00%
5.01.04.2.01.04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	jumlah kelompok	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	100,00%
5.01.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16 Kec	16 kec	16 Kec	16 Kec	100,00%	16 Kec	16 Kec	100,00%	100,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
5.01.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	100,00%
5.01.04.2.01.08	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	100,00%
5.01.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.42 %	72.90 %	60.02 %	39.16 %	65.24 %	60.12%	69.87%	116.22%	115.64%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
5.01.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	keaktifan anggota kelompok binaan	162 Kel	162 Kel	162 Kel	162 Kel	100,00%	162 Kel	162 Kel	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2023

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang memiliki 4 Program, 14 Kegiatan, dan 64 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah:

- a. **Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD** dengan target tahun 2023 sebesar 100,00 % dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 69,47 %.
- b. **Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD** dengan target tahun 2023 sebesar 100,00 % dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 73,31 %.

Pada program ini terdapat 6 kegiatan, dimana 6 kegiatan tersebut realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sudah mencapai lebih dari 50,00%.

2. Program Pengendalian Penduduk

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun” dengan target tahun 2023 sebesar 0,50% dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 0,39% (capaian 122,00%). Indikator ini mengalami peningkatan capaian jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 98,03% di tahun 2022 menjadi 122,00% di tahun 2023 Triwulan II.

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)” capaian indikator masih tetap, yaitu pada tahun 2022 sebesar 1,75 (112,50%) dan pada tahun 2023 Triwulan II sebesar 1,75 (112,50%).

Pada program ini terdapat kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); serta Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB; yang mana kegiatan tersebut memiliki indikator kinerja outcome “Cakupan Peserta KB Aktif”. Target indikator tersebut tahun

2023 sebesar 77.14% dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 77,20% (capaian 100,07%).

Terdapat pula kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja outcome “Cakupan PUS Unmeet need” dan “Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)”. Target indikator “Cakupan PUS Unmeet need” tahun 2023 sebesar 8,56% dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 8,49% (capaian 100,82%). Sedangkan Target indikator “Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)” tahun 2023 sebesar 11.10% dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 4,44% (capaian 160,00%).

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif” dengan target tahun 2023 sebesar 60.12% dan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 69.87% (capaian 116,22%).

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Dana Alokasi Khusus Fisik. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35.105.279.724	9.317.106.192	26,54%
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.688.790.774	3.929.232.253	36,8%
2.14.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.935.720	1.467.550	7,4%
2.14.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.476.400	414.750	11,9%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.14.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.775.200	0	0,0%
2.14.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.229.060	0	0,0%
2.14.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.775.200	1.052.800	59,3%
2.14.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.229.060	0	0,0%
2.14.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.450.800	0	0,0%
2.14.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.686.166.524	3.357.824.346	50,2%
2.14.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.420.740.724	3.254.204.346	50,7%
2.14.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.323.400	0	0,0%
2.14.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.411.200	0	0,0%
2.14.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	259.680.000	103.620.000	39,9%
2.14.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.011.200	0	0,0%
2.14.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.199.424.297	127.250.715	10,6%
2.14.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.580.477	392.000	1,8%
2.14.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.404.444	3.346.050	5,9%
2.14.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.841.369	10.577.620	11,6%
2.14.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	227.456.276	47.457.820	20,9%
2.14.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.425.262	1.838.825	2,9%
2.14.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	78.750.000	7.571.400	9,6%
2.14.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.966.469	56.067.000	12,2%
2.14.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	0	0,0%
2.14.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.406.303	0	0,0%
2.14.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	629.406.303	0	0,0%
2.14.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	484.604.000	192.214.451	39,7%
2.14.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.551.000	32.321.758	22,2%
2.14.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.053.000	159.892.693	47,2%
2.14.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.669.253.930	250.475.191	15,0%
2.14.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	9.294.570	25,6%
2.14.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	592.981.190	148.420.621	25,0%
2.14.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.744.400	7.687.000	6,9%
2.14.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	929.210.160	85.073.000	9,2%
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.160.099.460	283.687.322	24,5%
2.14.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan	381.450.670	96.935.100	25,4%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
2.14.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	47.070.200	13.435.100	28,5%
2.14.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	15.235.100	0	0,0%
2.14.02.2.01.07	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	36.310.100	10.200.000	28,1%
2.14.02.2.01.10	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	225.610.880	73.300.000	32,5%
2.14.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	57.224.390	0	0,0%
2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	778.648.790	186.752.222	24,0%
2.14.02.2.02.01	Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan	6.758.760	0	0,0%
2.14.02.2.02.05	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	45.468.980	0	0,0%
2.14.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	1.950.000	0,0%
2.14.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	228.194.300	115.043.762	50,4%
2.14.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	213.800.000	2.250.000	1,1%
2.14.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	200.622.500	67.508.460	33,6%
2.14.02.2.02.14	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	19.604.250	0	0,0%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	13.855.033.780	2.761.665.082	19,9%
2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.418.284.560	280.102.645	19,7%
2.14.03.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	277.816.750	37.850.000	13,6%
2.14.03.2.01.02	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	13.850.800	12.507.271	90,3%
2.14.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	413.817.010	79.466.351	19,2%
2.14.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	208.000.000	39.360.000	18,9%
2.14.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	424.800.000	104.469.023	24,6%
2.14.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	6.450.000	8,1%
2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.717.158.000	566.856.000	33,0%
2.14.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	60.000.000	0	0,00
2.14.03.2.02.03	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	90.175.000	37.200.000	41,3%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.14.03.2.02.04	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.566.983.000	529.656.000	33,8%
2.14.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	7.848.661.345	1.367.759.282	17,4%
2.14.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	62.100.000	3.225.000	5,2%
2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.124.280.000	1.127.322.000	27,3%
2.14.03.2.03.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	34.700.000	0	0,0%
2.14.03.2.03.06	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.605.920.496	55.678.051	2,1%
2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	88.100.000	12.250.000	13,9%
2.14.03.2.03.09	Sub Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	298.907.000	128.094.231	42,9%
2.14.03.2.03.10	Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	112.908.689	0	0,0%
2.14.03.2.03.11	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	386.445.160	15.190.000	3,9%
2.14.03.2.03.13	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria	135.300.000	26.000.000	19,2%
2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.870.929.875	546.947.155	19,1%
2.14.03.2.04.02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	3.000.000	0,0%
2.14.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	2.861.929.875	543.947.155	19,0%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9.401.355.710	2.342.521.535	24,9%
2.14.04.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	9.108.517.360	2.233.742.304	24,5%
2.14.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	425.297.040	1.999.625	0,5%
2.14.04.2.01.03	Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40.050.000	24.015.000	60,0%
2.14.04.2.01.04	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	329.199.970	171.385.000	52,1%
2.14.04.2.01.05	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.055.000.000	1.886.342.679	23,4%
2.14.04.2.01.07	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	258.970.350	150.000.000	57,9%
2.14.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan	292.838.350	108.779.231	37,1%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2.14.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	292.838.350	108.779.231	37,1%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program, dan 14 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang adalah sebesar Rp 35.105.279.724,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 9.317.106.192,- (26,54%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 25.788.173.532,- (73,46%).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2023
Tujuan: Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1,75	1,75	1,75
Sasaran: Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	Cakupan PUS Unmet need	7.00%	9.08%	8.56%	8.04%	7.52%	7.00%	10.89%	9.13%	8,49%	8,49%
	Persentase Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.20%	11.20%	11.10%	11.00%	10.90%	10.80%	19.63%	7.91%	4,44%	4.44%
	Cakupan Peserta KB Aktif	77.04%	77.04%	77.14%	77.24%	77.34%	77.44%	73.49%	76.08%	77,20%	77,20%
	Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.39%	0,39%	0.32%
Sasaran: Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.02%	60.02%	60.12%	60.22%	60.32%	60.42%	39.39%	72.90%	69,87%	69,87%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang”** memiliki satu indikator kinerja yaitu “Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)”, target sebesar 2.00 telah mencapai target, dengan realisasi sebesar 1.75 (capaian 114,28%);
- b. Sasaran **“Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB”** memiliki 4 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Cakupan PUS Unmet Need” telah mencapai target sebesar 8,56%, dengan realisasi sebesar 8,49% (capaian sebesar 100,82%);
 - 2) Indikator “Persentase Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (DO)” telah mencapai target sebesar 11,10%, dengan realisasi sebesar 4.44% (capaian sebesar 160%);
 - 3) Indikator “Cakupan Peserta KB Aktif” telah mencapai target sebesar 77.14%, dengan realisasi sebesar 77,20% (capaian sebesar 100,08 %).

4) Indikator “Cakupan PUS yang istrinya <20 tahun” telah mencapai target sebesar 0,50%, dengan realisasi sebesar 0,39% (capaian sebesar 122,00%).

c. Sasaran “**Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang**” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif” telah mencapai target sebesar 60,12%, dengan realisasi sebesar 69,87% (capaian sebesar 116,22%);

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

No	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
1	Lebih meningkatkan penanganan stunting pada keluarga yang beresiko stunting di Kota Semarang	<p>Mengoptimalkan langkah preventif (pencegahan) anak beresiko stunting melalui edukasi dan pendampingan pada calon pengantin (catin), ibu hamil, ibu bersalin / pasca salin dan baduta</p> <p>Meningkatkan pengetahuan kader TPK tentang pentingnya 1000 HPK, sehingga dalam pendampingan ke masyarakat yang mempunyai anak beresiko stunting dapat berjalan sesuai harapan yaitu menurunnya prevalence stunting</p>

No	Permasalahan	Upaya Tindak Lanjut
		Memberikan bahan stimulan makanan bergizi DAHSAT dan memberikan edukasi serta praktek memasak menu bergizi untuk pencegahan anak beresiko stunting
2	Lebih meningkatkan Sosialisasi Ketahanan Keluarga	Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi tentang Ketahanan Keluarga melalui Penguatan Poktan Tribina, PIK Remaja dan UPPKA di Tingkat Kecamatan se-Kota Semarang
3	Lebih meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB	Jaminan Ketersediaan Alokasi dan Sarana Penunjang
		Peningkatan kompetensi petugas pelayanan KB
		Peningkatan frekuensi pelayanan KB
		Sosialisasi, promosi, dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				34.135.380.449	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				34.135.380.449	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				10.421.787.021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				10.421.787.021	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.622.560	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.622.560	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	836.080	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	836.080	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	904.320	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	904.320	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.060.320	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.060.320	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.055.040	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.055.040	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1.060.320	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1.060.320	

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.706.480	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	2.706.480	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.321.813.428	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.321.813.428	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdalduk KB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.098.857.678	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdalduk KB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.098.857.678	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	527.750	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	527.750	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.008.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.008.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	221.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	221.120.000	
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	300.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	300.000	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.090.018.450	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.090.018.450	

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdalduk KB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.580.477	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdalduk KB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.580.477	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdalduk KB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.257.844	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disdalduk KB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	49.257.844	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disdalduk KB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	90.841.369	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disdalduk KB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	90.841.369	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdalduk KB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	173.242.222	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disdalduk KB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	173.242.222	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdalduk KB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	63.425.262	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disdalduk KB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	63.425.262	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	96.525.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	96.525.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	395.146.276	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	395.146.276	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disdalduk KB	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	200.000.000	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				738.760.573	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				738.760.573	

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdalduk KB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	738.760.573	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disdalduk KB	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	738.760.573	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				528.864.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				528.864.600	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	145.551.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	145.551.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	140 Laporan	383.313.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disdalduk KB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	140 Laporan	383.313.600	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.734.707.410	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.734.707.410	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdalduk KB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdalduk KB	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdalduk KB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	592.981.190	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disdalduk KB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	592.981.190	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdalduk KB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	202 Unit	109.108.080	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disdalduk KB	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	202 Unit	109.108.080	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdalduk KB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	996.299.960	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disdalduk KB	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	996.299.960	
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				1.115.571.020	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				1.115.571.020	

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				309.244.509	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				309.244.509	
05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	24.735.100	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	24.735.100	
06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	2 Dokumen	14.900.000	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	2 Dokumen	14.900.000	
07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	13.904.139	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	13.904.139	
10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	12 Laporan	198.480.880	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	12 Laporan	198.480.880	
15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	57.224.390	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	57.224.390	
2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				806.326.511	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				806.326.511	
01	Perumusan Parameter Kependudukan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	6.758.760	Perumusan Parameter Kependudukan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	6.758.760	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kota Semarang	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	25.908.380	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kota Semarang	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	25.908.380	
09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	16 Laporan	64.200.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	16 Laporan	64.200.000	
11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	16 Dokumen	281.282.621	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	16 Dokumen	281.282.621	
12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	211.550.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	211.550.000	
13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	197.022.500	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	197.022.500	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2 Laporan	19.604.250	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2 Laporan	19.604.250	
III	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				13.300.811.626	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				13.300.811.626	
2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.475.154.760	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.475.154.760	
01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Semarang	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	4 Organisasi	338.246.750	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Semarang	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	4 Organisasi	338.246.750	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPd						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	13.850.800	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	13.850.800	
04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruan	4 Dokumen	410.257.210	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruan	4 Dokumen	410.257.210	
06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Laporan	208.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Laporan	208.000.000	
07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	16 Laporan	424.800.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	16 Laporan	424.800.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
08	Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	16 Laporan	80.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	16 Laporan	80.000.000	
2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.694.523.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.694.523.000	
01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Semarang	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	16 Organisasi	60.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kota Semarang	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	16 Organisasi	60.000.000	
03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Laporan	81.445.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Laporan	81.445.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Semarang	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1680 Orang	1.553.078.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Semarang	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1680 Orang	1.553.078.000	
2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				7.293.354.119	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				7.293.354.119	
01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan	62.100.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan	62.100.000	
03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	830 Orang	4.117.905.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	830 Orang	4.117.905.000	
04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4 Laporan	16.500.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kota Semarang	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4 Laporan	16.500.000	
06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	16 Unit	2.321.732.163	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	16 Unit	2.321.732.163	
08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	82.470.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	82.470.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	36 Orang	289.530.202	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	36 Orang	289.530.202	
10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang	108.008.689	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang	108.008.689	
11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Laporan	201.808.065	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Semarang	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Laporan	201.808.065	
13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Semarang	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	75 Orang	93.300.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Semarang	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	75 Orang	93.300.000	
2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2.837.779.747	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2.837.779.747	7
02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	16 Dokumen	9.000.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	16 Dokumen	9.000.000	
03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Semarang	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	34 Kampung	2.828.779.747	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kota Semarang	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	34 Kampung	2.828.779.747	

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			Berencana) di Kampung KB					Berencana) di Kampung KB			
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				9.297.210.782	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				9.297.210.782	
2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				9.052.952.232	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				9.052.952.232	
02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Unit	362.000.880	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Unit	362.000.880	
03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	31.155.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	31.155.000	
04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40 Orang	328.416.722	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40 Orang	328.416.722	
05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	Kota Semarang	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	3479 Orang	8.055.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	Kota Semarang	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan	3479 Orang	8.055.000.000	

RANCANGAN PERUBAHAN RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 Laporan	276.379.630	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 Laporan	276.379.630	
2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				244.258.550	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				244.258.550	
02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	244.258.550	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	244.258.550	

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Tujuh Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.

- 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:

- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan angka kelahiran total”

dengan indikator tujuan **“Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang yaitu **“Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Cakupan PUS Unmet need;
- b. Persentase Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO);
- c. Cakupan Peserta KB Aktif;
- d. Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun;

Dan sasaran **“Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang”** dengan indikator sasaran:

- a. Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang
Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan angka kelahiran total	Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,00
SASARAN : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB dan alat obat kontrasepsi, pembinaan KB dan kesehatan reproduksi serta pemenuhan sarana prasarana KB	Cakupan PUS Unmet need	8,56%,
	Persentase Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	11.10%
	Cakupan Peserta KB Aktif	77.14%
	Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun	0.50%
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60.12%
SASARAN : Meningkatnya keluarga sejahtera di Kota Semarang		

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA
SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)” dan indikator sasaran “Cakupan PUS Unmet need; Persentase Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO); Cakupan Peserta KB Aktif; Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun; Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					19.905.166.724	20.268.499.724	34.135.380.449		
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	10.864.594.775	10.688.790.774	10.421.787.021		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %					
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	100 %	100 %	19.935.720	19.935.720	7.622.560		-
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.476.400	3.476.400	836.080	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.775.200	1.775.200	904.320	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.229.060	2.229.060	1.060.320	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.775.200	1.775.200	1.055.040	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.229.060	2.229.060	1.060.320	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	8.450.800	8.450.800	2.706.480	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00 %	6.743.228.184	6.686.166.524	6.321.813.428		
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.420.740.724	6.420.740.724	6.098.857.678	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.323.400	2.323.400	527.750	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.411.200	1.411.200	1.008.000	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	316.680.000	259.680.000	221.120.000	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2.072.860	2.011.200	300.000	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%	1.125.847.828	1.199.424.297	1.090.018.450		
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	21.580.477	21.580.477	21.580.477	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	56.404.444	56.404.444	49.257.844	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	90.841.369	90.841.369	90.841.369	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	227.456.276	227.456.276	173.242.222	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	63.425.262	63.425.262	63.425.262	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78.750.000	78.750.000	96.525.000	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	387.390.000	460.966.469	395.146.276	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	629.406.303	629.406.303	738.760.573		
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	629.406.303	629.406.303	738.760.573	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	658.359.300	484.604.000	528.864.600		
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	145.551.000	145.551.000	145.551.000	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	140 Laporan	140 Laporan	140 Laporan	512.808.300	339.053.000	383.313.600	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	1.687.817.440	1.669.253.930	1.734.707.410		
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit	79 Unit	79 Unit	611.544.700	592.981.190	592.981.190	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	202 Unit	202 Unit	202 Unit	110.744.400	110.744.400	109.108.080	APBD Kota Semarang	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	929.210.160	929.210.160	996.299.960	APBD Kota Semarang	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	684.178.460	808.499.460	1.115.571.020		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	337.550.670	381.450.670	309.244.509		
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39.270.200	47.070.200	24.735.100	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Kependudukan Jalur Pendidikan Formal								
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	12.735.100	15.235.100	14.900.000	APBD Kota Semarang	
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	36.310.100	36.310.100	13.904.139	APBD Kota Semarang	
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	198.810.880	225.610.880	198.480.880	APBD Kota Semarang	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.424.390	57.224.390	57.224.390	APBD Kota Semarang	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun	0.50 %	0.50 %	0.50 %	346.627.790	427.048.790	806.326.511		
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.758.760	6.758.760	6.758.760	APBD Kota Semarang	
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.468.980	45.468.980	25.908.380	APBD Kota Semarang	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	0	0	64.200.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	171.606.300	228.194.300	281.282.621	APBD Kota Semarang	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.900.000	22.400.000	211.550.000	APBD Kota Semarang, DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	86.289.500	104.622.500	197.022.500	APBD Kota Semarang, DAK Non Fisik-BOKB-KB	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	17.604.250	19.604.250	19.604.250	APBD Kota Semarang	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)	2,00	2,00	2,00	7.470.351.779	7.784.853.780	13.300.811.626		
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan peserta KB Aktif	77,14 %	77,14 %	77,14 %	404.836.560	435.484.560	1.475.154.760		
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	4 Organisasi	4 Organisasi	157.816.750	157.816.750	338.246.750	APBD Kota Semarang, DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.850.800	13.850.800	13.850.800	APBD Kota Semarang	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	233.169.010	263.817.010	410.257.210	APBD Kota Semarang, DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	0	0	208.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	0	0	424.800.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)								
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	0	0	80.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan peserta KB Aktif	77,14 %	77,14 %	77,14 %	1.264.825.000	1.303.158.000	1.694.523.000		
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	16 Organisasi	16 Organisasi	16 Organisasi	0	0	60.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	90.175.000	90.175.000	81.445.000	APBD Kota Semarang	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1680 Orang	1680 Orang	1680 Orang	1.174.650.000	1.212.983.000	1.553.078.000	APBD Kota Semarang, DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS Unmeet need	8,56 %	8,56 %	8,56 %	2.922.426.344	3.111.281.345	7.293.354.119		
		Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)	11,10 %	11,10 %	11,10 %					
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	0	0	62.100.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	830 Orang	830 Orang	830 Orang	138.350.000	138.350.000	4.117.905.000	APBD Kota Semarang, DAK Non Fisik-BOKB-KB	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	34.700.000	34.700.000	16.500.000	APBD Kota Semarang	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	16 Unit	16 Unit	16 Unit	2.013.379.494	1.949.870.496	2.321.732.163	APBD Kota Semarang, DAK Fisik	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	54.800.000	54.800.000	82.470.000	APBD Kota Semarang, DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	36 Orang	36 Orang	36 Orang	103.000.000	298.907.000	289.530.202	APBD Kota Semarang	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	56.451.690	112.908.689	108.008.689	APBD Kota Semarang	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	386.445.160	386.445.160	201.808.065	APBD Kota Semarang	
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	75 Orang	75 Orang	75 Orang	135.300.000	135.300.000	93.300.000	APBD Kota Semarang	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif	77,14 %	77,14 %	77,14 %	2.878.263.875	2.934.929.875	2.837.779.747		
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	0	0	9.000.000	DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	34 Kampung	34 Kampung	34 Kampung	2.878.263.875	2.934.929.875	2.828.779.747	APBD Kota Semarang, DAK Non Fisik-BOKB-KB	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12 %	60,12 %	60,12 %	886.041.710	986.355.710	9.297.210.782		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12 %	60,12 %	60,12 %	592.451.360	693.517.360	9.052.952.232		
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Unit	32 Unit	32 Unit	65.297.040	65.297.040	362.000.880	APBD Kota Semarang, DAK Non Fisik-BOKB-KB	
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	40.050.000	40.050.000	31.155.000	APBD Kota Semarang	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40 Orang	40 Orang	40 Orang	311.099.970	329.199.970	328.416.722	APBD Kota Semarang	
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3479 Orang	3479 Orang	3479 Orang	0	0	8.055.000.000	DAK NonFisik-BOKB-KB	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	176.004.350	258.970.350	276.379.630	APBD Kota Semarang	
2.14.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif	60,12 %	60,12 %	60,12 %	293.590.350	292.838.350	244.258.550		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	293.590.350	292.838.350	244.258.550	APBD Kota Semarang	
JUMLAH										

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

17. DINAS PERHUBUNGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan pagu indikatif, termasuk pada Dinas Perhubungan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah

- Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang;
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	68,15	67,71	64,22	67,71	105,43	67,71	99,35
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	94	86	88	79,75	90,63	79,75	84,84
		Jml trayek BRT	15	12	13	12	92,31	12	80,00
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	30	34	33	20,42	61,88	20,42	68,07
		Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk	7,01	7	7	5,48	78,29	5,48	78,17
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan MRLL	100	100	100	50	50,00	50	50,00
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Studi V/C Ratio Kota Semarang	1	0	0	0	0,00	0	0,00
		Jml dokumen rekayasa lalu lintas	11	5	12	6	50,00	0	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2	0	0	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2	0	0	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100	100	100	25	25,00	50	50,00
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml prasarana jalan	5	12	26	15	57,69	15	300,00
		Depo dan shelter trem	5	0	0	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jml perlengkapan jalan	3	13	575	764	132,87	746	24866,67
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jml pemeliharaan prasarana jalan	1	6	118	24	20,34	24	2400,00
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Rambu LL (Bahan Rambu)	250	359	250	123	49,20	123	49,20
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jml terminal	3	3	3	3	100,00	3	100,00
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Perawatan terminal	3	3	2	0	0,00	0	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jml SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	2	23	23	100,00	23	575,00
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12	12	12	6	50,00	6	50,00
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kegiatan pemungutan parkir	12	12	0	0	0,00	0	0,00
		Jumlah Kegiatan perijinan parkir	12	12	0	0	0,00	0	0,00
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	800		800	642	80,25	642	80,25

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Elektronik							
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengawasan	12	12	12	6	50,00	0	0,00
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12	12	12	6	50,00	6	50,00
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jml alat uji	2	2	1	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Blue Card	40000	47300	90000	18387	20,43	18387	45,97

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Service Alat Uji Kendaraan	35	35	35	35	100,00	35	100,00
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100	100	100	50	50,00	50	50,00
		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12	12	12	6	50,00	6	50,00
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jml Shelter BRT	1	2	0	0	0,00	0	0,00
		Bike rack	4	4	0	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan sosialisasi	3	2	3	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan	Jml kegiatan pengendalian	12	12	12	6	50,00	6	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan forum LLAJ	1	1	1	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1	1	1	0,5	50,00	0,5	50,00
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Sosialisasi perijinan andalalin	2	2	2	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengawasan andalalin	12	0	12	6	50,00	6	50,00
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12.00	12	12	6	50,00	6	#VALUE!
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pendataan dan pemantauan angkutan barang	12	12	12	6	50,00	6	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pendukung pelayanan BRT	100	100	100	50	50,00	50	50,00
		Pelayanan angkutan	100	100	100	50	50,00	50	50,00
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kertas Thermal E-Tiket	150000	31500	0	0	0,00	0	0,00
		Operasional BRT	12	12	0	0	0,00	0	0,00
		Jml Pemeliharaan Mesin E-Tiket	317	0	0	0	0,00	0	0,00
		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	257		259	257	99,23	257	100,00
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau	Pelaksanaan Mudik Gratis	1	0	0	0	0,00	1	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								
		DED Fasilitas Parkir Angkutan Barang	0	0	0	0	0,00	0	0,00
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam (Satu) Kabupaten/Kota	0		1	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	3	3	2	2	100,00	2	66,67
2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi	3	2	2	2	100,00	0	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2	2	2	1	50,00	1	50,00
2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	1	1	1	0	0,00	0	0,00
2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen angkutan / trayek	1	1	1	1	100,00	0	0,00
2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2	2	2	2	100,00	2	100,00
2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	Jml Studi	1	2	1	1	100,00	1	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	1	1	1	0	0,00	1	100,00
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jml kegiatan	2	2	2	1	50,00	1	50,00
2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jml keg	1	1	1	0	0,00	0	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	secara Elektronik								
2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan koordinasi	12	3	1	0	0,00	1	8,33
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	50	50,00	50	50,00
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100	100	100	50	50,00	50	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100	100	100	50	50,00	50	50,00
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100	100	100	50	50,00	50	50,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100	100	100	50	50,00	50	50,00
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jml dokumen perencanaan	2	1	3	0	0,00	1	50,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jml dokumen RKA	1	1	1	1	100,00	1	100,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml dokumen RKA Perubahan	1	1	1	1	100,00	1	100,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA	1	1	1	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jml dokumen DPA Perubahan	1	1	1	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dokumen lap realisasi kinerja	1	1	1	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jml dokumen evaluasi	1	2	1	0,5	50,00	0,5	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	50	50,00	50	50,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji pegawai	100	100	0	0	0,00	0	0,00
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111		111	111	100,00	111	100,00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor KPA BP, BPP,PPTK	100	100	0	0	0,00	0	0,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1	1	100,00	1	100,00
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jml dokumen penatausahaan keu	1	1	0	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jml dokumen akuntansi	1	1	0	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jml dokumen lap keu akhir tahun	1	1	1	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jml dokumen bahan pemeriksaan	1	1	0	0	0,00	0	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jml dokumen lap keu semesteran	1	1	4	2	50,00	2	200,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jml dokumen lap prognosis	1	1	1	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian SKPD	100	100%	100	50	50,00	50	50,00
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Mutu SDM	4	2	1	1	100,00	1	25,00
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian	300	0	300	150	50,00	150	50,00
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jml Dokumen	1	0	0	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jml Dokumen	1	0	1	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jml Dokumen	1	0	1	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jml kegiatan	1	0	0	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jml kegiatan	1	0	0	0	0,00	0	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ujian Kompetensi	100	0	12	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2	0	2	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	0	50	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	100	100	100	50	50,00	50	50,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jml Alat Listrik	25	41	25	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml peralatan dan perlengkapan kantor	2	2	2	0	0,00	1	50,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jml Alat/bahan Kebersihan	15	33	15	4	26,67	4	26,67
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml ATK (Alat Tulis Kantor)	20	77	20	5	25,00	5	25,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jml barang cetakan	25	28	25	11	44,00	11	44,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan MInuman	17500	8000	12	6	50,00	6	0,03

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jml kegiatan perjalanan dinas	12	12	12	6	50,00	6	50,00
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jml keg penatausahaan arsip	1	0	1	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jml jenis peralatan elektronika	11	10	11	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	50	50,00	50	50,00
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KBM Oprasional/Patrol	10	10	26	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml kendaraan tak bermotor	2	3	0	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jml mebel	7	0	7	2	28,57	2	28,57
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml sarpras kantor	7	0	7	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	50	50,00	50	50,00
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Materai	6000	0	0	0	0,00	0	0,00
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	100		12	6	50,00	50	50,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Menyurat							
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik Dan Telepon	12	12	12	6	50,00	6	50,00
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan kantor, tenaga TPHL dan Non ASN	100	100	12	6	50,00	50	50,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	100	100	100	50	50,00	50	50,00
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jml kendaraan dinas	1	1	1	1	100,00	1	100,00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jml kendaraan operasional	75	85	75	75	100,00	75	100,00
X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jml KBM Golf dll	4	4	4	4	100,00	4	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml bangunan	3	2	3	3	100,00	3	100,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml peralatan	5	4	5	5	100,00	5	100,00
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jml jenis pemeliharaan	8	11	9	4	44,44	4	50,00
X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD	100	100	100	50	50,00	50	50,00
X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan pelayanan pendukung BRT	12	12	12	6	50,00	6	50,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 capaian sub kegiatan yaitu: telah tercapai 100% atau lebih berjumlah 14 sub kegiatan, 50%-99% berjumlah 14 sub kegiatan dan kurang dari 50 % berjumlah berjumlah 21 sub kegiatan.

Beberapa sub kegiatan yang realisasinya dibawah 50% dikarenakan waktu pelaksanaan mundur dari yang telah dijadwalkan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Juni 2023	%
1	2	3	4	5	6
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.076.995.812	25.984.300.731	36,56
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.537.020	10.125.000	22,23
1	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.987.800	4.500.000	32,17
2	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.424.510	-	
3	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.620.420	-	
4	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.424.510	-	
5	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.620.420	-	
6	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.705.760	4.500.000	95,63
7	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.753.600	1.125.000	23,67
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.760.838.259	8.026.259.671	54,38
8	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.137.949.459	7.763.519.671	54,91
9	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	551.760.000	262.740.000	47,62
10	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.709.600	-	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Juni 2023	%
1	2	3	4	5	6
11	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.709.600	-	
12	X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	23.709.600	-	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	694.348.170	302.058.000	43,50
13	X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	323.400.000	160.200.000	49,54
14	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	226.670.170	141.858.000	62,58
15	X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.800.000	-	
16	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.971.400	-	
17	X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.600.000	-	
18	X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.642.200	-	
19	X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.264.400	-	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.310.649.686	754.646.000	22,79
20	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	133.736.963	-	
21	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.242.326	-	
22	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	119.120.273	23.398.800	19,64
23	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.832.198	37.723.900	22,21
24	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	299.357.975	39.600.000	13,23
25	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	137.700.000	8.000.000	5,81
26	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.022.015.100	187.228.300	18,32
27	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.987.365	-	
28	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.382.657.486	458.695.000	33,17
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.042.378.013	2.226.300.000	55,07
29	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.179.571.524	2.226.300.000	70,02
30	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	772.386.299	-	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Juni 2023	%
1	2	3	4	5	6
31	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.420.190	-	
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.962.208.960	1.910.232.195	48,21
32	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.000.000	14.000.000	35,90
33	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.277.669.760	581.995.262	45,55
34	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.645.539.200	1.314.236.933	49,68
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.527.035.704	1.551.825.500	23,78
35	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	22.543.345	55,92
36	X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.843.929.982	1.387.280.240	36,09
37	X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	126.836.360	43.028.040	33,92
38	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.624.029.269	-	
39	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	395.604.000	-	
40	X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	496.322.913	98.973.875	19,94
	X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	37.734.000.000	11.202.854.365	29,69
41	X.XX.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	37.734.000.000	11.202.854.365	29,69
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	243.004.293.191	108.882.757.590	44,81
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.754.926.270	979.678.800	55,82
42	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.754.926.270	979.678.800	55,82
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.600.890.738	2.824.698.888	29,42

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Juni 2023	%
1	2	3	4	5	6
43	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.974.468.637	418.534.325	10,53
44	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.284.143.129	1.109.237.140	48,56
45	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	2.507.861.890	734.355.923	29,28
46	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	834.417.082	562.571.500	67,42
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.061.786.784	544.223.079	26,40
47	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	1.422.046.691	329.700.000	23,18
48	2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	639.740.093	214.523.079	33,53
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.787.140.630	1.205.512.494	43,25
49	2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	732.674.230	372.610.599	50,86
50	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.054.466.400	832.901.895	40,54
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3.007.513.284	1.731.064.480	57,56
51	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.426.318.593	979.312.750	68,66
52	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	164.423.523	129.879.230	78,99
53	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.416.771.168	621.872.500	43,89
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5.328.160.338	2.358.290.291	44,26
54	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	46.176.000	-	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Juni 2023	%
1	2	3	4	5	6
55	2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	712.800.000	332.396.700	46,63
56	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4.323.769.684	2.025.893.591	46,85
57	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	245.414.654	-	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	79.500.000	69.031.500	86,83
58	2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	66.000.000	65.656.500	99,48
59	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	13.500.000	3.375.000	25,00
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	516.106.340	156.713.848	30,36
60	2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	516.106.340	156.713.848	30,36
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.853.581.537	98.723.117.548	45,53
61	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	216.715.988.822	98.629.502.548	45,51
62	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	137.592.715	93.615.000	68,04
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	235.064.810	-	
63	2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	235.064.810	-	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi s.d Juni 2023	%
1	2	3	4	5	6
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	214.716.640	119.343.231	55,58
64	2.15.02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	68.346.600	-	
65	2.15.02.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	146.370.040	119.343.231	81,54
	2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	345.739.780	137.994.200	39,91
66	2.15.02.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	62.805.370	-	
67	2.15.02.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	282.934.410	137.994.200	48,77
	2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	219.166.040	33.089.231	15,10
68	2.15.02.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	113.144.840	-	
69	2.15.02.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	106.021.200	33.089.231	31,21
Jumlah			314.081.289.003	134.867.058.321	42,94

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 21 kegiatan dan 69 sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah sebesar Rp 314.081.289.003,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 134.867.058.321,00 (42,94%).

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA			REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2021	2022	2023 smt I	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurai kemacetan	Kinerja lalu lintas	0,5	0,55	0,58	0,5	0,54	0,54	0,58
Sasaran 1 : Meningkatkan layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	0,54	0,58	0,58	0,54	0,58	0,58	0,58
Sasaran 2 : Meningkatkan ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	61,73	62,96	64,22	61,73	67,71	67,71	64,22
Sasaran 3 : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	65,93	66	67	65,39	68,11	68,11	67

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurangi kemacetan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Kinerja lalu lintas”, belum dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 93,1%;
- b. Sasaran 1 **“Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Konektivitas Kota”, telah dapat mencapai target, dimana realisasinya sebesar 100%;
- c. Sasaran 2 **“Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase sarpras transportasi terpasang” telah dapat melebihi target, dimana realisasinya lebih dari 100%;
- d. Sasaran 3 **“Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah”** memiliki 1 indikator yaitu “Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah” telah dapat melebihi target, dimana realisasinya lebih dari 100%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Kinerja Urusan Perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi yang berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Beberapa ruas jalan mengalami peningkatan volume lalu lintas kendaraan yang berpotensi pada kerawanan kemacetan lalu lintas masih menjadi isu yang harus segera dipecahkan.

Indikator jumlah titik/ ruas rawan macet yang pada tahun 2021 terdapat 4 lokasi (Jl. Brigjend. Sudiarto, Jl. Setiabudi, Siliwangi dan Jl. Elang) karena adanya bangkitan-bangkitan perjalanan baru di lokasi tersebut, berupa perumahan/ permukiman baru, tempat pendidikan dan pusat ekonomi. Namun demikian pada tahun 2022 dan masih sama keadaannya pada triwulan 2 tahun 2023, titik kemacetan menurun menjadi pada 3 titik /ruas jalan, yaitu Jalan Brigjend Sudiarto, Jalan Setiabudi dan Jalan Siliwangi.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang perhubungan antara lain:

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas;
- b. Masih terdapat wilayah yang belum terlayani angkutan umum massal;
- c. Masih kurangnya pemasangan dan pemeliharaan prasarana jalan serta manajemen rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang peraturan dan etika dalam berlalu lintas;
- Pelayanan angkutan umum massal yang belum menyentuh semua kawasan tarikan dan bangkitan (permukiman, pendidikan dan komersial);
- Semakin berkembangnya kebutuhan prasarana jalan seiring dengan perkembangan jalan dan volume kendaraan di jalan.

b. Peluang:

- Adanya perkembangan teknologi informasi (media sosial) yang dapat membantu sosialisasi kepada masyarakat agar tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam berlalu lintas;
- Adanya perkembangan positif animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan murah;
- Dukungan dari seluruh stakeholder dalam penyediaan prasarana jalan yang dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Kecenderungan peningkatan kepadatan lalu lintas di ruas jalan tertentu yang memicu kerawanan kemacetan;
- b. Belum optimalnya tingkat pelayanan angkutan umum sebagai penghubung pusat kegiatan strategis;
- c. Belum optimalnya penanganan prasarana dalam mendukung keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				322.247.350.698	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				322.387.350.698	
2.15.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	75.208.083.695	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	75.208.083.695	
2.15.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100 persen	45.537.020	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100 persen	45.537.020	
2.15.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.987.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.987.800	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.1.1.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.424.510	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.424.510	
2.15.1.1.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.620.420	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.620.420	
2.15.1.1.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.424.510	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.424.510	
2.15.1.1.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.620.420	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.620.420	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.1.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.705.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.705.760	
2.15.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.753.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.753.600	
2.15.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Dishub	100 persen	14.176.632.271	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Dishub	100 persen	14.176.632.271	
2.15.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	13.565.503.471	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	13.565.503.471	
2.15.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen	540.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen	540.000.000	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Tugas ASN					Pelaksanaan Tugas ASN			
2.15.1.1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	23.709.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	23.709.600	
2.15.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	23.709.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	23.709.600	
2.15.1.1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	23.709.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	23.709.600	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100 persen	628.134.570	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100 persen	628.134.570	
2.15.1.1.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	323.400.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	323.400.000	
2.15.1.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	226.670.170	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket	226.670.170	
2.15.1.1.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.800.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.800.000	
2.15.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	
2.15.1.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	12 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	Kota Semarang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	12 Orang	0	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
2.15.1.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0	
2.15.1.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	76.264.400	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	76.264.400	
2.15.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100 persen	3.031.892.312	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100 persen	3.031.892.312	
2.15.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	117.022.272	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	117.022.272	
2.15.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2 Paket	21.242.326	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2 Paket	21.242.326	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			n Kantor yang Disediakan					n Kantor yang Disediakan			
2.15.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	69.500.688	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	69.500.688	
2.15.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	153.553.204	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	153.553.204	
2.15.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	243.072.095	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	243.072.095	
2.15.1.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	137.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	137.700.000	
2.15.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	899.915.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	899.915.100	
2.15.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	7.229.141	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	7.229.141	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pada SKPD					pada SKPD			
2.15.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	1.382.657.486	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	1.382.657.486	
2.15.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100 persen	4.080.032.875	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100 persen	4.080.032.875	
2.15.1.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	26 Unit	3.179.571.524	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	26 Unit	3.179.571.524	
2.15.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	772.386.299	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	772.386.299	
2.15.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	128.075.052	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 Unit	128.075.052	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Disediakan					yang Disediakan			
2.15.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100 persen	3.968.064.060	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100 persen	3.968.064.060	
2.15.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	39.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	39.000.000	
2.15.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.283.524.860	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.283.524.860	
2.15.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.645.539.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.645.539.200	
2.15.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Pemeliharaan aset Dishub	100 persen	6.652.248.411	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Pemeliharaan aset Dishub	100 persen	6.652.248.411	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah					Pemerintahan Daerah					
2.15.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.313.180	
2.15.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	3.790.056.942	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	3.790.056.942	
2.15.1.1.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	126.836.360	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	126.836.360	
2.15.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	3 Unit	1.827.548.919	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	3 Unit	1.827.548.919	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2.15.1.1.2.09.10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	395.604.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	395.604.000	
2.15.1.1.2.09.11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	471.889.010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	471.889.010	
2.15.1.1.2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD Trans Semarang	100 persen	42.625.542.176	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan BLUD Trans Semarang	100 persen	42.625.542.176	
2.15.1.1.2.1.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	42.625.542.176	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kota Semarang	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	42.625.542.176	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.2.2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64.22 Persen	247.039.267.003	PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64.22 Persen	247.179.267.003	
2.15.2.2.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Pelaksanaan MRLL	100 persen	1.754.926.270	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Pelaksanaan MRLL	100 persen	1.754.926.270	
2.15.2.2.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.754.926.270	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.754.926.270	
2.15.2.2.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya perlengkapan jalan	100 persen	13.870.334.198	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya perlengkapan jalan	100 persen	13.903.609.198	
2.15.2.2.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	26 Unit	6.298.726.497	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	26 Unit	6.332.001.497	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.2.2.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	575 Unit	4.229.328.729	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	575 Unit	4.229.328.729	
2.15.2.2.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	118 Unit	2.507.861.890	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	118 Unit	2.507.861.890	
2.15.2.2.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 Unit	834.417.082	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Semarang	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 Unit	834.417.082	
2.15.2.2.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah terminal	3 unit	2.061.158.644	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah terminal	3 unit	2.061.158.644	
2.15.2.2.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Semarang	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	1.428.895.789	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Semarang	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	1.428.895.789	
2.15.2.2.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kota Semarang	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23 Orang	632.262.855	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Kota Semarang	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23 Orang	632.262.855	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								a			
2.15.2.2.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Penyelenggaraan parkir	12 bulan	2.672.054.230	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Penyelenggaraan parkir	12 bulan	2.705.329.230	
2.15.2.2.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 Dokumen	772.123.630	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 Dokumen	772.123.630	
2.15.2.2.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	12 Laporan	1.899.930.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan	12 Laporan	1.933.205.600	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota					Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota			
2.15.2.2.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	2.967.468.220	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bulan	2.967.468.220	
2.15.2.2.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1.426.318.593	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	1.426.318.593	
2.15.2.2.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90000 Dokumen	164.423.523	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90000 Dokumen	164.423.523	
2.15.2.2.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	1.376.726.104	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 Unit	1.376.726.104	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.2.2.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12 bulan	5.404.792.198	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12 bulan	5.444.967.198	
			Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100 persen				Pendukung pelayanan BRT dan rekayasa LL	100 persen		
2.15.2.2.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	64 Unit	46.176.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kota Semarang	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	64 Unit	46.176.000	
2.15.2.2.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/	3 Dokumen	712.800.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	3 Dokumen	712.800.000	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kota					Kabupaten/ Kota			
2.15.2.2.2.06.04			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	3 Laporan				Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	3 Laporan		
2.15.2.2.2.06.05	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	12 Laporan	4.373.769.684	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	12 Laporan	4.413.944.684	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	272.046.514	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	272.046.514	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kota					Kota			
2.15.2.2.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Pengawasan Andalalin	1 tahun	79.500.000	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Pengawasan Andalalin	1 tahun	79.500.000	
2.15.2.2.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	66.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	66.000.000	
2.15.2.2.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	13.500.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Semarang	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	13.500.000	
2.15.2.2.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Pemantauan angkutan	12 bulan	516.106.340	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Pemantauan angkutan	12 bulan	516.106.340	
2.15.2.2.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	12 Laporan	516.106.340	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	12 Laporan	516.106.340	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Angkutan Umum					Angkutan Umum			
2.15.2.2.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan angkutan	100 persen	216.812.312.213	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan angkutan	100 persen	216.812.312.213	
			pendukung pelayanan BRT	100 persen				pendukung pelayanan BRT	100 persen		
2.15.2.2.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	259 Unit	216.715.988.822	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	259 Unit	216.715.988.822	
2.15.2.2.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan	1 Laporan	96.323.391	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan	1 Laporan	96.323.391	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota			Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota			
2.15.2.2.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	3 kegiatan	149.980.210	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	3 kegiatan	149.980.210	
2.15.2.2.2.10.12	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	149.980.210	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/	3 Dokumen	149.980.210	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Kota			
2.15.2.2.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	185.728.660	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	185.728.660	
2.15.2.2.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
2.15.2.2.2.11.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	0 Dokumen	185.728.660	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	0 Dokumen	185.728.660	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		
2.15.2.2.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	345.739.780	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	379.014.780	
2.15.2.2.2.13.01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan	1 Dokumen	62.805.370	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan	1 Dokumen	62.805.370	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota			Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota		Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota			
2.15.2.2.2.13.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	282.934.410	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	316.209.410	
2.15.2.2.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	219.166.040	Penerbitan Izin Penyelenggaraa n Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	219.166.040	

Kode Rek.	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.2.2.2.15.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	113.144.840	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	113.144.840	
2.15.2.2.2.15.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	106.021.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Laporan	106.021.200	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023,

dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:

- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Tahun ke dua dari Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurangi kemacetan”, dengan indikator tujuan “Kinerja lalu lintas”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu:

- a. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi dengan indikator Konektivitas Kota;
- b. Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi dengan indikator Persentase sarpras transportasi terpasang;
- c. Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Tujuan : Mengendalikan kinerja lalu lintas untuk mengurangi kemacetan	Kinerja lalu lintas	Rasio	0,58
Sasaran : Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi	Konektivitas Kota	Rasio	0,58
Sasaran : Meningkatnya ketersediaan fasilitas transportasi	Persentase sarpras transportasi terpasang	%	64,22
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	67

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Perhubungan bertugas mewujudkan pencapaian indikator tujuan “Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur” serta indikator sasaran “Rasio konektivitas kabupaten/kota” dan “Pengurangan jumlah titik/ruas rawan macet”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					310.781.289.003	314.081.289.003	322.387.350.698		
2 15 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	69.699.407.770	71.076.995.812	75.208.083.695		
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan	100%	100%	100%					
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana Dinas Perhubungan	100%	100%	100%					
2 15 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub	100%	100%	100%	45.537.020	45.537.020	45.537.020		
2 15 1 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	13.987.800	13.987.800	13.987.800	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.424.510	5.424.510	5.424.510	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.620.420	5.620.420	5.620.420	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.424.510	5.424.510	5.424.510	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5.620.420	5.620.420	5.620.420	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 15 1 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.705.760	4.705.760	4.705.760	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	4.753.600	4.753.600	4.753.600	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dishub	100%	100%	100%	14.760.838.259	14.760.838.259	14.176.632.271		
2 15 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 orang	111 orang	111 orang	14.137.949.459	14.137.949.459	13.565.503.471	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	551.760.000	551.760.000	540.000.000	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	23.709.600	23.709.600	23.709.600	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	4 laporan	23.709.600	23.709.600	23.709.600	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	23.709.600	23.709.600	23.709.600	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub	100%	100%	100%	634.434.105	694.348.170	628.134.570		
2 15 1 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 unit	1 unit	263.400.000	323.400.000	323.400.000	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300 paket	300 paket	300 paket	226.670.170	226.670.170	226.670.170	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 15 1 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	-	15.971.400	15.971.400	-	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	12 orang	-	25.600.000	25.600.000	-	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	2 orang	0	24.642.200	24.642.200	-	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	50 orang	76.350.335	76.264.400	76.264.400	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub	100%	100%	100%	3.234.661.512	3.310.649.686	3.031.892.312		
2 15 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 paket	25 paket	25 paket	133.736.963	133.736.963	117.022.272	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	21.242.326	21.242.326	21.242.326	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	15 paket	15 paket	119.120.273	119.120.273	69.500.688	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	20 paket	20 paket	169.832.198	169.832.198	153.553.204	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 paket	25 paket	25 paket	299.272.040	299.357.975	243.072.095	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	197.700.000	137.700.000	137.700.000	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.022.015.100	1.022.015.100	899.915.100	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	24.987.365	24.987.365	7.229.141	APBD Kota	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dinamis pada SKPD							Semarang	
2 15 1 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	1.246.755.247	1.382.657.486	1.382.657.486	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub	100%			3.378.969.080	4.042.378.013	4.080.032.875		
2 15 1 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 unit	26 unit	26 unit	2.682.380.319	3.179.571.524	3.179.571.524	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 unit	7 unit	7 unit	606.168.571	772.386.299	772.386.299	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	7 unit	7 unit	90.420.190	90.420.190	128.075.052	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub	100%			3.962.208.960	3.962.208.960	3.968.064.060		
2 15 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	39.000.000	39.000.000	39.000.000	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.277.669.760	1.277.669.760	1.283.524.860	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.645.539.200	2.645.539.200	2.645.539.200	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset Dishub	100%			5.948.758.834	6.527.035.704	6.652.248.411		
2 15 1 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 15 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 unit	75 unit	75 unit	3.744.384.582	3.843.929.982	3.790.056.942	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 unit	4 unit	4 unit	126.836.360	126.836.360	126.836.360	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	1.343.099.799	1.624.029.269	1.827.548.919	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	197.802.000	395.604.000	395.604.000	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	9 unit	9 unit	496.322.913	496.322.913	471.889.010	APBD Kota Semarang	
2 15 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan BLUD Trans Semarang	100%			37.734.000.000	37.734.000.000	42.625.542.176		
2 15 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	37.734.000.000	37.734.000.000	42.625.542.176	APBD Kota Semarang	
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	64,22%	64,22%	64,22%	241.081.881.233	243.004.293.191	247.179.267.003		
		Rasio ijin trayek per jumlah penduduk	6,81%	6,81%	6,81%					
		Persentase pengelolaan Parkir On the Street	88%	88%	88%					
		Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum	33%	33%	33%					
		Jml trayek BRT	13 trayek	13 trayek	13 trayek					
2 15 2 2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan MRL	100%	100%	100%	1.688.376.270	1.754.926.270	1.754.926.270		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 15 2 2.01 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1.688.376.270	1.754.926.270	1.754.926.270	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan jalan	100%	100%	100%	8.838.477.743	9.600.890.738	13.903.609.198		
2 15 2 2.02 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	26 unit	26 unit	26 unit	3.744.235.888	3.974.468.637	6.332.001.497	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	575 unit	575 unit	575 unit	1.751.962.883	2.284.143.129	4.229.328.729	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.02 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	118 unit	118 unit	118 unit	2.507.861.890	2.507.861.890	2.507.861.890	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 unit	250 unit	250 unit	834.417.082	834.417.082	834.417.082	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal	3 unit	3 unit	3 unit	1.862.136.784	2.061.786.784	2.061.158.644		
2 15 2 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	3 unit	3 unit	1.422.046.691	1.422.046.691	1.428.895.789	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.03 05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23 orang	23 orang	23 orang	440.090.093	639.740.093	632.262.855	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyelenggaraan parkir	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2.587.490.630	2.787.140.630	2.705.329.230		
2 15 2 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 dokumen	800 dokumen	800 dokumen	732.674.230	732.674.230	772.123.630	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 15 2 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.854.816.400	2.054.466.400	1.933.205.600	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian kendaraan	12 bln			3.007.514.321	3.007.513.284	2.967.468.220		
2 15 2 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	1 unit	1 unit	1.622.901.474	1.426.318.593	1.426.318.593	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	90000 dokumen	2900 dokumen	2900 dokumen	60.321.063	164.423.523	164.423.523	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	35 unit	35 unit	35 unit	1.324.291.784	1.416.771.168	1.376.726.104	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas	12 bln	12 bln	12 bln	4.833.660.338	5.328.160.338	5.444.967.198		
2 15 2 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 unit	4 unit	4 unit	46.176.000	46.176.000	46.176.000	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	712.800.000	712.800.000	712.800.000	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3.963.769.684	4.323.769.684	4.413.944.684	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 15 2 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	110.914.654	245.414.654	272.046.514	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan Andalalin	1 tahun	1 tahun	1 tahun	79.500.000	79.500.000	79.500.000		
2 15 2 2.07 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 laporan	2 laporan	2 laporan	66.000.000	66.000.000	66.000.000	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.07 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	13.500.000	13.500.000	13.500.000	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pemantauan angkutan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	516.106.340	516.106.340	516.106.340		
2 15 2 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 laporan	12 laporan	12 laporan	516.106.340	516.106.340	516.106.340	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendukung pelayanan BRT	12 bulan	12 bulan	12 bulan	216.853.581.537	216.853.581.537	216.812.312.213		
2 15 2 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	259 unit	259 unit	259 unit	216.715.988.822	216.715.988.822	216.715.988.822	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.09 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	137.592.715	137.592.715	96.323.391	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 15 2 2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	235.064.810	235.064.810	149.980.210		
2 15 2 2.10 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	235.064.810	235.064.810	149.980.210	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	214.716.640	214.716.640	185.728.660		
2 15 2 2.11 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	0	68.346.600	68.346.600	-	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.11 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	146.370.040	146.370.040	185.728.660	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	146.089.780	345.739.780	379.014.780		
2 15 2 2.13 01	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	62.805.370	62.805.370	62.805.370	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 15 2 2.13 02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	83.284.410	282.934.410	316.209.410	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	219.166.040	219.166.040	219.166.040		
2 15 2 2.15 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	113.144.840	113.144.840	113.144.840	APBD Kota Semarang	
2 15 2 2.15 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	106.021.200	106.021.200	106.021.200	APBD Kota Semarang	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPDP Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perhubungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

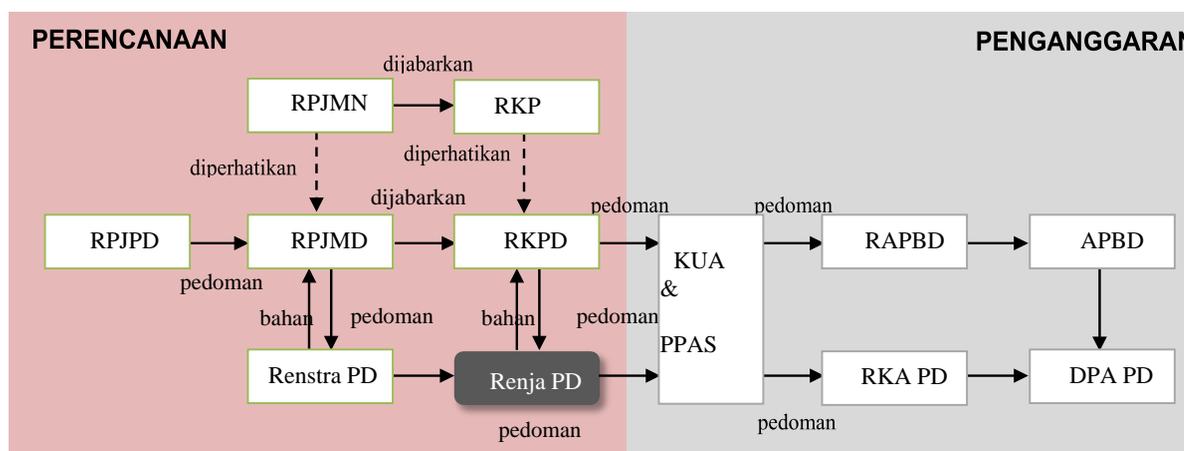
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu **“Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai**

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Dalam melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, telah banyak layanan yang diwujudkan, diantaranya SDK (Semarang Digital Kreatif) yang memfasilitasi masyarakat Kota Semarang agar tertarik dan menjadikan digital kreatif sebagai salah satu fokus kewirausahaan, dan komunitas yang bergabung dan aktif semakin meningkat; Terbangunnya fasilitas publik baru Co-Working Space di Gedung Olahraga Tri Lomba Juang; Free Wifi pada tempat publik; Aktivasi jaringan Internet kelurahan, Internet CCTV RT se-Kota Semarang; dan telah berfungsinya Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik; Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Semarang dan terlaksananya Evaluasi Smart City Kota Semarang.

Kinerja pengelolaan e Gov salah satunya dapat ditunjukkan dengan capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dimana pada tahun 2022 capaian Indeks SPBE Kota Semarang sebesar 3,38 (Baik). Belum optimalnya pencapaian ini disebabkan dari aspek penerapan manajemen SPBE dan aspek Audit TIK, masih jauh dari standar ideal (terrealisasi 2,64 dari skala 5). Sedangkan dari domain Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE menunjukkan skor diatas 3. Dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diharapkan dapat mengungkit Indeks SPBE Kota Semarang mendatang.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan

target kinerja pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

- tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 7);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 73);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Peersandian Kota Semarang Dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100	100 %	100.00	50 %	50 %	50 %	50 %
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100	100 %	100 %	43,75 %	43,75 %	43,75 %	43,75 %
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100	100 %	100 %	40 %	40 %	40 %	40 %
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	50 %	3 dokumen	50 %
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang dihasilkan	3 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	0 dokumen	0 %	0 dokumen	0 %
		Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Diskominfo	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 dokumen	1 dokumen	33 %	1 dokumen	33 %
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0 %	0 dokumen	0 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0 %	0 dokumen	0 %
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	0 dokumen	0 %
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100 %	3 dokumen	100%
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	3 Laporan	100 %	3 Laporan	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100	100	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			103 orang	102 orang	99,02 %	102 orang	99,02 %
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100	100	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			12 dokumen	6 dokumen	50 %	6 dokumen	50 %
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	14 Laporan	100 %	14 laporan	5 laporan	35,71 %	5 laporan	35,71 %
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	100 %	1 dokumen	0 dokumen	N/A	N/A	0 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100	100 %	100	40 %	40 %	40 %	40 %
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	penyampaian informasi tentang cukai tembakau atau sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	100%	N/A	N/A	N/A	0 %
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			160 orang	0 orang	0 %	0 orang	0 %
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100 %	90 %	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	100 %
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	100 %
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	100 %
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 %	100 %	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	100 %
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 %	2 jenis	1 paket	0 paket	0 %	0 paket	0 %
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	100 %	100 %	10 dokumen	0 dokumen	0 %	0 dokumen	0 %
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung, jumlah peserta rapat dan sosialisasi	100 %	100 %	150 laporan	35 laporan	25 %	35 laporan	25 %
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar	100 %	100 %	100 laporan	37 laporan	37 %	37 laporan	37 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	100 %	100 %	3 dokumen	1 laporan	33 %	1 laporan	33 %
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	100.00	100%	50%	50 %	50%	50 %
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	100 %	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	100 %	100 %	3 unit	2 unit	66,67%	2 unit	66,67%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	100 %	100 %	2 unit	1 unit	50 %	1 unit	50 %
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	100 %	100%	50 %	50 %	50 %	50 %
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah kegiatan pengelolaan surat menyurat	100 %	100 %	3 laporan	2 laporan	66,67 %	2 laporan	66,67 %
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %	36 laporan	18 laporan	50 %	18 laporan	50 %
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00	100 %	100 %	40 %	40 %	40 %	40 %
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	100 %
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	100 %	100 %	10 unit	16 unit	160 %	16 unit	160 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan							
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan perizinan alat berat	100 %	100 %	2 unit	1 unit	50 %	1 unit	50 %
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	jumlah pemeliharaan mebel	100 %	100 %	2 unit	0 unit	0 %	0 unit	0 %
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	100 %	3 unit	2 unit	66,67 %	2 unit	66,67 %
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah pemeliharaan taman	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	100 %
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	100 %	8 unit	0 unit	0 %	0 unit	0 %
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100 %	100 %	100 %	65 %	65 %	65 %	65 %
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan telekomunikasi	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Dokumen kajian menara telekomunikasi	1 dokumen	100 %	100	N/A	N/A	N /A	N /A
		Jumlah kegiatan sosialisasi menara telekomunikasi	5 kegiatan	20 %	N /A	N/A	N/A	N /A	N /A
		Jumlah rekomendasi Titik Menara Telekomunikasi	15 rekomendasi	213 %	N /A	N/A	N/A	N /A	N /A
		Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik			1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	jumlah penanganan pengaduan	4100 pengaduan	156 %	N / A	N/A	N/A	N/A	N/A
		kajian kebijakan pengaduan	1 dokumen	200 %	8 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A
		monitoring dan evaluasi	2 kegiatan	100 %	N / A	N/A	N/A	N / A	N / A
		Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	8 dokumen		8 dokumen	4 dokumen	50 %	4 dokumen	50 %
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	konten informasi publik yang disebarluaskan	875 konten	1115 %	N / A	N/A	N/A	N / A	N / A
		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan Media komunikasi Publik			8 dokumen	4 dokumen	50 %	4 dokumen	50 %
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jenis informasi publik yang disediakan	4 jenis	100 %	N / A	N/A	N/A	N / A	N / A
		permintaan informasi publik	2184 permintaan	225 %	N / A	N/A	N/A	N / A	N / A
		Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik			4 dokumen	2 dokumen	50 %	2 dokumen	50 %
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen kajian pengembangan TIK	1 dokumen	0 %	N / A	N/A	N/A	N / A	N / A
		jumlah kegiatan worksop dan pelatihan TIK	15 kegiatan	93 %	N / A	N/A	N/A	N / A	N / A
		jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapsitasnya			810 orang	620 orang	76,54 %	620 orang	76,54 %
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kajian Co Working Space	1 dokumen	0 %	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah kegiatan fasilitas FK Metra	8 kegiatan	50 %	N / A	N/A	N/A	N / A	N / A
		Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan			12 dokumen	6 dokumen	50 %	6 dokumen	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		komunitas dalam mendiseminasikan informasi program dan kebijakan							
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100 %	100 %	100 %	30 %	30 %	30 %	30 %
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra dan internet Pemerintah dan Data Center yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 perangkat daerah	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Tingkat kemampuan Data Center dalam melayani kebutuhan OPD untuk melayani masyarakat	90.00 %	111 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Tingkat kemampuan layanan Data Center untuk melayani kinerja pemerintah Kota Semarang	95.00 %	105 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Jumlah pendaftaran nama domin pemerintah kabupaten/kota			577 domain	207 domain	35,87 %	207 domain	35,87 %
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50 perangkat daerah	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Terpenuhinya kebutuhan jaringan internet untuk pendukung kegiatan OPD	80 %	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Jumlah dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6 dokumen	3 dokumen	50 %	3 dokumen	50 %
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah CCTV yang dimiliki oleh Diskominfo	125 unit	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		jumlah perangkat daerah yang terlayani jaringan intra	35 perangkat daerah	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		jumlah ruang publik yang terlayani oleh free wifi Pemkot	170 lokasi	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah			10 unit	10 unit	100 %	10 unit	100 %
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	50 perangkat daerah	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		jumlah perangkat daerah yang terintegrasi oleh implementasi sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) Kota Semarang	50 perangkat daerah	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan			40 unit	33 unit	82,5 %	33 unit	82,5 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah aplikasi layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3 paket aplikasi	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan layanan-layanan Aplikasi Smart City Kota Semarang (Single Sign On)	20 aplikasi	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city			4 dokumen	3 dokumen	75 %	3 dokumen	75 %
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah peralatan TIK yang disediakan untuk mendukung SPBE	60 %	167 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Terpenuhinya dan terawatnya peralatan TIK untuk mencapai Smart City	100 %	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			8 dokumen	4 dokumen	50 %	4 dokumen	50 %
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	jumlah kegiatan Monitoring Implementasi Sistem Integrated Smart System Platform (I-SSP) dan Smart City Kota Semarang	4 kegiatan	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		jumlah kegiatan monitoring yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung Smart City	4 kegiatan	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan spbe			4 dokumen	2 dokumen	50 %	2 dokumen	50 %
URUSAN STATISTIK									
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100 %	100 %	100 %	s	50 %	50 %	50 %
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Elemen Data yang Terpenuhi	5000 data	100 %	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A
		Jumlah Konversi Data Sektoral Ke Dalam Data Spasial	20 data	100 %	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A
		Jumlah Publikasi Statistik Sektoral	2 dokumen	100 %	12 dokumen	N /A	N /A	N/A	N/A
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			12 dokumen	6 dokumen	50 %	6 dokumen	50 %
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah OPD yang Memiliki SDM Pengelola Data/Statistisi	35 perangkat daerah	100 %	N /A	N /A	N /A	N /A	N /A
		Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam Peningkatan			30 orang	15 orang	50 %	15 orang	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi							
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah kegiatan yang dilengkapi metadata	20 kegiatan	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		jumlah OPD yang menyediakan metadata sesuai kaidah statistik	35 OPD	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		jumlah variabel yang dilengkapi metadata	1000 variabel	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun			30 dokumen	15 dokumen	50 %	15 dokumen	50 %
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang Mengelola Data Berdasarkan Statistik di Lingkungan Pemkot Semarang	25 OPD	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistic sektoral dari BPS			34 orang	17 orang	50 %	17 orang	50 %
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Tersedianya Ketersediaan Data Seluruh OPD Kota Semarang	90 %	104%	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Tersedianya SOP Portal Satu Data Kota Semarang	100 %	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Jumlah infrastruktur statistik			5 unit	3 unit	60 %	3 unit	60 %
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	jumlah data yang terotorisasi	1000 data	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		jumlah usulan kegiatan statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS (survey dan kompilasi)	50 kegiatan	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Jumlah data statistic sektoral yang dihimpun			30 dokumen	15 dokumen	50 %	15 dokumen	50 %
URUSAN PERSANDIAN									
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100 %	100 %	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi yang sudah menggunakan keamanan informasi	60 aplikasi	100 %	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A
		Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik			12 laporan	9 laporan	75 %	9 laporan	75 %

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2023

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN DAN INFORMATIKA	54.366.346.171		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.593.651.900	7.219.702.337	49,30
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.029.693	7.505.150	34,07
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.994.159	766.800	25,61
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.296.677	0	0,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.750.617	0	0,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.296.677	3.927.000	91,40
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.177.809	0	0,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.513.754	2.811.350	62,28
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.864.026.211	6.266.526.266	52,82
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.448.029.388	6.081.734.806	53,12
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	406.340.000	180.310.000	44,37
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.401.573	3.331.640	97,94
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.401.573	1.149.820	33,80
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.853.677	0	0,00
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	322.752.240	118.300.000	36,65
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	322.752.240	118.300.000	36,65
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	904.976.096	330.652.208	36,54
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.707.000	0	0,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.135.106	0	0,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.675.842	10.856.900	28,82
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.659.769	25.027.733	46,64
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.440.487	5.575.000	31,97
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.556.300	0	0,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	142.714.500	30.449.233	21,34
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.963.000	74.142.053	38,83
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	379.124.092	184.601.289	48,69
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228.536.726	115.871.350	50,70

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	140.259.301	88.853.350	63,35
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.277.425	27.018.000	30,61
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.004.264	190.893.048	40,70
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.999.000	10.890.000	54,45
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.005.264	180.003.048	40,09
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	832.326.670	189.954.315	22,82
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	10.299.039	25,55
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	462.700.491	134.958.129	29,17
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	36.504.000	7.970.127	21,83
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	7.272.000	0	0,00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.474.000	31.696.500	24,29
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.063.000	5.030.520	99,36
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.999.999	0	0,00
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.992.717.012	2.700.025.136	45,06
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.992.717.012	2.700.025.136	45,06
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	150.000.000	74.689.250	49,79
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.513.218.100	536.695.963	35,44
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.541.910.000	1.290.694.660	52,70
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	866.202.983	442.368.848	51,07
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	471.600.000	193.663.500	41,07
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	449.785.929	161.912.915	36,00
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	33.628.296.148	10.884.369.508	32,37
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.658.160.558	8.075.351.568	30,29
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2.216.799.645	287.796.033	12,98
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	688.097.282	361.591.360	52,55
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	23.753.263.631	7.656.574.452	32,23
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.970.135.590	2.809.017.940	40,30
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.111.561.710	1.158.282.473	54,85
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	875.649.010	560.827.434	64,05
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3.791.303.030	996.529.033	26,28
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	191.621.840	117.476.000	61,31
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	626.003.608	183.143.398	29,26
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	626.003.608	183.143.398	29,26
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	626.003.608	183.143.398	29,26

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	120.000.000	59.341.590	49,45
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	80.000.000	1.801.000	2,25
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	82.000.000	3.455.000	4,21
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	105.000.000	25.312.333	24,11
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	163.000.000	87.157.500	53,47
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	76.003.608	6.075.975	7,99
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	690.921.720	546.608.491	79,11
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	690.921.720	546.608.491	79,11
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	690.921.720	546.608.491	79,11
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	690.921.720	546.608.491	79,11
	TOTAL	55.581.590.388	21.455.835.287	38,64

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada perubahan Anggaran Tahun 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 3 (tiga) urusan, 5 (lima) program, dan 12 (dua belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah sebesar Rp 55.675.478.499. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 21.455.835.287. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 34.219.643.212.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian. di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan

terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					PROYEKSI					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
Tujuan : Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks domain tata kelola SPBE	Skor	3,2	3,4	3,6	3,8	4	3,3	N/A				3,4
	Indeks domain layanan SPBE	Skor	4	4,1	4,2	4,3	4,4	3,23	N/A				4,1
Sasaran : Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal	Persentase aplikasi yang sinergis dan integrative	%	80	82	85	87	90	80	50				82
	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	%	100	100	100	100	100	100	50				100
Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	100	100	100	100	100	100	50				100
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik	Tingkat penyebarluasan Informasi ke masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	50				100
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional	%	100	100	100	100	100	100	50				100

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Indeks domain tata kelola SPBE”, target sebesar 3,4 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 3,3 (capaian 97,06%) dan “Indeks domain layanan SPBE”, target sebesar 4,1 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 3,23 (capaian 78,78%);
- b. Sasaran 1 : “Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal” memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu “Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif” sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%) dan “Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi” sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
Sasaran 2 : “Meningkatnya pengamanan data dan informasi” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi” sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
Sasaran 3 : “Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Tingkat penyebarluasan Informasi ke masyarakat” sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);
Sasaran 4 : “Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional” sudah mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian, menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai Dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang

Statistik, dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA						PROYEKSI 2023	CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026		
ASPEK PELAYANAN UMUM																
1.	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100				100.00	
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100				100.00	
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.95	79.77	79.77				75.00	
4.	Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/ r eplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100				100.00	
5.	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100				100.00	
6.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100				100.00	
7.	Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	50				100.00	
8.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	117.20	88.06	88.06				100.00	
9.	Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan cyber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	65.00	65.00	75.00	80.00	85.00	100.00	68.42	86.84	86.84				75.00	

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2023

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan

pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Masih perlunya untuk menambah jaringan internet sesuai dengan kebutuhan OPD maupun masyarakat;
- b. Pengembangan SPBE yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa SPBE dapat diakses oleh masyarakat;
- c. Peningkatan layanan pusat data yang didukung dengan SDM yang berkompeten dan berkualitas;
- d. Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan pengaduan dan pelayanan data dan informasi;
- e. Pengamanan data dan informasi sangat dibutuhkan seiring dengan semakin meningkatnya teknologi yang bisa mengancam keamanan informasi;
- f. Pengelolaan data statistik sektoral perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dalam rangka memenuhi portal Satu Data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, diantaranya :

- a. Peningkatan kebutuhan pengelolaan fasilitas fisik pendukung pusat data dan layanannya;
- b. Peningkatan kualitas teknis SDM pengelola fasilitas pendukung pusat data dan layanannya;
- c. Belum terlayananya kebutuhan internet di kantor UPTD/OPD yang baru;
- d. Layanan internet monitoring CCTV RT belum terpenuhi untuk semua RT di Kota Semarang;
- e. Free Wifi di ruang publik banyak yang error jaringannya;
- f. Belum adanya perhatian seputar penanganan hoaks di Kota Semarang;
- g. Kurangnya pemahaman perempuan, anak-anak dan kaum difabel dalam pengelolaan pengaduan;
- h. Proses rekapitulasi permohonan informasi melalui WA yang masih dilakukan manual;
- i. Terkendalanya koordinasi terkait pelayanan informasi dengan badan vertikal di Kota Semarang;
- j. Ancaman keamanan informasi yang semakin meningkat seperti; hacking, phishing, deface dsbnya;
- k. Adanya anggapan salah dari OPD bahwa aplikasi dapat menjadi solusi dan belum memahaminya terkait proses bisnis dan tidak adanya dokumentasi ketika membuat aplikasi sehingga menyulitkan dalam proses develop;

- l. Belum tersedianya landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda, mengingat Kemendagri baru mulai menyusun Permen mengenai Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah;
- m. Belum optimalnya penyusunan metadata data statistik sektoral masing-masing OPD dan belum optimalnya pengajuan rekomendasi kegiatan statistic;
- n. Belum optimalnya kapasitas SDM masing-masing OPD terkait tugas dan fungsinya sebagai produsen data statistik sektoral.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- Mengelola dan mengantisipasi hoaks di Kota Semarang;
- Tersusunnya knowledge management system yang komprehensif;
- Semakin banyak permohonan informasi dan pelayanan publik yang terkait dengan lintas dinas/badan vertikal;
- Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan pengaduan yang banyak dihadiri oleh perempuan, anak-anak serta kaum difabel menunjukkan besarnya perhatian dalam pengelolaan pengaduan serta pelayanan informasi publik;
- Kebutuhan layanan teknologi pusat data bertambah besar baik skala kapasitas dan kualitas;
- SDM pengelola teknis pusat data dan layanan nya dituntut lebih dalam keahlian penuntasan masalah teknis dan ruang lingkupnya;
- Perlunya penambahan bandwidth untuk kantor UPTD/OPD yang baru;
- Perlunya penambahan jumlah titik internet monitoring CCTV RT;
- Perlunya dibangun jaringan Fiber Optik milik Pemerintah Kota Semarang;
- Ancaman peretasan dan virus yang tiap tahun bertambah dan mencoba sistem keamanan data center;
- Perkembangan TIK yang semakin pesat dan Kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dan cepat sehingga butuh terobosan inovasi TIK;
- Adanya penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang menitik beratkan pada adanya regulasi sebagai dasar penyelenggaraan;
- Adanya penilaian SDI dimana aspek yang kurang dari Kota Semarang adalah regulasi;
- Adanya pemberian peringkat terhadap penyusunan metadata di aplikasi OMAE kepada seluruh Kab/Kota di Jawa Tengah oleh BPS Provinsi;

- Tim pengelola data pada masing-masing OPD yang seringkali berubah-ubah.

b. Peluang

- Mengadakan sosialisasi terkait pelayanan informasi kepada masyarakat;
- Membuat MoU dengan badan vertikal di Kota Semarang terkait pelayanan informasi;
- Pemuktahiran dan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan pusat data dapat dilakukan dengan optimalisasi pilihan teknologi saat ini;
- SDM dapat terus dilatih dan di tingkatkan keahliannya dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis secara optimal;
- Penambahan bandwidth internet bisa diajukan penambahan anggaran jika memang dibutuhkan;
- Internet monitoring CCTV RT sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam penerapan TIK dalam bidang keamanan;
- Dengan dibangunnya free wifi di area publik, bisa dimanfaatkan internetnya oleh masyarakat secara gratis;
- Rencana Induk dan Arsitektur SPBE yang menopang perencanaan yang berkelanjutan dan sistematis;
- Pemanfaatan media-media seperti media sosial, website dan sebagainya sebagai sarana sosialisasi dan publikasi kebijakan dan arahan positif untuk pengelolaan data, aplikasi dan keamanan informasi;
- Peran perempuan, anak-anak serta kaum difabel dalam pengelolaan pengaduan serta pelayanan informasi publik semakin meningkat;
- Koordinasi dengan instansi vertikal yaitu Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada Kementrian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
- Pengembangan Geoportal Kota Semarang;
- Pengembangan pemenuhan data kewilayahan;
- Pengembangan Monitoring dan Evaluasi Metadata Variabel dan Metadata Indikator;
- Ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 480/443 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Personil Pengolah Data Portal Semarang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Pengelolaan layanan pusat data yang cepat dan masif harus segera di tindaklanjuti dengan peningkatan mutu SDM pengelola layanan pusat data;
- b. Standarisasi perlu dilakukan jika masih di inginkan memiliki fasilitas mandiri layanan pusat data, pilihan lain nya adalah memakai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat;
- c. Kebutuhan internet masih perlu ditambah, baik dari kapasitas maupun jaringan infrastrukturnya;
- d. Keamanan Siber dan Perlindungan Data: Keamanan data dan infrastruktur menjadi prioritas untuk melindungi informasi yang sensitive dan serangan siber;
- e. Pengembangan SPBE yang berkelanjutan, dengan optimasi renduk dan arsitektur SPBE serta Optimasi Anggaran untuk kegiatan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus juga terhindar dari redundansi sistem;
- f. Peningkatan Aksesibilitas untuk memastikan SPBE dapat diakses masyarakat; Pemanfaatan IOT dan Augmented Reality serta robotik yang selalu dalam riset dan pengembangan untuk pelayanan publik;
- g. Perlunya menyusun Perda Keterbukaan Informasi;
- h. Belum Optimalnya Regulasi terkait Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Semarang;
- i. Percepatan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang , sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				54.366.346.171	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				54.366.346.171	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja	100%	15.305.552.307	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan kinerja	100%	15.305.552.307	
			Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan					Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan			
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran					Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran			
			Persentase peningkatan kemampuan ASN					Persentase peningkatan kemampuan ASN			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10.00 Dokumen	22.029.693	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10.00 Dokumen	22.029.693	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.994.159	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.994.159	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.296.677	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.296.677	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.750.617	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.750.617	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.296.677	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.296.677	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	2.177.809	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	1 Dokumen	2.177.809	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.513.754	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.513.754	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	11.643.569.719	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	11.643.569.719	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	11.448.029.388	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	11.448.029.388	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	406.340.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	406.340.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.401.573	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.401.573	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	3.401.573	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	3.401.573	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	2.853.677	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	2.853.677	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	272.752.240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	272.752.240	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	160 Orang	272.752.240	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	160 Orang	272.752.240	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	1.510.945.981	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	1.510.945.981	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.707.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.707.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.135.106	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.135.106	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	37.675.842	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	37.675.842	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.659.769	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.659.769	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.440.487	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.440.487	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	21.556.300	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	21.556.300	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	142.714.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	142.714.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	190.963.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	190.963.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	n Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	379.124.092	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	n Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	379.124.092	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	276.184.618	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	276.184.618	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	140.259.301	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	140.259.301	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	88.277.425	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	88.277.425	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	469.690.524	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	469.690.524	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	19.999.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	19.999.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	449.005.264	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	449.005.264	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	1.060.379.532	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	1.060.379.532	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.313.180	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	462.700.491	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	462.700.491	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	36.504.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Semarang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	36.504.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Jenis	7.272.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Jenis	7.272.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	130.474.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	130.474.000	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.063.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.063.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	8 Unit	149.999.999	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	8 Unit	149.999.999	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Semarang	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	6.391.580.562	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Semarang	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	6.391.580.562	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	6.391.580.562	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	6.391.580.562	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	150.000.000	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen	1.513.218.100	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen	1.513.218.100	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	2.541.910.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	2.541.910.000	
	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	866.202.983	Pelayanan Informasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	866.202.983	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	810 orang	471.600.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	810 orang	471.600.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	449.785.929	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kota Semarang	umlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	449.785.929	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Semarang	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	32.669.213.302	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Semarang	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	25.481.757.649	
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	25.481.757.649	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	25.481.757.649	
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	577 Domain	2.216.799.645	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	577 Domain	2.216.799.645	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	688.097.282	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	688.097.282	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10 Unit	23.753.263.631	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10 Unit	23.753.263.631	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	7.187.455.653	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	7.187.455.653	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40 Unit	2.111.561.710	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40 Unit	2.111.561.710	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	875.649.010	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	875.649.010	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen	3.791.303.030	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen	3.791.303.030	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	191.621.840	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	191.621.840	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				578.210.608	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				578.210.608	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Semarang	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	578.210.608	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kota Semarang	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	578.210.608	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	578.210.608	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	578.210.608	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	120.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	120.000.000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30 Orang	80.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Semarang	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30 Orang	80.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	82.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Semarang	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	82.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	34 Orang	105.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektora	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	34 Orang	105.000.000	
	Pengembangan Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 unit	163.000.000	Pengembangan Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 unit	163.000.000	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	76.003.608	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	76.003.608	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIA				730.921.720	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIA				730.921.720	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Semarang	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	730.921.720	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Semarang	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	730.921.720	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	730.921.720	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	730.921.720	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	690.921.720	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	690.921.720	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Khusus untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang.

Dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut diantaranya dengan memberikan alokasi anggaran untuk fasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, atau dengan mengakomodir usulan hasil Musrenbang melalui pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Demikian juga pada perubahan anggaran tahun 2023 ada beberapa usulan program dan kegiatan yang berasal dari DPRD Kota Semarang yang perlu dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan di Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;

- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,5 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3 – 6,0 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5%;
- d. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,31 – 73,49;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,02%;
- g. Nilai Tukar Petani (NTP) 105 – 107;
- h. Nilai Tukar Nelayan 107 – 108.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

PD 1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

PD 2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;

PD 3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;

PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60 %;

- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 - 9,29%;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 %.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
- b. Peningkatan nilai investasi;
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa;
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

P2 Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja.

P3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;

- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

P4 Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya.

P5 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10 %;
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24 %;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60 %.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan

Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien”. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki kewajiban dalam mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas perencanaan pembangunan daerah, serta dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Semarang Kota Semarang

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”,

dengan indikator tujuan “Indeks domain tata kelola SPBE” dan “Indeks domain layanan SPBE”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang yaitu :

1. “Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal” dengan indikator sasaran “Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif” dan “Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi”;

2. “Meningkatnya pengamanan data dan informasi” dengan indikator sasaran “Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi”
3. “Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik” dengan indikator “Tingkat penyebarluasan Informasi ke Masyarakat”;
4. “Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia” dengan indikator “Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Diskominfo Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN / IKU / IKD	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Mewujudkan tata kelola dan pelayanan data dan informasi yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks domain tata kelola SPBE	skor	3,40
	Indeks domain layanan SPBE	skor	4,10
SASARAN :			
Meningkatnya Layanan Aplikasi yang tersinergis dan terintegrasi didukung Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang Handal	Persentase aplikasi yang sinergis dan integratif	%	82
	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi	%	100
Meningkatnya pengamanan data dan informasi	Tingkat Keamanan Informasi sesuai Sistem Manajemen Keamanan Informasi	%	100
Meningkatnya Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Publik	Tingkat penyebarluasan Informasi ke masyarakat	%	100
Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional dalam Mewujudkan Satu Data Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang sesuai Kaidah Sistem Statistik Nasional	%	100
Indikator Kinerja Utama (IKU) :			
	Indeks SPBE	skor	4,2
Indikator Kinerja Daerah (IKD)			

Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100.00
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100.00
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75.00
Persentase (%) perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan	%	100.00
Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100.00
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100.00
Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	%	100.00
Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100.00
Peningkatan (%) SDM pengelola keamanan syber dan SPBE yang mengikuti peningkatan kompetensi dan bersertifikasi	%	75.00

Sumber : Diskominfo Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA
SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan indikator sasaran “**Indeks SPBE**”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi yang didukung teknologi informasi dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					54.214.665.060	54.214.665.060	54.424.821.111		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	14.593.651.900	14.593.651.900	15.305.552.307	APBD Kota Semarang	
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	100%	100%					
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%	100%	100%					
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	22.029.693	22.029.693	22.029.693		
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.994.159	2.994.159	2.994.159		
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.296.677	4.296.677	4.296.677		
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.617	3.750.617	3.750.617		
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.296.677	4.296.677	4.296.677		
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.177.809	2.177.809	2.177.809		
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.513.754	4.513.754	4.513.754		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	11.864.026.211	11.864.026.211	11.643.569.719		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	103 Orang/bulan	11.448.029.388	11.448.029.388	11.226.667.269		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	406.340.000	406.340.000	405.600.000		
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.401.573	3.401.573	3.401.573		
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	3.401.573	3.401.573	5.047.200		
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.853.677	2.853.677	2.853.677		
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD	100%	100%	100%	272.752.240	272.752.240	322.752.240		
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 Orang	160 Orang	160 Orang	272.752.240	272.752.240	322.752.240		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	100%	100%	904.976.096	904.976.096	1.510.945.981		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	19.707.000	19.707.000	39.105.194		
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	42.135.106	42.135.106	258.035.402		
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	37.675.842	37.675.842	37.675.842		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	53.659.769	53.659.769	53.659.769		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	17.440.487	17.440.487	17.440.487		
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	21.556.300	21.556.300	4.785.654		
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	142.714.500	142.714.500	142.714.500		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	100 laporan	190.963.000	190.963.000	227.984.441		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	379.124.092	379.124.092	729.544.692		
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	228.536.726	228.536.726	276.184.618		
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	140.259.301	140.259.301	137.592.683		
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	88.277.425	88.277.425	138.591.935		
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	100%	100%	469.004.264	469.004.264	469.690.524		
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	19.999.000	19.999.000	18.667.000		
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	449.005.265	449.005.265	451.023.524		
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100%	100%	100%	832.326.670	832.326.670	1.060.379.532		
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180		
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	462.700.491	462.700.491	462.700.491		
2.16.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 unit	2 unit	2 unit	36.504.000	36.504.000	36.504.000		
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	7.272.000	7.272.000	7.272.000		
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	3 Unit	130.474.000	130.474.000	130.474.000		
2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.063.000	5.063.000	34.513.862		
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	8 Unit	8 Unit	8 Unit	149.999.999	149.999.999	348.601.999		
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat	100%	100%	100%	5.992.717.012	5.992.717.012	6.420.680.562		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik	100%	100%	100%	5.992.717.012	5.992.717.012	6.420.680.562		-
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	179.100.000		-
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.513.218.100	1.513.218.100	1.430.614.180		
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2.541.910.000	2.541.910.000	3.019.109.470		
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	886.202.983	886.202.983	941.202.983		
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	810 orang	810 orang	810 orang	471.600.000	471.600.000	303.600.000		
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	449.785.929	449.785.929	547.053.929		
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Terselenggaranya pengelolaan E-Government	100%	100%	100%	33.628.296.148	33.628.296.148	32.698.588.302		
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan	100%	100%	100%	26.658.160.558	26.658.160.558	25.511.132.649		
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	577 Domain	577 Domain	577 Domain	2.216.799.645	2.216.799.645	1.818.917.309		
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	688.097.282	688.097.282	408.967.299		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10 Unit	10 Unit	10 Unit	23.753.263.631	23.753.263.631	23.283.248.041		
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	6.970.135.590	6.970.135.590	7.187.455.653		
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	40 Unit	40 Unit	40 Unit	2.111.561.710	2.111.561.710	2.062.361.570		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.16.03.2.02.09	Pegembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	875.649.010	875.649.010	875.649.010		
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	3.791.303.030	3.791.303.030	4.057.823.233		
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	191.621.840	191.621.840	191.621.840		
	URUSAN STATISTIK					626.003.608	626.003.608	635.510.608		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	100%	626.003.608	626.003.608	635.510.608		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	100%	100%	100%	626.003.608	626.003.608	635.510.608		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000	120.000.000	120.000.000		
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	80.000.000	80.000.000	80.000.000		
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	82.000.000	82.000.000	82.000.000		
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	34 Orang	34 Orang	34 Orang	105.000.000	105.000.000	114.507.000		
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 unit	5 unit	5 unit	163.000.000	163.000.000	163.000.000		
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	76.003.608	76.003.608	76.003.608		
	URUSAN PERSANDIAN					690.921.720	690.921.720	755.146.720		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah	100%	100%	100%	690.921.720	690.921.720	755.146.720		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya penguatan manajemen resiko	100%	100%	100%	690.921.720	690.921.720	755.146.720		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	690.921.720	690.921.720	755.146.720		

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, 2023

Untuk perubahan anggaran tahun 2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang rencananya akan melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 55 (limapuluh lima) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 55.531.590.388 (Lima Puluh Lima Miliar lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribuh Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), dimana ada beberapa sub kegiatan yang mengalami pergeseran, baik berupa penambahan dan pengurangan anggarannya baik dalam satu sub kegiatan maupun antar sub kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2022 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

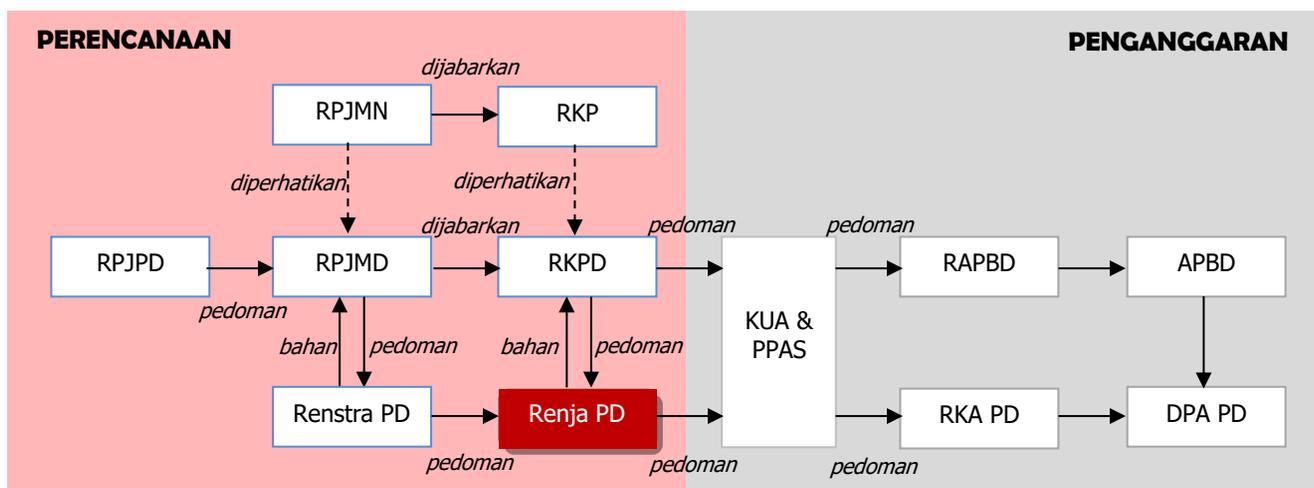
19. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, telah dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) dinamika perekonomian dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian baik dalam pendapatan maupun belanja daerah pada tahun berjalan; (2) untuk menyikapi perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2023; (3) Perlunya penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) adanya Penyesuaian target pendapatan serta pagu indikatif.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

- tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
 - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada

- Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
 - c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	46 dok	9 dok	10 dok	4 dok	40,00	13	28,26
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	2 dok	2 dok	0 dok	0,00	2	20,00
		Jumlah Dokumen RTP			1 dok	1 dok	100,00	1	1,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100,00	2	40,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1	20,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1	20,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1	20,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	3 dok	3 dok	0 dok	0,00	3	20,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	6 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	9	300,00
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	8 jenis	5 jrnis	2 jenis	40,00	10	200,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	35 jenis	35 jenis	3 jenis	0,57	38	108,57
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	1 jenis	12,50	9	112,50
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	4	200,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50,00	18	150,00
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50,00	18	150,00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	2 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50,00	8	160,00
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 unit	6 unit	3 unit	0 unit	0,00	6	200,00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100,00	7	350,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	2	200,00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100,00	50	200,00
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	0	0	0	0,00	0	0,00
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	5 unit	7 unit	4 unit	57,14	9	180,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	-	100%	50%	50,00	50	50,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	50%	50,00	150	150,00
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	3 dok	3 dok	1 dok	33,33	3	20,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	2	40,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 laporan	2 laporan	2 laporan	0 laporan	0,00	2	20,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang	3%	3%	3%	0%	0,00	3	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam							
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	30 koperasi	15 koperasi	1 koperasi	6,67	31	41,33
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 unit usaha	30 unit usaha	80 unit usaha	0 unit usaha	0,00	30	20,00
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	1 koperasi	2 koperasi	0	0,00	1	10,00
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 unit usaha	25 unit usaha	140 unit usahaa	0 unit usaha	0,00	140	93,33
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50,55%	50%	18,89%	37,78	69,44	138,88
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	370 koperasi	490 koperasi	271 koperasi	55,31	641	534,17

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 unit usaha	250 unit usaha	370 unit usaha	151 unit usaha	40,81	401	229,14
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 unit usaha	120 unit usaha	240 unit usaha	120 unit usaha	50,00	240	137,14
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35%	56,25%	31%	23,29%	75,13	79,54	227,26
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	67,99%	67%	43,53%	64,97	111,52	159,31
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 unit usaha	240 unit usaha	300 unit usaha	170 unit usaha	56,67	410	136,67
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	45,36%	10%	38,65%	386,5	84,01	840,10
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	76,63%	72%	67,48	93,72	144,11	180,14
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	80 orang	360 orang	367 orang	101,94	447	111,75

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	2%	1,82%	-	1,2%	-	3,02	151
2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam (1) satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro yang meningkat Pengetahuan dan Ketrampilan	75%	70%	-	-	-	-	-
2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	750 Orang	540 orang	-	-	-	-	-
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	26,37%	26%	16,62%	63,92	42,99	143,30
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	60%	50%	56,13%	112,26	116,13	232,26
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150 orang	164 orang	500 orang	415 orang	83,00	579	386
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,24%	3%	3,24%	108,00	9,48	316
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	300 orang	2.249 orang	1.050 orang	970 orang	92,38	3.219	1.073

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 unit usaha	649 unit usaha	100 unit usaha	185 unit usaha	185,00	834	166,80
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan usaha	500 unit usaha	450 unit usaha	100 unit usaha	200 unit usaha	200,00	650	130,00
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan usahanya	1000 unit usaha	650 unit usaha	660 unit usaha	185 unit usaha	28,03	835	83,50
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan	1000 orang	500 orang	500 orang	500 orang	100,00	1.000	100,00
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	-	150 orang	360 orang	240,00	360	48,00
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25%	47,89%	20%	31,05%	155,25	78,94	315,76
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	200 orang	150 orang	644 orang	429,00	844	140,67
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina/difasilitasi Pengembangan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3000 unit usaha	2380 unit usaha	500 unit usaha	644 unit usaha	128,8	3024	100,80
		Pengembangan Co Working Space	5 paket	1 paket	1 paket				

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 8 indikator sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 5 indikator kinerja dengan predikat tercapai, 2 indikator memiliki predikat akan tercapai, dan 1 indikator dengan predikat perlu upaya keras , yaitu: Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini disebabkan terbitnya Surat Edaran No 3 Tahun 2023 dari Kemenkop UKM tentang Moratorium Pelaksanaan Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. Sehingga semua penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam perlu menyesuaikan dengan ketentuan baru tersebut.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Pembangunan Gedung PLUT KUMKM dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk Pemberdayaan KUMKM serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Triwulan II Tahun 2023

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.636.263.149	4.716.214.776	37,32
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.195.580	498.970	4,09
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	564.080	0	0,00
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.117.280	0	0,00
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.729.190	0	0,00
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.610.080	0	0,00
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.961.990	0	0,00
2	17	1	2.01	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.212.960	498.970	41,14
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.212.357.840	4.105.662.195	44,57
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.960.986.160	4.012.202.195	44,77
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.080.000	93.460.000	37,37

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596.480	0	0,00
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	695.200	0	0,00
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.141.188.772	321.980.524	28,21
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.380.275	50.050.000	20,73
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.209.000	3.120.000	11,47
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.077.190	14.629.000	15,55
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.964.379	5.428.400	11,56
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	570.000	29,69
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.000.000	18.182.700	33,67
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.215.860	99.600.424	18,54
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	138.422.068	130.400.000	94,20
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.362.120	36.660.000	38,44
6	6	6	6	5	Pengadaan Mebel	44.837.384	0	0,00
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.524.736	36.660.000	72,56
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.640.000	34.253.466	29,37
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.640.000	34.253.466	29,37
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.058.518.837	217.159.621	10,55
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	16.839.287	46,37
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	348.054.470	88.202.334	25,34
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.476.070	14.050.000	27,83
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.623.670.117	98.068.000	6,04
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	214.521.290	46.456.100	21,66
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91.666.650	0	0,00
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	91.666.650	0	0,00

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
					Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	2	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	46.456.100	37,81
2	17	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	122.854.640	46.456.100	37,81
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	554.915.380	204.508.220	36,85
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	554.915.380	204.508.220	36,85
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	241.871.090	0	0,00
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	313.044.290	204.508.220	65,33
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	366.205.089	254.609.500	69,53
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.205.089	254.609.500	69,53
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	366.205.089	254.609.500	69,53
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	626.022.270	261.167.866	41,72
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	626.022.270	261.167.866	41,72
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	626.022.270	261.167.866	41,72
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.932.435.960	992.971.062	33,86
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.932.435.960	992.971.062	33,86

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.932.435.960	992.971.062	33,86
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.561.157.350	1.167.545.044	25,60
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	4.561.157.350	1.167.545.044	25,60
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	325.664.600	99.150.554	30,45
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	227.454.550	87.539.880	38,49
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	2.128.093.000	365.146.411	17,16
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	467.922.000	202.922.449	43,37
2	17	07	2.01	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1.412.023.200	412.785.750	29,23
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	12.112.719.680	1.514.514.473	12,50
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	12.112.719.680	1.514.514.473	12,50
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	12.112.719.680	1.514.514.473	12,50
JUMLAH						34.004.240.168	9.157.987.041	26,93

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, dan 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebesar Rp 34.004.240.168 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 25.435.036.168,- DAK Fisik untuk Pembangunan Gedung PLUT Sebesar Rp. 8.569.204.000,- dan dari DAK Non Fisik untuk pemberdayaan KUMKM sebesar Rp. 420.370.000,-

Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 9.157.987.041. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 24.846.253.127.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	
Tujuan:														
Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	50,70	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	-	-	37,33	-	-	-	54,00
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	10,24	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	-	-	17,11	-	-	-	13,00
Sasaran:														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	88,72	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	88,61	76,64	76,70	-	-	-	76,50
Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	-	-	1,02	-	-	-	35,00
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,13	77,20	77,50	77,75	78,00	78,50	81,08	79,71	80	-	-	-	80

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Tujuan **“Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase koperasi yang berkualitas”, sampai dengan Triwulan II 2023 tercapai sebesar

37,33 % dari target sebesar 54 % atau baru sebesar 69,13 %.

- b. Tujuan **“Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha”, telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2023 sudah sebesar 17,11% dari target sebesar 13,00% (capaian sebesar 131,62%);
- c. Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase koperasi aktif”, telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2023 sudah sebesar 76,70% dari target sebesar 76,50% (capaian sebesar 100,26%);
- d. Sasaran **“Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 baru tercapai 1,02 % dari target 35% (capaian sebesar 0,75%); karena kesulitan dalam mendata Usaha Mikro yang terdaftar melalui OSS.
- e. Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2023 realisasinya sebesar 80% dari target sebesar 77,20% (capaian sebesar 103,63%);

Selain dari aspek capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET					REALISASI KINERJA		PROYEK SI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	TW. II 2023	2023	2024
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100%	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Selanjutnya, selain realisasi dari target Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga perlu dicermati realisasi dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2. 5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	TW.II 2023	2023	2024	
ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	Persentase koperasi aktif	%	76%	76,50%	77%	77,5%	78%	76,64%	76,70%	-	77%	
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	12%	13%	14%	15%	16%	16,93%	17,11%	-	14%	
3	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	53%	54%	55%	55%	56%	48,22%	37,33%	-	55%	

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

Dari tabel diatas realisasi Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah 2 indikator sudah melampaui target yaitu Indikator Persentase Koperasi Aktif dan Indikator Meningkatnya usaha Mikro menjadi wirausaha, sedangkan 1 indikator yaitu Meningkatnya Koperasi yang berkualitas masih dalam tahap pencapaian target.

Untuk selanjutnya sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKD di atas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender. Data menunjukkan dari 8 program, 14 kegiatan, dan 38 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2023, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 2 program (25%), 2 kegiatan (14,29 %) dan 3 sub kegiatan (7,89 %). Adapun untuk jumlah anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di tahun 2023 adalah sebesar Rp 34.004.240.168,- sementara jumlah anggaran yang responsif gender (anggaran sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebesar Rp 3.400.357.960,- (9,99 %).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat

disimpulkan bahwa Secara umum kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah on the track. Beberapa target yang ditetapkan telah dapat dicapai, sementara target indikator lainnya masih dalam proses pencapaian

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, diantaranya:

- a. Belum tersedianya database Pelaku UMKM di Kota Semarang;
- b. Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Pengurus/pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang
- c. Masih kurangnya informasi dan pemahaman pelaku usaha mikro terhadap pendaftaran IUMK melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau OSS berbasis Resiko;
- d. Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga Keuangan Perbankan/Non Perbankan;
- e. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan :

- a. Perlunya dibangun sebuah sistem terkait database UMKM di Kota Semarang
- b. Optimalisasi pelatihan Perkoperasian dan Uji Kompetensi bagi pengelola Koperasi dan manajemen kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro;
- c. Optimalisasi kegiatan sosialisasi pengurusan IUMK melalui OSS RBA kepada para pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang;
- d. Meningkatkan Sosialisasi Kredit Wibawa kepada masyarakat baik pelaku usaha mikro serta penyelenggarakan Forum Kemitraan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan lembaga Perbankan/Non Perbankan
- e. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering

dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.

- Lambatnya regenerasi didalam Koperasi.
- Lemahnya komunikasi diantara lembaga-lembaga yang melakukan pemberdayaan KUMKM.
- kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro.
- Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh pelaku usaha mikro dalam pemasaran.
- Kemampuan dan Pengetahuan Tehnologi Informasi KUMKM masih terbatas.

b. Peluang:

- Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.
- Keberpihakan Pemerintah kepada KUMKM melalui Peraturan Perundang-undangan antara lain UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas yang memaksa UMKM untuk berkompetisi.
- Beragamnya Produk UMKM serta Sumber daya alam yang masih melimpah.
- Pembangunan infrastruktur secara massif memudahkan pergerakan arus barang/jasa.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis :

1. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu: belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasidan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 kegiatan ekspor roduknya; dan perlunya Optimalisasi PengembanganObyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE
2. Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha diprioritaskan pada upaya-upaya untuk: Meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan investasi, peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan sarana dan event yang langsung

dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro, peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta pemasaran produk, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing dipasar internasional.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					31.686.684.236	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					31,826,684,236
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	214.521.290	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	214,521,290		
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	91.666.650	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Kop	91,666,650		
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 Unit Usaha	91.666.650	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	91,666,650		
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan	2 kop	122.854.640	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	2 Kop	122,854,640		

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pinjam			untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kas Koperasi Simpan Pinjam			
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140 Unit Usaha	122.854.640	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	122,854,640	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	423.919.290	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	463,919,290	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	490 kop	423.919.290	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	463,919,290	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	370 Unit Usaha	132.027.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Unit Usaha	172,027,000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja		291.892.290			Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja		291,892,290	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	31 Persen	366.205.089	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	32 Persen	366,205,089	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	60%	366.205.089	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68%	366,205,089	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	366.205.089	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	366,205,089	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	569.033.650	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	569,033,650	
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitas Pelatihan	1%					Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitas Pelatihan		1%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70%	569.033.650	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	75%	569,033,650	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360 org	569.033.650	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 org	569,033,650	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	2.636.334.793	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	2,604,277,614	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2.636.334.793	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2,604,277,614	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	500 org	2.540.277.614	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan Perlindungan Koperasi	400 Unit Usaha	2,604,277,614	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan	3%	3.723.800.110	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan	3%	3,759,800,110	

No	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			kelembagaan, akses pembiayaan					kelembagaan, akses pembiayaan			
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	1.050 org	3.723.800.110	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	3,759,800,110	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 org	274.550.700	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Unit Usaha	274,550,700	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	168.579.010	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 Unit Usaha	168,579,010	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660 org	1.311.148.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 org	1,311,148,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	500 org	447.272.910	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	200 org	483,272,910	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Pemberdayaan Usaha Mikro		Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			Pemberdayaan Usaha Mikro		Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 org	1.522.249.490	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		1,522,249,490	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	12.221.316.838	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	12,221,316,838	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	150 org	12.221.316.838	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	12,221,316,838	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	12.221.316.838	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	12,221,316,838	
	NON URUSAN					NON URUSAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.627.610.355	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11,627,610,355	
		Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%			Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan	100%		

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
			Pelaporan Keuangan SKPD					Pelaporan Keuangan SKPD			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dok	12.195.580	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dok	12,195,580	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	564.080	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	564,080	
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RTP SKPD	1 dok			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RTP SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.117.280	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3,117,280	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	3.729.190	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	3,729,190	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.610.080	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1,610,080	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.961.990	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1,961,990	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.212.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1,212,960	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	8.293.676.908	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	8,293,676,908	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 org/bln	8.070.065.228	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 org/bln	8,070,065,228	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	222.320.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dok	222,320,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	596.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	596,480	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	695.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	695,200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.129.052.456	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1,129,052,456	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	259.807.069	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	259,807,069	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangg	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	17.268.890	Penyediaan Peralatan Rumah Tangg	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	17,268,890	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	57.076.870	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	57,076,870	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	28.900.059	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	28,900,059	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,920,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	54.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	54,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	530.397.860	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	530,397,860	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	179.681.708	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	179,681,708	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	668.189.134	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	668,189,134	
	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	617.664.398	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	617,664,398	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.524.736	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50,524,736	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	116.640.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	116,640,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	116.640.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	116,640,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	1.407.856.277	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	1,407,856,277	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36,318,180	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	348.054.470	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	348,054,470	
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	47.299.720	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	47,299,720	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	976.183.907	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	976,183,907	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro

dengan indikator tujuan :

1. Persentase Koperasi yang Berkualitas
2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi
- b. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Koperasi aktif
- b. Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro
- c. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	- Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	54,00
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	- Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	13,00
SASARAN :			
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	- Persentase Koperasi aktif	%	76,50
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	- Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	35,00
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	%	77,50

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2022

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bertugas mendukung pencapaian Misi ke 2 “Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila”. Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Laju Pertumbuhan ekonomi” dan indikator sasaran “ Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB”.
3. Keselarasan program dan kegiatan antara Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor KasKoperasi Simpan Pinjam	3%	3%	3%	214.521.290	214.521.290	214.521.290	APBD	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	15 kop	15 kop	91.666.650	91.666.650	91.666.650	APBD	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80 unit usaha	80 unit usaha	80 unit usaha	91.666.650	91.666.650	91.666.650	APBD	
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	2 kop	2 kop	122.854.640	122.854.640	122.854.640	APBD	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140 unit usaha	140 unit usaha	140 unit usaha	122.854.640	122.854.640	122.854.640	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kot									
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50%	50%	554.915.380	554.915.380	423.919.290	APBD	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	490 unit usaha	490 unit usaha	100 unit usaha	554.915.380	554.915.380	423.919.290	APBD	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	370 unit usaha	370 unit usaha	370 unit usaha	241.871.090	241.871.090	132.027.000	APBD	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundangundangan	240 unit usaha	240 unit usaha	240 unit usaha	313.044.290	313.044.290	291.892.290	APBD	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	31%	31%	31%	366.205.089	366.205.089	366.205.089	APBD	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	60%	60%	60%	366.205.089	366.205.089	366.205.089	APBD	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 unit usaha	300 unit usaha	300 unit usaha	366.205.089	366.205.089	366.205.089	APBD	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	10%	10%	335.896.070	378.117.270	569.033.650	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%	1%	1%					
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70%	70%	72%	335.896.070	378.117.270	569.033.650	APBD	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360 org	360 org	240 org	335.896.070	378.117.270	569.033.650	APBD	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	26%	26%	26%	2.762.566.380	2.932.435.960	2.540.277.614	APBD	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	50%	50%	2.762.566.380	2.932.435.960	2.540.277.614	APBD	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	500 org	500 org	2.447 org	2.762.566.380	2.932.435.960	2.540.277.614	APBD	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3%	3%	3.792.070.650	4.388.692.350	3.723.800.110	APBD	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi	1050 org	1050 org	600 org	3.792.070.650	4.388.692.350	3.723.800.110	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan								
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	522.672.200	325.664.600	274.550.700	APBD	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 unit usaha	100 unit usaha	200 unit usaha	227.454.550	227.454.550	168.579.010	APBD	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	660 unit usaha	660 unit usaha	410 unit usaha	2.080.993.000	2.128.093.000	1.311.148.000	APBD	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	500 org	500 org	605 org	515.022.000	467.922.000	447.272.910	APBD	
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 org	150 org	900 org	445.928.900	1.239.558.200	1.522.249.490	APBD	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	20%	20%	3.963.898.830	3.963.885.680	12.221.316.838	APBD	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	150 org	150 org	100 org	3.963.898.830	3.963.885.680	12.221.316.838	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 unit usaha	500 unit usaha	1.300 unit usaha	3.963.898.830	3.963.885.680	12.221.316.838	APBD	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	12.711.962.479	12.636.263.149	11.627.610.355	APBD	
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	100%					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 dok	10 dok	9 dok	12.195.580	12.195.580	12.195.580	APBD	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	564.080	564.080	564.080	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	3.117.280	3.117.280	3.117.280	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	3.729.190	3.729.190	3.729.190	APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.610.080	1.610.080	1.212.960	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.961.990	1.961.990	1.212.960	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	3 dok	1.212.960	1.212.960	1.212.960	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	9.215.117.840	9.212.357.840	8.293.676.908	APBD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok							
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 org/bln	35 org/bln	35 org/bln	8.960.986.160	8.960.986.160	8.070.065.228	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	12 dok	12 dok	252.840.000	250.080.000	222.320.000	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	596.480	596.480	596.480	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	695.200	695.200	695.200	APBD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.241.092.527	1.141.188.772	1.129.052.456	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 paket	14 paket	15 paket	231.107.778	241.380.275	259.807.069 D	APBD	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	27.209.000	27.209.000	17.268.890	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	94.077.190	94.077.190	57.076.870	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	46.964.379	46.964.379	28.900.059	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	12 dok	12 dok	1.920.000	1.920.000	1.920.000	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	12 lap	12 lap	54.000.000	54.000.000	54.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	537.215.860	537.215.860	530.397.860	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 dok	8 dok	8 dok	248.598.320	138.422.068	179.681.708	APBD	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	95.362.120	95.362.120	668.189.134	APBD	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit	14 unit	44.837.384	44.837.384	617.664.398		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	50.524.736	50.524.736	50.524.736		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	116.640.000	116.640.000	116.640.000		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	116.640.000	116.640.000	116.640.000		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	2.031.554.412	2.058.518.837	1.407.856.277		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 unit	25 unit	25 unit	316.345.380	348.054.470	348.054.470		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	7 unit	63 unit	50.476.070	50.476.070	47.299.720		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1.628.414.782	1.623.670.117	976.183.907		
JUMLAH										

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

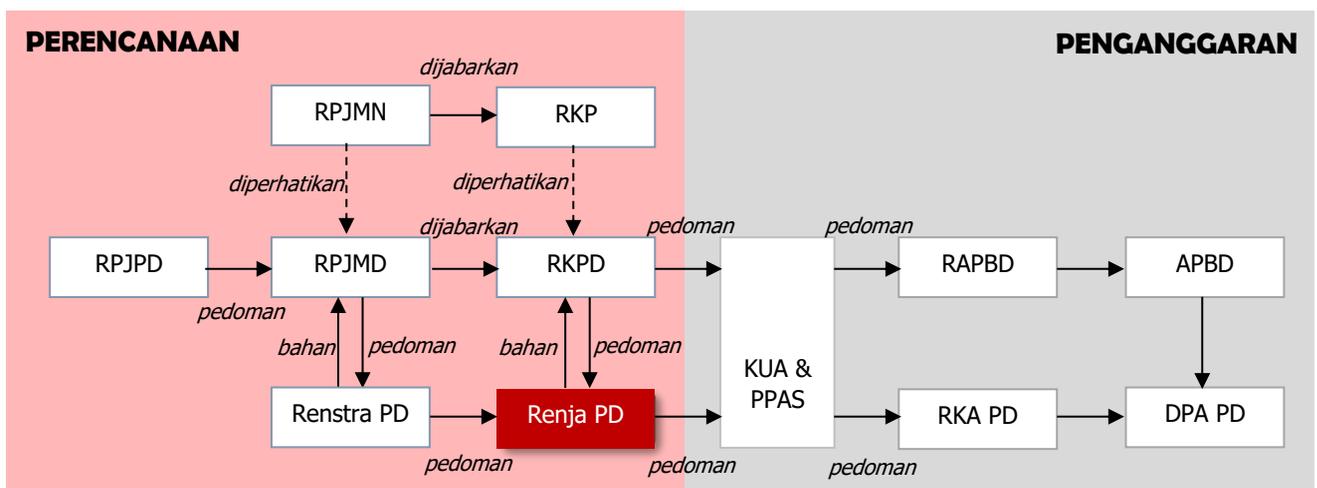
20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh adanya Dinamika perkembangan kebutuhan operasional ex rutin dari program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota; Penyesuaian anggaran belanja daerah akibat efisiensi dan refocusing kegiatan serta realokasi anggaran yang telah direncanakan dan dialokasikan pada awal tahun 2023.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

- tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022

- (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan

pada tahun 2023;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai Triwulan II Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3744 penanam modal	3.697 penanam modal	3691 penanam modal	2093 penanam modal	56,71%	2093 penanam modal	55,90%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	5 buah	3 Buah	4 buah	3 buah	75,00%	3 buah	60,00%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen	1 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	66,67%	4 dokumen	66,67%
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3744 penanam modal	1 dokumen	3691 Kegiatan usaha	2586 kegiatan usaha	70,06%	2586 kegiatan usaha	69,07%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	2 dokumen	100,00%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	654 investor	675 investor	492 Investor	395 investor	80,28%	395 investor	60,40%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	7 kegiatan	5 kegiatan	8 kegiatan	4 kegiatan	50,00%	4 kegiatan	57,14%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	7 dokumen	2 kegiatan	8 dokumen	4 dokumen	50,00%	4 dokumen	57,14%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	100%	95,63%	95%	61,19%	64,41%	61,19%	61,19%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	100%	100%	61,19%	61,19%	61,19%	61,19%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2500 pelaku usaha	100%	2400 pelaku usaha	1488 pelaku usaha	62,00%	1488 pelaku usaha	59,52%
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	800 kegiatan usaha	-	750 kegiatan usaha	353 kegiatan usaha	47,07%	353 kegiatan usaha	44,13%
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	900 kegiatan usaha	-	800 kegiatan usaha	376 kegiatan usaha	47,00%	376 kegiatan usaha	41,78%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	7000 kegiatan usaha	-	6000 kegiatan usaha	2820 kegiatan usaha	47,00%	2820 kegiatan usaha	40,29%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	1 (nilai)	2 (nilai)	1,6 (nilai)	80,00%	1,6 (nilai)	80,00%
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	10%	12,49%	7%	5,6%	80,00%	5,6%	56,00%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	20 kegiatan usaha	18 perusahaan	19 pelaku usaha	16 pelaku usaha	84,21%	16 pelaku usaha	80,00%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 kegiatan usaha	1 dokumen	19 kegiatan usaha	16 kegiatan usaha	84,21%	16 kegiatan usaha	80,00%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	100%	95%	96%	50%	52,08%	50%	50,00%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	80,56%	80,56%	80,56%	80,56%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	75,93%	75,93%	75,93%	75,93%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	9 dokumen	11 dokumen	10 dokumen	90,91%	10 dokumen	90,91%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	3 dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0,00%	0	0,00%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 laporan	100,00%	1 laporan	100,00%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	2 dokumen	3 laporan	3 laporan	100,00%	3 laporan	100,00%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	100%	100%	80,56%	80,56%	80,56%	80,56%
2.18.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	100%	49 orang/bulan	43 orang/bulan	87,76%	43 orang/bulan	87,76%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	100,00%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1 dokumen	18 laporan	11 laporan	61,11%	11 laporan	61,11%
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	1 dokumen	100,00%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	100 buah	200 unit	200 unit	100,00%	200 unit	100,00%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%
2.18.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	4 jenis	1 paket	1 paket	100,00%	1 paket	100,00%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 jenis	2 paket	1 paket	50,00%	1 paket	100,00%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	174 jenis	2 paket	1 paket	50,00%	1 paket	100,00%
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5000 orang	12 laporan	8 laporan	66,67%	8 laporan	66,67%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output), dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstras s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	2000 kegiatan	12 laporan	8 laporan	66,67%	8 laporan	66,67%
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	6 jenis	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100,00%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100%	12 laporan	8 laporan	66,67%	8 laporan	66,67%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100%	12 laporan	8 laporan	66,67%	8 laporan	66,67%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	100,00%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	23 unit	17 unit	34 unit	200,00%	34 unit	100,00%
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	100%	5 unit	0	0,00%	0	0,00%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	100%	30 unit	25 unit	83,33%	25 unit	83,33%

Sumber: DPMPSTSP Kota Semarang, 2023

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 s.d. Triwulan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

- 1) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (satu) Urusan Penanaman Modal, 6 (enam) Program dengan 9 (sembilan) indikator program dan 12 kegiatan dengan 12 (dua belas) indicator kinerja kegiatan.
- 2) Dari 9 (sembilan) indikator kinerja program, terdapat 4 (empat) indikator yang dipekirakan dapat melampaui target, 5 (lima) Indikator diperkirakan dapat memenuhi target.
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang bekerjasama dengan seluruh pihak terkait masih berproses mengupayakan 9 (sembilan) indikator kinerja program dapat urusan penanaman modal dapat tercapai dan melampaui target.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.501.133.195	6.460.594.248	41,68%
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.618.180	8.010.800	58,82%
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.204.440	898.640	74,61%
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.610.080	1.602.880	99,55%
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.961.990	0	0,00%
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.363.680	2.352.880	99,54%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.961.990	0	0,00%
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.090.080	494.880	45,40%
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.425.920	2.661.520	77,69%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.128.490.517	4.322.074.823	53,17%
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.837.042.837	4.200.001.063	53,59%
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	287.980.000	120.300.000	41,77%
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.090.080	1.082.880	99,34%
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.287.520	690.880	53,66%
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.090.080	0	0,00%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.952.000	0	0,00%
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	62.952.000	0	0,00%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.051.090.748	1.353.539.464	26,80%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.888.586.834	516.552.386	27,35%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik	79.486.308	23.212.572	29,20%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	18.350.273	2.025.000	11,04%
2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	24.964.900	6.898.800	27,63%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	799.688.060	129.359.706	16,18%
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	2.240.014.373	675.491.000	30,16%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.298.240	607.234.782	39,04%
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	623.130.240	269.534.782	43,25%
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932.168.000	337.700.000	36,23%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	689.683.510	169.734.379	24,61%
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemel, Biaya Pemel & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kend. Dinas Jabatan	36.318.180	23.909.000	65,83%
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemel. Biaya Pemel & Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lingkungan	403.272.500	126.487.299	31,37%
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	363.600	0	0,00%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.729.230	19.338.080	7,74%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PM	1.665.446.626	442.153.194	26,55%
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif di Bidang PM yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	903.961.203	346.455.070	38,33%
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Intensif dan Kemudahan PM	573.158.271	140.732.352	24,55%
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Intensif & Kemudahan PM	330.802.932	205.722.718	62,19%
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	761.485.423	95.698.124	12,57%
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum PM Daerah Kab/Kota	88.429.505	66.457.944	75,15%
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi & Peluang Usaha Kab/Kota	673.055.918	29.240.180	4,34%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.830.917.151	416.232.008	22,73%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Keg.Promosi PM Daerah Kab/Kota	1.830.917.151	416.232.008	22,73%
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	283.964.853	175.349.800	61,75%
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Keg. Promosi PM Daerah Kab/Kota	1.546.952.298	240.882.208	15,57%
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3.300.692.269	820.945.962	24,87%
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan scr Terpadu Satu Pintu di Bid. PM yang menjadi kewenangan Kab/Kota	3.300.692.269	820.945.962	24,87%
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1.144.592.003	311.333.085	27,20%
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.191.482.697	238.857.723	20,05%
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	164.989.625	33.807.209	20,49%
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	799.627.944	236.947.945	29,63%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM	561.960.573	221.456.650	39,41%

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan PM yg menjadi Kewenangan Kab/Kota	561.960.573	221.456.650	39,41%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)	217.100.000	81.315.600	37,46%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK 75.000.000)	344.860.573	140.141.050	40,64%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA & SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	850.526.728	182.032.327	21,40%
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data Informasi Perizinan & Non Perizinan yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan erintegrasi Secara Elektronik	850.526.728	182.032.327	21,40%
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian & Pemanfaatan Data & Informasi Perizinan & Non Perizinan Berbasis Siste Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	850.526.728	182.032.327	21,40%
JUMLAH		23.710.676.542	8.543.414.389	36,03%

Sumber : DPMPSTSP Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 s.d. 2.4. tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan bidang Penanaman Modal, dengan 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebesar Rp 23.710.676.542,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah). Dari anggaran tersebut, realisasi sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 8.543.414.389,- (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 15.167.262.153,- (lima belas milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semarang s.d Tahun 2021

INDIKATOR		TARGET RENSTRA						REALISASI			PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw.II	2023
Tujuan :											
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal	Persentase peningkatan nilai investasi	7%	10%	7%	7%	7%	7%	3%	12,49%	-43,44%	7%
Sasaran :											
Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi (dalam juta)	21.842.472	24.086.799	25.684.059	27.362.089	29.277.425	31.326.856	22.538.063	24.662.472	13.950.164	25.684.059
Terwujudnya Pelayanan Prima	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95%	95,50%	95,5	95,5	96	99,33%	124,90%	96,18%	95,50%

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “persentase peningkatan nilai investasi Kota Semarang”, pada triwulan II Tahun 2023 belum mencapai target, dimana capaian nilai investasi Kota Semarang baru 54,31% dari target. namun demikian proyeksi capaian target nilai investasi Kota Semarang tahun 2023 akan melampaui target yang telah ditetapkan;

- b. Sasaran “**Meningkatnya Nilai Investasi**” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Nilai Investasi” pada triwulan II Tahun 2023 telah melampaui target triwulan II tetapi belum meskipun belum melampaui target akhir tahun 2023, dimana nilai realisasinya (dalam juta) sebesar 13.950.164 dari target sebesar 25.684.059;
- c. Sasaran “**Meningkatnya Nilai Investasi dan Terwujudnya Pelayanan Prima**” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Persentase izin terbit sesuai SP” telah melampaui target dimana nilai realisasinya adalah 96,18% dari target sebesar 95,50%;

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi urusan bidang penanaman modal diantaranya:

- a. Sumber daya manusia yang kompeten masih terbatas.
- b. Rendahnya penguasaan teknologi oleh pegawai.
- c. Terbatasnya wadah peningkatan kapasitas, kualitas, dan kompetensi pegawai melalui pemanfaatan teknologi informasi dan diklat/bintek.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- e. Belum maksimalnya kegiatan promosi aset Kota Semarang yang dapat ditawarkan kepada investor.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Tingginya tingkat instabilitas kebijakan maupun regulasi yang baku yang mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.

- Kejadian luar biasa yang mempengaruhi semua aspek kegiatan masyarakat, baik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan pelayanan publik serta kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
 - Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPMPTSP Kota Semarang untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti;
- b. Peluang:
- Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti.
 - Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal merupakan salah satu faktor yang akan berpengaruh terhadap pengungkit pembangunan ekonomi daerah.
 - Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
 - Adanya regulasi yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal yang cepat, murah, mudah, transparan, dan pasti, serta peningkatan kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan.
 - Adanya dorongan dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu menjadi institusi yang terpercaya.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Terhambatnya data perkembangan investasi di Kota Semarang, sehingga dapat menyebabkan target promosi investasi di Kota Semarang tidak mencapai target yang ditentukan
- b. Belum Optimalnya proses pelayanan perizinan secara Online, sehingga masih perlu adanya pendampingan perizinan online dan proses tatapmuka dengan pemohon masih ada.
- c. Masih minimnya Informasi dan Edukasi tentang pemahaman pemohon dan petugas pelayanan perizinan melalui OSS secara teknis antar OPD Teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
- d. Perkembangan Teknologi yang Menyebabkan Perubahan Perilaku Pemohon Izin/Masyarakat.

- e. Belum optimalnya koordinasi antara Pusat, Provinsi, dan kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, serta penanaman modal.
- f. Pandemi Covid yang masih berlangsung mengakibatkan proses pelayanan perizinan terhambat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayann Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3691 penanam modal	1.665.446.626	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3691 penanam modal	1.665.446.626	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	4 buah	903.961.203	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	4 buah	903.961.203	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen	573.158.271	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen	573.158.271	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3691 Kegiatan usaha	330.802.932	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3691 Kegiatan usaha	330.802.932	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	761.485.423	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	761.485.423	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	88.429.505	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	88.429.505	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	673.055.918	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	673.055.918	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492 Investor	1.830.917.151	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492 Investor	1.830.917.151	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	8 kegiatan	1.830.917.151	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Promosi Investasi	8 kegiatan	1.830.917.151	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	283.964.853	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	283.964.853	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 dokumen	1.546.952.298	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 dokumen	1.546.952.298	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	3.300.692.269	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	3.300.692.269	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	3.300.692.269	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	3.300.692.269	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400 pelaku usaha	1.144.592.003	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400 pelaku usaha	1.144.592.003	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	750 kegiatan usaha	1.191.482.697	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	750 kegiatan usaha	1.191.482.697	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	800 kegiatan usaha	164.989.625	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	800 kegiatan usaha	164.989.625	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6000 kegiatan usaha	799.627.944	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6000 kegiatan usaha	799.627.944	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	561.960.573	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	561.960.573	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	561.960.573	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	561.960.573	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	19 pelaku usaha	217.100.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	19 pelaku usaha	217.100.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	19 kegiatan usaha	344.860.573	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	19 kegiatan usaha	344.860.573	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Kota Semarang	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96%	850.526.728	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kota Semarang	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan	96%	850.526.728	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PENANAMAN MODAL							non perizinan serta penanaman modal			
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	850.526.728	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	850.526.728	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	850.526.728	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	850.526.728	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	15.501.133.195	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	15.501.133.195	
			Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	15.501.133.195			Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	15.501.133.195	
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	13.618.180			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	13.618.180	
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	13.618.180			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	13.618.180	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	13.618.180	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	11 dokumen	13.618.180	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.204.440	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.204.440	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.610.080	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1.610.080	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.961.990	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.961.990	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.363.680	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2.363.680	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.961.990	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.961.990	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 dokumen	1.090.080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1 dokumen	1.090.080	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Realisasi Kinerja SKPD		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.425.920	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.425.920	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	8.128.490.517	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	8.128.490.517	
2.18.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	7.837.042.837	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	7.837.042.837	
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	287.980.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	287.980.000	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.090.080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.090.080	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.287.520	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 laporan	1.287.520	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.090.080	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.090.080	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	62.952.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	62.952.000	
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	62.952.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	62.952.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	5.051.090.748	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	5.051.090.748	
2.18.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.888.586.834	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.888.586.834	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	79.486.308	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	79.486.308	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	18.350.273	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	18.350.273	
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	24.964.900	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	24.964.900	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	799.688.060	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	799.688.060	
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2.240.014.373	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2.240.014.373	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	1.555.298.240	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	1.555.298.240	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	623.130.240	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	623.130.240	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	932.168.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	932.168.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	689.683.510	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	689.683.510	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36.318.180	

Kode Rekening	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	atau Kendaraan Dinas Jabatan										
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	403.272.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	403.272.500	
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	363.600	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	363.600	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	249.729.230	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	249.729.230	

Sumber: DPMPTSP Kota Semarang, 2022

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023

merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:

- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
- 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.

- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

- 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelaynan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan

dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, mengacu pada misi ke-2 RPJMD Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Riset dan Inovasi Berdasarkan Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila”. Tujuan Renstra ini juga merujuk pada tujuan RPJMD Kota Semarang yang ke-3 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing” yang kemudian diwujudkan sebagai tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026, sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Investasi” yang kemudian juga menjadi tujuan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatnya Pertumbuhan Investasi ”,

dengan indikator tujuan **“Persentase Peningkatan Nilai Investasi”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Meningkatkan Kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tiga Sasaran tersebut memiliki indikator sasaran berikut ini:

1. Nilai investasi
2. Persentase Izin Terbit Sesuai SP
3. Nilai AKIP

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023

	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	7

SASARAN :	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	(dalam juta)	25.684.059
	Meningkatnya Kemudahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	%	95
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	75

Sumber : DPMPTSP Kota Semarang, 2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing. Namun secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” dan tiga indikator sasaran, antara lain; Nilai Investasi, Persentase Izin Terbit sesuai SP, dan Nilai AKIP.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kota Semarang yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun
2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023
2.18.01	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitas Investasi	3691 penanam modal	3691 penanam modal	3691 penanam modal	1.677.125.085	1.677.125.085	1.665.446.626
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas/Insentif Yang Bisa Diberikan Kepada Investor	4 buah	4 buah	4 buah	877.796.431	877.796.431	903.961.203
2.18.02.2.01.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	499.318.314	499.318.314	573.158.271
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3691 Kegiatan usaha	3691 Kegiatan usaha	3691 Kegiatan usaha	378.478.117	378.478.117	330.802.932
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Investasi di Kota Semarang	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	799.328.654	799.328.654	761.485.423
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.022.000	100.022.000	88.429.505

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	699.306.654	699.306.654	673.055.918
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	492 Investor	492 Investor	492 Investor	1.972.815.361	1.972.815.361	1.830.917.151
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi	8 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	1.972.815.361	1.972.815.361	1.830.917.151
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	298.558.968	298.558.968	283.964.853
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.674.256.393	1.674.256.393	1.546.952.298
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin Terbit Sesuai SP	95%	95%	95%	3.375.109.445	3.375.109.445	3.300.692.269
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SP	100%	100%	100%	3.375.109.445	3.375.109.445	3.300.692.269
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2400 pelaku usaha	2400 pelaku usaha	2400 pelaku usaha	1.163.649.883	1.163.649.883	1.144.592.003

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	750 kegiatan usaha	750 kegiatan usaha	750 kegiatan usaha	1.191.482.697	1.191.482.697	1.191.482.697
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	800 kegiatan usaha	800 kegiatan usaha	800 kegiatan usaha	170.000.138	170.000.138	164.989.625
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6000 kegiatan usaha	6000 kegiatan usaha	6000 kegiatan usaha	849.976.727	849.976.727	799.627.944
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	2 (nilai)	2 (nilai)	2 (nilai)	586.869.751	586.869.751	561.960.573
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN(Milyar Rupiah)	7%	7%	7%	586.869.751	586.869.751	561.960.573
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	19 pelaku usaha	19 pelaku usaha	19 pelaku usaha	217.100.000	217.100.000	217.100.000
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	19 kegiatan usaha	19 kegiatan usaha	19 kegiatan usaha	369.769.751	369.769.751	344.860.573

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal	96%	96%	96%	960.524.998	960.524.998	850.526.728
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	100%	100%	100%	960.524.998	960.524.998	850.526.728
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	960.524.998	960.524.998	850.526.728
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	17.607.521.116	17.607.521.116	15.501.133.195
		Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%	100%	100%	17.607.521.116	17.607.521.116	15.501.133.195
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	17.607.521.116	17.607.521.116	13.618.180
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	17.607.521.116	17.607.521.116	13.618.180
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihilangkan	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	13.618.180	13.618.180	13.618.180

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1.204.440	1.204.440	1.204.440
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.610.080	1.610.080	1.610.080
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.961.990	1.961.990	1.961.990
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.363.680	2.363.680	2.363.680
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.961.990	1.961.990	1.961.990
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.090.080	1.090.080	1.090.080
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3.425.920	3.425.920	3.425.920
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi KeuangannSKPD	100%	100%	100%	8.977.389.514	8.977.389.514	8.128.490.517

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023
2.18.01.2.03	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	49 orang/bulan	49 orang/bulan	8.686.371.834	8.686.371.834	7.837.042.837
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	287.550.000	287.550.000	287.980.000
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.090.080	1.090.080	1.090.080
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	18 laporan	1.287.520	1.287.520	1.287.520
2.18.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.090.080	1.090.080	1.090.080
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	100%	100%	126.543.150	126.543.150	62.952.000
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	200 unit	200 unit	200 unit	126.543.150	126.543.150	62.952.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	5.360.831.392	5.360.831.392	5.051.090.748

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023
2.18.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1.793.390.139	1.793.390.139	1.888.586.834
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	204.083.952	204.083.952	79.486.308
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	129.615.306	129.615.306	18.350.273
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	41.617.200	41.617.200	24.964.900
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	752.675.060	752.675.060	799.688.060
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.439.449.735	2.439.449.735	2.240.014.373
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	1.895.319.800	1.895.319.800	1.555.298.240
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	861.507.800	861.507.800	623.130.240
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.033.812.000	1.033.812.000	932.168.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran		
			Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APDB TA 2023	Perubahan Renja 2023
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	1.233.819.080	1.233.819.080	689.683.510
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	17 unit	17 unit	403.272.500	403.272.500	403.272.500
2.18.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	361 unit	361 unit	5 unit	18.180.000	18.180.000	363.600
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	554 unit	554 unit	30 unit	776.048.400	776.048.400	249.729.230

Sumber : DPMPSTSP Kota Semarang, 2023

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

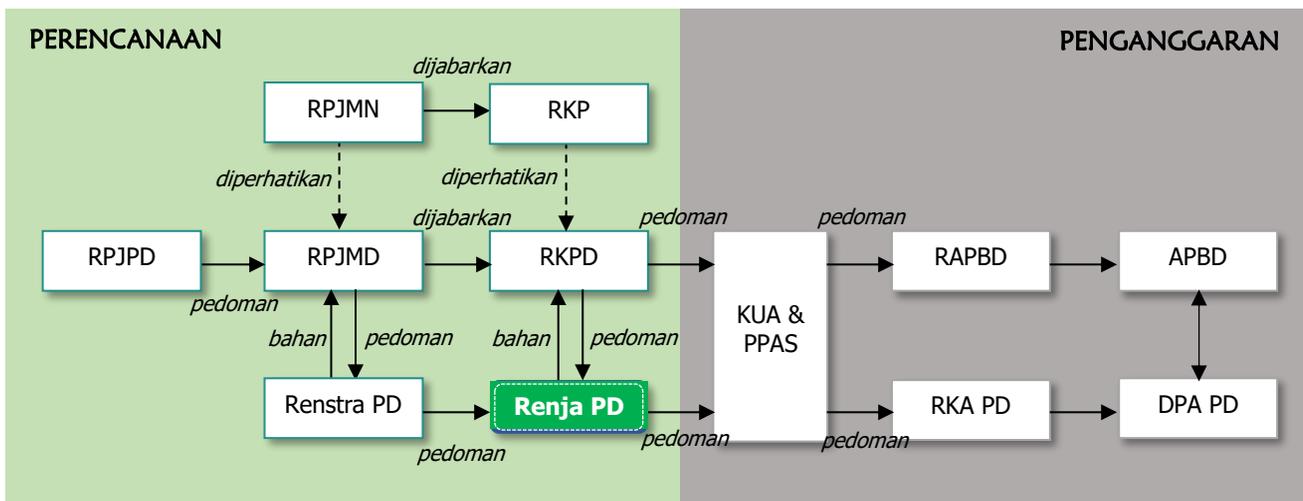
21. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perubahan Dispora Kota Semarang, yang berpedoman pada Renstra Dispora Kota Semarang. Untuk penyusunan Renja Perubahan Dispora Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Dispora Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana Perubahan tahun 2023 merupakan tahun kedua dalam periode Renstra tersebut.

Adapun muatan dari Renja Perubahan disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Tahun 2023.

Selanjutnya Renja Dispora Kota Semarang Perubahan Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dispora Kota Semarang Perubahan Tahun 2023.

Pemberdayaan dan Pembinaan Generasi Muda serta Pembinaan Keolahragaan di arahkan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia baru, yang berkualitas merupakan salah satu kiprah yang mendesak perlu dilakukan dan seiring dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang merupakan Paradigma baru dalam pelaksanaan sistem pemerintahan daerah.

Bertitik tolak dengan kiprah pembangunan dan pemberdayaan pemuda secara nasional, maka pembangunan dan pemberdayaan Pemuda Kota Semarang, mempunyai sasaran yang sama dan bersifat multi dimensi, upaya yang dilakukan antara lain dengan upaya mengaktualisasi segenap potensi, bakat dan minat, menumbuhkan kembangkan kemauan dan semangat wirausaha serta melindungi generasi muda dari sifat destruktif seperti penggunaan obat terlarang dan narkoba.

Untuk bidang keolahragaan yaitu turut berperan dalam pembinaan olahraga secara umum dan khususnya bagi kalangan pemuda, dan dilakukan sejak usia dini yang bertujuan untuk membentuk disiplin, sportifitas, sifat satria, semangat juang bagi upaya pembangunan manusia Indonesia baru yang sehat, unggul dan berketerampilan prima, serta berprestasi. Terkait upaya untuk mewujudkan sasaran, pembangunan dan pemberdayaan pemuda dan pembinaan olahraga di Kota Semarang.

Pada PERWAL Nomor 110 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Olahraga, dalam hal ini terkandung maksud bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi Pemerintah dalam pembinaan kepemudaan dan keolahragaan. Untuk itu sangat diharapkan Pemuda Olahraga Kota Semarang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks seperti :

1. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran Masyarakat seperti maraknya pengguna/pengedar Narkoba, Hiv/Aids, Minuman Keras, Perjudian dan Perilaku Kriminal remaja serta berbagai permasalahan sosial generasi muda yang merupakan masalah yang kompleks yang dapat mengancam masa depan generasi muda pada khususnya dan masa depan bangsa pada umumnya.
2. Adanya tuntutan demokrasi yang semakin terbuka dan reformasi di segala bidang, buruknya informasi dan ideologi politik asing yang bertentang dengan Pancasila sangat berpengaruh kepada generasi muda yang semakin mudah dan terbuka untuk diakses keinformasi global, kehidupan demokrasi politik yang masih dalam proses mencari arah dan pendewasaan.
3. Meningkatnya jumlah pemuda pengangguran sebagai dampak dari krisis ekonomi yang diakibatkan oleh masalah tenaga kerja, ketidakpastiaan iklim usaha, lemahnya kemampuan dan perilaku kewirausahaan dikalangan generasi muda.
4. Tuntutan reformasi di bidang olahraga, dimana masyarakat semakin kritis terhadap kinerja organisasi olahraga baik KONI maupun pengurus cabang olahraga. Tuntutan debirokratisasi, keterbukaan, akuntabilitas dan diterapkannya audit publik untuk penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat guna kepentingan olahraga.
5. Masih lemahnya kinerja beberapa cabang olahraga yang diakibatkan lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik pembina, pelatih, maupun profesi lain yang terkait sehingga pembina dan penanganan olahraga baik Tingkat

Sekolah, Klub, Kota Semarang, maupun Tingkat Provinsi berkesan amatiran, tidak serius dan tidak profesional.

6. Sarana dan Prasarana untuk semua cabang olahraga baik dari segi jumlah maupun kondisinya masih belum memadai, namun demikian untuk cabang olahraga tertentu boleh dikatakan sudah memenuhi syarat minimal
7. Sumber daya aparatur masih perlu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan Bidang kepemudaan dan keolahragaan maupun keterampilan teknis lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal sekaligus menjadi motivator.
8. Sistem dan Program pembinaan olahraga yang masih sporadis belum terpola dengan baik dan terbatas tenaga Profesional keolahragaan.
9. Dana pembinaan yang masih relatif kecil, sehingga banyak program yang tidak sempat terlaksana akibat terbagi dua.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang mempunyai durasi waktu Satu tahun kedepan, Sebagai suatu dokumen penting, sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renja, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Untuk mendukung visi Kota Semarang tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Daerah yang menangani Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan perlu menata organisasi dan personalianya untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan agar berhasil dan berdaya guna. Dalam rangka menata organisasi dan personalianya tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang Perubahan Tahun 2023 . Adanya Renja Perubahan dimaksudkan agar prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang dapat diterapkan dengan baik.

Proses penyusunan Renja Perubahan ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengelolaan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, merumuskan strategi, kebijakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan disajikan secara sistimatis serta dilengkapi dengan indikator tolok ukur pencapaiannya.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang tahun 2023 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan

- Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 - k. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016- 2021 ;
 - m. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - n. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - o. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - s. Perwal Kota Semarang No 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang
 - t. Perwal Kota Semarang No 118 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Gelanggang Olahraga Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kota Semarang Perubahan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator (tolokukur) kinerja kegiatan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana Kerja ini adalah:

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) adalah :

- a. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dan arah yang jelas bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dalam mencapai tujuan organisasi selama lima tahun ke depan;
- b. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang selama tahun 2023 melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang.
- c. Sebagai acuan dalam pembuatan Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang.
- d. Tersedianya dokumen perencanaan satu tahun
- e. Terciptanya hubungan antara keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (*immediate outcome*) dan selanjutnya dengan hasil akhir (*final outcome*) yang benar dan lengkap;

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Renja Dispora Kota Semarang Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DISPORA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dispora Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dispora Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispora Kota Semarang, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DISPORA KOTA SEMARANG

Memuat telaah terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dispora Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DISPORA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dispora Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN DISPORA KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DISPORA KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DISPORA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja Perubahan perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja Perubahan yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dispora Kota Semarang Perubahan Tahun 2023, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dispora Kota Semarang sampai dengan tahun 2023, yang menggunakan Renstra Dispora Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023

Pada tahun 2022, Dispora Kota Semarang telah menggunakan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, dengan melaksanakan 3 program, 14 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

- a) Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan target tahun 2022 sebesar 100,00 % dan realisasi sebesar 100,00 % (capaian 100,00 %). Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui persentase pemenuhan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan Dispora
 - b) Pada program ini terdapat 2 kegiatan dengan 13 sub kegiatan, dimana semua sub kegiatan mencapai target sebesar 100 %. Realisasi Indikator Program ini diukur dari jumlah target 10 Dokumen dan realisasi 10 dokumen
 - c) Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target sebesar 100,00 %, dan realisasi sebesar 100 % Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata - rata persentase pelaksanaan kegiatan terkait pelayanan administrasi perkantoran.
 - d) Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan target sebesar 100,00 %, dengan realisasi sebesar 100% Realisasi indikator kinerja program ini diukur melalui rata - rata dari persentase pengadaan sebesar 100 % dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur sebesar 100 %
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
- a) Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dengan target sebanyak 62 Organisasi kepemudaan dan realisasi sejumlah 62 Organisasi Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :
- a) Jumlah Atlet yang dibina dengan target 550 orang dan realisasi 550 orang dengan prosentase 100%

TABEL 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KOTA SEMARANG**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
02.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembuatan dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Program Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	penyusunan RKA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	penyusunan RKA perubahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	penyusunan DPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	penyusunan DPA perubahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prestasi Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyiapan bahan Verifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PELAPORAN AKHIR TAHUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	pelaporan semesteran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PROGNOSIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 01 2.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%
2 19 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen instalasi listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2 19 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang BDisediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan rutin kendaraan dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	prosen organisasi pemuda aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas sdm yang mempunyai daya saing saing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2 19 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	kapasitas dan kepeloporan kepemimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	paskibra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Membentuk karakter pemuda kota semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 02 2.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan dengan dunia usaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase pembinaan cabang olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kompetisi Olahraga dan Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Atlet Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2)	TINGKAT REALISASI %		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TAGHUN N-1	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
2 19 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Peningkatan atlet kota semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terwujudnya Pembinaan Atlet Kota semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.03 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	KONI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terbentuknya Organisasi Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembangan Olahraga Tradisional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Pramuka Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Organisasi Kepramukaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Pramuka	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dispora Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dispora Kota Semarang Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Perubahan Dispora Kota Semarang Tahun 2022

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN OKTOBER 2022	ANGGARAN MURNI	REALISASI S.D 30 DESEMBER 2022 (SPJ)	
				Rp	% DARI ANGGARAN MURNI
I	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	35.084.709.032	35.422.776.730	31.970.547.340	90,25
A	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.330.729.950	4.239.006.500	4.109.267.441	96,94
1	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	4.330.729.950	4.239.006.500	4.109.267.441	96,94
B	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	28.013.336.000	28.263.336.000	25.399.797.470	89,87
2	2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	25.809.342.750	26.050.000.000	23.335.301.521	89,58
3	2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1.550.000.000	1.500.000.000	1.435.569.649	95,70
4	2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	653.993.250	713.336.000	628.926.300	88,17
C	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	842.563.000	1.153.554.230	695.597.797,00	60,30

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN OKTOBER 2022	ANGGARAN MURNI	REALISASI S.D 30 DESEMBER 2022 (SPJ)	
				Rp	% DARI ANGGARAN MURNI
5	2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	416.204.000	711.704.000	398.500.502	55,99
6	2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	50.000.000	50.000.000	-	-
7	2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	50.000.000	50.000.000	49.105.000	98,21
8	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	120.359.000	70.440.000	94.765.275	134,53
9	2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	206.000.000	225.000.000	153.227.020	68,10
10	2.19.03.2.04.04 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi		46.410.230	-	-
D	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.898.080.082	1.766.880.000	1.765.884.632	99,94
11	2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.016.500.082	885.300.000	957.824.640	108,19
12	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	881.580.000	881.580.000	808.059.992	91,66
II	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.985.845.990	2.389.916.517	1.931.739.960	80,83
E	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	883.606.516	1.073.606.516	876.267.225	81,62
13	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	725.606.516	875.606.516	719.302.235	82,15
14	2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	158.000.000	198.000.000	156.964.990	79,28

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN OKTOBER 2022	ANGGARAN MURNI	REALISASI S.D 30 DESEMBER 2022 (SPJ)	
				Rp	% DARI ANGGARAN MURNI
F	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.102.239.474	1.316.310.001	1.055.472.735	80,18
15	2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	358.797.791	438.780.001	326.298.266	74,36
16	2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	120.621.990	200.000.000	118.070.000	59,04
17	2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	622.819.693	677.530.000	611.104.469	90,20
III	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.170.083.000	2.170.083.000	2.166.883.000,00	99,85
18	2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2.170.083.000	2.170.083.000	2.166.883.000	99,85
IV	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.354.813.192	16.306.993.753	12.469.741.057	76,47
G	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.697.218.127	11.920.518.300	9.130.296.079	76,59
19	2.19.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.849.700	1.849.700	1.331.000	71,96
20	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.330.519.827	11.530.260.000	8.787.227.579	76,21
21	2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	345.070.000	368.630.000	335.367.000	90,98
22	2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.660.000	5.660.000	-	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN OKTOBER 2022	ANGGARAN MURNI	REALISASI S.D 30 DESEMBER 2022 (SPJ)	
				Rp	% DARI ANGGARAN MURNI
23	2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.900	3.999.900	1.005.000	25,13
24	2.19.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.118.700	5.118.700	1.622.000	31,69
25	2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	3.743.500	74,87
H	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.249.072.170	1.765.915.862	1.080.522.744	61,19
26	2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	545.043.800	970.902.800	396.679.120	40,86
27	2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.001.200	50.001.200	46.929.000	93,86
28	2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.774.156	52.774.156	52.752.000	99,96
29	2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	44.219.330	44.219.330	38.678.500	87,47
30	2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000	8.100.000	8.100.000	100,00
31	2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.010.140	42.010.140	32.960.000	78,46
32	2.19.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	378.545.556	389.921.897	372.396.850	95,51
33	2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.013.980	20.013.980	20.013.120	100,00
34	2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.364.008	187.972.359	112.014.154	59,59

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN OKTOBER 2022	ANGGARAN MURNI	REALISASI S.D 30 DESEMBER 2022 (SPJ)	
				Rp	% DARI ANGGARAN MURNI
I	2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.201.756.556	1.067.537.207	1.112.825.322	104,24
35	2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	36.318.180	36.316.200	99,99
36	2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	366.408.880	366.408.880	348.618.173	95,14
37	2.19.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	3.199.680	3.199.680	3.000.000	93,76
38	2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	795.829.816	661.610.467	724.890.949	109,56
J	2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	425.137.330	785.929.775	413.181.040	52,57
39	2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	17.860.000	53.782.000	17.350.000	32,26
40	2.19.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	407.277.330	732.147.775	395.831.040	54,06
K	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	743.310.071	728.773.671	698.939.564	95,91
41	2.19.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.519.551	67.519.551	65.400.000	96,86
42	2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.604.360	396.067.960	389.172.831	98,26
43	2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.560	500.560	500.000,00	99,89
44	2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.685.600	264.685.600	243.866.733	92,13

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN OKTOBER 2022	ANGGARAN MURNI	REALISASI S.D 30 DESEMBER 2022 (SPJ)	
				Rp	% DARI ANGGARAN MURNI
L	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.318.938	38.318.938	33.976.308	88,67
45	2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.964.112	4.964.112	3.212.285	64,71
46	2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.008.110	5.008.110	4.975.000,00	99,34
47	2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.951.738	4.951.738	4.260.000	86,03
48	2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.256.820	5.256.820	5.220.000	99,30
49	2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.509.187	5.509.187	5.390.000	97,84
50	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.135.743	10.135.743	9.809.023	96,78
51	2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.493.228	2.493.228	1.110.000	44,52
	TOTAL	52.595.451.214	56.289.770.000	48.538.911.357	86,23

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISPORA KOTA SEMARANG

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dispora Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dispora Kota Semarang Tahun 2022-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dispora sebagaimana tabel berikut.

Kode	Tujuan /Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun 1		Tahun 2	
					Target	REALI SAIS	Target	REALIS ASI
2.19.0.00.0.00. 01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							
Tujuan	Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi	Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota Semarang	Orang	00.00	58	58	71	71
Sasaran	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	persen	00.00	00.01	0.001	00.01	00.01
Sasaran	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	persen	18.18	10.35	10.35	12.21	12.21
Sasaran	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	persen	75	72	75	69	69

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dispora tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Dispora Kota Semarang **Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi** mempunyai satu Indikator yaitu Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota Semarang, pada tahun 2023 Dispora Kota Semarang berhasil memperoleh target yaitu 58 orang pemuda yang berhasil baik dari prestasi olahraga maupun prestasi kepemudaan
- b. Sasaran Dispora Kota Semarang
 1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang dengan indikator Cakupan Wirausaha Muda Mandiri berhasil mencapai target sebesar 0.001% atau sebesar 100% di tahun 2023
 2. Meningkatnya Prestasi Olahraga dengan Indikator Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional dengan target 18.18 % dan berhasil mencapai 17.53 % atau mencapai 96%
 3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan Indikator Nilai AKIP dengan target 75 dan berhasil mencapai 72 sehingga mencapai 96%

Tabel 2.4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA				REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Dispora Kota Semarang, 2023

Pada tahun 2021, kesesuaian program RPJMD dengan RKPD adalah sebesar 100,00 %; dimana 3 program Perubahan RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 dapat terakomodir seluruhnya pada Perubahan RKPD Tahun 2021. Kesesuaian program Perubahan RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00 % dimana 3 program Perubahan RKPD yang harus dilaksanakan pada tahun 2021 dapat diakomodir seluruhnya pada APBD tahun 2021.

Selain Indikator Pelayanan Dispora yang sudah disebutkan di atas, Dispora juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Dispora Kota Semarang adalah sebagian IKK urusan Olahraga dan Kepemudaan.

Adapun capaian dari IKK pada urusan Olahraga dan Kepemudaan sesuai kewenangan Dispora Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Kunci Dispora Kota Semarang
Tahun 2023

II. Indikator Kinerja Kunci Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
- Penjelasan IKK Outcome

NO	KONSEP / DEFINISI	CAPAIAN				OPD PENGAMPU
		TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		PERHITUNGAN	HASIL	PERHITUNGAN	HASIL	
1.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			193 382297	0.05	Dispora

- Penjelasan IKK Output

NO	IKK Outcome	IKK Output	CAPAIAN		OPD PENGAMPU
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	80	150	Dispora
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	0	Dispora

2) IKK Outcome : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
- Penjelasan IKK Outcome

NO	KONSEP / DEFINISI	CAPAIAN				OPD PENGAMPU
		TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		PERHITUNGAN	HASIL	PERHITUNGAN	HASIL	
1.	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial			22300	5.833	Dispora

- Penjelasan IKK Output

NO	IKK Outcome	IKK Output	CAPAIAN		OPD PENGAMPU
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		1731	Dispora
		2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			

3) IKK Outcome : Peningkatan Prestasi Olahraga

- Penjelasan IKK Outcome

NO	KONSEP / DEFINISI	CAPAIAN				OPD PENGAMPU
		TAHUN 2022		TAHUN 2023		
		PERHITUNGAN	HASIL	PERHITUNGAN	HASIL	
1.	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	5	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	Dispora

- Penjelasan IKK Output

NO	IKK Outcome	IKK Output	CAPAIAN		OPD PENGAMPU
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1.	Peningkatan prestasi olahraga	1) Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	255	287	Dispora
		2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	60	24	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Semarang

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kota Semarang dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam upaya mewujudkan peran serta pemuda dalam pembangunan yang berwawasan kebangsaan, trampil, mandiri, sehat, berprestasi dan berdaya saing. Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota semarang menghadapi berbagai permasalahan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, maka dari itu untuk menuju capaian tersebut Dinas kepemudaan mempunyai beberapa permasalahan, adapun Permasalahannya sebagai berikut :

1. Kurangnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
2. Rendahnya keterampilan kecakapan hidup (life skill).
3. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pusat aktivitas pemuda.
4. Masih banyaknya pemuda yang belum memanfaatkan sarana Informasi Teknologi (IT).
5. Kurangnya Sinergitas dan kemitraan dari Pemerintah Daerah dengan Stakeholder Kepemudaan maupun Olahraga
6. Rendahnya tingkat kemajuan pembangunan olahraga
7. Kurangnya potensi sumberdaya keolahragaan
8. Kurangnya olahragawan berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Dispora Kota Semarang Perubahan Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dispora Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	SEMARA NG	35.00.00	2.074.999.392	APBD	02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	SEMARA NG	35.00.00	2.074.999.392	APBD
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	SEMARA NG	10.00	1,660,621,652	APBD	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	SEMARA NG	10.00	2.189.316.820	APBD
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan	SEMARA NG	05.00	356,500,000	APBD	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan	SEMARA NG	05.00	934.434.702	APBD
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	SEMARA NG	03.00	175,000,022	APBD	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	SEMARA NG	03.00	106.280.022	APBD
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Seleksi Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda	SEMARA NG	01.00	464,121,630	APBD	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Seleksi Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda	SEMARA NG	01.00	518.751.570	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.19.02. 2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	PASKIBRAKA	SEMARA NG	01.00	665,000,000	APBD	2.19.02. 2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	PASKIBRAKA	SEMARA NG	01.00	629.850.526	APBD
2.19.02. 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	SEMARA NG	1400.00.0 0	777,710,893	APBD	2.19.02. 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Aktif OKP	SEMARA NG	1400.00. 00	973.199.127	APBD
2.19.02. 2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	kordinasi kemitraan Kepemudaan	SEMARA NG	10.00	270,114,170	APBD	2.19.02. 2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	kordinasi kemitraan Kepemudaa n	SEMARA NG	10.00	510.255.430	APBD
2.19.02. 2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kepemudaan	SEMARA NG	05.00	507,596,723	APBD	2.19.02. 2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kepemudaa n	SEMARA NG	05.00	462.943.697	APBD
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	SEMARA NG	1197.00.0 0	34,594,915,979	APBD	02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	SEMARA NG	1197.00. 00	57.613.520.036	APBD
		Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	SEMARA NG	05.00		APBD			Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	SEMARA NG	05.00		APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	SEMARANG	06.00	4,500,099,338	APBD	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana yang di kelola	SEMARANG	06.00	4.716.734.81	APBD
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		SEMARANG		186,401,200	APBD	2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		SEMARANG		184.401.200	APBD
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	SEMARANG	12.00	4,313,698,138	APBD	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	SEMARANG	12.00	4.532.333.619	APBD
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	SEMARANG	06.00	1,998,600,001	APBD	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional	SEMARANG	06.00	25.054.478.941	APBD
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single	Penyelenggaraan Multi Event	SEMARANG	01.00	950,000,001	APBD	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single	Penyelenggaraan Multi Event	SEMARANG	01.00	23.805.900.001	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
	Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat daerah						Event Tingkat Kabupaten/Kota	Tingkat daerah				
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasi nya atlet dalam mengembangkan prestasi	SEMARANG	03.00	48.600.000	APBD	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasi nya atlet dalam mengembangkan prestasi	SEMARANG	03.00	0	APBD
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga	SEMARANG	10.00	1,000,000,000	APBD	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga	SEMARANG	10.00	1.248.578.940	APBD
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	SEMARANG	1297.00.00	27,350,000,000	APBD	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	SEMARANG	1297.00.00	27.271.257.000	APBD
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	SEMARANG	64.00.00	1,450,000,000	APBD	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	SEMARANG	64.00.00	1.404.050.000	APBD
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	KONI	SEMARANG	01.00	25.900.000.000	APBD	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	KONI	SEMARANG	01.00	25.867.207.000	APBD
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan	SEMARANG	63.00.00	49.600.000	APBD	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan	SEMARANG	63.00.00	0	APBD
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan organisasi olahraga	SEMARANG	02.00	49.600.000	APBD	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan organisasi olahraga	SEMARANG	02.00	0	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Medali Kejuaraan olahraga rekreasi	SEMARA NG	05.00	696,616,640	APBD	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Medali Kejuaraan olahraga rekreasi	SEMARA NG	05.00	571.049.276	APBD
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	SEMARA NG	03.00	333,126,910	APBD	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	SEMARA NG	03.00	248.628.066	APBD
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan pengembangan Olahraga Rekreasi	SEMARA NG	02.00	97,686,650	APBD	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan pengembangan Olahraga Rekreasi	SEMARA NG	02.00	97.686.650	APBD
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	SEMARA NG	05.00	239,280,000	APBD	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	SEMARA NG	05.00	224.734.560	APBD
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembangan Olahraga Tradisional	SEMARA NG	02.00	26,523,080	APBD	2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembangan Olahraga Tradisional	SEMARA NG	02.00	0	APBD
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	SEMARA NG	47.00.00	2.000.000.000	APBD	02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	SEMARA NG	47.00.00	2.000.000.000	APBD
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	SEMARA NG	01.00	2.000.000.000	APBD	2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	SEMARA NG	01.00	2.000.000.000	APBD
	NON URUSAN							NON URUSAN					

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	SEMARA NG	100.00.00	15,659,955,922	APBD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaa n dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	SEMARA NG	100.00.0 0	15.203.836.480	APBD
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	SEMARA NG	100.00.00		APBD			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	SEMARA NG	100.00.0 0		APBD
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	SEMARA NG	100.00.00		APBD			Persentase kinerja administras i dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	SEMARA NG	100.00.0 0		APBD
X.XX.01. 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	SEMARA NG	08.00	40,238,172	APBD	X.XX.01. 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	SEMARA NG	08.00	40.238.172	APBD
X.XX.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	SEMARA NG	02.00	7,265,332	APBD	X.XX.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaa n	SEMARA NG	02.00	7.265.332	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	SEMARA NG	01.00	5.365.330	APBD	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	SEMARA NG	01.00	5.365.330	APBD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	SEMARA NG	01.00	4.651,120	APBD	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	SEMARA NG	01.00	4.651.120	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	SEMARA NG	01.00	4,371,830	APBD	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	SEMARA NG	01.00	4.371.830	APBD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	SEMARA NG	01.00	4,314,240	APBD	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	SEMARA NG	01.00	4.314.240	APBD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	SEMARA NG	01.00	4,198,920	APBD	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	SEMARA NG	01.00	4.198.920	APBD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SEMARA NG	01.00	10.071.400	APBD	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SEMARA NG	01.00	10.071.400	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	SEMARA NG	100.00.00	10,028,149,812	APBD	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan	SEMARA NG	100.00.00	8.541.312.169	APBD
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	SEMARA NG	100.00.00	9,662,307,712	APBD	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	SEMARA NG	100.00.00	8.163.310.069	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan OPD	SEMARA NG	100.00.00	348,450,000	APBD	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan OPD	SEMARA NG	100.00.00	360.610.000	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
X.XX.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Keuangan yang di verifikasi	SEMARA NG	01.00	4.008.640	APBD	X.XX.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Keuangan yang di verifikasi	SEMARA NG	01.00	4.008.640	APBD
X.XX.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		SEMARA NG		2,418,760	APBD	X.XX.01. 2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		SEMARA NG		2,418.760	APBD
X.XX.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	SEMARA NG	01.00	2.183.600	APBD	X.XX.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	SEMARA NG	01.00	2.183.600	APBD
X.XX.01. 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuangan	SEMARA NG	01.00	4.142.200	APBD	X.XX.01. 2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan Pemeriksaan Keuangan	SEMARA NG	01.00	4.142.200	APBD
X.XX.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Se mesteran	SEMARA NG	02.00	3.313.500	APBD	X.XX.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Se mesteran	SEMARA NG	02.00	3.313.500	APBD
X.XX.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Prognosis	SEMARA NG	01.00	1.325.400	APBD	X.XX.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Prognosis	SEMARA NG	01.00	1.325.400	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2 19 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN	SEMARANG	1 DOKUMEN	75,904,240	APBD	2 19 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN	SEMARANG	1 DOKUMEN	75.904.240	APBD
X.XX.01. 2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		SEMARANG	1 DOKUMEN	75,904,240	APBD	X.XX.01. 2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		SEMARANG	1 DOKUMEN	75.904.240	APBD
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SOSIALISASI UNDANG - UNDANG	SEMARANG	80 Orang	194,328,333		2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SOSIALISASI UNDANG - UNDANG	SEMARANG	80 Orang	109.391.759	
X.XX.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		SEMARANG		194.532.673	APBD	X.XX.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		SEMARANG		109.391.759	APBD
X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	SEMARANG	100.00.00	1,296,029,876	APBD	X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	SEMARANG	100.00.00	1.099.927.536	APBD
X.XX.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	SEMARANG	01.00	24.994.560	APBD	X.XX.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	SEMARANG	01.00	24.994.560	APBD
X.XX.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEMARANG	05.00	152.475.290	APBD	X.XX.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEMARANG	05.00	152.475.290	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SEMARANG	03.00	58.576.330	APBD	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SEMARANG	03.00	58.576.330	APBD
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Kantor	SEMARANG	12.00	53.169.820	APBD	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Kantor	SEMARANG	12.00	53.169.820	APBD
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	SEMARANG	02.00	45.021.726	APBD	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	SEMARANG	02.00	35.501.726	APBD
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	SEMARANG	02.00	8.940.000	APBD	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	SEMARANG	02.00	8.940.000	APBD
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Rapat	SEMARANG	12.00	59.850.000	APBD	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Rapat	SEMARANG	12.00	45.000.000	APBD
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi luar dan dalam Daerah	SEMARANG	12.00	703,002,150	APBD	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi luar dan dalam Daerah	SEMARANG	12.00	524.269.81	APBD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Pendukung SPBE	SEMARANG	04.00	190,000,000	APBD	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Pendukung SPBE	SEMARANG	04.00	190.000.000	APBD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	SEMARANG	09.00	1,972,212,698	APBD	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	SEMARANG	09.00	2.075.890.698	APBD
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		SEMARANG		310,732,000	APBD	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		SEMARANG		310.732.000	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubel	SEMARA NG	03.00	81,453,190	APBD	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubel	SEMARA NG	03.00	81.453.190	APBD
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Olahraga	SEMARA NG	06.00	1,580,027,508	APBD	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Olahraga	SEMARA NG	06.00	1.683.705.508	APBD
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	SEMARA NG	100.00.00	776,893,731	APBD	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	SEMARA NG	100.00.00	796.576.151	APBD
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan Listrik dan Internet	SEMARA NG	12.00	279,358,400	APBD	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan Listrik dan Internet	SEMARA NG	12.00	258.031.200	APBD
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEMARA NG	08.00	75,067,820	APBD	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEMARA NG	08.00	75.067.820	APBD
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Non ASN,Kebersihan dan Keamanan	SEMARA NG	12.00	422,467,511	APBD	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Non ASN,Kebersihan dan Keamanan	SEMARA NG	12.00	463.477.131	APBD
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	SEMARA NG	100.00.00	1,276,199,060	APBD	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	SEMARA NG	100.00.00	2.464.595.755	APBD
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	SEMARA NG	01.00	36,318,180	APBD	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	SEMARA NG	01.00	36.318.180	APBD

NO	RANCANGAN AWAL						NO	PERUBAHAN					
Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIT AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGITAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
X.XX.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi nya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Opera sional	SEMARA NG	21.00	401,408,880	APBD	X.XX.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi nya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Opera sional	SEMARA NG	21.00	401.408.880	APBD
X.XX.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	SEMARA NG	03.00	7.272.000	APBD	X.XX.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	SEMARA NG	03.00	7.272.000	APBD
X.XX.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	SEMARA NG	02.00	831,200,000	APBD	X.XX.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	SEMARA NG	02.00	2.019.596.695	APBD
54,693,204,446						77.979.872.463							

BAB III
TUJUAN DAN DISPORA KOTA SEMARANG

3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015-2019

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 telah menetapkan visi untuk Tahun 2018 - 2023 yaitu “**MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI. TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI**”. Dari visi Jawa Tengah tersebut, dijabarkan ke dalam 4 (Empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kab/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dan fungsi yaitu :

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan

destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 – 2023 serta tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan, maka Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian target pembangunan dari **misi ketiga** yaitu “Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk **mengurangi kemiskinan dan pengangguran**” dan **misi keempat** yaitu “Menjadikan rakyat Jawa Tengah **lebih sehat**, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”.

3.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2015-2019

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia juga telah menyusun Renstra periode tahun 2015-2019. Dalam Renstra tersebut dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pembangunan sesuai Tupoksi. Visi Dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga periode 2015-2019 yaitu: “Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Adapun Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;

2. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
3. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, Pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional;
4. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas;
5. Mewujudkan dan mengembangkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

Dari Visi dan Misi tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia kemudian menyusun prioritas Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah berpedoman pada Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN Tahun 2015-2019, dengan demikian begitu diharapkan nantinya akan dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan dalam pelaksanaannya.

Rumusan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemuda yang memiliki karakter dan kemandirian
2. Menguatnya kelembagaan pramuka dalam upaya peningkatan kepramukaan yang berkarakter.
3. Meningkatnya sinergi lintas sektor dibidang kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan.
4. Mengembangkan budaya olahraga untuk kebugaran dan produktivitas.
5. Meningkatnya prestasi olahraga yang unggul serta hebat.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Untuk tahun 2023, merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang mengusung visi pembangunan yaitu “ Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah, yaitu :

- Misi 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial;
- Misi 2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila;
- Misi 3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan;
- Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota
- Misi 5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tema pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

P1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus :

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
- 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), melalui upaya-upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

P2 Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan fokus :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:

- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
- 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

P3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama

- 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

P4 Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus :

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel

- 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
- 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif,
dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD

- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan

- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024

- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Semarang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinpora Kota Semarang harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang.

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang adalah ” *Meningkatkan Kualitas Pemuda yang*

Unggul dan Olahraga Prestasi; ”.

Dari hasil telaah terhadap RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, didapatkan pokok-pokok perwujudan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kepemudaan Olahraga
2. Peningkatan peran serta kepemudaan guna menjadikan pemuda Kota Semarang berdaya saing
3. Prestasi Olahraga Kota Semarang
4. Pola kemitraan dengan Pihak Swasta
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Sasaran Jangka Menengah

Sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang ditetapkan untuk mendukung tercapainya sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Semarang. Adapun sasaran pembangunan jangka menengah yang hendak dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah:

1. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang
2. Meningkatnya Prestasi Olahraga
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah

**MATRIKS TUJUAN, SASARAN, BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SEMARANG TAHUN 2016 – 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatkan Kualitas Pemuda yang Unggul dan Olahraga Prestasi		Jumlah Wirausaha Muda yang berhasil + Jumlah Atlet yang mendapatkan Medali / Jumlah Pemuda Kota Semarang	Orang	58
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Cakupan Wirausaha Muda Mandiri	%	0.01
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Kota Semarang	Presentase jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan di Tingkat Nasional dan Internasional	%	8.92
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga untuk menunjang Prestasi olahraga dan Memfasilitasi Masyarakat dalam Berolahraga	Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	%	0.60
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai	75

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DISPORA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dispora Kota Semarang Perubahan Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dimana RKPD Tahun 2023 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 periode keempat;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. secara khusus, Dispora memiliki peran dalam pencapaian misi Pertama, yaitu 'Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dispora Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dispora Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dispora Kota Semarang pada Perubahan tahun 2023 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dispora Kota Semarang pada Perubahan tahun 2023 adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 8 kegiatan penunjang, dan 8 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dispora Kota Semarang pada Perubahan tahun 2023 adalah sebanyak 55 sub kegiatan, yang terdiri dari 36 sub kegiatan penunjang, dan 19 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dispora;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dispora Kota Semarang Perubahan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 77.979.872.463,- yang bersumber dari dana APBD Kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dispora Kota Semarang Perubahan Tahun 2023 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Dispora Kota Semarang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			77.979.872.463		
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			77.979.872.463		
02.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35.00 Organisasi Kpemudaan	3.162.515.947	SEMARANG	APBD
		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	35.00 Organisasi Kpemudaan		SEMARANG	APBD
2.19.02.2.01	<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota</i>	<i>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan</i>	10.00 Kegiatan	2.189.316.820	SEMARANG	APBD
		<i>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan</i>	10.00 Kegiatan		SEMARANG	APBD
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pelatihan Kewirausahaan	5.00 Kegiatan	934.434.702	SEMARANG	APBD
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Peningkatan sumberdaya Kepemudaan	3.00 Kegiatan	106.280.022	SEMARANG	APBD
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Seleksi Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawanan Pemuda	1.00 Kegiatan	518.751.570	SEMARANG	APBD
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	PASKIBRAKA	1.00 Kegiatan	629.850.52	SEMARANG	APBD
2.19.02.2.02	<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Anggota Aktif OKP</i>	1400.00 Orang	973.199.127	SEMARANG	APBD
		<i>Jumlah Anggota Aktif OKP</i>	1400.00 Orang		SEMARANG	APBD
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	kordinasi kemitraan Kepemudaan	10.00 Kegiatan	510.255.430	SEMARANG	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kepemudaan	5.00 Kegiatan	462.943.697	SEMARANG	APBD
02.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	jumlah Atlet prestasi	1197.00 jumlah	57.613.520.036	SEMARANG	APBD
		jumlah Atlet prestasi	1197.00 jumlah		SEMARANG	APBD
		Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun	5.00 Lapangan		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>jumlah sarana dan prasarana yang di kelola</i>	6.00 jumlah	4.716.734.819	SEMARANG	APBD
		<i>jumlah sarana dan prasarana yang di kelola</i>	6.00 jumlah		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar		00.00	184.401.200	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Gelanggang Olahraga	12.00 Bulan	4.532.333.619	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.02	<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional</i>	6.00 kegiatan	25.054.478.941	SEMARANG	APBD
		<i>Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional</i>	6.00 kegiatan		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Multi Event Tingkat daerah	1.00 Kegiatan	23.805.900.001	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya atlet dalam mengembangkan prestasi	0 Kegiatan	0	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Fasilitasi Kejuaraan Olahraga	10.00 Kejuaraan	1.248.578.940	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.03	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Atlet yang dibina</i>	1297.00 Orang	27.271.257.000	SEMARANG	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
		<i>Jumlah Atlet yang dibina</i>	1297.00 Orang		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Atlet	64.00 Orang	1.404.050.000	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	KONI	1.00 kegiatan	25.867.207.000	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.04	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>	<i>Jumlah Organisasi Keolahragaan</i>	0	0	SEMARANG	APBD
		<i>Jumlah Organisasi Keolahragaan</i>	0		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pengembangan organisasi olahraga	0	0	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.05	<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>	<i>Jumlah Medali Kejuaraan olahraga Rekreasi</i>	5.00 jumlah	571.049.276	SEMARANG	APBD
		<i>Jumlah Medali Kejuaraan olahraga Rekreasi</i>	5.00 jumlah		SEMARANG	APBD
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi	3.00 kegiatan	248.628.066	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	penyelenggaraan pengembangan Olahraga Rekreasi	2.00 Kegiatan	97.686.650	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	5.00 jenis	224.734.560	SEMARANG	APBD
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pengembangan Olahraga Tradisional	0	0	SEMARANG	APBD
02.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	47.00 Kegiatan	2.000.000.000	SEMARANG	APBD
		Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota Semarang	47.00 Kegiatan		SEMARANG	APBD
2.19.04.2.01	<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	<i>Jumlah keikutsertaan perlombaan Kepramukaan tingkat Daerah dan Nasional</i>	0.00 Kegiatan	2.000.000.000	SEMARANG	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
		<i>Jumlah keikutsertaan perlombaan Kepramukaan tingkat Daerah dan Nasional</i>	0.00 Kegiatan		SEMARANG	APBD
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Hibah Pramuka	1.00 kegiatan	2.000.000.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 %	15.203.836.480	SEMARANG	APBD
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 %		SEMARANG	APBD
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga	100.00 %		SEMARANG	APBD
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga	100.00 %		SEMARANG	APBD
<i>X.XX.01.2.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD</i>	8.00 Dokumen	40.238.172	SEMARANG	APBD
		<i>Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD</i>	8.00 Dokumen		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	2.00 Dokumen	7.265.332	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA	1.00 Dokumen	5.365.330	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	1.00 Dokumen	4.651.120	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA	1.00 Dokumen	4.371.830	SEMARANG	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan	1.00 Dokumen	4.314.240	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja	1.00 Dokumen	4.198.920	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	10.071.400	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Keuangan</i>	100.00 %	8.541.312.169	SEMARANG	APBD
		<i>Tersedianya Dokumen Keuangan</i>	100.00 %		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 persen	8.163.310.069	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan OPD	100.00 persen	360.610.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Keuangan yang di verifikasi	1.00 Dokumen	4.008.640	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		00.00	2.418.760	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	2.183.600	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	penyiapan bahan pemeriksaan Keuangan	1.00 Dokumen	4.142.200	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Semesteran	2.00 Dokumen	3.313.500	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Prognosis	1.00 Dokumen	1.325.400	SEMARANG	APBD
2 19 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pendapatan Daerah	100%	75.904.240	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah	1.00 Dokumen	75.904.240	SEMARANG	APBD
2 19 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi undang undang	100%	109.391.759	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi undang undang	80 Orang	109.391.759	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD</i>	100.00 Persen	1.099.927.536	SEMARANG	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
		<i>Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD</i>	<i>100.00 Persen</i>		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	1.00 Jenis	24.994.560	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.00 buah	159.475.290	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.00 Jenis	159.475.290	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Logistik Kantor	12.00 Jenis	53.169.820	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2.00 Jenis	35.501.726	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	2.00 Jenis	8.940.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan Minum Rapat	12.00 Bulan	45.000.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi luar dan dalam Daerah	12.00 Bulan	524.269.810	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Pendukung SPBE	4.00 Jenis	190.000.000	SEMARANG	APBD
<i>X.XX.01.2.07</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>9.00 Jenis</i>	<i>2.075.890.698</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</i>	<i>9.00 Jenis</i>		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		00.00	310.732.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Meubel	3.00 Jenis	81.453.190	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan Olahraga	6.00 Jenis	1.683.705.508	SEMARANG	APBD
<i>X.XX.01.2.08</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>796.576.151</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Tersedianya kebutuhan jasa kantor</i>	<i>100.00 Persen</i>		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan Listrik dan Internet	12.00 Bulan	258.031.200	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.00 jenis	75.067.820	SEMARANG	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Non ASN,Kebersihan dan Keamanan	12.00 Bulan	463.477.131	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemeliharaan aset SKPD</i>	<i>100.00 Persen</i>	<i>2.464.595.755</i>	SEMARANG	APBD
		<i>Pemeliharaan aset SKPD</i>	<i>100.00 Persen</i>		SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	1.00 Unit	36.318.180	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	21.00 Unit	401.408.880	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel	3.00 jenis	7.272.000	SEMARANG	APBD
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	2.00 Ruang	2.019.596.695	SEMARANG	APBD
JUMLAH				77.979.872.463		

BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting

1. Belum maksimalnya Sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan Prestasi Atletolahraga Kota Semarang
2. Perlunya kegiatan penunjang kepelatihan guna kemajuan Atlet Kota Semarang
3. Perlunya partisipasinya masyarakat dalam kemajuan Olahraga dan Kepemudaan dikota Semarang
4. Belum adanya sarana dan pasarana pendukung kegiatan Kepemudaan
5. Belum maksimalnya sekretariat/ Ruang Organisasi kepemudaan yang menyebabkan kegiatan Kepemudaan tidak bisa maksimal

B. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang ini memuat antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan Renja Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang.
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi.
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang.
4. Peranan masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.
5. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD.

C. Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kota Semarang.

22. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

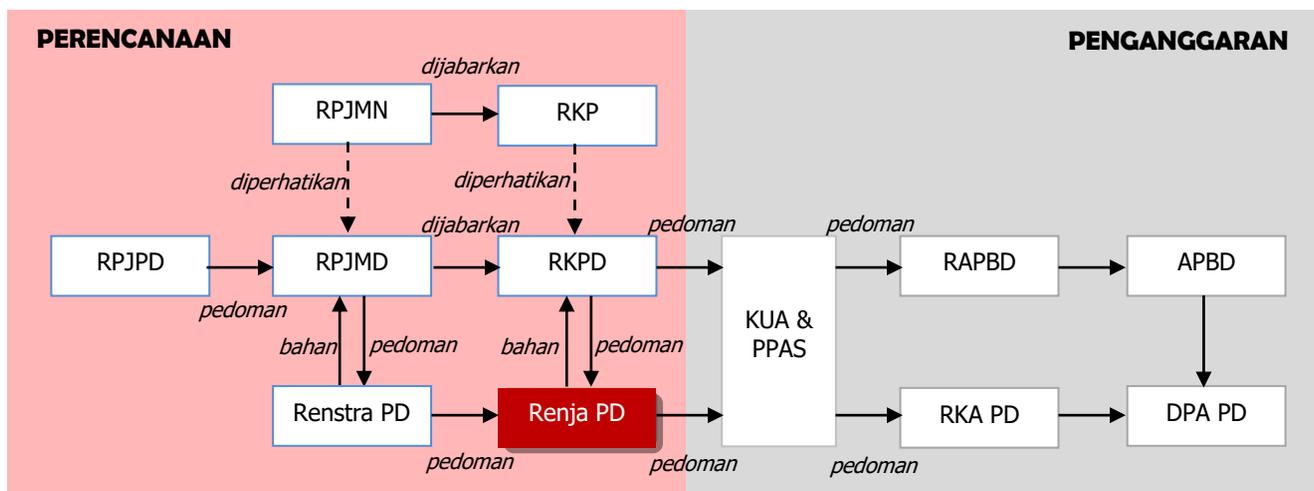
BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Rencana Kerja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Rencana Kerja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh :

1. Penurunan stabilitas perekonomian dunia pasca pandemi covid-19 selama 2 tahun. Sebagian APBN dan APBD ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak pasca pandemi covid-19 pada sektor ekonomi mengalami penurunan.
2. Penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat pandemi covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.
3. Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023.
4. Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, Perubahan Rencana Kerja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

- Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, review terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun rencana kerja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan atau permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Target Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023
Dan Pencapaian Rencana Strategis Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>), Kegiatan (<i>output</i>) dan Sub Kegiatan(<i>output</i>)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
Urusan Wajib Kebudayaan									
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	9 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	3 dokumen	37,50%	3 dokumen	33,33%
2.22.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50%	1 dokumen	50%
2.22.01.2.01.0	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2	2 dokumen	0 dokumen	0%	0	0%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>), Kegiatan (<i>output</i>) dan Sub Kegiatan(<i>output</i>)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		dokumen				dokumen	
2.22.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
2.22.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
2.22.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%
2.22.01.2.01.0 6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	100%
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>), Kegiatan (<i>output</i>) dan Sub Kegiatan(<i>output</i>)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	437 orang/bulan	437 orang/bula n	437 orang/bula n	50%	50%
2.22.01.2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%	50%	50%
2.22.01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	2 dokumen	100%
2.22.01.2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 laporan	0 laporan	0%	0 dokumen	0%
2.22.01.2.02.0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 orang	597 orang	597 orang	298 orang	49,92%	298 orang	49,92%
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 orang	20 orang	78 orang	19 orang	24,35%	19 orang	24,35%
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	14 paket	14 paket	17 paket	6 paket	42,86%	42,86%	42,86%
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	15 paket	15 paket	20 paket	6 paket	30%	6 paket	46,15%
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	54 paket	54 paket	53 paket	47 paket	100%	47 paket	100%
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetak	Jumlah Paket Barang dan Cetak dan Penggandaan	12 paket	12 paket	13 paket	6 paket	46,15%	6 paket	50%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>), Kegiatan (<i>output</i>) dan Sub Kegiatan(<i>output</i>)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengandaan	Yang Disediakan							
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 laporan	600 laporan	600 laporan	395 laporan	65,83%	395 laporan	65,83%
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 kegiatan	200 kegiatan	200 laporan	90 laporan	45%	90 laporan	45%
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dokumen	6 dokumen	15 dokumen	4 dokumen	26,66%	4 dokumen	66,67%
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	4 unit	4 unit	143 unit	40 unit	27,97%	40 unit	27,97%
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	100%	100%	12 laporan	6 laporan	50%	50%	50%
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Kendaraan Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit	30 unit	29 unit	96,66%	29 unit	96,66%
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	6 gedung	6 gedung	6 unit	6 unit	100%	6 unit	100%
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	6 unit	6 unit	132 unit	3 unit	2,27%	50%	50%
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	14,07%	20,00%	24%	170,57%	24%	68,57%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	35%	14,07%	20,00%	24%	170,57%	24%	68,57%
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	10 objek	10 objek	10 objek	100%	10 objek	100%
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	35%	14,07%	20,00%	27,76%	138,8%	27,76%	79,31%
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Obyek Pemajuan Tradisi Budaya Yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	7 objek	7 objek	7 objek	7 objek	100%	7 objek	100%
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	35%	14,07%	20,00%	35,15%	175,75%	35,15%	100%
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat Yang Dibina	2.600 orang	1.000 orang	2.600 orang	10.000 orang	384,61%	10.000 orang	384,61%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	35%	10,82%	20,00%	27,76%	138,8%	27,76%	79,31%
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	35%	14,07%	20,00%	24%	120%	24%	68,57%
2.22.03.2.01.0 2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	629 sertifikat	629 sertifikat	301 sertifikat	50,16%	301 sertifikat	50,16%
2.22.03.2.01.0 3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	124 lembaga	124 lembaga	74 lembaga	60,48%	75 embaga	60,48%
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	100%	71,57%	77,85%	77,85%	99,91%	77,78%	77,78%
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	71,57%	77,85%	77,85%	99,91%	77,78%	77,78%
2.22.05.2.02.0 1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Obyek Cagar Budaya	461 objek	461 objek	461 objek	461 objek	100%	461 objek	100%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Yang Dilindungi							
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	81 buah	76 buah	79 buah	373 buah	472,15%	398 buah	460,49%
3.26.02.2.01.0 3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	81 buah	76 buah	79 buah	373 buah	472,15%	373 lokasi	100%
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.540.211 orang	1.150 orang	1.293.191 orang	1.334.522 orang	103,19%	1.334.522 orang	86,65%
3.26.02.2.02.0 4	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	100%
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan Sesuai Dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	81 lokasi	81 lokasi	79 lokasi	79 lokasi	100%	79 lokasi	97,53%
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0%	1 unit	0%
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100%	100%	85%	50%	58,82%	50%	50%
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	6 laporan	6 laporan	6 laporan	3 laporan	50%	3 laporan	50%
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kabupaten/Kota								
3.26.03.2.01.0 1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	8 dokumen	50%	8 dokumen	50%
3.26.03.2.01.0 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	5 laporan	5 laporan	5 laporan	2 laporan	40%	2 laporan	40%
3.26.03.2.01.0 4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50%	2 dokumen	50%
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	100%	71,91%	70%	50%	71,42%	50%	50%
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	71,91%	70%	50%	71,42%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan/ Pogram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>), Kegiatan (<i>output</i>) dan Sub Kegiatan(<i>output</i>)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tri Wulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Tri Wulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.26.05.2.01.0 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Dikembangkan Kompetensinya	860 orang	160 orang	860 orang	120 orang	13,95%	120 orang	100%
3.26.05.2.01.0 2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang Yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.550 orang	1.200 orang	1550 orang	940 orang	60,64%	940 orang	60,64%

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan triwulan II Tahun 2023 telah melaksanakan 7 program. Adapun rincian hasil pelaksanaan program hingga triwulan II antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dengan indikator sebagai berikut :

- a. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
- b. Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- c. Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- d. Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50%.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Dengan indikator Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya.

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 24%.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Dengan indikator Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional.

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 27,76%.

4. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Dengan indikator Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya.

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 77,78%.

5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dengan indikator Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50%.

6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Dengan indikator Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan.

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50%.

7. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Dengan indikator SDM Pariwisata.

Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50%.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Dana Insentif Daerah (DID) serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
DINAS KEBUDAYAN DAN PARIWISATA		60.554.347.043	19.950.193.426	32,95
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		37.720.984.739	14.111.153.266	37,41
I	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.246.381.449	9.174.597.211	50,28
1	2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.829.020	0	0,00
1	2.22.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	325.200	0	0,00
2	2.22.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	253.600	0	0,00
3	2.22.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	371.510	0	0,00
4	2.22.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	253.600	0	0,00
5	2.22.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	371.510	0	0,00
6	2.22.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	253.600	0	0,00
2	2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.229.648.989	6.704.391.084	54,82

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
7	2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.798.370.989	6.503.552.622	55,12
8	2.22.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	430.673.200	200.838.462	46,63
9	2.22.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	201.600	0	0,00
10	2.22.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	201.600	0	0,00
11	2.22.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	0	0,00
3	2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	526.927.240	137.100.000	26,02
12	2.22.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	128.100.000	51,24
13	2.22.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	276.927.240	9.000.000	3,25
4	2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.128.791.919	933.617.887	43,86
14	2.22.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	215.204.500	109.234.560	50,76
15	2.22.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.320.980	50.420.000	55,82
16	2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.459.470	64.259.280	47,09
17	2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.396.037	4.647.839	9,81
18	2.22.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	700.000.000	383.191.370	54,74
19	2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	493.386.792	105.104.838	21,30
20	2.22.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	446.024.140	216.760.000	48,60
5	2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	289.990.090	121.607.000	41,93

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
21	2.22.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.990.090	121.607.000	41,93
6	2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.800.544.450	757.059.414	42,05
22	2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	850.090.000	345.014.394	40,59
23	2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	950.454.450	412.045.020	43,35
7	2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.268.649.741	520.821.826	41,05
24	2.22.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.481.640	134.256.076	42,16
25	2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	740.937.398	355.037.500	47,92
26	2.22.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.230.703	31.528.250	15,07
II	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	11.802.538.770	3.367.468.693	28,53
8	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.687.172.710	641.589.231	23,88
27	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.687.172.710	641.589.231	23,88
9	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.653.900.000	1.507.699.231	22,66
28	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	6.653.900.000	1.507.699.231	22,66
10	2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.461.466.060	1.218.180.231	49,49
29	2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.461.466.060	1.218.180.231	49,49
III	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.277.064.520	1.349.193.362	31,54

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
11	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.277.064.520	1.349.193.362	31,54
30	2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.914.880.000	993.854.131	34,10
31	2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.362.184.520	355.339.231	26,09
IV	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	3.395.000.000	219.894.000	6,48
12	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	3.395.000.000	219.894.000	6,48
32	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	3.395.000.000	219.894.000	6,48
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		22.833.362.304	5.839.040.160	25,57
V	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	17.468.796.858	4.007.614.067	22,94
13	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.522.890	0	0,00
33	3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	56.522.890	0	0,00
14	3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.500.720.960	3.875.489.067	31,00
34	3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	12.500.720.960	3.875.489.067	31,00
15	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.557.126.648	4.445.000	0,10
35	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	330.247.590	0	0,00
36	3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.898.957.000	0	0,00
37	3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	327.922.058	4.445.000	1,36

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
16	3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	354.426.360	127.680.000	36,02
38	3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata	354.426.360	127.680.000	36,02
VI	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.594.269.971	880.684.462	24,50
17	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.594.269.971	880.684.462	24,50
39	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.408.527.550	251.088.231	17,83
40	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.299.905.391	587.196.231	45,17
41	3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	885.837.030	42.400.000	4,79
VII	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.770.295.475	950.741.631	53,71
18	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.770.295.475	950.741.631	53,71
42	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	577.015.333	177.282.400	30,72
43	3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1.193.280.142	773.459.231	64,82
JUMLAH		60.554.347.043	19.950.193.426	32,95

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai dua urusan, tujuh program, dan 18 kegiatan dan 43 sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebesar Rp

60.554.347.043 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 19.950.193.426 atau sebesar 32,95 % dari keseluruhan anggaran. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 40.604.153.617. Program yang belum optimal ketercapaiannya adalah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 6,48 %, dimana kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Kota serta sub kegiatan Perlindungan Cagar Budaya belum optimal. Adapun event yang akan diselenggarakan antara lain yaitu Rakornas Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang diselenggarakan pada 22-26 Agustus 2023 meliputi kegiatan welcome dinner, parade budaya, pameran dan bazar, heritage tour, ladies program dan pentas seni budaya.

Selain itu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memiliki capaian anggaran 22,94 persen. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang belum dilaksanakan hingga triwulan II antara lain Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota. Adapun aktivitas yang akan diselenggarakan yaitu kajian pariwisata.

Selain itu terdapat kegiatan yang memiliki realisasi anggaran 0,10 persen antara lain Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp3.898.957.000 belum terlaksana hingga triwulan II. Adapun event yang akan diselenggarakan yaitu Pembangunan Kampong Wisata Taman Lele.

Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Adapun yang bersumber tidak APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp 250.000.000,-.

- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 3.698.380.000,-.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 1.146.459.000,-.
- d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 676.042.142,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 111 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021–2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021–2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET RENSTRA				REALISASI			PROYEKSI	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023 TW II	2024	2025
Tujuan 1 :											
Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal	%	45,48	49,95	55,17	61,05	50,47	61,52	64,18	64,18	64,18
Sasaran 1 :											
Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	65,30	71,57	77,85	85,45	63,78	77,78	77,78	77,78	77,78
	Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	25,66	28,33	32,50	36,66	37,16	45,27	50,58	50,58	50,58
Sasaran 6 :											
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	nilai	84,53	84,55	84,60	84,65	84,61	76,20	76,20	76,20	76,20
Tujuan 2 :											
Meningkatkan Kunjungan Wisata	Meningkatkan Pendapatan Asli	%	19	19	19	19	7,96	12,58	9,52	9,52	9,52

Kota Semarang	Daerah Sektor Pariwisata										
Sasaran 2 :											
Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	orang	3.455.921	3.663.276	3.883.073	4.116.057	2.663.684	4.943.302	2.440.965	4.943.302	4.943.302
Sasaran 3 :											
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	orang	7.025	7.447	7.894	8.367	77	4.045	3.121	4.045	4.045
Sasaran 4 :											
Tingkat Hunian Akomodasi	Tingkat Hunian Akomodasi	%	33,96	37,60	41,24	44,88	31,74	52,60	51,11	52,60	52,60
Sasaran 5 :											
Lama Tinggal Wisatawan	Lama Tinggal Wisatawan	hari	1,25	1,30	1,35	1,4	1,32	1,43	1,31	1,43	1,43

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. **Tujuan 1 “Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal”, telah dapat melebihi target, dimana realisasinya di tri wulan II sebesar 64,18% dari target sebesar 55,17%. Tujuan tersebut mengampu dua sasaran antara lain:

- Sasaran 1 “Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal” memiliki 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut :
 - Tingkat Pelestarian Warisan Budaya, target sebesar 77,85% dan realisasinya di tri wulan II sebesar 77,78%.
 - Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal, target sebesar 32,50% dan realisasinya di tri wulan II sebesar 50,58%.
- Sasaran 6 “Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimana target nilai sebesar 84,60 dan realisasi nilai sebesar 76,20.

b. **Tujuan 2 “Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata” belum dapat mencapai target dimana realisasinya sebesar 9,52 % dari target sebesar 19%. Indikator kinerja tersebut belum dapat mencapai target dan akan dimaksimalkan di sisa bulan anggaran.

Tujuan tersebut mengampu dua sasaran antara lain:

- Sasaran 2 “Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara, dimana realisasi di triwulan kedua sebanyak 2.440.965 orang dan target sebanyak 3.883.074 orang. Belum tercapainya target kunjungan wisatawan ini akan dioptimalkan pada liburan akhir

tahun. Adapun kendala yang dihadapi antara lain yaitu elnino yang menyebabkan cuaca begitu panas (Kota Semarang masuk 3 kota dengan suhu tertinggi) kemungkinan mengakibatkan turunnya pergerakan wisatawan nusantara.

- Sasaran 3 “Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara, dimana target sebanyak 7.894 orang dan realisasinya di triwulan kedua sebanyak 3.121 orang. Indikator kinerja tersebut belum dapat mencapai target, hal ini dikarenakan sebagai berikut :
 1. Masih ditutupnya rute penerbangan luar negeri di bandara Ahmad Yani.
 2. Kapal *cruise* yang bersandar ke Semarang belum terlalu intense.
- Sasaran 4 “Tingkat Hunian Akomodasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Hunian Akomodasi, dimana target sebanyak 41,24% dan realisasi di triwulan kedua sebanyak 51,11%.
- Sasaran 5 “Lama Tinggal Wisatawan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Lama Tinggal Wisatawan, dimana target sebanyak 1,35 hari dan realisasinya di triwulan kedua sebesar 1,31 hari.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun

2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui. Hanya ada beberapa target indikator yang belum tercapai ditriwulan kedua, diantaranya adalah sasaran Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal dengan indikator Tingkat Pelestarian Warisan Budaya; sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata dengan indikator Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata, serta sasaran Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pelayanan kebudayaan dan pariwisata antara lain:

- a. Semakin menurunnya minat masyarakat dalam mengapresiasi atraksi seni budaya.
- b. Belum beragamnya partisipasi kelompok/sanggar/komunitas seni budaya dalam kegiatan kebudayaan di Kota Semarang.
- c. Belum optimalnya pelestarian warisan budaya seperti artefak dan cagar budaya.
- d. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang ditunjukkan dengan beberapa kasus pengrusakan, pencurian maupun perilaku terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang menimbulkan hilangnya autentisitas nilai.
- e. Masih kurangnya apresiasi masyarakat pada atraksi seni budaya lokal.
- f. Masih kurangnya apresiasi penggiat seni budaya terhadap pembangunan kebudayaan.
- g. Belum fokus pada target pasar tertentu pada kunjungan wisatawan mancanegara Kota Semarang.
- h. Belum optimalnya kolaborasi seni budaya untuk atraksi wisata sebagai salah satu daya tarik wisatawan.
- i. Belum optimalnya lama tinggal wisatawan.
- j. Belum optimalnya masyarakat dalam perintisan tempat wisata.
- k. Belum optimalnya pemasaran paket wisata pada desa wisata.

1. Belum optimalnya pemasaran pada destinasi wisata buatan (wisata kuliner).

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan perihal layanan urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi terdapat solusi sebagai berikut:

- a. Strategi pemasaran pariwisata digital untuk mengenalkan wisata di Kota Semarang dengan target utama wisatawan nusantara.
- b. Menumbuhkan minat generasi muda dengan melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif, melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya.
- c. Menginventarisasi dan menyeleksi seni budaya lokal untuk dimasukkan di *calendar of event*, misalnya nyadran kali dan memetri kampung jawa dinaikkan ke event tingkat kota.
- d. Membuat kegiatan untuk mengapresiasi tokoh atau pelaku seni budaya agar lebih masif lagi.
- e. Mengadakan jasa konsultasi dengan menyusun kajian target pasar wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Semarang.
- f. Mendorong kelompok/sanggar dan komunitas seni budaya untuk berkarya atau tampil pada penyelenggaraan atraksi wisata di desa wisata dan di daya tarik wisata.
- g. Memfasilitasi menciptakan paket wisata dan berkolaborasi antar daya tarik wisata untuk mendorong kunjungan wisatawan.
- h. Lebih banyak melibatkan masyarakat dalam menawarkan produk paket wisata kepada Biro Perjalanan Wisata supaya masyarakat lebih berkolaborasi dalam kepariwisataan.
- i. Menambah rintisan obyek wisata dan pemaketan wisata.
- j. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya, dan yang lebih utama adalah peningkatan daya tarik destinasi pariwisata itu sendiri.

- k. Promosi paket wisata Kota Semarang dengan daerah lain sebagai tujuan wisata yang digemari wisatawan mancanegara perlu digalakkan kembali untuk meningkatkan kunjungan wisata dari mancanegara.
- l. Inovasi dalam peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui media sosial.
- m. Bekerjasama dengan *influencer* media social untuk memasarkan pariwisata Kota Semarang.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan :

- Penetapan Semarang Lama sebagai warisan budaya sebagai jalur rempah, jalur sutra dan jalur gula.
- Kemajuan teknologi berdampak pada kearifan lokal.
- Branding citra pariwisata Kota Semarang yang positif.
- Penyelenggaraan festival seni budaya yang berkelanjutan.
- Inovasi event atau festival kebudayaan bertaraf internasional yang dapat membuat peluang penerbangan internasional.
- *Sustainable tourism* sebagai tren wisata di era modern.
- Adaptasi pembayaran digital.
- Penyediaan infrastruktur yang ramah anak dan ramah difabel.
- Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- Menjamin kesamaan hak perempuan dan laki-laki serta upaya mewujudkan.
- Kesetaraan dan keadilan gender dalam pelayanan kebudayaan dan pariwisata.
- Penurunan pravelansi stunting melalui kegiatan wisata edukasi gizi.

- Peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal (sosialisasi branding kepariwisataan).
 - Pembangunan taman lalu lintas dan wisata ramah anak.
- b. Peluang :
- Kota Semarang masuk dalam 10 besar KEN (Kharisma Event Nusantara).
 - Kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata mulai dari Masyarakat, media, dunia usaha dan pemerintah daerah.
 - Penetapan UNESCO untuk Semarang Lama sebagai cagar budaya.
 - Dukungan peningkatan jumlah penerbangan dari Kota Semarang dan ke luar negeri.
 - Atraksi seni budaya lokal oleh pelaku seni dengan menyajikan kuliner khas Kota Semarang.
 - Leadership Kepala Daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas.
 - Pertumbuhan ekonomi mulai membaik, sehingga destinasi dan industri kepariwisataan juga mulai meningkat.
 - Kota Semarang mendapat apresiasi sebagai Lima Penyaji Terbaik Duta Seni Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang diselenggarakan Badan Penghubung Jawa Tengah TMII Jakarta.
 - Diraihnya Juara Kategori Paket Wisata Gelar Desa Wisata Jawa Tengah Tahun 2022 Kepada Desa Wisata Kandri, tingkat Provinsi Jawa Tengah.
 - Pemerintah Kota Semarang berkomitmen terhadap pembangunan tanpa mengesampingkan seni budaya lokal dan warisan cagar budaya yang menjadi salah satu produk wisata asli Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan kinerja lain di bidang pelaku seni, sanggar seni , apresiasi terhadap kesenian lokal, dan pelestarian warisan cagar budaya juga menunjukkan tren yang positif.
 - Kapal pesiar sudah mulai diijinkan berlabuh di Tanjung Mas meskipun intensitasnya belum terlalu sering.

- Destinasi wisata kembali dibuka operasionalisasinya secara penuh karena tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga HAKI dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro.
- Peningkatan promosi pariwisata melalui berbagai media seperti leaflet, media cetak dan elektronik berupa baliho, surat kabar dan website serta melalui sosial media dan paket wisata lainnya.
- Daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang.
- *Co-working space* gratis untuk memfasilitasi komunitas, terutama dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.
- Hubungan antar *stakeholder* pariwisata yang harmonis dan sinergis dengan adanya komunitas wisata yang saling berkolaborasi dengan UMKM.
- Dukungan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.
- Terbentuknya Badan Kerjasama Sektor Pariwisata KEDUNGSEPUR.
- Tersedianya *Big Data* yang dapat dimanfaatkan untuk melihat tren masyarakat.
- Banyaknya varian destinasi wisata sehingga memberikan pilihan tujuan wisata yang lebih luas dan beragam kepada wisatawan.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang maka isu strategis sebagai berikut:

- a. Penetapan Kawasan Semarang Lama sebagai cagar budaya yang dikembangkan. Kawasan Semarang lama antara lain : Kauman Pasar Johar (festival kuliner), masjid layur menara layur, pecinan yang ada klinteng dan kota lama (*little Netherlands*).
- b. Wisata kuliner sebagai wisata andalan di Kota Semarang.
- c. Trend wisatawan *culture immersion* yaitu kegiatan liburan di mana wisatawan datang ke tempat yang sangat berbeda dengan tempat

tinggal mereka, sehingga pengenalan desa wisata menjadi salah satu paket wisatawan yang perlu diperkenalkan.

- d. Pengaruh negative budaya asing/luar.
- e. Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif sebagai upaya pengembangan kapasitas pelaku dan ekosistem ekonomi kreatif dalam memanfaatkan kekayaan warisan budaya.
- f. Pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan.
- g. Pariwisata yang ramah lansia dan ramah difabel.
- h. Destinasi pariwisata menjadi kawasan tanpa rokok.
- i. Sarana prasarana di kawasan wisata yang responsive gender dan ramah anak.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya;
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
5. Program Pemasaran Pariwisata;
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.22 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN											
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	19.162.311.517	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	19.162.311.517	
			Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100,00%				Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100,00%		
			Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100,00%				Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100,00%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100,00%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100,00%		
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah Dokumen Dan Laporan	8 dokumen	1.603.026	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD, Jumlah Dokumen Dan Laporan	8 dokumen	1.603.026	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan					Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Yang Dihasilkan			
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	273.760	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	273.760	
2.22.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	227.880	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	227.880	
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	322.813	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	322.813	
2.22.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	227.880	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	227.880	
2.22.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen	322.813	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen	322.813	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			DPA-SKPD		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	227.880	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	227.880	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100,00%	12.478.837.919	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100,00%	12.478.837.919	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 Orang/bulan	12.047.637.079	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 Orang/bulan	12.047.637.079	
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	430.673.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	430.673.200	
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	175.880	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	175.880	
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	175.880	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	175.880	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	ulan/Semesteran SKPD		dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	175.880	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	175.880	
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100,00%	407.902.240	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100,00%	407.902.240	
2.22.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 Orang	250.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 Orang	250.000.000	
2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	157.902.240	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	157.902.240	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan	100,00%	2.223.034.662	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Cakupan Pelayanan	100,00%	2.223.034.662	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pelaksanaan Administrasi Umum					Pelaksanaan Administrasi Umum			
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	312.312.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	312.312.200	
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Pake	299.492.760	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Pake	299.492.760	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	106.049.802	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	47 Paket	106.049.802	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.408.976	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	47.408.976	
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 Laporan	525.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 Laporan	525.000.000	
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	370.040.094	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	370.040.094	
2.22.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	6 Dokumen	562.730.830	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	6 Dokumen	562.730.830	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD			Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD			
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	956.514.359	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	956.514.359	
2.22.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	279.938.739	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	279.938.739	
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87 Buah	676.575.620	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87 Buah	676.575.620	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	1.823.878.870	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Tersedianya Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	1.823.878.870	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	745.570.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	745.570.000	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	1.078.308.870	Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	1.078.308.870	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Umum Kantor		Kantor yang Disediakan			Umum Kantor		Kantor yang Disediakan			
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	1.270.540.441	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada OPD	100,00%	1.270.540.441	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	350.190.730	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	350.190.730	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	740.937.398	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	740.937.398	
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	179.412.313	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	179.412.313	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANG	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sangg	20%	12.493.445.020	PROGRAM PENGEMBAN	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sangga	20%	12.493.445.020	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	AN KEBUDAYAAN		ar Terhadap Kegiatan Seni Budaya			GAN KEBUDAYAAN		r Terhadap Kegiatan Seni Budaya			
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20%	2.678.078.960	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20%	2.678.078.960	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	2.678.078.960	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 objek	2.678.078.960	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20%	7.353.900.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20%	7.353.900.000	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	7.353.900.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 objek	7.353.900.000	

No	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20%	2.461.466.060	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20%	2.461.466.060	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	2.461.466.060	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	2.600 orang	2.461.466.060	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20%	4,670.839.520	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Kota Semarang	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20%	4,670.839.520	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	20%	4,670.839.520	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	20%	4,670.839.520	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	3.308.655.000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Kota Semarang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 sertifikat	3.308.655.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.22.03. 2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	1.362.184.520	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 lembaga	1.362.184.520	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77,85%	3.249.308.750	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya	77,85%	3.249.308.750	
2.22.05. 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77,85%	3.249.308.750	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77,85%	3.249.308.750	
2.22.05. 2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461 objek	3.249.308.750	Pelindungan Cagar Budaya	Kota Semarang	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	461 objek	3.249.308.750	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Kota Semarang				
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	17.557.409.883	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	17.557.409.883	
3.26.02. 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	78 buah	56.522.890	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	78 buah	56.522.890	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	79 lokasi	56.522.890	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pematapan, Revitalisasi)	79 lokasi	56.522.890	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.293.191 orang	12.642.130.680	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.293.191 orang	12.642.130.680	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 unit	12.642.130.680	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 unit	12.642.130.680	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	4.531.944.953	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100%	4.531.944.953	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 Lokasi	310.699.645	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	79 Lokasi	310.699.645	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	3.898.957.000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	3.898.957.000	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	322.288.308	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	322.288.308	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	85,00%	326.811.360	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah	Kota Semarang	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	85,00%	326.811.360	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	6 Laporan	326.811.360	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	6 Laporan	326.811.360	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	3.551.914.696	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	3.551.914.696	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	3.551.914.696	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	3.551.914.696	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 Dokumen	1.397.150.150	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	16 Dokumen	1.397.150.150	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	1.268.927.516	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	1.268.927.516	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pariwisata Kabupaten/Kota					Pariwisata Kabupaten/Kota					
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	885.837.030	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	885.837.030	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	70,00%	1.725.461.575	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Kota Semarang	SDM Pariwisata	70,00%	1.725.461.575	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,00%	1.725.461.575	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,00%	1.725.461.575	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120 Orang	524.267.833	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Semarang	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120 Orang	524.267.833	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta	940 Orang	1.201.193.742	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta	940 Orang	1.201.193.742	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			
	Total				62.410.690.961					62.410.690.961	

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107

8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui**

penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus :

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.

- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.

- 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan focus :

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.

- 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.

- 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian

menjadi tujuan dari Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

- Tujuan pada urusan wajib kebudayaan yaitu **Meningkatkan Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal**. dengan indikator tujuan “**Meningkatkan Kearifan Budaya Lokal**”. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu:
 1. **Sasaran 1 : “Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pelestarian Warisan Budaya
 - b. Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal
 2. **Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”**, dengan indikator sasaran yaitu Nilai AKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- **Tujuan pada urusan pilihan pariwisata yaitu: “Meningkatkan Kunjungan Wisata Kota Semarang”** dengan indikator tujuan **Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata**. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu :
 1. **Sasaran 3 : Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara**, dengan indikator sasaran kunjungan wisata nusantara.
 2. **Sasaran 4 : Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara**, dengan indikator sasaran kunjungan wisata mancanegara.
 3. **Sasaran 5 : Tingkat Hunian Akomodasi**, dengan indikator sasaran tingkat hunian akomodasi.
 4. **Sasaran 6 : Lama Tinggal Wisatawan**, dengan indikator sasaran lama tinggal wisatawan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN URUSAN KEBUDAYAAN			
Meningkatkan Kearifan Budaya Melalui Pelestarian Warisan Budaya dan Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17
SASARAN URUSAN KEBUDAYAAN			
Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya dan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	%	77,85
	Persentase Tingkat Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	%	32,50
TUJUAN URUSAN PARIWISATA			
Meningkatkan Sektor Pariwisata Sebagai Produk Unggulan Daerah	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	%	6
SASARAN URUSAN PARIWISATA			
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	orang	3.883.073
	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	orang	7.894
	Persentase Tingkat Hunian Akomodasi	%	41,24

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Tingkat Kearifan Budaya Lokal” dan indikator sasaran “Tingkat Kearifan Budaya Lokal” dan Indikator tujuan “Tingkat Kearifan Budaya Lokal” dan indikator sasaran “Persentase peningkatan kunjungan wisata”.
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi covid-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
2 22 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%	18.343.454.309	18.171.381.449	19.162.311.517	APBD	
		Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%					
		Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%					
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja disbudpar	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	1.014.600	1.829.020	1.603.026	APBD	
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	201.600	325.200	273.760	APBD	
2 22 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	253.600	227.880	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
2 22 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	371.510	322.813	APBD	
2 22 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	253.600	227.880	APBD	
2 22 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	371.510	322.813	APBD	
2 22 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	162.600	253.600	227.880	APBD	
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan-disbudpar	100,00%	100,00%	100,00%	12.326.941.989	12.229.648.989	12.478.837.919	APBD	
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	936 Orang/bulan	936 Orang/bulan	936 Orang/bulan	11.798.370.989	11.798.370.989	12.047.637.079	APBD	
2 22 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	528.083.200	430.673.200	430.673.200	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2 22 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	162.600	201.600	175.880	APBD	
2 22 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	162.600	201.600	175.880	APBD	
2 22 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	162.600	201.600	175.880	APBD	
2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian-disbudpar	100,00%	100,00%	100,00%	332.527.240	451.927.240	407.902.240	APBD	
2 22 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	597 Orang	597 Orang	597 Orang	175.000.000	175.000.000	250.000.000	DBH CHT	
2 22 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78 Orang	78 Orang	78 Orang	157.527.240	276.927.240	157.527.240	APBD	
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum-Disbudpar	100,00%	100,00%	100,00%	2.113.257.099	2.128.791.919	2.223.034.662	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	14 Paket	215.204.500	215.204.500	312.312.200	APBD	
2 22 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	13 Paket	13 Paket	90.320.980	90.320.980	299.492.760	APBD	
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket	47 Paket	47 Paket	136.459.470	136.459.470	106.049.802	APBD	
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	47.817.577	47.396.037	47.408.976	APBD	
2 22 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 Laporan	600 Laporan	600 Laporan	700.000.000	700.000.000	525.000.000	APBD	
2.22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	200 Laporan	493.386.792	493.386.792	370.040.094	APBD	
2 22 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	430.067.780	446.024.140	562.730.830	APBD	
2 22 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah-disbudpar Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	462.062.830	289.990.090	956.514.359	APBD	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	22 Unit	-	1 Unit	172.072.740	-	279.938.739	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
2 22 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	87 buah	87 buah	289.990.090	289.990.090	676.575.620	APBD	
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah-disbudpar	100,00%	100,00%	100,00%	1.800.544.450	1.800.544.450	1.823.878.870	APBD	
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	850.090.000	850.090.000	745.570.000	APBD	
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	950.454.450	950.454.450	1.078.308.870	APBD	
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-disbudpar	100,00%	100,00%	100,00%	1.307.106.101	1.268.649.741	1.270.540.441	APBD	
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	29 Unit	30 Unit	272.890.800	318.481.640	350.190.730	APBD	
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	6 Unit	6 Unit	6 Unit	824.984.598	740.937.398	740.937.398	APBD	
2 22 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	6 Unit	6 Unit	6 Unit	209.230.703	209.230.703	179.412.313	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	10.463.354.290	11.802.538.770	12.493.445.020	APBD	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	2.511.018.230	2.687.172.710	2.678.078.960	APBD	
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek	10 Objek	10 Objek	2.511.018.230	2.687.172.710	2.678.078.960	APBD	
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	6.453.900.000	6.653.900.000	7.353.900.000	APBD	
2 22 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	7 Objek	7 Objek	6.453.900.000	6.653.900.000	7.353.900.000	APBD	
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	1.498.436.060	2.461.466.060	2.461.466.060	APBD	
2 22 02 2.03 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2.600 Orang	2.600 Orang	2.600 Orang	1.498.436.060	2.461.466.060	2.461.466.060	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		yang Dibina								
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional	20,00%	20,00%	20,00%	4.277.064.520	4.277.064.520	4.277.064.520	APBD	
2 22 02 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya	20,00%	20,00%	20,00%	4.277.064.520	4.277.064.520	4.277.064.520	APBD	
2 22 03 2.01 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	629 Sertifikat	629 Sertifikat	629 Sertifikat	2.914.880.000	2.914.880.000	3.308.655.000	APBD	
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	124 Lembaga	124 Lembaga	124 Lembaga	1.362.184.520	1.362.184.520	1.362.184.520	APBD	
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pelestarian Warisan Budaya	77,85%	77,85%	77,85%	3.395.000.000	3.395.000.000	3.249.308.750	APBD	
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	77,85%	77,85%	77,85%	3.395.000.000	3.395.000.000	3.249.308.750	APBD	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindung	461 Objek	461 Objek	461 Objek	3.395.000.000	3.395.000.000	3.249.308.750	APBD	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%	13.500.000.000	13.500.000.000	17.557.409.883	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%	56.522.890	56.522.890	56.522.890	APBD	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	78 buah	78 buah	78 buah	56.522.890	56.522.890	56.522.890	APBD	
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	78 buah	78 buah	78 buah	588.329.790	588.329.790	4.531.944.953	APBD	
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Terwujudnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata secara berkelanjutan	-	79 Lokasi	79 Lokasi	330.347.590	330.347.590	310.699.645	APBD	
3 26 02 2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata	1.293.191 orang	1.293.191 orang	1.293.191 orang	12.500.720.960	12.500.720.960	12.642.130.680	APBD	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	6 Unit	12.500.720.960	12.500.720.960	12.642.130.680	APBD	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tata Kelola Destinasi Pariwisata	100,00%	100,00%	100,00%	315.587.400	588.329.790	4.531.944.953	APBD	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai		79 Lokasi	79 Lokasi	57.505.200	330.247.590	310.699.645	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, pemantapan, Revitalisasi)								
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	200.577.000	200.577.000	3.898.957.000	APBD DAK Fisik	
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	57.505.200	57.505.200	322.288.308	APBD DAK Non Fisik	
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas	100,00%	100,00%	85,00%	354.426.360	354.426.360	326.811.360	APBD	
3 26 02 2.04 0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Terlaksananya Bina Pelaku Usaha Pariwisata		6 Laporan	6 Laporan	354.426.360	354.426.360	326.811.360	APBD	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	100,00%	100,00%	3.498.424.331	3.394.269.971	3.551.914.696	APBD	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan	100,00%	100,00%	100,00%	3.498.424.331	3.394.269.971	3.551.914.696	APBD	
3 26 03 2.01 0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	1.128.527.550	1.208.527.550	1.397.150.150	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
3 26 03 2.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1.299.905.391	1.299.905.391	1.268.927.516	APBD	
3 26 03 2.01 0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.069.991.390	885.837.030	885.837.030	APBD DAK Non Fisik	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	SDM Pariwisata	70,00%	70,00%	70,00%	910.920.000	1.094.253.333	1.725.461.575	APBD	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70,00%	70,00%	70,00%	910.920.000	1.094.253.333	1.725.461.575	APBD	
3 26 05 2.01 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	120 Orang	120 Orang	120 Orang	393.682.000	577.015.333	524.267.833	APBD DAK Non Fisik	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	940 Orang	940 Orang	940 Orang	517.238.000	517.238.000	1.201.193.742	APBD	
JUMLAH						55.351.247.450	55.634.508.043	62.410.690.961		

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2023

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dinamika kondisi nasional maupun Kota Semarang selama triwulan I dan Triwulan II tahun 2023. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang.
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2023 sampai bulan Juni 2023 Triwulan II (Semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan;
3. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
4. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Rencana Kerja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis serta sebagai upaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Jasa Usaha pada UPTD Taman Lele.

5. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang dan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta evaluasi Gubernur.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan IV tahun 2023 sebagai bahan rencana tindaklanjut perencanaan pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai harapan.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, dengan melibatkan

partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

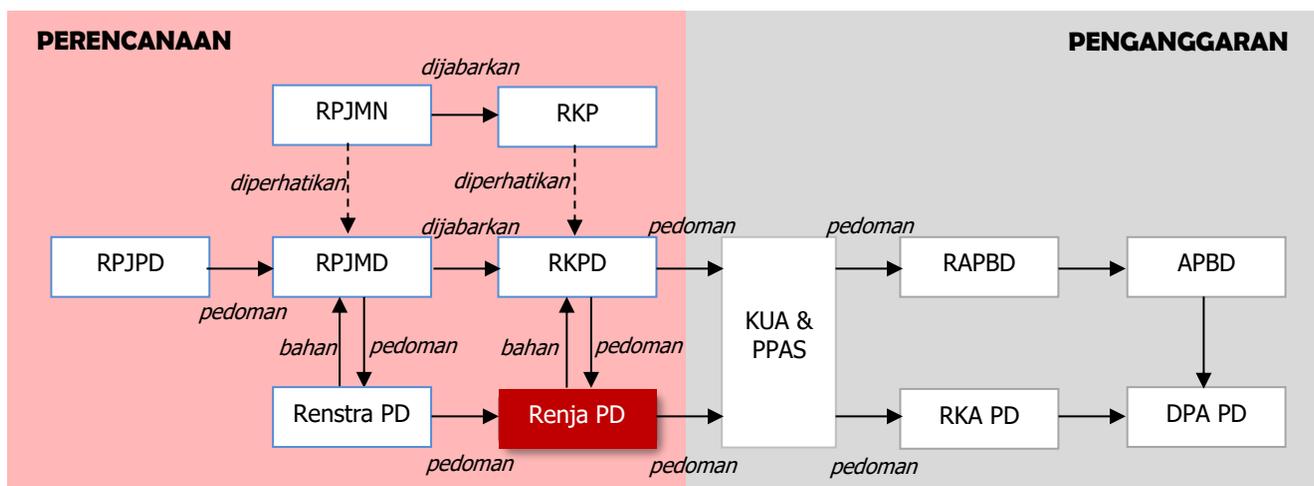
23. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH										
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 Rasio	0,93	1 Rasio	0	0%	1 Rasio	0,93	93%	93%
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terpenuhinya bahan bacaan dan peningkatan tenaga pengelola perpustakaan									
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100	5 Layanan	4 Layanan	80	80
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	4 Perpustakaan	80	80
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat	100 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	50 Eksemplar	100	100 Eksemplar	0 Eksemplar	0	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
		Kabupaten/Kota yang Dikembangkan									
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	12 Perpustakaan	240	240
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100	5 Perpustakaan	4 Perpustakaan	80	80
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	60 Orang	0 Orang	0	33
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100	5 Layanan	5 Layanan	100	100
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	100	200 Eksemplar	50 Eksemplar	25	25
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100	100 Eksemplar	0 Eksemplar	0	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
		Keberagaman Koleksi Perpustakaan									
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	12 Dokumen	50	50
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan literasi pada masyarakat serta kebermanfaatannya									
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	10 Lokus	10 Lokus	7 Lokus	70	15 Lokus	8 Lokus	53	53
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	6 Perpustakaan	60	20 Perpustakaan	16 Perpustakaan	80	80
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	3 Orang	60	5 Orang	193 Orang	386	386
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	3 Perpustakaan	60	5 Perpustakaan	12 Perpustakaan	240	240
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keempatannya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	0 Orang	0	2 Orang	2 Orang	100	100
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya khasanah naskah kuno daerah kabupaten/kota									
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	3 Orang	3 Orang	2 Orang	67	5 Orang	1 Orang	20	20
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	1 Eksemplar	50	5 Eksemplar	5 Eksemplar	100	100
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	100	2 Eksemplar	2 Eksemplar	100	100
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	100	5 Eksemplar	5 Eksemplar	100	100
	NON URUSAN										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	67	3 Dokumen	2 Dokumen	67	67
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50	2 Dokumen	1 Dokumen	50	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	4 Laporan	2 Laporan	50	50
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	4 Laporan	50	8 Laporan	4 Laporan	50	50
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	100	94 Orang/bulan	77 Orang/bulan	100	82
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	6 Dokumen	50	50
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	50	4 Laporan	2 Laporan	50	50
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50	50
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	2 Paket	67	67
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	2 Paket	67	67
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2 Paket	67	3 Paket	2 Paket	67	67
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	1 Paket	50	2 Paket	1 Paket	50	50
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	60	5 Dokumen	3 Dokumen	60	60
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50	50
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50	50
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	50	12 Dokumen	6 Dokumen	50	50
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	20 Unit	20 Unit	20 Unit	10 Unit	50	20 Unit	10 Unit	50	50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan									
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50	50
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50	12 Laporan	6 Laporan	50	50
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	13 Unit	100	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5 Unit	50	10 Unit	5 Unit	50	50
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	100
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
		kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik									
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	500 Berkas	500 Berkas	400 Berkas	80	1000 Berkas	489 Berkas	48	48
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	4000 Berkas	4000 Berkas	2000 Berkas	50	5000 Berkas	0 Berkas	0	40
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	100	31 Laporan	0 Laporan	0	100
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota										
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	125 Arsip	62,5	250 Arsip	155 Arsip	62	62
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	225 Arsip	56,25	500 Arsip	0 Arsip	0	45
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota										
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	80 Pengguna	75 Pengguna	60 Pengguna	80	100 Pengguna	53 Pengguna	53	53

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	100	31 Laporan	5 Laporan	16	16
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip Musnah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun										
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5000 Arsip	3000 Arsip	3000 Arsip	2000 Arsip	67	5000 Arsip	1005 Arsip	20	20
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	2000 Berkas	2000 Berkas	1000 Berkas	50	2500 Berkas	1005 Berkas	20	20
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota										
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	220 Arsip	55	500 Arsip	105 Arsip	21	21
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	220 Arsip	55	500 Arsip	105 Arsip	21	21
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang										

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
	Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan										
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	4 Daftar	4 Daftar	2 Daftar	50	7 Daftar	0 Daftar	0	57
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	4 Arsip	4 Arsip	2 Arsip	50	7 Arsip	0 Arsip	0	57
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	80 Arsip	80 Arsip	60 Arsip	75	100 Arsip	35 Arsip	35	80
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	80 Arsip	80 Arsip	60 Arsip	75	100 Arsip	35 Arsip	35	80
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota										
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	100 Arsip	50	250 Arsip	0 Arsip	0	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
		Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan									
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	300 Arsip	300 Arsip	170 Arsip	57	376 Arsip	200 Arsip	53	53
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang										
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	0 Arsip	0	80
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	0 Arsip	0	80
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	400 Arsip	400 Arsip	250 Arsip	62,5	500 Arsip	0 Arsip	0	80
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	100%	60%	60%	60%	100%	60	80%	80%	100%
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota										
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	5 SOP	5 SOP	3 SOP	60	5 SOP	0 SOP	0	100
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin	250 Arsip	200 Arsip	200 Arsip	130 Arsip	65	250 Arsip	0 Arsip	0	80

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
		Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) atau lebih adalah di antaranya sebagai berikut:

1. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
3. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
4. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
5. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
7. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
8. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Hal tersebut mengingat beberapa SubKegiatan di atas dirasa memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, sehingga merujuk pada Rapat-rapat koordinasi lintas Bidang maka menjadi Subkegiatan prioritas untuk dmaksimalkan.

Adapun Subkegiatan yang mengalami efisiensi anggaran cukup signifikan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
3. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
4. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

Meskipun secara tidak langsung terdapat pengaruh pada capaian kinerja namun demikian kerjasama lintas bidang perlu dilakukan untuk memberikan dukungan baik waktu, tenaga maupun pikiran.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15.447.829.882	7.551.854.364	48,89%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	14.316.065.367	7.205.206.481	50,33%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.557.705.242	6.250.010.224	49,77%
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.921.320	2.229.000	28,14%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.878.000	1.550.500	31,79%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.429.180	-	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	908.380	99.000	10,90%
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	705.760	579.500	82,11%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.332.019.562	4.549.820.820	48,75%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.128.481.882	4.466.540.020	48,93%
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	201.056.000	82.000.000	40,78%
7	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.170.160	794.600	67,91%
8	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.311.520	486.200	37,07%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.042.069.070	514.374.188	49,36%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.659.959	10.242.690	39,92%
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.482.067	6.914.940	37,41%
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.084.831	14.398.700	65,20%
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.981.626	10.177.900	53,62%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.400.000	3.859.000	26,80%
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.775.000	2.225.000	25,36%
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.065.240	47.390.958	20,87%
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	706.620.347	419.165.000	59,32%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231.627.803	130.651.000	56,41%
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	231.627.803	130.651.000	56,41%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	698.644.112	300.946.133	43,08%
18	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	257.332.112	81.509.233	31,67%
19	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	441.312.000	219.436.900	49,72%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.245.423.375	751.989.083	60,38%
20	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	36.318.180	17.798.583	49,01%
21	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	490.608.960	184.105.500	37,53%
22	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	112.606.160	32.996.000	29,30%
23	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	605.890.075	517.089.000	85,34%
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.653.644.405	873.750.497	52,84%
	Pengeloan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.052.469.760	681.697.400	64,77%

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
24	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan perpustakaan elektronik	260.973.780	238.421.600	91,36%
25	Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	64.875.810	7.180.000	11,07%
26	Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten/kota	95.522.650	0	0,00%
27	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	29.364.160	8.147.000	27,74%
28	Pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota	20.436.940	13.336.940	65,26%
29	Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	42.516.820	0	0,00%
30	Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota	12.159.930	0	0,00%
31	Pengembangan bahan pustaka	381.027.650	332.582.260	87,29%
32	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	73.910.080	20.554.150	27,81%
33	Penyusunan data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	71.681.940	61.475.450	85,76%
	Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah	601.174.645	192.053.097	31,95%
34	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	278.560.038	31.692.120	11,38%
35	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	85.175.527	45.226.309	53,10%
36	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	131.410.220	97.359.068	74,09%
37	Pengembangan Literasi berbasis inklusi sosial	70.692.280	17.775.600	25,15%
38	Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota	35.336.580	0	0,00%
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	104.715.720	81.445.760	77,78%
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	44.437.000	23.730.210	53,40%
39	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	40.915.980	23.730.210	58,00%
40	Pengembangan pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	3.521.020	0	0,00%
	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yg ditemukan oleh Pemda Kab/Kota	60.278.720	57.715.550	95,75%
41	Seleksi dan Pengadaan Koleksi budaya etnis nusantara	35.254.920	32.795.250	93,02%
42	Pengolahan dan Penyiangan koleksi budaya etnis nusantara	25.023.800	24.920.300	99,59%
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	1.131.764.515	346.647.883	30,63%
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	647.457.417	233.039.583	35,99%
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	214.552.237	72.151.793	33,63%
43	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	65.000.000	18.280.700	28,12%
44	Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	39.833.227	30.867.763	77,49%
45	Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan kabupaten/kota	109.719.010	23.003.330	20,97%
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	156.327.600	61.168.190	39,13%
46	Pengumpulan dan penyampaian salinan otentik naskah asli arsip terjaga kepada ANRI	44.074.300	30.801.480	69,89%
47	Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis	112.253.300	30.366.710	45,14%
	Pengelolaan Simpul jaringan infor kearsipan nasional Tk.Kab/Kota	276.577.580	99.719.600	36,05%
48	Penyediaan Informasi Akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	5.891.030	0	0,00%

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI
49	Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	270.686.550	99.719.600	36,84%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	433.441.458	113.608.300	26,21%
	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	55.809.690	28.832.000	51,66%
50	Penilaian penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	34.200.000	22.367.000	65,40%
51	Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun	21.609.690	6.465.000	29,92%
	Perlindungan dan penyelamatan Arsip akibat bencana yg berskala kab/kota	51.932.040	0	0,00%
52	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	36.930.420	0	0,00%
53	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	15.001.620	0	0,00%
	Penyelamatan Arsip perangkat daerah Kab/Kota yg digabung & dibubarkan & pemekaran daerah kec dan desa/kel	136.076.540	15.750.000	11,57%
54	Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7.778.500	6.850.000	88,06%
55	Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	9.500.000	8.900.000	93,68%
56	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	27.580.720	0	0,00%
57	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	91.217.320	0	0,00%
	Autentikasi Arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	131.123.218	69.026.300	52,64%
58	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	51.545.390	0	0,00%
59	Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	79.577.828	69.026.300	86,74%
	Pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan Hilang	58.499.970	0	0,00%
60	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	19.100.000	0	0,00%
61	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	19.999.980	0	0,00%
62	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencaian Arsip (DPA)	19.399.990	0	0,00%
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	50.865.640	0	0,00%
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yg bersifat Tertutup di Kab/Kota	50.865.640	0	0,00%
63	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	37.287.870	0	0,00%
64	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	13.577.770	0	0,00%

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 Urusan, 6 Program, 19 Kegiatan dan 64 Subkegiatan adalah sebesar Rp. 15.447.829.882,-. Dari total anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar 48,89% atau sejumlah Rp. 7.551.854.364,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 7.895.975.518,-.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun	44	45	46	47	48	49	45	67	68	69	70	71	69
	Persentase Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	55	56	57	58	59	60	56	57.05	57.05	58	59	60	58
	Persentase ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya	76	77	78	79	80	81	77	79.02	79.02	82	83	84	81
	Persentase indeks pembangunan literasi masyarakat	56	57	58	59	60	61	56	59.8	59.8	61	62	63	60

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Tujuan **“Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif”** memiliki 4 indikator kinerja yaitu:

1. Terukurnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat kajian/ survey total populasi usia membaca 15-68 Tahun, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
2. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.

3. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawabannya, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
4. Terukurnya unsur pembangunan literasi masyarakat dan aspek masyarakat, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.

Adapun Sasaran Renstra adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi social dengan indicator Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
- 2) Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK dengan indicator Persentase Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
- 3) Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik dengan indicator Persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.
- 4) Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat dengan indicator Persentase Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, di mana capaian tahun 2023 sudah sejalan dengan Renstra.

Dalam pemenuhan sasaran renstra disusunlah *critical succes factor* sehingga sasaran renstra diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut

- 1) Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan yakni Jumlah Seluruh masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan (termasuk tapi tidak terbatas pada KIE, Kunjungan onsite, dan kunjungan online) dibagi jumlah populasi
- 2) Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang yakni Jumlah koleksi (Termasuk tapi tidak terbatas pada buku, terbitan berkala, literatur kelabu, manuskrip, audio visual, rekaman, dan koleksi digital) dibagi jumlah populasi kota semarang
- 3) Nilai Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Kota Semarang yakni Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal
- 4) Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Semarang yakni Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang
Tahun 2023

2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	47	47
2	Pengunjung perpustakaan per tahun	%	28	28
3	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	59	59
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	79	79
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	58	58
3	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	arsip	149.500	149.500

Sumber: *Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2023*

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perpindahan gedung perpustakaan Kota Semarang lama di pertengahan Tahun 2021 yang semula berada di Gedung Pandanaran lantai 2 Jl. Pemuda Nomor. 148 Semarang ke Gedung Arsip di Jl. Prof . Sudharto Nomor 116 Semarang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat/pemustaka hal ini disebabkan oleh salah satunya gedung perpustakaan Kota Semarang yang kurang representatif seperti layaknya Perpustakaan Daerah lain, karena Gedung tersebut menjadi satu area dengan Depo Arsip (perpustakaan berada di lantai 1 dengan luas hanya $\pm 130 \text{ m}^2$ dan Depo arsip terletak satu lokasi yaitu berada di lantai 2 dengan luas $\pm 180 \text{ m}^2$);
2. Selain itu, Peraturan Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 31 Tahun 2015, pasal 17 huruf f dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk peruntukan Depo Arsip tidak diperbolehkan menjadi satu dengan area kerja/perkantoran;

3. Ditambah lagi, hasil pengawasan kearsipan eksternal Pemerintah Kota Semarang tanggal 21 Desember Tahun 2021 uraian hasil pengawasan pada point 28 dengan aspek/komponen yang dinilai terkait ruang penyimpanan arsip statis pada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) belum memenuhi kriteria yang diharapkan yaitu ruang penyimpanan arsip statis diisolasi dari sisa bangunan gedung lainnya sehingga adanya rekomendasi dari tim pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah yang harus dipenuhi;

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Kurangnya perpustakaan pada satuan pendidikan dasar yang telah mendapatkan akreditasi perpustakaan oleh Perpustakaan;
2. Kurangnya pengelolaan perpustakaan umum level kelurahan dan kecamatan sesuai standar;
3. Pengelolaan arsip di OPD Kota Semarang belum maksimal mengingat tidak semua OPD di kota Semarang memiliki Sarana Prasarana dan SDM kearsipan yang mumpuni;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Tantangan pada *Metaverse Library* untuk peningkatan fungsi-fungsi perpustakaan;
- 2) Tantangan peningkatan kualitas dan kuantitas *library material* berbasis digital;
- 3) Peningkatan khazanah arsip masih dapat dimaksimalkan apabila penyusutan dan penyelamatan arsip statis di Kota Semarang dilaksanakan dengan optimal;

b. Peluang

- 1) Telah tersedianya Layanan *Metaverse Library* yang saat ini mungkin menjadi satu-satunya di Jawa Tengah;
- 2) Telah dilaksanakan koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak untuk peningkatan *library material* berbasis digital;
- 3) Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kota Semarang telah cukup pesat dalam peningkatan Sarana dan Prasarana;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam

meningkatkan pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pembahasan Perda Kearsipan Kota Semarang;
2. *Cold Storage* Arsip untuk peningkatan *value* LKD;
3. Naskah Akademis dan Raperda Perpustakaan berbasis kebijakan-kebijakan terbaru;
4. Peningkatan Akreditasi Perpustakaan Sekolah Dasar di Kota Semarang.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Kota Semarang			14.316.065.367	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Kota Semarang			14.316.065.367	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00 rasio	1.653.644.405	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kota Semarang	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1.00 rasio	1.653.644.405	
3	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100.00 %	1.052.469.760	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100.00 %	1.052.469.760	
4	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	260.973.780	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	260.973.780	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	64.875.810	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	64.875.810	
6	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	95.522.650	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	95.522.650	
7	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	29.364.160	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	29.364.160	
8	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.436.940	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.436.940	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
9	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	42.516.820	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	42.516.820	
10	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	12.159.930	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	12.159.930	
11	Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	200 Eksemplar	381.027.650	Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	200 Eksemplar	381.027.650	
12	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	73.910.080	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kota Semarang	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	73.910.080	
13	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	71.681.940	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	71.681.940	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
14	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100.00 %	601.174.645	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100.00 %	601.174.645	
15	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	278.560.038	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	278.560.038	
16	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	85.175.527	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	85.175.527	
17	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	131.410.220	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	131.410.220	
18	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	70.692.280	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kota Semarang	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	70.692.280	
19	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keegiatannya	2 Orang	35.336.580	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keegiatannya	2 Orang	35.336.580	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
20	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 %	104.715.720	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Kota Semarang	Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100.00 %	104.715.720	
21	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100.00 %	44.437.000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100.00 %	44.437.000	
22	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	40.915.980	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kota Semarang	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	40.915.980	
23	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	3.521.020	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Kota Semarang	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	3.521.020	
24	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100.00 %	60.278.720	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100.00 %	60.278.720	
25	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	35.254.920	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	35.254.920	
26	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	25.023.800	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kota Semarang	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	25.023.800	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	12.557.705.242	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	12.557.705.242	
28		Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %			Kota Semarang	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 %		
29		Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00 %			Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100.00 %		
30	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8.00 dokumen	7.921.320	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8.00 dokumen	7.921.320	
31	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.878.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.878.000	
32	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.429.180	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.429.180	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
33	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	908.380	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	908.380	
34	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	705.760	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	705.760	
35	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00 %	9.332.019.562	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100.00 %	9.332.019.562	
36	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	9.128.481.882	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	9.128.481.882	
37	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	201.056.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	201.056.000	
38	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.170.160	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1.170.160	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
39	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.311.520	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.311.520	
40	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 %	1.042.069.070	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 %	1.042.069.070	
41	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.659.959	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.659.959	
42	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	18.482.067	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	18.482.067	
43	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.084.831	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	22.084.831	
44	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.981.626	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.981.626	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
45	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	14.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	14.400.000	
46	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.775.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.775.000	
47	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	227.065.240	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	227.065.240	
48	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	706.620.347	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	706.620.347	
49	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	231.627.803	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	231.627.803	
50	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	231.627.803	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	231.627.803	
51	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 %	698.644.112	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 %	698.644.112	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
52	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	257.332.112	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	257.332.112	
53	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	441.312.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	441.312.000	
54	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	1.245.423.375	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 %	1.245.423.375	
55	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	36.318.180	
56	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	490.608.960	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	490.608.960	
57	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	112.606.160	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	112.606.160	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
58	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	605.890.075	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	605.890.075	
59	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Kota Semarang			1.131.764.515	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Kota Semarang			1.131.764.515	
60	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	100.00 %	647.457.417	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Kota Semarang	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	100.00 %	647.457.417	
61	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100.00 %	214.552.237	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100.00 %	214.552.237	
62	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	65.000.000	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas	65.000.000	
63	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	39.833.227	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Kota Semarang	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5000 Berkas	39.833.227	
64	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	109.719.010	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	109.719.010	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
65	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00 %	156.327.600	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100.00 %	156.327.600	
66	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Semarang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	44.074.300	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Kota Semarang	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	44.074.300	
67	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	112.253.300	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kota Semarang	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	112.253.300	
68	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00 %	276.577.580	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100.00 %	276.577.580	
69	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Semarang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	5.891.030	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kota Semarang	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	5.891.030	
70	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	270.686.550	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	270.686.550	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
71	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	persentase jumlah arsip musnah	100.00 %	433.441.458	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Kota Semarang	persentase jumlah arsip musnah	100.00 %	433.441.458	
72	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Pemusnahan arsip - arsip yang memenuhi syarat	100.00 %	55.809.690	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Pemusnahan arsip - arsip yang memenuhi syarat	100.00 %	55.809.690	
73	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000 Arsip	34.200.000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000 Arsip	34.200.000	
74	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	21.609.690	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2500 Berkas	21.609.690	
75	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100.00 %	51.932.040	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100.00 %	51.932.040	
76	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	36.930.420	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	36.930.420	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
77	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	15.001.620	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	15.001.620	
78	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	70.00 %	136.076.540	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	70.00 %	136.076.540	
79	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	7.778.500	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	7.778.500	
80	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	9.500.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	9.500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
81	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	27.580.720	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	27.580.720	
82	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	91.217.320	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	91.217.320	
83	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	70.00 %	131.123.218	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	70.00 %	131.123.218	
84	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	51.545.390	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	51.545.390	
85	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	79.577.828	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	79.577.828	
86	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	70.00 %	58.499.970	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	70.00 %	58.499.970	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
87	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	19.100.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	19.100.000	
88	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	19.999.980	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	19.999.980	
89	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	19.399.990	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kota Semarang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	19.399.990	
90	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60.00 %	50.865.640	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Kota Semarang	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60.00 %	50.865.640	
91	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	60.00 %	50.865.640	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	60.00 %	50.865.640	
92	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	37.287.870	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	37.287.870	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
93	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	13.577.770	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kota Semarang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	13.577.770	

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35

5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan

berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan**, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.

- 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

- 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
- 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.

- 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif”

dengan indikator tujuan **“Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yaitu:

1. Layanan perpustakaan yang memenuhi harapan masyarakat;
2. Masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
3. Sistem Informasi Kearsipan yang kompatibel dan terintegrasi dengan baik;
4. Terlindungi dan terselamatkannya arsip dari kerusakan sesuai NSPK.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Rasio Koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang;
2. Cakupan masyarakat yang mendapatkan layanan perpustakaan;
3. Nilai Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Kota Semarang;
4. Nilai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Semarang

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan kualitas perpustakaan dan kearsipan yang unggul dan atraktif	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	46
	Persentase Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	58
	Persentase ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya	Persen	78
	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bentuk pertanggungjawaban	Persen	57

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Pembangunan Manusia” dan indikator sasaran “Tingkat Kearifan Budaya Lokal”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))							
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU			
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH								14.584.496.882	15.447.829.882	15.515.267.339
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								1.396.337.870	1.758.360.125	1.964.979.120
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 rasio	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1 rasio	1 rasio	1 rasio	1.307.921.937	1.653.644.405	1.725.868.020	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100,00%	Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan	100,00%	100,00%	100,00%	920.419.860	1.052.469.760	1.130.741.540	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah koleksi e-book	11.000 e book	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	260.973.780	260.973.780	272.707.870	
		Jumlah e-library	102 lokasi								
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan jumlah buku yang dipinjam masyarakat baik melalui manual maupun virtual	11.000 buku	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	64.875.810	64.875.810	64.875.810	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi bahan pustaka khas daerah/ unik	100 keping/buku	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	94.584.010	95.522.650	100.775.440	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan Sekolah	25 lokasi	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	29.369.690	29.364.160	29.364.160	
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	pembinaan perpustakaan khusus	60 lokasi	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.441.100	20.436.940	20.436.940	

KODE	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (RENSTRA)		INDIKATOR KINERJA (PEMUTAKHIRAN (KEPMEN 050-5889 TAHUN 2021))						
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			PAGU		
					RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	RKPD 2023	APBD INDUK 2023	RKPD PERUBAHAN 2023
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis tenaga perpustakaan/ pustakawan	2 kali	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	60 Orang	22.516.820	42.516.820	42.516.820
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rehabilitasi perpustakaan kelurahan	2 lokasi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/ Kota Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	12.159.930	12.159.930	12.159.930
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Penambahan bahan pustaka/ karya ilmiah dan koleksi perpustakaan	200 eksemplar	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	200 Eksemplar	200 Eksemplar	200 Eksemplar	306.573.300	381.027.650	381.027.650
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan terpelihara	1.500 eksemplar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar	100 Eksemplar	100 Eksemplar	37.243.480	73.910.080	65.872.700
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya data informasi dan satatistik perpustakaan kota	2 kali/tahun	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	71.681.940	71.681.940	141.004.220
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100,00%	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	387.502.077	601.174.645	595.126.480
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4 kegiatan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	15 Lokus	15 Lokus	15 Lokus	101.554.070	278.560.038	175.516.543
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	40,00 persen	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	85.175.527	85.175.527	182.170.857
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang menerima penghargaan perpustakaan	175 orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/ Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	131.410.220	131.410.220	131.410.220
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	35,00 persen	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	34.025.680	70.692.280	70.692.280
2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpilihnya duta baca Kota Semarang untuk mewakili di Tingkat Provinsi	3 orang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	2 Orang	2 Orang	2 Orang	35.336.580	35.336.580	35.336.580

2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlindungnya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100,00%	Terlindungnya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan	100,00%	100,00%	100,00%	88.415.933	104.715.720	239.111.100
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%	42.437.370	44.437.000	36.247.000
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Sosialisasi/Bintek tentang naskah kuno	2 kali/tahun	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5 Orang	5 Orang	5 Orang	38.916.150	40.915.980	34.785.980
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno dialih aksarakan dan dialih bahasa	200 buah	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	3.521.220	3.521.020	1.461.020
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100,00%	Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara	100,00%	100,00%	100,00%	45.978.563	60.278.720	202.864.100
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terseleksinya koleksi budaya etnis nusantara	150 buah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	2 Eksemplar	2 Eksemplar	2 Eksemplar	15.254.920	35.254.920	177.840.300
2.23.03.2.02.02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	150 buah	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	5 Eksemplar	5 Eksemplar	5 Eksemplar	30.723.643	25.023.800	25.023.800
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							916.464.790	1.131.764.515	1.130.668.875
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisyw pemerin tahan berbasis elektronik	100,00%	Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisyw pemerin tahan berbasis elektronik	100,00%	100,00%	100,00%	576.490.990	647.457.417	655.140.167
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100,00%	Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	216.919.010	214.552.237	187.746.917
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif telah dibuatkan daftar arsip	100,00 persen	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1.000 Berkas	1.000 Berkas	1.000 Berkas	65.000.000	65.000.000	36.826.680 I
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100,00 persen	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	5.000 Berkas	5.000 Berkas	5.000 Berkas	44.200.000	39.833.227	39.833.227 I
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan pengelolaan arsip OPD	60 OPD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	107.719.010	109.719.010	111.087.010 I
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100,00%	Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan	100,00%	100,00%	100,00%	137.994.300	156.327.600	174.453.130
2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah arsip terjaga yang terkumpul	105 berkas/roll/keping	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	44.074.300	44.074.300	68.406.230 I
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang diakuisisi	60 OPD	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	93.920.000	112.253.300	106.046.900 I
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100,00%	Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang	100,00%	100,00%	100,00%	221.577.680	276.577.580	292.940.120
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	20,00 persen	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 Pengguna	100 Pengguna	100 Pengguna	5.891.030	5.891.030	77.916.570 I
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik	100,00 persen	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	31 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	215.686.650	270.686.550	215.023.550 I

2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	persentase jumlah arsip musnah	100,00%	persentase jumlah arsip musnah	100,00%	100,00%	100,00%	311.108.160	433.441.458	446.413.068
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100,00%	Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat	100,00%	100,00%	100,00%	55.809.690	55.809.690	39.734.300
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip telah dinilai dan ditetapkan akan dimusnahkan berdasarkan NSPK	100,00 persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)Tahun	5.000 Arsip	5.000 Arsip	5.000 Arsip	34.200.000	34.200.000	30.600.000
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase arsip yang akan / sudah dimusnahkan	100,00 persen	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2.500 Berkas	2.500 Berkas	2.500 Berkas	21.609.690	21.609.690	9.134.300
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100,00%	Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK	100,00%	100,00%	100,00%	31.598.740	51.932.040	104.354.340
2.24.03.2.02.01	Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip akibat bencana yang teridentifikasi dan terevaluasi	200 berkas	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evaluasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	16.597.120	36.930.420	69.526.720
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Persentase arsip akibat bencana yang terselamatkan	50,00 persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	15.001.620	15.001.620	34.827.620
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	70,00%	Persentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan	70,00%	70,00%	70,00%	36.076.540	136.076.540	133.676.540
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Penggabungan OPD Kota	70,00 persen	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Daftar	7 Daftar	7 Daftar	7.778.500	7.778.500	7.778.500
2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang terdata dan dinilai dari Pembubaran OPD Kota	70,00 persen	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Arsip	7 Arsip	7 Arsip	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah arsip kecamatan pemekaran yang diselamatkan	5 kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	7.580.720	27.580.720	25.180.720
2.24.03.2.03.04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah arsip kelurahan pemekaran yang diselamatkan	5 kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	100 Arsip	100 Arsip	100 Arsip	11.217.320	91.217.320	91.217.320
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	70,00%	Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi	70,00%	70,00%	70,00%	129.123.220	131.123.218	124.223.218
2.24.03.2.04.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1.000 berkas	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	51.545.390	51.545.390	51.545.390
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media berdasarkan NSPK	1.000 berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	376 Arsip	376 Arsip	376 Arsip	77.577.830	79.577.828	72.677.828
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	70,00%	Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK	70,00%	70,00%	70,00%	58.499.970	58.499.970	44.424.670
2.24.03.2.05.01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang	1.000 berkas	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	19.100.000	19.100.000	19.100.000
2.24.03.2.05.02	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip alih media yang hilang	500 berkas	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	19.999.980	19.999.980	14.174.880
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah arsip yang diumumkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1.000 berkas	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	500 Arsip	500 Arsip	500 Arsip	19.399.990	19.399.990	11.149.790

2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60,00%	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	60,00%	60,00%	60,00%	28.865.640	50.865.640	29.115.640
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	60,00%	Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan	60,00%	60,00%	60,00%	28.865.640	50.865.640	29.115.640
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	5 SOP	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	5 SOP	5 SOP	17.287.870	37.287.870	24.237.870
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup berdasarkan NSPK	30 SK	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	250 Arsip	250 Arsip	250 Arsip	11.577.770	13.577.770	4.877.770
X.XX	NON URUSAN							12.271.694.222	12.557.705.242	12.419.619.344
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	12.271.694.222	12.557.705.242	12.419.619.344
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100,00%	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Arsip dan Perpustakaan	100,00%	100,00%	100,00%			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	7.892.580	7.921.320	7.921.320
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dan Perubahan Renja OPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.878.000	4.878.000	4.878.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA dan DFA OPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.440	1.429.180	1.429.180
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	908.380	908.380	908.380
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LKPJ dan LKJ IP OPD	2 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	705.760	705.760	705.760
		Terlaksanakannya Survey/Kajian Kinerja/IKK OPD	5 Dokumen							
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100,00%	Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar	100,00%	100,00%	100,00%	9.330.323.562	9.332.019.562	9.085.993.954
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	94 Orang/bulan	9.128.481.882	9.128.481.882	8.885.981.274

X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	199.360.000	201.056.000	198.656.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.170.160	1.170.160	795.160
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.311.520	1.311.520	561.520
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	901.360.569	1.042.069.070	1.012.754.652
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25 Jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	25.659.959	25.659.959	12.822.109
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibutuhkan	11 Jenis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	18.482.067	18.482.067	18.482.067
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	34 Jenis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	22.084.831	22.084.831	23.305.831
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	7 Jenis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	18.981.626	18.981.626	18.981.626
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Surat Kabar)	15 Jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	14.400.000	14.400.000	14.400.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	70 orang bulan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.300.000	8.775.000	15.900.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat/koordinasi/ konsultasi yang terselenggara	25 Kali/bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	205.615.240	227.065.240	149.613.000
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang/jasa yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD/OPD	10 Jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	571.836.846	706.620.347	759.250.019
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	54.212.044	231.627.803	322.091.811
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5 Jenis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	54.212.044	231.627.803	322.091.811
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00%	100,00%	728.782.112	698.644.112	697.712.112
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	257.332.112	257.332.112	256.400.112
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan Kantor dan Jasa Non ASN	100,00 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	471.450.000	441.312.000	441.312.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	1.249.123.355	1.245.423.375	1.293.145.495
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhiya pemeliharaan mobil jabatan	2 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhiya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	27 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	490.608.960	490.608.960	490.608.960
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhiya pemeliharaan mesin dan alat lainnya	12 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	116.306.140	112.606.160	101.548.080
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhiya pemeliharaan gedung arsip/perpustakaan	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	605.890.075	605.890.075	664.670.275

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ini berpedoman pada nomenklatur sesuai Kepmendagri no 050-5889. Selain itu terdapat penyesuaian *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian

dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

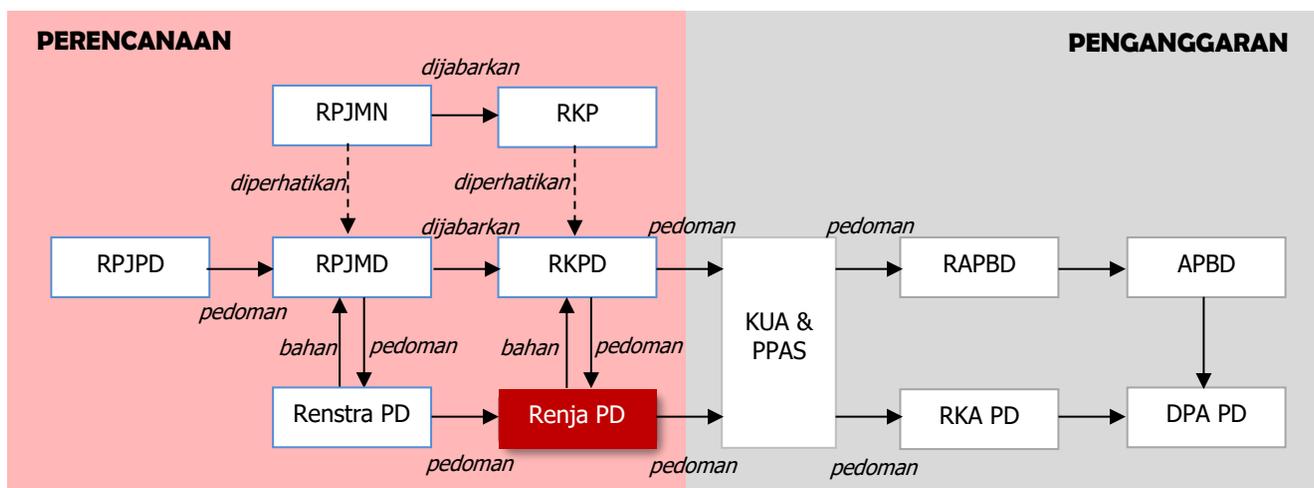
Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh : Setelah mulai pulih dari pandemic Covid-19, dunia kembali menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, yang wujud nyatanya adalah munculnya ketidakpastian akan ketersediaan dan harga komoditas pangan global. Ketegangan yang terjadi akibat perang yang berkepanjangan berimbas bagi dunia termasuk Indonesia, mulai dari sektor pangan, energi, hingga inflasi. Dengan adanya dinamika tersebut, serta dengan adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan Pembangunan termasuk di Kota Semarang. Dalam konteks perencanaan Pembangunan, hal ini juga menegaskan bahwa Pembangunan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap permasalahan serta isu – isu strategis terkini.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perikanan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

- Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 DINAS PERIKANAN Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
3	Urusan Pemerintahan Pilihan										
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan										
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	50,00 %	8 dokumen	4 dokumen	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00 %	2 dokumen	2 dokumen	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0,00 %
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0,00 %
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	1 dokumen	0 dokumen	0,00 %	0,00 %
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJiP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100,00 %	2 dokumen	2 dokumen	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00 %	2 dokumen	1 dokumen	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Prognosis Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	1 dokumen	1 dokumen	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	50,00 %	4 kegiatan	2 kegiatan	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50,00 %	50,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50,00 %	2 kegiatan	0 kegiatan	0,00 %	0,00 %
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga dan perabot kantor	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00 %	10 jenis	10 jenis	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	35 jenis	35 jenis	35 jenis	35 jenis	100,00 %	35 jenis	18 jenis	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	4 jenis	50,00 %	8 jenis	4 jenis	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Makan Minum Rapat Tamu	700 Orang	700 Orang	700 Orang	350 Orang	50,00 %	700 Orang	350 Orang	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 kegiatan	36 kegiatan	36 kegiatan	18 kegiatan	50,00 %	36 kegiatan	18 kegiatan	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan Kantor Elektronik	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00 %	3 jenis	2 jenis	80,00 %	80,00 %
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00 %	3 jenis	3 jenis	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00 %	2 jenis	2 jenis	100,00 %	100,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perlengkapan kantor	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100,00 %	1 jenis	1 jenis	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	100,00 %	3 orang	3 orang	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan asset Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00 %	1 unit	1 unit	100,00 %	100,00 %
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	28 unit	28 unit	28 unit	14 unit	50,00 %	28 unit	14 unit	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00 %	2 jenis	2 jenis	100,00 %	100,00 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Kantor dan Bangunan Lainnya										
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	3.213,34 ton	3.005,61 ton	3.005,61 ton	1.502,722 ton	50 %	3.055,90 ton	1.529,12 ton	50 %	47,55 %
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan	300.000 benih	150.000 benih	150.000 benih	75.000 benih	50 %	175.000 benih	90.000 benih	50 %	30 %
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah nelayan yang mengikuti pendampingan konversi BBG Jumlah kajian jasa konsultasi Jumlah nelayan tervalidasi Honorarium Non ASN Jumlah penerima fasilitasi alat tangkap Restocking di perairan umum 	120 orang 1 dokumen 200 orang 1 orang 40 orang 300.000 benih	20 orang 1 dokumen 50 orang 1 orang 6 orang 150.000 benih	20 orang 1 dokumen 50 orang 1 orang 6 orang 150.000 benih	20 orang 0 dokumen 25 orang 1 orang 6 orang 75.000 benih	100 % 0 % 50 % 100 % 100 % 50 %	40 orang 1 dokumen 100 orang 1 orang 25 orang 175.000 benih	40 orang 0 dokumen 50 orang 1 orang 25 orang 90.000 benih	100 % 0 % 50 % 100 % 100 % 50 %	33,33 % 0 % 25 % 100 % 62,5 % 30 %
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	300 orang	120 orang	120 orang	60 orang	50 %	240 orang	120 orang	50 %	40 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi nelayan Forum KUB Magang nelayan Pelatihan nelayan 	300 orang	120 orang	120 orang	60 orang	50 %	240 orang	120 orang	50 %	40 %
			150 orang	105 orang	105 orang	50 orang	50 %	105 orang	50 orang	50 %	33,33 %
			20 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100 %	10 orang	10 orang	100 %	100 %
			180 orang	120 orang	120 orang	60 orang	50 %	120 orang	60 orang	50 %	33,33 %
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	90 orang	30 orang	30 orang	15 orang	50 %	30 orang	15 orang	50 %	16,66 %
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan bakul dan nelayan TPI Sosialisasi optimalisasi TPI Sarpras pengelolaan TPI Monev TPI Fasilitasi Pembangunan TPI 	90 orang	30 orang	30 orang	15 orang	50 %	30 orang	15 orang	50 %	16,66 %
			60 orang	20 orang	20 orang	10 orang	50 %	20 orang	10 orang	50 %	16,66 %
			20 paket	10 jenis	10 jenis	5 jenis	50 %	10 jenis	5 jenis	50 %	25 %
			12 kali	12 kali	12 kali	6 kali	50 %	12 kali	6 kali	50 %	50 %
			2 paket	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100 %	1 jenis	0 jenis	0 %	0 %
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	4.202,58 ton	3.775,93 ton	3.775,93 ton	1.927,64 ton	51 %	3.845,95 ton	1.965,31 ton	51 %	46,76 %
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan / Sosialisasi budidaya air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200 orang	200 orang	200 orang	100 orang	50 %	200 orang	100 orang	50 %	50 %
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air payau Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air tawar Panen raya ikan Pelatihan teknologi pakan ikan 	40 orang	40 orang	40 orang	20 orang	50 %	40 orang	20 orang	50 %	50 %
			200 orang	200 orang	200 orang	100 orang	50 %	200 orang	100 orang	50 %	50 %
			100 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100 %	50 orang	0 orang	0 %	0%
			40 orang	20 orang	20 orang	10 orang	50 %	40 orang	20 orang	50 %	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		<ul style="list-style-type: none"> Honorarium Non ASN Sosialisasi hama dan penyakit ikan 	1 orang 60 orang	1 orang 40 orang	1 orang 40 orang	1 orang 20 orang	100 % 50 %	1 orang 40 orang	1 orang 20 orang	100 % 50 %	100 % 33,33 %
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi	80 orang	40 orang	40 orang	20 orang	50 %	50 orang	25 orang	50 %	31 %
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya induk ikan Tersedianya pakan ikan Tersedianya obat – obatan ikan Pelatihan / sosialisasi pembenihan Pembinaan UPR Rehab kolam dan saluran BBI Rehab / pemeliharaan Gedung BBI Honorarium Non ASN Lomba mancing 	5 jenis 8.000 kg 3 jenis 80 orang 80 orang 4 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan	5 jenis 4.500 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan	5 jenis 4.500 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan	5 jenis 2.500 kg 3 jenis 20 orang 20 orang 1 jenis 1 jenis 11 orang 1 kegiatan	100 % 50 % 100 % 50 % 50 % 50 % 50 % 100 % 100 %	5 jenis 5.000 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan	5 jenis 2.500 kg 3 jenis 20 orang 20 orang 1 jenis 1 jenis 11 orang 0 kegiatan	100 % 50 % 100 % 50 % 50 % 50 % 50 % 100 % 0 %	100 % 31 % 100 % 25 % 25 % 25 % 50 % 100 % 0 %
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	<ul style="list-style-type: none"> Rehab kolam dan saluran Minapolitan Pembangunan Kawasan Minapolitan 	3 jenis 3 jenis	1 jenis 2 jenis	1 jenis 2 jenis	0 jenis 0 jenis	0 % 0 %	2 jenis 2 jenis	0 kegiatan 0 kegiatan	0 % 0 %	0 % 0 %
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	1 kasus	5 kasus	5 kasus	0 kasus	0 %	4 kasus	0 kasus	0 %	0 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	200 orang	20 orang	20 orang	10 orang	50 %	40 orang	20 orang	50 %	10 %
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Pokmaswas Pembinaan Pokmaswas Jasa Konsultasi lainnya Temu Usaha Perikanan Uji mutu hasil perikanan 	200 orang 200 orang - 160 orang 5 kegiatan	20 orang 20 orang 1 dokumen 40 orang 2 kegiatan	20 orang 20 orang 1 dokumen 40 orang 2 kegiatan	10 orang 10 orang 0 dokumen 20 orang 1 kegiatan	50 % 50 % 0 % 50 % 50 %	40 orang 40 orang 1 dokumen 40 orang 3 kegiatan	20 orang 20 orang 0 dokumen 20 orang 0 kegiatan	50 % 50 % 0 % 50 % 0 %	10 % 10 % 0 % 12,5 % 0 %
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Produksi ikan olahan Angka konsumsi ikan per kapita 	17.986,26 ton 40,21 kg / kapita / th	17.495,45 ton 40,17 kg / kapita / th	17.495,45 ton 40,17 kg / kapita / th	8.753,287 ton -	50 % -	17.557,29 ton	17.624,01 ton	100 %	98 %
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	120 orang	20 orang	20 orang	10 orang	50 %	20 orang	10 orang	50 %	8,33 %
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran Bintek / magang Monev pedagang ikan hias Honorarium Non ASN 	120 orang 20 orang 12 kali 1 orang	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang	10 orang 10 orang 6 kali 1 orang	50 % 100 % 50 % 100 %	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang	10 orang 10 orang 6 kali 1 orang	50 % 100 % 50 % 100 %	8,33 % 50 % 50 % 100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		<ul style="list-style-type: none"> Validasi data pengolah dan pemasar ikan 	250 orang	50 orang	50 orang	25 orang	50 %	50 orang	25 orang	50 %	10 %
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 orang	100 orang	100 orang	50 orang	50 %	100 orang	50 orang	50 %	50 %
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> Cooking class Jumlah peserta kampanye gemar ikan TP PKK Jumlah peserta kegiatan lomba masak ikan tingkat kota dan provinsi Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan Pemberian makanan tambahan penderita gizi buruk Jumlah peserta sosialisasi gemar ikan dan PMT anak sekolah Jumlah peserta pembinaan pengolah ikan 	50 orang 20 orang	50 orang 20 orang	50 orang 20 orang	25 orang 10 orang	50 % 50 %	50 orang 60 orang	25 orang 30 orang	50 % 50 %	50 % 150 %
			20 orang	20 orang	20 orang	10 orang	50 %	20 orang	10 orang	50 %	50 %
			100 orang	100 orang	100 orang	50 orang	50 %	100 orang	50 orang	50 %	50 %
			100 orang	20 orang	20 orang	10 orang	50 %	40 orang	20 orang	50 %	20 %
			80 orang	20 orang	20 orang	10 orang	50 %	40 orang	20 orang	50 %	25 %
			80 orang	20 orang	20 orang	10 orang	50 %	40 orang	20 orang	50 %	100 %
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 orang	35 orang	35 orang	15 orang	40 %	40 orang	20 orang	50 %	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota										
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peserta pembinaan pedagang PIH Jumlah Pembangunan / perawatan Gedung Honorarium Non ASN Sarpras PIH 	40 orang	35 orang	35 orang	15 orang	40 %	40 orang	20 orang	50 %	50 %
			3 jenis	1 jenis	1 jenis	0 jenis	0%	1 jenis	1 jenis	50 %	50 %
			4 orang 3 jenis	4 orang 1 jenis	4 orang 1 jenis	4 orang 0 jenis	100 % 0 %	4 orang 1 jenis	4 orang 0 jenis	100 % 0 %	100 % 0 %

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Magang Pengolahan Ikan Asap” dan “Sekolah Lapang Cuaca Nelayan”,

Ada beberapa sub kegiatan yang belum tercapai pada triwulan II karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN”, “Penyediaan Bahan Logistik Kantor”, “Fasilitasi Kunjungan Tamu”, “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD”, “Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor”, “Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan” dan “Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.265.299.319	3.521.036.930	48,46
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	450.000	11,25
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	0	0
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	500.000	0	0
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	500.000	0	0
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	500.000	0	0
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	500.000	0	0
1.1.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	450.000	90
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.526.142.370	2.873.235.310	52
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.293.682.370	2.784.176.810	52,60
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	231.860.000	88.860.000	38,32
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	200.000	198.500	99,25
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	200.000	0	0
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	200.000	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.400.000	9.260.000	21,34
1.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	10.000.000	9.260.000	92,6
1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	33.400.000	0	0
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	637.884.959	292.237.880	45,81
1.4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000	26.708.000	76,31
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.065.457	23.900.180	47,74
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.252.450	22.405.200	42,10
1.4.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	5.925.000	19,75
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.443.458	42.574.500	21,03
1.4.6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	267.123.594	170.725.000	63,91
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.465.062	61.900.000	74,16
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83.465.062	61.900.000	74,16
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.042.569	112.102.637	24,53
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	74.925.907	37,46
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.786.277	17.587.500	21,50
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.256.292	19.589.230	11,17
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.364.359	171.851.103	33,47
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	11.762.000	29,10
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369.266.497	91.488.603	24,77
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.454.200	4.870.000	12,34
1.7.4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.330.482	63.730.500	99,06
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.064.175.008	437.667.185	21,20
2.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	763.815.068	147.867.290	19,35
2.1.1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	763.815.068	147.867.290	19,35
2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	651.175.008	172.931.865	26,55
2.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	651.175.008	172.931.865	26,55
2.3	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	649.184.932	116.868.030	18,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.3.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	649.184.932	116.868.030	18,00
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.240.691.285	782.406.527	24,14
3.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	855.988.400	369.748.080	43,19
3.1.1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	855.988.400	369.748.080	43,19
3.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.384.702.885	412.658.447	17,30
3.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	1.531.702.885	389.809.447	25,44
3.2.2	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	853.000.000	22.849.000	26,78
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	387.192.355	128.650.805	33,22
4.1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	387.192.355	128.650.805	33,22
4.1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam Kabupaten / Kota	387.192.355	128.650.805	33,22
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.331.208.123	497.498.138	37,37
5.1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	347.134.760	180.994.411	52,14
5.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	347.134.760	180.994.411	52,14
5.2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	410.393.363	165.700.400	40,37
5.2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	410.393.363	165.700.400	40,37
5.3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	573.680.000	150.803.327	26,29
5.3.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	573.680.000	150.803.327	26,29
JUMLAH		14.288.566.090	5.367.259.585	37,56

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kota Semarang adalah sebesar Rp 14.288.566.090 Dari anggaran tersebut, sampai

dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 5.367.259.585. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 8.921.306.505.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	
Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	6.539,12 ton	6.781,54 ton	6.901,85 ton	7.075,02 ton	7.249,54 ton	7.415,92 ton	6.712,12 ton	6.896,79 ton	3.494,43 ton	-	-	-	6.910 ton
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan	Nilai AKIP	65,7	70	71	72	73	74	-	70	-	-	-	-	71

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Meningkatkan Produk Unggulan Perikanan Daerah;
- b. Sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan;
- c. Sasaran Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan;

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan budidaya.
- b. Semakin berkurangnya lahan budidaya perikanan karena alih fungsi lahan.
- c. Belum optimalnya pengembangan produksi perikanan tangkap.
- d. Belum optimalnya pengembangan diversifikasi ikan olahan.
- e. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha perikanan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

- a. Semakin berkurangnya potensi perikanan tangkap
- b. Semakin berkurangnya lahan budidaya perikanan darat
- c. Penyakit ikan yang belum tertangani
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap produk dan sumberdaya perikanan
- e. Kurangnya diversifikasi usaha ikan olahan

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan
 - 1) Keterbatasan kemampuan SDM pelaku usaha perikanan dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan
 - 2) Pengelolaan BBI dan TPI belum optimal
 - 3) PIH masih belum dapat difungsikan sebagaimana mestinya
 - 4) Perlu memperluas jaringan distribusi pemasaran bagi kelompok pelaku usaha perikanan

b. Peluang

- 1) Peningkatan dan pengembangan usaha perikanan mulai hulu sampai hilir
- 2) Pengembangan pasar distribusi ikan
- 3) Dapat menciptakan areal lokasi pusat penjualan hasil perikanan bagi kelompok pelaku usaha perikanan
- 4) Pengembangan kawasan perikanan terpadu sebagai pusat kegiatan perikanan dari hulu ke hilir

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan perikanan dan produktivitas lahan budidaya
2. Daya saing pengolahan dan pemasaran ikan olahan masih rendah
3. Angka konsumsi ikan di Kota Semarang masih dibawah rata-rata nasional
4. Sarpras dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap di Kota Semarang belum optimal

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perikanan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Perikanan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Urusan Pemerintahan Pilihan					Urusan Pemerintahan Pilihan					
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perikanan	100,00 %	7.265.299.319	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perikanan	100,00 %	7.265.299.319	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 dokumen	4.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 dokumen	4.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	2 dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	2 dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Semarang	Dokumen RKA	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kota Semarang	Dokumen RKA	1 dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Semarang	Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Kota Semarang	Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kota Semarang	Dokumen DPA	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kota Semarang	Dokumen DPA	1 dokumen	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kota Semarang	Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Kota Semarang	Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 dokumen	500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen LKJIP dan LKPJ	2 dokumen	500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100,00 %	5.526.142.370	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100,00 %	5.526.142.370	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 %	5.293.682.370	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 %	5.293.682.370	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100,00 %	231.860.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100,00 %	231.860.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1 dokumen	200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1 dokumen	200.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	200.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Pelaporan dan Prognosis Keuangan	1 dokumen	200.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Pelaporan dan Prognosis Keuangan	1 dokumen	200.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	4 kegiatan	43.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	4 kegiatan	43.400.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kota Semarang	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Kota Semarang	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	10.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kota Semarang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	33.400.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kota Semarang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	33.400.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100,00 %	637.884.959	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100,00 %	637.884.959	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Peralatan rumah tangga dan perabot kantor	10 jenis	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Peralatan rumah tangga dan perabot kantor	10 jenis	35.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Alat Tulis Kantor	35 jenis	50.065.457	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Alat Tulis Kantor	35 jenis	50.065.457	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis	53.252.450	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis	53.252.450	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jamuan Makan Minum Rapat	700 Orang	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jamuan Makan Minum Rapat	700 Orang	30.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 kegiatan	202.443.458	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 kegiatan	202.443.458	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Peralatan Kantor Elektronik	3 jenis	267.123.594	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Peralatan Kantor Elektronik	3 jenis	267.123.594	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	83.465.062	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	83.465.062	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	83.465.062	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	83.465.062	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	457.042.569	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	457.042.569	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100,00 %	200.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100,00 %	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jasa perlengkapan kantor	1 jenis	81.786.277	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jasa perlengkapan kantor	1 jenis	81.786.277	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa pelayanan umum kantor	3 orang	175.256.292	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jasa pelayanan umum kantor	3 orang	175.256.292	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan asset Dinas Perikanan	100,00 %	513.364.359	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Pemeliharaan asset Dinas Perikanan	100,00 %	513.364.359	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	40.313.180	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kota Semarang	Pemeliharaan dinas operasional	28 unit	369.266.497	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kota Semarang	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	28 unit	369.266.497	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan peralatan dan mesin	100,00 %	39.454.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan peralatan dan mesin	100,00 %	39.454.200	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 jenis	64.330.482	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 jenis	64.330.482	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Produksi perikanan tangkap	3.055,90 ton	2.064.175.008	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Semarang	Produksi perikanan tangkap	3.055,90 ton	2.064.175.008	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan	175.000 benih	763.815.068	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan	175.000 benih	763.815.068	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah nelayan yang mengikuti pendampingan konversi BBG Jumlah kajian jasa konsultasi Jumlah nelayan tervalidasi Honorarium Non ASN Jumlah penerima fasilitasi alat tangkap Restocking di perairan umum 	40 orang 1 dokumen 100 orang 1 orang 25 orang 175.000 benih	763.815.068	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah nelayan yang mengikuti pendampingan konversi BBG Jumlah kajian jasa konsultasi Jumlah nelayan tervalidasi Honorarium Non ASN Jumlah penerima fasilitasi alat tangkap Restocking di perairan umum 	40 orang 1 dokumen 100 orang 1 orang 25 orang 175.000 benih	763.815.068	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 orang	651.175.008	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 orang	651.175.008	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi nelayan Forum KUB Magang nelayan Pelatihan nelayan 	240 orang 105 orang 10 orang 120 orang	651.175.008	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi nelayan Forum KUB Magang nelayan Pelatihan nelayan 	240 orang 105 orang 10 orang 120 orang	651.175.008	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	30 orang	649.184.932	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	30 orang	649.184.932	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan bakul dan nelayan TPI Sosialisasi optimalisasi TPI Sarpras pengelolaan TPI Monev TPI Fasilitasi Pembangunan TPI 	30 orang 20 orang 10 jenis 12 kali 1 jenis	649.184.932	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan bakul dan nelayan TPI Sosialisasi optimalisasi TPI Sarpras pengelolaan TPI Monev TPI Fasilitasi Pembangunan TPI 	30 orang 20 orang 10 jenis 12 kali 1 jenis	649.184.932	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kota Semarang	Produksi Perikanan Budidaya	3.845,95 ton	3.240.691.285	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kota Semarang	Produksi Perikanan Budidaya	3.845,95 ton	3.240.691.285	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Semarang	Pelatihan / Sosialisasi budidaya air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200 orang	855.988.400	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Semarang	Pelatihan / Sosialisasi budidaya air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200 orang	855.988.400	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air payau Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air tawar Panen raya ikan Pelatihan teknologi pakan ikan Honorarium Non ASN 	40 orang 200 orang 50 orang 40 orang 1 orang	855.988.400	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air payau Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air tawar Panen raya ikan Pelatihan teknologi pakan ikan Honorarium Non ASN Sosialisasi hama dan penyakit ikan 	40 orang 200 orang 50 orang 40 orang 1 orang	855.988.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi hama dan penyakit ikan 	40 orang					40 orang		
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi	50 orang	2.384.702.885	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Semarang	Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi	50 orang	2.384.702.885	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya induk ikan Tersedianyan pakan ikan Tersedianya obat – obatan ikan Pelatihan / sosialisasi pembenihan Pembinaan UPR Rehab kolam dan saluran BBI Rehab / pemeliharaan Gedung BBI Honorarium Non ASN Lomba mancing 	5 jenis 5.000 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan	1.531.702.885	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya induk ikan Tersedianyan pakan ikan Tersedianya obat – obatan ikan Pelatihan / sosialisasi pembenihan Pembinaan UPR Rehab kolam dan saluran BBI Rehab / pemeliharaan Gedung BBI Honorarium Non ASN Lomba mancing 	5 jenis 5.000 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan	1.531.702.885	
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Rehab kolam dan saluran Minapolitan Pembangunan Kawasan Minapolitan 	2 jenis 2 jenis	853.000.000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Rehab kolam dan saluran Minapolitan Pembangunan Kawasan Minapolitan 	2 jenis 2 jenis	853.000.000	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kota Semarang	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	4 kasus	387.192.355	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kota Semarang	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	4 kasus	387.192.355	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	40 orang	387.192.355	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	40 orang	387.192.355	
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pokmaswas • Pembinaan Pokmaswas • Jasa Konsultasi lainnya • Temu Usaha Perikanan • Uji mutu hasil perikanan 	40 orang 40 orang 1 dokumen 40 orang 3 kegiatan	387.192.355	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pokmaswas • Pembinaan Pokmaswas • Jasa Konsultasi lainnya • Temu Usaha Perikanan <p>Uji mutu hasil perikanan</p>	40 orang 40 orang 1 dokumen 40 orang 3 kegiatan	387.192.355	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi ikan olahan <p>Angka konsumsi ikan per kapita</p>	17.557,29 ton	1.331.208.123	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi ikan olahan <p>Angka konsumsi ikan per kapita</p>	17.557,29 ton	1.331.208.123	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	20 orang	347.134.760	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	20 orang	347.134.760	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran • Bintek / magang • Monev pedagang ikan hias • Honorarium Non ASN 	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang	347.134.760	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran • Bintek / magang • Monev pedagang ikan hias • Honorarium Non ASN 	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang	347.134.760	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			<ul style="list-style-type: none"> Validasi data pengolah dan pemasar ikan 	50 orang				Validasi data pengolah dan pemasar ikan	50 orang		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 orang	410.393.363	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 orang	410.393.363	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Cooking class Jumlah peserta kampanye gemar ikan TP PKK Jumlah peserta kegiatan lomba masak ikan tingkat kota dan provinsi Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan Pemberian makanan tambahan penderita gizi buruk Jumlah peserta sosialisasi gemar ikan dan PMT anak sekolah Jumlah peserta pembinaan pengolah ikan 	50 orang 60 orang 20 orang 100 orang 40 orang 40 orang 40 orang	410.393.363	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Cooking class Jumlah peserta kampanye gemar ikan TP PKK Jumlah peserta kegiatan lomba masak ikan tingkat kota dan provinsi Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan Pemberian makanan tambahan penderita gizi buruk Jumlah peserta sosialisasi gemar ikan dan PMT anak sekolah Jumlah peserta pembinaan pengolah ikan 	50 orang 60 orang 20 orang 100 orang 40 orang 40 orang 40 orang	410.393.363	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Kota Semarang	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 orang	573.680.000	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan	Kota Semarang	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 orang	573.680.000	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota					
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peserta pembinaan pedagang PIH Jumlah Pembangunan / perawatan Gedung Honorarium Non ASN Sarpras PIH 	40 orang 1 jenis 4 orang 1 jenis	573.680.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peserta pembinaan pedagang PIH Jumlah Pembangunan / perawatan Gedung Honorarium Non ASN Sarpras PIH	40 orang 1 jenis 4 orang 1 jenis	573.680.000	
	JUMLAH				14.288.566.090					14.288.566.090	

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.

- 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%

- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatnya produk unggulan perikanan daerah”

dengan indikator tujuan **“Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perikanan Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya produksi perikanan;
2. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Produksi perikanan (tangkap dan budidaya);
2. Nilai AKIP;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Meningkatnya produk unggulan perikanan daerah	Indikator Tujuan : Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB	%	2,97
Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan	Indikator Sasaran : Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	Ton	6.901,85
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Perikanan	Indikator Sasaran : Nilai AKIP	Angka	71

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERIKANAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Perikanan memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Prosentase kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada PDRB” dan indikator sasaran “Produksi perikanan (tangkap dan budidaya)” serta “Nilai AKIP”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Perikanan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
3	Urusan Pemerintahan Pilihan									
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	8.082.164.449	7.660.211.049	7.265.299.319	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	3.099.960	4.000.000	4.000.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja dan Perikanan Dalam Angka	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	813.000	1.500.000	1.500.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen RKA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	415.690	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	454.690	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Dokumen DPA	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	454.690	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	454.690	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJiP dan LKPJ	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	507.200	500.000	500.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	5.694.274.249	5.697.029.449	5.526.142.370	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 %	100,00 %	100,00 %	5.464.569.449	5.464.569.449	5.293.682.370	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	229.100.000	231.860.000	231.860.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaporan Keuangan dan Kinerja Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	201.600	200.000	200.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	Pelaporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	201.600	200.000	200.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Triwulanan / Semesteran SKPD									
3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan dan Prognosis Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	201.600	200.000	200.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Pelayanan Kepegawaian Dinas Perikanan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	42.758.300	43.400.000	43.400.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	10.336.100	10.000.000	10.000.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	32.422.200	33.400.000	33.400.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	769.25.014	771.794.963	637.884.959	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga dan perabot kantor	10 jenis	10 jenis	10 jenis	35.000.000	35.000.000	35.000.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	35 jenis	35 jenis	35 jenis	76.462.399	76.462.399	50.065.457	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	8 jenis	8 jenis	8 jenis	51.252.450	53.252.450	53.252.450	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jamuan Makan Minum Rapat	700 Orang	700 Orang	700 Orang	43.053.192	40.000.000	30.000.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	36 kegiatan	36 kegiatan	36 kegiatan	299.956.520	299.956.520	202.443.458	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peralatan Kantor Elektronik	3 jenis	3 jenis	3 jenis	263.534.453	267.123.594	267.123.594	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	519.815.031	83.465.062	83.465.062	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarpras Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	95.861.631	83.465.062	83.465.062	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	539.593.536	547.157.216	457.042.569	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	200.000.000	200.000.000	200.000.000	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perlengkapan kantor	1 jenis	1 jenis	1 jenis	67.401.136	74.964.816	81.786.277	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	3 orang	3 orang	3 orang	272.192.400	272.192.400	175.256.292	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan asset Dinas Perikanan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	513.364.359	513.364.359	513.364.359	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	28 unit	28 unit	28 unit	369.266.497	369.266.497	369.266.497	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin	100,00 %	100,00 %	100,00 %	39.454.200	39.454.200	39.454.200	APBD Kota Semarang	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	64.330.482	64.330.482	64.330.482	APBD Kota Semarang	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	3.055,90 ton	3.055,90 ton	3.055,90 ton	1.643.400.000	1.933.400.000	2.064.175.008	APBD Kota Semarang	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan	175.000 benih	175.000 benih	175.000 benih	650.000.000	700.000.000	763.815.068	APBD Kota Semarang	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah nelayan yang mengikuti pendampingan konversi BBG Jumlah kajian jasa konsultasi 	40 orang 1 dokumen	40 orang 1 dokumen	40 orang 1 dokumen	650.000.000	700.000.000	763.815.068	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah nelayan tervalidasi Honorarium Non ASN Jumlah penerima fasilitasi alat tangkap Restocking di perairan umum 	100 orang 1 orang 25 orang 175.000 benih	100 orang 1 orang 25 orang 175.000 benih	100 orang 1 orang 25 orang 175.000 benih					
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan	240 orang	240 orang	240 orang	445.400.000	610.400.000	651.175.008	APBD Kota Semarang	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi nelayan Forum KUB Magang nelayan Pelatihan nelayan 	240 orang 105 orang 10 orang 120 orang	240 orang 105 orang 10 orang 120 orang	240 orang 105 orang 10 orang 120 orang	445.400.000	610.400.000	651.175.008	APBD Kota Semarang	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI	30 orang	30 orang	30 orang	548.000.000	623.000.000	649.184.932	APBD Kota Semarang	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan bakul dan nelayan TPI Sosialisasi optimalisasi TPI Sarpras pengelolaan TPI Monev TPI Fasilitasi Pembangunan TPI 	30 orang 20 orang 10 jenis 12 kali 1 jenis	30 orang 20 orang 10 jenis 12 kali 1 jenis	30 orang 20 orang 10 jenis 12 kali 1 jenis	548.000.000	623.000.000	649.184.932	APBD Kota Semarang	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	3.845,95 ton	3.845,95 ton	3.845,95 ton	2.956.852.885	3.206.852.885	3.240.691.285	APBD Kota Semarang	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelatihan / Sosialisasi budidaya air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan	200 orang	200 orang	200 orang	688.400.000	888.400.000	855.988.400	APBD Kota Semarang	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air payau Pelatihan / sosialisasi budidaya ikan air tawar 	40 orang 200 orang	40 orang 200 orang	40 orang 200 orang	688.400.000	888.400.000	855.988.400	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Panen raya ikan Pelatihan teknologi pakan ikan Honorarium Non ASN Sosialisasi hama dan penyakit ikan 	50 orang 40 orang 1 orang 40 orang	50 orang 40 orang 1 orang 40 orang	50 orang 40 orang 1 orang 40 orang					
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan / sosialisasi	50 orang	50 orang	50 orang	2.268.452.885	2.318.452.885	2.384.702.885	APBD Kota Semarang	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya induk ikan Tersedianya pakan ikan Tersedianya obat – obatan ikan Pelatihan / sosialisasi pembenihan Pembinaan UPR Rehab kolam dan saluran BBI Rehab / pemeliharaan Gedung BBI Honorarium Non ASN Lomba mancing 	5 jenis 5.000 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan	5 jenis 5.000 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan	5 jenis 5.000 kg 3 jenis 40 orang 40 orang 2 jenis 2 jenis 11 orang 1 kegiatan	1.415.452.885	1.465.452.885	1.531.702.885	APBD Kota Semarang	
3.25.04.2.04.07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	<ul style="list-style-type: none"> Rehab kolam dan saluran Minapolitan Pembangunan Kawasan Minapolitan 	2 jenis 2 jenis	2 jenis 2 jenis	2 jenis 2 jenis	853.000.000	853.000.000	853.000.000	APBD Kota Semarang	
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan	4 kasus	4 kasus	4 kasus	283.192.355	333.192.355	387.192.355	APBD Kota Semarang	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten / Kota	Pelatihan Pokmaswas dalam peningkatan sumber daya perikanan	40 orang	40 orang	40 orang	283.192.355	333.192.355	387.192.355	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan dalam Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pokmaswas • Pembinaan Pokmaswas • Jasa Konsultasi lainnya • Temu Usaha Perikanan • Uji mutu hasil perikanan 	40 orang 40 orang 1 dokumen 40 orang 3 kegiatan	40 orang 40 orang 1 dokumen 40 orang 3 kegiatan	40 orang 40 orang 1 dokumen 40 orang 3 kegiatan	283.192.355	333.192.355	387.192.355	APBD Kota Semarang	
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi ikan olahan • Angka konsumsi ikan per kapita 	17.557,29 ton	17.557,29 ton	17.557,29 ton	1,395.494.760	1.353.494.760	1.331.208.123	APBD Kota Semarang	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran	20 orang	20 orang	20 orang	207.134.760	293.134.760	347.134.760	APBD Kota Semarang	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi informasi usaha pengolahan dan pemasaran • Bintek / magang • Monev pedagang ikan hias • Honorarium Non ASN • Validasi data pengolah dan pemasar ikan 	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang 50 orang	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang 50 orang	20 orang 10 orang 12 kali 1 orang 50 orang	207.134.760	293.134.760	347.134.760	APBD Kota Semarang	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan	100 orang	100 orang	100 orang	213.360.000	486.680.000	410.393.363	APBD Kota Semarang	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Cooking class • Jumlah peserta kampanye gemar ikan TP PKK 	50 orang 60 orang 20 orang	50 orang 60 orang 20 orang	50 orang 60 orang 20 orang	213.360.000	486.680.000	410.393.363	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peserta kegiatan lomba masak ikan tingkat kota dan provinsi Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan Pemberian makanan tambahan penderita gizi buruk Jumlah peserta sosialisasi gemar ikan dan PMT anak sekolah Jumlah peserta pembinaan pengolah ikan 	100 orang	100 orang	100 orang					
			40 orang	40 orang	40 orang					
			40 orang	40 orang	40 orang					
			40 orang	40 orang	40 orang					
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan	40 orang	40 orang	40 orang	975.000.000	573.680.000	573.680.000	APBD Kota Semarang	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah peserta pembinaan pedagang PIH Jumlah Pembangunan / perawatan Gedung Honorarium Non ASN Sarpras PIH 	40 orang	40 orang	40 orang					
			1 jenis	1 jenis	1 jenis	975.000.000	573.680.000	573.680.000	APBD Kota Semarang	
			4 orang	4 orang	4 orang					
			1 jenis	1 jenis	1 jenis					
JUMLAH						14.361.104.449	14.487.151.049	14.288.566.090		

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perikanan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian

dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perikanan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perikanan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

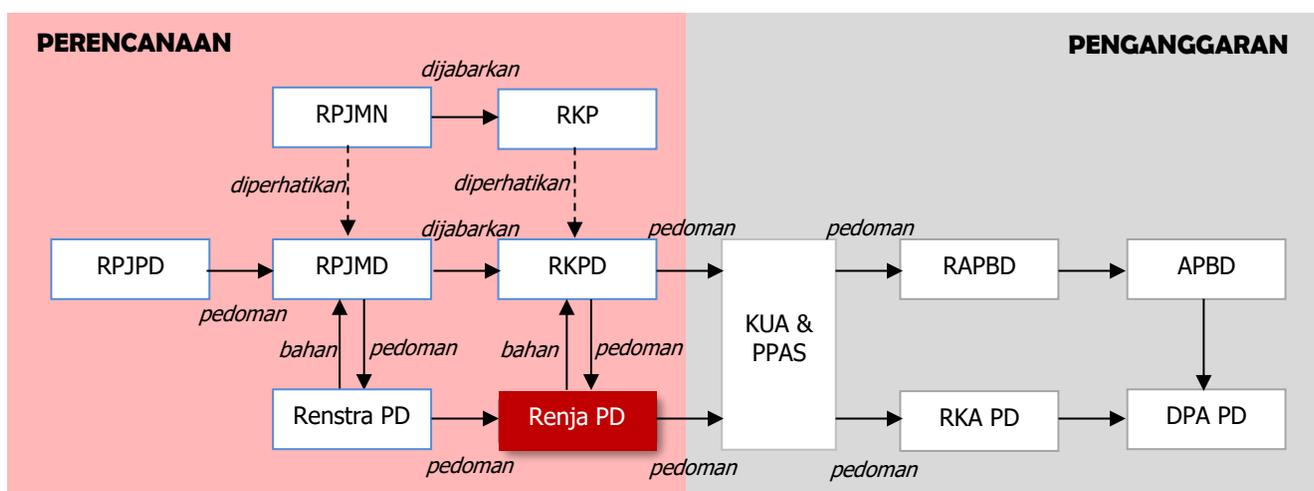
25. DINAS PERTANIAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh : Setelah mulai pulih dari pandemic Covid-19, dunia kembali menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan disrupsi terhadap perdagangan global dan rantai pasok, yang wujud nyatanya adalah munculnya ketidakpastian akan ketersediaan dan harga komoditas pangan global. Ketegangan yang terjadi akibat perang yang berkepanjangan berimbas bagi dunia termasuk Indonesia, mulai dari sektor pangan, energi, hingga inflasi. Dengan adanya dinamika tersebut, serta dengan adanya perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan Pembangunan termasuk di Kota Semarang. Dalam konteks perencanaan Pembangunan, hal ini juga menegaskan bahwa Pembangunan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap permasalahan serta isu – isu strategis terkini.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Pertanian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

- Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Pertanian Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	51283,73 ton	58065,88 ton	50647,76 ton	28045,22 ton	55,37	86111,1 ton	167,91
		produksi hasil peternakan	36822,00 ton	39690,27 ton	35922,00 ton	18990,5 ton	52,87	58680,77 ton	159,36
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	150 kelompok	35 kelompok	25 kelompok	18 kelompok	72	53 kelompok	35,33
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Luas areal budidaya pertanian dengan teknologi yg spesifik lokasi	66,20 ha	16 ha	19,00 ha	13 ha	68,42	29 ha	43,81
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan empon-empon	8 kelompok	3 kelompok	4 kelompok	0 kelompok	NA	3 kelompok	37,50
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman perkebunan	10 kelompok	1 kelompok	2 kelompok	0 kelompok	NA	1 kelompok	10,00
		Jumlah kelompok tani yang mendapat pendampingan pengembangan tanaman buah-buahan unggulan	8 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	6 kelompok	120	11 kelompok	137,50

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			12 laporan	14 laporan	116,67		
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	jumlah kelompok tani yg mendapat fasilitasi P2HP	23 kelompok	7 kelompok	8 kelompok	8 kelompok	100	15 kelompok	65,22
		Jumlah promosi hasil pertanian yang difasilitasi	15 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	7 kegiatan	233,33	10 kegiatan	66,67
		Jumlah pengembangan tanaman sukun	510 batang	110 batang	110 batang	0 batang	0	110 batang	21,57
		Jumlah kegiatan Gelar Hidroponik yang dilaksanakan	60 kali	12 kali	12 kali	3 kali	25	15 kali	25,00
		jumlah fasilitasi sarana budidaya pertanian di lahan sempit	82 paket	20 kelompok	16 paket	8 paket	50	28 paket	34,15
		jumlah poktan yg mendapat pendampingan pemanfaatan alsintan/nak	28 kelompok	10 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	100	16 kelompok	57,14
		Jumlah bibit yg disediakan untuk social planting	135.000.00 batang	18.500 batang	22.750 batang	16.967 batang	74,58	35.467 batang	0,03
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			30 laporan	32 laporan	106,67		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	87,50 persen	62,5 persen	62,50 persen	68,75 persen	110	65,63 persen	75
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kebun dinas yang dikelola	16 unit	16 unit	16 unit	16 unit	100		200
		Jumlah pohon induk yang dihasilkan	500 pohon	0	0 pohon	9 pohon	900	9 pohon	1,8
		Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan dari SDG	4000 batang	2000 batang	1500 batang	2629 batang	175,27	2629 batang	115,73

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		jumlah sertifikat Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) yg diperoleh	3 dokumen	0	0 dokumen	2 dokumen	200	2 dokumen	66,67
		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			6 dokumen	0	NA		
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	65.00 persen	40%	45.00 persen	57,69 persen	128,2	48.85 persen	75,15
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah laporan pengawasan bibit dan pakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	18 laporan	30
		Jumlah kelompok ternak yang mendapat fasilitasi penguatan pakan	20 kelompok	9 kelompok	2 kelompok	1 kelompok	50	10 kelompok	50
		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			12 laporan	16 laporan	133,33		
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengawasan terhadap pengecer obat hewan yang dibina	100 persen	20 persen	100 persen	0	100	20 persen	20
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah pengecer obat hewan yg dibina	108 toko	36 toko	0	0 toko	NA	36 toko	33,33
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	445 ekor	35 ekor	60 ekor	0 ekor	0	35 ekor	7,87
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kecamatan yang masuk pendataan ternak	16 kecamatan	16 kecamatan	16 kecamatan	8 kecamatan	50	16 kecamatan	100

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		<i>Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>			200 ekor	0	NA		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6,38 ton/ha	6,38 ton/ha	6.38 ton/ha	6,88 ton/ha	107,84	6,63 ton/ha	103,92
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	4 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	25
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah dokumen rencana pengelolaan LP2B yg disusun	1 dokumen	0	0 dokumen	0 dokumen	NA	0 dokumen	NA
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	jumlah dokumen rencana pengembangan prasarana pertanian yg disusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	NA	1 dokumen	50
		<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>			1 laporan	0	NA		
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah dokumen masterplan pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yg disusun	1.00 dokumen	0	1.00 dokumen	0 dokumen	NA	0 dokumen	NA
		<i>Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan</i>			1 laporan	0	NA		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	25 unit	27 unit	28 unit	12 unit	42,86	39 unit	156
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yg dibangun/direhab	7 unit	3 unit	2 unit	0 unit	NA	3 unit	42,86
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara			2 unit	0	NA		
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yg dibangun/direhab	3 unit	1 unit	0 unit	0 unit	NA	1 unit	33,33
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan pertanian yg dibangun/direhab	6 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	33,33
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			1 unit	1 unit	100		
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yg dibangun/direhab	0 unit	0	2 unit	1 unit	50	1 unit	100
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			2 unit	1 unit	50		
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yg direhab	0 unit	0	0 unit	0 unit	NA	0 unit	NA
		Jumlah sarana pendukung penyuluhan di BPP	3 paket	0	0 paket	1 paket	100%	1 paket	33,33

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yg dibangun/direhab	42 unit	22 unit	23 unit	10 unit	43,478	32 unit	76,19
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			23 unit	10 unit	43,48		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 persen	-5.00 persen	-5.00 persen	-88,32 persen	1766,4	-93,32 persen	1866,4
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	13.00 kelurahan	15 kelurahan	14.00 kelurahan	31 kelurahan	221,43	31 kelurahan	353,85
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kegiatan pengendalian & penanggulangan penyakit hewan/ternak	165 kali	25 kali	25 kali	47 kali	188	47 kali	28,48
		Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan & puskesmas	26500 ekor	3500 ekor	3500 ekor	1434 ekor	40,97	4934 ekor	18,62
		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			12 laporan	8 laporan	66,66667		
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	95 persen	90%	92 persen	100 persen	108,70	95 persen	105,26

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persentase peredaran BAH dan produk asal hewan yg terawasi	100 persen	20%	100 persen	100 persen	100	60 persen	100
		Persentase fasilitasi sesuai standar Nomor Kontrol Veritier (NKV)	100 persen	20%	100 persen	100 persen	100	60 persen	100
		Jumlah pendampingan & fasilitasi perijinan usaha pengolahan hasil peternakan			4 laporan	2 laporan	50	2 laporan	100
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			12 laporan	20 laporan	166,6667		
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	85 persen	75 persen	75 persen	100 persen	133,33	87,5 persen	102,94
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	37 kelompok	7 kelompok	7 kelompok	28 kelompok	400	35 kelompok	94,59
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari OPT	18 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	8 kelompok	200	12 kelompok	66,67
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			100 ha	103,9 Ha	103,9		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi penguatan perlindungan tanaman dari DPI pada tanaman pangan	19 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	1 kelompok	33,33	4 kelompok	21,05
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani			40 Ha	11 ha	27,5		
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	36 kelompok	26 kelompok	28 kelompok	27 kelompok	96,42857	27 kelompok	147,22
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	65 persen	35%	40 persen	37,86 persen	94,65	37,86 persen	56,05
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kegiatan pengembangan pola kemitraan pertanian yang terfasilitasi	13 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	2 kegiatan	40	2 kegiatan	53,85
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas			5 unit	5 unit	100		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah petani yang ditingkatkan kapasitasnya	900 orang	300 orang	840 orang	325 orang	38,69	325 orang	69,44
		Jumlah fasilitasi peningkatan kelembagaan petani	19 kegiatan	8 kegiatan	5 kegiatan	3 kegiatan	60	3 kegiatan	61,11
		Jumlah kelompok tani yang naik kelas dalam penilaian kelas kelompok tani	25 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	0 kelompok	NA	0 kelompok	20
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			41 unit	20 unit	48,78049		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	persentase sarana penyuluhan pertanian yang tersedia	100 persen	20 persen	100 persen	50 persen	50	35 persen	35
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			28 unit	7 unit	25,00		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 persen	20 persen	100 persen	48,18 persen	48,18	34,09 persen	34,09
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	131 dokumen	26 dokumen	27 dokumen	13 dokumen	48,15	39 dokumen	29,77
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	26 dokumen	5 Dokumen	6 dokumen	1 dokumen	16,67	6 dokumen	23,08
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 dokumen	1 dokumen	16,67		
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan & evaluasi kinerja	105 dokumen	21 Dokumen	27 dokumen	12 dokumen	44,44	33 dokumen	31,43
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			21 dokumen	12 dokumen	57,14		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100 persen	20 persen	100 persen	43,75	43,75	31,88 persen	31,88
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100 persen	20 persen	100 persen	74,53 persen	74,53	74,53 persen	47,27
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan OPD		4 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	0		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji & tunjangan	100 persen	20 persen	100 persen	50 persen	50	50 persen	35
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			95 org/bulan	94 Org/bulan	98,95		
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN pengelola kegiatan/keuangan yang disediakan honor penunjang	100 persen	20 persen	100 persen	50 persen	50	50 persen	35
		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	20 dokumen	4 dokumen	7 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	20
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	0	NA		
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	NA	1 dokumen	20
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			2 dokumen	0	NA		
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	10 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	NA	2 dokumen	20
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4 dokumen	0	NA		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	NA	1 dokumen	20
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 dokumen	0	NA		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 persen	20 persen	100 persen	44,86	44,86	32,43 persen	32,43
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 persen	100 cakupan	100 persen	46 persen	46	73 persen	73
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 jenis	10 jenis	11 jenis	5 jenis	45,45	15 jenis	150
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	2 paket	200		
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30 jenis	30 jenis	11 jenis	5 jenis	45,45	35 jenis	116,67
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			11 paket	6 paket	54,55		
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang disediakan	11 jenis	11 jenis	10 jenis	2 jenis	20	13 jenis	118,18
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 paket	2 paket	100		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3 Jenis	3 jenis	3 Jenis	2 jenis	66,67	5 jenis	166,67
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 dokumen	6 dokumen	600		
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitasi	100 persen	20 persen	100 persen	50 persen	50	35 persen	35
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 laporan	6 laporan	50		
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase koordinasi & konsultasi ke dalam dan luar daerah yang terfasilitasi	100 persen	20 persen	100 persen	50 persen	50	35 persen	35
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 laporan	6 laporan	50		
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang diadakan untuk mendukung SPBE pada OPD	14 jenis	14 jenis	5 jenis	3 jenis	60	17 jenis	121,43
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1 dokumen	2 dokumen	200		
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen	20 persen	100 persen	34 persen	34	27 persen	27
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil kepala dinas yang diadakan	1 unit	0	0 unit	0 unit	100	0 unit	0

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	12 unit	0	0 unit	0 unit	100	0 unit	0
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah barang meubelair kantor yg diadakan	4 jenis	4 jenis	13 jenis	4 jenis	30,77	8 jenis	200
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			100 unit	25 unit	25		
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan & mesin yang diadakan	5 jenis	5 jenis	6 jenis	2 jenis	33,33	7 jenis	140
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			21 unit	8 unit	38,10		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 persen	20 persen	100 persen	50 persen	50	35 persen	35
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	100 persen	20 persen	100 persen	50 persen	50	35 persen	35
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	6 laporan	50		
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan umum kantor yang disediakan	100 persen	20 persen	100 persen	50 persen	50	35 persen	35
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	6 laporan	50		

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100 persen	20 persen	100 persen	61 persen	61	40,5 persen	40,5
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	100
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 unit	1 unit	100		
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	67 unit	55 unit	66 unit	33 unit	50	88 unit	131,34
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			66 unit	33 unit	50		
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan gedung kantor	10 jenis	9 jenis	7 jenis	4 jenis	57,14	13 jenis	130
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			210 unit	106 unit	50,48		
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor & bangunan lainnya	10 gedung	9 gedung	11 gedung	5 gedung	45,45	14 gedung	140

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja (outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja			Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Renja Tahun 2023			Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			11 unit	5 unit	45,45		

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2023

Berdasarkan data-data pada tabel 2.1. dapat diuraikan hasil evaluasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian Renstra tahun 2021-2026 sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2023 telah dilaksanakan melalui 6 program, 17 kegiatan dan 45 subkegiatan dengan total indikator sebanyak 133 indikator yang terdiri dari 9 indikator program, 18 indikator kegiatan dan 106 indikator subkegiatan. Selanjutnya pada perkembangannya Dinas Pertanian mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik.
- 2) Secara umum capaian kinerja Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II cukup baik Dimana terdapat 79 indikator (59,4% dari seluruh indikator yang ada) memiliki capaian yang sangat tinggi, 16 indikator (12,03% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang tinggi, 3 indikator (2,25% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang sedang, 2 indikator (1,5% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang rendah, 33 indikator (24,81% dari total indikator yang ada) dengan capaian yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa strategis pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan cukup efektif dan efisien.
- 3) Dari 6 program yang dilaksanakan pada tahun 2023, 5 program diantaranya memiliki capaian indikator yang sangat tinggi dengan rata-rata capaian yaitu 368,7% hal ini dikarenakan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki capaian yang sangat tinggi. Capaian yang sangat tinggi disebabkan karena jumlah kasus penyakit hewan menular strategis pada tahun 2023 yaitu sebanyak 202 kasus memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 1730 kasus, sehingga realisasi capaian indikator penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis yaitu -88,32% apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu -5%, maka akan menghasilkan nilai yang sangat tinggi. Sedangkan pada Program Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki capaian indikator yang tinggi dengan rata-rata capaian yaitu 45,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- 4) Dari 18 indikator kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 terdapat 11 indikator dengan capaian sangat tinggi, 3 indikator dengan capaian tinggi, 1 indikator dengan capaian sedang dan 3 indikator dengan capaian sangat rendah. Indikator dengan capaian yang sangat rendah yaitu jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak, jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun dan jumlah dokumen pelaporan keuangan OPD. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut dijadwalkan pada triwulan III dan IV sehingga pada triwulan II belum terdapat capaian indikator. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut memiliki peluang besar untuk dapat mencapai target kinerjanya.

5) Dari 106 indikator kinerja subkegiatan, 62 indikator memiliki capaian yang sangat tinggi, 11 indikator memiliki capaian yang tinggi, 2 indikator memiliki capaian yang sedang, 2 indikator memiliki capaian yang rendah dan 29 indikator memiliki capaian yang sangat rendah. Dengan demikian secara umum capaian indikator kinerja tahun 2023 sampai dengan triwulan II yaitu baik dengan 58,5% diantaranya memiliki capaian yang sangat tinggi dan 10,4% diantaranya memiliki capaian yang tinggi. Indikator dengan capaian sangat rendah dapat disebabkan karena dijadwalkan pada triwulan III dan IV sehingga pada triwulan II belum terdapat capaian indikatornya.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik N=Bidang Ketahanan Pangan. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Pertanian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Pertanian Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
URUSAN PILIHAN PERTANIAN				
3.27	DINAS PERTANIAN :	42.361.372.245	12.236.075.605	28,88
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.666.743.843	8.553.290.740	43,49
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.439.366	7.712.000	67,42
2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.952.265	4.083.000	68,60
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.487.101	3.629.000	66,14
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.051.723.863	6.968.809.602	49,59
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.825.874.245	6.852.578.602	49,56
2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	222.100.000	115.760.500	52,12
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.292.978	0	0,00
2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.637.760	470.500	28,73
2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	818.880	0	0,00
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.434.693.824	461.030.022	32,13
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68.832.000	30.537.819	44,37
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	356.111.824	112.667.670	31,64
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	7.117.760	17,79
2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.080.000	4.200.000	41,67
2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.000.000	12.225.000	33,96
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	284.823.000	61.478.773	21,58

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	638.847.000	232.803.000	36,44
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	616.237.635	19.653.250	3,19
2.07.05	Pengadaan Mebel	549.934.580	0	0,00
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.303.055	19.653.250	29,64
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.562.509.000	685.035.516	43,84
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.045.000	149.191.334	39,46
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.184.464.000	535.844.182	45,24
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.990.140.155	411.050.350	20,65
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.314.000	14.610.480	36,24
2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	540.161.000	175.373.807	32,47
2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	226.855.735	68.169.311	30,05
2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.182.809.420	152.896.752	12,93
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.055.673.202	2.007.612.174	24,92
2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.788.181.602	1.022.395.766	21,35
2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.425.196.200	437.654.887	18,05
2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.362.985.402	584.740.879	24,75
2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	2.383.438.400	845.998.377	35,49
2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2.383.438.400	845.998.377	35,49
2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	719.720.000	112.897.500	15,69
2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	719.720.000	112.897.500	15,69
2.06	Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	164.333.200	26.320.531	16,02
2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	164.333.200	26.320.531	16,02
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.533.164.800	549.796.869	6,44
2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	247.280.000	53.282.500	21,55
2.01.03	Koordinasi dan Sinkronasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	98.680.000	5.392.000	5,46
2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	148.600.000	47.890.500	32,23
2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.285.884.800	496.514.369	5,99
2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.289.883.581	22.212.960	0,97
2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	628.200.000	112.496.500	17,91
2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	167.816.419	23.022.690	13,72

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	5.199.984.800	338.782.219	6,52
04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	795.802.000	510.842.686	64,19
2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	402.352.000	297.690.899	73,99
2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	402.352.000	297.690.899	73,99
2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	301.150.000	152.963.287	50,79
2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	301.150.000	152.963.287	50,79
2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	92.300.000	60.188.500	65,21
2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	92.300.000	60.188.500	65,21
05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	237.400.000	126.536.150	53,30
2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	237.400.000	126.536.150	53,30
2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	176.780.000	116.676.150	66,00
2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	60.620.000	9.860.000	16,27
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.072.588.400	487.996.986	9,62
2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	5.072.588.400	487.996.986	9,62
2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	230.700.000	95.784.200	41,52
2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	2.423.917.200	364.767.555	15,05
2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.417.971.200	27.445.231	1,14

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, dan 17 kegiatan dan 45 sub kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebesar Rp 42.361.372.245,-. Dari anggaran tersebut, realisasi anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp 12.236.075.605,- (28,88%). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 30.125.296.640,- (71,12%). Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena terdapat banyak paket pekerjaan yang sedang dalam proses pengadaan dan dijadwalkan pencairan maupun pelaksanaannya pada triwulan III dan IV.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 114 tahun 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI 2023
		2021*)	2022	2023	2024	2025	2026	2022	TW II 2023	
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	0,79%	0,792%	0,794%	0,796%	0,798%	0,800%	0,790%	0,750%**)	0,794%
SASARAN :										
1. Meningkatkan mutu, produksi & produktivitas pertanian yang berkelanjutan	Jumlah produksi pertanian	91.531 ton	86.066,87 ton	86.569,76 ton	87.076,23 ton	87.588,22 ton	88.105,73 ton	97.756,16 ton	47.035,72 ton	86.635,35 ton
2. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Nilai AKIP Dinas Pertanian	71,84	72	72,2	72,4	72,6	72,8	73,06	73,06**)	76,55

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2023

Ket : *) data awal periode Renstra 2021 – 2026

**) data sementara

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian sampai dengan triwulan II tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Renstra tahun 2021-2026 **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB”**. Pada triwulan II tahun 2023 kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku adalah 0,75%. Apabila dibandingkan dengan target Renja 2023 yaitu 0,794%, capaian ini termasuk kategori sangat tinggi dengan persentase 94,46% dan apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yaitu sebesar 0,8% maka termasuk kategori sangat tinggi dengan persentase 93,75%. Nilai persentase PDRB yang ada merupakan data sementara yang dapat diperoleh dari BPS Kota Semarang.
- b. Pada Renstra tahun 2021-2026 memiliki 2 sasaran, yaitu :
 - 1) Sasaran 1 **”Meningkatnya mutu, produksi & produktivitas pertanian yang berkelanjutan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **”jumlah produksi pertanian”**. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 jumlah produksi pertanian sebesar 47.035,72 ton, yaitu 54,33% dari target Renja tahun 2023. Tingkat capaian ini termasuk dalam kategori sangat tinggi sehingga memiliki peluang besar untuk dapat mencapai target kinerja pada akhir tahun 2023.
 - 2) Sasaran 2 **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian”** memiliki 1 indikator yaitu **“Nilai AKIP Dinas Pertanian”**. Pada tahun 2022 nilai AKIP Dinas Pertanian adalah 73,06. Nilai tersebut melampaui target pada Renja tahun 2022. Sedangkan hingga triwulan II tahun 2023, nilai AKIP Dinas Pertanian masih berpaku pada nilai tersebut karena sedang dalam proses penilaian oleh APIP Kota Semarang.

Selanjutnya, selain realisasi dari target tujuan dan sasaran Dinas Pertanian sebagai wujud pelayanan Dinas Pertanian yang berkaitan langsung dengan fungsinya di bidang pertanian, juga diperlukan pencermatan realisasi dari indikator kinerja daerah yang menjadi kinerja penyelenggaraan budang urusan pertanian, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pertanian Kota Semarang
sampai dengan Triwulan II tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA						REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI 2023
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	TW II 2023	
1	Produktivitas pertanian per ha per tahun	Ton/ha	-	6.38	6.38	6.38	6.38	6.38	6.96	6.89	6.72
2	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	-	-5	-5	-5	-5	-5	7,108.33	-88.32	-88.21
3	Sentra produk unggulan pertanian	kawasan	4	4	5	6	7	7	4	4	5
4	jumlah kawasan pertanian perkotaan	kelurahan	85	117	132	147	162	177	177	177	177
5	presentase luar areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	persen	-	75	75	80	80	85	93.33	100	100
6	Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	persen	-	75	81.25	81.25	81.25	87.5	43.75	43.75	37.5

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2023

Dalam Penyelenggaraan urusan Pertanian, pada periode RPJMD tahun 2021-2026 terdapat 6 Indikator Kinerja Daerah yang diampu Dinas Pertanian. Pada tahun 2022 yang merupakan tahun ke-II periode RPJMD 2021-2026, dapat diketahui bahwa dari 6 indikator yang ada terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu pada indikator "Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular" dan "Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis". Hal ini disebabkan karena adanya wabah penyakit hewan menular strategis (PHMS) yaitu penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang memasuki Kota Semarang pada bulan April.

Pada triwulan II tahun 2023 dapat diketahui bahwa dari 6 indikator yang ada terdapat 2 indikator yang belum mencapai target Renja 2023 yaitu indikator "Sentra produk unggulan pertanian" dan "Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis". Pada indikator sentra produk unggulan pertanian memiliki target yaitu 5 kawasan sedangkan capaian indikator sampai dengan triwulan II tahun 2023 yaitu 4 kawasan. Hal ini disebabkan karena 1 indikator yang belum terealisasi akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV. Sedangkan pada indikator presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis memiliki target yaitu 81,25% dengan capaian indikator yaitu 43,75%. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak kasus penyakit hewan menular strategis yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kota Semarang terutama penyakit mulut dan kuku (PMK) dan *lumpy skin disease (LSD)*. Tercatat sampai dengan triwulan II tahun 2023 terdapat 202 kasus penyakit hewan menular strategis yang tersebar pada 9 kecamatan di Kota Semarang. Namun berdasarkan trend dari triwulan I sampai dengan triwulan II terdapat penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis yang cukup signifikan yaitu pada triwulan I tercatat 199 kasus dan pada triwulan II tercatat 3 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus penyakit hewan menular strategis yang ada di Kota Semarang dapat dikendalikan dengan baik sehingga memiliki peluang besar untuk dapat mencapai target kinerja pada akhir tahun 2023.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Pertanian, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, menyebabkan luas budidaya pertanian semakin berkurang.

- b. Kuantitas penggunaan benih unggul bersertifikat oleh petani masih kurang, sehingga produktivitas kurang meningkat.
- c. Belum banyak kelompok tani yang dapat mengimplementasikan manajemen kelembagaan tani secara optimal.
- d. Sebagian petani belum mampu merubah mindset (perilaku) untuk lebih maju karena kurangnya penguasaan teknologi terutama teknologi informasi.
- e. Sarana irigasi belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menjamin ketersediaan air untuk menunjang usaha budidaya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- f. Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pertanian perkotaan, dirasakan masih kurang dimana hanya beberapa orang yang aktif berperan. Selain itu dukungan dari pemangku wilayah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat belum optimal untuk mendorong warga mengembangkan pertanian perkotaan di wilayahnya.
- g. Kota Semarang rentan terhadap penyebaran penyakit hewan menular dikarenakan posisi Kota Semarang sebagai pusat lalu lintas ternak dan bahan asal hewan (BAH) dari wilayah sekitarnya.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian, diantaranya :

- a. Keterbatasan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan.
- b. Pengembangan sentra produk pertanian masih rendah.
- c. Pengembangan pertanian perkotaan belum optimal, masih sebatas pemenuhan kebutuhan sendiri, belum berorientasi pasar.
- d. Dukungan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan masih belum optimal (sarana klinik hewan, puskesmas, BPP, pengendalian OPT, dll)
- e. Tingkat produktivitas pertanian yang masih rendah dan pendapatan usaha yang relatif rendah karena kecilnya skala usaha tani.
- f. Perlindungan terhadap bencana/kegagalan usaha (asuransi pertanian) masih rendah.
- g. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan carrying capacity.
- h. Sarana prasarana peternakan, daya saing produk hewan, skala usaha peternakan, kelembagaan kelompok dan jejaring pemasaran produk hewan belum optimal.
- i. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ), serta gangguan reproduksi ternak sehingga produktivitas ternak relatif rendah.
- j. Keterbatasan pengetahuan dan ketampilan serta akses untuk memperoleh modal, informasi, teknologi dan sarana prasarana
- k. Minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian mengalami penurunan.
- l. Pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan rendahnya kemandirian petani.

m. Terbatasnya jumlah ASN baik fungsional penyuluh maupun fungsional teknis terutama yang berlatar belakang pertanian.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Semakin berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat alih fungsi lahan di Kota Semarang.
- 2) Resiko masuknya zoonosis (penyakit yang menular dari ternak ke manusia) dari daerah asal ternak ke Kota Semarang relatif tinggi dikarenakan Kota Semarang merupakan pusat pemasaran ternak terbesar di Jawa Tengah.
- 3) Mudahnnya produk pertanian dari luar masuk ke Kota Semarang dengan harga yang bersaing.
- 4) Perubahan iklim global yang berpengaruh terhadap kontinuitas, kuantitas dan kualitas produksi pertanian dan peternakan.
- 5) Infrastruktur pertanian seperti sumber-sumber air untuk irigasi beserta jaringan, jalan pertanian dan kelembagaan pertanian belum optimal.
- 6) Praktek pertanian konvensional yang mengandalkan input produksi berbasis bahan kimia anorganik.
- 7) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan petani dalam membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders / pelaku usaha dan terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian.
- 8) Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian
- 9) Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.

b. Peluang

- 1) Meningkatnya konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH) di tingkat masyarakat.
- 2) Pasar komoditas pertanian yang terbuka luas terutama dengan adanya pasar bebas Asia (MEA).
- 3) Peluang investasi dibidang pertanian meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya perusahaan yang bergerak di agrobisnis
- 4) Berkembangnya pola kemitraan usaha agribisnis antara petani dengan pengusaha/produsen
- 5) Peningkatan intensifikasi pertanian dengan menerapkan Sapta Usaha Tani melalui *Good Agricultural Practice (GAP)* dan Standard Operasional Prosedur (SOP).

- 6) Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk pengembangan infrastruktur pertanian sehingga mengurangi beban SKPD Kota Semarang.
- 7) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk pengamanan usaha tani.
- 8) Pengembangan pupuk organik, agensia hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
- 9) Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan sekolah lapang.
- 10) Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
- 11) Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk petani Kota Semarang.
- 12) Pengembangan fungsi kebun dinas sebagai sentra kawasan pertanian terpadu dengan fungsi produksi, edukasi, penelitian, serta wisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pengembangan pertanian di Kota Semarang.
- 13) Penerapan peraturan tentang tata ruang dan penetapan peraturan tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk membatasi alih fungsi lahan pertanian produktif.
- 14) Pengembangan model pertanian perkotaan yaitu melalui pemilihan komoditas pertanian yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki nilai ekonomi tinggi, dan mempunyai peluang pasar yang terbuka serta dapat dikembangkan pada lahan sempit, sehingga diharapkan keterbatasan lahan bukan menjadi kendala untuk usaha dibidang pertanian.
- 15) Diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian.
- 16) Kenaikan harga komoditas pangan yang memicu inflasi merupakan peluang meningkatkan usaha tani terutama pada komoditas-komoditas penyumbang inflasi seperti cabe dan bawang.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Keterbatasan lahan pertanian.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pertanian yang masih rendah.
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan.
- d. Daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan peternakan sebagai produk unggulan lokal masih harus ditingkatkan.
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
- f. Fungsi kelembagaan pertanian belum optimal.

- g. Adanya wabah penyakit hewan menular strategis yang dapat menyebabkan turunnya produksi hasil peternakan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Pertanian Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50.647,76 ton	8,211,623,526	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50.647,76 ton	8,497,337,812	
			produksi hasil peternakan	35.922 ton				produksi hasil peternakan	35.922 ton		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	25 kelompok	5,298,457,117	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	40 kelompok	5,484,171,403	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Semarang	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	17 laporan	2,401,837,581	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kota Semarang	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	17 laporan	2,458,980,438	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	35 laporan	2,896,619,536	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Semarang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	35 laporan	3,025,190,965	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kebun dinas yang produktif	62.50 persen	2,383,438,400	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kebun dinas yang produktif	62.50 persen	2,426,295,543	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 dokumen	2,383,438,400	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Semarang	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 dokumen	2,426,295,543	
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	45.00 persen	224,490,118	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	45.00 persen	281,632,975	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Semarang	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	15 laporan	224,490,118	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kota Semarang	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 laporan	281,632,975	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	200 ekor	305,237,891	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah ternak yang disebarakan untuk pengembangan populasi ternak	200 ekor	305,237,891	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Semarang	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200 ekor	305,237,891	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kota Semarang	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	200 ekor	305,237,891	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	8,205,305,740	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	245,480,000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	2.00 dokumen	245,480,000	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	2.00 dokumen	245,480,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 laporan	96,880,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kota Semarang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 laporan	96,880,000	
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kota Semarang	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 laporan	148,600,000	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Kota Semarang	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 laporan	148,600,000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	47 unit	7,959,825,740	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	45 unit	7,496,592,159	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Semarang	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	12 unit	2,289,883,581	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kota Semarang	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	12 Unit	2,284,033,581	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Semarang	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	628,200,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kota Semarang	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	167,816,419	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kota Semarang	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	167,816,419	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kota Semarang	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	167,816,419	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	31 unit	4,873,925,740	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	31 unit	4,876,925,740	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 persen	774,177,000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 persen	802,748,428	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14.00 kelurahan	392,002,000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14.00 kelurahan	406,287,714	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Semarang	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 laporan	402,352,000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kota Semarang	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 laporan	406,287,714	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	12 laporan	301,150,000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5%	301,150,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Semarang	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	301,150,000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kota Semarang	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	301,150,000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	92.00 persen	81,025,000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	92.00 persen	95,310,714	
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Semarang	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 laporan	81,025,000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kota Semarang	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 laporan	95,310,714	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75.00 persen	236,350,000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75.00 persen	236,350,000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7.00 kelompok	236,350,000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7.00 kelompok	236,350,000	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	175,730,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	175,730,000	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	40 Ha	60,620,000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kota Semarang	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	40 Ha	60,620,000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28.00 kelompok	5,039,799,269	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28.00 kelompok	5,125,513,555	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	40.00 persen	5,039,799,269	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	40.00 persen	5,125,513,555	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	5.00 unit	224,894,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	5.00 unit	224,894,000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	41 unit	2,396,934,069	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kota Semarang	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	41 unit	2,482,648,355	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	28 unit	2,417,971,200	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	28 unit	2,417,971,200	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	18,873,765,910	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	18,873,765,910	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD					Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD			
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD					Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD			
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100.00 persen				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100.00 persen		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	27.00 dokumen	11,439,366	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	27.00 dokumen	11,439,366	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	5,952,265	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	5,952,265	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	5,487,101	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	5,487,101	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	12,953,773,381	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	12,953,773,381	
			Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	7.00 dokumen				Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	7.00 dokumen		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 org/bulan	12,727,923,763	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 org/bulan	12,727,923,763	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	222,100,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	222,100,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	1,292,978	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	1,292,978	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 dokumen	1,637,760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 dokumen	1,637,760	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	818,880	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	818,880	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 persen	1,425,237,890	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 persen	1,425,237,890	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	60,716,937	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	60,716,937	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11.00 paket	306,987,787	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11.00 paket	306,987,787	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan	2 paket	23,887,347	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan	2 paket	23,887,347	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10,080,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10,080,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	36,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	36,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	284,823,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	284,823,000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	702,742,819	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	702,742,819	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	809,710,916	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	809,710,916	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	2 unit	241,217,350	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	2 unit	241,217,350	
	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80 unit	513,991,697	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	80 unit	513,991,697	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	54,501,869	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	54,501,869	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	1,506,740,480	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	1,506,740,480	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Perubahan Renja 2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	322,276,480	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	322,276,480	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,184,464,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,184,464,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset OPD	100.00 persen	2,166,863,877	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan aset OPD	100.00 persen	2,166,863,877	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 unit	40,314,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 unit	40,314,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	66.00 unit	540,161,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	66.00 unit	540,161,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 unit	256,308,837	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 unit	256,308,837	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	1,330,080,040	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit	1,330,080,040	

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian”,

dengan indikator tujuan “Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan 2 sasaran Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu:

- a. Meningkatkan mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan, dengan indikator Jumlah produksi pertanian;
- b. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian, dengan indikator Nilai AKIP Dinas Pertanian.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	persen	0,794
SASARAN : 1. Meningkatkan mutu, produksi, & produktivitas pertanian yang berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian	Jumlah produksi pertanian Nilai AKIP Dinas Pertanian	Ton Nilai	86.569,76 72,2

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2023

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas, diperlukan strategi yang dijabarkan dalam rumusan program yang dilaksanakan. Dalam merumuskan program pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang;
3. Efisiensi terhadap belanja yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat serta program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Semarang;
4. Efisiensi belanja dilakukan dengan tetap memperhatikan pencapaian target kinerja Renstra Tahun 2016-2021;
5. Belanja yang berasal dari dana perimbangan (DAU dan DAK) dialokasikan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.
6. Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, serta penyesuaian target output dengan adanya efisiensi anggaran.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dilakukan penyesuaian strategi untuk mencapai target kinerjanya di tahun 2023, yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan mendorong partisipasi aktif petani, pelaku usaha, dan unsur masyarakat lainnya (Perguruan Tinggi, TNI, PKK, Komunitas, dll) dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Pertanian.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal (Kementerian Pertanian dan dinas lingkup pertanian Propinsi Jawa Tengah) untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang.
3. Optimalisasi sumber daya untuk memberantas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
4. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pertanian untuk mencapai target kinerja tahun 2023.

Selanjutnya untuk melaksanakan strategi-strategi di atas, akan diambil kebijakan sebagai berikut:

1. Penambahan, pengurangan dan penggeseran anggaran dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota.
2. Efisiensi anggaran dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang belum berjalan dan kurang mendukung program prioritas.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Dinas Pertanian memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Resiko Bencana” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Pertanian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	50.647,76 ton	50.647,76 ton	50.647,76 ton	5.918.669.202	6.417.669.202	8.497.337.812	APBD, DAK	
		produksi hasil peternakan	35.922 ton	35.922 ton	35.922 ton					
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya	25 kelompok	40 kelompok	40 kelompok	2.901.177.602	3.151.177.602	5.484.171.403	APBD, DAK	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 laporan	15 laporan	17 laporan	688.192.200	788.192.200	2.458.980.438	APBD, DAK	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	30 laporan	34 laporan	35 laporan	2.212.985.402	2.362.985.402	3.025.190.965	APBD	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebun dinas yang produktif	62.50 persen	62.50 persen	62.50 persen	2.258.438.400	2.383.438.400	2.426.295.543	APBD	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	2.258.438.400	2.383.438.400	2.426.295.543	APBD	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan	45.00 persen	45.00 persen	45.00 persen	595.720.000	719.720.000	281.632.975	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 laporan	12 laporan	12 laporan	595.720.000	719.720.000	281.632.975	APBD	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disebar untuk pengembangan populasi ternak	60 ekor	60 ekor	200 ekor	163.333.200	163.333.200	305.237.891	APBD	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	60 ekor	60 ekor	200 ekor	163.333.200	163.333.200	305.237.891	APBD	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per ha per tahun	6.38 ton/ha	6.38 ton/ha	6.38 ton/ha	197.280.000	247.280.000	245.480.000	APBD< DAK Fisik	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen rencana pengembangan pertanian yang disusun	2.00 dokumen	2.00 dokumen	2.00 dokumen	197.280.000	247.280.000	245.480.000	APBD	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 laporan	1 laporan	1 laporan	97.680.000	98.680.000	96.880.000	APBD	
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	99.600.000	148.600.000	148.600.000	APBD	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	28.00 unit	27 unit	45 unit	4.984.384.800	5.009.384.800	7.496.592.159	APBD,DAK Fisik	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 unit	1 Unit	12 Unit	349.400.000	225.983.581	2.284.033.581	APBD,DAK Fisik	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun,	1 unit	1 unit	1 unit	199.800.000	199.800.000	167.816.419	APBD,DAK Fisik	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Direhabilitasidan Dipelihara								
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	1 unit	1 unit	274.400.000	167.816.419	167.816.419	APBD, DAK Fisik	
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	23 unit	24 unit	31 unit	4.160.784.800	4.415.784.800	4.876.925.740	APBD, DAK Fisik	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-5.00 persen	-5.00 persen	-5.00 persen	494.652.000	795.802.000	802.748.428	APBD, DAK Non Fisik	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular	14.00 kelurahan	14.00 kelurahan	14.00 kelurahan	402.352.000	402.352.000	406.287.714	APBD	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 laporan	12 laporan	12 laporan	402.352.000	402.352.000	406.287.714	APBD	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-	-5%	-5%	-	301.150.000	301.150.000	DAK Non Fisik	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	12 laporan	12 laporan	-	301.150.000	301.150.000	DAK Non Fisik	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	92.300.000	92.300.000	95.310.714	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	92.300.000	92.300.000	95.310.714	APBD	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan	75.00 persen	75.00 persen	75.00 persen	499.008.000	237.400.000	236.350.000	APBD	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok yang difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim	7.00 kelompok	7.00 kelompok	7.00 kelompok	499.008.000	237.400.000	236.350.000	APBD	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 Ha	100 Ha	100 Ha	345.948.000	176.780.000	175.730.000	APBD	
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	40 Ha	40 Ha	40 Ha	153.060.000	60.620.000	60.620.000	APBD	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama	28.00 kelompok	28.00 kelompok	28.00 kelompok	1.330.720.000	874.107.400	5.125.513.555	APBD, DAK fisik	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	40.00 persen	40.00 persen	40.00 persen	1.330.720.000	874.107.400	5.125.513.555	APBD, DAK fisik	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi untuk penguatan kapasitas	5.00 unit	5.00 unit	5.00 unit	282.000.000	173.200.000	224.894.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 unit	40 unit	41 unit	918.720.000	646.986.200	2.482.648.355	APBD, DAK fisik	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	4 unit	4 unit	28 unit	130.000.000	53.921.200	2.417.971.200	APBD, DAK Fisik	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	19.666.743.843	19.666.743.843	18.873.765.910	APBD	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan	27.00 dokumen	27.00 dokumen	27.00 dokumen	11.439.366	11.439.366	11.439.366	APBD	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	5.952.265	5.952.265	5.952.265	APBD	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	5.487.101	5.487.101	5.487.101	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	14.051.723.863	14.051.723.863	12.953.773.381	APBD	
		Jumlah dokumen pelaporan Keuangan OPD	7.00 dokumen	7.00 dokumen	7.00 dokumen					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 org/bulan	95 org/bulan	95 org/bulan	13.825.874.245	13.825.874.245	12.727.923.763	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	222.100.000	222.100.000	222.100.000	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.292.978	1.292.978	1.292.978	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.637.760	1.637.760	1.637.760	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	818.880	818.880	818.880	APBD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.481.592.614	1.434.693.824	1.425.237.890	APBD	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	68.832.000	68.832.000	60.716.937	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	11.00 paket	11.00 paket	11.00 paket	355.910.614	356.111.824	306.987.787	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan & penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	40.000.000	40.000.000	23.887.347	APBD	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.080.000	10.080.000	10.080.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	36.000.000	36.000.000	36.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	284.823.000	284.823.000	284.823.000	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	685.947.000	638.847.000	702.742.819	APBD	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	703.630.000	616.237.635	809.710.916	APBD	
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	0	0	2 unit	0	0	241.217.350	APBD	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 unit	80 unit	80 unit	604.016.000	549.934.580	513.991.697	APBD	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 unit	21 unit	19 unit	99.614.000	66.303.055	54.501.869	APBD	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.344.137.000	1.562.509.000	1.506.740.480	APBD	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	206.773.000	378.045.000	322.276.480	APBD	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.137.364.000	1.184.464.000	1.184.464.000	APBD	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset OPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	2.074.221.000	1.990.140.155	2.166.863.877	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 unit	1.00 unit	1.00 unit	40.314.000	40.314.000	40.314.000	APBD	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas operasional	66.00 unit	66.00 unit	66.00 unit	540.161.000	540.161.000	540.161.000	APBD	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 unit	210 unit	210 unit	193.746.000	226.855.735	256.308.837	APBD	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	11 unit	11 unit	11 unit	1.300.000.000	1.182.809.420	1.330.080.040	APBD	

Sumber : Dinas Pertanian Kota Semarang, 2023

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Pertanian Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Pertanian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

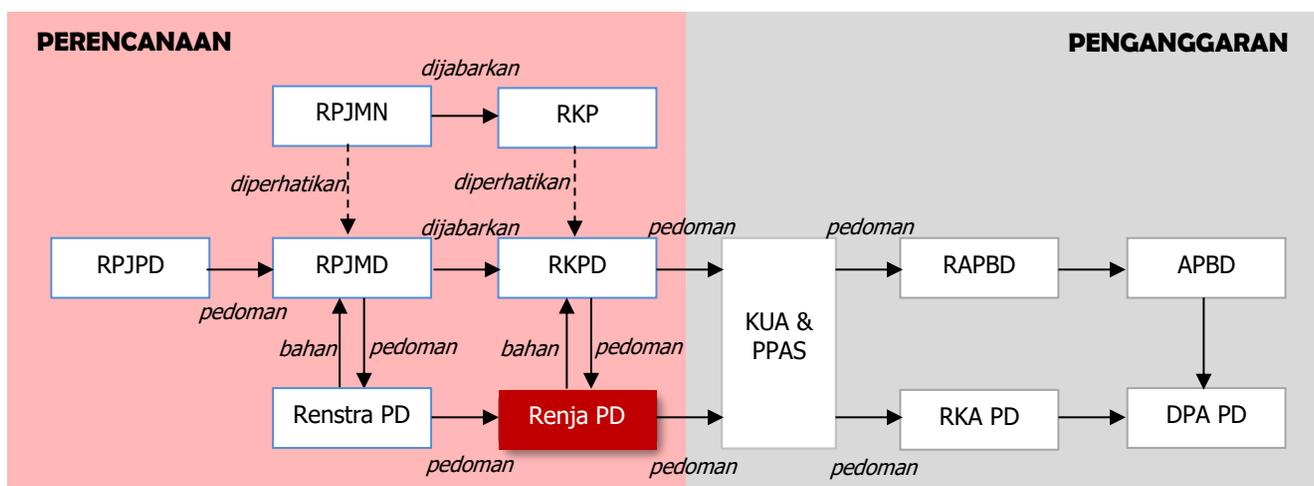
26. DINAS PERDAGANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2022 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perdagangan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
 - o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang;
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023;
- t. Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Perdagangan Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	50 %	50	100 %	50 %	50	50
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %	50 %	50	100 %	50 %	50	50
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %	50 %	50	100 %	50 %	50	50
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	41		8	8	100%	8	8	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6		1	1	100%	1	1	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	20		4	4	100%	4	4	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15		3	3	100%	3	3	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	895		179	179	100%	174	174	100%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5		1	1	100%	1	1	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	600		120	120	100%	120	120	100%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120		24	24	100%	24	24	100%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		1	1	100%	1	1	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	240		48	48	100%	48	48	100%	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50		10	10	100%	10	10	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55		11	11	100%	11	11	100%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5		1	1	100%	1	1	100%	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9000		1800	1800	100%	1800	1800	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	46%		36%	36%	100%	38%	38%	100%	
	Pembangunan dan	Jumlah sarana prasarana	23		18	18	100%	19	19	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	perdagangan yang diperbaiki									
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50		50	50	100%	50	50	100%	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50		50	50	100%	50	50	100%	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50		50	50	100%	50	50	100%	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	60		12	12	100%	12	12	100%	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,8%		4,11%	14%	0%	4,09%	4,09%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	60		12	12	100%	12	12	100%	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	60		12	12	100%	12	12	100%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	1,817,484,281		1,522,987,000	1,117,549,543	73%	1,568,676,610	1,568,676,610	100%	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang		36%		6%	6%	100%	12%	12%	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
	melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang									
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	150		30	30	100%	30	30	100%	
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	15		3	3	100%	3	3	100%	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	91%		66%	66%	100%	71%	71%	100%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	91%		66%	66%	100%	71%	71%	100%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	110110		80210	80210	100%	85910	85910	100%	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal	300		50	50	100%	50	50	100%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/9)	12 = (10/4)
		yang Dibina									
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	60%		10%	10%	100%	20%	20%	100%	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	500		100	100	100%	100	100	100%	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	150		30	30	100%	30	30	100%	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100		20	20	100%	20	20	100%	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5		1	1	100%	1	1	100%	

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2023

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perdagangan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023**

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	64.193.717.162	28.500.263.765	44,40
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.251.412.238	16.144.630.278	48,55
3.30.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.010.680	1.339.300	26,73%
3.30.01.2.01.01	sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.879.440	-	0,00%
3.30.01.2.01.04	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.789.280	-	0,00%
3.30.01.2.01.07	sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.341.960	1.339.300	99,80%
3.30.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.497.422.718	11.926.629.604	53,01%
3.30.01.2.02.1	sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.140.253.278	11.759.236.404	53,11%
3.30.01.2.02.2	sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	354.840.000	166.620.000	46,96%
3.30.01.2.02.5	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	776.480	773.200	99,58%
3.30.01.2.02.7	sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	776.480	-	0,00%
3.30.01.2.02.8	sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	776.480	-	0,00%
3.30.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.210.742.870	548.581.539	45,31%
3.30.01.2.06.01	sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	6.000.000	40,00%
3.30.01.2.06.03	sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	14.483.500	48,28%
3.30.01.2.06.04	sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.919.474	79.463.851	43,44%
3.30.01.2.06.05	sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	449.580.000	280.841.600	62,47%
3.30.01.2.06.08	sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	212.000.000	91.619.329	43,22%
3.30.01.2.06.09	sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.250.000	76.173.259	46,38%
3.30.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	630.775.578	63.400.000	10,05%
3.30.01.2.07.06	sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	630.775.578	63.400.000	10,05%
3.30.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.524.233.362	2.823.290.845	43,27%
3.30.01.2.08.02	sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.423.583.322	2.358.752.504	43,49%
3.30.01.2.08.04	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.100.650.040	464.538.341	42,21%
3.30.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.383.227.030	781.388.990	32,79%
3.30.01.2.09.02	sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	623.272.430	239.925.865	38,49%
3.30.01.2.09.05	sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	14.544.000	14.500.000	99,70%
3.30.01.2.09.06	sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	443.388.600	296.447.125	66,86%
3.30.01.2.09.09	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.302.022.000	230.516.000	17,70%
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	185.470.000	48.609.062	26,21%
3.30.02.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	185.470.000	48.609.062	26,21%

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
3.30.02.2.01.01	sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	185.470.000	48.609.062	26,21%
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	25.024.010.424	8.555.214.593	34,19%
3.30.03.2.01	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18.303.702.157	5.642.107.168	30,82%
3.30.03.2.01.01	sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.532.518.357	2.441.847.940	25,62%
3.30.03.2.01.02	sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.771.183.800	3.200.259.228	36,49%
3.30.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	6.720.308.267	2.913.107.425	43,35%
3.30.03.2.02.01	sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.951.728.082	1.665.090.943	42,14%
3.30.03.2.02.02	sub kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.768.580.185	1.248.016.482	45,08%
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.191.351.100	2.692.165.763	84,36%
3.30.04.2.02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.191.351.100	2.692.165.763	84,36%
3.30.04.2.02.02	sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.191.351.100	2.692.165.763	84,36%
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	631.145.000	253.481.530	40,16%
3.30.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	631.145.000	253.481.530	40,16%
3.30.05.2.01.01	sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	37.143.000	34.897.400	93,95%
3.30.05.2.01.02	sub kegiatan Pameran Dagang Nasional	594.002.000	218.584.130	36,80%
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.127.846.200	479.948.579	42,55%
3.30.06.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1.127.846.200	479.948.579	42,55%
3.30.06.2.01.01	sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	552.044.000	264.104.592	47,84%
3.30.06.2.01.02	sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	575.802.200	215.843.987	37,49%
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	782.482.200	326.213.960	41,69%
3.30.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	782.482.200	326.213.960	41,69%
3.30.07.2.01.01	sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	524.000.000	161.525.001	30,83%
3.30.07.2.01.02	sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	258.482.200	164.688.959	63,71%
	Total	64.193.717.162	28.500.263.765	44,40%

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 7 program, dan 33 sub kegiatan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sebesar Rp.64.193.717.162. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp.28.500.263.765. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp.35.693.453.397.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, Bidang Bina Usaha, Bidang Penataan dan Penetapan, Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	
Tujuan : Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen	jumlah PDRB sub sektor perdagangan	23538 464.13 juta rupiah	25186 156.62 juta rupiah	26949 187.59 juta rupiah	28835 630.72 juta rupiah	30854 124.87 juta rupiah	33013 913.61 juta rupiah	23538 464.13 juta rupiah	25186 156.62 juta rupiah	belum ada rilis data				26949187. 59 juta rupiah
Sasaran : Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	34 %	38 %	42 %	46 %	50 %	54 %	34 %	36 %	36%				42 %
Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	0	3 %	3 %	4 %	4 %	4 %	0	3%	0,5%				3 %
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,11 %	4,05 %	3,99 %	3,93 %	3,87 %	3,80 %	4,11 %	4,05%	4,05%				3,99 %
Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	66 %	71 %	76 %	81 %	86 %	91 %	66 %	71 %	71%				76 %

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen” memiliki satu indikator kinerja yaitu “jumlah PDRB sub sektor perdagangan”, target sebesar 26.949.187,59 juta rupiah belum dapat tercapai;
- b. Sasaran “Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan” memiliki indikator kinerja “Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya”, belum dapat mencapai target sebesar 42%, dengan realisasi sebesar 38%;
- c. Sasaran “Peningkatan nilai ekspor non migas” memiliki indikator kinerja “Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas”, belum dapat mencapai target sebesar 0,5%;
- d. Sasaran “Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” memiliki indikator kinerja “Persentase koefisien variasi harga antar waktu” belum dapat mencapai target sebesar 4,05%;
- e. Sasaran “Peningkatan kualitas perlindungan konsumen” memiliki indikator kinerja “Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku” belum dapat mencapai target sebesar 76%, dengan realisasi sebesar 71%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan OPD sektor perdagangan diarahkan untuk :

- a. penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri;
- b. peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
- c. optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk;
- d. peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di bidang perdagangan diantaranya :

- a. kurangnya sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri;
- b. belum optimalnya fasilitasi sistem distribusi perdagangan;
- c. belum stabilnya harga kebutuhan pokok masyarakat dan rendahnya penggunaan produk dalam negeri;

- d. kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban di bidang standarisasi dan perlindungan konsumen;
- e. belum optimalnya penanganan dan pengawasan perdagangan berbasis sistem elektronik.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Produk kepokmas dalam negeri belum diketahui peta lokasi, volume dan masa panen
- 2) Penggunaan produk – produk impor untuk konsumsi masih tinggi;
- 3) Negara-negara pengimpor banyak yang melakukan peningkatan hambatan masuk utamanya pasar Eropa dan Amerika terhadap produk-produk dari negara yang pasarnya terus berkembang (emerging market) termasuk produk dari Kota Semarang
- 4) Adanya tuntutan pasar terhadap kualitas barang yang harus memenuhi Standard Internasional (negara tujuan ekspor);
- 5) Belum adanya sistem perlindungan konsumen yang terintegrasi dan masih rendahnya kapasitas/kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan perlindungan konsumen
- 6) Upaya pengawasan dan penegakan hukum yang harus lebih konkrit dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha dan konsumen

b. Peluang

- 1) Sebaran UMKM semakin tinggi dan produk berkualitas;
- 2) Penggunaan IT sebagai sistem untuk Perdagangan;
- 3) Adanya upaya dari pemerintah tentang pengamanan akses pasar komoditas Kota Semarang dari tuduhan dagang oleh negara lain yang menghambat ekspor (Dumping, Subsidy, Safeguard) dan fasilitasi dari pemerintah seperti KITE, Promosi, Konsultasi publik hasil-hasil perundingan bilateral maupun multilateral FTA/PTA dan forum- forum ekspor;
- 4) Adanya keinginan yang kuat diantara stakeholder di bidang ekspor di Kota Semarang untuk meningkatkan ekspor non migas Kota Semarang;
- 5) Dukungan anggaran guna tersusunnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) pemerintah daerah bagi pelaksanaan bidang perlindungan konsumen (pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar, standardisasi, pengembangan mutu barang);

- 6) Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perdagangan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai berikut :

- a. penyediaan informasi pasar dalam rangka mengantisipasi dinamika perubahan pasar dalam dan luar negeri;
- b. peningkatan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan antar daerah dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
- c. optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk;
- d. peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Perdagangan Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PERDAGANGAN				69.214.615.983	URUSAN PERDAGANGAN				69.214.615.983	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	33.257.988.998	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	33.257.988.998	
Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan			100 %	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan				100 %			
Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran			100 %	Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran				100 %			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	5.010.680	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8	5.010.680	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1.879.440	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1.879.440	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4	1.789.280	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4	1.789.280	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1.341.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	1.341.960	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	22.497.422.718	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	22.497.422.718	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174	22.140.253.278	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174	22.140.253.278	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	354.840.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	354.840.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	776.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	776.480	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	776.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	776.480	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	776.480	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	776.480	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana	100%	1.217.372.870	Administrasi Umum Perangkat Daerah		persentase ketersediaan sarana prasarana	100%	1.217.372.870	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			perkantoran OPD					perkantoran OPD			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	182.919.474	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	182.919.474	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	449.580.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	449.580.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120	212.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120	212.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	327.873.396	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	327.873.396	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	630.775.578	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	630.775.578	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	630.775.578	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	630.775.578	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%	6.524.180.122	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%	6.524.180.122	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	5.423.583.322	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	5.423.583.322	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.100.596.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.100.596.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	2.383.227.030	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	2.383.227.030	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	623.272.430	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	623.272.430	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	14.544.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	14.544.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	443.388.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	443.388.600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.302.022.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.302.022.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelayanan pengurusan	100%	185.470.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase pelayanan pengurusan	100%	185.470.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			perizinan tepat waktu					perizinan tepat waktu			
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	185.470.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	185.470.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800	185.470.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800	185.470.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	38%	25.031.101.885	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	38%	25.031.101.885	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	19	18.303.972.157	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	19	18.303.972.157	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	9.532.518.357	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50	9.532.518.357	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	8.771.453.800	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	8.771.453.800	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		jumlah sarana prasarana perdagangan yang	50	6.727.129.728	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah sarana prasarana perdagangan yang	50	6.727.129.728	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			terkendali, aman, tertib			Masyarakat di Wilayah Kerjanya		terkendali, aman, tertib			
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	3.951.728.082	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	3.951.728.082	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	2.775.401.646	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12	2.775.401.646	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,09%	8.043.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,09%	8.043.000.000	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	8.043.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	8.043.000.000	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	12	8.043.000.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	12	8.043.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai ekspor non migas	1,568,676,610	729.327.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai ekspor non migas	1,568,676,610	729.327.000	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui		Persentase pelaku usaha yang	12%	729.327.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui		Persentase pelaku usaha yang	12%	729.327.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		memperoleh fasilitas promosi dagang			Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		memperoleh fasilitas promosi dagang			
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30	36.562.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30	36.562.000	
	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	692.765.000	Pameran Dagang Nasional	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3	692.765.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	71%	1.179.245.900	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	71%	1.179.245.900	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	71%	1.179.245.900	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	71%	1.179.245.900	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	85910	523.296.100	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Semarang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	85910	523.296.100	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50	655.949.800	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Semarang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50	655.949.800	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN		Prosentase UMKM yang mendapat	20%	788.482.200	PROGRAM PENGGUNAAN DAN		Prosentase UMKM yang mendapat	20%	788.482.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PRODUK DALAM NEGERI		fasilitas promosi			PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		fasilitas promosi			
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100	788.482.200	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100	788.482.200	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	530.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30	530.000.000	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20	258.482.200	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20	258.482.200	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Khusus untuk Dinas Perdagangan Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Perdagangan Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Perdagangan Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Jl. Menoreh Raya 12 RT.03/RW.05 RT 03 RW 05 Sampangan	Pelatihan kewirausahaan	1 Kegiatan	Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan ditujukan kepada pelaku usaha potensial ekspor, sehingga usulan tersebut diarahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM
2	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	Balai Kelurahan RT 01 RW 08 Wonosari	Sosialisasi UMKM	1 Kegiatan	Diakomodir

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;

- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
- PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
- PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
- PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
- PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
- PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
- PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
- PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
- PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
- PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
- PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
- PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
- PP 5. Transformasi Digital.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

- PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
- PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.

PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Publik, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
- PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada “**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2023 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;
- b. Prioritas kegiatan tahun 2023 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2023;
- c. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2023 sebagai tahun akhir RPJMD;
- d. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2023;
- e. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
- f. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
- g. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah “**Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasan strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;

- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan mendukung pencapaian prioritas pertama, yaitu “Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pematapan ketahanan bencana”. Sehingga memiliki kewajiban dalam pencapaian target indikator - indikator kinerja terkait sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen”,

dengan indikator tujuan **“jumlah PDRB sub sektor perdagangan”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perdagangan Kota Semarang beserta indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Sasaran “Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan” dengan indikator kinerja “Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya”;
- b. Sasaran “Peningkatan nilai ekspor non migas” dengan indikator kinerja “Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas”;
- c. Sasaran “Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting” dengan indikator kinerja “Persentase koefisien variasi harga antar waktu”;
- d. Sasaran “Peningkatan kualitas perlindungan konsumen” dengan indikator kinerja “Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Tujuan : Peningkatan sistem distribusi, Penguatan ekspor dan Penguatan perlindungan konsumen	jumlah PDRB sub sektor perdagangan	juta rupiah	26.949.187,59
Sasaran : Peningkatan kualitas sarana prasarana perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	42
Peningkatan nilai ekspor non migas	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	3
Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	3,99
Peningkatan kualitas perlindungan konsumen	Kenaikan persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	76

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERDAGANGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan OPD;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Perdagangan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	URUSAN PERDAGANGAN					73.415.499.286	73.415.499.286	69.214.615.983	APBD Kota Semarang	
3.30.01 3.30.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	37.143.389.786	37.143.389.786	33.257.988.998		
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100 %	100 %	100 %					
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	5.010.680	5.010.680	5.010.680		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.879.440	1.879.440	1.879.440		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.789.280	1.789.280	1.789.280		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1.341.960	1.341.960	1.341.960		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan	100%	100%	100%	26.318.120.969	26.318.120.969	22.497.422.718		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174 orang	174 orang	174 orang	25.960.951.529	25.960.951.529	22.140.253.278		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	354.840.000	354.840.000	354.840.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	776.480	776.480	776.480		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Kuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	776.480	776.480	776.480		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	776.480	776.480	776.480		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD	100%	100%	100%	997.747.600	997.747.600	1.217.372.870		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	10.000.000	10.000.000	15.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	152.944.204	152.944.204	182.919.474		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	349.580.000	349.580.000	449.580.000		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 laporan	120 laporan	120 laporan	177.350.000	177.350.000	212.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	277.873.396	277.873.396	327.873.396		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	118.862.741	118.862.741	630.775.578		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	118.862.741	118.862.741	630.775.578		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	8.523.207.796	8.523.207.796	6.524.180.122		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	7.422.610.996	7.422.610.996	5.423.583.322		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	1.100.596.800	1.100.596.800	1.100.596.800		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	1.180.440.000	1.180.440.000	2.383.227.030		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 unit	48 unit	48 unit	623.272.430	623.272.430	623.272.430		
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 buah	10 buah	10 buah	14.544.000	14.544.000	14.544.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 jenis	11 jenis	11 jenis	311.603.570	311.603.570	443.388.600		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 buah	1 buah	2 buah	231.020.000	231.020.000	1.302.022.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu	100%	100%	100%	259.908.200	259.908.200	185.470.000		
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani	100%	100%	100%	259.908.200	259.908.200	185.470.000		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1800 surat	1800 surat	1800 surat	259.908.200	259.908.200	185.470.000		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	42%	42%	42%	30.235.456.800	30.235.456.800	25.031.101.885		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki	20 pasar	20 pasar	20 pasar	23.790.322.900	23.790.322.900	18.303.972.157		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	50 pasar	50 pasar	50 pasar	15.377.597.100	15.377.597.100	9.532.518.357		
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 pasar	50 pasar	50 pasar	8.412.725.800	8.412.725.800	8.771.453.800		
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib	50 pasar	50 pasar	50 pasar	6.445.133.900	6.445.133.900	6.727.129.728		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	12 pasar	12 pasar	12 pasar	3.886.059.100	3.886.059.100	3.951.728.082		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 pasar	12 pasar	12 pasar	2.559.074.800	2.559.074.800	2.775.401.646		
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,09%	4,09%	4,09%	3.191.351.100	3.191.351.100	8.043.000.000		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga	100%	100%	100%	3.191.351.100	3.191.351.100	8.043.000.000		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	3.191.351.100	3.191.351.100	8.043.000.000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor non migas	US\$ 1.647.262.739	US\$ 1.647.262.739	US\$ 1.647.262.739	631.145.000	631.145.000	729.327.000		
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	12%	12%	12%	631.145.000	631.145.000	729.327.000		
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 orang	30 orang	30 orang	37.143.000	37.143.000	36.562.000		
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam	3 orang	3 orang	3 orang	594.002.000	594.002.000	692.765.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pameran Dagang								
		Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76%	76%	76%	1.127.846.200	1.127.846.200	1.179.245.900		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76%	76%	76%	1.127.846.200	1.127.846.200	1.179.245.900		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	85910 unit	85910 unit	85910 unit	552.044.000	552.044.000	523.296.100		
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 orang	50 orang	50 orang	575.802.200	575.802.200	655.949.800		
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi	20%	20%	20%	826.402.200	826.402.200	788.482.200		
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi	100 orang	100 orang	100 orang	826.402.200	826.402.200	788.482.200		
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 orang	30 orang	30 orang	575.000.000	575.000.000	530.000.000		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 orang	20 orang	20 orang	251.402.200	251.402.200	258.482.200		

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan ini berpedoman pada Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perdagangan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perdagangan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

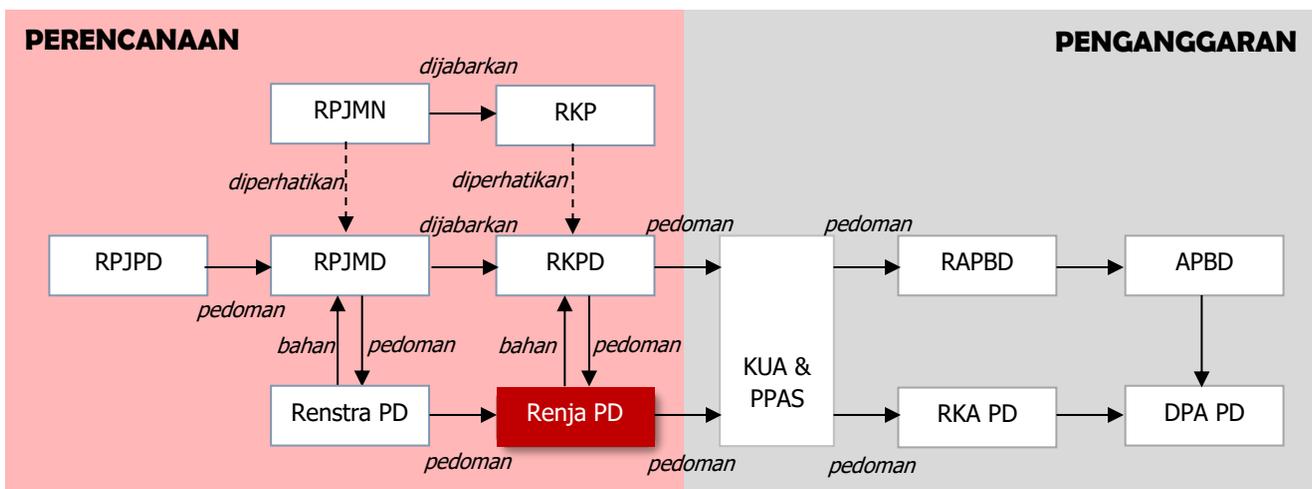
Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk mengatasi adanya ketidaksesuaian antara perkembangan yang terjadi dengan asumsi kerangka keuangan daerah yang telah ditetapkan. Adanya dinamika perekonomian dan iklim yang terjadi baik di level nasional maupun regional tentunya mempengaruhi struktur keuangan pada APBD Tahun 2023. Selain itu, adanya penyesuaian antara pendapatan dan belanja daerah juga menuntut untuk dilakukannya penyesuaian terhadap rencana program serta kegiatan di tahun 2023.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Perindustrian Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;

- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang;
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Perindustrian Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	6 Dokumen	60%	16 dokumen	32%
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	6 Dokumen	60%	16 dokumen	32%
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan dan RTP Dinas Perindustrian	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33%	4 Dokumen	27%
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	40%
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	20%
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA DISPERIN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	20%
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen LKJIP ; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	6 Dokumen	40%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%	20%	100%	50%	50%	70%	70%
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor	100%	20%	100%	50%	50%	70%	70%
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	20%	100%	50%	50%	70%	70%
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	20%	100%	50%	50%	70%	70%
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	20%
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	20%
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	20%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Anggaran Dinas Perindustrian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	20%
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%	20%	20%	20%	100%	40%	40%
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan	100%	20%	20%	20%	100%	40%	40%
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%	2 Kegiatan	40%
		Persentase tersedianyan Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%	25%	100%	50%	50%	75%	75%
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	25%	100%	50%	50%	75%	75%
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83 Jenis	13 Jenis	17 Jenis	8 Jenis	47 %	21 jenis	25%
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	102 Jenis	27 Jenis	24 Jenis	15 Jenis	63 %	42 Jenis	41%
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	205 Jenis	38 Jenis	52 Jenis	10 Jenis	20 %	48 Jenis	23%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang dan Cetak dan Penggandaan	60 Jenis	12 Jenis	13 Jenis	6 Jenis	46%	18 Jenis	30%
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	6300 Orang	900 Orang	700 Orang	400 Jenis	57%	1300 Orang	21%
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat dan Konsultasi Dinas Perindustrian	65 Kegiatan	25 Kegiatan	10 Kegiatan	4 Kegiatan	40%	29 Kegiatan	45%
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	25 Jenis	14 Jenis	6 Jenis	2 Jenis	33%	16 jenis	64%
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	20%	100%	20%	20%	40%	40%
3.31.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah tersedianya Mebel	5 Unit	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 unit	20%
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	1 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	40%	3 jenis	60%
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor - DISPERIN	5 Jenis	1 Jenis	5 Jenis	2 Jenis	40%	3 jenis	60%
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20%	100%	20%	20%	40%	40%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	20%	100%	41,67%	42%	61,67%	61,67%
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	20%	100%	41,67%	42%	61,67%	61,67%
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	20%	100%	41,67%	42%	61,67%	61,67%
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	20%	100%	20%	20%	40%	40%
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	40%
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100 Unit	20 unit	19 Unit	10 Unit	53%	30 Unit	30%
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	0 Unit	1 Unit	120 Unit	12 Unit	10%	13 unit	0%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 unit	7%
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	0 unit	0%
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	100%	20%	100%			80%	95,24%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan Sentra IKM	5 Sentra IKM	1 Sentra IKM	1 Sentra IKM	0 Sentra IKM	0 Sentra IKM	1 Sentra IKM	20%
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK - PERDA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 dokumen	100%
		Jumlah Sosialisasi dan evaluasi PERDA - RPIK	4 Sosialisasi	1 Sosialisasi	1 Sosialisasi	0 Sosialisasi	0%	1 sosialisasi	25%
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Penguatan Sentra IKM	20 Sentra IKM	4 Sentra IKM	4 Sentra	2 Sentra	50%	6 sentra	30%
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	5 Sentra IKM	1 Sentra IKM	1 Sentra	0 Sentea	0%	1 sentra	20%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Temu Usaha Industri	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 kegiatan	33%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Operasional Gedung Creative Maker Space	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Persentase Pengembangan sentra IKM	100%	20 %	20 %	10%	50%	30%	30%
		Persentase tahapan perencanaan dan perijinan (KIHT)	100%	70%	100%	10%	10%	80%	80%
		Jumlah Gedung Creative Maker Space	0 Gedung	0%	1 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	0 gedung	0%
		Persentase Operasional Gedung Sentra IKM	100%	20%	100%	40%	40%	60%	60%
		Jumlah Dokumen FS dan DED Creative Maker Space	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 dokumen	100%
		Jumlah Katalog Industri Rokok	5 Katalog	0 Katalog	0 Katalog	0 Katalog	0 %	0 Katalog	0%
		Persentase Pertambahan IKM	2,5%	0,5	0,5%	0 %	0%	0,5%	0%
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pertambahan IKM	100 IKM	20 IKM	20 IKM	0 IKM	0 IKM	0 IKM	0%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang Terfasilitasi HKI	360 IKM	100 IKM	90 IKM	10 IKM	11%	110 IKM	31%
		Jumlah Partisipasi Promosi / Pameran IKM	10 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	1 Kegiatan	10%
		Jumlah Workshop/Sosialisasi/ Pelatihan Industri kreatif/start up atau pelaku usaha/ link and match/ Semarang online sale	3930 IKM	660 IKM	660 IKM	100 IKM	15%	760 IKM	19%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang Terfasilitasi PIRT/ Halal / BPOM	1320 IKM	270 IKM	270 IKM	90 IKM	33%	360 IKM	27%
		Jumlah IKM yang Terfasilitasi SNI	375 IKM	30 IKM	20 IKM	5 IKM	4%	35 IKM	9%
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Terlaksananya Moneyv Industri	10 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	1 Kegiatan	10%
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	100%	99,68%	4%	10,03% (50,17% pelaksanaan renja)	10,03% (50,17% pelaksanaan renja)	3,5%	88%

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	75 IKM	17 IKM	15 IKM				
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	105 Izin	21 Izin	21 Izin	15 Izin	71%	36 izin	34%
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI, IPUI, IUKI, IPKI	260 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	10 Kegiatan	25%	50 kegiatan	19%
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	2,5 %	0,5 %	0,5%				

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	20%	4 %	4%				
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM dan perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	100 IKM	20 IKM	20 IKM	10 IKM	50%	30 IKM	30%
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Diseminasi/ sosialisasi data informasi dan analisa industri	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	40%
		Jumlah Profil Sentra IKM dan Kawasan Industri	10 Buku	2 Buku	2 Buku	0 Buku	0%	2 Buku	20%
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang patuh dalam Penyampaian Data	100 IKM	20 IKM	20 IKM	10 IKM	50%	30 IKM	30%

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023 sampai Triwulan II Dinas Perindustrian Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 4 Program dan 8 Indikator Kinerja Program dan 42 Kegiatan dengan 55 Indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 55 Indikator kinerja kegiatan sampai triwulan II Tahun 2022, terdapat indikator yang belum sesuai target, karena masih dalam proses berkegiatan yang belum selesai 100%. Semua Indikator pada Renja Tahun 2023 diperkirakan akan memenuhi target 100% pada Triwulan IV Tahun 2023
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 4 Program dengan 8 indikator program dan 42 kegiatan dengan 55 indikator kinerja kegiatan.
 - b) Dari 8 indikator kinerja program, terdapat 8 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target.
 - c) Dari 55 indikator kinerja kegiatan, terdapat 55 indikator yang diperkirakan dapat memenuhi target Renstra.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Perindustrian Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Perindustrian Kota Semarang Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
Urusan Pilihan: Perindustrian				
OPD: Dinas Perindustrian		25.463.705.989	7.342.691.384	28,84%
	Belanja Tidak Langsung	5.956.353.763	3.286.651.077	55,18%
	Belanja Pegawai	5.956.353.763	3.286.651.077	55.18%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
1	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.834.524.003	3.256.611.077	55,82%
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121.829.760	30.040.000	24,66%
	Belanja Langsung	19.507.352.226	4.056.040.307	20,79%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.157.567.841	1.273.805.767	40,34%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.699.940	3.962.200	23,73%
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.921.080	0	0,00%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.363.680	0	0,00%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.845.590	0	0,00%
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.363.680	1.080.000	45,69%
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.845.590	0	0,00%
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.360.320	2.882.200	66,10%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.744.185	10.848.985	85,13%
	a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.558.905	8.558.905	100,00%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.090.080	1.090.080	100,00%
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.400.000	1.200.000	50,00%
	d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	695.200	0	0,00%
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.000.000	78.636.000	82,77%
	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	95.000.000	78.636.000	82,77%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	948.871.293	335.712.415	35,38%
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.300.000	5.397.500	19,77%
	b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	10.866.700	27,17%
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.524.621	51.655.000	43,95%
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	22.882.200	41,60%
	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.965.000	17.663.500	32,14%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.507.000	48.917.515	17,95%
	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	381.574.672	178.330.000	46,74%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.267.894	117.110.620	70,43%
	a. Pengadaan Mebel	166.267.894	117.110.620	70,43%
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000	0	0,00%
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000	0	0,00%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.597.730.129	588.112.325	36,81%
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	379.775.729	94.803.185	24,96%
	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000	22.551.600	41,76%
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.163.954.400	470.757.540	40,44%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.254.400	139.423.222	43,54%
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.400.000	16.232.222	44,59%
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265.100.000	113.211.000	42,71%
	c. Pemeliharaan Mebel	8.726.400	0	0,00%
	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.980.000	99,80%
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000	0	0,00%
NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
B	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	15.400.398.898	2.385.385.040	15,49%
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	15.400.398.898	2.385.385.040	15,49%
	a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000	3.207.000	3,21%
	b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	701.309.205	229.635.740	32,74%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	832.803.525	297.598.228	35,73%
	d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	355.239.850	63.735.400	17,94%
	e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13.241.786.318	1.663.867.132	12,57%
	f. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	169.260.000	127.341.540	75,23%
C	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	316.460.000	139.368.000	44,04%
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	316.460.000	139.368.000	44,04%
	a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan \ Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	273.060.000	119.019.000	43,59%
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	43.400.000	20.349.000	46,89%
D	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	632.925.487	257.481.500	84,4
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	632.925.487	257.481.500	84,4
	a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	265.000.000	253.164.500	94,22
	b. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	343.085.487	0	86,39
	c. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas	24.840.000	4.317.000	26,77

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023 sampai triwulan II, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 4 program dan 10 kegiatan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah sebesar Rp 25.463.705.989. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.342.691.384. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 18.121.014.605,00 (71,2%)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian adalah melaksanakan fungsi sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam mencapai target Misi 2 RPJMD 2021 -2026 yaitu meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri yang berkelanjutan, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (%)					REALISASI (%)					PROYEKSI (%)
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2023
Tujuan: Meningkatkan Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri Pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	28,66	28,70	28,72	28,74	28,76	28,85	TW II 0,00	-	-	-	28,85
Sasaran I: Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,24	TW II 0,00	-	-	-	0,5
Sasaran II: Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perindustrian	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	95%	TW II 34,00	-	-	-	100

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “Meningkatkan Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri Pengolahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu ”Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB ”, target sebesar 28,70% belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar NA (capaian NA);
- b. Sasaran I “Meningkatkan produktivitas industri kecil dan menengah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah” belum dapat mencapai target sebesar 0,5 %, dengan realisasi sebesar 0,00 % (capaian sebesar 0,00 %);
- c. Sasaran II “Meningkatnya kinerja pelayanan dinas perindustrian” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD” belum dapat mencapai target sebesar 100 %, dengan realisasi sebesar 34,00 % (capaian sebesar 34,00 %);

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, permasalahan utama di Kota Semarang yang terkait dengan dinas perindustrian adalah pada permasalahan ke-2 yaitu “Produktifitas dan Daya saing potensi ekonomi lokal masih perlu ditingkatkan”.
- b. Permasalahan utama Pembangunan Jangka Menengah Dinas Perindustrian yaitu “Belum optimalnya kontribusi ekonomi sektor industri pengolahan”.
- c. Untuk ketercapaian peningkatan kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan dan peningkatan produktivitas industri kecil dan menengah, maka Dinas Perindustrian melakukan strategi penguatan dan pengembangan IKM dan Sentra IKM dengan arah kebijakan dengan melakukan berbagai kegiatan bernilai tambah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Perindustrian Kota Semarang diantaranya:

- a. Belum berkembangnya IKM dan Sentra IKM
- b. Belum adanya data industri
- c. Belum optimalnya pelayanan Dinas Perindustrian

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- ❖ Tuntutan konsumen akan jaminan mutu/standard produk
- ❖ Permasalahan IKM terkait:
 - Keterampilan SDM IKM yang belum memadai
 - Kapasitas mesin/peralatan IKM yang belum optimal berdampak pada kualitas dan kuantitas produk
 - Strategi pemasaran yang belum tepat
 - Inovasi produk IKM agar bisa lebih kompetitif
 - Banyaknya usaha IKM yang belum berijin
- ❖ Me-link and match-kan IKM di Kota Semarang dengan stakeholder sehingga produk IKM bisa terserap
- ❖ Data IKM yang akurat untuk pengembangan dan pembinaan
- ❖ Masuknya era industri 4.0 yang membutuhkan kreativitas, budaya inovasi yang tinggi mendorong pengembangan start up dan sektor industri kreatif
- ❖ Pembinaan dan pengembangan sentra industri dan kawasan industri di Kota Semarang

b. Peluang:

- ❖ Pasar produk IKM skala regional, nasional maupun Internasional (ekspor) masih besar. Kota Semarang yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa serta industri merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional. KEDUNGSEPUR dan segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR. Untuk itu mendorong IKM untuk meningkatkan produksi dan penjualan, terpenuhinya standard produk dan legalitas usaha/produk (adanya kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menggunakan layanan melalui OSS (Online Single Submissions), PIRT).
- ❖ Berkembangnya sistem pemasaran melalui media elektronik (online) dapat mempermudah/meningkatkan jaringan distribusi penjualan bagi IKM dan mendorong membuka pasar global.

- ❖ Keuntungan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi dengan banyak diselenggarakannya pertemuan, pameran, dan event budaya baik skala provinsi maupun nasional di setiap tahunnya membuka peluang dan diharapkan dapat membantu IKM dari sisi promosi dan pemasaran.
- ❖ Terbentuknya sentra-sentra industri dan adanya beberapa kawasan industri di Kota Semarang tentunya dapat dijadikan suatu modal bagi pelaku industri/IKM untuk mengembangkan jaringan kerja sama dan pemasaran serta melakukan inovasi produknya.
- ❖ Tumbuhnya industri kreatif di berbagai sektor menjadi peluang start up untuk berkembang, menciptakan wirausaha baru dan tenaga kerja baru. Keberadaan creative hub dan creative maker space menjadi penting sebagai sebuah ruang multifungsi bagi apresiasi karya serta lahirnya ide-ide kreatif.
- ❖ Ketentuan produk ekspor ber SNI akan memacu pelaku usaha/IKM untuk memperoleh sertifikasi terkait HKI dan SNI atas barang yang diproduksinya.
- ❖ Berkembangnya toko Swalayan, mall dan hotel di kota semarang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemasaran produk-produk IKM.
- ❖ Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang sebagai aspek pendukung daya saing, antara lain: Sarana jalan yang baik, tersedianya Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Stasiun Kereta api Tawang dan Poncol, dan beberapa terminal bus/angkutan di Kota Semarang, akan lebih memudahkan pelaku usaha dalam melakukan transaksi dan distribusi produknya.
- ❖ Terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang pelaksanaannya berlokasi di Kota Semarang selama periode lima tahun yang akan datang, seperti:
 - Tol Semarang Demak dan Tanggul Laut
Dengan adanya jalan tol dan tanggul laut tersebut akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan mendorong pertumbuhan industri karena mendukung kemudahan aksesibilitas aktivitas logistik kawasan industri di sepanjang superkoridor ekonomi Pantai Utara Jawa
 - Pembangunan Outer Ring Road Kendal-Semarang (Harbor Toll)
Keberadaan Harbour Toll Semarang-Kendal akan terhubung dengan lima proyek strategis nasional di antaranya Kawasan Industri Kendal, Bandara International Ahmad Yani Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang-Batang
 - Pembangunan Jalur Rel dari Tanjung Mas Menuju Kendal Sea Port

Integrasi dua pelabuhan ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi khususnya setelah pembangunan Kawasan Industri Kendal Pengangkutan dengan kereta akan menekan biaya logistik, lebih cepat dan tentu mengurangi beban dan kerusakan jalan raya. Dengan adanya pembangunan jalur rel maka akan terjadi perubahan pola angkutan yang selama ini diangkut dengan truk akan berubah menjadi jalur kereta khususnya untuk barang dalam jumlah atau ukuran besar.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Peningkatan Industri Kecil dan Menengah serta industri kreatif
- b. Penguatan dan peningkatan sentra-sentra industri

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Semarang				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Kota Semarang				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	9.114.021.604			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	9.504.021.972	-
			Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%				Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%		
			Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%				Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9 Dokumen	16.699.940	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9 Dokumen	17.261.958	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja, RTP dan Renja Perubahan Dinas Perindustrian	3 Dokumen	1.921.080	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas Perindustrian	2 Dokumen	1.579.830	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.363.680	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	3.529.520	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.845.590	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	4.123.048	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.363.680	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1.970.520	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.845.590	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	2.304.048	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKJIP; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 dokumen	4.360.320	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen LKJIP; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 dokumen	3.754.992	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	5.969.097.948	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	6.320.578.675	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.834.524.003	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	6.055.988.675	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	121.829.760	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	254.910.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	8.558.905	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	8.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Laporan	1.090.080	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/se	12 Lapora	2.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		Jumlah laporan keuangan Semesteran Dinas Perindustrian	1 Dokumen	340.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		mesteran Dinas Perindustrian			Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	695.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	340.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	948.871.293	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	1.202.599.899	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17 Paket	27.300.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Jenis	21.340.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	24 Paket	40.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga	27 Jenis	37.600.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	52 Paket	117.524.621	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor	46 Jenis	88.500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	13 Paket	55.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	14 Jenis	80.600.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	244 Laporan	54.965.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Kunjungan Tamu	1000 Orang	58.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	10 laporan	272.507.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	25 Kegiatan	219.109.899	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Dokumen yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	6 Dokumen	381.574.672	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	14 Jenis	696.950.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	166.367.894	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	83.200.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	166.267.894	Pengadaan Mebel		Jumlah Tersedianya Mebel	41 Unit	59.700.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	50.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	100.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	0 Unit	50.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	4 Jenis	23.400.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.597.730.129	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.571.281.440	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	379.775.729	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase Penyediaan Jaas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	401.126.440	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Laporan	54.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.163.954.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1.104.855.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	320.254.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	309.100.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	1 unit	36.400.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	19 unit	265.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	268.700.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebel	120 Unit	8.726.400	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Pemeliharaan Mebel	52 Unit	3.800.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Gedung	100.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	28.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	100.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
			Persentase Pertambahan IKM	0,50 %	15.400.398.898			Persentase Pertambahan IKM	0,50 %	13.069.218.767	
			Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	88 %				Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	84 %		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
			Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	15.400.398.898			Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	13.069.218.767	
			Jumlah Pertambahan Sentra IKM	20 Sentra IKM				Jumlah Pertambahan Sentra IKM	20 Sentra IKM		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	108.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan,	6 Dokumen	701.309.205	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan,	6 Dokumen	701.309.205	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	832.803.525	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	19 Dokumen	832.803.525	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	355.239.850	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen	355.239.850	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	6.273.331.076	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	6.273.331.076	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	169.260.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	169.260.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	316.460.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	196.950.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan	2 Dokumen	273.060.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan	2 Dokumen	273.060.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS			Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	43.400.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	43.400.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	632.925.487	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	632.925.487	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.		Tersedianya Informasi Industri untuk informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	632.925.487	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.		Tersedianya Informasi Industri untuk informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	632.925.487	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	2 Dokumen	265.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data	2 Dokumen	265.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).		Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	343.085.487	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3 Dokumen	343.085.487	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	24.840.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke S	1 Dokumen	24.840.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Perindustrian juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Perindustrian Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Perindustrian Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Perubahan Tahun 2023
Dinas Perindustrian Kota Semarang

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	FGD Perijinan	Kota Semarang	Terlaksana acara FGD Perijinan	1 kegiatan	Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinas perindustrian juga sudah mengakomodir pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan upaya – upaya pengentasan kemiskinan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- PP 2. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- PP 3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
- PP 4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
- PP 5. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi;
- PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- PP 7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri;
- PP 8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :

- PP 1. Pembangunan Wilayah Sumatera;
- PP 2. Pengembangan Wilayah Jawa-Bali;
- PP 3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
- PP 4. Pembangunan Wilayah Kalimantan;
- PP 5. Pembangunan Wilayah Sulawesi;
- PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku;
- PP 7. Pengembangan Wilayah Papua.

- PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
- PP 1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
 - PP 2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
 - PP 3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - PP 4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
 - PP 5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 - PP 6. Pengentasan Kemiskinan;
 - PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
- PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
- PP 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokoh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter;
 - PP 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia;
 - PP 3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial;
 - PP 4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter.
- PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
- PP 1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
 - PP 2. Infrastruktur Ekonomi;
 - PP 3. Infrastruktur Perkotaan;
 - PP 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
 - PP 5. Transformasi Digital.
- PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
- PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - PP 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - PP 3. Pembangunan Rendah Karbon.
- PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**, dijabarkan menjadi program prioritas sebagai berikut :
- PP 1. Konsolidasi Demokrasi;
 - PP 2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

- PP 3. Penegakan Hukum Nasional;
- PP 4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- PP 5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,2 – 6,0 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,5 – 6,3 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,41 – 73,46;
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26,87 %.

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut :

- PD 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- PD 2 Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- PD 3 Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
- PD 4 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Angka Kemiskinan sebesar 11,42 – 10,27 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,96 – 5,88 %;
- c. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,93 – 5,20 %;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,43.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang

dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Selain itu secara umum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2023 difokuskan pada mengontrol harga komoditas. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang di akhir tahun 2023 ditargetkan mencapai 5,5 – 6,0%. Sejalan dengan target tersebut, maka pembangunan ekonomi Kota Semarang pada tahun 2023 diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan peningkatan potensi ekonomi lokal sebagai upaya pemulihan ekonomi dan mendukung kebijakan pembangunan Kota Semarang.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah “Pemantapan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan sistem kesehatan menuju masyarakat sejahtera” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Ekonomi Lokal; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal;
- b. Fasilitasi sarana prasarana untuk berusaha;
- c. Peningkatan investasi;
- d. Peningkatan kunjungan wisatawan;
- e. Penguatan ketahanan pangan.

P2 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Perbaikan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar dan keberlanjutan pendidikan untuk semua;
- c. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional;
- d. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien;
- e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- g. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan,

P3 Pemenuhan Hak Dasar Serta Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran yang Berkeadilan; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- a. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan upaya perlindungan sosial;

- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- d. Penguatan kampung tematik produktif;
- e. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya.

P4 Percepatan Penyediaan Infrastruktur Berkualitas yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan untuk Menunjang Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Pemenuhan infrastruktur perekonomian;
- b. Pengembangan kawasa strategis kota;
- c. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru;
- d. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- f. Pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- h. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif dan Efisien; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas keuangan daerah;
- b. Peningkatan manajemen pengendalian internal;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,5 - 6,0 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 28,70 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,68 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 24.086.799 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,50 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,20 – 83,60 poin;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 95,65 poin;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,24 – 4,34 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,7 – 9,0 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perindustrian memiliki tugas membantu Walikota dalam mencapai target Misi 2 RPJMD 2021 -2026 yaitu meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri yang berkelanjutan, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing perekonomian

masyarakat melalui peningkatan produk unggulan daerah. Pembangunan dan pengembangan industri jasa dan perdagangan juga dilakukan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing masyarakat dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri Pengolahan”,
dengan indikator tujuan **“Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB.”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perindustrian Kota Semarang yaitu *“Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Perindustrian”*, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah.
- b. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Disperin Semarang Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ sasaran pada Tahun ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan kontribusi IKM terhadap sektor industri pengolahan		Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB	28,66	28,70	28,72	28,74	28,76
		Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM)	Persentase pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah.	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dinas Perindustrian memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan *“Persentase kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB”* dan indikator sasaran *“Meningkatnya Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian”* ;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perindustrian Kota Semarang;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Perindustrian Kota Semarang

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	9.927.257.406	10.227.257.406	9.504.021.972	
		Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian	100%	100%	100%				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian	100%	100%	100%				
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian	100%	100%	100%				
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	17.261.958	17.261.958	17.261.958	
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas Perindustrian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.579.830	1.579.830	1.579.830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.529.520	3.529.520	3.529.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokument Perubahan RKA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.123.048	4.123.048	4.123.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.970.520	1.970.520	1.970.520	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.304.048	2.304.048	2.304.048	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP; LKPJ dan LPPD Dinas Perindustrian	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3.754.992	3.754.992	3.754.992	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	7.006.124.000	7.006.124.000	6.320.578.675	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	6.795.684.000	6.795.684.000	6.055.988.675	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	260.760.000	260.760.000	254.910.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Semesteran Dinas Perindustrian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	340.000	340.000	340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	340.000	340.000	340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	535.116.000	535.116.000	1.202.599.899	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	13 Jenis	21.340.000	21.340.000	21.340.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	20 Jenis	27 Jenis	37.600.000	37.600.000	37.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	40 Jenis	40 Jenis	46 Jenis	43.400.000	43.400.000	88.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	12 Jenis	14 Jenis	70.000.000	70.000.000	80.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu	1250 Orang	1250 Orang	1000 Orang	45.000.000	45.000.000	58.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Perindustrian	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	115.426.000	115.426.000	219.109.899	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Perindustrian	5 Jenis	5 Jenis	14 Jenis	202.350.000	202.350.000	696.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	35.050.000	35.050.000	83.200.000	
3.31.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Unit	1 Unit	41 Unit	30.850.000	30.850.000	59.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100.000	100.000	100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Disperin	1 Jenis	1 Jenis	4 Jenis	4.100.000	4.100.000	23.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.866.405.448	1.866.405.448	1.571.281.440	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jaas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	711.550.448	711.550.448	401.126.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100%	1.104.855.000	1.104.855.000	1.104.855.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian	100%	100%	100%	307.300.000	307.300.000	309.100.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Mobil Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	36.400.000	36.400.000	36.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	20 unit	20 unit	20 unit	268.700.000	268.700.000	268.700.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 Unit	1 Unit	52 Unit	2.000.000	2.000.000	3.800.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100.000	100.000	100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100.000	100.000	100.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
		Persentase Pertambahan IKM	0,50 %	0,50 %	0,50 %	4.706.808.594	13.700.181.594	13.069.218.767	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM	84 %	84 %	84 %				
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
		Jumlah Pertambahan IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	4.706.808.594	13.700.181.594	13.069.218.767	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	20 Sentra IKM	20 Sentra IKM	20 Sentra IKM				
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	108.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Penguatan Sentra IKM	4 Sentra	4 Sentra	4 Sentra	345.000.000	345.000.000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah Pertambahan Sentra IKM	1 Sentra	1 Sentra	1 Sentra				
		Jumlah Temu Usaha Industri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi HKI	90 IKM	90 IKM	25 IKM	1.103.990.281	1.103.990.281	575.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah Partisipasi Pameran IKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
		Jumlah Workshop/sosialisasi/pelatihan industri kreatif/start up atau pelaku usaha/link and match/semarang online sale	660 IKM	660 IKM	260 IKM				
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terfasilitasi HACCP	270 IKM 90 IKM	270 IKM 90 IKM	100 IKM	460.000.000	460.000.000	435.628.047	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah IKM yang terfasilitasi Halal			20 IKM				
		Jumlah IKM yang terfasilitasi PIRT			100 IKM				
		Jumlah IKM yang terfasilitasi SNI			20 IKM				
		Jumlah Mesin Pelinting Rokok yang terdata			10 Mesin				
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan FS Creative Maker Space	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.557.818.313	11.551.191.313	11.635.900.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD) DBHCHT, DAK Fisik
		Jumlah Peningkatan SDM Industri Tembakau	450 IKM						
		Presentase Operasional Gedung Sentra IKM Logam	100 %	100 %	100 %				
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Terlaksananya Kegiatan IKM Fashion Award	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	170.000.000	170.000.000	140.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	4%	4%	4%	210.000.000	210.000.000	196.950.000	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif	15 IKM	15 IKM	15 IKM	210.000.000	210.000.000	196.950.000	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI	21 Izin	21 Izin	21 Izin	140.000.000	140.000.000	126.950.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI, UIPI, UIKI, IPKI	40 Kegiatan	40 Kegiatan	40 Kegiatan	70.000.000	70.000.000	70.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Data Informasi Industri	0.50 %	0.50 %	0.50 %	355.000.000	355.000.000	123.466.920	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.	Tersedianya Informasi Industri untuk informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	4 Persen	4 Persen	4 Persen	355.000.000	355.000.000	123.466.920	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	Jumlah IKM dan Perusahaan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS	20 IKM	20 IKM	20 IKM	215.000.000	215.000.000	8.071.920	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas.	Jumlah Diseminasi/sosialisasi data informasi dan analisa industri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Jumlah Profil sentra IKM dan Kawasan Industri	2 Buku	2 Buku	2 Buku				
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang patuh dan penyampaian Data	20 IKM	20 IKM	20 IKM	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian ini berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Perindustrian;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Perindustrian ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perindustrian Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perindustrian Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

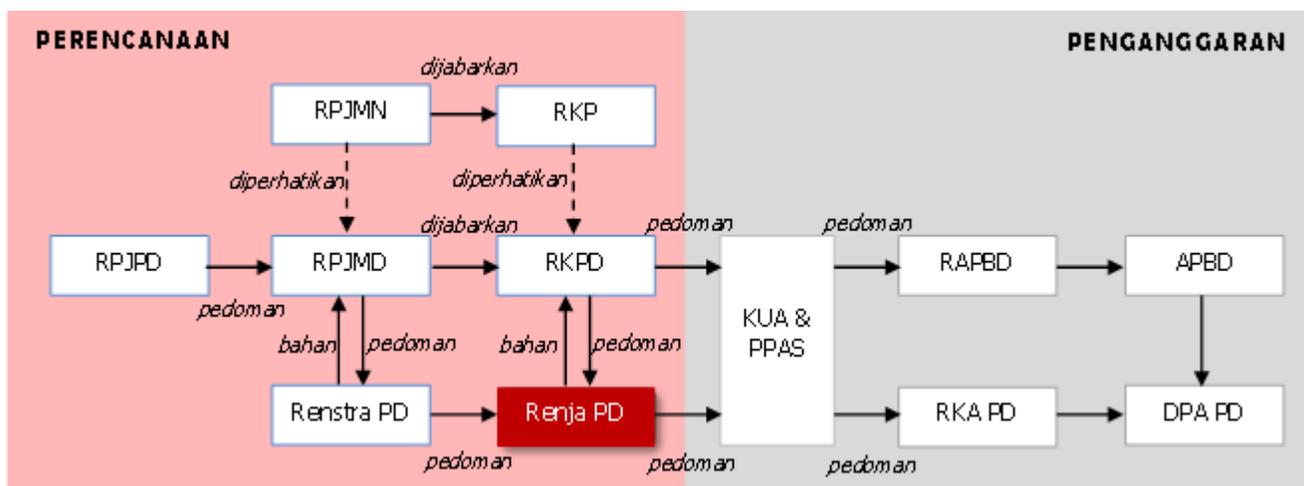
28. SEKRETARIAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian setelah pandemi *Covid-19* yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 setelah dicabutnya status pandemi Covid-19, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; (4) Persiapan memasuki Tahun Politik 2024; serta (5) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Sekretariat Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);

- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah

Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja dan perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan,serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kualitas Renja Sekretariat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan /permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Semarang

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %	25 %	100.00 %	25.00 %	25.00			
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16.00 Kecamatan	00.00 Kecamatan	00.00			
4.01.02.2.01. 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	00.00			Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01. 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100 %	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	00.00			Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02.2.01. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	100 %	6 Dokumen	0 Dokumen	00.00			Bagian Tata Pemerintahan
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	5.00 %	35.00 %	40.00 %	20.00 %	50.00			
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	5.00 %	15.00 %	40.00 %	20.00 %	50.00			
4.01.02.2.01 .03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	109.61 Dokumen	8 Dokumen	15 Dokumen	5 Dokumen	33.00			Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54 Kegiatan	7 Kegiatan	9.00 Kegiatan	5.00 Kegiatan	55.56			

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	54 kegiatan	9 kegiatan	9.00 kegiatan	5.00 kegiatan	55.56			
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 %	100 %	13 Dokumen	7 Dokumen	53.85			Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100 %	100 %	11 Dokumen	6 Dokumen	54.54			Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	100 %	100 %	7 Dokumen	3 Dokumen	42.86			Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	133 %	173 %	118.00 %	34.75 %	29.45			
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	133 %	126.28 %	118.00 %	34.75 %	29.45			

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	133 %	105.28 %	565 Dokumen	412 Dokumen	72.92			Bagian Hukum
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	133 %	122 %	55 Kasus	65 Kasus	118.18			Bagian Hukum
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	133 %	110 %	1000 Dokumen	412 Dokumen	41.20			Bagian Hukum
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	5 %	35 %	40.00 %	20.00 %	50.00			
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	5 %	15 %	40.00 %	20.00 %	50.00			
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.05 Dokumen	36 Dokumen	15 Dokumen	13 Dokumen	86.67			Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	7.06 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	60.00			Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	100 dokumen	16 dokumen	40.00 dokumen	25.00 dokumen	62.50			
4.01.03.2.01. 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Kajian Investasi BUMD & Evaluasi Kinerja BUMD	100 dokumen	24 dokumen	8 Dokumen	5 Dokumen	62.50			Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01. 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100 dokumen	2 dokumen	12 Dokumen	8 Dokumen	66.67			Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03.2.01. 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100 dokumen	4 dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	50.00			Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00			
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	5 dokumen	1 dokumen	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100.00			
4.01.03.2.02 .01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			Bagian Administrasi Pembangunan

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	6 Laporan	50.00			Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60 Dokumen	12 Dokumen	12 Laporan	6 Laporan	50.00			Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1150 Dokumen	152 Dokumen	150 Dokumen	108 Dokumen	72.00			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100 Kegiatan	25 Kegiatan	12 Dokumen	6 Kegiatan	50.00			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	125 Kegiatan	32 Kegiatan	10 Kegiatan	6 Kegiatan	60.00			Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	10 dokumen	10 dokumen	10.00 dokumen	5.00 dokumen	50.00			
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	100 dokumen	3 dokumen	10 Dokumen	7 Dokumen	70.00			Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	25 %	00.00 %	00.00 %	00.00			

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	100 %	100.00 %	00.00 %	00.00			
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	00.00			Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %	75 %	100.00 %	00.00 %	00.00			
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	NA	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	00.00			Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	00.00			Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	00.00			Bagian Keuangan
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	NA	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	00.00			Bagian Keuangan
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100 %	76 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Setda yang lebih baik	100 %	75 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	234 orang/ bulan	234 orang/ bulan	100.00			Bagian Keuangan

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	00.00			Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100.00			Bagian Keuangan
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 %	100 %	1 Laporan	0 Laporan	00.00			Bagian Keuangan
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	26 dokumen	2 dokumen	5.00 dokumen	2.00 dokumen	40.00			
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 dokumen	3 dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100.00			Bagian Keuangan
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	49 %	100.00 %	55.00 %	55.00			
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 jenis	3 jenis	6 Paket	3 Paket	50.00			Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	peningkatan kemampuan ASN	100 %	76 %	100.00 %	25.00 %	25.00			
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100 %	75 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100 %	NA	100 Orang	0 Orang	00.00			Bagian Keuangan
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %	NA	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 jenis	NA	10 Paket	4 Paket	40.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	70 jenis	NA	6 Paket	3 Paket	50.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	22 jenis	NA	4 Paket	2 Paket	50.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 %	NA	100.00 %	25.00 %	25.00			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	78 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 %	75 %	12 Dokumen	6 Dokumen	50.00			Bagian Tata Usaha

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	0.00 %	12 Laporan	6 Laporan	50.00			Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	0.00 %	5 Laporan	0 Laporan	00.00			Bagian Tata Usaha
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %	NA	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 jenis	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %	NA	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 jenis	NA	3 Unit	1 Unit	33.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 jenis	NA	208 Unit	31 Unit	85.71			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 jenis	NA	68 Unit	16 Unit	14.90			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 jenis	NA	812 Unit	37 Unit	4.55			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 jenis	NA	1 Unit	0 Unit	00.00			Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 %	NA	100.00 %	25.00 %	25.00			
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	75 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	76 %	12 Laporan	6 Laporan	50.00			Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	NA	3 Laporan	1 Laporan	33.33			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 %	75 %	12 Laporan	6 Laporan	50.00			Bagian Tata Usaha
4.01.01.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	NA	2 Laporan	2 Laporan	100.00			Bagian Rumah Tangga
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 %	NA	12 Laporan	6 Laporan	50.00			Bagian Tata Usaha
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	NA	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	NA	100.00 %	50.00 %	50.00			

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	75 %	4 Unit	4 Unit	100.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan genset yang dipelihara	100 %	75 %	221 Unit	111 Unit	50.23			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 %	75 %	1500 Unit	698 Unit	46.53			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	50 %	14 Unit	7 Unit	50.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	75 %	740 Unit	370 Unit	50.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 %	50 %	910 Unit	455 Unit	50.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100 %	76 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	74 %	100.00 %	50.00 %	50.00			

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	NA	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	100.00			Bagian Keuangan
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %	100 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	26 jenis	NA	24 Paket	12 Paket	50.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100 %	76 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	74 %	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	NA	2 Orang/bulan	2 Orang/bulan	100.00			Bagian Tata Usaha
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 %	NA	100.00 %	25.00 %	25.00			
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	NA	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100 %	NA	12 Paket	6 Paket	50.00			Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100 %	NA	12 Paket	0 Paket	00.00			Bagian Rumah Tangga
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	0 OPD	23 OPD	51.00 OPD	41.00 OPD	80.39			
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 indeks	174.7 indeks	88.00 indeks	91.02 indeks	103.43			
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	NA	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00			Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	NA	2 Laporan	0 Dokumen	00.00			Bagian Organisasi
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	NA	1 Dokumen	0 Dokumen	00.00			Bagian Organisasi
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	5.00 %	NA	100.00 %	00.00 %	00.00			
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	5 %	15 %	40.00 %	20.00 %	50.00			
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	165.01 dokumen	10 dokumen	20 Dokumen	9 Dokumen	45.00			Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %	NA	100.00 %	50.00 %	50.00			

Kode Rekening	Urusan/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Keterangan
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100 %	NA	100.00 %	50.00 %	50.00			
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100 %	NA	12 Laporan	6 Laporan	50.00			Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100 %	NA	12 Laporan	6 Laporan	50.00			Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100 %	NA	12 Laporan	6 Laporan	50.00			Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2**Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang Triwulan II Tahun 2023**

No.	Bagian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
1.	Hukum	4.972.382.100	1.363.603.939	27,42
2.	Tata Pemerintahan	2.499.033.524	924.181.800	36,98
3.	Organisasi	3.233.212.307	1.924.482.393	59,52
4.	Kerjasama dan Otonomi Daerah	11.000.841.431	1.921.838.623	17,47
5.	Perekonomian dan SDA	2.703.492.900	963.447.174	35,64
6.	Administrasi Pembangunan	886.030.000	402.566.962	45,43
7.	Kesejahteraan Rakyat	35.440.053.679	13.439.109.275	37,92
8.	Pengadaan Barang dan Jasa	2.336.283.972	537.141.207	22,99
9.	Komunikasi Pimpinan dan Protokol	14.362.907.905	4.610.260.164	32,10
10.	Tata Usaha	34.348.315.315	6.628.757.526	19,30
11.	Rumah Tangga	59.248.776.210	24.085.945.019	40,65
12.	Keuangan	39.742.124.697	17.424.117.112	43,84
	JUMLAH	210.773.454.040	74.225.451.194	35,22

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Penunjang Unsur Pendukung sebagai berikut :

Tabel 2.1.3**Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Semarang Triwulan II Tahun 2023****Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
	Bagian Hukum			
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	53.617.072.945	17.506.798.796	32,65
2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.972.382.100	1.363.603.939	27,42
03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	663.313.770	142.878.896	21,54
03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.903.334.330	294.087.751	15,45

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	2.405.734.000	926.637.292	38,52
	Bagian Tata Pemerintahan			
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	53.617.072.945	17.506.798.796	32,65
2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.564.932.919	946.271.031	36,89
01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	459.116.266	108.528.500	23,64
01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	582.116.466	36.923.300	6,34
01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.457.800.792	778.730.000	53,42
	Bagian Organisasi			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	151.236.815.823	54.815.766.055	36,24
02.13	Penataan Organisasi	3.528.450.096	2.066.047.234	58,55
13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	370.142.887	145.178.115	39,22
13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.317.672.300	1.731.516.538	74,71
13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	545.397.120	47.787.740	8,76
	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah			
02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	53.617.072.945	17.506.798.796	32,65
2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	10.639.704.247	1.758.184.551	16,52
04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	1.345.408.523	187.724.221	13,95
04.02	Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	9.294.295.724	1.570.460.330	16,90
2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.564.932.919	946.271.031	36,89
1.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	65.899.395	22.089.231	33,52
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	151.236.815.823	54.815.766.055	36,24
2.13	Penataan Organisasi	3.528.450.096	2.066.047.234	58,55
3.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	295.237.789	16.430.626	5,56

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
	Bagian Perekonomian dan SDA			
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.919.565.272	1.902.516.343	32,14
2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	2.212.143.200	887.123.174	40,10
01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	719.168.798	378.191.631	52,59
01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1.072.919.125	319.281.712	29,76
01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	420.055.277	189.649.831	45,15
2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	491.349.700	76.324.000	15,53
04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	491.349.700	76.324.000	15,53
	Bagian Administrasi Pembangunan			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	151.236.815.823	54.815.766.055	36,24
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.624.780	2.635.500	14,15
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.241.600	639.000	10,24
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.919.565.272	1.902.516.343	32,14
2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	879.788.400	401.927.962	45,68
02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	169.397.200	25.290.000	14,93
02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	551.561.560	305.364.500	55,36
02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	158.829.640	71.273.462	44,87
	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
02	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	53.617.072.945	17.506.798.796	32,65
2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	35.440.053.679	13.438.739.275	37,92
02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	28.309.315.138	10.804.566.753	38,16

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.031.207.793	2.194.248.761	36,38
02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.099.530.748	439.923.761	40,01
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
03	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.919.565.272	1.902.516.343	32,14
2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.336.283.972	537.141.207	22,99
03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.376.393.140	305.254.995	22,18
03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	396.800.832	102.306.212	25,78
03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	563.090.000	129.580.000	23,01
	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten	151.236.815.823	54.815.766.055	36,24
2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	14.362.907.905	4.610.260.164	32,10
14.01	Fasilitasi Keprotokolan	1.274.884.286	570.716.899	44,77
14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	9.183.106.385	2.931.725.955	31,92
14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3.904.917.234	1.107.817.310	28,37
	Bagian Tata Usaha			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten	151.236.815.823	54.815.766.055	36,24
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.390.777.995	7.870.081.614	23,57
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	338.040.000	145.193.000	42,95
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.961.119.600	3.176.946.274	31,89
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.766.783.715	1.967.483.497	10,48
2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.380.474.333	4.810.076.332	35,95

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bagian Tata Usaha	163.006.000	78.356.924	48,07
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Tata Usaha	1.700.000.000	153.427.831	9,03
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bagian Tata Usaha	319.615.000	130.350.000	40,78
2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.132.488.432	1.291.012.471	31,24
11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Bagian Tata Usaha	3.099.751.000	977.000.000	31,52
	Bagian Rumah Tangga			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	151.236.815.823	54.815.766.055	36,24
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.878.333.720	10.522.626	0,56
03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	49.912.034	10.522.626	21,08
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.654.267.745	206.094.108	5,64
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.345.916.745	197.569.108	5,90
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.390.777.995	7.870.081.614	23,57
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.093.512.956	255.178.000	23,34
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	841.922.512	302.291.193	35,90
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	507.931.999	288.933.650	56,88
06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.881.467.213	1.734.056.000	92,17
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.216.898.025	6.767.374.146	60,33
07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.200.000.000	273.260.146	12,42

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.658.848.472	5.478.999.000	82,28
07.05	Pengadaan Mebel	271.535.833	72.956.000	26,87
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.298.496.976	911.529.000	70,20
07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	788.016.744	30.630.000	3,89
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.380.474.333	4.810.076.332	35,95
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.603.219.632	4.095.445.245	42,65
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.594.633.701	352.496.332	22,11
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.308.024.593	8.547.741.263	35,16
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	169.123.596	55.881.393	33,04
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.311.041.512	1.237.235.337	37,37
09.05	Pemeliharaan Mebel	121.078.800	18.759.000	15,49
09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.370.582.324	6.248.529.227	38,17
09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.068.570.127	800.575.425	26,09
09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.267.628.234	186.760.881	14,73
2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.132.488.432	1.291.012.471	31,24
11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	850.336.800	255.955.200	30,10
2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.955.000.000	1.267.065.651	32,04
12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.575.000.000	1.145.150.000	44,47

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.380.000.000	121.915.651	8,83
	Bagian Keuangan			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	151.236.815.823	54.815.766.055	36,24
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.624.780	2.635.500	14,15
01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.268.000	NA	NA
01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.905.910	NA	NA
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.363.680	1.996.500	84,47
01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.845.590	NA	NA
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.410.568.199	17.138.606.711	45,81
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.526.053.799	16.741.398.471	45,83
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	881.400.000	395.650.000	44,89
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	695.200	599.140	86,18
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.419.200	959.100	39,65
2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.878.333.720	238.770.861	12,71
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.828.421.686	216.931.630	11,86
2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.654.267.745	206.094.108	5,64
05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	308.351.000	8.525.000	2,76
2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasioal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.132.488.432	1.291.012.471	31,24

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase (%)
11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	182.400.632	58.057.271	31,83

Dari data pada Tabel 2.1.3 tersebut diatas dapat dikehui bahwa pada tahun anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program dan 20 kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp. 210.773.454.040,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 74.225.081.194,-. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 136.548.372.846,-.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Sekretariat Daerah mendukung pencapaian RPJMD Kota Semarang khususnya pada Misi 5 **“Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan Menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”** dengan sasaran dan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET RENSTRA2023	REALISASI TW. II 2023	PROYEKSI 2023
No	Uraian	No	Uraian				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	74,00	72,68	74,00
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00	91,02	88,00
		3	Hasil Evaluasi SAKIP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai/Predikat	74,00	70,35	74,00
		4	Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD)	Nilai	3,46/ST	3,43/ST	3,46/ST
A	Sasaran Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi	1	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	Persentase	100%	50%	100%
		2	Persentase dokumen kerjasama (MoU, LoI, Perjanjian, Kesepakatan) yang ditetapkan	Persentase	100%	50%	100%
		3	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Persentase	100%	50%	100%
		4	Persentase produk hukum (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota) yang ditetapkan	Persentase	100%	50%	100%
		5	Persentase Produk Hukum Penetapan (Keputusan Wali Kota dan Keputusan Sekda) yang ditetapkan	Persentase	100%	50%	100%
		6	Persentase warga miskin dan OPD yang	Persentase	100%	50%	100%

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET RENSTRA2023	REALISASI TW. II 2023	PROYEKSI 2023
No	Uraian	No	Uraian				
1	2	3	4	5	6	7	8
			diberikan bantuan hukum				
		7	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase	100%	50%	100%
B	Sasaran Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	1	Persentase pelaksanaan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Persentase	100%	50%	100%
		2	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	Persentase	100%	50%	100%
		3	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama dan lembaga keagamaan yang terfasilitasi	Persentase	100%	50%	100%
		4	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	Persentase	100%	50%	100%
		5	Indeks tata kelola PBJ:	Nilai/predikat	50,00 (cukup)	cukup	50,00 (cukup)
C	Sasaran Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	1	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	Persentase	100%	50%	100%
		2	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	Persentase	100%	50%	100%
		3	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota yang terlayani	Persentase	100%	50%	100%
		4	Persentase administrasi persuratan dan	Persentase	100%	50%	100%

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET RENSTRA20 23	REALISASI TW. II 2023	PROYEKSI 2023
No	Uraian	No	Uraian				
1	2	3	4	5	6	7	8
			kepegawaian yang terlayani				
		5	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persentase	100%	50%	100%
		6	Persentase fasilitasi pengelolaan asset/BMD	Persentase	100%	50%	100%
		7	Persentase penyediaan sarana prasarana kantor	Persentase	100%	50%	100%
		8	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	Persentase	100%	50%	100%

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

• BAGIAN HUKUM

Permasalahan Bagian Hukum dalam melaksanakan Kegiatan di Tahun 2023 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Dinamika perkembangan regulasi;
- 2) Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dan/atau ASN terkait penyusunan produk hukum daerah dan penanganan perkara;
- 3) Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dan/atau ASN terkait ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 4) Kesulitan pada saat melakukan pembuktian dalam penanganan perkara di Pengadilan, karena Perangkat Daerah tidak memiliki Bukti Surat asli dan/atau saksi;
- 5) Banyaknya warga miskin yang tidak masuk dalam data base warga miskin (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menjadi salah satu syarat pengajuan fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin Kota Semarang;
- 6) Kurangnya peran LBH dalam memberikan fasilitasi bantuan hukum non litigasi bagi warga miskin;
- 7) Pemenuhan indikator penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Aksi HAM Pemerintah Kota Semarang dianggap kurang.
- 8) Perencanaan yang kurang maksimal terkait propemperkada;
- 9) Belum tersedianya aplikasi terkait pengajuan produk hukum yang mengakibatkan kesalahpahaman antara Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pengusul;
- 10) Terjadinya serangan hacker pada laman JDIH yang mengakibatkan gangguan pada sistem.

• BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

- 1) Kegiatan Audiensi / Jalan Sehat Wali Kota Semarang dengan Masyarakat ada penyesuaian kegiatan dan sinkronisasi dengan kegiatan Kepala Daerah.

• BAGIAN ORGANISASI

- 1) Hanya Perangkat Daerah yang menjadi sampel Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang memahami secara utuh tentang pelaksanaan reformasi birokrasi. Beberapa OPD belum memahami tentang pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya kecamatan, mengenai penyusunan rencana kerja dan juga indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- 2) Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang penyusunan Peta Lintas Fungsi sebagai penjabatan dari proses bisnis dan dasar penyusunan SOP.

• **BAGIAN PEREKONOMIAN**

- 1) Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil terdapat permasalahan :
 - a) Fasilitas Pameran bagi Pelaku Usaha dan UMKM masih kurang maksimal.
 - b) Terkait pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT perbulan, OPD Pengelola selalu ditingkatkan.
 - c) Kurang Koordinasi internal antar OPD Pengelola DBHCHT.
 - d) OPD Pengelola DBHCHT belum maksimal koordinasi dengan Sekretariat DBHCHT Kota Semarang.
- 2) Meskipun target deviden yang disetor tahun 2022 terpenuhi, namun ada BUMD yang belum memberikan PAD/deviden kepada Pemerintah Kota Semarang yaitu PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) yang kurang optimal dalam peningkatan kinerja dan PT Taman Satwa Semarang (Perseroda) yang melakukan penghapusan aset yg mempengaruhi ekuitas sehingga mengurangi laba rugi;
- 3) Permasalahan yang dihadapi terkait Sub Kegiatan Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian adalah;
 - a) Program CSR masih perlu ditingkatkan meskipun realisasi tahun 2022 ada kenaikan dibanding tahun 2021, akan tetapi jika dibandingkan dengan kota/kab lain masih jauh dan untuk aplikasi CSR sudah dilakukan pengembangan. Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan CSR atau tidak melaporkan CSR sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b) Untuk pelatihan aplikasi CSR masih sering terjadi di Perusahaan admin selalu berganti sehingga perlu dilakukan pelatihan aplikasi CSR baik admin yang lama, diganti atau admin baru dari perusahaan yang baru bergabung ke dalam aplikasi CSR.
 - c) Untuk LPG dan BBM bersubsidi, dari hasil monitoring bersama tim masih banyak ditemukan penggunaan LPG bersubsidi oleh yang tidak berhak dan LPG Kuota Kota Semarang banyak dijual di luar Kota.
 - d) Untuk monitoring pupuk bersubsidi dan pestisida dari hasil monitoring ditemukan pestisida palsu dan tidak terdaftar di Kementerian Pertanian. Selain itu penggunaan kartu tani yang masih rendah.
 - e) Hal ini dikarekan sebagian besar petani tidak memiliki saldo di Bank BRI, sedangkan untuk penyaluran pupuk bersubsidi Kota Semarang hanya mendapatkan 74% dari Kuota yang diusulkan lewat E-RDTK, namun masih tetap perlu dikawal dalam hal penyalurannya agar tepat sasaran.

• **BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

- 1) Standar Harga Satuan (SHS) sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran digunakan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- 2) Belum adanya aplikasi online untuk evaluasi kegiatan yang bersumber dari Non PAD kecuali Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Beberapa data yang diperlukan dari OPD susah untuk didapatkan.

• **BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 1) Permasalahan yang dihadapi khususnya kegiatan MTQ (Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual) adalah kesulitan dalam koordinasi, memperoleh kebutuhan data kegiatan oleh petugas tingkat kecamatan karena beban kerja yang tinggi sehingga hasilnya tidak maksimal;
- 2) Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, permasalahan yang dihadapi adalah data yang diterima masih kurang akurat terkait data tempat ibadah (akta, kepengurusan) dan kurangnya narasumber yang berkompeten dalam memberikan pembinaan ataupun sosialisasi yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas bagi modin perawat jenazah dan tempat ibadah yang ada di Kota Semarang;
- 3) Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah pembinaan dan sosialisasi belum bisa mencakup seluruh institusi yang ada di Kota Semarang, karena kurangnya sarana prasarana yang mendukung, misalnya nara sumber.

• **BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA**

- 1) Berkurangnya paket tender/seleksi oleh OPD karena mulai beralih ke metode pengadaan secara E-Purchasing;
- 2) Pengelolaan Katalog lokal yang belum optimal;
- 3) Indeks kematangan UKPBJ belum mencapai level 3;
- 4) Belum semua OPD yang melaksanakan paket pengadaan langsung tercatat dalam sistem SPSE.

• **BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL**

- 1) Kegiatan dapat terhambat jika proses persiapan serta para anggota penyelenggara terlambat datang;
- 2) Informasi tentang kegiatan kepala daerah tidak terpublish karena kurangnya komunikasi dengan pihak media dan keterlambatan pengiriman materi berita;
- 3) Keterlambatan pengiriman materi foto khususnya untuk kebutuhan berita ke media karena terlambat dalam pelaksanaan peliputan ataupun pendokumentasian kegiatan kepala daerah maupun dalam kegiatan kunjungan kerja; petugas peliputan harus menempel kepala daerah yang terkadang jadwal/agendanya berkesinambungan.

• **BAGIAN TATA USAHA**

- 1) Permasalahan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terletak pada perjalanan dinas yang mengalami penundaan/penjadwalan ulang sehingga mempengaruhi penyerapan realisasi anggaran;

- 2) Permasalahan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena SPJ dibawah Standar Harga Satuan (SHS) dan sesuai harga pasar sehingga terjadi efisiensi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, meskipun secara tidak langsung. Oleh karena itu, kedepannya diperlukan upaya pemecahan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan serta permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

- Dinamika perkembangan regulasi;
- Database warga miskin yang tidak teraktual, dimana data tersebut menjadi salah satu syarat pengajuan fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin Kota Semarang;
- Peningkatan pemahaman Perangkat Daerah dan/atau ASN terkait penyusunan produk hukum daerah dan penanganan perkara;
- Dibutuhkan aplikasi terkait pengajuan produk hukum yang mengakibatkan kesalahpahaman antara Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pengusul;
- Peningkatan keamanan siber (*cyber security*) pada laman JDIH;
- Peningkatan pemahaman pada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB);
- Peningkatan pemahaman pada Perangkat Daerah tentang penyusunan Peta Lintas Fungsi;
- Peningkatan koordinasi internal antar OPD pengelola DBHCHT dengan Sekretariat DBHCHT Kota Semarang;
- Optimalisasi PAD/deviden oleh BUMD;
- Peningkatan program CSR dan pelatihan aplikasi CSR;
- Optimalisasi pengawasan kepada penggunaan LPG dan BBM bersubsidi, serta penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi;
- Standar Harga Satuan (SHS) sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran digunakan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Pengadaan aplikasi online untuk mengevaluasi kegiatan yang bersumber dari Non PAD;
- Pengadaan aplikasi yang dapat mempermudah koordinasi antar OPD dan penarikan data saat dibutuhkan;
- Optimalisasi pengelolaan katalog lokal;
- Peningkatan indeks kematangan UKPBJ;
- Optimalisasi pelaksanaan paket pengadaan langsung melalui sistem SPSE;
- Optimalisasi penyerapan realiasi anggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisa kebutuhan Sekretariat Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01	URUSAN PENUNJANG				216.609.460.588	URUSAN PENUNJANG				216.609.460.588	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	151.460.039.909	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 %	151.460.039.909	
			Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %				Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100 %		
			OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	41 OPD				OPD yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat	41 OPD		
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100 %				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100 %		
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100 %				Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100 %		
			Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 %				Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100 %		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100 %				Peningkatan kemampuan ASN Bagian Tata Usaha	100 %		
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %				Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %		
			Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %				Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	100 %		
4.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	17.433.180	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100 %	17.433.180	-
			Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100 %		
4.01.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5.050.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas	3 dokumen	5.050.000	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.0 1.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.268.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos	1 dokumen	3.268.000	Bagian Keuangan
4.01.0 1.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.905.910	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	1 dokumen	3.905.910	Bagian Keuangan

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.0 1.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	2.363.680	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 dokumen	2.363.680	Bagian Keuangan
4.01.0 1.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2.845.590	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan rumah tangga	1 dokumen	2.845.590	Bagian Keuangan
4.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Setda yang lebih baik	100 %	31.275.158.161	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Keuangan Setda yang lebih baik	100 %	31.275.158.161	-
4.01.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 orang/bulan	30.390.643.761	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 orang/bulan	30.390.643.761	Bagian Keuangan
4.01.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	881.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	881.400.000	Bagian Keuangan
4.01.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	695.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	695.200	Bagian Keuangan
4.01.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	1 laporan	2.419.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 laporan	2.419.200	Bagian Keuangan

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			n/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
4.01.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	1.629.353.152	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	1.629.353.152	-
4.01.0 1.2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	44.814.152	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Semarang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	44.814.152	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.03 .06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1.584.539.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	1.584.539.000	Bagian Keuangan
4.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100 %	3.452.412.746	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100 %	3.452.412.746	-
			Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %				Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		
4.01.0 1.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6 paket	3.319.612.745	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6 paket	3.319.612.745	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	308.351.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	308.351.000	Bagian Keuangan
4.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	31.600.005.275	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100 %	31.600.005.275	-
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %		
4.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	888.228.795	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	888.228.795	Bagian Rumah Tangga

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	952.528.533	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	952.528.533	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	748.404.859	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	748.404.859	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	556.533.457	Penyediaan Bahan Bacaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	556.533.457	Bagian Tata Usaha
4.01.0 1.2.06 .08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	9.961.119.600	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	9.961.119.600	Bagian Tata Usaha
4.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	16.239.639.369	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	16.239.639.369	Bagian Tata Usaha
4.01.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	2.674.475.521	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dokumen	2.674.475.521	Bagian Tata Usaha
4.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %	16.416.359.848	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100 %	16.416.359.848	-
4.01.0 1.2.07 .01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dtau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas dtau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	2.200.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dtau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas dtau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit	2.200.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	208 unit	11.224.542.171	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	208 unit	11.224.542.171	Bagian Rumah Tangga

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.0 1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	68 unit	329.166.057	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	68 unit	329.166.057	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	812 unit	1.879.186.876	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	812 unit	1.879.186.876	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	783.464.744	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	783.464.744	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	13.273.389.593	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	13.273.389.593	-
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
4.01.0 1.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	163.006.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	163.006.000	Bagian Tata Usaha
4.01.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.640.302.132	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	9.640.302.132	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.555.832.760	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.555.832.760	Bagian Tata Usaha
4.01.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.914.248.701	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.914.248.701	Bagian Tata Usaha
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan		Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	24.407.974.743	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana	100 %	24.407.974.743	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Aparatur			
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	169.123.596	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 unit	169.123.596	Bagian Rumah Tangga
4.01.02.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221 unit	3.311.041.512	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	221 unit	3.311.041.512	Bagian Rumah Tangga
4.01.05.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	121.078.800	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1500 unit	121.078.800	Bagian Rumah Tangga
4.01.09.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 unit	16.600.525.643	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 unit	16.600.525.643	Bagian Rumah Tangga
4.01.10.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	740 unit	2.964.960.427	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	740 unit	2.964.960.427	Bagian Rumah Tangga
4.01.11.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	910 unit	1.241.244.765	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	910 unit	1.241.244.765	Bagian Rumah Tangga

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.0 1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	4.761.945.398	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100 %	4.761.945.398	-
			Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %				Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100 %		
4.01.0 1.2.11 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	92.621.598	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	92.621.598	Bagian Keuangan
4.01.0 1.2.11 .02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 paket	850.336.800	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 paket	850.336.800	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.11 .04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	3.818.987.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	3.818.987.000	Bagian Tata Usaha
4.01.0 1.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	3.955.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Semarang	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100 %	3.955.000.000	-
4.01.0 1.2.12 .01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	2.575.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	2.575.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.12 .02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	1.380.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 paket	1.380.000.000	Bagian Rumah Tangga
4.01.0 1.2.13	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.00 indeks	3.553.099.908	Penataan Organisasi	Kota Semarang	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.35 indeks	3.553.099.908	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	40 %				Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	50 %		
4.01.0 1.2.13 .01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	383.923.287	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen	383.923.287	Bagian Organisasi
4.01.0 1.2.13 .02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	2.317.672.300	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	2.317.672.300	Bagian Organisasi
4.01.0 1.2.13 .03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	531.616.720	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	531.616.720	Bagian Organisasi
4.01.0 1.2.13 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20 dokumen	319.887.601	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20 dokumen	319.887.601	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.0 1.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 %	17.117.907.905	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Prosentase Kegiatan Keprotokolan dan Publikasi Kebijakan serta Kegiatan Pimpinan Daerah	100 %	17.117.907.905	-
4.01.0 1.2.14 .01	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	1.322.059.286	Fasilitasi Keprotokolan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	1.322.059.286	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.0 1.2.14 .02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	11.823.106.385	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	11.823.106.385	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.0 1.2.14 .03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	3.972.742.234	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	3.972.742.234	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Semarang	Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan	9 kegiatan	58.335.546.500	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kota Semarang	Cakupan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan,	9 kegiatan	58.335.546.500	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Sosial Kemasyarakatan					Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan			
			Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	40 %				Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	40 %		
			Indek Pelayanan Publik	118 %				Indek Pelayanan Publik	118 %		
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100 %		
4.01.0 2.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Semarang	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16 kecamatan	2.884.932.919	Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Semarang	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16 kecamatan	2.884.932.919	-
			Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	40 %				Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	40 %		
4.01.0 2.2.01 .01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	630.166.266	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dokumen	630.166.266	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.0 2.2.01 .02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	635.666.466	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dokumen	635.666.466	Bagian Tata Pemerintahan
4.01.0 2.2.01 .03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 dokumen	1.619.100.187	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 dokumen	1.619.100.187	Bagian Tata Pemerintahan
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 dokumen			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 dokumen		Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.0 2.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	44.062.795.046	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Semarang	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	9 kegiatan	44.062.795.046	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.0 2.2.02 .01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 dokumen	36.383.637.470	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 dokumen	36.383.637.470	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.0 2.2.02 .02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 dokumen	6.855.453.478	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 dokumen	6.855.453.478	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.0 2.2.02 .03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 dokumen	823.704.098	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 dokumen	823.704.098	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.0 2.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Semarang	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	118 %	4.984.382.100	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Semarang	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	118%	4.984.382.100	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.01.0 2.2.03 .01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	675.313.770	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 dokumen	675.313.770	Bagian Hukum
4.01.0 2.2.03 .02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Semarang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.903.334.330	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Semarang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 dokumen	1.903.334.330	Bagian Hukum
4.01.0 2.2.03 .03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	1000 dokumen	2.405.734.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kota Semarang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasikan	1000 dokumen	2.405.734.000	Bagian Hukum
4.01.0 2.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	40 %	6.403.436.435	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Semarang	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	40 %	6.403.436.435	-
4.01.0 2.2.04 .01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 dokumen	1.343.410.523	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 dokumen	1.343.410.523	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01.0 2.2.04 .02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 dokumen	5.060.025.912	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 dokumen	5.060.025.912	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
4.01. 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	6.813.874.179	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kota Semarang	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100 %	6.813.874.179	-
			Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %				Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100 %		
			Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata,	100 %				Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata,	100 %		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa					koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa			
			Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen				Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen		
4.01.0 3.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Semarang	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	40 dokumen	3.034.243.200	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Semarang	Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah	40 dokumen	3.034.243.200	-
4.01.0 3.2.01 .02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 dokumen	719.168.798	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 dokumen	719.168.798	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.0 3.2.01 .03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10 dokumen	1.895.019.125	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 dokumen	1.895.019.125	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.0 3.2.01 .05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	8 dokumen	420.055.277	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	8 dokumen	420.055.277	Bagian Perekonomian dan SDA
4.01.0 3.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan secara Periodik	100 %	880.980.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Semarang	Laporan Hasil Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan secara Periodik	100 %	880.980.000	-

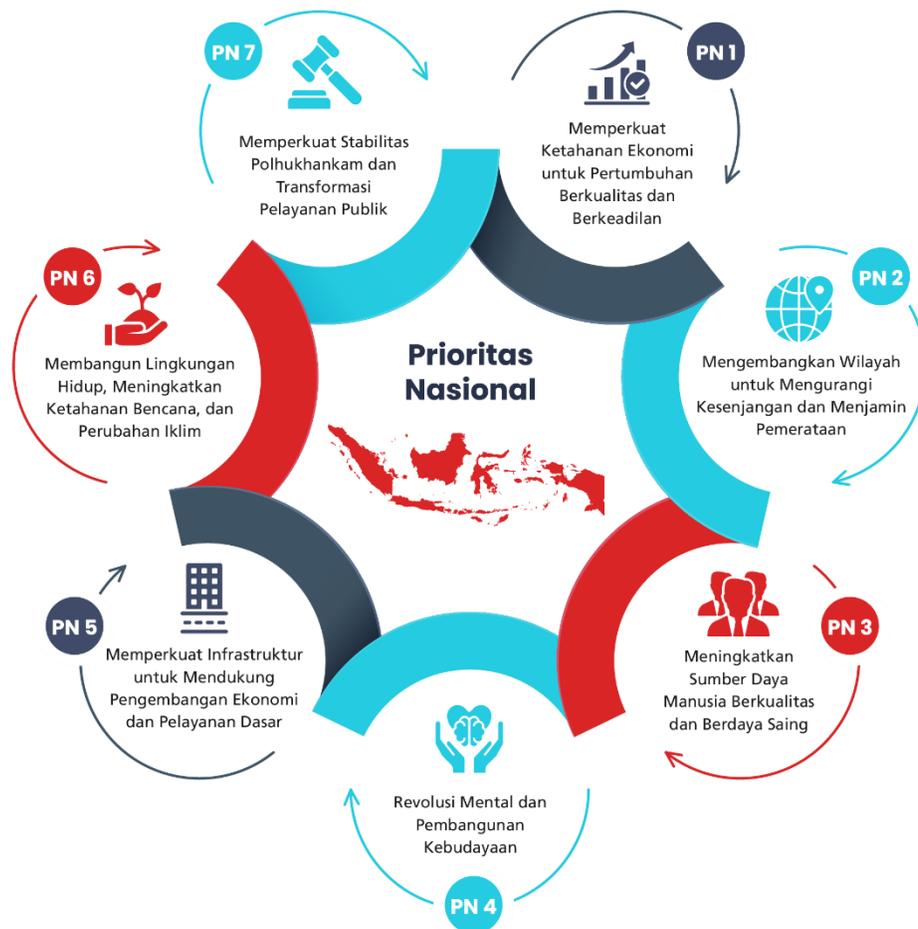
No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen				Pranata Standarisasi Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	1 dokumen		
4.01.0 3.2.02 .01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 dokumen	180.837.200	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 584.Daerah	1 dokumen	180.837.200	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.0 3.2.02 .02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	523.430.130	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 laporan	523.430.130	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.0 3.2.02 .03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	176.712.670	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	176.712.670	Bagian Administrasi Pembangunan
4.01.0 3.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	2.252.265.309	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dari Sisi Koordinasi, Evaluasi, Pengelolaan dan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	2.252.265.309	-
4.01.0 3.2.03 .01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 dokumen	1.326.670.140	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 dokumen	1.326.670.140	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.0 3.2.03 .02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	367.400.832	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	12 dokumen	367.400.832	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.0 3.2.03 .03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 kegiatan	558.194.337	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Semarang	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 kegiatan	558.194.337	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
4.01.0 3.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Semarang	Jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai	10 dokumen	646.385.670	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Semarang	Jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang	10 dokumen	646.385.670	-

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai					kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai			
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	10 dokumen	646.385.670	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	10 dokumen	646.385.670	Bagian Perekonomian dan SDA

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan

- Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Kooperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
 - PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PP 1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP 2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP 3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP 4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP 5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP 6 Penguatan Kemiskinan
 - PP 7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PP 1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP 2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia

- PP 3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP 4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
- PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
 - PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
 - PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
- PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas - prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kota Semarang sebagai lembaga administratif yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan, pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan petugas daerah serta pelayanan administratif, memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola di Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”** dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

- P1 **Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;**
dengan fokus pada:
- Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan
- Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
- P2 **Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia;**
dengan fokus pada:
- Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
 - Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
 - Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.
- P3 **Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;** dengan fokus pada:
- Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
 - Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
 - Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
 - Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
 - Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
 - Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
- P4 **Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah;** dengan fokus pada:
- Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
 - Digitalisasi tata kelola pemerintahan;
 - Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
 - Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
 - Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme,

dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;

- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah juga memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas daerah serta pelayanan administratif Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memantapkan tata Kelola pemerintahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang

Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Terwujudnya Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif Terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah”

dengan indikator tujuan **“nilai AKIP, nilai EKPPD, dan IKM Kota Semarang”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Sekretariat Daerah Kota Semarang yaitu:

1. **Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, Hukum, serta Organisasi**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik;
 - b. Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik;
 - c. Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan;
 - d. Nilai AKIP Sekretariat Daerah;
 - e. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat

- waktu;
- f. Persentase produk hukum (Perda, Perwal) yang ditetapkan;
 - g. Persentase warga yang diberikan bantuan;
 - h. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP;
 - i. Nilai IKM Sekretariat Daerah.
2. **Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
- a. Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD;
 - b. Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD);
 - c. Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu;
 - d. Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi;
 - e. Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi;
 - f. Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis.
3. **Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
- a. Persentase berita dan press release yang terpublikasi;
 - b. Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah;
 - c. Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani;
 - d. Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani;
 - e. Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu;
 - f. Persentase fasilitasi pengelolaan aset;
 - g. Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor;
 - h. Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2.1

Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Terwujudnya penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah	Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	74
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	>3,46/ST
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88
SASARAN : Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah. Hukum, serta Organisasi	Persentase kecamatan dan kelurahan yang beradministrasi baik	%	100
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang berkinerja baik	%	100
	Persentase dokumen kerjasama (MoU, Lol Perjanjian, kesepakatan) yang ditetapkan	%	100
	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	74
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikn laporan kinerja tepat waktu	%	100
	Persentase produk hukum (Perda,Perwal) yang ditetapkan	%	100
	Persentase warga yang diberikan bantuan	%	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SOP	%	100
	Nilai IKM Sekretariat Daerah	Nilai	88
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Perekonomian dan SDA, Administrasi Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, serta Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pembinaan BUMD	%	100
	Persentase fasilitasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)	%	100

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi keuangan dan fisik tepat waktu	%	100
	Persentase tempat peribadatan, pendidikan agama, lembaga keagamaan yang terfasilitasi	%	100
	Persentase kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100
	Pengadaan barang dan jasa untuk mencapai level strategis		3
Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Tata Usaha, Keuangan, serta Rumah Tangga	Persentase berita dan press release yang terpublikasi	%	100
	Persentase peliputan program dan kegiatan kepala daerah	%	100
	Persentase kegiatan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan SA yang terlayani	%	100
	Persentase administrasi persuratan dan kepegawaian yang terlayani	%	100
	Persentase penyusunan anggaran dan laporan keuangan bagian yang tepat waktu	%	100
	Persentase fasilitasi pengelolaan aset	%	100
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kantor	%	100
	Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor	%	100

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus Sekretariat Daerah bertugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Namun secara khusus, Sekretariat Daerah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 3 (tiga) program, yang terdiri dari 3 (tiga) program penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin);
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan, yang terdiri dari 20 (dua puluh) kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin);
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 216.609.460.588,- (Dua ratus enam belas miliar enam ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 216.609.460.588,- (Dua ratus enam belas miliar enam ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					198.962.303.560	207.282.104.340	216.609.460.588	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	147.320.402.183	148.036.815.823	151.460.039.909	
		Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	41 OPD	41 OPD	51 OPD				
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bagian Tata Usaha	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Tata Usaha	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Bagian Tata Usaha	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		peningkatan kemampuan ASN Bagian TU	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen				
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	17.424.780	18.624.780	17.433.180	
		Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.041.600	6.241.600	5.050.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.268.000	3.268.000	3.268.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.905.910	3.905.910	3.905.910	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.01.	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.363.680	2.363.680	2.363.680	BAGIAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
04	Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD							KEUANGAN
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.845.590	2.845.590	2.845.590	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan Setda yang lebih baik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	37.410.568.199	37.410.568.199	31.275.158.161	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	234 Orang/bulan	234 Orang/bulan	234 Orang/bulan	36.526.053.799	36.526.053.799	30.390.643.761	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	881.400.000	881.400.000	881.400.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	695.200	695.200	695.200	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.419.200	2.419.200	2.419.200	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1.429.031.720	1.878.333.720	1.629.353.152	
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	45.712.034	49.912.034	44.814.152	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Milik Daerah SKPD							
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.383.319.686	1.828.421.686	1.584.539.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Setda yang lebih baik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	3.288.695.351	3.654.267.745	3.452.412.746	
		Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	6 Paket	3.241.295.351	3.345.916.745	3.319.612.746	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	47.400.000	308.351.000	132.800.000	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Setda yang lebih baik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	43.532.182.354	33.390.777.995	31.600.005.275	
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	322.146.827	-	-	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	8 Paket	10 Paket	3.222.967.256	1.093.512.956	888.228.795	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	837.239.512	841.922.512	952.528.533	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	504.931.999	507.931.999	556.533.457	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	268 Dokumen	268 Dokumen	12 Dokumen	338.040.000	338.040.000	327.480.000	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	10.086.609.600	9.961.119.600	9.961.119.600	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	25.160.188.976	18.766.783.715	16.239.639.369	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3.060.058.184	1.881.467.213	2.674.475.521	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	8.730.483.416	11.216.898.025	16.416.359.848	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	3 Unit	1.900.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	7 Unit	33 Unit	208 Unit	4.527.080.692	6.658.848.472	11.224.542.171	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Lapangan	Lapangan yang Disediakan							
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Unit	56 Unit	68 Unit	271.535.833	271.535.833	329.166.057	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	57 Unit	812 Unit	1.276.981.147	1.298.496.976	1.879.186.876	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	754.885.744	788.016.744	783.464.744	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	10.153.130.772	10.180.474.333	13.273.389.593	
		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	163.006.000	163.006.000	163.006.000	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	6.403.219.632	6.403.219.632	9.640.302.132	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	1.672.656.439	1.700.000.000	1.555.832.760	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	1.914.248.701	1.914.248.701	1.914.248.701	BAGIAN TATA USAHA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	20.235.876.858	24.308.024.593	24.407.974.743	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	169.123.596	169.123.596	169.123.596	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	221 Unit	221 Unit	3.248.791.512	3.311.041.512	3.311.041.512	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.500 Unit	1.500 Unit	1.500 Unit	121.078.800	121.078.800	121.078.800	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	14 Unit	14 Unit	12.702.266.022	16.370.582.324	16.600.525.643	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	650 Unit	740 Unit	740 Unit	2.779.788.694	3.068.570.127	2.964.960.427	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	725 Unit	910 Unit	910 Unit	1.214.828.234	1.267.628.234	1.241.244.765	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi							
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	4.132.488.432	4.132.488.432	4.761.945.398	Gaji dan Operasional KDH dan WKDH
		Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	182.400.632	182.400.632	92.621.598	BAGIAN KEUANGAN
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket	850.336.800	850.336.800	850.336.800	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	3.099.751.000	3.099.751.000	3.818.987.000	BAGIAN TATA USAHA
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	3.955.000.000	3.955.000.000	3.955.000.000	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.575.000.000	2.575.000.000	2.575.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	1.380.000.000	1.380.000.000	1.380.000.000	BAGIAN RUMAH TANGGA
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 indeks	88 indeks	88 indeks	849.666.396	3.528.450.096	3.553.099.908	
		Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen				
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	114.667.937	370.142.887	383.923.287	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	367.211.980	2.317.672.300	2.317.672.300	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	146.581.690	545.397.120	531.616.720	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	221.204.789	295.237.789	319.887.601	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	13.585.853.905	14.362.907.905	17.117.907.905	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.126.880.000	1.274.884.286	1.322.059.286	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.885.460.385	9.183.106.385	11.823.106.385	BAGIAN KOMUNIKASI

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Pimpinan	Pimpinan							PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.573.513.520	3.904.917.234	3.972.742.234	BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indek Pelayanan Publik	118,00 persen	118,00 persen	118,00 persen	47.104.561.945	53.617.072.945	58.335.546.500	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan				
		Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen				
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik	16 Kecamatan	16 Kecamatan	16 Kecamatan	1.243.070.919	2.564.932.919	2.884.932.919	
		Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen				
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	459.116.266	630.166.266	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	582.116.466	635.666.466	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	593.070.919	1.523.700.187	1.619.100.187	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen				BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan	9 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	33.648.595.679	35.440.053.679	44.062.795.046	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	27.308.446.907	28.309.315.138	36.383.637.470	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	5.594.949.562	6.031.207.793	6.855.453.478	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	745.199.210	1.099.530.748	823.704.098	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tercukupinya kebutuhan kebijakan produk hukum di daerah	118,00 persen	118,00 persen	118,00 persen	2.572.584.100	4.972.382.100	4.984.382.100	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	565 Dokumen	565 Dokumen	565 Dokumen	515.389.690	663.313.770	675.313.770	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 Kasus	55 Kasus	55 Kasus	1.526.396.830	1.903.334.330	1.903.334.330	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	1.000 Dokumen	530.797.580	2.405.734.000	2.405.734.000	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang	40,00 persen	40,00 persen	40,00 persen	9.640.311.247	10.639.704.247	6.403.436.435	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	1.105.200.523	1.345.408.523	1.343.410.523	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
4.01.02.2.04 .02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	8.535.110.724	9.294.295.724	5.060.025.912	BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daerah	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	4.537.339.432	5.628.215.572	6.813.874.179	
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
		Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
		Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen				
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	jumlah dokumen penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah	11.174.169.030 dokumen	11.174.169.030 dokumen	40 dokumen	1.300.838.200	2.212.143.200	3.034.243.200	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah							
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	318.188.798	719.168.798	719.168.798	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	602.629.125	1.072.919.125	1.895.019.125	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	380.020.277	420.055.277	420.055.277	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	683.498.400	879.788.400	880.980.000	
		Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	165.797.200	169.397.200	180.837.200	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	387.821.560	551.561.560	523.430.130	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.879.640	158.829.640	176.712.670	BAGIAN ADMINISTRASI

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.353.002.832	2.336.283.972	2.252.265.309	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	230 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	1.221.062.000	1.376.393.140	1.326.670.140	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Kegiatan	12 Dokumen	568.850.832	396.800.832	367.400.832	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	10 Orang	10 kegiatan	10 Kegiatan	563.090.000	563.090.000	558.194.337	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	jumlah dokumen BLT untuk pekerja rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	200.000.000	200.000.000	646.385.670	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000	200.000.000	646.385.670	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja							
JUMLAH									

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja, dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/ keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan Bersama DPRD Kota Semarang;

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat

Daerah Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

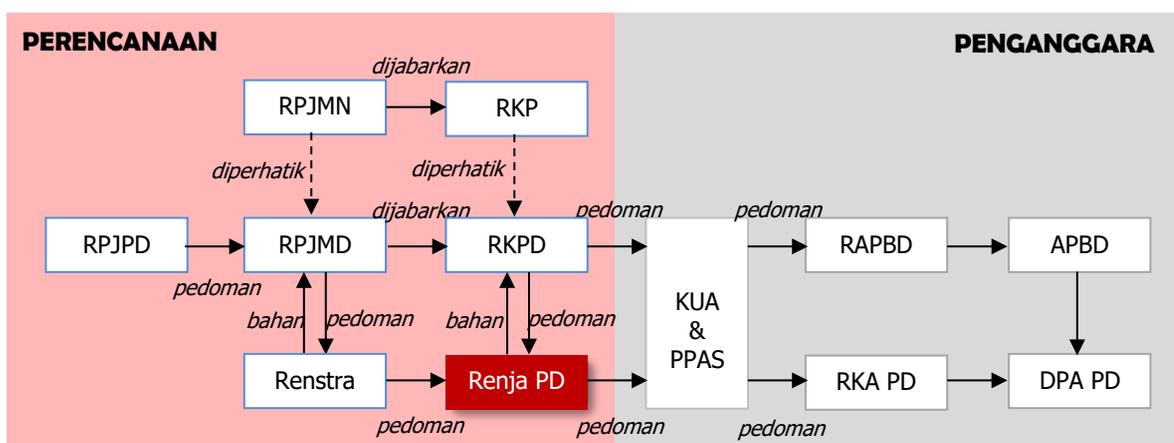
29. SEKRETARIAT DEWAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Sekretariat DPRD Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);

- s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat

DPRD Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan
Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
Sekretariat DPRD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9= (5+7)	10 = (9/4)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%						
4.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	41 dokumen	9 dokumen	8 dokumen	3 dokumen	37,5%	12 dokumen	29.27
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0.00	3 dokumen	27.27
4.02.01.2.01.02	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0.00	1 dokumen	20.00
4.02.01.2.01.03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0.00	1 dokumen	20.00
4.02.01.2.01.04	Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	2 dokumen	40.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.01.05	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0.00	1 dokumen	20.00
4.02.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.00	2 Laporan	40.00
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100.00	2 dokumen	40.00
4.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD	100%						
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	100%	100%	100%	100.00	100%	100.00
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 dokumen	1 laporan	0 laporan	0.00	1 dokumen	20.00
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0.00	1 Laporan	20.00
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	30 laporan	6 laporan	6 laporan	3 laporan	50.00	9 laporan	30.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
4.02.01.2.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Barang Milik Daerah yang terlindungi	5 unit						
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100.00	5 dokumen	25.00
4.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD	81 orang						
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	81 orang	50 orang	47 orang	20 orang	42.60	70 orang	28.00
4.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pelayanan Adm Perkantoran Sarana & Prasarana Aparatur	100%						
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	3 paket	3 paket	0 paket	0.00	3 Paket	30.00
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	35 Paket	7 paket	7 paket	2 paket	28.60	9 paket	25.71
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Peralatan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 Paket	12 paket	12 paket	6 paket	50.00	18 paket	30.00
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	30 Paket	6 paket	6 paket	2 paket	33.30	8 paket	26.67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0.00	1 dokumen	20.00
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50.00	18 laporan	30.00
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0.00	1 laporan	20.00
4.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%						
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	20 unit	5 unit	5 unit	2 unit	40.00	5 unit	25.00
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	100 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100.00	50 unit	50.00
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	150 unit	25 unit	25 unit	0 unit	0.00	25 Unit	16.67
4.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Umum Kantor, Jasa Surat Menyurat, Komunikasi Sumber daya Air & Listrik	100%						
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	1 laporan	1 laporan	0 laporan	0.00	1 laporan	20.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50.00	18 laporan	30.00
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50.00	18 laporan	30.00
4.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung Gedung Ktr/Bangunan Lainnya	100%						
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	235 Unit	47 unit	47 Unit	20 Unit	42.55	67 unit	28.51
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	248 Unit	48 unit	48 Unit	15 unit	31.25	63 unit	25.40
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit	2 unit	2 Unit	0 unit	0	2 unit	20.00
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150 Unit	30 unit	30 Unit	10 unit	33.30	40 unit	26.67
4.02.01.2.15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD	100%						
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Dprd	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang/bulan		100%	100%	100%	100%	100.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Dprd	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	30 Paket		6 Paket	3 Paket	50.00	9 Paket	30.00
4.02.01.2.16	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	Tertib Pelayanan Administrasi DPRD	100%						
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	20 Paket	4 paket	4 Paket	2 paket	50.00	6 paket	30.00
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	100%						
4.02.02.2.01	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan	100%						
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 dokumen	5 dokumen	17 dokumen	1 dokumen	5.88	6 dokumen	35.29
4.02.02.2.04	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%						
4.02.02.2.04.03	Publikasi Dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0.00	1 dokumen	20.00
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55 Orang	11 Orang	11 Orang	11 orang	100.00	22 orang	40.00
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0.00	1 dokumen	20.00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.02.02.2.05	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%						
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	750 dokumen	50 dokumen	150dokumen	50 dokumen	33.37	100 dokumen	40.00
4.02.02.2.08	FASILITASI TUGAS DPRD	Terlaksananya Koordinasi & Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%						
4.02.02.2.08.01	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0.00	1 dokumen	20.00
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0.00	1 dokumen	20.00

Sumber : Sekretariat-DPRD Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah Sub Kegiatan Koordinasi dan Dan Penyusunan DPA-SKPD , Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya, dan Pelaksanaan Reses

Ada beberapa sub kegiatan yang belum tercapai karena mengalami *refocusing* dan pelaksanaan pada Triwulan III tahun 2023.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Sekretariat DPRD Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4.02	SEKRETARIAT DPRD	111.905.273.587	45.099.783.405	40,30%
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	68.155.589.159	31.457.400.350	46,16%
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.012.494	5.242.900	15,88%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.128.674	205.000	2,02%
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.117.280	100.000	3,21%
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.199.030	-	0,00%
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.392.480	1.999.500	23,82%
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.199.030	-	0,00%
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.064.480	1.198.500	39,11%
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	1.911.520	1.739.900	91,02%
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.505.994.569	3.849.148.110	51,28%
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.140.519.359	3.692.389.110	51,71%
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	362.871.050	155.795.000	42,93%
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.008.000	692.000	68,65%
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.596.160	272.000	17,04%
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	48.000.000	96,00%
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	48.000.000	96,00%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	520.410.000	165.070.000	31,72%

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	520.410.000	165.070.000	31,72%
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.999.469.123	1.950.385.432	32,51%
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	24.024.000	48,05%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	417.627.845	121.771.796	29,16%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	473.413.980	181.908.850	38,42%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	323.617.400	116.028.690	35,85%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	339.944.180	113.285.000	33,32%
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.584.980.240	1.210.363.596	46,82%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.809.885.478	183.003.500	10,11%
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.941.532.270	1.228.165.000	41,75%
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.807.519.315	487.315.000	26,96%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	878.332.835	740.850.000	84,35%
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	255.680.120	-	0,00%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.544.332.256	1.156.520.115	45,45%
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	10.000.000	50,00%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.162.256	42.414.563	25,37%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.357.170.000	1.104.105.552	46,84%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.081.407.760	697.478.591	33,51%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	938.500.000	390.692.732	41,63%
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.014.560	91.108.030	26,80%
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.044.000	145.382.129	25,91%
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	241.849.200	70.295.700	29,07%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	44.590.930.687	21.434.420.702	48,07%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	43.515.288.950	21.179.445.702	48,67%
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.075.641.737	254.975.000	23,70%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.888.500.000	922.969.500	48,87%
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.888.500.000	922.969.500	48,87%
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	43.749.684.428	13.642.383.055	31,18%
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	9.929.408.134	2.744.814.158	27,64%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9.929.408.134	2.744.814.158	27,64%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	11.943.794.195	5.031.254.800	42,12%
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	785.600.000	41.500.000	5,28%
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8.712.618.895	4.253.500.000	48,82%
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.445.575.300	736.254.800	30,11%
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.056.512.974	2.102.001.800	29,79%
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	7.056.512.974	2.102.001.800	29,79%

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	14.819.969.125	3.764.312.297	25,40%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.270.465.126	3.306.672.297	26,95%
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.549.503.999	457.640.000	17,95%

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai satu urusan, 2 program, dan 13 kegiatan dan 40 sub kegiatan pada OPD kota Semarang adalah sebesar Rp111.905.273.587 . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp45.099.783.405 . Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp66.805.490.182

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD adalah melaksanakan fungsi sebagai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat
DPRD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	2023 Tw II	2023
TUJUAN :								
Meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD	85 %	90%	95%	95%	100%	0	88 %
SASARAN :								
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Persentase Raperda menjadi Perda	80	82,35	95%	95%	100%	6	82
Meningkatnya penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP OPD	60	81	88	94.12	94.12	0	80

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan Meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung Kinerja DPRD memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD, target sebesar 90% belum dapat dinilai karena penilaian akan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran;
- b. Sasaran memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator Persentase Raperda menjadi Perda belum dapat mencapai target sebesar 82.35%, dengan realisasi sebesar 6.00% . Dari target 17 Raperda baru 1 Raperda yang ditetapkan menjadi Perda ;
 - 2) Indikator Nilai SAKIP belum dapat mencapai target sebesar 81, belum dapat dinilai karena penilaian akan dilaksanakan pada awal tahun 2024.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dalam mendukung DPRD Kota Semarang menjadi parlemen yang modern, berbagai inovasi dilakukan untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dan menyampaikan aspirasi ke pada para wakil rakyat.

Dahulu, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi mereka ke DPRD harus mengirimkan surat atau berkunjung langsung ke kantor DPRD. Surat yang dikirimkan tentu butuh waktu hingga bisa sampai ke tangan para anggota DPRD. Begitu pula dengan datang langsung untuk mengadu, belum tentu saat ini juga bisa bertemu dengan anggota dewan yang diinginkan.

Proses penyampaian aspirasi juga bisa melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan kegiatan reses dewan. Fakta di lapangan, aspirasi dari rakyat belum sepenuhnya mampu tersampaikan pada anggota dewan. Tapi kini sudah berubah. Masyarakat bisa mengadu kapan pun juga. Waktu tersedia 24 jam sehari. Tidak lagi lewat surat berujung ke kantor DPRD. Aplikasi *e-Sarapan* membuat masyarakat Kota Semarang lebih mudah menyampaikan *uneg-uneg*-nya ke DPRD.

Masyarakat juga bisa menyampaikan kegiatan DPRD Kota Semarang lewat TV Parlemen D-TV. Agenda kegiatan DPRD, termasuk rapat-rapat, disarankan secara live streaming lewat akun Youtube DPRD Kota Semarang. Lewat inovasi ini, masyarakat bisa menyaksikan dan mengawasi secara langsung kinerja wakil-wakil mereka di parlemen.

Secara rutin DPRD Kota Semarang juga menyampaikan hasil kerja mereka dalam menanggapi aspirasi masyarakat lewat media massa. Media cetak, online,

radio, dan televisi ikut menyebarkan informasi dan kinerja DPRD Kota Semarang kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu bagian dari bentuk tanggung jawab DPRD Kota Semarang dalam melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Media sosial juga digunakan DPRD Kota Semarang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Penggunaan media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube sangat populer dikalangan generasi milenial. Lewat berbagai media sosial tersebut, DPRD Kota Semarang bisa menjangkau kalangan generasi milenial yang juga menjadi bagian dari konstituen mereka.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan diantaranya:

1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi DPRD tidak bisa terserap optimal, dikarenakan terdapat selisih yang cukup tinggi antara penganggaran dengan realisasi anggaran.
2. Sesuai dengan Program Pembentukan Perda tahun 2022, DPRD Kota Semarang akan mengesahkan 16 (enam belas) Raperda. Namun untuk yang berakhir sampai dengan 31 Juli 2023, hanya 1 (satu) yang bisa disetujui penetapannya.
3. Akibat dari rendahnya jumlah raperda yang disetujui berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan Konsultasi dan Kujungan Kerja Pansus, karena dalam rangkaian pembahasan Raperda selalu diikuti dengan kegiatan-kegiatan konsultasi dan kunjungan kerja luar daerah.
4. Perkembangan teknologi informasi yang cepat membutuhkan sumber daya manusia yang cukup memadai, untuk itu perlunya penguatan kualitas dan peningkatan kuantitas sumber daya manusia;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Perkembangan Teknologi yang semakin cemat dan Smart sehingga memudahkan kita dalam memperoleh Informasi yg tepat dan akurat;
- 2) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi melalui kanan <http://dprd.semarangkota.go.id/sarapan>;
- 3) Menjelang tahun politik tahun 2024 tentunya dinamika politik nasional akan berpengaruh terhadap dinamika politik di Kota Semarang, sehingga

diperlukan peran antara Pemerintah dan Legislatif untuk menjaga sinergitas dan kondusifitas;

- 4) Pemberlakuan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tentu saja akan berdampak pada penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD tahun 2023;
 - 5) Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang;
 - 6) Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal;
 - 7) Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
 - 8) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan;
 - 9) Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/purna tugas
- b. Peluang
- 1) Meningkatkan sinergitas penyusunan peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
 - 2) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD;
 - 3) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan publik kedepan;
 - 4) Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib;
 - 5) Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan;
 - 6) Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;
 - 7) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;
 - 8) Terbentuknya jejaring kerja dengan Stakeholder, Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah, Media Masa dan Elektronik;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai berikut :

1. Ruangan kantor Sekretariat DPRD sudah harus memadai untuk memfasilitasi kegiatan para Anggota DPRD;
2. Secara kuantitas perlu adanya penambahan SDM guna membantu secara aktif setiap kegiatan Anggota DPRD;
3. Peningkatan secara kualitatif SDM Sekretariat DPRD dilaksanakan dengan cara mengadakan bintek untuk bidang tertentu bagi karyawan;
4. Penganggaran secara lengkap berupa sarana teknologi canggih untuk mempercepat kinerja dan untuk menambah wawasan maupun pengetahuan bagi para Anggota DPRD;
5. Agenda secara periodik untuk forum komunikasi dan konsultasi antara karyawan Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD agar terjalin komunikasi yang harmonis sehingga terdapat kesamaan berpikir, berpendapat dan bertingkah laku;
6. Memberi dukungan dan fasilitas yang memadai berupa penganggaran kebutuhan dana agar tercipta produk-produk hukum yang dibutuhkan dalam pembangunan kota.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.02	SEKRETARIAT DPRD			112.634.147.228				109.634.147.228
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	68.884.462.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD	100%	68.305.296.590
4.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	10.128.674	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	10.128.674
4.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.117.280	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.117.280
4.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.199.030	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	3.199.030
4.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.392.480	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	8.392.480
4.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.199.030	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.199.030
4.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.064.480	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.064.480

NO	Rancangan Perubahan RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.911.520	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.911.520
4.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji/Tunjangan ASN	47 orang / bulan	6.934.719.086	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji/Tunjangan ASN	47 orang / bulan	6.934.719.086
4.02.01.2.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	362.871.050	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	321.351.982
4.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.008.000	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.008.000
4.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 laporan	1.596.160	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 laporan	1.493.280
4.02.01.2.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	5 dokumen	50.000.000	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	5 dokumen	50.000.000
4.02.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 orang	520.410.000	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 orang	453.000.000
4.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	50.000.000	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	50.000.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Paket	417.627.845	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Paket	417.627.845
4.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	473.413.980	PENYEDIAAN PERALATAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	473.413.980
4.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	6 Paket	323.617.400	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	6 Paket	323.617.400
4.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	339.944.180	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	339.944.180
4.02.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.584.980.240	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.300.661.353
4.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.809.885.478	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.706.279.680
4.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 unit	1.567.182.552	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 unit	604.880.552
4.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	50 unit	1.101.782.028	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	50 unit	990.057.431
4.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	25 unit	272.567.690	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	25 unit	272.567.690

NO	Rancangan Perubahan RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
4.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	20.000.000	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	20.000.000
4.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	167.162.256	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	2.465.252.000
4.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	2.357.170.000	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	2.465.252.000
4.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	938.500.000	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	938.500.000
4.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	248 Unit	340.014.560	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	248 Unit	269.693.340
4.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	561.044.000	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	561.044.000
4.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150 Unit	241.849.200	PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150 Unit	227.140.750
4.02.01.2.15.01	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50orang/bulan	44.449.962.864	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50orang/bulan	44.449.962.864
4.02.01.2.15.02	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	6 Paket	1.075.641.737	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	6 Paket	1.142.357.535
4.02.01.2.16.04	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	1.888.500.000	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	1.888.500.000

NO	Rancangan Perubahan RKPD 2023				Hasil Analisis Kebutuhan			
	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
04.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			43.749.684.428	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			41.328.850.638
4.02.03.2.01.02	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 dokumen	9.929.408.134	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 dokumen	8.858.545.134
4.02.03.2.04.03	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 dokumen	872.560.000	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 dokumen	761.600.000
4.02.03.2.04.04	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11 Orang	8.712.618.895	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11 Orang	8.412.618.895
4.02.03.2.04.06	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen	2.358.615.300	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen	2.620.575.300
4.02.02.2.05.03	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	7.056.512.974	PELAKSANAAN RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	6.463.633.544
4.02.03.2.08.01	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 dokumen	12.270.465.126	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 dokumen	11.662.373.766
4.02.03.2.08.04	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dokumen	2.549.503.999	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dokumen	2.549.503.999

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan,** dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.

- 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
- 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.

- 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.

- 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.

- 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang yaitu “Terwujudnya tata kelola Sekretariat DPRD yang baik dan melayani”, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Instrumen Survey Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD;
- b. Indek Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD kepada DPRD;
- c. Jumlah Perda dibagi Jumlah Rancangan Perda yang termuat dalam Propemperda dikali 100 %;
- d. Nilai SAKIP.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD kepada DPRD	%	90%
SASARAN : Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Persentase Raperda menjadi Perda	%	82,35
Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP PD	Nilai	81

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Sekretariat DPRD bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” dan indikator sasaran “Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis OPD Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Sekretariat
DPRD Kota Semarang

Kode	Bidang Urusan/Program RPJMD	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
4.02	SEKRETARIAT DPRD					129.984.475.35 9	111.905.273.58 7	109.634.147.22 8		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD				66.842.330.639	68.155.589.159	68.305.296.590	APBD KOTA SEMARANG	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.128.674	10.128.674	10.128.674		
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.117.280	3.117.280	3.117.280		
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.199.030	3.199.030	3.199.030		
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.392.480	8.392.480	8.392.480		
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.199.030	3.199.030	3.199.030		
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.064.480	3.064.480	3.064.480		
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 dokumen	1 Laporan	1.911.520	1.911.520	1.911.520		

Kode	Bidang Urusan/Program RPJMD	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji/Tunjangan ASN	47 orang / bulan	47 orang / bulan	47 orang / bulan	7.140.519.359	7.140.519.359	6.934.719.086		
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	362.871.050	362.871.050	321.351.982		
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3.708.000	1.008.000	1.008.000		
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6.096.160	1.596.160	1.493.280		
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47 orang	47 orang	47 orang	520.410.000	520.410.000	453.000.000		
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	417.627.845	417.627.845	417.627.845		
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	473.413.980	473.413.980	473.413.980		
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	323.617.400	323.617.400	323.617.400		

Kode	Bidang Urusan/Program RPJMD	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	339.944.180	339.944.180	339.944.180		
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.151.180.240	2.584.980.240	3.300.661.353		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.541.406.000	1.809.885.478	1.706.279.680		
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	5 unit	5 unit	5 unit	1.929.154.315	1.807.519.315	604.880.552		
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	50 unit	50 unit	50 unit	878.332.835	878.332.835	990.057.431		
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	25 unit	25 unit	25 unit	255.680.120	255.680.120	272.567.690		
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	167.162.256	167.162.256	2.465.252.000		
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	2.317.170.000	2.357.170.000	2.465.252.000		
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	47 Unit	938.500.000	938.500.000	938.500.000		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	248 Unit	248 Unit	248 Unit	340.014.560	340.014.560	269.693.340		

Kode	Bidang Urusan/Program RPJMD	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	561.044.000	561.044.000	561.044.000		
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	150 Unit	150 Unit	150 Unit	304.714.200	241.849.200	227.140.750		
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50orang/bulan	50orang/bulan	50orang/bulan	43.508.088.950	43.515.288.950	44.449.962.864		
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	1.008.662.695	1.075.641.737	1.142.357.535		
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	1.200.000.000	1.888.500.000	1.888.500.000		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD				63.142.144.720	43.749.684.428	41.328.850.638	APBD KOTA SEMARANG	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 dokumen	17 dokumen	17 dokumen	19.162.791.094	9.929.408.134	8.858.545.134		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	785.600.000	785.600.000	761.600.000		
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11 Orang	11 Orang	11 Orang	9.858.730.184	8.712.618.895	8.412.618.895		
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.445.575.300	2.445.575.300	2.620.575.300		
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	6.063.055.494	7.056.512.974	6.463.633.544		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	22.276.888.649	12.270.465.126	11.662.373.766		

Kode	Bidang Urusan/Program RPJMD	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.549.503.999	2.549.503.999	2.549.503.999		
JUMLAH						129.984.475.35 9	111.905.273.58 7	109.634.147.22 8		

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. CATATAN PENTING

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Sesuai dengan Program Pembentukan Perda tahun 2023, Komunikasi yang intensif dengan seluruh pemangku kebijakan maupun jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang pun mutlak dibutuhkan mengingat kondusivitas Kota Semarang tidak mungkin tercipta dan terpelihara tanpa dukungan dari berbagai pihak.
3. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

4.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Semarang ini memuat antara lain :

1. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang..

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

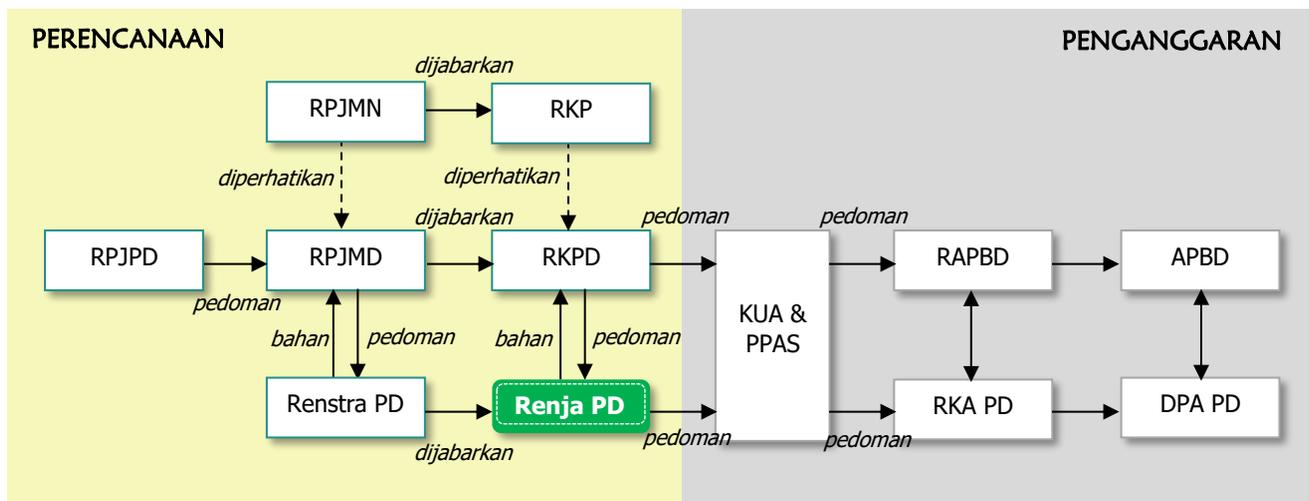
30. BAPPEDA

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah. Dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian Renja juga memuat sub kegiatan.

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023**, dengan mengacu pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.

Selain mengacu pada Renstra, penyusunan Renja juga memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang; dimana sehubungan dengan dinamika perencanaan kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; serta (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah, serta penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023, termasuk pada Bappeda Kota Semarang.

Karena itu, maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta regulasi terkait lainnya, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Selanjutnya Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2023.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51);
- y. Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Bappeda Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-

target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;

- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2023.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Bappeda Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Bappeda Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Bappeda Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang menggunakan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Bappeda Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 %	100,00 % (19,51 %)					
X.XX.01.2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	41 Dokumen	8 Dokumen					
X.XX.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja Bappeda	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Renstra Bappeda	1 Dokumen	-	-	-	-	-	0,00
		Jumlah Dokumen RTP Bappeda	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	-
X.XX.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
X.XX.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RDPPA Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	2 Dokumen	40,00
X.XX.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Dokumen LKJIP Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Dokumen Laporan PUG Bappeda	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00 %	100,00 % (20,00 %)					
X.XX.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda	100,00 %	100,00 % (20,00 %)					
X.XX.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	66 Orang / Bulan	66 Orang / Bulan	100,00	66 Orang / Bulan	-
X.XX.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang Disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	4 Dokumen	1 Dokumen	25,00	1 Dokumen	-
X.XX.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	15 Dokumen	3 Dokumen					
X.XX.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bappeda	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN	100,00 %	100,00 % (20,00 %)					
X.XX.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	15 Kegiatan	3 Kegiatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
X.XX.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bintek / Sosialisasi	15 Kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	66 Orang	66 Orang	25 Orang	37,88	25 Orang	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA								
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 %	100,00 % (23,02 %)					
X.XX.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00 %	100,00 % (29,06 %)					
X.XX.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19 Jenis	6 Jenis (31,58 %)	4 Paket (21,05 %)	0 Paket (0,00 %)	0,00	6 Jenis	31,58
X.XX.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	60 Jenis	15 Jenis (25,00 %)	15 Paket (25,00 %)	7 Paket (11,67 %)	46,67	22 Paket	36,67
X.XX.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	118 Jenis	63 Jenis (53,39 %)	30 Paket (25,42 %)	15 Paket (12,71 %)	50,00	78 Paket	66,10
X.XX.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	35 Jenis	8 Jenis (22,86 %)	7 Paket (20,00 %)	3 Paket (8,57 %)	42,86	11 Paket	31,43
X.XX.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Berkunjung	25900 Orang	6000 orang (23,17 %)	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	4 Laporan	1 Laporan	25,00	1 Laporan	0,00
X.XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	775 Kegiatan	180 kegiatan (23,23 %)	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	4 Laporan	1 Laporan	25,00	1 Laporan	0,00
X.XX.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Bappeda	33 Jenis	8 jenis (24,24 %)	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	1 Laporan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	-
X.XX.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00 %	100,00 % (20,00 %)					
X.XX.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi (Koran / Majalah)	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	4 Laporan	1 Laporan	25,00	1 Laporan	0,00
X.XX.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	100,00 % (20,00 %)	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	4 Laporan	1 Laporan	25,00	1 Laporan	0,00
X.XX.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100,00 %	100,00 % (20,00 %)					
X.XX.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	1 Unit (20,00 %)	1 Unit (20,00 %)	1 Unit (20,00 %)	100,00	1 Unit	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
X.XX.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145 Unit	29 Unit (20,00 %)	29 Unit (20,00 %)	29 Unit (20,00 %)	100,00	29 Unit	40,00
X.XX.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung 2 Paket (20,00 %)	1 Gedung 2 Paket (20,00 %)	1 Gedung 2 Paket (20,00 %)	100,00	1 Gedung 2 Paket	40,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
		Persentase keselarasan perencanaan tataran kota	100,00 %	99,44 %					
5.01.02.2.0 1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100,00 %	100,00 % (16,36 %)					
5.01.02.2.01 .03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPDP	5 Kegiatan	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	100,00	2 Kegiatan	40,00
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan (100,00 %)	0 Kegiatan (0,00 %)	0,00	0 Kegiatan	0,00
		Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01 .04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RKPDP)	5 Kegiatan	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	100,00	2 Kegiatan	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJPD)	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pelaksanaan Forum OPD Kota Semarang (dalam rangka penyusunan RPJMD)	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD	5 Kegiatan	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	100,00	2 Kegiatan	40,00
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perwal Pedoman Pelaksanaan Rembug Warga dan Musrenbang Kel dan Kec	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	2 Dokumen	40,00
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	-	800 Usulan	800 Usulan	800 Usulan	100,00	800,00	-
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah dokumen background study RPJPD	1 Dokumen	1 Dokumen (Bidang Infracwil, Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Perekonomian & SDA) (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen (Bidang Infracwil, Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Perekonomian & SDA) (100,00 %)	100,00
		Jumlah dokumen Teknokratik RPJPD	1 Dokumen	-	-				
		Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJPD	1 Dokumen	-	-				
		Jumlah Dokumen RPJPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen background study RPJMD	1 Dokumen	-	-				
		Jumlah dokumen Teknokratik RPJMD	1 Dokumen	-	-				
		Jumlah dokumen Naskah Akademik RPJMD	1 Dokumen	-	-				
		Jumlah Dokumen RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah dokumen Kajian Perencanaan	6 Dokumen	1 Dokumen (16,67 %)	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00 %	100,00 % (15,00 %)					
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Kinerja Urusan (IKU) Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Forum Satu Data Kota Semarang	10 Dokumen	1 Dokumen (10,00 %)	-	-	-	-	-
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100,00 %	100,00 % (18,18 %)					
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Perwal Renstra PD Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Workshop Penyusunan RKPD Tahun 2023	-	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Penyelenggaraan Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	-
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	1 Dokumen (100,00 %)	100,00	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RKPD	20 Dokumen	4 Dokumen (20,00 %)	4 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (5,00 %)	100,00	5 Dokumen	25,00
		Jumlah Laporan Evaluasi Hasil RPJMD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5.01.03-	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
		Persentase keselarasan perencanaan tataran perangkat daerah (Rumpun Pemsosbud)	100,00 %	98.74 %					
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00 %	100,00 % (20,39 %)					
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
	Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Ramah HAM	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	-	-
		Jumlah Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	1 Aplikasi (100,00 %)	-	-	-	1 Aplikasi (100,00 %)	100,00
		Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi (100,00 %)	0 Aplikasi (0,00 %)	0,00	0 Aplikasi	0,00
		Jumlah Dokumen Kajian Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Kelurahan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelaporan Lembaga Kemasyarakatan	1 Aplikasi	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Grand Design Pembangunan Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Implementasi Penegakan Peraturan Daerah di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Penganggaran di Kecamatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023		
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%	
		Jumlah Dokumen Review Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00	
		Jumlah Kegiatan TOT/Bintek PPRG	5 Kegiatan	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	0 Kegiatan (0,00 %)	0,00	1 Kegiatan	20,00	
		Jumlah Dokumen Renum TMMD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00	
		Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-					
		Jumlah Dokumen RAD Kepemudaan	1 Dokumen	-	-					
		Jumlah Dokumen RAD Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Berbasis Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-					
		Jumlah Dokumen Penguatan Peran CSR dalam program pemberdayaan masyarakat dan perempuan	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00	
		Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan digitalisasi Arsip Pemerintahan	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen Review Pelaksanaan RAD Kota Layak Anak	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Sinergitas Forum anak dan Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kajian E-Library di Kawasan Publik dalam mendukung Semarang Smart City	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kajian Mekanisme Layanan Informasi, Publikasi, Edukasi Khusus untuk Anak	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Kajian Peningkatan Kampung Tematik menuju Destinasi Wisata	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Ramah Lanjut Usia (2023-2028)	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting	-	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah LP2KD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Kinerja TKPKD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan TPB / SDGs Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Sistem Informasi Kelurahan Sehat	1 Aplikasi	1 Aplikasi (100,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Aplikasi	0,00
		Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Semarang 2022-2026	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen (100,00 %)	100,00
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2019, 2020, 2021	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Sehat Kota Semarang 2024 - 2029	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Ketenagakerjaan 2024 - 2029	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) SDG's Kota Semarang 2018 - 2030	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kampung Tematik Penetapan Tahun 2022, 2023, 2024	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Semarang Kota Inklusif 2026 – 2031	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Rating Kelurahan Sehat	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	1 Dokumen	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi	3 Dokumen	1 Dokumen (33,33 %)	1 Dokumen (33,33 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	33,33
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
		Persentase keselarasan perencanaan tataran perangkat daerah (Rumpun Perekonomian)	100,00 %	100,47 %					
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00 %	100,00 % (19,11 %)					
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Alternatif Pembiayaan Pembangunan di Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Roadmap Pemulihan Ekonomi Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Investasi di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen Pemetaan Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Promosi Investasi Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pemetaan Objek PBB Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Strategi Efektivitas Kebijakan Publik dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Penguatan Budaya Perusahaan BUMD di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen Pengembangan Sentra Industri di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Kajian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Grand Desain Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Wisata Berbasis Potensi Lokal	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	-
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal	5 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Kajian Potensi Sport Tourism di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Pengembangan UMKM Berbasis Klaster Usaha yang Ideal & Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen Strategi Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pola Pengembangan Klaster Ekonomi Kreatif di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Pengembangan Pariwisata Lokal berbasis Desa Wisata & Kearifan Lokal	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Kewenangan OPD Pemkot terhadap Pelaku Usaha di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Dampak Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Pengembangan Potensi Ekspor Perdagangan di Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.02.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Sistem Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Transformasi Sektor SDA untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Laporan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Semarang Technopark	4 Dokumen	-	1 Dokumen (25,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Pola Pengembangan Income Generation di Sektor Informal pada SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-					
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-					
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Sektor SDA mendukung green economy	1 Dokumen	-					
		Jumlah Dokumen Roadmap Industrialisasi Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen Masterplan Perikanan Berkelanjutan dalam mendukung Blue Economy di Kota Semarang	1 Dokumen	-					
		Jumlah Dokumen Roadmap Optimalisasi Sumber Daya Perairan dalam Pengembangan Ekonomi di Kota Semarang	1 Dokumen	-					
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Kebijakan Publik pada Sektor SDA di Kota Semarang	1 Dokumen	-					
		Jumlah Dokumen Optimalisasi Sistem Pangan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang	1 Dokumen	-					
		Jumlah Dokumen Bisnis Plan Inkubator Semarang Technopark	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen UKL-UPL Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Semarang	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen NA dan Raperda Pembudayaan Pertanian Perkotaan	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
		Persentase keselarasan perencanaan tataran perangkat daerah (Rumpun Infrastruktur)	100,00 %	98.30 %					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 %	100,00 % (27,58 %)					
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen RPAM (Rencana Pengamanan Air Minum)	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Hunian vertikal	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) Kota Semarang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Ranperda Air Limbah Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen NA Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen NA Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen RP3 (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan)	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen RAD AMPL	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Kajian Penanganan Permukiman di Lokasi Rawan Bencana	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) Dadapsari-Kuningan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review RISPK	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen EHRA (Enviromental Health Risk Assesment)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review RP2KPKPK	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen Masterplan Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Jakstrada SPAM	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Draft Perwal Masterplan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Perwal Perencanaan Mobilitas Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Review Masterplan Transportasi	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah dokumen Kajian Pengembangan RTH Sempadan Sungai	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen FS Rechanneling the city	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Fasilitas Parkir Angkutan Barang	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Transportasi rendah karbon	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen NA dan Draft Peraturan Daerah Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perda Sumber Daya Air	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Draft Perwal Masterplan Transportasi	-	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	-
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Semarang	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi pembangunan sektor PKP	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi WTP (Warga Terdampak Proyek) SPALDT	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
	Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Semarang Lama	4 Dokumen	-	1 Dokumen (25,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Perencanaan Rooftop Solar Panel	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Grand Design Pengembangan Wilayah	1 Dokumen	-	1 Dokumen (100,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	0 Dokumen	0,00
		Jumlah Dokumen Kajian Land Banking	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Masterplan Ruang Terbuka Hijau	1 Dokumen	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	100,00
		Jumlah Dokumen Kajian Sosial Semarang Lama	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Masterplan Vertical and Roof Garden / farming	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Manajemen Air skala Kampung	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Persampahan Sektor Hilir	-	1 Dokumen (100,00 %)	-	-	-	1 Dokumen	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dok. Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K)	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100,00 %	100,00 %					
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100,00 %	100,00 % (16,67 %)					
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	6 Dokumen	1 Dokumen (16,67 %)	1 Dokumen (16,67 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	16,67
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100,00 %	100,00 % (12,50 %)					
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	8 Dokumen	1 Dokumen (12,50 %)	6 Dokumen (75,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	12,50

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah Dokumen Kajian Sejarah Perkembangan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 1 Sejarah Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 2 Sejarah Pemerintahan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 3 (Sejarah Budaya Arsitektur & Kuliner Masyarakat Kota Semarang)	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen History of Semarang Buku 4 Kawasan Kota Semarang	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	100,00 %	100,00 % (21,21 %)					
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	14 Dokumen	2 Dokumen (14,29 %)	6 Dokumen (42,86 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	2 Dokumen	14,29
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	14 Dokumen	2 Dokumen (14,29 %)	6 Dokumen (31,58 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	5 Dokumen	26,32
		Jumlah Kajian Bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan	5 Dokumen	3 Dokumen (60,00 %)					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100,00 %	100,00 % (20,00 %)					
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi Lomba Krenova	5 Kegiatan	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	100,00	2 Kegiatan	40,00
		Jumlah Penyelenggaraan lomba krenova	5 Kegiatan	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	-	0,00	1 Kegiatan	20,00
		Jumlah Laporan Monev Inventor Krenova	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	-	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi	5 Kegiatan	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	-	0,00	1 Kegiatan	20,00
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	-
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Monev Penguatan SIDA	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Ripetek)	10 edisi	2 Edisi (20,00 %)	2 Edisi (20,00 %)	0 Edisi (0,00 %)	0,00	2 Edisi	20,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi dan Capaian Target Renstra s.d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9=5+7	10=9/4 x100%
		Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding)	10 Kegiatan	2 Kegiatan (20,00 %)	2 Kegiatan (20,00 %)	0 Kegiatan (0,00 %)	0,00	2 Kegiatan	20,00
		Jumlah Laporan Monev Smart City dan SPBE	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Penyelenggaraan Workshop HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	5 Kegiatan	1 Kegiatan (20,00 %)	1 Kegiatan (20,00 %)	0 Kegiatan (0,00 %)	0,00	1 Kegiatan	20,00

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2023, setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bappeda Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Bappeda Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01	URUSAN PERENCANAAN	25.255.986.010	8.401.119.026	33,26
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.693.846.010	6.074.824.081	41,34
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.991.560	2.050.250	13,68
5.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	537.480	0	0,00
5.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.014.400	0	0,00
5.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.534.400	0	0,00
5.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.014.400	1.250.000	41,47
5.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.534.400	0	0,00
5.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.356.480	800.250	58,99
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.466.429.530	5.230.223.608	41,95
5.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.101.850.010	5.063.783.608	41,84
5.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	363.000.000	166.440.000	45,85
5.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	296.160	0	0,00
5.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	987.200	0	0,00
5.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	296.160	0	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.990.680	9.000.000	9,68
5.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92.990.680	9.000.000	9,68
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.289.272.640	410.624.160	31,85
5.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.880.000	0	0,00
5.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.130.000	8.690.185	14,95
5.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.960.000	11.508.400	15,35
5.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.602.640	4.155.250	10,23
5.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	63.900.000	8.321.000	13,02
5.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486.400.000	35.674.855	7,33
5.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	492.400.000	342.274.470	69,51
5.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.040.000	32.738.832	17,41
5.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.440.000	1.453.601	13,92
5.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.600.000	31.285.231	17,62
5.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642.121.600	390.187.231	60,77
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	20.786.104	51,56
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.502.820	139.697.427	37,91
5.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233.305.600	229.703.700	98,46
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.631.830.000	563.897.821	21,43
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.708.180.000	451.109.001	26,41

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	133.300.000	8.722.500	6,54
5.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	94.250.000	2.242.350	2,38
5.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	317.450.000	146.988.700	46,30
5.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	132.180.000	13.523.500	10,23
5.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	1.031.000.000	279.631.951	27,12
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	181.950.000	860.000	0,47
5.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	88.000.000	860.000	0,98
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	93.950.000	0	0,00
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	741.700.000	111.928.820	15,09
5.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	447.200.000	84.399.589	18,87
5.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	294.500.000	27.529.231	9,35
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.930.310.000	1.762.397.124	22,22
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.099.010.000	258.537.469	12,32
5.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	407.100.000	80.272.041	19,72
5.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	38.910.000	3.336.200	8,57
5.01.03.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	912.500.000	90.518.328	9,92
5.01.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	740.500.000	84.410.900	11,40

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.770.800.000	315.489.863	17,82
5.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	951.000.000	176.058.399	18,51
5.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	362.300.000	88.786.526	24,51
5.01.03.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	442.500.000	49.209.158	11,12
5.01.03.2.02.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	15.000.000	1.435.780	9,57
5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4.060.500.000	1.188.369.792	29,27
5.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.245.000.000	583.714.659	26,00
5.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	651.000.000	129.099.643	19,83
5.01.03.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	624.000.000	89.028.600	14,27
5.01.03.2.03.07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	540.500.000	386.526.890	71,51
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.047.450.000	104.324.117	5,10
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.047.450.000	104.324.117	5,10
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	93.500.000	920.380	0,98
5.05.02.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	93.500.000	920.380	0,98
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	471.400.000	3.408.980	0,72

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
5.05.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	471.400.000	3.408.980	0,72
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	840.800.000	12.457.200	1,48
5.05.02.2.03.02	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	420.400.000	7.315.500	1,74
5.05.02.2.03.09	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	420.400.000	5.141.700	1,22
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	641.750.000	87.537.557	13,64
5.05.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	255.000.000	27.242.827	10,68
5.05.02.2.04.03	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	106.250.000	26.140.946	24,60
5.05.02.2.04.04	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	255.000.000	26.610.692	10,44
5.05.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	25.500.000	7.543.092	29,58
	J U M L A H	27.303.436.010	8.505.443.143	31,15

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 4 program, 16 kegiatan dan 53 sub kegiatan pada Bappeda kota Semarang adalah sebesar Rp 27.303.436.010,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Semarang sebesar Rp 27.003.436.010,- dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 300.000.000,- . Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 8.505.443.143,- (31,15 %). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 18.797.992.867,- (68,85 %).

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Selain terkait penyelenggaraan pelayanan dalam perencanaan juga diraih penghargaan terkait pelayanan dalam hal penelitian dan pengembangan. Diantaranya yaitu Penghargaan Kota Terinovatif dari *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2022 dari Menteri Dalam Negeri, dan Juara Umum Kota pada Anugerah Pemetaan Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dari Gubernur Jawa Tengah.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana tabel berikut. Juga dilakukan penyesuaian terkait indikator Nilai AKIP Bappeda yang mengalami perubahan formulasi perhitungan, sehingga menggunakan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET IKU					REALISASI	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2023	2023
Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	91,00	91,20	91,40	91,60	91,80	79,01	91,20
Sasaran 1 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	88,80 %	89,60 %	90,40 %	91,20 %	92,00 %	88,77	89,60 %

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET IKU					REALISASI	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2023	2023
Sasaran 2 : Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100,0 0 %	100,0 0 %	100,0 0 %	100,0 0% 	100,0 0 %	40,00 %	100,00 %
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	80,60	81,00	81,50	82,00	82,50	81,40	81,40

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Bappeda tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”. Dari target sebesar 91,20, realisasinya adalah sebesar 79,01 (capaian 86,63 %). Hal ini disebabkan adanya variabel indikator yang masih belum terealisasi. Diharapkan pada akhir tahun target yang ditetapkan dapat tercapai.
- b. Sasaran 1 : **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah”. Dari target sebesar 89,60 % realisasinya adalah sebesar 88,77 % (capaian 99,07 %). Hal ini disebabkan adanya variabel indikator yang belum mencapai target. Diharapkan pada akhir tahun target yang ditetapkan dapat tercapai.
- c. Sasaran 2 : **“Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah”. Dari target sebesar 100,00 % realisasinya adalah sebesar 0,00 % (capaian 0,00 %). Hal ini disebabkan seluruh variabel indikator sedang dalam proses pencapaian target. Diharapkan pada akhir tahun, target yang ditetapkan dapat tercapai.
- d. Sasaran 3 : **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP Bappeda”. Dari target sebesar 81,00 %, realisasinya adalah sebesar 81,40 % (capaian 100,49 %). Capaian ini kemudian perlu menjadi pertimbangan dalam penetapan target berikutnya.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Bappeda dalam pelaksanaan fungsinya di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bappeda Kota Semarang
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA PROYEKSI		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 Trw II	2023
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

Dalam pelaksanaan fungsi Bappeda Kota Semarang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Kota Semarang. Berangkat dari permasalahan kota, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat, menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, yaitu dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahun n+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahun n.

Berangkat dari hasil perencanaan pembangunan yang baik akan mampu menjawab permasalahan yang ada dan memberikan pencapaian pembangunan yang

lebih jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pada perencanaan tahun 2023, Pemerintah Kota Semarang meraih Juara III Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Penghargaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD
serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2023	2023
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

Selain Indikator Pelayanan Bappeda yang sudah disebutkan di atas, Bappeda juga memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk IKK yang menjadi kewenangan Bappeda Kota Semarang adalah sebagian IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pekerjaan Umum.

Adapun capaian dari IKK pada Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pekerjaan Umum sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kota Semarang
Tahun 2019 s.d 2022

NO	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	CAPAIAN			
			TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
URUSAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		2,81 %	12,19 %	17,14 %	59,38 %
		1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	51 OPD	51 OPD	51 OPD	51 OPD
		2) Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	65 Program / 91 Kegiatan	81 Program / 94 Kegiatan	81 Program / 94 Kegiatan / 108 Sub Kegiatan	93 Program / 135 Kegiatan / 202 Sub Kegiatan
URUSAN PEKERJAAN UMUM						
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten / kota	Ada	Ada	Ada	Ada
		2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada
		3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD	1 BUMD / UPTD
		4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 izin	1 izin	1 izin	1 izin
		5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama

Untuk selanjutnya sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKK di atas Bappeda Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender. Data menunjukkan dari 4 program, 16 kegiatan, dan 53 sub kegiatan pada Bappeda di tahun 2023, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender adalah sebanyak 4 program (100,00 %), 9 kegiatan (56,25 %) dan 24 sub kegiatan (45,28 %), dimana sebanyak 3 program, 3 kegiatan, dan 4 sub kegiatan telah memiliki GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement). Adapun untuk jumlah

anggaran pada Bappeda Kota Semarang di tahun 2023 adalah sebesar Rp 27.003.436.000,- sementara jumlah anggaran yang responsif gender adalah sebesar Rp 11.527.164.640,- (42,69 %), dimana jumlah anggaran sub kegiatan yang responsif gender adalah sebesar Rp1.785.717.480,-.

Disamping realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang dalam bidang perencanaan, perlu juga diperhatikan realisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2023 sedang dilakukan proses penyusunan 13 kajian penelitian, yaitu :

- 1) Indeks Pembumih Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kota Semarang;
- 2) Strategi Pemberdayaan perpustakaan kelurahan dan kecamatan dalam meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat;
- 3) Strategi Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan atas pembangunan infrastruktur;
- 4) Efektivitas penanganan pengangguran dalam penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Semarang;
- 5) Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pemberdayaan Perempuan dan anak di Kota Semarang;
- 6) Strategi Pemanfaatan Aset Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
- 7) Strategi Optimalisasi Retribusi Sektor Perdagangan Kota Semarang;
- 8) Strategi pengelolaan perparkiran Kota Semarang;
- 9) Kelayakan Ekonomi Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo Kota Semarang;
- 10) Pemetaan Potensi Pemasangan Pipa Resapan Horizontal Sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Semarang;
- 11) Evaluasi Implementasi Pemasangan Pipa Resapan Horizontal di Wilayah Kota Semarang;
- 12) Upaya Pengendalian Banjir di Kawasan Meteseh, Tembalang, dan Sekitarnya;
- 13) Desain Pembangunan Kebun Raya Tinjomoyo Kota Semarang.

Untuk selanjutnya, terdapat beberapa indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang dicapai Bappeda Kota Semarang, yaitu sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA	PROYEKSI 2023
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2023	
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (SiDa)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (SiDa)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	97,00 %	100,00 %
5	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	29,41 %	35,29 %	41,18 %	47,06 %	52,94 %	25,49 %	35,29 %
6	Indeks Inovasi Daerah	62	64	66	68	70	60,79	64

Kemudian, selain realisasi dari target pelayanan Bappeda yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI & CAPAIAN KINERJA			CATATAN ANALISIS
			2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	Trw II 2023	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi											
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,0-6,0	5,6-6,1	5,7-6,2	5,8-6,3	5,9-6,6	5,16	5,73	5,73*	-
2	Laju Inflasi	%	2,6±1	2,5±1	2,4±1	2,3±1	2,2±1	1,19	4,99	2,95	-
3	Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB	%	28,70	28,77	28,84	28,91	28,98	28,12	29,75	29,75*	-
4	Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	28,68	28,70	28,72	28,74	28,76	28,65	28,85	28,85*	-
Fokus Kesejahteraan Sosial											
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai indeks	83,20-83,60	83,60-84,00	84,00-84,40	84,40-84,80	84,80-84,20	83,55	84,08	84,08*	-
2	Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Ribu Rp./thn	15.600	15.800	16.000	16.300	16.600	15.425	16.047	16.047*	-
3	Angka Kemiskinan	%	4,24-4,32	4,04-4,24	3,84-4,04	3,74-3,84	3,51-3,74	4,56	4,24	4,25	-
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,7-9,0	8,3-8,6	7,7-8,0	6,8-7,1	5,9-6,2	9,54	7,60	7,60*	-
ASPEK DAYA SAING											
Kemampuan Ekonomi Daerah											
1	PDRB per kapita berlaku	Juta Rp	103,16	103,54	104,12	104,8	105,59	123,67	137,12	137,12*	-

* Angka sementara

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

Masih terkait pelayanan Bappeda Kota Semarang, beberapa inovasi yang telah dikembangkan dalam menjalankan tugas fungsinya di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran untuk Fasilitasi Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

Untuk memfasilitasi hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan, dialokasikan anggaran (*dedicated*) untuk melaksanakan hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, sehingga proses partisipatif dari hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dapat terjamin akan direalisasikan.

b. Kampung Tematik

Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan yang menunjukkan jatidiri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal; meningkatnya kualitas lingkungan permukiman; dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

c. Pangripta

Inovasi Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang berisi informasi mengenai data usulan musrenbang, informasi rencana pembangunan, dan prioritas pembangunan di Kota Semarang.

d. Jurnal Riptek Online

Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang yang berisi mengenai artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482 terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).

e. Si Amanah Bergas (Sistem Perencanaan Air Minum dan Sanitasi Semarang Hebat – Bergerak Bersama Gapai Sanitasi Sehat)

Sistem informasi dan monitoring evaluasi sektor air minum dan sanitasi Kota Semarang. Inovasi ini berisi mengenai data spasial di sektor air minum dan sanitasi mulai dari pelayanan air minum perpipaan oleh PDAM dan non perpipaan yang berasal dari program Pamsimas, DAK, Bankeu, dan APBD Kota Semarang, kemudian pelayanan air limbah skala permukiman dan layanan persampahan dari hulu sampai hilir dengan kedetailan data tingkat kelurahan di seluruh Kota Semarang.

f. Pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin)

Inisiatif pengembangan energi baru dan terbarukan dengan memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik dengan kapasitas 4 kWp yang dapat

dimanfaatkan masyarakat. Selanjutnya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (Angin) ini digunakan sebagai laboratorium.

g. Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Land Fill Gass

Dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, dimana Kota Semarang merupakan satu dari 12 kota yang ditunjuk untuk menjalankan proyek tersebut. Berlokasi di TPA Jatibarang, dengan estimasi nilai investasi 2,2 T, jumlah sampah yang diolah 1000 ton/hari, dan kapasitas energi yang dihasilkan 19 MW.

h. Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif) Kota Semarang

Simkraf (Sistem Informasi Manajemen Pelaku Ekonomi Kreatif) Kota Semarang adalah sistem informasi yang diperuntukan sebagai platform pendataan bagi pelaku 17 sub ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang serta sebagai media informasi ekosistem pendukung ekonomi kreatif lainnya.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2023 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah on the track. Beberapa target yang ditetapkan telah dapat dicapai, sementara target indikator lainnya masih dalam proses pencapaian.
- b. Beberapa indikator kinerja daerah yang bersifat makro belum dapat mencapai target, diantaranya Laju Inflasi dan Angka Kemiskinan. Bappeda perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya :

1. Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen penganggaran; baik dalam hal keselarasan antara Renja terhadap RKPD, Renja terhadap Renstra, maupun implementasi kegiatan *dedicated* RKPD ke dalam RKA. Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya pemahaman SDM perencana dalam proses perencanaan & penganggaran, dimana arahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, belum sepenuhnya diimplementasikan dalam perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Hal ini dapat berpengaruh terhadap keselarasan dan sinergitas antar dokumen perencanaan dan atau dokumen penganggaran, serta pencapaian prioritas pembangunan daerah. Upaya yang telah dilakukan Bappeda untuk menghadapi masalah ini adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM dalam perencanaan, pengendalian & evaluasi perencanaan pembangunan daerah; perencanaan penganggaran pembangunan daerah; serta pencapaian target indikator masing-masing OPD dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Kota Semarang. Kedepan, peningkatan kompetensi ini perlu terus dilakukan sebagai antisipasi atas perubahan kebijakan / regulasi ataupun adanya mutasi SDM perencana. Selain itu juga perlu dilakukan optimalisasi pendampingan dan fasilitasi perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran.
2. Belum optimalnya pencapaian target Nilai AKIP OPD, serta pencapaian target Nilai Perencanaan Pembangunan Daerah dari Provinsi Jawa Tengah. Hal ini antara lain disebabkan belum optimalnya komitmen OPD terkait akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan hingga evaluasi internal, yang kemudian tercermin pencapaian nilai AKIP OPD; serta terjadi perubahan kriteria penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah dari Provinsi Jawa Tengah. Upaya yang telah dilakukan Bappeda antara lain menjadikan pencapaian Nilai AKIP OPD sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja organisasi, yang dapat berpengaruh pada penerimaan TPP. Selanjutnya perlu terus dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses penilaian kinerja organisasi, agar dapat meningkatkan pencapaian target Nilai AKIP OPD, dan juga target Nilai RB serta target IKU OPD.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- 2) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat. Dimana selanjutnya aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut, yang seiring dengan perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 3) Perencanaan dan penganggaran dengan “*e-performance based budgeting*”.

Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “*e-performance based budgeting*” sehingga sepenuhnya menerapkan *money follow program* dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- 5) Perkembangan Kota Semarang beserta Seluruh Permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder dan elemen masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.

Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang sebagai berikut :

a. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda Kota Semarang adalah perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Oleh karena itu, Bappeda perlu memiliki komitmen kuat dalam mengoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

b. Pelaksanaan Program Prioritas dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026

Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, Bappeda Kota Semarang perlu mengoordinasikan serta mengawal pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, dan menjadikannya sebagai kegiatan *dedicated* yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Selain hal tersebut, untuk tahun 2024 secara khusus Bappeda Kota Semarang menjalankan fungsi koordinatif terkait beberapa program prioritas, yaitu :

- 1) Stimulus Pembangunan Wilayah;
- 2) Magang Tematik;
- 3) Kampung Tematik Produktif;
- 4) Pelibatan Tenaga Kerja Wilayah;
- 5) Unit Kerja Promosi Kota;
- 6) Promosi Pariwisata Bersama (Daerah Hinterland);

- 7) Kawasan Wisata Minapolitan;
- 8) Forum Perguruan Tinggi Abdimas;
- 9) Gerakan Bersama Forum CSR;
- 10) Kota Ramah HAM;
- 11) Musrenbang perempuan;
- 12) Semarang Kota Inklusif;
- 13) Rooftop solar panel (Bangunan Milik Pemkot Semarang);
- 14) Merubah air dari masalah (banjir dan rob) menjadi potensi (Water as Leverage);
- 15) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 16) Revitalisasi Semarang Lama;
- 17) Penghijauan Sempadan Sungai Semarang;
- 18) Pembangunan Tram;
- 19) Transportasi Massal Terintegrasi;
- 20) Pengelolaan Manajemen Risiko 2022-2026.

Selain itu, pada tahun 2023 juga terdapat beberapa program prioritas yang dilaksanakan Bappeda secara langsung, yaitu :

1. Pembahasan Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT 2023;
2. Pengembangan Alternatif pembiayaan di luar APBD (tahap persiapan);
3. Review Masterplan Transportasi (telah dilaksanakan pada tahun 2022).

c. Pencapaian Nilai AKIP Kota Semarang Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Salah satu indikator sasaran pembangunan Kota Semarang yang didukung pencapaiannya secara langsung oleh Bappeda Kota Semarang adalah “Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sendiri dilakukan terhadap 4 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal. Dan dari keempat komponen SAKIP yang dievaluasi tersebut, terkait tugas dan fungsinya maka Bappeda perlu memberi perhatian khusus terhadap 2 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

d. Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota terjabarkan dalam perencanaan perangkat daerah, perencanaan jangka menengah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, dan memastikan bahwa perencanaan akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan); serta terwujud sinergitas antar aspek untuk meningkatkan kualitas hasil perencanaan. Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan terkait

sumber-sumber pendanaan, dengan melakukan identifikasi dan pengoptimalan pendanaan di luar APBD Kota Semarang.

e. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Semarang terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah, diantaranya kebijakan terkait :

- 1) Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- 2) Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang;
- 3) Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- 4) Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 5) Sistem Nasional Penelitian serta Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Kebangkitan Teknologi Nasional, Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, serta Inovasi Daerah.

Selain regulasi / kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan berbagai kebijakan, kajian ataupun dokumen perencanaan di Kota Semarang. Diantaranya yaitu dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, RAD TPB / SDG's Kota Semarang, Roadmap Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Kota Semarang, RAD Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, Rencana Induk Semarang Kota Cerdas, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dokumen Pemetaan dan Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif Kota Semarang, serta berbagai dokumen kebijakan lainnya.

f. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 disampaikan bahwa pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Terkait hal tersebut, Bappeda Kota Semarang perlu memberikan dukungan fasilitasi dalam penyelenggaraan pilkada sesuai dengan kewenangan Bappeda. Selain itu Bappeda juga perlu mempersiapkan dan mengoordinasikan dokumen perencanaan sebagai kelanjutan atas terpilihnya Kepala Daerah yang baru.

g. Berakhirnya Periode RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Semarang akan berakhir pada tahun 2025. Untuk itu perlu dilakukan rangkaian persiapan dalam penyusunan RPJPD periode selanjutnya, termasuk penyusunan dokumen sektoral pendukung. Dan berkaitan dengan pelaksanaan

pilkada serentak, RPJPD ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program bagi para calon kepala daerah.

h. Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber; diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan, serta data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.

i. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Bappeda

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun tema pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

P1 Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus :

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya

- saing
- 2) Pengembangan wisata MICE
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor
- e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
 - 3) Penguatan ketahanan pangan

P2 Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan fokus :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik Produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja

P3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

P4 Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus :

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

P5 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10 %;
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24 %;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60 %.

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, sesuai tugas dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif”**. Namun sebagai koordinator perencanaan di Kota Semarang, Bappeda memiliki kewajiban dalam mengoordinasikan pelaksanaan seluruh prioritas

pembangunan Kota Semarang, serta dalam pencapaian target- target indikator kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Bappeda Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Bappeda Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	BAPPEDA KOTA SEMARANG				25.318.001.003	BAPPEDA KOTA SEMARANG				25.318.001.003	
	URUSAN PERENCANAAN				23.071.711.003	URUSAN PERENCANAAN				23.071.711.003	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				11.947.976.003	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA				11.947.976.003	
			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100%	14.991.560			Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100%	14.991.560	
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	10 Dokumen	14.991.560	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	10 Dokumen	14.991.560	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	537.480	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	537.480	
			- Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda (2 Dokumen)					- Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda (2 Dokumen)			
			- Dokumen RTP Bappeda (1 Dokumen)					- Dokumen RTP Bappeda (1 Dokumen)			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.014.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.014.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.534.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.534.400	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.014.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.014.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.534.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.534.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.356.480	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.356.480	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Dokumen LKPJ Bappeda (1 Laporan)					Dokumen LKPJ Bappeda (1 Laporan)			
			- Dokumen LKJIP Bappeda (1 Laporan)					Dokumen LKJIP Bappeda (1 Laporan)			
			- Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda (1 Laporan)					Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda (1 Laporan)			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100%	10.014.318.308			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100%	10.014.318.308	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda		10.014.318.308	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Bappeda		10.014.318.308	
				100%	10.013.034.948				100%	10.013.034.948	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61.00 Orang/Bulan	9.678.914.948	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61.00 Orang/Bulan	9.678.914.948	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	334.120.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	334.120.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen	1.283.360	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen	1.283.360	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	296.160	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	296.160	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	789.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2 Laporan	789.760	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	197.440	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	197.440	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100%	21.800.000			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100%	21.800.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	21.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	21.800.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66.00 Orang	21.800.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66.00 Orang	21.800.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100%	1.896.866.165	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100%	1.896.866.165	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.165.275.165	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.165.275.165	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	52.480.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	52.480.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	31.075.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	31.075.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	37.600.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	37.600.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	16.120.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	16.120.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	35.250.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	35.250.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	316.400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	316.400.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	676.350.165	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	676.350.165	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	92.775.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	92.775.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4.440.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4.440.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	88.335.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	4 Laporan	88.335.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100%	638.816.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100%	638.816.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40.313.180	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	368.502.820	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	368.502.820	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	230.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	230.000.000	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2.631.830.000	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2.631.830.000	
			Persentase keselarasan perencanaan tataran kota	100%	2.631.830.000			Persentase keselarasan perencanaan tataran kota	100%	2.631.830.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100%	1.748.160.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100%	1.748.160.000	0	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	133.300.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	133.300.000		
			- Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD (1 Kegiatan)								Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD (1 Kegiatan)	
			- Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD (1 Kegiatan)								Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD (1 Kegiatan)	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.575.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	3.575.000		
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	182.700.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	182.700.000		
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	38.142.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	38.142.000		
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	1.390.443.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	2 Dokumen	1.390.443.000		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								(RPJPD/ RPJMD/ RKPD)			
			- Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD (2 Dokumen)					Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD (2 Dokumen)			
			- Dokumen RAD Penerapan SPM Tahun 2025 – 2030 (1 Dokumen)					Dokumen RAD Penerapan SPM Tahun 2025 – 2030 (1 Dokumen)			
			- Analisis Penyusunan Prioritas Pembangunan dan Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (1 Dokumen)					Analisis Penyusunan Prioritas Pembangunan dan Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (1 Dokumen)			
			- Dokumen Kajian Penyusunan Metadata Indikator Pembangunan Kota Semarang (1 Dokumen)					Dokumen Kajian Penyusunan Metadata Indikator Pembangunan Kota Semarang (1 Dokumen)			
			- Kajian Penyusunan Dokumen Perencanaan (1 Dokumen)					Kajian Penyusunan Dokumen Perencanaan (1 Dokumen)			
			- Dokumen NA RPJPD Kota					- Dokumen NA RPJPD Kota			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Semarang (1 Dokumen)					Semarang (1 Dokumen)			
	Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	196.950.000	Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	196.950.000	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	103.000.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	103.000.000	
			- Dokumen Analisis Proyeksi Demografi Kota Semarang untuk RPJPD Tahun 2025 – 2045 (1 Dokumen)					Dokumen Analisis Proyeksi Demografi Kota Semarang untuk RPJPD Tahun 2025 – 2045 (1 Dokumen)			
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	93.950.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	93.950.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang		Persentase Pengendalian, evaluasi dan	100%	686.720.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang		Persentase Pengendalian, evaluasi dan	100%	686.720.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
	Perencanaan Pembangunan Daerah		pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala			Perencanaan Pembangunan Daerah		pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala				
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Bantuan Keuangan	2 Laporan	429.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Bantuan Keuangan	2 Laporan	429.000.000		
			- Laporan Bantuan Keuangan (1 Laporan)					Laporan Bantuan Keuangan (1 Laporan)				
			- Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (2 Laporan)					Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (2 Laporan)				
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	257.720.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	257.720.000		
			- Laporan Evaluasi Hasil RPJPD (1 Dokumen)					Laporan Evaluasi Hasil RPJPD (1 Dokumen)				
			- Laporan Evaluasi Hasil RKPD (4 Dokumen)					Laporan Evaluasi Hasil RKPD (4 Dokumen)				
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi				8.491.905.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi				8.491.905.000		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
	Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.022.905.000	Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.022.905.000		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.022.905.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	2.022.905.000		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	272.375.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	272.375.000		
			- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (1 Dokumen)					Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (1 Dokumen)				
			- Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan					Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan				

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
			Ketertiban Umum (1 Dokumen)					Ketertiban Umum (1 Dokumen)				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	87.300.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	87.300.000		
			- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (1 Dokumen)						Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (1 Dokumen)			
			- Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik oleh PPID di 16 Kantor Kecamatan di Kota Semarang (1 Dokumen)						Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik oleh PPID di 16 Kantor Kecamatan di Kota Semarang (1 Dokumen)			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	9 Dokumen	974.400.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	9 Dokumen	974.400.000		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
			- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1 Dokumen)					Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1 Dokumen)			
			- Dokumen Renum TMMD (1 Dokumen)					Dokumen Renum TMMD (1 Dokumen)			
			- Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan (1 Dokumen)					Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan (1 Dokumen)			
			- Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (1 Dokumen)					Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (1 Dokumen)			
			- Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat (1 Dokumen)					Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat (1 Dokumen)			
			- Kegiatan TOT / Bintek PPRG (1 Kegiatan)					Kegiatan TOT / Bintek PPRG (1 Kegiatan)			
			- Dokumen Kajian Minat Membaca					Dokumen Kajian Minat Membaca			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pelajar pada Perpustakaan Sekolah, Daerah dan Keliling Pasca Daring (1 Dokumen)					Pelajar pada Perpustakaan Sekolah, Daerah dan Keliling Pasca Daring (1 Dokumen)			
			- Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting (1 Dokumen)					Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting (1 Dokumen)			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	688.830.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	688.830.000	
			- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1 Dokumen)					Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1 Dokumen)			
			- LP2KD (1 Dokumen)					LP2KD (1 Dokumen)			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Laporan Kinerja TKPKD (1 Dokumen)					Laporan Kinerja TKPKD (1 Dokumen)			
			- Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang (1 Dokumen)					Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang (1 Dokumen)			
			- Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang (1 Dokumen)					Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang (1 Dokumen)			
			- Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi (1 Dokumen)					Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi (1 Dokumen)			
			- Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDG's Kota Semarang Tahun 2018-2030 (1 Dokumen)					Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDG's Kota Semarang Tahun 2018-2030 (1 Dokumen)			
			- Kajian Peningkatan Kesejahteraan Guru Wiyata Bakti dan Guru Kontrak Menuju Pendidikan Berkualitas (1 Dokumen)					Kajian Peningkatan Kesejahteraan Guru Wiyata Bakti dan Guru Kontrak Menuju Pendidikan Berkualitas (1 Dokumen)			
			- RAD Kota Ramah Lanjut Usia Tahun 2023-2026					RAD Kota Ramah Lanjut Usia Tahun 2023-2026			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	2.079.500.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	2.079.500.000		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	2.079.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	2.079.500.000		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	1.000.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	1.000.000.000		
			- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (1 Dokumen)								Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (1 Dokumen)	
			- Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional (1 Dokumen)								- Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Regional (1 Dokumen)			
			- Dokumen Strategi Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Partisipasi Sektor Swasta (1 Dokumen)					Dokumen Strategi Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Partisipasi Sektor Swasta (1 Dokumen)			
			- Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang (1 Dokumen)					Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang (1 Dokumen)			
			- Dokumen Grand Design Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang - (1 Dokumen)					- Dokumen Grand Design Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang (1 Dokumen) -			
			- Dokumen Dinamika Perekonomian Kota Semarang 20 Tahun ke Depan (1 Dokumen)					Dokumen Dinamika Perekonomian Kota Semarang 20 Tahun ke Depan (1 Dokumen)			
			- Dokumen Transformasi Dunia Usaha : Tantangan dan Peluang Menuju 2045 (1 Dokumen)					Dokumen Transformasi Dunia Usaha : Tantangan dan Peluang Menuju 2045 (1 Dokumen)			
			- Dokumen Pemetaan Potensi					Dokumen Pemetaan Potensi			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Bisnis Badan Usaha Milik Daerah (1 Dokumen)					Bisnis Badan Usaha Milik Daerah (1 Dokumen)			
			- Dokumen Analisis Keuangan Daerah Kota Semarang (1 Dokumen)					Dokumen Analisis Keuangan Daerah Kota Semarang (1 Dokumen)			
			- Dokumen Kajian Peluang Bisnis Kopi di Kota Semarang (1 Dokumen)					Dokumen Kajian Peluang Bisnis Kopi di Kota Semarang (1 Dokumen)			
			- Dokumen Kajian Upaya Peningkatan Pendapatan PKL di Kota Semarang (1 Dokumen)					Dokumen Kajian Upaya Peningkatan Pendapatan PKL di Kota Semarang (1 Dokumen)			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	329.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	329.500.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	634.400.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	5 Dokumen	634.400.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								(RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
			- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (1 Dokumen)					Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (1 Dokumen)			
			- Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang (1 Dokumen)					Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang (1 Dokumen)			
			- Dokumen Peta Jalan Ekonomi Sirkular Kota Semarang - (1 Dokumen)					- Dokumen Peta Jalan Ekonomi Sirkular Kota Semarang (1 Dokumen)			
			- Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian, Perikanan dan Pangan: Analisis Interdependensi Antara Sektor – Sektor Kunci - (1 Dokumen)					- Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian, Perikanan dan Pangan: Analisis Interdependensi Antara Sektor – Sektor Kunci (1 Dokumen)			
			- Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Aksi Daerah Pangan dan					Dokumen Evaluasi Hasil			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
			Gizi Kota Semarang Tahun 2020 – 2024 (1 Dokumen)					Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang Tahun 2020 – 2024 (1 Dokumen)				
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	2 Laporan	115.600.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	2 Laporan	115.600.000		
			- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (1 Dokumen)						- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (1 Dokumen)			
			- Dokumen Perencanaan Pengembangan Fasilitas Bangunan Di Pongangan (1 Dokumen)						- Dokumen Perencanaan Pengembangan Fasilitas Bangunan Di Pongangan (1 Dokumen)			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	4.389.500.000	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	4.389.500.000	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	4.389.500.000	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	4.389.500.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	2.254.400.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	2.254.400.000	
			- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (1 Dokumen)					Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (1 Dokumen)			
			- Dokumen Ranperda Kelembagaan					Dokumen Ranperda Kelembagaan			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pengelola SPALDT (1 Dokumen)					Pengelola SPALDT (1 Dokumen)			
			- Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) (1 Dokumen)					Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) (1 Dokumen)			
			- Dokumen RAD AMPL (1 Dokumen)					Dokumen RAD AMPL (1 Dokumen)			
			- Dokumen RISPK (1 Dokumen)					Dokumen RISPK (1 Dokumen)			
			- Dokumen Jakstrada SPAM (1 Dokumen)					Dokumen Jakstrada SPAM (1 Dokumen)			
			- Dokumen Masterplan Sumber Daya Air (1 Dokumen)					Dokumen Masterplan Sumber Daya Air (1 Dokumen)			
			- Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda (1 Dokumen)					Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda (1 Dokumen)			
			- Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor (1 Dokumen)					Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor (1 Dokumen)			
			- Dokumen Draft Perwal Masterplan					Dokumen Draft Perwal Masterplan			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
			Air Limbah (1 Dokumen)					Air Limbah (1 Dokumen)					
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7 Laporan	981.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7 Laporan	981.000.000			
			- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (1 Dokumen)						Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (1 Dokumen)				
			- Dokumen Monitoring dan Evaluasi SPALDT (1 Dokumen)						Dokumen Monitoring dan Evaluasi SPALDT (1 Dokumen)				
			- Dokumen Evaluasi Kinerja Jalan Kota (1 Dokumen)						Dokumen Evaluasi Kinerja Jalan Kota (1 Dokumen)				
			- Laporan Updating Data Pengembangan Sistem Air Minum						Laporan Updating Data Pengembangan Sistem Air Minum				

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			dan Sanitasi (SI AMANAH) (1 Laporan)					dan Sanitasi (SI AMANAH) (1 Laporan)			
			- Dokumen Perhitungan Capaian Penanganan dan Pencegahan Permukiman dan Perumahan Kumuh (1 Dokumen)					- Dokumen Perhitungan Capaian Penanganan dan Pencegahan Permukiman dan Perumahan Kumuh (1 Dokumen)			
			- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Program Pamsimas Kota Semarang Tahun 2008-2023 (1 Dokumen)					- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Program Pamsimas Kota Semarang Tahun 2008-2023 (1 Dokumen)			
			- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal Skala Permukiman (1 Dokumen)					Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal Skala Permukiman (1 Dokumen)			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	482.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya	3 Dokumen	482.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		(RPJPD. RPJMD dan RKPD)					(RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
			- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (1 Dokumen)					Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (1 Dokumen)			
			- Dokumen Kajian Sosial dan Ekonomi Semarang Lama (1 Dokumen)					Dokumen Kajian Sosial dan Ekonomi Semarang Lama (1 Dokumen)			
			- Dokumen Kajian pengelolaan sampah organik (1 Dokumen)					Dokumen Kajian pengelolaan sampah organik (1 Dokumen)			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	672.100.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	672.100.000	
			- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang					Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kewilayahan (1 Dokumen)					Kewilayahan (1 Dokumen)			
			- Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) (1 Dokumen)					Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) (1 Dokumen)			
			- Dokumen Kajian Mitigasi Perubahan Iklim (1 Dokumen)					Dokumen Kajian Mitigasi Perubahan Iklim (1 Dokumen)			
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					
			Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100%	2.246.290.000			Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100%	2.246.290.000	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	93.500.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	93.500.000	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Plaksanan & Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	93.500.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Plaksanan & Evaluasi Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen	93.500.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
			Bidang Pemerintahn Umum					Bidang Pemerintahn Umum				
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100%	482.170.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100%	482.170.000		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6 Dokumen	482.170.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6 Dokumen	482.170.000		
			- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial dengan penyedia mandiri (4 Dokumen)								Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial dengan penyedia mandiri (4 Dokumen)	
			- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (1 Dokumen)								Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (1 Dokumen)	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi & pembangunan	100%	1.050.370.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi & pembangunan	100%	1.050.370.000		
	Penelitian dan Pengembangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	5 Dokumen	397.770.000	Penelitian dan Pengembangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	5 Dokumen	397.770.000		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perindustrian dan Perdagangan		Perindustrian dan Perdagangan			Perindustrian dan Perdagangan		Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	8 Dokumen	652.600.000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	8 Dokumen	652.600.000	
			- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (7 Dokumen)					Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (7 Dokumen)			
			- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan penyedia mandiri (1 Dokumen)					Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan penyedia mandiri (1 Dokumen)			
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100%	620.250.000	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100%	620.250.000	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	243.500.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	243.500.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			- Penyelenggaraan Sosialisasi Lomba Krenova					Penyelenggaraan Sosialisasi Lomba Krenova			
			- Pelaksanaan Monev Inventor Krenova					Pelaksanaan Monev Inventor Krenova			
			- Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi					Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi			
			- Penyelenggaraan lomba krenova					Penyelenggaraan lomba krenova			
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	106.250.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 Laporan	106.250.000	
			- Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA (1 Dokumen)					Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA (1 Dokumen)			
			- Laporan Monev Penguatan SIDA (1 Dokumen)					Laporan Monev Penguatan SIDA (1 Dokumen)			
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Laporan	245.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	4 Laporan	245.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			
			- Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek) (2 Edisi)					Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek) (2 Edisi)			
			- Laporan Monev Smart City dan SPBE (1 Dokumen)					Laporan Monev Smart City dan SPBE (1 Dokumen)			
			- Penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding) (2 Kegiatan)					Penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding) (2 Kegiatan)			
			- Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan (1 Dokumen)					Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan (1 Dokumen)			
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	25.500.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	25.500.000	

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Bappeda juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan – usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Bappeda Kota Semarang, telah terjaring aspirasi berupa usulan kegiatan. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Bappeda Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Bappeda Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Membentuk Kampung Tematik Difabel	Kecamatan Candisari	Pembangunan Kampung Tematik	1 Kegiatan	Kampung Tematik Difabel di Kecamatan Candisari agar diusulkan pada awal tahun 2023 melalui mekanisme perencanaan kampung tematik
2	Membentuk Kampung Pancasila	Kecamatan Gayamsari	Pembangunan Kampung Pancasila	1 Kegiatan	Pembentukan Kampung Pancasila akan ditindaklanjuti lebih lanjut dengan instansi terkait, dan memperhatikan tujuan, output dan indikatornya

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

Selain aspirasi melalui Musrenbang, juga terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Bappeda Kota Semarang, yaitu antara lain :

1. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung pada tahun 2021, cukup mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, beragama dan kemasyarakatan di Kota Semarang. Seperti adanya larangan mudik, lesunya kegiatan ekonomi dan usaha,

pembatasan kegiatan berkumpul warga, dan berbagai hal lainnya. Terkait hal tersebut, diperlukan adanya program dan kegiatan pemulihan ekonomi yang jelas dan signifikan, dalam rangka pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Semarang. Diantaranya adalah program-program stimulan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi agar dapat kembali melanjutkan usahanya.

2. Pemerintah Kota Semarang diharap lebih memberikan perhatian untuk masalah yang timbul di daerah-daerah pinggiran, yang sekarang ini sudah berkembang baik fisik, sosial budaya dan sebagainya, sebagai penopang aktivitas di tengah kota. Perhatian tersebut hendaknya dilakukan dalam berbagai aspek, seperti pelayanan penyediaan sistem keamanan, pembuangan sampah, air bersih, infrastruktur, penerangan jalan, dan transportasi umum.
3. Pemerintah Kota Semarang agar memaksimalkan kegiatan kampung tematik karena sudah mendapatkan support anggaran dari pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
4. Pemerintah Kota Semarang agar merealisasikan pembangunan fasilitas umum dalam bentuk infrastruktur jalan, sanitasi dan drainase yang telah diusulkan oleh masyarakat dalam Musrenbang. Selain itu juga terdapat usulan dimana LPMK agar diberikan fasilitas yang sama seperti FKK dan kelurahan.
5. Perlunya penyediaan ruang publik yang dapat mendorong kreativitas serta memfasilitasi perwujudan ide-ide kreatif, antara lain dalam bentuk kegiatan, media, audio, visual, grafis maupun koreografi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan memperhatikan 5 arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu:

- 1) **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
- 2) **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3) **Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law*, terutama menerbitkan dua Undang-undang (UU) yaitu UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM.
- 4) **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural).
- 5) **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Arahan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan menjadi Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2023, yaitu:

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan *major project* sebagai berikut :

- MP 1 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
- MP 2 Pengelolaan Terpadu UMKM
- MP 3 Food Estate
- MP 4 Destinasi Wisata Prioritas
- MP 5 Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan *major project* sebagai berikut :

- MP 1 Wilayah Adat Papua : Laa Pago dan Domberay
- MP 2 Pembangunan Ibu Kota Nusantara

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan *major project* sebagai berikut :

- MP 1 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- MP 2 Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
- MP 3 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
- MP 4 Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan *major project* sebagai berikut :

- MP 1 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- MP 2 Transformasi Digital

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan *major project* sebagai berikut :

- MP 1 Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

PN 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik



Gambar 3.1 Prioritas Nasional Tahun 2023

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,30 - 5,90%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,30 - 6,00%;
- c. Rasio Gini sebesar 0,375 - 0,378;
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29 – 73,35;
- e. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02%;
- f. Nilai Tukar Petani 103 – 105;
- g. Nilai Tukar Nelayan 105 – 107;
- h. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 - 8,50%;

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan tahun 2023 diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, yang difokuskan pada:
 - (1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan
 - (2) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan
 - (3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu
 - (4) Peningkatan ketahanan pangan
 - (5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah serta koperasi
 - (6) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat dan lingkungan hidup
 - (7) Peningkatan nilai penanaman modal
 - (8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang
 - (9) Peningkatan daya dukung dan daya tampung
 - (10) Peningkatan ketahanan bencana

- 2) Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE), yang difokuskan pada:
 - 11) Penyediaan basic life access
 - 12) Penguatan sustainable livelihood
 - 13) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
 - 14) Pengurangan pengangguran

- 3) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, yang difokuskan pada:
 - 15) Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun serta pemenuhan Standar Pemenuhan Minimal (SPM) bidang pendidikan
 - 16) Penguatan pembangunan kesehatan paripurna Perubahan RKPD Tahun 2023 IV.18
 - 17) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak 18) Pembangunan kependudukan

- 4) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, yang difokuskan pada:
 - 19) Pemantapan kualitas pelayanan publik
 - 20) Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
 - 21) Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur
 - 22) Penguatan kondusivitas wilayah
 - 23) Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Adapun target pembangunan yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 - 5,60%;
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 - 9,29%;
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 - 4,80%;

Bila disandingkan antara target capaian dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Persandingan Target Pembangunan Daerah dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jateng dan Kota Semarang Tahun 2023

URAIAN	LPE	IPM	Angka Kemiskinan	TPT
Kota Semarang	5,60 - 6,10%	83,60 - 84,00	4,04 - 4,24	8,30 - 8,60%
Prov. Jateng	5,00 - 5,60%	72,75	9,51 - 9,29%	5,63 - 4,80%
Pusat	5,30 - 5,90%	73,29 - 73,35	7,50 - 8,50%	5,30 - 6,00%

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar target Kota Semarang berada di atas target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, terkecuali Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang yang perlu ditingkatkan lagi dalam penanganannya.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 beserta perubahannya merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 beserta perubahannya mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan IKU Bappeda Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran Bappeda maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 yaitu :

**“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
 untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat”**

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang”.

Dalam pencapaian tujuan tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel

Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah”.

2. Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dengan indikator sasaran yaitu “Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah”.

3. Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda

Dengan indikator sasaran yaitu “Nilai AKIP Bappeda”.

Selanjutnya dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang tertuang dalam IKU Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Khusus untuk target Nilai AKIP Bappeda yang bukan merupakan IKU Bappeda, penetapan target tidak mengacu pada target yang tercantum dalam Renstra Bappeda dikarenakan terdapat perubahan formulasi perhitungan nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian penetapan target Nilai AKIP Bappeda mempertimbangkan *baseline* nilai tahun 2022 dan tahun 2023.

Adapun target dari indikator tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas untuk Tercapainya Pembangunan Kota Semarang yang Semakin Hebat		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	%	91,20
	SASARAN 1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Konsisten dan Akuntabel	Persentase Akuntabilitas dan Konsistensi Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	%	89,60
	SASARAN 2 Terwujudnya Inovasi dan Penelitian Pengembangan yang Berkualitas dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dukungan Inovasi dan Hasil Kelitbangan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100,00
	SASARAN 3 Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Bappeda	Nilai AKIP Bappeda	%	81,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAPPEDA KOTA SEMARANG

IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Memedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023;
2. Memedomani Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5899 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026. Secara umum Bappeda bertugas mengkoordinasikan pencapaian kelima misi Walikota dan Wakil Walikota. Namun secara khusus, Bappeda memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Bappeda Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan;

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 10 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebanyak 53 kegiatan, yang terdiri dari 24 kegiatan penunjang, dan 29 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebesar Rp 25.318.001.033,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang dan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, kinerja, target kinerja, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Bappeda Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	BAPPEDA KOTA SEMARANG					27.003.436.0 10	27.003.436.0 10	25.318.001.0 03	
	URUSAN PERENCANAAN					24.955.986.0 10	24.955.986.0 10	23.071.711.0 03	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					14.844.128.5 10	14.693.846.0 10	11.947.976.0 03	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda	100%	100%	100%	14.991.560	14.991.560	14.991.560	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	14.991.560	14.991.560	14.991.560	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	537.480	537.480	537.480	APBD Kota Semarang
		- Dokumen Renja Bappeda dan Perubahan Renja Bappeda (2 Dokumen)							
		- Dokumen RTP Bappeda (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.014.400	3.014.400	3.014.400	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.534.400	3.534.400	3.534.400	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.014.400	3.014.400	3.014.400	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.534.400	3.534.400	3.534.400	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	1.356.480	1.356.480	1.356.480	APBD Kota Semarang
		- Dokumen LKPJ Bappeda (1 Laporan)							
		- Dokumen LKJIP Bappeda (1 Laporan)							
		- Laporan Pelaksanaan PUG Bappeda (1 Laporan)							
5.01.01									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda	100%	100%	100%	12.465.738.490	12.466.429.530	10.014.318.308	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Bappeda				12.465.738.490	12.466.429.530	10.014.318.308	APBD Kota Semarang
			100%	100%	100%	12.464.850.010	12.464.850.010	10.013.034.948	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74.00 Orang/Bulan	66.00 Orang/Bulan	61.00 Orang/Bulan	12.101.850.010	12.101.850.010	9.678.914.948	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	363.000.000	363.000.000	334.120.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	888.480	1.579.520	1.283.360	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	296.160	296.160	296.160	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	1 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	296.160	987.200	789.760	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		Triwulanan / Semesteran SKPD							
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	296.160	296.160	197.440	APBD Kota Semarang
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bappeda	100%	100%	100%	92.990.680	92.990.680	21.800.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	92.990.680	92.990.680	21.800.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	74.00 Orang	66.00 Orang	66.00 Orang	92.990.680	92.990.680	21.800.000	APBD Kota Semarang
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda	100%	100%	100%	2.270.407.780	2.119.434.240	1.896.866.165	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.473.365.488	1.289.272.640	1.165.275.165	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	150.194.597	72.880.000	52.480.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	51.180.000	58.130.000	31.075.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	30 Paket	30 Paket	67.456.039	74.960.000	37.600.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	47.113.098	40.602.640	16.120.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	63.900.000	63.900.000	35.250.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	489.420.000	486.400.000	316.400.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	604.101.754	492.400.000	676.350.165	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100%	100%	100%	154.920.692	188.040.000	92.775.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10.440.000	10.440.000	4.440.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		Air dan Listrik yang Disediakan							
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	144.480.692	177.600.000	88.335.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda	100%	100%	100%	642.121.600	642.121.600	638.816.000	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.313.180	40.313.180	40.313.180	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	29 Unit	368.502.820	368.502.820	368.502.820	APBD Kota Semarang
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	233.305.600	233.305.600	230.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.02	Program Perencanaan,					2.317.020.000	2.331.830.000	2.631.830.000	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan perencanaan tataran kota	100%	100%	100%	2.317.020.000	2.331.830.000	2.631.830.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	100%	100%	100%	1.726.030.000	1.708.180.000	1.748.160.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik - Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD (1 Kegiatan) - Pelaksanaan Konsultasi Publik RPJPD (1 Kegiatan)	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	133.300.000	133.300.000	133.300.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	94.250.000	94.250.000	3.575.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	317.450.000	317.450.000	182.700.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	800 Usulan	800 Usulan	800 Usulan	132.180.000	132.180.000	38.142.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.048.850.000	1.031.000.000	1.390.443.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)							
		- Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD (2 Dokumen)							
		- Dokumen RAD Penerapan SPM Tahun 2025 - 2030 (1 Dokumen)							
		- Analisis Penyusunan Prioritas Pembangunan dan Penentuan Prioritas Program dan Kegiatan Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan (1 Dokumen)							
		- Dokumen Kajian Penyusunan Metadata Indikator Pembangunan Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Kajian Penyusunan Dokumen Perencanaan (1 Dokumen)							
		- Dokumen NA RPJPD Kota Semarang (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
5.01.02.2.02	Analisis Data & Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	181.950.000	181.950.000	196.950.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) - Dokumen Analisis Proyeksi Demografi Kota Semarang untuk RPJPD Tahun 2025 – 2045 (1 Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	88.000.000	88.000.000	103.000.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Dokumen	1 Buku	1 Buku	93.950.000	93.950.000	93.950.000	APBD Kota Semarang
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala	100%	100%	100%	409.040.000	441.700.000	686.720.000	APBD Kota Semarang & Bantuan Keuangan Prov Jateng
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan dan Bantuan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	147.200.000	147.200.000	429.000.000	APBD Kota Semarang & Bantuan Keuangan

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	- Laporan Bantuan Keuangan (1 Laporan)							Prov Jateng
		- Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (2 Laporan)							
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	261.840.000	294.500.000	257.720.000	APBD Kota Semarang
		- Laporan Evaluasi Hasil RPJPD (1 Dokumen)							
		- Laporan Evaluasi Hasil RKPD (4 Dokumen)							
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					7.794.837.500	7.930.310.000	8.491.905.000	
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	2.044.350.000	2.099.010.000	2.022.905.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%	2.044.350.000	2.099.010.000	2.022.905.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	383.460.000	407.100.000	272.375.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (1 Dokumen)							
		- Dokumen Kajian Pemberdayaan Linmas Dalam Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (1 Dokumen)							
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.910.000	38.910.000	87.300.000	APBD Kota Semarang
		- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (1 Dokumen)							
		- Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik oleh PPID di 16 Kantor Kecamatan di Kota Semarang (1 Dokumen)							
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	8 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	846.580.000	912.500.000	974.400.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
		- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1 Dokumen)							
		- Dokumen Renum TMMD (1 Dokumen)							
		- Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan (1 Dokumen)							
		- Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (1 Dokumen)							
		- Dokumen NA dan Raperda Kota Sehat (1 Dokumen)							
		- Kegiatan TOT / Bintek PPRG (1 Kegiatan)							
		- Dokumen Kajian Minat Membaca Pelajar pada Perpustakaan Sekolah, Daerah dan Keliling							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		Pasca Daring (1 Dokumen)							
		- Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Penurunan Stunting (1 Dokumen)							
		-							
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	773.400.000	740.500.000	688.830.000	APBD Kota Semarang
		- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (1 Dokumen)							
		- LP2KD (1 Dokumen)							
		- Laporan Kinerja TKPKD (1 Dokumen)							
		- Dokumen Profil Kampung Tematik Kota Semarang (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		- Laporan Pelaksanaan dan Monev PUG di Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Laporan Pelaksanaan Aksi Konvergensi (1 Dokumen)							
		- Dokumen Review Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDG's Kota Semarang Tahun 2018-2030 (1 Dokumen)							
		- Kajian Peningkatan Kesejahteraan Guru Wiyata Bakti dan Guru Kontrak Menuju Pendidikan Berkualitas (1 Dokumen)							
		- RAD Kota Ramah Lanjut Usia Tahun 2023-2026							
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	1.770.800.000	1.880.800.000	2.079.500.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	100%	1.770.800.000	1.880.800.000	2.079.500.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<p>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (1 Dokumen)</p> <p>- Dokumen Potensi Pemasaran Pariwisata Berbasis Kemitraan Regional (1 Dokumen)</p> <p>-</p> <p>- Dokumen Strategi Optimalisasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Partisipasi Sektor Swasta (1 Dokumen)</p> <p>- Dokumen Strategi Optimalisasi Potensi PAD Kota Semarang (1 Dokumen)</p> <p>- Dokumen Grand Design Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang</p> <p>- (1 Dokumen)</p>	7 Dokumen	7 Dokumen	11 Dokumen	1.121.000.000	951.000.000	1.000.000.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		- Dokumen Dinamika Perekonomian Kota Semarang 20 Tahun ke Depan (1 Dokumen)							
		- Dokumen Transformasi Dunia Usaha : Tantangan dan Peluang Menuju 2045 (1 Dokumen)							
		- Dokumen Pemetaan Potensi Bisnis Badan Usaha Milik Daerah (1 Dokumen)							
		- Dokumen Analisis Keuangan Daerah Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Dokumen Kajian Peluang Bisnis Kopi di Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Dokumen Kajian Upaya Peningkatan Pendapatan PKL di Kota Semarang (1 Dokumen)							
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	302.300.000	362.300.000	329.500.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	279.500.000	442.500.000	634.400.000	APBD Kota Semarang
		- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (1 Dokumen)							
		- Dokumen Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Korporasi Sektor SDA di Kota Semarang (1 Dokumen)							
		- Dokumen Peta Jalan Ekonomi Sirkular Kota Semarang - (1 Dokumen)							
		- Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Sektor Pertanian, Perikanan dan Pangan: Analisis Interdependensi Antara Sektor – Sektor Kunci - (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		- Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Semarang Tahun 2020 – 2024 (1 Dokumen)							
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	178.000.000	15.000.000	115.600.000	APBD Kota Semarang
		- - Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (1 Dokumen) -							
		- Dokumen Perencanaan Pengembangan Fasilitas Bangunan Di Pongangan (1 Dokumen)							
5.01.03									

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	3.869.687.500	4.060.500.000	4.389.500.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%	3.869.687.500	4.060.500.000	4.389.500.000	APBD Kota Semarang
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	2.180.000.000	2.245.400.000	2.254.400.000	APBD Kota Semarang
		- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (1 Dokumen)							
		- Dokumen Ranperda Kelembagaan Pengelola SPALDT (1 Dokumen)							
		- Dokumen Ranperda PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) (1 Dokumen)							
		- Dokumen RAD AMPL (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		- Dokumen RISPK (1 Dokumen)							
		- Dokumen Jakstrada SPAM (1 Dokumen)							
		- Dokumen Masterplan Sumber Daya Air (1 Dokumen)							
		- Dokumen Masterplan Penyelenggaraan simpul dan integrasi layanan angkutan umum multimoda (1 Dokumen)							
		- Dokumen Masterplan Transportasi Tidak Bermotor (1 Dokumen)							
		- Dokumen Draft Perwal Masterplan Air Limbah (1 Dokumen)							
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	585.187.500	651.000.000	981.000.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		- Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (1 Dokumen)							
		- Dokumen Monitoring dan Evaluasi SPALDT (1 Dokumen)							
		- Dokumen Evaluasi Kinerja Jalan Kota (1 Dokumen)							
		- Laporan Updating Data Pengembangan Sistem Air Minum dan Sanitasi (SI AMANAH) (1 Laporan)							
		- Dokumen Perhitungan Capaian Penanganan dan Pencegahan Permukiman dan Perumahan Kumuh (1 Dokumen)							
		- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Program Pamsimas Kota Semarang Tahun 2008-2023 (1 Dokumen)							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan IPAL Komunal Skala Permukiman (1 Dokumen)							
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	594.500.000	624.000.000	482.000.000	APBD Kota Semarang
		- Dokumen Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (1 Dokumen)							
		- Dokumen Kajian Sosial dan Ekonomi Semarang Lama (1 Dokumen)							
		- Dokumen Kajian pengelolaan sampah organik (1 Dokumen)							
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	510.000.000	540.500.000	672.100.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (1 Dokumen) - Dokumen Fasilitasi Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) (1 Dokumen) - Dokumen Kajian Mitigasi Perubahan Iklim (1 Dokumen) 							
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah								
		Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimple mentasikan dalam perencanaan dan pembangunan daerah	100%	100%	100%	2.047.450.000	2.047.450.000	2.246.290.000	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	100%	100%	93.500.000	93.500.000	93.500.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Plaksanan & Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahn Umum	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	93.500.000	93.500.000	93.500.000	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial dan Kependudukan	100%	100%	100%	471.400.000	471.400.000	482.170.000	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial dengan penyedia mandiri (4 Dokumen) - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (1 Dokumen)	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	471.400.000	471.400.000	482.170.000	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemenuhan Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi & pembangunan	100%	100%	100%	840.800.000	840.800.000	1.050.370.000	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	420.400.000	420.400.000	397.770.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
	Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan							
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	420.400.000	420.400.000	652.600.000	APBD Kota Semarang
		- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (7 Dokumen)							
		- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum dengan penyedia mandiri (1 Dokumen)							
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase fasilitasi dan koordinasi pengembangan inovasi dan teknologi	100%	100%	100%	641.750.000	641.750.000	620.250.000	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	255.000.000	255.000.000	243.500.000	APBD Kota Semarang
		- Penyelenggaran Sosialisasi Lomba Krenova							

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Monev Inventor Krenova - Keikutsertaan pada Pameran Produk Inovasi - Penyelenggaraan lomba krenova 							
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	<p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pendukung / Pengembangan SIDA (1 Dokumen) - Laporan Monev Penguatan SIDA (1 Dokumen) 	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	106.250.000	106.250.000	106.250.000	APBD Kota Semarang
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	<p>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jurnal Penelitian dan Pengembangan (Jurnal Riptek) (2 Edisi) 	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	255.000.000	255.000.000	245.000.000	APBD Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	
		- Laporan Monev Smart City dan SPBE (1 Dokumen)							
		- Penyelenggaraan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan (Prosiding) (2 Kegiatan)							
		- Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan (1 Dokumen)							
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.500.000	25.500.000	25.500.000	APBD Kota Semarang

IV.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAPPEDA KOTA SEMARANG

Terdapat beberapa Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang merupakan tugas dan fungsi Bappeda dalam mengawal pencapaiannya, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
Terkait Tugas dan Fungsi Bappeda

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Perencanaan			
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	Dokumen	2
2	Tersedianya Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA secara tepat waktu	Dokumen	2
3	Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan	%	100,00
4.	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program APBD tahunan	%	100,00
Penelitian dan Pengembangan			
1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100,00
2.	Persentase perangkat daerah yang terfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah	%	35,29
3.	Indek Inovasi Daerah	Nilai Indeks	64

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2023

IV.3 INOVASI BAPPEDA KOTA SEMARANG

Selain pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di atas, dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya:

1. **Kampung Tematik**

Kampung Tematik adalah suatu wilayah di bawah administrasi Kelurahan, yang menunjukkan jati diri/identitas/makna masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang diangkat dan ditonjolkan atas hasil kesepakatan masyarakat. Kampung Tematik dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi lokal, meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, dan mengangkat kearifan lokal dalam mengelola potensi dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan.

2. **Jurnal Riptek Online**

Terbitan berkala ilmiah milik Pemerintah Kota Semarang, yang berisi artikel hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kota Semarang. Jurnal Riptek memiliki ISSN Cetak 1978-8320 dan ISSN Elektronik 2716-3482, dan terbit 2 kali dalam setahun. Jurnal Riptek sudah terindeks di Google Scholar dan Directory of Open Journal Access (DOAJ).

3. **JELITA (JENDELA INOVASI KOTA)**

Website untuk mewadahi data-data kegiatan inovatif dari seluruh OPD se-Kota Semarang, dalam rangka penilaian Innovative Government Award (IGA).

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bappeda Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor B/7081/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Bappeda ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitupula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang, serta hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan IV tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bappeda Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

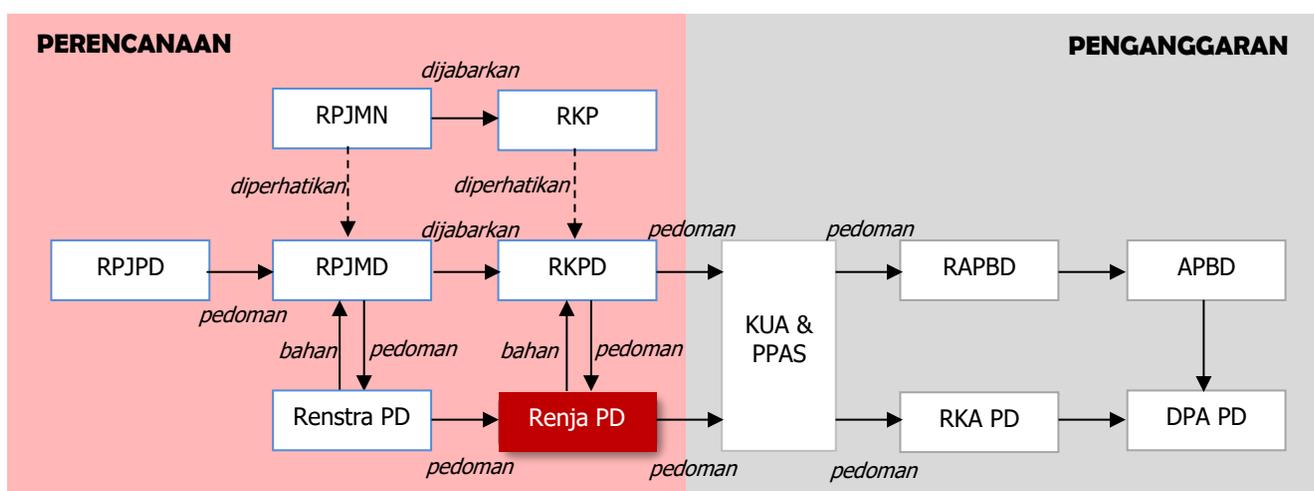
Dengan disusunnya Perubahan Renja Bappeda Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2022**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi APBD, yang dapat berupa:
 - 1) Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - 2) Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
 - 3) Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat;
- e. Keadaan luar biasa;
- f. Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2022**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51);
 - y. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor B/804/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sesuai dengan hasil pembahasan penajaman IKU BPKAD Tahun 2021-2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang pada tanggal 28 November 2022;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	URUSAN KEUANGAN									
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	%	100%	100%	100%	50%	50%		
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	%	100%	100%	100%	50%	50%		
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	%	100%	100%	100%	20%	20%		
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	%	100%	100%	100%	45%	45%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	%	8	8	8	4	50%		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	3	5	2	40%		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	0	0%		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	0	0%		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100%		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	0	0%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	4	4	100%		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	%	100%	100%	100%	87%	87%		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100%	100%	84	78	93%		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	100%	100%	12	6	50%		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	100%		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1	0	0%		
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	%	100%	100%	100%	0%	0%		
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12	12	150	0	0%		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	%	100%	100%	100%	92%	92%		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	8	8	6	0	0%		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	4	0	0%		
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	14	14	3	1	33%		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30	30	3	2	67%		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	2	0	0%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	25	25	6	0	0%		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	7000	5000	149	25	17%		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1693	1693	150	33	22%		
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	100	2898	2898	100%		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	11	11	11	1	9%		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100%	100%	100%	50%	50%		
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	95	77	2	1	50%		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	%	100%	100%	100%	32%	32%		
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	100%	100%	50	12	24%		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	100%	100%	12	6	50%		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	100%	100%	12	6	50%		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	%	100%	100%	100%	37%	37%		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	100%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	58	58	46	37	80%		
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	250	250	50	0	0%		
X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	24	12	50%		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	2	2	100%		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	10	128	42	33%		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	%	0,62%	6,02%	1,22%	10,61	86967%		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	%	100%	100%	100%	8%	8%		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	1	2	0	0%		
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	1	2	0	0%		
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	100%	100%	51	0	0%		
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	100%	100%	51	0	0%		
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	100%	100%	50	20	40%		
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	100%	100%	50	0	0%		
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2	2	100%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	0	0%		
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	3	3	12	6	50%		
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	100%	100%	12	6	50%		
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	100%	100%	2	1	50%		
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	100%	100%	1	0	0%		
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	2	1	200	0	0%		
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	%	100%	100%	100%	56%	56%		
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	52	52	522	266	51%		
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	100%	100%	250	153	61%		
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	100%	100%	2	1	50%		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	3	3	3	1	33%		
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	100%	100%	6	3	50%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	2	2	24	10	42%		
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	12	12	20	10	50%		
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1456	1456	1571	784	50%		
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	6	6	765	558	73%		
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	%	100%	100%	100%	53%	53%		
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	100%	100%	12	6	50%		
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	100%	100%	12	6	50%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	12	12	12	6	50%		
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	100%	100%	12	6	50%		
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	4	0	0%		
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	100%	100%	1	0	0%		
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	100%	100%	3	0	0%		
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1	1	0	0%		
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	1	100%		
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1	0	0%		
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1	1	350	175	50%		
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	2	2	40	40	100%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	%	100%	100%	100%	15%	15%		
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	1	1	0	0%		
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	100%	100%	12	2	17%		
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	%	100%	100%	80,84%	35%	43,30%		
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	%	100%	100%	100,00 %	83,90%	84%		
5.02.03.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	1	1	0	0%		
5.02.03.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	2	0	0%		
5.02.03.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	3	2	0	0%		
5.02.03.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	100%	100%	4	2	50%		
5.02.03.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	100%	100%	4	2	50%		
5.02.03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	25615	18115	10	7	70%		
5.02.03.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	100%	100%	12	2	17%		
5.02.03.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	10	10	15	4	27%		
5.02.03.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	100%	100%	17	7	41%		
5.02.03.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	102	102	200	200	100%		

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 Kegiatan yang sudah mencapai 50% ke atas yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
6. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
7. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun alasan kinerja pada beberapa kegiatan belum mencapai 50% karena:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah akan dilaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) SIPD RI serta Perwal Pengelolaan Keuangan pada triwulan 3 dan 4;
2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah disesuaikan dengan jadwal pemeliharaan barang milik daerah;
3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah untuk beberapa sub kegiatan seperti penyusunan KUA dan PPAS, RKA, serta APBD dilaksanakan sesuai jadwal pada triwulan 3 dan 4;
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaan disesuaikan dengan permohonan pengajuan belanja tidak terduga seperti bantuan sosial yang tidak direncanakan yang akan terus diakomodir sampai dengan tahun anggaran berakhir.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran induk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu anggaran induk beserta realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Semarang Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN KEUANGAN			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.298.487.866	Rp 52.246.977.213	52%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 35.824.480	Rp 1.726.300	5%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.486.400	Rp 563.300	9%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6.383.510	Rp -	0%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 7.619.420	Rp -	0%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4.745.810	Rp 136.000	3%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 7.619.420	Rp -	0%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.969.920	Rp 1.027.000	35%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.643.976.046	Rp 6.555.603.627	52%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12.189.075.406	Rp 6.325.681.127	52%
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 454.300.000	Rp 229.820.000	51%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 300.320	Rp 102.500	34%
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 300.320	Rp -	0%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 126.213.309	Rp 4.870.440	4%
11	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 126.213.309	Rp 4.870.440	4%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.936.892.444	Rp 549.845.212	28%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.418.188	Rp -	0%
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 102.740.854	Rp -	0%
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 32.731.556	Rp 12.536.000	38%
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 170.248.333	Rp 58.916.000	35%
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 6.737.600	Rp -	0%
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.820.180	Rp -	0%
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 179.725.000	Rp 20.674.883	12%
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 1.000.831.000	Rp 144.053.329	14%
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 5.998.860	Rp 5.740.000	96%
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 416.640.873	Rp 307.925.000	74%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 67.044.200	Rp 23.300.000	35%
22	Pengadaan Mebel	Rp 67.044.200	Rp 23.300.000	35%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 84.800.006.400	Rp 44.849.786.410	53%
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 200.000	Rp 35.000	18%
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 84.139.506.400	Rp 44.708.478.410	53%
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 660.300.000	Rp 141.273.000	21%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 688.530.987	Rp 261.845.224	38%
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 35.326.170	Rp 10.229.000	29%
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 433.041.441	Rp 145.173.374	34%
28	Pemeliharaan Mebel	Rp 4.035.960	Rp -	0%
29	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 49.480.137	Rp 17.428.000	35%
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 64.871.000	Rp 61.553.850	95%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 101.776.279	Rp 27.461.000	27%
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 78.193.171.545	Rp 2.250.267.390	3%
H	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 3.303.359.150	Rp 907.679.991	27%
32	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 139.117.766	Rp 6.130.000	4%
33	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 133.317.950	Rp -	0%
34	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 34.575.433	Rp -	0%
35	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp 47.835.410	Rp -	0%
36	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 32.112.600	Rp 29.332.900	91%
37	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp 14.174.910	Rp -	0%
38	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 530.935.347	Rp 213.807.901	40%
39	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 415.153.667	Rp -	0%
40	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 427.919.203	Rp 170.689.690	40%
41	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp 1.125.029.012	Rp 472.392.500	42%
42	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp 130.122.042	Rp 13.854.000	11%
43	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rp 110.698.860	Rp 1.473.000	1%
44	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 162.366.950	Rp -	0%
I	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 2.407.850.765	Rp 645.402.430	27%
45	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 550.562.013	Rp 232.654.089	42%
46	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp 215.636.850	Rp 76.114.600	35%
47	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Rp 169.669.850	Rp 35.777.200	21%
48	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 187.392.310	Rp 64.901.360	35%
49	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp 146.409.500	Rp 57.701.631	39%
50	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp 162.014.480	Rp 21.198.300	13%
51	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Rp 312.148.240	Rp 14.604.250	5%
52	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 147.051.075	Rp 41.458.750	28%
53	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 516.966.447	Rp 100.992.250	20%
J	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 2.615.029.200	Rp 405.209.969	15%
54	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp 51.242.500	Rp 14.590.150	28%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK	REALISASI ANGGARAN	%
55	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp 135.215.500	Rp 14.399.700	11%
56	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 370.929.500	Rp 73.650.000	20%
57	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 463.096.500	Rp 168.507.619	36%
58	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp 335.491.500	Rp -	0%
59	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 28.693.500	Rp -	0%
60	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp 127.665.500	Rp 17.040.000	13%
61	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp 75.957.200		0%
62	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp 279.589.000	Rp 92.247.500	33%
63	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 341.596.000	Rp -	0%
64	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 210.371.500	Rp 20.800.000	10%
65	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Rp 195.181.000	Rp 3.975.000	2%
K	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 69.866.932.430	Rp 291.975.000	0%
66	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 27.019.340	Rp -	0%
67	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 69.839.913.090	Rp 291.975.000	0%
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 4.482.705.506	Rp 772.924.484	17%
L	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 4.482.705.506	Rp 772.924.484	17%
68	Penyusunan Standar Harga	Rp 277.830.000	Rp 11.365.300	4%
69	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp 128.000.000	Rp -	0%
70	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 168.000.000	Rp 91.277.704	54%
71	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp 372.216.600	Rp 173.511.317	47%
72	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp 94.520.000	Rp 15.778.971	17%
73	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 1.436.344.097	Rp 146.220.600	10%
74	Penilaian Barang Milik Daerah	Rp 1.036.612.190	Rp 25.001.000	2%
75	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 207.563.608	Rp 42.759.300	21%
76	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp 625.394.011	Rp 174.882.040	28%
77	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 136.225.000	Rp 92.128.252	68%
JUMLAH		Rp 182.974.364.917	Rp 55.270.169.087	30%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana pada APBD induk yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program, dan 12 kegiatan dan 77 sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp182.974.364.917. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp55.270.169.087. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp127.704.195.830.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sampai dengan Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022
Tujuan :									
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan.	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran :									
Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai pemanfaatan aset	65%	65%	75%	85%	95%	100%	65%	65%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2023

Berdasarkan pertemuan pada tanggal 28 November 2022 dalam acara Desk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Bappeda disepakati untuk menyesuaikan Indikator Kinerja Utama BPKAD dengan dasar:

- a. Mengakomordir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Indikator Tujuan BPKAD sama dengan Indikator Kinerja Utama Kota Semarang sehingga perlu dilakukan perbaikan Renstra OPD demi keselarasan pada indikator RPJMD serta tidak sebagai Indikator Kinerja Utama Kota Semarang dalam RPJMD; dan
- c. Melakukan revisi tidak pada indikator program karena tercantum pada RPJMD

Didukung dengan dasar tersebut maka Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tujuan dan sasaran BPKAD disesuaikan menjadi:

- a. IKU Tujuan BPKAD yang semula Opini BPK disesuaikan menjadi Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan;
- b. Sasaran strategis 1: Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional dengan IKU Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang disesuaikan menjadi Persentase pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. Sasaran strategis 2: Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional dengan IKU Persentase nilai pemanfaatan aset disesuaikan menjadi Persentase nilai aset yang dikelola

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
Tujuan (Sesuai Renstra)										
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara Tertib, Akuntabel, dan Transparan.	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Tujuan (Hasil Pemantapan IKU)										
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79	79,5	80	80,5	81	81,5	85	79,3	79,3

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
Sasaran (Sesuai Renstra)										
Meningkatnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan OPD dengan laporan keuangan APBD Kota Semarang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Mewujudkan sistem pengelolaan aset yang profesional	Persentase nilai pemanfaatan aset	65%	65%	75%	85%	95%	100%	65%	65%	
Sasaran (Hasil Pemantapan IKU)										
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase pengelolaan keuangan daerah	95	95,3	95,7	96,0	96,3	96,7	98,11	96,42	78,56
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase nilai aset yang dikelola	89	89,5	90	90,5	91	91,5	89,68	89,77	98,54

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah. Terdapat 6 dimensi meliputi:

- 1) kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencakup kesesuaian nomenklatur program RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan KUA-PPAS, KUA-PPAS dengan APBD serta kesesuaian pagu program RKPD dengan KUA-PPAS dan KUA-PPAS dengan APBD;
- 2) pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dari penerimaan dana transfer, serta standar pelayanan minimal;
- 3) transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup ketepatan waktu terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan serta keteraksesan terhadap penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan

terbuka untuk publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya selama dua tahun anggaran;

- 4) penyerapan anggaran meliputi penyerapan anggaran belanja operasional, modal, tidak terduga, dan transfer;
- 5) kondisi keuangan daerah mencakup kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang; serta solvabilitas layanan.; dan
- 6) opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD selama 3 tahun terakhir berturut-turut.

Dengan skor masing-masing dimensi: $11,009+19,8276+15+13,3333+5,1625+15 = 79,3324$. Sehingga total indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 atas sebesar 79,3324

- b. Sasaran Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional;

Sasaran tersebut diperoleh dari rata-rata Persentase penetapan APBD tepat waktu, Persentase penyerapan anggaran belanja daerah (realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah), serta Persentase penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu. Dari target tahun 2023 sebesar 95,70% sampai dengan Triwulan II capaian BPKAD sebesar 47,39% dengan rincian:

- 1) 0 (belum dinilai karena jadwal Penetapan APBD pada triwulan 3 dan 4. Sampai dengan triwulan 2 proses penetapan APBD masih pada tahap Musrenbang Kota.
- 2) 36,03 (merupakan nilai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (konsolidasi) tahun anggaran 2023 periode 1 januari – 20 juni 2023)
- 3) 100 (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Kota Semarang telah mengirimkan permohonan pembahasan untuk mendapat persetujuan Bersama DPRD Kota Semarang atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang TA 2022 pada tanggal 21 Juni 2023).

- c. Sasaran Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional; Nilai asset keseluruhan sebesar Rp19.663.367.439.317,00 merupakan asset tetap dan asset lainnya. Nilai asset yang belum dikelola sebesar Rp2.010.592.840.131,00 di dalamnya terdapat nilai tuntutan ganti rugi, asset lain-lain (dalam proses usulan penghapusan) dan asset mangkrak. Sehingga

diketahui nilai asset yang dikelola sebesar Rp17.652.774.599.186 yaitu 89,77%. (Sumber data Neraca Audited Tahun 2021).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan BPKAD Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2021 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan melampaui target.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Kualitas sumber daya manusia
2. Pengelolaan keuangan belum optimal
3. Pengelolaan barang milik daerah

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Industri 4.0 yang menggabungkan teknologi digital dan fisik untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan terhubung;
- 2) Konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang responsif gender;
- 3) BMD yang belum terinventarisir dengan baik;

b. Peluang

- 1) Sebagian pegawai BPKAD merupakan *fresh graduate* yang dapat mempelajari sistem dengan cepat;

- 2) Penyusunan kisi-kisi KUA-PPAS dan RKA untuk memperhatikan penyusunan anggaran yang responsif terhadap gender, disabilitas, dan inklusi sosial;
- 3) Jadwal sensus barang milik daerah setiap 5 tahun sekali, sehingga perlu dilakukan inventarisasi BMD;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

1. Aplikasi SIPD RI;
2. Penetapan KUA-PPAS dan APBD berbasis responsif gender;
3. Sensus Barang Milik Daerah Tanah;
4. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
5. Penyusunan Perwal Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Percepatan realisasi belanja daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02	KEUANGAN				149.331.961.363	KEUANGAN				129.729.024.113	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BPKA D	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100%	107.822.716.481	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	BPKA D	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100%	107.396.041.061	
		BPKA D	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100%			BPKA D	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100%		
		BPKA D	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100%			BPKA D	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100%		
		BPKA D	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%			BPKA D	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	13 Dok	17.814.380	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dok	17.814.380	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	2.408.880	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	2.408.880	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	4.172.320	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	4.172.320	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.966.230	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.966.230	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	3.268.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	3.268.000	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 dok	1.608.550	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dok	1.608.550	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKA D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	1.390.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKA D	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	1.390.400	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKA D	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	12.376.885.576	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPKA D	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	11.950.204.156	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKA D	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	11.904.754.936	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPKA D	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	11.478.073.516	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	471.530.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	471.530.000	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKA D	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	300.320	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BPKA D	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	300.320	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKA D	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	300.320	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BPKA D	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	300.320	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKA D	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100%	109.595.029	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPKA D	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100%	109.595.029	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKA D	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	109.595.029	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKA D	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	109.595.029	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKA D	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	2.459.796.246	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPKA D	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	2.464.002.246	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi	BPKA D	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 Paket	15.418.188	Penyediaan Komponen Instalasi	BPKA D	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 Paket	15.418.188	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan			
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKA D	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	301.478.314	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPKA D	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	308.299.775	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKA D	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	34.648.324	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BPKA D	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	29.766.923	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKA D	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	170.320.461	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BPKA D	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	170.320.461	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKA D	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.737.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BPKA D	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.737.600	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKA D	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dok	5.820.180	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BPKA D	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dok	3.880.120	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKA D	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	149 Lap	179.725.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BPKA D	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	149 Lap	179.725.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKA D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	764.715.800	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BPKA D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	764.715.800	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2898 Dok	5.998.860	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2898 Dok	11.054.860	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dok	974.933.519	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	BPKA D	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dok	974.083.519	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKA D	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	435.217.320	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPKA D	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	435.217.320	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	BPKA D	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	435.217.320	Pengadaan Mebel	BPKA D	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	435.217.320	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKA D	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	91.528.575.143	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKA D	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	91.524.375.143	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKA D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Lap	200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKA D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Lap	200.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKA D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	90.868.075.143	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKA D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	90.958.075.143	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKA D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	660.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPKA D	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	566.100.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKA D	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	894.832.787	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPKA D	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	894.832.787	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKA D	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.326.170	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPKA D	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.326.170	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKA D	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	433.041.441	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPKA D	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	433.041.441	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	BPKA D	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	4.035.960	Pemeliharaan Mebel	BPKA D	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	4.035.960	
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BPKA D	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	49.480.137	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BPKA D	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	49.480.137	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKA D	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	271.172.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPKA D	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	271.172.800	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKA D	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128 unit	101.776.279	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPKA D	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128 unit	101.776.279	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA D	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22%	36.972.635.980	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA D	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22%	17.796.374.150	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKA D	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	2.946.956.190	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BPKA D	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	2.973.969.530	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKA D	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	94.536.716	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	BPKA D	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	94.536.716	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKA D	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	107.667.460	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BPKA D	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	107.667.460	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKA D	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	8.208.553	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	BPKA D	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	3.468.553	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKA D	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	7.035.410	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	BPKA D	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	4.110.410	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKA D	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	30.257.600	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BPKA D	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	30.257.600	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKA D	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	10.624.910	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BPKA D	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	10.624.910	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKA D	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	497.705.027	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKA D	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	519.230.027	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKA D	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	399.363.617	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKA D	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	407.022.617	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKA D	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dok	476.174.203	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKA D	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dok	476.174.203	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dok	986.979.012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dok	986.979.012	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dok	106.120.042	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dok	84.595.042	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dok	59.916.690	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dok	58.791.690	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKA D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	162.366.950	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKA D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	190.511.290	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan dan Perbendaharaan Daerah	BPKA D	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	1.953.202.300	Koordinasi dan Pengelolaan dan Perbendaharaan Daerah	BPKA D	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	1.953.202.300	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	522 Dok	542.336.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	522 Dok	542.336.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250 Dok	206.796.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250 Dok	206.796.000	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dok	70.275.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dok	70.275.000	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dok	210.341.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dok	210.341.000	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank	6 Dok	111.071.500	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	6 Dok	111.071.500	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Lembaga Keuangan Bukan Bank		dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			Keuangan Bukan Bank		dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKA D	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24 Lap	154.733.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKA D	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24 Lap	154.733.000	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	20 Dok	64.578.200	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	20 Dok	64.578.200	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1571 Dok	94.839.600	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1571 Dok	94.839.600	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKA D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	765 Orang	498.232.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKA D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	765 Orang	498.232.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKA D	Persentase menyusun LK OPD tepat waktu	100,00%	1.752.838.500	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKA D	Persentase menyusun LK OPD tepat waktu	100,00%	1.752.838.500	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap	31.017.500	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap	31.017.500	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dok	118.995.500	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dok	118.995.500	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKA D	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Lap	258.986.500	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	BPKA D	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Lap	258.986.500	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Lap	384.831.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Lap	384.831.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKA D	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dok	298.117.500	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	BPKA D	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dok	298.117.500	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP	BPKA D	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	1 Dok	6.538.500	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP	BPKA D	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	1 Dok	6.538.500	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dok	119.794.500	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dok	119.794.500	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	42.022.500	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	42.022.500	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKA D	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	215.821.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKA D	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	215.821.000	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKA D	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	91.439.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKA D	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	91.439.000	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKA D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	350 Orang	121.988.500	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKA D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	350 Orang	121.988.500	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKA D	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	40 Lembaga	63.286.500	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BPKA D	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	40 Lembaga	63.286.500	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA D	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	30.319.638.990	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKA D	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100,00%	11.116.363.820	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap	27.019.340	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap	-	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Lap	30.292.619.650	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Lap	11.116.363.820	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Persentase Legalitas Aset	80,48%	4.536.608.902	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Persentase Legalitas Aset	80,48%	4.536.608.902	
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Persentase Manajemen Aset	100%	4.536.608.902	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Persentase Manajemen Aset	100%	4.536.608.902	
5.02.03.01.01	Penyusunan Standar Harga	BPKA D	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	277.830.000	Penyusunan Standar Harga	BPKA D	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	277.830.000	
5.02.03.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	100.667.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	100.667.000	
5.02.03.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dok	168.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dok	168.000.000	
5.02.03.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Lap	397.617.498	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Lap	397.617.498	
5.02.03.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Lap	94.520.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Lap	94.520.000	
5.02.03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Lap	1.424.783.894	Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Lap	1.424.783.894	
5.02.03.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Lap	1.139.481.851	Penilaian Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Lap	1.139.481.851	
5.02.03.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Lap	144.658.608	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	15 Lap	144.658.608	
5.02.03.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dok	660.009.051	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	17 Dok	660.009.051	
5.02.03.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	150 Orang	129.041.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKA D	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	200 Orang	129.041.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemerintah Kabupaten/Kota		Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Pemerintah Kabupaten/Kota		Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02

6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.

- 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
- 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel”

dengan indikator tujuan **“Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yaitu:

1. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional;
2. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang professional.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase pengelolaan keuangan daerah;
2. Persentase nilai aset yang dikelola.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun
2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80	Indeks
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase pengelolaan keuangan daerah	95,7	%
Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional	Persentase nilai aset yang dikelola	90	%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki perandam pencapaian indikator tujuan “Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” dan indikator sasaran “Persentase pengelolaan keuangan daerah dan Persentase nilai aset yang dikelola”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02	KEUANGAN					167.934.451.827	182.974.364.917	129.729.024.113	APBD	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD	100%	100%	100%	100.298.487.866	100.298.487.866	107.396.041.061	APBD	
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan BPKAD	100%	100%	100%					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD	100%	100%	100%					
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	100%	100%					
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	13 Dok	13 Dok	13 Dok	35.824.480	35.824.480	17.814.380	APBD	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	6.486.400	6.486.400	2.408.880	APBD	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	6.383.510	6.383.510	4.172.320	APBD	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	7.619.420	7.619.420	4.966.230	APBD	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	4.745.810	4.745.810	3.268.000	APBD	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	7.619.420	7.619.420	1.608.550	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 lap	4 lap	4 lap	2.969.920	2.969.920	1.390.400	APBD	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan BPKAD	100%	100%	100%	12.643.976.046	12.643.976.046	11.950.204.156	APBD	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	12.189.075.406	12.189.075.406	11.478.073.516	APBD	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	12 Dok	454.300.000	454.300.000	471.530.000	APBD	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	300.320	300.320	300.320	APBD	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	300.320	300.320	300.320	APBD	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD	100%	100%	100%	126.213.309	126.213.309	109.595.029	APBD	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	150 Orang	150 Orang	126.213.309	126.213.309	109.595.029	APBD	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD	100%	100%	100%	1.936.892.444	1.936.892.444	2.464.002.246	APBD	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	15.418.188	15.418.188	15.418.188	APBD	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	102.740.854	102.740.854	308.299.775	APBD	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	32.731.556	32.731.556	29.766.923	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	170.248.333	170.248.333	170.320.461	APBD	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.737.600	6.737.600	6.737.600	APBD	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dok	6 Dok	6 Dok	5.820.180	5.820.180	3.880.120	APBD	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	149 Lap	149 Lap	149 Lap	179.725.000	179.725.000	179.725.000	APBD	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Lap	150 Lap	150 Lap	1.000.831.000	1.000.831.000	764.715.800	APBD	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2898 Dok	2898 Dok	2898 Dok	5.998.860	5.998.860	11.054.860	APBD	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dok	11 Dok	11 Dok	416.640.873	416.640.873	974.083.519	APBD	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	67.044.200	67.044.200	435.217.320	APBD	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	67.044.200	67.044.200	435.217.320	APBD	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	84.800.006.400	84.800.006.400	91.524.375.143	APBD	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Lap	50 Lap	50 Lap	200.000	200.000	200.000	APBD	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	84.139.506.400	84.139.506.400	90.958.075.143	APBD	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	660.300.000	660.300.000	566.100.000	APBD	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD	100%	100%	100%	688.530.987	688.530.987	894.832.787	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	35.326.170	35.326.170	35.326.170	APBD	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit	46 Unit	433.041.441	433.041.441	433.041.441	APBD	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	4.035.960	4.035.960	4.035.960	APBD	
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	24 Unit	49.480.137	49.480.137	49.480.137	APBD	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	64.871.000	64.871.000	271.172.800	APBD	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128 unit	128 unit	128 unit	101.776.279	101.776.279	101.776.279	APBD	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SILPA Terhadap APBD	1,22%	1,22%	1,22%	63.203.258.455	78.193.171.545	17.796.374.150	APBD	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	100%	100%	3.253.359.150	3.303.359.150	2.973.969.530	APBD	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	139.117.766	139.117.766	94.536.716	APBD	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	153.317.950	133.317.950	107.667.460	APBD	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	51 Dok	51 Dok	74.575.433	34.575.433	3.468.553	APBD	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	51 Dok	51 Dok	62.835.410	47.835.410	4.110.410	APBD	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	51 Dok	51 Dok	32.112.600	32.112.600	30.257.600	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	51 Dok	51 Dok	51 Dok	14.174.910	14.174.910	10.624.910	APBD	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	570.935.347	530.935.347	519.230.027	APBD	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	435.153.667	415.153.667	407.022.617	APBD	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dok	12 Dok	12 Dok	242.919.203	427.919.203	476.174.203	APBD	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	12 Dok	12 Dok	12 Dok	1.125.029.012	1.125.029.012	986.979.012	APBD	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	130.122.042	130.122.042	84.595.042	APBD	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	110.698.860	110.698.860	58.791.690	APBD	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200 Orang	162.366.950	162.366.950	190.511.290	APBD	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran	100%	100%	100%	2.357.850.765	2.407.850.765	1.953.202.300	APBD	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	522 Dok	522 Dok	522 Dok	550.562.013	550.562.013	542.336.000	APBD	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	250 Dok	250 Dok	250 Dok	215.636.850	215.636.850	206.796.000	APBD	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	169.669.850	169.669.850	70.275.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Dok	3 Dok	3 Dok	162.392.310	187.392.310	210.341.000	APBD	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6 Dok	6 Dok	6 Dok	146.409.500	146.409.500	111.071.500	APBD	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	24 Lap	24 Lap	24 Lap	137.014.480	162.014.480	154.733.000	APBD	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	20 Dok	20 Dok	20 Dok	312.148.240	312.148.240	64.578.200	APBD	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1571 Dok	1571 Dok	1571 Dok	147.051.075	147.051.075	94.839.600	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	765 Orang	765 Orang	765 Orang	516.966.447	516.966.447	498.232.000	APBD	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu	100%	100%	100%	2.565.029.200	2.615.029.200	1.752.838.500	APBD	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap	12 Lap	12 Lap	51.242.500	51.242.500	31.017.500	APBD	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dok	12 Dok	12 Dok	135.215.500	135.215.500	118.995.500	APBD	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Lap	12 Lap	12 Lap	370.929.500	370.929.500	258.986.500	APBD	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Lap	12 Lap	12 Lap	463.096.500	463.096.500	384.831.000	APBD	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dok	4 Dok	4 Dok	335.491.500	335.491.500	298.117.500	APBD	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	28.693.500	28.693.500	6.538.500	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	127.665.500	127.665.500	119.794.500	APBD	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	75.957.200	75.957.200	42.022.500	APBD	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	259.189.000	279.589.000	215.821.000	APBD	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	341.596.000	341.596.000	91.439.000	APBD	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	350 Orang	180.771.500	210.371.500	121.988.500	APBD	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	40 Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	195.181.000	195.181.000	63.286.500	APBD	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar	100%	100%	100%	55.027.019.340	69.866.932.430	11.116.363.820	APBD	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	27.019.340	27.019.340	-	APBD	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Lap	12 Lap	12 Lap	55.000.000.000	69.839.913.090	11.116.363.820	APBD	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Legalitas Aset	80,48%	80,48%	80,48%	4.432.705.506	4.482.705.506	4.536.608.902	APBD	
5.02.03.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Managemen Aset	100%	100%	100%	4.432.705.506	4.482.705.506	4.536.608.902	APBD	
5.02.03.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	277.830.000	277.830.000	277.830.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.03.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	128.000.000	128.000.000	100.667.000	APBD	
5.02.03.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok	168.000.000	168.000.000	168.000.000	APBD	
5.02.03.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Lap	4 Lap	4 Lap	372.216.600	372.216.600	397.617.498	APBD	
5.02.03.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Lap	4 Lap	4 Lap	94.520.000	94.520.000	94.520.000	APBD	
5.02.03.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Lap	10 Lap	10 Lap	1.436.344.097	1.436.344.097	1.424.783.894	APBD	
5.02.03.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Lap	12 Lap	12 Lap	1.036.612.190	1.036.612.190	1.139.481.851	APBD	
5.02.03.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	15 Lap	15 Lap	15 Lap	157.563.608	207.563.608	144.658.608	APBD	
5.02.03.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	17 Dok	17 Dok	17 Dok	625.394.011	625.394.011	660.009.051	APBD	
5.02.03.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	200 Orang	136.225.000	136.225.000	129.041.000	APBD	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2023

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

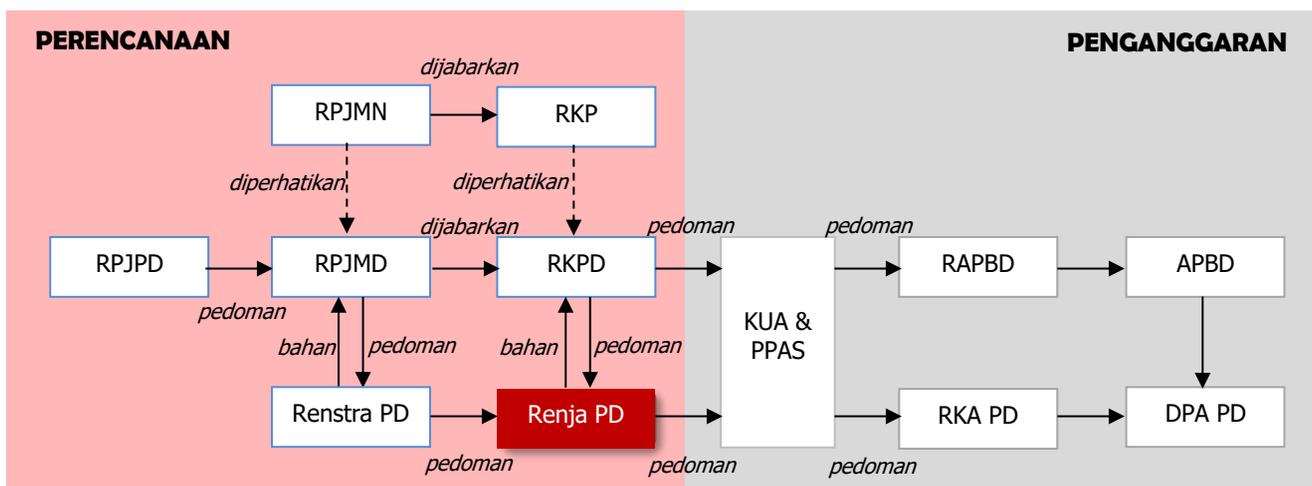
**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangkannya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 73);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Tahun Kota Semarang**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
											Realisasi Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7	10	11	12	13
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Realisasi terhadap target Dana Transfer yang ditentukan	100%	100	100%	0	0	-	0	100%	0
	5.02.02.2.0 2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	100%	100	100%	0	0	Tercapainya realisasi dana transfer terhadap target dana transfer	0	100%	0
	5.02.02.2.0 2.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah kegiatan asistensi, koordinasi, monitoring, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	100%	100	100%	0	0	-	0	100%	0

	5.02.02.2.0 4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah penyusunan laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	100%	100	100%	0	0	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan monitoring dengan SKPD Penerima Bantuan Propinsi	0	100%	0
	5.02.02.2.0 4.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		100%	100	100%	0	0	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	100%	0
			Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	100%	100	100%	0	0	Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerima bantuan provinsi	100%	100%	0
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%	10% (60%)	100%	10%	23,80%	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 (20%)	10%	23,80%
	5.02.04.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100%	10%	100%	10%	23,80%	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	100 (20%)	10%	23,80%
	5.02.04.2.0 1.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Peraturan tentang pendapatan daerah tersusun	100%	(60%)	100%	100 (20%)	63%	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	63%
	5.02.04.2.0 1.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Lebih Awal	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	100%

			Jumlah kegiatan rapat koordinasi pendapatan nasional	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%			100%	
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada Wajib Pajak Daerah berprestasi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%			100%	
			Jumlah kegiatan pemberian hadiah kepada WP dan Petugas PBB berprestasi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%			100%	
			Jumlah sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%			100%	
5.02.04.2.0 1.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah validasi data pajak daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	60%	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
5.02.04.2.0 1.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah laporan pendapatan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
			Informasi kegiatan dan data pendapatan daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%				
			Pengembangan SDM dan sistem informasi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%				

			Jumlah laporan supervisi tentang sistem informasi pendapatan daerah secara elektronik	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%				
5.02.04.2.0 1.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah wajib pajak yang termasuk penilaian NJOP PBB	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100.00 (20%)	100%	47%
			Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%				
5.02.04.2.0 1.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN	100%	(60%)	100%	100 (20%)	51%	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%				
			Jumlah dokumen SPPT PBB tercetak	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%				
5.02.04.2.0 1.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah kegiatan pelayanan kepada wajib pajak	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
5.02.04.2.0 1.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah dokumen verifikasi perpanjangan reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	100.00 (20%)	100%	50%

			Jumlah kegiatan penatausahaan pendapatan daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%				
5.02.04.2.0 1.11	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Berita Acara konfirmasi piutang pajak daerah yang tertagih	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
			Jumlah konfirmasi tunggakan PBB di 16 kecamatan dan 177 kelurahan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	52%				
			Jumlah sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%				
			Jumlah kegiatan penerimaan pembayaran pada operasi bakti dan operasi sisir PBB	100%	(60%)	100%	100 (20%)	60%				
5.02.04.2.0 1.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah penyelesaian dokumen restitusi/kelebihan dan kompensasi PBB dan BPHTB	100%	(60%)	100%	100 (20%)	67%	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
5.02.04.2.0 1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah SKPD pemeriksaan pajak daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	48%	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100.00 (20%)	100%	50%
			Jumlah kegiatan peningkatan kepatuhan para wajib pajak	100%	(60%)	100%	100 (20%)	32%				

			Jumlah kegiatan pengawasan, pemungutan dan penungguan pajak daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	33%				
5.02.04.2.0 1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah kegiatan optimalisasi penerimaan retribusi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	100%	67%
			Jumlah kegiatan evaluasi pendapatan dan penyerapan pendapatan daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100%	(60%)	100%	100 (20%)	20%	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 (20%)	100%	60%
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100%	(60%)	100%	100 (20%)	20%	Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 (20%)	100%	60%
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100%	(60%)	100%	100 (20%)	20%	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 (20%)	100%	60%
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100%	(60%)	100%	100 (20%)	20%	Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 (20%)	100%	60%

	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	29%	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 (20%)	100%	60%
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja SKPD) dan Renstra	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00 (20%)	100%	67%
			Jumlah Dokumen RTP Bapenda	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%				
	X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100.00 (20%)	100%	0%
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00 (20%)	100%	0%
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	100.00 (20%)	100%	100%

	X.XX.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	100.00 (20%)	100%	0%
	X.XX.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 (20%)	100%	100%
	X.XX.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi keuangan SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	25%	Tercapainya administrasi keuangan SKPD	100.00 (20%)	100%	38%
	X.XX.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100.00 (20%)	100%	50%
	X.XX.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00 (20%)	100%	39%
	X.XX.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.00 (20%)	100%	100%

	X.XX.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	100.00 (20%)	100%	0%
	X.XX.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis dan Realisasi Anggaran	100%	(60%)	100%	100 (20%)	0%	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00 (20%)	100%	0%
	X.XX.01.2. 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Tercapainya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100.00 (20%)	100%	100%
	X.XX.01.2.0 4.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kebijakan retribusi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	100%	100%
	X.XX.01.2.0 4.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan retribusi	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100.00 (20%)	100%	100%
	X.XX.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100%	(60%)	100%	100 (20%)	71%	Tercapainya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100.00 (20%)	100%	53%

	X.XX.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Korsik dan Group Band	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100.00 (20%)	100%	100%
	X.XX.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biaya Bagi Peserta Sosialisasi, Bintek dan Workshop	100%	(60%)	100%	100 (20%)	42%	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.00 (20%)	100%	7%
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	(60%)	100%	100 (20%)	53%	Tercapainya administrasi umum perangkat daerah	100.00 (20%)	100%	50%
	X.XX.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	50%
	X.XX.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	49%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	40%
	X.XX.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	49%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	44%
	X.XX.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	48%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	50%
	X.XX.01.2.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase langganan Surat Kabar	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	24%

	X.XX.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.00 (20%)	100%	49%
	X.XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00 (20%)	100%	50%
	X.XX.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatusahaan Arsip	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.00 (20%)	100%	100%
	X.XX.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	33%	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.00 (20%)	100%	43%
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	(60%)	100%	100 (20%)	31%	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 (20%)	100%	22%
	X.XX.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel kantor tersedia	100%	(60%)	100%	100 (20%)	33%	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	33%
	X.XX.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	33%
	X.XX.01.2.0 7.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Buku peraturan perundang-undangan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	71%	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	0%
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa Kantor	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	38%

	X.XX.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	surat menyurat kedinasan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00 (20%)	100%	42%
	X.XX.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	42%
	X.XX.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	27%
	X.XX.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan umum kantor	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100.00 (20%)	100%	40%
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	(60%)	100%	100 (20%)	54%	Tersedianya pemeliharaan aset SKPD	100.00 (20%)	100%	53%
	X.XX.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100.00 (20%)	100%	100%

	X.XX.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100%	(60%)	100%	100 (20%)	50%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100.00 (20%)	100%	53%
	X.XX.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel kantor	100%	(60%)	100%	100 (20%)	24%	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100.00 (20%)	100%	66%
	X.XX.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	(60%)	100%	100 (20%)	100%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00 (20%)	100%	31%
	X.XX.01.2.0 9.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100%	(60%)	100%	100 (20%)	60%	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100.00 (20%)	100%	0%
	X.XX.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	(60%)	100%	100 (20%)	40%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.00 (20%)	100%	67%

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah, Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya, Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penetapan Wajib Pajak Daerah, Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, dan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	69.005.235.595	18.638.486	27,01
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.411.980	10.904.920	19.68
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.821.000	2.625.870	19
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.145.180	193.620	2,12
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.093.800	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.313.800	3.628.310	43,64
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.430.200	0	0
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.608.000	4.457.120	58,58
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.451.142.743	15.534.194.313	27,04
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.349.563.143	15.172.943.503	26,93

8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.097.346.000	361.130.000	32,91
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.411.200	120.810	8,56
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.411.200	0	0
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.411.200	0	0
III	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	237.042.170	100.377.750	42,35
12	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	200.620.280	87.352.750	43,54
13	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	36.421.890	13.025.000	35,76
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	411.564.335	144.190.000	35,03
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102.925.505	101.590.000	98,70
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	308.638.830	42.600.000	13,80
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.144.964.328	946.177.900	30,09
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.046.760	20.889.000	29,82
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.878.109	39.412.500	43,85
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	184.168.209	37.499.500	20,36
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	511.414.851	117.484.500	22,97
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	4.750.000	31,67
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.650.000	13.608.500	25,85
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.032.281.000	192.326.169	18,63
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37.137.60	32.027.731	86,24
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.152.387.439	488.180.000	42,36
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.889.623.609	392.938.700	20,79
25	Pengadaan Mebel	662.519.428	207.023.700	31,25
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.221.284.001	185.915.000	15,22
27	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.820.180	0	0
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.509.799.490	658.029.598	26,22
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	144.000.000	23.366.200	16,23
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	632.623.440	206.753.971	32,68
30	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.473.300	25.369.427	27,43

31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.640.702.750	402.540.000	24,53
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.305.686.940	852.040.305	25,77
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.318.180	23.171.991	63,80
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	972.235.330	277.425.815	28,53
34	Pemeliharaan Mebel	13.318.668	5.755.000	43,21
35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	591.209.829	94.426.500	15,97
36	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.330.759	0	0
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.681.274.174	451.260.999	26,84
C	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	28.210.542.562	7.793.136.671	27,62
XI	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	28.210.542.562	7.793.136.671	27,62
38	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	694.172.891	304.017.800	43,80
39	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4.375.579.447	830.238.574	18,97
40	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	3.824.345.227	1.419.531.524	37,12
41	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4.693.658.080	1.063.610.873	22,66
42	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	260.636.731	166.141.000	63,74
43	Penetapan Wajib Pajak Daerah	3.230.148.377	617.658.410	19,12
44	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.712.134.109	950.715.585	25,61
45	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	889.376.590	346.233.926	38,93
46	Penagihan Pajak Daerah	5.177.622.420	1.70.051.500	33,22
47	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	25.500.020	18.581.000	72,87
48	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	909.465.250	284.190.329	31,25
49	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan pajak Daerah dan Retribusi Daerah	417.903.420	72.166.050	17,27
Total		97.215.778.157	26.431.990.157	27,19

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 2 program, dan 9 kegiatan dan 49 sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah sebesar Rp 97.215.778.157 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 26.431.990.157 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 70.744.302.865

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 120 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	IK K	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYE KSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 TW II	2024	2025	2026	2023
Tujuan : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	54,57	49,47	51,23	61,04	51,23	54,57	54,57	54,57
Sasaran: 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		10	10	10				17,85	6,71	-78,63				
				100	100	100	100	100		100,49	49,43	100	100	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator	IK K	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYE KSI
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 TW II	2024	2025	2026	2023
2. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	2. Realisasi PAD terhadap Target PAD 1. Nilai AKIP		74	74	74	74	74	74	76,52	78,06	78,75	74	74	74	74

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah” , dengan realisasi sebesar 61,04% sampai dengan Triwulan II dari target 54,57% pada Tahun 2023;
- b. Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja pada periode tahun 2021 s.d 2022 sesuai dengan target Renstra Bapenda Tahun 2021-2026 sebelum adanya pemutakhiran yaitu indikator “Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” dengan realisasi sebesar -78,63% dari target sebesar 10% sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ;
- c. Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja pada Tahun 2022 mengalami pemutakhiran yaitu indikator “Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah” dengan realisasi sebesar 49,43% sampai dengan Triwulan II tahun 2023
- d. Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah” yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator “Nilai AKIP” dengan realisasi nilai sebesar 78,75 dari target nilai sebesar 74 pada Tahun 2023.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 kinerja yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam upaya mencapai target tingkat kemandirian keuangan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target sebesar 54,57% diperoleh realisasi sebesar 61,04% yang diperoleh dari :

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.425.287.391.676}{\text{Rp } 2.335.150.362.327} \times 100\%$$

$$= 61,04\%$$

yang menggambarkan bahwa semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian Indikator Kinerja yang kedua yang sesuai dengan target renstra tahun 2021-2026 sebelum adanya pemutakhiran yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari :

Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{\text{PAD}(n) - \text{PAD}(n-1)}{\text{PAD}(n-1)} \times 100\%$$

$$= \frac{2.545.991.747.685 - 1.425.287.391.676}{\text{Rp } 1.425.287.391.676} \times 100\%$$

$$= -78,63\%$$

yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai periode per periode mengalami penurunan.

Capaian indikator yang ketiga setelah adanya pemutakhiran yaitu Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari :

Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 1.425.287.391.676}{\text{Rp } 2.865.712.538.632} \times 100\%$$

$$= 49,74\%$$

yang menggambarkan Pemerintah Kota Semarang belum mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dimana pendapatan asli daerah terdiri dari beberapa komponen dan pendapatan yang paling berdominan dari sector pajak daerah.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN DAERAH	5.381.832.964.155	2.335.150.362.327	43,39
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.865.712.538.632	1.425.287.391.676	49,74
1.1.1	PAJAK DAERAH	2.190.083.500.000	1.089.530.244.544	49,75
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	149.306.250.120	51.425.634.440	34,44
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	73.297.199.962	40.535.229.966	55,30

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.1.4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	453.025.588.550	243.796.282.726	53,82
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.516.120.425.523	909.862.970.651	36,16
A	PENDAPATAN TRANSFER PEM. PUSAT	1.897.277.425.523	670.978.735.705	35,36
1	BAGI HASIL PAJAK & BUKAN PAJAK/SDA	169.264.971.000	33.958.160.550	20,06
2	DANA ALOKASI UMUM	1.208.489.774.000	567.573.816.000	46,96
3	DANA ALOKASI KHUSUS	510.573.599.523	64.972.218.655	12,73
4	DANA INSENTIF DAERAH	8.949.081.000	4.474.540.500	50
B	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	618.843.000.000	238.884.234.946	38,60
1	DANA BAGI HASIL Dr PROVINSI & PEMDA LAINNYA	582.000.000.000	237.901.234.946	40,87
2	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI	36.843.000.000	983.000.000	2,66
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
1.3.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (HIBAH)	0	0	0

Data Pendapatan 31 Juni 2023 (sesuai data Laporan LRA ALL SKPD dari BPKAD (anaudited))

Target dan Realisasi Pajak Daerah Pada APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (+/-) (%)
1.	Pajak Hotel	192.999.999.999	79.699.060.853	41,29
2.	Pajak Restoran	265.000.000.001	114.328.635.668	43,14
3.	Pajak Hiburan	35.000.000.000	15.074.359.754	43,07
4.	Pajak Reklame	53.000.000.000	16.423.617.778	30,99
5.	Pajak Penerangan Jalan	265.000.000.000	127.198.220.647	48,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.000.000	4.536.000	3,78
7.	Pajak Parkir	25.000.000.000	11.826.637.934	47,31
8.	Pajak Air Tanah	26.893.500.000	10.989.991.052	40,86
9.	Pajak Sarang Burung Walet	70.000.000	500.000	0,71
10.	Pajak BPHTB	675.000.000.000	283.591.126.361	42,01
11.	PBB Pedesaan & Perkotaan	652.000.000.000	430.393.558.497	66,01
TOTAL		2.190.083.500.000	1.089.530.244.544	49,75

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Masih diperlukannya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar pencapaian tujuan kemandirian keuangan daerah sampai dengan akhir tahun dapat terpenuhi;
- 2) Diperlukan teknologi informasi yang menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan dalam pelayanan agar nilai AKIP yang telah diperoleh dapat terus dipertahankan dan ke depannya dapat melebihi nilai AKIP yang telah diperoleh.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

- 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah;
- 2) Berkembangnya ekspektasi masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 3) Masih diperlukannya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- 4) Perlu adanya pembaharuan dan pemutakhiran data base objek pajak daerah;
- 5) Masih terbatasnya tenaga teknis dalam mendukung proses pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemutakhiran objek pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
- 6) Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sadar teknologi informasi menuntut kecepatan, ketepatan dan kepraktisan pelayanan;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan

- 1) Kurang optimalnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- 2) Penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Pengintegrasian sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan
- 4) Tuntutan transparansi informasi publik.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang sebagai berikut:

- 1) Kota Semarang berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Tempat pelayanan yang strategis, online sehingga mudah diakses masyarakat.
- 3) Adanya website sebagai media informasi publik.
- 4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
- 5) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 6) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- 7) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 3
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.00.00.02.00.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				93.563.253.045	BADAN PENDAPATAN DAERAH				93.743.253.045	
5.02	KEUANGAN					KEUANGAN					
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	26.060.123.789	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	26.237.723.789	
5.02.04.2.01	<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>10.00 %</i>	<i>26.060.023.789</i>	<i>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	<i>Kota Semarang</i>	<i>Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>10.00 %</i>	<i>26.237.723.789</i>	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	1.683.374.693	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	1.683.374.693	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	2.665.595.322	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	2.722.595.322	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	4.240.988.950	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	4.301.288.950	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	12 laporan	3.365.442.780	Pengolahan, Pemeliharaan, dan	<i>Kota Semarang</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan	12 laporan	3.365.442.780	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Semarang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	196.003.354	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Semarang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	196.002.354	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	3.160.413.098	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	3.160.413.098	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	3.511.358.029	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	3.511.358.029	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	864.021.670	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	864.021.670	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	5.000.932.340	Penagihan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	5.061.232.340	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	25.500.020	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	25.500.020	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	882.549.590	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	882.549.590	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	463.943.943	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	463.943.943	
5.02.01	NON URUSAN				67.503.129.256	NON URUSAN				67.505.529.256	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	67.503.129.256	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	67.503.129.256	
			Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %				Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %		
			Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %				Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %		
			Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %				Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %		
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.00 dokumen	55.411.980	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.00 dokumen	55.411.980	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	13.821.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	13.821.000	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	9.145.180	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	9.145.180	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.093.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	9.093.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.0 1.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.313.800	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	8.313.800	
5.02.0 1.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	7.430.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	7.430.200	
5.02.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	7.608.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	7.608.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %	55.442.728.234	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %	55.404.128.234	
5.02.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan	54.413.398.754	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan	54.413.398.754	
5.02.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	1.026.280.520	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	987.680.520	
5.02.0 1.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	226.560	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	226.560	
5.02.0 1.2.02 .007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	2 laporan	1.411.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 laporan	1.411.200	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.411.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.411.200	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100.00 %	237.551.152	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100.00 %	278.551.152	
5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	213.527.416	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	254.527.416	
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	24.023.736	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	24.023.736	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100.00 %	397.444.235	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100.00 %	397.444.235	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	138.197.905	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Semarang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	138.197.905	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	259.246.330	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	259.246.330	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 %	2.832.048.095	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 %	2.781.465.835	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	70.046.760	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	70.046.760	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	130.878.109	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	130.878.109	
5.02.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	170.769.655	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	166.044.655	
5.02.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	495.157.351	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	444.575.091	
5.02.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	10.719.999	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	10.719.999	
5.02.0 1.2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	42.862.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	47.587.500	
5.02.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	855.742.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	855.742.000	
5.02.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	82.331.796	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	82.331.796	
5.02.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	973.539.925	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70 dokumen	973.539.925	
5.02.01.2.07 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	2.908.021.924	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	2.996.310.123	
5.02.0 1.2.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1 unit	451.182.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1 unit	451.182.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Lapangan yang Disediakan					Lapangan yang Disediakan			
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	600.249.576	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	600.249.576	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	1.850.770.168	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	1.939.058.367	
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	5.820.180	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	5.820.180	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	2.499.080.239	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	2.499.080.239	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	45.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	45.000.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	671.623.120	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	671.623.120	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	62.200.669	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	62.200.669	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	1.720.256.450	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	1.720.256.450	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	3.130.843.397	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	3.093.137.458	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
5.02.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36.318.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	36.318.180	
5.02.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	932.126.420	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	932.126.420	
5.02.0 1.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	13.318.668	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	13.318.668	
5.02.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	498.562.714	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	498.562.714	
5.02.0 1.2.09 .07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	11.330.759	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	11.330.759	
5.02.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	1.639.186.656	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	1.601.480.717	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupti teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah”

dengan indikator tujuan **“Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah;
2. Nilai AKIP;

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	54,57
SASARAN : 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Target Pendapatan Asli Daerah	%	100
SASARAN : 2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	74

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Resiko Bencana” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH					97.046.778.157	97.046.778.157	93.743.253.045	APBD	
5.02	KEUANGAN					97.046.778.157	97.046.778.157	93.743.253.045	APBD	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	10.00 %	10.00 %	28.334.173.757	28.334.173.757	67.505.529.256	APBD	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10.00 %	10.00 %	10.00 %	28.334.173.757	28.334.173.757	26.237.723.789	APBD	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	707.122.891	707.122.891	1.683.374.693	APBD	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 laporan	8 laporan	8 laporan	4.008.229.871	4.008.229.871	2.722.595.322	APBD	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 laporan	10 laporan	10 laporan	3.859.903.422	3.859.903.422	4.301.288.950	APBD	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	4.693.658.080	4.693.658.080	3.365.442.780	APBD	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	86000 obyek pajak	86000 obyek pajak	86000 obyek pajak	260.636.731	260.636.731	196.003.3354	APBD	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	3.180.148.377	3.180.148.377	3.160.413.098	APBD	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 layanan	12 layanan	12 layanan	4.004.481.685	4.004.481.685	3.511.358.029	APBD	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	1.042.276.590	1.042.276.590	864.021.670	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	5.190.147.420	5.190.147.420	5.061.232.340	APBD	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	30.000.020	30.000.020	25.500.020	APBD	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	939.665.250	939.665.250	882.549.590	APBD	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	417.903.420	417.903.420	463.943.943	APBD	
5.02.01	NON URUSAN					68.712.604.400	68.712.604.400	67.505.253.045	APBD	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %	68.712.604.400	68.712.604.400	67.505.529.256	APBD	
		Persentase administrasi dan pelaporan keuangan Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
		Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Bapenda	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.00 dokumen	8.00 dokumen	8.00 dokumen	55.411.980	55.411.980	55.411.980	APBD	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	13.821.000	13.821.000	13.821.000	APBD	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	9.145.180	9.145.180	9.145.180	APBD	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	9.093.800	9.093.800	9.093.800	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.313.800	8.313.800	8.313.800	APBD	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.430.200	7.430.200	7.430.200	APBD	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	7.608.000	7.608.000	7.608.000	APBD	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	57.451.142.743	57.451.142.743	55.404.128.234	APBD	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 orang/bulan	116 orang/bulan	116 orang/bulan	56.349.563.143	56.349.563.143	54.413.398.754	APBD	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76 dokumen	76 dokumen	76 dokumen	1.097.346.000	1.097.346.000	987.680.520	APBD	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.411.200	1.411.200	226.560	APBD	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	1.411.200	1.411.200	1.411.200	APBD	
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.411.200	1.411.200	1.411.200	APBD	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	87.042.170	87.042.170	278.551.152	APBD	
5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	50.620.280	50.620.280	254.527.416	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	36.421.890	36.421.890	24.023.736	APBD	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian	100.00 %	100.00 %	100.00 %	260.073.005	260.073.005	397.444.235	APBD	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	1 paket	102.925.505	102.925.505	138.197.905	APBD	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang	46 orang	46 orang	157.147.500	157.147.500	259.246.330	APBD	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3.504.900.784	3.504.900.784	2.781.465.835	APBD	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	10 paket	10 paket	70.046.760	70.046.760	70.046.760	APBD	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 paket	45 paket	45 paket	89.878.109	89.878.109	130.878.109	APBD	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 paket	90 paket	90 paket	184.168.209	184.168.209	166.044.655	APBD	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	852.351.307	852.351.307	444.575.091	APBD	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	15.000.000	15.000.000	10.719.999	APBD	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72 laporan	72 laporan	72 laporan	52.650.000	52.650.000	47.587.500	APBD	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	50 laporan	1.051.281.000	1.051.281.000	855.742.000	APBD	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	37.137.960	37.137.960	82.331.796	APBD	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	70 dokumen	70 dokumen	70 dokumen	1.152.387.439	1.152.387.439	973.539.925	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	1.669.500.259	1.669.500.259	2.996.310.123	APBD	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	0	0	151.182.000	APBD	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	631.974.810	631.974.810	600.249.576	APBD	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	1.031.705.269	1.031.705.269	1.939.058.367	APBD	
5.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	6 unit	6 unit	5.820.180	5.820.180	5.820.180	APBD	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00 %	100.00 %	100.00 %	2.480.912.647	2.480.912.647	2.499.080.239	APBD	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	144.000.000	144.000.000	45.000.000	APBD	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	632.623.440	632.623.440	671.623.120	APBD	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	168 laporan	168 laporan	168 laporan	63.586.457	63.586.457	62.200.669	APBD	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	1.640.702.750	1.640.702.750	1.720.256.450	APBD	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100.00 %	100.00 %	100.00 %	3.203.620.812	3.203.620.812	3.093.137.458	APBD	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	36.318.180	36.318.180	36.318.180	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	131 unit	131 unit	131 unit	1.064.380.710	1.064.380.710	932.126.420	APBD	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 unit	150 unit	150 unit	13.318.668	13.318.668	13.318.668	APBD	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	520 unit	520 unit	520 unit	564.089.510	564.089.510	498.562.714	APBD	
5.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	42 unit	42 unit	42 unit	7.294.444	7.294.444	11.330.759	APBD	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	6 unit	1.518.219.300	1.518.219.300	1.601.480.717	APBD	
JUMLAH						97.046.778.157	97.046.778.157	93.743.253.045		

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan terjabar ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tertuang bahwa penyesuaian nomenklatur program kegiatan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh perangkat daerah untuk menyesuaikan rencana kerja tahun 2023 dengan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Penyusunan rencana kerja perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, dan saling mendukung.

Rencana kerja perubahan perangkat daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Evaluasi ini dapat berupa evaluasi terhadap pencapaian target kinerja, efisiensi penggunaan anggaran, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.

Rencana Kerja Perubahan BKPP Tahun 2023 disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Rencana Kerja Perubahan BKPP Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Perubahan Kota Semarang dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan BKPP Tahun 2023 pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan BKPP Tahun 2022 sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 terdiri dari empat tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, Tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan tahap penetapan.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, orientasi mengenai RKPD dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan APBD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh : (1) Adanya perubahan kebijakan atau kebijakan baru dari Pemerintah Pusat yang

memberikan dampak langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 yang bertambah dan berkurang sesuai dengan hasil evaluasi capaian tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra BKPP Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang;
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 44);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi jajaran di lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam menentukan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV Tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja perubahan bagi BKPP Kota Semarang pada Tahun 2023 dengan berdasarkan pada Evaluasi Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan kedua dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026;
- b. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN ANGGARAN MURNI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Anggaran Murni dan Capaian Renstra BKPP
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi BKPP Kota Semarang
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1	Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan BKPP Kota Semarang
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ANGGARAN MURNI
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Anggaran Murni Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPP

Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program. Tahun anggaran 2023 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 3 program, 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan.

Evaluasi terhadap jalannya program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berlangsung sampai dengan triwulan II sangatlah penting. Dengan melakukan evaluasi kita dapat melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan program yang sudah berjalan sehingga dapat membuat perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik kedepannya. Dalam melakukan evaluasi diperlukan data yang akurat mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan baik berupa anggaran / keuangan maupun fisik / kinerja agar kita dapat menganalisis data tersebut.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPP Tahun 2023 dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Berikut capaian indikator kegiatan dan keuangan terhadap evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Anggaran Murni Tahun 2023 dapat dilihat tabel pada tabel 2.1.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DAN PENCAPAIAN RENSTRA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	12	13
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN											
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	300,42%	215,00%	215,00%	215,00%	225.70 Persen	215,00%	215,00%	215,00%	71,57%	
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100.00 Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99.00 Persen	99,00%	99,00%	99,00%	100,00%	
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99.00 Persen	99,00%	99,00%	99,00%	100,00%	
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	81.00 Persen	82,00%	82,00%	82,00%	100,00%	
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,04%	25,00%	25,00%	25,00%	17.53 Persen	25,00%	25,00%	25,00%	99,84%	
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100.00 Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
5.03.02.2.0 1.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Buku Formasi Kebutuhan Jabatan Pegawai	3 Buku	3 Buku	0 Buku	3 Buku	3 Buku	0 Buku	3 Buku	3 Buku	100,00%	
		Peserta Pengarahan Pengisian Aplikasi E-Formasi dan Rekonsiliasi Data Formasi Pegawai	320 Orang	315 Orang	0 Orang	315 orang	320 Orang	0 Orang	315 orang	315 orang	98,44%	
5.03.02.2.0 1.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta pembinaan dan pembekalan CPNS	1200 Orang	1200	0	0	1200 Orang	0	0	0	0%	
		Jumlah peserta seleksi CASN	5000 Orang	27000	0	0	5000 Orang	0	0	0	0%	
		Jumlah peserta sosialisasi pemberkasan pengangkatan CPNS	1200 Orang	1200	0	0	1200 Orang	0	0	0	0%	
5.03.02.2.0 1.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	160 Orang	40	45	150 Orang	40	45	85 Orang	56,67%	
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	729 Dokumen	735 Dokumen	168	157	729 Dokumen	168	154	322 Dokumen	44,17%	
5.03.02.2.0 1.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	0 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00%	
5.03.02.2.0 1.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Layanan cetak id card	1150 buah	1150	260	273	1150 buah	260	273	533 buah	46,35%	
		Layanan kartu pegawai	100 Orang	98	22	26	200 Orang	22	26	48 Orang	48,00%	
		Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	85	18	22	100 Orang	18	22	40 Orang	4,00%	
		Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang	85	21	19	100 Orang	21	19	40 Orang	4,00%	
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang	120	30	30	1500 Orang	30	30	60 Orang	6,00%	
		Layanan update data pegawai	100.000 Orang	97500	19600	21500	120.000 data	19600	21500	41100	41,10%	
		Pengelolaan arsip pegawai	100.000 Orang	97500	19600	21500	120000 data	19600	21500	41100	41,10%	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	100,00%	100,00%	25,00%	50,00%	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	75,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
5.03.02.2.0 2.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1 kali	1 kali	0	0	1 kali	0	0	0 Kali	0,00%	
		Mutasi Intern PNS	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Perubahan Jabatan ASN	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Tes Mutasi Masuk PNS	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%	
5.03.02.2.0 2.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	6 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	33,33%	
		Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2 Kali	2 Kali	0 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kali	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%	
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	4 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	2 Bulan	50,00%	
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4 Bulan	4 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	4 Bulan	1 Bulan	1 Bulan	2 Bulan	50,00%	
		Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	50,00%	
5.03.02.2.0 2.03	Pengelolaan Promosi ASN	Managemen Talenta ASN	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
		Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
		Pelantikan struktural	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%	
		Penilaian mandiri sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
		Penyusunan Perwal	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	4	5
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
		Tim Penilai kinerja PNS	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Uji kompetensi JPT Pratama	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	100,00%	
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1 Buku	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	100,00%	
		Jumlah peserta motivasi achievement/capacity building	100 Orang	100 Orang	112 Orang	0 Orang	100 Orang	112 Orang	0 Orang	112 Orang	112,00%	
		Jumlah peserta rakor kepegawaian	300 Orang	300 Orang	100 Orang	112 Orang	300 Orang	100 Orang	112 Orang	212 Orang	70,67%	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Monev pengelolaan pendidikan dan lanjutan PNS	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Pelaksanaan ujian dinas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
		Pelaksanaan UKPPI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	5 Orang	5 Orang	1 Orang	0 Orang	4 Orang	1 Orang	0 Orang	1 Orang	20,00%	
		Penyelesaian ijin belajar	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	4	5
5.03.02.2.0 3.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kenaikan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%	
		Pembekalan jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%	
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%	
		sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
5.03.02.2.0 3.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	400 Orang	379	0 orang	258 Orang	400 Orang	0 orang	258 Orang	258 Orang	64,50%	
		Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20 Orang	15	0 Orang	0 Orang	20 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%	
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	200 orang	215	0 Orang	0 Orang	250 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%	
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15 Orang	20	0 orang	20 Orang	15 Orang	0 orang	20 Orang	20 Orang	133,33%	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5.03.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Monev penilaian kinerja ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%	
5.03.02.2.0 4.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9 Orang	9 Orang	0 orang	0 Orang	9 Orang	0 orang	0 Orang	0 Orang	0,00%	
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	1 Buku	0 Buku	1 Buku	1 Buku	100,00%	
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20 orang	19 orang	0 orang	19 Orang	20 Orang	0 orang	19 Orang	19 Orang	95,00%	
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200 Piagam	200 Piagam	0 Orang	200 Piagam	175 Piagam	0 Orang	200 Piagam	200 Piagam	100,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
		Pelaksanaan konseling	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Pelaksanaan senam pegawai	22 Kali	18 Kali	8 Kali	10 Kali	22 Kali	8 Kali	10 Kali	18 Kali	81,82%	
		Pemeliharaan Aplikasi TPP	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30 Orang	21 Orang	4 Orang	6 Orang	30 Orang	4 Orang	6 Orang	10 Orang	33,33%	
		Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50 berkas	50 berkas	10 Berkas	15 Berkas	50 Berkas	10 Berkas	15 Berkas	25 Berkas	50,00%	
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40 Berkas	40 Berkas	14 Berkas	9 Berkas	40 Berkas	14 Berkas	9 Berkas	23 Berkas	57,50%	
		Sosialisasi TPP	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%	
		Tersusunnya Perkada TPP	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Dokumen	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
		Verifikasi e-cutu	250 berkas	250 berkas	84 berkas	67 berkas	250 Berkas	84 berkas	67 berkas	151 Berkas	60,40%	
5.03.02.2.0 4.07	Pembinaan Disiplin ASN	Bimbingan mental	10 Kegiatan	10 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	8 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	50,00%	
		Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80 Kegiatan	72 Kegiatan	13 Kegiatan	16 Kegiatan	5 Kegiatan	13 Kegiatan	16 Kegiatan	29 Kegiatan	36,25%	
		Pelepasan haji	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 0	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
		Pembekalan disiplin	2 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%	
		Sosialisasi Disiplin ASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%	
		Sosialisasi LHKASN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	50,00%	
		Sosialisasi LHKPN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
5.03.02.2.0 4.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Inspeksi Mendadak (Sidak)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	16,67%	
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	21 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	23 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	14,29%	
		Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2 Kasus	2 Kasus	0 Kasus	1 kasus	2 Kasus	0 Kasus	1 kasus	1 Kasus	50,00%	
		Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65 Orang	45 Orang	15 Orang	8 Orang	63 Orang	15 Orang	8 Orang	23 Orang	35,38%	
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
5.03.02.2.0 4.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Perprosesan ijin perceraian	25 Kasus	12 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	27 Kasus	2 Kasus	4 Kasus	6 Kasus	24,00%	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	55,00%	48,00%	48,00%	48,00%	35,00%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
5.04.02.2.0 1.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
5.04.02.2.0 1.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
		Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
5.04.02.2.0 1.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	826 Orang	738	0 Orang	218 Orang	746 Orang	0 Orang	218 Orang	218 Orang	26,39%	
5.04.02.2.0 1.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Evaluasi Pasca Diklat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	
					I	II		I	II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	985 Orang	84 Orang	86 Orang	800 Orang	84 Orang	86 Orang	170 Orang	17,00%		
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang	2 Orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	0 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	66,67%	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang	26 Orang	0 Orang	0 Orang	5 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang	78 Orang	0 Orang	35 Orang	0 orang	0 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	38,89%	
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang	20 Orang	0 Orang	20 Orang	60 Orang	0 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	57,14%	
X.XX	NON URUSAN												
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai	82 Nilai		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (renja) dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
		Jumlah Dokumen Rencana Strategis (perubahan) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	12.00 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12.00 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	12.00 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12.00 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1.00 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	

X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2.00 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2.00 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	115 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	

X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
		Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perubahan Tahun Lalu (2022)	Realisasi Tahun 2022 Kinerja Pada Triwulan		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Tahun 2023 Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2022 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab
					I	II		I	II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10+9	1	2
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	50,00%	

Sumber Data : Aplikasi Monev BKPP 2021

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah memenuhi target kinerja. Hal ini dikarenakan pelaksanaan/realisasinya sesuai dengan yang telah direncanakan. Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja sesuai yang direncanakan adalah lebih disebabkan karena pelaksanaan kegiatan tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi/kondisi yang terjadi ataupun sangat tergantung, yaitu dari segi evaluasi terhadap anggaran tidak menunjukkan progress yang baik dikarenakan adanya *reschedule* kegiatan .

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.945.709.175	8.023.065.463	47,35
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.366.537	9.469.800	30,19
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.314.914	477.200	36,29
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.324.765	-	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.834.367	-	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.388.206	6.181.000	83,66
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.324.765	-	0,00
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.179.520	2.811.600	67,27
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.031.789.226	6.127.737.423	50,93
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.672.312.466	6.024.523.323	51,61
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	357.095.000	102.520.000	28,71
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596.480	592.000	99,25
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	695.200	102.100	14,69
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.090.080	-	0,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	116.505.311	-	0,00
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	155.349.606	-	0,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.759.609.426	963.045.813	54,73
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.585.170	29.285.000	52,68
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	268.844.200	58.177.092	21,64

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.229.200	73.415.525	73,99
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.144.550	79.308.260	78,41
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.940.060	1.900.000	97,94
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.750.000	31.050.000	25,71
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	443.024.577	122.244.936	27,59
20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	669.091.669	567.665.000	84,84
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	438.576.519	322.296.500	73,49
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.303.552	-	0,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.739.207.393	632.832.992	36,39
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	459.402.759	170.656.036	37,15
23	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.695.834	85.285.000	26,03
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	952.108.800	376.891.956	39,58
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.120.083.435	289.979.435	25,89
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	10.384.498	25,76
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	509.651.239	154.663.437	30,35
27	Pemeliharaan Mebel	73.696.630	14.892.500	20,21
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	496.422.386	110.039.000	22,17
B	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.749.001.291	1.816.572.406	18,63
VIII	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.174.968.398	496.975.274	22,85
29	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	51.405.520	7.985.000	15,53
30	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.344.274.020	293.777.260	21,85
31	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	530.697.381	118.937.250	22,41
32	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	125.026.429	21.804.631	17,44
33	Pengelolaan Data Kepegawaian	123.565.048	54.471.133	44,08
IX	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	3.147.966.060	479.617.007	15,24

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
34	Pengelolaan Mutasi ASN	578.084.000	57.924.000	10,02
35	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	465.387.770	205.333.950	44,12
36	Pengelolaan Promosi ASN	2.104.494.290	216.359.057	10,28
X	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	2.844.495.753	455.864.458	16,03
37	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.225.733.813	15.117.220	1,23
38	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.242.565.450	342.381.364	27,55
39	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	266.577.960	24.914.314	9,35
40	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	109.618.530	73.451.560	67,01
XI	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.581.571.080	384.115.667	24,29
42	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	285.220.276	56.680.017	19,87
43	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	832.581.765	138.116.650	16,59
44	Pembinaan Disiplin ASN	375.864.210	160.246.000	42,63
45	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	71.111.430	24.945.000	35,08
46	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	16.793.399	4.128.000	24,58
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8.605.345.000	4.241.023.724	49,28
XII	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.694.660.000	735.041.237	43,37
47	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	68.573.020	2.892.180	4,22
48	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	289.336.880	161.745.400	55,90
49	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.197.480.000	516.932.127	43,17
50	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan	139.270.100	53.471.530	38,39

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2022 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN DENGAN TRIWULAN II (Rp.)	PERSENTASE (%)
	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
XIII	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	6.910.685.000	3.505.982.487	50,73
51	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6.910.685.000	3.505.982.487	50,73
Total		35.300.055.466	14.080.661.593	39,89

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 3 program dan 13 kegiatan pada BKPP Kota Semarang adalah sebesar Rp 35.300.055.466 Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 14.080.661.593 (39,89%) dengan sisa sebesar Rp 21.219.393.873 (60,11%).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data RPJMD yang dituangkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang telah memiliki tolok ukur Sasaran dan Indikator Kinerja pelayanan yang dapat diuji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, norma dan standar pelayanan. Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki tiga indikator kinerja, dengan rencana target capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 seperti yang tercantum dalam tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional		Tujuan : Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	82,28	N/A	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	84,50
	Meningkatnya kualitas	Sasaran I:	Nilai	80,30	N/A	80,60	80,90	81,20	81,50	81,50	81,50

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	REALISASI		TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	belayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian									
	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)	Sasaran II: Indeks Merit Sistem	Nilai	0,61	N/A	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,66

Sumber Data : RENSTRA BKPP 2021-2026

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran BKPP KOTA SEMARANG Semarang
Sampai Dengan Tahun 2021 dan 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	IKK	TARGET RENSTRA			REALISASI			PROYEKSI	
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024
Tujuan : Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN		82,50	83,00	83,50	84,00	85,50	-	-	-
Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian	1. Indeks Kepuasan Pegawai		80,60	80,90	81,20	79,00	81,80	-	-	-
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)	2. Indeks Sistem Merit		0,62	0,63	0,64	-	0,81	-	-	-

Sumber Data : RENSTRA BKPP 2021-2026

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran BKPP Kota Semarang Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Indeks Profesionalitas ASN”**, sudah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 85,39 % dari target sebesar 83,00%;
- b. Sasaran BKPP Kota Semarang terdiri dari 2 sasaran yaitu :
 - 1) Sasaran **“Meningkatnya kualitas pelayanan pegawai”** dengan indikator kinerja yaitu **“Indeks kepuasan pegawai”** telah dapat melampaui target, dimana realisasinya sebesar 85,093% dari target sebesar 80,90%;

- 2) Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)**” dengan indikator kinerja “Indeks Sistem Merit” Tahun 2023 telah dapat melampaui target sebesar **0,63** dan realisasi sebesar **0,75** ;

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan BKPP Kota Semarang dalam pelaksanaan fungsinya di bidang keuangan sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Dalam pelaksanaan fungsi Nama BKPP Kota Semarang di bidang keuangan dengan indikator Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Berdasarkan formula tersebut di atas dapat diketahui bahwa Rasio PAD dibanding Pendapatan Daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Secara umum dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional, BKPP Kota Semarang secara garis besar masih menghadapi berbagai kendala-kendala atau hambatan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, secara umum sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya kinerja pelayanan kepegawaian;
- 2) Belum optimalnya akurasi data kepegawaian
- 3) Kurangnya kompetensi ASN;
- 4) Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ASN

Kondisi internal BKPP terfokus pada beberapa hal yang terjadi faktor kekuatan dan peluang di satu sisi, serta keterbatasan BKPP sebagai institusi penyelenggara manajemen kepegawaian daerah. Melalui identifikasi kekuatan dan keterbatasan internal, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai upaya BKPP dalam menyikapi perkembangan dan perubahan lingkungan organisasinya, menghadapi tantangan, serta menjawab permasalahan yang ada agar BKPP dapat terus menyelenggarakan misinya untuk memenuhi harapan stakeholder dan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai unsur penunjang pelaksana di bidang kepegawaian khususnya PNS, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPP Kota Semarang. Beberapa isu strategis terkait dengan penyelenggaraan Tupoksi BKPP sebagaimana tugas dan fungsi BKPP adalah sebagai berikut :

1. Peluang

- a. BKPP Kota Semarang Kota Semarang sering dijadikan sebagai *pilot project* dalam kebijakan penanganan kepegawaian sehingga menjadikan BKPP Kota Semarang sebagai salah satu tujuan studi banding dalam manajemen kepegawaian daerah bagi daerah lain;
- b. Adanya tawaran kerjasama dalam pengukuran kompetensi bagi calon Pejabat struktural baik instansi di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta swasta;
- c. Banyaknya tawaran diklat baik yang bersifat kedinasan maupun diklat teknis fungsional dari Pemerintah Pusat, Pemda dan swasta;
- d. Adanya kewenangan yang lebih luas dalam penanganan kepegawaian di daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dengan pengakuan yang ada di Kota Semarang;
- e. Sistem informasi tentang data kepegawaian yang sudah mengalami kemajuan pesat dengan adanya aplikasi memudahkan pegawai untuk mengakses data kepegawaian dengan lebih cepat dan akurat.
- f. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan berdasarkan merit system dengan prinsip *The Right Man on The Right Job* melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
- g. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas melalui pemberian kesempatan yang luas bagi sumber daya aparatur Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kemampuannya melalui Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Optimalisasi dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung interlink pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan Perangkat Daerah terkait;

2. Tantangan

- a. Banyaknya sumber daya aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan dan penempatan PNS yang belum berdasar pada kompetensi jabatan;
- b. Belum tersusunnya perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan berbasis kinerja;

- c. Pengadaan PNS yang secara kualitas dan kuantitas belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan;
- d. Belum adanya pola karir PNS yang dijadikan acuan dalam pengembangan karir PNS;
- e. Belum optimalnya penyelesaian pensiun pegawai;
- f. Belum dilaksanakannya mutasi/rotasi pegawai secara berkala sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- g. Adanya tawaran peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dalam negeri maupun luar negeri;
- h. Diklat PNS belum optimal dalam meningkatkan kompetensi karena keterbatasan anggaran;
- i. Penetapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
- j. Belum terintegrasinya penyimpanan file dan arsip kepegawaian sehingga perlu mengintegrasikan penyimpanan file dan arsip kepegawaian terpadu dalam satu gedung;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerahnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya agar Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian khusus pada kualitas proses penyusunan dokumen RKPD, dan tentunya diikuti dengan proses pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya.

RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena RKPD menterjemahkan RPJMD dalam satuan tahunan dalam bentuk rencana, program, dan penganggaran tahunan. RKPD menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya RPJMD. Selain itu RKPD juga menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing sehingga semua program dan kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah mendukung dalam pencapaian target RKPD.

Adapun berdasarkan telaah terhadap RKPD Pemerintah Kota Semarang, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPP Kota Semarang Tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel 2.5 :

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DAN RENSTRA 2021-2026

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif		
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN				26.694.710.466	URUSAN KEPEGAWAIAN				26.694.710.466		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				9.749.001.291	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				9.674.001.291		
			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen			
			Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen				Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen			
			Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen				Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen			
			Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen				Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen			
			Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen				Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen			
			Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen				Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen			
			Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen			
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.174.968.398	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.235.951.478		
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	51.405.520	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	51.405.520	-	
			Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku				Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku			
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.344.274.020	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Semarang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.517.957.100		
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	530.697.381	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Semarang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	417.997.381		
			Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK				Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK			
	Rancangan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan						

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	125.026.429	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Semarang	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	125.026.429	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	123.565.048	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Semarang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	123.565.048	
		Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang	Layanan pengurusan kartu suami				1000 Orang			
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang	Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala				1000 Orang			
		Layanan update data pegawai	10000 Orang	Layanan update data pegawai				10000 Orang			
		Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang	Pengelolaan arsip pegawai				10000 Orang			
		Layanan kartu pegawai	300 Orang	Layanan kartu pegawai				300 Orang			
		Layanan cetak id card	1150 buah	Layanan cetak id card				1150 buah			
		Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP				8.00 Orang			
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN		Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan				3.147.966.060	Mutasi dan Promosi ASN		
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	578.084.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Semarang	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	578.084.000	
		Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan	Mutasi Intern PNS				12.00 Bulan			
		Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan	Perubahan Jabatan ASN				12.00 Bulan			
		Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan	Tes Mutasi Masuk PNS				3.00 Kegiatan			
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	465.387.770	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Semarang	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	465.387.770	
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan	Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat				6.00 Kegiatan			
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan	Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat				4.00 Bulan			
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan	Penyerahan SK kenaikan pangkat				4.00 Kegiatan			
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan	Penelitian berkas usul kenaikan pangkat				4.00 Bulan			
		Penyelesaian adminstrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan	Penyelesaian adminstrasi kenaikan pangkat				12.00 Bulan			
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	2.104.494.290	Pengelolaan Promosi ASN	Kota Semarang	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	2.104.494.290	

Rancangan RKPD Tahun 2022						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan				Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan				Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan		
			Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan				Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan		
			Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan				Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan		
			Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan				Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan		
			Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan				Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan		
			Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan				Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	2.844.495.753	Pengembangan Kompetensi ASN		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	2.794.495.753	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	1.225.733.813	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kota Semarang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	1.175.733.813	
		Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building	100.00 Orang	Jumlah peserta motivaiton achievment/capacity building				100.00 Orang			
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun				1.00 Buku			
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun				1.00 Buku			
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	1.242.565.450	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kota Semarang	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	1.242.565.450	
		Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan	Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah				12.00 Bulan			
		Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan	Pelaksanaan UKPPI				1.00 Kegiatan			
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang	Pemberian beasiswa PNS tugas belajar				6.00 Orang			
		Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan	Pelaksanaan ujian dinas				1.00 Kegiatan			
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	266.577.960	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kota Semarang	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	266.577.960	
		Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Kenaikan jabatan fungsional				3.00 Kegiatan			

Rancangan RKPDP Tahun 2022						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
			Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan				Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
			Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan				Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan		
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	109.618.530	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kota Semarang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	109.618.530	
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang	Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS				15.00 Orang			
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang	Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS				600.00 Orang			
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang	Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS				1000.00 Orang			
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	1.581.571.080	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	1.495.588.000	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	285.220.276	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Semarang	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	285.220.276	
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan	Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN				12.00 Bulan			
		Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan	Monev penilaian kinerja ASN				1.00 Kegiatan			
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	832.581.765	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kota Semarang	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	771.598.685	
		Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali	Pelaksanaan senam pegawai				22.00 Kali			
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah Kajian TPP yang tersusun				1.00 Buku			
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang	Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan				20.00 Orang			
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang	Penghargaan bagi PNS meninggal dunia				30.00 Orang			
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam	Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan				200.00 Piagam			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting		
			Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas				Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas				
			Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang				Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang				
			Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan				Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan				
			Verifikasi e-cutu	250.00 berkas				Verifikasi e-cutu	250.00 berkas				
			Penyelesaian adminstrasi dispensasi PNS	50.00 berkas				Penyelesaian adminstrasi dispensasi PNS	50.00 berkas				
5.03.02.2. 04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	375.864.210	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Semarang	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	350.864.210			
			Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan				Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan				
			Pelepasan haji	1.00 Kegiatan				Pelepasan haji	1.00 Kegiatan				
			Bimbingan mental	10.00 Kegiatan				Bimbingan mental	10.00 Kegiatan				
			Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan				Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan				
			Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan				
			Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan				Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan				
5.03.02.2. 04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Semarang	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	71.111.430	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Semarang	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	71.111.430			
			Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus				Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus				
			Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan				Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan				
			Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan				Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan				
			Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen				Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen				
5.03.02.2. 04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Perprosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	16.793.399	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kota Semarang	Perprosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	16.793.399			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				8.605.345.000	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				8.605.345.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				8.605.345.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				8.605.345.000	
			Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen				Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen		
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.694.660.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.694.660.000	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	68.573.020	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	68.573.020	
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	289.336.880	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	289.336.880	
			Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan				Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.197.480.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.197.480.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	139.270.100	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	139.270.100	
			Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan				Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan		
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	6.910.685.000	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	6.910.685.000	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	6.910.685.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Semarang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	6.910.685.000	
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang		
			Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang				Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang		
			Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang				Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang		
X.XX	NON URUSAN					NON URUSAN					
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	16.945.709.175	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	16.883.123.184	
			Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen				Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen		
			Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen				Persentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen		

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	31.366.537	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	31.176.800	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja perubahan dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	1.314.914	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja perubahan dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	3.040.380	
			Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen				Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	6.324.765	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.834.367	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	7.388.206	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	6.805.030	
			Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen				Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	6.324.765	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	4.179.520	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	4.179.520	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	12.031.789.226	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	12.031.789.226	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	11.672.312.466	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	11.672.312.466	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	357.095.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	357.095.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	596.480	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	596.480	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	695.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	695.200	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis Kebutuhan							
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.090.080	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.090.080			
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	155.349.606	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	-			
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	155.349.606	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	137.585.991			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.759.609.426	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.674.090.466			
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	55.585.170	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	55.585.170			
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	268.844.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	268.844.200			
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	99.229.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	99.229.200			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	101.144.550	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	101.144.550			
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.940.060	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.940.060			
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	120.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	100.732.500			
			Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan								Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan
			Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan								Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	443.024.577	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	377.229.692			
			Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan								Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	669.091.669	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	669.385.094			

Rancangan RKPD Tahun 2022						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan Penting
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	108.303.552	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	106.837.850	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	108.303.552	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	106.837.850	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	1.739.207.393	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	1.894.145.407	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	459.402.759	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	459.402.759	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	327.695.834	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	329.057.848	
			Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan			Kota Semarang	Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan		
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	952.108.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.105.684.800	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.120.083.435	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.145.083.435	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.313.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.313.180	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	509.651.239	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	509.651.239	
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	73.696.630	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	73.696.630	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	496.422.386	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	521.422.386	

Sumber Data: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan capaian realisasi atas target Renstra Periode 2021-2026 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada Tahun 2023 telah melaksanakan :

- a. Pengoptimalan indeks Sistem Merit yang pada Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Nomor Nomor 104/KEP.KASN/C/XI/2022 tanggal November 2022 dengan nilai 271, 5 (dua ratus tujuh puluh satu koma lima), kategori “BAIK” dan Indeks 0,66 (nol koma enam enam). Atas hasil tersebut Pemerintah Kota Semarang terus berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk menyempurnakan aspek-aspek penerapan sistem merit yang masih perlu dipenuhi sehingga pada Tahun 2023 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang berhasil meningkatkan nilai Sistem Merit Menjadi 300 atau dengan indeks 0,75 dengan Kategori “BAIK”:

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM dan KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan asas pemerintahan dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut, mengharuskan pemerintah pusat untuk mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang kepegawaian kepada daerah dan dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sebagai penyelenggara manajemen Aparatur Sipil di Pemerintah Kota Semarang, melalui manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif dan terarah dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, diperlukan ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil.

Peningkatan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat telah menjadi tuntutan masyarakat yang tidak bisa dihindari lagi. Oleh karena itu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki kewajiban meningkatkan kinerja aparat maupun kualitas aparatur Pemerintah Kota Semarang guna mendukung kedudukan ASN sebagai abdi negara dan abdi masyarakat maka dibutuhkan pendekatan baru dalam mewujudkan manajemen ASN yang mampu menjawab kondisi perkembangan global yang terus dinamis. Pendekatan kompetensi sebagai dasar manajemen ASN telah menjadi paradigma baru menggeser konsep pengelolaan pegawai berdasar konsep / paradigma personalia.

Kesadaran akan peran manusia dalam organisasi sangat penting maka peningkatan dan pengembangan manusia menjadi satu tema. Pegawai dikembangkan guna mencapai kompetensi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan. Konsep *the right man on the right place* menjadi kata kunci dalam penempatan jabatan, sehingga pengukuran demi pengukuran dilakukan secara terukur untuk melihat potensi dan kompetensi pegawai.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang yang dibentuk Berdasarkan Walikota Semarang Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Semarang.

Berdasarkan aturan tersebut di atas BKPP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka BKPP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota ;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB ;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya ;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan BKPP ;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB ;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai ;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian, Bidang Pengembangan Pegawai, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Bidang Kesejahteraan dan Disiplin, dan UPTB ;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra BKPP Kota Semarang

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPP Kota Semarang

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

3.2.2 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengadopsi dari Visi dan Misi Walikota Semarang menetapkan tujuan **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”**

3.2.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”** selanjutnya diwujudkan dengan 2 (dua) Sasaran, terdiri dari :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian;
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN).

3.2.4 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, untuk mewujudkan misi, tujuan, dan

sasaran Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode 2021-2026 di susun strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI				
MISI KE-V : Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis Dan Menyusun Produk Hukum Yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan aparatur sipil negara (ASN) yang profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Meningkatkan kelembagaan dan kinerja pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Peningkatan pelayanan administrasi ASN BKPP	
			Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN BKPP	
		Meningkatkan akurasi database Kepegawaian	Peningkatan akurasi database administrasi kepegawaian dengan pemanfaatan Teknologi informasi	
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi	
	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN)	Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya		Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan diklat dan sejenisnya
				Peningkatan dan pengembangan kelembagaan diklat
		Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan aparatur ASN		Peningkatan proses recruitment ASN
				Peningkatan pembinaan dan pengembangan karir ASN
		Penguatan sistem reward and punishment ASN		

Sumber Data: RENSTRA BKPP Kota Semarang tahun 2021

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

- a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
- b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
- c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Rencana Strategis.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengadopsi dari Visi dan Misi

Walikota Semarang menetapkan tujuan **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”**

Tujuan tersebut memiliki kesepakatan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus mampu mewujudkan aparatur Pemerintah Kota Semarang yang bertindak secara profesional sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan Kota Semarang melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menentukan “Indeks Profesionalitas ASN” sebagai indikator tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis.

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang **“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Professional”** selanjutnya diwujudkan dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu :

1. Sasaran ke-1 meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian
2. Sasaran ke-2 meningkatnya sumber daya aparatur sipil negara (ASN) dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah Indeks Merit Sistem.

Selanjutnya strategi yang merupakan rumusan penjelasan langkah prioritas untuk mencapai sasaran adalah (1) Meningkatkan kelembagaan dan kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (2) Meningkatkan akurasi database Kepegawaian (3) Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan dan sejenisnya (4) Mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan aparatur ASN .

Kemudian dijabarkan melalui arah kebijakan yaitu (1) Peningkatan pelayanan administrasi ASN BKPP, (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ASN BKPP, (3) Peningkatan akurasi database administrasi kepegawaian dengan pemanfaatan Teknologi informasi, (4) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi, (5) Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan diklat dan sejenisnya, (6) Peningkatan dan pengembangan kelembagaan diklat, (7) Peningkatan proses *recruitment* ASN, (8) Peningkatan pembinaan dan pengembangan karir ASN, (9) Penguatan sistem *reward and punishment* ASN.

Dan untuk mewujudkan kebijakan tersebut berbagai langkah yang akan dan telah ditempuh BKPP antara lain:

1. Meningkatkan Sistem Rekrutmen Pegawai

Pada masa mendatang perlu dipersiapkan pembenahan dalam sistem perekrutan pegawai. Sistem diawali dengan penyusunan pedoman pengadaan pegawai sesuai dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi, perumusan dan penyusunan formasi yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai. Mekanisme ini akan menghasilkan acuan atau pedoman dalam pengadaan pegawai.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah melaksanakan Rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara formasi PPPK dengan Jumlah Pelamar di Pemerintah Kota Semarang, 2.975 (Dua Ribuan Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Pelaksanaan seleksi terdiri dari 3 tahapan yaitu:

1. Tahap Seleksi Administrasi;
2. Tahap Seleksi Kompetensi Dasar;
3. Tahap Seleksi Kompetensi Bidang.

Para CASN ini yang nantinya diharapkan menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dimasing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terpenuhi sesuai formasi tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, peningkatan sistem rekrutmen pegawai melalui usulan formasi Perangkat Daerah se-Kota Semarang diajukan kepada Walikota Semarang dengan mengajukan usul Persetujuan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Gubernur Jawa Tengah. Mekanisme pengajuan usulan formasi tersebut dilakukan menggunakan aplikasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu e-formasi.

Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi mempunyai jumlah dan mutu/kualitas pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada masing-masing satuan organisasi. Proyeksi kebutuhan pegawai yang dihasilkan akan menginformasikan jumlah pegawai yang dibutuhkan daerah untuk mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Semarang akan dilaksanakan dengan strategi:

- 1) Analisis Kebutuhan Diklat dilaksanakan setiap tahun dengan memperhatikan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan kemanfaatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur. Penguatan peran BKPP dalam pelaksanaan seleksi calon peserta baik seleksi diklat teknis maupun diklat formal, merupakan suatu kebutuhan dalam mendukung peran dan fungsi BKPP untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait dengan peningkatan profesionalisme aparatur. Banyaknya penawaran diklat dan beasiswa, dari berbagai lembaga penyelenggara diklat baik dalam maupun luar negeri memberikan peluang yang terbuka bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalitasnya, namun demikian, perlu diupayakan filter agar pilihan diklat dan peserta diklatnya tidak jauh berbeda dengan perencanaan diklat dan kebutuhan organisasi.
- 2) Pemberian kesempatan dan fasilitasi bantuan biaya tugas belajar dan diklat lain-lain untuk mengirimkan aparatur dalam pendidikan dan latihan baik yang bersifat kedinasan (gelar) maupun diklat teknis fungsional (non gelar) serta melakukan sosialisasi dan fasilitasi atas tawaran kerjasama penyelenggaraan diklat bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Kota Semarang. Pengiriman aparatur dalam tugas belajar dan ikatan dinas dengan mempertimbangkan formasi kebutuhan yang ada.
- 3) Pengikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan bagi aparatur untuk meningkatkan wawasan, kapasitas, kompetensi dan kinerja pegawai serta mendukung Pemerintah Kota Semarang. Pengiriman aparatur dalam pendidikan pelatihan diharapkan mampu meningkatkan kemampuan, kompetensi serta perubahan pola pikir, moral dan perilaku aparatur.
- 4) Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, yaitu dalam rangka pemahaman atas peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sehingga tidak ada salah tafsir.
- 5) Pengembangan sumber daya Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan mewujudkan lembaga pengukuran kompetensi pegawai yang handal dan berdaya saing,

dengan dilakukan berbagai macam pelatihan assessor, magang serta meningkatkan promosi.

3. Menempatkan Pegawai sesuai dengan Kompetensi

Pelaksanaan penempatan PNS dalam jabatan berdasarkan prinsip “*menempatkan orang yang tepat dalam jabatan yang tepat*” sesuai dengan kompetensi serta kualifikasi yang dimiliki. Penerapan prinsip ini memerlukan alat yang bisa mengenali kompetensi PNS dan alat untuk menetapkan standar kompetensi jabatan. Penempatan dan distribusi PNS dalam Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu mempertimbangkan hasil pemetaan jabatan dan formasi. Sedangkan penempatan dan distribusi PNS dalam jabatan mempertimbangkan hasil penilaian potensi sesuai rekomendasi hasil Tes Psikologi maupun hasil *Assessment Center* tanpa mengabaikan hak-hak PNS sesuai dengan nilai-nilai demokratis, transparansi dan keadilan. Rekomendasi ini mengacu pada analisis jabatan yang akuntabel terutama menyangkut kualifikasi pegawai meliputi pendidikan, diklat teknis serta penjurangan minat dan bakat pegawai. Penempatan seseorang dalam jabatan diharapkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, bakat, kemampuan, peminatan pegawai serta kebutuhan instansi. Pada masa mendatang, adanya rencana perubahan manajemen kepegawaian akan membawa konsekuensi pada penataan personil pada jabatan yang baru maupun pemenuhan kelembagaan yang terbentuk.

Peranan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan penilaian yang memadai. Pegawai yang akan ditempatkan dalam jabatan tertentu merupakan pegawai yang benar-benar telah diseleksi secara obyektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip *merit system*.

Setiap tahun perlu senantiasa diupayakan rotasi pegawai secara berkala sebagai upaya penyegaran kerja dan peningkatan wawasan dan keahlian kerja. Rotasi pegawai dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelusuran kemampuan kerja dan keinginan setiap PNS sesuai prinsip *The Ability-Job fit and The Personality-Job Fit*. Untuk kepuasan dan efektivitas kerja perlu ada kesesuaian antara kemampuan dan jenis kepribadian kerja dengan kualifikasi pegawai yang akan dirotasi.

4. Mengembangkan pola karir PNS

Keberadaan pedoman dan *guidance* penyusunan pola karir secara nasional dan institutional perlu menjadi prioritas. Draft pola karir perlu

dikembangkan dan dirumuskan sebagai pedoman pola karir PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pola karir akan menjadi pedoman atau *guidance* yang jelas tentang perjalanan karir PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sejak menjadi CPNS sampai pensiun. Adanya pola karir yang jelas akan mendorong PNS untuk terus meningkatkan prestasi kerjanya.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai

Dalam rangka memperbaiki tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, selama kurun waktu ini akan dilaksanakan pemberian tunjangan tambahan penghasilan sesuai dengan prestasi kerja berdasarkan pada kinerja. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja merupakan wujud penghargaan atau *reward* bagi PNS sesuai dengan kinerjanya.

Penghargaan lain bagi PNS berupa pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya (dengan perhitungan per 10, 20 dan 30 tahun masa kerja). Selain diberikan tunjangan tambahan penghasilan tersebut, selama kurun waktu 1-5 tahun juga diupayakan peningkatan kesejahteraan jasmani melalui pembinaan kegiatan olahraga bagi PNS, pelaksanaan *general check up*, pemberian bantuan uji kesehatan, pemberian bantuan perawatan yang sakit sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pemberian kesejahteraan jasmani dan pelayanan kesehatan bagi PNS merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Semarang terhadap sumber daya aparaturnya.

6. Membentuk PNS yang berkarakter dan melestarikan budaya.

Pembentukan karakter PNS yang berbudaya dapat dimulai sejak CPNS pengembangan ketika sudah menjadi PNS. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil PNS di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan dasar (latsar) bagi CPNS yang mengarah kepada upaya peningkatan:

- Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air.
- Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya.
- Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Karakter ini dimaksudkan untuk memperkuat jati diri bangsa dan mendukung Daerah Kota Semarang dalam aspek sumber daya aparatur. Dukungan dalam aspek kebudayaan yakni dengan pengungkapan kembali kebudayaan lokal untuk pelestariannya di lingkungan PNS Pemerintah Kota Semarang.

7. Mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian terintegrasi

Sistem Informasi Kepegawaian dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai layanan di bidang kepegawaian. Data dan informasi kepegawaian yang akurat dibutuhkan sebagai bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepegawaian. Perencanaan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang melalui sistem informasi SIMPATIK yang memberikan pelayanan kepegawaian terintegrasi. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi, Sistem Informasi Kepegawaian akan dikembangkan secara bertahap agar sesuai pemanfaatannya. Sehingga sistem ini akan mampu menyediakan informasi yang akurat serta *up to date* bagi pengambilan kebijakan. Beberapa aplikasi kepegawaian yang telah ada saat ini seperti: Website : <https://simpatik.semarangkota.go.id> memberikan pelayanan kepegawaian terintegrasi sebagai berikut:

1. SISDM

Sistem Informasi untuk mengelola data kepegawaian. Merupakan pusat data dan dokumentasi riwayat kepegawaian setiap pegawai yang akan digunakan sebagai dasar data dan dokumen bagi layanan kepegawaian lainnya.

1. E-KINERJA

Aplikasi untuk membuat laporan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan Permenpan 8 Tahun 2021, baik secara laporan harian, bulanan dan tahunan. Data pegawai terintegrasi dari SISDM.

2. E-TPP

Aplikasi untuk pengajuan dan pengelolaan Tambahan Penghasilan Pegawai. Data pegawai terintegrasi dari SISDM dan E-KINERJA.

3. SILK

Aplikasi untuk pengajuan dan pengelolaan Layanan Kepegawaian. terdiri dari:

a. SINAGA

Aplikasi pengusulan, penjagaan dan pembuatan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala. Data pegawai terintegrasi dari SISDM. Sedang diupgrade untuk bisa Tanda Tangan Elektronik untuk Surat Pemberitahuan KGB bertanda tangan Kepala BKPP Kota Semarang dan Sekretaris Daerah dan terintegrasi dengan Aplikasi Tantekepo (Tanda Tangan Elektronik Kepegawaian Onsystem). Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id>, rencana akan diupgrade notifikasi pengingat pengusulan dan status verifikasi melalui Whatsapp PNS yang bersangkutan.

b. SIPIJAR

Aplikasi pengusulan dan pembuatan Surat Ijin Belajar. Data pegawai terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website bkpp.semarangkota.go.id, rencana akan diupgrade notifikasi status verifikasi melalui Whatsapp PNS yang bersangkutan dan akan diintegrasikan secara efektif dengan Aplikasi Tantekepo.

4. E-DISIPLIN

Aplikasi untuk pelaporan disiplin dan kehadiran pegawai pada kondisi dan saat tertentu. Data pegawai terintegrasi dari SISDM.

5. E-KENAIKAN PANGKAT

Aplikasi untuk pengusulan Kenaikan Pangkat untuk diajukan ke BKN melalui Aplikasi SAPK dan Docudigital. Data dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id> dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan ke e-mail PNS yang bersangkutan. Rencana akan diupgrade dengan notifikasi pengingat pengusulan dan verifikasi via Whatsapp.

6. E-FUNGSIONAL

Aplikasi untuk pengusulan dan pembuatan lampiran SK dan Petikan SK Kenaikan Jabatan, Pengangkatan Dalam Jabatan, dan Pemberhentian Jabatan Fungsional. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id>. Rencana akan diupgrade pemberitahuan notifikasi via Whatsapp dan juga efektivitas tanda tangan elektronik.

7. E-PENSIUN <baru>
Aplikasi untuk penjaan dan pengusulan pensiun untuk diajukan ke BKN melalui SAPK dan Aplikasi Semar. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diupgrade dengan cek status verifikasi di website <https://bkpp.semarangkota.go.id> dan notifikasi pengingat pengusulan dan verifikasi Whatsapp.
8. E-UJIAN DINAS
Aplikasi untuk mendaftar Ujian Dinas. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diupgrade notifikasi Whatsapp.
9. SIGELAR
Aplikasi pengusulan dan pembuatan Surat Ijin Penggunaan Gelar. Data Pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diintegrasikan secara efektif dengan Tantekepo dan notifikasi Whatsapp.
10. E-CUTI <baru>
Aplikasi untuk pengajuan izin cuti. <masih dalam tahap rewiu dan pengembangan>. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Rencana akan diintegrasikan secara efektif dengan Tantekepo dan notifikasi Whatsapp.
11. SIKAPUAS <baru>
Aplikasi pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri, dan Kartu Suami untuk diusulkan ke BKN Kanreg 1 Yogyakarta melalui Aplikasi Semar. Data pegawai dan dokumen terintegrasi dari SISDM. Status verifikasi usulan dapat dicek oleh masing-masing ASN melalui website <https://bkpp.semarangkota.go.id>. Rencana akan diupgrade pemberitahuan notifikasi via Whatsapp.
12. SISKA <baru>
Sistem Informasi Kompetensi Aparatur. Data pegawai terintegrasi dari SISDM.
13. SIPETE <baru>
Learning Management System (LMS) yang dapat mengakomodir semua kebutuhan media pembelajaran dalam 1 aplikasi Untuk memperoleh pelayanan pendaftaran diklat secara cepat dan lebih efisien, sebagai literasi digital bagi ASN di Pemerintah Kota Semarang dan memberikan kemudahan layanan (Pendaftaran Pra Diklat Online, Absensi Online, Mengakses Materi, Mengelola Aktivitas Pembelajaran) bagi Penyelenggara, Peserta Diklat dan Widya Iswara.

Selain itu terdapat layanan kepegawaian pendukung yang juga telah terintegrasi antara lain:

1. Website <https://bkpp.semarangkota.go.id>
2. CAT BKPP
Aplikasi Computer Assisted Test sebagai media tes/ujian pegawai berbasis komputer. Dapat diakses melalui alamat website <http://cat.bkpp.semarangkota.go.id>
3. sinona.semarangkota.go.id <baru>
Aplikasi pusat data pegawai kontrak Pemerintah Kota Semarang.
4. Aplikasi Presensi berbasis Android
Aplikasi presensi menggunakan handphone android bagi setiap pegawai, dengan pelacakan GPS. Juga dapat digunakan ketika WFH. Fitur pengenalan wajah sedang dalam tahap pengembangan.
5. Daftar Pegawai
Publik dapat mengakses keterbukaan informasi daftar pegawai melalui link website <https://data.scymark.semarangkota.go.id> atau <http://smartcity.semarangkota.go.id/DaftarPns>.
6. Statistik Pegawai
Informasi statistik pegawai dapat diakses melalui link website <https://sisdm.semarangkota.go.id/publik/statistik>
7. Verifikasi Dokumen Persyaratan Pengangkatan CPNS ke PNS
8. Aplikasi Mutasi Internal antar OPD
9. Laporan data Mutasi PNS Keluar Pemerintah Kota Semarang
10. Laporan data PNS Tugas Belajar
11. Laporan data PNS Meninggal
12. Laporan data PNS CLTN
13. Laporan data Satya Lencana
14. Laporan data Hukuman Disiplin
15. ADAGADIS Pengolahan data Penegakan Disiplin (sidak)
16. <https://panseljpt.semarangkota.go.id>
Website informasi dan pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
17. E-BAPERJAKAT
Aplikasi pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural.
18. PIK
Papan Informasi Kegiatan melalui website <http://pik.bkpp.semarangkota.go.id>
19. UKPPI
Cek kelengkapan dokumen persyaratan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. e-file, e-sisdm, e-kin, e-tp, e-silk telah diintegrasikan melalui jalur aplikasi simpatik. Dimana aplikasi simpatik ini menjadi gerbang awal menuju aplikasi-aplikasi tersebut

sehingga hanya dengan 1 (satu) username dan 1 (satu) password dapat mengakses semua aplikasi tersebut.

8. Meningkatkan mutu layanan dan jejaring kerja

Lembaga pengukuran kompetensi di daerah lain telah mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini memacu lembaga sejenis untuk senantiasa mengembangkan diri untuk meraih pangsa pasar dan menghadapi persaingan. Tahap awal perlu dilakukan penguatan kelembagaan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya diikuti dengan pembenahan manajemen, pembenahan metode pemasaran agar efektif serta mengembangkan jejaring untuk mencapai pasar yang lebih luas.

Pembenahan manajemen dimaksudkan untuk menjaga konsistensi sistem dan prosedur serta peningkatan kualitas layanan dan produk yang dihasilkan. Sebagai bahan pengambilan kebijakan, produk pengukuran kompetensi dituntut memiliki tingkat akurasi, relevansi dan kehandalan yang tinggi. Pengembangan UPTB Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diupayakan melalui kaderisasi dan peningkatan kualitas SDM, pengembangan alat ukur, peningkatan sarana prasarana serta penguatan jejaring kemitraan dengan daerah lain secara bertahap dan berkelanjutan.

9. Pelaksanaan Sistem Kenaikan Pangkat

Adanya kesenjangan dalam penyelesaian pelayanan kenaikan pangkat bagi PNS merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Perbaikan pelayanan senantiasa harus dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi intensif dengan BKN RI maupun BKN Regional sebagai mitra kerja dalam penyelesaian kenaikan pangkat PNS. Untuk mempertahankan konsistensi pelayanan, perlu penjagaan *bezeeting* yang terintegrasi antar instansi disertai optimalisasi fungsi Sistem Informasi Kepegawaian yang sudah ada. Pada fase ini akan dioptimalkan peran Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) untuk mendukung layanan kenaikan pangkat bagi PNS. Pemanfaatan Sistem yang didukung oleh akurasi data kepegawaian yang terintegrasi akan memudahkan proses layanan. Sehingga diharapkan semua usulan KP dapat selesai pada waktunya.

Pemberian kenaikan pangkat bagi PNS pada masa mendatang akan lebih mempertimbangkan kualifikasi persyaratan jabatan formasi dan kebutuhan organisasi, artinya seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam pangkat dan golongan lebih tinggi dapat diangkat selama formasinya ada dan memungkinkan, untuk

mendukung hal ini, ke depan akan disusun persyaratan dan kualifikasi jabatan pada setiap jenis jabatan dengan mensyaratkan golongan dan pangkat yang ditentukan sesuai dengan beban kerjanya. Dengan diberlakukannya kebijakan ini diharapkan kedepan komposisi PNS yang belum ideal, diharapkan secara bertahap mendekati ke bentuk idealnya. Sementara itu, keterlambatan SK pengangkatan bagi PNS golongan IV/c ke atas dikarenakan birokrasi dari BKN RI dan juga koordinasi ke Sekretariat Negara memang prosesnya lebih lama. Keterlambatan ini sendiri sudah diantisipasi dengan pengajuan lebih awal, namun kendala keterlambatan ini belum sepenuhnya bisa dihindari tapi keterlambatan hanya bisa dikurangi.

10. Meningkatkan Pengelolaan Pensiun PNS

Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian menjadi salah satu penyebab masih adanya kesenjangan dalam penyelesaian pensiun PNS/PTT. Perlu *bezeeting* PNS calon pensiun secara akurat sehingga terinformasikan data semua pegawai yang akan memasuki masa pensiun. Hal ini dapat meminimalkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pensiun yang akan merugikan pegawai calon pensiun. Pemanfaatan SAPK juga sangat mendukung layanan pengelolaan pensiun bagi PNS.

Pembekalan bagi PNS calon pensiun akan dilaksanakan secara reguler dan pembekalan kewirausahaan bagi PNS calon pensiun. Pembekalan reguler dititikberatkan pada pemberian pengetahuan pada aspek administratif dan psikologis PNS calon pensiun. Pembekalan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan administrasi berkaitan dengan dokumen kelengkapan pensiun serta diberikan wawasan lain sebagai bekal kesiapan menghadapi masa purna tugas. Sedangkan pembekalan kewirausahaan dilakukan dengan penjaringan minat dan bakat pegawai calon pensiun. Pelaksanaan pembekalan kewirausahaan bagi PNS calon pensiun diharapkan sesuai dengan minat dan ketertarikan pegawai calon pensiun yang tentunya akan berguna sebagai bekal pegawai untuk menghadapi masa pensiunnya. Pada kurun waktu tertentu akan dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan ini.

11. Meningkatkan Sarana Prasarana

Gedung Diklat yang telah difungsikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap peningkatan pendidikan dan pelatihan PNS. Saat ini terus dilakukan penambahan fasilitas seperti asrama, ruang makan maupun ruang terbuka hijau serta pemanfaatan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dari persewaan per kamar dengan target pendapatan pada tahun ini sebesar Rp. 50.000.000,-.

3.3. Program dan Kegiatan

Berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD Kota Semarang, disamping kegiatan rutin maka BKPP Kota Semarang juga melaksanakan program yang berwujud sebagai proyek pembangunan yang bersifat non fisik dengan didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tertuang bahwa penyesuaian nomenklatur program kegiatan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2023 sebanyak 3 program 13 kegiatan dan 50 sub kegiatan yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 2.5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 4.8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.3. Pemeliharaan Mebel
 - 7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Kepegawaian Daerah

- 8. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi Kepegawaian ASN.
 - 8.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan ASN;
 - 8.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
 - 8.3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 - 8.4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 8.5. Pengelolaan Data Kepegawaian
- 9. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.
 - 9.1. Pengelolaan Mutasi ASN
 - 9.2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 9.3. Pengelolaan Promosi ASN
- 10. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.
 - 10.1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
 - 10.2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - 10.3. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
 - 10.4. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- 11. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 11.1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 11.2. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 11.3. Pembinaan Disiplin ASN

- 11.4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- 11.5. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 12. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - 12.1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - 12.2. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - 12.3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - 12.4. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- 13. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 13.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Lokasi Program dan Kegiatan :

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2023 menjalankan 50 Sub Kegiatan, 13 Kegiatan dan 3 Program, dilaksanakan di Kota Semarang, dengan jumlah sebesar Rp. 36.148.417.009 (Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Rupiah)

Adapun rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar 33.255.647.626 (Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)
- b. Belanja Modal sebesar 2.892.769.383 (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.3:

Tabel 3.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03	URUSAN KEPEGAWAIAN					26.694.710.466					26.694.710.466
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					9.674.001.291	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		9.674.001.291
		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	239.43 Persen					239.43 Persen	
		Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen	Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi	100.00 Persen					100.00 Persen	
		Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen	Prosentase akurasi data kepegawaian	99.00 Persen					99.00 Persen	
		Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen	Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin	99.00 Persen					99.00 Persen	
		Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen	Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik	81.00 Persen		Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	81.00 Persen	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	19.19 Persen					19.19 Persen	
		Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00 Persen					100.00 Persen	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	2.235.951.478	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5.00 Kegiatan	2.235.951.478
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	Jumlah peserta kegiatan	300.00 Orang	51.405.520				300.00 Orang	51.405.520
		Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku	Jumlah buku formasi kebutuhan jabatan pegawai yang tersusun	3.00 Buku					3.00 Buku	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	Jumlah peserta seleksi CASN	12000 Orang	1.517.957.100				12000 Orang	1.517.957.100
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	Jumlah peserta kegiatan pembekalan purna tugas	150 Orang	417.997.381				150 Orang	417.997.381
		Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK	Jumlah SK PNS yang purna tugas yang terselesaikan	743 SK					743 SK	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dikelola	3 aplikasi	125.026.429				3 aplikasi	125.026.429
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	Layanan pengurusan kartu istri	1000 Orang	123.565.048				1000 Orang	123.565.048
		Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang	Layanan pengurusan kartu suami	1000 Orang					1000 Orang	
		Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang	Layanan pengurusan kenaikan gaji berkala	1000 Orang					1000 Orang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Layanan update data pegawai	10000 Orang	Layanan update data pegawai	10000 Orang					10000 Orang	
		Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang	Pengelolaan arsip pegawai	10000 Orang					10000 Orang	
		Layanan kartu pegawai	300 Orang	Layanan kartu pegawai	300 Orang					300 Orang	
		Layanan cetak id card	1150 buah	Layanan cetak id card	1150 buah					1150 buah	
		Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang	Jumlah layanan cetak ulang konversi NIP	8.00 Orang					8.00 Orang	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	Jumlah kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang berjalan baik	3 Kegiatan	3.147.966.060	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3 Kegiatan	3.147.966.060
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai	1.00 Kali	578.084.000				1.00 Kali	578.084.000
		Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan	Mutasi Intern PNS	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan	Perubahan Jabatan ASN	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan	Tes Mutasi Masuk PNS	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	Monitoring dan evaluasi penyelesaian kenaikan pangkat	2.00 Kali	465.387.770				2.00 Kali	465.387.770
		Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan	Desk asistensi verifikasi dan validasi kenaikan pangkat	6.00 Kegiatan					6.00 Kegiatan	
		Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan	Pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat	4.00 Bulan					4.00 Bulan	
		Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan	Penyerahan SK kenaikan pangkat	4.00 Kegiatan					4.00 Kegiatan	
		Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan	Penelitian berkas usul kenaikan pangkat	4.00 Bulan					4.00 Bulan	
		Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan	Penyelesaian administrasi kenaikan pangkat	12.00 Bulan					12.00 Bulan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	Mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	2.104.494.290				1.00 Kegiatan	2.104.494.290
		Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan	Sosialisasi Penguatan sistem merit	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan	Penilaian mandiri sistem merit	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan	Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan	Tim Penilai kinerja PNS	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan	Uji kompetensi JPT Pratama	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan	Pelantikan struktural	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan	Uji Kompetensi Administrasi	4.00 Kegiatan					4.00 Kegiatan	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	2.794.495.753	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4.00 Kegiatan	2.794.495.753
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	Jumlah peserta rakor kepegawaian	300.00 Orang	1.175.733.813				300.00 Orang	1.175.733.813
		Jumlah peserta motivasi achievement/capacity building	100.00 Orang	Jumlah peserta motivasi achievement/capacity building	100.00 Orang					100.00 Orang	
		Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku statistik pegawai yang tersusun	1.00 Buku					1.00 Buku	
		Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah buku survei kepuasan pegawai yang tersusun	1.00 Buku					1.00 Buku	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	Penyelesaian ijin belajar	12.00 Bulan	1.242.565.450				12.00 Bulan	1.242.565.450
		Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan	Penyelsaian surat ket belajar dan surat ket memiliki ijasah	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan	Pelaksanaan UKPPI	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang	Pemberian beasiswa PNS tugas belajar	6.00 Orang					6.00 Orang	
		Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan	Pelaksanaan ujian dinas	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	sosialisasi aplikasi kgt pengembangan karis PNS	1.00 Kegiatan	266.577.960				1.00 Kegiatan	266.577.960
		Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Kenaikan jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan	Pembekalan jabatan fungsional	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pemberhentian dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
		Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan	Update data jabatan fungsional	3.00 Kegiatan					3.00 Kegiatan	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	Jumlah penyelesaian pemberhentian jabatan fungsional PNS	20.00 Orang	109.618.530				20.00 Orang	109.618.530
		Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang	Penyelesaian pengangkatan kembali jabatan fungsional PNS	15.00 Orang					15.00 Orang	
		Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang	Jumlah penyelesaian kenaikan jenjang jabatan fungsional PNS	600.00 Orang					600.00 Orang	
		Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang	Penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional PNS	1000.00 Orang					1000.00 Orang	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang berjalan baik	5.00 Kegiatan	1.495.588.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5.00 Kegiatan	1.495.588.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	Sosialisasi penilaian kinerja ASN	2.00 Kegiatan	285.220.276				2.00 Kegiatan	285.220.276
		Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan	Pengelolaan Penilaian Kinerja ASN	12.00 Bulan					12.00 Bulan	
		Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan	Monev penilaian kinerja ASN	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	Pelaksanaan konseling	12.00 Bulan	771.598.685				12.00 Bulan	771.598.685
		Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali	Pelaksanaan senam pegawai	22.00 Kali					22.00 Kali	
		Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku	Jumlah Kajian TPP yang tersusun	1.00 Buku					1.00 Buku	
		Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang	Jumlah PNS yang dilakukan uji kesehatan	20.00 Orang					20.00 Orang	
		Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang	Penghargaan bagi PNS meninggal dunia	30.00 Orang					30.00 Orang	
		Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam	Jumlah Tanda kehormatan satyalancana karya satya yang diberikan	200.00 Piagam					200.00 Piagam	
		Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas	Penyelesaian berkas ijin cuti	40.00 berkas					40.00 berkas	
		Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang	Jumlah juara PNS berprestasi/teladan	9.00 Orang					9.00 Orang	
		Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan	Sosialisasi TPP	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	
		Verifikasi e-cuti	250.00 berkas	Verifikasi e-cuti	250.00 berkas					250.00 berkas	
		Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50.00 berkas	Penyelesaian administrasi dispensasi PNS	50.00 berkas					50.00 berkas	
		5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	Pelaksanaan apel pagi dan upacara hari senin	80.00 Kegiatan	350.864.210			
Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan			Pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional	5.00 Kegiatan					5.00 Kegiatan	
Pelepasan haji	1.00 Kegiatan			Pelepasan haji	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
Bimbingan mental	10.00 Kegiatan			Bimbingan mental	10.00 Kegiatan					10.00 Kegiatan	
Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan			Pembekalan disiplin	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan	Sosialisasi LHKASN	2.00 Kegiatan					2.00 Kegiatan	
		Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan	Sosialisasi LHKPN	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	Pemrosesan penghadapan PNS yang dimintai keterangan oleh APH	65.00 Orang	71.111.430				65.00 Orang	71.111.430
		Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus	Pemrosesan pemberhentian sementara/pemberhentian PNS	2.00 Kasus					2.00 Kasus	
		Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan	Inspeksi Mendadak (Sidak)	12.00 Kegiatan					12.00 Kegiatan	
		Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan sidang kasus ASN	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
		Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen	Jumlah SK hukdis yang dikeluarkan	24.00 Dokumen					24.00 Dokumen	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pemrosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	Pemrosesan ijin perceraian	28.00 Kasus	16.793.399				28.00 Kasus	16.793.399
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					8.605.345.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		8.605.345.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					8.605.345.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		8.605.345.000
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen	Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya	40.00 Persen					40.00 Persen	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis yang berjalan baik	4.00 Kegiatan	1.694.660.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4.00 Kegiatan	1.694.660.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan analisis kebutuhan diklat	1.00 Kegiatan	68.573.020				1.00 Kegiatan	68.573.020
5.04.02.2.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan kajian pengembangan diklat	1.00 Kegiatan	289.336.880				1.00 Kegiatan	289.336.880
		Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan	Penyelenggaraan pengembangan kurikulum pelatihan	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	Jumlah Peserta diklat Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi	621.00 Orang	1.197.480.000				621.00 Orang	1.197.480.000
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	Evaluasi Pasca Diklat	1.00 Kegiatan	139.270.100				1.00 Kegiatan	139.270.100
		Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan	Monitoring peningkatan kapasitas SDM pada Perangkat Daerah	1.00 Kegiatan					1.00 Kegiatan	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	6.910.685.000	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1.00 Kegiatan	6.910.685.000
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	Jumlah peserta latsar (penyelenggaraan)	1000.00 Orang	6.910.685.000				1000.00 Orang	6.910.685.000
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan nasional (pengiriman)	3.00 Orang					3.00 Orang	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator (penyelenggaraan)	30.00 Orang					30.00 Orang	
		Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang	Jumlah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas (penyelenggaraan)	90.00 Orang					90.00 Orang	
		Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang	Jumlah peserta diklat fungsional (pengiriman)	35.00 Orang					35.00 Orang	
X.XX	NON URUSAN						Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.883.123.184	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-		16.883.123.184
		Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen	Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah	100.00 Persen					100.00 Persen	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen	Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP	100.00 Persen					100.00 Persen	
		Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen	Presentase ketersediaan sarana prasarana kantor yang berfungsi baik	100.00 Persen					100.00 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	Nilai Sakip BKPP Kota Semarang	82 Nilai	31.176.800	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	82 Nilai	31.176.800

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja perubahan dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja perubahan dan rencana kerja perubahan yang tersusun	2.00 Dokumen	3.040.380				2.00 Dokumen	3.040.380
		Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen	Jumlah Dokumen RTP	1.00 Dokumen					1.00 Dokumen	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290				1.00 Dokumen	5.717.290
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (rka) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290				1.00 Dokumen	5.717.290
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) pergeseran yang tersusun	1.00 Dokumen	6.805.030				1.00 Dokumen	6.805.030
		Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang tersusun	1.00 Dokumen					1.00 Dokumen	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan yang tersusun	1.00 Dokumen	5.717.290				1.00 Dokumen	5.717.290
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	3.00 Dokumen	4.179.520				3.00 Dokumen	4.179.520
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berjalan baik	5 Kegiatan	12.031.789.226	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	5 Kegiatan	12.031.789.226
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	Pemenuhan gaji,tunjangan dan TPP ASN	12.00 Bulan	11.672.312.466				12.00 Bulan	11.672.312.466
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	Belanja penunjang tugas ASN	12.00 Bulan	357.095.000				12.00 Bulan	357.095.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang tersusun	1.00 Dokumen	596.480				1.00 Dokumen	596.480
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	695.200				2.00 Dokumen	695.200
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah yang tersusun	2.00 Dokumen	1.090.080				2.00 Dokumen	1.090.080
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik	1 Kegiatan	-	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1 Kegiatan	-
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	Jumlah peserta bintek internal	115.00 Orang	137.585.991				115.00 Orang	137.585.991
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berjalan baik	8 Kegiatan	1.674.090.466	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	8 Kegiatan	1.674.090.466
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik Perangkat Daerah	12 Bulan	55.585.170				12 Bulan	55.585.170
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	12 Bulan	268.844.200				12 Bulan	268.844.200
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan Alat Tulis Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	99.229.200				12 Bulan	99.229.200
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Barang Cetak Kantor Perangkat Daerah	12 Bulan	101.144.550				12 Bulan	101.144.550

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Perangkat Daerah	12 Bulan	1.940.060				12 Bulan	1.940.060
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman peserta kegiatan	12 Bulan	100.732.500				12 Bulan	100.732.500
		Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman rapat	12 Bulan					12 Bulan	
		Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan	Penyediaan makanan dan minuman tamu	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi dalam kota	12 Bulan	377.229.692				12 Bulan	377.229.692
		Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan	Penyediaan biaya rapat, konsultasi dan koordinasi ke luar kota	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	Pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE	12 Bulan	669.385.094				12 Bulan	669.385.094
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik	1.00 Kegiatan	106.837.850	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	1.00 Kegiatan	106.837.850
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	106.837.850				12 Bulan	106.837.850
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	Jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	3.00 Kegiatan	1.894.145.407	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	3.00 Kegiatan	1.894.145.407

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Renstra)	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi (telepon, internet), listrik, air Perangkat Daerah	12 Bulan	459.402.759				12 Bulan	459.402.759
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	329.057.848				12 Bulan	329.057.848
		Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Perbaikan peralatan kerja	12 Bulan					12 Bulan	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	Belanja penunjang tugas ASN	12 Bulan	1.105.684.800				12 Bulan	1.105.684.800
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik	4 Kegiatan	1.145.083.435	Kota Semarang	APBD Kota Semarang	-	4 Kegiatan	1.145.083.435
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas jabatan dan perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	12 Bulan	40.313.180				12 Bulan	40.313.180
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	Pemenuhan bahan bakar minyak, oli, perbaikan kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	12 Bulan	509.651.239				12 Bulan	509.651.239
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	Pemenuhan pemeliharaan mebelair	12 Bulan	73.696.630				12 Bulan	73.696.630
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	Pemenuhan pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	521.422.386				12 Bulan	521.422.386

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Rencana kerja dibuat terkait dengan visi misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pedoman dan alat ukur atas pelaksanaan penyelesaian program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang pada tahun 2023. Renja Perubahan BKPP Tahun 2023 diharapkan bisa dijadikan bagian penting dari upaya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan organisasi dan Pemerintah Kota Semarang.

Penyusunan Renja Perubahan BKPP tahun 2023 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi dalam sisa tahun Anggaran yang berjalan.

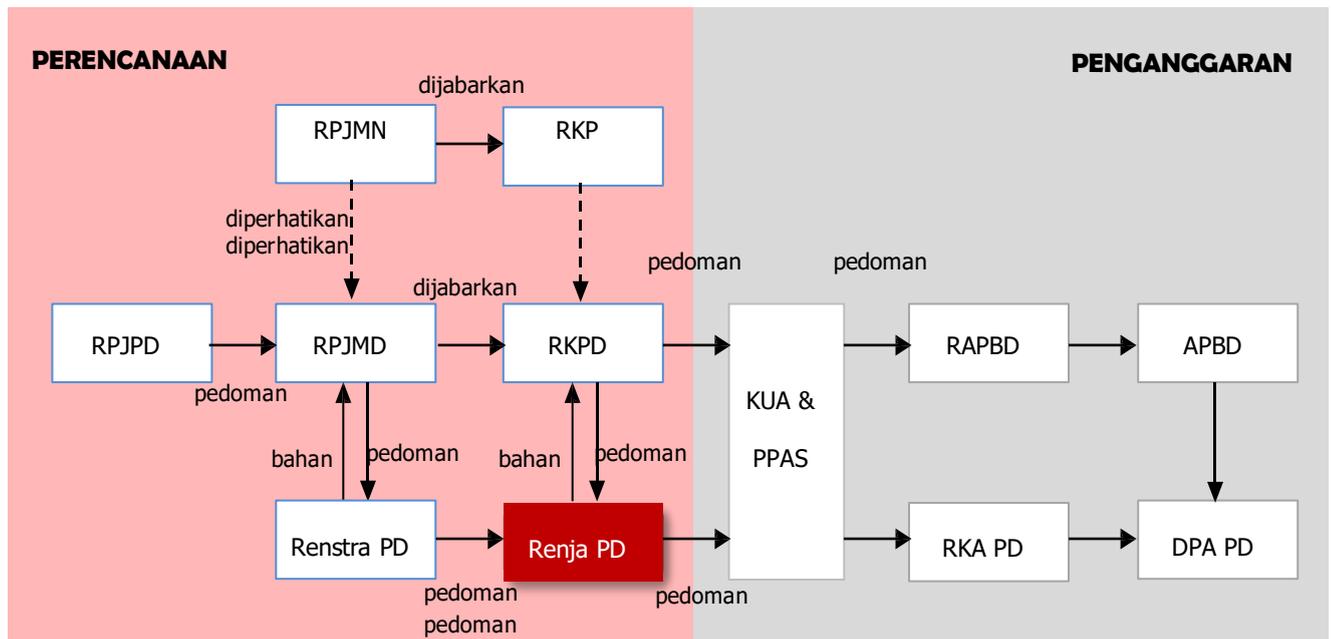
Demikian Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang Tahun 2023, semoga apa yang tertuang didalamnya dapat diwujudkan dan dilaksanakan serta bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi aparatur Pemerintah Kota Semarang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Inspektorat Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan selama 1 (semester) pelaksanaan APBD dan berdasar laporan realisasinya diketahui bahwa terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah Kota Semarang, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Selain itu, terdapat keadaan yang menyebabkan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Atas kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang menyusun KUA Perubahan dalam rangka penyusunan APBD Perubahan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Inspektorat Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2022, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang Kota Semarang;

- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Inspektorat Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Inspektorat Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Inspektorat Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Inspektorat Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan penunjang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 1
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	
Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				WTP
penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Maturitas SPIP		2,7	2,8	2,9	3,0	3,2	3,012	-					3,25
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko		2,2	2,6	3	3,05	3,1	2,820	-					3,05
	Level Kapabilitas APIP		3	3	3	3	3	3	3					3

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Inspektorat tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Mewujudkan Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP telah terealisasi WTP ;
- b. Sasaran Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan 3 indikator,
 - 1) Nilai Maturitas SPIP dengan target nilai 2,8 belum ada realisasi dikarenakan penilaian Maturitas oleh BPKP dilakukan di triwulan 4. Berdasarkan nilai maturitas SIP tahun 2022 sebesar 3,012 maka proyeksi di nilai 3,25.
 - 2) Indeks Penerapan Manajemen Risiko belum ada realisasi dikarenakan penilaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko oleh BPKP dilakukan di

triwulan 4. Berdasarkan Indeks Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2022 sebesar 2,820 maka proyeksi di angka 3,05.

3) Level Kapabilitas APIP belum ada realisasi dikarenakan penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP dilakukan di triwulan 4. Berdasarkan level kapabilitas APIP tahun 2022 sebesar 3 maka proyeksi di nilai 3.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah “**Peningkatan** Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan **Berkelanjutan**”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02

6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.

- 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

- 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
 - e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

"Mewujudkan Penguatan Peran Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel"

dengan indikator tujuan "Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah"

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. a. Nilai maturitas SPIP
b. Indeks penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks)
c. Level kapabilitas APIP
2. Nilai AKIP perangkat daerah.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Terwujudnya penguatan peran pengawasan internal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	2,8
	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	Indeks	2,6
	Level Kapabilitas APIP	Level	3

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Inspektorat memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Terwujudnya reformasi birokrasi yang mumpuni, terbuka, melayani dan bertanggungjawab” dan indikator sasaran “Opini BPK dengan target WTP”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Inspektorat Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Inspektorat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)/Sub Kegiatan	Target		Pagu Anggaran		Sumber Dana
			Renja	Perubahan	Renja	Perubahan	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				27.889.644.124	26.994.738.434	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100%	100%	2.949.036.853	2.712.407.863	
		Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.00 leveling	3.00 leveling			
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	100%	2.493.524.703	2.256.975.394	PAD
		Persentase Terselenggarakannya pengawasan internal	100.00 Persentase	100.00 Persentase			
		Persentase Tindak Lanjut Temuan	87.00 Persentase	87.00 Persentase			
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan kinerja pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	100%	100%	236.374.169	180.754.000	PAD

6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang	100%	100%	498.715.364	484.847.440	PAD
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja Kota Semarang	100%	100%	307.628.600	183.028.600	PAD
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan Kota Semarang	100%	100%	59.440.000	105.456.000	PAD
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	jumlah kegiatan kerjasama pengawasan internal (RIKMA BPKP, Saber Pungli dan Rakorwastas)	100%	100%	1.142.515.135	1.075.315.135	PAD
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kegiatan TL LHP, Rakorwas dan Larwasda	100%	100%	248.851.435	227.574.219	PAD
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	455.512.150	455.432.469	PAD
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	100%	100%	107.029.950	107.020.690	PAD
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pemeriksaan khusus, kasus dan aduan yang ditangani	100%	100%	348.482.200	348.411.779	PAD
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100%	100%	5.022.852.250	4.669.415.600	PAD
		Nilai Maturitas SPIP	3.04 nilai	3.04 nilai			

6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		100%	100%	361.323.800	272.105.400	PAD
		Persentase kebijakan yang bisa dimanfaatkan	100.00 persentase	100.00 persentase			
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang pengawasan yang berhasil disusun (Program kerja berbasis resiko, Peta auditan RR dan RTP Inspektorat)	100%	100%	68.421.400	50.285.400	PAD
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah kebijakan - kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan yang berhasil disusun (SPIP, monitoring RR dan RTP Tk. Kota, WBS / benturan Kepentingan)	100%	100%	292.902.400	221.820.000	PAD
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		100%	100%	4.661.528.450	4.397.310.200	PAD
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan konsultasi ke OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Pendampingan DPRD	100%	100%	696.330.000	612.930.000	PAD
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan pendampingan, asistensi dan verifikasi PMPRB dan ZI	100%	100%	484.802.300	276.262.300	PAD
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi (SPAK, Laporan Gratifikasi, Korsupgah, LHKASN, UPG)	100%	100%	3.344.596.750	3.372.905.000	PAD

6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan Survey Penilaian Integritas	100%	100%	135.799.400	135.212.900	PAD
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	19.917.755.021	19.612.914.971	PAD
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100.00 %	100.00 %			
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Inspektorat	100.00 %	100.00 %			
		persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Inspektorat	100.00 %	100.00 %			
		Persentase peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100.00 %	100.00 %			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	36.670.758	36.670.758	PAD
		Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	15.00 dokumen	15.00 dokumen			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Renstra, RKT, IKU, PK (Murni dan Perubahan)	100%	100%	13.544.580	13.544.580	PAD
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Murni	100%	100%	5.292.161	5.292.161	PAD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	100%	100%	5.409.019	5.409.019	PAD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Murni	100%	100%	4.629.799	4.629.799	PAD

X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	100%	100%	5.409.019	5.409.019	PAD
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	100%	100%	2.386.180	2.386.180	PAD
		Jumlah dokumen pelaporan evaluasi kinerja OPD	0 0	0 0			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	12.745.200.964	13.104.368.858	PAD
		Persentase administrasi keuangan SKPD 100%	100.00 %	100.00 %			
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	14.00 Dokumen	14.00 Dokumen			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	100%	12.451.857.124	12.811.105.018	PAD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100%	100%	288.040.000	287.960.000	PAD
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan	100%	100%	3.617.280	3.617.280	PAD
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	100%	100%	1.090.080	1.090.080	PAD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	100%	100%	596.480	596.480	PAD
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN Inspektorat	100%	100%	1.844.767.600	1.702.914.840	PAD
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase APiP yang mengikuti Diklat berdasarkan tugas dan fungsi	100%	100%	1.160.777.600	1.037.524.840	PAD

X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase APIP yang mengikuti Bimtek dibidang peraturan perundang-undangan	100%	100%	683.990.000	665.390.000	PAD
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	2.806.354.982	2.478.350.052	PAD
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	184.136.639	107.879.459	PAD
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100%	100%	89.008.516	88.847.017	PAD
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	100%	100%	210.257.745	152.193.645	PAD
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	100%	100%	5.982.068	1.724.560	PAD
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	100%	100%	245.700.000	85.050.000	PAD
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	876.938.002	668.726.002	PAD
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	100%	100%	323.220.904	280.556.208	PAD
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung SPBE pada SKPD	100%	100%	871.111.108	1.093.373.161	PAD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	1.832.255.527	1.649.625.273	PAD
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	100%	100%	1.326.386.217	1.326.386.217	PAD
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan sarana prasarana mebeleur	100%	100%	137.815.443	51.587.557	PAD

X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor	100%	100%	368.053.867	271.651.499	PAD
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	18.780.000	7.260.000	PAD
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	18.780.000	7.260.000	PAD
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	633.725.190	633.725.190	PAD
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas jabatan	100%	100%	36.668.180	36.668.180	PAD
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional / lapangan	100%	100%	348.386.120	348.386.120	PAD
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebeleur	100%	100%	10.530.800	10.530.800	PAD
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	100%	157.470.605	157.470.605	PAD
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	100%	80.669.485	80.669.485	PAD

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2023

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Inspektorat Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Inspektorat Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Inspektorat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Inspektorat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

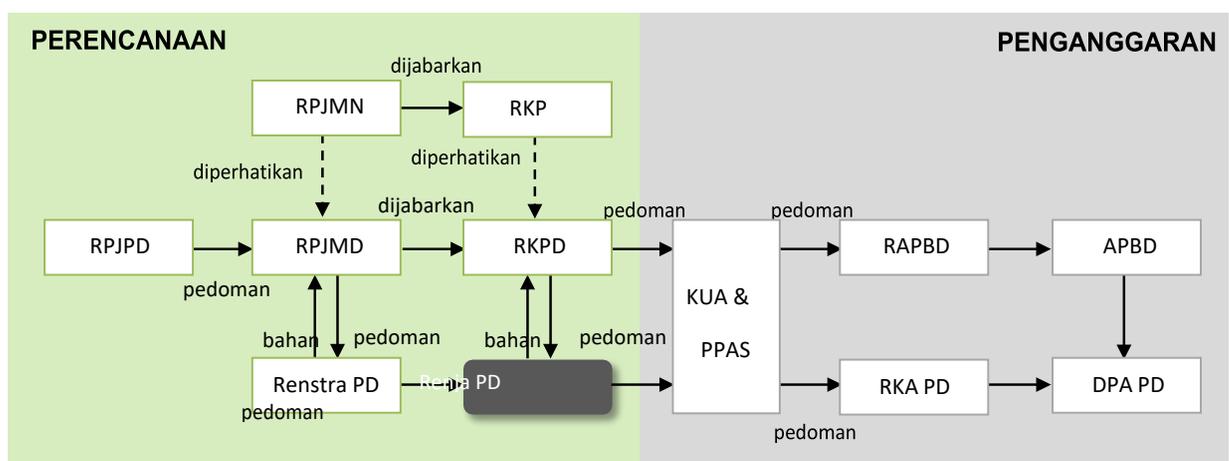
35. KECAMATAN SEMARANG SELATAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja** Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang **Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target- target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
KECAMATAN SEMARANG SELATAN TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja Kecamatan Semarang Selatan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Selatan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II tahun 2023

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
7.01	KECAMATAN									
7.01.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%	91%		92%	52%	56%	52%	54%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka		1 angka	1 angka	100%	1 angka	100%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen	7 dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	6 Dokumen	50%	6 Dokumen	85%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%		100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Barusari	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BARUSARI)	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/8x100%	10=5+8	11=10/4x100%
		Kantor Kelurahan Bulustalan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELU RAHAN BARUSARI)					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randusari	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELU RAHAN BARUSARI)	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pleburan	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELU RAHAN BARUSARI)	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Tengah	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
					Kecamatan(KELU RAHAN LAMPER TENGAH)					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonodri	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELU RAHAN WONODRI)	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Peterongan	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELU RAHAN PETERONGAN)	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mugassari	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
					Wilayah Kecamatan(KELU RAHAN MUGASSARI)					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper Kidul	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELU RAHAN LAMPER KIDUL)	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lamper lor	100%	100%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELU RAHAN LAMPER LOR)	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%		100%	50%	50%	50%	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
7.01.02.2.0 4.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	4 kegiatan	4 kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	97%		98%	50%	51%	50%	51%
7.01.03.2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan	1 kegiatan	33%	1 kegiatan	33%
7.01.03.2.0 2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	368 kegiatan	364 kegiatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	14 kegiatan	15 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	16 Unit	6 Unit	37%	6 Unit	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	14 kegiatan	9 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN LAMPER KIDUL)	11 Unit	6 Unit	54%	6 Unit	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	12 kegiatan	9 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN WONODRI)	11 Unit	9 Unit	81%	9 Unit	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	11 kegiatan	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN PETERONGAN)	11 Unit	9 Unit	81%	9 Unit	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	15 kegiatan	13 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN LAMPER LOR)	12 Unit	6 Unit	50%	6 Unit	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	14 kegiatan	16 Kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN PLEBURAN)	10 Unit	8 Unit	80%	8 Unit	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	12 kegiatan	9 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN MUGASSARI)	12 Unit	7 Unit	58%	7 Unit	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	14 kegiatan	14 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN RANDUSARI)	14 Unit	14 Unit	100%	14 Unit	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	12 kegiatan	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN BULUSTALAN)	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	14 kegiatan	17 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN BARUSARI)	13 Unit	9 Unit	69%	9 Unit	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	10 kegiatan	10 kegiatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	4 Unit	40%	4 Unit	indikator berubah
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35 kegiatan	32 kegiatan	Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Tengah	18 kegiatan	18 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Kidul	20 kegiatan	20 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulustalan	22 kegiatan	22 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Barusari	20 kegiatan	19 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randusari	20 kegiatan	20 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mugassari	20 kegiatan	19 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonodri	20 kegiatan	19 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/8x100%	10=5+8	11=10/4x100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pleburan	20 kegiatan	19 Kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Peterongan	20 kegiatan	17 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamper Lor	20 kegiatan	17 kegiatan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	100%	8 Pokmas / Ormas	indikator berubah
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 dokumen	6 dokumen		8 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	6 dokumen	6 dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KELURAHAN LAMPER TENGAH)	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
					KELURAHAN LAMPER TENGAH)					
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN LAMPER TENGAH)	9 Lembaga	9 Lembaga	100%	9 Lembaga	indikator berubah
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	indikator berubah
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	9,50%		15%	6,20%	41%	6,20%	20%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22 angka	62 angka		52 angka	37 angka	71%	37 angka	59%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/8x100%	10=5+8	11=10/4x100%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 kegiatan	50 kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1 Laporan	50%	1 Laporan	indikator berubah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	87%		92%	50%	50%	50%	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4 kegiatan	2 kegiatan		3 kegiatan	2 kegiatan	66%	2 kegiatan	50%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 kegiatan	10 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	indikator berubah
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%		100%	40%	40%	40%	40%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana	100%	100%		100%	63%	63%	63%	63%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
		perkantoran SKPD 100%								
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100%	100%		100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 dokumen	6 dokumen		6 dokumen	3 dokumen	50%	3 dokumen	50%
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	1 Dokumen	50%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/8x100%	10=5+8	11=10/4x100%
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	indikator berubah
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%		100%	50%	50%	50%	50%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen	2 dokumen	50%	2 dokumen	50%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	100%	63 Orang/bulan	indikator berubah
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prsentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	indikator berubah
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
					Keuangan Akhir Tahun SKPD					
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	9 Laporan	50%	9 Laporan	indikator berubah
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi	100%	100%		100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	1 dokumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	$9=7/8 \times 100\%$	$10=5+8$	$11=10/4 \times 100\%$
					Kantor yang Disediakan					
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Jenis	1 dokumen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	indikator berubah
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	1 dokumen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	indikator berubah
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	1 dokumen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	indikator berubah
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3853 orang	2439 orang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	229 kegiatan	189 kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	31 jenis	1 jenis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	indikator berubah

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/8x100%	10=5+8	11=10/4x100%
					Elektronik pada SKPD					
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%		100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	6 jenis	1 jenis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	indikator berubah
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%		100%	50%	50%	50%	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 jenis	13 jenis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	indikator berubah
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%		100%	50%	50%	50%	50%

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)	Indikator Mutakhir	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/8x100%	10=5+8	11=10/4x100%
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	50 unit	50 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	100%	36 Unit	72%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	1 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	7 Unit	63%	7 Unit	indikator berubah
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	1 jenis	1 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 jenis	1 jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, ”.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	38.871.782.141	13.287.302.916	34,18%
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.671.187.770	1.260.792.131	47,20%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.477.550	27.422.000	45,34%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.477.550	27.422.000	45,34%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.653.834.720	783.665.029	47,38%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.045.734.720	499.556.162	47,77%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER TENGAH	60.000.000	22.251.793	37,09%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER LOR	60.000.000	25.113.746	41,86%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN WONODRI	60.000.000	36.135.950	60,23%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN MUGASSARI	62.700.000	23.385.892	37,30%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER KIDUL	60.000.000	34.380.028	57,30%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN RANDUSARI	60.000.000	32.777.500	54,63%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PETERONGAN	60.000.000	34.661.416	57,77%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PLEBURAN	62.700.000	15.571.338	24,83%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BARUSARI	60.000.000	31.212.820	52,02%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BULUSTALAN	62.700.000	28.618.384	45,64%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	956.875.500	449.705.102	47,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	956.875.500	449.705.102	47,00%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.908.250.637	5.497.916.867	24,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.562.923.527	842.563.075	6,71%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	97.350.000	89.941.320	92,39%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.369.528.000	33.081.000	2,42%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH	950.000.000	0	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR	950.000.000	0	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN WONODRI	950.000.000	0	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI	950.000.000	0	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL	950.000.000	0	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN RANDUSARI	950.000.000	0	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN	950.000.000	10.460.000	1,10%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN	950.000.000	0	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BARUSARI	950.000.000	0	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN	950.000.000	0	0,00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	800.526.317	437.599.444	54,66%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH	83.820.040	25.269.100	30,15%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR	77.472.280	26.146.000	33,75%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WONODRI	89.825.270	43.989.775	48,97%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI	67.363.900	34.400.000	51,07%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL	78.132.800	20.584.040	26,34%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN RANDUSARI	68.174.000	3.554.000	5,21%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN	84.494.680	14.868.480	17,60%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN	97.027.830	26.432.700	27,24%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BARUSARI	73.466.380	34.805.600	47,38%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN	75.742.030	41.431.616	54,70%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.345.327.110	4.655.353.792	45,00%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	143.690.710	34.142.262	23,76%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN LAMPER TENGAH	1.087.079.960	520.207.250	47,85%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN LAMPER LOR	831.227.720	384.750.000	46,29%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN WONODRI	1.610.552.340	647.966.100	40,23%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN MUGASSARI	1.143.436.100	539.852.000	47,21%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN LAMPER KIDUL	850.367.200	384.535.350	45,22%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN RANDUSARI	1.051.726.000	413.355.000	39,30%
3	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PETERONGAN	1.039.605.320	493.650.700	47,48%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PLEBURAN	956.572.170	460.909.250	48,18%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BARUSARI	921.633.620	419.658.100	45,53%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BULUSTALAN	670.057.970	316.950.000	47,30%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	39.378.000	39.377.780	100,00%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87.930.000	19.050.000	21,66%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87.930.000	19.050.000	21,66%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	87.930.000	19.050.000	21,66%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	83.000.000	30.875.000	37,20%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	83.000.000	30.875.000	37,20%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	83.000.000	30.875.000	37,20%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.071.413.734	6.478.668.918	49,56%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.267.660	1.332.000	10,86%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.242.600		0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.004.510		0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.200.420		0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.004.510		0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.200.420		0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.281.600		0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.333.600		0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.836.564.145	6.261.040.243	52,90%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.521.679.345	6.119.520.243	53,11%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	311.040.000	141.520.000	45,50%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.281.600		0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.281.600		0,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.281.600		0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.530.029	60.041.788	13,45%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.811.900	4.529.000	38,34%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.700.000	0	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.847.150	9.871.000	23,04%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.216.210	7.343.788	22,80%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.077.600	23.100.000	30,77%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.396.000	15.198.000	20,99%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	158.481.169	0	0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.200.000	0	0,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.200.000	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.147.600	77.394.103	35,48%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.500.000	40.607.103	34,27%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.647.600	36.787.000	36,92%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.704.300	78.860.784	15,41%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	235.900.000	76.792.484	32,55%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.149.800	0	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.564.500	2.068.300	15,25%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.090.000	0	0,00%
	JUMLAH	38.821.782.141	13.287.302.916	34,23%

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah sebesar Rp 38.821.782.141,- Dari anggaran tersebut, sampai dengan bulan Juni 2023 realisasinya adalah sebesar Rp 13.287.302.916,- Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 25.534.479.225,-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan
Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					REALISASI	
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 TW II
TUJUAN RENSTRA										
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00 angka	91.00 angka	87.00 angka	88.00 angka	89.00 angka	90.00 angka	91.00 angka	89.00 angka	96.58 angka
SASARAN RENSTRA										
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	71.55 angka	82.00 angka	75.25 angka	77.70 angka	79.60 angka	80.30 angka	82.00 angka	70.36 angka	76.75 angka
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0.00 angka	5.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	50.27 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0.00 persen	30.00 persen	10.00 persen	15.00 persen	20.00 persen	25.00 persen	30.00 persen	9.00 persen	6.20 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	85.00 persen	100.00 persen	90.00 persen	92.00 persen	95.00 persen	98.00 persen	100.00 persen	90.00 persen	50 persen

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Selatan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”, telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 96,58 angka dari target sebesar 89 angka ;
- b. Sasaran 1 “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu NILAI AKIP telah sesuai dengan target dimana realisasinya 76,75 angka dari target sebesar 77,70 angka ;
- c. Sasaran 2 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan telah sesuai dengan target dimana realisasinya 1 angka dari target sebesar 1 angka ;
- d. Sasaran 3 “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan dimana pada Triwulan II realisasinya 50,27 % dari target sebesar 100 % ;
- e. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” pada Triwulan II realisasinya sebesar 6,2 persen dari target sebesar 15 persen ;
 - 2) Indikator “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” pada Triwulan II realisasinya sebesar 50 persen dari target sebesar 100 persen.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Selatan sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa indikator yang masih dibawah target seperti jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak di kantor Kecamatan dan

Kelurahan. Hal ini disebabkan makin luas dan mudahnya akses untuk melakukan pembayaran PBB seperti melalui internet banking, aplikasi online (Tokopedia, OVO, dll).

- b. Indikator jumlah kegiatan Lembaga masyarakat aktif dan persentase kehadiran RT dalam Musrenbang juga masih dibawah target. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19 sehingga terjadi pembatasan kegiatan dan jumlah orang yang hadir dalam kegiatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya:

- a. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam menjaga kerapian dan kebersihan wilayahnya;
- b. Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
- c. Masih terdapat PKL yang berada di trotoar maupun badan jalan;
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
- e. Kurangnya kompetensi pegawai kecamatan maupun kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Menjaga kebersihan wilayah merupakan tantangan tersendiri. Perlu adanya sinergitas antara pemangku wilayah dan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan wilayah;
 - Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Selatan

- Perlu adanya sinergitas antara Kecamatan dengan OPD teknis terkait (Satpol PP) dalam penertiban PKL ditrotoar maupun badan jalan;
- Masih perlu peningkatkan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan

b. Peluang:

- Merupakan wilayah pusat kota. Banyak terdapat fasilitas-fasilitas wisata seperti hotel, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh. Jika kebersihan dijaga dengan baik maka dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu lebih lama di Kota Semarang;
- PKL yang ditata dengan baik berpeluang menjadi tujuan wisata kuliner baru.
- Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPP dapat meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Selatan, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Kecamatan Semarang Selatan sebagai wilayah perkotaan dengan fungsi campuran (*mix used*) perlu diperhatikan penataan dan kebersihan wilayahnya sehingga dapat menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama;
- b. Peningkatan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Peningkatan pelayanan dan derajat Kesehatan masyarakat meliputi kesiapan dalam penanganan wabah maupun penyakit menular dan tidak menular, penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan, kondisi ibu dan anak serta promosi Kesehatan.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Semarang Selatan

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				38.871.782.141	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				39.011.782.141	
07.01	KECAMATAN				38.871.782.141	KECAMATAN				39.011.782.141	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 persen	2.661.893.770	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 persen	2.671.187.770	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	57.783.550	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	60.477.550	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	57.783.550	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	60.477.550	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.653.834.720	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	1.653.834.720	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.045.734.720	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.538.850.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BULUSTALAN	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BULUSTALAN	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BARUSARI	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BARUSARI	12 Laporan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN RANDUSARI	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN RANDUSARI	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN MUGASSARI	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN MUGASSARI	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PLEBURAN	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PLEBURAN	12 Laporan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN WONODRI	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN WONODRI	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PETERONGAN	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PETERONGAN	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER LOR	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER LOR	12 Laporan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER KIDUL	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER KIDUL	12 Laporan		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER TENGAH	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN LAMPER TENGAH	12 Laporan		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang maksimal	100 persen	950.275.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang maksimal	100 persen	956.875.500	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	950.275.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	956.875.500	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 persen	22.958.250.637	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 persen	23.098.250.637	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya usulan kegiatan fisik maupun non fisik dari masyarakat melalui forum musrenbang	3 kegiatan	12.612.923.527	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya usulan kegiatan fisik maupun non fisik dari masyarakat melalui forum musrenbang	3 kegiatan	12.752.923.527	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	97.350.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	97.350.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER TENGAH	16 Unit	10.869.528.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER TENGAH	16 Unit	10.869.528.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BULUSTALAN	10 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BULUSTALAN	10 Unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BARUSARI	13 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN BARUSARI	13 Unit		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN RANDUSARI	14 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN RANDUSARI	14 Unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN MUGASSARI	12 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN MUGASSARI	12 Unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN PLEBURAN	10 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN PLEBURAN	10 Unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN WONODRI	11 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN WONODRI	11 Unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN PETERONGAN	11 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN PETERONGAN	11 Unit		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER LOR	12 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER LOR	12 Unit		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER KIDUL	11 Unit				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KELURAHAN LAMPER KIDUL	11 Unit		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	1.646.045.527	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	1.786.045.527	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN	8 Pokmas / Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BULUSTALAN	8 Pokmas / Ormas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BARUSARI	8 Pokmas / Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BARUSARI	8 Pokmas / Ormas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan RANDUSARI	8 Pokmas / Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan RANDUSARI	8 Pokmas / Ormas		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI	8 Pokmas / Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN MUGASSARI	8 Pokmas / Ormas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN	8 Pokmas / Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PLEBURAN	8 Pokmas / Ormas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WONODRI	8 Pokmas / Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN WONODRI	8 Pokmas / Ormas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN	8 Pokmas / Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PETERONGAN	8 Pokmas / Ormas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR	8 Pokmas / Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER LOR	8 Pokmas / Ormas		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL	8 Pokmas / Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER KIDUL	8 Pokmas / Ormas		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH	8 Pokmas / Ormas				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN LAMPER TENGAH	8 Pokmas / Ormas		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya kegiatan kelembagaan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penuntasan kemiskinan	8 dokumen	10.345.327.110	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya kegiatan kelembagaan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penuntasan kemiskinan	8 dokumen	10.345.327.110	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.305.949.110	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	10.345.327.110	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN BULUSTALAN	9 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN BULUSTALAN	9 Lembaga Kemasyarakatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN BARUSARI	9 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN BARUSARI	9 Lembaga Kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN RANDUSARI	9 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN RANDUSARI	9 Lembaga Kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN MUGASSARI	9 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN MUGASSARI	9 Lembaga Kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN PLEBURAN	9 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN PLEBURAN	9 Lembaga Kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN WONODRI	9 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN WONODRI	9 Lembaga Kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN PETERONGAN	9 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN PETERONGAN	9 Lembaga Kemasyarakatan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER LOR	9 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER LOR	9 Lembaga Kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER KIDUL	9 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER KIDUL	9 Lembaga Kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER TENGAH	9 Lembaga Kemasyarakatan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KELURAHAN LAMPER TENGAH	9 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	39.378.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	39.378.000	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 persen	87.930.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 persen	87.930.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan aman serta menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban	52 angka	87.930.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan aman serta menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban	52 angka	87.930.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	87.930.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	87.930.000	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 persen	83.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 persen	83.000.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui forum masyarakat	3 kegiatan	83.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui forum masyarakat	3 kegiatan	83.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	60 Orang	83.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	60 Orang	83.000.000	
	NON URUSAN	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				NON URUSAN	KECAMATAN SEMARANG SELATAN				
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	38.871.782.141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	13.071.413.734	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya laporan kinerja OPD	6 dokumen	12.267.660	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya laporan kinerja OPD	6 dokumen	12.267.660	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.242.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.242.600	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	2.004.510	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	2.004.510	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen RKA SKPD					Dokumen RKA SKPD			
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.200.420	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.200.420	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.004.510	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2.004.510	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.200.420	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.200.420	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Dokumen	1.281.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Dokumen	1.281.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Realisasi Kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.333.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.333.600	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya Pemenuhan Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan OPD	100 persen	11.836.564.145	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya Pemenuhan Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan OPD	100 persen	11.836.564.145	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	11.521.679.345	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	11.521.679.345	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	311.040.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	311.040.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.281.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.281.600	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.281.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.281.600	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.281.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.281.600	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya kebutuhan logistik kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan	100 persen	474.324.029	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Terwujudnya kebutuhan logistik kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan	100 persen	446.530.029	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.811.900	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.811.900	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.512.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.700.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN AN	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Paket	42.847.150	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN AN	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 Paket	42.847.150	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SEMARANG SELATAN	Kantor yang Disediakan				SEMARANG SELATAN	Kantor yang Disediakan			
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.216.210	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.216.210	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	67.877.600	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.077.600	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60.412.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	72.396.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	195.646.769	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	72.396.000	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		46.200.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		46.200.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	46.200.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	46.200.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Tersedianya kebutuhan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		199.647.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Tersedianya kebutuhan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan		218.147.600	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	118.500.000	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	99.647.600	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	99.647.600	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Cakupan Aset yang di pelihara oleh OPD	100 persen	511.704.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Cakupan Aset yang di pelihara oleh OPD	100 persen	511.704.300	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	235.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	235.900.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	88.149.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	88.149.800	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.564.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.564.500	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	174.090.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	174.090.000	
JUMLAH					38.871.782.141					39.011.782.141	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105

7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;

- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:

- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.

- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.

- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan

Teknologi Informasi”

dengan indikator tujuan “**Indeks Kepuasan Masyarakat**”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator **sasaran Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang sebagai berikut:**

- SASARAN 1 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
- Indikator : Nilai AKIP
- SASARAN 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
- Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
- SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
- Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
- SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
- Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN TUJUAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88.00
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	77.70
SASARAN: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1.00

SASARAN: Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
SASARAN: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	15.00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	92.00

Sumber : Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026,, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Selatan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Indeks Reformasi Birokrasi**” dan indikator sasaran “**Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2023

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TARGET			PAGU			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN SEMARANG SELATAN					38.419.238.041	38.937.363.041	39.011.782.141	PAD	
07.01	KECAMATAN					38.419.238.041	38.937.363.041	39.011.782.141	PAD	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 persen	92 persen	92 persen	2.543.940.100	2.700.142.700	2.671.187.770	PAD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	95.446.800	76.346.800	60.477.550	PAD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	1.538.850.000	1.666.920.400	1.653.834.720	PAD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang maksimal	100 persen	100 persen	100 persen	909.643.300	956.875.500	956.875.500	PAD	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 persen	98 persen	98 persen	23.836.928.000	24.232.128.000	23.098.250.637	PAD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya usulan kegiatan fisik maupun non fisik dari masyarakat melalui forum musrenbang	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	13.222.800.000	13.628.200.000	12.752.923.527	PAD	

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TARGET			PAGU			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya kegiatan kelembagaan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan penuntasan kemiskinan	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	10.614.128.000	10.603.928.000	10.345.327.110	PAD	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 persen	15 persen	15 persen	87.930.000	87.930.000	87.930.000	PAD	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan aman serta menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban	52 angka	52 angka	52 angka	87.930.000	87.930.000	87.930.000	PAD	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 persen	92 persen	92 persen	83.000.000	83.000.000	83.000.000	PAD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui forum masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	83.000.000	83.000.000	83.000.000	PAD	
NON URUSAN										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	11.867.439.941	11.834.162.341	13.071.413.734	PAD	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100%							

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TARGET			PAGU			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %	100%							
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya laporan kinerja OPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	18.999.200	12.267.660	12.267.660	PAD	
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pemenuhan Gaji Pegawai dan Pelaporan Keuangan OPD	100 persen	100 persen	100 persen	10.664.562.841	10.661.622.841	11.836.564.145	PAD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kebutuhan logistik kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan	100 persen	100 persen	100 persen	375.442.400	408.837.040	446.530.029	PAD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen					
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan	100 persen	100 persen	100 persen	31.500.000	10.492.000	46.200.000	PAD	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan kantor dalam mendukung kinerja pemerintahan	100 persen	100 persen	100 persen	224.280.000	229.238.500	218.147.600	PAD	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Aset yang di pelihara oleh OPD	100 persen	100 persen	100 persen	552.655.500	511.704.300	511.704.300	PAD	

BAB V PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Selatan;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang ;

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

36. KECAMATAN SEMARANG UTARA

BAB I PENDAHULUAN

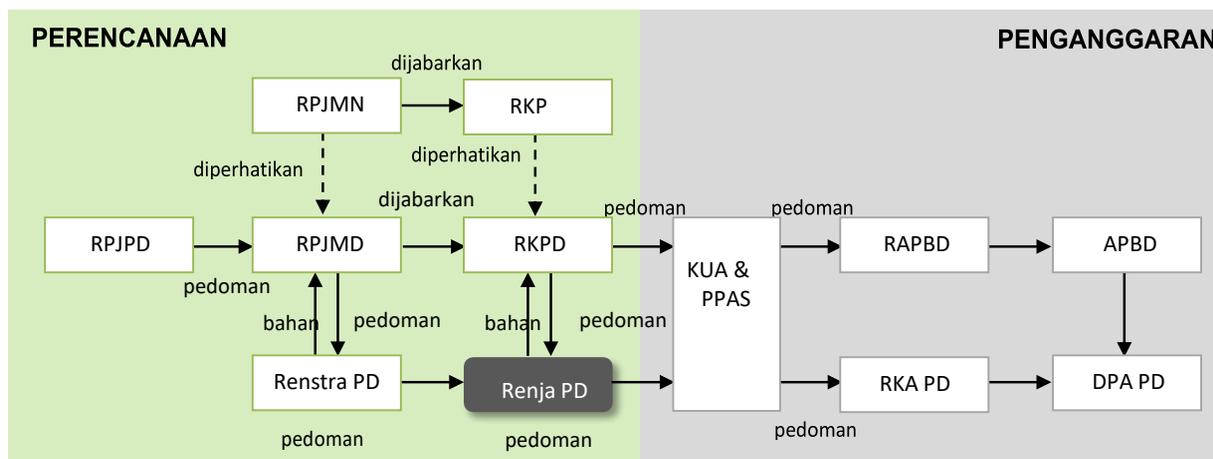
1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (30) yang menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Semarang Utara, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Utara.



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD
(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Dalam Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja memedomani Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk penyusunan Renja tahun 2023 maka yang berpedoman pada Renstra tahun 2023 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Penyusunan Renja PD juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Utara. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2021-2026. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 13);
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 78);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Perwal Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023;
- v. Keputusan Camat Semarang Utara Nomor 414.34/177/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Utara di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD.

Adapun tujuan dari Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2022 dan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Utara secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara serta solusi dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan hasil Renja Kecamatan

Semarang Utara tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

Bab ini berisi Perubahan Rencana Kerja dan rencana pendanaan Kecamatan Semarang Utara tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Semarang Utara

Kualitas Renja Kecamatan Semarang Utara yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kecamatan Semarang Utara.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun yang lalu adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

- a. Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan
Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Semarang Utara

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%		100%	63,79%	63,79%	64%	63,79%
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00		100	67,89	67,89%	67,89	67,89%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00		100	73,72	73,72%	73,72	73,72%
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100,00		100	49,76	49,76%	49,76	49,76%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00		100	80,00	80,00%	80,00	80,00%
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5,00		5	4,00	80,00%	4,00	80,00%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%		100%	50,00%	50,00%	50%	50,00%
		Rencana Kerja (Renja SKPD)	100,00	0	100	75,00	75,00%	75,00	75,00%
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang utara	100,00	0	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%		100%	100%	100,00%	100%	100,00%
		RKA SKPD	100,00	0	100	100,00	100,00%	100,00	100,00%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%		100%	0,00%	0,00%	0%	0,00%
		Perubahan RKA SKPD	100,00	0	100	0,00	0,00%	0%	0,00%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%		100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		DPA SKPD	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%		100%	100%	100,00%	100%	100,00%
		Perubahan DPA-SKPD	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	74%	73,72%	74%	73,72%
		Persentase administrasi Keuangan SKPD	100,00		100	73,72	73,72%	73,72	73,72%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	0	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	0	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Pelaporan Keuangan SKPD 100%	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		100%	80,12%	80,12%	80%	80,12%
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00	0,00	100,00	80,12	80,12%	80,12	80,12%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	0	100%	60%	60,00%	60%	60,00%
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00%	60,00	60,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%		100%	60%	60,00%	60%	60,00%
		Peralatan dan perlengkapan kantor	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00%	60,00	60,00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Logistik Kantor	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		barang cetakan dan penggandaan	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Fasilitasi kunjungan tamu	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Rapat yang terselenggara	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	73,02%	73,02%	73,02%	73,02%
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00	0,00	100,00	73,02	73,02%	73,02	73,02%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		100%	61,13%	61,13%	61,13%	61,13%
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00	0,00	100,00	61,13	61,13%	61,13	61,13%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Peralatan dan mesin lainnya	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Jumlah Gedung yang dipelihara	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%		100%	50%	50,00%	50,00%	50,00%
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00%	50,00	50,00%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%		100%	105%	104,89%	105%	105%
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95,00		92	96,50	104,89%	96,50	101,58%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%		100%	65%	65,00%	65,00%	65,00%
		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	65,00		65	22,00	33,85%	22,00	33,85%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%		100%	60%	60,00%	60,00%	60,00%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10,00	4	6	5,00	83,33%	9,00	90,00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%		100%	49,43%	49,43%	49,43%	49,43%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00		100,00	49,43	49,43%	49,43	49,43%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%		100%	55%	55,00%	55,00%	55,00%
		Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Panggung Lor	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Panggung Kidul	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Plombokan	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Dadapsari	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Purwosari	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Bandarharjo	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100,00	0,00	100	55,00	55,00%	55,00	55,00%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	53.92	53,92	53.92	53,92
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100,00	0,00	98,00	52,84	53,92%	52,84	52,84%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%		100%	34,58%	34,58%	0,35	34,58%
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7704,00		321	111	34,58%	111,00	1,44%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%		100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%		100%	45%	45,00%	45,00%	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	100,00	0,00	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	100,00	0,00	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	100,00	0,00	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	100,00	0,00	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	100,00	0,00	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	100,00	0,00	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	100,00	0,00	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	100,00	0,00	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	100,00	0,00	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel Panggung Kidul	100,00	0,00	100	45,00	45,00%	45,00	45,00%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%		100%	60%	60,00%	60,00%	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel Panggung Kidul	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		100%		100%	80,00%	80,00%	80%	80,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga masyarakat yang seharusnya	50,00	0,00	50	40,00	80,00%	40,00	80,00%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat		100%		100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga masyarakat yang dilaporkan	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga masyarakat yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pangung Kidul	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pangung Lor	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	100,00	0,00	100	50,00	50,00%	50,00	50,00%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%		100%	65%	65,00%	65%	65,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	100,00	0	100	65,00	65,00%	65,00	65,00%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%		100%	67%	66,67%	100,00%	100,00%
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,00		15	10,00	66,67%	10,00	33,33%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%		100%	75,00%	75,00%	75%	75,00%
		Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	25,00		40	30,00	75,00%	30,00	120,00%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%		100%	60%	60,00%	60%	60,00%
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	0,00	100	60,00	60,00%	60,00	60,00%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	100%	67,39%	67,39%	100,00%	100,00%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00	0,00	92	62,00	67,39%	62,00	62,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%		100%	100%	100,00%	100%	100,00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Th 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Trw II 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Trw II 2023	Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 =(5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10,00	2	4	4	100,00%	6,00	60,00%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%		100%	60%	60,00%	60%	60,00%
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00	0,00	100,00	60,00	60,00%	60,00	60,00%
Rata-rata capaian riil semua kegiatan						00.00			
Rata-rata Capaian Kinerja Program (diluar Penunjang)(%)								73.22.00	
Predikat Kinerja Program									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								71.33.00	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									

Dari data sebagaimana tabel 2.1 tersebut di atas, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022 Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut :

- a. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
 - Adanya mekanisme yang jelas dalam hal pengadaan barang dan jasa serta perencanaan anggaran kas yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan.
- b. Faktor penghambat pencapaian kinerja:
 - Masih lemahnya kapasitas SDM bidang keuangan di seluruh kelurahan
- c. Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
 - Optimalisasi koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga capaian kinerja kegiatan bisa lebih baik.
- d. Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya:
 - Penguatan kapasitas SDM bidang keuangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas workshop atau bintek keuangan untuk perangkat Kelurahan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023. Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kewilayahan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar :

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kewilayahan Tahun 2023 Triwulan II

OPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN			
KECAMATAN SEMARANG UTARA	43.448.564.260	16.552.565.760	38,10

Adapun perincian pelaksanaan program dan Sub Kegiatan pada Urusan Penunjang Kewilayahan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perincian Keuangan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pada Urusan Wajib
Kewilayahan Tahun 2023 Triwulan II

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.931.340.946	6.482.899.462	54,34
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.562.600	4.210.580	75,69
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.049.510	2.024.240	98,77
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.120.420	470.500	41,99
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.049.510	2.048.250	99,94
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.120.420	0	0
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	253.600	253.480	99,95
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.830.605.091	8.503.874.846	78,52
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	539.560.000	370.590.000	68,68
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	201.600	201.460	99,93
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.419.200	1.572.000	64,98
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	101.300	50,25
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.186.200	3.011.750	71,94
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.327.180	42.168.720	42,45
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.594.900	15.936.650	59,92
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.517.000	2.517.000	100
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.400.000	37.277.000	90,04
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.100.000	14.625.000	85,53
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	127.125.799	71,82
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.327.180	60.055.650	60,46
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.233.280	25.007.500	88,57
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.218.086	29.610.000	66,96

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.236.179.394	1.598.054.562	49,38
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.000.000	3.000.000	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.773.179.394	2.062.310.649	74,37
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	46.000.000	27.162.948	59,05
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BULU LOR)	51.000.000	42.755.742	83,83
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PURWOSARI)	46.000.000	37.485.863	81,49
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KUNINGAN)	53.000.000	39.163.375	73,89
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	58.000.000	42.708.341	73,64
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	43.000.000	34.404.582	80,01
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	55.000.000	40.056.789	72,83
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	60.000.000	37.654.215	62,76
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN DADAPSARI)	48.000.000	35.085.576	73,09
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.180.922.492	8.406.793.236	29,83

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.561.780	52.851.000	98,67
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.200.000.000	467.015.536	38,92
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	950.000.000	918.261.512	96,66
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	1.021.000.000	892.495.843	87,41
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	950.000.000	527.709.947	55,55
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	1.118.000.000	1.110.289.480	99,31
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	950.000.000	944.813.380	99,45
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	950.000.000	677.300.644	71,29
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	1.248.000.000	1.243.135.500	99,61
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	1.611.000.000	1.000.304.751	62,09
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	950.000.000	377.394.930	39,73
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	550.017.856	397.484.500	72,27
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	150.000.000	79.360.500	52,91
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BULU LOR)	150.000.000	94.498.828	63
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWOSARI)	150.000.000	35.328.000	23,55
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KUNINGAN)	150.000.000	41.362.800	27,58

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	150.000.000	55.328.380	36,89
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	150.000.000	18.684.500	12,46
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANDARHARJO)	150.000.000	33.075.000	22,05
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	150.000.000	34.630.500	23,09
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN DADAPSARI)	150.000.000	59.725.200	39,82
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	234.142.856	149.571.150	63,88
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PLOMBOKAN)	993.400.000	673.875.000	67,84
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BULU LOR)	1.607.200.000	1.153.996.420	71,8
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PURWOSARI)	1.024.600.000	721.245.000	70,39
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KUNINGAN)	1.743.400.000	1.250.465.060	71,73
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PANGGUNG LOR)	2.368.600.000	1.718.362.750	72,55
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PANGGUNG KIDUL)	705.400.000	499.450.670	70,8
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BANDARHARJO)	2.009.800.000	1.446.380.700	71,97
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN TANJUNG MAS)	2.501.800.000	1.803.350.000	72,08
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN DADAPSARI)	1.291.000.000	919.372.000	71,21
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	800.000.000	315.222.865	39,4
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.550.000	5.550.000	100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.550.000	5.550.000	100
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.571.428	59.268.500	62,67

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94.571.428	70.268.500	74,30

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Utara

Efektivitas adalah tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pencapaian sasaran diartikan sebagai tercapainya sasaran (100% atau lebih) sesuai target yang ditetapkan berdasarkan capaian kinerja sasaran. Berdasarkan laporan capaian indikator kinerja tahun 2023 menunjukkan adanya program dan kegiatan yang belum efektifitas belum terealisasi sesuai dengan rencana meski capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Renstra Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, capaian sasarannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2023 Triwulan II

Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra		Realisasi Capaian	Catatan Analisis
			2022	2023	2023	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	93	94	96,50	
1 Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;	Nilai AKIP	Angka	68	69	71,11	
2 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	
3 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan;	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	75	80	40	
4 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	10	15	22	

Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra		Realisasi Capaian	Catatan Analisis	
			2022	2023	2023		
5	Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	%	60	70	60	

Adapun hasil analisis dari data realisasi sampai dengan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, dengan rincian penjelasan untuk setiap indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator **Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah** realisasi nilai AKIP sebesar 71.11 melampaui dari target sebesar 69;
2. Indikator **Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan** mencapai realisasi 100% dari target 100%;
3. Indikator **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan** realisasinya sebesar 40% dari target sebesar 80%;
4. Indikator **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik** realisasi inovasi sebanyak 22 inovasi dari target 15;
5. Indikator **Meningkatan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan** realisasinya sebesar 60% dari target sebesar 70% (capaian sebesar 85%);

Disamping hal-hal di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara dalam pelaksanaan fungsinya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
2	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	1 dokumen	-	-

Dalam pelaksanaan fungsi Kecamatan Semarang Utara di bidang perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah,

dimana dalam kurun waktu tahun 2010-2015 menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, sedangkan pada tahun 2022 menggunakan dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2022-2027.

Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun ke-n+1 serta Perubahan Renja Tahun ke-n dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Setiap 5 tahunan sebanyak 1 dokumen. Selanjutnya kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara di bidang perencanaan juga dapat dilihat dari upaya mengakomodir usulan Musrenbang dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini dokumen Renja, sebagai bentuk penerapan perencanaan partisipatif, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Presentase Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam Renja
Kecamatan Semarang Utara
Tahun 2021-2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah Usulan	194 usulan	126 usulan	175 usulan
2	Usulan yang Terakomodir	180 usulan	116 usulan	130 usulan
3	Persentase Usulan yang Terakomodir	65%	64%	74%

Data di atas menunjukkan bahwa persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2023 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2022) sebesar 74 % telah mengalami penurunan bila dibandingkan dengan RKPD Tahun 2022 (pelaksanaan Musrenbang Tahun 2021) sebesar 64%, sedangkan pada RKPD Tahun 2021 usulan Musrenbang yang terakomodir sebesar 65%.

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Kecamatan Genuk yang terkait langsung dengan fungsinya di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, dimana hal ini berkaitan dengan kedudukan Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Pelayanan
Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi	%	96,50
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	69,71
3	Nilai AKIP	%	71,11

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi
4	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	74,30
5	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	%	74,10
6	Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	%	75
7	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	%	85
8	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	2
9	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	72
10	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	20
11	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Angka	74
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	96,50

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Utara sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Utara terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Utara sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah nilai AKIP yang melampaui target, Persentase pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teknologi informasi, Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Indeks Kepuasan Masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan memenuhi target yang telah ditetapkan.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Meskipun Tingkat Partisipasi Masyarakat, Presentase kehadiran RT dalam Musrenbang dan Presentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam Musrenbang turun namun patut diapresiasi bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat. Kecamatan Semarang Utara mampu memberikan pelayanan yang cukup memuaskan kepada masyarakat.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Utara, maupun isu- isu yang bersifat eksternal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Keberadaan sumber daya Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang :

a. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia Kecamatan Semarang Utara

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan

masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

b. Keterbatasan Anggaran

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran kurang memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Masih banyak kelurahan yang kekurangan sarana dan prasarana pelayanan, sementara anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan dedicated seperti pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang, transport RT/RW, transport PKK RT/RW, PKK, LPMK, Karang Taruna, FKK dan Posyandu. Padahal sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan juga tidak kalah penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur masing – masing Seksi

SOP adalah rangkaian urutan langkah kerja yang dilakukan menurut keterkaitan pekerjaan, yaitu dimana saja pekerjaan itu dilakukan, apa saja yang terjalin dalam pekerjaan, bagaimana cara melakukan sebuah pekerjaan dan siapakah yang melakukan pekerjaan. Selain untuk memperlancar pekerjaan juga sebagai pedoman untuk setiap pekerja baru atau awam sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga untuk mengajarkan.

Keberadaan SOP di Kecamatan Semarang Utara yang sudah berjalan adalah SOP pada Seksi Pelayanan Publik yaitu SOP pengurusan surat-surat kependudukan, sedangkan pada Seksi – seksi yang lain belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Utara, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi

secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Utara tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Utara agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan

Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
- 4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
KECAMATAN SEMARANG UTARA			42.868.026.091			42.710.841.869
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	3.066.793.880	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	3.243.093.735
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			3.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3.000.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.063.793.880	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.240.093.735
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			3.063.793.880	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3.240.093.735
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.603.793.880		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	55.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	51.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Dadapsari	48.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Dadapsari	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	53.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pangg Kidul	43.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan PangguKidul	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	58.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	46.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Purwosari	46.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Purwosari	
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	60.000.000		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	27.873.761.780	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	26.942.631.547
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.873.761.780	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	26.942.631.547

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			53.561.780	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		53.561.780
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.561.780		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.561.780
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.948.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		10.902.740.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.200.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.200.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	1.248.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	1.208.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.021.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.021.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	950.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.118.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.118.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	950.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	950.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	1.611.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	1.611.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.650.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.190.744.003

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pangg Kidul	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	150.000.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor			Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	150.000.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	150.000.000		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	150.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.222.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	14.795.585.764
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			14.422.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		13.911.147.764
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	177.000.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	177.000.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	2.009.800.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	2.009.800.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	1.607.200.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	1.607.200.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	1.291.000.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	1.291.000.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	1.743.400.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	1.743.400.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pangg Kidul	705.400.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Pangg Kidul	705.400.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Lor	2.368.600.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Lor	2.368.600.000
		Jumlah Kegiatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	993.400.000		Jumlah Kegiatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	993.400.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	1.024.600.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	1.024.600.000
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	2.501.800.000		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			800.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		804.438.000
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	800.000.000		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	804.438.000

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.550.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.550.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	5.550.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	20.550.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			5.550.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		20.550.000
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.550.000		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.550.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	69.750.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan,	94.571.428

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
	keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya	Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			69.750.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		94.571.428
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	94.571.428
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	11.852.170.431	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	12.409.995.159
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana			Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12.156.060	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12.156.060
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.562.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.562.600
		Rencana Kerja (Renja SKPD)	5.562.600		Rencana Kerja (Renja SKPD)	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.049.510	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.049.510

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
		DPA SKPD	2.049.510		DPA SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.120.420	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.120.420
		Perubahan RKA SKPD	1.120.420		Perubahan RKA SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.049.510	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.049.510
		DPA SKPD	2.049.510		DPA SKPD	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.120.420	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1.120.420
		Perubahan RKA SKPD	1.120.420		Perubahan RKA SKPD	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			253.600			253.600
		Evaluasi Kinerja	253.600			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase administrasi Keuangan SKPD	11.372.987.491	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	11.372.987.491
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.830.605.091	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		11.202.470.984
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	10.830.605.091		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	11.202.470.984
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			539.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		539.560.000
		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	539.560.000		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	539.560.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			201.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		201.600
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	201.600		Laporan Keuangan Akhir Tahun	201.600

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.419.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		2.419.200
		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2.419.200		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2.419.200
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			201.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		201.600
		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	162.808.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	284.560.079
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.186.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		53.182.920
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	4.186.200		Komponen instalasi listrik yang tersedia	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			82.758.880	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		134.976.939
		Peralatan dan perlengkapan kantor	82.758.880		Peralatan dan perlengkapan kantor	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.846.770	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		26.594.900
		Logistik Kantor	14.846.770		Logistik Kantor	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.517.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.695.150
		barang cetakan dan penggandaan	2.517.000		barang cetakan dan penggandaan	
Fasilitasi Kunjungan Tamu			41.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		44.325.000
		Fasilitasi kunjungan tamu	41.400.000		Fasilitasi kunjungan tamu	

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17.100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20.785.170
		Rapat yang terselenggara	17.100.000		Rapat yang terselenggara	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	177.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	180.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			177.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		180.000.000
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	127.218.030	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	188.425.636
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			99.327.180	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		99.327.180
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.327.180		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		43.085.800
		Peralatan dan mesin lainnya	20.000.000		Peralatan dan mesin lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.890.850	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		46.012.656
		Jumlah Gedung yang dipelihara	7.890.850		Jumlah Gedung yang dipelihara	

Rencana Kerja Perangkat Daerah				Hasil Analisis Kebutuhan		
SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	0		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Kecamatan Semarang Utara diperoleh melalui usulan yang disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap awal tahun dengan keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, semua usulan dari kelurahan nantinya akan dibuat skala prioritas pembangunan oleh kecamatan dan ada beberapa usulan yang juga diarahkan kepada Dinas Teknis untuk pelaksanaan realisasinya.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kota Semarang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

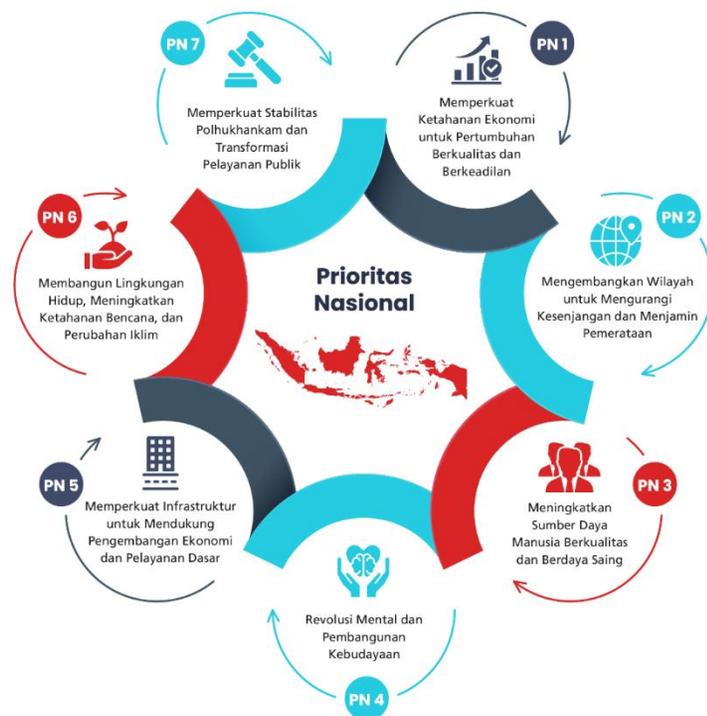
Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Kecamatan Semarang Utara pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang adalah nihil.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG UTARA

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Program Nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
 - PP 1 Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)
 - PP 2 Peningkatan kuantitas / ketahanan air untuk mendukung
 - PP 3 Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
 - PP 4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
 - PP 5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
 - PP 6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi
 - PP 7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

- PP 8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
 - PP 2 Pengembangan Wilayah Jawa Bali
 - 1) Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa -Bali (%/tahun) dengan target 2023 sebesar 5,3-5,8
 - 2) IPM Provisi di Wilayah Jawa-Bali (Nilai Min-Maks) dengan target 2023 74,05-82,43
 - 3) Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa dan Bali (%) dengan target 2023 sebesar 69-76
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
 - PP1 Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
 - PP2 Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
 - PP3 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
 - PP4 Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
 - PP5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
 - PP6 Penguatan Kemiskinan
 - PP7 Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
 - PP1 Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan membentuk Mentalitas Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter
 - PP2 Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
 - PP3 Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Hasmoni Sosial
 - PP4 Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter
- 5. Memperkuat Infrastruktur dan Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
 - PP 2 Infrastruktur ekonomi
 - PP 3 Infrastruktur Perkotaan
 - PP 4 Energi dan Ketenagalistrikan
 - PP 5 Transformasi Digital
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim
 - PP 1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

- PP 2 Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
- PP 3 Pembangunan Rendah Karbon
- 7. Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - PP 1 Konsolidasi Demokrasi
 - PP 2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
 - PP 3 Penegakan Hukum Nasional
 - PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
 - PP 5 Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Terkait prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut di atas, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Adapun target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2023 antara lain meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut RPJMN sebesar 74,77% atau sasaran Ekonomi Makro 73,31-73,49%;
- b. Tingkat Kemiskinan menurut RPJMDN 7-7,5 atau Sararan Ekonomi makro 7,5-8;
- c. Pertumbuhan PDB menurut RPJMN 5,7-6 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3 - 5,69%;
- d. Gini Rasio menurut RPJMN sebesar 0,374-0,377 atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 0,375- 0,378;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut RPJMD sebesar 4-4,6 % atau Sasaran Ekonomi Makro sebesar 5,3-6;

Bila disandingkan dengan kondisi di Kota Semarang, sampai dengan Triwulan II 2019 sebagian besar target nasional tersebut telah terlampaui. Seperti Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,72 dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,52 %. Demikian pula untuk Tingkat Kemiskinan sebesar 4,14 % dan Indeks Gini Rasio sebesar 0,33 menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan target nasional. Hanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,29 % yang belum mencapai target nasional. Namun diharapkan TPT Kota Semarang akan menunjukkan kondisi yang membaik pada akhir 2019.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2020 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2020 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**, dimana pembangunan

Jawa Tengah tahun 2020 diarahkan pada “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia**” dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

P1 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; dengan fokus pada:

Kemiskinan : *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan TKPKD dengan Satgas Kemiskinan

Pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

P2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia; dengan fokus pada:

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

P3 Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan; dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan;
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup;
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan serta konektivitas antar daerah dan wilayah;
- i. Peningkatan kualitas air, udara serta tutupan lahan;
- j. Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

P4 Pemantapan tata kelola pemerintahan, kondusivitas wilayah dan perbaikan kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:

- a. *Direct services* (pelayanan publik langsung kepada masyarakat);
- b. Digitalisasi tata kelola pemerintahan;

- c. Manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- d. Manajemen ASN dan efisiensi kelembagaan;
- e. Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaran kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA;
- f. Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kecamatan Semarang Utara juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Semarang agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut di atas.

Keseimbangan pelaksanaan antara tugas pemerintahan daerah yang tercermin dalam asas desentralisasi dan tugas pemerintahan umum baik yang bersifat atributif maupun kewenangan yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Gubernur memiliki dua peran kunci yang sangat strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom provinsi, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, Gubernur perlu lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi yang baik pada tingkat provinsi hingga kabupaten / kota dalam hal penyelenggaraan pemerintahan karena fungsinya selaku koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi.

Ukuran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Semarang.

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023, maka dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Semarang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	83,60-84,00
2	Tingkat Kearifan Budaya Lokal	%	55,17

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,3 - 8,6
4	Angka Kemiskinan	%	4,04-4,24
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6-6,1
6	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rp)	103,54
7	Persentase peningkatan Nilai Investasi	% (Juta Rp)	7 (25.684.059)
8	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	6
9	Indeks Demokrasi	indeks	72,4
10	Indeks Pembangunan Gender	indeks	95,70
11	Persentase penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	%	10,52
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,01
13	Indeks Kinerja Sistem Infrastruktur	indeks	84,5
14	Persentase kawasan banjir dan rob terhadap luas wilayah keseluruhan	%	3,32
15	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74,00
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88
17	Opini BPK	Predikat	WTP

Terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kemendagri telah mengeluarkan kebijakan penerapan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan). Program ini merupakan terobosan, sebagai cara untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem satu pintu pada tingkat kecamatan untuk mendorong kecepatan, transparansi dan keterukuran dengan menyediakan fasilitas ruang pelayanan yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara

Tujuan Strategis

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
2. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di

Kecamatan dan Kelurahan;

4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;
5. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

Program dan Kegiatan

Program, kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara pada tahun 2023 berbeda nomenklatur dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan nomenklatur tersebut dikarenakan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun pemetaan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pemetaan Nomenklatur Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Sesuai Dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
7.01.0.0.0200	KECAMATAN SEMARANG UTARA	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Dadapsari
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandarharjo
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD)
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %
		Pelaporan Keuangan SKPD 100%
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat yang terselenggara
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara

Demikian pula untuk target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 juga mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Target 2023
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	94.00
SASARAN: Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	69.00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	80.00
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	15.00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	70

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 beserta prakiraan maju tahun 2024 Kecamatan Semarang Utara sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Rancangan Program / Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
KECAMATAN SEMARANG UTARA			42.868.026.091	41.074.052.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	3.066.793.880	3.542.446.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	3.000.000	15.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.000.000	15.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3.063.793.880	3.527.446.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.063.793.880	3.527.446.000	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2.603.793.880	2.760.021.513	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bandharharjo	55.000.000	58.300.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	51.000.000	54.060.000	KELURAHAN BULU LOR

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Dadapsari	48.000.000	50.880.000	KELURAHAN DADAPSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Kuningan	53.000.000	56.180.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Kidul	43.000.000	45.580.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Panggung Lor	58.000.000	61.480.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	46.000.000	48.760.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Purwosari	46.000.000	48.760.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Tanjungmas	60.000.000	63.600.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	27.873.761.780	25.982.770.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.651.561.780	25.773.495.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.561.780	70.000.000	
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.561.780	56.775.487	KECAMATAN SEMARANG UTARA

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			10.948.000.000	11.856.200.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1.200.000.000	1.272.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandharharjo	1.248.000.000	1.322.880.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	1.021.000.000	1.082.260.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	950.000.000	1.007.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	1.118.000.000	1.185.080.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	950.000.000	1.007.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	950.000.000	1.007.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	950.000.000	1.007.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	950.000.000	1.007.000.000	KELURAHAN PURWOSARI

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	1.611.000.000	1.707.660.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1.650.000.000	14.847.295.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300.000.000	318.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bandarharjo	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Kidul	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Panggung Lor	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjungmas	150.000.000	159.000.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.222.200.000	209.275.000	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			14.422.200.000	160.000.000	
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	177.000.000	187.620.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bandarharjo	2.009.800.000	2.130.388.000	KELURAHAN BANDARHARJO
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	1.607.200.000	1.703.632.000	KELURAHAN BULU LOR
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	1.291.000.000	1.368.460.000	KELURAHAN DADAPSARI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	1.743.400.000	1.848.004.000	KELURAHAN KUNINGAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Kidul	705.400.000	747.724.000	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Panggung Lor	2.368.600.000	2.510.716.000	KELURAHAN PANGGUNG LOR
		Jumlah Kegiatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	993.400.000	1.053.004.000	KELURAHAN PLOMBOKAN
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	1.024.600.000	1.086.076.000	KELURAHAN PURWOSARI
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tanjungmas	2.501.800.000	2.651.908.000	KELURAHAN TANJUNGMAS
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			800.000.000	49.275.000	
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	800.000.000	49.275.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.550.000	200.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	5.550.000	200.000.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.550.000	200.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000	54.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Peningkatan upaya perlindungan sosial	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	69.750.000	54.500.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	69.750.000	54.500.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	11.852.170.431	11.294.336.000	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD			
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	12.156.060	14.499.358	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5.562.600	5.896.356	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Rencana Kerja (Renja SKPD)	5.562.600	5.896.356	Dokumen Renja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.049.510	2.172.481	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		RKA SKPD	2.049.510	2.172.481	Dokumen RKA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.120.420	1.187.645	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Perubahan RKA SKPD	1.120.420	1.187.645	Perubahan RKA
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.049.510	2.172.481	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		DPA SKPD	2.049.510	2.172.481	Dokumen DPA

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			1.120.420	1.187.645	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Perubahan DPA SKPD	1.120.420	1.187.645	Perubahan DPA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			253.600	253.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Evaluasi Kinerja	253.600	253.600	Dokumen Evkin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase administrasi Keuangan SKPD	11.372.987.491	11.372.987.491	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.830.605.091	10.830.605.091	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	10.830.605.091	10.830.605.091	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			539.560.000	539.560.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	539.560.000	539.560.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			201.600	201.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	201.600	201.600	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			2.419.200	2.419.200	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	2.419.200	2.419.200	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			201.600	201.600	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	201.600	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	162.808.850	162.808.850	

SKPD / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.186.200	4.186.200	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Komponen instalasi listrik yang tersedia	4.186.200	4.186.200	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			82.758.880	82.758.880	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Peralatan dan perlengkapan kantor	82.758.880	82.758.880	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.846.770	14.846.770	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Logistik Kantor	14.846.770	14.846.770	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			2.517.000	2.517.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		barang cetakan dan penggandaan	2.517.000	2.517.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu			41.400.000	41.400.000	
		Fasilitasi kunjungan tamu	41.400.000	41.400.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17.100.000	17.100.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Rapat yang terselenggara	17.100.000	17.100.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	177.000.000	177.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			177.000.000	177.000.000	
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	177.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	127.218.030	233.100.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA

SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Pagu Tahun 2023	Perkiraan Tahun 2024	Unit Pelaksana
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			99.327.180	81.600.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.327.180	81.600.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000	45.000.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Peralatan dan mesin lainnya	20.000.000	45.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.890.850	67.500.000	KECAMATAN SEMARANG UTARA
		Jumlah Gedung yang dipelihara	7.890.850	67.500.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	39.000.000	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	0	39.000.000	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021- 2026. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas, dijabarkan dalam rumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program/kegiatan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Utara bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (11 indikator) dan indikator sasaran (30 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Semarang Utara memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP / Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 4 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 1 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 11 kegiatan, yang terdiri dari 10 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah/eks rutin), dan 1 kegiatan pelaksanaan/pembangunan. Adapun kegiatan yang menjadi prioritas:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menggerakkan roda perekonomian dengan memfasilitasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Forum Kesehatan Kelurahan, Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, Pemberdayaan Masyarakat Lanjut Usia dan Pemberdayaan Ekonomi (Koperasi dan Usaha Mikro) di seluruh Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara;
 - b. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dalam proses pembangunan tugas dari lembaga kemasyarakatan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam hal Sumber Daya Manusia, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, fasilitasi lembaga kemasyarakatan tersebut meliputi, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPMK;
 - c. Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Semarang pada setiap hari Sabtu di Minggu pertama di gelar pelayanan akhir pekan dan malam hari untuk memfasilitasi masyarakat yang terkendala dalam akses pelayanan pada hari kerja;
 - d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang bertujuan untuk mendorong peran dan partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan bersama pemerintah, membahas dan menyepakati daftar skala prioritas pembangunan di Kecamatan dari hasil musrenbangkel dan prioritas Kecamatan.
 - e. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dalam rangka peningkatan keterlibatan forkompimcam serta untuk meningkatkan koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Kecamatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 42.710.841.869,00 yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
- a. Rp 14.994.264.311,00 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp 27.873.761.780,00 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program, kegiatan dan indikator kinerja serta sumber pendanaan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

KODE	URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
7.01.0.00.02.0000	KECAMATAN SEMARANG UTARA					42.868.026.091	43.386.151.091	42.710.841.869
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	3.066.793.880	3.236.179.394	3.243.093.735
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	65 Kegiatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	3.063.793.880	3.233.179.394	3.240.093.735
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	3.063.793.880	3.233.179.394	3.240.093.735
		Persentase Operasional Pelayanan dan						

KODE	URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan						
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN						
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plombokan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulu Lor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwosari	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kuningan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Panggung Lor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Panggung Kidul	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kel Bandarharjo	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			

KODE	URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kel. Tanjungmas	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kelurahan Dadapsari	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98 Persen	98 Persen	98 Persen	27.873.761.780	28.180.922.492	26.942.631.547
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	321 Kegiatan	321 Kegiatan	321 Kegiatan	12.651.561.780	12.901.579.636	12.147.045.783
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	53.561.780	53.561.780	53.561.780
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	10.948.000.000	10.948.000.000	10.902.740.000
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	16 Unit	16 Unit	16 Unit			

KODE	URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	8 Unit	8 Unit	8 Unit			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	15 Unit	15 Unit	15 Unit			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	14 Unit	14 Unit	14 Unit			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelur Panggung Lor	11 Unit	11 Unit	11 Unit			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel Panggung Kidul	11 Unit	11 Unit	11 Unit			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	15 Unit	15 Unit	15 Unit			

KODE	URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		Kelurahan Bandarharjo						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel Tanjungmas	14 Unit	14 Unit	14 Unit			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	15 Unit	15 Unit	15 Unit			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.650.000.000	1.900.017.856	1.190.744.003
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plombokan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bulu Lor	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas			

KODE	URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kuningan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelu Panggung Lor	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel Panggung Kidul	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kel Bandarharjo	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas			

KODE	URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		Pembangunan di Kel Tanjungmas						
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dadapsari	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	15.222.200.000	15.279.342.856	14.795.585.764
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	-	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	14.422.200.000	14.479.342.856	13.991.147.764
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Plombokan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan			
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bulu Lor	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan			
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwosari	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan			
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kuningan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan			
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan			

KODE	URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		dilaporkan di Kel Pangung Lor						
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kel Pangung Kidul	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan			
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kel Bandarharjo	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan			
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kel Tanjungmas	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan			
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Dadapsari	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan			
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	800.000.000	800.000.000	804.438.000
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	15 Persen	15 Persen	5.550.000	5.550.000	20.550.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	40 kegiatan	40 kegiatan	40 kegiatan	5.550.000	5.550.000	20.550.000

KODE	URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.550.000	5.550.000	20.550.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	92 Persen	92 Persen	69.750.000	94.571.428	94.571.428
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10 Angka	10 Angka	10 Angka	69.750.000	94.571.428	94.571.428
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	480 Orang	480 Orang	480 Orang	69.750.000	94.571.428	94.571.428
07.01	NON URUSAN					11.852.170.431	11.868.927.777	12.409.995.159
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	11.852.170.431	11.868.927.777	12.409.995.159

KODE	URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%			
		Persentase tercapainya kegiatan sarana dan prasarana	100,00%	100,00%	100,00%			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	12.156.060	12.156.060	12.156.060
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rencana Kerja (Renja SKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.562.600	5.562.600	5.562.600
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang utara						
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.049.510	2.049.510	2.049.510
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.120.420	1.120.420	1.120.420
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.049.510	2.049.510	2.049.510
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.120.420	1.120.420	1.120.420
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	253.600	253.600	253.600
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	11.372.987.491	11.372.987.491	11.744.853.384

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 100%	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	10.830.605.091	10.830.605.091	11.202.470.984
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Honor Pengelolaan Keuangan SKPD 100 %	63 Dokumen	63 Dokumen	63 Dokumen	539.560.000	539.560.000	539.560.000
		Pelaporan Keuangan SKPD 100%						
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	201.600	201.600
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.419.200	2.419.200	2.419.200
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	201.600	201.600	201.600
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	162.808.850	135.005.680	284.560.079
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	17 Paket	17 Paket	17 Paket	4.186.200	4.186.200	53.182.920
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	13 Paket	13 Paket	16 Paket	82.758.880	43.207.580	134.976.939
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik Kantor	48 Paket	48 Paket	48 Paket	14.846.770	26.594.900	26.594.900
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	2.517.000	2.517.000	4.695.150

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	41.400.000	41.400.000	44.325.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat yang terselenggara	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	17.100.000	17.100.000	20.785.170
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	177.000.000	177.000.000	180.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	177.000.000	177.000.000	180.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	127.218.030	171.778.546	188.425.636
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	10 Unit	99.327.180	99.327.180	99.327.180
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	20.000.000	28.233.280	43.085.800
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	26 Unit	26 Unit	26 Unit	7.890.850	44.218.086	46.012.656
JUMLAH						42.868.026.091	43.386.151.091	42.710.841.869

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Semarang Utara pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016-2021, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Utara;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara ini juga berpedoman pada Perubahan RKPd Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 ini akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2023 pada triwulan empat Tahun 2023.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

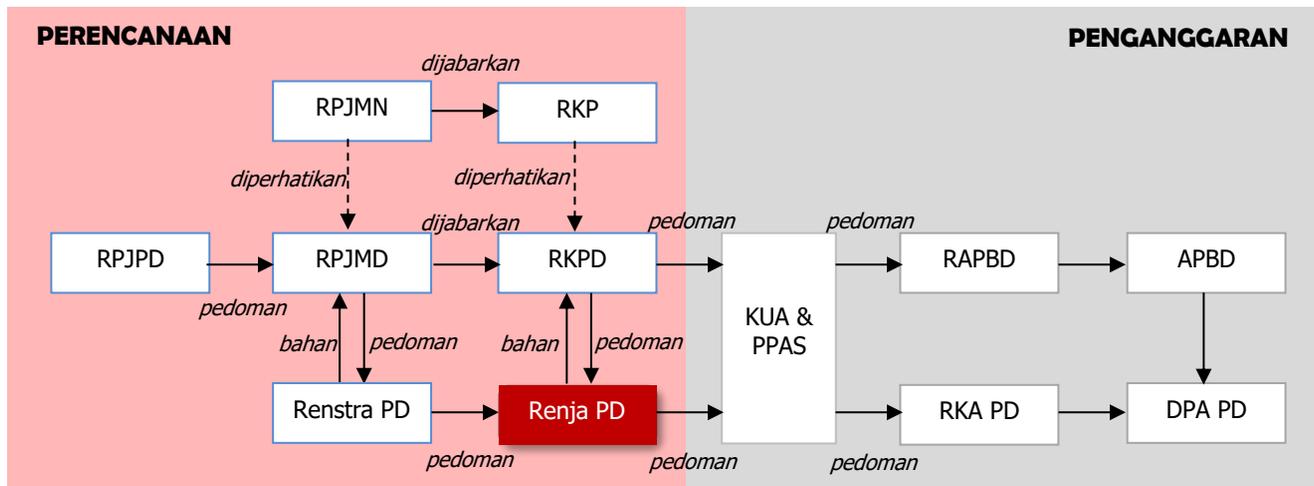
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Kecamatan Semarang Barat **Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja** Kecamatan Semarang Barat **Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

- Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 - r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50%
		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%	92%	92%	46%	50,00%	46%	48%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	50%	50,00%	100%	100%
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2,00	00.00	2,00	0,00	2%	2%	1%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	0%	0,00%	0,00	0%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	25%	25,00%	50%	50%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	25%	100,00%	50%	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	0%	0,00%	0,00	0%
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngemplak Simongan	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Manyaran	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakharjo	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalibanteng Kulon	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Krpyak	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalibanteng Kidul	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bojongsalaman	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bongsari	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Salamanmloyo	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cabean	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangayu	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembangarum	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawangmas	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tawangsari	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Krobokan	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
		Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gisikdrono	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,00	0%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	100%	25%	25%	50%	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	25%	100%	50%	50%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	25%	25%	51%	50%
		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	100%	25%	100%	50%	50%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	25%	25%	50%	50%
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100%	25%	100%	50%	50%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	0%	0,00%	0,00	0%
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	100%	100%	0%	0,00%	0,00	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Ngemplak Simongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Manyaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krapyak	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tambakharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kulon	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kalibanteng Kidul	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Gisikdrono	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bongsari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Salamanmloyo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Cabean	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Karangayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawang Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Krobokan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Tawangmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Kembangarum	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah di Kelurahan Bojongsalaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	100%	100%	0%	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manyaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krapyak	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngemplak Simongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gisikdrono	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kulon							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bongsari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bojongsalaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Salamanmloyo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cabean	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Krobokan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawangmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tawang Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembangarum	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	18%	18%	48%	48%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17,00	0,00	17.00 Dokumen	0,00	0%	8,00	47%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	0%	0%	0.00%	0%
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Ngemplak Simongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Manyaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Krapyak	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Tambakharjo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Kalibanteng Kulon	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Kalibanteng Kidul	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Gisikdrono	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bongsari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bojongsalaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Salamanmloyo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Cabean	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Karangayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Krobokan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Tawang Sari	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Tawangmas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Kembangarum	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100%	100%	0%	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	100%	100%	20%	20%	40%	40%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	30%	15%	0%	0%	6,00	20%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100%	100%	25%	25%	50,00	50%
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	15,00	00.00	20	0%	0%	10,00	67%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	0%	0%	0,00	0%
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	100%	100%	25%	25%	50%	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	92%	0,00	0%	46%	46%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	100%	20%	0%	60%	60%
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5,00	0%	5,00	0%	0%	3,00	60%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	25%	25%	50%	50%
		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	25%	100%	50%	50%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	25%	100%	50%	50%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	25%	100%	50%	50%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	70%	70%	50%	50%
		Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5,00	0%	5.00 Dokumen	0%	0%	3,00	60%
		Dokumen pelaporan	2,00	0%	2.00 Dokumen	0%	0%	3,00	150%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Semarang Barat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Dokumen RKA SKPD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Dokumen Perubahan RKA SKPD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Dokumen DPA SKPD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	25%	25%	50%	50%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	0%	0%	4	0%	0%	2	0%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Laporan akir tahun	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	25%	25%	50%	50%
		Waktu pelaksanaan administrasi umum	0%	0%	12	0%	0%	6	0%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	00.00	00.00	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah tamu yang berkunjung	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	40%	40%	65%	65%
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	65%	65%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Peralatan dan mesin lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Perlengkapan Kantor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	25%	25%	50%	50%
		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	25%	100%	50%	50%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/4)
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	25%	25%	50%	50%
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	25%	100%	50%	50%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	0%	0%	50%	50%
		Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Rehabilitasi Gedung	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2023

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.198.056.398	1.979.305.731	47,15%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.850.778.023	1.406.453.543	49,34%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.850.778.023	1.406.453.543	49,34%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.328.253.452	567.462.188	42,72%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	288.253.452	109.193.095	37,88%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Ngemplak Simongan	65.000.000	20.215.595	31,10%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Manyaran	65.000.000	30.004.134	46,16%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Krapyak	65.000.000	25.757.130	39,63%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tambakharjo	65.000.000	34.630.320	53,28%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kalibanteng Kulon	65.000.000	20.293.503	31,22%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kalibanteng Kidul	65.000.000	40.896.470	62,92%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Gisikdrono	65.000.000	31.133.807	47,90%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bongsari	65.000.000	21.770.045	33,49%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bojongsalaman	65.000.000	37.232.198	57,28%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Salamanmloyo	65.000.000	25.729.257	39,58%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Cabean	65.000.000	31.711.367	48,79%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Karangayu	65.000.000	24.022.946	36,96%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Krobokan	65.000.000	23.502.230	36,16%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tawangsari	65.000.000	38.865.430	59,79%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tawangmas	65.000.000	16.718.962	25,72%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kembangarum	65.000.000	35.785.699	55,05%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.024.923	5.390.000	28,33%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	19.024.923	5.390.000	28,33%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.242.244.710	22.785.342.275	56,62%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.629.959.138	13.756.076.385	66,68%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76.280.480	70.151.875	91,97%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.275.000.000	1.166.301.000	91,47%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngemplak Simongan	950.000.000	506.836.000	53,35%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manyaran	1.029.000.000	608.867.000	59,17%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Krapyak	950.000.000	820.902.000	86,41%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambakharjo	950.000.000	575.300.000	60,56%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalibanteng Kulon	950.000.000	930.560.000	97,95%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalibanteng Kidul	950.000.000	930.696.000	97,97%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gisikdrono	1.092.000.000	577.436.000	52,88%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bongsari	950.000.000	733.576.000	77,22%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojongsalaman	950.000.000	866.768.000	91,24%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Salamanmloyo	950.000.000	509.112.000	53,59%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cabean	950.000.000	855.886.000	90,09%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangayu	950.000.000	604.470.000	63,63%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Krobokan	988.000.000	807.680.000	81,75%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangsari	950.000.000	707.381.000	74,46%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangmas	950.000.000	732.380.000	77,09%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kembangarum	1.159.000.000	909.167.000	78,44%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	810.678.658	419.265.700	51,72%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ngemplak Simongan	175.000.000	2.700.000	1,54%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Manyaran	175.000.000	1.950.000	1,11%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Krapyak	175.000.000	48.196.250	27,54%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tambakharjo	175.000.000	16.553.000	9,46%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalibanteng Kulon	175.000.000	4.320.000	2,47%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kalibanteng Kidul	175.000.000	87.064.000	49,75%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Gisikdrono	175.000.000	54.968.600	31,41%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bongsari	175.000.000	30.390.110	17,37%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bojongsalaman	175.000.000	3.775.000	2,16%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Salamanmloyo	175.000.000	13.140.000	7,51%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cabean	175.000.000	11.624.300	6,64%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karangayu	175.000.000	33.568.000	19,18%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Krobokan	175.000.000	54.968.600	31,41%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tawang Sari	175.000.000	54.062.100	30,89%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tawangmas	175.000.000	9.307.000	5,32%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kembangarum	175.000.000	27.041.000	15,45%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	19.612.285.572	9.029.265.890	46,04%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	136.100.472	29.208.000	21,46%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Ngemplak Simongan	1.288.800.000	588.651.000	45,67%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Manyaran	1.905.600.000	896.171.320	47,03%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Krapyak	1.059.000.000	478.691.000	45,20%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tambakharjo	628.200.000	268.151.400	42,69%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kalibanteng Kulon	999.600.000	468.970.000	46,92%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kalibanteng Kidul	808.200.000	397.950.000	49,24%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Gisikdrono	2.027.400.000	980.969.810	48,39%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Bongsari	1.277.400.000	602.238.000	47,15%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Bojongsalaman	1.215.000.000	576.409.500	47,44%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Salamanmloyo	765.600.000	333.539.000	43,57%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Cabean	581.400.000	274.670.900	47,24%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Karangayu	937.200.000	417.863.750	44,59%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Krobokan	1.809.000.000	836.201.500	46,22%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tawang Sari	1.025.400.000	456.202.870	44,49%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Tawangmas	1.084.800.000	475.789.840	43,86%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kembangarum	2.047.200.000	947.588.000	46,29%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.232.061	0	0,00%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.232.061	0	0,00%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.232.061	0	0,00%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	84.043.922	27.500.000	32,72%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	84.043.922	27.500.000	32,72%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	84.043.922	27.500.000	32,72%
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.410.524.179	10.257.949.494	58,92%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.291.637	1.553.640	13,76%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.566.286	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.735.291	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.114.331	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.091.788	1.553.640	74,27%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.895.173	0	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.151.290	0	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	737.478	0	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.585.787.196	9.579.906.101	61,47%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.725.508.393	9.194.329.781	62,44%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	857.000.000	384.920.000	44,91%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.262.093	656.320	52,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.008.355	0	0,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.008.355	0	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	571.728.936	194.475.400	34,02%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.779.000	3.312.000	2,74%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.279.743	0	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.613.789	12.617.900	23,10%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.692.240	10.065.500	29,87%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.521.960	23.290.000	40,49%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.333.000	26.430.000	24,62%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	131.509.204	118.760.000	90,31%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.889.741	208.045.000	83,25%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	241.629.875	208.045.000	86,10%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.259.866	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.674.869	86.675.653	40,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.966.979	76.373.153	42,20%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.707.890	10.302.500	28,85%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.151.800	187.293.700	24,16%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	587.051.950	175.569.700	29,91%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.524.550	0	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.357.240	5.199.000	14,70%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.218.060	6.525.000	29,37%
	JUMLAH	61.949.101.270	35.050.097.500	56,58%

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 100 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang adalah sebesar Rp.61.949.101.270. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp.35.050.097.500. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp.26.899.003.770.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan di Kota Semarang, yang

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan. Kedudukan dan Susunan Organisasi

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
2. Kecamatan merupakan pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Kecamatan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
4. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Publik;
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
8. Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
9. Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tugas Camat sebagaimana dimaksud meliputi :

1. perumusan kebijakan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
2. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Wali Kota;
3. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi

- Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Kelurahan;
4. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Kecamatan;
 5. penyelenggaraan kerja sama Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
 6. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
 7. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 8. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 9. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 10. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Kelurahan;
 11. penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
 12. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana lainnya di tingkat Kecamatan;
 13. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
 14. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
 15. penyelenggaraan urusan pemerintahan kewenangan Wali Kota yang didelegasikan kepada Camat;
 16. penyelenggaraan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain *stunting*, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
 17. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
 18. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 19. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi-fungsi

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 3. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 4. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 5. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
 7. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
 8. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan antara lain bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan kebersihan lingkungan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, antara lain:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara

- Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; dan
2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, antara lain:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, antara lain:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
 3. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
 4. evaluasi Kelurahan;
- i. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, antara lain:
1. pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
 2. Peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
 3. peningkatan ketahanan pangan keluarga;
 4. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
 5. peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;

6. peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
 7. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 8. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
 9. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
 10. pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
 11. pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
 12. penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kecamatan, antara lain:
1. pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
 2. penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
 3. pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
 4. pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan, antara lain:
1. penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
 2. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
 4. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
 5. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
 5. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
 6. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain *stunting*, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi.

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana, meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; dan

Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Sekretariat sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud oleh seorang Sekretaris Kecamatan.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Publik, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- f. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di kesekretariatan Kecamatan;
- g. pelaksanaan kegiatan pendukung penyelesaian isu-isu strategis kota, antara lain *stunting*, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi;
- h. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Kecamatan;

- i. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- j. pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan;
- k. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- l. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- m. pelaksanaan administrasi barang milik daerah Kecamatan;
- n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Kecamatan;
- o. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Kecamatan;
- q. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
- r. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Kecamatan;
- s. pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian Kecamatan;
- t. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, Manajemen Perubahan, dan pengembangan inovasi Kecamatan serta Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
- u. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kecamatan;
- v. pelaksanaan administrasi umum Kecamatan;
- w. pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- x. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kecamatan;
- y. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kecamatan;
- z. pelaksanaan kegiatan sosialisasi implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- aa. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
- bb. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kecamatan;
- cc. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kecamatan;
- dd. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- f. menyiapkan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, antara lain: Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
- g. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan, Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan;
- h. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan;
- l. menyiapkan kegiatan evaluasi kinerja Kecamatan;
- m. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- n. menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan;
- o. menyiapkan kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
- p. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- q. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Kecamatan;

- r. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah Kecamatan;
- s. menyiapkan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada Kecamatan;
- t. menyiapkan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Kecamatan;
- u. menyiapkan kegiatan pengelolaan, penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Kecamatan;
- v. menyiapkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Kecamatan;
- w. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kecamatan;
- x. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- y. menyiapkan kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Kecamatan;
- z. menyiapkan kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Kecamatan;
- aa. menyiapkan kegiatan penyusunan manajemen resiko dan rencana tindak pengendalian;
- bb. menyiapkan kegiatan perencanaan pengelolaan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- cc. menyiapkan kegiatan analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- dd. menyiapkan kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- ee. menyiapkan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- ff. menyiapkan kegiatan pengolahan data retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- gg. menyiapkan kegiatan penetapan wajib retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- hh. menyiapkan kegiatan pelaporan pengelolaan retribusi daerah kewenangan Kecamatan;
- ii. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- jj. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- kk. menyiapkan penilaian kinerja bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- ll. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

- mm. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
- nn. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kecamatan;
- g. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- h. menyiapkan kegiatan dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan fasilitasi kunjungan tamu di Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
- k. menyiapkan kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- l. menyiapkan kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- m. menyiapkan kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dan penyediaan bahan/material serta penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- n. menyiapkan kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- o. menyiapkan kegiatan pengadaan mebel, dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- p. menyiapkan kegiatan pengadaan aset tetap lainnya, pengadaan aset tak berwujud, pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
- q. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan

- dan perizinan alat besar, penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor, pemeliharaan mebel, dan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- r. menyiapkan kegiatan pemeliharaan aset tetap lainnya, pemeliharaan aset tak berwujud, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - s. menyiapkan kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Kecamatan;
 - t. menyiapkan kegiatan pengamanan barang milik daerah Kecamatan;
 - u. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - v. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Kecamatan;
 - w. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan Budaya Kerja Kecamatan;
 - x. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan Zona Integritas,
 - y. menyiapkan kegiatan pengembangan inovasi Kecamatan;
 - z. menyiapkan kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan;
 - aa. menyiapkan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Kecamatan;
 - bb. menyiapkan kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Kecamatan;
 - cc. menyiapkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian Kecamatan;
 - dd. menyiapkan kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Kecamatan;
 - ee. menyiapkan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi pegawai Kecamatan;
 - ff. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kecamatan;
 - gg. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - hh. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - ii. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - jj. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - kk. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - ll. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan;
- f. menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
- g. menyiapkan kegiatan administrasi, dan fasilitasi di bidang pertanahan;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kecamatan baik statis maupun dinamis;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kecamatan, dan fasilitasi penyusunan profil kelurahan;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
- m. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku;

- t. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- u. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota;
- v. menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- w. menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- x. menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- y. menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- z. menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- aa. menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- bb. menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- cc. menyiapkan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- dd. menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- ee. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- ff. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- gg. menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Wali Kota;
- hh. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- ii. menyiapkan kegiatan evaluasi Kelurahan;
- jj. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
- kk. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan;
- ll. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan;

- mm. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- nn. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- oo. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- pp. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- f. menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- h. menyiapkan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan;
- i. menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- j. menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- k. menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- q. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

- r. menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum antara lain (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, *Water Closet* umum, terminal);
- t. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- w. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- x. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- y. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- z. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
- aa. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- bb. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- cc. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- dd. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- ee. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- ff. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- gg. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- g. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan karang taruna;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi administrasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
- u. menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
- v. menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan

- dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
- w. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
 - x. menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
 - y. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
 - z. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
 - aa. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
 - bb. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - cc. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
 - dd. Menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;
 - ee. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
 - ff. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga;
 - gg. menyiapkan kegiatan penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
 - hh. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
 - ii. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
 - jj. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
 - kk. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - ll. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang sosial, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, koperasi dan usaha mikro, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, pertanian, perikanan, perindustrian, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- mm. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- nn. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- oo. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- pp. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- qq. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial; dan
- rr. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pelayanan Publik;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pelayanan Publik;
- f. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- g. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. menyiapkan kegiatan pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- k. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan;
- l. menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- m. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- n. menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- o. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;

- p. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
- q. menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- r. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- s. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- t. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
- u. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pelayanan Publik;
- v. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi di Kecamatan;
- w. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pelayanan Publik;
- x. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- y. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- z. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Publik;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;

- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota;
- k. menyiapkan kegiatan fasilitasi sosialisasi kebijakan Pemerintah terkait Ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satuan Perlindungan Masyarakat;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi Sistem Keamanan Lingkungan Kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat apabila terjadi kecelakaan tugas;
- t. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- v. menyiapkan kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- w. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- x. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- y. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah;
- z. menyiapkan kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- aa. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
- bb. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah Kecamatan kepada Wali kota;
- cc. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Penataan Ruang, bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, bidang Perdagangan, bidang Perhubungan;
- dd. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan
- ee. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pencegahan bencana di Tingkat Kecamatan;
- ff. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penanganan bencana di Tingkat Kecamatan
- gg. menyiapkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Penanganan bencana di Tingkat Kecamatan;
- hh. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana lainnya di Kecamatan;
- ii. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penanganan bencana di tingkat Kecamatan;
- jj. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- kk. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- ll. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- mm. menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- nn. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- oo. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

KELURAHAN

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan.

Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pembangunan;
- d. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- f. Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi

Lurah

Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pendistribusian tugas sekretariat, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- d. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- g. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Camat;
- i. pelaksanaan kegiatan koordinasi;
- j. pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- k. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kelurahan;
- l. pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- m. pelaksanaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
- n. pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- o. pelaksanaan kegiatan pelayanan publik;
- p. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitas Pelayanan Publik;
- q. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan Kelurahan; dan

- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Lurah mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Fungsi Lurah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Wali Kota, antara lain:
 - 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional;
 - 3. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 5. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
 - 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
 - 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
 - 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kelurahan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di Wilayah Kelurahan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kelurahan kepada Camat;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan, antara lain:
1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
 3. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
 4. evaluasi Kelurahan;
- h. melaksanakan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan, antara lain:

1. pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 2. peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
 3. peningkatan ketahanan pangan keluarga;
 4. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
 5. peningkatan kesadaran keluarga dalam mewujudkan rumah sehat dan layak huni serta kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah;
 6. peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
 7. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 8. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya;
 9. penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup;
 10. pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
 11. pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga; dan
 12. penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan bencana di tingkat Kelurahan, antara lain:
1. pencegahan bencana di Tingkat Kelurahan;
 2. penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
 3. pembinaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan; dan
 4. Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan bencana di Tingkat Kelurahan;
- j. melaksanakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan, antara lain:
1. penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
 4. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan

5. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- l. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat di wilayah Kelurahan;
- m. melaksanakan kegiatan pendukung penyelesaian isu - isu strategis kota, antara lain *stunting*, kemiskinan, ketahanan pangan, inflasi, digitalisasi pemerintahan dan investasi; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat;
- b. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Seksi Pembangunan, Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- e. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan Kesekretariatan Kelurahan;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan Kelurahan;
- g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Kelurahan;
- h. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan barang milik daerah Kelurahan;
- i. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan Kelurahan;
- j. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;

- k. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Kelurahan;
- l. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Kelurahan;
- m. pelaksanaan administrasi umum Kelurahan;
- n. pelaksanaan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Kelurahan;
- o. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang, antara lain: jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta jasa pelayanan umum kantor Kelurahan;
- p. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Kelurahan;
- q. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kelurahan;
- r. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kelurahan;
- s. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Kelurahan;
- t. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Kelurahan;
- u. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;
- w. menyiapkan bahan pembinaan petugas pelayanan;
- x. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- y. menyiapkan kegiatan pengelolaan survei kepuasan masyarakat/pelanggan;
- z. menyiapkan kegiatan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial;
- aa. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- bb. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Sekretariat;
- cc. menyiapkan fasilitasi konsep kebijakan dan kegiatan pelayanan publik;
- dd. menyiapkan kegiatan penyusunan tatalaksana pengelolaan pengaduan dan pemberian informasi;
- ee. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan publik;
- ff. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengamanan perangkat lunak layanan publik;
- gg. menyiapkan kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- hh. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
- ii. menyiapkan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- jj. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Camat melalui Sekretaris Kelurahan;
- kk. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kelurahan;
- ll. menyiapkan kegiatan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
- mm. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan;
- nn. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- oo. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Komunikasi dan Informatika;
- pp. menyiapkan kegiatan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat;
- qq. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- rr. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- ss. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
dan
- tt. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran seksi Pembangunan;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan;
- f. menyiapkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- g. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- h. menyiapkan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan;
- i. menyiapkan kegiatan terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- j. menyiapkan kegiatan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kelurahan;
- k. menyiapkan kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;
- m. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
- n. menyiapkan kegiatan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi Masyarakat;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemugaran perumahan dan permukiman penduduk;
- p. menyiapkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan;
- q. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- r. menyiapkan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- s. menyiapkan kegiatan penyusunan dan pelaporan data potensi prasarana dan sarana umum (tempat ibadah, jalan / jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal dll);
- t. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- v. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan;
- w. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran pembangunan;
- x. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
- y. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- z. menyiapkan kegiatan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait

- aa. menyiapkan kegiatan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kelurahan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- bb. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan;
- cc. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pembangunan;
- dd. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- ee. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- ff. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan;
- gg. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
- e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- f. menyiapkan kegiatan fasilitasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- g. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- h. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan penanganan warga miskin;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. menyiapkan kegiatan fasilitasi program jaminan sosial;
- k. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengembangan perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan kelurahan dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);

- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, program peningkatan pengarusutamaan gender, usaha mikro, dan Karang Taruna;
- m. menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Lembaga nirlaba lainnya;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam;
- q. menyiapkan kegiatan fasilitasi administrasi Badan Amil Zakat dan Palang Merah Indonesia;
- r. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyuluhan program wajib belajar;
- s. menyiapkan kegiatan fasilitasi pameran dan festival seni budaya;
- t. menyiapkan kegiatan penyusunan rekomendasi tertentu di bidang perekonomian dan kesejahteraan sosial;
- u. menyiapkan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan;
- v. menyiapkan kegiatan pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
- w. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar-keluarga, warga, dan kelompok masyarakat;
- x. menyiapkan kegiatan peningkatan ketahanan pangan keluarga;
- y. menyiapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri;
- z. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah;
- aa. menyiapkan kegiatan peningkatan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- bb. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- cc. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya;
- dd. menyiapkan kegiatan penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup;

- ee. menyiapkan kegiatan pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam;
- ff. menyiapkan kegiatan pelatihan keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga;
- gg. menyiapkan kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas;
- hh. menyiapkan kegiatan fasilitasi penunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- ii. menyiapkan kegiatan fasilitasi dan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
- jj. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan
- kk. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna; menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Sosial, Pangan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Koperasi dan Usaha Mikro, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Pertanian, Perikanan, Perindustrian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- ll. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- mm. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- nn. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- oo. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- pp. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- qq. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kegiatan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- c. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
- d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;

- e. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. menyiapkan kegiatan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik;
- g. menyiapkan kegiatan administrasi dan fasilitasi di bidang pertanahan;
- h. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi, pembebasan tanah;
- i. menyiapkan kegiatan fasilitasi monitoring dan inventarisasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya;
- j. menyiapkan kegiatan penyusunan data monografi Kelurahan baik statis maupun dinamis;
- k. menyiapkan kegiatan penyusunan profil kelurahan;
- l. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan pencapaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi sesuai dengan kewenangannya;
- m. menyiapkan kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), RT, RW, di wilayah kerjanya;
- n. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan;
- o. menyiapkan kegiatan fasilitasi peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
- p. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
- q. menyiapkan kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- r. menyiapkan kegiatan lomba administrasi kelurahan dan lomba pemberdayaan masyarakat;
- s. menyiapkan kegiatan pemberian rekomendasi tertentu di bidang pemerintahan;
- t. menyiapkan kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- u. menyiapkan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- v. menyiapkan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- w. menyiapkan kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

- x. menyiapkan kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- y. menyiapkan kegiatan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- z. menyiapkan kegiatan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- aa. menyiapkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- bb. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- cc. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- dd. menyiapkan kegiatan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kelurahan kepada Wali Kota;
- ee. menyiapkan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ff. menyiapkan kegiatan berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat bidang Pertanahan;
- gg. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- hh. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat;
- ii. menyiapkan kegiatan fasilitasi penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan penting;
- jj. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengumpulan bahan keterangan dan informasi indikasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- kk. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga Masyarakat terhadap peraturan daerah dan/ atau peraturan wali kota
- ll. menyiapkan kegiatan fasilitasi penyusunan data dan informasi potensi Satlinmas;
- mm. menyiapkan kegiatan fasilitasi penerbitan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- nn. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemetaan kebutuhan fasilitas, prasarana dan sarana penunjang tugas operasional Satlinmas;
- oo. menyiapkan kegiatan fasilitasi mobilisasi anggota Satlinmas untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanganan ketenteraman dan ketertiban serta pengamanan pemilu;
- pp. menyiapkan kegiatan fasilitasi seleksi anggota Satlinmas;
- qq. menyiapkan kegiatan fasilitasi Siskamling Kelurahan;

- rr. menyiapkan kegiatan fasilitasi Pemberian Piagam Penghargaan kepada anggota Satlinmas;
- ss. menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberian santunan kepada anggota Satlinmas apabila terjadi kecelakaan tugas;
- tt. menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban umum;
- uu. menyiapkan kegiatan pengadaan, pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- vv. menyiapkan kegiatan program pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
- ww. menyiapkan kegiatan penelitian/pengamatan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- xx. menyiapkan kegiatan pertimbangan legalitas dan izin keramaian yang berhubungan dengan ketertiban umum serta kemasyarakatan;
- yy. menyiapkan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- zz. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengamanan Peraturan Daerah dan Peraturan lain yang menyangkut ketertiban wilayah;
- aaa. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam mentaati peraturan;
- bbb. menyiapkan bahan dan melaksanakan menyelenggarakan perlindungan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- ccc. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penanggulangan akibat bencana;
- ddd. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan anggota linmas dan membuat laporan anggota linmas;
- eee. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat dan pos keamanan lingkungan;
- fff. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan dan pemasangan bendera dan umbul-umbul;
- ggg. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak remaja dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat addiktif dan bahan berbahaya;
- hhh. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- iii. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- jjj. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- kkk. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- lll. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

mmm. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional sebagaimana, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2023
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	87,00	87,00	99,67	99,67
SASARAN											
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	71,87	75,70	79,24	83,20	87,36	91,72	71,87	75,70	79,24	79,24
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17,00	17,00	20,00	38,00	10,00	100,00	17,00	17,00	10,00	20,00
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Barat tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, telah mencapai target, dimana realisasinya sebesar 99,67% dari target sebesar 88,00%;
- b. Sasaran “Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”, telah mencapai target dimana realisasi sebesar 79,24 dari target sebesar 79,24;
- c. Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik”, memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan” telah mencapai target dimana realisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00;
- d. Sasaran “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan ”, memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif ” belum mencapai target dimana realisasi sebesar 50% dari target sebesar 100%;
- e. Sasaran “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan ”, memiliki 2 indikator kinerja yaitu :
 1. “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ” belum mencapai target dimana realisasi sebesar 10,00% dari target sebesar 17,00%;
 2. “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan” belum mencapai target dimana realisasi sebesar 50,00% dari target sebesar 100,00%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Barat, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Barat sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Barat terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100,00 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat intergratif dengan pemanfaatan teknologi informasi
- b. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
- c. Kurang efektif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Barat, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

1. Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat
2. Tuntutan kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin meningkat, terutama berkaitan dengan pelayanan publik
3. Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Semarang Barat tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
5. Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya
6. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran
7. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Barat

agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang:

1. Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat
2. Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau
3. Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah kelurahan menjadi perangkat kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat kecamatan sehingga anggaran kelurahan merupakan bagian dari tanggungjawab Kecamatan, Camat mendapat pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan ini terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas.
4. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas
5. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan
6. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat

untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.

7. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Barat, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
- b. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
- c. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- d. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk

menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01	URUSAN KEWILAYAHAN				62.606.119.168	URUSAN KEWILAYAHAN				62.984.119.168	
02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	4.200.423.998	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 Persen	4.200.423.998	
2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2.00 Angka	2.850.778.023	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2.00 Angka	2.850.778.023	
02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	2.850.778.023	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	2.850.778.023	
2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	1.330.621.052	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	1.330.621.052	
03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	288.253.452	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	288.253.452	
			Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	65.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngemplak Simongan)			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manyaran)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Manyaran)	12 Laporan	65.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krapyak)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Krpyak)	12 Laporan	65.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakharjo)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakharjo)	12 Laporan	65.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	12 Laporan	65.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	12 Laporan	65.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Gisikdrono)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Gisikdrono)	12 Laporan	65.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Bongsari)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Bongsari)	12 Laporan	65.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Bojongsalaman)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan (Bojongsalaman)	12 Laporan	65.001.500	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67.366.100	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Wilayah Kecamatan (Kelurahan Salaman mloyo)					(Kelurahan Salaman mloyo)			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangayu)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangayu)	12 Laporan	65.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krobokan)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Krobokan)	12 Laporan	65.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangsari)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangsari)	12 Laporan	65.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangmas)	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tawangmas)	12 Laporan	65.000.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan	12 Laporan	65.000.000			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	65.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kembangarum)					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kembangarum)			
2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	19.024.923	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Semarang	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	19.024.923	
03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	19.024.923	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	19.024.923	
01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kota Semarang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 Persen	39.133.504.60	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kota Semarang	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 Persen	39.509.390.06	2
2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00 Kegiatan	19.749.237.568	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.00 Kegiatan	20.125.123.028	
01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.00 Lembaga Kemasyarakatan	76.280.480	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.00 Lembaga Kemasyarakatan	70.205.480	
02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00 Unit	1.275.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16.00 Unit	1.275.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngemplak Simongan)	16.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngemplak Simongan)	16.00 Unit	950.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Manyaran)	11.00 Unit	1.029.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Manyaran)	11.00 Unit	1.029.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Krapyak)	8.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Krapyak)	8.00 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakharjo)	11.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakharjo)	11.00 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	12.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	12.00 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	9.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	9.00 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gisikdrono)	15.00 Unit	1.092.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gisikdrono)	15.00 Unit	1.092.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bongsari)	16.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bongsari)	16.00 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bojongsalaman)	11.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bojongsalaman)	11.00 Unit	950.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Salaman mloyo)	11.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Salaman mloyo)	11.00 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cabean)	8.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cabean)	8.00 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangayu)	13.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangayu)	13.00 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Krobokan)	12.00 Unit	988.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Krobokan)	12.00 Unit	988.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tawang Sari)	11.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tawang Sari)	11.00 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tawangmas)	8.00 Unit	950.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tawangmas)	8.00 Unit	950.000.000	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kembangarum)	15.00 Unit	1.159.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kembangarum)	15.00 Unit	1.159.000.000	
03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107.00 Pokmas/ Ormas	810.678.658	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107.00 Pokmas/ Ormas	1.297.045.143	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngemplak Simongan)	10.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Ngemplak Simongan)	10.00 Pokmas/ Ormas	118.506.340	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manyaran)	6.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Manyaran)	6.00 Pokmas/ Ormas	112.700.840	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krapyak)	7.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krapyak)	7.00 Pokmas/ Ormas	113.676.195	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tambakharjo)	10.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tambakharjo)	10.00 Pokmas/ Ormas	102.995.800	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalibanteng Kulon)	7.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalibanteng Kulon)	7.00 Pokmas/ Ormas	99.689.700	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalibanteng Kidul)	5.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kalibanteng Kidul)	5.00 Pokmas/ Ormas	125.732.560	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gisikdrono)	4.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gisikdrono)	4.00 Pokmas/ Ormas	123.451.230	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bongsari)	8.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bongsari)	8.00 Pokmas/ Ormas	111.623.760	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bojongsalaman)	6.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bojongsalaman)	6.00 Pokmas/ Ormas	118.752.150	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Salaman Mloyo)	8.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Salaman Mloyo)	8.00 Pokmas/ Ormas	104.637.730	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cabean)	6.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Cabean)	6.00 Pokmas/ Ormas	109.750.030	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangayu)	7.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangayu)	7.00 Pokmas/ Ormas	116.728.410	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krobokan)	4.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Krobokan)	4.00 Pokmas/ Ormas	100.942.820	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangsari)	7.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangsari)	7.00 Pokmas/ Ormas	107.123.680	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangmas)	4.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tawangmas)	4.00 Pokmas/ Ormas	127.021.220	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kembangarum)	5.00 Pokmas/ Ormas	175.000.000			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kembangarum)	5.00 Pokmas/ Ormas	121.539.940	
2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 Dokumen		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17.00 Dokumen	10.630.800	
01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	136.100.472	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	131.218.024	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngemplak SImongan)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.288.800.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngemplak SImongan)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.271.593.660	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Manyaran)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	1.905.600.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Manyaran)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	1.894.199.160	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Krapyak)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	1.059.000.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Krapyak)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	1.046.623.805	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakharjo)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	628.200.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakharjo)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	626.499.790	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	999.600.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalibanteng Kulon)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	993.693.055	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	808.200.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalibanteng Kidul)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	783.655.770	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gisikdrono)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	2.027.400.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gisikdrono)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	2.001.980.390	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bongsari)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	1.277.400.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bongsari)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	1.264.869.350	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bojongsalaman)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	1.215.000.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bojongsalaman)	7.00 Lembaga Kemasyarakan	1.196.975.000	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7.00 Lembaga	765.600.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	7.00 Lembaga	755.930.700	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Diselenggarakan (Kelurahan Salaman Mloyo)	Kemasyarakatan				Diselenggarakan (Kelurahan Salaman Mloyo)	Kemasyarakatan		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cabean)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	581.400.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cabean)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	572.949.970	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangayu)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	937.200.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangayu)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	918.181.120	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Krobokan)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.809.000.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Krobokan)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.809.000.000	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tawang Sari)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.025.400.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tawang Sari)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.019.576.320	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tawangmas)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.084.800.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tawangmas)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	1.059.730.060	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kembangarum)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	2.047.200.000			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kembangarum)	7.00 Lembaga Kemasyarakatan	2.026.960.060	
04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00 Laporan	16.385.100	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.00 Laporan	10.630.800	
01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran	15.00 Persen	14.232.061	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 Persen	14.232.061	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Ketentraman dan Ketertiban Umum								
2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20.00 Angka	14.232.061	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20.00 Angka	14.232.061	
01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.00 Laporan	14.232.061	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.00 Laporan	14.232.061	
01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	84.043.922	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Semarang	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 Persen	84.043.922	
2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 Angka	84.043.922	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5.00 Angka	84.043.922	
02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	50.00 Orang	84.043.922	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan	50.00 Orang	84.043.922	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	19.173.914.585	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00 Persen	19.176.029.125	
2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 Dokumen	11.291.637	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5.00 Dokumen	11.291.637	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	1.566.286	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	1.566.286	
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen		
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.735.291	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1.00 Dokumen	1.735.291	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	2.114.331	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	2.114.331	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	2.091.788	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1.00 Dokumen	2.091.788	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.895.173	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.895.173	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1.151.290	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Dokumen	1.151.290	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	737.478	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	737.478	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen	17.386.962.950	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4.00 Dokumen	17.386.962.950	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85.00 Orang/bulan	14.725.508.393	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85.00 Orang/bulan	16.633.044.147	
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	857.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.00 Dokumen	750.640.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1.00 Laporan	1.262.093	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	1.262.093	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Keuangan Akhir Tahun SKPD								
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00 Laporan	1.008.355	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.00 Laporan	1.008.355	
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.008.355	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	1.008.355	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 Bulan	577.241.799	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12.00 Bulan	564.356.339	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.00 Paket	120.779.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.00 Paket	80.344.480	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	66.279.743	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	41.343.393	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	54.613.789	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.00 Paket	74.808.968	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.00 Paket	33.692.240	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.00 Paket	35.663.514	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			57.521.960	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang			92.821.500	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	107.333.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	96.708.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 Dokumen	69.096.035	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.00 Dokumen	138.666.484	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	256.971.580	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	256.971.580	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit	241.629.875	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit	228.497.580	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit	8.259.866	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit	28.474.000	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	216.674.869	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	231.674.869	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	180.966.979	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	195.966.979	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Laporan	35.707.890	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.00 Laporan	35.707.890	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	724.771.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	724.771.750	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	58.00 Unit	587.051.950	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	58.00 Unit	587.051.950	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	130.524.550	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.00 Unit	80.144.500	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00 Unit	35.357.240	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.00 Unit	35.357.240	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	22.218.060	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	22.218.060	

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.

- 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%

- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan public, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan, Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Nilai AKIP
- b. Jumlah inovasi pelayanan public di Kecamatan dan Kelurahan
- c. Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
- e. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,00
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Nilai	79,24
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	1. Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen Persen	20,00 100,00
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100,00

Sumber : Kecamatan Semarang Barat, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Kecamatan Semarang Barat bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (9 indikator) dan indikator sasaran (28 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, OPD memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN SEMARANG BARAT					61.368.563.101	61.886.688.101	62.606.119.168	APBD	
07.01	KECAMATAN					43.894.762.920	44.538.577.091	43.432.204.583	APBD	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	92 Persen	92 Persen	4.079.931.398	4.198.056.398	4.200.423.998	APBD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	2 Angka	2 Angka	2 Angka	2.850.778.023	2.850.778.023	2.850.778.023	APBD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2.850.778.023	2.850.778.023	2.850.778.023	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.210.128.452	1.328.253.452	1.330.621.052	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.210.128.452	1.328.253.452	1.330.621.052	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	19.024.923	19.024.923	19.024.923	APBD	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.024.923	19.024.923	19.024.923	APBD	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 Persen	98 Persen	98 Persen	39.716.555.539	40.242.244.710	39.133.504.602	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	20.111.134.978	20.629.959.138	19.749.237.568	APBD	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	76.280.480	76.280.480	70.205.480	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	16.943.000.000	16.943.000.000	16.943.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	11 Unit	11 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	8 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	15 Unit	15 Unit	-	-	-	-	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	107 Pokmas / Ormas	107 Pokmas / Ormas	107 Pokmas / Ormas	3.091.854.498	3.610.678.658	2.736.032.088	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	-	-	-	-	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	19.605.420.561	19.612.285.572	19.384.267.034	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	19.595.900.472	19.595.900.472	19.373.636.234	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	9.520.089	16.385.100	10.630.800	APBD	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	15 Persen	15 Persen	14.232.061	14.232.061	14.232.061	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	20 Angka	20 Angka	14.232.061	14.232.061	14.232.061	APBD	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	14.232.061	14.232.061	14.232.061	APBD	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	92 Persen	92 Persen	84.043.922	84.043.922	84.043.922	APBD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5 Angka	5 Angka	5 Angka	84.043.922	84.043.922	84.043.922	APBD	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	84.043.922	84.043.922	84.043.922	APBD	
X.XX	NON URUSAN					17.473.800.181	17.348.111.010	17.473.800.181	APBD	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	17.473.800.181	17.348.111.010	19.173.914.585	APBD	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	11.291.637	11.291.637	11.291.637	APBD	
		Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.566.286	1.566.286	1.566.286	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.735.291	1.735.291	1.735.291	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.114.331	2.114.331	2.114.331	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.585.787.196	15.585.787.196	17.386.962.950	APBD	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	14.725.508.393	14.725.508.393	16.633.044.147	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	857.000.000	857.000.000	750.640.000	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.262.093	1.262.093	1.262.093	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.008.355	1.008.355	1.008.355	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.008.355	1.008.355	1.008.355	APBD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	390.545.824	509.315.767	577.241.799	APBD	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	68.270.200	120.779.000	80.229.940	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	50.850.465	66.279.743	34.521.932	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	45.250.104	54.613.789	81.630.429	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	28.777.404	33.692.240	35.663.514	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.651.616	57.521.960	92.821.500	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	69.650.000	107.333.000	113.708.000	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	69.096.035	69.096.035	138.666.484	APBD	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	508.840.275	249.889.741	256.971.580	APBD	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	337.565.687	241.629.875	228.497.580	APBD	
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Lainnya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	171.274.588	8.259.866	28.474.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Bangunan Lainnya yang Disediakan								
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	201.300.616	216.674.869	216.674.869	APBD	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	163.887.840	180.966.979	180.966.979	APBD	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	37.412.776	35.707.890	35.707.890	APBD	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	776.034.633	775.151.800	724.771.750	APBD	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	58 Unit	58 Unit	587.051.950	587.051.950	587.051.950	APBD	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	130.570.585	130.524.550	80.144.500	APBD	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	36.194.038	35.357.240	35.357.240	APBD	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	22.218.060	22.218.060	22.218.060	APBD	
JUMLAH						61.368.563.101	61.886.688.101	62.606.119.168		

Sumber : Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, 2023

BAB V **P E N U T U P**

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

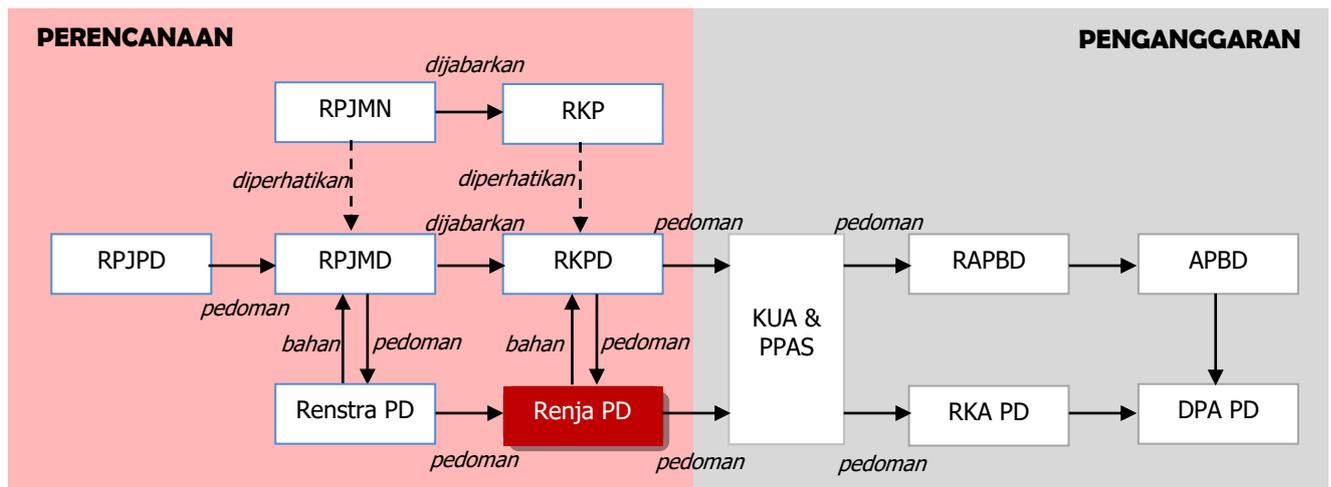
38. KECAMATAN SEMARANG TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian

target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
 - s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	I		II		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100 %	15.308.789.000		10.795.271.187	100%	0	100.29%	0	0.29 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.59	0	100.59	0.00
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95				92.00	Person	92.27		0.27		0		0		92.54			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00				1.00	angka	0.00		0.00		0		0		0.00			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	220.000.000		11.706.500	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00	0	0.00	0				
		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1.00				1.00	angka	0.00		0.00		0		0		0.00			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	220.000.000		11.706.500	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00	0	0.00	0	0.00%	0		
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	0.00		0		00		0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		di Tingkat Kecamatan																		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100 %	10.352.733.000	9.832.529.149		100 %	0	25.00%	0	25.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	50.00	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			I	II																
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 0 0 %	220.000.00 0		11.706. 500	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.0 0%	0	0.0 0%	0	0.00 %	0		
7.01.02.2 .02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100 %	10.352 .733.0 00		9.832.529. 149	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.0 0%	0	0.0 0%	0	0.00 %	0		
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten	0.0 0		0		00		0		0		0		0.00					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemijen	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatibaru	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sarirejo	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kebonagung	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bugangan	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mlatiharjo	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangturi	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejosari	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangtempel	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rejomulyo	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 %	4.736.056.000		951.035.538	100 %	0	25.00%	0	25.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	50.00	0		
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00				100.00 persen		25.00		25.00		0		0		50.00	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.02.2 .04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100 %	4.736.056.000		951.035.538	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	0.00		0		0.00		0		0		0		0		0.00			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	122.751.500.000		23.158.439.699	100 %	0	25.00 %	0	20.92 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	45.92	0	45.92	0.00
		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100.00				98.00 pers en		24.50		20.50		0		0		45.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100 %	121.38 1.500.000		22.143.54 5.299	100 %	0	1.53 %	0	21.1 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	22.6 %	0		
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327.00				327.00	0 kegiatan	5.00		69.00		0		0		74.00			
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100 %	362.00 0.000		155.673.500	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.0 %	0	0.0 %	0	0.00 %	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					
7.01.03.2 .02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100 %	62.586 .125.0 00		13.521.46 9.059	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Mlatiharjo	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			I	II	7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%			
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Mlatibaru	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Rejomulyo	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			I	II	7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%			
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kebonagung	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			I	II	7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%			
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Bugangan	0.0		0		0.0		0		0		0		0.00			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karangturi	0.0		0		0.0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			I	II																
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Sarirejo	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Rejosari	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karangtempel	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kemijen	0.0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
7.01.03.2 .02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100	58.433		8.466.402.	100	0	0.00	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0		
			%	.375.000		740	%		%		0%		0%		0%		%			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			I	II	7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%			
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Rejomulyo	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00			
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bugangan	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			I	II	7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%					
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mlatibaru	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kemijen	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mlatiharjo	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kebonagung	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sarirejo	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Karangturi	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Rejosari	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Karangtempel	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0.0		0		0 0		0		0		0		0.00					
7.01.03.2 .03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100 %	1.370.000.000		1.014.894.400	100 %	0	287.50%	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	287.50	0			
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8.0				8.00	doku men	23.0		0.00		0		23.0					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.03.2 .03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100 %	830.00 0.000		87.094.40 0	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.0 0%	0	0.0 0%	0	0.00 %	0		
		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan Kelurahan Kemijen	0.0 0		0		0.0 %		0		0		0		0		0.00 %			
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan Kelurahan Mlatibaru	0.0 0		0		0.0 %		0		0		0		0		0.00 %			
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan Kelurahan Rejomulyo	0.0 0		0		0.0 %		0		0		0		0		0.00 %			
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan Kelurahan Mlatiharjo	0.0 0		0		0.0 %		0		0		0		0		0.00 %			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan Kelurahan Bugangan	0.0		0		0.0		0		0		0		0.00					
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan Kelurahan Kebonagung	0.0		0		0.0		0		0		0		0.00					
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan Kelurahan Sarirejo	0.0		0		0.0		0		0		0		0.00					
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan Kelurahan Karangturi	0.0		0		0.0		0		0		0		0.00					
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan Kelurahan Rejosari	0.0		0		0.0		0		0		0		0.00					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Masyarakat yang Dilaporkan Kelurahan Karangtempel	0.0		0		0.0		0		0		0		0		0.00			
7.01.03.2 .03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100	540.00		927.800.0	100	0	0.00	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0		
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	0.0		0		0.0		0		0		0		0		0.00			
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	0.0		0		0.0		0		0		0		0		0.00			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA		100	182.00		288.650.4	100	0	64.6	0	20.0	0	0.0	0	0.0	0	84.6	0	84.6	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	N DAN KETERTIBAN UMUM		%																	
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.00				15.00	persen	9.70		3.00		0		0		12.70			
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	0		0	100%	0	99.14%	0	0.03%	0	0.00%	0	0.00%	0	99.17%	0		
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20.00				35.00	angka	34.70		0.01		0		0		34.71			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04.2 .01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100 %	0		0	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %		
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0.00	0	0		0.00		0		0		0		0		0.00				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %	137.000.000		0	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00	0.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			I	II	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)							
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.00				2.00		0.00		0.00		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100.00				92.00	persen	0.00		0.00		0		0		0.00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	137.000.000		0	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4.00				2.00		0.00		0.00		0		0		0.00			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	137.000.000		0	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0		0		0 0		0		0		0							
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100 %	72.870 .469.000		21.342.340.724	100 %	0	21.67 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	46.67	0	46.67	0.00
		Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 .00				100.00 %		20.00		25.00		0		0		45.00			
		Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100 .00				100.00 %		20.00		25.00		0		0		45.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	I		II		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%			
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100.00				100.00 %		25.00		25.00		0		0		50.00			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	109.600.000		9.415.000	100 %	0	150.00%	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	150.00	0		
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2				2.00 Dokumen		2		0		2							
		Presentase Dokumen pelaporan	100				100.00 persen		25		25		50							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100 %	21.000 .000		3.810.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	0.0 0		0		0.0 0		0		0		0		0		0.00			
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Semarang Timur	0.0 0		0		0.0 0		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100 %	15.600 .000		761.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	0.0 0		0		0.0 0		0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100 %	14.100 .000		796.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	0.0		0		0.0		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100 %	14.100 .000		796.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	0.0		0		0.0		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100 %	16.100 .000		761.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100 %	16.100 .000		761.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100 %	9.000.000		0	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0.00		0		0.00		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	16.500.000		2.526.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	0.00		0		0.00		0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	60.591.579.950		17.683.455.397	100 %	0	27.17%	0	24.17%	0	0.00%	0	0.00%	0	51.33	0		
		Administrasi Keuangan SKPD	100.00				100.00		21.00		15.00		0		0		36.00			
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00				3.00		1.00		1.00		0		0		2.00			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	57.477.715.094		16.973.892.397	100 %	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	0.00		0		0.00		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100 %	3.087.700.000		704.540.000	100 %	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	0.0 0		0		0 0		0		0		0		0.00		0.00			
X.XX.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100 %	19.564 .856		4.021.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Laporan Keuangan akhir tahun	0.0 0		0		0 0		0		0		0		0.00		0.00			
X.XX.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		100 %	3.300. 000		460.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Laporan Keuangan Semesteran	0.0 0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100 %	3.300. 000		542.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.0 0%	0	0.0 0%	0	0.00 %	0		
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0.0 0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	5.796. 289.05 0		1.438.295. 037	100 %	0	25.0 0%	0	25.0 0%	0	0.0 0%	0	0.0 0%	0	50.0 0	0		
		Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 .00				100.0 0 pers en		25.0 0		25.0 0		0		0		50.0 0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100 %	65.000.000		3.971.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0.00		0		0.00		0		0		0		0.00					
X.XX.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %	1.880.000.000		358.581.155	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0.00		0		0.00		0		0		0		0.00					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	I		II		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%			
1	2	3	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100 %	143.28 9.050		17.707.88 2	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.0 0%	0	0.0 0%	0	0.00 %	0		
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0.0 0		0		0.0		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100 %	70.000 .000		10.448.00 0	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.0 0%	0	0.0 0%	0	0.00 %	0		
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0.0 0		0		0.0		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100 %	473.00 0.000		43.684.00 0	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.0 0%	0	0.0 0%	0	0.00 %	0		
		Jumlah tamu yang berkunjung	0.0 0		0		0.0		0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			I	II	7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%					
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 %	740.00 0.000		18.960.00 0	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	0.0 0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100 %	2.425. 000.00 0		984.943.0 00	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	0.0		0		0		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	1.775.000.000		556.254.210	100	0	10.0	0	40.0	0	0.0	0	0.0	0	50.0	0		
		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100				100.0		10.0		40.0		0		0		50.0			
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100	1.775.000.000		556.254.210	100	0	0.00	0	0.00	0	0.0	0	0.0	0	0.00	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II									
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Peralatan dan Mesin Lainnya	0.00		0		0.00		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.730.000.000		98.869.004	100%	0	10.00%	0	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	30.00%	0		
		Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100.00				100.00	persen	10.00		20.00		0		0		30.00			
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	870.000.000		95.644.004	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00		0		0.00		0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100 %	860.000.000		3.225.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	0.00		0		0.00		0		0		0		0		0.00			
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2.868.000.000		1.556.052.076	100 %	0	20.00 %	0	25.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	45.00	0		
		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00				100.00 persen		20.00		25.00		0		0		45.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100 %	926.00 0.000		176.662.5 00	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0	0.0 0%	0	0.00 %	0	0		
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.0 0		0		0 0		0		0		0		0		0.00			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100 %	1.100.000.000		408.023.000	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0.00		0		0.00		0		0		0		0.00					
X.XX.01. 2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 %	662.000.000		918.765.276	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0		
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	0.00		0		0.00		0		0		0		0.00					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	I		II											
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
X.XX.01. 2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100 %	180.00 0.000		52.601.30 0	100 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.0 0%	0	0.0 0%	0	0.00 %	0		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	0.0 0		0		0.0		0		0		0		0.00					
Rata-rata capaian riil semua kegiatan									0.00	0	0.00	0	0.0 0	0	0.00 0	0				
Rata-rata Capaian Kinerja Program (diluar Penunjang)(%)																0			57.7 9	0.00
Predikat Kinerja Program																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								0		0		0		0						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																0			55.5 7	0.00
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				

Sumber: Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”,

Sub kegiatan yang belum mencapai 100% bersifat rutin, dan pelaksanaannya di triwulan III dan/atau triwulan IV.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu :

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- e. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- j. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- k. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- o. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
- p. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

q. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	Urusan Wajib Kewilayahan	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	41.847.960.468	15.255.567.699	36.45
A	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.196.020.699	1.391.359.868	43.53
1	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	68.250.120	217.000	0.32
	01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	68.250.120	217.000	0.32
2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.123.173.104	958.017.464	45.12
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.407.173.104	590.346.024	41.95
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kemijen)	75.000.000	41.652.597	55.54
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejomulyo)	69.000.000	31.735.759	45.99
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatibaru)	73.000.000	28.277419	38.74
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mlatiharjo)	69.000.000	38.576.793	55.91
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kebonagung)	67.000.000	31.088.140	46.40
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bugangan)	73.000.000	40.399.322	55.34
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sarirejo)	71.000.000	27.317.433	38.47
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rejosari)	83.000.000	51.868.697	62.49
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangturi)	67.000.000	39.745.727	59.32
	02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangtempel)	69.000.000	37.009.553	53.64
3	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.004.597.475	433.125.404	43.11
	04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.004.597.475	433.125.404	43.11
B	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	25.385.200.000	7.113.255.953	28.02
1	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	13.422.000.000	1.543.308.063	11.50
	02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65.000.000	48.344.400	74.38
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.100.000.000	0	0
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	1.192.000.000	138.693.000	11.64
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	950.000.000	0	0
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	950.000.000	0	0
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	950.000.000	0	0
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	950.000.000	139.588.164	14.69

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	950.000.000	7.444.000	0.78
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	950.000.000	0	0
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	1.275.000.000	30.919.730	2.43
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	950.000.000	363.018.969	38.21
	02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	950.000.000	287.374.000	30.25
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	440.000.000	55.069.000	12.52
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kemijen)	175.000.000	4.575.000	2.61
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejomulyo)	175.000.000	26.860.550	15.35
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatibaru)	175.000.000	5.400.000	3.09
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mlatiharjo)	175.000.000	33.612.850	19.21
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kebonagung)	175.000.000	35.716.200	20.41
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bugangan)	175.000.000	45.819.350	26.18
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sarirejo)	175.000.000	34.694.250	19.83
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rejosari)	175.000.000	30.919.730	17.67
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangturi)	175.000.000	36.585.500	20.91
	02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangtempel)	175.000.000	35.639.100	20.37
2	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.963.200.000	5.569.947.890	46.56
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	16.665.000	12.16
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kemijen)	1.644.600.000	783.645.000	47.65
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Rejomulyo)	910.200.000	369.558.090	40.60
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mlatibaru)	1.308.600.000	604.636.000	46.20
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mlatiharjo)	894.600.000	419.005.700	46.84
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kebonagung)	640.800.000	308.554.300	48.15
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bugangan)	1.344.000.000	636.750.000	47.38
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sarirejo)	1.074.600.000	515.386.400	47.96
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Rejosari)	2.468.400.000	1.216.391.460	49.28
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangturi)	652.200.000	300.584.000	46.09
	03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangtempel)	838.200.000	398.321.940	47.52
	03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	450.000	0.90
C	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.000.000	5.220.000	14.91
	2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.000.000	5.220.000	14.91
	03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.000.000	5.220.000	14.91
D	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	88.300.000	27.750.000	31.43

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
		UMUM			
	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	88.300.000	27.750.000	31.43
	01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	88.300.000	27.750.000	31.43
E	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.143.439.769	6.717.981.878	51.11
1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.354.720	669.500	2.87
	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.437.800	204.500	8.39
	01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.702.950	0	0
	01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.261.150	0	0
	01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.702.950	0	0
	01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.261.150	0	0
	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.079.360	0	0
	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.909.360	465.000	24.35
2	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.910.469.851	6.278.726.068	57.55
	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.376.795.299	6.070.394.068	58.50
	02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	528.560.000	207.150.000	39.19
	02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.157.760	1.182.000	37.43
	02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.060.320	0	0
	02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	896.472	0	0
3	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	912.448.967	281.802.350	30.88
	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	6.848.700	85.61
	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	274.459.685	103.660.000	37.77
	06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.268.755	21.588.150	43.82
	06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.136.570	1.592.500	11.27
	06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.313.281	19.800.000	16.46
	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.930.474	6.926.500	3.79
	06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	263.340.202	121.386.500	46.09
4	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.467.640	36.285.900	96.85
	07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.467.640	36.285.900	96.85
5	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.980.321	56.235.310	10.45
	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.599.756	46.945.310	17.41
	08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.380.565	9.290.000	3.46
6	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.718.270	64.262.750	8.90
	09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.717.970	54.589.500	30.72
	09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	122.032.710	7.174.350	5.88

No	Kode Rekening	Nama Program/Kegiatan/SubKegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	323.898.860	2.498.900	0,77
	09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.068.730	0	0
JUMLAH			41.847.960.468	15.255.567.699	36,45

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah sebesar Rp. 41.634.104.531. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 15.255.567.699. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp. 26.378.536.832

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 2
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYE KSI 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,68 angka	87,50 angka	88,00 angka	88,35 angka	89,00 angka	90,00 angka	-	92,66 angka	92,54 angka				88,00 angka

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI				PROYEKSI 2023		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024		2025	2026
kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi														
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	63.89 angka	64.00 angka	65.00 angka	66.00 angka	67.00 angka	68.00 angka	-	70.96 angka	0 angka				65.00 angka
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	-	1 angka	1 angka				1 angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	-	100.00 %	50.00 %				100 %
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.00 %	45.00 %	50.00 %	55.00 %	58.00 %	60.00 %	-	64.00 %	30.00 %				50.00 %
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	0 %	20.00 %	40.00 %	60.00 %	80.00 %	100.00 %	-	20.00 %	0 %				40.00 %

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Timur tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, target sebesar 88 % dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 92,54 % (capaian sebesar 105,2 %).
- b. Sasaran **”Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki satu indikator kinerja yaitu **”NILAI AKIP”** belum dapat mencapai target sebesar 65, dengan realisasi sebesar 0 (capaian sebesar 0%) karena penilaian AKIP dilakukan pada triwulan III.
- c. Sasaran **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Kinerja Pelayanan Publik”** memiliki satu indikator kinerja yaitu **”Jumlah inovasi**

- “pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan”** target sebesar 1 angka sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 1 angka;
- d. Sasaran **“Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki satu indikator kinerja yaitu **“Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”** belum dapat mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 50% (capaian sebesar 50%).
 - e. Sasaran **“Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki dua indikator kinerja yaitu **Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”** belum dapat mencapai target sebesar 50%, dengan realisasi sebesar 30% (capaian sebesar 30%) dan indikator **“Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”** belum dapat mencapai target sebesar 40%, dengan realisasi sebesar 20% (capaian sebesar 20%).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Timur, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Timur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur pada tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai 50% pada Semester I / Triwulan II. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD dimana harus tercapai kesesuaian 100% pada akhir periode Tahun 2023 sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang sudah memperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini merupakan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Terdapat kasus kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Semarang Timur, walaupun dengan angka yang kecil tetapi perlu terus diupayakan

usaha untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan menyalurkan bantuan pangan.

- d. Masih adanya angka stunting yang terdapat di wilayah Kecamatan Semarang Timur. Isu tersebut terus diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami stunting.
- e. Dibeberapa wilayah Kecamatan Semarang Timur ada yang masih terdampak daerah banjir jika musim penghujan meskipun sarana dan prasarana seperti pompa pengendali banjir sudah ada tetapi masih belum dapat berfungsi secara maksimal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan kewilayahan diantaranya:

1. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif.
2. Belum optimalnya pengelolaan, penatausahaan, dan pemanfaatan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan;
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan, realisasi, dan evaluasi kinerja;
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat
5. Kurang optimalnya koordinasi, peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Semarang Timur agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan

Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya apa lagi saat ini terdapat Isu Nasional mengenai permasalahan Stunting, kemiskinan ekstrim, penanggulangan banjir dan peran Kecamatan dalam penuntasan masalah tersebut juga sangat penting.

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN KEWILAYAHAN				41.411.257.190	URUSAN KEWILAYAHAN				41,461,257,190
	KECAMATAN				27.745.373.877	KECAMATAN				41,461,257,190
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Timur	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	3.096.047.599	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Semarang Timur	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	3,059,498,659
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	45.503.120	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 Angka	43,888,150
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	45.503.120	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	43,888,150
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100.00 Persen	2.055.952.304	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	100.00 Persen	2,021,018,334

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	2.055.952.304	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,305,018,334
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Kemijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	75,000,000
		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69,000,000
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	12 Laporan			Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	73,000,000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Kecamatan					Wilayah Kecamatan		
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69,000,000
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Kebonagung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67,000,000
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Bugangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	73,000,000
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Sarirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	71,000,000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Rejosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	83,000,000
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Karangturi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67,000,000
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Karangtempel	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	69,000,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Timur	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	994.592.175	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Semarang Timur	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	994,592,175
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	994.592.175	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	994,592,175

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	24.496.026.278	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	24,604,040,748
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327.00 Kegiatan	12.763.609.856	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	327.00 Kegiatan	12,870,596,506
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 Lembaga	65.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	94 Lembaga	65,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	11.172.800.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	1,105,800,000
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			Kelurahan Kemijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1,192,000,000
		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950,000,000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit			Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950,000,000
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit			Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950,000,000
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit			Kelurahan Kebonagung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	950,000,000
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit			Kelurahan Bugangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950,000,000
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			Kelurahan Sarirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	950,000,000
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit			Kelurahan Rejosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1,275,000,000
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit			Kelurahan Karangturi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	950,000,000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			Kelurahan Karangtempel	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.525.809.856	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	646,087,256
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Kelurahan Kemijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	96,300,000
		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	102,463,850
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	109,675,300
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	96,662,900

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Kelurahan Kebonagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	95,656,420
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Kelurahan Bugangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	94,405,180
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Kelurahan Sarirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	98,060,230
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Kelurahan Rejosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	91,223,050
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Kelurahan Karangturi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	104,133,700
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Kelurahan Karangtempel	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	98,128,620
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan	8.00 Dokumen	11.732.416.422	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah jenis laporan lembaga	8.00 Dokumen	11,733,444,242

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Tingkat Kecamatan		yang seharusnya			Tingkat Kecamatan		kemasyarakatan yang seharusnya		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	11.682.416.422	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	116,953,492
		Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Kemijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	1,626,000,000
		Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Rejomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	885,436,150
		Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Mlatibaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	1,276,624,700
		Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Mlatiharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	875,637,100
		Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Kebonagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	622,843,580
		Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Bugangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	1,327,294,820
		Kelurahan Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga			Kelurahan Sarirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	1,054,239,770

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Diselenggarakan					yang Diselenggarakan		
		Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Rejosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	2,454,876,950
		Kelurahan Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Karangturi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	625,766,300
		Kelurahan Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Karangtempel	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	817,771,380
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	50.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	65.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	65.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35.00 angka	65.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35.00 angka	65.000.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	65.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	65.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	88.300.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92,200,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	88.300.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	92,200,000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	88.300.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200.00 kegiatan	92,200,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	13.665.883.313	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	13,640,517,783
		Kecamatan Semarang Timur	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%			Kecamatan Semarang Timur	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%	
		Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%			Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen pelaporan	2.00 Dokumen	14.034.720	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2.00 Dokumen	6,374,210

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 Dokumen	487.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 Dokumen	428,080
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	3.202.950	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1,494,080
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	2.761.150	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 Dokumen	1,487,970
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	3.182.950	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 Dokumen	831,380
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	2.741.150	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1,273,180

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
								SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	699.360	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	201,600
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	959.360	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	657,920
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	11.900.402.210	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	11,906,393,490
		Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 Dokumen			Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 Dokumen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	11.368.083.810	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	11,368,083,810
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	528.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	536,560,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	3.157.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	1 Laporan	1,247,760

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	300.320	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	300,320
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	300.320	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	201.600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	785.029.287	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	772,276,067
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.141.540	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11,431,340
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 Paket	209.431.420	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 Paket	209,431,420

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Disediakan					Disediakan		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.793.649	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	47,533,709
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	19.066.084	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	23,800,742
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	96.109.958	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	86,235,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	130.831.874	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	96,752,874
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	277.654.762	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	297,090,982
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	37.467.640	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	37,467,640
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	37.467.640	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	37,467,640

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	212.831.186	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	207,405,196
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	169.599.756	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	169,599,756
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	43.231.430			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	37,805,440
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	716.118.270	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Semarang Timur	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	710,601,180
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	177.717.970	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	177,717,970
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	116.432.710	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	110,915,620

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	323.898.860	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	323,898,860
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	98.068.730	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Semarang Timur	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	98,068,730

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023,

dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

- 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.

- 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.

- 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi”
dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yaitu:

- | | |
|------------------|--|
| SASARAN 1 | : Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah |
| Indikator | : Nilai AKIP |
| SASARAN 2 | : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik |
| Indikator | : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan |
| SASARAN 3 | : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan |
| Indikator | : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif |
| SASARAN 4 | : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan |
| Indikator | : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum |

- Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,00
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Angka	65,00
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik angka	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	50,00
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	40,00

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Timur memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Indeks Kepuasan Masyarakat**” dan indikator sasaran “**Nilai Kepuasan Masyarakat; Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan; Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif; Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan**”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, termasuk kasus stunting dan kemiskinan ekstrim.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SEMARANG TIMUR					41.634.104.531	41.752.229.531	41.411.257.190		
7.01	KECAMATAN					41.634.104.531	28.704.520.699	27.745.373.877		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	3.080.253.499	3.196.020.699	3.096.047.599		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1.00	1 angka	1 angka	70.607.920	68.250.120	45.503.120		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	4 Dokumen	4 Dokumen	70.607.920	68.250.120	45.503.120	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	2.005.048.104	2.123.173.104	2.055.952.304		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kemije	100.00	12 Laporan	12 Laporan	2.005.048.104	2.123.173.104	2.055.952.304	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00	100,00 persen	100,00 persen	1.004.597.475	1.004.597.475	994.592.175		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00	3 Laporan	3 Laporan	1.004.597.475	1.004.597.475	994.592.175	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98.00	98,00 persen	98,00 persen	25.385.200.000	25.385.200.000	24.496.026.278		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	391.00	391 kegiatan	327 kegiatan	13.422.000.000	13.422.000.000	12.763.609.856		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	391.00	94 Lembaga	94 Lembaga	65.000.000	65.000.000	65.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mlatiharjo	8.00	7 Unit	7 Unit	11.167.000.000	11.167.000.000	11.172.800.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rejomulyo	24.00	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	2.190.000.000	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	94.00	94 dokumen	8 dokumen	11.963.200.000	11.963.200.000	11.732.416.422		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4.00	4 Lembaga	4 Lembaga	11.913.200.000	11.913.200.000	11.682.416.422	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00	15,00 persen	15,00 persen	35.000.000	35.000.000	65.000.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang	35.00	35 angka	35 angka	35.000.000	35.000.000	65.000.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Ketertiban Umum	ditangani								
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	3.00	2 Laporan	4 Laporan	35.000.000	35.000.000	65.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00	92,00 persen	92,00 persen	88.300.000	88.300.000	88.300.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00	2 kegiatan	2 kegiatan	88.300.000	88.300.000	88.300.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00	200 Orang	200 Orang	88.300.000	88.300.000	88.300.000	APBD Kota Semarang	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00	100,00 %	100,00 %	13.045.351.032	13.047.708.832	13.665.883.313		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen pelaporan	10.00	10 dokumen	2 dokumen	25.058.043	23.354.720	14.034.720		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	2.00	3 Dokumen	3 Dokumen	4.141.123	2.437.800	487.800	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00	1 Dokumen	1 Dokumen	4.702.950	4.702.950	3.202.950	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00	1 Dokumen	1 Dokumen	4.261.150	4.261.150	2.761.150	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00	1 Dokumen	1 Dokumen	4.702.950	4.702.950	3.182.950	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	1 Dokumen	1 Dokumen	4.261.150	4.261.150	2.741.150	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00	1 Laporan	1 Laporan	1.079.360	1.079.360	699.360	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00	2 Laporan	2 Laporan	1.909.360	1.909.360	959.360	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00	100,00 persen	100,00 persen	10.877.152.083	10.877.152.083	11.900.402.210		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00	66 Orang/bulan	64 Orang/bulan	10.343.477.531	10.343.477.531	11.368.083.810	DAU APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00	12 Dokumen	12 Dokumen	528.560.000	528.560.000	528.560.000	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00	1 Laporan	1 Laporan	3.157.760	3.157.760	3.157.760	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1.00	1 Laporan	1 Laporan	1.060.320	1.060.320	300.320	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00	1 Dokumen	1 Dokumen	896.472	896.472	300.320	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100.00	100,00 persen	100,00 persen	851.408.680	850.035.798	785.029.287		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10.00	1 Paket	1 Paket	8.000.000	8.000.000	10.141.540	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3.00	5 Paket	5 Paket	301.500.395	274.459.685	209.431.420	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20.00	12 Paket	12 Paket	48.080.755	49.268.755	41.793.649	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4.00	10 Paket	10 Paket	12.966.770	14.136.570	19.066.084	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2040.00	12 Laporan	12 Laporan	118.609.958	120.313.281	96.109.958	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10.00	10 Laporan	10 Laporan	182.930.474	182.930.474	130.831.874	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	4.00	4 Dokumen	4 Dokumen	179.320.328	200.927.033	277.654.762	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00	100,00 persen	100,00 persen	37.467.640	37.467.640	37.467.640		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	3.00	28 Unit	28 Unit	37.467.640	37.467.640	37.467.640	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00	100,00 persen	100,00 persen	635.546.316	537.980.321	212.831.186		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00	12 Laporan	12 Laporan	269.599.756	269.599.756	169.599.756	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	7.00	7 Laporan	7 Laporan	365.946.560	268.380.565	43.231.430	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100.00	100,00 persen	100,00 persen	618.718.270	721.718.270	716.118.270		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	26.00	26 Unit	26 Unit	177.717.970	177.717.970	177.717.970	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2.00	2 Unit	2 Unit	122.032.710	122.032.710	116.432.710	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	3.00	3 Unit	3 Unit	220.898.860	323.898.860	323.898.860	APBD Kota Semarang	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	2.00	2 Unit	2 Unit	98.068.730	98.068.730	98.068.730	APBD Kota Semarang	
JUMLAH						41.634.104.531	41.752.229.531	41.411.257.190		

Sumber : Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, 2023

BAB V **P E N U T U P**

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

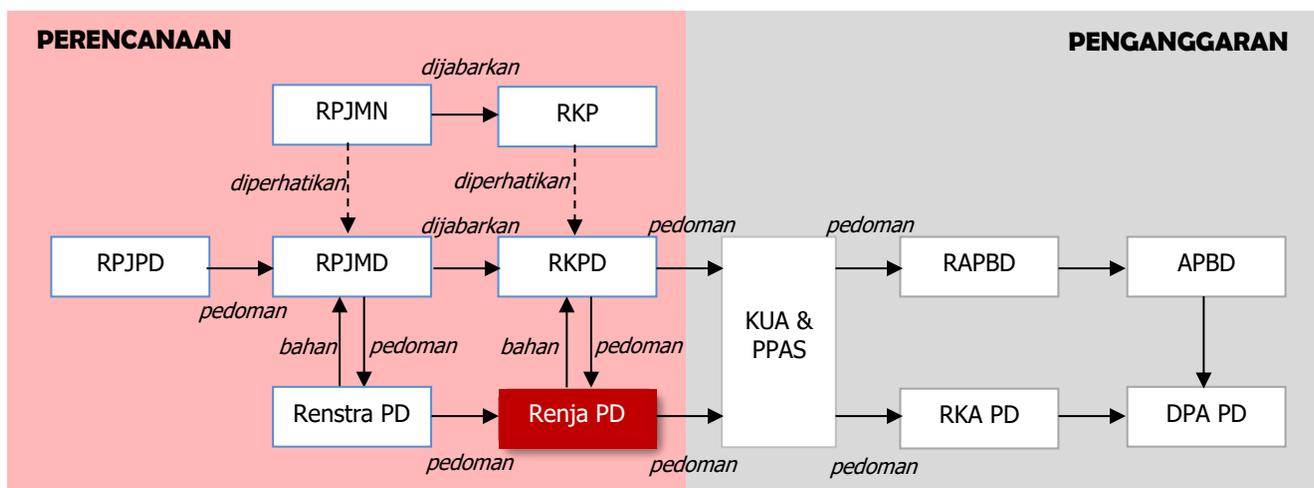
39. KECAMATAN SEMARANG TENGAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/ kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);

- p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- s. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN PENUNJANG KEWILAYAHAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%	92%	85%	85%	100%	92%	92%	96,8%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 angka	1 angka				1 angka	1 angka	50%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dok				4 dok	4 dok	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%				100%	100%	100%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan				2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	95%	92%				92%	92%	96,8%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827 kegiatan	827 kegiatan	827		827 kegiatan	827 kegiatan	100%	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	210 angka	220 angka	220		220 angka	220 angka	104%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10 kegiatan	9 kegiatan			9 kegiatan	9 kegiatan	90%	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13 kegiatan	13 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	13 kegiatan	13 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12 kegiatan	12 kegiatan	10%	10%	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	17 kegiatan	17 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	17 kegiatan	17 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13 kegiatan	13 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	13 kegiatan	13 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	9 kegiatan	9 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	9 kegiatan	9 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	9 kegiatan	9 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	9 kegiatan	9 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	12 kegiatan	12 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	15 kegiatan	15 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	100%	15 kegiatan	15 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18 kegiatan	18 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	18 kegiatan	18 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	12 kegiatan	12 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13 kegiatan	13 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	13 kegiatan	13 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	12 kegiatan	12 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	10 kegiatan	10 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	10 kegiatan	10 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28 kegiatan	28 kegiatan				28 kegiatan	28 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67 kegiatan	67 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	67 kegiatan	67 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	57 kegiatan	57 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	57 kegiatan	57 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	67 kegiatan	67 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	67 kegiatan	67 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66 kegiatan	66 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	66 kegiatan	66 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	64 kegiatan	64 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	100%	64 kegiatan	64 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61 kegiatan	61 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	61 kegiatan	61 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	71 kegiatan	71 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	71 kegiatan	71 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	68 kegiatan	68 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	68 kegiatan	68 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57 kegiatan	57 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	57 kegiatan	57 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57 kegiatan	57 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	57 kegiatan	57 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73 kegiatan	73 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	73 kegiatan	73 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	64 kegiatan	64 kegiatan	25 kegiatan	25 kegiatan	100%	64 kegiatan	64 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64 kegiatan	64 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	64 kegiatan	64 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	62 kegiatan	62 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	62 kegiatan	62 kegiatan	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	63 kegiatan	63 kegiatan	27 kegiatan	27 kegiatan	100%	63 kegiatan	63 kegiatan	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15	15				15	15	100
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15 dokumen	15 dok				15 dok	15 dok	100%
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	5 kelurahan	1 kelurahan			0	1 kelurahan	1 kelurahan	20%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	19%	12%	2%	2%	100%	12%	12%	63%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24%	34%				34%	34%	41,6%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	2 kegiatan				2 kegiatan	2 kegiatan	100%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60%	30%				30%	30%	50%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan				2 kegiatan	2 kegiatan	100%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 kegiatan	2 kegiatan				2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	20 dokumen	100%	20 dokumen	20 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen pelaporan	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	100%	14 dokumen	14 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	15 jenis	12 jenis	100%	100%	100%	12 jenis	12 jenis	80%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	2 jenis	100%	100%	100%	2 jenis	2 jenis	100%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45 jenis	45 jenis	100%	100%	100%	45 jenis	45 jenis	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7 jenis	5 jenis	100%	100%	100%	5 jenis	5 jenis	71,42%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	2500 orang	2500 orang				2500 orang	2500 orang	100%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40 kegiatan	40 kegiatan	100%	100%	100%	40 kegiatan	40 kegiatan	100%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2 jenis	2 jenis	100%	100%	100%	2 jenis	2 jenis	100%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 jenis	1 jenis				1 jenis	1 jenis	100%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%		100		100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	10 jenis	9 jenis	100%	100%	100%	9 jenis	9 jenis	90%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50 unit	50 unit	54 unit	54 unit	100%	50 unit	50 unit	100%
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	1 gedung	1 gedung	3 gedung	3 gedung	100%	1 gedung	1 gedung	100%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	2 jenis	2 jenis	100%	100%	100%	2 jenis	2 jenis	100%
		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 jenis	1 jenis	100%	100%	100%	1 jenis	1 jenis	100%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1 jenis	1 jenis	100%	100%	100%	1 jenis	1 jenis	100%

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan”.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD 2023	REALISASI s/d AGUSTUS TAHUN 2023	
			(SPJ)	
			Anggaran Rp	Persentase %
	7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH	51,803,076,903	29,741,472,978	57.48
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,697,342,300	2,271,292,533	61.43
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24,620,000	23,367,000	94.91
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24,620,000	23,367,000	94.91
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1,467,837,131	953,755,600	64.98
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,467,837,131	953,755,600	64.98
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	47,648,749	65.27
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN MIROTO)	73,000,000	47,648,749	65.27
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	30,411,901	41.66
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BRUMBUNGAN)	73,000,000	30,411,901	41.66
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	51,729,850	70.86
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan		51,729,850	70.86

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD 2023	REALISASI s/d AGUSTUS TAHUN 2023	
			(SPJ)	
			Anggaran	Persentase
			Rp	%
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN JAGALAN)	73,000,000		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	28,477,697	39.01
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KRANGGAN)	73,000,000	28,477,697	39.01
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	47,833,877	65.53
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GABAHAN)	73,000,000	47,833,877	65.53
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	38,507,869	52.75
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KEMBANGSARI)	73,000,000	38,507,869	52.75
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	29,346,578	40.20
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SEKAYU)	73,000,000	29,346,578	40.20
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	36,144,227	49.51
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PANDANSARI)	73,000,000	36,144,227	49.51
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	52,639,527	72.11
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BANGUNHARJO)	73,000,000	52,639,527	72.11
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	34,157,478	46.79
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KAUMAN)	73,000,000	34,157,478	46.79
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	31,794,540	43.55
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PURWODINATAN)	73,000,000	31,794,540	43.55
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	73,000,000	29,725,377	40.72

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD 2023	REALISASI s/d AGUSTUS TAHUN 2023	
			(SPJ)	
			Anggaran	Persentase
			Rp	%
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGKIDUL)	73,000,000	29,725,377	40.72
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	29,259,274	40.08
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PEKUNDEN)	73,000,000	29,259,274	40.08
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	31,517,821	43.18
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL)	73,000,000	31,517,821	43.18
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73,000,000	42,226,436	57.84
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PENDRIKAN LOR)	73,000,000	42,226,436	57.84
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,109,885,169	732,748,732	66.02
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,109,885,169	732,748,732	66.02
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29,972,191,217	14,263,984,377	47.59
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	29,796,615,796	14,204,038,027	47.67
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	57,900,000	10,820,750	18.69
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,150,000,000	368,019,944	32.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN MIROTO)	950,000,000	727,464,000	76.58
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BRUMBUNGAN)	950,000,000	10,264,000	1.08
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN JAGALAN)	950,000,000	14,108,000	1.49
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KRANGGAN)	950,000,000	122,562,518	12.90
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GABAHAN)	950,000,000	163,275,000	17.19
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KEMBANGSARI)	950,000,000	801,183,000	84.34
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SEKAYU)	950,000,000	393,745,000	41.45
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PANDANSARI)	950,000,000	565,039,359	59.48
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BANGUNHARJO)	950,000,000	109,041,868	11.48
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KAUMAN)	950,000,000	572,041,000	60.21
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PURWODINATAN)	950,000,000	329,418,957	34.68
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KARANGKIDUL)	950,000,000	616,813,985	64.93

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD 2023	REALISASI s/d AGUSTUS TAHUN 2023	
			(SPJ)	
			Anggaran	Persentase
			Rp	%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PEKUNDEN)	950,000,000	733,531,500	77.21
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL)	950,000,000	646,621,000	68.07
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN PENDRIKAN LOR)	950,000,000	182,254,000	19.18
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	791,615,796	580,844,900	73.37
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN MIROTO)	1,057,000,000	630,617,000	59.66
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BRUMBUNGAN)	943,600,000	547,378,671	58.01
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN JAGALAN)	1,081,000,000	646,918,825	59.84
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KRANGGAN)	861,400,000	445,805,000	51.75
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GABAHAN)	1,132,000,000	636,800,875	56.25
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KEMBANGSARI)	920,500,000	541,957,050	58.88
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SEKAYU)	674,200,000	323,226,000	47.94
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PANDANSARI)	729,400,000	377,508,500	51.76
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BANGUNHARJO)	756,400,000	397,943,700	52.61
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KAUMAN)	662,800,000	310,045,000	46.78
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PURWODINATAN)	956,200,000	497,182,475	52.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KARANGKIDUL)	823,000,000	414,934,800	50.42
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PEKUNDEN)	912,400,000	430,648,500	47.20
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL)	936,400,000	472,747,850	50.49
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PENDRIKAN LOR)	1,100,800,000	583,275,000	52.99
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	175,575,421	59,946,350	34.14
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	135,549,538	58,416,350	43.10
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	40,025,883	1,530,000	3.82
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22,500,000	13,800,000	61.33
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22,500,000	13,800,000	61.33
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22,500,000	13,800,000	61.33
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	82,455,000	53,050,000	64.34
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	82,455,000	53,050,000	64.34
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	82,455,000	53,050,000	64.34
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18,028,588,386	13,139,346,068	73.13

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD 2023	REALISASI s/d AGUSTUS TAHUN 2023	
			(SPJ)	
			Anggaran	Persentase
			Rp	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,740,000	20,921,375	47.83
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,380,000	6,377,550	99.96
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,400,000	2,250,000	41.67
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5,400,000	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,580,000	2,004,725	56.00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3,580,000	0	0.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,160,000	7,200,000	44.55
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,240,000	3,089,100	95.34
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,636,019,734	12,213,672,390	73.42
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15,892,729,734	11,752,142,890	73.95
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	733,620,000	454,120,000	61.90
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,660,000	3,659,500	99.99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,540,000	2,700,000	59.47
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,470,000	1,050,000	71.43
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380,685,527	191,200,425	50.23
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,500,000	7,495,000	99.93
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,777,020	19,175,000	96.96
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000	23,038,000	76.79
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,500,000	9,664,925	77.32
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110,000,000	58,170,500	52.88
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43,500,000	5,192,000	11.94
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	157,408,507	68,465,000	72.07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,421,458	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,421,458	0	0.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205,000,000	132,865,853	64.81
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140,000,000	81,916,853	58.51
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,000,000	50,949,000	78.38
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	753,721,667	580,686,025	77.04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	332,390,820	164,641,525	49.53
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,600,000	199,145,000	99.27
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89,991,595	87,438,500	97.16
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan		129,461,000	99.02

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD 2023	REALISASI s/d AGUSTUS TAHUN 2023	
			(SPJ)	
			Anggaran	Persentase
			Rp	%
	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130,739,252		
	JUMLAH	51,803,076,903	29,741,472,978	57.48

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 81 sub kegiatan pada Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang adalah sebesar Rp 51.803.076.903. Dari anggaran tersebut, sampai dengan bulan Agustus 2023 realisasinya adalah sebesar Rp 29.741.472.978. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 22.061.603.925.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah Semarang Sampai Dengan Tahun 2021 (Tujuan & sasaran lama)

Tujuan	Indikator	Target pada Akhir Renstra Tahun 2021	Capaian Kinerja			Capaian 2020
			Target 2021	Realisasi 2021	%	
Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat	87%	87%	87%	100	85%
Meningkatnya birokrasi kecamatan dan kelurahan yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75 Angka	75 angka	75 angka	100	75 angka

Sasaran	Indikator	Target pada Akhir Renstra Tahun 2021	Capaian Kinerja			Capaian 2020	
			Target 2021	Realisasi 2021	%		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	82,45%	82,45%	82,45%	100%	81,99%
2	Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja kecamatan	98%	98%	98%	100%	94,41%
		Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 (Tujuan dan Sasaran baru)

Tujuan	Indikator	Target pada Renstra Tahun 2022	Target pada Renstra Tahun 2023	Capaian Kinerja						
				Target 2022	Realisasi 2022	%	Target 2023	Realisasi 2023 (Tw II)	%	
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5 angka	88 angka	87,5 angka	87,5 angka	100	88 angka			
Sasaran	Indikator	Target pada Renstra Tahun 2022	Target pada Renstra Tahun 2023	Capaian Kinerja						
				Target 2022	Realisasi 2022	%	Target 2023	Realisasi 2023 (Tw II)	%	
1	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	68,5	69	68,5	75,61	110%	69	78,85	114%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	0	1	1	1	100%	1	1	100%
3	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	84%	86%	84%	84%	100%	86%	46%	53%

	kelurahan									
4	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7%	12%	7%	7%	100%	12%	6%	50%
		Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	20%	30%	20%	20%	100%	30%		

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Semarang Tengah tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Tingkat partisipasi masyarakat”, telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 87% dari target sebesar 87%;
- b. Tujuan “Meningkatnya birokrasi kecamatan dan kelurahan yang bersih dan melayani” memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, telah sesuai target, dimana realisasinya sebesar 75 angka dari target sebesar 75 angka;
- c. Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan telah sesuai dengan target dimana realisasinya 82,45% dari target sebesar 82,45%.
- d. Sasaran 2 “Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase capaian kinerja kecamatan” telah sesuai dengan target, dimana realisasinya sebesar 98% dari target sebesar 98% (capaian sebesar 100%);
 - 2) Indikator “Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik” telah sesuai dengan target sebesar 100,00%, dengan realisasi sebesar 100% (capaian sebesar 100%);

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Semarang Tengah sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa indikator yang masih dibawah target seperti jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak di kantor Kecamatan dan Kelurahan. Hal ini disebabkan makin luas dan mudahnya akses untuk melakukan pembayaran PBB seperti melalui internet banking, aplikasi online (Tokopedia, OVO, dll).
- b. Indikator jumlah kegiatan Lembaga masyarakat aktif dan persentase kehadiran RT dalam Musrenbang juga masih dibawah target. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 masih terjadi pandemic covid 19 sehingga terjadi pembatasan kegiatan dan jumlah orang yang hadir dalam kegiatan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya:

- a. Kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam menjaga kerapian dan kebersihan wilayahnya;
- b. Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
- c. Masih terdapat PKL yang berada di trotoar maupun badan jalan;
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
- e. Kurangnya kompetensi pegawai kecamatan maupun kelurahan dalam menjalankan tugasnya. Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Begitu pula dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Satu orang pegawai bisa menangani beberapa pekerjaan yang tidak masuk dalam tupoksinya dikarenakan tidak adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang khususnya di tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan:

- Menjaga kebersihan wilayah merupakan tantangan tersendiri. Perlu adanya sinergitas antara pemangku wilayah dan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan wilayah;
- Masih tingginya angka stunting di wilayah Kecamatan Semarang Tengah
- Perlu adanya sinergitas antara Kecamatan dengan OPD teknis terkait (Satpol PP) dalam penertiban PKL ditrotoar maupun badan jalan;
- Masih perlu peningkatkan kompetensi aparatur di Kecamatan dan Kelurahan

b. Peluang:

- Merupakan wilayah pusat kota. Banyak terdapat fasilitas-fasilitas wisata seperti hotel, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh. Jika kebersihan dijaga dengan baik maka dapat menarik wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu lebih lama di Kota Semarang;
- PKL yang ditata dengan baik berpeluang menjadi tujuan wisata kuliner baru.
- Adanya diklat-diklat yang diadakan oleh BKPP dapat meningkatkan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Semarang Tengah, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis

- a. Kecamatan Semarang Tengah sebagai wilayah perkotaan dengan fungsi campuran (*mix used*) perlu diperhatikan penataan dan kebersihan wilayahnya sehingga dapat menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama;
- b. Peningkatan kompetensi pegawai kecamatan dan kelurahan perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Peningkatan pelayanan dan derajat Kesehatan masyarakat meliputi kesiapan dalam penanganan wabah maupun penyakit menular dan tidak menular, penanganan penyakit degeneratif dan yang dipengaruhi kondisi lingkungan, kondisi ibu dan anak serta promosi Kesehatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.00.00.05	KECAMATAN SEMARANG TENGAH					53.385.746.578	KECAMATAN SEMARANG TENGAH					53.385.746.578	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00.00	persen	3.694.902.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92.00.00	persen	3.694.902.300	-
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	01.00	Angka	24.620.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	01.00	Angka	24.620.000	-
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					24.620.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					24.620.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00	Dokumen	24.620.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	04.00	Dokumen	24.620.000	-
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00.00	persen	2.562.837.131	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00.00	persen	2.562.837.131	

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Kecamatan						
7.01. 02.2. 02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1.467.837.131	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1.467.837.131	-
		KELURAHAN MIROTO	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mirototo	100.00.00	persen	73.000.000		KELURAHAN MIROTO	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mirototo	100.00.00	persen	73.000.000	-
		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100.00.00	persen	73.000.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	100.00.00	persen	73.000.000	-
		KELURAHAN JAGALAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN JAGALAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN KRANGGAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN KRANGGAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN KEMBANGSARI	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN KEMBANGSARI	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100.00.00	Persen	73.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
									Kembanghari				
		KELURAHAN GABAHAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN GABAHAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN PANDAN SARI	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN PANDAN SARI	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN BANGU NHARJO	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN BANGU NHARJO	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN SEKAYU	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN SEKAYU	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN KARANG KIDUL	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN KARANG KIDUL	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN PURWODINATAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN PURWODINATAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	100.00.00	Persen	73.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PEKUNDEN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN PEKUNDEN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN KAUMAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN KAUMAN	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100.00.00	Persen	73.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	100.00.00	Persen	73.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00.00	persen	-		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100.00.00	persen	-	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	02.00	Kegiatan	0		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	02.00	Kegiatan	0	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00.00	Persen	1.107.445.169	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00.00	Persen	1.107.445.169	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		kan kepada Camat						kan kepada Camat					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1.107.445.169	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1.107.445.169	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	02.00	Kegiatan	1.107.445.169		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	02.00	Kegiatan	1.107.445.169	-
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	92.00.00	Persen	28.684.684.740	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	92.00.00	Persen	28.684.684.740	-
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggara kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00.00	kegiatan	28.525.313.792	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggara kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	827.00.00	kegiatan	28.525.313.792	-
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					16.558.050	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					16.558.050	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	220.00.00	angka	16.558.050		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	220.00.00	angka	16.558.050	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					15.210.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					15.210.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	09.00	kegiatan	960.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	09.00	kegiatan	960.000.000	-
		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13.00	kegiatan	950.000.000		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	13.00	kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12.00	kegiatan	950.000.000		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	12.00	kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	17.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	17.00	Kegiatan	950.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13.00	kegiatan	950.000.000		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	13.00	kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	10.00	kegiatan	950.000.000		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	10.00	kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	09.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	09.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN PANDAN SARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	09.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN PANDAN SARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	09.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN BANGU NHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	12.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN BANGU NHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	12.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	15.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	15.00	Kegiatan	950.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kelurahan Kauman						Kelurahan Kauman				
		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	18.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	12.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	12.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	13.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN KARANG KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	12.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN KARANG KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	12.00	Kegiatan	950.000.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10.00	Kegiatan	950.000.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kelurahan Pendrikan Lor						Kelurahan Pendrikan Lor				
		KELURAHAN KEMBA NGSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	10.00	Kegiatan	950.000.000		KELURAHAN KEMBA NGSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	10.00	Kegiatan	950.000.000	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					13.298.755.742	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					13.298.755.742	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28.00.00	Kegiatan	835.907.283		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	28.00.00	Kegiatan	835.907.283	-
		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67.00.00	Kegiatan	964.915.512		KELURAHAN MIROTO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	67.00.00	Kegiatan	964.915.512	-
		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	57.00.00	Kegiatan	1.008.998.083		KELURAHAN JAGALAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	57.00.00	Kegiatan	1.008.998.083	-
		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	67.00.00	Kegiatan	874.337.519		KELURAHAN BRUMBUNGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	67.00.00	Kegiatan	874.337.519	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kelurahan Brumbungan						Kelurahan Brumbungan				
		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66.00.00	Kegiatan	790.777.250		KELURAHAN KRANGGAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	66.00.00	Kegiatan	790.777.250	-
		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	64.00.00	Kegiatan	660.113.830		KELURAHAN PANDANSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	64.00.00	Kegiatan	660.113.830	-
		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61.00.00	Kegiatan	1.053.121.928		KELURAHAN GABAHAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	61.00.00	Kegiatan	1.053.121.928	-
		KELURAHAN KEMBAINGSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	71.00.00	Kegiatan	851.160.848		KELURAHAN KEMBAINGSARI	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	71.00.00	Kegiatan	851.160.848	-
		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	68.00.00	Kegiatan	597.353.227		KELURAHAN SEKAYU	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	68.00.00	Kegiatan	597.353.227	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN BANGU NHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57.00.00	Kegiatan	686.238.210		KELURAHAN BANGU NHARJO	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	57.00.00	Kegiatan	686.238.210	-
		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57.00.00	Kegiatan	593.706.078		KELURAHAN KAUMAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	57.00.00	Kegiatan	593.706.078	-
		KELURAHAN KARANG KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73.00.00	Kegiatan	754.000.000		KELURAHAN KARANG KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	73.00.00	Kegiatan	754.000.000	-
		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	64.00.00	Kegiatan	885.615.444		KELURAHAN PURWODINATAN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	64.00.00	Kegiatan	885.615.444	-
		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64.00.00	Kegiatan	843.400.000		KELURAHAN PEKUNDEN	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	64.00.00	Kegiatan	843.400.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	62.00.00	Kegiatan	1.031.800.000		KELURAHAN PENDRIKAN LOR	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	62.00.00	Kegiatan	1.031.800.000	-
		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	63.00.00	Kegiatan	867.310.530		KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	63.00.00	Kegiatan	867.310.530	-
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya laporan lembaga kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00	dokumen	159.370.948	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tersedianya laporan lembaga kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	15.00	dokumen	159.370.948	-
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					128.813.348	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					128.813.348	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15.00	dokumen	128.813.348		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	15.00	dokumen	128.813.348	-
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					30.557.600	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					30.557.600	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	02.00	kegiatan	30.557.600		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	02.00	kegiatan	30.557.600	-
		KECAMATAN SEMARA	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	01.00	kelurahan	0		KECAMATAN SEMAR	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di	01.00	kelurahan	0	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		NG TENGAH						ANG TENGAH	Kecamatan				
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.00	Persen	22.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.00	Persen	22.500.000	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penurunan angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	34.00.00	angka	22.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya penurunan angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	34.00.00	angka	22.500.000	-
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					22.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					22.500.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	02.00	Kegiatan	22.500.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	02.00	Kegiatan	22.500.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.00.00	persen	82.455.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30.00.00	persen	82.455.000	-
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	02.00	kegiatan	82.455.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	02.00	kegiatan	82.455.000	-
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan					82.455.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)					82.455.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	02.00	Kegiatan	82.455.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	02.00	Kegiatan	82.455.000	-
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00.00	%	20.901.204.538	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00.00	%	20.901.204.538	-
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00.00	%				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100.00.00	%		-
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00.00	%				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100.00.00	%		-
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Kec Smg Tgh	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00	dokumen	43.740.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Kec Smg Tgh	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	20.00	dokumen	43.740.000	-
			Jumlah Dokumen pelaporan	14.00	dokumen				Jumlah Dokumen pelaporan	14.00	dokumen		-
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.380.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6.380.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	02.00	dokumen	6.380.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	02.00	dokumen	6.380.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	01.00	dokumen	0		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	01.00	dokumen	0	-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.400.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen RKA SKPD	01.00	dokumen	5.400.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen RKA SKPD	01.00	dokumen	5.400.000	-
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					5.400.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	01.00	dokumen	5.400.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	01.00	dokumen	5.400.000	-
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					3.580.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					3.580.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen DPA SKPD	01.00	dokumen	3.580.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen DPA SKPD	01.00	dokumen	3.580.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					3.580.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					3.580.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00	dokumen	3.580.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	01.00	dokumen	3.580.000	-
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					16.160.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					16.160.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	berkas	16.160.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	berkas	16.160.000	-
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.240.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3.240.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	02.00	Dokumen	3.240.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	02.00	Dokumen	3.240.000	-
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan dan terselenggaranya	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00	dokumen	18.558.463.888	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan dan terselenggaranya	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	08.00	dokumen	18.558.463.888	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		administrasi keuangan skpd Kec. Smg Tgh						administrasi keuangan skpd Kec. Smg Tgh					
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00.00	persen				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00.00	persen		-
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.815.173.888	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.815.173.888	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00.00	persen	17.815.173.888		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100.00.00	persen	17.815.173.888	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					733.620.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					733.620.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00.00	persen	733.620.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100.00.00	persen	733.620.000	-
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.660.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					3.660.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	01.00	dokumen	3.660.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	01.00	dokumen	3.660.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX. 01.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4.540.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					4.540.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	06.00	dokumen	4.540.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	06.00	dokumen	4.540.000	-
X.XX. 01.2. 02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.470.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.470.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	01.00	dokumen	1.470.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	01.00	dokumen	1.470.000	-
X.XX. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum di kecamatan dan kelurahan se kecamatan Semarang Tengah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00.00	persen	815.414.707	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi umum di kecamatan dan kelurahan se kecamatan Semarang Tengah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	100.00.00	persen	815.414.707	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX. 01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					15.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00	jenis	15.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12.00	jenis	15.000.000	-
X.XX. 01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					381.277.979	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					381.277.979	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	02.00	Jenis	381.277.979		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	02.00	Jenis	381.277.979	-
X.XX. 01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					34.588.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					34.588.300	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45.00.00	Jenis	34.588.300		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	45.00.00	Jenis	34.588.300	-
X.XX. 01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					14.926.780	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					14.926.780	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	05.00	Jenis	14.926.780		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	05.00	Jenis	14.926.780	-
X.XX. 01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu					125.675.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu					125.675.000	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00.00	orang	125.675.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah tamu yang berkunjung	2500.00.00	orang	125.675.000	-
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					43.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					43.500.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40.00.00	Kegiatan	43.500.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	40.00.00	Kegiatan	43.500.000	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					200.446.648	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					200.446.648	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	02.00	jenis	200.446.648		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	02.00	jenis	200.446.648	-
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00.00	persen	6.650.276	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00.00	persen	6.650.276	-
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.650.276	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					6.650.276	-
		KECAMATAN SEMARANG	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	01.00	jenis	6.650.276		KECAMATAN SEMARANG	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	01.00	jenis	6.650.276	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
		TENGAH						TENGAH					
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa kantor	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00.00	persen	246.421.770	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa kantor	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00.00	persen	246.421.770	-
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					170.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					170.000.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00.00	persen	170.000.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.00.00	persen	170.000.000	-
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					76.421.770	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					76.421.770	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	09.00	jenis	76.421.770		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	09.00	jenis	76.421.770	-
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan aset SKPD	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00.00	persen	1.230.513.897	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan aset SKPD	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100.00.00	persen	1.230.513.897	-
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					332.390.820	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional					332.390.820	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
							atau Lapangan						
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.00.00	unit	332.390.820		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.00.00	unit	332.390.820	-
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					640.996.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					640.996.000	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	01.00	gedung	640.996.000		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	01.00	gedung	640.996.000	-
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					89.991.595	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					89.991.595	-
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	02.00	jenis	89.991.595		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	02.00	jenis	89.991.595	-
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					167.135.482	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan					167.135.482	-

No	Rancangan Awal RKPD 2023						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Satuan	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Lainnya						
		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	01.00	Jenis	167.135.482		KECAMATAN SEMARANG TENGAH	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	01.00	Jenis	167.135.482	-

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023,

dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:

- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”
dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran dan indikator **sasaran Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang sebagai berikut:**

- SASARAN 1 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
Indikator : Nilai AKIP
- SASARAN 2 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
Indikator : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
- SASARAN 3 : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
Indikator : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
- SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88
SASARAN: Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	69
SASARAN: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
SASARAN: Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	86
SASARAN: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	12
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	30

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Semarang Tengah memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN SEMARANG TENGAH				53.385.746.578	APBD Kota Semarang		50.587.221.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)		92	3.694.902.300	APBD Kota Semarang	94	4.304.912.000	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan		1	24.620.000	APBD Kota Semarang	0	25.300.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	4	24.620.000	APBD Kota Semarang	4	25.300.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100	2.562.837.131	APBD Kota Semarang	100	3.081.212.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1.467.837.131			3.081.212.000	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Miroto	KELURAHAN MIROTO	100	73.000.000	APBD Kota Semarang	100		
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Brumbungan	KELURAHAN BRUMBUNGAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang	100		
		Persentase operasional Pelayanan dan	KELURAHAN JAGALAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang	100		

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jagalan							
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kranggan	KELURAHAN KRANGGAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kembang Sari	KELURAHAN KEMBANGSARI	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gabahan	KELURAHAN GABAHAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandansari	KELURAHAN PANDANSARI	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bangunharjo	KELURAHAN BANGUNHARJO	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekayu	KELURAHAN SEKAYU	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangkidul	KELURAHAN KARANGKIDUL	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwodinatan	KELURAHAN PURWODINATAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pekunden	KELURAHAN PEKUNDEN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Kidul	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	100	73.000.000	APBD Kota Semarang		100	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kauman	KELURAHAN KAUMAN	100	73.000.000	APBD Kota Semarang	100		
		Persentase operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pendrikan Lor	KELURAHAN PENDRIKAN LOR	100	73.000.000	APBD Kota Semarang	100		
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	100	0	APBD Kota Semarang	100		
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2	0		2		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	1.107.445.169	APBD Kota Semarang	100	1.198.400.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1.107.445.169	APBD Kota Semarang		1.198.400.000	
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2	1.107.445.169	APBD Kota Semarang	2	1.198.400.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		92	28.684.684.740	APBD Kota Semarang	93	28.812.787.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan	827	28.525.313.792	APBD Kota Semarang	827	28.812.787.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				16.558.050	APBD Kota Semarang		83.187.000	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	220	16.558.050	APBD Kota Semarang	220	83.187.000	
					16.558.050			16.718.220.000	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	9	960.000.000	APBD Kota Semarang	9		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	KELURAHAN MIROTO	13	950.000.000	APBD Kota Semarang	13		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	KELURAHAN BRUMBUNGAN	12	950.000.000	APBD Kota Semarang	12		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	KELURAHAN GABAHAN	17	950.000.000	APBD Kota Semarang	17		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	KELURAHAN KRANGGAN	13	950.000.000	APBD Kota Semarang	13		

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Kelurahan Kranggan							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	KELURAHAN JAGALAN	10	950.000.000	APBD Kota Semarang		10	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	KELURAHAN SEKAYU	9	950.000.000	APBD Kota Semarang		9	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	KELURAHAN PANDANSARI	9	950.000.000	APBD Kota Semarang		9	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	KELURAHAN BANGUNHARJO	12	950.000.000	APBD Kota Semarang		12	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	KELURAHAN KAUMAN	15	950.000.000	APBD Kota Semarang		15	
		Prioritas Hasil Musyawarah	KELURAHAN PURWODINATAN	18	950.000.000	APBD Kota Semarang		18	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik							
		Prioritas Hasil Musyawarah							
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	KELURAHAN PEKUNDEN	12	950.000.000	APBD Kota Semarang	12		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik							
		Prioritas Hasil Musyawarah							
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	13	950.000.000	APBD Kota Semarang	13		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik							
		Prioritas Hasil Musyawarah							
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	KELURAHAN KARANGKIDUL	12	950.000.000	APBD Kota Semarang	12		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik							
		Prioritas Hasil Musyawarah							
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Lor	KELURAHAN PENDRIKAN LOR	10	950.000.000	APBD Kota Semarang	10		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik							
		Prioritas Hasil Musyawarah							
		Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	KELURAHAN KEMBANGSARI	10	950.000.000	APBD Kota Semarang	10		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13.298.755.742				11.802.380.000

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	28	835.907.283	APBD Kota Semarang		28	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Miroto	KELURAHAN MIROTO	67	964.915.512	APBD Kota Semarang		67	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jagalan	KELURAHAN JAGALAN	57	1.008.998.083	APBD Kota Semarang		57	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Brumbungan	KELURAHAN BRUMBUNGAN	67	874.337.519	APBD Kota Semarang		67	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kranggan	KELURAHAN KRANGGAN	66	790.777.250	APBD Kota Semarang		66	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandansari	KELURAHAN PANDANSARI	64	660.113.830	APBD Kota Semarang		64	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gabahan	KELURAHAN GABAHAN	61	1.053.121.928	APBD Kota Semarang		61	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kembang Sari	KELURAHAN KEMBANGSARI	71	851.160.848	APBD Kota Semarang		71	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sekayu	KELURAHAN SEKAYU	68	597.353.227	APBD Kota Semarang		68	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bangunharjo	KELURAHAN BANGUNHARJO	57	686.238.210	APBD Kota Semarang		57	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kauman	KELURAHAN KAUMAN	57	593.706.078	APBD Kota Semarang		57	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangkidul	KELURAHAN KARANGKIDUL	73	754.000.000	APBD Kota Semarang		73	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwodinatan	KELURAHAN PURWODINATAN	64	885.615.444	APBD Kota Semarang		64	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekunden	KELURAHAN PEKUNDEN	64	843.400.000	APBD Kota Semarang		64	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan pendrikan Lor	KELURAHAN PENDRIKAN LOR	62	1.031.800.000	APBD Kota Semarang		62	
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pendrikan Kidul	KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL	63	867.310.530	APBD Kota Semarang		63	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Tersedianya laporan lembaga kemasyarakatan	15	159.370.948				209.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				128.813.348	APBD Kota Semarang			
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	15	128.813.348			15	134.000.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				30.557.600	APBD Kota Semarang			

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2	30.557.600	APBD Kota Semarang	2	75.000.000	
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1	0		1		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum		12%	22.500.000	APBD Kota Semarang	14%	30.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Terwujudnya penurunan angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	34 angka	22.500.000	APBD Kota Semarang	30 angka	30.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				22.500.000	APBD Kota Semarang		30.000.000	
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 kegiatan	22.500.000	APBD Kota Semarang	2 kegiatan	30.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		30%	82.455.000	APBD Kota Semarang	40%	30.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	82.455.000	APBD Kota Semarang	2 kegiatan	30.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2	82.455.000	APBD Kota Semarang	2 kegiatan	30.000.000	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100	20.901.204.538	APBD Kota Semarang	100%	17.409.522.000	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD		100		APBD Kota Semarang	100%		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD		100		APBD Kota Semarang	100%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Kec Smg Tgh	20 dokumen	43.740.000	APBD Kota Semarang	20 dokumen	44.000.000	
		Jumlah Dokumen pelaporan		14					

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.380.000	APBD Kota Semarang		10.000.000	
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan renstra yang disusun	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 dokumen	6.380.000	APBD Kota Semarang	2 dokumen	10.000.000	
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 dokumen	0	APBD Kota Semarang	1 dokumen		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.400.000	APBD Kota Semarang		7.500.000	
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 dokumen	5.400.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.400.000	APBD Kota Semarang		7.500.000	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 dokumen	5.400.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	7.500.000	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.580.000				
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 dokumen	3.580.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	6.000.000	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				3.580.000				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 dokumen	3.580.000	APBD Kota Semarang	1 dokumen	6.000.000	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16.160.000				
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	12 dokumen	16.160.000	APBD Kota Semarang	12 dokumen	1.000.000	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat				3.240.000				

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 dokumen	3.240.000	APBD Kota Semarang	2 dokumen	6.000.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan dan terselenggaranya administrasi keuangan skpd Kec. Smg Tgh	8 dokumen	18.558.463.888	APBD Kota Semarang	8 dokumen	16.110.522.000	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD		100%			100%		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.815.173.888			15.294.304.707	
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	100%	17.815.173.888	APBD Kota Semarang	100%		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				733.620.000				
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	100%	733.620.000	APBD Kota Semarang	100%	810.217.293	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.660.000			3.500.000	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 laporan	3.660.000	APBD Kota Semarang	1 laporan		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4.540.000			1.500.000	
		Jumlah Laporan Keuangan bulanan, triwulan dan Semester	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	6 laporan	4.540.000	APBD Kota Semarang	6 laporan		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.470.000				

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 laporan	1.470.000	APBD Kota Semarang	1 laporan	1.000.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum	Terselenggaranya administrasi umum di kecamatan dan kelurahan se kecamatan Semarang Tengah	100%	815.414.707	APBD Kota Semarang	100%	402.500.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	12 jenis	15.000.000	APBD Kota Semarang	12 jenis	10.000.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 jenis	381.277.979	APBD Kota Semarang	2 jenis	35.000.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	45 jenis	34.588.300	APBD Kota Semarang	45 jenis	25.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	5 jenis	14.926.780	APBD Kota Semarang	5 jenis	12.500.000	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2500 orang	125.675.000	APBD Kota Semarang	2500 orang	100.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	40 kegiatan	43.500.000	APBD Kota Semarang	40 kegiatan	120.000.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 jenis	200.446.648	APBD Kota Semarang	2 jenis	100.000.000	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	6.650.276		100%		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 jenis	6.650.276	APBD Kota Semarang	2 jenis	100.000.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Tersedianya jasa kantor	100%	246.421.770		100%	220.000.000	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	100%	170.000.000	APBD Kota Semarang	100%	120.000.000	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	9 jenis	76.421.770	APBD Kota Semarang	10 jenis	100.000.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	Terwujudnya pemeliharaan asset SKPD	100%	1.230.513.897		100%	532.500.000	

Kode Rekening	Urusan/Program/Keg/SubKeg	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
				Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	50 unit	332.390.820	APBD Kota Semarang	50 unit	350.000.000	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 gedung	640.996.000	APBD Kota Semarang	1 gedung	75.000.000	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	2 jenis	89.991.595	APBD Kota Semarang	2 jenis	57.500.000	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	1 jenis	167.135.482	APBD Kota Semarang	1 jenis	145.000.000	

Sumber : Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, 2023

BAB V **P E N U T U P**

Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

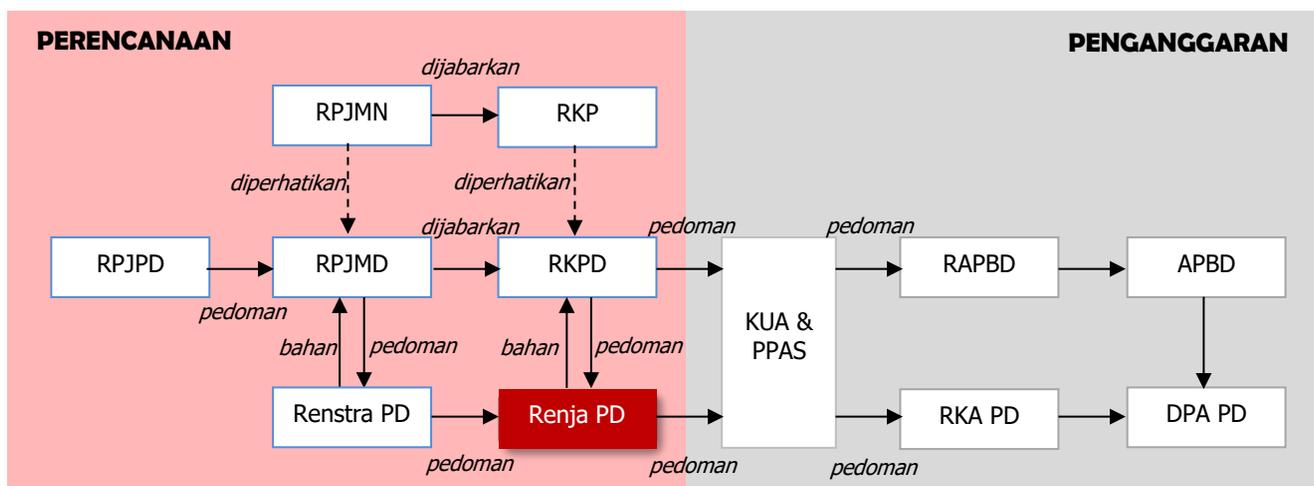
40. KECAMATAN GUNUNGPATI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023 serta (4) Persiapan pemilu serentak di Tahun 2024.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

- Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 - v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).
 - w. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026;
 - x. Keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 900/44 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungpati Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya

melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN : KEWILAYAHAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	38%	38%	38%	38%
		- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		- Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	35%	35%	35%	35%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	33,33%	2 Dokumen	33,33%
		- Dokumen pelaporan	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	100,00%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- dokumen rencana kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 dokumen				0 Dokumen	0,00%
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				1 dokumen	100,00%
		- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			1 dokumen	1 dokumen	100,00%		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				0 Dokumen	0,00%
		- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				1 Dokumen	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				0 Dokumen	0,00%
		- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				0 Laporan	0,00%
		- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	0 Laporan	0,00%		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				1 Laporan	100,00%
		- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	1 Dokumen	33,33%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			117 orang/bulan	117 orang/bulan	100,00%		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- persentase jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	6 dokumen	50,00%		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 dokumen				1 laporan	100,00%
		- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	1 laporan	100,00%		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 dokumen				0 Laporan	0,00%
		- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	0 Laporan	0,00%		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 dokumen				0 dokumen	0,00%
		- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 dokumen	0 dokumen	0,00%		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	6 Bulan	50,00%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	16 Jenis				10 jenis	50,00%
		- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	1 paket	100,00%		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Jenis	30 jenis				10 Jenis	33,33%
		- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3 paket	2 paket	66,67%		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2500 Jenis	1036 jenis				1071 Jenis	42,84%
		- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7 paket	3 paket	42,86%		42,86%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 jenis				3 Paket	60,00%
		- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			6 paket	4 paket	66,67%		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- jumlah tamu yang berkunjung		1095 orang				16500	50,00%
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	6 laporan	50,00%		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	25 Kegiatan	25 kegiatan				13 Kegiatan	52,00%
		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	10 Jenis	6 jenis				10 Jenis	100,00%
		- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2 dokumen	2 dokumen	100,00%		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- tersedianya peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	2 jenis				2 Jenis	50,00%
		- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 unit	1 unit	50,00%		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 bulan				6 Bulan	50,00%
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	6 laporan	50,00%		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	15 Jenis	6 jenis				4 Jenis	26,67%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			6 Laporan	4 Laporan	66,67%		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	55 Unit	38 unit				38 unit	69,09%
		- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			38 unit	38 unit	100,00%		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	3 gedung				1 Gedung	33,33%
		- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 unit	1 unit	100,00%		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	3 jenis				1 Unit	20,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	1 unit	100,00%		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	5 Jenis	5 jenis				0%	0,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	0 unit	100,00%		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%	91%	92%	94,63%	102,86%	94,63%	102,86%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	3 Angka	2 Angka	2 Angka	1 Angka	50 %	1 Angka	50 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- jumlah dokumen monitoring evaluasi	2 Dokumen	2 dokumen				1 Dokumen	50,00%
		- Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan		2 Kegiatan				0%	0,00%
		- persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sukorejo	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SUKOREJO)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sadeng	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SADENG)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kandri	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan ((KELURAHAN KANDRI)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sekaran	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SEKARAN)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pongangan	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PONGANGAN)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KALISEGORO)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatirejo	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		(KELURAHAN JATIREJO)							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngijo		100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN NGIJO)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Patemon	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PATEMON)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Nongkosawit	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN NONGKOSAWIT)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cepoko	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (CEPOKO)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gunungpati	100%	100%				50%	50,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN GUNUNGPATI)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Keluahan Mangunsari	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MANGUNSARI)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pakintelan	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PAKINTELAN)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plalangan	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN PLALANGAN)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sumurejo	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SUMURREJO)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	49%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	3 kegiatan				2 Kegiatan	66,67%
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3 laporan	2 laporan	66,67%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	98,00%	50,00%	51,02%	50,00%	50,00%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200 Kegiatan	100%	192 Kegiatan	112 Kegiatan	58,33%	112 Kegiatan	58,33%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	200 Kegiatan	192 kegiatan				192 Kegiatan	100,00%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	14 Kegiatan	14 kegiatan				6 Kegiatan	85,71%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			7 Unit	6 Unit	85,71%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	15 Kegiatan	11 kegiatan				4 kegiatan	28,57%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SUKOREJO)			14 unit	4 unit	28,57%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	8 Kegiatan	8 kegiatan				8 kegiatan	53,33%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SADENG)			15 unit	8 unit	53,33%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15 Kegiatan	9 kegiatan				4 kegiatan	26,67%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN KANDRI)			15 unit	4 unit	26,67%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	14 Kegiatan	10 kegiatan				5 kegiatan	35,71%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SEKARAN)			14 unit	5 unit	35,71%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	11 Kegiatan	8 kegiatan				4 kegiatan	28,57%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN PONGANGAN)			14 unit	4 unit	28,57%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	12 Kegiatan	9 kegiatan				1 kegiatan	8,33%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN KALISEGORO)			12 unit	1 unit	8,33%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	12 Kegiatan	9 kegiatan				9 kegiatan	90,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN JATIREJO)			10 unit	9 unit	90,00%		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	8 Kegiatan	7 kegiatan				8 kegiatan	100,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN NGIJO)			8 unit	8 unit	100,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	19 Kegiatan	11 kegiatan				9 kegiatan	47,37%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN PATEMON)			19 unit	9 unit	47,37%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	14 Kegiatan	8 kegiatan				7 kegiatan	50,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN NONGKOSAWIT)			14 unit	7 unit	50,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	9 Kegiatan	7 kegiatan				1 kegiatan	11,11%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN CEPOKO)			9 unit	1 unit	11,11%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan gunungpati	18 Kegiatan	13 kegiatan				13 kegiatan	72,22%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN GUNUNGPATI)			18 unit	13 unit	72,22%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan mangunsari	14 Kegiatan	8 kegiatan				4 kegiatan	28,57%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN MANGUNSARI)			14 unit	4 unit	28,57%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pakintelan	18 Kegiatan	13 kegiatan				6 kegiatan	33,33%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN PAKINTELAN)			18 unit	6 unit	33,33%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	15 Kegiatan	9 kegiatan				4 kegiatan	26,67%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN PLALANGAN)			15 unit	4 unit	26,67%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	17 Kegiatan	12 kegiatan				5 kegiatan	29,41%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SUMURREJO)			17 unit	5 unit	29,41%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	59 Kegiatan	14 kegiatan				4 kegiatan	23,53%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			17 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	23,53%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sukorejo	17 Kegiatan	17 kegiatan				6 kegiatan	23,08%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SUKOREJO)			26 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	23,08%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sadeng	13 Kegiatan	13 kegiatan				4 kegiatan	22,22%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SADENG)			18 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	22,22%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kandri	15 Kegiatan	15 kegiatan				5 kegiatan	33,33%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kandri)			15 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	33,33%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sekaran	15 Kegiatan	13 kegiatan				6 kegiatan	30,00%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekaran)			20 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	30,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan pongangan	20 Kegiatan	18 kegiatan				9 kegiatan	64,29%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			14 Pokmas/Ormas	9 Pokmas/Ormas	64,29%		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		(Kelurahan Pongangan)							
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kalisegoro	19 Kegiatan	13 kegiatan				3 kegiatan	14,29%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)			21 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	14,29%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan jatirejo	15 Kegiatan	15 kegiatan				8 kegiatan	33,33%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)			24 Pokmas/Ormas	8 Pokmas/Ormas	33,33%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Ngijo	14 Kegiatan	14 kegiatan				9 kegiatan	39,13%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngijo)			23 Pokmas/Ormas	9 Pokmas/Ormas	39,13%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Patemon	13 Kegiatan	13 kegiatan				6 kegiatan	33,33%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patemon)			18 Pokmas/Ormas	6 Pokmas/Ormas	33,33%		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Nongkosawit	14 Kegiatan	13 kegiatan				7 kegiatan	24,14%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)			29 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	24,14%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cepoko	11 Kegiatan	11 kegiatan				3 kegiatan	16,67%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cepoko)			18 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	16,67%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gunungpati	14 Kegiatan	14 kegiatan				7 kegiatan	31,82%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)			22 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	31,82%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunsari	18 Kegiatan	15 kegiatan				13 kegiatan	48,15%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)			27 Pokmas/Ormas	13 Pokmas/Ormas	48,15%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan	11 Kegiatan	11 kegiatan				4 kegiatan	30,77%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		pembangunan di kelurahan Pakintelan							
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)			13 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	30,77%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Plalangan	16 Kegiatan	16 kegiatan				5 kegiatan	31,25%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plalangan)			16 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	31,25%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sumurejo	12 Kegiatan	12 kegiatan				13 Kegiatan	68,42%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sumurrejo)			19 Pokmas/Ormas	13 Pokmas/Ormas	68,42%		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	3 Dokumen	50,00%	3 Dokumen	50,00%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	100,00%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	75,00%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sukorejo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga			9 Lembaga	8 Lembaga	88,89%		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sadeng)			Kemasyarakatan	Kemasyarakatan			
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kandri)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sekaran)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pongangan)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalisegoro)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatirejo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngijo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Patemon)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Nongkosawit)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cepoko)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gunungpati)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Mangunsari)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pakintelan)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plalangan)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sumurrejo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	88,89%		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan				1 Kelurahan	100,00%
		- jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	2 Kegiatan	1 kegiatan				0%	0,00%
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			2 Laporan	1 Laporan	50,00%	1 Laporan	
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum		95%				5%	33,33%
		- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 Persen		15%	69,52%	4,63%	69,52%	4,63%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani		95%	2 Angka	1 Angka	50,00%	1 Angka	50,00%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 Kegiatan	3 kegiatan				3 Kegiatan	100,00%
		- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			3 Laporan	3 Laporan	100,00%		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	90%	92%	76,47%	83,12%	76,47%	76,47%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	2 Kegiatan	100,00%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	200	75 angka				100 Orang	100,00%
		- Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			100 Orang	100 Orang	100,00%		

Sumber: Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan”.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan” dan “Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan”

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2023	PERGESERAN I 2023	REALISASI S/D TRIWULAN II 2023	
				Rp.	REALISASI
7.01	KECAMATAN GUNUNGPATI	23.904.767.415	23.967.180.584	12.865.048.073	53,68%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.003.100.195	18.065.513.364	10.278.785.680	56,90%
7.01.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.017.440	10.017.440	1.152.650	11,51%
7.01.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	846.120	846.120	0	0,00%
7.01.01.2.01.02	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.845.590	2.845.590	0	0,00%
7.01.01.2.01.03	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.313.590	3.313.590	0	0,00%
7.01.01.2.01.04	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.078.390	1.078.390	1.058.650	98,17%
7.01.01.2.01.05	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.234.390	1.234.390	0	0,00%
7.01.01.2.01.06	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.320	300.320	0	0,00%
7.01.01.2.01.07	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	399.040	399.040	94.000	23,56%
7.01.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.573.915.733	16.573.915.733	9.485.103.396	57,23%
7.01.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.764.630.933	15.764.630.933	9.091.064.396	57,67%
7.01.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	808.680.000	808.680.000	393.860.000	48,70%
7.01.01.2.02.05	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	201.600	201.600	179.000	88,79%
7.01.01.2.02.07	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	201.600	201.600	0	0,00%
7.01.01.2.02.08	5 Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	201.600	0	0,00%
7.01.01.2.06	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	623.845.499	686.258.668	506.643.575	73,83%
7.01.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	4.470.000	22,35%
7.01.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	207.983.487	207.983.487	179.420.000	86,27%
7.01.01.2.06.04	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.913.597	64.913.597	27.451.675	42,29%
7.01.01.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.695.997	19.695.997	3.699.500	18,78%
7.01.01.2.06.08	5 Fasilitas Kunjungan Tamu	8.925.000	8.925.000	3.347.400	37,51%
7.01.01.2.06.09	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.092.000	77.092.000	19.500.000	25,29%
7.01.01.2.06.11	7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	225.235.418	287.648.587	268.755.000	93,43%
7.01.01.2.07	4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.091.788	76.091.788	0	0,00%
7.01.01.2.07.06	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.091.788	76.091.788	0	0,00%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2023	PERGESERAN I 2023	REALISASI S/D TRIWULAN II 2023	
				Rp.	REALISASI
7.01.01.2.08	5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.132.000	144.132.000	64.038.828	44,43%
7.01.01.2.08.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.232.000	96.232.000	54.170.828	56,29%
7.01.01.2.08.03	2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.900.000	47.900.000	9.868.000	20,60%
7.01.01.2.09	6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.097.735	575.097.735	221.847.231	38,58%
7.01.01.2.09.02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.097.735	245.097.735	62.739.231	25,60%
7.01.01.2.09.09	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	210.000.000	210.000.000	159.108.000	75,77%
7.01.01.2.09.10	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	0,00%
7.01.01.2.09.11	4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	70.000.000	0	0,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.455.112.220	3.455.112.220	1.584.645.943	45,86%
7.01.02.2.01	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	454.750.000	454.750.000	188.580.000	41,47%
7.01.02.2.01.02	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	454.750.000	454.750.000	188.580.000	41,47%
7.01.02.2.02	2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.316.338.500	1.316.338.500	620.436.175	47,13%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.316.338.500	1.316.338.500	620.436.175	47,13%
7.01.02.2.04	3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.684.023.720	1.684.023.720	775.629.768	46,06%
7.01.02.2.04.03	1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	1.684.023.720	1.684.023.720	775.629.768	46,06%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.109.830.000	2.109.830.000	795.140.200	37,69%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.722.830.000	1.722.830.000	754.042.700	43,77%
7.01.03.2.02.01	1 Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	171.300.000	171.300.000	118.629.700	69,25%
7.01.03.2.02.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.211.530.000	1.211.530.000	595.263.000	49,13%
7.01.03.2.02.03	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	340.000.000	340.000.000	40.150.000	11,81%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	387.000.000	387.000.000	41.097.500	10,62%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	137.000.000	41.097.500	30,00%
7.01.03.2.03.04	2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	250.000.000	250.000.000	0	0,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.975.000	48.975.000	48.958.750	99,97%
7.01.04.2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48.975.000	48.975.000	48.958.750	99,97%
7.01.04.2.01.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan	48.975.000	48.975.000	48.958.750	99,97%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	287.750.000	287.750.000	157.517.500	54,74%
7.01.05.2.01	1 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala daerah	287.750.000	287.750.000	157.517.500	54,74%
7.01.05.2.01.02	1 Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi ,Konsultasi) wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional	287.750.000	287.750.000	157.517.500	54,74%
10,01	KELURAHAN SUKOREJO	3.064.000.000	3.064.000.000	1.160.617.987	37,88%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2023	PERGESERAN I 2023	REALISASI S/D TRIWULAN II 2023	
				Rp.	REALISASI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000	60.000.000	27.145.487	45,24%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60.000.000	60.000.000	27.145.487	45,24%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60.000.000	60.000.000	27.145.487	45,24%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.004.000.000	3.004.000.000	1.133.472.500	37,73%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.273.000.000	1.273.000.000	308.722.500	24,25%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.098.000.000	1.098.000.000	298.448.000	27,18%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	175.000.000	10.274.500	5,87%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.731.000.000	1.731.000.000	824.750.000	47,65%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.731.000.000	1.731.000.000	824.750.000	47,65%
10,02	KELURAHAN SADENG	2.331.600.000	2.331.600.000	1.097.962.979	47,09%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	54.000.000	54.000.000	24.986.479	46,27%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	54.000.000	54.000.000	24.986.479	46,27%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.000.000	54.000.000	24.986.479	46,27%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.277.600.000	2.277.600.000	1.072.976.500	47,11%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	1.125.000.000	535.726.500	47,62%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	496.148.000	52,23%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	175.000.000	39.578.500	22,62%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.152.600.000	1.152.600.000	537.250.000	46,61%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.152.600.000	1.152.600.000	537.250.000	46,61%
10,03	KELURAHAN KANDRI	1.775.471.633	1.775.471.633	637.124.161	35,88%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.000.000	49.000.000	25.646.661	52,34%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	49.000.000	49.000.000	25.646.661	52,34%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.000.000	49.000.000	25.646.661	52,34%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.726.471.633	1.726.471.633	611.477.500	35,42%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.109.671.633	1.109.671.633	321.330.000	28,96%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	304.135.000	32,01%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159.671.633	159.671.633	17.195.000	10,77%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	616.800.000	616.800.000	290.147.500	47,04%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	616.800.000	616.800.000	290.147.500	47,04%
10,04	KELURAHAN SEKARAN	1.985.400.000	1.985.400.000	697.233.122	35,12%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.000.000	51.000.000	14.297.622	28,03%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	51.000.000	51.000.000	14.297.622	28,03%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2023	PERGESERAN I 2023	REALISASI S/D TRIWULAN II 2023	
				Rp.	REALISASI
	Kecamatan				
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.000.000	51.000.000	14.297.622	28,03%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.934.400.000	1.934.400.000	682.935.500	35,30%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	1.125.000.000	316.710.500	28,15%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	298.867.000	31,46%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	175.000.000	17.843.500	10,20%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	809.400.000	809.400.000	366.225.000	45,25%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	809.400.000	809.400.000	366.225.000	45,25%
10,05	KELURAHAN PONGANGAN	1.837.441.628	1.837.441.628	622.287.372	33,87%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000	50.000.000	16.070.022	32,14%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50.000.000	50.000.000	16.070.022	32,14%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000	16.070.022	32,14%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.787.441.628	1.787.441.628	606.217.350	33,92%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.111.241.628	1.111.241.628	293.692.350	26,43%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	260.398.000	27,41%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	161.241.628	161.241.628	33.294.350	20,65%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	676.200.000	676.200.000	312.525.000	46,22%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	676.200.000	676.200.000	312.525.000	46,22%
10,06	KELURAHAN KALISEGORO	1.759.492.525	1.759.492.525	384.850.602	21,87%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.000.000	49.000.000	27.787.102	56,71%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	49.000.000	49.000.000	27.787.102	56,71%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.000.000	49.000.000	27.787.102	56,71%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.710.492.525	1.710.492.525	357.063.500	20,87%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.108.092.525	1.108.092.525	118.713.500	10,71%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	106.094.000	11,17%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	158.092.525	158.092.525	12.619.500	7,98%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	602.400.000	602.400.000	238.350.000	39,57%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	602.400.000	602.400.000	238.350.000	39,57%
10,07	KELURAHAN JATIREJO	1.609.600.000	1.609.600.000	1.108.889.076	68,89%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.000.000	55.000.000	16.643.576	30,26%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	55.000.000	55.000.000	16.643.576	30,26%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.000.000	55.000.000	16.643.576	30,26%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.554.600.000	1.554.600.000	1.092.245.500	70,26%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2023	PERGESERAN I 2023	REALISASI S/D TRIWULAN II 2023	
				Rp.	REALISASI
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	1.125.000.000	916.498.000	81,47%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	890.648.000	93,75%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	175.000.000	25.850.000	14,77%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	429.600.000	429.600.000	175.747.500	40,91%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	429.600.000	429.600.000	175.747.500	40,91%
10.08	KELURAHAN NGIJO	1.784.800.000	1.784.800.000	1.252.179.205	70,16%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.000.000	49.000.000	16.096.205	32,85%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	49.000.000	49.000.000	16.096.205	32,85%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.000.000	49.000.000	16.096.205	32,85%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.735.800.000	1.735.800.000	1.236.083.000	71,21%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	1.125.000.000	962.058.000	85,52%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	926.852.000	97,56%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	175.000.000	35.206.000	20,12%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	610.800.000	610.800.000	274.025.000	44,86%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	610.800.000	610.800.000	274.025.000	44,86%
10.09	KELURAHAN PATEMON	1.887.245.247	1.887.245.247	1.258.877.320	66,70%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000	50.000.000	28.054.820	56,11%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50.000.000	50.000.000	28.054.820	56,11%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000	28.054.820	56,11%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.837.245.247	1.837.245.247	1.230.822.500	66,99%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.110.045.247	1.110.045.247	884.222.500	79,66%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	845.125.000	88,96%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	160.045.247	160.045.247	39.097.500	24,43%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	727.200.000	727.200.000	346.600.000	47,66%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	727.200.000	727.200.000	346.600.000	47,66%
10.10	KELURAHAN NONGKOSAWIT	1.789.364.175	1.789.364.175	843.236.347	47,12%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.000.000	49.000.000	19.653.347	40,11%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	49.000.000	49.000.000	19.653.347	40,11%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.000.000	49.000.000	19.653.347	40,11%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.740.364.175	1.740.364.175	823.583.000	47,32%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.119.364.175	1.119.364.175	523.483.000	46,77%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	507.262.000	53,40%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169.364.175	169.364.175	16.221.000	9,58%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	621.000.000	621.000.000	300.100.000	48,33%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	621.000.000	621.000.000	300.100.000	48,33%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2023	PERGESERAN I 2023	REALISASI S/D TRIWULAN II 2023	
				Rp.	REALISASI
10,11	KELURAHAN CEPOKO	1.638.000.000	1.638.000.000	311.280.400	19,00%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.000.000	48.000.000	12.154.400	25,32%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	48.000.000	48.000.000	12.154.400	25,32%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.000.000	48.000.000	12.154.400	25,32%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.590.000.000	1.590.000.000	299.126.000	18,81%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	1.125.000.000	119.756.000	10,64%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	110.431.000	11,62%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	175.000.000	9.325.000	5,33%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	465.000.000	465.000.000	179.370.000	38,57%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	465.000.000	465.000.000	179.370.000	38,57%
10,12	KELURAHAN GUNUNGPATI	2.201.650.677	2.201.650.677	1.048.263.521	47,61%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.000.000	53.000.000	23.186.771	43,75%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	53.000.000	53.000.000	23.186.771	43,75%
	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53.000.000	53.000.000	23.186.771	43,75%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.148.650.677	2.148.650.677	1.025.076.750	47,71%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.108.250.677	1.108.250.677	521.096.750	47,02%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	491.663.000	51,75%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	158.250.677	158.250.677	29.433.750	18,60%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.040.400.000	1.040.400.000	503.980.000	48,44%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.040.400.000	1.040.400.000	503.980.000	48,44%
10,13	KELURAHAN MANGUNSARI	1.815.800.000	1.815.800.000	532.584.460	29,33%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000	50.000.000	30.072.810	60,15%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50.000.000	50.000.000	30.072.810	60,15%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000	30.072.810	60,15%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.765.800.000	1.765.800.000	502.511.650	28,46%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	1.125.000.000	220.100.650	19,56%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	170.052.000	17,90%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	175.000.000	50.048.650	28,60%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	640.800.000	640.800.000	282.411.000	44,07%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	640.800.000	640.800.000	282.411.000	44,07%
10,14	KELURAHAN PAKINTELAN	1.820.271.633	1.820.271.633	626.717.772	34,43%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000	50.000.000	18.685.272	37,37%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	50.000.000	50.000.000	18.685.272	37,37%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD 2023	PERGESERAN I 2023	REALISASI S/D TRIWULAN II 2023	
				Rp.	REALISASI
	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000	18.685.272	37,37%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.770.271.633	1.770.271.633	608.032.500	34,35%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.109.671.633	1.109.671.633	301.482.500	27,17%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	288.415.000	30,36%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	159.671.633	159.671.633	13.067.500	8,18%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	660.600.000	660.600.000	306.550.000	46,40%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	660.600.000	660.600.000	306.550.000	46,40%
10.15	KELURAHAN PLALANGAN	1.736.800.000	1.736.800.000	659.380.832	37,97%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	49.000.000	49.000.000	23.821.232	48,61%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	49.000.000	49.000.000	23.821.232	48,61%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.000.000	49.000.000	23.821.232	48,61%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.687.800.000	1.687.800.000	635.559.600	37,66%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	1.125.000.000	369.784.600	32,87%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	342.424.600	36,04%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	175.000.000	27.360.000	15,63%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	562.800.000	562.800.000	265.775.000	47,22%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	562.800.000	562.800.000	265.775.000	47,22%
10.16	KELURAHAN SUMUREJO	1.929.200.000	1.929.200.000	700.919.460	36,33%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000	50.000.000	29.927.460	59,85%
7.01.02.2.02	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	50.000.000	50.000.000	29.927.460	59,85%
7.01.02.2.02.03	1 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000	29.927.460	59,85%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.879.200.000	1.879.200.000	670.992.000	35,71%
7.01.03.2.02	1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	1.125.000.000	305.342.000	27,14%
7.01.03.2.02.02	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950.000.000	950.000.000	240.961.000	25,36%
7.01.03.2.02.03	2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.000.000	175.000.000	64.381.000	36,79%
7.01.03.2.03	2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	754.200.000	754.200.000	365.650.000	48,48%
7.01.03.2.03.01	1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	754.200.000	754.200.000	365.650.000	48,48%
JUMLAH KECAMATAN DAN KELURAHAN		54.870.904.933	54.933.318.102	25.807.452.689	46,98%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 100 sub kegiatan pada Kecamatan Gunungpati adalah sebesar Rp 54.933.318.102,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 25.807.452.689,00 atau 46.98 %.

Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 29.125.865.413,00.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang. Penyelenggaraan pelayanan tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 sebagaimana direview Kemenpan RB terhadap Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Gunungpati. Hasil review Kepmenpan RB tersebut tertuang dalam keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021–2026.

Analisis pelayanan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati 2021-2026 tersaji sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 (Triwulan II)	2023	2024	2025	2026
TUJUAN														
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat		88	88,5	89	89,55	90,5		93,23	94,63	88,5	89	89,5 5	90,5
SASARAN :														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	1 Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	23,39%						23,97%						
Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD	1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja OPD	100%						100%						
	2 Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan	100%						100%						
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP		71,87	73	73,5	74,00	74,50		78,51	78,75	73	73,5	74	74,5

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 (Triwulan II)	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	- Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan		1						1					
	- Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN		100%	100%	100%	100%	100%			50%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		97%	98%	99%	100%	100%		100%	50%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		10%						10%					
	- Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			85,04%	86,72%	88,40%	90,08%			42,52%	85,04%	86,72%	88,40%	90,08%
	- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan		60%	92%	95%	98%	100%		62,50%	78,57%	92%	95%	98%	100%

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gunungpati tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** dengan indikator **“Indeks Kepuasan Masyarakat”** pada Triwulan II Tahun 2023 telah melebihi target, dimana realisasinya sebesar 94,63 dari target sebesar 88.5 atau mencapai 106,93 %;
- b. Sasaran 1 **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** dengan indikator **“Nilai AKIP”** dimana pada semester I 2023 nilai tersebut belum keluar;
- c. Sasaran 2 **”Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”** dengan indikator **“Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”** dimana sampai dengan semester I Tahun 2023 telah tercapai 50 % dari target yang ditetapkan sebesar 100 %;
- d. Sasaran 3 **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** dengan indikator **“Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”** dimana pada semester I Tahun 2023 target yang dicapai adalah 50 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 98 %;
- e. Sasaran 4 **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 2 indikator sebagai berikut :
 - 1) Indikator **“Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”** dimana target pada tahun 2023 adalah 85,04 % dan pada Semester I Tahun 2023 terealisasi sebesar 42.52 %;
 - 2) Indikator **“Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”** dimana target pada tahun 2023 adalah 92 % dan pada Semester I Tahun 2023 terealisasi sebesar 78.57 %.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gunungpati, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan pada Kecamatan Gunungpati sampai dengan Semester I Tahun 2023 sudah berjalan cukup baik dan target yang ditetapkan sudah dicapai sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini dapat dilihat pada survey kepuasan

masyarakat yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan serta kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan yang melebihi target yang telah dilaksanakan.

2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam renja sudah cukup baik, akan tetapi kedepannya masih perlu diupayakan agar semua usulan dapat terakomodir. Dalam mengakomodir usulan musrenbang perlu lebih meningkatkan keterlibatan semua pihak, baik dari organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan serta tokoh agama dan masyarakat terutama keterlibatan perempuan, lansia serta forum anak agar mewujudkan perencanaan penyelenggaraan pelayanan yang responsive gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan diantaranya:

1. Kondisi geografis Kecamatan Gunungpati yang berbukitan dengan kondisi tanah yang rawan longsor mengakibatkan banyaknya terjadi bencana tanah longsor maupun pohon tumbang di musim penghujan;
2. Rata-rata jalan raya yang ada di kecamatan Gunungpati adalah jalan desa sehingga penanganan jika terjadi kerusakan kecil kurang optimal;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kegiatan masyarakat yang berbasis responsif gender.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi Walikota Semarang. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi Walikota Semarang.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia yang berkembang sangat pesat menyebabkan semua orang mudah dan memiliki akses untuk mengetahui informasi apapun secara cepat dan *uptodate*. Konsekuensinya masyarakat menjadi lebih kritis dan tanggap terhadap berbagai hal. Untuk itu, dalam kegiatan pelayanan kecamatan Gunungpati harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk semua kegiatan, program kerja, inovasi maupun aduan di masyarakat.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Gunungpati agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang sebagai berikut:

1) Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Oleh karena itu, Kecamatan Gunungpati perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

- 2) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD Kota Semarang 2021-2026 dan RKPD Perubahan 2023 dan perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah berupa Renstra Kecamatan Gunungpati 2021-2026 serta Renja Perubahan kecamatan Gunungpati Tahun 2023.
- 3) Pengakomodiran Usulan Musrenbang
Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender
- 4) Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan.
Dalam mengoptimalkan melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan perlu menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengoptimalan tersebut melalui Pengembangan program pelayanan publik yang berbasis teknologi yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel, Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang responsive gender.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7	URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNGPATI					55.234.116.097	KECAMATAN GUNUNGPATI					55.384.116.097
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	4.283.018.616	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	4.259.166.656	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	2 Angka	444.250.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	2 Angka	444.250.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	444.250.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	444.250.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 Persen	2.161.944.896	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 Persen	2.141.692.936	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.314.216.236	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.293.964.276	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60.000.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	56.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	56.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	53.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	53.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	51.628.660	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12 Laporan	51.628.660	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	55.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	55.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSAARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN MANGUNSAARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Wilayah Kecamatan					Wilayah Kecamatan			
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	51.700.000	
7.01.02.2.0 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUMURREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.700.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KELURAHAN SUMURREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	52.700.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	1.676.823.720	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	1.673.223.720	
7.01.02.2.0 4.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.676.823.720	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.673.223.720	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 Persen	30.651.844.366	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 Persen	30.801.844.366	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	200 Kegiatan	18.460.378.066	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	200 Kegiatan	18.610.378.066	
7.01.03.2.0 2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	KECAMATAN GUNUNGPA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	6 Lembaga Kemasyarakatan	171.300.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	KECAMATAN GUNUNGPA	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi	6 Lembaga Kemasyarakatan	171.300.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TI	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	TI	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.211.530.0 00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	1.211.530.00 0	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.098.000.0 00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	1.098.000.00 0	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPA TI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPA TI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUMURREJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KELURAHAN SUMURREJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas/Ormas	332.847.200	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas/Ormas	482.847.200	
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	90.371.639	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	90.371.639	
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	18 Pokmas/Ormas	92.824.439	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	18 Pokmas/Ormas	92.824.439	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Kelurahan					Kelurahan			
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas/Ormas	84.569.300	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas/Ormas	84.569.300	
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/Ormas	92.771.139	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/Ormas	92.771.139	
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas/Ormas	79.193.839	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas/Ormas	79.193.839	
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	80.379.489	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	80.379.489	
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas/Ormas	100.380.039	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas/Ormas	100.380.039	
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas/Ormas	91.307.739	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	19 Pokmas/Ormas	91.307.739	
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22 Pokmas/Ormas	75.493.839	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22 Pokmas/Ormas	75.493.839	
7.01.03.2.0 2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	17 Pokmas/Or	84.930.869	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	17 Pokmas/Or	84.930.869	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kelurahan	NONGKOSAWIT	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	mas		Kelurahan	NONGKOSAWIT	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	mas		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	98.332.539	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN CEPOKO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	98.332.539	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPAATI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	69.919.400	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN GUNUNGPAATI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/Ormas	69.919.400	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas/Ormas	96.152.108	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas/Ormas	96.152.108	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas/Ormas	78.685.072	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas/Ormas	78.685.072	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas/Ormas	92.192.508	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas/Ormas	92.192.508	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUMURREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas/Ormas	89.196.908	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN SUMURREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas/Ormas	89.196.908	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	12.191.466.300	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	12.191.466.300	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPAATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	122.880.600	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN GUNUNGPAATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	122.880.600	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.713.875.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUKOREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.713.875.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.575.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SADENG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.134.575.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	593.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KANDRI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	593.200.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	791.575.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SEKARAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	791.575.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	658.175.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PONGANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	658.175.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	580.175.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN KALISEGORO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	580.175.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	410.614.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN JATIREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	410.614.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	594.275.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NGIJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	594.275.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	710.650.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PATEMON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	710.650.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	606.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN NONGKOSAWIT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	606.800.000	
7.01.03.2.0	Penyelenggaraan	KELURAHAN	Jumlah Lembaga	9 Lembaga		Penyelenggaraan	KELURAHAN	Jumlah Lembaga	9 Lembaga	447.561.100	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
3.01	Lembaga Kemasyarakatan	N CEPOKO	Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kemasyarakatan	447.561.100	Lembaga Kemasyarakatan	N CEPOKO	Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Kemasyarakatan		
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN GUNUNGPAATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.026.525.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN GUNUNGPAATI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.026.525.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	624.410.600	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN MANGUNSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	624.410.600	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	641.575.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PAKINTELAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	641.575.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	544.975.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN PLALANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	544.975.000	
7.01.03.2.0 3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUMURREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	739.625.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KELURAHAN SUMURREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	739.625.000	
7.01.03.2.0 3.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPAATI	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN GUNUNGPAATI	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	250.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	48.975.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	53.475.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah pelanggaran terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 Angka	48.975.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah pelanggaran terhadap gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 Angka	53.475.000	
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	KECAMATAN GUNUNGPAATI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	3 Laporan	48.975.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	KECAMATAN GUNUNGPAATI	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	3 Laporan	53.475.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Wilayah Kecamatan		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Wilayah Kecamatan		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	280.550.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 Persen	280.550.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	280.550.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2 kegiatan	280.550.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	280.550.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	280.550.000	
	NON URUSAN					NON URUSAN					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	19.969.728.115	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	19.989.080.075	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA					DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen				Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen		
			Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen				Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 Persen		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	9.872.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	7.468.000	
			Dokumen pelaporan	2 Dokumen				Dokumen pelaporan	2 Dokumen		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	846.120	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	846.120	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.845.590	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.741.090	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.313.590	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.014.090	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.078.390	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.078.390	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.234.390	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.234.390	
7.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Laporan	300.320	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 Laporan	300.320	
7.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	253.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	253.600	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitrasi keuangan SKPD	100 Persen	18.485.715.348	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Adminsitrasi keuangan SKPD	100 Persen	18.485.715.348	
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen		
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	17.676.430.548	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	17.676.430.548	
7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	808.680.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	808.680.000	
7.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	201.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	201.600	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Akhir Tahun SKPD					Akhir Tahun SKPD			
7.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	201.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	201.600	
7.01.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	201.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	201.600	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	680.690.730	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	698.102.949	
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	207.983.487	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	228.352.492	
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	58.648.562	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	58.648.562	
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	19.643.094	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	19.561.308	
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.925.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.925.000	
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	77.842.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	74.967.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	SKPD	TI	dan Konsultasi SKPD				TI	dan Konsultasi SKPD			
7.01.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	287.648.587	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	287.648.587	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	123.281.917	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	127.625.658	
7.01.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	123.281.917	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	127.625.658	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	134.359.350	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	134.359.350	
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.232.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.232.000	
7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	38.127.350	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	38.127.350	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100 Persen	535.808.770	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya pemeliharaan Barang Milik daerah	100 Persen	535.808.770	
7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	38 Unit	220.808.770	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	KECAMATAN GUNUNGPA TI	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	38 Unit	220.808.770	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinannya			Lapangan		Perizinannya			
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	210.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	210.000.000	
7.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	35.000.000	
7.01.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN GUNUNGPATI	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	70.000.000	

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023,

dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:

- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60-6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Renja Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah direview oleh Kemenpan RB terhadap Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Gunungpati, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 berdasarkan Surat keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021–2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”
dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan;
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP;

2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik dengan indikator Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan dengan indikator Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan indikator:
 - a. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Perubahan Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah direview oleh Kemenpan RB terhadap Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Gunungpati, terdapat perubahan Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2023 berdasarkan Surat keputusan Camat Gunungpati Kota Semarang Nomor 050/43/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021–2026 sebagaimana yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,5
SASARAN :			
1 Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	Angka	73
2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	- Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
3 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	98
4 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	85,04
	- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	92

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Gunungpati Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gunungpati memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan indikator sasaran “Nilai AKIP, Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN									
	7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNGPATI					54.271.118.433	54.933.318.102	55.234.116.097		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	92 Persen	92 Persen	3.872.112.220	4.271.112.220	4.283.018.616		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	2 Angka	2 Angka	2 Angka	55.750.000	454.750.000	444.250.000		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	55.750.000	454.750.000	444.250.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	2.132.338.500	2.132.338.500	2.161.944.896		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.316.338.500	1.316.338.500	1.314.216.236	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukorejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sadeng)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	54.000.000	54.000.000	56.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.000.000	49.000.000	51.700.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kandri)								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sekaran)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	51.000.000	51.000.000	53.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pongangan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	52.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalisegoro)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.000.000	49.000.000	51.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatirejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000	55.000.000	51.628.660	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngijo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.000.000	49.000.000	51.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Patemon)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	52.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Nongkosawit)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.000.000	49.000.000	51.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.000.000	48.000.000	50.700.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cepoko)								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gunungpati)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	53.000.000	53.000.000	55.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunsari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pakintelan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	52.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plalangan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	49.000.000	49.000.000	51.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sumurrejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	50.000.000	52.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.684.023.720	1.684.023.720	1.676.823.720		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.684.023.720	1.684.023.720	1.676.823.720	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98%	98%	98%	32.259.967.518	32.259.967.518	30.651.844.366		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	200 Kegiatan	19.772.167.518	19.772.167.518	18.460.378.066		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.Lembaga Kemasyarakatan	6.Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	171.300.000	171.300.000	171.300.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21 Unit	21 Unit	8 Unit	1.211.530.000	1.211.530.000	1.211.530.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sukorejo)	14 Unit	14 Unit	14 Unit	1.098.000.000	1.098.000.000	1.098.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sadeng)	15 Unit	15 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kandri)	15 Unit	15 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sekaran)	14 Unit	14 Unit	16 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pongangan)	14 Unit	14 Unit	18 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalisegoro)	12 Unit	12 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatirejo)	10 Unit	10 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngijo)	8 Unit	8 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Patemon)	19 Unit	19 Unit	10 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan	14 Unit	14 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Nongkosawit)								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cepoko)	9 Unit	9 Unit	9 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gunungpati)	18 Unit	18 Unit	12 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mangunsari)	14 Unit	14 Unit	13 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pakintelan)	18 Unit	18 Unit	19 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plalangan)	15 Unit	15 Unit	15 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KelurahanSumurrejo)	17 Unit	17 Unit	18 Unit	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50 Pokmas/Ormas	50 Pokmas/Ormas	14 Pokmas/Ormas	340.000.000	340.000.000	332.847.200	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sukorejo)	26 Pokmas/Ormas	26 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	175.000.000	175.000.000	90.371.639	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sadeng)	18 Pokmas/Ormas	18 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	175.000.000	175.000.000	92.824.439	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas/Ormas	15 Pokmas/Ormas	14 Pokmas/Ormas	159.671.633	159.671.633	84.569.300	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Kelurahan (Kelurahan Kandri)								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sekaran)	20 Pokmas/Ormas	20 Pokmas/Ormas	15 Pokmas/Ormas	175.000.000	175.000.000	92.771.139	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pongangan)	14 Pokmas/Ormas	14 Pokmas/Ormas	18 Pokmas/Ormas	161.241.628	161.241.628	79.193.839	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalisegoro)	21 Pokmas/Ormas	21 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	158.092.525	158.092.525	80.379.489	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirejo)	24 Pokmas/Ormas	24 Pokmas/Ormas	17 Pokmas/Ormas	175.000.000	175.000.000	100.380.039	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngijo)	23 Pokmas/Ormas	23 Pokmas/Ormas	19 Pokmas/Ormas	175.000.000	175.000.000	91.307.739	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Patemon)	18 Pokmas/Ormas	18 Pokmas/Ormas	22 Pokmas/Ormas	160.045.247	160.045.247	75.493.839	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	29 Pokmas/Ormas	29 Pokmas/Ormas	17 Pokmas/Ormas	169.364.175	169.364.175	84.930.869	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Kelurahan (Kelurahan Nongkosawit)								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cepoko)	18 Pokmas/Ormas	18 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	175.000.000	175.000.000	98.332.539	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gunungpati)	22 Pokmas/Ormas	22 Pokmas/Ormas	12 Pokmas/Ormas	158.250.677	158.250.677	69.919.400	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunsari)	27 Pokmas/Ormas	27 Pokmas/Ormas	30 Pokmas/Ormas	175.000.000	175.000.000	96.152.108	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pakintelan)	13 Pokmas/Ormas	13 Pokmas/Ormas	13 Pokmas/Ormas	159.671.633	159.671.633	78.685.072	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plalangan)	16 Pokmas/Ormas	16 Pokmas/Ormas	20 Pokmas/Ormas	175.000.000	175.000.000	92.192.508	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sumurrejo0)	19 Pokmas/Ormas	19 Pokmas/Ormas	18 Pokmas/Ormas	175.000.000	175.000.000	89.196.908	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	12.487.800.000	12.487.800.000	12.191.466.300		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	137.000.000	122.880.600	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sukorejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.731.000.000	1.731.000.000	1.713.875.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sadeng)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.152.600.000	1.152.600.000	1.134.575.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kandri)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	616.800.000	616.800.000	593.200.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sekaran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	809.400.000	809.400.000	791.575.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pongangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	676.200.000	676.200.000	658.175.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalisegoro)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	602.400.000	602.400.000	580.175.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	429.600.000	429.600.000	410.614.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngijo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	610.800.000	610.800.000	594.275.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Patemon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	727.200.000	727.200.000	710.650.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Nongkosawit)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	621.000.000	621.000.000	606.800.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cepoko)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	465.000.000	465.000.000	447.561.100	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.040.400.000	1.040.400.000	1.026.525.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Diselenggarakan (Kelurahan Gunungpati)	an	an	an					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	640.800.000	640.800.000	624.410.600	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pakintelan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	660.600.000	660.600.000	641.575.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plalangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	562.800.000	562.800.000	544.975.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sumurrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	754.200.000	754.200.000	739.625.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	15%	15%	48.522.200	48.975.000	48.975.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran terhadap Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	2 Angka	2 Angka	100%	48.522.200	48.975.000	48.975.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	48.522.200	48.975.000	48.975.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	92%	92%	75.675.000	287.750.000	280.550.000		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	75.675.000	287.750.000	280.550.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	75.675.000	287.750.000	280.550.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	18.014.841.495	18.065.513.364	19.969.728.115		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	11.011.860	10.017.440	9.872.000		
		Dokumen Pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	487.800	846.120	846.120	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.108.110	2.845.590	2.845.590	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.020	3.313.590	3.313.590	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.410	1.078.390	1.078.390	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.770.320	1.234.390	1.234.390	APBD Kota	

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
05	Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD							Semarang	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	300.320	300.320	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	253.600	399.040	253.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	16.579.435.733	16.573.915.733	18.485.715.348		
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/bulan	117 Orang/bulan	105 Orang/bulan	15.764.630.933	15.764.630.933	17.676.430.548	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	814.200.000	808.680.000	808.680.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	201.600	201.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	201.600	201.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	201.600	201.600	201.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Wajtu pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	602.072.379	686.258.668	680.690.730		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	3 Paket	190.935.119	207.983.487	207.983.487	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7 Paket	52.000.000	64.913.597	58.648.562	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	20.809.842	19.695.997	19.643.094	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.925.000	8.925.000	8.925.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	84.167.000	77.092.000	77.842.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	225.235.418	287.648.587	287.648.587	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	76.091.788	76.091.788	123.281.917		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	2 Unit	76.091.788	76.091.788	123.281.917	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	144.132.000	144.132.000	134.359.350		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	96.232.000	96.232.000	96.232.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	47.900.000	47.900.000	38.127.350	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	602.097.735	575.097.735	535.808.770		

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Ket
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit	55 Unit	38 Unit	245.097.735	245.097.735	220.808.770	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	4 Unit	225.000.000	210.000.000	210.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	2 Unit	62.000.000	50.000.000	35.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	3 Unit	70.000.000	70.000.000	70.000.000	APBD Kota Semarang	
JUMLAH						54.271.118.433	54.933.318.102	55.234.116.097		

Sumber : Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, 2023

BAB V **P E N U T U P**

Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gunungpati Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output*/keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gunungpati Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan

Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

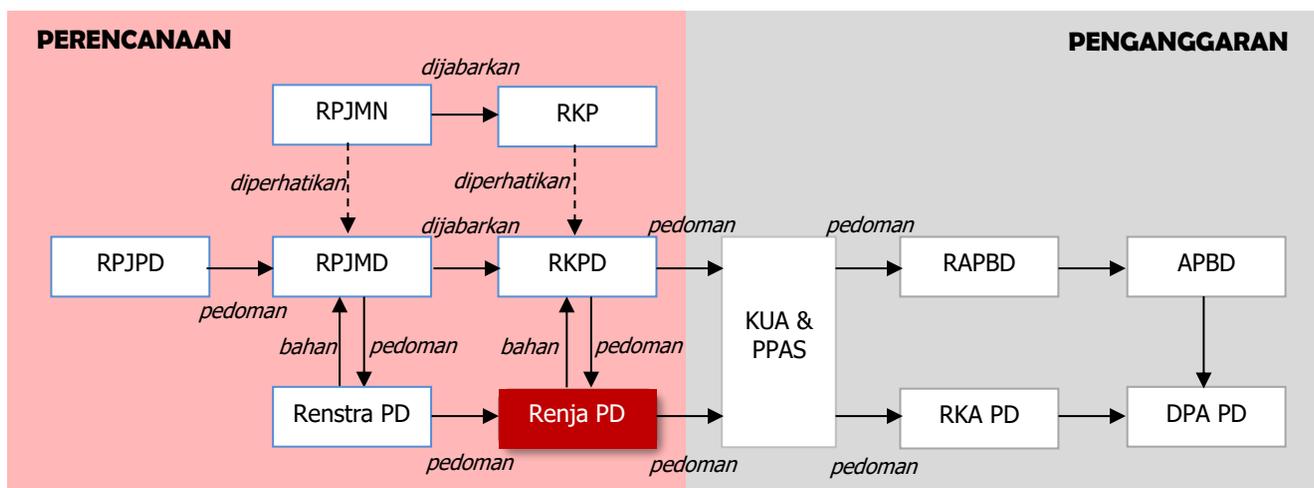
41. KECAMATAN TUGU

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2022 yang disebabkan oleh: (1) Menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Tugu Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - k. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - l. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
 - o. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

- q. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- r. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- t. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- u. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Tugu Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tugu Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUGU
KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Tugu Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja skpd	100,00 %	35,15 %	100,00 %	1.66%	1.66%	1.66%	1.66%
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00 %	96.26 %	100,00 %	57.5%	57.5%	57.5%	57.5%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100,00 %	81.42 %	100,00 %	45.21%	45.21%	45.21%	45.21%
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00 dokumen	7.00 dokumen	7.00 dokumen	5 Dokumen	71.42%	5 Dokumen	71.42%
		Jumlah Dokumen pelaporan	4 dokumen	4 dokumen	4.00 dokumen	3 Dokumen	75%	3 Dokumen	75%
7.01.01.2.01.01	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33.33%	1 Dokumen	33.33%
7.01.01.2.01.02	b Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.03	c Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokuen Perubahan Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01.04	d Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.05	e Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.06	f Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	2.00 dokumen	66.66%	2.00 dokumen	66.66%
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	71.19 persen	100.00 persen	57.50 persen	57.50 %	57.50 persen	57.50 %
7.01.01.2.02.01	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100%
7.01.01.2.02.02	b Sub Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	12 Dokumen	100 Persen	12 Dokumen	3 Dokumen	25%	3 Dokumen	25%
7.01.01.2.02.05	c Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.02.07	d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.02.08	e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0%
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (100%)	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	55.14 persen	55.14%	55.14 persen	55.14%
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Jenis	2 Paket	1 Paket	50%	1 Paket	50%
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	2 Jenis	3 Paket	2 Paket	66.66%	2 Paket	66.66%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Jenis	2 Paket	1 Paket	50%	1 Paket	50%
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Jenis	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	100%
7.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1 Laporan	150 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1 Laporan	6 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%
7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	4 Jenis	3 Dokumen	2 Dokumen	66.66%	2 Dokumen	66.66%
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	61.02 persen	61.02%	61.02 persen	61.02%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.07.06	a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	15 Unit	3 Jenis	15 Unit	9 Unit	60%	9 Unit	60%
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	42.65 persen	42.65%	42.65 persen	42.65%
7.01.01.2.08.02	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	50%
7.01.01.2.08.03	b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Laporan	7 Jenis	12 Laporan	4 Laporan	33.33%	4 Laporan	33.33%
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	22.04 persen	22.04%	22.04 persen	22.04%
7.01.01.2.09.02	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perzinan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	18 Unit	11 Unit	18 Unit	5 Unit	27.77%	5 Unit	27.77%
7.01.01.2.09.09	b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi gedung	1 Unit	1 Gedung	1 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.01.2.09.10	c Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2 Unit	2 Jenis	2 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.01.2.09.11	d Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor	5 Unit	5 Jenis	5 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	92,00 persen	91.3 persen	92.00 persen	47.00 persen	51.08%	47.00 persen	51.08%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		berbasis teknologi informasi (SPBE)							
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4.00 angka	4 Angka	4.00 angka	2.00 angka	50%	2.00 angka	50%
7.01.02.2.01.02	a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	2 Dokumen	50%
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	49.91 persen	49.91%	49.91 persen	49.91%
7.01.02.2.02.03	a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan	6 Laporan	99,38 persen	6 Dokumen	5 Laporan	83.33%	5 Laporan	83.33%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Kulon	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	4 Laporan	33.33%	4 Laporan	33.33%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	11 Laporan	91.66%	11 Laporan	91.66%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangkang Wetan	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	8 Laporan	66.66%	8 Laporan	66.66%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Randugarut	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	8 Laporan	66.66%	8 Laporan	66.66%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	5 Laporan	41.66%	5 Laporan	41.66%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tugurejo	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	7 Laporan	58.33%	7 Laporan	58.33%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jerakah	12 Laporan	100 Persen	12 Laporan	7 Laporan	58.33%	7 Laporan	58.33%
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	41.58 persen	41.58%	41.58 persen	41.58%
7.01.02.2.04.03	a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	12 Laporan	3302 Kegiatan	12 Laporan	5 Laporan	41.66%	5 Laporan	41.66%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	95.81 persen	98.00 persen	17.86 persen	18.22%	17.86 persen	18.22%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297.00 kegiatan	190 kegiatan	297.00 kegiatan	18.00 kegiatan	6.06%	18.00 kegiatan	6.06%
7.01.03.2.02.01	a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	120 Angka	6 Lembaga	6 Lembaga	100%	6 Lembaga	100%
7.01.03.2.02.02	b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	10 Unit	22 Kegiatan	10 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangkang Kulon	13 Unit	5 Kegiatan	13 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangunharjo	6 Unit	5 Kegiatan	6 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Unit	5 Kegiatan	9 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Randugarut	11 Unit	5 Kegiatan	11 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Karanganyar	10 Unit	5 Kegiatan	10 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tugurejo	17 Unit	5 Kegiatan	17 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah	12 Unit	5 Kegiatan	12 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Jerakah							
7.01.03.2.02.03	c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	4 Pokmas	55 Kegiatan	4 Pokmas	4 Pokmas	100%	4 Pokmas	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Kulon	20 Pokmas	10 Kegiatan	20 Pokmas	0 Pokmas	0%	0 Pokmas	0%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangunharjo	26 Pokmas	10 Kegiatan	26 Pokmas	11 Pokmas	42.30%	11 Pokmas	42.30%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mangkang Wetan	23 Pokmas	10 Kegiatan	23 Pokmas	5 Pokmas	21.73%	5 Pokmas	21.73%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Randugarut	17 Pokmas	10 Kegiatan	17 Pokmas	5 Pokmas	29.41%	5 Pokmas	29.41%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karanganyar	22 Pokmas	10 Kegiatan	22 Pokmas	3 Pokmas	13.63%	3 Pokmas	13.63%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tugurejo	16 Pokmas	10 Kegiatan	16 Pokmas	4 Pokmas	25%	4 Pokmas	25%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jerakah	18 Pokmas	5 Kegiatan	18 Pokmas	5 Pokmas	27.77%	5 Pokmas	27.77%
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27.00 dokumen	27.00 dokumen	27.00 dokumen	14.00 dokumen	51.85%	14.00 dokumen	51.85%
7.01.03.2.03.01	a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	24 Dokumen	4 Lembaga	0 Lembaga	0%	0 Lembaga	0%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Kulon	9 Lembaga		9 Lembaga	4 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangunharjo	9 Lembaga		9 Lembaga	4 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Mangkang Wetan	9 Lembaga		9 Lembaga	4 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Randugarut	9 Lembaga		9 Lembaga	0 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Karanganyar	9 Lembaga		9 Lembaga	4 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Tugurejo	9 Lembaga		9 Lembaga	4 Lembaga			

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kelurahan Jerakah	9 Lembaga		9 Lembaga	4 Lembaga			
7.01.03.2.03.04	b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	3 Laporan	3 Kegiatan	3 Laporan	0 Laporan	0%	0 Laporan	0%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	26.48 persen	15.00 persen	0%	0%	0%	0%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2.00 angka	2.00 angka	2.00 angka	1 angka	50%	1 angka	50%
7.01.04.2.01.01	a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Kegiatan	2 Laporan	1 Laporan	50%	1 Laporan	50%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	83.66 persen	92.00 persen	44.72%	48.60%	44.72%	48.60%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	2.00 kegiatan	1 kegiatan	50%	1 kegiatan	50%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.05.2.01.02	a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 kegiatan	50%	1 kegiatan	50%

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2021

Dari data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2022 Triwulan II Kecamatan Tugu Kota Semarang
 - a) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 5 Program, dan 13 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 5 Indikator kinerja program belum ada Indikator yang memenuhi target.
- 2) Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 5 Program, 13 kegiatan, dan 63 Sub Kegiatan.
 - b) Dari 5 indikator kinerja program, pada triwulan II tahun 2023 belum ada indikator yang memenuhi target.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Tugu Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tugu Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN PERENCANAAN	27.004.927.100	15.165.931.264	56,15
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.825.013.317	6.675.463.572	67,94
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.689.660	945.750	16,62
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	487.800	113.000	23,16
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	924.510	0	0
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.120.420	0	0
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	924.510	577.000	62,41
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.120.420	0	0
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	604.800	85.750	14,17
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	507.200	85.750	16,90
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.707.601.845	6.081.956.356	69,84
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.352.937.045	5.916.831.356	70,83
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	354.060.000	165.040.000	46,61

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	201.600	85.000	42,16
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	201.600	0	0
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	201.600	0	0
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	578.593.153	375.377.750	64,87
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.800.000	4.043.000	41,25
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.776.916	104.545.000	83,78
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.166.500	40.079.500	46,51
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	5.623.350	37,48
1.3.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.163.200	26.470.000	79,81
1.3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.249.200	24.187.900	64,93
1.3.7	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	272.437.337	170.429.000	62,55
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	48.878.109	29.825.000	61,02
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.878.109	29.825.000	61,02
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.375.550	92.753.808	56,77
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.494.000	77.323.808	66,95
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.881.550	15.430.000	32,22
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.875.000	94.604.908	29,48
1.6.1	Sub Kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.875.000	57.473.908	47,54
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	26.328.000	26,32
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	7.303.000	14,60
1.6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	3.500.000	7,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.205.381.917		60,80
2.1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.037.510	9.790.000	37,59
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.037.510	9.790.000	37,59
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.546.230.036		
2.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.056.230.036	677.488.439	64,14
2.2.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jerakah)	70.000.000	40.579.271	57,97
2.2.3	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tugurejo)	70.000.000	63.690.123	90,98
2.2.4	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karanganyar)	70.000.000	48.387.988	69,12
2.2.5	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Randugarut)	70.000.000		
2.2.6	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangkang Wetan)	70.000.000		
2.2.7	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunharjo)	70.000.000		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
2.2.8	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangkang Kulon)	70.000.000		
2.3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	633.114.371	355.693.710	56,18
2.3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	633.114.371	355.693.710	56,18
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.879.364.316	2.184.008.252	19,69
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.165.884.717		
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	58.125.000	49.944.000	85,92
3.1.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.500.000.000	889.354.251	59,29
3.1.3	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jerakah)	950.000.000	305.428.872	32,15
3.1.4	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tugurejo)	950.000.000	276.121.000	29,06
3.1.5	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karanganyar)	950.000.000	680.330.500	71,61
3.1.6	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Randugarut)	950.000.000		
3.1.7	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangkang Wetan)	950.000.000		
3.1.8	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	950.000.000		
3.1.9	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mangkang Kulon)	950.000.000		
3.1.10	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	732.759.717	319.565.000	43,61
3.1.11	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jerakah)	175.000.000	86.854.500	49,63
3.1.12	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tugurejo)	175.000.000	64.251.400	36,71
3.1.13	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karanganyar)	175.000.000	89.365.500	51,06
3.1.14	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Randugarut)	175.000.000		
3.1.15	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangkang Wetan)	175.000.000		
3.1.16	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	175.000.000		
3.1.17	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangkang Kulon)	175.000.000		
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.713.479.599		
3.2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	163.822.609	34.666.000	21,16
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Jerakah)	487.800.000	306.340.250	62,80
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Tugurejo)	792.720.000	514.676.000	64,92
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Karanganyar)	589.800.000	365.817.850	62,02
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Randugarut)	387.000.000		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Mangkang Wetan)	927231.510		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	726.200.000		
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Kelurahan Mangkang Kulon)	606.835,480		
3.2.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	32.070.000	0	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.500.000	0	0
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.500.000	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
4.1.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.500.000	0	0
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	72.667.550	48.175.000	66,29
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	72.667.550	48.175.000	66,29
5.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	72.667.550	48.175.000	66,29

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan pada Kecamatan Tugu kota Semarang adalah sebesar Rp 27.004.927.100. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 15.165.931.264. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 11.838.995.836.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebaigian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 TW II	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,00 angka	97,08 angka	98,00 angka	98,50 angka	98,80 angka	99,00 angka	97,00 angka	97,08 angka	32,34 angka				32,34 angka

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 TW II	2024	2025	2026	2023
kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi														
Sasaran : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka				1 angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	41,75 %				41,75 %
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	76,00 angka	77,00 angka	78,00 angka	79,00 angka	80,00 angka	81,00 angka	76,00 angka	77,00 angka	37,00 angka				37,00 angka
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 %	75,00 %	80,00 %	85,00 %	90,00 %	95,00 %	0 %	75,00 %	40,00 %				40,00 %
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	0 %	60,00 %	70,00 %	80,00 %	90,00 %	100,00 %	0 %	60,00 %	35,00 %				35,00 %

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tugu tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, target sebesar 98,00 belum dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 32,34 (capaian 33,33 %);
- b. Sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” belum dapat mencapai target sebesar 1 , dengan realisasi sebesar 1 (capaian sebesar 100,00 %);

- c. Sasaran **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” belum dapat mencapai target sebesar 100,00 % , dengan realisasi sebesar 41,75 % (capaian sebesar 41,75 %);
- d. Sasaran **“Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “NILAI AKIP” belum dapat mencapai target sebesar 78,00 , dengan realisasi sebesar 37,00 (capaian sebesar 47,44 %);
- e. Sasaran **“Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) Indikator “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” belum dapat mencapai target sebesar 80,00 %, dengan realisasi sebesar 40,00 % (capaian sebesar 50,00 %);
 - 2) Indikator “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” belum dapat mencapai target sebesar 70,00 %, dengan realisasi sebesar 35,00 % (capaian sebesar 50,00 %).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tugu Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Tugu, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Tugu terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tugu sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan

gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tugu, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang adalah:

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Tugu yang tidak seimbang dengan luas wilayah.
- 3) Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini.
- 4) Sarana dan prasarana yang masih terbatas.
- 5) Masyarakat Kecamatan Tugu yang heterogen.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Tugu adalah sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
- 2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Tugu hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.
- 2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan. SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku karyawan.

Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.

- 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 5) Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.
- 6) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan.
- 7) Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum optimal.
- 8) Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 9) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketenteraman dan ketertiban umum.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tugu Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Tugu Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	URUSAN KEWILAYAHAN				27.004.927.100	URUSAN KEWILAYAHAN				27.004.927.100
	KECAMATAN				27.004.927.100	KECAMATAN				27.004.927.100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Tugu	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	2.205.381.917	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PelayANAN PUBLIK	Kecamatan Tugu	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	92.00 persen	2.205.381.917
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4.00 Angka	26.037.510	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4.00 Angka	26.037.510
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	26.037.510	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	26.037.510
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 Persen	1.546.230.036	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Tugu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 Persen	1.546.230.036

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	1.546.230.036	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	1.546.230.036
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Jerakah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Tugurejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Karanganyar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Randugarut	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	633.114.371	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Tugu	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 Persen	633.114.371
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	633.114.371	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	633.114.371
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tugu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	14.879.364.316	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Tugu	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	14.879.364.316
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297.00 Kegiatan	10.165.884.717	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297.00 Kegiatan	10.165.884.717
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	58.125.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	58.125.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	8.150.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	8.150.000.000
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit			Kelurahan Jerakah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit			Kelurahan Tugurejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			Kelurahan Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit			Kelurahan Randugarut	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit			Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit			Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.957.759.717	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di	Kecamatan Tugu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.957.759.717
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas			Kelurahan Jerakah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Pokmas / Ormas	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas			Kelurahan Tugurejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas	
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22 Pokmas / Ormas			Kelurahan Karanganyar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	22 Pokmas / Ormas	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas			Kelurahan Randugarut	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 Pokmas / Ormas			Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	23 Pokmas / Ormas	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas			Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 Pokmas / Ormas			Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 Pokmas / Ormas	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27.00 Dokumen	4.713.479.599	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27.00 Dokumen	4.713.479.599
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4.681.409.599	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4.681.409.599
		Kelurahan Jerakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Jerakah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	
		Kelurahan Tugurejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Tugurejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	
		Kelurahan Karanganyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Karanganyar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	
		Kelurahan Randugarut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga			Kelurahan Randugarut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			yang Diselenggarakan					yang Diselenggarakan		
		Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Mangkang Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	
		Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Mangkang Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	
		Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Kelurahan Mangunharjo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	32.070.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	32.070.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tugu	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	22.500.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Tugu	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	22.500.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2.00 angka	22.500.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tugu	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2.00 angka	22.500.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	22.500.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	22.500.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tugu	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	72.667.550	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Tugu	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	72.667.550
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	72.667.550	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2.00 Kegiatan	72.667.550
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	72.667.550	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Tugu	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2.00 kegiatan	72.667.550
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tugu	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	9.825.013.317	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Tugu	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100.00%	9.825.013.317

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
		Kecamatan Tugu	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%			Kecamatan Tugu	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100.00%	
		Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%			Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100.00%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00 Dokumen	5.689.660	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keamatan Tugu	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00 Dokumen	5.689.660
		Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan	4.00 Dokumen			Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan	4.00 Dokumen	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 Dokumen	487.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 Dokumen	487.800
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.00 Dokumen	924.510	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.00 Dokumen	924.510
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.00 Dokumen	1.120.420	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.00 Dokumen	1.120.420
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1.00 Dokumen	924.510	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1.00 Dokumen	924.510

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.120.420	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 Dokumen	1.120.420
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	604.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	604.800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	507.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	507.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	8.707.601.845	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 Persen	8.707.601.845
		Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 Dokumen			Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 Dokumen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	8.352.937.045	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Tugu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	8.352.937.045
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	354.060.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	354.060.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	201.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	201.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	201.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	201.600
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	201.600	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	201.600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	578.593.153	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Tugu	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100.00 Persen	578.593.153
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.800.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.800.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	124.776.916	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	124.776.916
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	83.820.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	83.820.000

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Kecamatan Tugu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33.163.200	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	33.163.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	37.249.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	37.249.200
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	272.437.337	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tugu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	272.437.337
	Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	48.878.109	Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100.00 Persen	48.878.109
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	48.878.109	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	48.878.109
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	163.375.550	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 Persen	163.375.550
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.494.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.494.000
	Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tugu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	47.881.550			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	47.881.550

NO	Rancangan Perubahan SKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
			Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	320.875.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tugu	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 Persen	320.875.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	120.875.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tugu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	120.875.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Tugu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.

- 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.

- 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.

- 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--|
| SASARAN 1 | : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah |
| Indikator | : Nilai AKIP |
| SASARAN 2 | : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik |
| Indikator | : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan |
| SASARAN 3 | : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan |
| Indikator | : Persentase lembaga kemasyarakatan aktif |

SASARAN 4 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

- Indikator : - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	98,00
SASARAN : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Angka	78,00
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	80,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	70,00

Sumber : Kecamatan Tugu Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum OPD bertugas mengkoordinasikan pencapaian seluruh indikator tujuan (11 indikator) dan indikator sasaran (38 indikator) pembangunan daerah Kota Semarang. Namun secara khusus, Kecamatan Tugu memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan **“Indeks Reformasi Birokrasi”** dan indikator sasaran **“Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Tugu Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	URUSAN PERENCANAAN, URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					26.580.288.045	26.942.513.931	27.004.927.100	APBD Kota Semarang	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	9.756.263.069	9.762.600.148	9.825.013.317	APBD Kota Semarang	
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %					
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %	100 %	100 %					
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7.00 dokumen	7.00 dokumen	7.00 dokumen	5.689.660	5.689.660	5.689.660	APBD Kota Semarang	-
		Jumlah Dokumen pelaporan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	487.800	487.800	487.800	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	924.510	924.510	924.510	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.120.420	1.120.420	1.120.420	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	924.510	924.510	924.510	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.120.420	1.120.420	1.120.420	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	604.800	604.800	604.800		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	507.200	507.200	507.200	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3.00 dokumen	3.00 dokumen	3.00 dokumen	8.707.601.845	8.707.601.845	8.707.601.845	APBD Kota Semarang	
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	8.352.937.045	8.352.937.045	8.352.937.045	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.02	Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	354.060.000	354.060.000	354.060.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	201.600	201.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	201.600	201.600	201.600	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	201.600	201.600	201.600	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (100%)	100 %	100 %	100 %	509.837.584	516.179.984	578.593.153	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	9.800.000	9.800.000	9.800.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	124.776.916	124.776.916	124.776.916	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	79.824.100	86.166.500	86.166.500	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	33.163.200	33.163.200	33.163.200	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	37.249.200	37.249.200	37.249.200	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	210.024.168	210.024.168	272.437.337	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	48.883.430	48.878.109	48.878.109	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	15 Unit	48.883.430	48.878.109	48.878.109	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	163.375.550	163.375.550	163.375.550	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	115.494.000	115.494.000	115.494.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	47.881.550	47.881.550	47.881.550	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	320.875.000	320.875.000	320.875.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	120.875.000	120.875.000	120.875.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	2.087.256.917	2.205.381.917	2.205.381.917	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	4 Angka	4 Angka	4 Angka	26.037.510	26.037.510	26.037.510	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	26.037.510	26.037.510	26.037.510	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	1.428.105.036	1.546.230.036	1.546.230.036	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.428.105.036	1.546.230.036	1.546.230.036	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jerakah)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tugurejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Randugarut)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangkang Wetan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangunharjo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Mangkang Kulon)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100.00 persen	100.00 persen	100.00 persen	633.114.371	633.114.371	633.114.371	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	633.114.371	633.114.371	633.114.371	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98.00 persen	98.00 persen	98.00 persen	14.641.600.509	14.879.364.316	14.879.364.316	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	297 Kegiatan	9.928.120.910	10.165.884.717	10.165.884.717	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	58.125.000	58.125.000	58.125.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	8.150.000.000	8.150.000.000	8.150.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jerakah	12 Unit	12 Unit	12 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Tugurejo	17 Unit	17 Unit	17 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Karanganyar	10 Unit	10 Unit	10 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Randugarut	11 Unit	11 Unit	11 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Mangkang Wetan	9 Unit	9 Unit	9 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Mangunharjo	6 Unit	6 Unit	6 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Mangkang Kulon	13 Unit	13 Unit	13 Unit				APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.719.995.910	1.957.759.717	1.957.759.717	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jerakah	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tugurejo	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karanganyar	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas	22 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Randugarut								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan	23 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangunharjo	26 Pokmas / Ormas	26 Pokmas / Ormas	26 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkang Kulon	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas	20 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	4.713.479.599	4.713.479.599	4.713.479.599	APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4.681.409.599	4.681.409.599	4.681.409.599	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Jerakah)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Tugurejo)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Karanganyar)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Randugarut)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Mangkang Wetan)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan (Mangunharjo)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga					
		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan (Mangkang Kulon)	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga					
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	32.070.000	32.070.000	32.070.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.00 persen	15.00 persen	15.00 persen	22.500.000	22.500.000	22.500.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	2 Angka	2 Angka	2 Angka	22.500.000	22.500.000	22.500.000	APBD Kota Semarang	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	22.500.000	22.500.000	22.500.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92.00 persen	92.00 persen	92.00 persen	72.667.550	72.667.550	72.667.550	APBD Kota Semarang	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat,	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	72.667.550	72.667.550	72.667.550	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2 Orang	2 Orang	2 Orang	72.667.550	72.667.550	72.667.550	APBD Kota Semarang	

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tugu Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tugu;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tugu ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Tugu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tugu Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

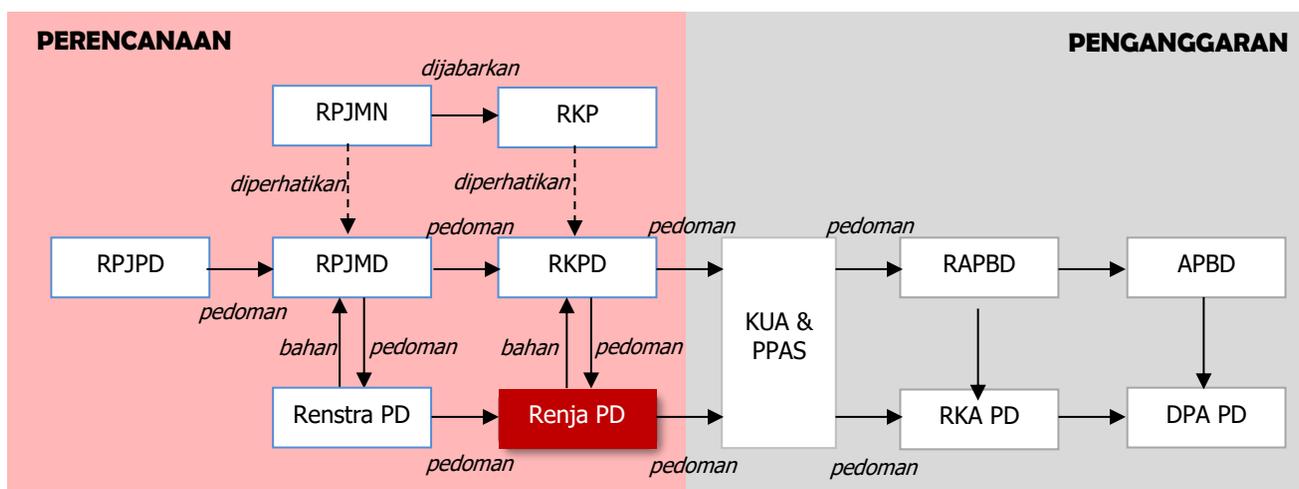
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tugu Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Mijen Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun sehubungan dengan dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan dan pagu indikatif, serta penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2023, termasuk pada Kecamatan Mijen Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Mijen Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	30,00 %	30,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	31 Dokumen	5 Dokumen (16,13 %)	7 Dokumen (22,58 %)	1 Dokumen (3,23%)	14,29	6 Dokumen	19,35
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun dan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRASKPD) yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1 Dokumen (9,09 %)	3 Dokumen (27,27 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	9,09
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Mijen		1 Dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	- Jumlah Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	- Jumlah Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	100,00	2 Dokumen	40,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
		- Jumlah Dokumen Pelaporan	Jumlah Dokumen Pelaporan	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00 %)	3 Dokumen (30,00 %)	2 Dokumen (20,00 %)	66,67	4 Dokumen	40,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	0 Laporan (0,00 %)	0,00	1 Laporan	20,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	2 Laporan (40,00 %)	100,00	3 Laporan	60,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100,00 %	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	30,00 %	30,00
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00%	100,00% (20,00 %)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	30,00 %	30,00
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 % (535 Orang/bulan)	100,00 % 107 Orang/bulan (20,00 %)	107 Orang/bulan (20,00 %)	98 Orang/bulan (18,32 %)	91,59	205 Orang/bulan	38,32
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00 % (60 Dokumen)	100,00 % 12 Dokumen) (20,00 %)	12 Dokumen (20,00 %)	6 Dokumen (10,00 %)	50,00	18 Dokumen	30,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 Dokumen	4 Dokumen (20,00%)	3 Dokumen (15,00%)	2 Dokumen (10,00%)	66,67	6 Dokumen	30,00
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (20,00 %)	100,00	2 Laporan	40,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (10,00 %)	50,00	3 Laporan	30,00
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	1 Dokumen (20,00 %)	1 Dokumen (20,00 %)	0 Dokumen (0,00 %)	0,00	1 Dokumen	20,00
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	- Persentase Tersedianya sarana dan prasarana	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	30,00 %	30,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	perkantoran SKPD 100%	perkantoran SKPD 100%							
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	30,00 %	30,00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	75 Jenis (30 paket)	15 Jenis (6 Paket) (20,00 %)	6 Paket (20,00 %)	3 Paket (10,00 %)	50,00	9 Paket	30,00
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Jenis (25 paket)	3 Jenis (5 Paket) (20,00 %)	5 Paket (20,00 %)	5 Paket (20,00 %)	100,00	10 Paket	40,00
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	300 Jenis (60 Paket)	60 Jenis (12 Paket) (20,00 %)	12 Paket (20,00 %)	6 Paket (10,00 %)	50,00	18 Paket	30,00
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	55 Jenis (60 Paket)	11 Jenis (12 paket) (20,00 %)	12 Paket (20,00 %)	6 Paket (10,00 %)	50,00	18 Paket	30,00
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jumlah tamu yang berkunjung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500 Orang (60 Laporan)	550 Orang (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Kegiatan (60 Laporan)	18 Kegiatan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Jenis (12 Dokumen)	4 Jenis (1 Dokumen) (8,33 %)	8 Dokumen (66,67 %)	6 Dokumen (50,00 %)	75,00	7 Dokumen	58,33
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	30,00 %	30,00
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	2 Jenis (20,00 %)	3 Unit (30,00 %)	2 Unit (20,00 %)	66,67	4 Unit	40,00
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	30,00 %	30,00
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan (60 Laporan)	12 Bulan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Jenis (60 Laporan)	6 Jenis (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	30,00 %	30,00
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	165 Unit	32 Unit (19,39 %)	32 Unit (19,39 %)	32 Unit (19,39 %)	100,00	64 Unit	38,79
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Rehabilitasi gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Gedung	3 Gedung (20,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	9 Unit	60,00
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	15 Jenis	3 Jenis (20,00 %)	6 Unit (40,00 %)	6 Unit (40,00 %)	100,00	9 Unit	60,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Dipelihara/Direha bilitasi							
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Pemeliharaan/Reha bilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	8 Jenis	2 Jenis (25,00 %)	2 Unit (25,00 %)	2 Unit (25,00 %)	100,00	4 Unit	50,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)	95,00%	91,30 %	92,00 %	93,51 %	101,64	101,64	106,99
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	5 Angka	0 Angka (0,00 %)	1 Angka (20,00 %)	0Angka (0,00 %)	0,00	0 Angka	0,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di	10 Dokumen	2 Dokumen (20,00 %)	9 Dokumen (90,00 %)	3 Dokumen (30,00 %)	33,33	5 Dokumen	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Tingkat Kecamatan							
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	30,00 %	30,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan (60 Laporan)	1 Kegiatan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
		- Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN		100,00%	100,00 %	-	-	-	-	-
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Wilayah Kecamatan							
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemukakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Kantor Kelurahan Purwosari	Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
		- Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemukhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)	
			Wilayah Kecamatan								
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)	
			Wilayah Kecamatan								
		-	Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00%	100,00 % (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	100,00 % (20,00%)	100,00 % (20,00 %)	50,00 % (10,00 %)	50,00	30,00 %	30,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Kegiatan (60 Laporan)	3 Kegiatan (12 Laporan) (20,00 %)	12 Laporan (20,00 %)	6 Laporan (10,00 %)	50,00	18 Laporan	30,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100,00%	99,64 %	98,00 %	51,37 %	54,42	54,42	54,42

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.510 Kegiatan	275 Kegiatan (10,96 %)	498 Kegiatan (19,84 %)	545 Kegiatan (21,71 %)	109,44	820 Kegiatan	32,67
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	415 Angka (20 Lembaga)	399 Angka (4 Lembaga) (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	100,00	8 Lembaga	40,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	70 Kegiatan	13 Kegiatan (18,57 %)	14 Unit (20,00 %)	14 Unit (20,00 %)	100,00	27 Unit	38,57
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	49 Kegiatan	9 Kegiatan (18,37 %)	10 Unit (20,41 %)	10 Unit (20,41 %)	100,00	19 Unit	38,78
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	50 Kegiatan	10 Kegiatan (20,00 %)	9 Unit (18,00 %)	9 Unit (18,00 %)	100,00	19 Unit	38,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemukhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	45 Kegiatan	9 Kegiatan (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	100,00	18 unit	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	45 Kegiatan	9 Kegiatan (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	9 Unit (20,00 %)	100,00	18 unit	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purvosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purvosari)	52 Kegiatan	12 Kegiatan (23,77 %)	10 Unit (19,23 %)	10 Unit (19,23 %)	100,00	22 Unit	42,31
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	54 Kegiatan	12 Kegiatan (22,22 %)	16 Unit (29,63 %)	16 Unit (29,63 %)	100,00	28 Unit	51,85

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemukhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	54 Kegiatan	14 Kegiatan (25,93 %)	8 Unit (14,81 %)	10 Unit (18,52 %)	125,00	24 unit	44,44
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	51 Kegiatan	10 Kegiatan (19,61 %)	12 Unit (23,53 %)	12 Unit (23,53 %)	100,00	22 Unit	43,14
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	52 Kegiatan	12 Kegiatan (23,08 %)	10 Unit (19,23 %)	10 Unit (19,23 %)	100,00	22 Unit	42,31
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	58 Kegiatan	17 Kegiatan (29,31 %)	12 Unit (20,69 %)	12 Unit (20,69 %)	100,00	29 Unit	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	50 Kegiatan	10 Kegiatan (20,00 %)	11 Unit (22,00 %)	11 Unit (22,00 %)	100,00	21 Unit	42,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	52 Kegiatan	11 Kegiatan (21,15 %)	12 Unit (23,08 %)	12 Unit (23,08 %)	100,00	23 Unit	44,23
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	50 Kegiatan	12 Kegiatan (24,00 %)	10 Unit (20,00 %)	10 Unit (20,00 %)	100,00	22 Unit	44,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	52 Kegiatan	12 Kegiatan (23,08 %)	14 Unit (26,92 %)	14 Unit (26,92 %)	100,00	26 unit	50,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	130 Kegiatan (20 Pokmas/O rmas)	15 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	100 Kegiatan (20 Pokmas/O rmas)	8 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	120 Kegiatan (20 Pokmas/O rmas)	12 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	115 Kegiatan (20 Pokmas/O rmas)	6 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polaman)	100 Kegiatan (20 Pokmas/O rmas)	6 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwosari)	110 Kegiatan (20 Pokmas/O rmas)	8 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambangan)	140 Kegiatan (20 Pokmas/O rmas)	7 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonolopo)	160 Kegiatan (20 Pokmas/O rmas)	6 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	8 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	110 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	8 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	155Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	10 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	90 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	7 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonoplumbon)	125 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	12 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatisari)	125 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	11 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pesantren)	115 Kegiatan (20 Pokmas/Ormas)	10 Kegiatan (4 Pokmas / Ormas) (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	4 Pokmas / Ormas (20,00 %)	100,00	8 Pokmas / Ormas	40,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	90 Dokumen	9 Dokumen (10,00 %)	130 Dokumen (144,44 %)	17 Dokumen (18,89 %)	13,08	26 Dokumen	28,89
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Mijen)	50 Dokumen (20 Lembaga)	8 Dokumen (4 Lembaga) (20,00 %)	4 Lembaga (20,00 %)	3 Lembaga (15,00 %)	75,00	7 Lembaga	35,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	8 Lembaga (17,78 %)	88,89	17 Lembaga	37,78
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	18 Lembaga	40,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	18 Lembaga	40,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	18 Lembaga	40,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	8 Lembaga (17,78 %)	88,89	17 Lembaga	37,78
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	18 Lembaga	40,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemukakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			(Kelurahan Tambangan)							
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	18 Lembaga	40,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	18 Lembaga	40,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	18 Lembaga	40,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	18 Lembaga	40,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	8 Lembaga (17,78 %)	88,89	17 Lembaga	37,78

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	8 Lembaga (17,78 %)	88,89	17 Lembaga	37,78
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	18 Lembaga	40,00
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	45 Lembaga	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	9 Lembaga (20,00 %)	100,00	18 Lembaga	40,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Kegiatan (10 Laporan)	6 Kegiatan (2 Laporan) (20,00 %)	2 Laporan (20,00 %)	1 Laporan (10,00 %)	50,00	3 Laporan	30,00
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan		5 Kelurahan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30,00%	62,04 %	15,00 %	35,71 %	238,07	35,71	35,71

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisas i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	360 Angka	41 Angka (11,39 %)	84 Angka (23,33%)	27 Angka (7,50 %)	32,14	68 Angka	18,89
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan (65 Laporan)	1 Kegiatan (13 Laporan) (20,00 %)	15 Laporan (23,08 %)	6 Laporan (9,23 %)	40,00	19 Laporan	29,23
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100,00%	78,00 %	92,00 %	0,00 %	0,00	78,00	78,00

Kode Rekening	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023 (Pemutakhiran)	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
						Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi i (%)	Realisasi Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10 = (6+8)	11 = (10/5)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	10 Kegiatan	1 Kegiatan (10,00 %)	2 Kegiatan (20,00 %)	0 Kegiatan (0,00 %)	0,00	1 Kegiatan	10,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	10 Kegiatan (500 Orang)	1 Kegiatan (100 Orang) (20,00 %)	100 Orang (20,00 %)	0 Orang (0,00 %)	0,00	100 Orang	20,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2023

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu pengeseran anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Mijen Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Mijen Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	URUSAN KEWILAYAHAN	53.640.603.103	24.288.074.353	45,28
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.673.399.903	11.221.722.918	54,28
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.663.000	0	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.330.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.884.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.469.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.675.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.870.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	972.000	0	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.463.000	0	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.347.139.642	9.065.194.528	52,26
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.573.379.642	8.768.074.528	52,90
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	770.760.000	297.120.000	38,55
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	775.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.549.000	0	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	676.000	0	0,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.365.075.017	1.139.900.400	83,50
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.753.000	2.037.800	30,18
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	479.085.848	466.342.000	97,34

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.870.000	16.341.600	39,03
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	6.734.000	39,61
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.175.000	675.000	2,10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.248.000	22.865.000	17,97
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	660.943.169	624.905.000	94,55
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.250.000	7.860.000	69,87
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.250.000	7.860.000	69,87
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.557.244	96.583.569	39,17
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.445.244	60.583.569	32,85
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.112.000	36.000.000	57,96
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.685.715.000	912.184.421	54,11
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.150.000	51.105.700	29,86
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.565.000	9.921.721	14,91
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.078.000.000	649.069.000	60,21
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370.000.000	202.088.000	54,62
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.660.446.200	1.464.070.755	40,00
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	172.400.000	8.325.000	4,83
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	172.400.000	8.325.000	4,83
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.190.546.200	881.129.980	40,22
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	1.291.546.200	585.911.413	45,37
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)	65.000.000	21.482.060	33,05
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	62.000.000	19.335.636	31,19

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	61.000.000	22.205.226	36,40
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	61.000.000	22.985.125	37,68
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	62.000.000	17.567.015	28,33
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	62.000.000	19.970.097	32,21
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	68.000.000	22.986.374	33,80
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	66.000.000	42.809.417	64,86
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	62.000.000	20.879.000	33,68
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	65.000.000	17.409.369	26,78
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	65.000.000	12.038.386	18,52
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	63.000.000	18.682.264	29,65
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	74.000.000	17.864.857	24,14
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	63.000.000	19.003.741	30,16
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.297.500.000	574.615.775	44,29
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.297.500.000	574.615.775	44,29
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.165.235.000	11.569.980.680	39,67
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17.424.435.000	6.427.339.000	36,89
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	49.435.000	43.122.250	87,23
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan Mijen)	1.350.000.000	901.799.500	66,80
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	950.000.000	194.224.000	20,44
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	950.000.000	562.563.000	59,22

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	950.000.000	513.373.000	54,04
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Polaman)	950.000.000	429.711.000	45,23
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	950.000.000	152.723.000	16,08
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	950.000.000	0	0,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	950.000.000	418.631.000	44,07
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Mijen)	950.000.000	70.671.000	7,44
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	950.000.000	19.893.000	2,09
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	950.000.000	542.961.000	57,15
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	950.000.000	775.661.000	81,65
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	950.000.000	670.772.000	70,61
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	950.000.000	328.330.000	34,56
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	950.000.000	452.913.000	47,68
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	275.000.000	60.435.000	21,98
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	175.000.000	41.180.000	23,53
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	175.000.000	23.790.000	13,59
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	175.000.000	13.162.000	7,52
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	175.000.000	15.400.000	8,80
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	175.000.000	18.455.000	10,55
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	175.000.000	29.785.500	17,02
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	175.000.000	13.390.000	7,65
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	175.000.000	26.015.000	14,87
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	175.000.000	24.867.500	14,21

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	175.000.000	15.615.000	8,92
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	175.000.000	15.282.500	8,73
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	175.000.000	21.326.250	12,19
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	175.000.000	15.667.500	8,95
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	175.000.000	15.620.000	8,93
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.740.800.000	5.142.641.680	43,80
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	47.011.280	34,31
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Cangkiran)	914.400.000	405.414.500	44,34
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bubakan)	574.200.000	250.713.000	43,66
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Karangmalang)	403.800.000	154.868.500	38,35
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Polaman)	331.800.000	120.338.000	36,27
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Purwosari)	543.000.000	229.700.500	42,30
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambangan)	445.200.000	184.884.000	41,53
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonolopo)	1.209.000.000	565.596.400	46,78
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Mijen)	985.200.000	435.095.000	44,16
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatibarang)	484.800.000	203.215.500	41,92
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kedungpane)	890.400.000	413.535.000	46,44
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Ngadirgo)	1.033.200.000	464.325.000	44,94
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Wonoplumbon)	632.400.000	285.355.000	45,12
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatisari)	2.129.400.000	1.026.420.000	48,20
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pesantren)	777.000.000	354.370.000	45,61
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	250.000.000	1.800.000	0,72

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50.830.000	4.800.000	9,44
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.830.000	4.800.000	9,44
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.830.000	4.800.000	9,44
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.692.000	27.500.000	30,32
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.692.000	27.500.000	30,32
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90.692.000	27.500.000	30,32

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 92 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen kota Semarang adalah sebesar Rp 53.640.603.103,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 24.288.074.353,- (45,28 %). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 29.352.528.750,- (54,72 %).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada

Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 Trw II	2023
Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	91,30	93,51	91,50
Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1	-	-	-	-	1	-	-
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00
Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	84,00	96,15	98,00
Sasaran 3 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	43,00	-	-	-	-	62,04	-	-
	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	83,36	85,04	86,72	88,40	90,08	-	56,00	85,04

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET RENSTRA / IKU					REALISASI		PROYEKSI
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 Trw II	2023
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90,00	92,00	95,00	98,00	100,00	58,00	0,00	92,00
Sasaran 4 : Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Angka	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	72,06	74,80	74,00

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mijen Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”**. Dari target sebesar 91,50, realisasinya sebesar 93,51 (capaian 102,20)%;
- b. Sasaran Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut :
 - 1) Sasaran 1 : **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu **“Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”**. Dari target sebesar 100,00 %, realisasinya sebesar 50,00 % (capaian 50,00%);
 - 2) Sasaran 2 : **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja **“Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”**. Dari target sebesar 98,00 %, realisasinya sebesar 96,15 % (capaian 98,11%).
 - 3) Sasaran 3 : **“Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 2 indikator yaitu **“Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”**, dimana realisasinya sebesar 56,00 % dari target sebesar 85,04

% (capaian 65,85 %) dan “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan” dimana realisasinya sebesar 0 % dari target sebesar 92,00 % (capaian 0,00 %). Hal ini disebabkan seluruh variabel indikator sedang dalam proses pencapaian target. Diharapkan pada akhir tahun, target yang ditetapkan dapat tercapai.

- 4) Sasaran 4 : **“Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”. Dari target sebesar 73,00 realisasinya sebesar 74,80 (capaian 102,46 %).

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Kecamatan Mijen dalam pelaksanaan fungsinya di bidang kewilayahan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.4
Indikator Keberhasilan Daerah Kecamatan Mijen
Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA	PROYEKSI
		2022	2023	2024	2025	2026	Trw II 2023	2024
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum dan wawasan kebangsaan ditingkat kewilayahan	86,68 %	88,52 %	90,86 %	93,20 %	95,04 %	31,37 %	90,00 %
2	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima layanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91,00 %	92,00 %	93,00 %	94,00 %	95,00 %	93,51 %	93,00 %
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	97,00 %	98,00 %	99,00 %	100,00 %	100,00 %	96,15 %	98,00 %
ASPEK DAYA SAING								
1	Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban	11,14 %	10,52 %	9,9 %	9,28 %	8,85 %	3,38 %	9,00 %

Untuk selanjutnya, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka Kecamatan Mijen Kota Semarang berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender sebagai berikut : Dari 5 program, 13 kegiatan, dan 92 sub kegiatan pada Kecamatan Mijen di tahun 2023, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 2 program (40,00 %), 3 kegiatan (23,08 %) dan 4 sub kegiatan (4,35 %). Dari jumlah anggaran pada Kecamatan Mijen Kota Semarang di tahun 2023 sebesar Rp 53.578.189.934,- , jumlah anggaran yang responsif gender adalah sebesar Rp 60.310.290,- (0,11 %).

Masih terkait pelayanan Kecamatan Mijen Kota Semarang, inovasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Jemput Bola dan Sisir PBB

Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 3 kali dalam satu bulan di Kelurahan di Kecamatan Mijen. Program Sisir PBB ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.

2. FORLAK (Forum Kolaborasi Apik) Pecah-Bayar SPPT PBB di Kecamatan Mijen

Merupakan kolaborasi yang terintegrasi antara Pegawai, Dinas terkait dan Stakeholder Eksternal dalam rangka upaya percepatan pelayanan pecah-bayar PBB di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

3. Mijen Mari Tanem (Mijen Remaja Putri Tanpa Anemia)

Merupakan program penanggulangan Anemia pada Remaja Putri usia 15-23 Tahun yang dilaksanakan di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen. Pada remaja putri tersebut dilakukan pengukuran kadar darah, selanjutnya bagi yang positif anemia akan diberi suplemen dan pendampingan dari tenaga kesehatan.

4. SIPONJEN KITA

Merupakan salah satu bentuk inovasi Kelurahan Mijen dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ke arah digitalisasi. Dengan aplikasi ini masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyampaian informasi dan pengaduan secara online dan cepat.

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mijen sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Mijen terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mijen sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah:

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disruptif atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Mijen belum mencukupi sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah disusun.
- 3) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Perkembangan Kota Semarang yang semakin maju, masyarakat yang semakin kritis dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Mijen adalah sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
- 3) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.

c. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Mijen hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.
- 2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.
SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.

- 4) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini penerapan teknologi informasi dalam pelayanan masih kurang optimal.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2023 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2024, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota

Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Mijen memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Pelaksanaan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026

Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Untuk tahun 2023, secara umum Kecamatan Mijen Kota Semarang menjalankan beberapa program prioritas, yaitu :

- (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan;
- (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah;
- (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan;
- (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah;
- (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE;

- (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari;
- (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan.

3. Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Memasuki tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, hate speech, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

4. Evaluasi program pelayanan akhir pekan

Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang

Di tahun 2023, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

6. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan Mijen

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mijen perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja,

ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Mijen Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Mijen Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				52.702.380.499	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen				52.702.380.499	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen			21.124.563.333	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen			21.124.563.333	
			Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	13.913.000	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD		100 %	13.913.000		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	11.603.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	11.603.000	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.205.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.205.000	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	1 Dokumen	3.509.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	3.509.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			SKPD								
X.XX.01 .2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.094.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.094.000	
X.XX.01 .2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.300.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1.300.000	
X.XX.01 .2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.495.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.495.000	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	2.310.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	2.310.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Daerah					Daerah					
X.XX.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	597.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	597.000	
X.XX.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.713.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.713.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	17.822.044.027	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Mijen	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	17.822.044.027	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	17.820.544.027	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	17.820.544.027	
X.XX.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang	17.049.784.027	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang	17.049.784.027	
X.XX.01 .2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	770.760.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	770.760.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	1.500.000			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	1.500.000	
X.XX.01 .2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	
X.XX.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	799.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	799.000	
X.XX.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Mijen	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	301.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	301.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Mijen	Persentase Tersedianya sarana dan	100 %	3.288.606.306	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Mijen	Persentase Tersedianya sarana dan	100 %	3.288.606.306	6

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	KABUPATEN/KOTA		prasarana perkantoran SKPD			KABUPATEN/KOTA		prasarana perkantoran SKPD			
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.366.081.002	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Mijen	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.366.081.002	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.753.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.753.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	479.085.848	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	479.085.848	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.870.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.870.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.654.455	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Mijen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.654.455	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.675.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.675.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	111.374.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	111.374.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	8 Dokumen	691.668.699	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	8 Dokumen	691.668.699	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Berbasis Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD		Berbasis Elektronik pada SKPD			
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	8.041.060	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	8.041.060	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.041.060	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.041.060	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	228.769.244	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	228.769.244	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	166.657.244	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	166.657.244	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.112.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	62.112.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.685.715.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mijen	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.685.715.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	171.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	171.150.000	
X.XX.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	66.565.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	66.565.000	
X.XX.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.078.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.078.000.000	
X.XX.01 .2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	370.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	370.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mijen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	3.617.107.640	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mijen	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	3.617.107.640	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	121.748.040	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	121.748.040	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	121.748.040	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	121.748.040	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.204.975.480	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Mijen	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2.204.975.480	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	12 Laporan	1.279.842.820	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	12 Laporan	1.279.842.820	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67.700.000		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	67.700.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			(Kelurahan Cangkiran)					(Kelurahan Cangkiran)			
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	12 Laporan	68.958.650		Kelurahan Bubakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	12 Laporan	68.958.650	
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan	63.553.910		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan	63.553.910	
		Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	12 Laporan	70.328.350		Kelurahan Polaman	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	12 Laporan	70.328.350	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	12 Laporan	62.000.000		Kelurahan Purwosari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	12 Laporan	62.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	12 Laporan	66.591.750		Kelurahan Tambangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)	12 Laporan	66.591.750	
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan	68.000.000		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan	68.000.000	
		Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan	66.000.000		Kelurahan Mijen	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan	66.000.000	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan	62.000.000		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan	62.000.000	
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	65.000.000		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	65.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)					Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)			
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	12 Laporan	65.000.000		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)	12 Laporan	65.000.000	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Laporan	63.000.000		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Laporan	63.000.000	
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan	74.000.000		Kelurahan Jatisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan	74.000.000	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan	63.000.000		Kelurahan Pesantren	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan	63.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Pesantren)					Pesantren)			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mijen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.290.384.120	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Mijen	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.290.384.120	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.290.384.120	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.290.384.120	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mijen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	27.819.187.526	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Mijen	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	27.819.187.526	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	498 Kegiatan	16.524.211.361	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	498 Kegiatan	16.524.211.361	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	47.136.620	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	47.136.620	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	14 Unit	1.350.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	14 Unit	1.350.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Cangkir-an	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkir-an)	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Cangkir-an	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkir-an)	10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	950.000.000		Kelurahan Bubakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	950.000.000		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	9 Unit	950.000.000		Kelurahan Polaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	9 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Purwosari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	16 Unit	950.000.000		Kelurahan Tambangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambangan)	16 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Wonolo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	10 Unit	950.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		po	Terbangun (Kelurahan Wonolopo)					Terbangun (Kelurahan Wonolopo)			
		Kelurahan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Mijen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	12 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	12 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	11 Unit	950.000.000		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	11 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	950.000.000		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	10 Unit	950.000.000		Kelurahan Jatisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	10 Unit	950.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	14 Unit	950.000.000		Kelurahan Pesantren	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	14 Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas/Ormas	134.314.356	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)	4 Pokmas/Ormas	134.314.356	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/Ormas	119.707.585		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/Ormas	119.707.585	
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/Ormas	113.866.990		Kelurahan Bubakan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/Ormas	113.866.990	
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas/Ormas	121.410.070		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas/Ormas	121.410.070	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/Ormas	114.886.690		Kelurahan Polaman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/Ormas	114.886.690	
		Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/Ormas	120.141.960		Kelurahan Purwosari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/Ormas	120.141.960	
		Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/Ormas	116.610.710		Kelurahan Tambangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/Ormas	116.610.710	
		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	4 Pokmas/Ormas	123.026.200		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	4 Pokmas/Ormas	123.026.200	
		Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/Ormas	125.032.315		Kelurahan Mijen	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/Ormas	125.032.315	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/Ormas	123.177.670		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/Ormas	123.177.670	
		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/Ormas	126.345.350		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/Ormas	126.345.350	
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	4 Pokmas/Ormas	125.341.860		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)	4 Pokmas/Ormas	125.341.860	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/Ormas	125.341.155		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/Ormas	125.341.155	
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/Ormas	118.916.020		Kelurahan Jatisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/Ormas	118.916.020	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/Ormas	118.955.810		Kelurahan Pesantren	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/Ormas	118.955.810	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	130 Dokumen	11.294.976.165	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	130 Dokumen	11.294.976.165	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	112.269.210	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	112.269.210	
		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	884.692.415		Kelurahan Cangkiran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	884.692.415	
		Kelurahan Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	546.074.360		Kelurahan Bubakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	546.074.360	
		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	372.536.020		Kelurahan Karangmalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	372.536.020	
		Kelurahan Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakatan	300.284.960		Kelurahan Polaman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakatan	300.284.960	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)					Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)			
	Kelurahan Purwosari		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	515.558.040		Kelurahan Purwosari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	515.558.040	
	Kelurahan Tambangan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	416.697.540		Kelurahan Tambangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	416.697.540	
	Kelurahan Wonolopo		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.178.673.800		Kelurahan Wonolopo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.178.673.800	
	Kelurahan Mijen		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	952.867.685		Kelurahan Mijen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	952.867.685	
	Kelurahan Jatibarang		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	454.322.330		Kelurahan Jatibarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	454.322.330	
	Kelurahan Kedungpane		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	856.754.650		Kelurahan Kedungpane	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	856.754.650	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.558.140		Kelurahan Ngadirgo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.558.140	
		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	599.758.845		Kelurahan Wonoplumbon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	599.758.845	
		Kelurahan Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.103.183.980		Kelurahan Jatisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	2.103.183.980	
		Kelurahan Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	750.744.190		Kelurahan Pesantren	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	750.744.190	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	250.000.000	
		Kecamatan Mijen	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan				Kecamatan Mijen	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan		1 Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	50.830.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	50.830.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84 Angka	50.830.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Mijen	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84 Angka	50.830.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	50.830.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mijen	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	50.830.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	90.692.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Mijen	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	90.692.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi	2 Kegiatan	90.692.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Mijen	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi	2 Kegiatan	90.692.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan					Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan			
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	90.692.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mijen	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	90.692.000	

Sumber : Kecamatan Mijen Kota Semarang, 2023

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijarah berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Mijen Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Mijen Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Mijen Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kecamatan Mijen Kota Semarang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VO LUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN CANGKIRAN					
1.	Pelebaran Jembatan	Jalan Jatikalangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/300 M2	Kondisi kontur jalan naik turun sehingga membahayakan pengguna jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN BUBAKAN					
2.	Penerangan Jalan	Jalan Maryadi	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	960.000.000/32 Tiang	Kurangnya Penerangan jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
3.	Pengaspalan Jalan Gg	Gg kelengkeng	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	640.000.000/4500 M2	Jalan Rusak (Dinas Pekerjaan Umum)
4.	Pembangunan DAM	Sungai Gendruwo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.400.000.000/17112,29 M3	Rusak Berat (Dinas Pekerjaan Umum
5.	Pengaspalan Jalan	Jalan Maryadi	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.350.000.000/7500 M2	Jalan Rusak (Dinas Pekerjaan umum)
KELURAHAN KARANGMALANG					
6.	Taman Kota	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	750.000.000/1 paket	Belum adanya taman kota (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
7.	Penerangan Jalan Umum	RW 1, 2, DAN 3 KELURAHAN KARANGMALAN G	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/33 Tiang lamp	Kurangnya Penerangan Lampu Jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
8.	Joging Track dan lampu lapangan	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas sarana	250.000.000/800 Meter	Belum adanya Joging Track dan lampu lapangan (Dinas

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VO LUME	CATATAN
			dan prasarana wilayah		Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
9.	Talud dan Bronjong	DK. SEBUMI	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/200 Meter	Belum adanya talud dan bronjong (Dinas Pekerjaan Umum)
10.	Talud dan Bronjong	DK. GEDUNGAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/200 Meter	Belum adanya talud dan bronjong (Dinas Pekerjaan Umum)
11.	Pembangunan Talud Irigasi	DK. GERUNG	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/900 Meter	Belum adanya talud saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
12.	Pengecoran Jl. Dawung	DK. DAWUNG	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/300 Meter	Jalan Rusak Parah (Dinas Pekerjaan Umum)
13.	Alat Rebana	DK. GERUNG	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	150.000.000/1 Paket	menndukung kegiatan warga (Dinas Pendidikan)
14.	Alat Pertanian Traktor	DK. GEDUNGAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	20.000.000/2 Pake	Mendukung ekonomi warga di sektor pertanian (Dinas Pertanian)
15.	PHBI Tingkat Kelurahan	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	50.000.000/1 Paket	mendukung kegiatan warga (Dins Kebudayaan dan Pariwisata)
16.	Nyadran Kelurahan Karangmalang di 3 RW	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	15.000.000/3 Paket	mendukung kegiatan warga (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
17.	Pembuatan Taman	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	150.000.000/1 Paket	Belum adanya taman kota (Dinas Pariwisata)
KELURAHAN POLAMAN					
18.	Sarana dan Prasarana penunjang kolam ASA MINA MULIA	Kelurahan Polaman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	205.000.000/1 paket	Menunjang ekonomi masy (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
19.	Talud Jalan	Jalan Seduren	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/1200 M3	Jalan longsor ke saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN PURWOSARI					
20.	Pembangunan Jembatan	Jl. Tegalsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/100 M2	jembatan masih bambu (Dinas Pekerjaan Umum)
21.	Pembangunan betonisasi jalan 20 cm	Jl. Jatiombo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	525.000.000/3000 Meter	Lanjutan (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN TAMBANGAN					
22.	Pavingisasi Jalan Masuk Kampung Ternak Sapi/Kambing	Tambangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/400 Meter	Kondisi jalan Rusak Parah (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
23.	Pengaspalan Jalan	Jalan Raya Genuk-Duwet	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/600 Meter	Kondisi Jalan Rusak Berat (Lanjutan) (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
24.	Jembatan	Sidorejo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/1 Paket	Kondisi Jembata Rusak Parah Akibat Terkena Banjir (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
25.	Talud Jalan	Jl. Tembus RW 01-RW 03	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/1000 Meter	Belum Ada Talud Jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VO LUME	CATATAN
26.	Pembangunan Jalan Raya Bandungsari	Bandungsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000/240 Meter	Kondisi jalan Rusak Parah/Pengecoran Jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
27.	Pembangunan Jalan	Jl. Danang Citro Duwet-Sidorejo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/4000 Meter	Jalan Rusak Parah (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
28.	Gedung Pos Paud	Duwet	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000/1 Paket	Belum Ada Gedung Masih Berupa Tanah dan Siswa Belajar Di Balai RT (dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN WONOLOPO					
29.	Pelebaran Jalan Utama Wonolopo	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	358.000.000/2500 Meter	Jalan terlalu sempit untuk berpapasan mobil (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
30.	Pekerjaan PJU	WONOLOPO	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000/15 Titik	tidak adanya penerangan jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
31.	Talud Jalan Utama Wonolopo	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/2500 Meter	Saluran kurang berfungsi dengan baik (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
32.	Pelebaran Jalan masuk Lapangan Leri	JL. TEGALSARI	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/1750 Meter	Jalan sempit dan rusak (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
33.	Pembangunan Kantor Baru	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/400 M3	Kondisi Gedung Rusak (Dinas Penataan Ruang)
34.	Peningkatan sarpras kampung tematik embung	Jalan Embung Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	6.000.000.000/18.000.000 Meter	Sarpras Belum Optimal (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN MIJEN					
35.	Pembangunan Balai Kelurahan Mijen	Kelurahan Mijen	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	6.500.000.000/600 M ²	Belum ada Balai Kelurahan (Dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN JATIBARANG					
36.	Pembangunan kantor kelurahan jatibarang	Jl. Raya Duduhan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/300 Meter Pers	Urgen dikarenakan gedung teribas SORR (Semarang Outer Ring Road) (Dinas Penataan Ruang)
37.	Pekerjaan beton jalan	Dk Tegalsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/600 Meter Pers	Sangat dibutuhkan untuk kegiatan akses utama warga tegalsari (Dinas Pekerjaan Umum)
38.	Pekerjaan bahu beton jalan (kanan-kiri)	Jl. Raya Duduhan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	510.000.000/4000 Meter	sangat dibutuk untuk manuver kendaraan karena sering terjadinya intensitas kecelakaan (Dinas Pekerjaan Umum)
39.	Saluran Air Irigasi/Pengendalian Banjir	Tlogo tegalsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600.000.000/600 Meter	sangat diperlukan sebagai irigasi lahan pertanian dan pengendalian banjir (Dinas Pekerjaan Umum)
40.	Pekerjaan pembangunan limbah peternakan	Jl. Duduhan-Tlogo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/72 Meter Pers	Pengelolaan limbah kotoran sapi dimanfaatkan energi listrik dll (Dinas Lingkungan Hidup)
KELURAHAN KEDUNGPAHE					
41.	Rehab Rumah Dinas Lurah Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/72 M2	Dinas Penataan Ruang
42.	Pembangunan Saluran dan Talud Saluran	Sepanjang Jl. Untung Suropati RW. 01-RW. 04	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	1.500.000.000/800 M2	Dinas Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VO LUME	CATATAN
			wilayah		
43.	Rehab Balai Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000/200 M2	Dinas Penataan Ruang
44.	Rehab TK Pertiwi 22 Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000/60 M2	Dinas Penataan Ruang
45.	Pembangunan Kantor Baru Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000 /1000 M2	Dinas Penataan Ruang
KELURAHAN NGADIRGO					
46.	Pekerjaan Penerangan jalan Umum	RT 05,06,07 RW 04; RT 02,03 RW 02	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000/ 0 Unit	Kondisi jalan yang gelap perlu adanya penerangan jalan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
47.	Jembatan	Jalan RT 02 RW 03	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/ 0 Meter	Menurunnya kualitas jembatan yang memprihatinkan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
48.	Jembatan	Jalan RT 05 RW 03	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	450.000.000/ 0 Meter	kondisi jembatan yang memprihatinkan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
49.	Pekerjaan Pintu air	RT 01 RW 06	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/ 0 Meter	kondisi pintu air yang kecil mengakibatkan banjir apabila terjadi hujan lebat dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
50.	Pengaspalan Jalan	Jalan RW 02, RW 03, RW 07	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/2000 Meter	kondisi jalan yang kecil sehingga kesulitan ketika berpapasan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
51.	Pembangunan Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan Ngadirgo	Jl. Raya Ngadirgo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.500.000.000/ 0 Meter	Kondisi Kantor dan Balai sudah banyak yang rusak perlu adanya renovasi dan sudah diusulkan sejak tahun 2015 (Dinas Penataan Ruang)
52.	Jembatan	Jalan RW 03 dan RW 01	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	8.000.000.000/ 0 Meter	tidak adanya penghubung antar RW karena dipisahkan oleh sungai sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN WONOPLUMBON					
53.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan Djahuri	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/30 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena di malam hari terlalu gelap karena lokasi kanan dan kiri masih daerah hijau/kebundaran sebagian hutan jati (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
54.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/30 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena di malam hari terlalu gelap karena lokasi kanan dan kiri masih daerah hijau/kebundaran sebagian hutan jati (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
55.	Pembangunan Pavingisasi jalan dan talud jalan	DK Talun wilayah RW 01	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/600 M2	Perlunya peningkatan infrastruktur jalan raya (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
56.	Pembangunan Pavingisasi Jalan dan talud jalan	Jalan Sepedet Wonoplumbon	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	500.000.000/4000 M2	Perlunya pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalan penghubung antara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VO LUME	CATATAN
			wilayah		RT.04;RT.05;RT.07;RT.09 (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
57.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Jalan raya Wonoyoso RW.04	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/25 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
58.	Pembangunan pengaspalan jalan dan pelebaran jalan di wilayah Sebeluk RW 03 menuju ke RW 04 Wonoyoso	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/4000 Meter	Perlunya peningkatan insfrastuktur jalan raya (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN JATISARI					
59.	Lampu PJU	Jatisari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000 / 1 Paket	belum ada penerangan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
60.	Penambahan peralatan dan sarana olahraga	Jatisari Asri	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000 / 1 Paket	untuk sarana olahraga (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
61.	Pemb. Talud Saluran	Jatisari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000 / 300 M2	belum ada talud (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
62.	Pemb. Gedung Olahraga	Jatisari Permai	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000 / 1 Paket	untuk sarana olahraga (Dinas Penataan Ruang)
63.	Pelebaran Jalan	Jl. RM Hadi Soebeno Mijen	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	100.000.000.000/1.600.000 M2	Setiap Pagi Hari dan Ketika Weekend Selalu Terjadi Kemacetan (Dinas Pekerjaan Umum)
64.	Pembuatan Saluran dan Embung	Jatisari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.000.000.000/10.000 M2	Banjir Ketika Curah Hujan Lebat dan Lama (Dinas Pekerjaan Umum)
65.	Pembangunan Gedung PAUD	Jatisari Elok	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000 / 100 M2	untuk sarana belajar anak usia dini (Dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN PESANTREN					
66.	Pekerjaan Saluran	Jalan robyong depan villa lonjaten	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	270.000.000 /250 Meter	Belum ada saluran (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

Sumber: Kecamatan Mijen, 2022

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Mijen pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 66 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2023 yang tersebar di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan Major Project dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107

8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah “Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;

Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

- 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.

- 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.

- 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

- 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Adapun sasaran – sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut beserta indikator kinerjanya yaitu :

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
Dengan indikator sasaran yaitu **“Nilai AKIP Kecamatan Mijen”**
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik
Dengan indikator sasaran yaitu **“Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”**.

3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
Dengan indikator sasaran yaitu **“Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”**
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
Dengan indikator sasaran yaitu **Persentase “Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” dan “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”.**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,50
SASARAN 1: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100,00
SASARAN 2 : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	98,00
SASARAN 3 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	85,05
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	92,00
SASARAN 4 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	74,00

Sumber : Kecamatan Mijen, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Mijen memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
3. Melaksanakan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu :
 - (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan
 - (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah
 - (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan
 - (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
 - (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE
 - (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari
 - (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan terkait kewilayahan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Mijen Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Mijen Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 92 sub kegiatan, yang terdiri dari 26 sub kegiatan penunjang, dan 66 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 53.752.380.499,- yang bersumber dari dana APBD Kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Mijen Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Mijen					53.460.064.934	53.578.189.934	53.752.380.499		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.610.986.734	20.610.986.734	21.124.563.333		
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	17.663.000	17.663.000	13.913.000		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					17.663.000	17.663.000	13.913.000		
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	14.228.000	14.228.000	11.603.000		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.330.000	2.330.000	1.205.000	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.884.000	3.884.000	3.509.000	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.469.000	4.469.000	4.094.000	APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.675.000	1.675.000	1.300.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.870.000	1.870.000	1.495.000	APBD	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3.435.000	3.435.000	2.310.000	APBD	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	972.000	972.000	597.000	APBD	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.463.000	2.463.000	1.713.000	APBD	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	17.397.539.64 2	17.347.139.64 2	17.822.044.027	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	17.397.539.64 2	17.347.139.64 2	17.822.044.027		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	107 Orang	107 Orang	106 Orang	16.573.379.642	16.573.379.642	17.049.784.027	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	821.160.000	770.760.000	770.760.000	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000	3.000.000	1.500.000	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	775.000	775.000	400.000	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1.549.000	1.549.000	799.000	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	676.000	676.000	301.000	APBD	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %	100 %	100 %	3.195.784.092	3.246.184.092	3.288.606.306	APBD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	1.277.661.848	1.302.661.848	1.366.081.002	APBD	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6.753.000	6.753.000	6.753.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Bangunan Kantor yang Disediakan								
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	454.085.848	479.085.848	479.085.848	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	41.870.000	41.870.000	41.870.000	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.000.000	17.000.000	16.654.455	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	32.175.000	32.175.000	18.675.000	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	127.248.000	127.248.000	111.374.000	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	598.530.000	598.530.000	691.668.699	APBD	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	11.250.000	11.250.000	8.041.060	APBD	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	2 Unit	11.250.000	11.250.000	8.041.060	APBD	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	221.157.244	246.557.244	228.769.244	APBD	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	167.045.244	184.445.244	166.657.244	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	54.112.000	62.112.000	62.112.000	APBD	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	1.685.715.000	1.685.715.000	1.685.715.000	APBD	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	32 Unit	171.150.000	171.150.000	171.150.000	APBD	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	66.565.000	66.565.000	66.565.000	APBD	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.078.000.000	1.078.000.000	1.078.000.000	APBD	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	370.000.000	370.000.000	370.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	92%	92%	3.542.321.200	3.660.446.200	3.667.107.640	APBD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	172.400.000	172.400.000	171.748.040	APBD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	172.400.000	172.400.000	171.748.040	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	2.072.421.200	2.190.546.200	2.204.975.480	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Mijen)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.072.421.200	1.291.546.200	1.279.842.820	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		65.000.000	67.700.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Wilayah Kecamatan (Kelurahan Cangkiran)								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bubakan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		62.000.000	68.958.650	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karangmalang)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		61.000.000	63.553.910	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Polaman)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		61.000.000	70.328.350	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Purwosari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		62.000.000	62.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		62.000.000	66.591.750	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambangan)								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonolopo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		68.000.000	68.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mijen)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		66.000.000	66.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatibarang)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		62.000.000	62.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungpane)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		65.000.000	65.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		65.000.000	65.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Ngadirgo)								
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		63.000.000	63.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatisari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		74.000.000	74.000.000	APBD	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pesantren)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		63.000.000	63.000.000	APBD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	1.297.500.000	1.297.500.000	1.290.384.120	APBD	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.297.500.000	1.297.500.000	1.290.384.120	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	98%	98%	29.165.235.000	29.165.235.000	28.819.187.526	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	498 Kegiatan	498 Kegiatan	502 Kegiatan	17.424.435.000	17.424.435.000	17.524.211.361	APBD	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	49.435.000	49.435.000	47.136.620	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Mijen)	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14.650.000.000	1.350.000.000	2.350.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Cangkiran)	10 Unit	10 Unit	10 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bubakan)	9 Unit	9 Unit	9 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karangmalang)	9 Unit	9 Unit	9 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Polaman)	9 Unit	9 Unit	9 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Purwosari)	10 Unit	10 Unit	10 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		(Kelurahan Tambangan)								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonolopo)	8 Unit	8 Unit	10 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mijen)	12 Unit	12 Unit	12 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatibarang)	10 Unit	10 Unit	10 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungpane)	12 Unit	12 Unit	12 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Ngadirgo)	11 Unit	11 Unit	11 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonoplumbon)	12 Unit	12 Unit	12 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatisari)	10 Unit	10 Unit	10 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pesantren)	14 Unit	14 Unit	14 Unit		950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	2.725.000.000	275.000.000	134.314.356	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Mijen)								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Cangkiran)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	119.707.585	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bubakan)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	113.866.990	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karangmalang)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	121.410.070	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Polaman)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	114.886.690	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Purwosari)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	120.141.960	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambangan)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	116.610.710	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonolopo)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	123.026.200	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mijen)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	125.032.315	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatibarang)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	123.177.670	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	126.345.350	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungpane)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	125.341.860	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Ngadirgo)								
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonoplumbon)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	125.341.155	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatisari)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	118.916.020	APBD	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pesantren)	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas		175.000.000	118.955.810	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	130 Dokumen	130 Dokumen	18 Dokumen	11.740.800.000	11.740.800.000	11.294.976.165	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Mijen)	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyaraktan	4 Lembaga Kemasyaraktan	11.490.800.000	137.000.000	112.269.210	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Cangkiran)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyaraktan	9 Lembaga Kemasyaraktan		914.400.000	884.692.415	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bubakan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		574.200.000	546.074.360	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karangmalang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		403.800.000	372.536.020	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Polaman)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		331.800.000	300.284.960	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Purwosari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		543.000.000	515.558.040	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambangan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		445.200.000	416.697.540	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonolopo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		1.209.000.000	1.178.673.800	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mijen)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		985.200.000	952.867.685	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		484.800.000	454.322.330	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Diselenggarakan (Kelurahan Jatibarang)								
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungpane)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		890.400.000	856.754.650	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Ngadirgo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		1.033.200.000	1.000.558.140	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonoplumbon)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		632.400.000	599.758.845	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatisari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		2.129.400.000	2.103.183.980	APBD	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pesantren)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakan	9 Lembaga Kemasyarakan		777.000.000	750.744.190	APBD	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	APBD	
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan				APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	15%	15%	50.830.000	50.830.000	50.830.000	APBD	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84 Angka	84 Angka	84 Angka	50.830.000	50.830.000	50.830.000	APBD	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	50.830.000	50.830.000	50.830.000	APBD	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	92%	92%	90.692.000	90.692.000	90.692.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	90.692.000	90.692.000	90.692.000	APBD	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	100 Orang	100 Orang	90.692.000	90.692.000	90.692.000	APBD	

Selain pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di atas, Kecamatan Mijen Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya :

1. Pelayanan Jemput Bola dan Sisir PBB

Merupakan program pembayaran PBB yang dilaksanakan 3 kali dalam satu bulan di Kelurahan di Kecamatan Mijen. Program Sisir PBB ini dimaksudkan agar memudahkan masyarakat dalam pembayaran PBB.

2. FORLAK (Forum Kolaborasi Apik) Pecah-Bayar SPPT PBB di Kecamatan Mijen

Merupakan kolaborasi yang terintegrasi antara Pegawai, Dinas terkait dan Stakeholder Eksternal dalam rangka upaya percepatan pelayanan pecah-bayar PBB di Kecamatan Mijen Kota Semarang.

3. Mijen Mari Tanem (Mijen Remaja Putri Tanpa Anemia)

Merupakan program penanggulangan Anemia pada Remaja Putri usia 15-23 Tahun yang dilaksanakan di 14 Kelurahan di Kecamatan Mijen. Pada remaja putri tersebut dilakukan pengukuran kadar darah, selanjutnya bagi yang positif anemia akan diberi suplemen dan pendampingan dari tenaga kesehatan.

4. SIPONJEN KITA

Merupakan salah satu bentuk inovasi Kelurahan Mijen dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat ke arah digitalisasi. Dengan aplikasi ini masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, penyampaian informasi dan pengaduan secara online dan cepat.

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Mijen Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Mijen Kota Semarang Nomor 050/87/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran dan target. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya review terhadap Renstra.;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Mijen ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Mijen ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RKPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Mijen Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Mijen Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mijen Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

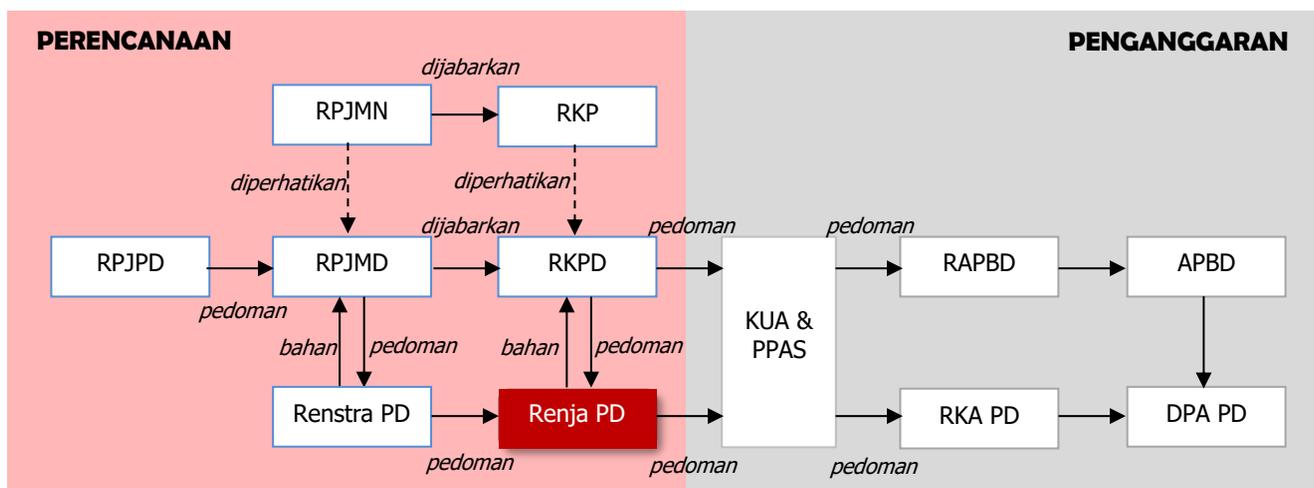
43. KECAMATAN GENUK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Genuk sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Genuk Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

- Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Genuk Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GENUK
KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Genuk Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Genuk

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	95,537,438,085	26,510,028,421	100	50	50%	26,510,028,421	28%
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	117,148,484	16,773,810	7	5	71%	16,773,810	14%
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun			2	1	50%		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD			1	1	100%		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD			1	1	100%		
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD			1	1	100%		
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	0	0%		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun			2	2	100%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD			1	1	100%		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	85,989,360,648	23,358,554,103	100	50	50%	23,358,554,103	27%
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan			100	100	100%		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas			12	6	50%		
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			2	2	100%		
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran			2	1	50%		
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			1	1	100%		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	2,698,193,160	1,626,074,371	100	50	50%	1,626,074,371	60%
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			4	4	100%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			4	3	75%		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan			12	6	50%		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			4	2	50%		
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung			12	6	50%		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah			12	6	50%		
	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD			6	5	83%		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	372,767,220	219,482,000	100	50	50%	219,482,000	59%
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya			3	3	100%		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	1,450,382,562	167,032,797	100	50	50%	167,032,797	12%
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12	6	50%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor			12	6	50%		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	4,909,586,011	1,122,111,340	100	50	50%	1,122,111,340	23%
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47	22	47%		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3	3	100%		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9	9	100%		
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2	2	100%		
II	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	20,645,058,490	14,580,128,677	95	94	99%	14,580,128,677	71%

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	489,447,240	125,955,000	1	0	0%	125,955,000	26%
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7	4	57%		
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	11,462,166,280	13,300,617,337	100	50	50%	13,300,617,337	116%
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8,693,444,970	1,153,556,340	12	6	50%	1,153,556,340	13%
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan			12	6	50%		
III	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	191,765,767,793	37,060,441,619	98	40	41%	37,060,441,619	19%
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	173,830,469,583	35,807,224,369	279	108	39%	35,807,224,369	21%
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan			8	6	75%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan			13	9	69%		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			13	13	100%		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			9	9	100%		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			14	0	0%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8	0	0%		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	0	0%		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			9	0	0%		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			7	0	0%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	12	100%		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			13	0	0%		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			13	13	100%		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8	1	13%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8	6	75%		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10	5	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan			12	6	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan			12	6	50%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
			Pembangunan di Kelurahan							
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan			12	6	50%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
			Pembangunan di Kelurahan							
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan			12	6	50%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
			Pembangunan di Kelurahan							
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	17,935,298,210	1,253,217,250	11	6	55%	1,253,217,250	7%
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan			4	2	50%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan			12	6	50%		
IV	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	239,865,710	246,086,766	15	12	79%	246,086,766	103%

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	239,865,710	246,086,766	27	16	59%	246,086,766	103%
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3	2	67%		
V	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	343,581,540	-	92	75	82%	-	0%
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	343,581,540	-	100	75	75%	-	0%

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI KINERJA s/d TAHUN 2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA RENJA TAHUN 2023			REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA	
						TARGET RENJA TAHUN 2023	REALIASI RENJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI KINERJA s/d TW II TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			300	240	80%		
		JUMLAH								

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

Ada beberapa sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami refocusing dan efisiensi biaya,terkait dengan pencapaian pada triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan target renja tahun 2023 rata-rata pencapaian telah mencapai 50% dan dapat terlaksana pada triwulan III tahun 2023 kecuali sub kegiatan pembagunan sarana dan prasarana di beberapa kelurahan yang masih menunggu Perubahan anggaran tahun 2023 serta adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang masih menunggu anggaran perubahan.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Genuk Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Genuk Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4,394,540,790	2,097,917,261	47.74%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,158,522,240	783,153,750	67.60%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,158,522,240	783,153,750	67.60%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2,211,225,340	848,912,221	38.39%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,236,225,340	512,944,825	41.49%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	67,000,000	19,615,326	29.28%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76,000,000	10,783,819	14.19%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70,000,000	12,989,500	18.56%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84,000,000	46,505,142	55.36%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72,000,000	32,596,379	45.27%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76,000,000	30,983,743	40.77%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	76,000,000	38,226,261	50.30%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79,000,000	42,231,959	53.46%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78,000,000	28,856,039	36.99%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	81,000,000	16,385,978	20.23%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	67,000,000	11,224,944	16.75%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79,000,000	8,388,353	10.62%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70,000,000	37,179,953	53.11%

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,024,793,210	465,851,290	45.46%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,024,793,210	465,851,290	45.46%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32,867,809,793	13,477,458,930	41.01%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17,406,511,583	6,371,058,870	36.60%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	111,064,635	103,331,980	93.04%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,200,000,000	734,412,000	61.20%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	10,180,000	1.07%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	-	0.00%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	343,139,000	36.12%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,163,000,000	11,965,000	1.03%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	11,305,000	1.19%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	9,981,000	1.05%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	9,967,000	1.05%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	953,000,000	929,316,000	97.51%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,044,000,000	1,016,740,000	97.39%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,104,000,000	856,008,000	77.54%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	759,243,000	79.92%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,211,000,000	9,928,000	0.82%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	928,793,000	97.77%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	745,446,948	319,262,250	42.83%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	36,017,000	20.58%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	62,667,000	35.81%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	18,306,000	10.46%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	11,799,000	6.74%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	31,180,000	17.82%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	34,779,850	19.87%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	17,005,840	9.72%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	39,307,650	22.46%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	9,114,300	5.21%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	27,916,000	15.95%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	9,715,000	5.55%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	6,940,000	3.97%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	12,740,000	7.28%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15,461,298,210	7,106,400,060	45.96%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	117,020,160	12,684,160	10.84%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	265,200,000	102,640,550	38.70%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,239,000,000	564,160,000	45.53%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	523,200,000	217,585,000	41.59%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,214,600,000	1,056,930,000	47.73%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	863,400,000	406,165,300	47.04%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,239,000,000	575,746,000	46.47%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,320,000,000	602,834,000	45.67%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,551,000,000	742,744,400	47.89%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,441,800,000	682,001,700	47.30%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,051,400,000	995,233,950	48.51%

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	296,400,000	97,555,000	32.91%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,684,200,000	784,625,000	46.59%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	605,400,000	265,495,000	43.85%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	49,678,050	-	0.00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	68,535,710	6,750,000	9.85%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68,535,710	6,750,000	9.85%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	68,535,710	6,750,000	9.85%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	108,581,540	53,150,000	48.95%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	108,581,540	53,150,000	48.95%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	108,581,540	53,150,000	48.95%
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,292,788,954	10,112,771,881	58.48%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,593,140	1,856,000	7.55%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,096,120	-	0.00%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,158,110	-	0.00%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,069,290	-	0.00%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,558,290	-	0.00%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4,558,290	-	0.00%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,242,960	-	0.00%
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,910,080	1,856,000	63.78%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,288,399,218	9,003,106,902	58.89%
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,693,408,618	8,733,419,902	59.44%
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	589,830,000	266,640,000	45.21%
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3,075,320	3,047,000	99.08%
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,583,680	-	0.00%
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	501,600	-	0.00%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	855,759,676	402,845,090	47.07%
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50,099,120	5,259,000	10.50%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	427,744,690	270,215,200	63.17%
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,741,400	11,760,000	24.13%
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,597,837	9,095,390	40.25%
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65,227,200	19,072,000	29.24%
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114,895,500	5,743,500	5.00%

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERGESERAN	REALISASI ANGGARAN	%
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	126,453,929	81,700,000	64.61%
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304,769,220	286,750,000	94.09%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	304,769,220	286,750,000	94.09%
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267,667,030	92,132,506	34.42%
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,329,440	53,119,406	35.57%
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118,337,590	39,013,100	32.97%
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551,600,670	326,081,383	59.12%
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	286,362,040	95,735,883	33.43%
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182,144,000	178,684,000	98.10%
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35,272,000	34,823,000	98.73%
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47,822,630	16,838,500	35.21%
		54,732,256,787	25,748,048,072	47.04%

Sumber : Kecamatan Genuk Daerah Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 88 sub kegiatan pada Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah sebesar Rp 54.732.256.787 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 25.748.048.072 Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 28.984.208.715

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Kecamatan Genuk yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Genuk Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

#	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian dan Rasio	
					2022	2023	2024	2025	2026	Capaian 2022	Capaian 2023
TUJUAN RENSTRA											
	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00 angka	90.00 angka	88.00 angka	88.50 angka	89.00 angka	89.50 angka	90.00 angka	92.36	93.74
SASARAN RENSTRA											
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	69.89 nilai	75.00 nilai	71.50 nilai	72.50 nilai	73.00 nilai	74.00 nilai	75.00 nilai	73.45	73.45
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1.00 angka	5.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1.00 angka	1	0
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	80.00 persen	90.00 persen	85.00 persen	86.00 persen	87.00 persen	89.00 persen	90.00 persen	90	40.51
			35.00 persen	60.00 persen						47	35

#	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian dan Rasio	
					2022	2023	2024	2025	2026	Capaian 2022	Capaian 2023
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			40.00 persen	45.00 persen	50.00 persen	55.00 persen	60.00 persen		
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	0.00 persen	100.00 persen	60.00 persen	70.00 persen	80.00 persen	90.00 persen	100.00 persen	60	75

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Genuk tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi** memiliki 1 indikator kinerja yaitu Indeks **Kepuasan Masyarakat**, target sebesar 88,50 dan sudah dapat tercapai bahkan melebihi target, dengan realisasi sebesar 93,74.
- b. Sasaran 1 **Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah** memiliki 1 indikator kinerja yaitu NILAI AKIP telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 76,20 dari target sebesar 72,50.
- c. Sasaran 2 **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” belum dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 0 dari target sebesar 1.
- d. Sasaran 3 **Meningkatnya patisipasi dan pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif” belum dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 40,51 dari target sebesar 86.
- e. Sasaran 4 **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan** memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum” belum dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 35 dari target sebesar 45. Sedangkan indikator kinerja “persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan” telah dapat melebihi target, dimana realisasinya sebesar 75 dari target sebesar 70.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Genuk tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Genuk, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Genuk sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Genuk terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Genuk sampai dengan tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun

terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100 % sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.

- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi / lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

- a. Masih minimnya Aparatur Sipil Negara dalam menguasai Teknologi Informasi yang menyangkut sistem aplikasi.
- b. Belum optimalnya pengelolaan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan.
- c. Sebagian besar wilayah masih rawan banjir, menyebabkan aktivitas masyarakat terdampak.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Genuk, yaitu sebagai berikut:

1. Tantangan :
 - a. Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Genuk agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.
 - b. Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya. Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.
 - c. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring

perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaianya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

2. Peluang :

- a. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- c. Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- d. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Genuk, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang; Pencapaian visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang. Kecamatan sebagai pembantu Walikota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya-upaya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Semarang.
2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana

perencanaan di tataran kota telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di Organisasi perangkat daerah. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.

3. Pengakomodiran Usulan Musrenbang; Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutaman gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
4. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal. Adapun langkah-langkah strategis tersebut antara lain:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi (SPBE) yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel.
 - b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban lingkungan.
 - c. Peningkatan keberdayaan masyarakat.
 - d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - e. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS dan LHBS).

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Genuk Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Genuk Kota Semarang

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	18,451,827,669	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	18,451,827,669	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	24,593,140	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	24,593,140	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	3,096,120	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	3,096,120	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4,158,110	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4,158,110	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	3,069,290	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	3,069,290	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4,558,290	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	4,558,290	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,558,290	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,558,290	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2 Dokumen	2,242,960	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2 Dokumen	2,242,960	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	2,910,080	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	2,910,080	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	16,554,169,676	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	16,554,169,676	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	15,968,329,076	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	15,968,329,076	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	580,680,000	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	580,680,000	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	3,075,320	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	3,075,320	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	1,583,680	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	1,583,680	
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	501,600	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	501,600	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	729,150,593	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	729,150,593	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	50,099,120	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	50,099,120	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis	331,392,610	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis	331,392,610	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	48,741,400	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	48,741,400	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	23,119,994	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	23,119,994	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1.900 Orang	70,627,200	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1.900 Orang	70,627,200	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	114,895,500	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	114,895,500	
	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis	5 Jenis	90,274,769	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis	5 Jenis	90,274,769	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Elektronik pada SKPD					Elektronik pada SKPD			
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	304,769,220	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	304,769,220	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	304,769,220	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	304,769,220	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	267,667,030	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	267,667,030	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	149,329,440	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	149,329,440	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	9 Jenis	118,337,590	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	9 Jenis	118,337,590	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	300%	571,478,010	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	300%	571,478,010	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	47 Unit	286,362,040	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	47 Unit	286,362,040	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Gedung	182,144,000	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Gedung	182,144,000	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 Jenis	35,272,000	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 Jenis	35,272,000	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis	67,699,970	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis	67,699,970	
II	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%	4,515,570,747	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%	4,515,570,747	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka	1,363,002,540	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka	1,363,002,540	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	1,363,002,540	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	1,363,002,540	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2,150,772,117	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	2,150,772,117	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	1,227,298,508	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	1,227,298,508	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	59,458,620	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	59,458,620	

No	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	76,819,449	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	76,819,449	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	66,812,620	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	66,812,620	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	72,037,070	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	72,037,070	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	79,000,000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	79,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	84,000,000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	84,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	76,000,000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	76,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	66,050,000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	66,050,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	72,000,000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	72,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	78,000,000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	78,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	57,045,850	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	57,045,850	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	67,000,000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	67,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	69,250,000	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	69,250,000	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1,001,796,090	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1,001,796,090	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	1,001,796,090	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	1,001,796,090	
III	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	31,358,735,544	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	31,358,735,544	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	277 Kegiatan	16,153,494,930	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	277 Kegiatan	16,153,494,930	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	111,064,635	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	111,064,635	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 Kegiatan	1,200,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 Kegiatan	1,200,000,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	1,104,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	1,104,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	953,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	953,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	950,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	950,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	950,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	950,000,000	

No	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	1,211,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	1,211,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	1,163,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	1,163,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	806,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	806,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	950,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	950,000,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	950,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	950,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	1,044,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	1,044,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	750,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	750,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	950,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	950,000,000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	950,000,000	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	950,000,000	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	38 Kegiatan	789,141,308	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	38 Kegiatan	789,141,308	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	113,454,750	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	113,454,750	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	93,784,541	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	93,784,541	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	106,025,890	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	106,025,890	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	131,192,930	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	131,192,930	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	91,648,771	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	91,648,771	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	90,907,810	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	90,907,810	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Kegiatan	99,224,437	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Kegiatan	99,224,437	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	98,233,800	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	98,233,800	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	96,249,710	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	96,249,710	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembunharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	99,692,960	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembunharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	99,692,960	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	99,363,740	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	99,363,740	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	97,168,250	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	97,168,250	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	105,341,398	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	105,341,398	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11 Angka	15,205,240,614	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11 Angka	15,205,240,614	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 Angka	117,020,160	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 Angka	117,020,160	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	2,038,016,630	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	2,038,016,630	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,537,926,010	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,537,926,010	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,220,691,490	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,220,691,490	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,190,300,000	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,190,300,000	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,670,081,229	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,670,081,229	

No	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	2,202,222,190	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	2,202,222,190	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,299,305,565	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,299,305,565	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	589,646,200	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	589,646,200	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	845,680,290	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	845,680,290	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,420,637,040	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	1,420,637,040	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	254,620,410	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	254,620,410	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	277,761,750	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	277,761,750	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	496,903,600	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	496,903,600	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	44,428,050	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	44,428,050	
IV	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	64,035,710	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	64,035,710	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25.70%	64,035,710	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25.70%	64,035,710	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	64,035,710	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	64,035,710	
V	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	108,581,540	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	108,581,540	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	100%	108,581,540	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	100%	108,581,540	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Angka	108,581,540	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Angka	108,581,540	
	JUMLAH				54,498,751,210	JUMLAH				54,498,751,210	

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GENUK
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Perubahan Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Perubahan Kedua Renstra OPD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Perubahan OPD Kota Semarang Tahun 2023, yaitu :

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Semarang”,

Dengan indicator tujuan **“ Meningkatkan kinerja pelayanan publik , pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi”**

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas kerja pelayanan perangkat daerah dengan indicator : nilai AKIP;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan public dengan indicator : jumlah inovasi pelayanan public;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan di Kecamatan dan Kelurahan dengan indicator : persentase lembaga kemasyarakatan aktif;
4. Meningkatkan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan indicator : Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023

#	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Satuan
TUJUAN RENSTRA				
	Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88.5
SASARAN RENSTRA				
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Nilai	72.5
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	Angka	1
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	86
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	45
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	70

Sumber : Kecamatan Genuk, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Genuk memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Resiko Bencana” dan indikator sasaran “Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Genuk Kota Semarang

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	17,198,708,085	17,292,788,954	18,451,827,669	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	24,593,140	24,593,140	24,593,140	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3,096,120	3,096,120	3,096,120	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,158,110	4,158,110	4,158,110	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,069,290	3,069,290	3,069,290	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,558,290	4,558,290	4,558,290	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,558,290	4,558,290	4,558,290	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ dan LKJIP yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2,242,960	2,242,960	2,242,960	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,910,080	2,910,080	2,910,080	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	15,288,399,218	15,288,399,218	16,554,169,676	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	14,693,408,618	14,693,408,618	15,968,329,076	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	100%	589,830,000	589,830,000	580,680,000	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,075,320	3,075,320	3,075,320	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1,583,680	1,583,680	1,583,680	
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	501,600	501,600	501,600	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	761,678,807	855,759,676	729,150,593	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	13,744,810	50,099,120	50,099,120	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	442,908,500	427,744,690	331,392,610	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 Jenis	35 Jenis	35 Jenis	48,741,400	48,741,400	48,741,400	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	22,597,837	22,597,837	23,119,994	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	1.900 Orang	1.900 Orang	1.900 Orang	54,750,000	65,227,200	70,627,200	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	114,895,500	114,895,500	114,895,500	
	7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	64,040,760	126,453,929	90,274,769	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	304,769,220	304,769,220	304,769,220	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	304,769,220	304,769,220	304,769,220	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	267,667,030	267,667,030	267,667,030	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	149,329,440	149,329,440	149,329,440	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	118,337,590	118,337,590	118,337,590	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	200%	300%	551,600,670	551,600,670	571,478,010	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47 Unit	47 Unit	47 Unit	286,362,040	286,362,040	286,362,040	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	182,144,000	182,144,000	182,144,000	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	35,272,000	35,272,000	35,272,000	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	47,822,630	47,822,630	67,699,970	
II	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%	95%	95%	3,292,260,490	4,394,540,790	4,515,570,747	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	156,772,240	1,158,522,240	1,363,002,540	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	156,772,240	1,158,522,240	1,363,002,540	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	2,108,016,280	2,211,225,340	2,150,772,117	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terwujudnya Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%	100%		1,236,225,340	1,227,298,508	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		81,000,000	59,458,620	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Bangetayu Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		79,000,000	76,819,449	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Banjardowo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		76,000,000	66,812,620	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Gebangsari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		76,000,000	72,037,070	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Genuksari)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		79,000,000	79,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karangroto)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		84,000,000	84,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kudu)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		76,000,000	76,000,000	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Muktiharjo Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		70,000,000	66,050,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Penggaron Lor)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		72,000,000	72,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Sembungharjo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		78,000,000	78,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Kulon)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		67,000,000	57,045,850	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Terboyo Wetan)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		67,000,000	67,000,000	
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Trimulyo)	Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan	100%	100%	100%		70,000,000	69,250,000	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	1,027,471,970	1,024,793,210	1,001,796,090	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,027,471,970	1,024,793,210	1,001,796,090	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
III	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100%	100%	100%	32,883,632,793	32,867,809,793	31,358,735,544	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	277 Kegiatan	277 Kegiatan	277 Kegiatan	17,422,334,583	17,406,511,583	16,153,494,930	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	100%	100%	100%	111,064,635	111,064,635	111,064,635	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	14,275,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		1,104,000,000	1,104,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		953,000,000	953,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan		950,000,000	950,000,000	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan		950,000,000	950,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan		1,211,000,000	1,211,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan		1,163,000,000	1,163,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		950,000,000	806,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		950,000,000	950,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		950,000,000	950,000,000	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan		1,044,000,000	1,044,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		950,000,000	750,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		950,000,000	950,000,000	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		950,000,000	950,000,000	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	38 Kegiatan	3,036,269,948	745,446,948	789,141,308	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		175,000,000	113,454,750	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangetayu Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		175,000,000	93,784,541	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjardowo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	17 Kegiatan		175,000,000	106,025,890	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Gebangsari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		175,000,000	131,192,930	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Genuksari)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan		175,000,000	91,648,771	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangroto)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan		175,000,000	90,907,810	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kudu)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Kegiatan	13 Kegiatan	13 Kegiatan		175,000,000	99,224,437	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Muktiharjo Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan		175,000,000	98,233,800	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Penggaron Lor)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		175,000,000	96,249,710	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sembungharjo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan		175,000,000	99,692,960	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Kulon)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		175,000,000	99,363,740	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Terboyo Wetan)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		175,000,000	97,168,250	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Trimulyo)	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Non-Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		175,000,000	105,341,398	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	11 Angka	11 Angka	11 Angka	15,461,298,210	15,461,298,210	15,205,240,614	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 Angka	8 Angka	8 Angka	15,411,620,160	117,020,160	117,020,160	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		2,051,400,000	2,038,016,630	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Bangetayu Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		1,551,000,000	1,537,926,010	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjardowo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		1,239,000,000	1,220,691,490	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Gebangsari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		1,239,000,000	1,190,300,000	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Genuksari)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		1,684,200,000	1,670,081,229	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangroto)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		2,214,600,000	2,202,222,190	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kudu)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		1,320,000,000	1,299,305,565	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Muktiharjo Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		605,400,000	589,646,200	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Penggaron Lor)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		863,400,000	845,680,290	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sembungharjo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		1,441,800,000	1,420,637,040	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Kulon)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		265,200,000	254,620,410	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Terboyo Wetan)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		296,400,000	277,761,750	
	7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Trimulyo)	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka		523,200,000	496,903,600	
	7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di kelurahan	6 Angka	6 Angka	6 Angka	49,678,050	49,678,050	44,428,050	
IV	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	30%	30%	68,535,710	68,535,710	64,035,710	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25.70%	25.70%	25.70%	68,535,710	68,535,710	64,035,710	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	68,535,710	68,535,710	64,035,710	

No	Kode Rekening	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU ANGGARAN			KETERANGAN
				RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	RENJA 2023	APBD INDUK 2023	PERUBAHAN RENJA 2023	
		Vertikal di Wilayah Kecamatan								
V	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	100%	100%	108,581,540	108,581,540	108,581,540	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	100%	100%	100%	108,581,540	108,581,540	108,581,540	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	300 Angka	300 Angka	300 Angka	108,581,540	108,581,540	108,581,540	
		JUMLAH						54,732,256,787	54,498,751,210	

Sumber : Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2023

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Genuk Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Genuk Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPd Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Genuk ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Genuk Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Genuk Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Genuk Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

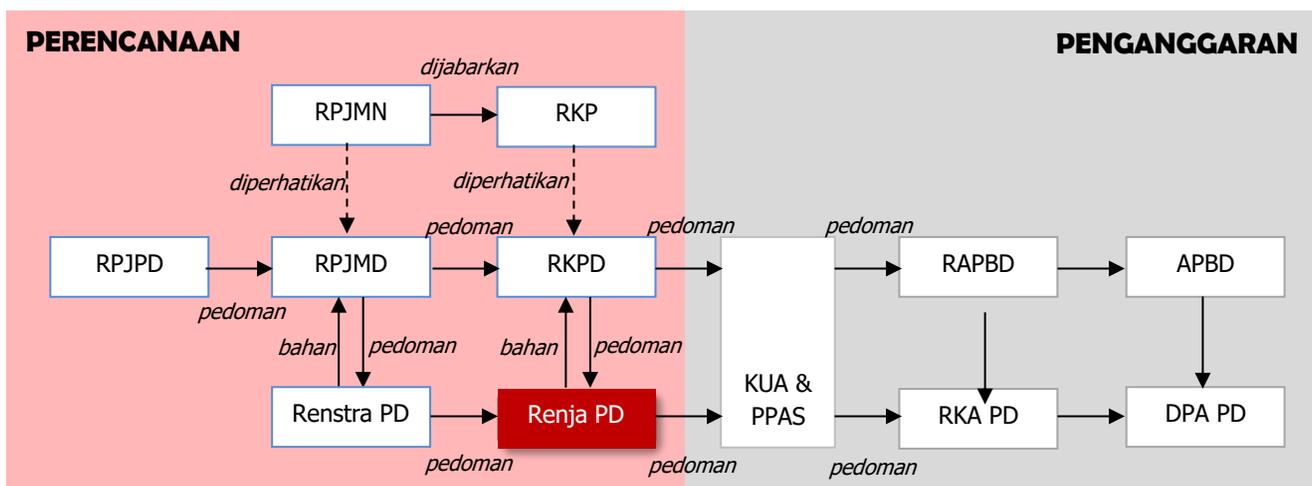
44. KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan,

lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun sehubungan dengan dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh : (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah perlunya penyesuaian target pendapatan dan pagu indikatif, serta penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2023, termasuk pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
27. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60)
28. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
29. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9 = 5+7	10= 9/4
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	97,00%	95,3%	94,00%	95%	101,06%	95%	98%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	5 Angka	1 Angka	1 Angka	0	100%	1	20%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	30%
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4,00	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Dokumen	-	4 Dokumen	2	50%	2	30%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	97,59%	100%	100,00%	100,00%	100%	30%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	97,59%	100%	100,00%	100,00%	100%	30%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	94,99%	100%	100,00%	100,00%	100%	40%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Duwur	100%	94,22%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	30%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendan Ngisor	100%	94%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	30%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gajahmungkur	100%	88,14%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	30%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karangrejo	100%	89,96%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGREJO)	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	30%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Lemponsari	100%	96,95%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	-	-	12 Laporan	6 Laporan	50%	6 Laporan	30%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Petompon	100%	93,36%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PETOMPON)	-	-	12 Laporan	6	50%	6	30%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sampangan	100%	96,88%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SAMPANGAN)	-	-	12 Laporan	6	50%	6	30%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bendungan	100%	98,38%	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDUNGAN)	-	-	12 Laporan	6	50%	6	30%
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	12 Laporan	6	50%	6	50%
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standart PATEN	100%	98,00%	-	-	;-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3 kegiatan	2	3,00	3	100%	3	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	98,69%	100%	100,00%	100,00%	100%	40%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	98,69%	100%	100,00%	100,00%	100%	40%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	40%
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	15 kegiatan	15:00	-	-	100%	-	-
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-	12 Laporan	6	-	6	50%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	40%
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	96,00%	97,00%	97,00%	100,00%	97%	40%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	98,9	100%	1	100,00%	100%	40%
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272	269	272 Kegiatan	4056:00:00	62,13%	169	62%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	272	272	-	-	100,00%	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	4 Lembaga	4	-	4	100%
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	113,34%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Duwur	15 Kegiatan	15	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	-	-	17 Unit	17	1,00	17	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendan Ngisor	15 Kegiatan	11	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN BENDAN NGISOR)			13 Unit	13	100,00%	13	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	17 Kegiatan	14	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)			13 Unit	13	100,00%	13	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	11 Kegiatan	9	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN KARANGREJO)			12 Unit	12	100,00%	12	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lemponsari	14 Kegiatan	13	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN LEMPONGSARI)			13 Unit	13	100,00%	13	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	12 Kegiatan	11	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN PETOMPON)			10 Unit	10	100,00%	10	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	21 Kegiatan	13	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN SAMPANGAN)			16 Unit	16	100,00%	16	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	12 Kegiatan	12	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun(KELURAHAN BENDUNGAN)			13 Unit	13	100,00%	13	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	11 Kegiatan	13	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KECAMATAN)			10 Unit	10	100,00%	10	100%
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	99,73%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	37 Kegiatan	38	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Kegiatan	124	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Bendan Duwur							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN BENDAN DUWUR)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngisor	14 Kegiatan	122	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN BENDAN NGISOR)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gajahmungkur	15 Kegiatan	120	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Karangrejo	11 Kegiatan	119	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN KARANGREJO)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lemponsari	17 Kegiatan	125	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN LEMPONGSARI)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Petompon	11 Kegiatan	119	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN PETOMPON)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sampangan	12 Kegiatan	120	-	-	-	-	-
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN SAMPANGAN)			4 Pokmas / Ormas	4	100,00%	4	100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bendungan	11 Kegiatan	119	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas(KELURAHAN BENDUNGAN)			4 Pokmas / Ormas	4		4	100%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9	9	9.00 Dokumen	9	100,00%	9	100%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	8 dokumen	8	-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KECAMATAN)			4 Lembaga	4	100,00%	4	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Benda Duwur	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		BENDAN DUWUR)							
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendan Ngisor	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Gajahmungskur	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Karangrejo	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN KARANGREJO)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Lemponsari	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN LEMPONGSARI)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Petompon	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN PETOMPON)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Sampangan	00:00		-	-	-	-	-
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN SAMPANGAN)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan di Kelurahan Bendungan	00:00		-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan(KELURAHAN BENDUNGAN)			9 Lembaga	9	100,00%	9	100%
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	6 Kegiatan	00:00	-	-	-	-	-
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	5 Kelurahan	5	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			5 Laporan	5	100,00%	5	100%
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	112,3%	100%	24:00:00	100,00%	100%	100%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30%	11,23%	15%	15,00%	100,00%	15%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	92,11%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	25	35	35.00 Angka	35	92,11%	35	100%
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Kegiatan	4	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	00:00	50,00%	50%	30%
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	112,50%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	100%	90%	85%	20:24:00	100,00%	85%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Ketahanan Nasional							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	5	2	2 Kegiatan	2	100,00%	2	100%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5	2	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			80 Orang	80	100,00%	80	100%
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6	6	6 Dokumen	6	100,00%	6	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan	3	3	3 Dokumen	3	100,00%	3	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Renstra yang Disusun	2	2	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Gajahmungkur	1		-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3	100,00%	3	100%
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1	100,00%	1	100%
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	1	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1	100,00%	1	100%
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1	100,00%	1	100%
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1		1	100%
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	1		1	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2	2	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2	100,00%	2	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	4	4.00 Dokumen	4	100,00%	4	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	-	-	-	-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			74 Orang/bulan	74	100,00%	74	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	99%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	99%	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	6%	50,00%	6%	30%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1	100,00%	1	40%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	1	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12	6		6	30%
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1,00	00:00	100,00%	100%	0,40
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1	100,00%	1	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9	9	9 Paket	9	100,00%	9	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9	10	4 Paket	4	40,00%	4	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	35	12 Paket	12	34,29%	12	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	6 Paket	6	60,00%	6	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	97,20%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Tamu yang Berkunjung	1000	972	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12		12	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	86%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	50	43	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12		12	100%
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Barang yang Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	19	-	-	-	-	-
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			7 Dokumen	7	100,00%	7	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3	9	9 Unit	9	100,00%	9	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12	100,00%	12	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	16	14	-	-	-	-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12	100,00%	12	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	20	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			12 Unit	12	100,00%	12	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	-	-	-	-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2	100,00%	2	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	20	24	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2	100,00%	2	100%

Kode Rekening	Urusan / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program dan kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2022)			Realisasi Capaian Target Renstra s/d TW II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Target Capain Tahun 2023 TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%
		Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1	1	-	-	-	-	-
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1	100,00%	1	100%

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2023

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu pergeseran anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran APBD	Realisasi TW 2	
			Keuangan	%
7.01	KECAMATAN	33.580.399.611	21.210.324.941	63.16
	7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	33.580.399.611	21.210.324.941	63.16
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.928.290.000	1.325.406.706	45.26
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.250.000	20.332.500	50.52
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.125.500.000	631.363.361	56.10
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	70.000.000	34.971.336	49.96
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	70.000.000	36.092.560	51.56
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	80.000.000	53.694.579	67.12
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN KARANGREJO)	71.000.000	39.785.711	56.04
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	72.000.000	47.089.403	65.40

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran APBD	Realisasi TW 2	
			Keuangan	%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN PETOMPON)	72.000.000	33.992.535	47.21
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN SAMPANGAN)	74.000.000	52.935.965	71.54
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(KELURAHAN BENDUNGAN)	70.000.000	50.789.991	72.56
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.183.540.000	789.804.321	66.73
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.294.950.000	12.257.161.050	67.00
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	162.500.000	131.344.200	80.83
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.144.500.000	991.098.750	86.60
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	950.000.000	945.122.000	99.49
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	950.000.000	944.133.000	99.38
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	950.000.000	944.986.000	99.47
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN KARANGREJO)	950.000.000	945.351.500	99.51
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	950.000.000	945.229.500	99.50
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN	950.000.000	946.815.000	99.66

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran APBD	Realisasi TW 2	
			Keuangan	%
	PETOMPON)			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN SAMPANGAN)	950.000.000	944.165.060	99.39
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan(KELURAHAN BENDUNGAN)	950.000.000	945.502.500	99.53
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	365.750.000	212.820.800	58.19
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	175.000.000	52.650.000	30.09
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	175.000.000	66.678.900	38.10
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	175.000.000	76.273.000	43.58
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN KARANGREJO)	175.000.000	54.900.000	31.37
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	175.000.000	57.006.500	32.58
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN PETOMPON)	175.000.000	61.250.000	35.00
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN SAMPANGAN)	175.000.000	76.197.520	43.54
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(KELURAHAN BENDUNGAN)	175.000.000	86.934.000	49.68
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	77.621.500	56.66
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BENDAN DUWUR)	703.200.000	418.712.000	59.54
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BENDAN NGISOR)	699.000.000	428.606.000	61.32
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN GAJAHMUNGKUR)	1.694.400.000	1.092.809.500	64.50

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran APBD	Realisasi TW 2	
			Keuangan	%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN KARANGREJO)	781.200.000	488.245.000	62.50
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN LEMPONGSARI)	874.800.000	557.483.000	63.73
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN PETOMPON)	839.400.000	546.509.000	65.11
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN SAMPANGAN)	1.159.800.000	745.324.210	64.26
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan(KELURAHAN BENDUNGAN)	683.400.000	423.437.900	61.96
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	50.000.000	48.865.250	97.73
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80.650.000	34.912.000	43.29
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.650.000	45.760.000	56.74
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	79.275.000	34.036.000	42.93
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	79.275.000	51.398.000	64.84
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.197.234.611	7.558.809.185	61.97
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.295.000	2.096.200	33.30
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.390.000	0	0.00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.898.000	0	0.00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.050.000	0	0.00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.307.000	0	0.00
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	2.176.000	2.174.600	99.94

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran APBD	Realisasi TW 2	
			Keuangan	%
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.580.000	4.571.800	99.82
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.299.083.442	8.042.738.354	78.09
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	429.581.000	277.761.400	64.66
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.375.000	2.370.600	99.81
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.180.000	2.171.200	99.60
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.180.000	0	0.00
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.925.000	2.223.900	37.53
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.075.000	94.600.000	95.48
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.500.000	42.380.000	70.05
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.936.000	8.276.500	55.41
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.925.000	15.191.250	72.60
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.879.000	64.045.093	49.69
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	261.907.000	249.070.000	95.10
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.113.000	132.973.000	96.98
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.500.000	106.402.505	85.46
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.426.000	74.937.000	85.71
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.250.000	68.053.199	43.55
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	131.110.000	130.730.000	99.71

KODE	BIDANG URUSAN/PROGRAM RPJMD	Anggaran APBD	Realisasi TW 2	
			Keuangan	%
	Lainnya			
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.000.000	21.423.200	51.01
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.500.000	50.280.000	99.56
JUMLAH		33,580,399,611	21,210,324,941	63.16

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan pada Kecamatan Gajahmungkur kota Semarang adalah sebesar Rp **33,580,399,611,-**. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp **21,210,324,941,-** (63.16 %). Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 12.370.074.670,- (36.84 %).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur adalah melaksanakan fungsi sebagai pembantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi 2023
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 TW II	
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92.00 angka	93.00 angka	94.00 angka	95.00 angka	96.00 angka	97.00 angka	95.29	93.13	94
SASARAN RENSTRA											
Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	70.01 Nilai	71.00 Nilai	72.00 Nilai	73.00 Nilai	74.00 Nilai	75.00 Nilai	72.31	0.00	72,5
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00	0.00	1
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	80.00 Persen	80.00 Persen	85.00 Persen	90.00 Persen	92.00 Persen	95.00 Persen	100.00	100.00	100
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	40.00 Persen	40.00 Persen	45.00 Persen	50.00 Persen	55.00 Persen	60.00 Persen	42.17	84.32	85
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	0.00 Persen	60.00 Persen	65.00 Persen	70.00 Persen	80.00 Persen	90.00 Persen	62.96	66.66	67

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gajahmungkur Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”. Dari target sebesar 94, realisasinya sebesar 93,13 (capaian 99,07%);
- b. Sasaran Kecamatan Gajahmungkur adalah sebagai berikut :
 - 1) Sasaran 1 : **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”. Dari target sebesar 100,00 %, realisasinya sebesar 50,00 % (capaian 50,00%);
 - 2) Sasaran 2 : **“Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 1 indikator kinerja “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”. Dari target sebesar 85,00 %, realisasinya sebesar 100,00 % (capaian 117,64%).
 - 3) Sasaran 3 : **“Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki 2 indikator yaitu “Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum”, dimana realisasinya sebesar 84,32 % dari target sebesar 45 % (capaian 187,35 %) dan “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan” dimana realisasinya sebesar 66,66 % dari target sebesar 65,00 % (capaian 102,55 %). Hal ini disebabkan seluruh variabel indikator sedang dalam proses pencapaian target. Diharapkan pada akhir tahun, target yang ditetapkan dapat tercapai.
 - 4) Sasaran 4 : **“Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP”. Dari target sebesar 72,00 realisasinya sebesar 72,31 (capaian 100,43 %).

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Gajahmungkur terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur sudah cukup baik, dimana sebagian besar target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya

adalah cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan sudah cukup baik, dan diharapkan dari tahun ke tahun dapat meningkat sebagai cermin keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.

a. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang adalah:

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupti atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- 2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Gajahmungkur belum mencukupi sesuai dengan Analisis Jabatan yang telah disusun.
- 3) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Perkembangan Kota Semarang yang semakin maju, masyarakat yang semakin kritis dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Gajahmungkur adalah sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.

- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.
 - 3) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau.
- c. Permasalahan
- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Gajahmungkur hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.
 - 2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan.
SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM.
 - 3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian, hingga saat ini penerapan teknologi informasi dalam pelayanan masih kurang optimal.

Selain memperhatikan berbagai tantangan, peluang, dan permasalahan yang ada, pembangunan Kecamatan di Tahun 2023 juga harus memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian di tahun 2024, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota
Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gajahmungkur memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Pelaksanaan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026
Dalam penetapan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah program prioritas yang harus dilaksanakan perangkat daerah sesuai kewenangan dan jadwal pentahapannya, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026.
Untuk tahun 2023, secara umum Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang menjalankan beberapa program prioritas, yaitu :
 - (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan;
 - (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah;
 - (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan;
 - (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah;
 - (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE;
 - (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari;
 - (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan.

3. Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024
Memasuki tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, hate speech, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

4. Evaluasi program pelayanan akhir pekan
Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang

Di tahun 2023, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

6. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan Gajahmungkur

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Gajahmungkur perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			33.747.443.234				33.747.443.234	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94,00%	2.892.185.303	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94,00%	2.892.185.303	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	40.250.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	40.250.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	40.250.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	40.250.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	1.671.269.570	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	1.671.269.570	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.671.269.570	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.671.269.570	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	1.180.665.733	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	1.180.665.733	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.180.665.733	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	1.180.665.733	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97,00%	17.275.721.906	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97,00%	17.275.721.906	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272 Kegiatan	9.930.560.091	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	272 Kegiatan	9.930.560.091	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	139.580.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	139.580.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	8.697.227.871	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	8.697.227.871	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit		

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.143.752.220	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.143.752.220	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9 Dokumen	7.345.161.815	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	9 Dokumen	7.345.161.815	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	7.295.161.815	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	7.295.161.815	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	50.000.000	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00%	80.650.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00%	80.650.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 Angka	80.650.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 Angka	80.650.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.650.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	80.650.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85,00%	79.275.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85,00%	79.275.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	79.275.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	79.275.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	79.275.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	80 Orang	79.275.000	
NON URUSAN			13.419.611.025	NON URUSAN			13.419.611.025	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	13.419.611.025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	13.419.611.025	
	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%			Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00%		
	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6 Dokumen	28.696.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6 Dokumen	28.696.000	
	Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen			Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.295.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.295.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.390.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.390.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.898.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.898.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.050.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3.050.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.307.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.307.000	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.176.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.176.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.580.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.580.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	11.914.628.486	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	11.914.628.486	
	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	11.481.012.486	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	11.481.012.486	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	426.881.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	426.881.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.375.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.375.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.180.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.180.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.180.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.180.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100 Persen	653.428.539	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100 Persen	653.428.539	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	5.925.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	5.925.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	104.146.124	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	104.146.124	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60.500.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.567.390	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	14.567.390	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.925.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.925.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	139.951.806	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	139.951.806	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	307.413.219	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11 Dokumen	307.413.219	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	172.301.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	172.301.100	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	172.301.100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	172.301.100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	270.696.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	270.696.900	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	174.180.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	174.180.000	

Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.516.900	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	96.516.900	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	379.860.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	379.860.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	156.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	156.250.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	131.110.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	131.110.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	42.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.500.000	

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, 2023

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2023 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang yang dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Keperentingan Tahun 2023 Kecamatan Gajahmungkur Kota
Semarang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KELURAHAN CANGKIRAN					
1.	Pelebaran Jembatan	Jalan Jatikalangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/300 M2	Kondisi kontur jalan naik turun sehingga membahayakan pengguna jalan (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN BUBAKAN					
2.	Penerangan Jalan	Jalan Maryadi	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	960.000.000/32 Tiang	Kurangnya Penerangan jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
3.	Pengaspalan Jalan Gg	Gg kelengkeng	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	640.000.000/4500 M2	Jalan Rusak (Dinas Pekerjaan Umum)
4.	Pembangunan DAM	Sungai Gendruwo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.400.000.000/17112,29 M3	Rusak Berat (Dinas Pekerjaan Umum)
5.	Pengaspalan Jalan	Jalan Maryadi	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.350.000.000/7500 M2	Jalan Rusak (Dinas Pekerjaan umum)
KELURAHAN KARANGMALANG					
6.	Taman Kota	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	750.000.000/1 paket	Belum adanya taman kota (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
7.	Penerangan Jalan Umum	RW 1, 2, DAN 3 KELURAHAN KARANGMALANG	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/33 Tiang lamp	Kurangnya Penerangan Lampu Jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
8.	Joging Track dan lampu lapangan	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/800 Meter	Belum adanya Joging Track dan lampu lapangan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
9.	Talud dan	DK. SEBUMI	Meningkatnya	250.000.000/200	Belum adanya talud dan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Bronjong		kualitas sarana dan prasarana wilayah	Meter	bronjong (Dinas Pekerjaan Umum)
10.	Talud dan Bronjong	DK. GEDUNGAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/200 Meter	Belum adanya talud dan bronjong (Dinas Pekerjaan Umum)
11.	Pembangunan Talud Irigasi	DK. GERUNG	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/900 Meter	Belum adanya talud saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
12.	Pengecoran Jl. Dawung	DK. DAWUNG	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/300 Meter	Jalan Rusak Parah (Dinas Pekerjaan Umum)
13.	Alat Rebana	DK. GERUNG	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	150.000.000/1 Paket	menndukung kegiatan warga (Dinas Pendidikan)
14.	Alat Pertanian Traktor	DK. GEDUNGAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	20.000.000/2 Pake	Mendukung ekonomi warga di sektor pertanian (Dinas Pertanian)
15.	PHBI Tingkat Kelurahan	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	50.000.000/1 Paket	mendukung kegiatan warga (Dins Kebudayaan dan Pariwisata)
16.	Nyadran Kelurahan Karangmalang di 3 RW	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	15.000.000/3 Paket	mendukung kegiatan warga (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata)
17.	Pembuatan Taman	DK. KRAJAN	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	150.000.000/1 Paket	Belum adanya taman kota (Dinas Pariwisata)
KELURAHAN POLAMAN					
18.	Sarana dan Prasarana penunjang kolam ASA MINA MULIA	Kelurahan Polaman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	205.000.000/1 paket	Menunjang ekonomi masy (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
19.	Talud Jalan	Jalan Seduren	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/12 00 M3	Jalan longsor ke saluran (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN PURWOSARI					
20.	Pembangunan Jembatan	Jl. Tegalsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/100 M2	jembatan masih bambu (Dinas Pekerjaan Umum)
21.	Pembangunan betonisasi jalan 20 cm	Jl. Jatiombo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	525.000.000/300 0 Meter	Lanjutan (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN TAMBANGAN					
22.	Pavingisasi Jalan Masuk Kampung Ternak Sapi/Kambing	Tambangan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/40 0 Meter	Kondisi jalan Rusak Parah (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
23.	Pengaspalan Jalan	Jalan Raya Genuk-Duwet	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/60 0 Meter	Kondisi Jalan Rusak Berat (Lanjutan) (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
24.	Jembatan	Sidorejo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/1 Paket	Kondisi Jembata Rusak Parah Akibat Terkena Banjir (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
25.	Talud Jalan	Jl. Tembus RW 01-RW 03	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/10 00 Meter	Belum Ada Talud Jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
26.	Pembangunan Jalan Raya Bandungsari	Bandungsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000/24 0 Meter	Kondisi jalan Rusak Parah/Pengecoran Jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
27.	Pembangunan Jalan	Jl. Danang Citro Duwet-Sidorejo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/40 00 Meter	Jalan Rusak Parah (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
28.	Gedung Pos Paud	Duwet	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000/1 Paket	Belum Ada Gedung Masih Berupa Tanah dan Siswa Belajar Di Balai RT (dinas Penataan Ruang)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
KELURAHAN WONOLOPO					
29.	Pelebaran Jalan Utama Wonolopo	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	358.000.000/2500 Meter	Jalan terlalu sempit untuk berpapasan mobil (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
30.	Pekerjaan PJU	WONOLOPO	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	210.000.000/15 Titik	tidak adanya penerangan jalan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
31.	Talud Jalan Utama Wonolopo	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/2500 Meter	Saluran kurang berfungsi dengan baik (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
32.	Pelebaran Jalan masuk Lapangan Leri	JL. TEGALSARI	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/1750 Meter	Jalan sempit dan rusak (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
33.	Pembangunan Kantor Baru	Jl. Raya Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/400 M3	Kondisi Gedung Rusak (Dinas Penataan Ruang)
34.	Peningkatan sarpras kampung tematik embung	Jalan Embung Wonolopo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	6.000.000.000/18.000.000 Meter	Sarpras Belum Optimal (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN GAJAHMUNGKUR					
35.	Pembangunan Balai Kelurahan Gajahmungkur	Kelurahan Gajahmungkur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	6.500.000.000/600 M ²	Belum ada Balai Kelurahan (Dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN JATIBARANG					
36.	Pembangunan kantor kelurahan jatibarang	Jl. Raya Duduhan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/300 Meter Pers	Urgen dikarenakan gedung teribas SORR (Semarang Outer Ring Road) (Dinas Penataan Ruang)
37.	Pekerjaan beton jalan	Dk Tegalsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/600 Meter Pers	Sangat dibutuhkan untuk kegiatan akses utama warga tegalsari (Dinas Pekerjaan Umum)
38.	Pekerjaan bahu beton jalan (kanan-kiri)	Jl. Raya Duduhan	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	510.000.000/400 Meter	sangat dibutuk untuk manuver kendaraan karena sering terjadinya intensitas kecelakaan (Dinas Pekerjaan Umum)
39.	Saluran Air Irigasi/Pengendalian Banjir	Tlogo tegalsari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	600.000.000/600 Meter	sangat diperlukan sebagai irigasi lahan pertanian dan pengendalian banjir (Dinas Pekerjaan Umum)
40.	Pekerjaan pembangunan limbah peternakan	Jl. Duduhan-Tlogo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	400.000.000/72 Meter Pers	Pengelolaan limbah kotoran sapi dimanfaatkan energi listrik dll (Dinas Lingkungan Hidup)
KELURAHAN KEDUNGPANE					
41.	Rehab Rumah Dinas Lurah Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/72 M2	Dinas Penataan Ruang
42.	Pembangunan Saluran dan Talud Saluran	Sepanjang Jl. Untung Suropati RW. 01-RW. 04	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	1.500.000.000/800 M2	Dinas Pekerjaan Umum
43.	Rehab Balai Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	350.000.000/200 M2	Dinas Penataan Ruang
44.	Rehab TK Pertiwi 22 Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000/60 M2	Dinas Penataan Ruang
45.	Pembangunan Kantor Baru Kelurahan Kedungpane	Jl. Untung Suropati	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.000.000.000/1000 M2	Dinas Penataan Ruang
KELURAHAN NGADIRGO					
46.	Pekerjaan Penerangan jalan Umum	RT 05,06,07 RW 04; RT 02,03 RW 02	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000/ 0 Unit	Kondisi jalan yang gelap perlu adanya penerangan jalan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
47.	Jembatan	Jalan RT 02 RW 03	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/ 0 Meter	Menurunnya kualitas jembatan yang memprihatinkan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
					(Dinas Pekerjaan Umum)
48.	Jembatan	Jalan RT 05 RW 03	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	450.000.000/ 0 Meter	kondisi jembatan yang memprihatinkan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
49.	Pekerjaan Pintu air	RT 01 RW 06	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/ 0 Meter	kondisi pintu air yang kecil mengakibatkan banjir apabila terjadi hujan lebat dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
50.	Pengaspalan Jalan	Jalan RW 02, RW 03, RW 07	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/200 0 Meter	kondisi jalan yang kecil sehingga kesulitan ketika berpapasan dan sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
51.	Pembangunan Kantor Kelurahan dan Balai Kelurahan Ngadirgo	Jl. Raya Ngadirgo	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	2.500.000.000/ 0 Meter	Kondisi Kantor dan Balai sudah banyak yang rusak perlu adanya renovasi dan sudah diusulkan sejak tahun 2015 (Dinas Penataan Ruang)
52.	Jembatan	Jalan RW 03 dan RW 01	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	8.000.000.000/ 0 Meter	tidak adanya penghubung antar RW karena dipisahkan oleh sungai sudah diusulkan sejak tahun 2020 (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN WONOPLUMBON					
53.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan Djahuri	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/30 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap karena lokasi kanan dan kiri masih daerah hijau/kebundaran sebagian hutan jati (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
54.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/30 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap karena lokasi kanan dan kiri masih daerah hijau/kebundaran sebagian hutan jati (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
55.	Pembangunan Pavingisasi jalan dan talud jalan	DK Talun wilayah RW 01	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	300.000.000/60 0 M2	Perlunya peningkatan insfratraktur jalan raya (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
56.	Pembangunan Pavingisasi Jalan dan talud jalan	Jalan Sepedet Wonoplumbon	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/40 00 M2	Perlunya pembangunan infrastruktur jalan sebagai jalan penghubung antara RT.04;RT.05;RT.07;RT.09 (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
57.	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Raya	Jalan raya Wonoyoso RW.04	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	250.000.000/25 Titik	Perlunya lampu penerangan jalan karena dimalam hari terlalu gelap (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
58.	Pembangunan pengaspalan jalan dan pelebaran jalan di wilayah Sebeluk RW 03 menuju ke RW 04 Wonoyoso	Sepanjang jalan raya Sebeluk sampai dengan jalan raya Wonoyoso	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/40 00 Meter	Perlunya peningkatan insfratraktur jalan raya (Dinas Pekerjaan Umum)
KELURAHAN JATISARI					
59.	Lampu PJU	Jatisari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000/ 1 Paket	belum ada penerangan (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
60.	Penambahan peralatan dan sarana olahraga	Jatisari Asri	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	201.000.000/ 1 Paket	untuk sarana olahraga (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
61.	Pemb. Talud	Jatisari	Meningkatnya	250.000.000/	belum ada talud (Dinas

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Saluran		kualitas sarana dan prasarana wilayah	300 M2	Perumahan dan Kawasan Pemukiman)
62.	Pemb. Gedung Olahraga	Jatisari Permai	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	500.000.000/1 Paket	untuk sarana olahraga (Dinas Penataan Ruang)
63.	Pelebaran Jalan	Jl. RM Hadi Soebeno Gajahmungkur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	100.000.000.000/1.600.000 M2	Setiap Pagi Hari dan Ketika Weekend Selalu Terjadi Kemacetan (Dinas Pekerjaan Umum)
64.	Pembuatan Saluran dan Embung	Jatisari	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	3.000.000.000/10.000 M2	Banjir Ketika Curah Hujan Lebat dan Lama (Dinas Pekerjaan Umum)
65.	Pembangunan Gedung PAUD	Jatisari Elok	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	250.000.000/100 M2	untuk sarana belajar anak usia dini (Dinas Penataan Ruang)
KELURAHAN PESANTREN					
66.	Pekerjaan Saluran	Jalan robyong depan villa lonjaten	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	270.000.000/250 Meter	Belum ada saluran (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman)

Sumber: Kecamatan Gajahmungkur, 2022

Usulan program dan kegiatan yang diusulkan Kecamatan Gajahmungkur pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada fungsi pelayanan secara umum, sehingga pada bab ini terdapat 66 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan Kota Semarang yang diusulkan dalam Musrenbang Tahun 2023 yang tersebar di 14 Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan Major Project dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02

6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah “Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
 - d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.

- 3) Penguatan ketahanan pangan.
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:

- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.

- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
 - e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
 - f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:

- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”

dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Adapun sasaran – sasaran dalam pencapaian tujuan tersebut beserta indikator kerjanya yaitu :

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
Dengan indikator sasaran yaitu **“Nilai AKIP Kecamatan Gajahmungkur”**
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan Publik
Dengan indikator sasaran yaitu **“Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN”**.
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan
Dengan indikator sasaran yaitu **“Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”**
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan
Dengan indikator sasaran yaitu Persentase **“Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”** dan **“Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”**.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN: Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	94
SASARAN 1: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Angka	1

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
SASARAN 2 : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	85,00
SASARAN 3 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	45
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	65
SASARAN 4 : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	Angka	72,00

Sumber : Kecamatan Gajahmungkur, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gajahmungkur memiliki peran dalam pencapaian misi kelima, yaitu “Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
3. Melaksanakan program prioritas dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yaitu :
 - (1) Penyediaan Broadband Learning Center (BLC) di Kecamatan
 - (2) Fasilitasi Sarpras Arena Nobar Kecamatan Batas Wilayah
 - (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan
 - (4) Pemberdayaan Bank Sampah Wilayah
 - (5) Dukungan Pelaksanaan SPBE
 - (6) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Terpadu Malam Hari
 - (7) Dukungan Fasilitasi Penyediaan Layanan Publik Akhir Pekan
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan terkait kewilayahan;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 4 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 13 kegiatan, yang terdiri dari 6 kegiatan penunjang, dan 7 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 36 sub kegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp 33/797.443.234,- yang bersumber dari dana APBD Kota.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR					33.350.181.442	33.468.306.442	33.797.443.234
7.01	KECAMATAN					21.332.965.000	21.383.165.000	20.327.832.209
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	94,00%	94,00%	94,00%	2.741.415.000	2.928.290.000	2.892.185.303
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	62.020.000	40.250.000	40.250.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	62.020.000	40.250.000	40.250.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.495.855.000	1.704.500.000	1.671.269.570
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.495.855.000	1.704.500.000	1.671.269.570
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
		Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.183.540.000	1.183.540.000	1.180.665.733

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.183.540.000	1.183.540.000	1.180.665.733
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	97,00%	97,00%	97,00%	18.434.750.000	18.294.950.000	17.275.721.906
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	324 Kegiatan	324 Kegiatan	272 Kegiatan	10.816.250.000	10.672.750.000	9.930.560.091
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	175.500.000	162.500.000	139.580.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	10 Unit	10 Unit	8.875.000.000	8.744.500.000	8.697.227.871
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	17 Unit	17 Unit			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	12 Unit	12 Unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	16 Unit	16 Unit			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	13 Unit	13 Unit			
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.765.750.000	1.765.750.000	1.143.752.220

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
		Kelurahan						
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas			
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas			
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya	78 Dokumen	78 Dokumen	9 Dokumen	7.618.500.000	7.622.200.000	7.345.161.815

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	7.572.200.000	7.572.200.000	7.295.161.815
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
			n					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasy arakata n	9 Lembaga	9 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasy arakata n	9 Lembaga	9 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasy arakata n	9 Lembaga	9 Lembaga			
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasy arakata n	9 Lembaga	9 Lembaga			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	46.300.000	50.000.000	50.000.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00%	15,00%	15,00%	79.800.000	80.650.000	80.650.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 Angka	35 Angka	35 Angka	79.800.000	80.650.000	80.650.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	79.800.000	80.650.000	80.650.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85,00%	85,00%	85,00%	77.000.000	79.275.000	79.275.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	77.000.000	79.275.000	79.275.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	80 Orang	80 Orang	77.000.000	79.275.000	79.275.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
		Nasional						
X.XX	NON URUSAN					12.017.216.442	12.085.141.442	13.419.611.025
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100,00 %	100,00%	100,00%	12.017.216.442	12.085.141.442	13.419.611.025
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00 %	100,00%	100,00%			
		Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100,00 %	100,00%	100,00%			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Kec.Gajahmungkur	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	28.696.000	28.696.000	28.696.000
		Jumlah Dokumen	3	3	3 Dokumen			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
		Pelaporan	Dokumen	Dokumen				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	6.295.000	6.295.000	6.295.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.390.000	4.390.000	4.390.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.898.000	4.898.000	4.898.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.050.000	3.050.000	3.050.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.307.000	3.307.000	3.307.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.176.000	2.176.000	2.176.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4.580.000	4.580.000	4.580.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	10.735.399.442	10.735.399.442	11.914.628.486
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen			

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	10.332.283.442	10.299.083.442	11.481.012.486
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	396.381.000	429.581.000	426.881.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.375.000	2.375.000	2.375.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.180.000	2.180.000	2.180.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.180.000	2.180.000	2.180.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
	Anggaran	Realisasi Anggaran	en					
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Kec.Gajahmungkur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	584.822.000	592.147.000	653.428.539
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	9 Paket	9 Paket	5.925.000	5.925.000	5.925.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	5 Paket	106.250.000	99.075.000	104.146.124
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	71.000.000	60.500.000	60.500.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	14.936.000	14.936.000	14.567.390
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	20.925.000	20.925.000	20.925.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	128.879.000	128.879.000	139.951.806
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	236.907.000	261.907.000	307.413.219
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	71.298.000	137.113.000	172.301.100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	57 Unit	9 Unit	13 Unit	71.298.000	137.113.000	172.301.100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Kec.Gajahmungkur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	198.926.000	211.926.000	270.696.900
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	124.500.000	124.500.000	174.180.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
		yang Disediakan						
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	74.426.000	87.426.000	96.516.900
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Kec.Gajahmungkur	100 Persen	100 Persen	100 Persen	398.075.000	379.860.000	379.860.000
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	156.250.000	156.250.000	156.250.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	149.325.000	131.110.000	131.110.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	42.000.000	42.000.000	42.000.000

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			PAGU		
			RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2023	APBD INDUK	RKPD PERUBAHAN
	Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi						
X.XX.01.2.09 .11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.500.000	50.500.000	50.500.000
JUMLAH						33.350.181.442	33.468.306.442	33.747.443.234

Sumber ; Kecamatan Gajahmungkur 2023

Selain pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di atas, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang juga mengembangkan beberapa inovasi, baik yang sudah dibangun sebelumnya, maupun yang sedang dalam proses pengembangan, diantaranya :

1. Kegiatan pengembangan budaya inovasi pelayanan akhir pekan dan malam hari yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan pada tahun 2023 dinilai efektif dan mendapat sambutan yang besar dari masyarakat
2. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan melalui Board Learning Center (BLC).
4. Terlaksananya Musrenbang Perempuan (Sayang Perempuan dan Anak/ Sang Puan) di tahun 2023. Musrenbang Perempuan ini diharapkan menjadi solusi berbagai persoalan tingkat partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan sekaligus sebagai inovasi dan terobosan memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender khususnya di Kecamatan Gajahmungkur. Dengan Musrenbang Perempuan ini peserta mampu mengidentifikasi berbagai isu dan masalahnya lalu merekomendasikan usulan dalam berbagai persoalan baik sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik ataupun kesetaraan gender.

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Camat Gajahmungkur Kota Semarang Nomor 050/87/XI/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran dan target. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya review terhadap Renstra.;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023;

2. Dalam penyusunan RKPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

- a. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.
- b. Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.
- c. Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

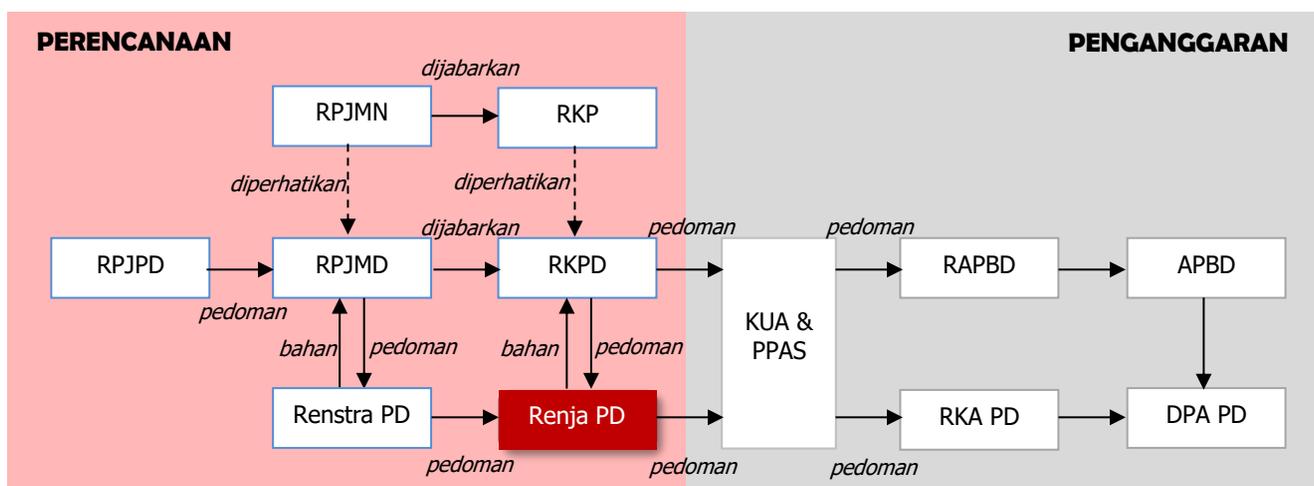
45. KECAMATAN TEMBALANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Berlangsungnya tahapan pemilihan umum serentak yang menyebabkan diperlukannya penyesuaian anggaran guna mendukung terlaksanannya proses tahapan pemilihan umum serentak 2024; (2) Penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TEMBALANG
KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Tembalang Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN : KEWILAYAHAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	30%	30%	38%	38%
		- Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
		- Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	35%	35%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	16,67%	2 Dokumen	28,57%
		- Dokumen pelaporan	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	66,67%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- dokumen rencana kerja dan rencana strategis (Renja dan renstra SKPD) yang disusun	2 Dokumen	2 dokumen				0 Dokumen	0,00%
		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				1 dokumen	100,00%
		- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD			1 dokumen	1 dokumen	100,00%		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				0 Dokumen	0,00%
		- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				0 Dokumen	0,00%
		- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				0 Dokumen	0,00%
		- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- dokumen pelaporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 dokumen				0 Laporan	0,00%
		- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	0 Laporan	0,00%		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 dokumen				2 dokumen	100,00%
		- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	2 Laporan	100,00%		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
		- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	1 Dokumen	33,33%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- persentase ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100 orang/bulan	100 orang/bulan	100,00%		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- persentase jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	6 dokumen	50,00%		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 dokumen				1 dokumen	100,00%
		- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	1 laporan	100,00%		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 dokumen				0 Laporan	0,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	0 Laporan	0,00%		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 dokumen				0 dokumen	0,00%
		- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 dokumen	0 dokumen	0,00%		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Cakupan pelaksanaan administrtasi umum	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50,00%	6 Bulan	50,00%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	10 Jenis				6 jenis	50,00%
		- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6 paket	4 paket	66,67%		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Jenis	1 jenis				0 Jenis	0,00%
		- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 paket	0 paket	0,00%		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	40 Jenis	26 jenis				18 Jenis	45,00%
		- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 paket	10 paket	83,33%		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	5 jenis				4 Jenis	80,00%
		- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5 paket	4 paket	66,67%		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- jumlah tamu yang berkunjung	2700 orang	3065 orang				1440 orang	53,33%
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	6 laporan	50,00%		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60 Kegiatan	69 kegiatan				26 Kegiatan	43,33%
		- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- jumlah barang yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5 Jenis	3 jenis				2 Jenis	40,00%
		- Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			3 dokumen	2 dokumen	66,67%		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- tersedianya peralatan dan mesin lainnya	4 Jenis	1 jenis				1 Jenis	25,00%
		- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 unit	1 unit	100,00%		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 bulan				6 Bulan	50,00%
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	6 laporan	50,00%		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jasa pemeliharaan dan perlengkapan gedung kantor	7 Jenis	6 jenis				3 Jenis	42,86%
		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Persentase pemeliharaan Aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	28 Unit	28 unit				4 unit	14,29%
		- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28 Unit	11 unit	39,29%		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Gedung	2 gedung				0 Gedung	0,00%
		- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	0 unit	0,00%		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	4 Jenis	2 jenis				0 Unit	0,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 unit	0 unit	0,00%		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	3 Jenis	2 jenis				0%	0,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	0 unit	0,00%		
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91%	91%	91%	93,17%	102,38%	93,17%	102,38%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	0	0,00%	0	0,00%
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	- jumlah dokumen monitoring evaluasi	4 Dokumen	4 dokumen				2 Dokumen	50,00%
		- Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kelurahan dan kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan				1 kegiatan	50,00%
		- persentase kecamatan dan kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bulusan	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSAN)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jangli	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JANGLI)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kedungmundu	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KRAMAS)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Mangunharjo	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MANGUNHARJO)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalisegoro	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN METESEH)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Rowosari	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kecamatan (KELURAHAN ROWOSARI)							
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambiroto		100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAMBIROTO)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangguwo	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGGUWO)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sendangmulyo	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGMULYO)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tandang	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TANDANG)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Terlaksananya Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tembalang	100%	100%				50%	50,00%
		- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TEMBALANG)			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100%	50%	50,00%	50%	50,00%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	3 kegiatan				2 Kegiatan	66,67%
		- Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			3 laporan	2 laporan	66,67%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98%	97%	98,00%	47,00%	47,96%	47,00%	47,96%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415 Kegiatan	406 kegiatan	415 Kegiatan	272 Kegiatan	65,54%	106 Kegiatan	25,54%
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	- jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	415 angka	481 angka				517 angka	124,58%
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	18 Kegiatan	17 kegiatan				8 Kegiatan	44,44%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 Unit	8 Unit	80,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bulusan	15 Kegiatan	12 kegiatan				2 kegiatan	13,33%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN BULUSAN)			15 unit	2 unit	13,33%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jangli	15 Kegiatan	8 kegiatan				3 kegiatan	20,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN JANGLI)			15 unit	3 unit	20,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah	14 Kegiatan	10 kegiatan				3 kegiatan	21,43%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perencanaan pembangunan di kelurahan Kedungmundu							
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN KEDUNGUMUNDU)			14 unit	3 unit	21,43%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kramas	11 Kegiatan	10 kegiatan				0 kegiatan	0,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN KRAMAS)			11 unit	0 unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunharjo	10 Kegiatan	11 kegiatan				0 kegiatan	0,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN MANGUNHARJO)			10 unit	0 unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Meteseh	23 Kegiatan	15 kegiatan				1 kegiatan	4,35%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN METESEH)			23 unit	1 unit	4,35%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Rowosari	16 Kegiatan	9 kegiatan				2 kegiatan	12,50%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN ROWOSARI)			16 unit	2 unit	12,50%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sambiroto	12 Kegiatan	6 kegiatan				0 kegiatan	0,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SAMBIROTO)			12 unit	0 unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangguwo	16 Kegiatan	10 kegiatan				0 kegiatan	0,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SENDANGGUWO)			16 unit	0 unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangmulyo	22 Kegiatan	13 kegiatan				0 kegiatan	0,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN SENDANGMULYO)			22 unit	0 unit	0,00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	17 Kegiatan	12 kegiatan				3 kegiatan	17,65%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN TANDANG)			17 unit	3 unit	17,65%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tembalang	11 Kegiatan	9 kegiatan				0 kegiatan	0,00%
		- Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (KELURAHAN TEMBALANG)			11 unit	0 unit	0,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- Jumlah Kegiatan pembangunan Non Fisik Prioritas hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	21 Kegiatan	21 kegiatan				8 kegiatan	38,10%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bulusan	19 Kegiatan	88 kegiatan				6 kegiatan	31,58%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulusan)			5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jangli	16 Kegiatan	84 kegiatan				5 kegiatan	31,25%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jangli)			4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kedungmundu	26 Kegiatan	92 kegiatan				7 kegiatan	26,92%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)			4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Kramas	20 Kegiatan	86 kegiatan				5 kegiatan	25,00%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kramas)			5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Mangunharjo	23 Kegiatan	86 kegiatan				8 kegiatan	34,78%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)			6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Meteseh	17 Kegiatan	81 kegiatan				5 kegiatan	29,41%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Meteseh)			4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Rowosari	21 Kegiatan	83 kegiatan				6 kegiatan	28,57%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rowosari)			6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	100,00%		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sambiroto	22 Kegiatan	85 kegiatan				6 kegiatan	27,27%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)			4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangguwo	24 Kegiatan	88 kegiatan				7 kegiatan	29,17%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)			4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan nonfisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sendangmulyo	22 Kegiatan	80 kegiatan				6 kegiatan	27,27%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)			4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tandang	21 Kegiatan	90 kegiatan				7 kegiatan	33,33%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tandang)			5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	- jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tembalang	24 Kegiatan	85 kegiatan				8 kegiatan	33,33%
		- Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tembalang)			5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	100,00%		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	112 Dokumen	29 dokumen	35 Dokumen	17 Dokumen	48,57%	17 Dokumen	15,18%
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	- Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	4 Dokumen	28 dokumen				2 Dokumen	50,00%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bulusan)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jangli)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungmundu)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kramas)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunharjo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Meteseh)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rowosari)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambiroto)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangguwo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangmulyo)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tandang)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
		- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tembalang)			9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- jumlah kampung keluarga berkualitas di Kecamatan	1 Kelurahan	1 Kelurahan				0 Kelurahan	0,00%
		- jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	3 Kegiatan	1 kegiatan				1 kegiatan	33,33%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra (2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		- Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			4 Laporan	0 Laporan	0,00%		
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Persen	11%	15%	10,00%	66,67%	10,00%	66,67%
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	42 Angka	35 Angka	10 Angka	28,57%	1 0 Angka	28,57%
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 Kegiatan	12 kegiatan				2 Kegiatan	66,67%
		- Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	6 Laporan	50,00%		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70%	65%	70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%	1 Kegiatan	33,33%
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	- Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	3 kegiatan	3 kegiatan				1 kegiatan	33,33%
		- Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			150 Orang	50 Orang	33,33%		

Sumber: Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor”.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
5. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
6. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	URUSAN KEWILAYAHAN	60.741.156.586	22.103.407.873	36,39
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.058.798.586	8.719.342.099	57,90
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.090.000	385.000	4,76
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000	-	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.730.000	-	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.030.000	-	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.440.000	-	0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.750.000	-	0,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	440.000	-	0,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000	385.000	96,25
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.035.368.417	8.274.393.093	58,95
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.420.308.417	7.994.137.093	59,57
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	614.070.000	279.960.000	45,59
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	330.000	296.000	89,70
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	330.000	-	0,00
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	330.000	-	0,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	580.340.169	229.647.285	39,57
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	10.117.300	50,59
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.400.000	-	0,00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.700.000	16.910.985	74,50
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.950.000	1.844.000	37,25

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
17	Fasilitas Kunjungan Tamu	102.300.000	26.875.000	26,27
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.977.000	90.900.000	40,05
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	116.013.169	83.000.000	71,54
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000	4.470.000	89,40
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	4.470.000	89,40
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.000.000	70.344.901	36,07
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	50.734.901	42,28
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	19.610.000	26,15
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.000.000	140.101.820	59,62
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000	45.557.320	41,42
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	89.235.000	99,15
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	5.309.500	21,24
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	-	0,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.901.808.000	1.859.303.929	47,65
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	916.325.000	501.104.000	54,69
27	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	916.325.000	501.104.000	54,69
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.005.133.000	900.093.009	44,89
27	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN TEMBALANG)	1.380.333.000	632.768.591	45,84
28	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN BULUSAN)	44.200.000	20.099.326	45,47
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN JANGLI)	47.200.000	16.628.945	35,23
30	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KEDUNG MUNDU)	50.200.000	23.681.317	47,17
31	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN KRAMAS)	46.000.000	20.490.124	44,54
32	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	51.400.000	20.928.362	40,72
33	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN METESEH)	62.800.000	15.953.632	25,40
34	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN ROWOSARI)	47.800.000	24.776.677	51,83
35	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SAMBIROTO)	52.600.000	29.309.872	55,72
36	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	54.400.000	19.401.613	35,66
37	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	66.000.000	23.202.014	35,15
38	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TANDANG)	55.600.000	29.186.182	52,49
39	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KELURAHAN TEMBALANG)	46.600.000	23.666.354	50,79
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	980.350.000	458.106.920	46,73

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	980.350.000	458.106.920	46,73
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.638.550.000	11.486.211.845	27,59
10	Kegiatan Pemberdayaan	17.841.150.000	2.087.980.420	11,70
41	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	82.150.000	79.841.400	97,19
42	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	1.397.000.000	1.242.185.000	88,92
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN BULUSAN)	950.000.000	21.250.000	2,24
44	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN JANGLI)	950.000.000	20.800.000	2,19
45	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)	950.000.000	22.175.000	2,33
46	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KRAMAS)	950.000.000	19.434.000	2,05
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	950.000.000	22.232.000	2,34
48	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN METESEH)	1.475.000.000	48.440.000	3,28
49	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN ROWOSARI)	1.120.000.000	35.470.000	3,17
50	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SAMBIROTO)	950.000.000	22.037.000	2,32
51	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	1.309.000.000	44.257.000	3,38
52	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	1.901.000.000	56.115.000	2,95
53	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TANDANG)	1.614.000.000	59.276.000	3,67
54	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN TEMBALANG)	950.000.000	19.450.000	2,05
55	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KECAMATAN TEMBALANG)	193.000.000	87.587.000	45,38
56	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN BULUSAN)	175.000.000	26.589.400	15,19
57	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN JANGLI)	175.000.000	5.185.000	2,96
58	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KEDUNGMUNDU)	175.000.000	34.556.500	19,75
59	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KRAMAS)	175.000.000	39.165.000	22,38
60	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MANGUNHARJO)	175.000.000	22.525.000	12,87
61	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN METESEH)	175.000.000	29.458.250	16,83
62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN ROWOSARI)	175.000.000	14.497.000	8,28
63	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SAMBIROTO)	175.000.000	22.687.000	12,96
64	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SENDANGGUWO)	175.000.000	41.319.000	23,61
65	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SENDANGMULYO)	175.000.000	11.980.000	6,85
66	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TANDANG)	175.000.000	20.415.000	11,67
67	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN TEMBALANG)	175.000.000	19.053.870	10,89
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	23.797.400.000	9.398.231.425	39,49
68	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	20.075.000	14,65
69	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Bulusan)	969.000.000	362.950.000	37,46
70	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jangli)	933.000.000	355.075.000	38,06
71	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kedungmundu)	1.464.600.000	569.055.000	38,85
72	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kramas)	687.600.000	243.885.000	35,47
73	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Mangunharjo)	1.609.200.000	656.908.850	40,82

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
74	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Meteseh)	3.787.800.000	1.545.715.000	40,81
75	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Rowosari)	1.090.200.000	418.575.000	38,39
76	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sambiroto)	1.953.600.000	944.366.000	48,34
77	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sendangguwo)	2.186.400.000	889.225.000	40,67
78	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Sendangmulyo)	5.146.200.000	2.097.585.000	40,76
79	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tandang)	2.374.800.000	955.150.000	40,22
80	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tembalang)	828.000.000	335.916.575	40,57
81	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	630.000.000	3.750.000	0,60
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49.000.000	7.050.000	14,39
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49.000.000	7.050.000	14,39
82	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	49.000.000	7.050.000	14,39
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	93.000.000	31.500.000	33,87
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	93.000.000	31.500.000	33,87
83	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	93.000.000	31.500.000	33,87

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 83 sub kegiatan pada Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah sebesar Rp 60.741.156.586. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 22.103.407.873. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 38.637.748.713.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI			PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2023	2024	2025	2026
TUJUAN														
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat		87,5	88	88,35	89	90		94,97	93,17	92	92,5	93	93,5
SASARAN :														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	75%						75%						
Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan OPD	1. Persentase capaian kinerja Kecamatan	98%						100%						
	2. Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan	100%						100%						
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP		71,50	72	72,50	73	73,50		71,66	74,10	73	73,20	73,70	74
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan		1						1					
	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN		100%	100%	100%	100%	100%			50%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		97%	98%	99%	100%	100%		100%	50%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		35%						35%					

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI			PROYEKSI			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2023	2024	2025	2026
umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			85,04 %	86,72 %	88,40 %	90,08 %			23%	85,04 %	86,72 %	88,40 %	90,08 %
	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan		90%	92%	95%	98%	100%		60%	0%	92%	95%	98%	100%

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tembalang tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”, target sebesar 88 sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 93,17;
 - a) Sasaran “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Indikator “Nilai AKIP” target sebesar 72 Nilai, dengan realisasi sebesar 74,10 Nilai.
 - b) Sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Indikator “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN” target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 50%.
 - c) Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 1 indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Indikator “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” target sebesar 98%, dengan realisasi sebesar 50%.
 - d) Sasaran “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki 2 indikator kinerja sebagai berikut:
 1. Indikator “Persentase peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” target sebesar 85,04%, dengan realisasi sebesar 23%.
 2. Indikator “Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan” target sebesar 92%, dengan realisasi sebesar 0%.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Tembalang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Tembalang terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Tembalang pada tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai 50% pada Semester I / Triwulan II. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD dimana harus tercapai kesesuaian 100% pada akhir periode Tahun 2023 sebagai perwujudan perencanaan yang ideal;
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang sudah memperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini merupakan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;
3. Terdapat kasus kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Tembalang, walaupun dengan angka yang kecil tetapi perlu terus diupayakan usaha untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan menyalurkan bantuan pangan;
4. Masih adanya angka stunting yang terdapat di wilayah Kecamatan Tembalang. Isu tersebut terus diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami stunting.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan diantaranya:

- a) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP;
- b) Belum Optimalnya sinergitas antara TNI, Polri dan Pemerintah Kecamatan Tembalang pada level bawah;
- c) Belum sempurnanya SOP dan Standar pelaporan kegiatan;
- d) Belum optimalnya peran serta Lembaga kemasyarakatan dalam program kegiatan Kecamatan Tembalang;
- e) Belum optimalnya peran serta linmas dalam penanganan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f) Terdapat beberapa kantor kelurahan yang kurang representatif;

- g) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan;
- h) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat;

Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan. Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia.

Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Tembalang tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek yang saling terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Tembalang agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas.
- 2) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.
- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di kecamatan dan kelurahan.
- 4) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Tembalang Kota Semarang sebagai berikut:

1. Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024
Mendekati tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, *hate speech*, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.
2. Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIKAM)
Pembentukan Forkopimcam didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Forkopimcam yaitu melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta yang terpenting yaitu untuk memelihara stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di tingkat kecamatan.

3. Evaluasi program pelayanan akhir pekan

Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang

Di tahun 2023, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator				Pagu Indikatif (Rp)
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7	URUSAN KEWILAYAHAN												
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TEMBALANG					59.752.460.397	KECAMATAN TEMBALANG					59.682.460.397	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91	Persen	4.041.565.892	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91	Persen	3.970.965.892	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	Angka	1.064.937.870	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	Angka	991.637.870	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	1.064.937.870	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00	Dokumen	991.637.870	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	1.996.278.022	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	1.998.978.022	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.344.033.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	1.344.033.000	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	47.900.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	47.900.000	
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	49.900.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	49.900.000	
		KELURAHAN KEDUNGMANDU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	53.645.022		KELURAHAN KEDUNGMANDU	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	53.645.022	
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	48.700.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	48.700.000	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	49.200.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	51.900.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	64.600.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	64.600.000	
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	50.500.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	50.500.000	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	55.300.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	55.300.000	
		KELURAHAN SENDANGUWO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	57.100.000		KELURAHAN SENDANGUWO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	57.100.000	
		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	67.800.000		KELURAHAN SENDANGMULYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	67.800.000	
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	58.300.000		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	58.300.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	49.300.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	49.300.000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	980.350.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	Persen	980.350.000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	980.350.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.00	Laporan	980.350.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	Persen	39.605.486.678	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	Persen	39.619.672.778	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415	Kegiatan	16.552.097.417	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	415	Kegiatan	16.568.083.517	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	82.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.00	Lembaga Kemasyarakatan	82.150.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.397.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	1.397.000.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting			
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)				
			Indikator Mutakhir						Uraian	Targ et	Satuan			Indikator Mutakhir		
			Uraian	Targ et	Satuan									Uraian	Targ et	Satuan
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000				
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15	Unit	950.000.000				
		KELURAHAN KEDUNG MUNDU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000		KELURAHAN KEDUNG MUNDU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14	Unit	950.000.000				
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000				
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	Unit	950.000.000				
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23	Unit	1.475.000.000		KELURAHAN METESEH	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23	Unit	1.475.000.000				
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.120.000.000		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.120.000.000				
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	950.000.000				
		KELURAHAN SENDANGG UWU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.309.000.000		KELURAHAN SENDANGG UWU	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16	Unit	1.309.000.000				

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/ SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN SENDANGM ULYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22	Unit	1.901.000.000		KELURAHAN SENDANGM ULYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22	Unit	1.901.000.000	
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	Unit	1.614.000.000		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17	Unit	1.614.000.000	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11	Unit	950.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	223.375.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	240.261.100	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	57.835.162		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	57.835.162	
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	60.933.730		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	60.933.730	
		KELURAHAN KEDUNGMANDU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	74.234.590		KELURAHAN KEDUNGMANDU	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	74.234.590	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	67.234.770		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	67.234.770	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	99.247.742		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	98.347.742	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	65.901.491		KELURAHAN METESEH	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	65.901.491	
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	53.163.080		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6	Pokmas / Ormas	53.163.080	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	48.848.100		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	48.848.100	
		KELURAHAN SENDANGG UWO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	70.935.109		KELURAHAN SENDANGG UWO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	70.935.109	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN SENDANGM ULYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	72.260.179		KELURAHAN SENDANGM ULYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4	Pokmas / Ormas	72.260.179	
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	65.495.009		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	65.495.009	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	44.483.455		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas / Ormas	44.483.455	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	112	Dokumen	23.053.389.261	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	112	Dokumen	23.051.589.261	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	101.820.052	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4.00	Lembaga Kemasyarakatan	101.820.052	
		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	918.582.068		KELURAHAN BULUSAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	918.582.068	
		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	872.976.876		KELURAHAN JANGLI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	872.976.876	
		KELURAHAN KEDUNGMANDU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.400.273.959		KELURAHAN KEDUNGMANDU	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.400.273.959	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	630.351.050		KELURAHAN KRAMAS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	630.351.050	
		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.567.360.500		KELURAHAN MANGUNHARJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.565.560.500	
		KELURAHAN METESEH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	3.730.518.696		KELURAHAN METESEH	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	3.730.518.696	
		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.036.618.943		KELURAHAN ROWOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.036.618.943	
		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.896.927.309		KELURAHAN SAMBIROTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	1.896.927.309	
		KELURAHAN SENDANGG UWO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.121.470.009		KELURAHAN SENDANGG UWO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.121.470.009	
		KELURAHAN SENDANGM ULYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	5.086.288.568		KELURAHAN SENDANGM ULYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	5.086.288.568	
		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.316.449.284		KELURAHAN TANDANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	2.316.449.284	
		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	796.229.399		KELURAHAN TEMBALANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9.00	Lembaga Kemasyarakatan	796.229.399	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.00	Laporan	577.522.548	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.00	Laporan	577.522.548	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15	Persen	49.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15	Persen	49.000.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35	Angka	49.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35	Angka	49.000.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	49.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.00	Laporan	49.000.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70	Persen	93.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70	Persen	93.000.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	93.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3	kegiatan	93.000.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150	Orang	93.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150	Orang	93.000.000	
NON URUSAN							NON URUSAN						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	15.963.407.827	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100	Persen	15.949.821.727	
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100	Persen		
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100	Persen		

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7	Dokumen	8.090.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7	Dokumen	8.090.000	
			Jumlah Dokumen pelaporan	3	Dokumen				Jumlah Dokumen pelaporan	3	Dokumen		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	300.000	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	1.730.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	1.730.000	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.030.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.030.000	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	1.440.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	1.440.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.750.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00	Laporan	440.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,00	Laporan	440.000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	400.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	Persen	15.012.713.528	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	Persen	15.012.713.528	
			Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3	Dokumen				Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD	3	Dokumen		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Orang/bulan	14.434.853,528	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Orang/bulan	14.434.853,528	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	576.870.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	576.870.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	TARGET	Satuan				Uraian	TARGET	Satuan		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	330.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	330.000	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	330.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	330.000	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	330.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	330.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	Persen	507.604.299	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	Persen	494.018.199	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	Paket	20.000.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	32.385.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	37.749.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	22.700.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	22.700.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	5.241.530	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	5.241.530	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	109.485.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	90.535.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	201.779.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	201.779.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	116.013.169	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	116.013.169	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	5.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	Persen	5.000.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	5.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	195.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	Persen	190.725.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	120.000.000	

Rancangan Awal RKPD Perubahan 2023							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
Kode	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	Program/Keg/SubKeg	Lokasi	Indikator			Pagu Indikatif (Rp)	
			Indikator Mutakhir						Indikator Mutakhir				
			Uraian	Target	Satuan				Uraian	Target	Satuan		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	70.725.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	235.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100	Persen	239.275.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	110.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	Unit	114.275.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	90.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	90.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	25.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN TEMBALANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	10.000.000	

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
 - e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”
dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Tembalang Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah, dengan indikator Nilai AKIP;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik, dengan indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan, dengan indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;
4. Meningkatnya wawasan Kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan, dengan 2 indikator yaitu Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			

Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,5
SASARAN :			
1 Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	Angka	73
2 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	- Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
3 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	98
4 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	- Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	85,04
	- Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	Persen	92

Sumber : Kecamatan Tembalang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Tembalang memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat ” dan indikator sasaran “Nilai Kepuasan Masyarakat; Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan; Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif; Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Tembalang Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TEMBALANG					59.760.618.417	60.678.743.417	59.562.460.397		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	91 Persen	91 persen	91 Persen	2.931.990.000	3.901.808.000	3.901.565.892		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	63.500.000	916.325.000	924.937.870		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	63.500.000	916.325.000	924.937.870	APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.888.140.000	2.005.133.000	1.996.278.022		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 persen	12 laporan	12 laporan	1.888.140.000	2.005.133.000	1.996.278.022	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 kegiatan						APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Meteseh)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Mangunharjo)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tandang)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangguwo)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jangli)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kedungmundu)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tembalang)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sendangmulyo)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Bulusan)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kramas)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Rowosari)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambiroto)	100 persen	12 Laporan	12 Laporan				APBD Kota Semarang	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	980.350.000	980.350.000	980.350.000		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Kegiatan	3 Laporan	3 Laporan	980.350.000	980.350.000	980.350.000	APBD Kota Semarang	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98%	98%	98%	41.619.350.000	41.638.550.000	39.555.486.678		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Kelurahan	415 kegiatan	415 kegiatan	415 kegiatan	17.841.150.000	17.841.150.000	16.502.097.417		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	415 angka	6.Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	82.150.000	82.150.000	82.150.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Pembangunan di Kelurahan									
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 kegiatan	10 Unit	10 Unit	15.466.000.000	15.466.000.000	15.466.000.000	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Meteseh)	23 kegiatan	23 Unit	23 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Mangunharjo)	10 kegiatan	10 Unit	10 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tandang)	17 kegiatan	17 Unit	17 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sendangguwo)	16 kegiatan	16 Unit	16 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jangli)	15 kegiatan	15 Unit	15 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kedungmudu)	14 kegiatan	14 Unit	14 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tembalang)	11 kegiatan	11 Unit	11 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sendangmulyo)	22 kegiatan	22 Unit	22 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Bulusan)	15 kegiatan	15 Unit	15 Unit				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kramas)	11 kegiatan	11 Unit	11 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Rowosari)	16 kegiatan	16 Unit	16 Unit				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambiroto)	12 kegiatan	12 Unit	12 Unit				APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	2.293.000.000	2.293.000.000	953.947.417	APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Meteseh)	17 kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Mangunharjo)	23 kegiatan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tandang)	21 kegiatan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangguwo)	24 kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jangli)	16 kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kedungmundu)	26 kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tembalang)	24 kegiatan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sendangmulyo)	22 kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Bulusan)	19 kegiatan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kramas)	20 kegiatan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rowosari)	21 kegiatan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambiroto)	22 kegiatan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas				APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Peran Serta Lembaga Kemasyarakatan	112 dokumen	112 dokumen	35 dokumen	23.778.200.00	23.797.400.00	23.053.389.26		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 dokumen	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	23.148.200.00	23.167.400.00	22.475.866.71	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Meteseh)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Mangunharjo)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tandang)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangguwo)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jangli)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kedungmundu)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tembalang)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sendangmulyo)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Bulusan)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kramas)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Rowosari)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambiroto)	9 dokumen	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga				APBD Kota Semarang	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 kegiatan	4 Laporan	4 Laporan	630.000.000	630.000.000	577.522.548	APBD Kota Semarang	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	15%	15%	50.000.000	49.000.000	49.000.000		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Gangguan	35 angka	35 angka	35 angka	50.000.000	49.000.000	49.000.000		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	49.000.000	49.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70%	70%	70%	96.000.000	93.000.000	93.000.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kegamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	96.000.000	93.000.000	93.000.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional	3 kegiatan	150 Orang	150 Orang	96.000.000	93.000.000	93.000.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	15.063.278.417	14.996.385.417	15.963.407.827		
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%					
		Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	7 dokumen	7 dokumen	6 dokumen	8.090.000	8.090.000	8.090.000		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000	300.000	300.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.730.000	1.730.000	1.730.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.030.000	2.030.000	2.030.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.440.000	1.440.000	1.440.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	440.000	440.000	440.000	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	400.000	400.000	400.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang berkelanjutan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	14.040.888.417	14.035.368.417	15.012.713.528		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100 orang/bulan	100%	13.420.308.417	13.420.308.417	14.434.853.528	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	12 Dokumen	100%	619.590.000	614.070.000	576.870.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	330.000	330.000	330.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	330.000	330.000	330.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	330.000	330.000	330.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Daya Dukung Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	579.300.000	517.927.000	507.604.299		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 jenis	6 Paket	6 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 jenis	4 Paket	4 Paket	108.150.000	87.400.000	32.385.600	APBD Kota Semarang	

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 jenis	12 Paket	12 Paket	22.700.000	22.700.000	22.700.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 jenis	5 Paket	5 Paket	4.950.000	4.950.000	5.241.530	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2700 orang	12 Laporan	12 Laporan	102.300.000	102.300.000	109.485.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 kegiatan	12 Laporan	12 Laporan	267.600.000	226.977.000	201.779.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	3 Dokumen	3 jenis	53.600.000	53.600.000	116.013.169	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 jenis	1 Unit	1 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	195.000.000	195.000.000	195.000.000		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000	120.000.000	120.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 jenis	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	235.000.000	235.000.000	235.000.000		

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	110.000.000	110.000.000	110.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 gedung	1 Unit	1 Unit	90.000.000	90.000.000	90.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 jenis	2 Unit	2 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	APBD Kota Semarang	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 jenis	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	APBD Kota Semarang	
JUMLAH						59.760.618.417	60.678.743.417	59.562.460.397		

Sumber : Kecamatan Tembalang Kota Semarang, 2023

BAB V **P E N U T U P**

Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Tembalang Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Tembalang Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Tembalang ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Tembalang Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Tembalang Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

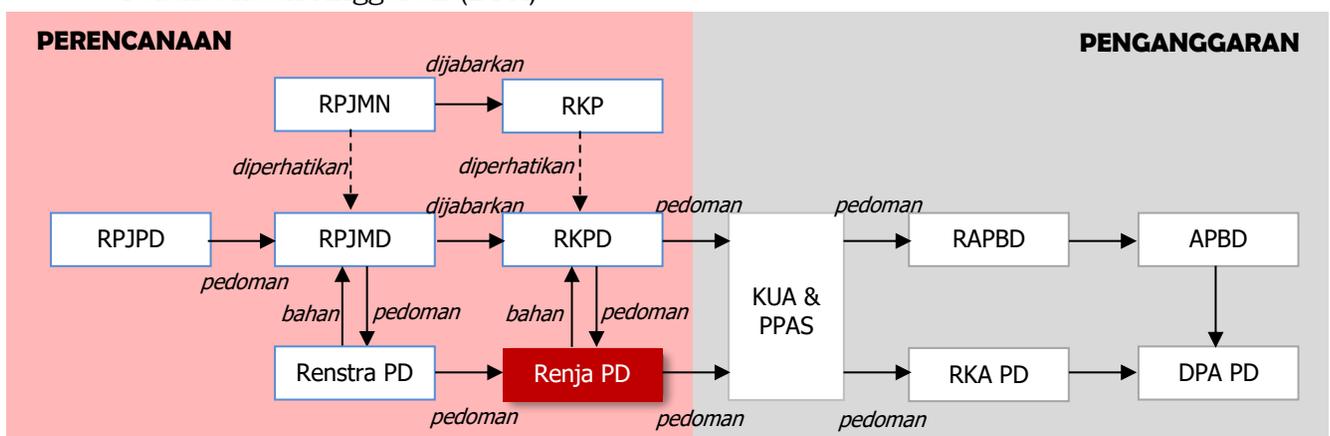
46. KECAMATAN CANDISARI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023 yang menurun akibat menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; (3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (4) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Candisari Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Candisari Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Candisari Kota Semarang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 7+8		10 = 9/6 x 100%		11= 5+9		12 = 12/4x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	15.061.302.000		8.140.951.703	100%	0	76.89%	0	0.00%	0	76.89	0	76.89	0			8.140.951.703	76.89	0	
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95				92.00 Persen		95.48		-0.17		95.31									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
						I	II									
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	0			2.00 angka		1		0		1				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	1.000.000.000	121.040.600	100%	0	100.00%	0	0.00%	0	100	0			
		JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1			1.00 Angka		1		0		1				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	1.000.000.000	121.040.600	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0			
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0		0	0 0		0		0		0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
								I	II									
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	9.531.700.240		7.091.703.792	100%	0	25.00%	0	25.00%	0	50	0				
		Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100				100.00 persen		25		25		50					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	9.531.700.240		7.091.703.792	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0				
		Presentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart paten	0		0		00		0		0		0					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Candi	0		0		00		0		0		0					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							I	II							
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jatingaleh	0		0	00		0		0					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaliwiru	0		0	00		0		0					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tegalsari	0		0	00		0		0					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonotingal	0		0	00		0		0					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
						I	II									
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Karanganyar Gunung	0		0	00		0		0		0				
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Jomblang	0		0	00		0		0		0				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	4.529.601.760		928.207.311	100%	0	25.00%	0	25.00%	0	50	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
								I		II										
		Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100			100.00 persen		25		25		50								
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	4.529.601.760		928.207.311	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0						
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	0		0	0 0		0		0		0								
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	94.444.000.000		23.636.888.147	100%	0	25.00%	0	25.66%	0	50.66	0	50.66	0		23.636.888.147	50.66	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
						I	II									
		PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100			100.00 persen		25		25.66		50.66				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	91.574.000.000	23.317.543.566	100%	0	18.75%	0	38.75%	0	57.5	0			
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80			80.00 kegiatan		15		31		46				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	115.000.000	39.309.025	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II							
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0		0		0 0	0		0		0				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%	45.683.895.500		16.945.676.000	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Karanganyar Gunung	0		0		0 0	0		0		0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jomblang	0		0		00		0		0		0							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Candi	0		0		00		0		0		0							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Wonotingal	0		0		00		0		0		0							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
									I	II										
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Candisari	0		0		0 0		0		0		0							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Jatingaleh	0		0		0 0		0		0		0							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tegalsari	0		0		0 0		0		0		0							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kaliwiru	0		0		0 0	0		0		0				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	45.775.104.500		6.332.558.541	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jatingaleh	0		0		0 0	0		0		0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kaliwiru	0		0		0 0		0		0		0							
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Jomblang	0		0		0 0		0		0		0							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			0		0		0 0		I	II	0									
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Karanganyar gunung	0		0		0 0		0		0		0							
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tegalsari	0		0		0 0		0		0		0							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
									I	II										
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Wonotingal	0		0		0 0		0		0		0							
		jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan candi	0		0		0 0		0		0		0							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	0		0		0 0		0		0		0							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II									
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		100%	2.870.000.000		319.344.581	100%	0	33.33%	0	33.33%	0	66.67	0				
		Jumlah jenis laporan lembaga masyarakat yang seharusnya	6				6.00 kegiatan		2		2		4					
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat		100%	870.000.000		113.784.781	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0				
		Jumlah jenis laporan lembaga masyarakat yang dilaporkan	0		0		0 0		0		0		0					
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Masyarakat yang Dilaporkan	0		0		0 0		0		0		0					
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Masyarakat yang Dilaporkan	0		0		0 0		0		0		0					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							I	II												
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	0		0		00		0		0		0							
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	0		0		00		0		0		0							
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	0		0		00		0		0		0							
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	0		0		00		0		0		0							
		Jumlah Jenis Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Dilaporkan	0		0		00		0		0		0							
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	2.000.000.000		205.559.800	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							I	II												
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	0		0		0 0		0		0		0							
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	0		0		0 0		0		0		0							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	450.000.000		229.302.582	100%	0	25.67%	0	6.80%	0	32.47	0	32.47	0		229.302.582	32.47	0
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30				15.00 persen		3.85		1.02		4.87							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II									
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	0	0	100%	0	25.00%	0	30.77%	0	55.77	0					
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	22			52.00 angka		13		16		29						
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	0	0	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
									I	II										
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0		0		0 0		0		0		0							
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	220.000.000		0	100%	0	20.87%	0	56.30%	0	77.17	0	77.17	0		0	77.17	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I		II							
		Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	13			5.00 angka		1		4		5					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
			0			I	II	50											
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0			92.00%		20		30		50							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	220.000.000	0	100%	0	0.00%	0	100.00%	0	100	0						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II											
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2			2.00 kegiatan		0		2		2								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	220.000.000	0	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							I	II												
		Jumlah peserta kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0		0		0 0		0		0		0							
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	50.525.481.000		13.598.281.545	100%	0	25.00%	0	25.00%	0	50	0	50	0		13.598.281.545	50	0
		Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100				100.00%		25		25		50							
		Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100				100.00%		25		25		50							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
						I	II									
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100			100.00%		25		25		50				
X.XX.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	247.250.000	11.404.450	100%	0	62.50%	0	12.50%	0	75	0			
		Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2			2.00 Dokumen		2		0		2				
		Presentase Dokumen pelaporan	100			100.00 persen		25		25		50				
X.XX.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	33.750.000	1.059.000	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							I	II									
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) yang disusun	0		0		0 0		0		0		0				
		Jumlah Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Candisari	0		0		0 0		0		0		0				
X.XX.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	33.750.000		169.55	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0			
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	0		0		0 0		0		0		0				
X.XX.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	33.750.000		169.55	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	0		0		0 0		0		0		0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II							
X.XX.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	33.750.000		169.5	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	0		0		0 0		0		0		0			
X.XX.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	33.750.000		176	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0		0		0 0		0		0		0			
X.XX.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	16.750.000		1.258.900	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
							I	II													
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		0		0 0		0		0		0								
X.XX.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	61.750.000		8.401.950	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0							
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	0		0		0 0		0		0		0								
X.XX.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	42.242.067.940		11.957.875.396	100%	0	29.17%	0	29.17%	0	58.33	0							
		Administrasi Keuangan SKPD	100				100.00 Persen		25		25		50								
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3				3.00 dokumen		1		1		2								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II									
X.XX.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	39.825.782.911		11.621.869.116	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0				
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	0		0		0 0		0		0		0					
X.XX.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	2.327.785.029		331.757.000	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0				
		Presentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	0		0		0 0		0		0		0					
X.XX.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	29.500.000		4.249.280	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0				
		Laporan Keuangan akhir tahun	0		0		0 0		0		0		0					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II										
X.XX.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	29.500.000	0	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0						
		Laporan Keuangan Semesteran	0		0	0 0		0		0		0							
X.XX.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	29.500.000	0	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0						
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0		0	0 0		0		0		0							
X.XX.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.512.629.807	415.272.750	100%	0	25.00%	0	25.00%	0	50	0						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
						I	II									
		Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100			100.00 persen		25		25		50				
X.XX.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	309.366.538	0	9.017.800	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	0		0	0 0		0		0		0				
X.XX.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	413.263.269		21.306.500	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
									I	II									
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0		0		0 0		0		0		0						
X.XX.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	317.500.000		20.582.250	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0					
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0		0		0 0		0		0		0						
X.XX.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	37.500.000		6.311.350	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0					
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0		0		0 0		0		0		0						
X.XX.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	255.000.000		16.031.350	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0					
		Jumlah tamu yang berkunjung	0		0		0 0		0		0		0						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
								I	II								
X.XX.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	365.000.000		15.155.000	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0			
		Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	0		0		0 0		0		0		0				
X.XX.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	815.000.000		326.868.500	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0			
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	0		0		0 0		0		0		0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II								
X.XX.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	78.500.000		2.862.000	100%	0	20.00%	0	30.00%	0	50	0			
		Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100				100.00 persen		20		30		50				
X.XX.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	78.500.000		2.862.000	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0			
		Peralatan dan Mesin Lainnya	0		0		0 0		0		0		0				
X.XX.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	974.842.873		106.176.798	100%	0	15.00%	0	35.00%	0	50	0			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
								I	II								
		Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100			100.00 Persen		15		35		50					
X.XX.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	889.842.873		106.176.798	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0			
		Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0		0	0 0		0		0		0					
X.XX.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	85.000.000		0	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	0		0	0 0		0		0		0					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		
								I	II											
X.XX.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.470.190.380		1.104.690.151	100%	0	25.00%	0	25.00%	0	50	0						
		Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100				100.00 Persen		25		25		50							
X.XX.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	2.588.960.000		150.123.190	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
									I	II											
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0		0		0 0		0		0		0								
X.XX.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	821.830.380		679.204.000	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0							
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0		0		0 0		0		0		0								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
								I	II									
X.XX.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	834.400.000		265.696.561	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0				
		Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	0		0		00		0		0		0					
X.XX.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	225.000.000		9.666.400	100%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0				

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)	
									I	II									
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	0		0		0 0		0		0		0						
Rata-rata capaian riil semua kegiatan									0	0	0	0	0	0					
Rata-rata Capaian Kinerja Program (diluar Penunjang)(%)														59.3	0				
Predikat Kinerja Program																			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								0		0		0		0					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														57.44	0				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			

Sumber: Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub kegiatan yang belum mencapai 100% bersifat rutin, dan pelaksanaannya di triwulan III dan/atau triwulan IV.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu :

- a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- d. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
- h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
- i. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
- j. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- k. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- n. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- o. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
- p. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

q. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Candisari Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Kecamatan Candisari Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
		Urusan Wajib Kewilayahan	33.385.032.749	14.754.591.114	44.20%
A	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.764.956.042	5.691.770.489	52.87%
1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.100.640	1.801.250	6.41%
	01.01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.887.800	-	0.00%
	01.02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.088.870	-	0.00%
	01.03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.141.150	-	0.00%
	01.04	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	5.582.950	-	0.00%
	01.05	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.141.150	-	0.00%
	01.06	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.099.360	-	0.00%
	01.07	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.159.360	1.801.250	83.42%
2	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.674.731.540	5.013.864.728	57.80%
	02.01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.263.615.580	4.884.981.228	59.11%
	02.02	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	403.015.000	126.500.000	31.39%
	02.05	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.700.320	2.383.500	88.27%
	02.07	d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	2.700.320	-	0.00%
	02.08	e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.700.320	-	0.00%
3	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	949.154.467	385.998.120	40.67%
	06.01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.158.470	9.814.000	48.68%
	06.02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.065.509	215.980.000	84.02%
	06.04	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.179.700	18.593.700	24.41%
	06.05	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.407.073	8.260.850	33.85%
	06.08	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	134.375.000	25.485.000	18.97%
	06.09	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.200.000	16.864.570	12.85%
	06.11	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	305.768.715	91.000.000	29.76%

NO	KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
4	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179.438.737	133.420.000	74.35%
	07.06	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.438.737	133.420.000	74.35%
5	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.721.018	60.106.871	27.86%
	08.02	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193.903.018	50.656.871	26.12%
	08.03	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.818.000	9.450.000	43.31%
6	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.809.640	96.579.520	13.45%
	09.02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.421.375	57.596.770	19.37%
	09.09	b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.250.000	-	00.00%
	09.10	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.571.490	18.621.750	72.82%
	09.11	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.566.775	20.361.000	21.31%
B	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.315.602.557	1.281.655.225	55.35%
1	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	187.244.950	48.350.000	25.82%
	01.02	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	187.244.950	48.350.000	25.82%
2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.841.357.107	841.420.608	45.70%
	02.03	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	1.316.357.107	604.575.583	45.93%
	02.03	b. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jatingaleh)	74.000.000	32.358.095	43.73%
	02.03	c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Wonotingal)	72.000.000	27.924.009	38.78%
	02.03	d. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Tegalsari)	80.000.000	26.011.245	32.51%
	02.03	e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kaliwiru)	68.000.000	26.784.993	39.39%

NO	KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	02.03	f. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Karanganyar Gunung)	72.000.000	45.776.910	63.58%
	02.03	g. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Candi)	76.000.000	41.119.347	54.10%
	02.03	h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Jomblang)	83.000.000	36.870.426	44.42%
3	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	812.000.500	391.884.617	48.26%
	04.03	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	812.000.500	391.884.617	48.26%
C	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.624.135.650	7.725.555.400	39.37%
1	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.039.535.650	3.257.769.500	88.22%
	02.01	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	51.395.590	26.310.000	51.19%
	02.02	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kecamatan)	1.297.250.000	1.117.237.000	86.12%
	02.02	c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jatingaleh)	950.000.000	250.111.000	26.23%
	02.02	d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Wonotingal)	950.000.000	126.956.000	13.36%
	02.02	e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Tegalsari)	996.000.000	141.688.000	14.23%
	02.02	f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kaliwiru)	950.000.000	22.923.000	2.41%
	02.02	g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karanganyar Gunung)	968.000.000	165.502.000	17.10%
	02.02	h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Candi)	950.000.000	212.466.000	22.36%
	02.02	i. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Jomblang)	1.450.000.000	948.155.000	65.39%
	02.03	j. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)	251.890.060	68.340.000	27.13%
	02.03	k. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jatingaleh)	175.000.000	28.653.500	16.37%
	02.03	l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Wonotingal)	175.000.000	37.325.000	21.33%
	02.03	m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tegalsari)	175.000.000	3.750.000	2.14%
	02.03	n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kaliwiru)	175.000.000	33.018.000	18.87%
	02.03	o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karanganyar Gunung)	175.000.000	16.000.000	9.14%
	02.03	p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Candi)	175.000.000	52.460.000	29.98%
	02.03	q. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jomblang)	175.000.000	6.875.000	3.93%

NO	KODE REK	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
2	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.584.600.000	4.467.785.900	46.61%
	03.01	a. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)	137.000.000	39.113.000	28.55%
	03.01	b. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jatingaleh)	1.234.800.000	609.582.500	49.37%
	03.01	c. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Wonotingal)	984.000.000	458.250.000	46.57%
	03.01	d. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Tegalsari)	1.867.200.000	876.570.000	46.95%
	03.01	e. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kaliwiru)	570.000.000	245.665.000	43.10%
	03.01	f. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karanganyar Gunung)	1.030.800.000	464.746.000	45.09%
	03.01	g. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Candi)	1.410.600.000	678.132.000	48.07%
	03.01	h. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Jomblang)	2.305.200.000	1.084.620.000	47.05%
	03.04	i. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	45.000.000	11.107.400	24.68%
D	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80.000.000	19.760.000	24.70%
1	2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80.000.000	19.760.000	24.70%
	03.01	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	80.000.000	19.760.000	24.70%
E	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.338.500	35.850.000	47.59%
1	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.338.500	35.850.000	47.59%
	01.02	a. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75.338.500	35.850.000	47.59%

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah sebesar Rp 33.385.032.749. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 14.754.591.114. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 18.630.441.635.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi informasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.00	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00		93.25	95.31				92
Sasaran : Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %		100.00 %	100.00 %				100.00%
Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Presentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	40.00 %	45.00 %	50.00 %	55.00 %	58.00 %	60.00 %		45.00 %	25.00 %				50.00 %
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	0	1	1	1	1	1		1	1				5

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEK SI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	74.53	75.00	75.50	76.00	76.50	77.00		71.06					75.50

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candisari tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi informasi” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”, target sebesar 90 angka sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 95.31 angka;
- b. Sasaran “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” target sebesar 100% sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 100%;
- c. Sasaran “Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” memiliki satu indikator kinerja yaitu “Presentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum” target sebesar 50% terealisasi sebesar 25%;
- d. Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik” memiliki satu indikator kinerja yaitu ”Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” target sebesar 1 angka sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 1 angka;
- e. Sasaran ”Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” memiliki satu indikator kinerja yaitu ”NILAI AKIP” target sebesar 75.50 angka belum terealisasi (penilaian AKIP dilakukan pada Triwulan ke-III).

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Candisari Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Candisari, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini terkait upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;
2. Kinerja pelayanan Kecamatan Candisari terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Candisari sampai dengan Tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD. Namun hasil ini masih belum optimal jika dikaitkan dengan konsistensi perencanaan, dimana harus tercapai kesesuaian 100% sebagai perwujudan perencanaan yang ideal;
3. Terdapat kasus kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Candisari, walaupun dengan angka yang kecil tetapi perlu terus diupayakan usaha untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan menyalurkan bantuan pangan;
4. Masih adanya angka stunting yang terdapat di wilayah Kecamatan Candisari, baik warga pendatang maupun warga asli Kecamatan Candisari. Isu tersebut terus diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami stunting.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan kewilayahan diantaranya:

1. Belum optimalnya pengelolaan, penatausahaan, dan pemanfaatan aset Pemerintah di Kecamatan/ Kelurahan;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan, realisasi, dan evaluasi kinerja;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kegiatan masyarakat yang berbasis responsif gender.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Setiap orang memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun di dunia ini. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap hal yang berkembang. Kecamatan Candisari tertantang untuk memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dalam aspek kecepatan pelayanan;
- 2) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Candisari agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut;
- 3) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam. Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran;
- 4) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Candisari agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- 1) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan secara transparan, cepat dan berkualitas yang mana akan berimplikasi terhadap tingkat kepuasan masyarakat;
- 2) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah. Selain itu pengelolaan sumber daya aparatur Kecamatan Candisari yang baik juga merupakan aspek yang penting dalam merespon peluang tersebut;
- 3) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, baik secara individu, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

- 4) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Candisari Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Candisari Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi dan Misi Walikota

Visi dan misi Walikota dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang beserta indikator dan targetnya. Oleh karena itu, Kecamatan Candisari perlu memiliki komitmen kuat dalam mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;

2. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD Kota Semarang 2021-2026 dan RKPD Perubahan 2023 dan perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah berupa Renstra Kecamatan Candisari 2021-2026 serta Renja Perubahan kecamatan Candisari Tahun 2023.

3. Pengakomodiran Usulan Musrenbang;

Untuk mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bentuk perencanaan partisipatif perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pengakomodiran aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang. Dalam pengakomodiran usulan musrenbang juga perlu melibatkan lebih banyak pihak, diantaranya perempuan dan organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender, yaitu dalam upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender;

4. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan perlu menentukan langkah-langkah strategis yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengoptimalan tersebut melalui Pengembangan program pelayanan publik yang berbasis teknologi yang ramah anak, ramah lansia dan ramah difabel, Peningkatan kapasitas penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum serta wawasan kebangsaan, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Peningkatan partisipasi keberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang responsif gender.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Candisari Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Candisari Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	URUSAN KEWILAYAHAN										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Candisari	Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00 %	10.736.158.454				100,00 %	11.251.255.410	
			Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100,00 %					100,00 %		
			Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00 %					100,00 %		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	28.100.640				2 Dokumen	28.100.640	
			Presentase Dokumen pelaporan	100,00 %					100,00 %		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.887.800				3 Dokumen	2.887.800	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4.088.870				1 Dokumen	4.088.870	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.141.150				1 Dokumen	5.141.150	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	5.582.950				1 Dokumen	5.582.950	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	5.141.150				1 Dokumen	5.141.150	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.099.360				1 Laporan	3.099.360	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.159.360				2 Laporan	2.159.360	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Administrasi Keuangan SKPD	100,00 %	8.674.106.540				100,00 %	9.309.576.281	
			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen					3 dokumen		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	8.263.615.580				52 Orang/bulan	8.944.337.761	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	402.390.000				12 Dokumen	359.735.000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.700.320				1 Laporan	2.700.320	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	12 Laporan	2.700.320				12 Laporan	2.700.320	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.700.320				1 Dokumen	102.880	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Candisari	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 %	1.024.065.702				100,00 %	865.828.937	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.148.080				6 Paket	14.304.710	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	325.822.781				6 Paket	257.065.509	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.447.860				12 Paket	47.881.780	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Candisari	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	17.517.297				6 Paket	21.169.223	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	97.875.000				12 Laporan	125.375.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	111.700.000				12 Laporan	93.834.000	
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	370.554.684				10 Dokumen	306.198.715	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	109.819.117				100,00 %	179.438.737	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	109.819.117				27 Unit	179.438.737	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00 %	191.837.150				100,00 %	206.719.300	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	166.701.000				12 Laporan	184.901.300	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Laporan	25.136.150				12 Laporan	21.818.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perlengkapan Kantor yang Disediakan								
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Candisari	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 %	708.229.305				100,00 %	661.591.515	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	305.150.685				29 Unit	273.021.395	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000				2 Unit	299.250.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.306.170				3 Unit	25.571.490	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Candisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	113 Unit	82.772.450				65 Unit	63.748.630	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Candisari	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	2.698.777.036				92%	2.785.920.643	
			Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 angka					2 angka		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	187.244.950				1 Angka	160.010.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	187.244.950				2 Dokumen	160.010.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Candisari	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100,00 %	1.709.226.826				100,00 %	1.828.217.952	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					12 Laporan		
		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					12 Laporan		
		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					12 Laporan		
		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					12 Laporan		
		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					12 Laporan		
		Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					12 Laporan		
		Kelurahan Candi	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					12 Laporan		
		Kelurahan Jomblang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan					12 Laporan		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Candisari	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 %	802.305.260				100,00 %	797.692.691	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	802.305.260				12 Laporan	797.692.691	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Candisari	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100,00 %	19.614.220.590				100,00 %	18.847.011.560	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	10.029.620.590				80 kegiatan	9.471.421.122	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyaraktan	51.395.590				4 Lembaga	27.017.280	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1.297.250.000				10 Unit	1.297.250.000	
		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000				14 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	950.000.000				14 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	996.000,000				17 Unit	996.000,000	
		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950.000.000				10 Unit	950.000.000	
		Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	968.000.000				10 Unit	968.000.000	
		Kelurahan Candi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 Unit	950.000.000				13 Unit	950.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		Kelurahan Jomblang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	22 Unit	1.450.000.000				22 Unit	1.450.000.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Candisari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	1.467.100.000				4 Pokmas / Ormas	933.153.842	
		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas					4 Pokmas / Ormas		
		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas					4 Pokmas / Ormas		
		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas					4 Pokmas / Ormas		
		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas					4 Pokmas / Ormas		
		Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas					4 Pokmas / Ormas		
		Kelurahan Candi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas					4 Pokmas / Ormas		
		Kelurahan Jomblang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	4 Pokmas / Ormas					4 Pokmas / Ormas		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan								
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Candisari	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	67 kegiatan	9.584.600.000				6 kegiatan	9.375.590.438	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Candisari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000				4 Lembaga	123.584.650	
		Kelurahan Jatingaleh	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1,234,800,000				9 Lembaga	1.216.049.030	
		Kelurahan Wonotingal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	984.000.000				9 Lembaga	960.578.320	
		Kelurahan Tegalsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.867.200.000				9 Lembaga	1.847.172.098	
		Kelurahan Kaliwiru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	570.000.000				9 Lembaga	547.366.930	
		Kelurahan Karanganyar Gunung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.030.800.000				9 Lembaga	1.005.600.800	
		Kelurahan Candi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.410.600.000				9 Lembaga	1,388,141,040	
		Kelurahan Jomblang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2,305,200,000				9 Lembaga	2,275,974,970	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	45,000,000				2 Laporan	11,120,600	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Candisari	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	15%	80.000.000				15%	41.681.154	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Candisari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52 angka	80.000.000				52 angka	41.681.154	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Kecamatan Candisari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	10 Laporan	80.000.000				10 Laporan	41.681.154	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Candisari	Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 angka	75.338.500				5 angka	74.800.000	
			Persentase Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 %					92,00 %		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Candisari	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	75.338.500				2 kegiatan	74.800.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Candisari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	75.338.500				50 Orang	74.800.000	

Sumber : *Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2023*

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN CANDISARI
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“ Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”

dengan indikator tujuan **“ Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Candisari Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya Kualitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai AKIP;
2. Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;
4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya kinerja pelayanan publik, pemberdayaan, masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman, dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	90,00
SASARAN :			
- Meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	- Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100
- Meningkatkan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	- Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	50
- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik	- Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	angka	1
- Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	angka	75.5

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2021-2016, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Candisari memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan indikator sasaran “Nilai AKIP; Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan; Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif; Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang, termasuk kasus stunting dan kemiskinan ekstrim.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Candisari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	URUSAN KEWILAYAHAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	10.736.158.454	10.702.542.873	11.251.255.410		
		Presentase Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran	100,00 %	100,00 %	100,00 %					
		Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	28.100.640	28.100.640	28.100.640		
		Presentase Dokumen pelaporan	100,00 %	100,00 %	100,00 %					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2.887.800	2.887.800	2.887.800		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.088.870	4.088.870	4.088.870		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.141.150	5.141.150	5.141.150		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.582.950	5.582.950	5.582.950		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.141.150	5.141.150	5.141.150		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3.099.360	3.099.360	3.099.360		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2.159.360	2.159.360	2.159.360		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	8.674.106.540	8.674.731.540	9.309.576.281		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen					
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	52 Orang/bulan	8.263.615.580	8.263.615.580	8.944.337.761		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	402.390.000	403.015.000	359.735.000		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.700.320	2.700.320	2.700.320		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.700.320	2.700.320	2.700.320		
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.320	2.700.320	102.880		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 %	100,00 %	100,00 %	1.024.065.702	886.741.298	865.828.937		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	20.148.080	20.158.470	14.304.710		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	325.822.781	257.065.509	257.065.509		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	80.447.860	76.179.700	47.881.780		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	17.517.297	24.407.073	21.169.223		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	97.875.000	134.375.000	125.375.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	111.700.000	131.200.000	93.834.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	370.554.684	243.355.546	306.198.715		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	109.819.117	179.438.737	179.438.737		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	27 Unit	27 Unit	109.819.117	179.438.737	179.438.737		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor	100,00 %	100,00 %	100,00 %	191.837.150	215.721.018	206.719.300		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	166.701.000	193.903.018	184.901.300		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25.136.150	21.818.000	21.818.000		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	708.229.305	717.809.640	661.591.515		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	29 Unit	305.150.685	297.421.375	273.021.395		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Unit	2 Unit	300.000.000	299.250.000	299.250.000		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	20.306.170	25.571.490	25.571.490		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	113 Unit	65 Unit	65 Unit	82.772.450	95.566.775	63.748.630		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	92%	92%	2.698.777.036	2.840.602.557	2.785.920.643		
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	2 angka	2 angka	2 angka					
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	187.244.950	187.244.950	160.010.000		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	187.244.950	187.244.950	160.010.000		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	1.709.226.826	1.841.357.107	1.828.217.952		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jatingaleh)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Wonotingal)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tegalsari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaliwiru)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Candi)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Wilayah Kecamatan (Kelurahan Jomblang)								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 %	100,00 %	100,00 %	802.305.260	812.000.500	797.692.691		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	802.305.260	812.000.500	797.692.691		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100,00 %	100,00 %	100,00 %	19.614.220.590	19.624.135.650	18.847.011.560		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 kegiatan	80 kegiatan	80 kegiatan	10.029.620.590	10.039.535.650	9.471.421.122		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	51.395.590	51.395.590	27.017.280		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	8.511.125.000	8.511.250.000	8.511.250.000		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jatingaleh)	14 Unit	14 Unit	14 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Wonotingal)	14 Unit	14 Unit	14 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tegalsari)	17 Unit	17 Unit	17 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaliwiru)	10 Unit	10 Unit	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Karanganyar Gunung)	10 Unit	10 Unit	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Candi)	13 Unit	13 Unit	13 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Jomblang)	22 Unit	22 Unit	22 Unit					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.467.100.000	1.476.890.060	933.153.842		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatingaleh)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Wonotingal)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tegalsari)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaliwiru)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Candi)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jomblang)	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	67 kegiatan	67 kegiatan	6 kegiatan	9.584.600.000	9.584.600.000	9.375.590.438		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	4 Lembaga	137.000.000		123.584.650		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jatingaleh)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga	1,234,800,000		1.216.049.030		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Wonotingal)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga	984.000.000		960.578.320		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tegalsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga	1.867.200.000		1.847.172.098		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaliwiru)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga	570.000.000		547.366.930		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Karanganyar Gunung)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga	1.030.800.000		1.005.600.800		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Candi)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga	1.410.600.000		1,388,141,040		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Jomblang)	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga	9 Lembaga	2,305,200,000		2,275,974,970		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	45,000,000		11,120,600		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	15%	15%	80.000.000	80.000.000	41.681.154		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	52 angka	52 angka	52 angka	80.000.000	80.000.000	41.681.154		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	80.000.000	80.000.000	41.681.154		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 angka	5 angka	5 angka	75.338.500	75.338.500	74.800.000		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan	92,00 %	92,00 %	92,00 %					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	75.338.500	75.338.500	74.800.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	50 Orang	75.338.500	75.338.500	74.800.000		
JUMLAH										

Sumber : Kecamatan Candisari Kota Semarang, 2023

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Candisari Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Candisari Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Candisari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Candisari Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Candisari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

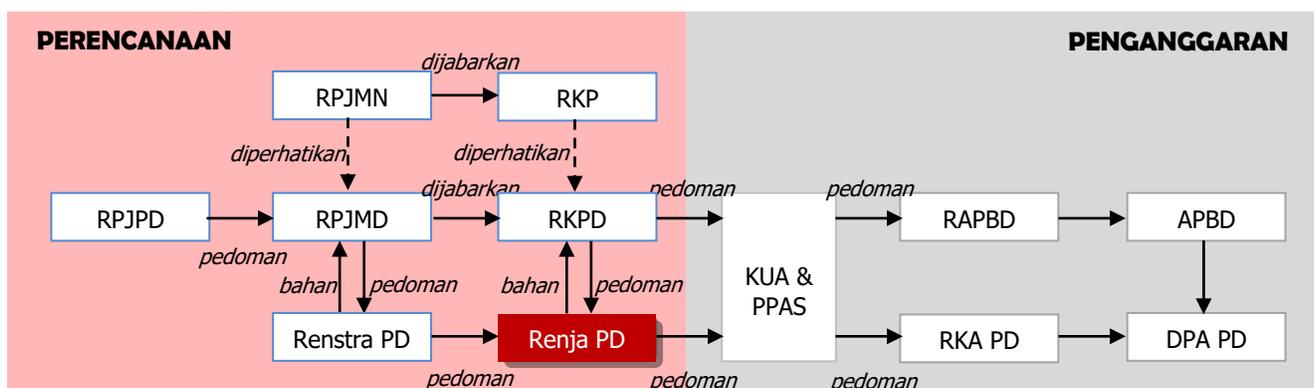
47. KECAMATAN BANYUMANIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Banyumanik sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Kecamatan Banyumanik Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Adanya resesi global menyebabkan kondisi perekonomian yang tidak stabil antara lain penurunan aktivitas ekonomi, pendapatan individu dan rumah tangga, dll; (2) Penyesuaian target indikator kinerja terkait isu utama dalam penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi/harga dan digitalisasi pemerintahan (3) Penyesuaian anggaran baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran; serta (4) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023;

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	75%	75%	1,75	175%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	75%	75%	1,75	175%
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	75%	75%	1,75	175%
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7	7	7	7	100%	14	200%
		Jumlah Dokumen pelaporan	2	2	2	2	100%	4	200%
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	100%	6	200%
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	2	200%
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100%	2	200%
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	2	200%
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100%	2	200%
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1	1	1	1	100%	2	200%

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	2	200%	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	75	75%	175	175%	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	3	3	2	67%	5	167%	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	89	91	91	100%	180	180%	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	100	100	100%	200	200%	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	0	0%	1	100%	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12	9	75%	21	175%	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	1	1	100%	2	200%	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	100	100	75	75%	175	175%	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	7	7	5	71%	12	171%	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	100%	4	200%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	30	50	40	80%	70	140%	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	20	4	3	75%	23	115%	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	15	15	10	67%	25	167%	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	9	75%	21	175%	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	3	3	2	67%	5	167%	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100%	200	200%	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	2	2	100%	4	200%	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	100	100	75	75%	175	175%	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	9	75%	21	175%	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	100%	12	200%	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	9	75%	21	175%	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100%	200	200%	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	30	30	30	100%	60	222%	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	2	3	3	2	67%	5	250%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
	Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	2	67%	5	167%	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	5	4	3	75%	8	160%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	1	1	1	100%	2	200%	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	1	1	100%	2	200%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	75	75%	175	175%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	9	75%	21	175%	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	75	75%	175	175%	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	10	10	10	100%	20	200%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	7	7	7	100%	14	200%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	6	6	6	100%	12	100%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	12	75%	28	175%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	4	4	4	100%	8	200%	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	10	15	14	93%	24	80%	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25	35	32	26	81%	61	244%	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	9	75%	21	175%	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92	91	92	92	100%	183	199%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	2	2	2	2	100%	4	200%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
	Penugasan Kepala Daerah	Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan								
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	2	2	2	100%	4	200%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95	91	92	95	103%	186	196%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	50	50%	150	150%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52	27	13	9	69%	36	69%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9	9	9	6	67%	15	167%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
	BANYUMANIK	Diselenggarakan								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	50	50%	150	150%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	9	50%	41	50%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	6	67%	15	167%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	50	50%	150	150%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	9	50%	41	50%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	6	67%	15	167%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	50	50%	150	150%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	82	32	18	9	50%	41	50%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
	Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Kelurahan yang Terbangun								
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	6	67%	15	167%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	50	50%	150	150%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	9	50%	41	50%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9	9	9	6	67%	15	167%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
	PADANGSARI	Diselenggarakan								
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	50	50%	150	150%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	9	50%	41	50%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	6	67%	15	167%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	100	100	100	50	50%	150	150%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
	Kecamatan	Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	9	50%	41	50%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	6	67%	15	167%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	50	50%	150	150%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	457	449	450	363	81%	812	178%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
		Kelurahan								
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	9	50%	41	50%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	6	67%	15	167%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	50	50%	150	150%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	9	50%	41	50%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang	5	5	5	5	100%	10	200%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
		seharusnya								
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	6	67%	15	167%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	50	50%	150	150%	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	9	50%	41	50%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	6	67%	15	167%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	89	92	92	100%	181	213%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan	Presentase Penyelenggaraan	100	100	100	50	50%	150	150%	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023		Capaian
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Target Realisasi (%)	Capaian Realisasi Renstra (%)
	Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	6	50%	18	150%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	97	98	95	97%	192	192%	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	449	450	363	81%	812	178%	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	32	18	9	50%	41	50%	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	8	50%	24	150%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	100%	10	200%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	6	67%	15	167%	

Sumber: Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan” dan Sebagian besar sub kegiatan di kegiatan “Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah”,

Tidak Ada sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami refocusing karena refocusing menasar pada hal yang inefisiensi sehingga target dapat tercapai dengan baik. Kegiatan dedicated seperti pelaksanaan hasil musrenbang dan sejenisnya seperti honor RT RW, LPMK, dll tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran antara lain “Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan”, “Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat”, hal tersebut dilakukan dikarenakan Sebagian besar telah dilaksanakan oleh dinas teknis untuk menghindari dobel anggaran.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.417.475.136	8.902.928.765	57,75%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	-	0,00%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000	-	0,00%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	-	0,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	-	0,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	-	0,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	-	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	-	0,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000	-	0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.852.485.483	8.247.314.771	59,54%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.277.265.483	7.957.534.771	59,93%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	573.720.000	289.780.000	50,51%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	-	0,00%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	500.000	-	0,00%
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000	-	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	838.624.189	331.475.341	39,53%
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	6.000.000	40,00%
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	415.993.197	235.443.000	56,60%
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000	32.537.341	54,23%
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.764.955	9.480.000	41,64%
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.100.000	31.875.000	35,77%
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.073.000	5.360.000	4,50%
19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	116.693.037	10.780.000	9,24%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.479.654	15.300.000	92,84%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.479.654	15.300.000	92,84%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.595.150	133.830.612	47,53%
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.235.600	59.740.612	45,87%
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.817.650	26.690.000	32,62%
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.541.900	47.400.000	68,16%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.790.660	175.008.041	41,30%
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	223.790.660	104.460.000	46,68%
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	54.041.900	36,03%
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	16.506.141	55,02%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	-	0,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.065.752.746	970.186.926	46,97%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.388.400	-	0,00%
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60.388.400	-	0,00%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	937.864.436	446.789.338	47,64%
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	937.864.436	446.789.338	47,64%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.067.499.910	523.397.588	49,03%
30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.067.499.910	523.397.588	49,03%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.910.120.003	386.518.100	20,24%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.706.300.003	340.790.000	19,97%
31	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	66.300.000	21.905.000	33,04%
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.070.000.000	7.000.000	0,65%
33	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	570.000.003	311.885.000	54,72%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	203.820.000	45.728.100	22,44%
34	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	147.000.000	45.728.100	31,11%
35	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	56.820.000	-	0,00%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.600.000	10.800.000	50,00%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.600.000	10.800.000	50,00%
36	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.600.000	10.800.000	50,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	170.579.767	96.530.000	56,59%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	170.579.767	96.530.000	56,59%
37	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	170.579.767	96.530.000	56,59%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	74.000.000	45.340.148	61,27%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	74.000.000	45.340.148	61,27%
38	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BANYUMANIK	74.000.000	45.340.148	61,27%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.313.000.000	1.354.427.750	58,56%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	783.307.750	69,63%
39	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	950.000.000	746.772.750	78,61%
40	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	175.000.000	36.535.000	20,88%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.188.000.000	571.120.000	48,07%
41	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BANYUMANIK	1.188.000.000	571.120.000	48,07%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	76.000.000	29.338.704	38,60%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	76.000.000	29.338.704	38,60%
42	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN GEDAWANG	76.000.000	29.338.704	38,60%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.535.600.000	364.317.000	14,37%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	7.068.000	0,63%
43	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	950.000.000	2.498.000	0,26%
44	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	175.000.000	4.570.000	2,61%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.410.600.000	357.249.000	25,33%
45	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN GEDAWANG	1.410.600.000	357.249.000	25,33%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	70.000.000	33.127.834	47,33%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	70.000.000	33.127.834	47,33%
46	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN JABUNGAN	70.000.000	33.127.834	47,33%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.903.200.000	1.190.603.860	62,56%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	880.527.860	78,27%
47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	950.000.000	857.922.900	90,31%
48	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	175.000.000	22.604.960	12,92%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	778.200.000	310.076.000	39,85%
49	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN JABUNGAN	778.200.000	310.076.000	39,85%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.000.000	29.693.764	37,59%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	79.000.000	29.693.764	37,59%
50	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN NGESREP	79.000.000	29.693.764	37,59%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.869.600.000	1.710.141.180	59,60%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.201.000.000	1.018.138.580	84,77%
51	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN NGESREP	1.026.000.000	958.320.000	93,40%
52	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NGESREP	175.000.000	59.818.580	34,18%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.668.600.000	692.002.600	41,47%
53	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN NGESREP	1.668.600.000	692.002.600	41,47%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	82.000.000	39.056.094	47,63%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	82.000.000	39.056.094	47,63%
54	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PADANGSARI	82.000.000	39.056.094	47,63%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.118.200.000	1.587.215.500	50,90%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	768.471.500	68,31%
55	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	950.000.000	729.558.500	76,80%
56	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	175.000.000	38.913.000	22,24%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.993.200.000	818.744.000	41,08%
57	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PADANGSARI	1.993.200.000	818.744.000	41,08%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.000.000	40.610.397	52,74%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	77.000.000	40.610.397	52,74%
58	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PEDALANGAN	77.000.000	40.610.397	52,74%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.523.000.000	992.879.700	39,35%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	437.541.000	38,89%
59	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	950.000.000	416.456.000	43,84%
60	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	175.000.000	21.085.000	12,05%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.398.000.000	555.338.700	39,72%
61	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PEDALANGAN	1.398.000.000	555.338.700	39,72%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89.000.000	33.314.657	37,43%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	89.000.000	33.314.657	37,43%
62	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	89.000.000	33.314.657	37,43%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.277.000.000	1.920.540.660	44,90%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.442.000.000	972.535.160	67,44%
63	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	1.267.000.000	939.617.500	74,16%
64	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	175.000.000	32.917.660	18,81%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.835.000.000	948.005.500	33,44%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
65	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	2.835.000.000	948.005.500	33,44%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	76.000.000	32.312.275	42,52%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	76.000.000	32.312.275	42,52%
66	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL KULON	76.000.000	32.312.275	42,52%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.551.200.000	1.074.890.700	42,13%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	500.767.000	44,51%
67	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	950.000.000	462.039.000	48,64%
68	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	175.000.000	38.728.000	22,13%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.426.200.000	574.123.700	40,26%
69	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL KULON	1.426.200.000	574.123.700	40,26%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	87.000.000	54.903.773	63,11%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	87.000.000	54.903.773	63,11%
70	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	87.000.000	54.903.773	63,11%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.963.600.000	2.088.417.057	52,69%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.395.000.000	1.022.301.557	73,28%
71	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	1.220.000.000	972.939.557	79,75%
72	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	175.000.000	49.362.000	28,21%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.568.600.000	1.066.115.500	41,51%
73	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	2.568.600.000	1.066.115.500	41,51%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.000.000	44.884.055	61,49%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	73.000.000	44.884.055	61,49%
74	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUMURBOTO	73.000.000	44.884.055	61,49%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.077.800.000	1.420.394.900	68,36%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	963.400.500	85,64%
75	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	950.000.000	923.178.000	97,18%
76	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	175.000.000	40.222.500	22,98%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	952.800.000	456.994.400	47,96%
77	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SUMURBOTO	952.800.000	456.994.400	47,96%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.000.000	30.689.267	42,04%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	73.000.000	30.689.267	42,04%
78	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN TINJOMOYO	73.000.000	30.689.267	42,04%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.133.000.000	795.329.555	37,29%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.125.000.000	399.984.555	35,55%
79	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	950.000.000	397.684.555	41,86%
80	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	175.000.000	2.300.000	1,31%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.008.000.000	395.345.000	39,22%
81	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TINJOMOYO	1.008.000.000	395.345.000	39,22%
Total		50.706.727.652	25.279.392.621	49,85%

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah sebesar Rp 50.706.727.652 Dari anggaran tersebut, sampai dengan

triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 25.279.392.621. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 25.427.335.031

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
TUJUAN														
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	86.68	87.50	88.00	88.35	89.00	90.00	83,76	97,04	93,87				97,00
SASARAN														
Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023	
Sasaran 2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	96	97	98	99	100	100	96	97	95					98
Sasaran 3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48	49	52	56	59	62	48	51	52					53
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	50	60	70	80	90	100	50	60	70					71

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Banyumanik tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik cenderung naik dari tahun 2021 sampai dengan 2023, dari target renstra sebesar 90,00 sudah terlewati pada tahun 2022 dengan nilai 97,04.

- b. Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik;

Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN di Kecamatan Banyumanik telah tercapai dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar 100%, hal tersebut sesuai dengan Perwal No.43 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Terpadu Kecamatan

- c. Sasaran 2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan.

Tingkat keaktifan/ partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kewilayahan di Kecamatan Banyumanik dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dalam pembangunan melalui musrenbang secara bottom up. Target akhir renstra sebesar 98 %, dan akan terpenuhi pada akhir renstra 2026.

- d. Sasaran 3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan.

Terdapat 2 (dua) indikator dalam pelaksanaan sasaran 3 ini yakni:

- a. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada akhir periode renstra terdapat target 62, sedangkan proyeksi tahun 2023 sebesar 53. Kecamatan Banyumanik diperkirakan mampu mencapai target tersebut mengingat kondisi keamanan dan ketertiban umum terlihat semakin baik dan kondusif. Konflik sosial tidak ada dalam skala besar, yang ada hanya gesekan yang normal dan wajar dalam hidup bermasyarakat.

- b. Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Pada akhir periode renstra 2026 terdapat target 100%, sedangkan proyeksi pada akhir tahun ini sebesar 71%. Pembinaan wasbang dan ketahanan nasional dilakukan melalui FGD yang mengundang generasi milenial dan generasi z untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Banyumanik, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan Layanan:

Layanan public di Kecamatan Banyumanik diselenggarakan setiap hari kerja, dan hari sabtu dan malam minggu setiap bulan yakni layanan akhir pekan.

2. Kualitas Layanan:

Penilaian terhadap kualitas layanan yang diberikan, termasuk apakah layanan tersebut efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survey kepuasan Masyarakat.

3. Aksesibilitas Layanan:

Tingkat aksesibilitas penduduk kecamatan terhadap layanan, termasuk akses fisik dan kebijakan aksesibilitas yang ada. Layanan jemput bola juga untuk memperpendek jangkauan antara pemberi layanan dan penerima layanan masyarakat

4. Partisipasi Masyarakat:

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pelayanan publik di kecamatan. Masyarakat memberikan masukan/feedback untuk perbaikan layanan kearah yang lebih baik.

5. Penggunaan Teknologi

Sejauh mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan, seperti aplikasi SAPA MBA ITA untuk menampung berbagai masukan Masyarakat.

6. Peningkatan Layanan :

Upaya dan rencana kecamatan dalam meningkatkan layanan, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan mengatasi kekurangan yang ada.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan kewilayahan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya:

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia sering menjadi hambatan dalam menyediakan layanan yang memadai dan efisien di kecamatan.

2. Koordinasi antara Instansi:

Dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah di tingkat daerah dapat menyebabkan tumpang tindih dalam penyelenggaraan layanan.

3. Ketidaksetaraan Akses:

Terdapat kemungkinan ketidaksetaraan akses terhadap layanan publik di berbagai wilayah kecamatan, yang dapat merugikan penduduk di wilayah yang lebih terpencil atau kurang berkembang seperti di Kelurahan Jabungan.

4. Perubahan Kebijakan Pusat:

Perubahan kebijakan yang sering terjadi di tingkat pemerintah pusat dapat memengaruhi ketersediaan sumber daya dan tugas yang diberikan kepada kecamatan.

5. Kepatuhan Terhadap Regulasi:

Kepatuhan terhadap regulasi dan aturan hukum yang berlaku adalah masalah yang perlu diperhatikan untuk menghindari konflik dan hambatan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths):

- a. Sumber Daya Alam yang Kaya:** Kecamatan ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian seperti di Kelurahan Jabungan dan wisata alam di Kelurahan Srandol Kulon.
- b. Pendidikan yang Berkualitas:** Terdapat sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas di kecamatan, yang mendukung pengembangan SDM yang kompeten.
- c. Infrastruktur Jalan yang Baik:** Infrastruktur jalan yang baik memfasilitasi mobilitas penduduk dan transportasi barang.
- d. Pengembangan Wisata Alam:** Keindahan alam dan potensi wisata alam yang belum dieksplorasi sepenuhnya dapat menjadi peluang bagi industri pariwisata.

2. Kelemahan (Weaknesses):

a. Masih Adanya Stunting

Stunting akan berakibat buruk bagi generasi mendatang yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

- b. Kurangnya Lapangan Pekerjaan:** Tingkat pengangguran yang tinggi dan minimnya kesempatan kerja lokal adalah masalah yang perlu diatasi agar tidak berdampak dengan meningkatnya angka kemiskinan.

3. Peluang (Opportunities):

- a. **Pengembangan Pariwisata:** Keindahan alam dan potensi wisata alam yang belum dimaksimalkan merupakan peluang untuk menarik wisatawan dan mengembangkan sektor pariwisata.
- b. **Program Pembangunan Ekonomi Lokal:** Dukungan pemerintah pusat untuk program-program pembangunan ekonomi lokal dan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat meningkatkan daya saing kecamatan ini.
- c. **Kerja Sama Regional:** Keikutsertaan dalam kerja sama regional dapat membuka peluang untuk investasi dan perdagangan yang lebih baik.

4. Ancaman (Threats):

- a. **Resiko Bencana Alam:** Kecamatan ini berada di daerah rentan bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi.
- b. **Persaingan Ekonomi yang Ketat:** Persaingan dengan kecamatan lain atau wilayah lain untuk investasi dan sumber daya bisa menjadi ancaman.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur:

Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan listrik yang memadai adalah isu strategis untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk.

2. Pengentasan Kemiskinan:

Penanggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial adalah isu strategis untuk meningkatkan taraf hidup penduduk yang kurang mampu.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal:

Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), pertanian, dan sektor ekonomi lokal lainnya adalah isu penting untuk menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

4. Perlindungan Lingkungan:

Konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim adalah isu strategis untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

5. Partisipasi Masyarakat:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan lokal adalah isu strategis untuk memastikan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6. Pengelolaan Bencana Alam:

Kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana alam adalah isu strategis, terutama jika kecamatan berada di daerah yang rentan terhadap bencana.

7. Digitalisasi Layanan Publik:

Penggunaan aplikasi dan barcode dalam layanan publik semakin banyak dan berkembang dengan penggunaan teknologi informasi yang masif.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Banyumanik	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	15.417.475.136	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Banyumanik	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	15.417.475.136	
		Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%		
		Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kecamatan Banyumanik	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7		
		Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen pelaporan	2	4.500.000		Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen pelaporan	2	4.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	500.000	
	Evaluasi Kinerja	Kecamatan	Jumlah Laporan	1	500.000	Evaluasi Kinerja	Kecamatan	Jumlah Laporan	1		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Perangkat Daerah	Banyumanik	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Perangkat Daerah	Banyumanik	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	13.852.485.483	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	13.852.485.483	
		Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3			Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91	13.277.265.483	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91	13.277.265.483	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	573.720.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	573.720.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	500.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	838.624.189	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Banyumanik	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	838.624.189	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	415.993.197	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	415.993.197	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	60.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	22.764.955	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	22.764.955	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	89.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	89.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	119.073.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	119.073.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	3	116.693.037	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	3	116.693.037	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Berbasis Elektronik pada SKPD		Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	16.479.654	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	16.479.654	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	16.479.654	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	16.479.654	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	281.595.150	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100	281.595.150	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	130.235.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	130.235.600	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	81.817.650	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	81.817.650	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	69.541.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	69.541.900	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	423.790.660	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kecamatan Banyumanik	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	423.790.660	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	223.790.660	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	223.790.660	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	150.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	150.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	30.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	30.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	20.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	20.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	2.065.752.746	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	2.065.752.746	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	60.388.400	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	60.388.400	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Tingkat Kecamatan					Tingkat Kecamatan					
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	60.388.400	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	60.388.400	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	937.864.436	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	937.864.436	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	937.864.436	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	937.864.436	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	1.067.499.910	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	1.067.499.910	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	1.067.499.910	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	1.067.499.910	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	98	1.910.120.003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	98	1.910.120.003	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	DAN KELURAHAN		KELURAHAN			DESA DAN KELURAHAN		KELURAHAN			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.706.300.003	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.706.300.003	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	66.300.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	66.300.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	1.070.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6	1.070.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	570.000.003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	570.000.003	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	203.820.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	203.820.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	147.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	147.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	56.820.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	56.820.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15	21.600.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Banyumanik	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15	21.600.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
						UMUM					
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	32	21.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	32	21.600.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	21.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	21.600.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92	170.579.767	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Banyumanik	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92	170.579.767	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	2	170.579.767	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan	2	170.579.767	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Organisasi Kepemudaan					Organisasi Kepemudaan			
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	170.579.767	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	170.579.767	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	74.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	74.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	74.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	74.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BANYUMANIK	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	74.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BANYUMANIK	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	74.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN	98	2.313.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN	98	2.313.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		MASYARAKAT KELURAHAN			N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		MASYARAKAT KELURAHAN			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	950.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.188.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.188.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BANYUMANIK	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.188.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BANYUMANIK	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.188.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	76.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	76.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100	76.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	100	76.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Daerah yang ada di Kecamatan		Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN GEDAWANG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	76.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN GEDAWANG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	76.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	2.535.600.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	2.535.600.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.410.600.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.410.600.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN GEDAWANG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.410.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN GEDAWANG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.410.600.000	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	70.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	70.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	70.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	70.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN JABUNGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	70.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN JABUNGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	70.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	1.903.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	1.903.200.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	16	175.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	16	175.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas			Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN		Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	778.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	778.200.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN JABUNGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	778.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN JABUNGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	778.200.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	79.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	79.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	79.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	79.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN NGESREP	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	79.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN NGESREP	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	79.000.000	
	PROGRAM	Kecamatan	PRESENTASE	98	2.869.600.000	PROGRAM	Kecamatan	PRESENTASE	98		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Banyumanik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Banyumanik	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN		2.869.600.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.201.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.201.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	1.026.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	1.026.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.668.600.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.668.600.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN NGESREP	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.668.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN NGESREP	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.668.600.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	82.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	82.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	100	82.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	100	82.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kecamatan		oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PADANGSARI	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	82.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan PADANGSARI	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	82.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	3.118.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	3.118.200.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.993.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.993.200.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.993.200.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.993.200.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PADANGSARI					PADANGSARI					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	77.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	77.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	77.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	77.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PEDALANGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	77.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PEDALANGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	77.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	2.523.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	2.523.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	
	Pemberdayaan	Kecamatan	Jumlah Pokmas	16	175.000.000	Pemberdayaan	Kecamatan	Jumlah Pokmas	16		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Banyumanik	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas			Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Banyumanik	dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas		175.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.398.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.398.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PEDALANGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9	1.398.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PEDALANGAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	9	1.398.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	89.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	89.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	89.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	89.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	89.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	89.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	4.277.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	4.277.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.442.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.442.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	1.267.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	1.267.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	2.835.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	2.835.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	2.835.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	2.835.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	76.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	76.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100	76.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100	76.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daerah yang ada di Kecamatan		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SRONDOL KULON	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	76.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	76.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	2.551.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	2.551.200.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.426.200.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	1.426.200.000	
	Penyelenggaraan	Kecamatan	Jumlah Lembaga	9	1.426.200.000	Penyelenggaraa	Kecamatan	Jumlah Lembaga	9		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Banyumanik	Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			n Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Banyumanik	Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		1.426.200.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	87.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	87.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	87.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	87.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	87.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	87.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	3.963.600.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	3.963.600.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.395.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.395.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana	18	1.220.000.000	Pembangunan Sarana dan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana	18	1.220.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN		Kelurahan yang Terbangun			Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN		Kelurahan yang Terbangun			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	2.568.600.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	2.568.600.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	2.568.600.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	2.568.600.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	73.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92	73.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	73.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	73.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12	73.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	12	73.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUMURBOTO		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUMURBOTO		Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	2.077.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	2.077.800.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	952.800.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	952.800.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SUMURBOTO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	952.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SUMURBOTO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	952.800.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis	92	73.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Kecamatan Banyumanik	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis	92	73.000.000	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			teknologi informasi (SPBE)			PUBLIK		teknologi informasi (SPBE)			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	73.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Banyumanik	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	73.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN TINJOMOYO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	73.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN TINJOMOYO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	73.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	2.133.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banyumanik	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98	2.133.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	450	1.125.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18	950.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	175.000.000	
	Pemberdayaan	Kecamatan	Jumlah jenis	5	1.008.000.000	Pemberdayaan	Kecamatan	Jumlah jenis	5		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Banyumanik	laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya			Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Banyumanik	laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya		1.008.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TINJOMOYO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.008.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TINJOMOYO	Kecamatan Banyumanik	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	1.008.000.000	
					50.706.727.652					50.706.727.652	

Sumber : Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN BANYUMANIK
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023,

dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:

- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”

dengan indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Banyumanik Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik.
2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan.
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN
2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
3. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target

yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik	Angka	88,00
Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	Persen	100
Sasaran 2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	98
Sasaran 3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	52
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	70

Sumber : Kecamatan Banyumanik, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Banyumanik memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Banyumanik” dan indikator sasaran “Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	15.417.475.136	15.417.475.136	17.122.743.501	APBD	
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100%	100%					
		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7	7	7	7	4.500.000	4.500.000	4.500.000	APBD	
		Jumlah Dokumen pelaporan	2	2	2	2					
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	3	3	500.000	500.000	500.000	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	500.000	500.000	500.000	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	500.000	500.000	500.000	APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	APBD	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	500.000	500.000	500.000	APBD	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	1	1	500.000	500.000	500.000	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100	100			15.515.487.592		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3	3	3	3					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	100	13.277.265.483	13.277.265.483	14.940.267.592	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100	100	100	573.720.000	573.720.000	573.720.000	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	500.000	500.000	500.000	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12	12	500.000	500.000	500.000	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1	1	1	1	500.000	500.000	500.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100	100	100	100	838.624.189	838.624.189	878.096.402	APBD	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	7	7	7	15.000.000	15.000.000	15.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	2	2	415.993.197	415.993.197	413.392.051	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50	50	50	50	60.000.000	60.000.000	60.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20	20	20	20	22.764.955	22.764.955	22.439.671	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	15	15	15	89.100.000	89.100.000	89.100.000	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	119.073.000	119.073.000	167.306.586	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	3	3	3	116.693.037	116.693.037	110.858.094	APBD	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	16.479.654	16.479.654	16.479.654	APBD	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	2	2	16.479.654	16.479.654	16.479.654	APBD	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase tersedianya	100	100	100	100	281.595.150	281.595.150	301.572.914	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan jasa kantor									
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	130.235.600	130.235.600	144.705.264	APBD	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	6	6	81.817.650	81.817.650	81.817.650	APBD	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	69.541.900	69.541.900	75.050.000	APBD	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	423.790.660	423.790.660	406.606.939	APBD	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	27	27	27	223.790.660	223.790.660	223.790.660	APBD	
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	2	2	2	150.000.000	150.000.000	150.000.000	APBD	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	30.000.000	30.000.000	30.000.000	APBD	
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	5	5	5	20.000.000	20.000.000	2.816.279	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	2.065.752.746	2.065.752.746	2.034.280.696	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1	1	1	1	60.388.400	60.388.400	52.888.400	APBD	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	1	1	1	60.388.400	60.388.400	52.888.400	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	937.864.436	937.864.436	937.864.436	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	937.864.436	937.864.436	937.864.436	APBD	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	1.067.499.910	1.067.499.910	1.067.499.910	APBD	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	10	10	10	1.067.499.910	1.067.499.910	1.067.499.910	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	1.910.120.003	1.910.120.003	1.840.145.004	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.706.300.003	1.706.300.003	1.712.251.154	APBD	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7	7	7	7	66.300.000	66.300.000	22.152.950	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana	12	12	12	12	1.070.000.000	1.070.000.000	1.070.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Prasarana Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun									
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	570.000.003	570.000.003	620.098.204	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	203.820.000	203.820.000	127.893.850	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4	4	4	4	147.000.000	147.000.000	127.000.000	APBD	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	12	12	12	56.820.000	56.820.000	893.850	APBD	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	30	30	30	21.600.000	21.600.000	16.200.000	APBD	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	25	25	25	25	21.600.000	21.600.000	16.200.000	APBD	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	21.600.000	21.600.000	16.200.000	APBD	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92	92	92	92	170.579.767	170.579.767	166.000.003	APBD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	2	2	2	2	170.579.767	170.579.767	166.000.003	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Penugasan Kepala Daerah	Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan									
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	2	2	2	170.579.767	170.579.767	166.000.003	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95	95	95	95	74.000.000	74.000.000	74.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	74.000.000	74.000.000	74.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	74.000.000	74.000.000	74.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.313.000.000	2.313.000.000	2.186.104.930	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.125.000.000	1.125.000.000	1.012.281.850	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	52	52	52	52	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	62.281.850	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	BANYUMANIK	Masyarakat di Kelurahan Pokmas									
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.188.000.000	1.188.000.000	1.173.823.080	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN BANYUMANIK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.188.000.000	1.188.000.000	1.173.823.080	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	76.000.000	76.000.000	76.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	76.000.000	76.000.000	76.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	76.000.000	76.000.000	76.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.535.600.000	2.535.600.000	2.409.301.303	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.125.000.000	1.125.000.000	1.012.466.273	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	62.466.273	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.410.600.000	1.410.600.000	1.396.835.030	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN GEDAWANG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.410.600.000	1.410.600.000	1.396.835.030	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	70.000.000	70.000.000	70.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	70.000.000	70.000.000	70.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	70.000.000	70.000.000	70.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	1.903.200.000	1.903.200.000	1.773.083.920	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.125.000.000	1.125.000.000	1.019.796.650	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	69.796.650	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang	5	5	5	5	778.200.000	778.200.000	753.287.270	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Kecamatan	seharusnya									
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN JABUNGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	778.200.000	778.200.000	753.287.270	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	79.000.000	79.000.000	79.379.870	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	79.000.000	79.000.000	79.379.870	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	79.000.000	79.000.000	79.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.869.600.000	2.869.600.000	2.741.432.000	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.201.000.000	1.201.000.000	1.099.208.332	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	1.026.000.000	1.026.000.000	1.026.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	73.208.332	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.668.600.000	1.668.600.000	1.642.223.668	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN NGESREP	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.668.600.000	1.668.600.000	1.642.223.668	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	82.000.000	82.000.000	82.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	82.000.000	82.000.000	82.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	82.000.000	82.000.000	82.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	3.118.200.000	3.118.200.000	2.994.614.970	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.125.000.000	1.125.000.000	1.036.013.730	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PADANGSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	86.013.730	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.993.200.000	1.993.200.000	1.958.601.240	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	9	9	9	9	1.993.200.000	1.993.200.000	1.958.601.240	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	PADANGSARI	Diselenggarakan									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	77.000.000	77.000.000	77.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	77.000.000	77.000.000	77.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	77.000.000	77.000.000	77.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.523.000.000	2.523.000.000	2.523.000.000	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.125.000.000	1.125.000.000	1.008.820.250	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	58.820.250	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.398.000.000	1.398.000.000	1.387.173.500	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PEDALANGAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.398.000.000	1.398.000.000	1.387.173.500	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	89.000.000	89.000.000	89.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	89.000.000	89.000.000	89.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	89.000.000	89.000.000	89.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	4.277.000.000	4.277.000.000	4.153.852.699	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.442.000.000	1.442.000.000	1.349.880.089	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	1.267.000.000	1.267.000.000	1.267.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	82.880.089	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	2.835.000.000	2.835.000.000	2.803.972.610	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN PUDAKPAYUNG	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	2.835.000.000	2.835.000.000	2.803.972.610	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan	85	85	85	85	76.000.000	76.000.000	76.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	PELAYANAN PUBLIK	berbasiskan teknologi informasi (SPBE)									
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	76.000.000	76.000.000	76.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	76.000.000	76.000.000	76.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.551.200.000	2.551.200.000	2.428.061.610	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.125.000.000	1.125.000.000	1.036.955.240	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	86.955.240	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.426.200.000	1.426.200.000	1.391.106.370	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL KULON	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.426.200.000	1.426.200.000	1.391.106.370	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	87.000.000	87.000.000	87.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	87.000.000	87.000.000	87.000.000	APBD	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	87.000.000	87.000.000	87.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	3.963.600.000	3.963.600.000	3.839.736.726	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.395.000.000	1.395.000.000	1.314.969.256	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	1.220.000.000	1.220.000.000	1.220.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	94.969.256	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	2.568.600.000	2.568.600.000	2.524.767.470	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SRONDOL WETAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	2.568.600.000	2.568.600.000	2.524.767.470	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	73.000.000	73.000.000	74.520.900	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	100	100	100	100	73.000.000	73.000.000	74.520.900	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	73.000.000	73.000.000	74.520.900	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.077.800.000	2.077.800.000	1.952.816.600	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.125.000.000	1.125.000.000	1.033.490.000	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	83.490.000	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	952.800.000	952.800.000	919.326.600	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN SUMURBOTO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	952.800.000	952.800.000	919.326.600	APBD	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	85	85	85	85	73.000.000	73.000.000	73.000.000	APBD	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	100	100	100	100	73.000.000	73.000.000	73.000.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
				Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Kecamatan	Kecamatan									
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	73.000.000	73.000.000	73.000.000	APBD	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	100	100	100	100	2.133.000.000	2.133.000.000	2.005.442.950	APBD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	457	457	457	457	1.125.000.000	1.125.000.000	1.018.130.938	APBD	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	82	82	82	82	950.000.000	950.000.000	950.000.000	APBD	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas	16	16	16	16	175.000.000	175.000.000	68.130.938	APBD	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	5	5	5	5	1.008.000.000	1.008.000.000	987.312.012	APBD	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan KELURAHAN TINJOMOYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9	9	9	9	1.008.000.000	1.008.000.000	987.312.012	APBD	
	TOTAL						50.706.727.652	50.706.727.652	50.917.711.432		

Sumber : *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, 2023*

BAB V **P E N U T U P**

Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Banyumanik Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumanik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

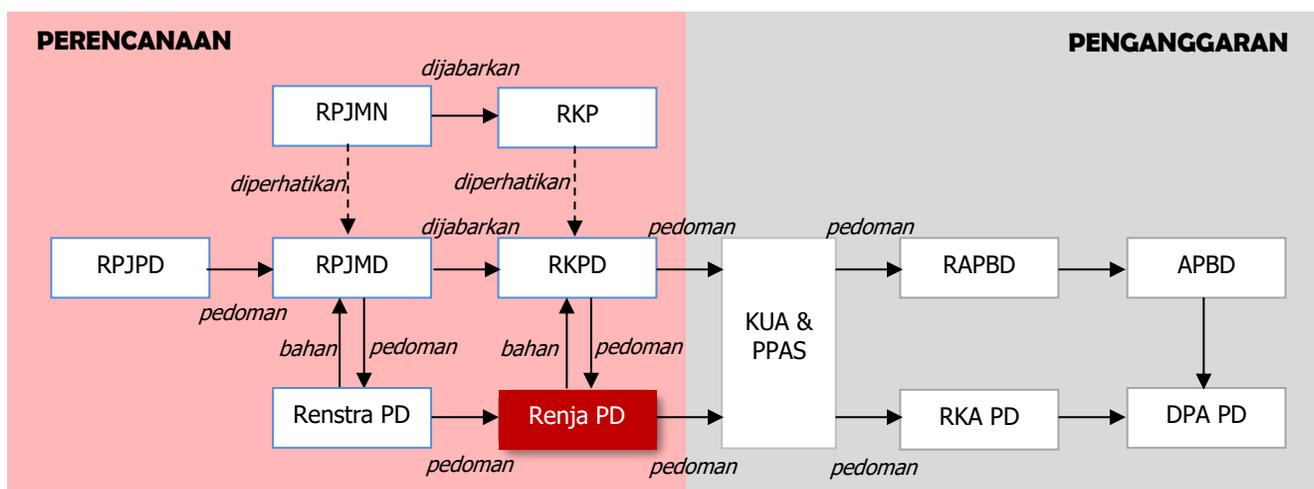
48. KECAMATAN NGALIYAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2023, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat realokasi anggaran; (2) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2023; serta (3) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

- Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang;
 - u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
 - v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
 - w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
 - x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN *OPD* KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	108.79%	100%	108.7%	108.7%		108.7%
		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95%	99%	92.00%	100%	108.70%		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	100%	100.00%		
		Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1	1	1	1	100.00%		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.00 Dokumen	4	4	2	50.00%		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	100.00%	50.00%	50.00%		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wates	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Purwoyoso	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Podorejo	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gondoriyo	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalipancur	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bringin	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakaji	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang Memenuhi Standar PATEN	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	3.00 kegiatan	3	3	2	66.67%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Wonosari	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Ngaliyan	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Bambangremp	100.00 persen	100%	100%	50.00%	50.00%		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100%	100%	50.00%	50.00%		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3.00 kegiatan	3	3	2	66.67%		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	101.03	100%	76%	76.00%		102.04%
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	98%	98%	75%	76.53%		
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	100%	100%	76.70%	76.70%		
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	227	377	279	214	76.70%		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		100%	100%	100%	100%	100.00%		
		Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	109.00 Angka	182	109	109	100.00%		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		100%		100%	38.53%	38.53%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	5.00 kegiatan	13	5	3	60.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	10.00 kegiatan	23	10	3	30.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bampakerep	10.00 kegiatan	10	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	10.00 kegiatan	6	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	10.00 kegiatan	15	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	10.00 kegiatan	20	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bringin	10.00 kegiatan	14	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	10.00 kegiatan	6	10	3	30.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	10.00 kegiatan	24	10	3	30.00%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	14.00 kegiatan	14	14	12	85.71%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	10.00 kegiatan	8	10	3	30.00%		
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	95.24%	100%	19.35%	19.35%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Beringin	23.00 kegiatan	56	23	5	21.74%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Podorejo	21.00 kegiatan	13	21	3	14.29%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gondoriyo	27.00 kegiatan	26	27	7	25.93%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalipancur	23.00 kegiatan	16	23	5	21.74%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Purwoyoso	34.00 kegiatan	11	34	8	23.53%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Bambankerep	24.00 kegiatan	10	24	3	12.50%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Ngaliyan	43.00 kegiatan	17	43	7	16.28%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Ngaliyan	22.00 kegiatan	10	22	3	13.64%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wates	21.00 kegiatan	17	21	3	14.29%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakaji	22.00 kegiatan	9	22	5	22.73%		
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non- fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wonosari	19.00 kegiatan	5	19	5	26.32%		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Lembaga	100%	100	100%	75	7500.00%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8	19	8	6	75.00%		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Masyarakat	Lembaga	100%	100.00%	100%	56.41%	56.41%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8.00 dokumen	8	8	4	50.00%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bringin	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Podorejo	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Gondoriyo	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Kalipancur	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Tambakaji	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Wonosari	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Purwoyoso	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Ngaliyan	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Wates	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan di Kelurahan Bambankerep	7.00 laporan	0	7	4	57.14%		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan	1.00 kegiatan	1	1	1	100.00%		
		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan	1.00 kelurahan	1	1	1	100.00%		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	120%	100%	66.67%	66.67%		66.67%
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	12	15.00%	10%	66.67%		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30	38	15.00%	10%	66.67%		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	100	100%	31.43%	31.43%		
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	25	21	35	11	31.43%		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		100%	100.00%	100%	60.00%	60.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketrriban Umum	5.00 Kegiatan	5	5	3	60.00%		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	90%	92.00%	92%	100.00%		100%
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	90%	92.00%	92%	100.00%		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	100%	100%	33.33%	33.33%		
		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	4	2	3	1	33.33%		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		100%	100%	100%	66.67%	66.67%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.00 kegiatan	2	3	2	66.67%		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	100%	100%	50%	50.00%		50%
		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100.00%	50%	50.00%		
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%	100%	100.00%	50%	50.00%		
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100.00%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	80%	80.00%		
		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5	5	5	3	60.00%		
		Jumlah Dokumen pelaporan	2	2	2	2	100.00%		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	100%	100%	66.67%	66.67%		
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	2.00 dokumen	1	2	1	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah Dokumen RTP Kecamatan Ngaliyan	1.00 dokumen	1	1	1	100.00%		
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100.00%	100.00%		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	2.00 dokumen	2	2	2	100.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100	100%	75%	75.00%		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4	4	4	3	75.00%		
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100	100	100.00%	75%	75.00%		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 persen	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 persen	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 dokumen	1	1	0	0.00%		
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	100%	100%	50%	50.00%		
		Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2.00 dokumen	2	2	1	50.00%		
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	100%	100%	100.00%	100.00%		
		Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 dokumen	1	1	1	100.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%	50%	50.00%		
		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	100%	100%	60%	60.00%		
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5.00 jenis	5	5	3	60.00%		
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	66.67%	66.67%		
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3.00 jenis	3	3	2	66.67%		
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	100%	100%	85.71%	85.71%		
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35.00 jenis	35	35	30	85.71%		
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	100%	100%	83.33%	83.33%		
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6.00 jenis	6	6	5	83.33%		
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Jumlah tamu yang berkunjung	2000 orang	1,500	2000	1000	50.00%		
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	100%	100%	33.33%	33.33%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	60.00 kegiatan	60	60	20	33.33%		
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		100%	100%	100%	100.00%	100.00%		
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2.00 jenis	1	2	2	100.00%		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100%	100%	100%	100.00%	100.00%		
		Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	1.00 jenis	2	1	1	100.00%		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	100%	100%	50%	50.00%		
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	100%	100%	50	50.00%		
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6 x 100%	9 = 5+7	10 = 9/4x100%
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6.00 jenis	6	2	1	50.00%		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	50.00%	50.00%		
		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	50%	50.00%		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100%	100%	100%	62.50%	62.50%		
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.00 unit	24	24	15	62.50%		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		
		Jumlah pemeliharaan / rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2.00 gedung	1	2	0	0.00%		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	66.67%	66.67%		
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	3.00 jenis	3	3	2	66.67%		
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100%	100%	100%	0.00%	0.00%		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja Renja SKPD Tahun (2023) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Renja SKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{7}{6} \times 100\%$	$9 = 5+7$	$10 = \frac{9}{4} \times 100\%$
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	1.00 jenis	2	1	0	0.00%		
Rata-rata capaian riil semua kegiatan						0			
Rata-rata Capaian Kinerja Program (diluar Penunjang)(%)							94.35		
Predikat Kinerja Program									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							85.48		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									

Sumber: Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan”, “Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya”, “Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD”, “Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran”, dan “Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah”.

Ada sub kegiatan yang tidak tercapai karena mengalami refocusing yaitu “Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,557,157,361	7,775,016,229	53.41%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,041,000	3,857,325	24.05%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,098,000	1,026,000	48.90%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,180,000	0	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,730,000	0	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1,925,000	1,251,175	65.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2,159,000	0	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,093,000	831,000	76.03%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	856,000	749,150	87.52%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,795,614,192	7,013,587,799	54.81%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,306,355,192	6,782,690,799	55.12%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	486,035,000	230,820,000	47.49%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,333,000	77,000	5.78%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	896,000	0	0.00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	995,000	0	0.00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	482,504,169	287,523,450	59.59%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,000,000	6,294,000	52.45%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	154,298,000	122,700,000	79.52%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,475,000	29,963,400	52.13%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,111,000	6,768,950	74.29%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8,892,000	2,890,100	32.50%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,956,000	18,907,000	26.65%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	169,772,169	100,000,000	58.90%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59,912,000	52,500,000	87.63%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59,912,000	52,500,000	87.63%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232,773,000	118,606,005	50.95%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121,348,000	59,531,335	49.06%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111,425,000	59,074,670	53.02%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970,313,000	298,941,650	30.81%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158,100,000	52,234,150	33.04%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	750,600,000	243,376,000	32.42%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31,013,000	3,331,500	10.74%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,600,000	0	0.00%
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2,443,189,000	1,068,862,650	43.75%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	186,992,000	7,950,000	4.25%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	186,992,000	7,950,000	4.25%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	985,597,000	469,343,850	47.62%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	985,597,000	469,343,850	47.62%
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1,270,600,000	591,568,800	46.56%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1,270,600,000	591,568,800	46.56%
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,298,862,886	2,157,876,400	65.41%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,950,589,886	2,109,885,075	71.51%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50,374,000	36,680,425	72.82%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2,300,000,000	1,910,758,000	83.08%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	600,215,886	162,446,650	27.06%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	348,273,000	47,991,325	13.78%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	137,000,000	41,241,325	30.10%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	211,273,000	6,750,000	3.19%
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	63,283,000	18,221,100	28.79%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63,283,000	18,221,100	28.79%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	63,283,000	18,221,100	28.79%
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	92,469,000	39,898,500	43.15%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	92,469,000	39,898,500	43.15%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,469,000	39,898,500	43.15%
KELURAHAN KALIPANCUR		3,717,280,000	1,325,041,777	35.65%
F	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47,080,000	19,223,277	40.83%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	47,080,000	19,223,277	40.83%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47,080,000	19,223,277	40.83%
G	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,670,200,000	1,305,818,500	35.58%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,311,000,000	355,745,000	27.14%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,136,000,000	348,030,000	30.64%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	7,715,000	4.41%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,359,200,000	950,073,500	40.27%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,359,200,000	950,073,500	40.27%
KELURAHAN BAMBANKEREP		1,938,760,000	1,026,453,216	52.94%
H	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39,760,000	17,497,216	44.01%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39,760,000	17,497,216	44.01%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39,760,000	17,497,216	44.01%
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,899,000,000	1,008,956,000	53.13%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,125,000,000	710,872,700	63.19%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	674,555,000	71.01%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	36,317,700	20.75%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	774,000,000	298,083,300	38.51%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	774,000,000	298,083,300	38.51%
KELURAHAN NGALIYAN		2,943,160,000	882,960,803	30.00%
J	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44,560,000	17,913,203	40.20%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	44,560,000	17,913,203	40.20%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44,560,000	17,913,203	40.20%
K	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,898,600,000	865,047,600	29.84%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,125,000,000	40,009,000	3.56%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	26,486,000	2.79%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	13,523,000	7.73%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,773,600,000	825,038,600	46.52%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,773,600,000	825,038,600	46.52%
KELURAHAN WATES		2,071,360,000	904,624,411	43.67%
L	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36,160,000	14,247,411	39.40%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36,160,000	14,247,411	39.40%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36,160,000	14,247,411	39.40%
M	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,035,200,000	890,377,000	43.75%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,125,000,000	534,713,000	47.53%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	531,503,000	55.95%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	3,210,000	1.83%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	910,200,000	355,664,000	39.08%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	910,200,000	355,664,000	39.08%
KELURAHAN TAMBAKAJI		3,886,120,000	1,392,913,792	35.84%
N	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38,920,000	22,367,792	57.47%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	38,920,000	22,367,792	57.47%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38,920,000	22,367,792	57.47%
O	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,847,200,000	1,370,546,000	35.62%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,428,000,000	179,053,000	12.54%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,253,000,000	142,083,000	11.34%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	36,970,000	21.13%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,419,200,000	1,191,493,000	49.25%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,419,200,000	1,191,493,000	49.25%
KELURAHAN WONOSARI		4,164,360,000	1,093,330,408	26.25%
P	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39,760,000	17,482,908	43.97%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39,760,000	17,482,908	43.97%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39,760,000	17,482,908	43.97%
Q	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,124,600,000	1,075,847,500	26.08%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,586,000,000	59,366,000	3.74%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,411,000,000	28,796,000	2.04%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	30,570,000	17.47%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,538,600,000	1,016,481,500	40.04%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,538,600,000	1,016,481,500	40.04%
KELURAHAN PODOREJO		2,482,120,000	572,955,005	23.08%
R	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35,920,000	9,494,005	26.43%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35,920,000	9,494,005	26.43%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35,920,000	9,494,005	26.43%
S	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,446,200,000	563,461,000	23.03%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,125,000,000	39,036,000	3.47%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	27,846,000	2.93%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	11,190,000	6.39%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,321,200,000	524,425,000	39.69%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,321,200,000	524,425,000	39.69%
KELURAHAN PURWOYOSO		3,216,720,000	891,928,624	27.73%
T	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40,120,000	16,203,874	40.39%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	40,120,000	16,203,874	40.39%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40,120,000	16,203,874	40.39%
U	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3,176,600,000	875,724,750	27.57%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,304,000,000	122,246,750	9.37%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,129,000,000	110,597,000	9.80%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	11,649,750	6.66%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,872,600,000	753,478,000	40.24%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,872,600,000	753,478,000	40.24%
KELURAHAN BRINGIN		4,156,760,000	1,211,872,761	29.15%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38,560,000	14,819,661	38.43%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	38,560,000	14,819,661	38.43%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38,560,000	14,819,661	38.43%
W	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4,118,200,000	1,197,053,100	29.07%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,249,000,000	36,324,000	2.91%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1,074,000,000	31,409,000	2.92%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	4,915,000	2.81%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2,869,200,000	1,160,729,100	40.45%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2,869,200,000	1,160,729,100	40.45%
KELURAHAN GONDORIYO		2,561,440,000	613,201,570	23.94%
X	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37,240,000	12,620,370	33.89%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	37,240,000	12,620,370	33.89%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37,240,000	12,620,370	33.89%
Y	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,524,200,000	600,581,200	23.79%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,125,000,000	34,026,000	3.02%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	950,000,000	25,786,000	2.71%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175,000,000	8,240,000	4.71%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1,399,200,000	566,555,200	40.49%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1,399,200,000	566,555,200	40.49%
JUMLAH		51,593,041,247	20,975,157,246	40.66%

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 11 kegiatan dan 76 sub kegiatan pada Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah sebesar Rp51.593.041.247,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp20.975.157.246,00. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 30.617.884.001,00.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian		Proyeksi 2023
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 TW 2	
TUJUAN RENSTRA											
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.68 angka	90.00 angka	87.50 angka	88.00 angka	88.35 angka	89.00 angka	90.00 angka	91.95	90	92
SASARAN RENSTRA											
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	74.53 Nilai	77.00 Nilai	75.00 Nilai	75.50 Nilai	76.00 Nilai	76.50 Nilai	77.00 Nilai	71.61	73.40	73.40
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	0.00 Angka	5.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1.00 Angka	1	1	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	80.00 persen	90.00 persen	84.00 persen	86.00 persen	88.00 persen	88.00 persen	90.00 persen	100	100	100

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Perangkat Daerah Tahun					Capaian		Proyeksi 2023
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023 TW 2	
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40.00 persen	60.00 persen	45.00 persen	50.00 persen	55.00 persen	58.00 persen	60.00 persen	45	50	50
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	0.00 persen	100.00 persen	60.00 persen	70.00 persen	80.00 persen	90.00 persen	100.00 persen	60	85	85

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ngaliyan tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Indikator tujuan Renstra yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat tercapai sebesar 90% dari target yang telah ditetapkan sebesar 88%. Hal ini dikarenakan adanya komitmen Kecamatan Ngaliyan yang melayani masyarakat dengan sepenuh hati;
- b. Indikator Sasaran Strategis yang pertama yaitu “Nilai AKIP” tidak tercapai, yaitu dari target yang ditetapkan sebesar 75,5 hanya bisa dicapai sebesar 73,40. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor sebagai berikut:
 - ◆ Perencanaan kinerja memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum menunjukkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
 - ◆ Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun belum dijelaskan faktor-faktor pencapaian efisiensi tersebut.
 - ◆ Pada kriteria setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, belum menunjukkan keterlibatan setiap pegawai dalam proses pengukuran kinerja.
 - ◆ Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja hanya dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (T-1).
 - ◆ Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
 - ◆ Dokumen Laporan Kinerja dalam menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, hanya menyampaikan terkait efisiensi anggaran tanpa penjalasan faktor efisiensinya.
 - ◆ Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.

- ◆ Informasi dalam laporan kinerja belum menunjukkan pengaruh terhadap perubahan budaya kinerja organisasi.
 - ◆ Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan.
- c. Indikator Sasaran Strategis yang kedua yaitu “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan” dapat tercapai sebesar 1 dari yang target yang telah ditetapkan sebesar 1 inovasi yaitu Kanal Pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, aduan, kritik dan saran terhadap Pemerintah Kota Semarang pada umumnya dan Kecamatan Ngaliyan pada khususnya. Selain itu masyarakat juga dapat memperoleh informasi seputar pelayanan publik dengan cepat;
 - d. Indikator Sasaran Strategis yang ketiga yaitu “Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif” dapat dicapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 86%. Hal ini dikarenakan dilaksanakannya pembinaan lembaga kemasyarakatan secara rutin oleh Camat dan Lurah;
 - e. Indikator Sasaran Strategis yang keempat yaitu “Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum” dapat dicapai sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan sebesar 505;
 - f. Indikator Sasaran Strategis yang kelima yaitu “Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan” dapat dicapai sebesar 85% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 70%. Hal ini dikarenakan koordinasi yang dilaksanakan sebelumnya sehingga semua stakeholder dapat berperan serta dan aktif dalam kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI Kecamatan Ngaliyan KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Ngaliyan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan.

- c. Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan diantaranya:

- a. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat yang integratif dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan dan Kelurahan
- c. Kurang efektifnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan

- ❖ Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Kecamatan Ngaliyan agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- ❖ Perkembangan Kota Semarang beserta seluruh permasalahannya.

Sebagai sebuah kota metropolitan, Kota Semarang memiliki permasalahan dalam berbagai aspek saling yang terkait. Diperlukan strategi tepat dan komitmen kuat dalam mengarahkan perkembangan Kota Semarang beserta penyelesaian seluruh permasalahannya.

- ❖ Tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan yang semakin beragam.

- 1) Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan karena berpengaruh terhadap kualitas penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat, yang seiring perkembangan Kota Semarang menjadi semakin beragam, sehingga perlu diberikan ruang dalam penyampaiannya, serta yang terpenting dalam pengakomodirannya, agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

b. Peluang

- ❖ Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
 - ❖ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- 1) Tersedianya potensi sumber daya aparatur yang harus dikelola dengan tepat, terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya melalui pendidikan formal maupun non formal, agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- b. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- c. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- d. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
- e. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua level.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil

analisis kebutuhan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN				51,046,613,719	KECAMATAN NGALIYAN				53,236,613,719
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	2,845,301,691	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	2,845,301,691
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 Angka	176,096,000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 Angka	176,096,000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	176,096,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	176,096,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	1,412,867,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	1,412,867,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,412,867,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1,008,397,000
		KELURAHAN KALIPANCUR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			KELURAHAN KALIPANCUR	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	47,080,000
		KELURAHAN BAMBANKER EP	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			KELURAHAN BAMBANKEREP	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40,660,000
		KELURAHAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			KELURAHAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	44,560,000

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF
		KELURAHAN WATES	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			KELURAHAN WATES	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	38,860,000
		KELURAHAN TAMBAKAJI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			KELURAHAN TAMBAKAJI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	38,920,000
		KELURAHAN WONOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			KELURAHAN WONOSARI	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	39,760,000
		KELURAHAN PODOREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			KELURAHAN PODOREJO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35,920,000
		KELURAHAN PURWOYOSO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			KELURAHAN PURWOYOSO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40,120,000
		KELURAHAN BRINGIN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			KELURAHAN BRINGIN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	39,850,000
		KELURAHAN GONDORIYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan			KELURAHAN GONDORIYO	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	38,740,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	1,256,338,691	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	1,256,338,691
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1,256,338,691	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1,256,338,691
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	32,221,989,361	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	34,411,989,361
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	13,886,234,503	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	16,076,234,503

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPJ					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	40,236,250	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	40,236,250
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	12,903,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit	4,150,000,000
		KELURAHAN KALIPANCUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			KELURAHAN KALIPANCUR	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,136,000,000
		KELURAHAN BAMBANKER EP	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			KELURAHAN BAMBANKEREP	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000
		KELURAHAN NGALIYAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			KELURAHAN NGALIYAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000
		KELURAHAN WATES	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			KELURAHAN WATES	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	950,000,000
		KELURAHAN TAMBAKAJI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			KELURAHAN TAMBAKAJI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,253,000,000
		KELURAHAN WONOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			KELURAHAN WONOSARI	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,411,000,000
		KELURAHAN PODOREJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			KELURAHAN PODOREJO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000
		KELURAHAN PURWOYOSO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			KELURAHAN PURWOYOSO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,129,000,000
		KELURAHAN BRINGIN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			KELURAHAN BRINGIN	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,074,000,000
		KELURAHAN GONDORIYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit			KELURAHAN GONDORIYO	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	950,000,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	942,998,253	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	698,492,396
		KELURAHAN KALIPANCUR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			KELURAHAN KALIPANCUR	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	33,017,859

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF
		KELURAHAN BAMBANKER EP	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			KELURAHAN BAMBANKEREP	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	64,879,173
		KELURAHAN NGALIYAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			KELURAHAN NGALIYAN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	42,047,139
		KELURAHAN WATES	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			KELURAHAN WATES	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	33,142,550
		KELURAHAN TAMBAKAJI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			KELURAHAN TAMBAKAJI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	41,790,620
		KELURAHAN WONOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			KELURAHAN WONOSARI	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	65,877,140
		KELURAHAN PODOREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			KELURAHAN PODOREJO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	36,385,334
		KELURAHAN PURWOYOSO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			KELURAHAN PURWOYOSO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	40,506,792
		KELURAHAN BRINGIN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			KELURAHAN BRINGIN	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	35,437,040
		KELURAHAN GONDORIYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas			KELURAHAN GONDORIYO	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	41,422,210
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	18,335,754,858	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	18,335,754,858

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18,102,386,165	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	112,673,010
		KELURAHAN KALIPANCUR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN KALIPANCUR	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2,344,002,346
		KELURAHAN BAMBANKER EP	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BAMBANKEREP	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	727,915,596
		KELURAHAN NGALIYAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN NGALIYAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1,748,217,842
		KELURAHAN WATES	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN WATES	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	894,648,971
		KELURAHAN TAMBAKAJI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN TAMBAKAJI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2,398,057,005
		KELURAHAN WONOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN WONOSARI	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2,493,386,220
		KELURAHAN PODOREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PODOREJO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1,304,538,469
		KELURAHAN PURWOYOSO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN PURWOYOSO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1,849,820,140
		KELURAHAN BRINGIN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN BRINGIN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	2,852,181,988
		KELURAHAN GONDORIYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan			KELURAHAN GONDORIYO	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	1,376,944,578
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	233,368,693	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	233,368,693
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	59,683,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	59,683,000
			Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen				Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	59,683,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	59,683,000

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF
			Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 angka				Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 angka	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	59,683,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	59,683,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	86,169,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	86,169,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	86,169,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	86,169,000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	86,169,000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	86,169,000
X.XX	NON URUSAN				15,833,470,667	NON URUSAN				15,833,470,667
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	15,833,470,667	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100,00%	15,833,470,667
			Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%				Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00%	
			Persentase Kinerja administrasi dan	100,00%				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00%	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF
			pelaporan Keuangan SKPD							
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	15,141,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	15,141,000
			Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen				Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,198,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,198,000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4,180,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4,180,000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,730,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,730,000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1,925,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1,925,000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,159,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,159,000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,093,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,093,000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	856,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	856,000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	13,956,583,993	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	13,956,583,993
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	13,467,744,993	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	13,467,744,993
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	486,035,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	486,035,000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	913,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	913,000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	896,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	896,000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	995,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	995,000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	469,358,974	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	469,358,974
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12,000,000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	132,763,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	132,763,000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57,475,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57,475,000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,970,805	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,970,805
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11,692,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11,692,000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	74,686,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	74,686,000

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPJ					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF	SKPD / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	169,772,169	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	169,772,169
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	59,912,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	59,912,000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	59,912,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	59,912,000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	227,102,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	227,102,000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	123,360,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	123,360,000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	103,742,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	103,742,000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00 persen	1,105,372,700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan aset SKPD	100,00 persen	1,105,372,700
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	158,100,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	158,100,000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	900,600,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	900,600,000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	16,072,700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	16,072,700
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,600,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KECAMATAN NGALIYAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,600,000

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKP Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi”,

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yaitu:

1. Sasaran 1 “Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah” dengan indikator kinerja “Nilai AKIP”;
2. Sasaran 2 “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik” dengan indikator kinerja “Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan”;
3. Sasaran 3 “Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan” dengan indikator kinerja “Persentase lembaga kemasyarakatan aktif”;
4. Sasaran 4 “Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan” dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - 1) “Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”; dan
 - 2) “Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN RENSTRA			
Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	90.00 angka	88.00 angka
SASARAN RENSTRA			
Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77.00 Nilai	75.50 Nilai
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	5.00 Angka	1.00 Angka
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	90.00 persen	86.00 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.00 persen	50.00 persen
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan	100.00 persen	70.00 persen

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Ngaliyan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan indikator sasaran “Persentase lembaga kemasyarakatan aktif, Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Persentase pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023		
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN NGALIYAN					49.668.402.192	51.530.628.078	51.046.613.719		
7.01	KECAMATAN					35.597.410.000	37.035.883.886	35.213.143.052		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 Persen	92 Persen	92 Persen	2.686.896.000	2.841.269.000	2.845.301.691	PAD	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 Angka	1 Angka	1 Angka	62.492.000	186.992.000	176.096.000		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1.353.804.000	1.383.677.000	1.412.867.000		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	1.270.600.000	1.270.600.000	1.256.338.691		
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98,00 persen	98,00 persen	98,00 persen	32.754.762.000	34.038.862.886	32.221.989.361	PAD	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	279 kegiatan	279 kegiatan	279 kegiatan	14.169.489.000	15.453.589.886	13.886.234.503		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	18.585.273.000	18.585.273.000	18.335.754.858		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen	63.283.000	63.283.000	59.683.000		
		Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00 persen	15,00 persen	15,00 persen					
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	35 Angka	35 Angka	63.283.000	63.283.000	59.683.000		
		Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	35 angka	35 angka	35 angka					
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92,00 persen	92,00 persen	92,00 persen	92.469.000	92.469.000	86.169.000	PAD	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	92.469.000	92.469.000	86.169.000		
X.XX	NON URUSAN					14.070.992.192	14.494.744.192	15.833.470.667		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Perencanaan dan	100,00 %	100,00 %	100,00 %	14.070.992.192	14.494.744.192	15.833.470.667	PAD	

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU			SUMBER DANA	KET
			RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023	RENJA 2023	APBD 2023	RENJA PERUBAHAN 2023		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	pelaporan Kinerja SKPD								
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %					
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	18.516.000	16.041.000	15.141.000		
		Jumlah Dokumen pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen					
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	12.795.614.192	12.795.614.192	13.956.583.993		
		Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen					
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	365.081.000	420.091.000	469.358.974		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	59.912.000	59.912.000	59.912.000		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	221.714.000	232.773.000	227.102.000		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset	100,00 persen	100,00 persen	100,00 persen	610.155.000	970.313.000	1.105.372.700		
JUMLAH						49.668.402.192	51.530.628.078	51.046.613.719		

Sumber : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, 2023

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPd Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

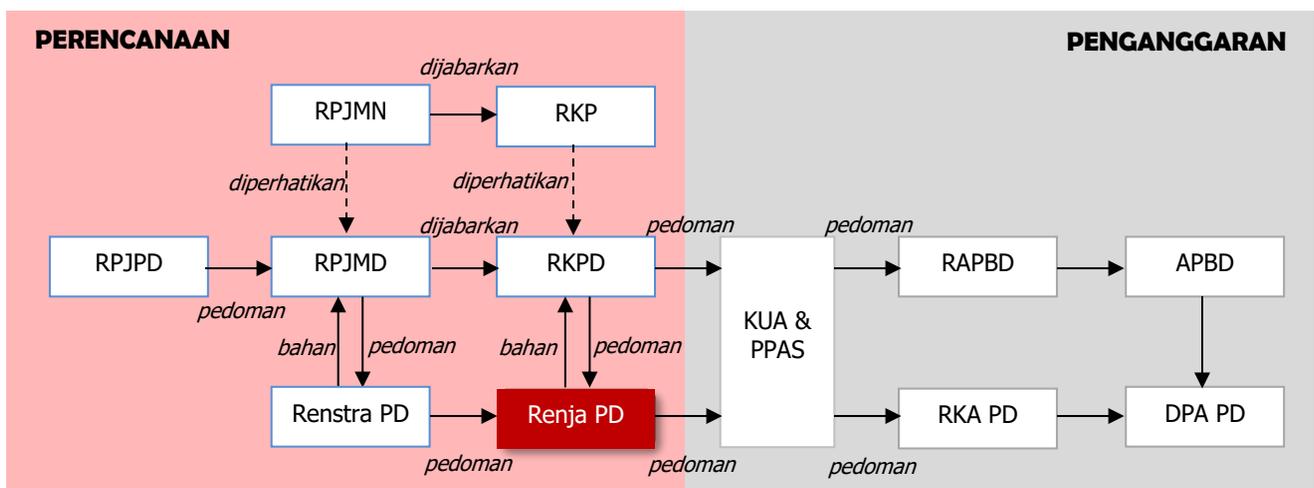
Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Gayamsari sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh: (1) Penyesuaian program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan penurunan stunting dan pencegahan inflasi; serta (2) perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);

- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- v. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN GAYAMSARI
KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	66.53 %	66.53 %	66.53 %	66.53 %
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %	69.24 %	69.24 %	69.24 %	69.24 %
		Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	51.71 %	51.71 %	51.71 %	51.71 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	57 %	4 Dokumen	57 %
		Jumlah Dokumen Pelaporan	2 dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66 %	2 Dokumen	66 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD) dan Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	0 Dokumen	0 %
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	100 %
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50 %	1 Laporan	50 %
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %
		Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50 %	2 Dokumen	50 %
		Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bln	100 %	65 orang/bln	62 Org/ Bln	95,38 %	62 Org/ Bln	95,38 %
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100 %	100 %	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100 %	100 %	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0	0 %	0	0 %
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	100 %
		Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.02.05	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0 %	0	0 %
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	100 %
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	9 Paket	90 %	9 Paket	90 %
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 Jenis	100 Jenis	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	100 %
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100 Jenis	100 Jenis	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	100 %
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50 %	6 Laporan	50 %
		Jumlah tamu yang berkunjung	100 Orang	100 Orang	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50 %	6 Laporan	50 %
		Jumlah Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	10 Kegiatan	10 Kegiatan	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	12 Dokumen	100 %
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis	5 Jenis	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	50 %	50%	50 %	50%
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	33.33 %	1 Unit	33.33 %
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jenis	1 Jenis	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50 %	6 Laporan	50 %
		Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	100 %	-	-	-	-	-
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50 %	6 Laporan	50 %
		Persentase Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	11 Unit	91.66 %	11 Unit	91.66 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42 Unit	42 Unit	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	100 %
		Jumlah pemeliharaan / rehab Gedung kantor dan bangunan lainnya	3 gedung	3 Gedung	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	100 %
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor	3 Jenis	3 Jenis	-	-	-	-	-
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1 unit	1 Unit	100 %	1 Unit	100 %
		Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor	3 Jenis	3 Jenis	-	-	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	91 %	92 %	97.425 %	105 %	97.425 %	105 %
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	8 Angka	1 angka	1 Angka	100 %	1 Angka	100 %
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi standart PATEN	100 %	100 %	-	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kelurahan dan Kecamatan	100 Angka	100 Angka	-	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gayamsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gayamsari)	12 Laporan		12 Laporan	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gayamsari	100 %	100 %	-	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	12 Laporan		12 Laporan	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pandean Lamper	100 %	100 %	-	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(Kelurahan Sambirejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambirejo)	12 Laporan		12 Laporan	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sambirejo	100 %	100 %	-	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan(Kelurahan Siwalan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)	12 Laporan		12 Laporan	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Siwalan	100 %	100 %	-	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	12 Laporan		12 Laporan	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Sawah Besar	100 %	100 %	-	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	12 Laporan		12 Laporan	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kaligawe	100 %	100 %	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	12 Laporan		12 Laporan	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tambakrejo	100 %	100 %	-	-	-	-	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	50 %	50 %
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	6 Dokumen	50 %	6 Dokumen	50 %
		Jumlah kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	1200 Angka	1200 Angka	-	-	-	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	98 %	97 %	98 %	69 %	70.40 %	69 %	70.40 %
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	80 angka	80 angka	50 angka	62.50 %	50 angka	62.50 %
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	100 %	5 Lembaga	100 %
		Jumlah usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	80 Angka	80 Angka	-	-	-	-	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit		9 Unit	9 unit	100 %	9 unit	100 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah Pembangunan Kecamatan Gayamsari	9 Angka	9 Angka	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gayamsari)	12 Unit		12 Unit	11 Unit	91.66 %	11 Unit	91.66 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah Pembangunan Kelurahan Gayamsari	14 Angka	14 Angka	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pandean Lamper)	10 Unit		10 Unit	10 Unit	100 %	10 Unit	100 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah Pembangunan Kelurahan Pandean Lamper	9 Angka	9 Angka	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambirejo)	10 Unit		10 Unit	10 Unit	100 %	10 Unit	100 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah Pembangunan Kelurahan Sambirejo	10 Angka	10 Angka	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Siwalan)	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100 %	12 Unit	100 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah Pembangunan Kelurahan Siwalan	11 Angka	11 Angka	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sawah Besar)	9 Unit		9 Unit	7 Unit	77.77 %	7 Unit	77.77 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah Pembangunan Kelurahan Sawah Besar	10 Angka	10 Angka	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaligawe)	13 Unit		13 Unit	11 Unit	84.61 %	11 Unit	84.61 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah Pembangunan Kelurahan Kaligawe	14 Angka	14 Angka	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakrejo)	11 Unit		11 Unit	11 Unit	100 %	11 Unit	100 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan fisik prioritas hasil musyawarah Pembangunan Kelurahan Tambakrejo	11 Angka	11 Angka	-	-	-	-	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas		7 Pokmas	5 Pokmas	71.42 %	5 Pokmas	71.42 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan non fisik prioritas Hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kecamatan Gayamsari	32 Angka	32 Angka	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	7 Pokmas		7 Pokmas	5 Pokmas	71.42 %	5 Pokmas	71.42 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan non fisik prioritas Hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gayamsari	16 Angka	16 Angka	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean lamper)	7 Pokmas		7 Pokmas	5 Pokmas	71.42 %	5 Pokmas	71.42 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah kegiatan Pembangunan non fisik prioritas Hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pandean Lamper	15 Angka	15 Angka	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	7 Pokmas		7 Pokmas	5 Pokmas	71.42 %	5 Pokmas	71.42 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan non fisik prioritas Hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sambirejo	12 Angka	12 Angka	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	7 Pokmas		7 Pokmas	5 Pokmas	71.42 %	5 Pokmas	71.42 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan non fisik prioritas Hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Siwalan	17 Angka	17 Angka	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	7 Pokmas		7 Pokmas	6 Pokmas	85.71 %	6 Pokmas	85.71 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan non fisik prioritas Hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Besar	20 Angka	20 Angka	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	7 Pokmas		7 Pokmas	6 Pokmas	85.71 %	6 Pokmas	85.71 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan non fisik prioritas Hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kaligawe	13 Angka	13 Angka	-	-	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	7 Pokmas		7 Pokmas	6 Pokmas	85.71 %	6 Pokmas	85.71 %
		Jumlah kegiatan Pembangunan non fisik prioritas Hasil musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tambakrejo	13 Angka	13 Angka	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	768 angka	768 angka	250 angka	32.55 %		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %
		Jumlah laporan Lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	768 Angka	768 Angka	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gayamsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gayamsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pandean Lamper)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pandean Lamper)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sambirejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sambirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Siwalan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Siwalan)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sawah Besar)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sawah Besar)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kaligawe)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaligawe)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %	3 Lembaga Kemasyarakatan	33.33 %
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50 %	6 Laporan	50 %
		Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kecamatan dan kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kampung Tematik di Kecamatan Gayamsari	3 Angka	3 Angka	-	-	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	15 %	15 %	9 %	60 %	9 %	60 %
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 Angka	24 Angka	24 Angka	11 Angka	45.83 %	11 Angka	45.83 %
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50 %	6 Laporan	50 %
		Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 Kegiatan	10 Kegiatan	-	-	-	-	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	95 %	92 %	92 %	100 %	92 %	100 %

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100 %	6 Kegiatan	100 %
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Orang	-	120 Orang	120 Orang	100 %	120 Orang	100 %
		Jumlah Kegiatan dalam penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 Kegiatan	6 Kegiatan	-	-	-	-	-

Sumber: Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi kinerja telah tercapai (100%) yaitu :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- e. Evaluasi kinerja perangkat daerah
- f. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan bahan logistik kantor
- i. Penyediaan barang cetakan dan pemnggandaan
- j. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- k. Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- l. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- m. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
- n. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
- o. Pembangunan sarana dan prasarana Kecamatan
- p. Pembangunan sarana dan prasarana (Kelurahan Pandean Lamper)
- q. Pembangunan sarana dan prasarana (Kelurahan Sambirejo)
- r. Pembangunan sarana dan prasarana (Kelurahan Tambakrejo)
- s. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- t. Fasilitasi , Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

Pada tahun 2023 terdapat penyesuaian belanja yang dikarenakan dilakukan Hold oleh OPD teknis dan Refocusing untuk pengalihan belanja pada level Pemerintah Kota Semarang. Adapun kegiatan yang dilakukan hold oleh opd teknis yaitu Pemberdayaan Lansia, Pemberdayaan ekonomi, Kegiatan lembaga yang tidak menjadi kewenangan lembaga tersebut, Gerbang hebat, dan lainnya . Untuk Kecamatan Gayamsari dilakukan efisiensi sebesar Rp. 737.297.990 . Namun dengan adanya efisiensi tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja OPD dikarenakan masih terdapat strategi lain yang bisa dilaksanakan untuk mencapai kinerja. Efisiensi dilakukan dengan menyesuaikan beberapa komponen belanja yaitu makan minum , perjalanan dinas, atk, dan lain-lain.

Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu :

- a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan)
- b. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
- c. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kecamatan)

- d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)
- e. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sambirejo)
- f. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)
- g. penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Siwalan)
- h. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)
- i. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)
- j. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakrejo)
- k. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pandean Lamper)
- l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)
- m. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sawah Besar)
- n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)
- o. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kaligawe)
- p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)
- q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gayamsari)
- r. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)
- s. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN GAYAMSARI			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.074.597.421	7.039.438.290	63,56
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.182.830	1.843.850	57,93
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	454.690	240.000	52,78
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	454.690	191.000	42,01
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	454.690	290.750	63,94
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	454.690	449.000	98,75
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	454.690	0	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	454.690	229.000	50,36
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	454.690	444.100	97,67
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.585.143.009	5.947.469.499	62,04
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.200.848.935	5.763.725.999	62,64
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	382.930.000	183.420.000	47,90
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	454.690	0	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	454.690	132.500	29,14

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN GAYAMSARI			
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	454.690	191.000	42,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	742.589.526	524.415.200	70,61
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.157.110	9.125.100	89,84
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	343.834.579	247.295.000	71,92
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.495.930	26.029.000	62,72
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.445.730	6.797.100	60,42
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.250.000	10.510.000	96,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.724.000	46.395.000	34,95
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	192.682.177	178.264.000	92,51
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.601.240	0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.601.240	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.120.440	54.249.770	39,85
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.993.300	44.909.770	37,74
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.127.140	9.340.000	54,53
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.960.380	511.459.971	87,89
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.736.280	31.387.649	49,56
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	397.000.000	99,25
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.224.100	53.692.000	98,83
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	29.380.322	97,93
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.166.176.896	1.042.592.550	72,01
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.250.000	2.250.000	100
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.250.000	2.250.000	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.476.607.456	711.822.354	48,20
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.022.450.756	472.374.729	46,20
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gayamsari)	65.000.000	29.324.099	45,11
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	65.000.000	29.467.567	45,33
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)	64.156.700	38.636.386	60,22
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambirejo)	65.000.000	44.158.870	67,93
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	65.000.000	25.986.494	39,97
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	65.000.000	37.224.474	57,26
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	65.000.000	34.649.735	53,30
7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	687.319.440	328.520.196	47,79
7.01.02.2.04.03	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	687.319.440	328.520.196	47,79

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
	KECAMATAN GAYAMSARI			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.257.710.080	11.295.813.316	58,65
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.918.334.370	6.793.668.907	68,49
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	34.696.710	33.451.500	96,41
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.200.000.000	998.502.800	83,20
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	950.00.000	733.754.000	77,23
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	950.00.000	864.444.000	90,99
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	950.000.000	923.237.200	97,18
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	950.00.000	772.830.000	81,35
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	950.000.000	696.854.000	73,35
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	950.000.000	652.520.000	68,68
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	1.063.000.000	473.381.700	44,53
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	695.637.660	328.680.500	47,24
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	175.000.000	43.207.000	24,68
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	175.000.000	40.634.500	23,21
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	175.000.000	81.803.327	46,74
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	175.000.000	53.176.000	30,38
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	175.000.000	15.954.000	9,11
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	175.000.000	30.506.000	17,43
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	175.000.000	50.731.180	28,98
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	9.339.375.710	4.502.144.409	48,20
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	137.000.000	49.013.600	35,77
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gayamsari)	1.379.400.000	680.088.300	49,30
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pandean Lamper)	2.007.600.000	987.641.609	49,19
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sambirejo)	1.121.400.000	536.128.590	47,80
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Siwalan)	804.000.000	372.909.950	46,38
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sawah Besar)	1.172.400.000	579.070.800	49,39
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kaligawe)	1.515.600.000	734.194.800	48,44
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakrejo)	1.152.600.000	557.396.760	48,35
7.01.03.2.03.04	Failitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	49.375.710	5.700.000	11,54
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.850.000	14.825.000	78,64
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.850.000	14.825.000	78,64
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	18.850.000	14.825.000	78,64
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	76.750.000	43.750.000	57,00
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	76.750.000	43.750.000	57,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
KECAMATAN GAYAMSARI				
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	76.750.000	43.750.000	57,00
JUMLAH		32.594.084.397	19.436.419.156	59,63

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2023

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana setelah pergeseran ke empat yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan pada Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah sebesar Rp 32.594.084.397 Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp.19.436.419.156 (59,63) Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp.13.157.665.241. Untuk sisa anggaran akan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dengan adanya Kerjasama anatara masing-masing PPTK di Kecamatan dan KPA di setiap kelurahan demi tercapainya tujuan dan target yang sudah ditetapkan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah dan pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	
TUJUAN														
Meningkatnya birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang bersih, melayani dan memberdayakan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	-	-	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pemberdayaan Masyarakat serta	Indeks Kepuasan Masyarakat di	-	89	92	93	94	95	-	91	97,42	-	-	-	92

Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kecamatan Gayamsari													
SASARAN														
Terwujudnya kualitas kinerja pelayannya perangkat daerah	Nilai AKIP	-	75,50	76	76,50	77	77,50	-	71,01	74,52	-	-	-	74
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	100 %	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Capaian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan	100 %	-	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan public di Kecamatan dan Kelurahan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN	-	-	100	100	100	100	-	-	100	-	-	100	100
Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	-	97	98	99	100	100	-	97	50	-	-	-	98
Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan	Persentase Jumlah Siskampling di Lingkungan RT	85	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-
	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	40 %	-	-	-	-	-	40 %	-	-	-	-	-
	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	85,04	86,72	88,40	90,08	-	-	60	-	-	-	85,04
	Persentase Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan	-	60	92	95	98	100	-	60	92	-	-	-	92

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gayamsari tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan “ **Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dalam Pemberdayaan Masyarakat Serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi** “ memiliki 1 indikator yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari** dengan target tahun 2023 yaitu 92, dan realisasi sampai dengan triwulan 2 yaitu sebesar 97,42 artinya bahwa Kecamatan Gayamsari sampai dengan triwulan 2 sudah melebihi target yang sudah ditetapkan dan menandakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Gayamsari terhadap pelayanan yang diberikan sudah maksimal.
- b. Sasaran “ **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik** “ mempunyai 1 indikator yaitu **Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Standar PATEN** dengan target tahun 2023 yaitu 100 % dan realisasi sampai dengan triwulan 2 yaitu 100 %. Kecamatan Gayamsari sudah berhasil mencapai target di triwulan 2 artinya bahwa berdasarkan jumlah pelayanan yang diajukan sudah berhasil diselesaikan .
- c. Sasaran “ **Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan** “ dengan Indikator **Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif** dengan target tahun 2023 yaitu 98 % dengan capaian sampai dengan triwulan 2 yaitu 50 % diharapkan akhir tahun 2023 dapat mencapai target yang sudah ditetapkan.
- d. Sasaran “ **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan , Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan** “ memiliki 2 indikator yaitu **Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum** dengan target tahun 2023 yaitu 85,04 dan realisasi sampai dengan triwulan 2 yaitu 60 % dan indicator **Persentase Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan** dengan target tahun 2023 yaitu 92 % dengan realisasi sampai dengan triwulan 2 yaitu 92 dan sudah berhasil mencapai target yang sudah ditetapkan dan artinya kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan sudah selesai dilaksanakan.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Gayamsari, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja Kecamatan Gayamsari melalui Indikator Pelayanan publik yang ditunjukkan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat dengan realisasi semester 2 sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan di Kecamatan Gayamsari sudah berjalan dengan baik.
2. Kinerja Kecamatan Gayamsari yang lainnya ditunjukkan dengan sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Standar PATEN, dari realisasi sampai dengan triwulan 2 indikator tersebut sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan . Hal tersebut menunjukkan Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan pelayanan yang diajukan oleh masyarakat.
3. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan yang ditunjukkan dengan Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif sampai dengan triwulan 2 sudah 50 % dengan harapan sampai dengan akhir tahun 2023 tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan kewilayahan dapat tercapai.
4. Untuk kinerja Meningkatnya Wawasan Kebangsaan , Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan yang ditunjukkan dengan indikator Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Persentase Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan dimana realisasi sampai dengan triwulan 2 untuk indikator tersebut tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya bahkan untuk pembinaan wawasan kebangsaan sudah mencapai target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan RENSTRA Kecamatan Gayamsari tahun 2021-2026 terdapat uraian permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kewilayahan di Kecamatan Gayamsari diantaranya:

1. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Gayamsari hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi.
2. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas, kompetensi di Kecamatan SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM percaya diri dan pengendalian emosi.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat
4. Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
5. Kurangnya optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
6. Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan
7. Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang belum optimal
8. Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
9. Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketentraman dan ketertiban umum .

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena

itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disrupsi atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.
- 2) Wilayah Kecamatan Gayamsari merupakan daerah yang sering banjir jika musim penghujan meskipun sarana dan prasarana seperti pompa pengendali banjir sudah ada di wilayah yang sering terdampak tetapi masih belum dapat berfungsi secara maksimal.
- 3) Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sering mengalami perubahan seiring perkembangan informasi teknologi.

b. Peluang

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat
- 2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau serta anggaran APBD yang memadai
- 3) Kemajuan informasi teknologi yang semakin cepat dan berkembang
- 4) Kebijakan otonomi daerah dalam undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana struktur pemerintah Kelurahan menjadi perangkat Kecamatan. Salah satu perubahan yang esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah dibawah Kecamatan, berubah statusnya menjadi perangkat Kecamatan sehingga anggaran Kelurahan merupakan bagian dari tanggung jawab Kecamatan, Camat mendapat

pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat termasuk perijinan, selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan ini terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas

5) Kepercayaan terhadap stabilitas keamanan lingkungan yang kondusif

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPd Kota Semarang Tahun 2023
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

NO	Rancangan Perubahan RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAH											
KECAMATAN GAYAMSARI											
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Gayamsari	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	2.160.680.966	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Gayamsari	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	2.160.680.966	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 angka	4.500.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 angka	4.500.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	4.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	4.500.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	1.460.361.836	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Gayamsari	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	2.160.680.966	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.015.430.451	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.015.430.451	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gayamsari)	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gayamsari)	12 Laporan	55.256.443	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gayamsari)	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gayamsari)	12 Laporan	55.256.443	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	12 Laporan	58.452.634	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	12 Laporan	58.452.634	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAH											
KECAMATAN GAYAMSARI											
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambirejo)	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambirejo)	12 Laporan	65.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambirejo)	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambirejo)	12 Laporan	65.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)	Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)	12 Laporan	64.353.318	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)	Kelurahan Siwalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)	12 Laporan	64.353.318	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	12 Laporan	68.662.130	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	12 Laporan	68.662.130	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	12 Laporan	66.100.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	12 Laporan	66.100.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	12 Laporan	67.106.860	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	12 Laporan	67.106.860	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	695.819.130	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Gayamsari	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	695.819.130	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	695.819.130	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	695.819.130	
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	98 %	18.541.296.318	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	98 %	18.541.296.318	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAH											
KECAMATAN GAYAMSARI											
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	9.362.179.795	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	9.362.179.795	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	34.696.710	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	34.696.710	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.198.650.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	1.198.650.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gayamsari)	12 Unit	947.900.050	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gayamsari)	12 Unit	947.900.050	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pandean Lamper)	10 Unit	947.300.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pandean Lamper)	10 Unit	947.300.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambirejo)	10 Unit	950.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambirejo)	10 Unit	950.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	Kelurahan Siwalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Siwalan)	12 Unit	949.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	Kelurahan Siwalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Siwalan)	12 Unit	949.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sawah Besar)	9 unit	946.700.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sawah Besar)	9 unit	946.700.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaligawe)	13 Unit	947.900.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaligawe)	13 Unit	947.900.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	Kelurahan tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakrejo)	11 Unit	1.060.370.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	Kelurahan tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakrejo)	11 Unit	1.060.370.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	7 Pokmas/Ormas	676.511.360	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	7 Pokmas/Ormas	676.511.360	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAH											
KECAMATAN GAYAMSARI											
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	7 Pokmas/Ormas	78.819.860	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	7 Pokmas/Ormas	78.819.860	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	7 Pokmas/Ormas	99.377.920	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	7 Pokmas/Ormas	99.377.920	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	7 Pokmas/Ormas	115.940.255	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	Kelurahan Sambirejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	7 Pokmas/Ormas	115.940.255	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	7 Pokmas/Ormas	105.815.260	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	Kelurahan Siwalan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	7 Pokmas/Ormas	105.815.260	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	7 Pokmas/Ormas	96.166.950	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	7 Pokmas/Ormas	96.166.950	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	7 Pokmas/Ormas	101.516.320	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	7 Pokmas/Ormas	101.516.320	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	7 Pokmas/Ormas	105.515.110	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	Kelurahan tambakrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakrejo)	11 Unit	1.060.370.000	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
URUSAN KEWILAYAH												
KECAMATAN GAYAMSARI												
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 Angka	9.179.116.523	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Lembaga Tingkat Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 Angka	9.179.116.523	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	125.504.963	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kecamatan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	125.504.963	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gayamsari)	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gayamsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.359.929.200	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Gayamsari)	Lembaga (Kelurahan Gayamsari)	Kelurahan Gayamsari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gayamsari)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.359.929.200	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pandean Lamper)	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pandean Lamper)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.990.377.520	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pandean Lamper)	Lembaga (Kelurahan Pandean Lamper)	Kelurahan Pandean Lamper	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pandean Lamper)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.990.377.520	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sambirejo)	Kelurahan sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan sambirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.094.737.680	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Pandean Sambirejo)	Lembaga (Kelurahan Pandean Sambirejo)	Kelurahan sambirejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan sambirejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.094.737.680	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Siwalan)	Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Siwalan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	774.535.600	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Siwalan)	Lembaga (Kelurahan Siwalan)	Kelurahan Siwalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Siwalan)	9 Lembaga Kemasyarakatan	774.535.600	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sawah Besar)	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sawah Besar)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.167.227.940	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Sawah Besar)	Lembaga (Kelurahan Sawah Besar)	Kelurahan Sawah Besar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Sawah Besar)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.167.227.940	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kaligawe)	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaligawe)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.491.753.870	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Kaligawe)	Lembaga (Kelurahan Kaligawe)	Kelurahan Kaligawe	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kaligawe)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.491.753.870	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakrejo)	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.135.774.040	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Tambakrejo)	Lembaga (Kelurahan Tambakrejo)	Kelurahan Tambakrejo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tambakrejo)	9 Lembaga Kemasyarakatan	1.135.774.040	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	39.275.710	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Masyarakat	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	39.275.710	
7.01.04	Program koordinasi ketentrangan dan ketertiban umum	Kecamatan Gayamsari	Persentase penurunan pelanggaran	15 %	25.504.640	Program koordinasi ketentrangan dan ketertiban umum	Kecamatan Gayamsari	Persentase penurunan pelanggaran Ketentrangan dan Ketertiban Umum	15 %	25.504.640		

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAH											
KECAMATAN GAYAMSARI											
			Ketentraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 Angka	25.504.640	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 Angka	25.504.640	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.504.640	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.504.640	
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	76.750.000	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92 %	76.750.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	76.750.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	76.750.000	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Org	76.750.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Org	76.750.000	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kecamatan Gayamsari	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	12.346.553.552	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kecamatan Gayamsari	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	12.346.553.552	

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAH											
KECAMATAN GAYAMSARI											
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %		
			Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %				Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	3.182.830	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	3.182.830	
			Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	454.690	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	454.690	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	454.690	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	454.690	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	454.690	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	454.690	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	454.690	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	454.690	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	454.690	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	454.690	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	454.690	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	454.690	

NO	Rancangan Perubahan RPKD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAH											
KECAMATAN GAYAMSARI											
			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	454.690	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	454.690	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	10.735.742.074	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	10.735.742.074	
			Administrasi Keuangan SKPD	100 %				Administrasi Keuangan SKPD	100 %		
7.01.01.2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bln	10.355.948.004	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bln	10.355.948.004	
7.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	378.430.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	378.430.000	
7.01.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	454.690	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	454.690	
7.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	454.690	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	454.690	
7.01.01.2.01	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	454.690	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	454.690	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	824.048.128	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Gayamsari	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	824.048.128	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.970.780	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.970.780	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	359.361.867	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	359.361.867	

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
URUSAN KEWILAYAH												
KECAMATAN GAYAMSARI												
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	46.926.270	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	46.926.270		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Barang dan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.907.892	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Paket Barang dan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	10.907.892		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.375.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.375.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	103.316.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	103.316.000		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	276.190.319	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	276.190.319		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	45.581.240	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	45.581.240		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	45.581.240	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	45.581.240		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	154.068.010	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	154.068.010		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.786.360	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.786.360		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.281.650	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.281.650		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	583.931.270	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Gayamsari	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	583.931.270		

NO	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN KEWILAYAH											
KECAMATAN GAYAMSARI											
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	95.736.280	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	95.736.280	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	58.194.990	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	58.194.990	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Gayamsari	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN GAYAMSARI
KOTA SEMARANG

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RRPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana

tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;
- Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.

- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupti teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

- 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
 - 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%

- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakat serta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi”

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan;
3. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan;

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar PATEN;
2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif;
3. Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dalam Pemberdayaan Masyarakatserta Penyelenggaraan Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Gayamsari	Angka	92
SASARAN 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang Sesuai Dengan Standar PATEN	Persen	100
SASARAN 2 : Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	98
SASARAN 3 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	85,04
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	92

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Gayamsari memiliki perandalam pencapaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Gayamsari” dan indikator sasaran “Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai dengan standar PATEN, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum dan Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di Kecamatan dan Kelurahan”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
07.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92 %	92 %	92 %	2.028.424.226	2.166.176.896	2.160.680.966	PAD	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 angka	1 angka	8 angka	2.250.000	2.250.000	4.500.000		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000	2.250.000	4.500.000		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	1.338.854.786	1.476.607.456	1.460.361.836		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.338.854.786	1.476.607.456	1.460.361.836		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gayamsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gayamsari)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pandean Lamper)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sambirejo (Kelurahan Sambirejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sambirejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Siwalan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sawah Besar)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kaligawe)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambakrejo)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	100 %	687.319.440	687.319.440	689.224.230		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	687.319.440	687.319.440	689.224.230		
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	98 %	98 %	98 %	19.026.951.848	19.257.710.080	18.421.296.318	PAD	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 angka	80 angka	80 angka	9.676.696.938	9.918.334.370	9.242.179.795		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	36.289.350	34.696.710	34.696.710		
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	9 Unit	9 Unit	7.963.000.000	7.963.000.000	7.947.820.050		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gayamsari)	12 Unit	12 Unit	12 Unit					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pandean Lamper)	10 Unit	10 Unit	10 Unit					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sambirejo)	10 Unit	10 Unit	10 Unit					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Siwalan)	12 Unit	12 Unit	12 Unit					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Sawah Besar)	9 Unit	9 Unit	9 Unit					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kaligawe)	13 Unit	13 Unit	10 Unit					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tambakrejo)	11 Unit	11 Unit	11 Unit					
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas					
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gayamsari)	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas					
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		Kelurahan (Kelurahan Pandean Lamper)								
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sambirejo)	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan(Kelurahan Siwalan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Siwalan)	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Sawah Besar)	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kaligawe)	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tambakrejo)	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas	7 Pokmas/ Ormas					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan Kecamatan	Lembaga Tingkat Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	768 angka	768 angka	768 angka	9.350.254.910	9.339.375.710	9.179.116.523		
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.290.000.000	9.290.000.000	9.139.840.813		
	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan					
	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan					

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan	
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023			
	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Lembaga	Jumlah Lembaga yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan					
	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Lembaga	Jumlah Lembaga yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan					
	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Lembaga	Jumlah Lembaga yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan					
	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Lembaga	Jumlah Lembaga yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan					
	Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Lembaga	Jumlah Lembaga yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan					
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.254.910	49.375.710	39.275.710		
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	koordinasi	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 %	15 %	15 %	18.850.000	18.850.000	25.504.640	PAD	KECAMATAN GAYAMSARI
7.01.04.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Upaya	Jumlah Pelanggaran terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	24 angka	24 angka	20 angka	18.850.000	18.850.000	25.504.640		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	18.850.000	18.850.000	25.504.640		
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah	92 %	92 %	92 %	76.750.000	76.750.000	76.750.000	PAD	KECAMATAN GAYAMSARI

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
		mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	5 Kegiatan	76.750.000	76.750.000	76.750.000		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional	120 Org	120 Org	120 Org	76.750.000	76.750.000	76.750.000		
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota daerah	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100 %	100 %	100 %	11.062.570.154	11.012.184.252	12.353.148.452	PAD	KECAMATAN GAYAMSARI
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100 %	100 %	100 %					
		Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %					
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3.182.830	3.182.830	3.182.830		
		Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen					
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	454.690	454.690	454.690		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.690	454.690	454.690		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.690	454.690	454.690		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.690	454.690	454.690		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.690	454.690	454.690		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	454.690	454.690	454.690		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	454.690	454.690	454.690		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	9.585.143.005	9.585.143.005	10.735.742.074		
		Administrasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	100 %					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bln	65 Orang/Bln	65 Orang/Bln	9.200.848.935	9.200.848.935	10.355.948.004		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	382.930.000	382.930.000	378.430.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	454.690	454.690	454.690		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	454.690	454.690	454.690		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	454.690	454.690	454.690		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100 %	100 %	100 %	699.029.848	680.176.357	840.633.028		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.157.110	10.157.110	14.970.780		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	343.834.579	343.834.579	357.728.997		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	40.912.290	41.495.930	46.926.270		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakanjumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.664.472	10.445.730	10.855.662		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	11.250.000	11.250.000	12.375.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	133.974.000	132.724.000	121.586.000		
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	149.237.397	130.269.008	276.190.319		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	100 %	100 %	38.606.022	25.601.240	35.591.240		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	38.606.022	25.601.240	35.591.240		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 %	100 %	100 %	136.145.280	136.120.440	154.068.010		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	114.000.000	118.993.300	131.786.360		

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023	Renja 2023	APBD TA 2023	Perubahan Renja 2023		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.145.280	17.127.140	22.281.650		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset SKPD	100 %	100 %	100 %	600.463.169	581.960.380	583.931.270		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	12 Unit	114.239.069	95.736.280	95.736.280		
47.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	400.000.000	400.000.000	400.000.000		
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	56.224.100	56.224.100	58.194.990		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000		
JUMLAH						32.213.546.228	32.531.671.228	33.030.785.476		

Sumber : Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, 2023

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Gayamsari Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Gayamsari Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPDP Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gayamsari Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

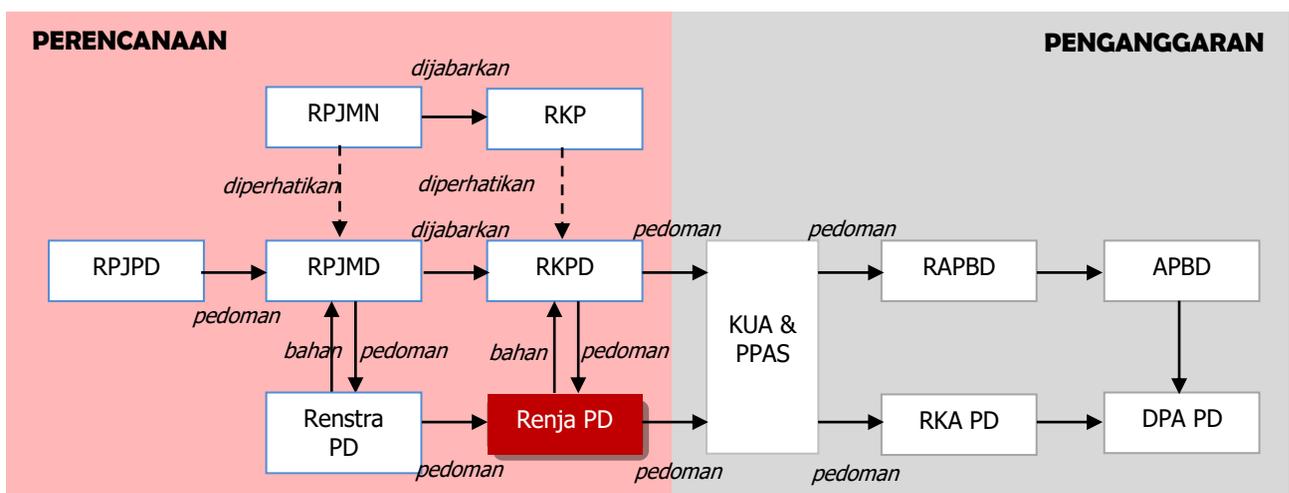
50. KECAMATAN PEDURUNGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

“Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun Renja Perubahan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 - 2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, kemudian dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2023 yang disebabkan oleh:

- 1) Karena dampak pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik yang menyebabkan krisis kesehatan, sosial dan ekonomi secara global, nasional maupun regional yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi;
- 2) Penyesuaian target Pendapatan Daerah di tahun 2022 yang menurun akibat pandemi Covid-19 dan menegangnya kondisi geopolitik, baik itu dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, penyesuaian anggaran Belanja Daerah akibat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran;
- 3) Penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2022; serta
- 4) Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 - k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - m. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
 - n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
 - o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
 - p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);
 - q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;

- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 5);
- s. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 45);
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);
- v. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- w. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- x. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 51).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada

- Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023;
 - c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Dan Capaian Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sampai dengan tahun 2023 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		- Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		- Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	7 Dokumen	70 Persen	7 Dokumen	8.75 Persen
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Renstra yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 dokumen	100 Persen
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 dokumen	100 Persen
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 Persen	1 dokumen	100 Persen
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen				0 Persen
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen LKJiP Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen 100 Persen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN tahun berkenaan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Pemenuhan jasa administrasi perkantoran - Pemenuhan penunjang capaian kinerja	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen	50 Persen 50 Persen
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50 Persen	1 Dokumen	50 Persen
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	2 Paket	2 Paket	100 Persen	2 Paket	100 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 Jenis	25 Jenis	1 Paket	1 Paket	100 Persen	1 Paket	100 Persen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	8 Jenis	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	75 Persen
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	3355 Orang	7603 Orang	12 Laporan	8 laporan	66	8 laporan	75 Persen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	15 Kegiatan	10 Kegiatan	12 Laporan	8 Laporan	66	8 Laporan	75 Persen
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	3 Jenis	4 dokumen	3 dokumen	75	3 dokumen	75 Persen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	100 Persen	100	25 persen	25 persen	25 persen	25 persen
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	6 Unit	2 Unit	33 Persen	2 Unit	40 Persen
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	30 Unit	30 Unit	30 unit	30 unit	100	30 unit	100 Persen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Gedung	2 Gedung	4 unit	4 unit	100	4 unit	100 Persen
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor	3 Jenis	2 Jenis	2 unit	2 unit	100 Persen	2 unit	100 Persen
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	3 Jenis	2Jenis	4 Unit	3 Unit	75 Persen	3 Unit	100 Persen
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase kepuasan masyarakat dlm menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	95 Persen	97.46 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	1 angka	1 Angka	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 dokumen	50 Persen	2 dokumen	50 Persen
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	Persentase Operasional Pelayanan dan	2	2	12 Laporan	6 Laporan	50 Persen	6 Laporan	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemeliharaan Kantor Kecamatan	Kegiatan	Kegiatan					
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan penggaron kidul	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Wetan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogomulyo	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kramas	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Muktiharjo Kidul	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Plamongan Sari	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Gemah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Kidul	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Lor	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Pedurungan Kidul Tengah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
		Persentase Operasional Pelayanan dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan Kalicari	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100 Persen	100 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan di Kecamatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	3 laporan	2 laporan	66 Persen	2 laporan	66 Persen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	95 Persen	98 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	385 Kegiatan	362 Kegiatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	135 Angka	121 Angka	147 kegiatan	6 kegiatan	4.08 Persen	6 kegiatan	50 Persen
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	13 kegiatan	6 kegiatan	46.15 Persen	6 kegiatan	50 Persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Penggaron kidul	8 Kegiatan	3 Kegiatan	8 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik	9	8	11 kegiatan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Gemah	Kegiatan	Kegiatan					
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogomulyo	10 Kegiatan	5 Kegiatan	10 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Muktiharjo kidul	13 Kegiatan	13 Kegiatan	15 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogosari kulon	12 Kegiatan	12 Kegiatan	13 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Kidul	10 Kegiatan	7 Kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Plamongan Sari	12 Kegiatan	6 Kegiatan	14 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Lor	10 Kegiatan	9 Kegiatan	11 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10 Kegiatan	8 Kegiatan	10 kegiatan	-	-	-	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kecamatan dan Kelurahan Pedurungan Tengah							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Palebon	10 Kegiatan	7 Kegiatan	10 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Kalicari	8 Kegiatan	6 Kegiatan	8 kegiatan	-	-	-	-
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan Tlogosari wetan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	12 kegiatan	-	-	-	-
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	25 Kegiatan	40 Kegiatan	4 Pokmas/ Ormas	4 Pokmas/ Ormas	50	4 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penggaron kidul	19 Kegiatan	9 Kegiatan	19 Pokmas/ Ormas	19 Pokmas/ Ormas	50	19 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gemah	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Pokmas/ Ormas	21 Pokmas/ Ormas	50	21 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogomulyo	14 Kegiatan	8 Kegiatan	14 Pokmas/ Ormas	14 Pokmas/ Ormas	50	14 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	27 Kegiatan	13 Kegiatan	27 Pokmas/ Ormas	27 Pokmas/ Ormas	50	27 Pokmas/ Ormas	50 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Kelurahan Muktiharjo Kidul							
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon	20 Kegiatan	20 Kegiatan	20 Pokmas/ Ormas	20 Pokmas/ Ormas	50	20 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Kidul	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Pokmas/ Ormas	16 Pokmas/ Ormas	50	16 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Plamongansari	18 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Pokmas/ Ormas	18 Pokmas/ Ormas	50	18 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Lor	15 Kegiatan	11 Kegiatan	15 Pokmas/ Ormas	15 Pokmas/ Ormas	50	15 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pedurungan Tengah	18 Kegiatan	9 Kegiatan	18 Pokmas/ Ormas	18 Pokmas/ Ormas	50	18 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Palebon	22 Kegiatan	12 Kegiatan	22 Pokmas/ Ormas	22 Pokmas/ Ormas	50	22 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kalicari	16 Kegiatan	4 Kegiatan	16 Pokmas/ Ormas	16 Pokmas/ Ormas	50	16 Pokmas/ Ormas	50 persen
		Jumlah Kegiatan Pembangunan Non-fisik Prioritas Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tlogosari Wetan	19 Kegiatan	9 Kegiatan	19 Pokmas/ Ormas	19 Pokmas/ Ormas	50	19 Pokmas/ Ormas	50 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	100 persen	100 persen	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	50	4 Lembaga Kemasyarakatan	50 persen
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang dilaporkan	8 Jenis	8 Jenis	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50	6 Lembaga Kemasyarakatan	75 persen
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	- Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Kelurahan - Jumlah Kampung tematik	1 Kegiatan 1 Kelurahan	1 Kegiatan 1 Kelurahan	1 laporan	-	-	-	-
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	30 Persen	30 Persen	100	50	50	50	-
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	20 Angka	22 Angka	20 Angka	10 Angka	50 %	10 Angka	50 persen
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	50 persen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Persen	100 Persen	100 persen	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi	4 Kegiatan	2 Kegiatan	12 laporan	6 laporan	50	6 laporan	50 persen

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		kepemudaan							
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	4 Kegiatan	2 Kegiatan	12 laporan	6 laporan	50	6 laporan	50 persen

Sumber: Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2023

Sampai pada triwulan II Tahun 2023 sub kegiatan yang telah tercapai (100%) adalah “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Ada beberapa sub kegiatan rata rata sudah mencapai 500 ersen ini dikarenakan pelaksanaanya segbagian di triwulan III dan IV. Sub kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran yaitu “Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat”, “Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan “Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan” meliputi kecamatan dan kelurahan dan “Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional”.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 setelah mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah serta realokasi anggaran. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	61.631.683.979	24.192.501.600	39,25	53.152.955.286
5.1	BELANJA OPERASI	46.731.133.634	23.454.193.600	50,19	39.277.964.186
5.1.01	Belanja Pegawai	14.973.534.810	8.876.678.502	59,28	14.716.630.201
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.242.139.810	3.906.693.262	62,59	6.605.966.951
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.604.735.226	2.832.879.306	61,52	4.810.299.722
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	415.014.418	267.767.850	64,52	451.363.646
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	418.834.906	273.120.000	65,21	448.070.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	69.727.490	46.260.000	66,34	90.305.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	244.657.476	159.179.160	65,06	269.619.660
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	61400004	59226001	96,46	21924748
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	90.710	36.103	39,80	65.945
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	392.765.220	247.814.516	63,09	474.758.840
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.728.500	5.102.524	58,46	9.889.763
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	26.185.860	15.307.802	58,46	29.669.627
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.177.625.000	4.745.835.240	58,03	7.548.813.250
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.177.625.000	4.745.835.240	58,03	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	0	0,00	0,00	7.548.813.250
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	553.770.000	224.150.000	40,48	561.850.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	553.770.000	224.150.000	40,48	515.050.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0	0,00	0,00	46.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.757.598.824	14.577.515.098	45,90	24.561.333.985
5.1.02.01	Belanja Barang	4.590.224.080	1.667.274.845	36,32	3.583.135.674

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.590.224.080	1.667.274.845	36,32	3.583.135.674
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.804.083.014	1.904.910.129	32,82	2.556.362.211
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.447.743.256	1.835.507.529	33,69	2.442.733.517
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	73.147.360	35.535.300	48,58	67.572.694
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	67.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	214.146.998	33.867.300	15,81	44.206.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.045.400	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	1.850.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	773.338.730	126.285.124	16,33	523.511.100
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	510.316.660	85.370.794	16,73	321.000.100
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	263.022.070	40.914.330	15,56	202.511.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.346.641.000	2.558.420.000	109,02	17.895.255.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.346.641.000	2.558.420.000	109,02	17.895.255.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.243.312.000	8.320.625.000	45,61	3.070.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.243.312.000	8.320.625.000	45,61	3.070.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	46.731.133.634	23.454.193.600	50,19	39.277.964.186
5.2	BELANJA MODAL	14.900.550.345	738.308.000	4,95	13.874.991.100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	556.190.762	307.590.000	55,30	1.251.515.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	131.621.402	126.000.000	95,73	189.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	131.621.402	126.000.000	95,73	189.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	246.714.511	64.500.000	26,14	223.450.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	246.714.511	64.500.000	26,14	114.250.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	0,00	20.000.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	0,00	0,00	89.200.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	0,00	49.880.000

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	0,00	49.880.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.484.880	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	4.484.880	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	173.369.969	117.090.000	67,54	601.095.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	104.104.780	99.340.000	95,42	407.855.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	69.265.189	17.750.000	25,63	193.240.000
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0	0,00	0,00	188.090.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0	0,00	0,00	188.090.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.626.591	24.977.000	6,67	1.544.847.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	374.626.591	24.977.000	6,67	1.544.847.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	374.626.591	24.977.000	6,67	1.544.847.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.969.732.992	405.741.000	2,90	11.078.629.100
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7.120.379.007	198.331.000	2,79	4.074.335.140
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	7.056.799.007	198.331.000	2,81	4.074.335.140
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	63.580.000	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.849.353.985	207.410.000	3,03	7.004.293.960
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.849.353.985	207.410.000	3,03	7.004.293.960
	JUMLAH BELANJA MODAL	14.900.550.345	738.308.000	4,95	13.874.991.100
	JUMLAH BELANJA	61.631.683.979	24.192.501.600	39,25	53.152.955.286

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 5 program, dan 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan pada Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah sebesar Rp 61.631.683.979,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 24.192.501.600,00. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 37.439.182.379,00.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROY EKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023 Tw II	2024	2025	2026	2023
Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan public, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.37 angka	89 angka	90 angka	91 angka	92 angka	93.00 angka	97,46 angka	99,57 angka	-	-	-	-	
Sasaran : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	65.83 angka	67 angka	68 angka	69 angka	70 angka	71 angka	70,31 angka	71.95 angka	-	-	-	-	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	1 angka	-	-	-	-	
	Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan standar PATEN	100	100	100	100	100	100	100	100					
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif	97	97	98	99	100	100	97	-	-	-	-		
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	83,36	83,36	85,04	86,72	88,40	88.60	83,36	85,04	-	-	-	-	
	Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional di kecamatan dan kelurahan	92	92	95	98	100	100	92	95					

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2023

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pedurungan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan **“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”** memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**, target sebesar 88 % dapat tercapai, dengan realisasi sebesar 92,54 % (capaian sebesar 105,2 %).
- b. Sasaran **”Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki satu indikator kinerja yaitu **”NILAI AKIP”** belum dapat mencapai target sebesar 65, dengan realisasi sebesar 0 (capaian sebesar 0%) karena penilaian AKIP dilakukan pada triwulan III.
- c. Sasaran **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Kinerja Pelayanan Publik”** memiliki satu indikator kinerja yaitu **”Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan”** target sebesar 1 angka sudah tercapai, dengan realisasi sebesar 1 angka;
- d. Sasaran **“Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan”** memiliki satu indikator kinerja yaitu **“Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif”** belum dapat mencapai target sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 50% (capaian sebesar 50%).
- e. Sasaran **“Meningkatnya wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan”** memiliki dua indikator kinerja yaitu **Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum”** belum dapat mencapai target sebesar 50%, dengan realisasi sebesar 30% (capaian sebesar 30%) dan indikator **“Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan kelurahan”** belum dapat mencapai target sebesar 40%, dengan realisasi sebesar 20% (capaian sebesar 20%).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Pedurungan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kinerja pelayanan Kecamatan Pedurungan terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pedurungan pada tahun 2023 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai 50% pada Semester I / Triwulan II. Diantaranya adalah kesesuaian program-program Renja baik terhadap Renstra maupun terhadap APBD dimana harus tercapai kesesuaian 100% pada akhir periode Tahun 2023 sebagai perwujudan perencanaan yang ideal.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang sudah memperhatikan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya organisasi/lembaga terkait pengarusutamaan gender serta keterlibatan peserta perempuan dalam Musrenbang, dimana hal ini merupakan upaya mewujudkan perencanaan yang responsif gender.
- c. Terdapat kasus kemiskinan ekstrim di wilayah Kecamatan Pedurungan, walaupun dengan angka yang kecil tetapi perlu terus diupayakan usaha untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan menyalurkan bantuan pangan.
- d. Masih adanya angka stunting yang terdapat di wilayah Kecamatan Pedurungan. Isu tersebut terus diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan memberikan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada anak-anak yang mengalami stunting.
- e. Dibeberapa wilayah Kecamatan Pedurungan ada yang masih terdampak daerah banjir jika musim penghujan meskipun sarana dan prasarana seperti pompa pengendali banjir sudah ada tetapi masih belum dapat berfungsi secara maksimal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah diantaranya:

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP
Belum optimalnya penyusunan dan penerapan SOP dan SP di sebabkan karena belum semua Kasi menyusun SOP. SOP yang ada di Kecamatan Pedurungan hanya SOP One Stop Service pada Kasi Pelayanan Publik. Padahal pada Kasi yang lain harusnya juga menyusun SOP sesuai dengan kegiatan yang dimiliki masing – masing Kasi;
- 2) Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di Kecamatan;
SDM yang kompeten sangat diperlukan dalam lingkungan kompetitif. Individu yang mempunyai kompetensi kerja yang baik tentu akan mudah untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya serta mampu menyesuaikan diri secara baik dengan lingkungannya. Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, kompetensi akan terkait dengan strategi organisasi. Pengertian kompetensi juga dapat dipadukan dengan soft skill, hard skill, social skill dan mental skill. Soft skill menunjukkan intuisi, kepekaan SDM, hard skill mencerminkan pengetahuan dan keterampilan fisik SDM, social skill menunjukkan keterampilan dan hubungan sosial SDM, sementara mental skill menunjukkan mental SDM;
- 3) Belum pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Kurang optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
- 5) Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
- 6) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait lembaga kemasyarakatan;
- 7) Sinergitas dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang belum optimalnya optimal;
- 8) Belum adanya pedoman SOP pelaporan terkait penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 9) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemerintah terkait ketenteraman dan ketertiban umum;

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang khususnya di tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan

- 1) Revolusi Industri 4.0 yang memacu pada inovasi-inovasi teknologi dan pelayanan yang memberikan dampak disruptif atau perubahan fundamental terhadap kehidupan masyarakat. Hal tersebut memberi tantangan baru tak terkecuali layanan birokrasi publik di sektor pemerintahan. Oleh karena itu, manajemen layanan publik di pemerintahan didorong terus untuk melakukan perubahan-perubahan serta inovasi-inovasi di segala bidang untuk merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Jumlah pegawai di wilayah kerja Kecamatan Pedurungan yang tidak seimbang dengan luas wilayah;
- 3) Kualitas SDM yang kurang memadai dengan kebutuhan saat ini;
- 4) Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas;
- 5) Kondisi masyarakat Kecamatan Pedurungan yang heterogen;

b. Peluang

- 1) Digitalisasi Pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 saat ini, telah jelas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25/2009 yang mengatur pada aspek pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat
- 2) Dukungan Pemerintah Kota Semarang atas peningkatan pelayanan dasar masyarakat yang berkualitas dan terjangkau;

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang sebagai berikut:

1. Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Mendekati tahun 2024 sebagai tahun politik, stabilitas sosial politik menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih. Oleh karenanya, kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan diharapkan mampu menjaga kondusivitas wilayah, terutama terkait isu-isu yang biasa berkembang seperti penyebaran berita bohong, hate speech, dan politik identitas yang beresiko dapat memecah belah persatuan di masyarakat.

2. Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM)

Pembentukan Forkopimcam didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Forkopimcam yaitu melaksanakan kebijakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, serta yang terpenting yaitu untuk memelihara stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di tingkat kecamatan

3. Evaluasi program pelayanan akhir pekan

Pelayanan akhir pekan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang pada hari kerja. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih keras agar program tersebut dalam berjalan secara efektif dan efisien, terutama untuk menarik minat masyarakat yang hadir.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Hasil Musrenbang

Di tahun 2023, terdapat tiga jenis program pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam implementasinya, seringkali terdapat usulan kegiatan yang tumpang tindih antara ketiganya, baik dari segi jenis kegiatan maupun peserta. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan dan klasterisasi kegiatan yang lebih terarah agar anggaran pemberdayaan masyarakat dari fasilitasi hasil musrenbang dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				61.569.270.810	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				61.569.270.810	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80 %	17.209.331.934	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pedurungan	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	80 %	17.209.331.934	
			Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %				Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%	100 %		
			Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %				Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%	100 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	24.779.770	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	7 Dokumen	24.779.770	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan	3 Dokumen		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.704.440	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	24.779.770	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	4.449.180	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3 Dokumen	3.884.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	5.617.790	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.704.440	
X.XX.01 .2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	3.988.590	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	2 Dokumen	4.449.180	
X.XX.01 .2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	2.394.290	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	5.617.790	
X.XX.01 .2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.187.520	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	3.988.590	
X.XX.01 .2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.437.960	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.394.290	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	14.981.020.690	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	14.981.020.690	
			- Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen				Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 Dokumen		
X.XX.01 .2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	14.419.764.810	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang	14.419.764.810	
X.XX.01 .2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	553.741.720	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	553.741.720	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	947.760	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	947.760	
X.XX.01 .2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.369.920	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	5.369.920	
X.XX.01 .2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	- Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.196.480	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.196.480	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	636.693.595	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pedurungan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	636.693.595	
X.XX.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	
X.XX.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	230.370.605	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	230.370.605	
X.XX.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.842.640	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.842.640	
X.XX.01 .2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.426.550	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.426.550	
X.XX.01 .2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	90.141.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	90.141.000	
X.XX.01 .2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Laporan	106.956.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	106.956.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			SKPD			SKPD		Konsultasi SKPD			
X.XX.01 .2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	110.956.800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	110.956.800	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	392.413.448	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	392.413.448	
X.XX.01 .2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	392.413.448	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	392.413.448	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	437.629.130	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	437.629.130	
X.XX.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.312.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.312.160	
X.XX.01 .2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	177.316.970	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	177.316.970	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	736.795.301	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pedurungan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	736.795.301	
X.XX.01 .2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	192.081.570	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	192.081.570	

No	Rancangan Akhir RKPД 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
X.XX.01 .2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20.087.140	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20.087.140	
X.XX.01 .2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	374.626.591	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	374.626.591	
X.XX.01 .2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	150.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	3.542.321.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pedurungan	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	92%	3.922.205.594	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	172.400.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 Angka	914.120.384	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	172.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	914.120.384	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.910.935.678	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	1.910.935.678	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	12 Laporan	1.910.935.678	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	12 Laporan	1.910.935.678	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Wilayah Kecamatan		kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)			Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)			
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	100 Laporan			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	12 Laporan		
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	100 Laporan			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Laporan		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	100 Laporan			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogomulyo)	12 Laporan		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	100 Laporan			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	12 Laporan		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	100 Laporan			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	12 Laporan		
		Kelurahan Plamongansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongansari)	100 Laporan			Kelurahan Plamongansari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongansari)	12 Laporan		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Plamongansari)			
		Kelurahan Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	100 Laporan			Kelurahan Gemah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	12 Laporan		
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	100 Laporan			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Laporan		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	100 Laporan			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	12 Laporan		
		Kelurahan Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	100 Laporan			Kelurahan Palebon	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	12 Laporan		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	100 Laporan			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	12 Laporan		
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	100 Laporan			Kelurahan Kalicari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	12 Laporan		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.097.149.532	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pedurungan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	1.097.149.532	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.097.149.532	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	1.097.149.532	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	40.338.273.512	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Pedurungan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	98%	29.165.235.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407 Kegiatan	16.548.584.172	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	407 Kegiatan	17.424.435.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.350.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	49.435.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	13 unit	13.983.982.992	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	13 unit	14.650.000.000	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	8 Unit			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	8 Unit		
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Unit			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	12 Unit		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	10 Unit			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	10 Unit		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
								Tlogomulyo)			
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	13 Unit			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	13 Unit		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	15 Unit			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	15 Unit		
		Kelurahan Plamongansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongansari)	14 Unit			Kelurahan Plamongansari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Plamongansari)	14 Unit		
		Kelurahan Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	11 Unit			Kelurahan Gemah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	11 Unit		
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Unit			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	12 Unit		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	11 Unit			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	11 Unit		
		Kelurahan Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Palebon)	10 Unit			Kelurahan Palebon	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Palebon)	10 Unit		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	10 Unit			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	10 Unit		
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	8 Unit			Kelurahan Kalicari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	8 Unit		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan)	4 Pokmas/Ormas	2.514.251.180	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan)	4 Pokmas/Ormas	2.514.251.180	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	19 Pokmas/Ormas			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Penggaron Kidul)	19 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	19 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	19 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	14 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	14 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	20 Pokmas/Ormas			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	20 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	27 Pokmas/Ormas			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	27 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Plamongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongsari)	18 Pokmas/Ormas			Kelurahan Plamongsari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongsari)	18 Pokmas/Ormas		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Plamongansari)					Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)			
		Kelurahan Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	21 Pokmas/Ormas			Kelurahan Gemah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	21 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	16 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	16 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	15 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	15 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	22 Pokmas/Ormas			Kelurahan Palebon	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	22 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	18 Pokmas/Ormas			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	18 Pokmas/Ormas		
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	16 Pokmas/Ormas			Kelurahan Kalicari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	16 Pokmas/Ormas		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	76 Dokumen	23.731.984.580	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	76 Dokumen	23.731.984.580	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	
		Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Penggaron Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Penggaron Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Penggaron Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tlogosari Wetan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tlogomulyo	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Tlogosari Kulon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Muktiharjo Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Plamongansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongansari)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Plamongansari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongansari)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Gemah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	6 Lembaga Kemasyarakatan		

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pedurungan Kidul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pedurungan Lor	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Palebon	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Pedurungan Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
		Kelurahan Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	6 Lembaga Kemasyarakatan			Kelurahan Kalicari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	6 Lembaga Kemasyarakatan		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	57.704.760	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	57.704.760	
		Kecamatan Pedurungan	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan			Kecamatan Pedurungan	Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	1 Kelurahan		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	50.830.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	15%	50.830.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35 Angka	50.830.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	84 Angka	50.830.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	12 Laporan	50.830.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	15 Laporan	50.830.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kecamatan		Wilayah Kecamatan			Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	50.980.350	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Pedurungan	Persentase Jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	92%	50.980.350	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	50.980.350	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	2 Kegiatan	50.980.350	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	50.980.350	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pedurungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang	50.980.350	

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Untuk tahun 2023 tema yang diangkat dalam RKP adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional. Selain itu RKP Tahun 2023 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023,

dimana tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Pada tahun 2023 kebijakan pembangunan diarahkan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, yang dijabarkan dalam prioritas daerah sebagai berikut:

- PD 1 Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- PD 2 Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)
- PD 3 Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing
- PD 4 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusifitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;

Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru.
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi.
- b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi.
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perizinan.
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing.
 - 2) Pengembangan wisata MICE.
- d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa.
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi.
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan.
 - 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor.
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular.
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan.

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin.
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin.
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin.
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan.
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS.
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif.
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif.
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja.
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja.
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan.
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi.
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP.
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan.
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi.
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat.
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah.
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan.

- 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan.
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama.
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan.
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia.
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas layanan KB.
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas.
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan.
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga.
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM.
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.

4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
- 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga.
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya.
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik.
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota.
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi.
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel.
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang.
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon.
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman.

- 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh.
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak.
 - 5) Pemenuhan lahan pemakaman umum.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan.
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik.
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air.
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air.
 - 3) Pengendalian daya rusak air.
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.

5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah.
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan.
 - 3) Optimalisasi BUMD.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik.
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*.
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan.
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

- 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko.
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

“Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi”

dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yaitu:

1. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pelayanan publik
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan

4. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Nilai AKIP
2. Jumlah inovasi pelayanan public di kecamatan dan kelurahan
3. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif
4. - Persentase Peningkatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Persentasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di kecamatan dan kelurahan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,00
SASARAN : Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	NILAI AKIP	Angka	65,00
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan kinerja pelayanan publik	Jumlah inovasi pelayanan publik angka	Angka	1
Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100,00
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	50,00
	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan	%	40,00

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2016-2021;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara khusus, Kecamatan Pedurungan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”** dan indikator sasaran **“Nilai Kepuasan Masyarakat; Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan; Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif; Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan dan Kelurahan”**;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
7. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01	Urusan Kewilayahan Kecamatan Pedurungan				61.569.270.810	APBD			60.514.018.000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	Kec. Pedurungan	80 %	17.209.331.934	APBD		100 %	18.620.352.000
		Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100%		100 %			100 %		
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%		100 %			100 %		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kec. Pedurungan	7 Dokumen	24.779.770	APBD		7 Dokumen	29.000.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan		3 Dokumen			3 Dokumen		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pedurungan	1 Dokumen	2.704.440	APBD			3.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kec. Pedurungan	2 Dokumen	4.449.180	APBD			3.000.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	5.617.790	APBD			3.000.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kec. Pedurungan	2 Dokumen	3.988.590	APBD			5.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	2.394.290	APBD			5.000.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pedurungan	1 Laporan	2.187.520	APBD			5.000.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pedurungan	2 Laporan	3.437.960	APBD			5.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kec. Pedurungan	100%	14.981.020.690	APBD		100%	16.838.246.358
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD		4 Dokumen			4 Dokumen		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pedurungan	100 Orang	14.419.764.810	APBD			16.173.246.358
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Pedurungan	12 Dokumen	553.741.720	APBD			650.000.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Pedurungan	2 Laporan	947.760	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Pedurungan	2 Laporan	5.369.920	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Pedurungan	1 Dokumen	1.196.480	APBD		5.000.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kec. Pedurungan	100%	636.693.595	APBD	100%	590.000.000	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	4 Paket	25.000.000	APBD		10.000.00000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	230.370.605	APBD		100.000.000	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	51.842.640	APBD		50.000.000	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Paket	21.426.550	APBD		30.000.000	

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pedurungan	25 Laporan	90.141.000	APBD		100.000.000	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pedurungan	12 Laporan	106.956.000	APBD		100.000.000	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	110.956.800	APBD		200.000.000	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Pedurungan	100%	392.413.448	APBD		100%	250.000.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Pedurungan	6 Unit	392.413.448	APBD		250.000.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kec. Pedurungan	100%	437.629.130	APBD		100%	325.000.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	260.312.160	APBD		250.000.000	
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	177.316.970	APBD		75.000.000	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kec. Pedurungan	100%	736.795.301	APBD		100%	588.105.642

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pemerintahan Daerah								
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Pedurungan	29 Unit	192.081.570	APBD			250.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	20.087.140	APBD			100.000.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	374.626.591	APBD			138.105.642
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Pedurungan	4 Unit	150.000.000	APBD			100.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)	Kec. Pedurungan	92%	3.542.321.200	APBD		93%	3.713.566.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Pedurungan	1 Angka	172.400.000	APBD		1 Angka	100.000.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Pedurungan	4 Dokumen	172.400.000	APBD		100.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Pedurungan	100%	1.910.935.678	APBD	100%	2.250.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	12 Laporan	1.910.935.678	APBD		2.250.000.000	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kel. Tlogomulyo	100 Laporan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		(Kelurahan Tlogomulyo)							
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Plamongansari)	Kel. Plamongansari	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	100 Laporan					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	100 Laporan					
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	100 Laporan					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Pedurungan	100%	1.097.149.532	APBD		100%	1.363.566.000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pedurungan	3 Laporan	1.097.149.532	APBD		3 Kegiatan	1.363.566.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kec. Pedurungan	98%	40.338.273.512	APBD		99%	38.155.100.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Pedurungan	407 Kegiatan	16.548.584.172	APBD		502 Kegiatan	37.816.100.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pedurungan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.350.000	APBD		50.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	13 unit	13.983.982.992	APBD		15.976.290.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kel. Penggaron Kidul	8 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	12 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	13 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	15 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	Kel. Plamongansar	14 Unit					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Terbangun (Kelurahan Plamongansari)	i						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	11 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	12 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	11 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	10 Unit					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	8 Unit					
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kecamatan Pedurungan	Kec. Pedurungan	4 Pokmas/ Ormas	2.514.251.180	APBD			21.789.810.000
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan	Kel. Penggaron Kidul	19 Pokmas/ Ormas					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Penggaron Kidul)							
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	19 Pokmas/ Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	14 Pokmas/ Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	20 Pokmas/ Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	27 Pokmas/ Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Plamongansari)	Kel. Plamongansari	18 Pokmas/ Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	21 Pokmas/ Ormas					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	16 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Kel. Pedurungan Lor	15 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	22 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	18 Pokmas/Ormas					
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	16 Pokmas/Ormas					
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya	Kec. Pedurungan	76 Dokumen	23.731.984.580	APBD		18 Dokumen	339.000.000
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kecamatan Pedurungan)	Kec. Pedurungan	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.731.984.580	APBD			175.000.000
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Kel. Penggaron	6 Lembaga					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Diselenggarakan (Kelurahan Penggaron Kidul)	Kidul	Kemasyar akatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Wetan)	Kel. Tlogosari Wetan	6 Lembaga Kemasyar akatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogomulyo)	Kel. Tlogomulyo	6 Lembaga Kemasyar akatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Tlogosari Kulon)	Kel. Tlogosari Kulon	6 Lembaga Kemasyar akatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Muktiharjo Kidul)	Kel. Muktiharjo Kidul	6 Lembaga Kemasyar akatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Plamongansari)	Kel. Plamongansar i	6 Lembaga Kemasyar akatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Gemah)	Kel. Gemah	6 Lembaga Kemasyar akatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Kidul)	Kel. Pedurungan	6 Lembaga Kemasyar akatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Kel. Pedurungan	6 Lembaga					

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Lor)	Lor	Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Palebon)	Kel. Palebon	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Pedurungan Tengah)	Kel. Pedurungan Tengah	6 Lembaga Kemasyarakatan					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Kelurahan Kalicari)	Kel. Kalicari	6 Lembaga Kemasyarakatan					
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pedurungan	1 Laporan	57.704.760	APBD			164.000.000
		Jumlah kampung keluarga berkualitas di kecamatan	Kec. Pedurungan	1 Kelurahan					
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pedurungan	15%	50.830.000	APBD		20%	100.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kec. Pedurungan	35 Angka	50.830.000	APBD	35 Angka		100.000.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan	Kec. Pedurungan	12 Laporan	50.830.000	APBD			100.000.000

No	Rancangan Akhir RKPD 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pedurungan	92%	50.980.350	APBD	95%		25.000.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan	Kec. Pedurungan	2 Kegiatan	50.980.350	APBD	2 Kegiatan		25.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Pedurungan	150 Orang	50.980.350	APBD			25.000.000

Sumber : Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, 2023

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Pedurungan Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2023, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2022 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah akan dilakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 pada triwulan empat tahun 2023.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pedurungan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

51. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Pasal 1 Ayat (11) undang-undang dimaksud menyebutkan “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pula keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu tertuang dalam Pasal 273 ayat (2) yang berbunyi “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum nantinya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

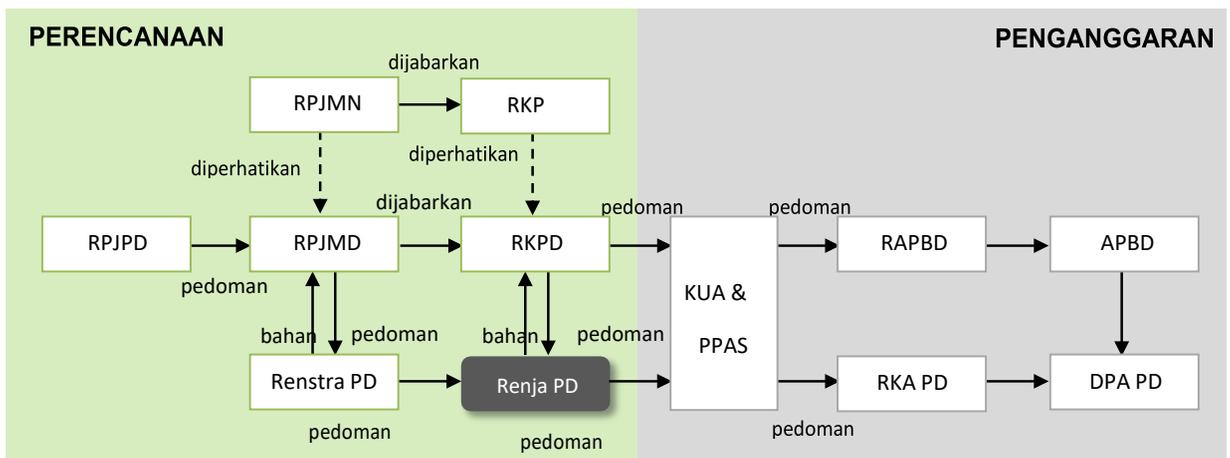
Peraturan selanjutnya yang mengatur mengenai penyusunan renja kerja perangkat daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (30), disebutkan bahwa “Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.”

Proses penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 – dan merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran tahun kedua dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 lalu.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dari tingkat pusat sampai dengan di tiap perangkat daerah dapat digambarkan dalam gambar sebagaimana berikut :



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja OPD

(Sumber: Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014)

Gambar 1. diatas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja perangkat daerah memedomani pada Renstra Perangkat Daerah (PD) Kota Semarang Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja tahun 2023 berpedoman pada Renstra tahun 2021-2026 serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renja perangkat daerah juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaanya.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 disusun berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023. Dengan memperhatikan kondisi aktual pandemi Covid-19, maka rencana kerja pembangunan Kota Semarang pada tahun 2023 diarahkan pada

“Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Daya Saing Daerah yang didukung Potensi Unggulan Daerah”.

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan RKPD Tahun 2023 melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023. Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka pada tahun 2023 perlu disusun perubahan terhadap RKPD tahun 2023 sebagai akibat dari dinamika perekonomian dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian baik dalam pendapatan maupun belanja daerah pada tahun berjalan. Selain itu, perubahan RKPD juga perlu dilakukan untuk menyikapi perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2023. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian hasil sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 juga menjadi dasar untuk penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023. Implikasi yang ditimbulkan dari perubahan tersebut adalah diperlukannya penyesuaian terhadap target pendapatan serta pagu indikatif. Di samping itu, penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II tahun 2023 juga perlu dilakukan. Perubahan dokumen RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R-DPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kebupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender;
33. Peraturan Walikota Semarang Nomor 121 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
34. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
35. Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023;

36. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Nomor 44);
37. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Nomor B/2514/900/VII/2022 Tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di Tahun 2023, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang secara berkesinambungan, dengan berpedoman pada Renstra dan Perubahan RKPD Kota Semarang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 adalah untuk

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2023 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara sistematis dan terorganisir, di antaranta melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (R-DPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023;
- d. Sebagai pedoman untuk menentukan arah dan langkah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada semester kedua tahun 2023 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
- e. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG SEMESTER I TAHUN 2023

Memuat evaluasi pelaksanaan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu dan capaian renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada semester pertama tahun 2023; analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; review terhadap Rancangan Perubahan RKPD; serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Memuat telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023, serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG TAHUN 2023

Memuat rencana kerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan dala Renja dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG SEMESTER
PERTAMA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Semester Pertama Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Kualitas penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan maupun permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian di semester pertama tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun 2023.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Semester Pertama Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan Kedua
Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Lembar : 1 dari 14 halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
08.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8 0101	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30% (150%/5)	30%
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30% (150%/5)	30%
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30% (150%/5)	30%
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30% (150%/5)	30%
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	40 dok	8 dok	11 dok	3 dok	27,27%	11 dok	27,5%
02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan	11 dok	2 dok	2 dok	1 dok	50%	3 dok	27,5%
02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	10 = (9/4)	1
02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	20%
02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	20%
02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	20%
02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	2 dok	40%
02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	2 dok	40%
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	1100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30% (150%/5)	30%
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	20 dok	4 dok	4 dok	2 dok	50%	6 dok	30%
02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30% (150%/5)	30%
02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30% (150%/5)	30%
02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	1 dok	20%
02.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	2 dok	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
02.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0%	20%	1 dok
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30% (150%/5)	30%
02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	275 orang	49 Orang	55 orang	55 orang	100%	104 orang	37,81%
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30% (150%/5)	30%
02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50 jenis	10 Jenis	10 Jenis	5 Jenis	50%	15 jenis	30%
02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	50%	15 jenis	30%
02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 jenis	20 jenis	20 jenis	10 Jenis	50%	30 jenis	30%
02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 jenis	5 jenis	5 jenis	2 Jenis	40%	7 jenis	28%
02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	140 jenis	0 jenis	10 jenis	0 jenis	0%	0 jenis	0%
02.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	5000 orang	1000 Orang	1000 Orang	600 orang	60%	1600 orang	32%
02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	500 kegiatan	100 Kegiatan	100 Kegiatan	60 kegiatan	60%	160 kegiatan	32%
02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	25 jenis	5 Jenis	5 Jenis	0 jenis	0%	5 jenis	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30%	100%
02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	10 jenis	2 Jenis	2 Jenis	0 jenis	0%	2 jenis	20%
02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 jenis	2 Jenis	2 Jenis	0 jenis	0%	2 jenis	20%
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30%	100%
02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30%	100%
02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30%	100%
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100% (500%/5)	20% (100%/5)	20% (100%/5)	10% (50%/5)	50%	30%	100%
02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2unit	40%
02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	110 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	44 unit	40%
02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	50 Unit	10 Unit	10 Unit	10 unit	100%	20 unit	20%
02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	250 Unit	50 Unit	50 Unit	20 unit	40%	70 unit	28%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
08.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pengamalan Pancasila	2.4 Indeks	3.20 Indeks	2 indeks	3.20 Indeks	160%	3.2 indeks	133.33%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota Semarang selama satu tahun	1 Kejadian	3 Kejadian	2 Kejadian	0 Kejadian	200%	3 Kejadian	0%
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	270 orang	0 Orang	50 orang	0 Orang	0%	0 orang	0 %
		Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	455 orang	450 Orang	120 orang	40 Orang	33.33%	490 orang	107,69%
		Jumlah Peserta Event Pembauran Kebangsaan	420 orang	25 Orang	70 orang	0 Orang	0%	45 orang	10,71%
		Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	475 orang	75 Orang	900 orang	900 Orang	100%	975 orang	205.26%
		Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	265 orang	424 Orang	120 orang	0 Orang	0%	424 orang	160%
		Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	265 orang	0 Orang	50 orang	0 Orang	0%	0 orang	0,00%
		Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	165 orang	350 Orang	120 orang	75 Orang	150%	425 orang	257,57%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
02.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	46 Kali	0 Kali	5 kali	0 Kali	0%	0 kali	0,00%
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	240 Kali	5 Kali	6 kali	3 Kali	60%	8 kali	3,33%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kampung Tematik Pancasila	22 Lokasi	16 Lokasi	3 lokasi	0 Kali	0%	16 lokasi	72,72%
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	2300 Orang	0 Orang	500 orang	0 Orang	0%	0 orang	0%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	30 Forum	1 Forum	5 Forum	1 Forum	20%	2 Forum	9,09%
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	930 orang	165 Orang	180 orang	55 Orang	30,55%	220 orang	23,65%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Pengukuran Indeks Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	5 kali	1 Kali	1 kali	0 Kali	0%	1 kali	20,00%
		Jumlah Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	5 kali	1 Kali	1 kali	0 Kali	0%	1 kali	20,00%
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	60 dokumen	0 dokumen	3 dok	0 dok	0%	0 dok	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	70 angka indeks	98.20 Indeks	64.00 angka indeks	98.20 Indeks	153.43%	98.20 Indeks	140,28%%
2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	32.500 laporan dan usulan	6.453 laporan dan usulan	6000 laporan dan usulan	2.994 laporan dan usulan	49.90%	9447 laporan dan usulan	29.07%
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	70%	-	-	-	-	-	-
2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	10 kali	0 Kal	0 Kali	0 Kali	0 %	0 Kali	0 %
		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	15 konten	2 Konten	5 Konten	3 Konten	60%	2 Konten	13,33%
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	44 konten	0 Konten	10 Konten	0 Konten	0 %	0 Konten	0 %
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	96 paket	0 Paket	20 Paket	0 Paket	0 %	0 Paket	0 %
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	2450 orang	1387 Orang	600 orang	680 Orang	113,33%	2067 orang	34,38%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	280 orang	0 Orang	70 orang	0 Orang	0%	0 Orang	0%
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	0%	0%	100%	100%	100%	-	-
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	0%	0%	100%	0%	0%	-	-
2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	45%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%	-	0%	0%	0%	0%	0,00%
2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah peserta bimtek pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik	215 orang	40 Orang	45 orang	0 Orang	0%	45 orang	20,93%
		jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	175 orang	25 Orang	36 orang	24 orang	66,66%	49 orang	28%
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	30 event	-	10 event	0 event	0 event	0 event	0 event

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	5 kali	1 Kali	1 kali	0 kali	0%	1 kali	20,00%
		Jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	42 dokumen	12 Dokumen	12 dok	6 dok	75%	18 dok	42,86%
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	580 dokumen	100 Dokumen	120 dok	31 dok	31%	131 dok	22,58%
		Jumlah Monitoring Fasilitas Pemilu/Pemilukada	240 dokumen	0 dok	0 dok	0 dok	0%	0 dok	0,00%
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	60 indeks	63,81 Indeks	57 Indeks	63,81 Indeks	111,94%	63,81 Indeks	106,35%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Ormas Aktif	36%	52.58%	34%	52.58%	154.64%	52.58%	146.05%
02.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	22 ormas	1 Ormas	6 ormas	5 ormas	83,33%	6 ormas	27,27%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	54 ormas	12 ormas	10 Ormas	8 Ormas	80%	20 ormas	37,04%
		jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	9 ormas	0 Ormas	2 Ormas	0 Ormas	0%	0 ormas	0%
		jumlah peserta ormas award	42 ormas	30 Ormas				30 ormas	71,43%
		Jumlah peserta ormas expo	20 ormas	-	30 ormas	0 ormas			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
02.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	40 orang	100 Orang	40 Orang	0 Orang	0%	100 orang	250%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	430 orang	50 Orang	90 Orang	115 Orang	127,77%	165 orang	38,37%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	655 dok	88 Dok	120 Dok	52 Dok	33,33%	114 dok	2 1.37%
		Jumlah pengukuran indeks kinerja Ormas dan jumlah peserta seminar Indeks kinerja Ormas	70 ormas	61 Ormas	15 Ormas	0 Ormas	0%	87.14 ormas	14,29%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	72 indeks	80,04 Indeks	71 Indeks	80,04 Indeks	112,73%	80,04 Indeks	97,22%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kejadian	0 Kejadian	2 Kejadian	0 Kejadian	200%	0 Kejadian	200%
02.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	350 orang	150 orang	150 orang	40 orang	26.66%	190 orang	54.28%
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	950 orang	690 orang	200 oang	720 orang	360%	1410 orang	148.42%
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	640 orang	615 orang	200 Orang	0 Orang	0%	615 orang	96.09%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	22 konten	5 konten	6 konten	0 konten	0%	5 konten	22.72%
		Jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	15 konten	0 konten	3 konten	0 konten	0%	0 konten	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	40 dokumen	5 dokumen	12 dok	2 dok	16,67%	7 dok	17,5%
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	37 kali	32 Kali	9 Kali	0 Kali	0%	32 kali	86,49%
		jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	16 organs	6 organsasi	4 organs	6 organs	150%	12 organs	75%
		jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	550 orang	50 orang	50 orang	0 orang	0%	50 orang	9,09%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah penelitian pengukuran indeks kerukunan umat beragama	5 kali	1 Kali	1 kali	0 kali	0%	1 kali	20,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	85%	81%	82%	81%	98,78%	81%	95.29%
02.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan	21 kejadian	5 Kejadian	24 Kejadian	0 Kejadian	200%	5 Kejadian	179,16%
02.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	126 kali	18 Kali	18 kali	4 kali	22,22%	22 kali	22,46%
		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	510 orang	0 Orang	60 orang	0 orang	0%	0 orang	0%
		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	400 orang	0 Orang	50 orang	0 orang	0%	0 orang	0%
		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100%	0 %	100%	0%	0%	0%	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (ouput)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Triwulan Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10 = (9/4)
02.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	7 Kelompok	0 Kelompok	1 Kelompok	0 Kelompok	0%	0 Kelompok	0%
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	15 Konten	0 konten	3 konten	0 konten	0%	0 konten	0%
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	144 Kali	18 Kali	24 Kali	4 kali	16,66%	22 Kali	15,27%
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	405 orang	223 Orang		-	-	0 Kali	0,00%
02.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Situasi Daerah	1825 Dokumen	365 dokumen	365 dok	184 dok	50,41%	549 dok	30,08%
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	78 kali	24 Kali	12 kali	6 kali	50%	30 kali	38,46%
02.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	78 kali	6 Kali	12 kali	6 kali	50%	12 kali	15,38%

Dari tabel 2.7 diatas, evaluasi hasil pelaksanaan renja triwulan II tahun 2023 dan perkiraan capaian target renstra tahun 2021-2026 sampai dengan triwulan II tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat disampaikan bahwa “perkiraan realisasi capaian renstra s/d tahun 2023” di tingkat sub kegiatan bervariasi mengingat prioritas pembangunan di tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan partisipasi politik pada pesta demokrasi di tahun 2024 – baik pemilu maupun pilkada. Sedangkan capaian masing-masing indikator program dan kegiatan memang tergolong tinggi mengingat dasar yang digunakan untuk menetapkan target indikator program dan kegiatan adalah dinamika capaian di tahun-tahun sebelumnya – baik capaian indikator serupa di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi.

a. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 2.
Realisasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik s/d Triwulan Kedua Tahun 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSEN TASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
5	BELANJA DAERAH	Rp 52,867,882,876	Rp 13,650,641,385	25.82	Rp 39,217,241,491
5.1	BELANJA OPERASI	Rp 52,769,163,456	Rp 13,634,341,385	25.84	Rp 39,134,822,071
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 7,826,818,580	Rp 3,266,946,393	41.74	Rp 4,559,872,187
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp 5,091,365,876	Rp 2,619,929,992	51.46	Rp 2,471,435,884
5.1.05	Belanja Hibah	Rp 39,850,979,000	Rp 7,747,465,000	19.44	Rp 32,103,514,000
5.2	BELANJA MODAL	Rp 98,719,420	Rp 16,300,000	16.51	Rp 82,419,420
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 431,140	Rp -	0.00	Rp 431,140
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 98,288,280	Rp 16,300,000	16.58	Rp 81,988,280
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Rp 52,867,882,876	Rp 13,650,641,385	25.82	Rp 39,217,241,491
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6,087,093,876	Rp 2,988,694,090	49.10	Rp 3,098,399,786
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12,103,000	Rp 660,800	5.46	Rp 11,442,200
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 847,000	Rp -	0.00	Rp 847,000
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3,269,000	Rp -	0.00	Rp 3,269,000
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 3,219,000	Rp -	0.00	Rp 3,219,000
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp 1,611,000	Rp 570,800	35.43	Rp 1,040,200

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSEN TASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 1,962,000	Rp -	0.00	Rp 1,962,000
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 639,000	Rp 30,000	4.69	Rp 609,000
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 556,000	Rp 60,000	10.79	Rp 496,000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5,094,162,876	Rp 2,620,145,992	51.43	Rp 2,474,016,884
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4,824,045,876	Rp 2,486,459,992	51.54	Rp 2,337,585,884
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 267,320,000	Rp 133,470,000	49.93	Rp 133,850,000
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 815,000	Rp 216,000	26.50	Rp 599,000
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 1,582,000	Rp -	0.00	Rp 1,582,000
8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 400,000	Rp -	0.00	Rp 400,000
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 26,075,000	Rp 13,089,800	50.20	Rp 12,985,200
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 26,075,000	Rp 13,089,800	50.20	Rp 12,985,200
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 454,147,000	Rp 157,590,529	34.70	Rp 296,556,471
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10,015,000	Rp 1,125,000	11.23	Rp 8,890,000
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14,984,000	Rp 6,107,900	40.76	Rp 8,876,100
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 55,053,000	Rp 15,753,000	28.61	Rp 39,300,000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 10,554,000	Rp 1,542,000	14.61	Rp 9,012,000
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 432,000	Rp -	0.00	Rp 432,000
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 74,832,000	Rp 22,455,960	30.01	Rp 52,376,040
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 214,005,000	Rp 94,306,669	44.07	Rp 119,698,331
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 74,272,000	Rp 16,300,000	21.95	Rp 57,972,000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 24,523,000	Rp -	0.00	Rp 24,523,000
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp 19,523,000	Rp -	0.00	Rp 19,523,000
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5,000,000	Rp -	0.00	Rp 5,000,000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 156,103,000	Rp 59,132,000	37.88	Rp 96,971,000
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 14,503,000	Rp 4,040,000	27.86	Rp 10,463,000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 141,600,000	Rp 55,092,000	38.91	Rp 86,508,000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 319,980,000	Rp 138,074,969	43.15	Rp 181,905,031
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp 36,319,000	Rp 10,066,000	27.72	Rp 26,253,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSEN TASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 251,300,000	Rp 119,078,969	47.39	Rp 132,221,031
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Rp 6,750,000	Rp 2,225,000	32.96	Rp 4,525,000
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25,611,000	Rp 6,705,000	26.18	Rp 18,906,000
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1,523,554,000	Rp 705,301,800	46.29	Rp 818,252,200
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 1,523,554,000	Rp 705,301,800	46.29	Rp 818,252,200
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 889,474,000	Rp 608,575,400	68.42	Rp 280,898,600
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 113,000	Rp -	0.00	Rp 113,000
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 544,922,000	Rp 78,446,400	14.40	Rp 466,475,600
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 69,879,000	Rp 18,280,000	26.16	Rp 51,599,000
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp 19,166,000	Rp -	0.00	Rp 19,166,000
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 36,895,513,000	Rp 4,831,360,427	13.09	Rp 32,064,152,573
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Rp 36,895,513,000	Rp 4,831,360,427	13.09	Rp 32,064,152,573

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSEN TASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 317,690,000	Rp 265,085,000	83.44	Rp 52,605,000
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 35,733,853,000	Rp 4,222,805,000	11.82	Rp 31,511,048,000
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 610,882,000	Rp 269,231,200	44.07	Rp 341,650,800
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp 207,091,000	Rp 74,239,227	35.85	Rp 132,851,773
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp 1,717,684,000	Rp 910,214,454	52.99	Rp 807,469,546
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 1,717,684,000	Rp 910,214,454	52.99	Rp 807,469,546
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 852,204,000	Rp 760,809,227	89.28	Rp 91,394,773
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 500,000,000	Rp 2,000,000	0.40	Rp 498,000,000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 205,500,000	Rp 92,216,000	44.87	Rp 113,284,000

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSEN TASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp 159,980,000	Rp 55,189,227	34.50	Rp 104,790,773
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp 3,674,620,000	Rp 3,102,765,954	84.44	Rp 571,854,046
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp 3,674,620,000	Rp 3,102,765,954	84.44	Rp 571,854,046
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 280,191,000	Rp 210,274,000	75.05	Rp 69,917,000
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 114,980,000	Rp 34,739,227	30.21	Rp 80,240,773
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp 3,279,449,000	Rp 2,857,752,727	87.14	Rp 421,696,273
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp 2,969,418,000	Rp 1,112,304,660	37.46	Rp 1,857,113,340
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp 2,969,418,000	Rp 1,112,304,660	37.46	Rp 1,857,113,340
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 807,723,000	Rp 446,719,480	55.31	Rp 361,003,520
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 383,532,000	Rp 105,817,680	27.59	Rp 277,714,320

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D TW II	PERSEN TASE (%)	SISA PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(3-4)
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp 173,565,000	Rp 69,667,500	40.14	Rp 103,897,500
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,604,598,000	Rp 490,100,000	30.54	Rp 1,114,498,000
TOTAL		Rp 52,867,882,876	Rp 13,650,641,385	25.82	Rp 39,217,241,491

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 6 program, dan 12 kegiatan dan 50 sub kegiatan pada OPD kota Semarang adalah sebesar Rp. 52.867.882.876,-. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp 13.650.641.385,- atau 25.82%. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 39.217.241.491,-. Sisa anggaran terbesar adalah anggaran guna dukungan terhadap penyelenggara pilkada 2024, yaitu hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Semarang sebesar Rp 31.500.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) yang memang secara peraturan baru boleh dianggarkan paling cepat satu bulan sebelum tahapan pilkada dimulai - yaitu pada triwulan keempat di tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan sub unsur dari urusan Pemerintahan Umum sebagaimana tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2. 3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi	Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Indeks Demokrasi	-	v	72.20	72.40	72.80	73.20	73.60	95.35	72.40	72.80	73.20	73.60	Capaian Indeks Demokrasi di Kota Semarang s/d triwulan kedua tahun 2023 masih mendasarkan pada hasil pengukuran di akhir tahun 2022, yaitu sebesar 95.35 indeks
2.	Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK)	-	v	73.00	73.50	74.00	74.50	75.0	82.13	73.50	74.00	74.50	75.0	Capaian Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) di Kota Semarang s/d triwulan kedua tahun 2023 masih mendasarkan pada hasil pengukuran di akhir tahun 2022, yaitu sebesar 82.13 indeks

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang s/d triwulan kedua tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang memiliki tujuan **“meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”** dengan indikator tujuan adalah **“Indeks Demokrasi”**. Capaian Indeks Demokrasi di Kota Semarang s/d triwulan kedua tahun 2023 masih berdasarkan pada hasil pengukuran di akhir tahun 2022, yaitu sebesar 95.35 indeks
- b. Adapun sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah **Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan** dengan indikator sasaran **“Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan”** (selanjutnya disebut IP2WK). Capaian Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP2WK) di Kota Semarang s/d triwulan kedua tahun 2023 masih berdasarkan pada hasil pengukuran di akhir tahun 2022, yaitu sebesar 82.13 indeks.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

- 1) Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat
 - (a) Perlunya upaya-upaya kreatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2024 di tengah-tengah kondisi paska pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi;
 - (b) Perlunya upaya peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh rendahnya persentase keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu 30% dari keseluruhan calon legislatif (caleg). Hal itu berimbas pada partai politik yang tidak mengajukan 30% calon perempuan di masing-masing daerah pemilihan (dapil) – dengan ketentuan tambahan setiap tiga caleg laki-laki maka ada satu orang caleg perempuan – maka akan gagal pada dapil tersebut. Dengan kewajiban tersebut pada pemilu tahun 2014 dan pemilu 2019 telah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pemilu. Tapi sayangnya, jumlah keterwakilan atau keterpilihan perempuan dalam lembaga legislatif di Kota Semarang malah makin menurun. Jika pada tahun 2014-2018 ada 11 orang atau 22% anggota legislatif perempuan, pada tahun 2019-2024

jumlahnya menurun, yaitu 10 orang atau 20% anggota legislatif perempuan.

- (c) Perlunya dilakukan upaya-upaya strategis dalam menanggulangi peredaran narkoba dan zat aditif lainnya di Kota Semarang mengingat Kota Semarang tergolong peringkat pertama kategori daerah rawan (bahaya) narkoba se-Jawa Tengah. Upaya ini tentunya membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh *stakeholder* terkait.
 - (d) Peningkatan kemampuan analisa intelijen strategis untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masyarakat perlu terus dikembangkan;
 - (e) Perlunya diambil tindakan untuk mengantisipasi tindak penolakan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu;
 - (f) Perlunya pengambilan kebijakan strategis untuk mengantisipasi kemunculan aksi-aksi yang dilatarbelakangi oleh ideologi non-Pancasila;
 - (g) Kenakalan remaja yang makin mengarah pada aksi kriminalitas membutuhkan intervensi yang lebih inovatif;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Pandemi covid-19 yang melanda sepanjang tahun 2021, menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2022, antara lain :

1. Dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah dan mengantisipasi munculnya konflik sosial, kerawanan sosial, ataupun disintegrasi bangsa maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang perlu melakukan upaya-upaya sosialisasi untuk meng-counter isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat. Kondisi pandemi berimplikasi pada pembatasan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berwujud tatap muka atau mengumpulkan banyak orang sehingga dibutuhkan upaya-upaya inovatif untuk tetap dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi;
2. Munculnya kembali aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Orang Asli Papua yang mengatasnamakan dari kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) KK Semarang dan Hipmapas (Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Papua Semarang). Adapun isu yang

selalu diangkat dalam setiap aksi unjuk rasa dari orang asli Papua yang mengatasnamakan pelajar dan mahasiswa Papua adalah sebagai berikut:

- a) Adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua;
 - b) Menolak New York Agreement yang ditandatangani Indonesia dan Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962, karena perjanjian itu dinilai menjadi awal pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua;
 - c) Menuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri (Referendum);
 - d) Menganggap Republik Indonesia saat ini sedang menjajah Papua;
 - e) Sering membawa simbol mirip dengan bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka).
3. Munculnya aksi penolakan masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok syi'ah apabila kelompok tersebut melaksanakan kegiatan di luar kelompoknya;
 4. Maraknya kembali kejadian tawuran antar pelajar Kota Semarang;
 5. Partisipasi kaum perempuan dalam penyelenggaraan umum, yaitu perempuan sebagai pemilih, tergolong tinggi, yaitu mencapai angka 83.76% pada pemilihan umum anggota legislatif lalu. Namun sayangnya, partisipasi aktif kaum perempuan – yaitu perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif – justru hanya 39.53% dari keseluruhan calon legislatif.
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB

dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, **nilai investasi yang semakin besar**, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Meningkatnya nilai investasi berkaitan erat dengan kondisi keamanan dan ketentraman wilayah. Kondisi keamanan yang terpelihara mampu menarik minat investor untuk menginvestasikan sumber daya yang dimiliki ke Kota Semarang. Hal ini berdampak langsung pada pembangunan Kota Semarang secara keseluruhan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan warga Kota Semarang dengan terbukanya peluang di dunia kerja serta terpenuhinya sumber-sumber kebutuhan.

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

- a) Tuntutan perubahan pola pelayanan ke masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19;
- b) Ancaman peningkatan aksi intoleran terhadap kelompok tertentu;
- c) Berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
- d) Kenakalan remaja yang kian mengarah pada aksi kriminalitas;
- e) Peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam pemilihan umum anggota legislatif;
- f) Kecenderungan penurunan minat untuk berpartisipasi pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang diakibatkan oleh kondisi perekonomian yang belum stabil akibat pandemi Covid-19.

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a) Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Semarang untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan instansi vertikal di daerah dalam mendukung upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah Kota Semarang;
- c) Jaringan komunikasi dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur negara di tingkat kecamatan untuk menangani konflik sosial yang berkembang;
- d) Media sosial yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat digunakan sebagai media sosialisasi, baik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai aksi kriminalitas di wilayah

masing-masing, meng-counter informasi *hoax* yang beredar di masyarakat, maupun sosialisasi informasi yang berkaitan dengan Pandemi COVID-19.

- e) Menyusun inovasi pelayanan dengan penggunaan media sosial untuk memperlancar pelaksanaan tugas maupun menjalankan tugas pokok dan fungsi.

- 5) Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2023 :

a) Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya upaya-upaya kreatif untuk mendorong partisipasi pemilih pada pemilihan umum 2024 pada kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19;
2. Perlunya mengintensifkan sinergi dengan partai politik untuk mendorong partisipasi aktif kaum perempuan;
3. Perlunya peningkatan pendidikan politik dan kesadaran kebangsaan pada generasi muda dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik secara masif kepada generasi muda;
4. Perlunya tindakan penanggulangan kenakalan remaja yang mengarah pada bibit-bibit kriminalitas dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendorong generasi muda berkompetisi secara sehat dan kreatif serta untuk menyalurkan hobi dan energi generasi muda.

b) Catatan Strategis

Catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di tahun 2023 dapat disampaikan sbb:

1. Perubahan pola pelayanan selama masa pandemi – dari tatap muka menjadi virtual. Oleh karena itu, fasilitas maupun kemampuan aparatur perlu dipersiapkan sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami kendala yang signifikan;
2. Perlunya melibatkan pemangku kewilayahan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat wilayah;

3. Perlunya peningkatan pelibatan stakeholder terkait dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun ke dua dari pelaksanaan RPJMD, serta RKP Tahun 2023. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023 adalah **“Perwujudan Pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing daerah yang didukung potensi unggulan daerah ”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1: Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif dan berkelanjutan;
- b. Prioritas Daerah 2: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- c. Prioritas Daerah 3: Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif dan produktif;
- d. Prioritas Daerah 4: Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar;
- e. Prioritas Daerah 5: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien dan inovatif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor.
 - 2) Pengembangan kewirausahaan baru
 - 3) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pelaksanaan promosi investasi
 - 2) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, melalui upaya-

upaya:

- 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
- 2) Pengembangan wisata MICE

d. Peningkatan kualitas perdagangan dan jasa, melalui upaya - upaya:

- 1) Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa
- 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
- 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
- 4) Peningkatan nilai dan produk ekspor

e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), melalui upaya - upaya:

- 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
- 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan
- 3) Penguatan ketahanan pangan

2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:

a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
- 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
- 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
- 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:

- 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
- 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS

d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya - upaya:

- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
 - 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessible, melalui upaya-upaya:
- 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat

- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan
 - 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
- 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
 - a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan, melalui upaya- upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga
 - 3) Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
 - 4) Pengembangan kawasan strategis cagar budaya
 - 5) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan, melalui upaya – upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal

terintegrasi

- 3) Rintisan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Peningkatan sarana prasarana angkutan barang
 - 5) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang rendah karbon
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan dan berkelanjutan
 - 2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan ruang publik
 - 3) Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - 4) Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu, melalui upaya-upaya:
- 1) Konservasi sumber daya air
 - 2) Pendayagunaan sumber daya air
 - 3) Pengendalian daya rusak air
- f. Penguatan ketahanan bencana, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
 - 2) Peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-

upaya:

- 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi barang milik daerah
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan
 - 3) Optimalisasi BUMD
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
- 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung *decision making system*
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- c. Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas kelima, yaitu **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”**. Namun memiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap memiliki kewajiban dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama ataupun target - target lainnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 4
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Lembar : 1 dari 26 halaman

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					62.255.402.920					62.255.402.920	
8 01 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					62.255.402.920					62.255.402.920	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	5.880.814.920	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Semarang	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	5.880.814.920		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			
		Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	100%			
		Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%			Kota Semarang	Persentase peningkatan kemampuan ASN	100%			
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	7.635.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	7.635.000		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	180.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	180.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen perencanaan	2 dok		
		Kota Semarang	Jumlah dokumen RTP	1 dok			Kota Semarang	Jumlah dokumen RTP	1 dok		
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	2.713.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	2.713.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok		
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.651.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	2.651.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dok		
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	603.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	603.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.238.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1.238.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 dok		
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	99.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	99.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok		
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	151.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	151.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	1 dok		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	4.879.762.333	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	4.879.762.333	
		Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok			Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	4 dok		
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	4.609.694.333	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	4.609.694.333	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%			Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%		
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	268.290.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	268.290.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%			Kota Semarang	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%		
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	494.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	494.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok			Kota Semarang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dok		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 dok	1.086.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 dok	1.086.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan keuangan semesteran	1 dok		
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	198.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	198.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok		
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	21.802.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	21.802.000	
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	21.802.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 orang	21.802.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55 orang			Kota Semarang	Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	55 orang		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	480.373.587	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	480.373.587	
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.120.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.120.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis			Kota Semarang	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis		
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.984.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	14.984.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis			Kota Semarang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis		
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.558.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.558.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis			Kota Semarang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis		
2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.553.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.553.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Jenis			Kota Semarang	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Jenis		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dok	0	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	100 buku			Kota Semarang	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	0 buku		
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	85.040.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	85.040.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang			Kota Semarang	Jumlah tamu yang berkunjung	1000 orang		
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	245.846.587	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	245.846.587	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan			Kota Semarang	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 kegiatan		
2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 dok	74.272.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 dok	74.272.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	5 Jenis			Kota Semarang	Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	3 Jenis		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	24.523.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	24.523.000	
2.07 05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	19.523.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	19.523.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	3 Jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	1 Jenis		
2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 jenis			Kota Semarang	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 jenis		
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	148.253.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	148.253.000	
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.503.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.503.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 persen			Kota Semarang	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	100 persen		
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	133.750.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	133.750.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100 persen			Kota Semarang	Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	100 persen		

No	Rancangan Perubahan RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	318.466.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	100%	318.466.000	
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.319.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.319.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit			Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	251.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	251.300.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit			Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	22 Unit		
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	5.236.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	5.236.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit			Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Mebel	10 Unit		
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	25.611.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	25.611.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit			Kota Semarang	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	50 unit		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.10 indeks	2.070.716.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Indeks Pengamalan Pancasila	2.10 indeks	2.070.716.000	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Ke	2.070.716.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	2 Kej	2.070.716.000	
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	18 Dok	860.032.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	18 Dok	860.032.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	900 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara	900 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	120 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	40 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	0 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	0 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	0 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award	0 orang		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	70 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda	70 orang		
		Kota Semarang	Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	0 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta event pembauran kebangsaan	0 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	150 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	150 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Hibah yang disalurkan	1 organ			Kota Semarang	Jumlah Hibah yang disalurkan	1 organ		
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 dokumen	59.000	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 dokumen	59.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	30 Kali			Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	30 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	0 Kali			Kota Semarang	Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	0 Kali		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3140 orang	1.110.380.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3140 orang	1.110.380.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah Kampung Tematik Pancasila	3 Lokasi			Kota Semarang	jumlah Kampung Tematik Pancasila	3 Lokasi		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	500 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Sosialisasi Bela Negara	480 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Sosialisasi Bela Negara	480 orang		
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	165 orang	57.627.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	165 orang	57.627.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	1 Forum			Kota Semarang	Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	1 Forum		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	165 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	165 orang		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	42.618.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	42.618.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembeduan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembeduan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	1 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	1 dok			Kota Semarang	Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	1 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali			Kota Semarang	Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	1 Kali		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	64 angka indeks	44.708.012.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Semarang	Indeks Kebebasan Sipil	64 angka indeks	44.708.012.000	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6000 laporan dan usulan	44.708.012.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Semarang	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6000 laporan dan usulan	44.708.012.000	
		Kota Semarang	Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	0%			Kota Semarang	Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	0%		
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	16 Dokumen	288.310.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	16 Dokumen	288.310.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	3 Konten			Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	3 Konten		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 Konten			Kota Semarang	jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	10 Konten		
		Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	780 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	780 orang		
		Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	0 Paket			Kota Semarang	jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	0 Paket		
		Kota Semarang	jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	0 Kali			Kota Semarang	jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	0 Kali		
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	43.002.178.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	43.002.178.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	0 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	0 Orang		
		Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%			Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	100%		
		Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100%			Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	100%		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	32.330.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 orang	32.330.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelaksanaan Silaturahmi dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	50 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Pelaksanaan Silaturahmi Akbar Stakeholder Pemilu 2024	50 orang		
		Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	0			Kota Semarang	Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	0		
		Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	0			Kota Semarang	prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	0		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.450 orang	1.134.321.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.450 orang	1.134.321.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	10 event			Kota Semarang	Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	10 event		
		Kota Semarang	jumlah peserta bimtek pengeloan bantuan keuangan kepada partai politik	27 orang			Kota Semarang	jumlah peserta bimtek pengeloan bantuan keuangan kepada partai politik	27 orang		
		Kota Semarang	jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	27 orang			Kota Semarang	jumlah peseta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	27 orang		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 Laporan	250.873.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 Laporan	250.873.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/Pemilukada	60 dok			Kota Semarang	Jumlah Monitoring Failitasi Pemilu/Pemilukada	60 dok		
		Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12 dok			Kota Semarang	jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	12 dok		
		Kota Semarang	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali			Kota Semarang	jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1 kali		
		Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	0 dok			Kota Semarang	jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	0 dok		
		Kota Semarang	Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	27 dok			Kota Semarang	Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	27 dok		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	57 Indeks	1.717.684.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Semarang	indeks Kinerja Ormas	57 Indeks	1.717.684.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	34%	1.717.684.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Semarang	Persentase Ormas Aktif	34%	1.717.684.000	
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	19 dok	859.155.000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	19 dok	859.155.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	6 ormas			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi	6 ormas		
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	2 organ			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola	2 organ		
		Kota Semarang	jumlah peserta ormas award	0			Kota Semarang	jumlah peserta ormas award	0		
		Kota Semarang	Jumlah peserta ormas expo	0 organ			Kota Semarang	Jumlah peserta ormas expo	0 organ		
		Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	10 organ			Kota Semarang	jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah	10 organ		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dok	500.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 dok	500.000.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	40 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	40 Orang		
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90 orang	205.500.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90 orang	205.500.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	90 Orang			Kota Semarang	jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	90 Orang		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 dokumen	204.755.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 dokumen	204.755.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	120 Dok			Kota Semarang	jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	120 Dok		
		Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	30 ormas			Kota Semarang	jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	30 ormas		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	70,50 indeks	3.674.620.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Semarang	indeks kerukunan umat beragama	70,50 indeks	3.674.620.00	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	3.674.620.00	3.674.620.000	Kota Semarang	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	1 Kej	3.674.620.00	
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	261.227.000	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	11 Dokumen	261.227.000	Indikator Mutakhir SIPD
Kota Semarang		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	6 Konten	Kota Semarang			jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	6 Konten			
Kota Semarang		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	0 Konten	Kota Semarang			jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	0 Konten			
Kota Semarang		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	0 orang	Kota Semarang			jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	0 orang			
Kota Semarang		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	40 orang	Kota Semarang			jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	40 orang			
Kota Semarang		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	720 orang	Kota Semarang			jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	720 orang			
Kota Semarang		Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali	Kota Semarang			Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	1 Kali			

No	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	79.275.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 orang	79.275.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	5 Dok			Kota Semarang	jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	5 Dok		
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.000 orang	3.822.565.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.000 orang	3.822.565.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	0 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	0 orang		
		Kota Semarang	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	0 Kali			Kota Semarang	Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	0 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	6 organ			Kota Semarang	Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	6 organ		
		Kota Semarang	Jumlah peserta FGD peningkatan Indeks Kota Toleran	50 orang			Kota Semarang	Jumlah peserta FGD peningkatan Indeks Kota Toleran	50 orang		
		Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	80 orang			Kota Semarang	jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	80 orang		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan	0	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	0 Kali			Kota Semarang	Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	0 Kali		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	82 prosentase	3.663.383.000	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Semarang	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	82 prosentase	3.663.383.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	24 Kej	3.663.383.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Kota Semarang	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	24 Kej	3.663.383.000	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1800 orang	778.203.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1800 orang	778.203.000	Indikator Mutakhir SIPD
Kota Semarang		Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	0 Orang	Kota Semarang			Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik	0 Orang			
Kota Semarang		Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	0 orang	Kota Semarang			Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial	0 orang			
Kota Semarang		Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen	Kota Semarang			Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial	100 persen			
Kota Semarang		Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	18 Kali	Kota Semarang			Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara	18 Kali			

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.700 orang	996.205.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.700 orang	996.205.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	24 Kali			Kota Semarang	Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	24 Kali		
		Kota Semarang	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	0 Kelompok			Kota Semarang	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	0 Kelompok		
		Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	0 orang			Kota Semarang	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	0 orang		
		Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	0 Konten			Kota Semarang	Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	0 Konten		

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Kebutuhan Dana	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	365 laporan	171.727.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	365 laporan	171.727.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen			Kota Semarang	Jumlah Laporan Situasi Daerah	365 Dokumen		
		Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	12 Kali			Kota Semarang	Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	12 Kali		
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.717.428.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.717.428.000	Indikator Mutakhir SIPD
		Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	12 Kali			Kota Semarang	jumlah fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	12 Kali		

Pada Anggaran Perubahan tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang rencananya akan melaksanakan 6 program, 12 kegiatan, 49 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 62.255.402.920,- (enam puluh dua milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam renja dimaksud memiliki kesesuaian 100% (seratus persen) dengan rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat lima prinsip pendekatan, yaitu :

- 1) pendekatan perencanaan teknokratik
- 2) pendekatan perencanaan politik
- 3) pendekatan perencanaan partisipatif
- 4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*)
- 5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*)

Usulan dari masyarakat dijaring dari pelaksanaan musrenbang yang telah diselenggarakan mulai akhir tahun Desember lalu di tingkat RT/ RW. Adapun masukan dari masyarakat yang diajukan ke OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sbb :

Tabel.2. 1.
Review terhadap Perubahan Rancangan RKPD Tahun 2023
Kota Semarang.

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

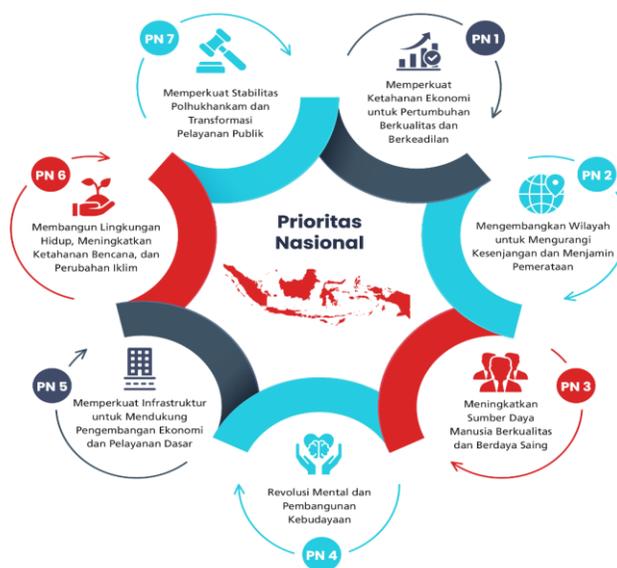
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

2.5. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 ada 7 (tujuh) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 yang terkandung dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Prioritas Nasional



3.1.1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Tema pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan *omnibus law*. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,90%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 – 6,00%
3. Rasio Gini nilai 0,375 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,29 – 73,35
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 103 – 105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 105 – 107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,50 – 8,50%

3.1.2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2023

Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah dalam rangka pencapaian Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “**Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**” sebagaimana RPJMD 2018-2023.

Tema Pembangunan Jawa Tengah tahun 2023 adalah “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”. Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju Sumber Daya Manusia berdaya saing.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 diarahkan pada :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 5,60%.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,75

3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 %
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80%.

3.1.3. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023

Prioritas Pembangunan pada RKPD kota Semarang Tahun 2023 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021, perkiraan capaian di tahun 2022 serta isu-isu strategis di tahun 2023.

Rumusan prioritas pembangunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--|
| Prioritas Daerah 1. | Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan |
| Prioritas Daerah 2. | Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran |
| Prioritas Daerah 3. | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif |
| Prioritas Daerah 4. | Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar |
| Prioritas Daerah 5. | Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif. |

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya, sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus:
 - a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro dan koperasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas produk, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran produk usaha mikro, terutama yang berbasis e-commerce.
 - 2) Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah
 - 3) Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - 4) Pengembangan kewirausahaan baru berbasis nilai tambah

- 5) Peningkatan nilai dan produk ekspor
 - 6) Peningkatan peran dan fungsi koperasi
 - b. Peningkatan nilai investasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan peran dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu
 - 2) Pelaksanaan promosi investasi
 - 3) Pemberian insentif dan kemudahan perijinan
 - c. Peningkatan sektor pariwisata unggulan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing
 - 2) Pengembangan wisata MICE
 - d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, melalui upaya-upaya:
 - 1) Revitalisasi sarpras perdagangan
 - 2) Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi
 - 3) Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan
 - e. Pengembangan ekonomi hijau (green economy), melalui upaya-upaya:
 - 1) Rintisan pengembangan transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular
 - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya Pertanian berbasis perkotaan
 - 3) Peningkatan kapasitas sumberdaya perikanan
 - 4) Pemenuhan cadangan pangan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
 - 2) Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin
 - 3) Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi warga miskin
 - 4) Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - 2) Upaya peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - c. Peningkatan upaya perlindungan sosial, melalui upaya-upaya:
 - 1) Sinergitas gerakan sosial kemasyarakatan
 - 2) Peningkatan bantuan untuk PPKS
 - d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan upaya keberlanjutan Kampung Tematik produktif
- 2) Peningkatan dukungan dan sinergitas OPD untuk pengembangan Kampung Tematik produktif
- e. Pengembangan kesatuan sistem demand and supply set tenaga kerja, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja
 - 2) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
 - 3) Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja
 - 4) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:
 - a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan
 - 2) Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 - 4) Penguatan pendidikan karakter berwawasan daerah dan kebangsaan
 - 5) Penguatan pendidikan non formal (PNF) dan vokasi
 - 6) Pengembangan sekolah inklusi, ramah anak, adiwiyata dan sehat
 - 7) Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan accessable, melalui upaya-upaya:
 - 1) Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi
 - 2) Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan
 - 3) Peningkatan layanan kesehatan rujukan
 - 4) Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama
 - 5) Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - 2) Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan

- 3) Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia
 - d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas layanan KB
 - 2) Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas
 - e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan
 - 2) Peningkatan prestasi olahraga
 - 3) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
 - 4) Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
 - 5) Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar, dengan fokus:
- a. Pemenuhan Infrastruktur Strategis Perkotaan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Percepatan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur (Land Banking)
 - 2) Peningkatan sarana prasarana olahraga sesuai standar dan representatif
 - 3) Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi
 - 4) Pengembangan pengelolaan infrastruktur berbasis teknologi informasi
 - 5) Pengembangan kawasan strategis heritage
 - 6) Pengembangan kawasan dan infrastruktur penunjang ekonomi
 - 7) Pengembangan kawasan dan infrastruktur penunjang pariwisata
 - 8) Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik
 - b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan jalan, pedestrian, jembatan dan dekorasi kota
 - 2) Peningkatan sarana prasarana dan layanan transportasi massal terintegrasi
 - 3) Rintisan Pembangunan moda transportasi massal berbasis rel
 - 4) Pengembangan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman, melalui upaya-upaya:

- 1) Peningkatan sarana prasarana lingkungan permukiman
 - 2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3) Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh
 - 4) Peningkatan akses air minum aman dan sanitasi layak
 - 5) Pemenuhan lahan permakaman umum
- d. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui upaya-upaya:
- 1) Pengembangan dan peningkatan fungsi ruang terbuka hijau
 - 2) Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu
 - 3) Pemanfaatan energi baru dan terbarukan pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur
 - 4) Upaya peningkatan konservasi lingkungan
- e. Peningkatan sarana dan prasarana Pengendalian banjir, melalui upaya-upaya:
- 1) Peningkatan pemeliharaan sistem drainase pengendalian banjir
 - 2) Peningkatan kapasitas dan fungsi sarana dan prasarana pengendali banjir
- f. Penguatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, melalui upaya peningkatan kapasitas mitigasi bencana.
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan fokus:
- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, melalui upaya-upaya:
 - 1) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah
 - 2) Optimalisasi aset-aset kota
 - b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, melalui upaya-upaya:
 - 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 - 2) Pengembangan alternatif pembiayaan di luar APBD
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, melalui upaya-upaya:
 - 1) Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik
 - 2) Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3) Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system
 - 4) Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, melalui upaya-upaya:

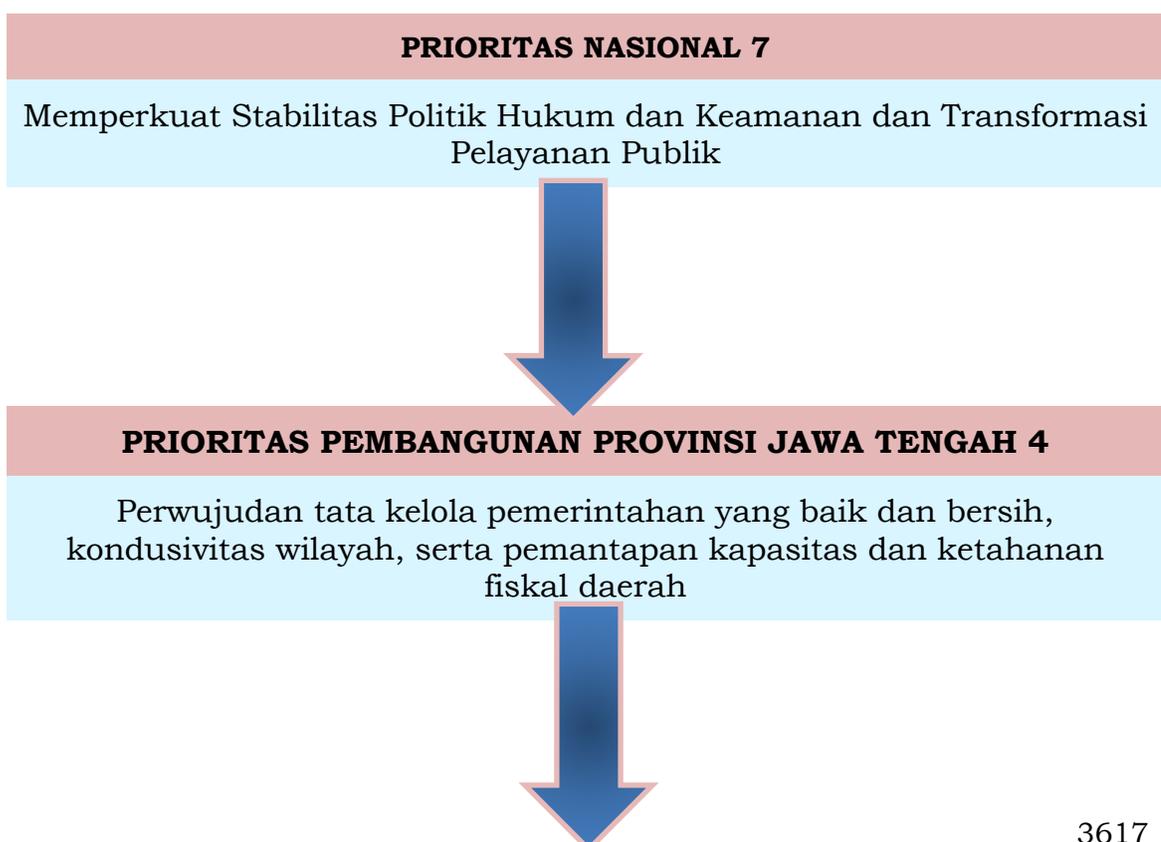
- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
 - 2) Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
 - 3) Penguatan Manajemen Risiko
 - 4) Dukungan fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui upaya pengembangan budaya inovasi di OPD

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2023, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,60 - 6,10%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,60 – 84,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,04 – 4,24%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 8,30 – 8,60%

Program dan kegiatan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan prioritas tersebut dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dilihat pada gambar sbb :

Gambar 3. 2
Keterkaitan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Maupun Daerah Tahun 2023



PRIORITAS DAERAH 3

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif

Fokus e

Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan

Upaya

1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat
2. Perwujudan kota ramah HAM dan peduli HAM
3. Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial

3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuandan sasaran pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023, yaitu **“meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila”** dengan indikator tujuan adalah **“Indeks Demokrasi”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yaitu :

- a. meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan indikator sasaran “Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” (selanjutnya disebut IP2WK);
- b. terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator sasaran “nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : meningkatkan kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Indeks Demokrasi	angka indeks	72.4
Sasaran : Meningkatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Indeks Pembumihian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	indeks	73.50

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tahun 2023 yaitu :

- ✓ Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
- ✓ Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2023 sebanyak **6 (Enam) program** dengan **12 (Dua Belas) kegiatan, 49 (Empat Puluh Sembilan) Sub Kegiatan** yang terdiri dari terdiri dari 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan rutin dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- 1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1. Pengadaan Mebel
 - 5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.3. Pemeliharaan Mebel
 - 7.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan aparatur
 - 1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- 1.2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 1.3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 1.4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 1.5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - 1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - 1.3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - 1.4. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

- 1.5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1.1. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 1.2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 1.3. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 1.4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 1.1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 1.2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 1.3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- 1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- 1.4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan tersebut di atas melibatkan segenap unsur masyarakat di Kota Semarang yang terdiri dari pemangku kebijakan di Kota Semarang yang tergabung dalam MUSPIDA Kota Semarang, jajaran instansi vertikal yang ada di Kota Semarang, fungsionaris partai politik, pengurus organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam arti luas (tokoh agama/ tokoh masyarakat/ tokoh pemuda/ tokoh perempuan) serta generasi muda (pelajar maupun mahasiswa), dan tidak lupa para aparatur di tingkat kecamatan maupun kelurahan se-Kota Semarang.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2023 serta Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bertugas melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun secara khusus, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan meningkatnya kualitas demokrasi substansial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila” dengan indikator tujuan adalah “Indeks Demokrasi”.
3. Keserasian dan keterpaduan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/ kegiatan.

Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebanyak 6 program, yang terdiri dari 1 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 5 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebesar Rp.62.255.402.920,- yang bersumber dari dana APBD Kota, dengan perincian:
 - a. Rp 5.880.814.920,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah/ eks rutin).
 - b. Rp.56.374.588.000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun Anggaran Perubahan 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kota Semarang

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Lembar : 1 dari 21 halaman

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				62.255.402.920				154.001.844.000
8 01 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				62.255.402.920				154.001.844.000
8 01 01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Kota Semarang	100%	5.880.814.920	APBD Kota Semarang		100%	6.773.508.000
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
		Persentase peningkatan kemampuan ASN	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	
02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kota Semarang	9 dok	7.635.000	APBD Kota Semarang		8 dok	8.652.000
2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	2 dok	180.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD	2 dok	800.000
		Jumlah Dokumen perencanaan	Kota Semarang	2 dok		APBD Kota Semarang		2 dok	
		Jumlah dokumen RTP	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok	2.713.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	1 dok	2.651.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok	603.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	1 dok	1.238.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	800.000
2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 dok	99.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	1.700.000
2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	1 dok	151.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja OPD	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	1.700.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	Kota Semarang	100%	4.879.762.333	APBD Kota Semarang		100%	5.604.334.000
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Semarang	4 dok		APBD Kota Semarang		4 dok	
2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	35 orang/bulan	4.609.694.333	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	5.055.882.000
2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	12.00	268.290.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang		100%	520.000.000
2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	1.00	494.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	10.000.000
2.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	12 dok	1.086.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Laporan keuangan semesteran	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	12.000.000
2.02 07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	1 dok	198.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		1 dok	6.452.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kota Semarang	100%	21.802.000	APBD Kota Semarang		100%	32.037.000
2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		55 orang	21.802.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah personil yang mendapatkan bimbingan teknis	Kota Semarang	55 orang		APBD Kota Semarang		55 orang	32.037.000
02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kota Semarang	100%	480.373.587	APBD Kota Semarang		100%	587.100.000
2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	6.120.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Semarang	1 Jenis		APBD Kota Semarang		10 Jenis	7.000.000
2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Semarang	2 Paket	14.984.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Semarang	10 Jenis		APBD Kota Semarang		10 Jenis	20.000.000
2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	4 Paket	43.558.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Semarang	20 Jenis		APBD Kota Semarang		20 Jenis	110.000.000
2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Semarang	1 Paket	10.553.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kota Semarang	1 Jenis		APBD Kota Semarang		5 jenis	30.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Semarang	0 Dok	0	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Kota Semarang	100 buku		APBD Kota Semarang		10 buku	1.200.000
2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	50 Laporan	85.040.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah tamu yang berkunjung	Kota Semarang	1000 orang		APBD Kota Semarang		1000 orang	50.000.000
2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	100 laporan	245.846.587	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kota Semarang	100 kegiatan		APBD Kota Semarang		100 kegiatan	168.900.000
2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	3 dok	74.272.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah barang yang mendukung Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	3 Jenis		APBD Kota Semarang		5 Jenis	200.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Semarang	100%	24.523.000	APBD Kota Semarang		100%	60.009.000
2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Semarang	1 Unit	19.523.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	Kota Semarang	1 Jenis		APBD Kota Semarang		2 Jenis	15.000.000
2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Semarang	1 Unit	5.000.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Semarang	1 jenis		APBD Kota Semarang		2 jenis	45.009.000
02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	Kota Semarang	100%	148.253.000	APBD Kota Semarang		100%	169.950.000
2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Semarang	12 Laporan	14.503.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	Kota Semarang	100 persen		APBD Kota Semarang		100%	49.950.000
2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Semarang	24 Laporan	133.750.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Persentase Penyediaan honorarium TPHL dan driver yang dibayarkan	Kota Semarang	100 persen		APBD Kota Semarang		100%	120.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Aset SKPD	Kota Semarang	100%	318.466.000	APBD Kota Semarang		100%	311.426.000
2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Semarang	1 Unit	36.319.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Semarang	1 Unit		APBD Kota Semarang		1 Unit	45.000.000
2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Semarang	22 Unit	251.300.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Kota Semarang	22 Unit		APBD Kota Semarang		22 Unit	218.000.000
2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Semarang	50 Unit	5.236.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Pemeliharaan Mebel	Kota Semarang	50 Unit		APBD Kota Semarang		10 unit	8.426.000
2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Semarang	100 Unit	25.611.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Kota Semarang	100 unit		APBD Kota Semarang		50 unit	40.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Pengamalan Pancasila	Kota Semarang	2.10 indeks	2.070.716.000	APBD Kota Semarang		2.20 Indeks	3.823.570.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun	Kota Semarang	2 Kejadian	2.070.716.000	APBD Kota Semarang		2 Kejadian	3.823.570.000
8.01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Semarang	18 Dok	860.032.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
Jumlah Peserta Event Pembinaan Kesadaran Bela Negara		Kota Semarang	900 orang	APBD Kota Semarang			100 Orang	190.000.000	
Jumlah Peserta Event Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan		Kota Semarang		APBD Kota Semarang			100 orang	100.000.000	
Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tentang Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan		Kota Semarang		APBD Kota Semarang			100 orang	250.000.000	
Jumlah Peserta Event Kesatuan Bangsa Award		Kota Semarang		APBD Kota Semarang			100 orang	300.000.000	
Jumlah Peserta Event Penguatan Karakteristik Dan Jiwa Patriotik Generasi Muda		Kota Semarang	70 orang	APBD Kota Semarang			100 orang	300.000.000	
Jumlah peserta event pembauran kebangsaan		Kota Semarang		APBD Kota Semarang			100 orang	200.000.000	
Jumlah Peserta Orientasi Pemantapan Nilai - Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan		Kota Semarang	150 orang	APBD Kota Semarang			40 orang	108.000.000	
Jumlah Hibah yang disalurkan		Kota Semarang	1 organ	APBD Kota Semarang					

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Kota Semarang	28 Dok	59.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Sosial	Kota Semarang	30 Kali		APBD Kota Semarang		70 kali	140.000.000
		Jumlah Konten Pendidikan Wawasan Kebangsaan Melalui Media Mainstream	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		24 Kali	600.000.000
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	900 orang	1.110.380.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah Kampung Tematik Pancasila	Kota Semarang	3 Lokasi		APBD Kota Semarang		9 Lokasi	685.570.000
		Jumlah Peserta Event Upacara Bela Negara	Kota Semarang	500 orang		APBD Kota Semarang		500 orang	190.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	165 orang	57.627.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Event Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan	Kota Semarang	1 Forum		APBD Kota Semarang		10 Forum	300.000.000
		Jumlah Peserta Kegiatan TMMD Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	165 orang		APBD Kota Semarang		210 Orang	250.000.000
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Semarang	3 Laporan	42.618.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pembedaan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang		1 Kali	70.000.000
		Jumlah Laporan Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental	Kota Semarang	1 dok		APBD Kota Semarang		12 Dokumen	70.000.000
		Jumlah Event Pengukuran Indeks Pengamalan Pancasila	Kota Semarang	1 Kali		APBD Kota Semarang		1 Kali	70.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Indeks Kebebasan Sipil	Kota Semarang	64 angka indeks	44.708.012.000	APBD Kota Semarang		62 angka indeks	132.584.460.000	
		Prosentase Partisipasi pemilih pada pemilu/pemilukada	Kota Semarang	0%				APBD Kota Semarang		6000 laporan dan usulan
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Semarang	6000 laporan dan usulan	44.708.012.000	APBD Kota Semarang		-	132.584.460.000	
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	16 Dokumen	288.310.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD			
		jumlah konten pendidikan politik melalui media mainstream	Kota Semarang	3 Konten				APBD Kota Semarang	4 Kali	90.000.000
		jumlah konten pendidikan politik melalui media sosial	Kota Semarang	10 Konten				APBD Kota Semarang	10 Konten	50.000.000
		jumlah peserta event pendidikan politik dan kewarganegaraan	Kota Semarang	780 orang				APBD Kota Semarang	800 Orang	200.000.000
		jumlah paket pelatihan dan lomba penyelenggaraan pemilihan umum	Kota Semarang	0 PAKET					20 paket	90.000.000
		jumlah event fasilitasi koordinasi kelembagaan pemerintahan	Kota Semarang	0 Kali				APBD Kota Semarang	3 Paket	80.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	11 Dokumen	43.002.178.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah peserta pengembangan demokrasi bagi partai politik	Kota Semarang	70 Orang		APBD Kota Semarang		70 Orang	120.000.000
		Prosentase penerima dana hibah penyelenggaraan pilkada	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
		prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang	Kota Semarang	100%		APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	50 orang	32.330.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10
		Jumlah Peserta Pelaksanaan Silaturahmi Akbar Stakeholder Pemilu 2024	Kota Semarang	50 orang		APBD Kota Semarang		100%	129.300.000.000
		Jumlah Peserta Asistensi Penyusunan LPJ Bankeu Partai Politik	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		35%	2.019.460.000
		Jumlah Peserta Bimtek Bankeu Partai Politik	Kota Semarang			APBD Kota Semarang			
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	1.410 orang	1.134.321.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Event Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	Kota Semarang	10 event		APBD Kota Semarang		40 Orang	70.000.000
		jumlah peserta bimtek pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik	Kota Semarang	27 orang		APBD Kota Semarang		20 event	200.000.000
		jumlah peserta asistensi penyusunan LPJ bantuan keuangan kepada partai politik	Kota Semarang	27 orang		APBD Kota Semarang		30 orang	30.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Semarang	120 Laporan	250.873.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Monitoring Fasilitasi Pemilu/Pemilukada	Kota Semarang	60 dok		APBD Kota Semarang		180 dokumen	100.000.000
		jumlah hasil analisa perkembangan politik di Kota Semarang	Kota Semarang	12 dok		APBD Kota Semarang		8 Dok	75.000.000
		jumlah event pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Kota Semarang	1 kali		APBD Kota Semarang		1 Kall	60.000.000
		jumlah laporan pemantauan perkembangan politik	Kota Semarang			APBD Kota Semarang		120 dokumen	100.000.000
		Jumlah Monitoring Bantuan Keuangan Partai Politik	Kota Semarang	27 dok		APBD Kota Semarang			

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks Kinerja Ormas	Kota Semarang	57 Indeks	1.769.410.000	APBD Kota Semarang		58 Indeks	3.192.199.000
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas Aktif	Kota Semarang	34%	1.769.410.000	APBD Kota Semarang		35%	3.192.199.000
8.01.04.2.01.01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	19 dok	859.155.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
jumlah ormas yang diberdayakan melalui fasilitasi		Kota Semarang	6 ormas	APBD Kota Semarang			4 Organs	100.000.000	
jumlah ormas yang diberdayakan melalui swakelola		Kota Semarang	2 organ	APBD Kota Semarang			3 organs	15.000.000	
jumlah peserta ormas award		Kota Semarang		APBD Kota Semarang			15 organs	150.000.000	
Jumlah peserta ormas expo		Kota Semarang		APBD Kota Semarang					
jumlah ormas yang diberdayakan melalui hibah		Kota Semarang	10 organ	APBD Kota Semarang			23 Organisasi	2.343.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	1 dok	500.000.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah peserta fasilitasi forum komunikasi ormas	Kota Semarang	40 Orang		APBD Kota Semarang		20 Orang	20.000.000
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	90 orang	205.500.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah peserta pengembangan kapasitas ormas	Kota Semarang	90 Orang		APBD Kota Semarang		100 Orang	100.000.000
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Semarang	120 dokumen	204.755.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitasnya ormas	Kota Semarang	120 Dok		APBD Kota Semarang		130 Dok	394.199.000
		jumlah pengukuran indeks kinerja ormas dan jumlah peserta seminar indeks kinerja ormas	Kota Semarang	30 ormas		APBD Kota Semarang		30 organs	70.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kerukunan umat beragama	Kota Semarang	70,50 indeks	4.136.067.000	APBD Kota Semarang		71 indeks	2.374.009.000
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan	Kota Semarang	1 Kej	4.136.067.000	APBD Kota Semarang		1 Kej	2.374.009.000
8.01.05.2.01.01	Penyusunan program kerja dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Kota Semarang	11 Dokumen	261.227.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media sosial	Kota Semarang	6 Konten		APBD Kota Semarang		5 konten	10.000.000
		jumlah konten kampanye cinta produk Indonesia dan edukasi moderasi beragama melalui media mainstream	Kota Semarang	0 Konten		APBD Kota Semarang		3 konten	30.000.000
		jumlah peserta event fasilitasi acara P4GN	Kota Semarang	0 orang		APBD Kota Semarang		150 orang	158.000.000
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	Kota Semarang	40 orang		APBD Kota Semarang		150 orang	120.000.000
		jumlah peserta event edukasi moderasi beragama	Kota Semarang	720 orang		APBD Kota Semarang		250 orang	250.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	100 orang	79.275.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah penerbitan dokumen perijinan rumah ibadat	Kota Semarang	5 Dok		APBD Kota Semarang		11 Dok	216.009.000
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	860 orang	3.822.565.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah peserta event Fasilitasi Paguyuban Petamas	Kota Semarang	0 orang		APBD Kota Semarang		150 orang	150.000.000
		Jumlah event fasilitasi organisasi keagamaan	Kota Semarang	0 Kali		APBD Kota Semarang		2 kali	60.000.000
		Jumlah forum agama dan ormas keagamaan penerima hibah	Kota Semarang	6 organ		APBD Kota Semarang		3 organisasi	1.350.000.000
		Jumlah peserta FGD peningkatan Indeks Kota Toleran	Kota Semarang	50 orang		APBD Kota Semarang			
		jumlah peserta event edukasi cinta produk Indonesia	Kota Semarang	80 orang		APBD Kota Semarang			
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Semarang	0 Laporan	0	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Penelitian Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama	Kota Semarang	0 Kali		APBD Kota Semarang		1 Kali	30.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase kemampuan Analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam	Kota Semarang	82 prosentase	3.663.383.000	APBD Kota Semarang		83%	5.254.098.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Konflik Sosial	Jumlah demonstrasi / unjuk rasa bersifat kekerasan	Kota Semarang	24 Kej	3.663.383.000	APBD Kota Semarang		23 kejadian	5.254.098.000
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	1800 orang	778.203.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
Jumlah Peserta Pelatihan Mediator Konflik		Kota Semarang	0 Orang	APBD Kota Semarang			100 orang	300.000.000	
Jumlah peserta pelatihan koordinasi penanganan konflik sosial		Kota Semarang	0 orang	APBD Kota Semarang			200 orang	500.000.000	
Prosentase Layanan Mediasi Konflik Sosial		Kota Semarang	100 persen	APBD Kota Semarang			100%	250.000.000	
Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Intelijen Negara		Kota Semarang	18 Kali	APBD Kota Semarang			48 kali	850.000.000	

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	400 orang	996.025.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial	Kota Semarang	24 Kali		APBD Kota Semarang		48 Kali	904.098.000
		Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Memelihara Kerukunan, Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Umum	Kota Semarang	0 Kelompok		APBD Kota Semarang		2 Kelompok	500.000.000
		Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pembekalan Mengenai Bahan Pengumpulan Dan Bahan Keterangan Potensi ATHG	Kota Semarang	0 orang		APBD Kota Semarang		120 orang	350.000.000
		Jumlah Konten Edukasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan ATHG	Kota Semarang	0 Konten		APBD Kota Semarang		3 Konten	150.000.000

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun Anggaran 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	10	7	8	9	10
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Semarang	377 laporan	171.727.000	APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		Jumlah Laporan Situasi Daerah	Kota Semarang	365 Dokumen		APBD Kota Semarang		365 Dokumen	300.000.000
		Jumlah Pantauan Terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Dan Lembaga Asing Di Kota Semarang	Kota Semarang	12 Kali		APBD Kota Semarang		24 Kali	250.000.000
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	12 Dokumen		APBD Kota Semarang	Indikator Mutakhir SIPD		
		jumlah fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang	Kota Semarang	12 Kali	1.717.428.000	APBD Kota Semarang		24 Kali	900.000.000

Pada anggaran perubahan tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang rencananya akan melaksanakan 6 program, 12 kegiatan, 49 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 62.255.402.920,- (enam puluh dua milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Demikian pula pada tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang rencananya akan tetap menyelenggarakan hal yang sama dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang pada gilirannya akan menunjang pencapaian visi dan misi Walikota Semarang – namun tentu saja dengan besaran kebutuhan anggaran yang berbeda menyesuaikan dengan fluktuasi harga barang dan penetapan SHS (Standar Harga Satuan) Kota Semarang.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2023 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan *output/* keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2023, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

Adapun point-point yang perlu ditekankan dalam perencanaan program dan kegiatan mendatang, antara lain :

1. Perlunya upaya-upaya yang lebih intensif untuk mendorong partisipasi pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 di tengah-tengah kondisi pemulihan ekonomi paska melandanya pandemi Covid-19;

2. Demikian pula dibutuhkan upaya menjaga kondusivitas Kota Semarang menjelang, selama, dan sesudah penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 agar suksesi kepemimpinan berjalan dengan aman dan kondusif;
3. Perlunya upaya peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
4. Dalam rangka mengantisipasi berkembang luasnya aliran radikalisme yang mengancam integrasi bangsa maka kegiatan – kegiatan yang sifatnya deradikalisasi perlu lebih ditingkatkan, terutama bagi generasi muda. Selain itu, perlu juga diformulasikan suatu aksi yang sifatnya pembinaan dan pendampingan kepada para napi eks-terorisme agar tidak kembali terjebak dalam paham-paham radikal.
5. Menghadapi fenomena meluasnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika maka perlu disusun rencana aksi pencegahan peredaran dan pengayalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
6. Peningkatan kemampuan analisa intelijen strategis untuk mengantisipasi potensi kerawanan sosial di masyarakat perlu terus dikembangkan;
7. Perlunya diambil tindakan untuk mengantisipasi tindak penolakan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu;
8. Perlunya pengambilan kebijakan strategis untuk mengantisipasi kemunculan aksi-aksi yang dilatarbelakangi oleh ideologi non-ancasila;
9. Kenakalan remaja yang makin mengarah pada aksi kriminalitas membutuhkan intervensi yang lebih inovatif;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan memperhatikan peran maupun tugas pokok dan fungsi;
3. Keterpaduan dan sinkronisasi program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang;
4. Peranan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan

kegiatan;

5. Penegasan Perubahan RKPD sebagai acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD;
6. PerubahanRenja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023;
7. Dalam penyusunan RKA-P nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun2023 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2023 untuk setiap triwulannya.

Program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang akan dilaksanakan secara bersinergi dan berkesinambungan dalam mendukung program-program pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat Kota Semarang.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001